

2018

Laporan Tahunan
Annual Report



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Establishment of Excellence Digital Port

Membangun Pelabuhan
Digital yang Unggul





Establishment of Excellence Digital Port

Membangun Pelabuhan Digital yang Unggul

Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan *roadmap* yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan enam fitur *digital* pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Customer Relationship Management (CRM)* di seluruh Kantor Cabang dan dua Entitas Anak IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.

The direction towards *World Class Performance* in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of *Establishment of Performance*. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (*Digital Port*). In fact, the Company is the first *Digital Port* in Indonesia. The Company has implemented the six digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, and *Sales* are contained in the *Digital Customer Relationship Management (CRM)* application feature in all Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Peti Kemas.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity



2015

Advancing Excellence Through Performance

Melewati tahun 2015 yang penuh tantangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tetap mampu mempertahankan kinerja keuangan yang baik dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan mencatat sejarah penerbitan global *bond* yang memberikan dukungan penuh untuk sektor-sektor prioritas negara, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang dinilai strategis. Selain itu, Perseroan juga telah memulai proses uji coba operasional mega proyek terminal *New Priok* secara bertahap.

Through the challenging year of 2015, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) still managed to maintain good financial performance and provide added value for all stakeholders. The Company recorded a history in global bond issuance, which provided full support for the country's priority sectors, especially for strategic infrastructure development and long-term investments. In addition, the Company has also begun the operational trial process of *New Priok* terminal mega project gradually.



2016

Menciptakan nilai tambah dengan tata kelola perusahaan

Melalui fase *Fit in infrastructure*, Perseroan menyusun *Corporate GCG Roadmap* untuk lima tahun ke depan dan mengimplementasikannya secara menyeluruh, demi terciptanya *Good Corporate Citizenship* yang komprehensif. Suksesnya implementasi fase ini terbukti berhasil mendorong keberhasilan Perseroan untuk melalui masa-masa sulit. Ke depannya, Perseroan terus memperkuat komitmen terhadap implementasi kepatuhan yang optimal, demi memberikan nilai-nilai terbaik bagi Bangsa Indonesia dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Through the *Fit in Infrastructure* phase, the Company prepared its roadmap for the next five years and is implementing it comprehensively for the creation of a comprehensive *Corporate Citizenship*. The successful implementation of this phase is proven to drive the Company's success to go through difficult times. Moving forward, the Company will continue to strengthen its commitment in implementing optimal compliance, in order to provide the best values for Indonesia and all Stakeholders.



2017

Strengthening Capabilities Towards Digital Port

Tahun 2017 dalam *Corporate Roadmap* IPC merupakan tahun “*Enhancement*” dimana Perseroan memperkuat kapabilitas menuju *digital port* guna mewujudkan kinerja unggul yang berkesinambungan.

Enhancement mencakup peningkatan aspek operasional dan pelayanan, modernisasi alat terbaru, pengembangan anak perusahaan dan program pemasaran, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan-pelabuhan baru. Dengan mewujudkan *digital port*, IPC mampu terus melaju menjadi penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia dan mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.

2017 in the IPC Corporate Roadmap is a year of “*Enhancement*”, in which the Company strengthens its capabilities towards digital port in order to realize sustainable superior performance.

Enhancement includes improvement of operational and service aspect, modernization of latest equipment, development of subsidiaries and marketing programs, and development of infrastructure and superstructure of new ports. By realizing digital port, IPC will be able to move forward and become the leading port service provider in Indonesia and achieve its goal of becoming a world-class port operator.

2018

Establishment Of Excellence Digital Port

Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan *roadmap* yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan enam fitur *digital* pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Customer Relationship Management* (CRM) di seluruh Kantor Cabang dan dua Entitas Anak IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.



The direction towards *World Class Performance* in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of *Establishment of Performance*. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (*Digital Port*). In fact, the Company is the first *Digital Port* in Indonesia. The Company has implemented the six digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, and *Sales* are contained in the *Digital Customer Relationship Management* (CRM) application feature in all Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Peti Kemas.

DAFTAR ISI

Table of Contents

4	Kesinambungan Tema Theme Continuity	128	Profil Direksi Board of Directors' Profiles	266	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis
6	Daftar Isi Table of Contents	144	Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Profile and Competency Development		
8	Sekilas Tentang Perseroan The Company At A Glance	158	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition		
10	Jejak Langkah Milestones	159	Daftar Entitas Anak dan/ atau Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and/or Associated Entities		
12	Kontribusi Terbaik Kami Our Best Contribution	194	Struktur Grup Perusahaan Organization Group Structure		
20	Inisiatif 2018 2018 Initiatives	195	Kronologi Penerbitan Saham Chronology of Issuing Stock		
21	Corporate Roadmap Corporate Roadmap	197	Kronologi Penerbitan dan/ atau Pencatatan Obligasi Chronology of Bond Issuance and/ or Listing		
22	Kilas Kinerja Performance Highlights	199	Kronologi Penerbitan dan/ atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance and/ Listing		
24	Performa 2018 2018 Performance	200	Nama dan Alamat Lembaga dan/ atau Profesi Penunjang Name and Addresses of Institutions and/or Supporting Professionals		
26	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	206	Penghargaan dan Sertifikasi Award and Certification		
40	Peristiwa Penting Di Tahun 2018 2018 Event Highlights	220	Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Kantor Cabang dan/ atau Kantor Wilayah Name and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, Branches and/or Subsidiaries Regional Offices	268	Tinjauan Perekonomian Economy Review
46	Laporan Manajemen Management Report	224	Informasi Pada Website Perseroan Information On The Company Website	274	Tinjauan Operasional Operational Review
48	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	225	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Supervisory Unit Education and/or Training	278	Kinerja Segmen Usaha Business Segment Performance
60	Laporan Direksi Board of Directors' Report	232	Tinjauan Pendukung Bisnis Business Supporting Review	367	Kinerja Entitas Anak Subsidiary Performance
76	Profil Perusahaan Company Profile	234	Kerangka Strategi Manajemen <i>Human Capital</i> Human Capital Management Strategy Framework	383	Proyek Strategis 2018 2018 Strategic Projects
78	Identitas Perusahaan Company Identity	236	Pengembangan Organisasi Organizational Development	388	Prospek Usaha Business Outlook
80	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company	237	Profil Divisi <i>Human Capital</i> Profile of Human Capital Division	399	Strategi Ke Depan Future Strategies
81	Brand Perusahaan Company Brand	240	Manajemen <i>Human Capital</i> Human Capital Management	404	Tinjauan Keuangan Financial Review
82	Bidang Usaha Business Fields	249	Teknologi Informasi Information Technology	405	Kinerja Keuangan Financial Performance
88	Peta Wilayah Usaha Business Area Map			426	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
90	Struktur Organisasi Organizational Structure			439	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Ability To Pay Debt and Receivables Collectibility
93	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers' Profiles			442	Struktur Modal Capital Structure
106	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Company Vision, Mission and Culture			443	Ikatan Material Investasi Barang Modal Material Commitments For Capital Goods Investment
108	Review Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Vision and Mission Review By The Board of Commissioners and Board of Directors			446	Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
112	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profiles			449	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring
				451	Pencapaian Target dan Target Ke Depan Achievement and Future Target
				459	Informasi Dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Audit Report Date
				461	Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan Yang Mengandung Kejadian Yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

461	Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perseroan Impact of Price Changes On Sales or Net Income of The Company	483	Roadmap <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Roadmap	840	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
461	Komponen-Komponen Subs Tansidari Pendapatan Dan Beban Lainnya Substantial Components of Other Income And Expenses	485	Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Principles	842	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility Governance
461	Peningkatan/Penurunan Material Dari Penjualan/Pendapatan Bersih Material Increases / Decreases In Sales / Net Income	486	Pencapaian <i>Roadmap 2018</i> 2018 Roadmap Achievement	850	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility Related To Human Rights
462	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen Dividend Policy, Announcement and Payment	489	Struktur dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> GCG Structure and Mechanism	853	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Adil Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations
464	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)	515	Dewan Komisaris Board of Commissioners	857	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Related To The Environment
465	Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Realization of The Use of Public Offering Proceeds	609	Direksi Board of Directors	873	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility Related To Employment, Occupational Health and Safety
466	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Information On Material Transactions Containing Conflict of Interest And/or Transactions With Affiliated Parties	686	Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris Organs and Committee Under The Board of Commissioners	887	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Related To Community Social Development
471	Aspek Perpajakan Taxation Aspect	726	Organ dan Komite Di Bawah Direksi Organs and Committees Under The Board of Directors	905	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen Corporate Social Responsibility Related To Consumers
472	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Dan Dampaknya Regulatory changes and the impact	744	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information On Majority and Controlling Shareholders	912	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Pemasok Corporate Social Responsibility Related To Responsibilities To Suppliers
473	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	745	Akuntan Publik Public Accountant	916	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Kreditor Corporate Social Responsibility Related To Responsibilities To Creditors
475	Tingkat Kesehatan Perseroan Soundness Level of the Company	748	Manajemen Risiko Risk Management	918	Laporan Keuangan Financial Report
477	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	773	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	1115	Referensi Silang Kriteria ARA 2018 Cross Reference of ARA's Criteria 2018
478	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	785	Perkara Penting Legal Issues		
480	Kerangka Penerapan <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Application Framework	794	Pemberian dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik Social and/or Political Funding		
481	Dasar Penerapan <i>Corporate Governance</i> Basis For Corporate Governance Application	795	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access To Information and Company Data		
482	Tujuan Penerapan <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Objectives	802	Program Anti Korupsi Anti Corruption Program		
		802	Kode Etik Code of Conduct		
		810	Kebijakan Gratifikasi Gratify Policy		
		815	<i>Whistleblowing System</i> Whistleblowing System		
		823	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Assets Reports (LHKPN)		
		826	Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> GCG Implementation Assessment		
		836	Asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Superior Performance Assessment Criteria		

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

The Company at a Glance



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia.

PEMEGANG SAHAM:

SHAREHOLDER:

Menteri Badan Usaha Milik
Negara RI

Indonesian Ministry of
State-Owned Enterprise

PRODUK DAN JASA UTAMA:

MAIN PRODUCTS AND SERVICES:

Pelayanan Kapal, Pelayanan
Barang dan Pelayanan Rupa-rupa
Ship Service, Goods Service,
Other Services

SEGMENT USAHA:

BUSINESS SEGMENT:

Jasa Kepelabuhan dan Logistik
Port and Logistic Services

DATA JARINGAN KANTOR :

1 Kantor Pusat
10 Wilayah Kerja
12 Kantor Cabang Pelabuhan
17 Group Anak Perusahaan, terdiri
dari :
14 Entitas Anak Perusahaan
2 Entitas Asosiasi
1 Joint Venture

OFFICE NETWORK DATA:

1 Head Office
10 Work Areas
12 Branch Offices
17 Subsidiaries
17 Company Group consisting of:
14 Subsidiaries
2 Associated Entities
1 Joint Venture

SEKILAS TENTANG PERSEROAN
The Company At A Glance



JEJAK LANGKAH

Milestones

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

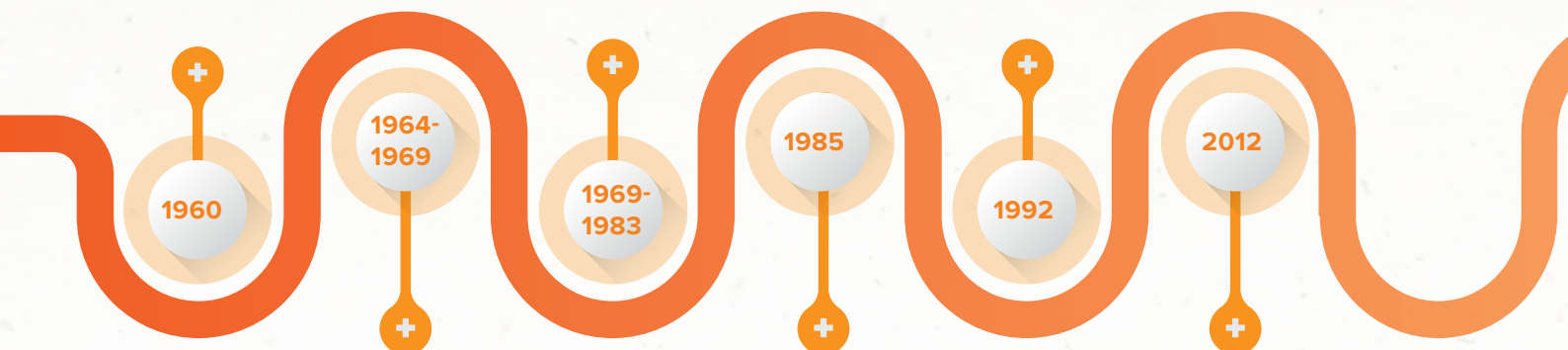
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of State Enterprise (PN) in accordance to the Government Regulation Number 19 year 1960 regarding the management of ports by the Port Management Agency (BPP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

According to the Government Regulation Number 18/1969, the BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57/1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II, under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial deed No. 3 dated December 1, 1992.



Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial.

The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu, merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Based on the Government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became State-Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan *branding* identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new branding identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world-class port operator.

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Groundbreaking Terminal New Priok* oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world.

Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhanan eksisting seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC Corporate University oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC Corporate University merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC Corporate University, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

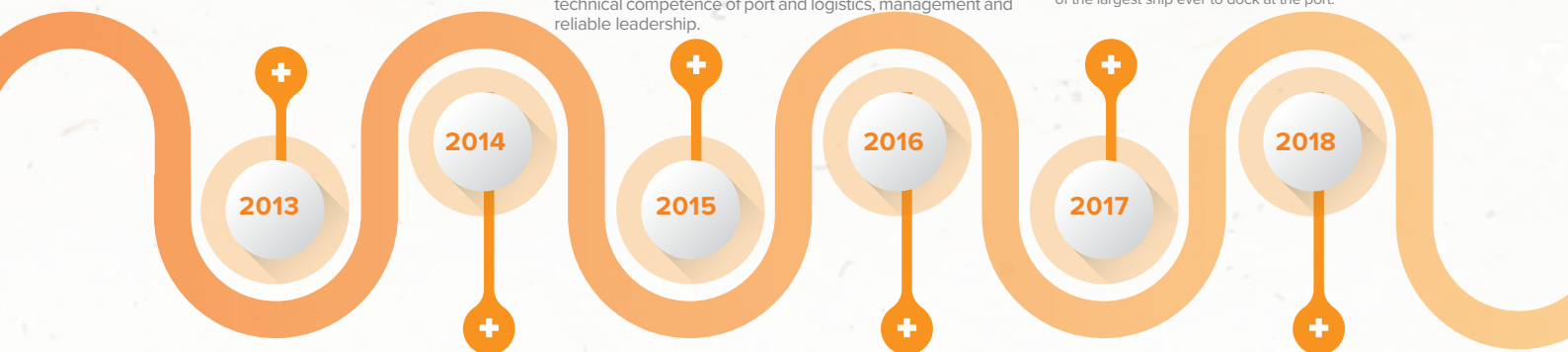
In this year, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

Pada fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan untuk yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun, EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencahainya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang.

IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services" atau disingkat "JAX Services", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15%. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people.

IPC provides services under the JavaSouth East Asia Express Services/Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMA/CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement/Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.



Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama *World Bank* tentang "Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy". Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *pilot project*, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in subsidiaries, increased 33.64% compared to 2013 which amounted to Rp1.07 trillion. In addition, the Company also invested in human resources development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish onestop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyesuaian (*fine-tuning*) dalam semua aspek.

Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/ New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects.

One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

Tahun 2018 merupakan tahun "Establishment" dengan fokus tahun ini adalah "volume growth", "profitability growth" dan "holding establishment".

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

Our Best Contribution

Sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, IPC memiliki visi untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Dalam mewujudkan visi tersebut, IPC telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis mulai dari penguatan posisi dan arah IPC, termasuk penajaman visi, nilai dan karakter Perseroan. Manajemen juga telah menyusun *corporate roadmap 2016-2020*, yang secara berturut-turut ditetapkan sebagai tahapan *fit in infrastructure, enhancement, establishment, sustainable dan world class port*. Tahun 2018 yang merupakan fase *establishment* merupakan tahapan penting dalam pematapan fondasi untuk mewujudkan cita-cita IPC sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia di tahun 2020, sebagai wujud kontribusi IPC sebagai BUMN kepada Indonesia.

World class port yang didefinisikan sebagai pelabuhan dengan standar operasional dan layanan kelas dunia diwujudkan IPC dengan berbagai langkah penting, meliputi:

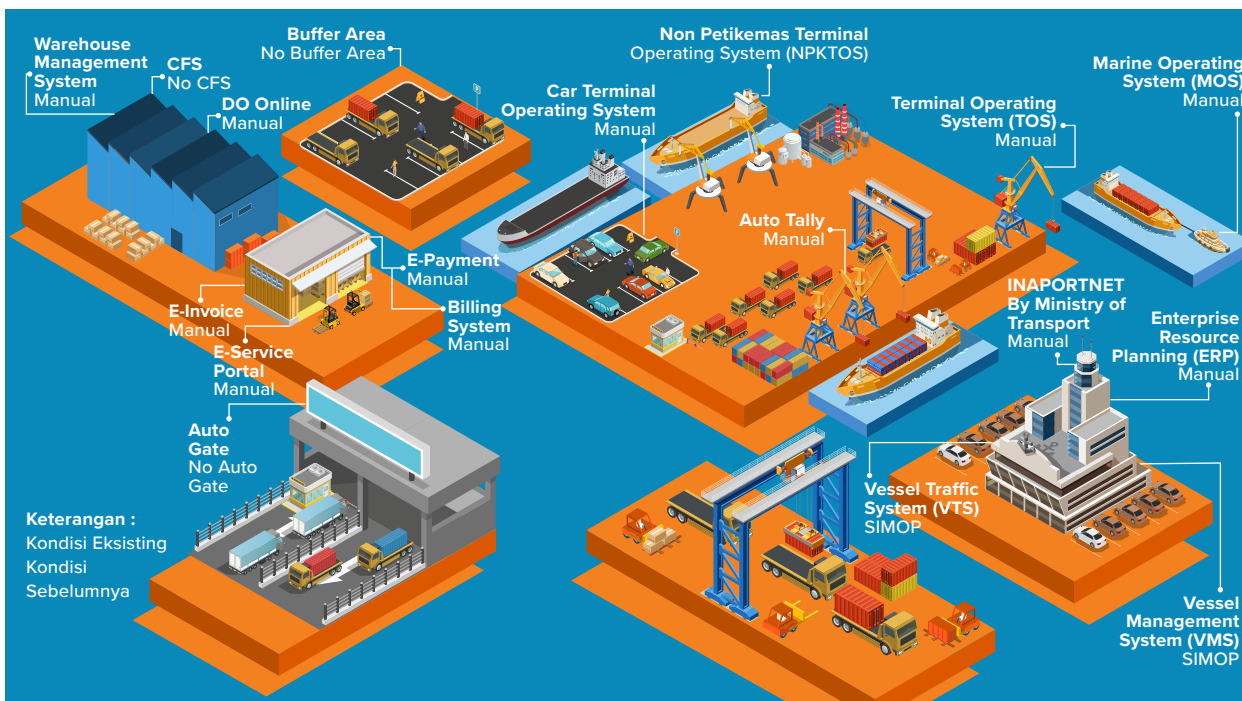
As the largest port operator in Indonesia, IPC has a vision to become a world-class port manager that excels in operations and services. To realize this vision, IPC has implemented various strategic steps ranging from strengthening IPC's position and direction, to sharpening the Company's vision, values and character. Management has also prepared a 2016-2020 corporate roadmap, broken down into the stages of infrastructure, enhancement, establishment, sustainable and world-class port.

The establishment phase in 2018 was an important stage for strengthening the foundation to realize IPC's goal to become a world-class port manager by 2020, as a sign of IPC's contribution as a SOE to Indonesia.

A World class port is a port with world-class operational standards and services, and IPC has translated that into various important steps, including:

DIGITALISASI PELABUHAN

DIGITIZING PORTS



KONTRIBUSI TERBAIK KAMI
Our Best Contribution

IPC mentransformasi pelabuhan menjadi *smart port* atau *digital port* dengan menggunakan basis IT, termasuk dalam sistem operasionalnya. Transformasi ini menjadi prioritas Perseroan seiring dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan. Program *digital port* dan pemangkasan waktu bongkar muat peti kemas akan menjadi modal utama dalam mendukung program tol laut dan sekaligus menjadi langkah penting menuju *World Class Port*.

Dalam mewujudkan *digital port*, IPC menggunakan basis IT dalam melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk perbaikan pelayanan dan operasional. Transformasi ini menjadi prioritas Perseroan yang dilakukan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Pada tahun 2018, Perseroan telah membuat terobosan dengan implementasi *digital port* pada lini darat dan laut, diantaranya yaitu implementasi *autogate*, *Integrated Container Freight Station (CFS Center)*, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online, *Terminal Operating System (TOS)* dan *Auto Tally* di terminal peti kemas, penerapan *Marine Operating System (MOS)*, *VTS (Vessel Traffic System)*, *Vessel Management System (VMS)*, serta *E-Service* pada sejumlah Cabang Pelabuhan.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan jasa kepelabuhanan ini selain bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa dalam bertransaksi, juga untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap transparansi biaya pelayanan jasa. Sebagai salah satu contohnya yaitu *CFS Center*, yang merupakan opsi yang dapat dipilih pengguna jasa untuk memudahkan transaksi. Keunggulannya adalah proses pelayanan menjadi ringkas/ sederhana dan transparan sehingga menjadi efisien bagi pengguna jasa. Integrasi CFS mencakup manajemen data pelanggan, *CFS booking service*, layanan nota, pembayaran elektronik, *tracking* kargo, dan *customer care*. Selain sistem CFS yang sudah berjalan online dan beroperasi 24/7, ke depannya, sistem layanan CFS akan terus disempurnakan dan ditambah fitur baru, seperti *multichannel payment* serta *invoice* langsung ke pemilik barang/*consignee*.

Selain pada sisi operasional, IPC juga mengembangkan sistem pada sisi pengelolaan interaksi pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa. IPC mengaktifkan enam fitur aplikasi digital *Customer Relationship Management (CRM)* di seluruh Kantor Cabang dan dua Entitas Anak IPC (PT Pelabuhan Tanjung Priok dan

IPC is transforming its ports into smart ports or digital ports using IT in its operational systems. This transformation is a Company priority together with improving port infrastructure. The digital port program, and the reduction of container loading and unloading time, will be the mainstay for supporting the sea toll program, and at the same time will be an important step towards becoming a World Class Port.

In realizing digital ports, IPC uses IT in its innovations aimed at service and operational improvements. This transformation is a Company priority and is being carried out in parallel with the port infrastructure construction. In 2018, the Company made a breakthrough with the implementation of digital ports for its land and sea lines, including the implementation of *autogate*, *Integrated Container Freight Station (CFS Center)*, *Online Temporary Storage (TPS)*, *Terminal Operating System (TOS)* and *Auto Tally* in container terminals, and the implementation of the *Marine Operating System (MOS)*, *VTS (Vessel Traffic System)*, *Vessel Management System (VMS)*, and *E-Service* in a number of Port Branches.

Optimizing information technology in port services is not only aimed at facilitating service users in transactions, but also to support *Good Corporate Governance (GCG)* related to the transparency of service costs. One example being the *CFS Center*, which is an option that can be chosen by service users to facilitate transactions. The advantage being that the service process becomes concise / simple and transparent so that it becomes efficient for service users. *CFS* integration includes customer data management, *CFS* booking services, receipt services, electronic payments, cargo tracking, and customer care. As well as the *CFS* system that runs online and operates 24/7, the *CFS* service system will continue to be refined and new features will be added, such as *multichannel payments* and *direct invoices* to goods owners / *consignees*.

In addition to the operational side, IPC has also developed a customer interaction management system that aims to increase service user satisfaction. IPC runs six digital *Customer Relationship Management (CRM)* application features in all Branch Offices and its two IPC Subsidiaries (PT Tanjung Priok Port and PT IPC Container Terminal). The

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

Our Best Contribution

PT IPC Terminal Peti Kemas). Keenam fitur aplikasi *Digital CRM*, yang terdiri dari *Master Customer Data; Customer Profiling; Customer Service; Customer Visit Management; Customer Survey; dan Sales*, seluruhnya telah diaktivasi (*go live*). Aplikasi tersebut merupakan bagian dari strategi dan proses pengelolaan interaksi dengan pelanggan.

Dengan adanya aplikasi *digital* ini, pelanggan atau calon pelanggan punya akses khusus untuk menyampaikan pertanyaan, permintaan atau keluhan melalui *email*, yang akan direspon secara otomatis (*auto reply*). Sesuai standar ketentuan *Service Level Agreement (SLA)*, saran atau keluhan tersebut kemudian akan direspon oleh IPC dalam waktu paling lambat satu jam. Dengan demikian, CRM dapat memberikan manfaat besar bagi pelanggan, salah satunya dengan adanya *tools* untuk memonitor dan menganalisis semua kebutuhan pelanggan maka respon dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan fitur *customer service* misalnya, manajemen bisa mendapatkan gambaran tentang interaksi pelanggan di semua cabang, serta memantau penyelesaian persoalannya secara *real time*. Penerapan CRM ini juga merupakan langkah nyata atas komitmen IPC yang terus meningkatkan kapabilitas sebagai *Digital Port*.

Selain CRM, IPC juga mengembangkan layanan *e-service* berupa *Integrated Billing System (IBS)* yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) yang sekaligus menjadi implementasi program Kementerian BUMN

six Digital CRM application features includes: Customer Data Master; Customer Profiling; Customer Service; Customer Visit Management; Customer Survey; and Sales, all of which have gone live. This application is part of the strategy and process of managing interactions with customers.

Through this digital application, customers or prospective customers will have special access to submit questions, requests or complaints via email, which will be responded to automatically (auto reply). In accordance with the standards of the Service Level Agreement (SLA) provisions, the suggestions or complaint will then be responded to by IPC within a maximum of one hour. As a result, CRM will provide great benefits for customers, one being tools to monitor and analyze all customer needs so that responses can be made more quickly and precisely. Through the customer service feature, management can get an overview of customer interactions in all branches, as well as be able to monitor the resolution of problems in real time. The CRM application is also a real step towards IPC's commitment to continually improving its capabilities as a Digital Port.

In addition to CRM, IPC has also developed an e-service service called the Integrated Billing System (IBS), which integrates the port service systems in ports operated by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) and at the same time will become part of the Ministry of SOE program.

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI
Our Best Contribution

PENGEMBANGAN TRANSHIPMENT PORT

TRANSHIPMENT PORT DEVELOPMENT



Upaya penting berikutnya yang telah dilaksanakan Manajemen yaitu penguatan peran Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *transshipment port* yang secara reguler telah melayani kapal-kapal besar dengan *direct call services* ke beberapa tujuan akhir baik di Eropa, Amerika, Australia maupun China melalui kerjasama dengan *shipping line* raksasa dunia seperti CMA-CGM, COSCO dan MSC. IPC telah berhasil merealisasikan kerjasama dengan CMA-CGM untuk menghubungkan Indonesia dengan Amerika secara langsung, melalui pembukaan rute Jakarta – Los Angeles (*direct call*) dengan menggunakan kapal berukuran besar berkapasitas lebih dari 10.000 TEUs.

Selain kapal-kapal CMA CGM, terdapat beberapa kapal besar (*mother vessel*) yang juga rutin berlabuh di Tanjung Priok seperti generasi Post – Panamax APL yang memiliki kapasitas di atas 10.000 TEUs dengan rute layanan langsung yang ditawarkan antara lain tujuan Eropa Utara, Pantai Barat Amerika Serikat dan Intra Asia. IPC juga menambah layanan *direct call* ke Asia/China dengan *shipping line* COSCO, layanan *direct call* ke Asia/Vietnam dengan *shipping line* SM Lines, serta layanan *direct call* ke Korea Selatan oleh MSC.

The next important effort implemented by Management was the strengthening of Tanjung Priok Port's role as a transshipment port that regularly served large vessels with direct call services to several final destinations in Europe, America, Australia and China through cooperation with giant global shipping lines such as CMA-CGM, COSCO and MSC. IPC has successfully collaborated with CMA-CGM to directly connect Indonesia and the USA, resulting in the opening of the Jakarta - Los Angeles (direct call) route using large-sized ships (capacity of more than 10,000 TEUs).

In addition to CMA CGM ships, there are several mother vessels that also routinely dock in Tanjung Priok such as the APL Post-Panamax generation which has a capacity of more than 10,000 TEUs with direct service routes offered including the North European destination, the American West Coast Union and Intra Asia. IPC has also added direct call services to Asia / China with the COSCO shipping line, direct call services to Asia / Vietnam with shipping line SM Lines, as well as direct call services to South Korea by MSC.

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

Our Best Contribution

Pencapaian ini membuktikan bahwa IPC mampu menyediakan layanan setara dengan pelabuhan kelas dunia lainnya dan memiliki kapasitas yang baik dalam operasional dan pelayanan. *Direct call* tersebut sekaligus menjadi wujud kontribusi aktif IPC dalam pengurangan biaya logistik dan fasilitasi kegiatan ekspor-impor Indonesia, dimana dengan adanya pelayaran langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok baik menuju Amerika Serikat, Eropa maupun negara tujuan lainnya biaya pengiriman barang ekspor maupun impor menjadi lebih efisien karena tidak perlu transit di pelabuhan negara lain terlebih dahulu. Selain itu kapal-kapal besar tersebut memberikan layanan angkutan barang yang lebih kompetitif dan waktu pengiriman yang lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia.

Catatan penting lainnya adalah telah direalisasikannya 8 (delapan) kerjasama *Sister Port* yaitu antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, dan Port of Townsville. Lingkup kerjasama dari *Sister Port* diantaranya adalah terkait *sharing knowledge*, kerja sama bisnis, *internship program*, *benchmarking*, pertukaran informasi, dan potensi kerja sama lainnya dalam rangka memperluas jaringan di sektor maritim dan logistik. Inisiatif *Direct Call* dan pengembangan kerjasama *Sister Port* tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari dukungan IPC pada upaya Pemerintah dalam merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

PROYEK STRATEGIS IPC DAN IPO ENTITAS ANAK

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur sektor maritim, IPC telah menyiapkan beberapa program pembangunan pelabuhan. Salah satunya adalah pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangunan ini merupakan solusi adanya keterbatasan lahan serta tingginya tingkat sedimentasi sungai yang menyebabkan kapal besar sulit bersandar.

Pada tanggal 11 April 2018, IPC mencanangkan pembangunan Terminal Kijing yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) agar mampu mengakomodir potensi *hinterland* serta kapal berukuran besar. Pelabuhan ini mempunyai *draft* -15 mLws sehingga kapal-kapal besar dapat bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat. Terminal Kijing akan dikembangkan dengan konsep *digital port* dan

These achievements prove that IPC is capable of providing services equal to other world-class ports, and has good capacity for operations and services. *Direct call* is also a manifestation of IPC's active contribution in reducing logistics costs and facilitating Indonesia's import-export activities, where the direct shipping from Tanjung Priok Port to the United States, Europe and other destination countries is more efficient as there is no need to transit in other countries' ports. In addition, these large vessels provide more competitive freight services and faster delivery times, which has the potential to increase the competitiveness of Indonesian export products.

Another important note has been the realization of 8 (eight) *Sister Port* collaborations, namely Tanjung Priok Port working together with the Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, and Port of Townsville. The scope of cooperation with the *Sister Ports* includes knowledge sharing, business cooperation, internship programs, benchmarking, information exchange, and other potential cooperations to expand the maritime and logistics sector network. The *Direct Call* initiative and the *Sister Port* collaboration development are part of IPC's support for the Government's efforts in realizing Indonesia as a World Maritime Axis.

IPC STRATEGIC PROJECT AND SUBSIDIARIES IPO

To support the acceleration of the maritime sector infrastructure development program, IPC has prepared several port development programs. One being the construction of the Kijing terminal in Mempawah Regency, West Kalimantan. This development is a solution to the limited land and the high sedimentation rate of the river that makes it difficult for large vessels to moor.

On April 11, 2018, IPC launched the Kijing Terminal construction that will be developed as a deep-sea port to accommodate the hinterland potential and large-sized vessels. This port has a draft of -15 mLws so large vessels can moor and carry out loading and unloading activities. The Kijing Terminal will be developed using a digital port concept and will become the largest international standard port in Kalimantan. The

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI Our Best Contribution

akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Luas Terminal Kijing sekitar 200 hektar dan akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunan tahap pertama ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Terminal ini akan terdiri dari dermaga curah kering, dermaga *multi purpose*, dermaga peti kemas dan dermaga curah cair. Pembangunan Terminal Kijing diharapkan bisa mengatasi penumpukan peti kemas di Cabang Pelabuhan Pontianak.

Selain pembangunan pelabuhan, IPC juga terus mendorong peningkatan praktik *best practice* pengelolaan korporasi secara profesional, transparan serta sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, tidak hanya pada Perusahaan Induk (*holding*) namun juga di lingkungan Entitas Anak yang sejalan dengan cita-cita mewujudkan layanan kelas dunia. Pada tanggal 9 Juli 2018, salah satu Entitas Anak IPC yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) Tbk resmi melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan IPCC. Perusahaan ini merupakan satu-satunya operator terminal di Indonesia yang didedikasikan khusus untuk kendaraan dan tercatat sebagai pengelola terminal kendaraan terbesar ke 3 di Asia Tenggara serta terbesar ke 27 di dunia yang menangani mobil, alat berat, truk, bus dan suku cadang. IKT Tbk merupakan Entitas Anak kedua yang melakukan IPO, menyusul PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Tbk yang pada tahun sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan aksi korporasi serupa. IPC akan mendorong Entitas Anak yang lain untuk juga menjadi perusahaan terbuka, sehingga IPC Group akan menjadi semakin baik dari pengelolannya dan menjadi BUMN yang semakin kuat.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

IPC meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan Perseroan sangat penting demi menjaga kinerja usaha secara berkelanjutan. IPC telah berhasil menyusun *Roadmap* GCG IPC 2017-2020 yang dimaksudkan untuk menentukan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola yang dapat mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan manfaat bersama dengan *stakeholder* (*shared value*). *Roadmap* GCG dengan seluruh kelengkapannya tersebut menjadi rujukan wajib bagi seluruh Insan IPC dalam menjalankan

Kijing Terminal area covers around 200 hectares and will be integrated with the Special Economic Zone (SEZ). The first phase construction is targeted to be completed and will start operating in 2019. The terminal will consist of dry bulk docks, multi-purpose docks, container docks and liquid bulk docks. Construction of the Kijing Terminal will help reduce the accumulation of containers in the Pontianak Port Branch.

In addition to port development, IPC also encourages improvement of best practice practices in corporate management in a professional, transparent manner and in accordance with Good Corporate Governance principles, not only in the Holding Company but also in the Subsidiaries, in line with the goal of providing a world-class service. On July 9, 2018, IPC Subsidiary, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) Tbk officially listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange under the IPCC trade code. The company is the only terminal operator in Indonesia dedicated specifically to vehicles and is listed as the third largest vehicle terminal manager in Southeast Asia and the 27th largest in the world handling cars, heavy equipment, trucks, buses and spare parts. IKT Tbk became the second Subsidiary to conduct an IPO, following PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Tbk IPO the previous year. IPC will encourage other Subsidiaries to become public companies, so that the IPC Group will become better from a management standpoint, and become a stronger SOE.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) APPLICATION

IPC believes that applying Good Corporate Governance (GCG) within the Company is very important to maintain business performance on an ongoing basis. IPC has established its 2017-2020 IPC GCG Roadmap that determines the direction and long-term achievements in governance aspects that will support the achievement of business performance and create benefits for our stakeholders (*shared value*). The GCG Roadmap with all its features is a reference for all IPC Personnel in conducting business. Roadmap is also aimed at increasing the awareness of all stakeholders, both internal

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

Our Best Contribution

bisnis. *Roadmap* tersebut juga ditujukan untuk semakin meningkatkan kesadaran seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal tentang pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang dengannya *stakeholder* dapat memahami komitmen serta posisi IPC dalam menegakkan bisnis yang beretika.

Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik salah satunya tercermin pada peningkatan skor hasil *assessment* GCG. *Assessment* GCG tahun buku 2017 yang dilaksanakan di tahun 2018 menunjukkan skor 96,36, atau mengalami kenaikan skor sebesar 3,05 poin dari pencapaian di tahun buku sebelumnya sebesar 93,31. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen Perseroan dalam penerapan GCG.

APRESIASI

Berbagai upaya peningkatan layanan IPC telah mendapatkan apresiasi dari Pemangku Kepentingan. Sebanyak delapan Cabang Pelabuhan dan empat Entitas Anak IPC menerima penghargaan pelayanan prima untuk unit pelayanan publik sektor transportasi tahun 2018. Terdapat total 14 (empat belas) penghargaan yang diterima yang seluruhnya dianugerahkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional. Terdapat 9 (sembilan) instrumen penilaian yang mendasari yaitu visi, misi dan motto pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana prasarana pelayanan, penanganan pengaduan, survei kepuasan masyarakat (SKM), sistem informasi pelayanan publik serta produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

Dari ke 14 (empat belas) penghargaan yang diraih, lima diantaranya meraih penghargaan prima utama yaitu Terminal Peti Kemas Tanjung Priok (PT IPC Terminal Peti Kemas), Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT Tbk). Sebanyak delapan penghargaan lainnya yaitu penghargaan prima madya meliputi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Teluk Bayur, Terminal Curah Kering Banten, Terminal Penumpang Nusantarapura Tanjung Priok, Terminal Peti Kemas Pelabuhan Pontianak, Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Peti Kemas Pelabuhan Jambi, Terminal Curah Cair Pelabuhan Teluk Bayur serta Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Pandan. Sedangkan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Palembang mendapatkan Penghargaan Prima Pratama.

and external about the importance of Good Corporate Governance, by which stakeholders can understand the commitment and position of IPC in upholding its ethical business position.

The improvements in the quality of good governance implementation are reflected in the increase in GCG assessment scores. The 2017 fiscal year GCG assessment carried out in 2018 showed a score of 96.36, an increase of 3.05 points from the previous fiscal year's achievement of 93.31. This increase reflected the increase in the company's commitment to implementing GCG.

APPRECIATION

The efforts to improve IPC services have received appreciation from Stakeholders. Eight Port Branches and four IPC Subsidiaries received excellent service awards for their public service units in the transportation sector in 2018. There were 14 (fourteen) awards received from the Ministry of Transportation in the context of National Transportation Day. There were 9 (nine) underlying assessment instruments, namely vision, mission and service motto, service standards and service announcements, system procedure mechanisms, human resources, service infrastructure facilities, complaint handling, community satisfaction surveys (SKM), public service information systems and productivity in achieving service targets.

Of the 14 (fourteen) awards achieved, five were Prima Utama Awards, namely Tanjung Priok Container Terminal (PT IPC Container Terminal), Panjang Port Container Terminal, Panjang Port Dry Bulk Terminal, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) and PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT Tbk). Eight other Prima Madya Awards included Teluk Bayur Port Container Terminal, Banten Dry Bulk Terminal, Nusantarapura Tanjung Priok Passenger Terminal, Pontianak Port Container Terminal, Koja Container Terminal, Jambi Port Container Terminal, Teluk Bayur Port Bulk Terminal and Tanjung Pandan Port Passenger Terminal. While the Palembang Port Container Terminal received the Prima Pratama Award.

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI
Our Best Contribution

Selain penghargaan yang diberikan atas layanan Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak, IPC sebagai Entitas Induk (*holding*) juga telah menerima berbagai apresiasi atas upaya-upaya yang dilaksanakan Perseroan pada tahun 2018. Pada bulan Desember 2018, IPC mendapatkan dua penghargaan yang membanggakan dari lembaga internasional yaitu *Global Performance Excellent Award 2018 - Best in Class*, dari Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO) yang berbasis di Selandia Baru. Penghargaan berikutnya adalah '*Best Water Management Initiative*' untuk kategori Tata Kelola Lingkungan, yang diberikan oleh The Asset Publishing and Research Ltd., di Hongkong.

Melengkapi dua penghargaan tersebut, IPC juga meraih penghargaan TOP IT & TELCO Award 2018, *Top Leader on IT Leadership*; TOP IT & TELCO Award 2018, *Top Leader Implementation On Port Sector 2018* dan TOP IT & TELCO Award 2018, *Top Digital Transformation Readiness 2018* dari Majalah IT Works yang merupakan apresiasi pada proses digitalisasi pelabuhan IPC. Sepanjang tahun 2018 IPC mendapatkan sebanyak total 35 penghargaan.

In addition to the awards given for Port Branches and Subsidiary services, IPC as the holding company also received appreciation for efforts carried out by the Company in 2018. In December 2018, IPC received two awards from international institutions namely the 2018 Global Performance Excellent Award - Best in Class, from the Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO) based in New Zealand, and the 'Best Water Management Initiative' award in the category of Environmental Management, from The Asset Publishing and Research Ltd., in Hong Kong.

Complementing the two awards, IPC also won the TOP IT & TELCO Award 2018, Top Leader on IT Leadership; TOP 2018 IT & TELCO Award, Top Leader Implementation On Port Sector 2018 and 2018 TOP IT & TELCO Award, Top Digital Transformation Readiness 2018 from IT Works Magazine which is an appreciation for the IPC port digitalization process. Throughout 2018 IPC received a total of 35 awards.

INISIATIF 2018

2018 INITIATIVES

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" yang menjadi fokus tahun ini adalah "*volume growth*", "*profitability growth*" dan "*holding establishment*".

Target dimaksud diturunkan menjadi target per Direktorat atau masing-masing Direktorat mempunyai fokus masing-masing yaitu, target Direktorat Utama adalah "*Superior GCG and Branding Positioning*"; target Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha "*Optimization of Asset Utilization*"; Direktorat Teknik dan Manajemen Risiko "*Accelerated Capital Expenditure and Port Infrastructure Development*"; Direktorat Operasi dan Sistem Informasi "*Operational Excellence and Zero Accident*"; Direktorat Keuangan "*Financial Automation System*"; Direktorat SDM dan Hukum "*Fully Implementation Human Capital System and Law Enforcement*"; serta target Direktorat Pengelolaan Anak Perusahaan "*Expansion Superior Performance & Total Synergy*".

2018 is the year of "Establishment", which become the focus of this year is "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

These targets was broke down to become the targets per Directorate or each Directorate has its own focus, namely the target of Main Directorate is "Superior GCG and Branding Positioning"; the target of Commercial and Business Development Directorate "Optimization of Asset Utilization"; the target of Engineering and Risk Management Directorate is "Accelerated Capital Expenditure and Port Infrastructure Development"; the target of Operations and Information Systems Directorate is "Operational Excellence and Zero Accident"; the target of Finance Directorate is "Financial Automation System"; the target of HC and Legal Directorate is "Fully Implementation of Human Capital System and Law Enforcement"; and the target of Subsidiary Management Directorate is "Expansion Superior Performance & Total Synergy".

CORPORATE ROADMAP

Corporate Roadmap

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki target untuk menjadi *World Class Modern Port, Excellent in Operation and Service*. Proses untuk mencapai target ini dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu *Fit in Infrastructure, Enhancement, Establishment, Sustainable* dan *World Class*. Masing-masing tahapan ini direncanakan dapat tercapai selama satu tahun.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) aims to become A World Class Modern Port, Excellent in Operation and Service. The process to achieve this target is divided into 5 (five) stages, including *Fit in Infrastructure, Enhancement, Establishment, Sustainable* and *World Class*. Each of these stages is planned to be attained in one year.



KILAS KINERJA

Performance Highlights

CAPAIAN PENTING 2018

Kinerja Keuangan:

Pendapatan Operasi naik dari Rp10,66 triliun di tahun 2017 menjadi Rp11,44 triliun di tahun 2018 atau naik sebesar 7,33%.

Operating revenues increased from Rp10.66 trillion in 2017 to Rp11.44 trillion in 2018 or increased by 7.33%.



2018 KEY ACHIEVEMENTS

Financial Performance:

Laba Bersih Tahun Berjalan naik dari Rp2,21 triliun di tahun 2017 menjadi Rp2,43 triliun di tahun 2018 atau naik sebesar 10,20%.

Net income for the year increased from Rp2.21 trillion in 2017 to Rp2.43 trillion in 2018 or increased by 10,20%.



Total Aset naik dari Rp47,22 triliun di tahun 2017 menjadi Rp51,43 triliun di tahun 2018 atau naik sebesar 8,92%.

Total Assets increased from Rp47.22 trillion in 2017 to Rp51.43 trillion in 2018 or an increase of 8.92%.



Ekuitas naik dari Rp13,95 triliun di tahun 2017 menjadi Rp16,43 triliun di tahun 2018 atau naik sebesar 17,83%.

Equity rose from Rp13.95 trillion in 2017 to Rp16.43 trillion in 2018 or up by 17.83%.



Kinerja Non Keuangan:

Skor GCG di tahun buku 2018 naik menjadi 98,30 dibanding tahun buku 2017 sebesar 96,37. GCG score in 2018 increased to 98.30 compared to 96.37 in 2017.

01

Financial Non Performance:

Kunjungan kapal pada tahun 2018 terealisasi sebesar 35.771 unit dan 224.298.619 GT atau tumbuh sebesar 3,2% dalam satuan unit dan 10,95% dalam satuan GT dibandingkan dengan tahun 2017.

Ship calls in 2018 were realized at 35,771 units and 224,298,619 GT or grew by 3.2% in units and 10.95% in GT compared to 2017.

02

Arus barang dalam kemasan non peti kemas tahun 2018 untuk satuan ton naik sebesar 8,55%, untuk satuan box naik 9,01% dan untuk satuan TEUs naik 10,33% dibanding tahun 2017.

Flow of goods in non-container packaging in 2018 for tonnes increased by 8.55%, for box units increased by 9.01% and for TEUs increased by 10.33% compared to 2017. Flow of goods in 2018 or an increase of 8.92%.

03

Arus peti kemas di tahun 2018 untuk satuan box naik sebesar 9,01% dan untuk satuan TEUs naik 10,33% dibanding tahun 2017.

Flow of containers in 2018 for box units increased by 9.01% and for TEUs increased by 10.33% compared to 2017.

04

Arus penumpang di tahun 2018 mencapai 714.931 orang atau 16,69% diatas pencapaian tahun 2017 yang sebanyak 612.680 orang.

Flow of passengers in 2018 reached 714,931 people or 16.69% higher than the achievement of 2017 which amounted to 612,680 people.

05

PERFORMA 2018

2018 PERFORMANCE

PADA TAHUN 2018, IPC BERHASIL MENINGKATKAN LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SEBESAR 10,20%. SELAIN ITU ASET PERSEROAN DI TAHUN 2018 JUGA MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 8,92%.

In 2018, IPC managed to increase its current year's net profit by 10.20%. In addition, the Company's assets in 2018 also increased by 8.92%.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS AND FINANCIAL RATIOS

Ikhtisar Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

Financial Highlights

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
<i>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>					
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901	3.709.001.423
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.836.007.289	6.999.082.698	4.787.160.000	3.059.900.000	90.000.000
Piutang usaha – neto Trade receivables – net					
Pihak ketiga Third parties	634.078.032	549.154.117	404.004.378	444.862.341	423.768.331
Pihak berelasi Related parties	155.875.322	149.599.560	80.267.487	98.101.853	78.761.919
Piutang lain-lain – neto Other receivables – net					
Pihak ketiga Third parties	9.530.083	49.765.763	31.679.063	471.142.531	43.156.036
Pihak berelasi Related parties	640.168.731	738.312.346	108.443.481	54.843.542	50.924.144
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	120.068.178	144.176.602	153.791.098	137.364.743	124.263.592
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues					
Pihak ketiga Third parties	305.866.345	303.926.301	201.554.511	301.819.703	219.162.911
Pihak berelasi Related parties	17.001.727	26.573.499	63.312.642	30.686.264	93.753.846
Persediaan Inventories	59.139.424	56.480.952	49.241.502	53.122.512	41.622.447
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	751.789.998	557.236.979	432.913.175	449.603.826	231.290.725
Aset lancar Lainnya Other current assets	6.139.521	-	-	-	-
Total Aset Lancar Total Current Assets	24,554,336,129	23,781,639,149	20,780,243,015	21,511,261,216	5,105,705,374

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
ASET TIDAK LANCAR					
NON-CURRENT ASSETS					
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in associates	2.362.825.278	1.554.888.854	1.619.970.587	1.792.763.739	1.423.142.235
Investasi pada Penyertaan Saham Investment in share of stocks	524.362.036	-	-	-	-
Investasi pada Surat Utang Investment in bonds	324.550.117	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Long-term Investment	3.211.737.431	1.554.888.854	1.619.970.587	1.792.763.739	1.423.142.235
Properti investasi – neto Investment properties - net	377.142.447	394.342.020	415.822.791	435.830.922	455.321.632
Aset tetap – neto Fixed assets – net	12.628.997.433	11.325.850.596	10.436.641.420	10.275.380.615	9.609.238.010
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	482.390.189	507.560.396	535.920.134	553.704.635	573.656.024
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	47.498.765	44.644.534	37.017.244	15.271.329	14.495.181
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	9.038.949.144	8.296.435.366	8.617.040.414	7.181.073.270	4.104.672.777
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	841.931.567	839.786.756	668.961.286	655.267.475	84.356.310
Dana yang dibatasi pencairannya limited funds	-	-	-	-	450.881.147
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	249.893.918	474.940.688	359.883.364	167.951.508	184.052.638
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	26.878.540.894	23.438.449.210	22.691.257.240	21.077.243.493	16.899.815.954
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255	42.588.504.709	22.005.521.328
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS					
LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
CURRENT LIABILITIES					
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	4.000.000	-	-	-	358.589.496
Utang usaha Trade payables					
Pihak ketiga Third parties	404.693.466	367.571.206	401.719.610	626.787.335	465.214.337
Pihak berelasi Related parties	1.261.214.247	999.183.968	944.037.756	806.699.888	586.994.057
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	834.098.021	778.706.786	457.410.169	349.955.442	160.358.465
Utang pajak Taxes payable	389.495.675	441.919.999	195.577.132	398.803.105	270.127.010

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Beban akrual Accrued expense	2.290.832.616	2.168.022.495	1.148.153.513	902.033.374	571.136.330
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities					
Utang bank Bank loans	-	1.860.603	1.724.970	1.535.322	504.784.444
Sewa pembiayaan Finance Lease	-	-	635.202	586.829	279.119
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi Other long-term liabilities - related parties	38.272.280	54.127.289	63.047.890	60.432.856	57.792.649
Liabilitas jangka pendek lainnya Other short-term liabilities					
Pihak ketiga Third parties	185.350.553	165.639.036	183.421.670	187.083.860	158.878.854
Pihak berelasi Related parties	90.237.622	95.916.891	96.993.402	130.253.043	118.860.889
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	5.498.194.480	5.072.948.273	3.492.721.314	3.464.171.054	3.253.015.650
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES					
Utang obligasi Bonds payable	22.890.166.969	21.376.332.500	21.178.512.268	21.732.391.821	-
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long-term liabilities – net of current maturities					
Utang bank Bank loans	-	-	1.860.603	3.676.610	6.024.972.086
Sewa pembiayaan Finance Lease	-	-	-	431.796	830.710
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak ketiga Other long-term liabilities – third parties	234.402.238	219.299.877	221.112.329	227.020.287	191.575.851
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.290.892.916	4,496.181.101	4.754.664.509	4.532.294.577	1.061.430.390
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	1.776.917.294	1.806.109.326	1.554.159.311	1.291.162.024	1.170.427.350
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	307.846.807	301.299.484	356.873.980	389.960.436	442.352.868
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	29.500.226.224	28.199.222,288	28.067.183.000	28.176.937.551	8.891.589.255

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
TOTAL LIABILITAS	34.998.420.704	33.272.170.561	31.559.904.314	31.641.108.605	12.144.604.905
TOTAL LIABILITIES					
EKUITAS					
EQUITY					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of parent entity					
Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 (nilai penuh) per saham Share capital – par value of Rp1,000,000 (full amount) per share					
Modal dasar – 4,000,000 saham Authorized capital - 4,000,000 shares					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1,444,029 saham Issued and fully paid capital - 1,444,029 shares	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)
Saldo laba Retained earnings					
Ditentukan penggunaannya Appropriated	11.726.994.846	10.201.069.392	9.153.232.292	8.196.831.000	6.988.840.570
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	2.379.261.695	2.179.893.506	1.415.580.254	1.232.455.771	1.421.852.045
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(112.143.427)	(72.365.832)	53.674.364	236.226.457	178.202.172
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – neto Equity attributable to owners of parent entity - net	15.147.370.621	13.461.854.573	11.775.744.417	10.818.770.735	9.742.152.294
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	1.287.085.698	486.063.225	135.851.524	128.625.369	118.764.129
Ekuitas – neto Equity - net	16.434.456.319	13.947.917.798	11.911.595.941	10.947.396.104	9.860.916.423
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255	42.588.504.709	22.005.521.328
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY					
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
<i>CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>					
Pendapatan operasi Operating revenues	11.436.700.894	10.655.574.667	8.926.064.770	7.703.628.326	7.055.304.822
Pendapatan konstruksi Construction revenues	781.658.834	319.744.293	1.392.135.798	2.623.090.159	2.355.878.115
Beban operasi Operating expenses	(8.042.554.820)	(7.397.914.132)	(6.411.461.985)	(5.795.468.490)	(5.619.803.630)
Beban konstruksi Construction expenses	(781.658.834)	(319.744.293)	(1.392.135.798)	(2.623.090.159)	(2.355.878.115)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating income - net	(196.360.574)	11.410.021	208.659.785	141.403.991	276.259.795
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	3.197.785.500	3.269.070.556	2.723.262.570	2.049.563.827	1.711.760.987
Pendapatan keuangan Finance income	688.914.300	534.789.328	287.625.782	247.860.282	62.403.718
Beban keuangan Finance costs	(1.130.782.016)	(1.064.136.560)	(1.043.385.641)	(885.967.925)	(101.815.519)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	376.200.594	79.081.852	72.794.376	286.217.128	405.117.535
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	3.132.118.378	2.818.805.176	2.040.297.087	1.697.673.312	2.077.466.721
Beban pajak final Final tax expense	(357.113.222)	(345.222.944)	253.178.548	(118.463.540)	(34.577.324)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	2.775.005.156	2.473.582.232	1.787.118.539	1.579.209.772	2.042.889.397
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)					
Kini Current	(353.981.768)	(291.831.888)	(237.965.664)	(259.454.472)	(378.384.396)
Tangguhan Deferred	9.686.466	23.976.675	(11.938.104)	35.325.324	(85.726.939)
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771	1.355.080.624	1.578.778.062
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti Remeasurement of defined benefit plans	32.019.693	(159.232.831)	(179.146.070)	(100.865.711)	29.885.140
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	(18.329.765)	23.609.863	(3.987.667)	159.036.520	(51.410.250)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	(54.279.223)	8.946.393	-	-	-
Total laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.082.034	1.413.251.433	1.557.252.952
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income For The Year Attributable To:					
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	2.379.261.695	2.179.893.506	1.511.459.775	1.328.335.292	1.551.494.937
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	51.448.159	25.833.513	25.754.996	26.745.332	27.283.125
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771	1.355.080.624	1.578.778.062
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for The Year Attributable To:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.339.484.100	2.053.853.310	1.328.907.682	1.386.359.578	1.530.400.869
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	50.636.459	25.197.134	25.173.352	26.891.855	26.852.083
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.081.034	1.413.251.433	1.557.252.952
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	1.647.655	1.509.591	1.046.696	919.881	1.074.421

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	10.419.622.862	9.545.892.387	8.512.075.301	7.620.375.727	7.105.447.737
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(4.849.497.861)	(4.316.101.188)	(4.118.471.372)	(3.406.547.357)	(3.339.954.393)
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(2.324.087.858)	(2.245.546.714)	(1.833.435.900)	(1.172.297.373)	(1.178.261.926)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(541.932.045)	(391.972.308)	(141.735.373)	(685.793.665)	(456.175.909)
Penghasilan bunga Interest received	604.025.265	439.649.013	243.908.383	212.351.217	58.577.557
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya Payment of interest and other financial charges	(1.064.789.688)	(984.317.563)	(960.401.313)	(885.967.925)	(101.815.519)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	2.243.340.675	2.047.603.627	1.701.939.726	1.682.120.624	2.087.817.547
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Penerimaan dividen Receipt of dividend	272.747.364	130.367.400	193.335.930	202.786.500	461.284.338
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(1.984.667.658)	(775.034.171)	(2.125.974.262)	(4.234.352.077)	(4.069.376.513)
Penempatan investasi jangka pendek Receipt of short-term investments	3.163.075.409	(2.011.922.698)	(1.727.260.000)	(2.969.900.000)	(80.000.000)
Penerimaan sewa di muka Receipt of advance rental fee	318.174.500	308.934.500	526.670.000	-	-
Penempatan deposito jangka panjang Placement of long-term deposits	-	-	(200.000.000)	-	-
Penerimaan (penempatan) investasi saham Receipt (placement) of investment in shares of stock	(327.615.532)	449.500.127	154.264.311	(386.505.596)	(334.854.044)
Penerimaan (penempatan) dana yang dibatasi pencairannya Acceptance (placement) of restricted funds.	-	-	-	450.881.147	450.881.147
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	1.441.714.083	(1.898.154.842)	(3.178.964.021)	(3.604.966.953)	(4.473.827.366)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Penerimaan dari utang obligasi Receipt from bond payables	-	-	-	21.732.391.821	-

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

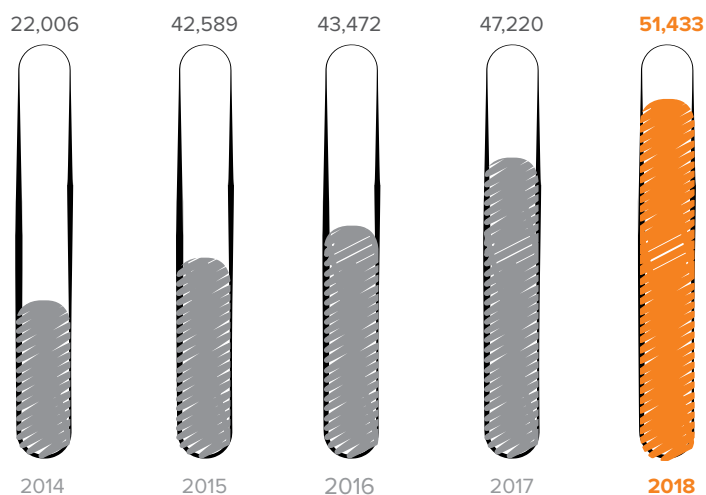
Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Penerimaan dari pinjaman bank Receipt from bank loans	-	-	-	-	6.521.851.852
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman bank keuangan lainnya Receipt (Payment) of other financial bank loans	2.139.397	(2.360.172)	(1.626.360)	(6.883.134.093)	(1.041.410.504)
Pembayaran dividen Payment of dividend	(653.968.052)	(453.437.932)	(371.934.000)	(309.741.136)	(796.314.090)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Funding Activities	(651.828.655)	(455.798.104)	(373.560.360)	14.539.516.592	4.684.127.258
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	778.115.044	45.803.973	(91.353.568)	84.142.215	9.036.140
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS NET DECREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS	3.811.341.147	(260.545.346)	(1.941.938.223)	12.700.812.478	2.307.153.579
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901	3.709.001.423	1.401.847.844
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901	3.709.001.423
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS					
PROFITABILITAS PROFITABILITY					
ROA	4.73%	4.67%	3.54%	3.18%	7.17%
ROE	17.31%	18.82%	14.79%	14.00%	18.93%
ROI	11.15%	11.03%	10.20%	7.25%	15.35%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset Return on Asset Ratio	4.73%	4.67%	3.54%	3.18%	7.17%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Ekuitas Return on Equity Ratio	14.79%	15.81%	12.91%	12.38%	16.01%

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

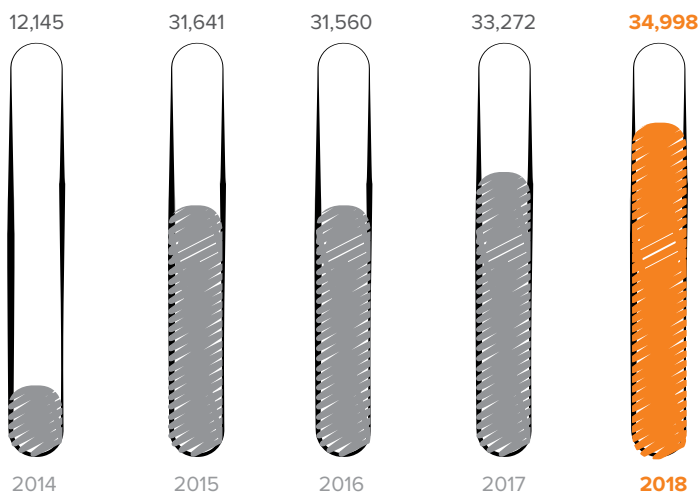
Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan Return on Revenues Ratio	21.25%	20.21%	17.22%	17.59%	22.38%
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	68.05%	70.46%	72.60%	74.29%	55.19%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	212.96%	238.55%	264.95%	289.03%	123.16%
LIKUIDITAS LIQUIDITY					
Rasio Kas Cash Ratio	397.49%	418.03%	551.20%	562.03%	114.95%
Rasio Lancar Current Ratio	446.59%	468.79%	594.96%	620.96%	155.10%
Rasio Perputaran Total Aset Asset Turnover Ratio	27.32%	27.60%	25.34%	19.64%	45.51%
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Asset Ratio	31.95%	28.33%	27.09%	25.40%	45.60%

Grafik pertumbuhan aset 2014-2018
 Assets Growth 2014-2018

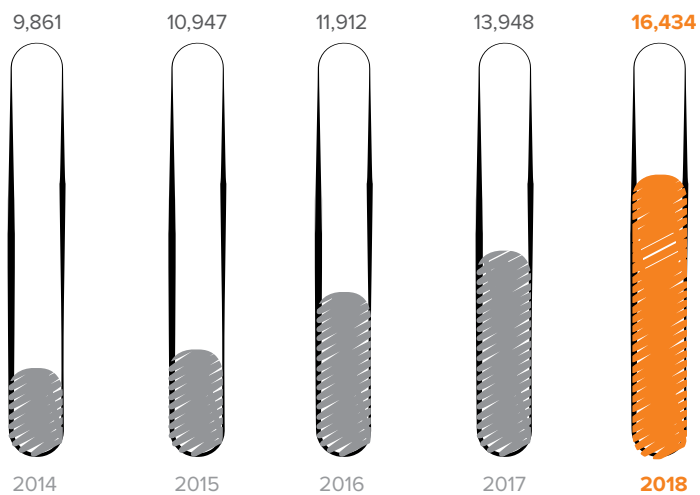


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Key Financial Highlights

Grafik pertumbuhan Liabilitas 2014-2018
Liabilities Growth 2014-2018



Grafik pertumbuhan Ekuitas 2014-2018
Equity Growth 2014-2018



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

IKHTISAR OPERASIONAL**Kinerja Operasional**

Keterangan Description	Satuan Unit	2018	2017	2016	2015	2014
Kunjungan Kapal Ship Calls	Unit	35,771	34,662	33,370	43,847	52,491
	GT	224,298,619	202,153,652	173,468,382	201,729,502	220,222,610
Arus Barang Flow of Goods	Ton	61,917,277	57,091,681	55,506,634	85,653,194	102,750,263
	Box	5,655,416	5,187,936	4,673,090	4,441,096	4,857,089
	TEUs	7,640,312	6,925,046	6,222,798	5,935,330	6,442,968
Arus Petikemas Flow of Containers	Box	5,655,416	5,187,936	4,673,090	4,441,096	4,857,089
	TEUs	7,640,312	6,925,046	6,222,798	5,935,330	6,442,968
Arus Penumpang Flow of Passengers	Orang Persons	714,931	612,680	707,033	816,735	1,245,541

OPERATIONAL HIGHLIGHTS**Operational Performance****INFORMASI HARGA SAHAM**

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebanyak 1.444.029 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp1.444.029.000.000,00.

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal yang berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 1.444.029.000.000,00 dalam perseroan tersebut yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam perseroan hingga saat ini.

INFORMATION ON SHARE PRICE

The issued and fully paid capital as of December 31, 2018 and 2017 are 1,444,029 shares with par value of Rp1,000,000 per share, thus the total issued and fully paid in capital is Rp1,444,029,000,000.00.

That the Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the only owner and sole shareholder entitled to 1,444,029 shares with par value of Rp1,000,000.00 or a total of Rp1,444,029,000,000.00 in the Company, which is the total shares issued and placed and fully paid in the Company to date.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

Tabel Informasi Saham

(dalam ribuan Rupiah)

Stock Information

(in thousand Rupiah)

Keterangan <i>Keterangan</i>	2018	2017
Modal saham – nilai nominal Rp1,000,000 (nilai penuh) per saham	1,444,029,000	1,444,029,000
Modal dasar – 4,000,000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1,444,029 saham		
Capital Stock – nominal value per share Rp1,000,000 (full amount)		
Paid-up capital – 4,000,000 shares		
Issued and fully paid capital – 1,444,029 shares		

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai harga saham, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan.

AKSI KORPORASI

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perseroan merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek sehingga tidak terdapat informasi mengenai aksi korporasi penjualan saham.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perseroan belum melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek, sehingga tidak terdapat informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

As of December 31, 2018, the Company has not listed shares on the Indonesia Stock Exchange. Thus, there is no information about stock prices, market capitalization and trading volume.

CORPORATE ACTION

As of December 31, 2018, the Company is a non-listed business entity that has not listed its shares on the Stock Exchange, hence there is no information about corporate actions.

STOCK TRADING TEMPORARY SUSPENSION AND/OR DELISTING

As of December 31, 2018, the Company has not listed its shares on any Stock Exchange, so there is no information to report regarding Suspension of Stock Trading and / or the Delisting of Shares.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ON BONDS, SHARIA BONDS AND/OR CONVERTIBLE BONDS

INFORMASI OBLIGASI

INFORMATION ON BONDS

No.	Uraian <i>Description</i>	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang <i>Currency</i>	Jumlah Obligasi <i>Amount of Bonds</i>	Harga Penawaran per lembar (USD) <i>Price per Sheet (USD)</i>
1.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 1	05 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 Years	USD	1,1 miliar 1.1 billion	98.996 USD
2.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 2		30 Tahun 30 Years		500 juta 500 million	98.996 USD

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC tidak menerbitkan sukuk atau surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sukuk.

INFORMATION ON SHARIA BONDS

As of December 31, 2018, IPC does not issue sharia bonds or state Islamic based government securities, thus there is no information regarding sharia bonds.

INFORMASI OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi konversi.

INFORMATION ON CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2018, IPC does not issue convertible bonds, thus there is no information regarding convertible bonds.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Pada tahun 2018, IPC tidak memiliki sumber pendana yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

In 2018, IPC did not have a source of funding from other securities, thus is was no information about other funding sources.

2018 Performances

Management Report
 Company Profile
 Business Support Functions
 Management Discussion and Analysis
 Good Corporate Governance
 Corporate Social Responsibility

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
 Key Financial Highlights

	Tanggal Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran <i>Payment Status</i>	Peringkat <i>Ranking</i>		Dicatatkan di <i>Listed in</i>
				2018	2017	
	05 Mei 2025 May 5, 2025	4,250% per tahun 4.250% per Years	Pembayaran akan dilakukan pada saat jatuh tempo Payment will be made at maturity	S&P: BBB- (<i>Outlook: Stable</i>)	S&P: BBB- (<i>Outlook: Stable</i>)	Singapore Stock Exchange
	05 Mei 2045 May 5, 2045	5,375% per tahun 5.375% per Years		Moody's: Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)	Moody's: Baa3 (<i>Outlook: Positive</i>)	
				Fitch: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	Fitch: BBB- (<i>Outlook: Positive</i>)	

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018

2018 Event Highlights

JANUARI JANUARY



10 Januari 2018
January 10, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Signing of MoU between IPC and the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) concerning Land Rights Certification and Land Asset Problem Handling of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



17 Januari 2018
January 17, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung.

Signing of MoU between IPC and Lampung Provincial Government concerning the Cooperation Plan of Panjang Port Development in Lampung Province



23 Januari 2018
January 23, 2018

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IPC dengan tema "Corporate Establishment towards Digital Port".

IPC National Coordination Meeting (RAKERNAS) with the theme "Corporate Establishment towards Digital Port".

FEBRUARI FEBRUARY



19 Februari 2018
February 19, 2018

Peresmian Fasilitas *Billing Center* sebagai lokasi pelayanan administrasi sekaligus pembayaran jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Inauguration of Billing Center Facilities as a location for administrative services as well as payment of port services at Tanjung Priok Port.



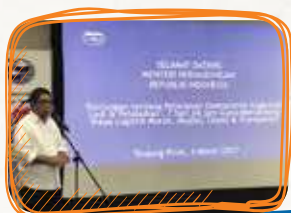
23 Februari 2018
February 23, 2018

Realisasi komitmen IPC melakukan pembayaran ganti rugi lahan sebagai awal pembangunan Terminal Kijing, Kalimantan Barat.

Realization of IPC's commitment to pay compensation of land in the initial construction of Kijing Terminal, West Kalimantan.

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018
 2018 Event Highlights

MARET
 MARCH



4 Maret 2018
 March 4, 2018

Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI tentang pelayanan operasional angkutan laut dan pelabuhan 7 (tujuh) hari 24 (dua puluh empat) jam guna mendukung biaya logistik murah, mudah, cepat dan transparan.

Working Visit of the Indonesian Minister of Transportation on sea and port transportation operational services 7 (seven) days 24 (twenty four) hours to support cheap, easy, fast and transparent logistical costs.



10 Maret 2018
 March 10, 2018

Kunjungan kapal pesiar MV Europa (kapal pesiar yang dimiliki dan dioperasikan oleh Jerman Hapag-Llyod).

Visit of MV Europa cruise ship (cruise ship owned and operated by German Hapag-Llyod).



12 Maret 2018
 March 12, 2018

Seremonial keberhasilan catatkan akumulasi throughput 1 juta TEUs dalam waktu kurang lebih satu setengah tahun.

The achievement ceremony on recording an accumulated throughput of 1 million TEUs in approximately one and a half years.

APRIL
 APRIL



2 April 2018
 April 2, 2018

Stakeholders Coffee Morning IPC bersama Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak IPC Group, Instansi Pelabuhan, Asosiasi Pengguna Jasa, Pengguna Jasa serta Pelaku Perbankan Pelabuhan Tanjung Priok.

IPC Stakeholders Coffee Morning with Port Branches and Subsidiaries of IPC Group, Port Agencies, Service Users Associations, Service Users and Banking Players in Tanjung Priok Port.



6 April 2018
 April 6, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (ASKRINDO) tentang sinergi bisnis antar BUMN.

Signing of MoU between IPC and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (ASKRINDO) on business synergy between SOEs.



11 April 2018
 April 11, 2018

Pencanangan pembangunan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.

Declaration of construction of Kijing Terminal, Pontianak Port, West Kalimantan.

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018
 2018 Event Highlights

MEI
 MAY



10 Mei 2018
 May 10, 2018

Direktur Utama IPC wakili Indonesia Bicara Pelabuhan dalam Konferensi Pelabuhan Internasional IAPH World Port Conference 2018 di Baku, Azerbaijan.
 President Director of IPC represented Indonesia Port Talk at the IAPH World Port Conference 2018 in Baku, Azerbaijan.



15 Mei 2018
 May 15, 2018

Pelepasan ekspor dan peninjauan infrastruktur pelabuhan oleh Presiden RI di Tanjung Priok.
 Export Release and review of port infrastructure by the President of Indonesia at Tanjung Priok.



17 Mei 2018
 May 17, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno tentang rencana kerjasama pemanfaatan lahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.
 Signing of MoU between IPC and PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., witnessed by the Minister of SOE Rini M. Soemarno about cooperation plan in land use and port service activities.



30 Mei 2018
 May 30, 2018

Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) Entitas Anak IPC, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)/IPCC.
 Initial Public Offering (IPO) of IPC's Subsidiary, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)/IPCC.

JUNI
 JUNE



7 Juni 2018
 June 7, 2018

Pemberangkatan Mudik Gratis Bersama IPC Group ke 17 kota tujuan Jawa dan Sumatera dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.
 Free Homecoming Celebration with IPC Group to 17 cities destination in Java and Sumatera to welcome Eid al-Fitr.



8 Juni 2018
 June 8, 2018

Sinergi IPC dan Pelindo I melalui Penandatanganan MoU tentang Penyiapan Kerjasama Operasi Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar.
 Synergy of IPC and Pelindo I through the Signing of MoU on the Preparation of Operational Cooperation for Batu Ampar Port Management .

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018
 2018 Event Highlights

JULI
 JULY



4 Juli 2018
 July 4, 2018

IPC memberikan bantuan kapal pembersih sampah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 IPC donated garbage cleaning vessel to the Provincial Government of DKI Jakarta.



6 Juli 2018
 July 6, 2018

IPC Lakukan Uji Coba Penerapan *Auto Gate Pass System* di Pelabuhan Tanjung Priok.
 IPC Performed Trial of *Auto Gate Pass System* at Tanjung Priok Port.



9 Juli 2018
 July 9, 2018

Pencatatan Saham Perdana Entitas Anak IPC, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Kode Perdagangan IPCC.
 Initial Share Listing of IPC's Subsidiary, PT Indonesia Kendaraan Terminals (IKT) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the stock code IPCC.



12 Juni 2018
 July 12, 2018

Penandatanganan Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat sebagai Persiapan Awal Pembangunan Fisik Terminal Kijing.
 Signing of Construction and Concession Agreement of Kijing Terminal Port Construction, Pontianak Port, West Kalimantan as Initial Preparation for Physical Construction of the Kijing Terminal.

AGUSTUS
 AUGUST



1 Agustus 2018
 August 1, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) tentang Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 Signing of MoU between IPC and Energy and Mineral Resources Research and Development Agency (Balitbang ESDM) on Cooperation in Research, Development and Technology Utilization in the field of Energy and Mineral Resources.



9 Agustus 2018
 August 9, 2018

Peresmian IPC Corporate University sebagai Entitas Pembelajaran untuk mengintegrasikan Pengembangan SDM dalam Organisasi IPC.
 Inauguration of IPC Corporate University as a Learning Entity to integrate HC Development within IPC Organization.

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018
 2018 Event Highlights

SEPTEMBER
 SEPTEMBER



4 September 2018
 September 4, 2018

Launching Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online IPC Cabang Pelabuhan Panjang. Launching of Online Temporary Stockpiling Site (TPS) of IPC Panjang Port Branch.



5 September 2018
 September 5, 2018

Kehadiran Presiden RI, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan pada Seremoni Capaian Ekspor 1,3 Juta unit kendaraan utuh produksi Toyota melalui fasilitas Entitas Anak IPC, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)/IPCC.

The Presence of the Indonesian President, Minister of Industry, Minister of Trade and Minister of Transportation in the Export Achievement Ceremony of 1.3 million units of intact vehicles produced by Toyota through the facilities of IPC's Subsidiary, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)/IPCC.



20 Agustus 2018
 September 20, 2018

Penugasan baru Direktur Keuangan IPC sebelumnya, Iman Rachman ke Pelindo III oleh Kementerian BUMN. New assignment for IPC's Finance Director, Iman Rachman to Pelindo III by the Ministry of SOE.

OKTOBER
 OCTOBER



2 Oktober 2018
 October 2, 2018

Uji Coba Penggunaan Buffer Area (Kantong Parkir Truk Kontainer) di Pelabuhan Tanjung Priok. Trial of Buffer Area (Container Truck Parking Area) at Tanjung Priok Port.



17 Oktober 2018
 October 17, 2018

IPC Raih 4 Penghargaan Terbaik Kategori "Best IT and Data Technology Governance", "CEO Terbaik", "Teknologi Informasi Terbaik untuk Tata Kelola Data" dan "Teknologi Informasi Terbaik untuk Keamanan Data" pada Ajang Data GovAI Award 2018 di Jakarta. IPC Won 4 Best Awards for the category of „Best IT and Data Technology Governance“, „Best CEO“, „Best Information Technology for Data Management“ and „Best Information Technology for Data Security“ at the 2018 GovAI Award Data Event in Jakarta.

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018
 2018 Event Highlights

NOVEMBER
NOVEMBER



9 November 2018
November 9, 2018

Penandatanganan MoU antara IPC dengan Lazaro Cardenas Port perihal *Sister Port* di Meksiko sekaligus pertemuan khusus dengan Ketua Komisi Urusan Luar Negeri untuk Asia-Pasifik dan Afrika Senat Meksiko.

Signing of MoU between IPC and Lazaro Cardenas Port regarding *Sister Port* in Mexico as well as a special meeting with the Chairperson of Foreign Affairs Commission for Asia-Pacific and African Senate Mexico.



27 November 2018
November 27, 2018

Penunjukan Widyaka Nusapati menjadi Direktur Keuangan IPC yang baru.
 Appointment of Widyaka Nusapati as the new IPC's Finance Director.

DESEMBER
DECEMBER



7 Desember 2018
December 7, 2018

Soft Launching Museum Maritim Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
 Soft Launching of Indonesian Maritime Museum at Tanjung Priok Port, Jakarta.



10 dan 11 Desember 2018
December 10 and 11, 2018

IPC Menangkan Penghargaan Internasional "Best Water Management Initiative" dari The Asset di Hong Kong dan "Global Performance Excellent Award 2018-Best in Class" dari Asia Pacific Quality Organization Inc. (APQO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
 IPC Won the International Award of "Best Water Management Initiative" from The Asset in Hong Kong and "2018-Best in Class Global Excellent Performance Award" from Asia Pacific Quality Organization Inc. (APQO) in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

PADA TAHUN 2018, DIREKSI TELAH BERHASIL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN *DIGITAL PORT* YANG BERKONTRIBUSI PADA KINERJA PERSEROAN MELALUI PENINGKATAN EFISIENSI PADA SISI LAUT, TERMINAL, MAUPUN BACK OFFICE. TEROBOSAN *DIGITAL PORT* YANG TELAH DILAKUKAN DI ANTARANYA ADALAH IMPLEMENTASI *AUTOGATE*, TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) *ONLINE*, DAN *AUTO TALLY* DI TERMINAL PETI KEMAS, OPERASI BERBASIS *TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS)*, PENERAPAN *MARINE OPERATING SYSTEM (MOS)*, DAN *VESSEL MANAGEMENT SYSTEM (VMS)* PADA SEJUMLAH CABANG PELABUHAN.

In 2018, the Board of Directors succeeded in implementing digital ports that contributed to the Company's performance through increased efficiency on the sea, terminal and back office side. The digital port breakthrough included autogate, Online TPS, and auto tally at container terminals, Terminal Operating System (TOS) based operations, the Marine Operating System (MOS), and Vessel Management System (VMS) in a number of port branches.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report



TUMPAK H. PANGGABEAN

Komisaris Utama
President Commissioner

Secara umum pencapaian tahun 2018 telah memenuhi yang ditargetkan, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. *Return on Asset (ROA)* mencapai 4,73 melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 4,22. *Return on Equity (ROE)* sebesar 17,31 melebihi yang telah ditargetkan yaitu sebesar 16,42. Dari sisi efisiensi, Perseroan juga telah mampu mencapai target *Net Income Margin* yaitu sebesar 21,25 melampaui yang ditargetkan sebesar 17,58.

In general, the 2018 achievements reached their targets, and increased compared to the previous year. Return on Assets (ROA) reached 4.73 more than the target of 4.22. Return on Equity (ROE) reached 17.31 more than the target of 16.42. In terms of efficiency, the Company's Net Income Margin reached 21.25, exceeding the target of 17.58.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2018. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris.

Perekonomian dunia selama tahun 2018 belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dari sejumlah lembaga internasional. IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2018 melakukan revisi ke bawah dalam memperkirakan pertumbuhan PDB dunia pada 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 3,7% yang relatif sama dengan tahun 2017. Angka ini dari perkiraan sebelumnya di bulan Juli 2018 yang diperkirakan sebesar 3,9%. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bahkan lebih pesimis dengan memprediksi pertumbuhan pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 3,5%.

Tantangan perekonomian dunia juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan, namun masih belum cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit mengalami peningkatan dari 5,07% (YoY) pada 2017 menjadi 5,17% (YoY) pada 2018. Sementara itu, ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan harga komoditas yang menurun.

Namun demikian, secara umum kondisi perekonomian nasional menunjukkan arah yang positif. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik sehingga menopang ketahanan

Dear respected Shareholders and Stakeholders,

We herewith submit the Board of Commissioners' Report on its supervisory and advisory function to the Board of Directors throughout 2018. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners always upholds integrity and independence in accordance as mandated in the Company's Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

When assessing the Board of Directors' performance, the Board of Commissioners considers various factors, specifically the achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI) and the targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The Board of Commissioners is aware that achieving the KPI and the RKAP targets are influenced by economic conditions, so that is one of the things taken into consideration by the Board of Commissioners.

The world economy during 2018 did not show any significant increase in growth, resulting in a number of international institutions correcting their GDP forecasts. In their October 2018 World Economic Outlook, the IMF revised its world GDP growth estimate for 2018 to 2020 down from 3.9% to 3.7%. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) was even more pessimistic predicting growth of 3.5% in 2019 and 2020.

The world economy challenges affected the national economic growth, which despite experiencing increased growth, it was still not significant. Indonesia's economy grew slightly from 5.07% (YoY) in 2017 to 5.17% (YoY) in 2018. Meanwhile, net exports were negative influenced by sluggish global economic growth and declining commodity prices.

Nevertheless, the national economic conditions showed a positive direction. Indonesia's Balance of Payments thus sustaining the external sector resilience. In Q4 - 2018, the

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Report

sektor eksternal. Pada triwulan IV 2018, NPI mencatat *surplus* 5,4 miliar dolar AS ditopang peningkatan *surplus* transaksi modal dan finansial sejalan persepsi investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan ketidakpastian global yang berkurang.

Kondisi perekonomian dunia dan nasional tersebut memberikan dampak pada industri kepelabuhanan di Indonesia. Secara politis, industri kepelabuhanan dan perdagangan dunia saat ini sedang dipengaruhi oleh perang dagang antara dua kekuatan besar dunia yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. *Throughput* petikemas pada kuartal ke IV tahun 2018 masih mengalami perlambatan karena perang dagang ini. Drewry Maritime Research memproyeksikan pertumbuhan *throughput* petikemas dunia akan mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 1% jika perang dagang masih terus berlanjut. Walaupun demikian, masih terdapat peluang yang baik untuk Indonesia karena kawasan Asia Tenggara memiliki pertumbuhan petikemas yang relatif tinggi pada tahun 2018 yaitu rata-rata sebesar 8,00%.

Berdasarkan analisis perekonomian dan kondisi industri kepelabuhanan, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja Direksi yang mampu menghadapi tantangan makro dengan baik. Pada tahun 2018, Direksi telah berhasil dalam mengimplementasikan *digital port* yang berkontribusi pada kinerja Perseroan melalui peningkatan efisiensi pada sisi laut, terminal, maupun *back office*. Terobosan *digital port* yang telah dilakukan di antaranya adalah implementasi *autogate*, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) *Online*, dan *auto tally* di terminal peti kemas, operasi berbasis *Terminal Operating System (TOS)*, penerapan *Marine Operating System (MOS)*, dan *Vessel Management System (VMS)* pada sejumlah cabang pelabuhan. Perseroan juga telah menginisiasi Penerapan *Integrated Billing System (IBS)*, yang di dalamnya terdapat aplikasi *e-registration*, *e-booking*, *e-tracking and tracing*, *e-payment*, *e-billing*, dan *e-care*, yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh pelabuhan yang dioperasikan.

Perseroan juga telah melakukan inisiasi program *direct call* yang memungkinkan kapal berukuran besar untuk langsung menuju pelabuhan akhir di luar negeri tanpa harus singgah di pelabuhan negara lain. Program *direct call* ini telah menghubungkan Indonesia dengan Amerika, Eropa, Australia, Asia Timur dan Asia Tenggara secara langsung.

balance of payments recorded a surplus of USD 5.4 billion supported by an increase in the capital and financial account surplus, in line with foreign investors' view that the Indonesian economy remained strong, and that the global uncertainty was diminishing.

Both the global and national economic conditions had an impact on the port industry in Indonesia. Politically, the global port and trade industry is currently being influenced by a trade war between the two major world powers, the People's Republic of China and the United States of America. Container throughput in Q4 - 2018 was still experiencing a slowdown due to this trade war. Drewry Maritime Research projected that world container throughput growth will decline from 3.5% to 1% if the trade war continues. Nevertheless, there are still good opportunities for Indonesia as the Southeast Asia region experienced relatively high container growth in 2018 averaging 8.00%.

Based on economic analysis and the condition of the port industry, the Board of Commissioners expresses its appreciation for the Board of Directors' performance that faced the macro challenges well. In 2018, the Board of Directors has succeeded in implementing digital ports that contributed to the Company's performance through increased efficiencies on the sea, terminal and back office side. The digital port breakthrough included autogate, Online TPS, and auto tally at container terminals, Terminal Operating System (TOS) based operations, the Marine Operating System (MOS), and Vessel Management System (VMS) in a number of port branches. The Company also initiated an Integrated Billing System (IBS), which includes e-registration applications, e-booking, e-tracking and tracing, e-payment, e-billing, and e-care, to integrate port service systems in all operational ports.

The company also initiated a direct call program that allows large sized vessels to go directly to their destination port overseas without having to stop at another country's port. This direct call program directly links Indonesia with America, Europe, Australia, East Asia and Southeast Asia.

Berbagai inisiatif strategi tersebut telah berimplikasi terhadap kinerja Perseroan. Hasil evaluasi KPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2018 secara keseluruhan melampaui yang telah ditargetkan, yaitu sebesar 101,26%. Pencapaian KPI Perusahaan juga dibarengi dengan peningkatan realisasi tingkat kesehatan perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, skor kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk realisasi tahun 2018 berjumlah 88,00 sehingga kesehatan berada dalam kategori SEHAT (AA), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,60.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas kinerja Direksi dalam pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Menunjuk Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, secara umum pencapaian tahun 2018 atas Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal telah memenuhi yang ditargetkan, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. *Return on Asset (ROA)* mencapai 4,73% melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 4,22%. *Return on Equity (ROE)* sebesar 17,31 melebihi yang telah ditargetkan yaitu sebesar 16,42%. Dari sisi efisiensi, Perseroan juga telah mampu mencapai target *Net Income Margin* yaitu sebesar 21,25% melampaui yang ditargetkan sebesar 17,58%.

Dengan berbagai capaian kinerja yang baik di 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan telah sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan Aspirasi Pemegang Saham. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi di tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan arahan agar kedepannya Direksi tetap mempertahankan kinerjanya dengan mengatasi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait peningkatan pendapatan operasional.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa strategi Perseroan telah dijalankan dengan efektif. Mekanisme pengawasan khususnya dilakukan melalui Rapat Gabungan dan Rapat Pembahasan Masalah Strategis, serta berbagai

These strategic initiatives will have implications on the Company's performance. The PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) KPI results in 2018 achieved 101.26% of the target set. In addition the Company's health level increased. Based on the Republic of Indonesia Minister of Finance Decree Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Rating of State-Owned Enterprises, the performance score for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2018 reached 88.00 in the HEALTHY category (AA), an increase from the previous year's 86.60.

The Board of Commissioners also expresses its appreciation for the performance of the Board of Directors in fulfilling the Shareholders / Capital Owners Aspirations. Based on the Minister of SOEs Letter to SOEs' Board of Directors / Commissioners / Supervisors No. S-487/MBU/08/2017 dated August 31, 2017 concerning the Shareholders / Capital Owners Aspirations for Preparing the Company Work Plan and Budgets in 2018, in general the 2018 targets have been achieved, and have increased from the previous year. The Return on Assets (ROA) reached 4.73% more than the target of 4.22%. Return on Equity (ROE) reached 17.31% exceeding the target of 16.42%. The Company also achieved a Net Income Margin of 21.25%, exceeding the target of 17.58%.

Based on these good performance achievements in 2018, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors' performance in managing the Company has been in accordance with the Board of Commissioners' direction and the Shareholders' aspirations. In general, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors performance in 2018 was good, and hopes that the Board of Directors maintain this performance by focusing on a number of areas that still need to be improved, specifically related to the increase in operating income.

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION OF STRATEGY IMPLEMENTATION

To ensure the Company's strategies are followed effectively, the Board of Commissioners conducts supervision, primarily through Joint Meetings and Strategic Issues Discussion

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

Evaluasi dan Arahan, khususnya terkait dengan penyusunan dan monitoring pelaksanaan RKAP. Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang, baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu.

Beberapa pembahasan yang bersifat strategis pada tahun 2018 yang telah dilakukan antara lain pembahasan mengenai IPO Entitas Anak, pemberian *shareholder loan* kepada Entitas Anak, kajian pemanfaatan lahan, perubahan struktur organisasi, rencana penyaluran PKBL, pengembangan teknologi informasi, permasalahan hukum, serta tindakan-tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan memerlukan persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan telah mendorong peningkatan kinerja Perseroan di 2018. Dewan Komisaris akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perseroan, khususnya terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015-2019.

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2018, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya. Pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis dengan Direksi yang antara lain membahas mengenai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pengembangan sistem informasi, manajemen SDM, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, serta rencana strategis Perseroan lainnya.

Dewan Komisaris juga telah memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan yang antara lain meliputi:

- a. Evaluasi usulan RKAP Tahun 2019 dan Tanggapan Dewan Komisaris;

Meetings, as well as through Evaluations and Directives, particularly related to the RKAP preparation and monitoring. In addition, the Board of Commissioners conducts work visits to branches to monitor performance, and for specific purposes.

Some strategic discussions in 2018 that have been carried out included discussions on Subsidiaries' IPOs, granting shareholders loans to subsidiaries, land use studies, organization structure changes, PKBL distribution plans, information technology development, legal issues, and Board of Directors' actions requiring approvals / recommendations from the Board of Commissioners.

In most cases, the Company's strategy was well prepared and implemented and drove the Company's performance in 2018. The Board of Commissioners will continue to increase the effectiveness of its supervision of the Company's strategies, especially in the face of changes in the business environment that affect the Company's performance, particularly those strategies related to the 2015-2019 Long-term Company Plan.

FREQUENCY AND PROCEDURES FOR GIVING ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

To provide direction to the Board of Directors, the Board of Commissioners uses several mechanisms, including Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Directors, Strategic Issues Discussion Meetings and evaluation, directives, responses and approvals mechanisms. 12 (twelve) Joint Meetings were held in 2018. In the meetings, among other matters, discussions were held concerning periodic company performance, reports from each Directorate, follow-up of previous meetings, as well as several other agendas. In 2018 the Board of Commissioners' Strategic Issue Discussion Meetings with the Directors, among other matters, included discussions on the National Strategic Projects, information system development, HR management, and customer service improvements, as well as other strategic Company plans.

The Board of Commissioners also delivered Evaluations / Directives / Responses / Agreements including:

- a. Evaluating proposed 2019 RKAP and the Board of Commissioners' Response;

- b. Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan;
- c. Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang:
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal Perseroan;
 - Manajemen Risiko Perseroan;
 - Sistem teknologi Informasi Perseroan;
 - Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Pekerja;
 - Kebijakan Akuntansi dan Pentusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK;
 - Pengadaan dan Pelaksanaan.
- d. Kebijakan Mutu pelayanan dan Pelaksanaan.
- e. Evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang realisasi Triwulan I, II, dan III yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
- f. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi, serta Direksi dan Komisaris Entitas Anak.
- g. Evaluasi kinerja Direksi telah dilaksanakan yaitu melalui tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan tahun buku 2017 serta tanggapan kinerja Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan I, II, dan III Tahun 2018;
- h. Tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018;
- i. Mengajukan usulan auditor eksternal. Berdasarkan hasil pemilihan KAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surya (EY) kepada Menteri BUMN sebagai RUPS IPC, untuk melakukan audit laporan keuangan dan laporan PKBL tahun buku 2018; dan
- j. Memberikan Tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah menetapkan surat tanggapan dan persetujuan atas usulan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan/persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Providing directives for changes in the business environment, expected to have a major impact on the company's business and performance;
- c. Evaluating and submitting directives concerning:
- Strengthening the Company's Internal Control System;
 - Corporate Risk Management;
 - Corporate Information technology systems;
 - Employee Career Development Policy and Implementation;
 - Accounting Policies and Preparation of Financial Statements in accordance with PSAK.
 - Procurement and its execution;
- d. Service quality and implementation policy
- e. Evaluating the 2018 RKAP implementation and preparing the Board of Commissioners' responses regarding the Quarter I, II and III realization for submission to the Shareholders;
- f. Evaluating proposals / recommendations to the GMS regarding candidates for Directors, as well as the Directors and Commissioners of Subsidiaries.
- g. Evaluating the Board of Directors' Performance to date through the Board of Commissioners' response to the Company's 2017 fiscal year performance and the Board of Commissioners' response to the performances in Quarter I, II, and III of 2018;
- h. Responding to the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for 2018;
- i. Proposing an external auditor. Based on the results of the KAP selection, the Board of Commissioners submitted the proposed appointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surya (EY) to the Ministry of SOE at the IPC GMS, to audit the financial statements and PKBL reports for fiscal year 2018; and
- j. Providing responses to matters related to the Board of Commissioners' main duties and functions in managing the Company. The Board of Commissioners in 2018 prepared response letters and approvals to Board of Directors' proposals based on the Articles of Association provisions regarding responses / approvals required from the Board of Commissioners.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners' Report

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Kunci keberhasilan usaha adalah adanya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi diharapkan untuk dapat melihat prospek usaha yang telah memperhitungkan berbagai faktor. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa prospek usaha telah dianalisis dengan baik oleh Direksi. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang ada di industri kepelabuhanan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan dalam merespon berbagai peluang tersebut.

Dalam industri kepelabuhanan saat ini dihadapkan pada berkembangnya ukuran kapal dan konsolidasi muatan kapal sehingga pelabuhan dihadapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terminalnya karena semakin besarnya kapal. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa transformasi yang dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2016 dengan target menjadi *World Class* di 2020 akan mampu mengatasi tantangan dan menangkap peluang yang ada di industri kepelabuhanan. Hal ini terlihat dari capaian-capaian baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun dan terlampauninya target-target kunci Perseroan secara berkelanjutan.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melakukan kegiatan usaha dibutuhkan mekanisme tata kelola yang baik, karena akan mendorong terpenuhinya hak Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya yang tercermin dari semakin meningkatnya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik senantiasa diterapkan secara efektif di Perusahaan. Beberapa mekanisme tata kelola yang baik yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pencegahan pelanggaran, khususnya dalam penerapan *whistleblowing system* (WBS).

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan pengendalian intern adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kehandalan laporan pelaporan

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The key to business success is long-term business continuity. Therefore, the Board of Directors is expected to recognize business prospects after taken into account various factors. The Board of Commissioners ensures that the business prospects have been analyzed by the Board of Directors, and to do this, the Board of Commissioners considers the various opportunities and challenges that exist in the port industry and the strengths the company has in responding to these opportunities.

The port industry is currently faced with the problems of ship size and ship cargo consolidation, so ports need to be able to increase their terminal capacity and capability due. This is both a challenge and an opportunity for the Company. The Board of Commissioners considers that the transformation carried out by the Company since 2016 targeting being *World Class* in 2020 will overcome the challenges and seize the opportunities in the port industry. This is evident from the achievements, both in terms of operational and financial performance, which continue to grow year on year and the Company's key sustainable targets.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Good governance mechanisms are needed when conducting business activities as they encourages the fulfillment of shareholders and other stakeholders' rights, and are reflected in the increasing Company performance. Therefore, the Board of Commissioners emphasizes that good governance principles are applied effectively in the Company. The governance mechanisms that are of major concern to the Board of Commissioners include the internal control system, and the implementation of a whistleblowing system (WBS) to prevent violations.

APPLICATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The purpose of the internal control is to improve effectiveness and efficiency in managing the Company's resources to achieve the Company's objectives. These include the reliability of financial reporting reports and compliance with

keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pengendalian intern telah berjalan secara efektif. Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern, dapat mendeteksi risiko lebih dini sehingga dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar.

Komponen utama sistem pengendalian internal Perusahaan yang terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*) telah berjalan dengan baik. Perseroan telah memiliki sistem pengendalian yang reliabel dan konsisten dalam menerapkannya.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Insan IPC dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Mekanisme WBS telah dikembangkan dengan nama "IPC Bersih" yang merupakan sebuah program nyata dari untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. Perseroan bersama PT Deloitte Konsultan Indonesia selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eskternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim "IPC Bersih" sebagai *counterpart*.

Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara aktif sebagai pengawas dalam penerapan WBS dan menjadi salah satu bagian penting dalam Komite "IPC Bersih". Dalam menjalankan perannya dalam Komite "IPC Bersih" Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit khususnya dalam melakukan proses investigasi.

Meskipun penerapan WBS telah berjalan baik, namun Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk lebih meningkatkan efektivitas sosialisasi mekanisme WBS, agar para *stakeholder* lebih termotivasi dalam menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

laws and regulations. The Board of Commissioners has the responsibility to ensure that internal control is carried out effectively. The Board of Commissioners' effective supervision of the internal control system helps detect risks early so as to prevent problems from growing.

The Company's internal control system is made up of five main interrelated elements, namely the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. The system is reliable and consistent and is functioning well.

APPLICATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

A Whistleblowing system (WBS) is required to strengthen the good corporate governance systems, and provides opportunities to all IPC personnel and other stakeholders to submit reports, with good intentions, any indications of violations of applicable ethical values, based on evidence that can be accounted for.

The WBS mechanism has been developed under the name "IPC Bersih", a program that is clean from fraudulent acts, corruption and extortion. The Company, with PT Deloitte Consultants Indonesia as partners, has implemented the WBS system to receive and monitor internal and external complaints, and to produce monthly reports to the "IPC Bersih" Team as a counterpart.

The Board of Commissioners plays an active role as supervisors in the WBS and is an important part of the "IPC Bersih" Committee. In carrying out its role in the Committee, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, especially for conducting investigation processes.

Although the WBS runs well, the Board of Commissioners has provided directives to further improve its effectiveness through socialization, so that stakeholders become more motivated in reporting violations that could harm the company.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018.
2. *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
3. Evaluasi kinerja SPI.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR COMMITTEES BELOW THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE ASSESSMENT BASIS

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees including:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Management Monitoring Committee

During 2018, the Board of Commissioners considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly.

The Audit Committee is a committee formed to help the Board of Commissioners supervise that the management of IPC is in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Audit Committee has carried out its duties well. During 2018, the Audit Committee held 37 (thirty seven) meetings and its tasks included:

1. Evaluating the KAP performance, and the appointment process of a KAP to audit the financial statements for fiscal year 2018.
2. Monitoring and evaluating follow-up findings of the external and internal auditors.
3. Evaluating the SPI performance.
4. Monitoring and evaluating the port branches

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to help the Board of Commissioners supervise the Nomination and Remuneration policies application for the Directors, Management Teams and employees. The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties well. During 2018, the Nomination and Remuneration Committee held 18 (eighteen) meetings and its tasks included:

1. Evaluating the proposals for prospective Directors for the Company and its Subsidiaries.
2. Evaluating the proposed remuneration.
3. Monitoring and evaluating the port branches

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi, *monitoring*, dan evaluasi penerapan manajemen risiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit manajemen risiko.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi cabang pelabuhan

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan jumlah rapat Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100% dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Perseroan, selama tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut.

PERIODE 1 JANUARI – 22 JANUARI 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris IPC periode 1 Januari – 22 Januari 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

The Risk Management Monitoring Committee was established to improve the quality of supervision and advice from the Board of Commissioners regarding the Enterprise Risk Management (ERM). The Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties well. During 2018, the Risk Management Monitoring Committee held 23 (twenty three) meetings and its tasks included:

1. Evaluating and monitoring the application of risk management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Coordinating periodically with the risk management units.
3. Monitoring and evaluating the port branches

The Committees below the Board of Commissioners performance assessments form part of the Board of Commissioners' KPI, namely the criteria of effectively executing its duties, and the number of Committee meetings held. Based on these KPI performance measurements, all the Committees below the Board of Commissioners achieve the set KPI targets. All Committees carried out their tasks achieving 100%, and conducted their meetings achieving 120%.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

To meet the Company's developing needs, during 2018 there was 1 (one) change to the Board of Commissioners' composition.

PERIOD JANUARY 1 - 22, 2018

The IPC Board of Commissioners composition for the period January 1 – 22, January 2018 comprised 6 (six) people consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 4 (four) Commissioners. All members were domiciled within the IPC Head Office working area.

Nama Name	Jabatan Position
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen The President Commissioner concurrently serves as an Independent Commissioner
Montty Girianna	Komisaris Commissioner
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Djadmiko	Komisaris Commissioner
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner

PERIODE 22 JANUARI – 31 DESEMBER 2018

Berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-26/MBU/01/2018, Bapak R. Agus H. Purnomo diangkat sebagai Komisaris IPC. Maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD JANUARY 22 - DECEMBER 31, 2018

Based on the Ministry of SOEs decree Number SK-26/MBU/01/2018, Agus H. Purnomo was appointed as Commissioner of IPC. The IPC Board of Commissioners composition as at December 31, 2018 comprised 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners. All members were domiciled within the IPC Head Office working area.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen The President Commissioner concurrently serves as an Independent Commissioner
Montty Girianna	Komisaris Commissioner
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner
Djadmiko	Komisaris Commissioner
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner

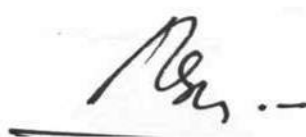
PENUTUP

Demikian Laporan kami sampaikan. Atas kepercayaan Pemegang Saham dan dukungan Direksi serta pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada khususnya kepada Direksi dan seluruh pegawai, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Berkat dedikasi dan profesionalitas kerja yang diberikan, Perseroan dapat menghasilkan kinerja yang cukup membanggakan. Dewan Komisaris berharap agar kerja sama yang efektif dapat senantiasa dipertahankan, guna memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

CLOSING

Accordingly, we submit our report. With the trust of the Shareholders and the support of the Board of Directors and other stakeholders, the Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities properly. In particular to the Board of Directors and all employees, the Board of Commissioners conveys its highest appreciation. Thanks to the dedication and professionalism of the work provided, the Company has produced a proud performance. The Board of Commissioners hopes that this effective cooperation can always be maintained, in order to provide benefits to the nation and the state.

Jakarta, April 2019
Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners



TUMPAK H. PANGGABEAN
Komisaris Utama / Komisaris Independen
President Commissioner / Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report



ELVYN G. MASASSYA

Direktur Utama
President Director

Terkait dengan kinerja operasional, secara keseluruhan kunjungan kapal pada tahun 2018 baik dalam satuan Unit mengalami kenaikan sebesar 3,28% atau 35.771 Unit dari anggaran 34.636 unit dan untuk GT kapal mencapai 224.298.619 GT atau mengalami kenaikan 11,90% dari anggaran yaitu 200.445.020 GT. Realisasi arus barang dalam kemasan tahun 2018 untuk satuan ton sebesar 61.971.277 dalam satuan *box* mencapai 5.655.416 dan dalam satuan TEU's sebesar 7.640.312 TEU's, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

For operational performance, overall ship visits in 2018 increased by 3.28% or 35,771 units against the target of 34,636 units, and ship GT reached 224,298,619 GT, an increase of 11.90% against the target of 200,445,020 GT. Packaged goods in 2018 reached 61,971,277 tons in 5,655,416 box units, and TEU's units reached 7,640,312 TEUs, an increase compared to the previous year.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya, sehingga kinerja Perseroan di tahun 2018 secara umum telah sesuai dengan harapan Pemegang Saham. Bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan tugas kepengurusan Perseroan yang telah dilaksanakan di tahun 2018.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya seluruh pegawai atas kontribusi yang telah diberikan, sehingga Perseroan mampu menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2018. Capaian kinerja di tahun 2018 tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dan industri serta pemilihan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang efektif.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Meskipun perekonomian dunia berada dalam kondisi yang stagnan namun, perekonomian nasional di tahun 2018 masih bertumbuhan sebesar 5,17%, atau sedikit meningkat dibanding pertumbuhan di tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%. Sementara itu, defisit transaksi berjalan pada triwulan IV 2018 tercatat 9,1 miliar dolar AS atau 3,57% dari PDB, sehingga secara keseluruhan defisit transaksi berjangka pada tahun 2018 masih tetap berada dalam batas yang aman sebesar 2,98% dari PDB. Nilai tukar Rupiah menguat sehingga menopang berlanjutnya stabilitas perekonomian. Rupiah pada triwulan IV 2018, secara *point to point* menguat sebesar 3,63% dibandingkan dengan level akhir triwulan III 2018, ditopang Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat surplus. Inflasi di tahun 2018 tercatat 3,13% (YoY), lebih rendah dari tahun 2017, sebesar 3,61%. Terkendalnya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Bank Indonesia dan Pemerintah senantiasa memperkuat koordinasi kebijakan, guna menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil.

Seiring dengan stabilnya perekonomian nasional, industri kepelabuhanan dapat melanjutkan tren yang telah berlangsung pada beberapa tahun terakhir. Kapasitas kapal petikemas juga terus meningkat, sehingga mendorong pelabuhan-pelabuhan di dunia untuk terus berinovasi agar dapat melayani kapal dengan ukuran yang semakin besar, dan juga mengadopsi sistem terminal yang lebih modern. Selain itu, jumlah koneksi pelayaran *weekly loops*

Dear Shareholders and Other Stakeholders,

With praise and thanks to God Almighty, for His Grace, the Company's performance in 2018 has generally been in line with the Shareholders' expectations. Through this report, we submit the results of the Company management tasks conducted during 2018.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

The Board of Directors would like to thank all parties, especially all our employees for their contribution that has enabled the Company to deliver a good performance in 2018. The in 2018 performance achievements cannot be separated from the influence of the economy and industry as well as the selection and execution of effective strategic policies.

ECONOMIC REVIEW

Even though the world economy is in the condition of being stagnan but, the national economy in 2018 growing of 5.17%, a slight increase compared to the previous year's 5.07%, or the same time, the current account deficit by Q4 2018 had reached US\$ 9.1 billion, or 3.57% of GDP. However, for 2018 overall it remained within a safe limit of 2.98% of GDP. The Rupiah exchange rate strengthened to help sustain economic stability. In Q4 2018, the Rupiah strengthened by 3.63% compared to the end of Q3 of 2018, supported a balance of payments surplus. 2018 inflation reached 3.13% (YoY), lower than 3.61% in 2017. Controlled inflation is not independent from consistent monetary policies for directing inflation expectations, including maintaining appropriate fundamental exchange rate movements. Bank Indonesia and the Government follow strong policy coordination to keep inflation at a low and stable level.

Together with the stable national economy, the port industry continued the trend of recent years. The container ships' capacity continued to increase, ports throughout the world continued to invest to accommodate ships of a larger size, and adopted automated terminal systems. It is projected that there will be an increase in the number of shipping connections weekly loops from 7 (seven) to 12 (twelve) in East Asia and Southeast Asia by 2021. Therefore, amid the

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

diperkirakan akan naik dari 7 (tujuh) menjadi 12 (dua belas) di Regional Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2021. Maka dari itu, di tengah kondisi yang penuh tantangan dalam dunia kepelabuhanan, Indonesia dan Perseroan khususnya masih memiliki peluang untuk tumbuh.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri yang telah dilakukan, Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan. Sebagai bagian dari *Corporate Roadmap 2016-2020*, dengan target menjadi *World Class Port* di tahun 2020, tahun 2018 menekankan pada strategi *Establishment*. Strategi *Establishment* dilakukan setelah pengembangan dan penguatan bisnis selesai dilaksanakan di tahun 2017 dengan strategi "*Enhancement*". Fokus pada tahap *establishment* yaitu membuat strategi untuk mencapai peningkatan *volume growth*, *profitability growth* dan juga melakukan *holding establishment* guna pemantapan/perkuatan posisi *holding* Perseroan yang secara tidak langsung juga menguatkan entitas-entitas anak. Pada tahap ini, Perseroan fokus pada peningkatan jumlah pangsa pasar, jumlah pelanggan, efektivitas operasi di Cabang Pelabuhan, peningkatan produktivitas, optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional pelabuhan dan standarisasi operasi dan infrastruktur pelabuhan.

Untuk merealisasikan hal itu, Perseroan telah melaksanakan beberapa langkah. Pertama, IPC mentransformasi pelabuhan menjadi *smart port* atau *digital port* dengan menggunakan basis IT, termasuk dalam sistem operasionalnya. Transformasi ini menjadi prioritas Perseroan seiring dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan. Program *digital port* dan pemangkasan waktu tunggu bongkar muat peti kemas akan menjadi modal utama dalam mendukung program tol laut dan sekaligus menjadi langkah penting menuju *World Class Port*. Pada tahun 2018, Perseroan telah membuat terobosan dengan diimplementasikannya *digital port* pada lini darat dan laut, diantaranya yaitu implementasi *autogate*, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) *Online*, *Terminal Operating System* (TOS) dan *Auto Tally* di terminal peti kemas, penerapan *Marine Operating System* (MOS), serta *Vessel Management System* (VMS) pada sejumlah Cabang Pelabuhan.

Kedua, *E-Service*. Hadirnya pelayanan berbasis elektronik seperti *e-registration*, *e-booking*, *e-tracking and tracing*, *e-payment*, *e-billing*, dan *e-care*. Pelayanan-pelayanan

uncertainty that exists in the port world, Indonesia and the Company still have opportunities to grow.

STRATEGIC POLICIES

Based on economic and industrial analysis, the Company has established the necessary strategic policies. As part of the 2016-2020 Corporate Roadmap, targeting being a World Class Port by 2020, the 2018 emphasis follows a Business Establishment strategy. The Establishment strategy follows on from the business development and strengthening "Enhancement" strategy completed in 2017. After business development and strengthening, we will further develop the Company's business strategy to increase our volume growth, profitability growth and also establish a holding establishment to reinforce / strengthen our position as a holding company that will indirectly also strengthen the subsidiaries. At this stage, the Company is focused on increasing its market share, number of customers, effectiveness of operations at the port branches, increasing productivity, optimizing assets, increasing port operational efficiencies, and standardizing port operations and infrastructure to support the integrated port network program.

To realize this, IPC has taken several steps towards becoming a World Class Port. Firstly through IT, IPC is transforming its ports into smart ports or digital ports as a priority, accompanied by improvements to port infrastructure, and use of information technology in operational systems. The digital port program, and the reduction in container loading and unloading waiting times, will be a mainstay to supporting the sea toll and the first step towards becoming a World Class Port. In 2018, the Company made a breakthrough in its digital ports, including implementing *autogate*, *Online Temporary Storage* (TPS), and *auto tally* in container terminals, *Terminal Operating System* (TOS) based operations, *Marine Operating System* (MOS), and *Vessel Management System* (VMS) in a number of port branches.

Secondly, through *E-Service* that consists of electronic-based services such as *e-registration*, *e-booking*, *e-tracking and tracing*, *e-payment*, *e-billing*, and *e-care*. These services form

tersebut menjadi basis *Integrated Billing System* (IBS) yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I,II,III,IV (Persero) yang sekaligus menjadi implementasi program Kementerian BUMN.

Ketiga, Peningkatan Pelayanan, salah satunya melalui upaya merealisasikan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *Transshipment Port*. IPC telah berhasil merealisasikan kerjasama dengan CMA-CGM untuk menghubungkan Indonesia dengan Amerika secara langsung, melalui pembukaan rute Jakarta – Los Angeles (*direct call*) dengan menggunakan kapal berukuran besar (kapasitas lebih dari 10.000 TEUs). Selain Amerika, kerjasama dengan CMA-CGM juga membuka rute baru SEANE yakni Jakarta-Eropa (*direct call*) yang sebelumnya belum pernah ada. IPC juga menambah layanan *direct call* ke Asia/China dengan *shipping line* COSCO, layanan *direct call* ke Asia/Vietnam dengan *shipping line* SM Lines, serta layanan *direct call* ke Korea Selatan oleh MSC. Inisiatif *Direct Call* tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari dukungan IPC pada upaya Pemerintah dalam merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Direct Call* telah memberikan implikasi bagi para eksportir berupa efisiensi biaya karena dapat secara langsung mengirimkan produk ke negara tujuan tanpa harus transit di pelabuhan negara lain.

Keempat, Pembangunan proyek strategis, yakni pembangunan terminal di Kalimantan Barat untuk menjadi *hub port* dan mendukung program tol laut yang telah dicanangkan Pemerintah, yakni Terminal Kijing. Selain Terminal Kijing, IPC juga mengupayakan proyek pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang merupakan upaya optimalisasi alur sungai dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang yang dapat menjadi penghubung antara pelabuhan dengan area *hinterland*. CBL diharapkan dapat mengurangi kongesti jalan di darat dan diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya. Proyek strategis lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Sorong di Papua Barat. Pelabuhan ini diproyeksikan untuk menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur sehingga jalur tol laut nasional yang dicita-citakan Pemerintah dari sisi barat hingga ke timur Indonesia dapat diwujudkan. IPC berencana untuk memulai pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong dengan kapasitas 500.000 TEUs.

the basis for the *Integrated Billing System* (IBS) that will be integrated into the port service systems at ports operated by PT Pelabuhan Indonesia I,II,III,IV (Persero) and at the same time will become part of the Ministry of SOE program.

Thirdly, through Service Improvement efforts to realize the Tanjung Priok Port Branch as a *Transshipment Port*. IPC has successfully collaborated with CMA-CGM to directly connect Indonesia and the USA, resulting in the opening of the Jakarta - Los Angeles (*direct call*) route using large-sized ships (capacity of more than 10,000 TEUs). In addition to the USA, in collaboration with CMA-CGM, a new SEANE route has been opened, namely Jakarta-Europe (*direct call*) that had never before existed. IPC has also added *direct call* services to Asia / China with the COSCO shipping line, *direct call* services to Asia / Vietnam with shipping line SM Lines, as well as *direct call* services to South Korea by MSC. The *Direct Call* initiative was also carried out as part of IPC's support for the Government's efforts to realize Indonesia as a World Maritime Axis. *Direct Call* has implications for exporters in the form of cost efficiency as they can now directly send products to destination countries without having to transit in other countries' ports.

Fourthly, the strategic project development, specifically constructing the Kijing Terminal in West Kalimantan as a hub port to support the sea toll program that has been launched by the Government. In addition to the Kijing Terminal, IPC is also looking to develop the Cikarang Bekasi Laut (CBL) Canal project in an effort to optimize river channels using barges as an alternative mode of goods transportation to link the port and the hinterland area. CBL is expected to reduce congestion on land and is expected to have an impact on time and cost efficiencies. Another strategic project is the construction of the Sorong Port in West Papua. This port is projected to become a hub port in Eastern Indonesia so that the Government's plan to link the west to the east of Indonesia through a national sea toll road can be realized. IPC plans to start construction of Phase I of the Sorong Port with a capacity of 500,000 TEUs.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Catatan positif lainnya adalah telah direalisasikannya 8 (delapan) kerjasama *Sister Port* yaitu antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, dan Port of Townsville. Lingkup kerja sama dari *Sister Port* diantaranya adalah terkait *sharing knowledge*, kerja sama bisnis, *internship program*, *benchmarking*, pertukaran informasi, dan potensi kerja sama lainnya dalam rangka memperluas jaringan di sektor maritim dan logistik.

Di samping itu, penguatan entitas induk juga menjadi fokus tahun 2018. Langkah Perseroan dalam hal ini diantaranya adalah dengan standarisasi operasi dan infrastruktur pelabuhan guna mendukung *integrated port network*, *subsidiaries expansion*, *implementasi Pelindo Incorporated*, kerja sama dengan kawasan industri, serta pembangunan *Container Terminal 2*, *Container Terminal 3*, Produk Terminal 1 dan Produk Terminal 2 New Priok Port. IPC terus memberikan dukungan penuh untuk sektor-sektor prioritas negara, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang strategis serta program pemerintah di bidang kemaritiman.

PENCAPAIAN TARGET

Hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan strategis telah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan. Secara umum, Perseroan telah mencapai kinerja melampaui yang ditargetkan. Berdasarkan hasil laporan keuangan IPC tahun buku 2018 (*audited*), Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih tahun 2018 sebesar Rp2,43 triliun atau 18,33% lebih tinggi dari RKAP dan 10,20% meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Demikian juga EBITDA, tahun 2018 tercapai sebesar Rp4,17 triliun, 1,40% di atas RKAP dan 3,48% lebih tinggi dari realisasi Tahun 2017. Sementara itu, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat kita pertahankan sebesar 70,00% atau 2,28% lebih baik dari target 2018. Efisiensi ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Perseroan telah mendapatkan manfaat yang tinggi dari penerapan digitalisasi pelayanan pelabuhan karena telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan operasional. Pada sisi aset, berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2018 (*audited*), nilainya menunjukkan tren positif yaitu tercatat sebesar Rp51,43 triliun atau naik 8,92% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp47,22 triliun.

Another positive has been the realization of 8 (eight) *Sister Port* collaborations, namely Tanjung Priok Port working together with the Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, and Port of Townsville. The scope of cooperation with the *Sister Ports* includes knowledge sharing, business cooperation, internship programs, benchmarking, information exchange, and other potential cooperations to expand the maritime and logistics sector network.

In addition, strengthening the holding company was a focus in 2018. The Company's steps in this regard included standardization of port operations and infrastructure to support integrated port networks, subsidiary expansion, implementation of Pelindo Incorporated, cooperation with industrial estates, and construction of *Container Terminal 2*, *Container Terminal 3*, *Terminal 1 Products*, and *New Priok Port Terminal 2 Products*. IPC continues to provide full support for the country's priority sectors, especially for strategic long-term infrastructure and investment development and government programs in the maritime sector.

TARGET ACHIEVEMENTS

The result of implementing the strategic policies has had a positive impact on the Company's performance. In general, the Company's performance has exceeded its targets. Based on IPC's 2018 financial statements (*Audited*), the company recorded a Net Profit of Rp2.43 trillion or 18.33% higher than the RKAP target, and a 10.20% increase compared to the previous year. Likewise in 2018 EBITDA increased 3.48% compared to 2017 reaching Rp4.17 trillion, 1.40% above the RKAP target. Meanwhile, we have maintained our Operational Cost to Operating Income (BOPO) ratio at 70.00% or 2.28% better than the 2018 target. This efficiency, and the ability to increase operating income, also shows how the Company has benefited greatly from implementing the port service digitalization. On the asset side, based on the Financial Position Report as of December 31, 2018 (*audited*), the results are also positive, with total assets reaching Rp51.43 trillion, up 8.92% from the previous year's Rp47.22 trillion.

Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas mencapai 7,6 juta TEUs, 7,57% lebih tinggi dari RKAP 2018 dan naik 10,33% dibandingkan 2017. Sedangkan untuk arus non peti kemas terealisasi sebesar 61,97 juta ton, 14,95% lebih rendah dari target 2018 namun mengalami kenaikan 8,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Kunjungan kapal menunjukkan tren positif baik dari sisi unit maupun GT kapal, masing-masing tercapai 3,28% dan 11,90% di atas target yaitu sebesar 35.771 unit dan 224,3 juta GT. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, maka capaian tersebut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,20% dari sisi unit dan 10,95% berdasarkan satuan GT. Kenaikan juga terjadi pada arus penumpang yaitu mencapai 714,93 ribu orang atau 39,72% di atas RKAP, naik 16,69% dibandingkan jumlah tahun sebelumnya.

Implementasi *digital port* juga telah mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal. Pada tahun 2018 Perseroan telah mendapatkan 10 (sepuluh) *award* terkait dengan digitalisasi, diantaranya yaitu; *Platinum Award pada Indonesia IT Award-I-2018 (IITA-I-2018)*; *The Best IT Data Governance, Data Security*, dan *Data Infrastructure* pada ajang *Best IT & Data Technology Governance*; serta *Top Digital Transformation Readiness 2018* dari *TOP IT & TELCO 2018*.

KENDALA/TANTANGAN YANG DIHADAPI SERTA STRATEGI PENYELESAIANNYA

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan juga tercermin dari upaya Perseroan dalam menghadapi kendala/tantangan dalam menjalankan usaha. Dalam upaya penerapan digitalisasi pelayanan pelabuhan secara menyeluruh, Perseroan menghadapi tantangan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaksanakan strategi peningkatan kompetensi SDM diantaranya melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang diidentifikasi berdasarkan *gap analysis*, termasuk di dalamnya pelatihan yang ditujukan untuk persiapan kompetensi sebelum datangnya peralatan baru. Perseroan juga melaksanakan program-program *internship* khususnya melalui kerja sama *sister port*. Di samping upaya peningkatan kompetensi *hard skill*, Perseroan juga senantiasa meningkatkan kesadaran para pegawai dalam menginternalisasikan nilai perusahaan yang disebut *CINTA (Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, dan Action)*. Hal ini dikarenakan implementasi *digital port* sangat terkait dengan penerapan tata kelola yang baik.

Looking at the operational aspect, container flow traffic reached 7.6 million TEUs, 7.57% higher than the 2018 RKAP target, and up 10.33% compared to 2017. While non-container flow reached 61.97 million tons, 14.95% lower than the 2018 target but still an increase of 8.55% compared to the previous year. Ship visits showed a positive trend both in terms of units and ship GT, reaching 3.28% and 11.90% above the targets of 35,771 units and 224.3 million GT respectively. Both these achievements also show an increase compared to last year of 3.20% from the unit side and 10.95% based on GT units. Increases also occurred in passenger flow that reached 714.93 thousand people or 39.72% above the RKAP target, and up 16.69% compared to the previous year.

The digital port implementation received appreciation from external parties, with the Company receiving 10 awards in 2018 related to digitalization, including; *Platinum Award* from the *Indonesia IT Award-I-2018 (IITA-I-2018)*; *The Best IT Data Governance, Data Security, and Data Infrastructure* at the *Best IT & Data Technology Governance* event; and *Top Digital Transformation Readiness 2018* from *TOP IT & TELCO 2018*.

CONSTRAINTS/CHALLENGES FACED AND THEIR SOLUTION STRATEGIES

The Company's success is also reflected in the efforts taken in facing the constraints / challenges that arose in running the business. In an effort to implement overall digitalization of the port services, the Company faced the challenge of preparing its human resources with the required competencies. In this regard, the Company followed a HR competency improvement strategy that including identifying training needs based on a gap analysis, and training aimed at competency preparation before the arrival of new equipment. The company also implemented a special internship programs in collaboration with its sister ports. In addition to increasing hard skill competencies, the Company is continuously raising the employees' awareness to the company value *CINTA (Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, and Action)*. This is because the digital ports implementation is very much related to the implementation of good governance.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Dengan menerapkan budaya perusahaan secara efektif maka implementasi terhadap budaya Perusahaan akan berjalan secara efektif. *Customer centric*, dapat diartikan bahwa bagi IPC yang merupakan perusahaan jasa *customer* merupakan prioritas utama dan perusahaan tidak akan berarti tanpa mereka. *Integrity*, tidak mungkin korporasi bisa hebat kalau tidak punya *integrity*. *Nationalism*, apa yang kita kerjakan oleh IPC ditujukan untuk kepentingan negara. *Teamwork*, tidak mungkin masing-masing orang bekerja sendiri, harus ada *teamwork* agar tujuan dapat tercapai. *Action*, bermakna bahwa tidak cukup hanya berbicara dalam tataran teori tetapi harus ada aksi nyata untuk menggapai tujuan.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERSEROAN

Beberapa sumber memperkirakan bahwa di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global masih dalam kondisi stagnan di tengah laju pertumbuhan ekonomi negara maju yang melambat. Seiring dengan hal tersebut, laju pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diperkirakan melambat, dari 5,1% di tahun 2018 menjadi 4,7% di tahun 2019. Risiko perekonomian global ke depan masih akan bersumber dari langkah kebijakan yang diambil oleh negara-negara utama dunia. Selain proteksionisme yang dapat berujung pada semakin merosotnya tingkat perdagangan internasional serta kemungkinan perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok, pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan juga dapat menciptakan sentimen negatif dan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan.

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian nasional diprediksi akan cukup stabil dan masih memberikan peluang pertumbuhan di 2019. Sebagai salah satu komponen pertumbuhan, ekspor diperkirakan akan terpengaruh dari sentimen eksternal yaitu perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tetap tumbuh meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya, sehingga menjadi tantangan dalam kinerja ekspor nasional. Pertumbuhan ekspor tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,6%. Sedangkan pada sisi impor, adanya tren kebutuhan konsumsi dan investasi dalam negeri yang tumbuh lebih tinggi dari perkiraan membuat proyeksi impor tumbuh sebesar 7,4%, dimana hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Kedua tren dalam aktivitas ekspor dan impor merupakan

Applying a corporate culture will ensure it runs effectively. Customer centric, means that to IPC, as a customer service company, customers are the top priority and the company can do nothing without them. Integrity, means it is impossible for the company to be great if it does not have integrity. Nationalism, means that what is done by IPC is aimed at the State's interest. Teamwork, means it is impossible for anyone to work alone, and there must be teamwork so that the goals can be achieved. Action, means that it is not enough just to talk theory but there must be real action to reach the goals.

COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS ANALYSIS

Many sources estimate that in 2019 the global economic growth will still be stagnant amid the slowing pace of economic growth in developed countries. As a result, the world trade volume growth is also expected to slow down, from 5.1% in 2018 to 4.7% in 2019. Going forward, the risk to the global economy will still stem from policy measures taken by major world countries. In addition to protectionism, which could lead to a decline in the level of international trade, and the possibility of a US-China trade war, tightening monetary policies faster than expected could also create negative sentiment and high volatility in the financial market.

Amid the slowing world economic growth, Indonesia's national economy is predicted to be quite stable and still provide opportunities for growth in 2019. As one component of growth, exports are expected to be affected by external sentiment, namely the estimated growth in world trade volume that although continuing to grow will not be as high as the previous year. This will become a challenge to the national export performance. Export growth in 2019 is targeted at 6.6%. Meanwhile on the import side, the trend for higher domestic consumption and investment growth sees the import growth projected to be 7.4%. This will create a challenge for Indonesia and its ability to maintain its balance of trade position. The two trends in export and import activities create opportunities for the port industry as it facilitates the

kesempatan bagi industri kepelabuhanan untuk dapat mengambil peran dalam memfasilitasi pergerakan arus barang, sekaligus menunjukkan bahwa terdapat prospek yang baik pada 2019. Terlebih lagi, dengan posisi Indonesia yang berada di Asia Tenggara yang merupakan kawasan dengan pertumbuhan peti kemas yang relatif tinggi yaitu sebesar 10% pada akhir tahun 2018.

Dalam menangkap peluang tersebut, berbagai strategi telah dipersiapkan dan mulai dilaksanakan, khususnya strategi digitalisasi pelayanan pelabuhan. Di sisi lain, Perseroan memiliki kinerja keuangan yang cukup kuat, sehingga Perseroan optimis, bahwa prospek usaha Perseroan kedepannya akan berada pada arah yang positif.

Faktor penting lainnya terkait dengan prospek usaha adalah adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan poros maritim terkemuka di dunia. IPC sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan terus melakukan upaya dengan cara ekspansi bisnis untuk mendukung realisasi target Pemerintah tersebut. IPC juga aktif mendukung program Pemerintah melalui Program Tol Laut yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dari kawasan barat hingga timur Indonesia melalui jalur laut. IPC berinvestasi dalam pembangunan beberapa pelabuhan yang menjadi proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar pulau di Indonesia, memperkuat jaringan pelayaran, menumbuhkan perekonomian di daerah dan memangkas biaya transportasi laut.

Untuk pengembangan pelabuhan, pada tahun 2018 beberapa proyek yang akan menjadi fokus IPC adalah melanjutkan Pembangunan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat yang merupakan ekstensi dari Pelabuhan Pontianak, Proyek Pembangunan *Inland Waterways* Kanal CBL (Cikarang Bekasi Laut), dan Pembangunan Pelabuhan Sorong di Papua Barat yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur.

Kami optimis dengan fondasi yang telah disiapkan pada fase *establishment* di tahun 2018, IPC dapat meneruskan kinerja positif IPC dan mensukseskan tahun 2019 sebagai fase *sustainable superior performance* sebagai landasan memasuki fase *World Class Port* pada tahun 2020.

movement of goods flows, and demonstrates that there will be good prospects in 2019. Moreover, Indonesia is positioned in Southeast Asia, an area that saw relatively high container growth at 10% at the end of 2018.

To capture these opportunities, various strategies have been prepared and have started to be implemented, specifically the port digitalization strategy. In addition, the Company had a strong financial performance, so the Company is optimistic, that its future business prospects will be in a positive direction.

Another important factor related to business prospects is the desire of President Joko Widodo to make Indonesia a country with the world's leading maritime axis. IPC as a company engaged in port management continues to expand its business to support the realization of the Government's targets. IPC also actively supports the Government programs through the Sea Toll Program that aims to strengthen national connectivity from western to eastern Indonesia by sea. IPC has invested in the construction of several ports that are national strategic projects to facilitate inter-island connectivity in Indonesia, strengthen shipping networks, grow the economy in the regions, and cut sea transportation costs.

For port development, in 2019 IPC's focus projects will include continuing construction of the Tanjung Priok Port Container Terminal, Construction of the Kijing Terminal in West Kalimantan as an extension of Pontianak Port, the Inland Waterways Canal CBL Development Project (Cikarang Bekasi Laut), and the Sorong Port Development in West Papua that is projected to be a hub port for Eastern Indonesia.

We are optimistic that with the foundations laid in the establishment phase in 2018, IPC will continue its positive performance and succeed in 2019 following the sustainable superior performance phase as the foundation for entering the World Class Port phase in 2020.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI 2018

Seluruh proses bisnis di Perusahaan wajib memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Kami percaya bahwa dengan penerapan GCG maka peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan dapat terwujud.

IPC memiliki komitmen terhadap penerapan GCG di seluruh lini Perseroan, tidak hanya di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan namun juga termasuk di seluruh Entitas Anak. Perseroan memiliki sebuah *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017-2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selaras dengan Rencana Strategis Perseroan, *Roadmap* GCG disusun untuk jangka panjang. Penyusunan *Roadmap* GCG IPC 2017-2020 ini dilakukan untuk menentukan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola yang dapat mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan manfaat bersama dengan *stakeholder* (*shared value*). *Roadmap* GCG dengan seluruh kelengkapannya harus menjadi rujukan seluruh Insan IPC dalam menjalankan bisnis. *Roadmap* GCG juga ditujukan untuk semakin meningkatkan kesadaran kepada seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal tentang pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan adanya *Roadmap* GCG ini, *stakeholder* dapat memahami komitmen serta posisi IPC dalam menegakkan bisnis yang beretika.

Sejak disahkan, *Roadmap* GCG ini telah berjalan dengan baik. Sebagian hasil dari pelaksanaan *Roadmap* GCG 2017-2020 sudah dapat dirasakan sebagai sebuah capaian jangka pendek (*quick win*), di antaranya yaitu; telah terbentuknya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *Roadmap* penyempurnaan GCG); meningkatnya nilai *assessment* GCG berdasarkan aturan Kementerian BUMN; dan diperolehnya penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

Di tahun 2018 yang merupakan fase kedua, implementasi GCG ditargetnya mencapai fase *Trusted* yaitu penerapan CGC yang unggul mendapatkan kepercayaan dari Pemangku Kepentingan sebagai dasar membangun kredibilitas dan reputasi. Fase ini diharapkan menjadi dasar dalam

CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT IN 2018

All business processes in the Company must follow the principles of good corporate governance (GCG). We believe that by adopting GCG, sustainable improvements in the Company's performance can be realized.

IPC is committed to applying GCG in all areas of the company, not only at the Head Office and Port Branches but also all Subsidiaries. The Company has established a Good Corporate Governance (GCG) Roadmap that was ratified by the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of the 2017-2020 Good Corporate Governance (GCG) Roadmap in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

In line with the Company's Strategic Plan, the GCG Roadmap was prepared for the long term. The 2017-2020 IPC GCG Roadmap determines the direction and long-term achievements in governance aspects that will support the achievement of business performance and create benefits for our stakeholders (*shared value*). The GCG Roadmap with all its features is a reference for all IPC Personnel in conducting business. The GCG Roadmap is also aimed at increasing the awareness of all stakeholders, both internal and external about the importance of Good Corporate Governance. Through this GCG Roadmap, stakeholders can understand the commitment and position of IPC in upholding its ethical business position.

Since it was approved, the GCG Roadmap has worked well. Some of the 2017-2020 GCG Roadmap results have already been felt as quick wins, including; the formulization of the governance structure and GCG infrastructure (guidelines and Roadmap for improving GCG); increased GCG assessment results based on the Ministry of SOE regulations; and receiving national-level awards in the field of GCG.

In 2018, which is the second phase, GCG is targeted to reach the *Trusted* phase, namely the application of superior CGC to gain trust from Stakeholders as a basis for building credibility and reputation. This phase is expected to be the basis for moving on to the next phase, namely the Sustainable and

pencapaian fase berikutnya yaitu fase *Sustainable* dan *Citizenship*. Pada tahun 2018, Perseroan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi *assessment* GCG untuk tahun buku 2017. Selain itu, IPC juga melaksanakan kegiatan lain guna peningkatan kualitas penerapan GCG diantaranya yaitu; penandatanganan Janji Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas, yang merupakan bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Hingga akhir 2018, persentase penandatanganan pakta ini oleh karyawan IPC mencapai 100%.

Perseroan juga telah melaksanakan survei pemahaman GCG tahun 2018 kepada Insan IPC, yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai organik. Hasil survei menunjukkan bahwa capaian skor pemahaman sebesar 78 (tujuh puluh delapan) dengan kategori Baik.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu reviu internal atas pedoman-pedoman GCG perusahaan, dengan mengacu pada kriteria dalam SK-16/S.MBU/2011. Berdasarkan hasil reviu, tersebut selanjutnya dilaksanakan pemutakhiran pedoman-pedoman yang ada.

Perkembangan tata kelola perusahaan penting lainnya di tahun 2018 adalah telah dikembangkannya digitalisasi dari sisi non-operasional sebagai upaya penerapan budaya GCG yaitu:

1. *I-Good*: merupakan sebuah *platform* yang memiliki 6 (enam) fungsi utama, yaitu monitoring pemenuhan aspek asesmen GCG, pelaksanaan asesmen mandiri (*self assessment*) GCG, *monitoring area of improvement asesmen* GCG, pelaksanaan sosialisasi GCG dan media survei pemahaman GCG serta pelaksanaan persetujuan Pakta Integritas dan Janji Kode Etik Insan IPC. Sehingga masing-masing proses yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual dapat dilakukan dengan tersistem/*digital*.
2. *I-Move*: suatu sistem yang mempermudah Insan IPC dalam mengakses beberapa fungsi administrasi dalam versi *smartphone* (android dan iOS).
3. *I-Save*: aplikasi *digital* yang *handle* manajemen surat keluar, surat masuk non elektronik, manajemen pengarsipan atas seluruh dokumen perusahaan. Fungsi

Citizenship phase. In 2018, the Company followed up on the fiscal year 2017 GCG assessment recommendations. In addition, IPC also carried out other activities to improve the quality of its GCG including; signing the Company's Code of Ethics Promise and the Integrity Pact, as joint commitments to compliance with GCG principles. By the end of 2018, 100% of IPC employees had signed this pact.

The Company also conducted a survey on GCG understanding in 2018 for IPC Personnel, including the Commissioners, Directors and organic employees. The survey results resulted in a comprehension score of 78 (seventy eight) in the Good category.

Other activities carried out included internal reviews of company GCG guidelines based on the criteria in SK-16/S.MBU/2011. The review results were then used to update the existing guidelines.

The development of other important corporate governance in 2018 included digitalization from the non-operational side in an effort to implement a GCG culture, including:

1. *I-Good*: a platform with 6 (six) main functions, namely monitoring compliance with GCG assessment aspects, implementing GCG self assessments, monitoring GCG assessment areas of improvement, implementing GCG dissemination and media survey on GCG understanding, and implementing the Integrity Pact and the IPC Code of Ethics Promise. This enables each process that was previously carried out manually to be done systematically / digitally.
2. *I-Move*: a system that facilitates IPC Personnel in accessing several administrative functions using smartphones (android and iOS).
3. *I-Save*: a digital application that handles outgoing mail management, non-electronic incoming mail, archiving management for all company documents. The main

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

utama *I-Save* adalah integrasi dokumen manajemen, integrasi arsip manajemen, *document tracing, barcoding system, ERP-Integrated, digital reporting*.

4. *EPICS System (Enterprise Planning & Controlling)*: sebuah sistem informasi yang dibangun untuk melakukan perencanaan hingga eksekusi strategi dalam bentuk Rencana Kerja Manajemen (RKM). Sementara *Dashboard Kinerja IPC* adalah aplikasi untuk mengumpulkan data kinerja secara *online* dan terintegrasi.

Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik salah satunya tercermin pada adanya peningkatan skor *assessment* GCG. *Assesment* GCG tahun buku 2017 yang dilaksanakan di tahun 2018 menunjukkan skor 96,36, atau mengalami kenaikan skor sebesar 3,05 poin dari pencapaian di tahun buku sebelumnya sebesar 93,31. Sementara kami sampaikan pula, pencapaian skor GCG tahun buku 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebesar 98,30. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen Perseroan dalam penerapan GCG.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi yang terdiri atas 2 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko
2. Komite IPC Bersih

Selama tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan investasi dan risiko Perseroan. Selama tahun 2018, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite IPC Bersih merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas penerapan *whistleblowing system* di IPC. Selama tahun 2018, Komite IPC Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

function of *I-Save* is document management integration, management archive integration, document tracing, barcoding system, ERP-Integrated, digital reporting.

4. *EPICS System (Creative Planning & Controlling)*: an information system built to carry out planning and execution of strategies in the form of a Management Work Plan (RKM). While the IPC Performance Dashboard is an application to collect online and integrated performance data.

The improvements in the quality of good governance implementation are reflected in the increase in GCG assessment scores. The GCG assessment carried out in 2018 showed a score of 96.36, an increase of 3.05 points from the previous year's achievement of 93.31. While the 2018 fiscal year GCG score of 98.30 was carried over to 2019. This increase was generally due to an increase in the Company's commitment to implementing GCG.

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS AND THE ASSESSMENT BASIS

In carrying out its supervisory duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) committees including:

1. Investment and Risk Management Committee
2. IPC Bersih Committee

During 2018, the Board of Directors considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly.

The Investment and Risk Management Committee is a committee formed to help the Board of Directors in managing the Company's investments and risks. During 2018, the Investment and Risk Management Committee held 5 (five) meetings and carried out its duties well.

The IPC Bersih Committee is a committee formed to help the Board of Directors ensure the effectiveness of the whistleblowing system in IPC. During 2018, the IPC Bersih Committee held 6 (six) meetings and carried out its duties properly.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa kali perubahan komposisi Direksi. Perubahan dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi dan dasar pengangkatan Direksi selama periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI 2018 – 18 SEPTEMBER 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi IPC periode 1 Januari – 18 September 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

During 2018 there were several changes in the Board of Directors' composition. Changes were made to fulfill the Company's needs. The composition changes and basis for the Board of Directors' appointment during 2018 are outlined as follows.

PERIOD JANUARY 1, 2018 - SEPTEMBER 18, 2018

The number and composition of IPC's Board of Directors for the period January 1, - September 18, 2018 consisting of 7 (seven) people including 1 (one) President Director and 6 (six) Directors.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Director
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information System Director
Iman Rachman	Direktur Keuangan Finance Director
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum HR & Legal Director
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Management Director

PERIODE 19 SEPTEMBER 2018 – 25 NOVEMBER 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi IPC periode 19 September – 25 November 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur.

PERIOD SEPTEMBER 19, 2018 - NOVEMBER 25, 2018

The number and composition of IPC's Board of Directors for the period September 19 – November 25, 2018 consisting of 6 (six) people including 1 (one) President Director and 5 (five) Directors.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Director
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information System Director

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum HR & Legal Director
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Management Director

PERIODE 26 NOVEMBER 2018 – 31 DESEMBER 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi IPC periode 26 November – 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Pada Saat ini juga terdapat perubahan nomenklatur Direksi, sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK-295/MBU/11/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang akan berlaku efektif tanggal 07 Januari 2019.

PERIOD NOVEMBER 26, 2018 - DECEMBER 31, 2018

The number and composition of IPC's Board of Directors for the period November 26 – December 31, 2018 consisting of 7 (seven) people including 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. Also there was a change in the nomenclature of the Board of Directors, in accordance with a copy of the Ministry of State-Owned Enterprises PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-295/MBU/11/2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Duties Transfer and Appointment of Members of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Director, which became effective on January 7, 2019.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director
Rizal Ariansyah	Direktur SDM HR Director
Riry Syeried Jetta	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Bussiness Development Director

PENUTUP

Atas dukungan berbagai pihak, khususnya kepada seluruh pegawai, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih. Berkat dukungan yang diberikan, Perseroan telah mencatatkan kinerja yang baik di 2018. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan dan kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan arahnya dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus memantapkan komitmennya untuk meraih standar *World Class* dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

CLOSING

With the support of many parties, especially all employees, we, the entire Board of Directors, would like to thank you. Thanks to the support provided, the Company has recorded a good performance in 2018. Thanks also to the shareholders for the trust given and to the Board of Commissioners for their supervision and direction in running the management of the Company. Going forward, the Company will continue to strengthen its commitment to achieving World Class standards in port services

Jakarta, April 2019

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



ELVYN G. MASASSYA


Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018 telah di muat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Komisaris BOARD OF COMMISSIONERS



Tumpak H. Panggabean

Komisaris Utama-Komisaris Independen
President Commissioner-
Independent Commissioner



Djadmiko
Komisaris
Commissioner



Suaidi Marasabessy
Komisaris-Komisaris Independen
Commissioner-Independent Commissioner



R. Agus H. Purnomo
Komisaris
Commissioner



Montty Girianna
Komisaris
Commissioner



Kushari Suprianto
Komisaris
Commissioner



D. Andhi Nirwanto
Komisaris
Commissioner

Statement of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2018 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

We, the undersigned, testify that all information contained in the 2018 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been presented in its entirety and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This statement is hereby made in all truthfulness.

Direksi

BOARD OF DIRECTORS



Elvyn G. Masassya

Direktur Utama
President Director



Saptono R. Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Commercial and Business
Development Director



Prasetyadi

Direktur Operasi dan Sistem Informasi
Operations and Information
Systems Director



Dani Rusli Utama

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko
Technical and Risk Management Director



Widyaka Nusapati

Direktur Keuangan
Finance Director



Rizal Ariansyah

Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum
HR and Legal Director



Riry Syeried Jetta

Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan
Subsidiary Management Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

IPC DIDIRIKAN DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA KEPELABUHAN, SERTA OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI PERSEROAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG BERMUTU TINGGI DAN BERDAYA SAING KUAT UNTUK MENDAPATKAN/MENGEJAR KEUNTUNGAN GUNA MENINGKATKAN NILAI PERSEROAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP PERSEROAN TERBATAS.

IPC was established with the intent and purpose of conducting business in port services and operations, as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and / or services to obtain / pursue profits to increase the Company's value following the principles of a Limited Liability Company.



IDENTITAS PERUSAHAAN

Company Identity

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jenis/Badan Hukum Perusahaan <i>Type/Company Legal Entity</i>	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Jasa Kepelabuhan dan Logistik Port and Logistic Services
Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang dan Pelayanan Rupa-Rupa Ship Services, Cargo Services, and Other Services
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	5 Februari 1960 February 5, 1960
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	<p>Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi.</p> <p>Deed of Establishment Number 3 dated December 1, 1992, amended by Deed Number 4 dated May 5, 1998, both of which were made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta and amended by Deed of Amendment Number 2 dated August 15, 2008 and Deed Number 3 dated July 30, 2009, both of which were made before Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notary in Bekasi.</p> <p>Kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 12 tanggal 21 September 2012, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p> <p>Later amended by Deed of Amendment Number 12 dated September 21, 2012 which was made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with the latest amended by Deed of Amendment Number 3 dated August 2, 2013 which was made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.</p>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	Negara Republik Indonesia: 100% The Government of The Republic of Indonesia, 100%
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp4.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	Rp1.444.029.000.000
Data Jaringan Kantor <i>Office Network Data</i>	<p>1 Kantor Pusat 10 Wilayah Kerja 12 Kantor Cabang 17 Group Perusahaan yang terdiri dari: 14 Entitas Anak Perusahaan 2 Entitas Asosiasi 1 Joint Venture</p> <p>1 Head Office 10 Work Areas 12 Branch Offices 17 Subsidiaries 17 Company Group consisting of: 14 Subsidiaries 2 Associated Entities 1 Joint Venture</p>
Jumlah Pegawai <i>Total Employees</i>	9.092 (Termasuk Organik dan Non Organik, serta Entitas Anak) 9.092 (Including Organic and Non Organic, as well as Subsidiaries)
Total Aset <i>Total Assets</i>	Rp51.432.877.023.000

IDENTITAS PERUSAHAAN
 Company Identity

Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	EVP Sekretaris Perusahaan : Shanti Puruhita Email : corp_sec@indonesiaport.co.id
Alamat Kantor Pusat <i>Head Office Address</i>	Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 14310 Phone : (6221) 4301080 Fax : (6221) 43911704
Situs Web <i>Website</i>	Website : www.indonesiaport.co.id
Contact Address <i>Contact Address</i>	Corporate Secretary corp_sec@indonesiaport.co.id Investor Relation Email : investor.relations@indonesiaport.co.id Media Sosial Facebook : Pelabuhan Indonesia II /IndonesiaPort Twitter : @indonesiaport Instagram : @indonesiaportcorp Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC
Wilayah Kerja dan Pelabuhan <i>Operational Areas & Port Branches</i>	Terdapat 10 (sepuluh) wilayah kerja dan 12 (dua belas) pelabuhan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat 2. Cabang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 3. Cabang Pelabuhan Jambi, Jambi 4. Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan 5. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung 6. Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung 7. Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung 8. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 9. Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat 10. Cabang Pelabuhan Banten, Banten 11. Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat 12. Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta <p>10 (ten) operational areas and 12 (twelve) port branches, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Bayur Port Branch, West Sumatera 2. Pulau Baai Port Branch, Bengkulu 3. Jambi Port Branch, Jambi 4. Palembang Port Branch, Sout Sumatra 5. Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung 6. Panjang Port Branch, Lampung 7. Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung 8. Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta 9. Pontianak Port Branch, West Kalimantan 10. Banten Port Branch, Banten 11. Cirebon Port Branch, West Java 12. Sunda Kelapa Port Branch, DKI Jakarta
Entitas Anak <i>Subsidiaries</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) 2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) 3. PT Multi Terminal Indonesia (MTI) 4. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI, Tbk) 5. PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) 6. PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) 7. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT, Tbk) 8. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) 9. PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) 10. PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) 11. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) 12. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) 13. PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) 14. PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)
Entitas Asosiasi <i>Associated Entities</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) 2. PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)
Joint Venture <i>Joint Venture</i>	KSO Terminal Peti Kemas Koja (TPK KOJA)

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

PT Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut “IPC” dan “Perseroan”) pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum (“Perum”) Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, IPC tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. Namun demikian, IPC telah melakukan perubahan status perusahaan dari semula perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan sehingga nama IPC menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Perubahan ini efektif berlaku pada 19 April 2004 sesuai dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993.

PT Pelabuhan Indonesia II (hereinafter referred to as “IPC” and “Company”) was originally established as a Public Company (“Perum”) Pelabuhan II based on Government Regulation (“PP”) No. 15 of 1983 juncto PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise (“BUMN”) under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II changed its status to Limited Liability Company (PT), based on Imas Fatimah, S.H., Notarial Deed No. 3 dated December 1, 1992. The deed of establishment was approved by RI Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment by the Ministry of SOEs in 1998, the Company has come under its guidance. The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Shareholders Decision notarized in the Notarial Deed No. 03 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 concerning additional issued and fully paid capital in the Company. The Articles of Association amendment was notified to the RI Ministry of Law and Human Rights the Letter of Acceptance Notification No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Based on Deed No. 03, the Republic of Indonesia Government, represented by the Ministry of SOEs added Rp426,418,000,000 in equity to the Company, which was derived from the transfer of all the Republic of Indonesia’s shares to PT Pengerukan Indonesia in the context of restructuring PT Pengerukan Indonesia.

With the addition of the Republic of Indonesia’s shares, the Company’s issued and fully paid capital increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000.

INFORMATION ON NAME CHANGE

IPC has never made a name change since it was first established. However, IPC has changed the company status from a general public company to a Limited Liability Company so the name IPC changed to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). This change took effect on April 19, 2004 in accordance with the approval of the RI Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993.

BRAND PERUSAHAAN

Company Brand

IPC



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Adapun penjelasan dari *brand* Perseroan di atas adalah sebagai berikut:

1. Anak panah yang melesat di atas air atau horizon dan menjadi representasi dari konsep pergerakan Perusahaan yang dinamis.
2. Cahaya matahari pagi yang merepresentasikan perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh karyawan terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan Perusahaan.
3. Sisi biru logo menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis, serta fleksibilitas dari setiap komponen Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan.
4. IPC dengan tulisan abu-abu gelap merupakan *brand* yang merepresentasikan citra modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasi kepercayaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan.
5. "Energizing Trade. Energizing Indonesia" merupakan *tagline* yang mencerminkan pergeseran paradigma Perusahaan dari sekedar *Serving Indonesia Economic Growth* menjadi *Driving Indonesia Economic Growth*.

Company brand explanation:

1. A dashed arrow above the water or horizon represents a concept of the dynamic movement of the Company.
2. The sunrise represents the spirit of change, strength, optimism, and the pride of employees toward their company that drives them to work together to achieve the Company's goals.
3. The blue represents a dynamic new era for both the company and employees where all of the Company's elements move in a flexible way when facing challenges.
4. IPC's name written in dark grey font becomes a brand that represents a modern image, confidence, and professionalism as well as illustrating our trust to all Stakeholders.
5. "Energizing Trade. Energizing Indonesia" is a tagline that reflects of paradigm shift for the Company from *Serving Indonesia economic growth* into *Driving Indonesia Economic Growth*.

BIDANG USAHA

Business Fields

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar terakhir, IPC didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BUSINESS ACTIVITIES

Based on Article 3 paragraph 1 of the latest Articles of Association, IPC was established with the intention and purpose of conducting business in the field of port business services and operations, as well as optimizing the utilizing the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and / or services to obtain / pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

Kegiatan Usaha <i>Business Activities</i>	Sudah Dijalankan <i>Has been implemented</i>	Belum Dijalankan <i>Has not Implemented</i>
UTAMA <i>MAIN</i>		
Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal; <i>Port basins and water pools for traffic and vessels dock;</i>	✓	
Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal; <i>Services related to pilotage and vessel delays;</i>	✓	
Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , barang termasuk hewan (<i>general cargo</i>), dan fasilitas naik turunnya penumpang; <i>Docks and other facilities for anchoring, stevedoring, containers, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, goods including animals (general cargo), and facilities for passenger embarkation/debarkation facilities;</i>	✓	
Jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (<i>general cargo</i>), dan kendaraan; <i>Stevedoring services, containers, liquid bulk, general cargo and vehicles;</i>	✓	
Jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro; <i>Container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multi purpose bulk, passengers, public services, and Ro-Ro;</i>	✓	
Gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; <i>Warehouses and stockpiles and goods storage, transportation, equipment stevedoring, and port equipment;</i>	✓	
Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut; <i>Land for buildings and land and warehouses / buildings needed for smooth sea transportation;</i>	✓	
Penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah; <i>Provision of electricity, drinking water and waste disposal waste installations</i>	✓	
Jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan; <i>Fuel filling services for vessels and vehicles in the port environment;</i>		✓
Kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan; <i>Consolidation and distribution activities for goods including animals;</i>	✓	
Jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan; <i>Consultancy, education and training services related to the ports;</i>	✓	
Depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i> , fumigasi serta pelayanan logistik; dan <i>Container depots and repair, cleaning, fumigation and logistics services; and</i>	✓	

BIDANG USAHA
Business Fields

Kegiatan Usaha <i>Business Activities</i>	Sudah Dijalankan <i>Has been implemented</i>	Belum Dijalankan <i>Has not Implemented</i>
Kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Customs areas and temporary storage	√	
PENDUKUNG <i>SUPPORT</i>		
Jasa angkutan Transport services	√	
Persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan Rental and repair of equipment facilities	√	
Perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan Maintenance of ships and equipment in the ports	√	
Pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (<i>ship to ship transfer</i>) termasuk jasa ikutan lainnya <i>Freight</i> services (ship to ship transfer) including other follow-up services	√	
<i>Property</i> di luar kegiatan utama kepelabuhan Property outside the main port activities	√	
Kawasan industri Industrial areas	√	
Fasilitas pariwisata Tourism facilities	√	
Perhotelan Hospitality		√
Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhan Port consultants and surveyors services	√	
Jasa komunikasi dan informasi Information and communication services	√	
Jasa konstruksi kepelabuhan Port construction services	√	
Jasa <i>forwarding</i> /ekspedisi, jasa kesehatan Forwarding / shipping services, health services	√	
Perbekalan dan <i>catering</i> Supplies and catering	√	
Tempat tunggu kendaraan bermotor dan <i>shuttle bus</i> Motorized vehicle and shuttle bus parking area	√	
Jas penyelaman (<i>salvage</i>) Diving suits (salvage)	√	
Jasa <i>tally</i> dan jasa pas pelabuhan Tally services and port fitting services	√	
Jasa timbangan Weighing services	√	

BIDANG USAHA Business Fields

PRODUK DAN JASA

Sesuai dengan Akta Perseroan, produk/jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

PELAYANAN KAPAL

Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi:

- **Jasa Tambat** : Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat;
- **Jasa Pandu** : Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;
- **Jasa Tunda** : Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga; dan
- **Jasa Pelayanan Air, Sampah dan Limbah** : Jasa yang diberikan untuk pelayanan air, pengelolaan sampah dan limbah kapal

PELAYANAN BARANG

Pelayanan barang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi:

- **Dermaga** : Bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal
- **Gudang Penumpukan** : Suatu bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal;
- **Lapangan Penumpukan**: Sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menempatkan atau menumpuk petikemas atau barang lainnya yang disusun secara berencana baik barang yang akan dimuat ke kapal ataupun barang setelah dibongkar dari kapal;
- **Receiving/Delivery** : Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya

PRODUCTS AND SERVICES

In accordance with the Deeds of the Company, the Company's products / services include:

SHIP SERVICES

Ship service is a service for vessel operations from entry to and exit from the port. Ship services includes:

- **Anchorage Service**: Services provided for docked ships to carry out loading and unloading activities;
- **Pilotage Service**: Services provided for ships going in and out of the dock through the port channel, so that navigation can be carried out safely, orderly and smoothly for the safety of ships and the environment;
- **Towage Service**: Services provided by tugs to push or pull ships to or out of the dock; and
- **Fresh Water, Garbage and Waste Service**: Services provided for water services, waste management and ship waste

CARGO SERVICES

Cargo Services provides stevedoring services for ships for the delivery of their cargoes to the owners. Cargo services includes:

- **Berthing**: Buildings specifically designed at the port or a place for ships to be tethered or docked to carry out loading and unloading activities of goods and passengers
- **Storage Warehouse**: A building or closed place used to store items originating from ships, or to be loaded onto ships;
- **Storage Yard**: An open area within the terminal area used to place or stack containers or other items, arranged in a planned manner, for goods to be loaded onto ships, or for goods after being unloaded from ships;
- **Receiving/Delivery**: Moving goods from stockpiles in warehouses / stacking areas, onto vehicles at the warehouse / stacking gates or vice versa

PELAYANAN RUPA-RUPA

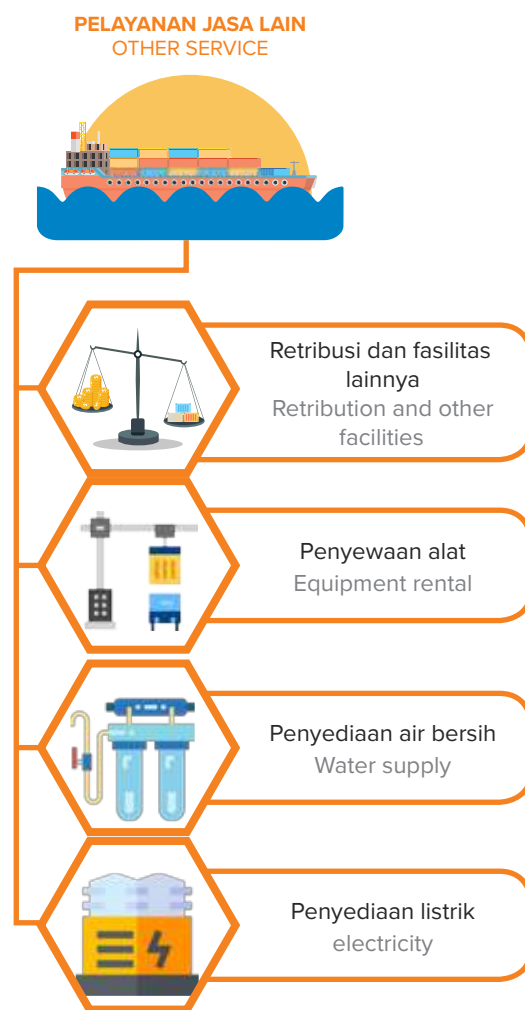
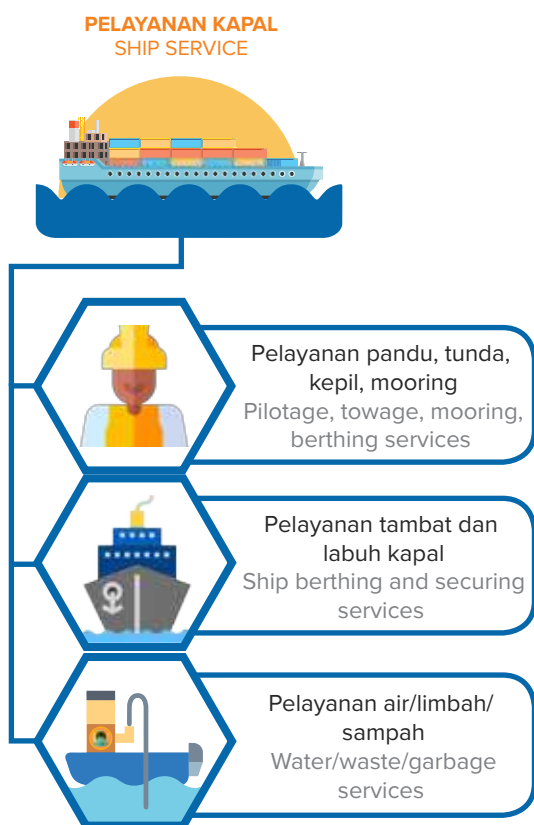
Pelayanan rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. Pelayanan rupa-rupa meliputi:

- Pas Pelabuhan : Biaya masuk area pelabuhan untuk perseorangan dan kendaraan bermotor;
- Jasa Pemeliharaan Alat-Alat Pelabuhan : Jasa yang diberikan, berupa persewaan *forklift*, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, motor boat dan alat pemadam kebakaran; dan
- Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik (TBAL): Merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

OTHER SERVICES

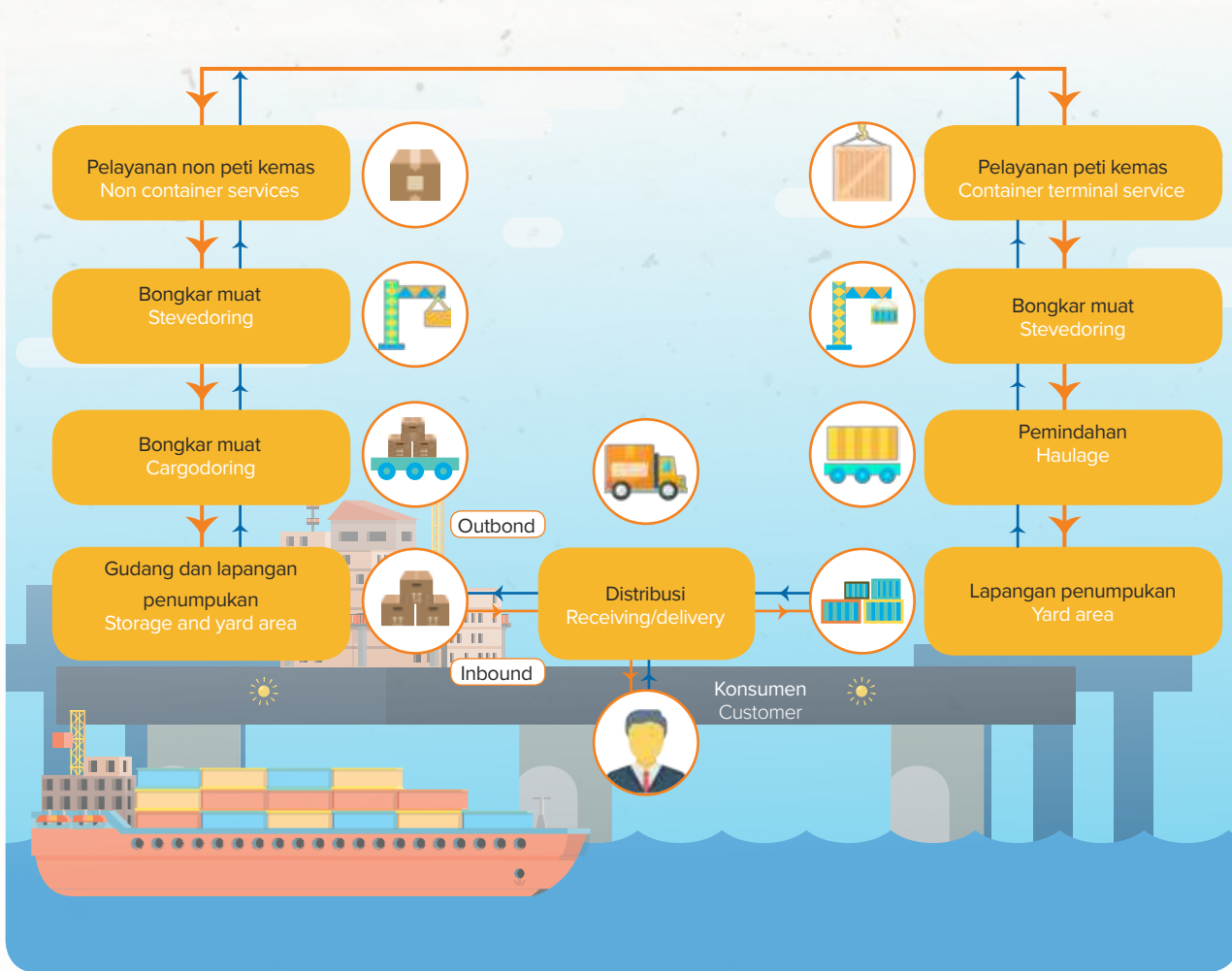
Other services cover services that support port activities. Other services includes:

- Port Pass: Cost of entering a port area for individuals and motorized vehicles;
- Port Equipment Maintenance Services: Services provided, in the form of forklift rental, faucets (land, buoyancy and electricity), tugboats, motorboats and fire extinguishers; and
- Land Rental, Buildings, Water & Electricity: A rental service for land, buildings, clean water and electricity.



BIDANG USAHA
 Business Fields

PELAYANAN BARANG DAN PETI KEMAS | GOODS AND CONTAINER SERVICES





PETA WILAYAH USAHA

Business Area Map

Saat ini Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 12 Kantor Cabang Pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

At present the Company has 1 Head Office and 12 Port Branch Offices spread throughout Indonesia.

Tabel Jaringan Kantor selama 5 tahun terakhir

Office Network for the past 5 years

Jenis Kantor <i>Type of Office</i>	2018	2017	2016	2015	2014
Kantor Pusat Head Office	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Pelabuhan Port Branch Office	12	12	12	12	12

Cabang Pelabuhan Utama <i>Main Port Branch</i>	Cabang Pelabuhan Madya <i>Medium Port Branch</i>	Cabang Pelabuhan Pratama <i>Small Port Branch</i>
1. Tanjung Priok; 2. Banten; 3. Panjang	4. Teluk Bayur; 5. Pontianak; 6. Palembang; 7. Bengkulu; 8. Jambi; 9. Cirebon	10. Pangkal Balam; 11. Sunda Kelapa; 12. Tanjung Pandan

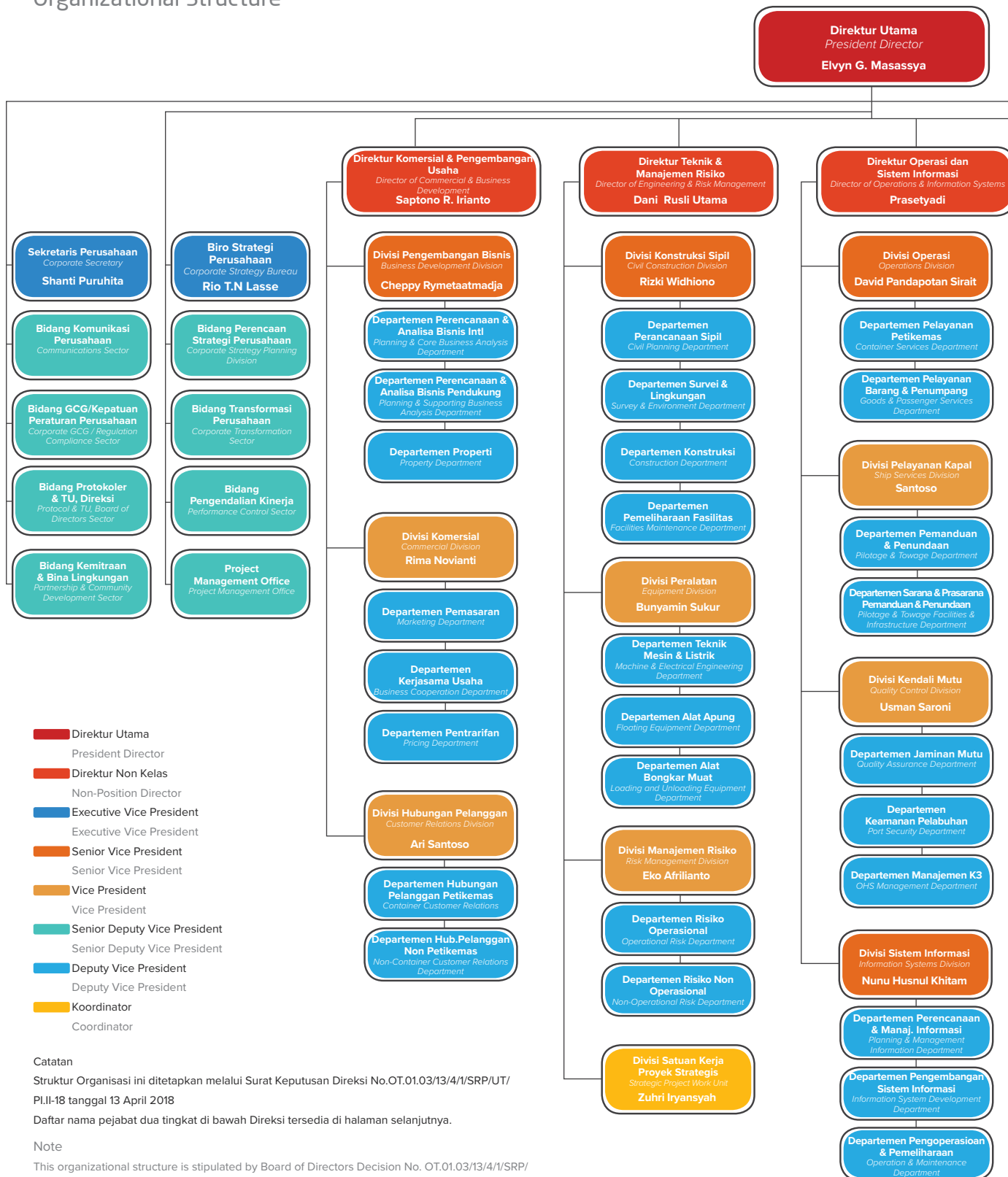


PETA WILAYAH USAHA
Business Area Map



STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

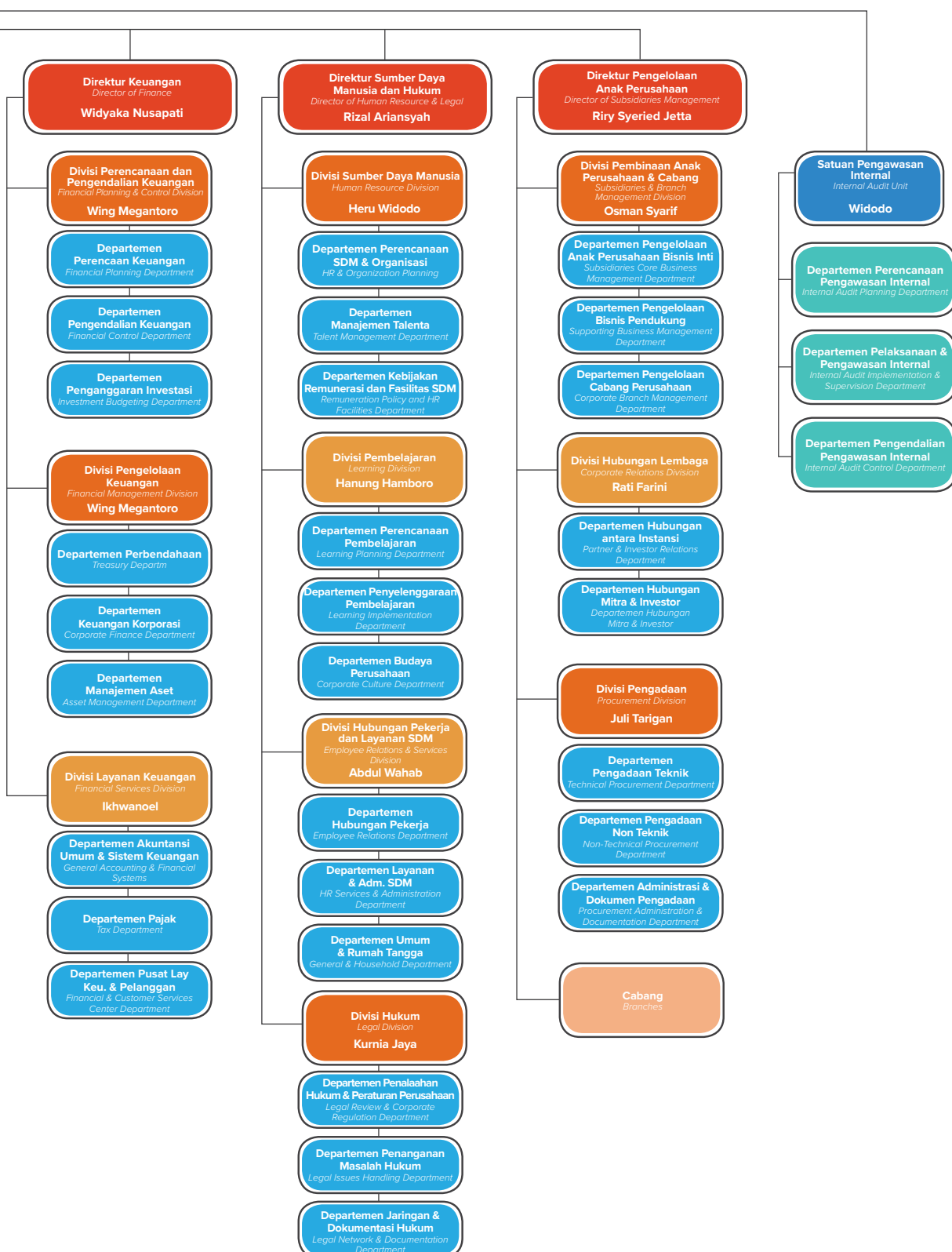


- Direktur Utama
President Director
- Direktur Non Kelas
Non-Position Director
- Executive Vice President
Executive Vice President
- Senior Vice President
Senior Vice President
- Vice President
Vice President
- Senior Deputy Vice President
Senior Deputy Vice President
- Deputy Vice President
Deputy Vice President
- Koordinator
Coordinator

Catatan
Struktur Organisasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 tanggal 13 April 2018
Daftar nama pejabat dua tingkat di bawah Direksi tersedia di halaman selanjutnya.

Note
This organizational structure is stipulated by Board of Directors Decision No. OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018
List of two-level- below official names under the Board of Directors is available on the next page

STRUKTUR ORGANISASI
 Organizational Structure



STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Tahun 2018, IPC mengalami perubahan struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/30/8/1/PI.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pada Direktorat SDM dan Hukum serta Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-295/MBU/11/2018 pada tanggal 26 November 2018, terkait perubahan nomenklatur jabatan Board of Director. Maka struktur organisasi IPC mengalami perubahan kembali, dengan perubahan terakhir yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan No. OT.01.03/7/1/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 07 Januari 2019. Adapun perihal susunan struktur organisasi Perseroan diuraikan di bawah ini:

In 2018, IPC change to the organizational structure was ratified through a PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree Number: OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018 concerning Amendment to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree Number HK.568/30/8/1/PI.II-16 dated August 30, 2016 concerning Management Organization and Administration in the HR and Legal Directorate and the Operations and Information Systems Directorate in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

As a follow-up to Ministry of SOEs Decree Number SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018, concerning changes to the Board of Directors position nomenclature. The IPC organizational structure changed, following the latest amendments determined by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree Number OT.01.03/7/1/1/PSO/UT/PI.II-19 dated January 7, 2019. The Company's organizational structure subject matter is described below.

Direktorat <i>Directorate</i>	Divisi <i>Division</i>
Direktorat Utama President Director	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Perencanaan Strategi Korporasi Corporate Secretary Division, Internal Audit Unit Division and Corporate Strategy Planning Division
Direktorat Komersial Commercial Directorate	Divisi Pemasaran, Divisi Manajemen Aset dan Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan Marketing Division, Asset Management Division and Business Alliances and Customer Relations Division
Direktorat Teknik Engineering Directorate	Divisi Konstruksi Sipil, Divisi Peralatan dan Divisi Manajemen Proyek Strategis Civil Construction Division, Equipment Division and Strategic Project Management Division
Direktorat Operasi Operations Directorate	Divisi Pelayanan Kapal, Divisi Pelayanan Terminal dan Divisi Sistem Informasi Ship Service Division, Terminal Service Division and Information System Division
Direktorat Keuangan Finance Directorate	Divisi Perencanaan & Pengendalian Keuangan, Divisi Pengelolaan Keuangan, Divisi Layanan Keuangan dan Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang Financial Planning & Control Division, Financial Management Division, Financial Services Division and Subsidiary & Branch Management Division
Direktorat Sumber Daya Manusia Human Resources Directorate	Divisi Strategi SDM, Divisi Pembelajaran SDM, Divisi Layanan SDM, Divisi Hukum dan Divisi Pengadaan HR Strategy Division, HR Learning Division, HR Services Division, Legal Division and Procurement Division
Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Directorate	Divisi Transformasi dan Pengembangan Bisnis, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kendali Mutu Business Transformation and Development Division, Risk Management Division and Quality Control Division

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers' Profiles

KANTOR PUSAT

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor OT.,01,03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 pada tanggal 13 April 2018. Adapun profil pejabat eksekutif dijelaskan sebagai berikut:

HEAD OFFICE

Based on the Board of Directors' Decree Number OT.,01,03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018, the executive officers' profiles are as follows:

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
DIREKTORAT UTAMA PRESIDENT DIRECTOR							
A DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY DIVISION							
	EVP Sekretaris Perusahaan EVP Corporate Secretary	Shanti Puruhita	KP.428/10/3/1/PI.II-17 Tanggal 10 Maret 2017 KP.428/10/3/1/PI.II-17 dated March 10, 2017	41 Tahun/ Years	S.H., M.B.A	Kuhne Logistics University, Hamburg	2014
	SDVP Komunikasi Perusahaan SDVP Corporate Communications	Fajar Setyono	KP.428/10/3/1/PI.II-17 Tanggal 30 Mei 2018 KP.428/10/3/1/PI.II-17 dated May 30, 2018	35 Tahun/ Years	M.Sc	Cardiff University, UK	2015
	SDVP GCG/Kepatuhan Peraturan Perusahaan SDVP GCG/ Company Regulations Compliance	Riawan	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	52 Tahun/ Years	Drs., M.B.A	Kuhne Logistics University, Hamburg	2017
	SDVP Protokoler & TU Direksi SDVP Board of Directors Protocol & Administration	Siti Nurrochmah	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017	34 Tahun/ Years	M.Sc	Shanghai Maritime University, PR China	2012
	SDVP Kemitraan & Bina Lingkungan SDVP Partnership & Community Development	Angga Iriano Nugroho	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017	35 Tahun/ Years	M.Sc	Shanghai Maritime University, PR China	2013
B DIVISI BIRO STRATEGI PERUSAHAAN CORPORATE STRATEGIC BUREAU DIVISION							
	EVP Biro Strategi Perusahaan EVP Corporate Strategic Bureau	Rio T.N Lasse	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016	45 Tahun/ Years	M.Sc.	The University New South Wales	1999
	SDVP Perencanaan Strategi Perusahaan SDVP Corporate Strategic Plan	Bobby Hardian	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	38 Tahun/ Years	S.E., Akt, CA, M.Sc.	Erasmus Universiteit Rotterdam	2011

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	SDVP Transformasi Perusahaan SDVP Corporate Transformation	Rizqi Wijayanto	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	38 Tahun/ Years	S.T., M.M	Universitas Gadjah Mada	2016
	SDVP Pengendalian Kinerja SDVP Performance Control	Pratiwi Karim	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	30 Tahun/ Years	S.T., M.Sc.	Plymouth University, UK	2013
	Koordinator Project Management Office Coordinator for Project Management Office	Budi Pratomo	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	40 Tahun/ Years	M.I.T	Queensland University	2008
C	DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION						
	EVP Satuan Pengawasan Internal EVP Internal Audit Unit	Widodo	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016	49 Tahun/ Years	Ir., M.Sc.	Netherlands Maritime University	2013
	SDVP Perencanaan Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Planning	Mintarso	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	54 Tahun/ Years	Ir.	STMIK Gunadarma	1992
	SDVP Pelaksanaan Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Implementation	Dhena Nugraha	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	44 Tahun/ Years	S.T., M.Sc., Mstr.,	Universitas Indonesia	2011
	SDVP Pengendalian Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Control	Risman	KP.10.02/9/8/3/SBP/ SUM/PI.II-17 Tanggal 09 Agustus 2017 KP.10.02/9/8/3/SBP/ SUM/PI.II-17 dated August 9, 2017	49 Tahun/ Years	S.E., M.M	Universitas Pancasila	2005
DIREKTORAT KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORATE							
A	DIVISI PENGEMBANGAN BISNIS BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION						
	SVP Pengembangan Bisnis SVP Business Development	Cheppy Rymetaatmadja	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	47 Tahun/ Years	S.T., M.M	Universitas Indonesia	2017

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
 Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Perencanaan & Analisa Bisnis Inti DVP Planning and Core Business Analysis	Dimas Rizky Kusmayadi	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	34 Tahun/ Years	M.Sc., M.H.	Universitas Indonesia	2017
	DVP Perencanaan & Analisa Bisnis Pendukung DVP Planning and Supporting Business Analysis	Arief Adhi Wibowo	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	48 Tahun/ Years	S.E., M.Sc.	World Maritime University	2005
	DVP Properti DVP Property	Aryo Kuncoro	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	41 Tahun/ Years	S.H., M.Sc.	World Maritime University	2011
B	DIVISI KOMERSIAL COMMERCIAL DIVISION						
	VP Komersial VP Commercial	Rima Novianti	KP.10.02/11/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 11 September 2017 KP.10.02/11/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 11, 2017	48 Tahun/ Years	S. Sos., M. Kom.	Universitas Indonesia	2005
	DVP Pemasaran DVP Marketing	Arya Adhiguna Sayogyo	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017	32 Tahun/ Years	S.T., M.M	Sekolah Tinggi Manajemen PPM	2015
	DVP Kerjasama Usaha DVP Business Cooperation	Vonny Oktaviana Sari	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	30 Tahun/ Years	S.T., M.Sc.	Erasmus University	2013
	DVP Pentarifan DVP Pricing	Moh. Taufik Hidayat	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017	41 Tahun/ Years	S.Tr., M.Sc.	Shanghai Maritime University	2012
C	DIVISI HUBUNGAN PELANGGAN CUSTOMER RELATIONS DIVISION						
	VP Hubungan Pelanggan VP Customer Relations	Ari Santoso	KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	45 Tahun/ Years	S.E., M.M., M.B.A	Renmin University	2012

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Hubungan Pelanggan Petikemas DVP Container Customer Relations	Yossianis Marciano	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	34 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2013
	DVP Hubungan Pelanggan Non Petikemas DVP NonContainer Customer Relations	Muhamad Hasan	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	49 Tahun/ Years	S. Kom	INS.II.SOSPOL Jakarta	1996
DIREKTORAT TEKNIK DAN MANAJEMEN RISIKO TECHNICAL AND RISK MANAGEMENT DIRECTORATE							
A DIVISI KONSTRUKSI SIPIL CIVIL CONSTRUCTION DIVISION							
	SVP Konstruksi Sipil SVP Civil Construction	Rizki Widhiono	KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	42 Tahun/ Years	S.T., M.Sc.	Kuhne Logistics University	2014
	DVP Perencanaan Sipil DVP Civil Planning	Siti Hadijah	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	35 Tahun/ Years	S.T., M.Sc.	UNESCOIHE, Delft Netherlands	2013
	DVP Survei & Lingkungan DVP Survey & Environment	Endra Sutanto	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	52 Tahun/ Years	S.T.	TRISAKTI	1993
	DVP Konstruksi DVP Construction	R. Apriyanto Kosindratno	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	36 Tahun/ Years	S.T., M.Sc.	UNESCOIHE, Delft Netherlands	2012
	DVP Pemeliharaan Fasilitas DVP Facilities Maintenance	Rikky Afrianto	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	42 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherlands Maritime University, Netherlands	2016
B DIVISI PERALATAN EQUIPMENT DIVISION							
	VP Peralatan VP Equipment	Bunyamin Sukur	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated 31 August 31, 2016	45 Tahun/ Years	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2014

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
 Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Teknik Mesin & Listrik DVP Machine & Electricity Engineering	Nurwahyudi Panca	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	44 Tahun/ Years	S.T	Universitas Indonesia	2002
	DVP Alat Apung DVP Floating Equipment	Mohammad Reza Alichsan	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017	43 Tahun/ Years	M.T.	Universitas Pancasila	2009
	DVP Alat Bongkar Muat DVP Loading and Unloading	Achmad Yoga Suryadarma	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	43 Tahun/ Years	M.Sc.	University Of Antwerp Belgia	2010
C	DIVISI MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT DIVISION						
	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	Eko Afrilianto	KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	43 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
	DVP Risiko Operasional DVP Operational Risk	Sumarman	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	48 Tahun/ Years	S.T	Universitas Muhammadiyah	1998
	DVP Risiko Non Operasional DVP Non Operational Risk	Basril Nofaris	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	45 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
D	DIVISI SATUAN KERJA PROYEK STRATEGIS STRATEGIC PROJECT WORK UNIT DIVISION						
	Koordinator Satuan Kerja Proyek Strategis Coordinator for Strategic Project Work Unit	Zuhri Iryansyah	KP.10.02/25/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 Tanggal 25 Agustus 2017 KP.10.02/25/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 dated August 25, 2017	49 Tahun/ Years	M.Sc.	UNESCO IHE	2011
	Deputi Koordinator Proyek Satuan Kerja Proyek Strategis Deputy Coordinator for Strategic Project Work Unit	Wahyu Pradityo	KP.10.02/9/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 Tanggal 9 Agustus 2017 KP.10.02/9/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 dated August 9, 2017	35 Tahun/ Years	M.Sc.	UNESCOIHE, Delft Netherlands	2012

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	Deputi Koordinator Administrasi Satuan Kerja Proyek Strategis Deputy Administrative Coordinator for Strategic Project Work Unit	Ika Oktania	KP.428/7/6/1/PI.II-17 Tanggal 7 Juni 2017 KP.428/7/6/1/PI.II-17 dated June 7, 2017	34 Tahun/ Years	M.Sc.	UNESCOIHE, Delft Netherlands	2013
DIREKTORAT OPERASI DAN SISTEM INFORMASI OPERATION AND INFORMATION SYSTEMS							
A DIVISI OPERASI OPERATIONS DIVISION							
	SVP Operasi SVP Operations	David Pandapotan Sirait	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016	47 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
	DVP Pelayanan Petikemas DVP Container Services	Hermana Widhyohadi	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	43 Tahun/ Years	M.Sc.	Shanghai Maritime University	2013
	DVP Pelayanan Barang & Penumpang DVP Goods and Passengers Services	Imam Rahmiyadi	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	41 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritime University	2012
B DIVISI PELAYANAN KAPAL SHIP SERVICES DIVISION							
	VP Pelayanan Kapal (Pelaksana Harian) VP Ship Services (Daily Executive)	Santoso	PLH	46 Tahun/ Years	M.Sc.	Marine Master, STIP.	2009
	DVP Pemanduan & Penundaan DVP Pilotage & Delays	Santoso	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	46 Tahun/ Years	M.Sc.	Marine Master, STIP.	2009
	DVP Sarana & Prasarana Pemanduan & Penundaan DVP Pilotage & Delays Guidance & Infrastructure	Adi Priyatmono	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	36 Tahun/ Years	M.Sc.	Institut Teknologi Sepuluh November	2007
C DIVISI KENDALI MUTU QUALITY CONTROL DIVISION							
	VP Kendali Mutu VP Quality Control	Usman Saroni	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016	40 Tahun/ Years	M.Mtr	World Maritime University	2015

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
 Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Jaminan Mutu DVP Quality Assurance	Oka Sudarsono	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	49 Tahun/ Years	S.S.T. Pel	STTK. Hatawana	2003
	DVP Keamanan Pelabuhan DVP Port Security	Bambang Ruwadi	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	54 Tahun/ Years	S.E	STIE KU	2000
	DVP Manajemen K3 DVP OHS Management	Hari Toto Budiarto	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	52 Tahun/ Years	M.M.	STIE Widya Jayakarta	2000
D	DIVISI SISTEM INFORMASI INFORMATION SYSTEM DIVISION						
	SVP Sistem Informasi SVP Information System	Nunu Husnul Khitam	KP.10.02/11/9/1/PI.II-17 tanggal 11 September 2017 KP.10.02/11/9/1/PI.II-17 dated September 11, 2017	48 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
	DVP Perencanaan & Manajemen Informasi DVP Planning & Management Information	Raden Mulyadi	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	44 Tahun/ Years	S.T	Universitas Krisnadwi- payana	2001
	DVP Pengembangan Sistem Informasi DVP Information System Development	Donald H Sitompul	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	41 Tahun/ Years	S.T	Institut Sains Dan Teknologi Nasional	2017
	DVP Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Informasi DVP Information Operation & Maintenance	Bombom Cepi Nugraha	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	45 Tahun/ Years	S.E	STIE Jambi	2008
DIREKTORAT KEUANGAN FINANCE DIRECTORATE							
A	DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN FINANCIAL PLANNING & CONTROL DIVISION						
	SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan SVP Financial Planning & Control	Wing Megantoro	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	46 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Perencanaan Keuangan DVP Financial Planning	Muhammad Hadiyan Azmi	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	32 Tahun/ Years	S.E	Universitas Sebelas Maret	2008
	DVP Pengendalian Keuangan DVP Financial Control	Marwan Hakim	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	33 Tahun/ Years	S.E	Universitas Pasundan	2009
	DVP Penganggaran Investasi DVP Investment Budgeting	Yuli Wahyu Wibowo	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	34 Tahun/ Years	S.E	Universitas Gadjah Mada	2008
B	DIVISI PENGELOLAAN KEUANGAN FINANCIAL MANAGEMENT DIVISION						
	SVP Pengelolaan Keuangan (Pelaksana Harian) SVP Financial Management (Daily executive)	Wing Megantoro		46 Tahun/ Years		Kuhne Logistics University	2015
	DVP Perbenda haraan DVP Treasury	Nur Islaminnisa	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	36 Tahun/ Years	M.Ak.	Universitas Gajah Mada	2009
	DVP Keuangan Korporasi DVP Corporate Finance	Jonathan William Asali	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	29 Tahun/ Years	B.Ch.E.	University Of Illinois	2012
	DVP Manajemen Aset DVP Asset Management	Abdul Latief	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	46 Tahun/ Years	M.M	Universitas Pancasila	2008
C	DIVISI LAYANAN KEUANGAN FINANCIAL SERVICES DIVISION						
	VP Layanan Keuangan VP Financial Services	Ikhwanoel	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	44 Tahun/ Years	S.E	Universitas Persada Indonesia	2004

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Akuntansi Umum & Sistem Keuangan DVP General Accounting & Financial System	Dudung Abdul Aziz	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	43 Tahun/ Years	S.E	Universitas Terbuka	2015
	DVP Pajak DVPTax	Agus Wahyudi	KP.10.02/22/1/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 22 Januari 2018 KP.10.02/22/1/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated January 22, 2018	44 Tahun/ Years	S.E	Universitas Muhammadiyah	1999
	DVP Pusat Layanan Keuangan Pelanggan DVP Customer Finance Service Center	Heru Susetyohadi	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	48 Tahun/ Years	S.E	Universitas Gadjah Mada	1995
DIREKTORAT SDM DAN HUKUM HR AND LEGAL DIRECTORATE							
A DIVISI SDM HR DIVISION							
	SVP SDM SVP HR	Heru Widodo	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	53 Tahun/ Years	S.Psi	Universitas Gadjah Mada	1991
	DVP Perencanaan SDM & Organisasi DVP HR & Organization Planning	Dian Vegawati	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	37 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2012
	DVP Manajemen Talenta DVP Talent Management	Audy Nirsa Kusuma	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	36 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritime University	2014
	DVP Kebijakan Remunerasi & Fasilitas SDM DVP HR Remuneration & Facilities Policy	Rachmat Hidayat	KP.10.02/2/10/2/SBP/ SUM/PI.II-17 Tanggal 2 Oktober 2017 KP.10.02/2/10/2/SBP/ SUM/PI.II-17 dated October 2, 2017	53 Tahun/ Years	S.A.P	Universitas Padjajaran	1989
B DIVISI PEMBELAJARAN LEARNING DIVISION							
	SVP Pembelajaran SVP Learning	Hanung Hamboro	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	48 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2004

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Perencanaan Pembelajaran DVP Learning Planning	Desi Yulfia	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	35 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2013
	DVP Penyelenggaraan Pembelajaran DVP Learning Management	Sufarly Andrias	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	52 Tahun/ Years	S. Adm.	Universitas Muhamaddiyah Palembang	2008
	DVP Budaya Perusahaan DVP Corporate Culture	Budi Setiawan	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	47 Tahun/ Years	S. Adm.	Universitas Tulang Bawang	2008
C DIVISI HUBUNGAN PEKERJA DAN LAYANAN SDM HR EMPLOYEE RELATIONS & FACILITIES							
	VP Hubungan Pekerja & Layanan SDM VP Employee Relations & HR Facilities	Abdul Wahab	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	53 Tahun/ Years	S.H.	Universitas Tanjung Pura	1992
	DVP Hubungan Pekerja DVP Employee Relations	Wiluyo Karyanto	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	47 Tahun/ Years	M.B.A	Universitas Gadjah Mada	2018
	DVP Layanan & Administrasi SDM DVP HR Services & Administration	Indah Lestari	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	40 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2014
	DVP Umum & Rumah Tangga DVP General & Household	Dedi Daryono Tanjung	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	46 Tahun/ Years	S.E.	Universitas Gunadarma	2001
C DIVISI HUKUM LEGAL DIVISION							
	SVP Hukum SVP Legal	Kurnia Jaya	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016	43 Tahun/ Years	M.H., M.B.A	Kuhne Logistic University	2017

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Penelaahan Hukum & Peraturan Perusahaan DVP Legal Review & Corporate Regulation	Eko Budyasmoro	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	45 Tahun/ Years	M.H	Universitas JAYABAYA	2005
	DVP Penanganan Masalah Hukum DVP Legal Issues Handling	Sutanto	KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/ SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018	37 Tahun/ Years	S.H	Universitas 17 Agustus 1945	2009
	DVP Jaringan & Dokumentasi Hukum DVP Legal Network & Documentation	Dwi Hertanto	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	53 Tahun/ Years	M.H	Universitas Sriwijaya	2012
DIREKTORAT PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES MANAGEMENT DIRECTORATE							
A DIVISI PEMBINAAN ANAK PERUSAHAAN & CABANG SUBSIDIARIES & BRANCHES MANAGEMENT DIVISION							
	SVP Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang SVP Subsidiary & Branch Management	Osman Syarif	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	51 Tahun/ Years	M.B.A	Monash University	2003
	DVP Pengelolaan Anak Perusahaan Bisnis Inti DVP Subsidiary Core Business Management	Yanuar Evyanto	KP.428/11/1/1/PI.II-17 Tanggal 11 Januari 2017 KP.428/11/1/1/PI.II-17 dated January 11, 2017	45 Tahun/ Years	M.B.A	Renmin University	2012
	DVP Pengelolaan Anak Perusahaan Bisnis Pendukung DVP Subsidiary Supporting Business Management	Cucu Kuswoyo	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	40 Tahun/ Years	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2013
	DVP Pengelolaan Cabang Perusahaan DVP Corporate Branch Management	Mujianto	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	49 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2016
B DIVISI HUBUNGAN LEMBAGA CORPORATE RELATIONS DIVISION							
	VP Hubungan Lembaga VP Corporate Relations	Rati Farini	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 tanggal 26 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 26, 2018	52 Tahun/ Years	M.LLM	Institut Pertanian Bogor	2015

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers' Profiles

NO	KETERANGAN JABATAN DESCRIPTION POSITION	NAMA NAME	SK PENGANGKATAN LEGAL APPOINTMENT	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN YEAR OF GRADUATION
	DVP Hubungan Antar Instansi DVP Inter-Agency Relations	Chandra Irawan	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	37 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritime University	2013
	DVP Hubungan Mitra & Investor DVP Partner & Investor Relations	Pramestie Wulandary	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	36 Tahun/ Years	M.LLM	Monash University	2005
C DIVISI PENGADAAN PROCUREMENT DIVISION							
	SVP Pengadaan SVP Procurement	Juli Tarigan	KP.06.02/21/8/1/SBP/ SUM/PI.II-17 Tanggal 21 Agustus 2017 KP.06.02/21/8/1/SBP/ SUM/PI.II-17 dated August 21, 2017	50 Tahun/ Years	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2017
	DVP Pengadaan Teknik DVP Technical Procurement	Dany Syuhada	KP.10.02/22/9/1/SBP/ UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/ PI.II-17 dated September 22, 2017	38 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2014
	DVP Pengadaan Non Teknik DVP Non-Technical Procurement	Ibnu Hajar	KP.428/24/10/9/PI.II-16 Tanggal 24 Oktober 2016 KP.428/24/10/9/PI.II-16 dated October 24, 2016	48 Tahun/ Years	S.T	Universitas Krisna Dwipayana	2001
	DVP Administrasi & Dokumentasi Pengadaan DVP Procurement Administration & Documentation	Asep Kusnadi	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016	37 Tahun/ Years	S.H	Universitas Pasundan	1992

PROFIL KEPALA CABANG PELABUHAN

PORT BRANCH HEAD PROFILES

NO	CABANG PELABUHAN PORT BRANCH	NAMA NAME	SK Pengangkatan (Nomor dan Tanggal) Appointment SK (Number and Date)	USIA Age	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN TAHUN KELULUSAN
1	Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Tanjung Priok Port Branch	Mulyadi	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	55 Tahun/ Years	M.M. & M.Sc.	University Of Antwerp Belgium	2010
2	Cabang Pelabuhan Panjang Panjang Port Branch	Drajat Sulistyio	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	39 Tahun/ Years	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2014

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
 Executive Officers' Profiles

NO	CABANG PELABUHAN PORT BRANCH	NAMA NAME	SK Pengangkatan (Nomor dan Tanggal) Appointment SK (Number and Date)	USIA Age	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	UNIVERSITAS UNIVERSITY	TAHUN KELULUSAN TAHUN KELULUSAN
3	Cabang Pelabuhan Palembang Palembang Port Branch	Agus Edi Santoso	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	46 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2006
4	Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port Branch	Armen	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	55 Tahun/ Years	S.H	Universitas Bung Hatta	1987
5	Cabang Pelabuhan Pontianak Pontianak Port Branch	Adi Sugiri	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	41 Tahun/ Years	M.B.A	Renmin University	2012
6	Cabang Pelabuhan Banten Banten Port Branch	Hendro Haryono	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	54 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
7	Cabang Pelabuhan Cirebon (Pelaksana Harian) Cirebon Port Branch (Daily basis)	Sendy Fernando	(Pelaksana Harian)	40 Tahun/ Years	M.B.A	Kuhne Logistics University	2017
8	Cabang Pelabuhan Jambi Jambi Port Branch	Kartiko Yuwono	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	51 Tahun/ Years	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2000
9	Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa Sunda Kelapa Port Branch	Reini Delfianti	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	43 Tahun/ Years	M.M., M.Sc.	Netherland Maritime University	2014
10	Cabang Pelabuhan Bengkulu Bengkulu Port Branch	Hambar Wiyadi	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	50 Tahun/ Years	M.Sc.	Netherland Maritime University	2013
11	Cabang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Balam Port Branch	Nugroho Iwan	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	42 Tahun/ Years	SANT TK II	Dirjen Perhubungan Laut	2016
12	Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Port Branch	Nurkholis Lukman	KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018 KP.10.02/26/2/1/SBP/ SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	45 Tahun/ Years	S.T	Universitas Bina Darma	2009

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Company Vision, Mission and Culture

VISI | VISION

“MENJADI PENGELOLA PELABUHAN KELAS DUNIA YANG UNGGUL DALAM OPERASIONAL DAN PELAYANAN”

“PELABUHAN BERKELAS DUNIA”

IPC mampu menjadi perusahaan pengelola pelabuhan profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan kepelabuhanan terbaik di dunia.

1. *Image* perusahaan yang baik
2. Fasilitas infrastruktur yang modern
3. Sistem yang terintegrasi.

Sedangkan penjelasan dari Visi Perseroan adalah sebagai berikut.

“PELABUHAN BERKELAS DUNIA YANG UNGGUL DALAM OPERASIONAL”

IPC mampu menarik pengguna jasa pelabuhan baik domestik maupun internasional untuk bekerjasama dengan IPC.

1. Menerapkan standar operasional terbaik di dunia
2. Memiliki produktivitas yang tinggi
3. Bekerja secara efektif dan efisien, menerapkan *“international best practice”*
4. Mengimplementasikan kebijakan *“zero accident”*, serta mampu memenuhi SLA/SLG yang disepakati dengan pengguna jasa.

“PELABUHAN BERKELAS DUNIA YANG UNGGUL DALAM PELAYANAN”

IPC diharapkan menjadi penyedia jasa pelabuhan yang bersahabat, mengerti akan kebutuhan pengguna jasanya serta mampu memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pelanggannya.

1. Memberikan berbagai macam pelayanan dengan kualitas terbaik
2. Menerapkan pelayanan dengan cepat
3. Menyediakan kemudahan akses sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa pelabuhan.

“TO BE A WORLD-CLASS PORT OPERATOR THAT EXCELS IN OPERATIONS AND SERVICES”

“WORLD CLASS PORT”

IPC is able of become a professional port management company and can be aligned and compete with the best port service providers in the world.

1. Good corporate image
2. Modern infrastructure facilities
3. Integrated systems.

Company Vision Explanation, as follows.

“A PORT WITH EXCELLENT OPERATIONS”

IPC is able to attract domestic and international port services users to cooperate with IPC.

1. Implements the best operational standards in the world
2. With high productivity
3. Works effectively and efficiently, implementing *“international best practices”*
4. Implements a *“zero accident”* policy, and able to meet agreed SLA / SLG with service users.

“A PORT WITH EXCELLENT SERVICE”

IPC is expected to be a friendly port service provider, understanding the customers' needs and able to meet and exceed the customers' expectations.

1. Provides a wide range of highest quality services
2. Implements swift services
3. Provides easy access in accordance with the port customers' requirements.

Misi | Missions

Sebagai Pengelola Pelabuhan yang Memaksimalkan Nilai Tambah bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Secara Berkesinambungan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional.

Stakeholder yang dimaksud adalah:

1. Pelanggan dan Mitra

Menyediakan, membangun dan mengoperasikan pelayanan kepelabuhanan dan logistik secara terintegrasi, berkualitas dan handal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

2. Karyawan

Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan Insan perusahaan yang fokus pada pelanggan, berintegrasi, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.

3. Pemegang Saham

Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik.

4. Masyarakat dan Negara

Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

As an Operator that Maximizes Added Value for All Stakeholders on an ongoing basis in order Increasing the National Economy.

Stakeholders are:

1. Customers and Partners

Provide, build and operate port and logistics services in an integrated, high quality and reliable way to meet customer and partner satisfaction.

2. Employees

Create a comfortable work environment for employees, promote employees that are customer-focused, have integrity, and have pride in the company and its culture, while providing welfare and satisfaction to employees.

3. Shareholders

Maximize the Company's value to shareholders and improve the Company's health in a professional manner through the fulfillment of good corporate governance.

4. Community and Country

Ensure the smooth and safe flow of ships and goods to realize logistical cost efficiency to accelerate the national economic growth and to improve the people's welfare.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors

Pada Tahun 2018, visi dan misi Perseroan telah di-review dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan Visi dan Misi, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi Nomor HK.568/8/9/5/ PI.II-16 tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Visi, Karakter Perusahaan, Nilai-Nilai Perusahaan dan *Corporate Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Visi dan Misi Perusahaan terdapat dalam RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan). RJPP Perusahaan Tahun 2015-2019 telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 58/DK/PI.II/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penyampaian Telaah atas Usulan RJPP 2015 – 2019.

Terdapat ukuran atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditentukan untuk menjadi representatif pencapaian visi dan misi perusahaan. KPI tersebut, dilakukan *monitoring* secara periodik. Untuk memudahkan proses *monitoring* pencapaian KPI saat ini, Perseroan sedang mengembangkan *dashboard* kinerja perusahaan. Pada *dashboard* tersebut, jika terlihat indikator yang tidak tercapai atau menurun angka pencapaiannya, maka akan dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau proses kerja yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut.

Dengan dilakukannya evaluasi, maka akan muncul inisiatif perbaikan dalam pelaksanaan program kerja atau proses kerja tersebut. Organisasi juga memantau pencapaian tata nilai perusahaan dengan menetapkan hasil pencapaian nilai-nilai organisasi dan realisasi pelaksanaan *morning briefing* pada setiap unit kerja yang menjadi KPI perusahaan, dan dilakukan pula *monitoring* pencapaiannya selama triwulanan. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2018, arah pencapaian visi dan misi telah sesuai dengan yang ditargetkan dan ditunjukkan dengan pencapaian KPI di tahun 2018. Hasil review tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In 2018 the Company's vision and mission were reviewed and approved by the Board of Commissioners and Board of Directors. The Vision and Mission was determined based on:

1. Board of Directors' Decree Number HK.568/8/9/5/ PI.II-16 dated September 8, 2016 concerning Determination of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Vision, Company Character, Corporate Values and Corporate Roadmap.
2. The Company's Vision and Mission are contained in the RJPP (Company Long-Term Plan), and the Corporate RJPP for 2015-2019 was approved by the Board of Directors and Board of Commissioners based on letter No. 58/DK/PI.II/III/2017 dated March 21, 2017 concerning Submission of Review on the 2015 - 2019 RJPP Proposal.

Key Performance Indicators (KPI) that been determined to be representative for achieving the company's vision and mission. The KPI is monitored periodically. To facilitate the monitoring process of KPI achievement, currently, the Company is developing a company performance dashboard. On the dashboard, if you see indicators that have not been reached or decreases in the number of achievements, an evaluation of the work program and / or work process will be carried out to achieve these indicators.

By conducting an evaluation, improvement initiatives will appear in the work program or work process. The organization also monitors the achievement of corporate values, the results of fulfilling the organizational values, and the realization of morning briefings in each work unit, to set the company's KPI, and monitors their achievement quarterly. Based on the evaluation results in 2018, the direction of achieving the vision and mission is in accordance with the targeted and indicated by the achievement of the KPI in 2018. The results of the review have been approved by the Board of Commissioners and Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
 Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai perusahaan IPC dapat dijelaskan sebagai berikut:

CORPORATE CULTURE

IPC Corporate Values explanation:



C	<p><i>Customer Centric: "Meet Customer Expectation"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif 2. Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan 3. Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang <p>Customer Centric: "Meet Customer Expectation"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proactively seeking and understanding customer needs to provide innovative solutions 2. Building good long-term relationships with customers 3. Consistently providing reliable and best in class services to help customers grow and develop
I	<p><i>Integrity: "Walk the Talk"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan rasa percaya dengan mengatakan apa yang kita rasakan serta melakukan apa yang kita ucapkan. 2. Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. 3. Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. <p>Integrity: "Walk the Talk"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspiring trust by saying what we mean and doing what we say. 2. Demonstrating professionalism and honesty when interacting with internal and external stakeholders. 3. Demonstrating discipline and adherence to our code of business ethics in our day-to-day work
N	<p><i>Nationalism: "National Pride"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan semangat dan ikut berperan menyukseskan program Pemerintah dalam pembangunan nasional. 2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dalam bekerja, mampu berkembang, dan bersaing dengan perusahaan pengelola pelabuhan kelas dunia. <p>Nationalism: "National Pride"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Growing enthusiasm and contributing to the success of Government programs in national development to reducing national logistics costs. 2. Growing a spirit of nationalism in work, being able to develop, and competing with world-class port management companies.
T	<p><i>Team Work: "Together We Can"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkolaborasi dalam tim untuk mendapatkan hasil yang terbaik 2. Bekerja bersama-sama menghasilkan ide-ide implementatif untuk solusi kebutuhan pengguna jasa pelabuhan 3. Semangat kebersamaan dan menghargai orang lain <p>Team Work: "Together We Can"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborating with teams to get the best results 2. Working together to produce implementable ideas for solving the needs of port service users 3. The spirit of togetherness and respect for others
A	<p><i>Action: "Make It Happen"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berani bermimpi dan berusaha mewujudkannya 2. Proaktif untuk mencari cara dalam mewujudkan visi perusahaan 3. Melakukan terobosan-terobosan dan langkah nyata dalam mendorong perkembangan perusahaan <p>Action: "Make It Happen"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daring to dream and trying to make it happen 2. Proactively finding ways to realize the company's vision 3. Making breakthroughs and concrete steps to encourage the Company's development

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors

Selain nilai-nilai perusahaan, Perseroan juga memiliki karakter perusahaan sebagai berikut.

In addition to Corporate Values, the Company has the following corporate characteristics.



LESS BUREAUCRATIC (DECISION MAKING PROCESS)

1 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter cepat, tepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has fast, precise and accurate character in decision making process



LESS FEUDALISM (PROFESSIONAL INTIMACY)

2 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter yakni hubungan komunikasi yang dibangun berdasarkan profesionalisme kerja

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has the character of a communication relationship that built based on work professionalism.



MORE MODERN (WORLD CLASS COMPANY, TECHNOLOGY BASED & CUSTOMER CENTRIC)

3 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter perusahaan berkelas dunia yang berbasis IT dan fokus terhadap kepuasan pelanggan.

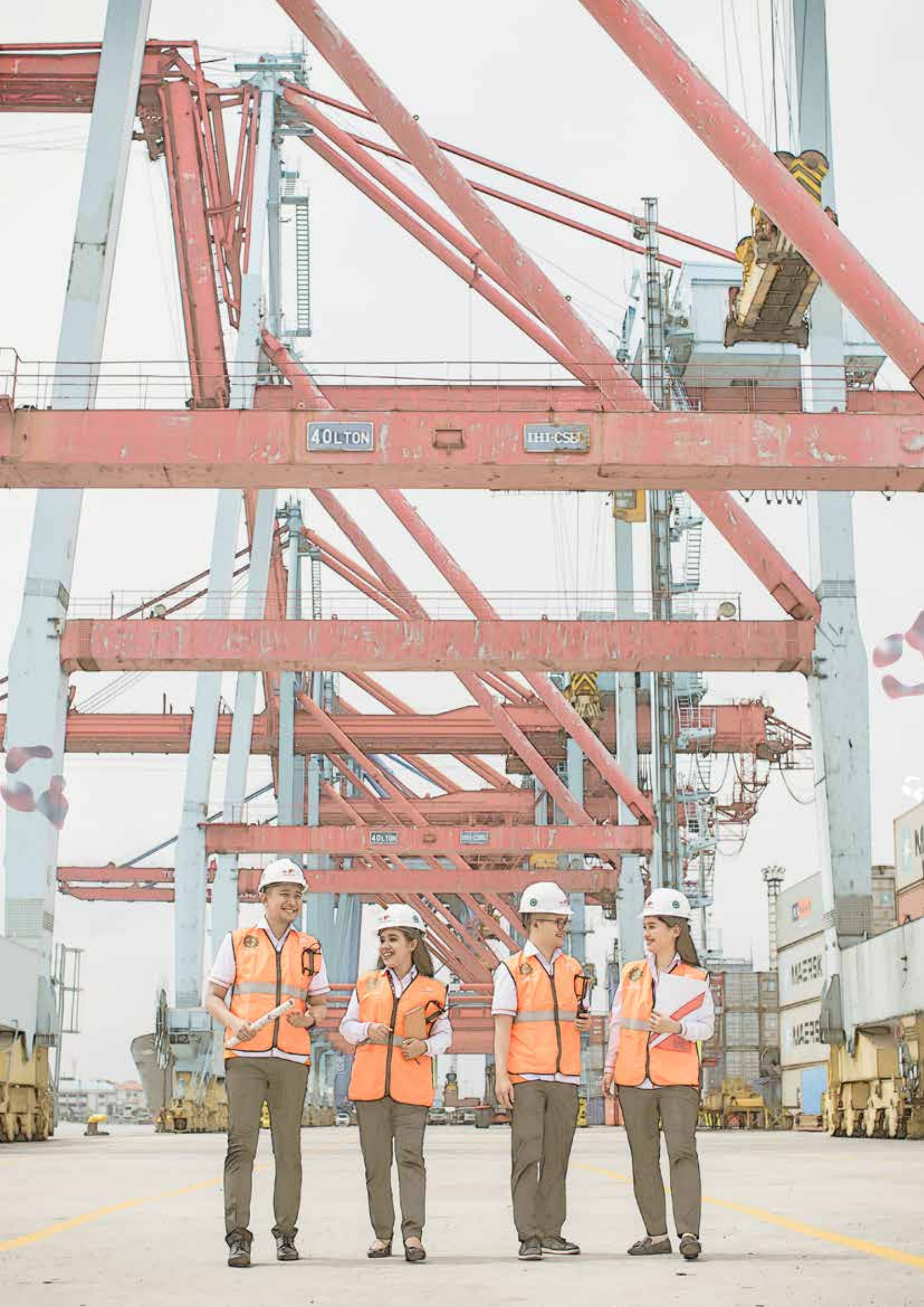
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has a world-class IT-based corporate character and focuses on customer satisfaction.



MORE FRIENDLY (WORLD CLASS SERVICES)

4 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter pelayanan optimal, berkelas dunia dan memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has an optimal service character, world class and has close relationships with customers.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profiles



Tumpak H. Panggabean
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Sanggau Kapuas, Kalimantan Barat, pada 29 Juli 1943. Berusia 75 tahun per Desember 2018. Born in Sanggau Kapuas, West Kalimantan, on July 29, 1943. 75 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	Sarjana bidang Hukum dari Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN), Pontianak pada tahun 1972. Bachelor's degree in Law from Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN), Pontianak in 1972.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Kariernya dimulai sejak 1973 sampai 2003 sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung RI dengan menjabat beberapa posisi yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Dili, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Kepala Sub Direktorat Intelijen pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung RI, Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta. Kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jaksa Tinggi Maluku, Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan dan terakhir sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejaksaan Agung RI.</p> <p>Between 1973 to 2003 served as Prosecutor at the Indonesian Attorney General's Office holding several positions, namely Chief Prosecutor Pangkalan Bun, Senior Prosecutor Intelligence Assistant Central Sulawesi, Head of Dili District Prosecutor's Office, Assistant Special Crime Attorney Riau, Head of Intelligence Sub-Directorate at the JAM Supreme Court of Indonesia, Jakarta Attorney General Intelligence Assistant. Then served as Deputy Chief of the Maluku Senior Prosecutor's Office, Maluku Senior Prosecutor, South Sulawesi Senior Prosecutor and finally as Secretary of the Deputy Attorney General for Special Crimes (Sesjampidsus) Republic of Indonesia Attorney General's Office.</p> <p>Setelah memasuki masa pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan pangkat terakhir IV E, Beliau diamanatkan untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pertama sebagai Wakil Ketua (2003-2007). Pada 2008 diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN. Beliau akhirnya dipilih kembali untuk memimpin KPK dengan menduduki posisi Pimpinan/Ketua Sementara KPK (Oktober 2009 - Maret 2010). Kemudian menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (Maret 2010 - 2015).</p> <p>After retirement, with a last Civil Service level of IV E, was mandated to head the Corruption Eradication Commission (KPK) for the first period as Deputy Chair (2003-2007). In 2008 was appointed as a member of PT Pos Indonesia (Persero) Board of Commissioners based on a Ministry of SOEs Decree. Was finally re-elected to head KPK with the position of KPK Chairperson / Provisional Chairperson (October 2009 - March 2010). Then served as a Board of Commissioners' Member at PT Pos Indonesia (Persero) (March 2010 - 2015).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama IPC sejak 2015, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-79/MBU/06/2015 tanggal 03 Juni 2015. Kemudian Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016. First appointed as IPC President Commissioner in 2015, based on Ministry of SOEs' Decree number No. SK-79/MBU/06/2015 dated June 3, 2015. Then appointed President Commissioner and Independent Commissioner in 2015, based on Ministry of SOEs' Decree number No. SK- 40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	Periode menurut SK pengangkatan: 03 Juni 2015 - 02 Juni 2020 (Periode Pertama). Period based on appointment decree: June 3, 2015 - June 2, 2020 (First Period).
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	Nihil. None



Djadmiko
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 03 Februari 1955. Berusia 63 tahun per Desember 2018. Born in Magelang, Central Java, on February 3, 1955. 63 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	1. Sarjana bidang Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN pada tahun 1985, dan 2. Master of Social Science in Development Finance, University of Birmingham, United Kingdom (Inggris) pada tahun 1988. 1. Bachelor's degree in Public Administration from Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN in 1985, and 2. Master of Sosial Science in Development Finance, University of Birmingham, United Kingdom in 1988.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (1990-1991), Kepala Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam pada Sekretariat Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang (1991-1993), Kepala Bagian Protokol dan Persidangan pada Kantor Menko Ekku Wasbang (1993-1995), Asisten Deputi Urusan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2007-2009), Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009-2011), Deputi Bidang Administrasi, sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2011-2015), serta Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) Kementerian Keuangan (2015 - saat ini). Served as Directorate General Head for the Budgeting Subdivision at the Ministry of Finance (1990-1991), Equipment and Internal Affairs Head at the Secretariat Office of the Coordinating Minister for Economy and Wasbang (1991-1993), Protocol and Conference Head at the Ministry for Economic Affairs Coordinating Office 1993-1995), Assistant Deputy for Export Improvement, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2007-2009), Expert Staff for Public-Private Investment and Partnerships, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2009-2011), Administration Deputy, Republic of Indonesia Cabinet Secretariat (2011-2015), and Head of the Ministry of Finance's Indonesia National Single Window Portal (PP-INSW) Management Unit (2015 - present).
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 01 Maret 2016. First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	Periode menurut SK pengangkatan: 01 Maret 2016 - 28 Februari 2021 (Periode Pertama). Period based on appointment decree: March 1, 2016 - February 28, 2021 (Firts Period).
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PPINSW) Kementerian Keuangan (2015 - saat ini). Head of Ministry of Finance's Management Unit for the Indonesia National Single Window (PPINSW) (2015 - present)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	Nihil. None



Suaidi Marasabessy
Komisaris/Komisaris Independen
Commissioner/Independent Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Ambon, Maluku, pada 05 Januari 1947. Berusia 71 tahun per Desember 2018. Born in Ambon, Maluku, on January 5, 1947. 71 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	1. Sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Terbuka di Jakarta pada tahun 1995, dan 2. Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung pada tahun 1992. 1. Bachelor's degree in Political Science from Universitas Terbuka in Jakarta in 1995, and 2. ABRI Staff and Command School in Bandung in 1992.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	Setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Darat pada 1971, beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain Danyonif 202/Jaya (1984-1985), Dandim 0504/Jakbar (1986-1988), Asops Divisi-2/Kostrad (1992-1993), Asops Kasdam-IV/Dip(1993-1994), Danmentar Akmil (1994), Waasops Kasad (1994-1995), Waasops Kasum ABRI (1995-1996), Asops Kasad (1996-1998), Pangdam-VII/WRB(1998-1999), Anggota MPR-RI (1999), Kasum TNI (1999-2000), Komisaris PT SGI (2006 - saat ini), Komisaris Utama PT SSW (2008 - saat ini), Direktur Utama PT TMU (2010 - saat ini), Direktur Utama PT PKU (2011 - saat ini), Direktur Utama PT Sindo Mandiri (2012 - saat ini), dan Direktur PT Kutai Energi (2015 - saat ini). After completing Islamic Civil Servant education in 1971, held several important positions including Danyonif 202 / Jaya (1984-1985), Dandim 0504 / West Jakarta (1986-1988), Asops Division-2 / Kostrad (1992-1993), Asops Kasdam-IV / Dip (1993-1994), Danmentar Akmil (1994), Waasops Kasad (1994-1995), Waasops Kasum ABRI (1995-1996), Asops Kasad (1996-1998), Pangdam-VII / WRB (1998-1999), Kasum TNI (1999-2000), and MPR-RI Member (1999), MPR-RI member (1999), Kasum TNI (1999-2000), Commissioner of PT SGI (2006 - present), President Commissioner of PT SSW (2008 - present), President Director of PT TMU (2010 - present), President Director PT PKU (2011 - present), President Director of PT Sindo Mandiri (2012 - present), and Director of PT Kutai Energi (2015 - present).
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 01 Maret 2016. First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	Periode menurut SK pengangkatan: 01 Maret 2016 - 28 Februari 2021 (Periode Pertama). Period based on appointment decree: March 1, 2016 - February 28, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	Komisaris PT SGI (2006 - saat ini), Komisaris Utama PT SSW (2008 - saat ini), Direktur Utama PT TMU (2010 - saat ini), Direktur Utama PT PKU (2011 - saat ini), Direktur Utama PT Sindo Mandiri (2012 - saat ini), dan Direktur PT Kutai Energi (2015 - saat ini). President Commissioner of PT SSW (2008 - present), President Director of PT TMU (2010 - present), President Director PT PKU (2011 - present), President Director of PT Sindo Mandiri (2012 - present), and Director of PT Kutai Energi (2015 - present).
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	Nihil. None



Monty Girianna
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta.
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 22 Januari 1963. Berusia 55 tahun per Desember 2018 Born in Bandung, West Java, on January 22, 1963. 55 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985, 2. Master of Science degree in Transportation dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989, 3. Master in City Planning (MCP) bidang <i>Project Finance</i> di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat tahun 1996, Doktor bidang Sistem Transportasi University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), Amerika Serikat pada tahun 2002, 4. Project Finance, Executive Program dari Harvard Business School - Harvard University, MA, Amerika Serikat tahun 2005 dan Strategy and Organization Executive Program di Graduate School of Business, Standford University, CA, Amerika Serikat tahun 2011. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1985, 2. Master of Science degree in Transportation from Institut Teknologi Bandung in 1989, 3. Master in City Planning (MCP) degree in Project Finance from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA in 1996, and Doctorate in Transportation Systems from the University of Illinois, Urbana Champaign (UIUC), United States in 2002, 4. Strategy and Organization Executive Program at the Graduate School of Business, Standford University, CA, USA in 2011, and Project Finance, Executive Program at the Harvard Business School - Harvard University, MA, USA in 2005.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Kasubdit Pembiayaan dan Investasi Infrastruktur BAPPENAS (2003-2005), Anggota Kelompok Kerja Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) (2003-2005), Peneliti atau Research Associate di LPEM Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2003-2010), serta Perwakilan Tetap Dewan Energi Nasional (DEN) (periode 2009 - 2014), Sekretaris Tim Kerja Konektivitas, MP3EI (2012- 2014), Ketua Tim Teknis Kerjasama Indonesia – Green Global Growth Institute/GGGI (2013-2014), Staf Pengajar di Universitas Pertahanan, Program Ketahanan Energi (2012 – saat ini), serta Deputy Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian (2014 - saat ini).</p> <p>Served as Infrastructure Financing and Investment Sub-Directorate Head at BAPPENAS (2003-2005), Working Group Member for the Infrastructure Development Acceleration Policy (KKPPI) (2003-2005), Researcher or Research Associate at LPEM Faculty of Economics, Universitas Indonesia (2003-2010), Permanent National Energy Council (DEN) Representative (2009 - 2014), Secretary of the Connectivity Working Team, MP3EI (2012-2014), Chairman of the Indonesian Cooperation Technical Team - Green Global Growth Institute / GGGI (2013-2014), Teaching Staff at Universitas Pertahanan, Energy Security Program (2012 - present), and Deputy Coordinating Minister for Energy, Natural Resources and Environment Management, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014 - present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 40/MBU/03/2016 tanggal 01 Maret 2016.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK- 40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	Periode menurut SK pengangkatan: 01 Maret 2016 - 28 Februari 2021 (Periode Pertama). Period based on appointment decree: March 1, 2016 - February 28, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Staf Pengajar di Universitas Pertahanan, Program Ketahanan Energi (2012 sampai saat ini), serta Deputy Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian (2014 sampai saat ini).</p> <p>Teaching Staff at Universitas Pertahanan, Energy Security Program (2012 - present), and Deputy Coordinating Minister for Energy, Natural Resources and Environment Management, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014 - present).</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	Nihil. None



Kushari Suprianto
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 02 Oktober 1966. Berusia 52 tahun per Desember 2018. Born in Madiun, East Java, on October 2, 1966. 52 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1990, 2. Magister Manajemen bidang Sumber Daya Manusia Universitas Borobudur, Jakarta tahun 2007, dan 3. Magister Ekonomi bidang Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2009. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor of Economics degree in Accounting from Universitas Brawijaya, Malang, in 1990, 2. Master of Management degree in Human Resources from Universitas Borobudur, Jakarta in 2007, and 3. Master in Economics degree in Public Policy from Universitas Indonesia, Jakarta in 2009.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (2007), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (2008), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (2009), Direktur Teknis Kepabeanan (2012), serta Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai (2015-26 November 2018), serta Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai (26 November 2018-saat ini).</p> <p>Served as Head of Customs and Excise Service Office Type B in Batam (2007), Head of the Tanjung Priok Customs and Excise Service Office Type A (2008), Director of Customs and Excise Regulations (2009), Director of Customs and Excise (2012), and Directorate General Secretary at the Customs and Excise - (2015 - November 26, 2018), and Director of Customs and Excise Audit (November 26, 2018- present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2017, berdasarkan akta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2017, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 14 Juli 2017 - 13 Juli 2022 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: July 17, 2017 - July 13, 2022 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun 2015 sampai dengan 26 November 2018, dan Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai sejak 26 November 2018 sampai saat ini.</p> <p>Secretary to the Director General of Customs and Excise from 2015 - November 26, 2018, Customs and Excise Audit Director from November 26, 2018 to present.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>



D. Andhi Nirwanto
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 08 Januari 1956. Berusia 62 tahun per Desember 2018. Born in Judus, East Java, on January 8, 1956. 62 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Hukum bidang Hukum Pidana dari Universitas 17 Agustus 1945 ,Semarang pada tahun 1979, 2. Master bidang Manajemen Internasional dari Institut Bisnis dan Informatika, Jakarta pada tahun 1998, dan 3. Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2015. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor of Law degree in Criminal Law from Universitas 17 Agustus 1945, Semarang in 1979, 2. Master's degree in International Management from Institut Bisnis dan Informatika, Jakarta in 1998, and 3. Doctorate in Law from Universitas Padjajaran, Bandung in 2015.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Karier dimulai tahun 1981 sampai dengan 2016, selama 35 tahun menjabat sebagai Jaksa, beberapa jabatan pernah didudukinya, antara lain: KAJARI Maros (1997-1999), Kabag Rumah Tangga Kejagung RI (1999-2000), KAJARI Jakarta Pusat (2000-2001), Aswas Kejati Jawa Barat (2001-2003), Kabag Kepangkatan Kejagung RI (2003-2004), WAKAJATI Sumatera Barat (2004-2005), WAKAJATI Kalimantan Selatan (2005-2006), Direktur Uheksi pd JAM Pidum (2006), KAJATI Kalimantan Timur (2006-2008), Inspektur Pegasum pd JAM Was (2008), KAJATI DKI Jakarta (2008-2009), Ses JAM Pidsus (2009-2011), JAM Pidsus (2011-2013), , serta Wakil JAKSA AGUNG RI/Merangkap Ketua Tim Pemburu Koruptor (2013-2016), Dosen Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang (2015-saat ini), Senior Advisor Santosa Hospital Bandung (2016-saat ini), dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) (2016-saat ini).</p> <p>Career spanning 1981 until 2016, and for 35 years served as a Prosecutor, occupied several positions, including: KAJARI Maros (1997-1999), Kabag Rumah Tangga Kejagung RI (1999-2000), KAJARI Jakarta Pusat (2000-2001), West Java Attorney General (2001-2003), Kabag Kepangkatan Kejagung RI (2003-2004), WAKAJATI West Sumatra (2004-2005), WAKAJATI South Kalimantan (2005-2006), Uheksi Director at JAM Pidum (2006), KAJATI Kalimantan Timur (2006-2008), Inspector Pegasum at JAM Was (2008), KAJATI DKI Jakarta (2008-2009), Ses JAM Pidsus (2009-2011), JAM Pidsus (2011-2013), Vice Attorney General RI / Accompanying Corruption Investigation Team Leader (2013-2016), Lecturer in the Masters and Doctorate of Law Programs at UNTAG Semarang (2015- present), Senior Advisor at Santosa Hospital Bandung (2016-present), and Supervisory Board Chairman at the National Strategy Assessment Center (PPSN) (2016-present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2017, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-215/MBU/10/2017 tanggal 04 Oktober 2017.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2017, based on Ministry of SOEs Decree of the No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 04 Oktober 2017 - 3 Oktober 2022 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: October 4, 2017- October 3, 2022 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Dosen Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang sejak 2015, Senior Advisor Santosa Hospital Bandung sejak 2016, dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) sejak 2016.</p> <p>Santosa Hospital Bandung Senior Advisor since 2016, UNTAG Law and Doctor of Law Sciences Masters Program Lecturer, Semarang since 2015, National Strategy Review Center (PPSN) Supervisory Board Chair since 2016.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>



R. Agus H. Purnomo
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta. Jakarta.
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Sleman, Jawa Tengah, pada 24 Agustus 1961. Berusia 57 tahun per Desember 2018. Born in Sieman, Central Java, on August 24, 1961. 57 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	1. Sarjana Teknik Mesin Universitas Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, pada tahun 1985, dan 2. Magister di Bidang Manajemen dari STIE Arta Bodhi Iswara, tahun 2008. 1. Bachelor's degree in Mechanical Engineering, Universitas Teknologi Sepuluh Nopember, and Surabaya, in 1985. 2. Master's degree in Management from STIE Arta Bodhi Iswara, in 2008.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	Karirnya dimulai sejak 1985 hingga tahun 2012 di PT Barata Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai CEO (2008-2012), CEO PT INKA (Persero) (2012-2017), serta Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2017- saat ini). Career started in 1985 until 2012 at PT Barata Indonesia with last positions as CEO (2008-2012), CEO of PT INKA (Persero) (2012-2017), and Sea Transportation Director General at the Ministry of Transportation (2017-present).
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 22 Januari 2018, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri BUMN No SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018. First appointed as IPC Commissioner on January 22, 2018, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018.
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	Periode menurut SK pengangkatan: 22 Januari 2018 - 21 Januari 2023 (Periode Pertama). Period based on appointment decree: January 22, 2018 - January 21, 2023 (First Period).
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation since 2017 until now.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	Nihil. None

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profiles

1. Tumpak H Panggabean

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

2. Djadmiko

Komisaris
Commissioner

3. Suaidi Marasabessy

Komisaris/Komisaris Independen
Commissioner/Independent Commissioner

4. R. Agus H. Purnomo

Komisaris
Commissioner

5. Montty Giriana

Komisaris
Commissioner

6. D. Andhi Nirwanto

Komisaris
Commissioner

7. Kushari Suprianto

Komisaris
Commissioner



PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Profiles



PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profiles



Elvyn G. Masassya
Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Medan, Sumatera Utara, pada 18 Juni 1967. Berusia 51 tahun per Desember 2018. Born in Medan, North Sumatra, on June 18, 1967. 51 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi di Universitas Jayabaya, Jakarta (1990), 2. Profesional Development Program di Institut Bankir Indonesia, Jakarta (1991), dan 3. Magister Keuangan di Institut Teknologi Bandung, Bandung (2000). <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in Economics from Universitas Jayabaya, Jakarta (1990), 2. Professional Development Program at the Indonesian Bankers Institute, Jakarta (1991), and 3. Master's degree in Finance from Institut Teknologi Bandung, Bandung (2000).
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Mengawali karir di Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan menjabat sebagai Credit Analyst, Bank BNI (Persero) Tbk. (1991), dan berbagai posisi hingga Group Head atau Vice President (2001), Chairman Financial Intelligence (2001). Kemudian menduduki jabatan diantaranya: Commissioner of Bali Bank (2002) , Director of Permata Bank (2002 – 2006), Corporate Secretary of Bank BNI (2007), Managging Director PT. Tuban Petrochemical (2008), Investment Director of PT. Jamsostek (2008 – 2012), President Director of PT. Jamsostek (2012 – 2013), President Director of BPJS Ketenagakerjaan (2014-2016), Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (Juli 2017-saat ini), dan Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (Januari 2017-saat ini).</p> <p>Served at Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, as Credit Analyst, BNI (Persero) Tbk. (1991), and various positions up to Group Head or Vice President (2001), Chairman of Financial Intelligence (2001). Then held several positions including: Commissioner of Bali Bank (2002), Director of Permata Bank (2002 - 2006), Corporate Secretary of Bank BNI (2007), Managing Director of PT. Tuban Petrochemical (2008), Investment Director of PT. Jamsostek (2008 - 2012), President Director of PT. Jamsostek (2012 - 2013), President Director of BPJS Employment (2014 - 2016), President Commissioner at PT Pelabuhan Tanjung Priok (July 2017- present), and President Commissioner at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (January 2017- present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama IPC sejak 22 April 2016, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016.</p> <p>First appointed as IPC President Director in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 22 April 2016 - 21 April 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: April 22, 2016 - April, 21 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak 26 Juli 2017 dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. sejak 19 Januari 2017.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as President Commissioner in Subsidiary, PT Pelabuhan Tanjung Priok from July 26, 2017, and PT Indonesia Vehicular Terminal Tbk. from January 19, 2017.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>



Saptono R. Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Commercial and Business Development Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 14 Desember 1957. Berusia 61 tahun per Desember 2018. Born in Purworejo, Central Java, on December 14, 1957. 61 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1983), dan 2. Master bidang <i>Hydraulic Engineering</i> dari Internasional Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda (1987). <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1983), and 2. Master's degree in Hydraulic Engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Netherlands (1987).
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Sejumlah posisi di PT Pelabuhan Indonesia yang pernah dijabat antara lain: Kepala Dinas Perencanaan Teknik Sipil di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Dinas Teknik Sipil Wilayah I (1995), Kepala Divisi Teknik (Manajer Teknik) (2000), General Manager Cabang Pelabuhan Banten (2000-2002), General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2004-2008), Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (2008) dan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (2009).</p> <p>A number of positions at PT Pelabuhan Indonesia that have been held include: Head of the Civil Engineering Planning Office in Tanjung Priok Port Branch, Head of Civil Engineering Region I (1995), Head of Engineering Division (Technical Manager) (2000), Banten Port General Manager (2000-2002), Tanjung Priok Port Branch General Manager (2004-2008), President Director of PT Multi Terminal Indonesia (2008) and Director of Commercial and Business Development (2009).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2009, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-108/MBU/2009 tanggal 08 Mei 2009, kemudian menjabat kembali pada SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2009, based on Ministry of SOEs' Decree number KEP-108/MBU/2009 dated May 8, 2009, and reappointed base on SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 08 Mei 2009 - 11 Maret 2014 (Periode Pertama), 11 Maret 2014 - 10 Maret 2019 (Periode Kedua).</p> <p>Period based on appointment decree: May 8, 2009 - March 11, 2014 (First Period), March 11, 2014 - March 10, 2019 (Second Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu Komisaris Utama PT IPC Terminal Petikemas sejak 01 November 2014, serta Komisaris Utama PT Multi Terminal Indonesia sejak 20 April 2017.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as the President Commissioner of the Subsidiary, namely the President Commissioner of PT IPC Container Terminal since 2014 - present and the President Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia since 2017.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil. None</p>



Dani Rusli Utama

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko
Technical and Risk Management Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Bandung, Jawa Barat, 14 Januari 1971. Berusia 47 tahun per Desember 2018. Born in Bandung, West Java, on January 14, 1971. 47 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994), 2. Magister Manajemen Bidang Infrastruktur dari Yokohama University, Jepang (1999). 3. Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994), 4. Master's degree in Infrastructure Management from Yokohama University, Japan (1999).
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Palembang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2010), Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta Internasional Container Terminal (2010-2011), Kepala Biro Strategis Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012), Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012), dan Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (2015), Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia (Januari 2017-saat ini), serta Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (Januari 2017-saat ini),</p> <p>Served as General Manager of Palembang Port PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2010), Director of Human Resources at PT Jakarta Internasional Container Terminal (2010-2011), Head of Strategy Bureau at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012), President Director at PT Pelabuhan Indonesia (2012), and President Director at PT Jakarta International Container Terminal (2015), President Commissioner at PT Jasa Armada Indonesia (January 2017- present), and President Commissioner at PT Pengerukan Indonesia (January 2017-present),</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 16 Mei 2016 - 15 Mei 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: May 16, 2016 - Mei 15, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di entitas anak yaitu PT Jasa Armada Indonesia sejak 19 Januari 2017 dan PT Pengerukan Indonesia sejak 20 Januari 2017.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as the President Commissioner of subsidiary, PT Jasa Armada Indonesia from January 19, 2017, and PT Pengerukan Indonesia from January 20, 2017.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>



Prasetyadi

Direktur Operasi dan Sistem Informasi
Operations and Information Systems Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia. Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 07 Agustus 1969. Berusia 49 tahun per Desember 2018. Born in Bandung, West Java, on August 7, 1969. 49 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Teknik Bidang Mesin/Konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (1993), 2. Master pada bidang <i>Port Engineering</i> dari University of Le Havre, Prancis (1998), dan 3. Magister bidang Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2015). <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in Engineering / Construction Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (1993), 2. Master's degree in Port Engineering from the University of Le Havre, France (1998), and 3. Master's degree in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (2015).
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Supervisor Peralatan Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Cabang Makassar, PT Pelindo IV (2000-Maret 2002), Kepala Dinas Peralatan Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Cabang Makassar, PT Pelindo IV (Maret 2002-November 2002), Asisten Senior Manager Alat Bongkar Muat PT Pelindo IV (November 2002-Mei 2004), Asisten Senior Manager Sigi dan Rekayasa PT Pelindo IV (Mei 2004-Maret 2007), Senior Manager Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan PT Pelindo IV (Maret 2007-Maret 2009), Senior Manager Pengebangan Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV (Maret 2009-Desember 2010), Staf Ahli Direksi PT Pelindo III (Januari 2011-Desember 2011), Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo III (Januari 2012-Desember 2013), Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong (Januari 2014-Mei 2016), Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia (Juli 2017 - saat ini), Komisaris New Priok Container Terminal 1 (Maret 2018 - saat ini), Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (November 2016-saat ini), serta Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (Januari 2017 - saat ini).</p> <p>Served as Container Equipment Supervisor at Makassar Branch Container Terminal, PT Pelindo IV (2000-March 2002), Head of Container Equipment Office at Makassar Branch Container Terminal, PT Pelindo IV (March 2002-November 2002), Senior Assistant Manager PT Pelindo IV Loading Equipment (November 2002-May 2004), Senior Assistant Manager Sigi and Engineering at PT Pelindo IV (May 2004-March 2007), Senior Manager Building and Equipment Maintenance at PT Pelindo IV (March 2007-March 2009), Senior Manager Port Facilities Development at PT Pelindo IV (March 2009-December 2010), Expert Staff for the Board of Directors at PT Pelindo III (January 2011-December 2011), Senior Manager Facility Maintenance at PT Pelindo III (January 2012-December 2013), and President Director at PT Terminal Teluk Lamong (January 2014-May 2016), President Commissioner at PT Electronic Data Interchange Indonesia (July 2017 - present), Commissioner at New Priok Container Terminal 1 (March 2018 - present), President Commissioner at PT Terminal Petikemas Indonesia (November 2016-present), and President Commissioner at PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (January 2017 - present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2016, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 16 Mei 2016 - 15 Mei 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: May 16, 2016 - Mei 15, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia sejak 18 Juli 2017, Komisaris New Priok Container Terminal 1 sejak 12 Maret 2018, Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia sejak 15 November 2016, dan Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sejak 31 Januari 2017.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as President Commissioner at PT Electronic Data Interchange Indonesia from July 18, 2017, Commissioner at New Priok Container Terminal 1 from March 12, 2018, President Commissioner at PT Terminal Petikemas Indonesia from November 15, 2016, and President Commissioner at PT Integrasi Logistik Cipta Solusi from January 31, 2017.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None.</p>



Widyaka Nusapati
Direktur Keuangan
Finance Director

PROFIL DIREKSI
Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Jakarta, pada tahun 12 Januari 1967. Berusia 51 tahun per Desember 2018. Born in Jakarta, on January 12, 1967. 51 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ilmu Perikanan Bidang Manajemen Sumberdaya Perairan di Institut Pertanian Bogor (IPB) (1990), dan 2. Master in Business Administration (MBA) Major in Financial Management/Quantitative Analysis, Cleveland State University (1994). <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor of Fisheries Science degree in Water Resources Management from Institut Pertanian Bogor (IPB) in (1990), and 2. Master in Business Administration (MBA) Majoring in Financial Management/Quantitative Analysis from Cleveland State University in (1994)
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Senior Analyst di Mashill Dresdner Kleinwort Benson Securities (Januari 1995 – Juli 1997), Head of Research and Corporate Finance Manager di PT Sigma Batara Securities (Agustus 1997 – Juli 2000), Dosen pada bidang Corporate Finance and Financial Analysis di Magister Management Sahid University (Juni 1998 – Juni 2004), Team Leader Shareholder Settlement and Asset disposal di Assets Management Investment Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (Agustus 2000 – Juni 2002), Group Head Assets Management Investment di Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKS) (Juni 2002 – Mei 2004), Director Business Advisory and Finance Administration di PT PNM Investment Management (Entitas Anak PT PNM Persero) (Mei 2004 – Februari 2007).</p> <p>Served as Senior Analyst at Mashill Dresdner Kleinwort Benson Securities (January 1995 - July 1997), Head of Research and Corporate Finance Manager at PT Sigma Batara Securities (August 1997 - July 2000), Lecturer in Corporate Finance and Financial Analysis at Magister Management Sahid University (June 1998 - June 2004), Team Leader for Shareholder Settlement and Asset Disposal at Assets Management Investment Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (August 2000 - June 2002), Assets Management Investment Group Head at the Financial Sector Policy Committee (FSPC) - Financial Sector Policy Committee (KKS) (June 2002 - May 2004), Business Advisory and Finance Administration Director at PT PNM Investment (subsidiary of PT PNM Persero) - state owned enterprise (May 2004 - Feb 2007).</p> <p>Beliau juga menduduki berbagai posisi penting antara lain: Finance and Business di PT PNM Persero (Mei 2004 – Februari 2007), President Director di PT Wawasan Global Citrajaya (2012 – 2014), Komisaris di PT PNM Investment Management – Entitas Anak di PT PNM Persero (2012 – 2014), Finance Director di PT Relndo (ReAsuransi Indonesia Utama) Persero (September 2013 – November 2014), Finance Director di PT IndonesiaRe (ReAsuransi Indonesia Utama) Persero (November 2014 – November 2015), Founder di PT Widyaka Propertindo (Developer Properti) (2015-Juli 2018) dan Investment Director di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Persero (Juli 2018-November 2018)</p> <p>Has held various important positions including: Finance and Business at PT PNM Persero - state owned enterprise (May 2004 - Feb 2007), President Director at PT Wawasan Global Citrajaya - state owned enterprise (2012 - 2014), Commissioner at PT PNM Investment Management - subsidiary of PT PNM Persero (2012 - 2014), Finance Director at PT Relndo (ReAsuransi Indonesia) - state owned enterprise (Sep 2013 - Nov 2014), Finance Director at PT IndonesiaRe (ReAsuransi Indonesia Utama) - state owned enterprise (Nov 2014 - Nov 2015), Founder of PT Widyaka Propertindo, a Developer Property (2015-July 2018) and Investment Director at PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri - state owned subsidiary (July 2018-November 2018)</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 26 November 2018, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018.</p> <p>First appointed as IPC Director on November 26, 2018, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 26 November 2018 - 25 November 2023 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: November 26, 2018 - November 25, 2023 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak sebagai Founder di PT Widyaka Propertindo (Developer Properti) (2015-Juli 2018) dan Investment Director di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Persero (Juli 2018-November 2018).</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries as Founder of PT Widyaka Propertindo (Property Developer) (2015-July 2018) and Investment Director at PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Persero (July 2018-November 2018).</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None.</p>



Rizal Ariansyah

Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum
HR and Legal Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 24 Juni 1974. Berusia 44 tahun per Desember 2018. Born in Surabaya, East Java, on June 24, 1974. 44 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana bidang hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan 2. Master bidang hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2006. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in law from University of Indonesia in 1996, and 2. Master's degree in law from University of Indonesia in 2006.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Vice President Group Hukum di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Desember 1999-Februari 2004), Senior Manager Hukum di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2004-Agustus 2005), Senior Vice President Group Hukum di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (September 2005-Mei 2009), dan Partner di Radjiman Bilitea & Partners (Juli 2009-April 2012), Executive Vice President di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2012-September 2016), Executive Vice President di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (September 2016 - Juli 2017), Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (Februari 2018-saat ini), Vice President Commissioner PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (Maret 2018-saat ini).</p> <p>Served as Legal Group Vice President at the National Bank Restructuring Agency (December 1999-February 2004), Senior Legal Manager at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2004-August 2005), Legal Group Senior Vice President at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (September 2005-May 2009), and Partner at Radjiman Bilitea & Partners (July 2009-April 2012), Executive Vice President in PT Asset Management Company (Persero) (April 2012-September 2016), also Executive Vice President in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (September 2016 - July 2017), President Commissioner at PT Rumah Sakit Pelabuhan (February 2018- present), Vice President Commissioner at PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (March 2018- present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2017, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2017, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 14 Juli 2017 - 13 Juli 2022 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: July 14, 2017 - Juli 23, 2022 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan sejak 19 Februari 2018, Vice President Commissioner PT JICT berdasarkan <i>Circular Resolutions of Shareholders</i> PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sejak 22 Maret 2018.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as President Commissioner at the Port Hospital since February 19, 2018, Vice President Commissioner at PT JICT based on PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Shareholders Circular Resolution from March 22, 2018 to date.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>



Riry Syeried Jetta
Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan
Subsidiary Management Director

PROFIL DIREKSI
 Board of Directors' Profiles

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth / Age</i>	Lahir di Jakarta, pada 08 Juni 1969. Berusia 49 tahun per Desember 2018. Born in Jakarta, on June 8, 1969. 49 years old as of December 2018.
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana bidang Teknik Mesin dari Universitas Pancasila pada tahun 1995, 2. Master bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1999, dan 3. Doktor bidang Keuangan dari Universitas Padjajaran pada tahun 2009. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Universitas Pancasila in 1995, 2. Master's degree in Management from Universitas Indonesia in 1999, and 3. Doctorate in Finance from Universitas Padjajaran in 2009.
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2007-2008), Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2008-2014), serta Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) (2014-2016), Ketua Dewan Pengawas KSO TPK Koja (Februari 2017-saat ini), Komisaris Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (April 2017-saat ini), dan Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (Februari 2018-saat ini).</p> <p>Served as Finance Director at PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2007-2008), also Managing Director at PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2008-2014), President Director at PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) (2014- 2016), Supervisory Board Chairman at KSO TPK Koja (February 2017-present), President Commissioner at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (April 2017-present), and President Commissioner at PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (February 2018-present).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016.</p>
Periode Jabatan <i>Position Period</i>	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 16 Mei 2016 - 15 Mei 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on appointment decree: May 16, 2016 - Mei 15, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Positions</i>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak 20 April 2017, Ketua Dewan Pengawas KSO TPK Koja sejak 22 Februari 2017 dan Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia sejak 19 Februari 2018.</p> <p>Has no concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by serving as President Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia from April 20, 2017, Supervisory Board Chairperson at KSO TPK Koja from February 22, 2017, and President Commissioner at PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia from February 19, 2018.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC <i>Share Ownership in IPC</i>	<p>Nihil.</p> <p>None</p>

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profiles

1. Elvyn G. Masassya

Direktur Utama
President Director

2. Saptono R. Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Commercial and Business Development Director

3. Widyaka Nusapati

Direktur Keuangan
Finance Director

4. Rizal Ariansyah

Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum
HR and Legal Director

5. Prasetyadi

Direktur Operasi dan Sistem Informasi
Operations and Information Systems Director

6. Dani Rusli Utama

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko
Technical and Risk Management Director

7. Riry Syeried Jetta

Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan
Subsidiary Management Director



PROFIL DIREKSI
Board of Directors' Profiles



5

6

7

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

IPC memiliki 2 (dua) kategori karyawan yaitu karyawan organik dan karyawan non organik. Karyawan organik adalah Pekerja Perusahaan termasuk Pekerja Dalam Masa Percobaan yang diangkat/ditetapkan oleh Perusahaan yang memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP) sedangkan karyawan non organik adalah Pekerja Non Organik adalah Pekerja Perusahaan ditetapkan oleh Perusahaan yang tidak memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP). Profil karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan masa kerja yang disajikan pada laporan tahunan ini adalah untuk karyawan organik.

IPC has 2 (two) categories of employees, namely organic employees and non-organic employees. Organic employees are Company Employees including Workers during their Trial Period who are appointed / determined by Companies that have a Port Worker Number (NIPP), while non-organic employees are Company Workers determined by Companies that do not have a Port Worker Number (NIPP). Employee profiles based on organizational level, education level, age, gender and years of service in this annual report are for organic employees.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Tabel Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Level Organisasi, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Level Organisasi Organization Level	2018			2017		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	2	1	1	2
3	10	2	12	11	1	12
4	44	6	50	43	9	52
5	26	0	26	25	2	27
6	58	3	61	62	2	64
7	111	15	126	105	13	118
8	92	15	107	83	13	98
9	175	23	198	186	24	210
10	447	110	557	376	66	442
11	273	67	340	290	98	388
12	307	102	409	325	78	403
13	151	46	197	185	70	255
14	168	33	201	172	44	216
15	198	6	204	243	12	255
16	102	11	113	105	11	116
Jumlah Total	2.163	440	2.603	2.212	444	2.656

TOTAL EMPLOYEES BASED ON ORGANIZATIONAL LEVEL

Number of Organic Employees by Organization Level in the Parent Company, as follows:

(people)

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
 Employee Profile and Competency Development

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan <i>Education Level</i>	2018			2017		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Pasca Sarjana	331	81	412	263	61	324
Sarjana	878	230	1.108	816	192	1.008
Diploma	237	79	316	317	113	430
SLTA	706	50	756	805	78	883
SLTP	11	-	11	11	-	11
Jumlah Total	2.163	440	2.603	2.212	444	2.656

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EDUCATIONAL LEVEL

Number of Employees Based on Education Level at the Parent Company, as follows:

(people)

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Uraian <i>Description</i>	2018		2017	
	Pegawai Organik <i>Organic Employees</i>	2.603		2.656
Pegawai Non Organik <i>Non Organic Employees</i>	6.489		6.335	
Jumlah Total	9.092		8.991	

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Number of Employees Based on Employment Status in the Parent Company, as follows:

(people)

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Rentang Usia <i>Age Group</i>	2018			2017		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
≥55	48	3	51	42	7	49
51 ≤ x < 55	173	10	183	167	10	177
46 ≤ x < 51	427	33	460	370	31	401
36 ≤ x < 46	711	71	782	771	61	832
26 ≤ x < 36	761	311	1.072	773	283	1.056
<26	43	12	55	89	52	141
Jumlah Total	2.163	440	2.603	2.212	444	2.656

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON AGE GROUP

Number of Employees Based on Age Group in the Parent Company, as follows:

(people)

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Induk Perusahaan, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Uraian <i>Description</i>	2018	2017
Pria <i>Male</i>	2.163	2.212
Wanita <i>Female</i>	440	444
Jumlah Total	2.603	2.656

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON GENDER

Number of Employees Based on Gender, as follows:

(people)

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja pada Induk Perusahaan, sebagai berikut:

(dalam satuan orang)

Masa Kerja <i>Period of Service</i>	2018			2017		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
≥35	17	2	19	30	9	39
30 ≤ x < 35	12	3	15	24	3	27
25 ≤ x < 30	183	6	189	170	2	172
20 ≤ x < 25	408	30	438	361	26	387
15 ≤ x < 20	223	24	247	293	27	320

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON PERIOD OF SERVICE

Number of Employees Based on Period of Service in the Parent Company, as follows:

(people)

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
 Employee Profile and Competency Development

Masa Kerja <i>Period of Service</i>	2018			2017		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
10 ≤ x < 15	252	52	304	197	41	238
5 ≤ x < 10	566	247	813	518	206	724
<5	502	76	578	619	130	749
Jumlah Total	2.163	440	2.603	2.212	444	2.656

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

KEBIJAKAN

Dalam menjalankan pengembangan kompetensi karyawan, IPC mengacu pada Surat Menteri BUMN No S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham tersebut, seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System (ITMS)* dan mengirimkan talenta perusahaan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN, yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi. Anggaran untuk Program Pengembangan Human Capital/SDM agar dialokasikan dalam RKAP minimal 5% dari total biaya *human capital/ SDM* dalam 1 tahun.

Untuk mengimplementasikan Program Pengembangan Karyawan yang terstruktur dan terencana, IPC merujuk kepada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II-16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Surat Keputusan Direksi tersebut, dirancang dengan tujuan sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan Program Pengembangan Karyawan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Seluruh karyawan IPC memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pengembangan karyawan dalam level organisasi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Perusahaan mulai menjalankan kembali Program Pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan level jabatan yaitu Program Kepemimpinan Korporat. Secara garis besar, Program Kepemimpinan Korporat terbagi menjadi dua yaitu :

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

POLICY

In carrying out employee competency development, IPC refers to the SOE Ministry's Letter No. S-564/MBU/08/2018 dated August 31, 2018 concerning Shareholders / Capital Owners Aspirations for Preparation of the Company's Work Plan and Budget in 2019. Based on the Shareholders' aspirations, all SOEs are required to build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company talent to the talent pool at the Ministry of SOEs, which should consist of at least 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for a minimum of 3 successors per Director's position. The Human Capital / HR Development Program budget as allocated in the RKAP should be at least 5% of the total human capital / HR costs in 1 year.

To implement a structured and planned Employee Development Program, IPC refers to the of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree Number: HK.568/30/12/7/PI.II-16 dated December 30, 2016 concerning Worker Development in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Board of Directors' Decree was designed with the aim of guiding the Employee Development Program in line with the Company's Vision, Mission and Long-Term Plan. All IPC employees receive equal opportunities for employee development at the organizational level.

COMPETENCY DEVELOPMENT BASED ON POSITION LEVEL

2018 is the year in which the Company begins to re-run the Learning Program that is adjusted based on the position level, namely the Corporate Leadership Program. Broadly speaking, the Corporate Leadership Program is divided into two, namely:

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

- | | |
|---|---|
| <p>1. Pengembangan Karir.
Program Pengembangan Karir adalah pelatihan atau serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada Karyawan sesuai dengan zona jabatannya.</p> | <p>1. Career development.
Career Development Program is training or a series of leadership training given to Employees in accordance with their position zones.</p> |
| <p>2. Program Persyaratan Karir.
Program Persyaratan Karir adalah serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada Karyawan yang akan naik zona karir.</p> | <p>2. Career Requirements Program.
Career Requirements Program is a series of leadership training given to employees who will rise in the career zone.</p> |

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018

Table of Competency Development Based on Position Level in 2018

Level Jabatan Position Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose	Jumlah Peserta Number of Participants
BOD-1	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>Executive Engagement</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memahami <i>Corporate Value</i>. Meningkatkan semangat kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan. Meningkatkan kecakapan berkepedulian dalam prespektif yang luas. Meningkatkan Profesionalisme dengan prinsip 5K. 	Batch I : 52 Batch II : 30
BOD-1	Pengembangan Karir Career Development	<i>Executive Development Program II - Managing the Business</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengajak para Direksi dan VP IPC untuk berpikir secara global dengan tetap berkepribadian lokal. Memahami pengembangan bisnis yang tetap mengedepankan ketahanan nasional. Memahami proses pemasaran IPO dan kiat suksesnya. Mampu berfikir kreatif sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi perusahaan. 	Batch 1 : 48
BOD-1	Persyaratan Karir Career Requirement		<ol style="list-style-type: none"> Mengajak para Direksi dan VP IPC untuk berpikir secara global dengan tetap berkepribadian lokal. Memahami pengembangan bisnis yang tetap mengedepankan ketahanan nasional. Memahami proses pemasaran IPO dan kiat suksesnya. Mampu berfikir kreatif sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi perusahaan. 	Batch 1 : 48
			<ol style="list-style-type: none"> Inviting IPC Directors and VPs to think globally while maintaining a local personality. Understanding business development that continually promotes national security. Understanding the IPO marketing process and success tips Able to think creatively so as to produce new innovations for the company. Able to think creatively so as to produce new innovations for the company.. 	

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
Employee Profile and Competency Development

Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
BOD-1	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>Executive Engagement Direktur Anak Perusahaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan <i>leader</i> yang cakap dalam mengembangkan timya. 2. Menciptakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memimpin para milenials. 3. Membekali para pemimpin dengan keterampilan dan <i>tools coaching</i>. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kondusif, mendorong komunikasi menjadi lebih efektif, membangun kepercayaan serta meningkatkan hubungan kerja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Creating competent team development leaders. 2. Creating appropriate leadership styles to lead milenials. 3. Equipping leaders with coaching skills and tools. 4. Creating an open & conducive work environment, encouraging communication to be more effective, building trust and improving work relations. 	Batch 1 : 30
BOD-2	Pengembangan Karir Career Development	<i>MDP Managing The Business</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengidentifikasi kesempatan bisnis dari berbagai sudut pandang. 2. Memahami proses bisnis dan berbagi faktor pendukung serta faktor penghambat. 3. Membuat strategi bisnis baru melalui pendekatan inovasi dan membuat perencanaan strategi bisnis hingga proses yang efektif. <ol style="list-style-type: none"> 1. Understanding and identifying business opportunities in various fields. 2. Understanding business processes and sharing supporting factors and inhibiting factors. 3. Creating a new business strategy through an innovation approach and planning a business strategy with an effective process. 	Batch 1 : 22
BOD-2	Pengembangan Karir Career Development	<i>MDP Interpersonal Skill</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan dan kesempatan untuk melakukan kerjasama. 2. Menetapkan kemajuan dan pengembangan solusi bersama. 3. Menerapkan situasi yang saling menguntungkan dalam menyelesaikan masalah. 4. Memeriksa pemahaman mengenai tindakan yang diusulkan dan mendapatkan kesepakatan mengenai solusi. 5. Melakukan koordinasi dengan <i>Key Person eksternal</i> perusahaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. 6. Menjalni hubungan kerja secara luas dalam meraih peluang bisnis. <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifying and knowing the needs and opportunities for collaboration. 2. Establishing progress and developing joint solutions. 3. Applying a situation that is mutually beneficial in solving problems. 4. Checking understanding of the proposed actions and getting agreement on the solutions. 5. Coordinating with the company's external Key Persons when running the company's business. 6. Establishing extensive working relationships in achieving business opportunities. 	Batch 1 : 23

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
BOD-2	Pengembangan Karir <i>Career Development</i>	<i>Character Building Managerial Development Program</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada. 2. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi. 3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien. 4. Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan. 	<i>Batch 1 : 60</i>
BOD-2	Pengembangan Karir <i>Career Development</i>	<i>Executive Development Program I - Leadership (Coaching)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan leader yang cakap mengembangkan timnya. 2. Menciptakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memimpin para milenials. 3. Membekali para pemimpin dengan keterampilan dan <i>tools coaching</i>. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kondusif, mendorong komunikasi menjadi lebih efektif, membangun kepercayaan serta meningkatkan hubungan kerja. 	<i>Batch I : 13 Batch II : 15</i>
BOD-3	Persyaratan Karir <i>Career Requirement</i>	<i>Character Building ODP</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada. 2. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi. 3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien. 4. Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan. 	<i>Batch I : 60 Batch II : 110 Batch III : 60</i>

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
 Employee Profile and Competency Development

Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
BOD-3	Persyaratan Karir Career Requirement	ODP Managing Business	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prinsip-prinsip bisnis model dalam memperbaharui strategi perusahaan untuk menghadapi persaingan dan situasi bisnis yang berubah-ubah. 2. Memahami dan mengidentifikasi kesempatan bisnis dari berbagai sudut pandang. 3. Mempelajari proses bisnis dan berbagai faktor pendukung serta faktor penghambat. 4. Membuat strategi bisnis baru melalui pendekatan inovasi. 5. Membuat perencanaan strategi bisnis hingga proses eksekusi yang efektif. 	<i>Batch I : 26</i> <i>Batch II : 25</i> <i>Batch III : 30</i>
BOD-3	Persyaratan Karir Career Requirement	ODP Interpersonal Skill (Building Business Partnership)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan dan kesempatan untuk melakukan kerjasama. 2. Menetapkan kemajuan dan pengembangan solusi bersama. 3. Menerapkan situasi yang saling menguntungkan dalam menyelesaikan masalah. 4. Melakukan koordinasi dengan <i>Key Person</i> eksternal perusahaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. 5. Menjalin hubungan kerja secara luas dalam meraih peluang bisnis. 	<i>Batch I : 23</i>

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
BOD-3	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>Managerial Development Program 1 Batch 1 (Series Coaching)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Menciptakan leader yang cakap mengembangkan timnya. Menciptakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memimpin para milenials. Membekali para pemimpin dengan keterampilan dan <i>tools coaching</i>. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka & kondusif, mendorong komunikasi menjadi lebih efektif, membangun kepercayaan serta meningkatkan hubungan kerja. <ol style="list-style-type: none"> Creating competent team development leaders. Creating appropriate leadership styles to lead milenials. Equipping leaders with coaching skills and tools. Creating an open & conducive work environment, encouraging communication to be more effective, building trust and improving work relations. 	<p><i>Batch I : 20</i> <i>Batch II : 20</i> <i>Batch III : 20</i> <i>Batch IV : 19</i></p>
BOD-3	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>ODP Program Personal Aspect</i>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan etos kerja, kepercayaan diri, akuntabilitas, tanggung jawab, mental positif, antusias dan bahagia untuk melayani perusahaan. Memahami proses kreativitas dan potensi bakat yang dimiliki. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas. <ol style="list-style-type: none"> Creating competent team development leaders. Creating appropriate leadership styles to lead milenials. Equipping leaders with coaching skills and tools. Creating an open & conducive work environment, encouraging communication to be more effective, building trust and improving work relations. 	<p><i>Batch I : 13</i> <i>Batch II : 43</i> <i>Batch III : 23</i> <i>Batch IV : 22</i></p>
BOD-4	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>Character Building ODP</i>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan dalam mengoptimalkan Sumber Daya yang dimiliki dan peluang yang ada. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Meningkatkan kemampuan dan penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan Sumber Daya yang efisien. Meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi antar Unit ditingkat Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> Improve work ethics, self-confidence, accountability, responsibility, mental positive, enthusiastic and happy to serve the company. Understanding the process of creativity and potential talent possessed. Improving ability in effective use of time, efficient decision making and resources. Increasing the cooperation and communication effectiveness between units at the Head Office, Branch and Subsidiary levels. 	<p><i>Batch I : 60</i></p>

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
 Employee Profile and Competency Development

Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
BOD-4	Persyaratan Karir Career Requirement	<i>Officer Development Program 1 (Series Coaching)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Menciptakan leader yang cakap dalam mengembangkan anak buah nya. Menciptakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memimpin para milenials. Membekali para pemimpin dengan keterampilan dan <i>tools coaching</i>. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka & kondusif, mendorong komunikasi menjadi lebih efektif, membangun kepercayaan serta meningkatkan hubungan kerja. <ol style="list-style-type: none"> Improving ability to optimize available resources and opportunities. Improving ability to face obstacles and challenges faced. Improving ability in effective use of time, efficient decision making and resources. Increasing the cooperation and communication effectiveness between units at the Head Office, Branch and Subsidiary levels. 	Batch I : 28 Batch II : 28

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCE DEVELOPMENT COSTS

Secara keseluruhan realisasi anggaran pelatihan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Overall the realization of training budget for 2018 is as follows:

Biaya Pengembangan Kompetensi (dalam Rp) <i>Competency Development Cost (in Rp)</i>		Pertumbuhan <i>Growth</i>	
2018	2017	dalam mata uang <i>in currency</i>	dalam persen <i>in percentage</i>
24.843.949.074	19.750.906.337	5.093.042.737	25,78

Adapun realisasi biaya untuk Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan adalah sebesar Rp6.907.020.000.

The cost realization for the Competency Development Program Based on Position Level is Rp6,907,020,000.

Jabatan <i>Position</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Biaya <i>Cost</i>
BOD-1	<i>Executive Engangement</i>	755.820.000
BOD-1	<i>Executive Development Program II-Managing the Business</i>	127.500.00
BOD-1	<i>Executive Engangement Direktur Anak Perusahaan</i>	360.000.000
	Total	1.243.320.000
BOD-2	<i>Executive Development Program I-Leadership (Coaching)</i>	279.000.000
BOD-2	<i>MDP Managing The Business</i>	310.000.000
BOD-2	<i>MDP Interpersonal Skill</i>	74.800.000
BOD-2	<i>Character Building Managerial Development Program</i>	612.000.000

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

Jabatan Position	Program Pelatihan Training Program	Biaya Cost
Total		1.275.800.000
BOD-3	Character Building ODP	1.513.000.000
BOD-3	ODP Managing Business	456.000.000
BOD-3	ODP Interpersonal Skill (Building Business Partnership)	73.600.000
BOD-3	ODP Program Personal Aspect	418.300.000
BOD-3	Managerial Development Program Leadership Series Coaching	725.400.000
JUMLAH TOTAL		3.186.300.000
BOD-4	Character Building ODP	720.000.000
BOD-4	Officer Development Program Leadership Series Coaching	481.600.000
JUMLAH TOTAL		1.201.600.000
JUMLAH TOTAL		Rp6.907.020.000

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Divisi Pembelajaran SDM bekerjasama dengan PT PMLI melakukan evaluasi setelah pelaksanaan pelatihan baik terhadap pelatihan (evaluasi tingkat 1) maupun hasil pembelajaran terhadap peserta (evaluasi tingkat 2). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari hasil pengukuran reaksi peserta terhadap pelatihan. Selain itu, evaluasi tingkat 2 dilakukan agar mengetahui hasil pembelajaran peserta setelah mengikuti program tersebut.

COMPETENCY DEVELOPMENT EVALUATION

The HR Learning Division collaborated with PT PMLI to evaluate the training for both training (level 1 evaluation) and learning outcomes for participants (level 2 evaluation). Its aim was to improve the quality of implementation based on the participants' reactions to training. In addition, a level 2 evaluation was conducted to find out the participants' learning outcome after participating in the program.

Tabel Kategori penilaian

NO	HASIL EVALUASI EVALUATION RESULT	KATEGORI CATEGORY
1	0 - 20	POOR
2	21 - 40	BAD
3	41 - 60	AVERAGE
4	61 - 80	GOOD
5	81 - 100	EXCELLENT

Table Evaluation Category

Pada evaluasi tingkat 1 yaitu penilaian terkait reaksi peserta terhadap pelatihan *inhouse* selama Tahun 2018 mendapatkan rata-rata nilai 84,7 dari skala 0-100 atau dikategorikan *Excellent*. Adapun untuk evaluasi pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut :

The level 1 participants' reaction to in-house training evaluation during 2018 received an average score of 87 from a 0-100 scale, or Excellent. The evaluation of competency development is as follows:

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
 Employee Profile and Competency Development

Level Peserta <i>Participant Level</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Evaluasi Pelatihan Tingkat 1 <i>Training Evaluation Level 1</i>
BOD-1	<i>Executive Engagement</i>	87,2
BOD-1	<i>Executive Development Program II - Managing the Business</i>	90
BOD-1	<i>Executive Engagement Direktur Anak Perusahaan</i>	84,4
	Rata-Rata <i>Average</i>	87,2
BOD-2	<i>MDP Managing The Business</i>	70
BOD-2	<i>MDP Interpersonal Skill</i>	82
BOD-2	<i>Character Building Managerial Development Program</i>	72
BOD-2	<i>Executive Development Program I - Leadership (Coaching)</i>	Batch 1 = 87,3 Batch 2 = 85
	Rata-Rata <i>Average</i>	79.26
BOD-3	<i>Character Building ODP</i>	Batch 1 = 79,4 Batch 2 = 79,4 Batch 3 = 79,4
BOD-3	<i>ODP Managing Business</i>	Batch 1 = 87,7 Batch 2 = 86 Batch 3 = 87,7
BOD-3	<i>ODP Interpersonal Skill (Building Business Partnership)</i>	81
BOD-3	<i>ODP Program Personal Aspect</i>	Batch 1 = 88,3 Batch 2 = 86,7
BOD-3	<i>Managerial Development Program Leadership Series Coaching</i>	Batch 1 = 93 Batch 2 = 86 Batch 3 = 89,3 Batch 4 = 68
	Rata-Rata <i>Average</i>	83.9
BOD-4	<i>Character Building OpDP</i>	78,5
BOD-4	<i>Officer Development Program Leadership Series Coaching</i>	Batch 1 = 95,4 Batch 2 = 92,4
	Rata-Rata <i>Average</i>	88.7

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Perusahaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk Program Pengembangan Karyawan. Rencana Program Pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN FOR 2019

In 2019, the Company allocated a budget of Rp75 billion for the Employee Development Program. The Learning Program Plan will be implemented in 2019 as follows:

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
I. Pendidikan <i>Education</i>			
1.	Pendidikan Dalam Negeri Domestic Education	1	7
2.	Pendidikan Luar Negeri Foreign Education	1	1
II. Pelatihan <i>Training</i>			
1	Dasar Korporat Corporate Basic	1	124
2	Wajib Korporat Corporate Obligation	9	227
3	Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership		
a.	Pengembangan Karir Career Development	8	311
b.	Persyaratan Karir Career Requirements	47	1.364
4	Lintas Akademi Cross Academy	19	308
5	Wajib & Keahlian Sekolah Mandatory & School Skills	197	2.407
III. Magang <i>Internship</i>			
1.	<i>Sisterport</i> Sisterport	1	12
2.	<i>Talent Exchange BUMN</i> Talent Exchange BUMN	1	18
3.	<i>Fellowship</i>	1	5
Jumlah I Total		286	4.784

Rencana Program Pembelajaran tersebut meliputi:

1. Program Pendidikan.
Ditujukan bagi karyawan yang masih melanjutkan pendidikannya sampai dengan tahun 2019.
2. Program Pelatihan
Fokus program pelatihan dan/atau serangkaian pelatihan bagi Karyawan dengan merujuk kepada Kompetensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga diharapkan Karyawan Perusahaan dapat menjadi *talent* di Perusahaan dan Kementerian BUMN. Selain itu, Perusahaan juga akan berfokus pada pengembangan karyawan yang dapat mendukung Proyek Strategis Nasional, *Holding* Kemaritiman dan juga Proyek Investasi Perusahaan.

The Learning Program plan includes:

1. Educational Program.
Aimed at employees who are still continuing their education in 2019.
2. Training Program
The training program focus for 2019 is the Corporate Leadership Program, namely to provide training and / or a series of training for Employees with reference to the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Competencies, so that Company Employees are expected to become talent for the Company and the Ministry of SOEs. In addition, the Company will also focus on developing employees to support the National Strategic Project, Maritime Holding and also the Corporate Investment Project.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Employee Profile and Competency Development

3. Magang Karyawan

Melalui kerjasama dengan *sisterport*, Perseroan akan kembali mengirimkan Karyawan terpilih untuk melaksanakan magang. Tidak hanya itu, Perseroan juga akan menjalin kerjasama dengan Pelabuhan yang dapat mendukung implementasi Proyek Strategis Nasional seperti otomatisasi Pelabuhan dan pengembangan pelabuhan Kijing. Perusahaan juga berpartisipasi dalam program magang yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui program *talent exchange* dimana karyawan dapat magang di Perusahaan BUMN lainnya dengan topik tertentu yang difasilitasi oleh Perusahaan BUMN tersebut. Diharapkan melalui program magang yang direncanakan, Karyawan dapat mempelajari dan memperoleh pengalaman langsung sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan di Perusahaan.

PERNYATAAN TENTANG KESETARAAN

IPC memiliki konsep kesetaraan untuk pekerjaannya yang ditunjukkan dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana pekerja adalah seluruh pekerja IPC, tanpa dibedakan berdasarkan SARA dan *gender*. Pengembangan karier maupun pelatihan di IPC juga tidak dibedakan berdasarkan SARA dan *gender*. Pengembangan karier telah diatur dalam SK Pengembangan SDM dan Pola Karir. Untuk Pengembangan SDM, syarat pengembangan pekerja didasarkan pada hasil *performance* dan *assessment*. Sedangkan untuk karier pekerja didasarkan pada hasil performansi, talenta, dan juga minat dari pekerja.

Untuk informasi lebih lengkap terkait Pembahasan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam Bab Fungsi Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

3. Employee Internship

In cooperation with *sisterport*, the Company will send selected Employees to carry out internships. Not only that, the Company will also collaborate with the Ports to support the National Strategic Projects, including Port automation and development of the Kijing port. The company will also participate in an apprenticeship program initiated by the Ministry of SOEs through a talent exchange program where employees can intern in other SOE companies for specific topics facilitated by the SOE Company. It is expected that through the planned internship program, employees can learn and obtain direct experience so that they can gain a more comprehensive knowledge that can be used in the Company.

STATEMENT OF EQUALITY

IPC has the concept of equality for its workers which is shown in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), where workers are all IPC workers, without differentiation based on SARA and gender. Career development and training in IPC are also not differentiated based on SARA and gender. Career development has been regulated in the Decree on HR Development and Career Patterns. For HR Development, workers' development requirements are based on results of performance and assessment. As for the career of workers based on the results of performance, talent, and also the interests of workers.

For more complete information related to the Discussion of Human Resources can be seen in the Business Supporting Review section of the Human Resources section in this Annual Report.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Number of issued and fully paid shares</i>	Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	Total
Pemerintah Republik Indonesia	1.444.029 lembar	100,00%	1.444.029.000.000.
Government of the Republic of Indonesia	1,444,029 shares		1,444,029,000,000.

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang Saham tunggal yang berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 dalam perseroan tersebut yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam Perseroan hingga saat ini.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih perusahaan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih perusahaan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi maupun Dewan Komisaris IPC tidak mempunyai kepemilikan saham atas IPC. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, IPC tidak menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

The Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the only owner and sole shareholder entitled to 1,444,029 shares with a nominal value of Rp1,000,000.00, or Rp1,444,029,000,000 in the company, which constitutes the total shares issued and placed and fully paid in the company to date.

20 LARGEST SHAREHOLDERS COMPOSITION

As of December 31, 2018, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Thus, there is no information to give regarding the 20 (twelve) largest shareholders composition.

SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE COMPOSITION

As of December 31, 2018, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Information regarding shareholders with 5% or more composition has been explained above.

COMMUNITY GROUP SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5%

As of December 31, 2018, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Information regarding community group shareholders with 5% or more composition companies has been explained above.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The IPC Board of Directors and Board of Commissioners do not own shares in IPC. 100% of the shares are owned by the Republic of Indonesia Government. As such, IPC does not present information regarding Board of Directors or Board of Commissioners members who own direct or indirect shares.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ ATAU ENTITAS ASOSIASI

List Of Subsidiaries and / or Associated Entities

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Nama <i>Name</i>	Kegiatan / Bidang Usaha <i>Activity Businesses</i>	Kepemilikan Saham <i>Stock Ownership</i>	Tahun Pendirian <i>Year of Establishment</i>	Status Operasi <i>Operation State</i>	Jumlah Aset (dalam ribuan Rupiah) <i>Asset (in thousands Rupiah)</i>	Domisili <i>Location</i>
KEPEMILIKAN LANGSUNG <i>Direct Ownership</i>						
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)	Terminal Multipurpose Petikemas dan Konvensional Multipurpose Terminal Container and Conventional	99,00%	2013	Beroperasi Operating	1.882.166.289	Jakarta
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)	Pengembangan Pelabuhan Port Development	99,00%	2012	Beroperasi Operating	2.159.484.557	Jakarta
PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)	Jasa Logistik Logistic Service	99,00%	2002	Beroperasi Operating	898.058.263	Jakarta
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk)	Penyedia Jasa Transportasi Laut Sea Transportation Service	76,89%	2013	Beroperasi Operating	1.192.128.218	Jakarta
PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)	Pengerukan Alur Dredging Grooves	99,90%	1991	Beroperasi Operating	352.868.336	Jakarta
PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)	Rumah Sakit Hospital	99,88%	1999	Beroperasi Operating	423.222.370	Jakarta
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk)	Terminal Kendaraan Vehicle terminal	77,38%	2012	Beroperasi Operating	1.254.556.394	Jakarta
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)	Sistem Informasi Information System	51,00%	2012	Beroperasi Operating	179.025.159	Jakarta
PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)	Sistem Informasi Information System	51,00%	1995	Beroperasi Operating	138.970.919	Jakarta
PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)	Penyedia Energi Listrik Supplier of Electrical Power	55,00%	2012	Beroperasi Operating	164.452.796	Jakarta
PT IPC Terminal Peti Kemas (PT IPC TPK)	Terminal Petikemas dan Konvensional Container Terminal and Conventional	99,00%	2013	Beroperasi Operating	1.221.341.130	Jakarta
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)	Jasa Peralatan Pelabuhan Port Equipment Services	99,00%	2012	Beroperasi Operating	143.759.943	Jakarta
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik Training Services and Maritime Education and Logistics	99,99%	2013	Beroperasi Operating	50.067.630	Bogor
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII)	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis Capital market investment and business consultants	99,99%	2017	Beroperasi Operating	1.428.675.682	Jakarta

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP)

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Pelindo II pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo II setuju untuk memberikan hak kepada PT PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Pelindo II untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan addendum II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Pelindo II sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, diantaranya tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Pelindo II Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.000.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000
2. PII memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000

A brief description of each of the Subsidiaries is described as follows:

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP)

PT Tanjung Priok Port (PTP) is a subsidiary established on June 10, 2013 through the Deed of Establishment no. 27 dated June 10, 2013 and the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Deed No.AHU-42024.AH.01.01 of 2013 dated August 01, 2013.

Based on agreement No. HK.566 / 20/13 / PI / II-13 dated December 27, 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) and PTP entered into an Agreement on Handover of Port Facility Operations and Port Support Facilities and Port Land Use based on Management Rights (HPL) Pelindo II at Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, Pelindo II agreed to grant PT PTP the right to operate port facilities and port support facilities as well as port land use which are assets owned by Pelindo II for the implementation of port services and other services based on the terms and conditions as stipulated in agreement. The agreement has been extended several times. Finally, with addendum II No.KS.03 / 27/12/3 / DI.1 / GM / C.Tpk-17 and No. HK.566 / 27/12/1 / PTP-17 dated December 27, 2017 where PTP and Pelindo II agreed to add and reduce a number of things, including no longer cooperating to submit management rights operations (HPL) owned by Pelindo II Tanjung Priok Branch.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 30 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., substitute notary from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transferred and surrendered all of its shares, namely as many as 250 shares in PTP to PII with a purchase price of Rp16,549,000,000.

PTP's authorized capital of Rp100,000,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The company has 99% or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000,000.
2. PII has 1% or as many as 250 shares with a value of Rp250,000,000

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pelindo II tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Pelindo II, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi. Pada tanggal 01 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Pelindo II cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal non peti kemas. Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Bidang usaha Perusahaan terkait kepelabuhanan sesuai Undang-Undang NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri dari 2 (dua) kelompok usaha yaitu:

1. Penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan
2. Penyediaan dan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Sementara itu, untuk kelompok jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan pelayanan barang terdiri dari :

1. Pelayanan Barang
Merupakan pelayanan bongkar muat dari kapal ke lapangan/gudang atau sebaliknya yakni antara lain:
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; dan
 - c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
2. Pelayanan Lain-Lain
Meliputi pelayanan yang mendukung aktivitas kepelabuhanan antara lain:
 - a. Penyewaan alat-alat pelabuhan; dan
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa *Stuffing*.

Based on the Decree of the Board of Directors of Pelindo II dated December 22, 2017, as amended on May 18, 2018, it is regulated regarding the PTP business zoning in the Pelindo II port branch, including operating activities and cooperation patterns and their distribution.

On July 16, 2018, PTP spin-off its container operations at Tanjung Priok port to PT IPC Container Terminal (IPC TPK), a related party. On September 01, 2018, PTP cooperated with the Banten branch of Pelindo II regarding the operation and management of non-container terminal services. At present, PTP is engaged in container terminal services, dry bulk services, liquid bulk, bunkering and warehousing and field services.

The business fields related to ports according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, consists of 2 (two) businesses, namely:

- Provision and port services
- Provision and services to support the port services.

Meanwhile, for port service groups, the provision and service of goods consists of:

1. Goods Services
Is a loading and unloading service from the ship to the field / warehouse or vice versa namely:
 - a. Provision and / or dock services for loading and unloading activities of goods and containers;
 - b. Provision of and / or warehouse services and stockpiling, loading and unloading equipment, and port equipment; and
 - c. Provision and / or services for container terminals, liquid bulk, dry bulk and Ro-Ro terminals;
2. Other Services
Includes services that support port activities:
 - a. Rental of port equipment; and
 - b. Provision of and / or stuffing services.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Pelabuhan Tanjung Priok yakni:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>
<p>Menjadi Operator Terminal Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. To become a World-Class Terminal Operator that excels in Operations and Services</p>

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT PTP Nomor: SK.03/30/8/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/30/8/1/MTI-2018 tentang Penetapan Anggota–Anggota Direksi PTP, serta Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT PTP Nomor: SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/25/10/1/MTI-2018 tentang

Adapun visi dan Misi PT Pelabuhan Tanjung Priok yakni:

Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Sebagai operator terminal yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Dengan Penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, membangun dan mengoperasikan pelayanan terminal dan logistik secara terintegrasi, berkualitas dan andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra. Menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas, dan adil; 2. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik; 3. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan insan perusahaan yang fokus pada pelanggan, berintegritas, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan; dan 4. Menjamin kelancaran dan keamanan arus barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. <p>As a terminal operator that maximizes added value for all stakeholders continuously in order to improve the national economy. With explanation as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Providing, building and operating terminal and logistics services in an integrated, quality and reliable manner to meet customer and partner satisfaction. Organizing corporate governance that is transparent, accountable, responsible, integrity and fair. 2. Maximizing company value for shareholders and improving the health of the company in a professional manner by fulfilling aspects of good corporate governance. 3. Creating a comfortable work environment for employees, creating company people who focus on customers, integrity, pride in the company and culture, and provide welfare and satisfaction to employees; and 4. Ensuring the smooth and safe flow of goods to realize logistical cost efficiency to spur national economic growth that has an impact on improving people's welfare

Based on the PT PTP Shareholders without going through General Meeting of Shareholders Decision Number: SK.03/30/8/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/30/8/1/MTI-2018 concerning Determination of PTP Board of Directors' Members, and PT PTP Shareholders without going through General Meeting of Shareholders Decisions Number: SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/25/10/1/

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

Penetapan Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PTP, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PTP adalah sebagai berikut:

MTI-2018 concerning Determination of Changes to the PT PTP Board of Commissioners, the PT PTP Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Elvyn G. Masassya
Komisaris Independen Independent Commissioner	Sabri Saiman
Komisaris Commissioner	Bambang S. Ervan
Komisaris Commissioner	Nugroho Indrio
Komisaris Commissioner	Said Aqil Siradj

DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Imanuddin
Direktur Operasi dan Teknik Operations and Technical Director	Andi Isnovandiono
Direktur Keuangan dan SDM (Plt.) Acting Finance and HR Director	Prastyo Wasis P.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Ari Henryanto

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 05 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000.000 yang diambil bagian oleh IPC dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000.000 dan Rp250.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03- 0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

PPI was established on November 05, 2012 based on Deed of Establishment No. 9 dated November 5, 2012, and amended by Deed of Establishment No.107 dated December 15, 2015, and Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Deed No. AHU-57925.A.H.01.01.2012 in 2012.

Based on Certificate No. 11 September 13, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Company increased authorized capital to Rp900,000,000,000 and issued and fully paid-up capital to Rp225,000,000,000 which was taken part by IPC and MTI amounting to Rp224,750,000,000 and Rp250,000,000 respectively. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03- 0230843 dated August 9, 2018.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.000 Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000
2. PII memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan. Adapun visi dan Misi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yakni:

Multi Terminal Indonesia transferred and handed over all of its shares, namely as many as 25,000 shares in the PPI to PII with a purchase price of Rp342,000,000. PPI authorized capital of Rp100,000,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital full as follows:

1. The company has 99% or as many as 2,475,000 shares with a value of Rp24,750,000,000
2. PII has 1% or as many as 25,000 shares with a value of Rp250,000,000

At present, PPI is engaged in port development. The vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia is:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka, memberikan solusi terpadu untuk setiap aspek di bidang Infrastruktur Kepelabuhanan, antara lain: terminal, dermaga, lapangan penumpukan, pergudangan dan fasilitas lainnya. Pengembangan kepelabuhanan, yang antara lain: sistem informasi, sistem pengelolaan, rekonfigurasi dan sistem lainnya.</p> <p>To become the leading Indonesian company, that provides integrated solutions for every aspect in the area of Port Infrastructure, including: terminals, docks, stacking fields, warehousing, and other facilities. Development of ports, among others: information systems, management systems, reconfiguration, and other systems.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perusahaan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan tingkat dunia. 2. Menjadi perusahaan terbesar dalam bidang pengembangan infrastruktur kepelabuhanan. 3. Memberikan nilai tinggi dan berkelanjutan bagi setiap pemangku kepentingan dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 4. Memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan Memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Become a world-class port infrastructure development company. 2. Become the largest company in the field of port infrastructure development. 3. Provide high value and sustainability for each stakeholder & deliver customer satisfaction. 4. Provide benefits to shareholders & contribute to the development of Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PPI No. 25 tanggal 26 September 2018, yang dibuat di hadapan Silfia, S.H., Notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PPI No. 14 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI adalah sebagai berikut:

Based on PT PPI Shareholders Decision Deed No. 25 dated September 26, 2018, made before Silfia, S.H., a replacement Notary for Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and the PT PPI Shareholders Decision Deed No. 14 dated June 26, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The PT PPI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Riry Syeried Jetta
Komisaris Commissioner	Apep Fajar Kurniawan
Komisaris Commissioner	Irsal Yunus
Komisaris Commissioner	Dachamer Munthe
Komisaris Commissioner	Lukita Dinarsyah Tuwo
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Arif Suhartono
Direktur Teknik (Plt.) Acting Technical Director	Wahyu Hardiyanto
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Kiki Mohammad Hikmat
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Henri Panggabean

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.000. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

1. Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.000
2. Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.000

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik.

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

MTI was established on February 15, 2002 based on deed No. 15 dated 15 February 2002 made by Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., in Jakarta. The deed obtained legal status based on the Ministry of Law and Human Rights Decree No. C-06123.HT.01.01.TH.2002 dated April 11, 2002.

MTI's authorized capital of Rp28,500,000,000 consists of 57,000,000 shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The total issued and fully paid capital is 34,629,439 shares or equal to Rp17,314,719,000

The composition of the capital that has been placed and fully paid is:

1. The company has 99% or 34,283,150 shares with a nominal value of Rp17,141,575,000
2. The Maritime Employee Cooperative has 1% or as many as 346,289 shares with a nominal value of Rp173,144,000

At present, MTI is engaged in logistics services.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Multi Terminal Indonesia yakni:

The vision and mission of PT Multi Terminal Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi perusahaan logistik nasional yang terpercaya To become a trusted national logistics company	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan misi <i>shareholder</i> dalam menurunkan biaya logistik nasional. 2. Memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang lebih cepat dan lebih aman. 3. Menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi seluruh Pekerja Perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Realize the shareholders' vision in reducing the national logistics costs. 2. Provide added value for the customers with competitive price and faster and more secure services. 3. Become a favorable workplace for all the Company's Employees.

Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 20 September 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MTI sebagai berikut:

Based on Deed Number 19 dated September 20, 2018 the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT MTI is as follows

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Saptono R. Irianto
Komisaris Commissioner	Toto Dirgantoro
Komisaris Commissioner	Buyung Lalana
Komisaris Commissioner	Ricky Handersend
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama (Plt.) Acting President Director	Agus Hendrianto
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Miftahul Huda
Direktur Operasi (Plt.) Acting Operations Director	Suparjo
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Andi Hamdani

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (PT JAI TBK)

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 09 September 2013.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (PT JAI TBK)

JAI was established based on Certificate No. 24 dated July 10, 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 09, 2013.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

1. Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
2. Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyakbanyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.
3. Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000.000 menjadi Rp406.930.460.000 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460.000 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.000
2. MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.000
3. Karyawan (Program ESA) memiliki 0,14% atau sebanyak 7.162.700 saham dengan nilai sebesar Rp716.270.000
4. Masyarakat memiliki 22,86% atau sebanyak 1.208.343.800 saham dengan nilai sebesar Rp120.834.380.000.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 14 dated October 11, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, JAI shareholders agreed to include:

1. Changes in the nominal value of the shares from the initial Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
2. Issuance of shares from the JAI portfolio, which are as many as 30% of new shares issued from the port of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or a maximum of 1,743,987,600 new shares offered to the public through JAI's initial public offering.
3. Increase the authorized capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share and increase the issued and paid-up capital from Rp58,000,000,000 to Rp406,930,460,000 where the increase in the amount of Rp348,930,460,000 or 3,489,304,600,000 shares carried out by the Company through inbreng 21 units of vessels, consisting of 9 units of pilot ships, 10 units of tugboats and 2 units of kepil ships. The inbreng of the ship was assessed by KJPP Toto Suharto & Rekan with the results of the assessment No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

JAI's authorized capital of Rp1,500,000,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The company has 76.89% or 4,063,504,600 shares with a value of Rp406,350,460,000
2. MTI has 0.11% or 5,800,000 shares with a value of Rp580,000,000
3. Employees (ESA Program) have 0.14% or as many as 7,162,700 shares with a value of Rp716,270,000
4. The community owns 22.86% or 1,208,343,800 shares with a value of Rp120,834,380,000.

At present, JAI is engaged in ship guidance services, ship delays, sea transportation, rivers, lakes and crossings, boat rentals and ship agency.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yakni:

The vision and mission of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, are as follows:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi terdepan dalam pengelolaan armada kapal sehingga dapat menjadi perusahaan penyedia kapal <i>Harbour Tug</i> pilihan utama di Indonesia memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan terkemuka di Asia.</p> <p>To be the leader in ship fleet management and to become the leading Harbor Tug provider company of choice from Indonesia that provides reliable and reputable services in Asia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan kontribusi ke <i>shareholder</i> dengan memberikan pelayanan profesional dan <i>safety</i> kepada <i>customer</i>, dan penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh proses. 2. Memberikan pelayanan yang efisien dan bersahabat. 3. Mencapai <i>standard</i> profesionalisme tertinggi melalui integritas, kualitas, kerja sama dan efisiensi serta meyakinkan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan. <ol style="list-style-type: none"> 1. To increase the role and contributions to shareholders by providing excellent services to customers, and through the utilization of information technology in all processes. 2. To provide efficient and friendly service. 3. To achieve the highest standards of professionalism through integrity, quality, cooperation and efficiency, and to ensure long-term sustainability for the benefit of all interested parties.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAI Tbk No. 25 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAI Tbk No. 29 tanggal 10 November 2017, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JAI Tbk adalah sebagai berikut.

Based on the PT JAI Tbk Shareholders Decision Deed No. 25 dated July 26, 2017, made before Devi Yuana Lisa, SH, M.Kn., replacement Notary for Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., Notary in Jakarta, and PT JAI Tbk Shareholders Decision Deed No. 29 dated November 10, 2017, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. PT JAI Tbk Board of Commissioners and Board of Directors composition of is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Dani Rusli Utama
Komisaris Commissioner	Jimmy A.B. Nikijuluw
Komisaris Commissioner	A. Sumardi
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama Independen Independent President Director	Dawam Atmosudiro
Direktur Operasi dan Komersial Operations and Commercial Director	-
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Herman Susilo

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHUAH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.000
2. PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

Rukindo was established under the name PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Certificate No. 2 dated October 1, 1991 from Achmad Bajumi, S.H., successor to Notary Imas Fatimah, S.H., which was later amended by Certificate No. 51 dated February 11, 1992 from Notary Imas Fatimah, S.H. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 March 3, 1992.

Rukindo's authorized capital of Rp2,000,000,000,000 consists of 2,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated 28 December 2017, the Company's shareholders agreed to the following matters:

1. The increase in issued and paid-up capital from the original amounted to Rp195,000,000,000 which will be converted into capital at the end of the 10th year (ten). Shares issued amounted to 195,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated 28 December 2017 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights No AHUAH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 new shares as a result of the conversion of Rukindo's debt to the Company. The Company's share ownership in Rukindo increased to 99.93%. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The Company has 99.93% or 806,622 shares with a value of Rp806,622,000,000.
2. PPI has 0.07% or 542 shares with a value of Rp 542,000,000.

At present, Rukindo is mainly engaged in the dredging of shipping lanes, port pools, reclamation and transportation of dredged products.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Pengerukan Indonesia yakni:

The vision and mission of PT Pengerukan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi pemimpin dalam pasar pengerukan di Indonesia. To be the leader in the dredging market in Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. Menyediakan jasa pemeliharaan kapal, konstruksi kapal dan jasa pendukung lainnya. 3. Menyediakan jasa sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang reliabel. 4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sehingga pekerja dapat mempunyai kinerja yang tinggi. 5. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi terkini yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry out dredging and reclamation work in accordance with consumers needs. 2. Provide ship maintenance and ship construction services, as well as other support services. 3. Provide services in accordance with reliable Standard Operating Procedure (SOP) 4. Developing human resource competencies to generate workers with high performance 5. Develop and implement the latest integrated information technology as needed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rukindo No. 06 tanggal 06 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rukindo No. 48 tanggal 28 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dahlia, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rukindo adalah sebagai berikut :

Based on PT Rukindo Shareholders Decision Deed No. 06 dated April 6, 2018, made before Nanda Fauz Iwan, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, and PT Rukindo Shareholders Decision Deed No. 48 dated December 28, 2017, made before Dahlia, Bachelor of Law Notary in Jakarta. The PT Rukindo's Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Dani Rusli Utama
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	M. Hadi Syafitri Noor
Direktur Keuangan dan SDM Finance & HR Director	Budi Priyanto
Direktur Komersial dan Teknik (Plt.) Actinf Commercial and Operations Director	Muhammad Yusuf

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (PT RSP)

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 tanggal 01 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (PT RSP)

RSP was established based on Notary Certificate Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 dated May 01, 1999 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999. Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99,52% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000.000
2. Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,48% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya. Adapun visi dan Misi PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia yakni:

Indonesia with Decree No. C.11876.HT.01.01 June 29, 1999. RSP authorized capital of Rp150,000,000,000 consists of 150,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The Company has 99.52% or 37,452 shares with a nominal value of Rp37,452,000,000
2. The Maritime Employee Cooperative has 0.48% or 180 shares with a nominal value of Rp180,000,000

At present, RSP is engaged in health services and other health support services.

The vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia Hospital are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi perusahaan terbaik dalam industri kesehatan nasional dengan layanan profesional kelas dunia. To become the best company in the national health industry with world-class professional services.	Menjalankan usaha layanan kesehatan berkualitas, berorientasi pada sinergi sumber daya dan teknologi terkini serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Implement a quality healthcare business, oriented towards the synergy of resources and the latest technology as well as sustainable growth of the company.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RSP No. 47 tanggal 14 September 2018, yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RSP No. 40 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT RSP adalah sebagai berikut :

Based on PT RSP Shareholders Decision Deed No. 47 dated September 14, 2018, made before Herdimansyah Chaidirsyah, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, and PT RSP Shareholders Decision Deed No. 40 dated March 15, 2018, made before Herdimansyah Chaidirsyah, Bachelor of Law Notary in Jakarta. The PT RSP Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Rizal Ariansyah
Komisaris Commissioner	Akhriadi
Komisaris Commissioner	Amir Hamzah Dilaga
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Dessy Emastari Prihatiningtyas
Direktur Medik Medical and Marketing Director	R. Suhasbagyo
Direktur Pengembangan dan Pemasaran Development and Marketing Director	Banu Astrini
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Try Djunaidy

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK)

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 05 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (*Employee Stock Option*).

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482.000 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.000
2. MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.000
3. Karyawan IKT memiliki 0,03% atau sebanyak 472.400 saham dengan nilai sebesar Rp47.240.000
4. Masyarakat memiliki 27,97% atau sebanyak 508.675.300 saham dengan nilai sebesar Rp50.867.530.000

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK)

IKT was established based on Certificate No. 10 dated 05 November 2012 by Yulianti Irawati, SH., A successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 of 2012 dated November 19, 2012.

Based on the Certificate of Extraordinary General Meeting of Shareholders IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, the shareholders agreed, the number of shares issued in the context of a Public Offering of no more than 30% of the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or as many as possible 557,142,800 new shares offered to the public through Initial IKT Public Offering, each with a nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of a maximum of 10% of new shares issued with the ESA program (*Employee Stock Option*).

The IKT authorized capital of Rp181,838,482,000 consists of 1,818,384,820 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The IKT's issued and fully paid capital composition is as follows:

1. The Company has 71.28% or 1,296,144,749 shares with a value of Rp129,614,475,000
2. MTI has 0.72% or 13,092,371 shares with a value of Rp1,309,237,000
3. IKT employees have 0.03% or as many as 472,400 shares with a value of Rp47,240,000
4. The community has 27.97% or as many as 508,675,300 shares with a value of Rp50,867,530,000

At present, IKT is engaged in managing vehicle terminals, loading and unloading of goods, stacking services and other logistics services.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. yakni:

The vision and mission of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi perusahaan logistik kendaraan terbaik di kawasan Asia dengan pelayanan kelas dunia. To become the best vehicle logistics company in the Asian region with world-class service</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendorong arus ekspor impor dan bongkar muat kendaraan. 2. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dukungan pengembangan industri otomotif nasional. 3. Mewujudkan pelayanan terbaik dengan tingkat keselamatan tinggi yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, melalui pengelolaan secara profesional dan didukung Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi, sehingga mampu bersaing di pasaran dunia dengan mewujudkan efisiensi biaya logistik. 4. Menjalankan bisnis unit sebagai pendukung pelayanan inti dalam upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Providing ease and smoothness to encourage the flow of export imports and loading and unloading vehicles. 2. Provide a significant contribution to the national economic growth including support for the development of the national automotive industry. 3. Realizing the best services with a high level of safety that gives satisfaction to service users, through professional management and supported by highly competent Humans Resources that can compete in the world market by realizing logistical cost efficiencies. 4. Running a business unit as a support for the core services in an effort to increase company profits.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 12 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Silfia, S.H.,Notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IKT Tbk adalah sebagai berikut:

Based on the PT Indonesia Kendaraan Terminal Shareholders Deed No. 12 dated May 21, 2018, made before Silfia, S.H., a replacement Notary to Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. PT IKT Tbk Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Elvyn G. Masassya
Komisaris Independen Independent Commissioner	Fathony Akbar
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Commissioner	Marta Hardisarwono
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Chiefy Adi K.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial & Business Development Director	Arif Isnawan
Direktur Operasi dan Teknik Operations & Technical Director	Indra Hidayat Sani
Direktur Keuangan dan SDM Finance & HR Director	Sugeng Mulyadi
Direktur Kepatuhan (Direktur Independen) Compliance Director (Independent Director)	Salusra Wijaya

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.000
2. PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.000

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

Adapun visi dan Misi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yakni:

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

ILCS was established in 2012 based on Certificate of Establishment No. 11 dated September 21, 2012, and Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Certificate AHU.50211.AH.01.01 - 2012 dated September 26, 2012.

The ILCS authorized capital of Rp400,000,000,000 consists of 40,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The Company has 51% or 5,100,000 shares with a value of Rp51,000,000,000
2. PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000 shares with a value of Rp49,000,000,000

At present, ILCS is engaged in the provision of e-trade logistic services and other services which include data management services, e-commerce services, computer consulting and informatics engineering, software manufacturing services, multimedia supply and utilization services through telecommunications equipment and services. information technology consultant.

The vision and mission of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi pemain nasional terkemuka di Indonesia di bidang logistik <i>e-trade</i> yang mengaplikasikan standar kelas dunia. To become the leading national company in Indonesia in the e-trade logistics sector that applies world-class standards</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui penyediaan layanan portal <i>e-trade</i>. 2. Menyediakan <i>platform</i> teknologi informasi dan komunikasi terpercaya bagi komunitas logistik. 3. Memberikan imbal hasil yang terbaik bagi pemegang saham. 4. Menyediakan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan untuk bertumbuh dengan sistem penghargaan yang terbaik pula bagi para sumber daya manusianya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Improving competitiveness of Indonesia economy through e-trade portal services. 2. Providing a trusted ICT Platform for Logistic Community. 3. Delivering best return to shareholders. 4. Providing best environment for talent to grow with best reward system.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ILCS No. 45 tanggal 29 September 2017, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT ILCS adalah sebagai berikut:

Based on PT ILCS Shareholders Decision Deed No. 45 dated September 29, 2017, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The PT ILCS Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Prasetyadi
Komisaris Commissioner	Pranyoto
Komisaris Commissioner	Mohammad Alfuniam

DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Jati Widagdo
Direktur IT dan Operasi Operations and IT Director	A. Syaiful Amin
Direktur ADM dan Keuangan Administration and Finance Director	Feri Irawan

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII)

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 03 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.000
2. PT Sisindokom Teknologi memiliki 49% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.000

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan *software* dan pelayanan administrasi efek.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII)

EDII was established based on Notarial Certificate No. 1 dated June 1, 1995 from Notary Sulami Mustafa, S.H., and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2- 9572.HT.01.01.TH.95 dated August 03, 1995.

As of December 31, 2016, EDII's authorized capital of Rp.100,000,000,000 consisted of 100,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000 (full amount) per share. The amount of issued and fully paid capital is 25,000,000 shares or in the amount of Rp25,000,000,000 with the following composition:

1. The Company has 51% or 12,750,000 shares with a value of Rp12,750,000,000
2. PT Sisindokom Teknologi has 49% or as many as 12,250,000 shares with a nominal value of Rp12,250,000,000.

At present, EDII is engaged in providing information data, data transfer, software sales and securities administration services.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Electronic Data Interchange Indonesia yakni:

The vision and mission of PT Electronic Data Interchange Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi penyedia layanan <i>e-Business</i> yang terkemuka di Asia, di mana perusahaan ingin menempatkan posisinya menjadi <i>pioneer</i> di dalam negeri dan menjadi dikenal di lingkup internasional khususnya diawali dari Asia terlebih dahulu.</p> <p>To be the leading <i>e-Business</i> service provider in Asia. Where the company wants to put its position as the pioneer in the country and become known in the international scope, starting in Asia first.</p>	<p>Mengutamakan layanan <i>e-Business</i> yang inovatif berstandar internasional dengan menjunjung tinggi <i>Good Corporate Governance</i> untuk memberikan suatu nilai tambah yang berkelanjutan bagi para <i>stakeholder</i></p> <p><i>Prioritize innovative e-Business services with international standards while upholding Good Corporate Governance to provide a continuous added value for the stakeholders.</i></p>

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Electronic Data Interchange Indonesia nomor SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor KS-089/LEG/SISTEK-PELINDOII/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EDII No. 19 tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Adi Triharso. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT EDII adalah sebagai berikut :

Based on the PT Electronic Data Interchange Indonesia Shareholders Decision Without Going Through the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) number SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number KS KS-089/LEG/SISTEK-PELINDOII/XI/2018 dated November 14, 2018 concerning Appointment of Board of Directors Members, and PT EDII Shareholders Decision Deed No. 19 dated August 15, 2017, was made before Adi Triharso, Bachelor of Law, Notary in Jakarta. The PT EDII Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Prasetyadi
Komisaris Commissioner	Herry Andriejanssen
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	E. Helmi Wantono
Direktur Keuangan dan Pendukung Finance and Support Director	Elon Manurung
Direktur Komersial dan Operasi Commercial and Operations Director	Yan Budi Santoso

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

EPI was established based on the Certificate of Establishment No. 11 November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 55% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000.000
2. PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.000

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Adapun visi dan Misi PT Energi Pelabuhan Indonesia yakni:

EPI authorized capital of Rp600,000,000,000 consists of 60,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The Company has 55% or 8,250,000 shares with a value of Rp82,500,000,000
2. PT Haleyora Power has 45% or 6,750,000 shares with a value of Rp67,500,000,000

At present, EPI is engaged in providing electricity in the port area and its surroundings.

The vision and mission of PT Energi Pelabuhan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menyediakan Energi Listrik dengan kualitas handal dengan mutu pelayanan <i>Good Governance</i> di Kawasan Pelabuhan. Providing electrical energy with reliable quality with Good Governance service quality in the Port Area.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penggunaan Energi Listrik yang ramah lingkungan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya. 2. Terwujudnya layanan pasokan Energi Listrik dengan <i>Level of service premium</i> kepada pelanggan. 3. Terwujudnya penggunaan Energi Listrik yang berbasis Tarif Non Subsidi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Realization of environmentally friendly electricity energy used in port area and its surroundings. 2. Realization of electricity supply service with premium level of service to customer. 3. The realization of electricity energy use based on non-subsidized tariff.

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Energi Pelabuhan Indonesia Nomor SK.03/13/9/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor 067.RUPS/DIR-HP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Direksi dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EPI No. 02 tanggal 05 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Bambang Heryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT EPI adalah sebagai berikut :

Based on the PT Energi Pelabuhan Indonesia Shareholders Without Going Through the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) Decision Number SK.03/13/9/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number 067.RUPS/DIR-HP/2018 September 13, 2018 concerning Dismissal of Board of Directors Members, and PT EPI Shareholders Decision Deed No. 02 October 5, 2017, made before Bambang Heryanto, Bachelor of Law, Notary in Jakarta. The PT EPI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	-
Komisaris Commissioner	Hasril Nuzahar
Komisaris Commissioner	Victor Vikki Subroto
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Irwan Favoriet

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Direktur Operasi dan Niaga <i>Operations and Commercial Director</i>	-
Direktur Keuangan dan SDM <i>Finance and HR Director</i>	Sumarno

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS (PT IPC TPK)

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.000.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000
2. PII memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Adapun Visi dan Misi PT IPC Terminal Peti Kemas yakni:

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS (PT IPC TPK)

PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) is a subsidiary established on July 10, 2013 through a Deed of Establishment No. 25 dated July 10, 2013, and the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Deed No. AHU-40641.AH.01.01 - 2013. Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 36 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., substitute notary from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transferred and handed over all of its shares, namely as many as 250 shares in IPC TPK to PII with a purchase price of Rp7,915,500,000.

The authorized capital of IPC TPK of Rp.100,000,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The company has 99% or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000,000
2. PII has 1% or 250 shares with a value of Rp250,000,000

At present, IPC TPK is engaged in container terminal services and other port services.

The Vision and Mission of PT IPC Container Terminal, are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi Operator Terminal Petikemas Berstandar Internasional yang Unggul dalam Operasional dan Layanan. To become an International Standard Container Terminal Operator that excels in Operations and Services.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan meningkatkan sistem operasi berstandar internasional di setiap terminal untuk memperkuat terminal peti kemas berkinerja tinggi. 2. Menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berstandar internasional. 3. Melakukan ekspansi bisnis dan membangun jaringan nasional dan internasional yang sinergis antar terminal di seluruh Indonesia yang memiliki nilai komersial tinggi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Provide and upgrade international standard operating systems in each terminal to strengthen high-performance container terminals. 2. Provide and improve Human Resources with international standards. 3. Perform business expansion and building national and international networks synergies between terminals across Indonesia that have high commercial value.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT IPC Terminal Petikemas Nomor: HK.568/20/4/2/PI.II-17 dan Nomor HK.476/20/4/4/MTI-2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT IPC TPK, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT IPC Terminal Petikemas Nomor: SK.03/27/8/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/27/8/1/MTI-2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT IPC TPK. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IPC TPK adalah sebagai berikut.

Based on the PT IPC Terminal Peti Kemas General Meeting of Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Decision Number: HK.568/20/4/2/PI.II-17 and Number HK.476/20/4/4/MTI-2018 April 20, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of PT IPC TPK Commissioners, and the PT IPC Terminal Peti Kemas General Meeting of Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Decision Number: SK.03/27/8/2/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/27/8/1/MTI-2018 dated August 27, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of PT IPC TPK Commissioners, the composition of the PT IPC TPK Board of Commissioners and Board of Directors as follows.

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Saptono R. Irianto
Komisaris Commissioner	Hary Kriswanto
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	M. Adji
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Arif Rusman Yulianto
Direktur Operasi dan Teknik Operations and Technical Director	Heru Satrio
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Rahmat Prayogi

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)
JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.000.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)
JPPI was established based on Certificate No. 8 dated 5 November 2012 from Yulianti Irawati, S.H., successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012. Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transferred and handed over all of its shares, namely 25,000 shares in the JPPI to PII with a purchase price of Rp227,500,000.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

JPPI authorized capital of Rp100,000,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp. 10,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000
2. PII memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000

1. The company has 99% or 2,475,000 shares with a value of Rp24,750,000,000
2. PII has 1% or as many as 25,000 shares with a value of Rp250,000,000

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

At present, JPPI is engaged in the field of technical business services including installation / assembly, repair and maintenance (maintenance) and installation of technical equipment, installation of equipment for water, gas, telecommunications, electrical and mechanical, pressure vessels (boilers / pressure vessels) and related business fields.

Adapun visi dan Misi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yakni:

The vision and mission of PT Indonesia Port Equipment Services are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi Perusahaan yang Unggul di Bidang Penyediaan Peralatan dan <i>Engineering Services</i>. To Be a Company that Excels in the Field of Supply of Equipment and Engineering Services.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi partner handal dan terpercaya sebagai penyedia peralatan di semua sektor industri. 2. Fokus pada mutu dengan biaya pelayanan yang efisien sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna jasa. <ol style="list-style-type: none"> 1. To become a reliable and trusted partner as equipment provider in all industry sectors. 2. Focus on quality with cost efficient services in accordance with the standards and needs of service users.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JPPI No. 39 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Jhonni Marihotua Sianturi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JPPI adalah sebagai berikut:

Based on PT JPPI Shareholders Decision Deed No. 39 dated January 24, 2019, made before Jhonni Marihotua Sianturi, a Bachelor of Law Notary in Jakarta. The PT JPPI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	-
Komisaris Commissioner	Rudiana
Komisaris Commissioner	Abdur Rahim Hasan
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Bimo Widhiatmoko
Direktur Keuangan dan SDM Finance & HR Director	Budi Setijadi Kurjanto
Direktur Teknik dan Operasi Technical and Operations Director	Agus Sulistyono

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 02 September 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.000

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.000
2. PII memiliki 1% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.000

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) atau juga dikenal dengan IPC Corporate University didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Akta Pendirian no. 26 tanggal 10 Juli 213 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) no.AHU-45955. AH.01.01 tahun 2013.

Adapun visi dan Misi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia yakni:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi pusat keunggulan dan mitra strategis dalam pengembangan pelabuhan, maritim dan bisnis logistik di Indonesia dan Asia Pasifik. To be the center of excellence and strategic partner in developing port, maritime, and logistics businesses in Indonesia and Asia Pacific.	Menjadi pilihan utama dan kebanggaan bagi pelanggan, karyawan dan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan manusia unggul dan membangun kapasitas organisasi bagi pengembangan maritim dan logistik di Indonesia dan Asia Pasifik. Being the top choice and pride of customers, employees, and stakeholders in providing excellent people and organization capacity building for maritime and logistics development in Indonesia and Asia Pacific.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

PMLI also known as IPC Corporate University, was established on July 10, 2013 through Certificate of Establishment No. 26 dated July 10, 2013, and Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Certificate No.AHU-45955. 2013 AH.01.01. September 02 2013.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transferred and handed over all of its shares, namely as many as 300 shares in PMLI to PII with a purchase price of Rp173,500,000

PMLI's authorized capital of Rp120,000,000,000 consists of 120,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The company has 99% or 29,700 shares with a value of Rp29,700,000,000
2. PII has 1% or 300 shares with a value of Rp300,000,000

At present, PMLI is engaged in providing education, training, consulting services in the maritime and logistics fields and managing education and training facilities and infrastructure.

PT Indonesia Maritime and Logistics Education (PMLI) or also known as IPC Corporate University was established on July 10, 2013 with the Certificate of Establishment no. 26 dated 10 July 213 and the Certificate of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) no.AHU-45955. 2013 AH.01.01.

The vision and mission of Indonesian Maritime and Logistics Education PT are:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PMLI No. 18 tanggal 19 April 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PMLI No. 7 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PMLI adalah sebagai berikut:

Based on the PT PMLI Shareholders Decision Deed No. 18 April 19, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and PT PMLI Shareholders Decision Deed No. 7 dated March 12, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The PT PMLI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
Komisaris Utama President Commissioner	Riry Syeried Jetta
Komisaris dan Komisaris Utama Commissioner and President Commissioner	Marwansyah
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
Direktur Utama President Director	Amri Yusuf
Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha Finance & Business Development Director	Edy Purwanto
Direktur Akademik Academic Director	Yana Pratapa

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

PII also known as IPC Investment Company, was established on November 17, 2017 through Deed of Establishment No. 112 dated November 17, 2017 based on notarial deed Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The authorized capital of PII is Rp.800,000,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.000
2. MTI memiliki 1% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000

1. The company has 99% or 198,000 shares with a nominal value of Rp198,000,000,000
2. MTI has 1% or 2,000 shares with a nominal value of Rp2,000,000,000

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

At present, PII is engaged in investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in the capital market and money market, business consulting services and acting as an advisor.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Adapun visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia Investama yakni: The vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia Investama are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi perusahaan investasi global di sektor kepelabuhanan dan pendukungnya demi menciptakan nilai tambah bagi <i>stakeholders</i>. To become a global investment company in the port and supporting sector to create added value for stakeholders.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi IPC melalui konsolidasi kepemilikan anak perusahaan, pengembangan SDM yang profesional, dan sistem pengelolaan yang berkelas dunia. 2. Memperkuat pendanaan untuk anak perusahaan melalui inisiatif <i>capital raising</i> baik dari internal IPC maupun dari sumber dana eksternal untuk mencapai pertumbuhan investasi yang optimal. 3. Mengoptimalkan potensi sinergi dalam kepelabuhanan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve the effectiveness of IPC investment management through consolidated subsidiary ownership, professional HR development, and world-class management system. 2. Strengthen funding for subsidiaries through capital raising initiatives both from internal IPC as well as from external funding sources to achieve optimal investment growth. 3. Optimizing the potential for synergy in seaports.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor : SK.03/18/12/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/18/12/2/MTI-2018 tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia Investama dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor : SK.03/18/2/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/18/12/3/MTI-2018 Tentang Penetapan Anggota-Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia Investama, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PII adalah sebagai berikut :

Based on the PT Pelabuhan Indonesia Investama General Meeting of Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Decision Number: SK.03/18/12/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/18/12/2/MTI-2018 dated December 18, 2018 concerning the Termination and Determination of PT Pelabuhan Indonesia Investama Board of Commissioners, and the PT Pelabuhan Indonesia Investama General Meeting of Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Decision Number: SK.03/18/2/2/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/18/12/3/MTI-2018 concerning the Determination of PT Pelabuhan Indonesia Investama of Board of Directors Members, the PT PII Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Ito Warsito
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Randy Pangalila
Direktur Operasi dan Keuangan Operations and Finance Director	Sophia Isabella Wattimena
Direktur Investasi Investment Director	Jeffry Haryadi P.M.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

CUCU PERUSAHAAN

SUB-SUBSIDIARY

Nama Name	Kegiatan / Bidang Usaha Activity Businesses	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Operasi Operation state	Jumlah Aset (dalam ribuan Rupiah) Asset (in thousands Rupiah)	Domisili Location
PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol Equity Participation in the Toll Road project	99,52%	2014	Belum Beroperasi Secara Komersial Not Commercially Operating	776.783.899	Jakarta
PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Jasa pengelola Property Property Management Service	70,00%	2018	Belum Beroperasi Secara Komersial Not Commercially Operating	88.512.621	Jakarta
PT New Priok Container Terminal One (NPCT1)	Terminal Petikemas Container Terminal	50,99%	2014	Beroperasi Operating	4.326.430.446	Jakarta

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA (API)

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 04 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000.000 yang

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA (API)

API was established based on Certificate No. 29 dated July 24, 2014 from Yulianti Irawati, S.H., successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-19255.40.10.2014 dated 04 August 2014. The Articles of Association of the API have been amended based on Certificate No. 29 dated March 26, 2015 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, concerning the increase in authorized capital and paid-up capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0934117.AH.01.02.TUN 2015 dated April 27, 2015.

Based on Certificate No. 33 dated 21 December 2017 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Company increased its authorized capital to Rp1,000,000,000,000 and issued and fully paid-up capital to Rp386,000,000,000 which was taken part by

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000.000 dan Rp3.860.000.000 Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000.000 dan Rp3.860.000.000 Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. PPI memiliki 99% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.000
2. PTP memiliki 1% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.000

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT API adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Commissioner	Arif Suhartono
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Iwan Ridwan
Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Operations and Business Development Director	Ari Sunaryono
Direktur Keuangan dan SDM Finance & HR Director	Nofal Hayin

PT MENARA MARITIM INDONESIA (MMI)

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

the PPI and PTP amounting to Rp. 382,140,000,000 and Rp3,860,000,000 respectively. This Certificate has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Certificate No. 26 December 28, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, API increased its issued and fully paid capital to Rp805,760,000,000 which was taken part by PPI and PTP amounting to Rp801,900,000,000 respectively. and Rp3,860,000,000 This Certificate has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0018880 dated 11 January 2019.

The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. PPI has 99% or 80,190,000 shares with a nominal value of Rp801,900,000,000
2. PTP has 1% or 386,000 shares with a nominal value of Rp3,860,000,000

Currently, API activities are mainly concentrated in investment in CTP, an associate engaged in the operation of toll road projects.

The composition of the Board of Commissioners and Directors of PT API are as follows:

PT MENARA MARITIM INDONESIA (MMI)

MMI was established based on Certificate No. 16 dated July 5, 2018 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. This certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033122.AH.01.01.Year 2018 on July 16, 2018.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. PPI memiliki 70% atau sebanyak 612.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp61.250.000.000
2. PT PP Properti Tbk memiliki 30% atau sebanyak 262.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.250.000.000

Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MMI adalah sebagai berikut:

MMI's authorized capital is Rp350,000,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. PPI owns 70% or 612,500,000 shares with a nominal value of Rp61,250,000,000
2. PT PP Properti Tbk owns 30% or 262,500,000 shares with a nominal value of Rp26,250,000,000

At present, MMI has not carried out commercial activities. The PT MMI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Arif Suhartono
Komisaris Commissioner	Nanang Siswanto
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Bagus Dwipoyono
Wakil Direktur Utama Vice Director	Yunas Rudianto
Direktur Director	Rudy Istiawan

PT New Priok Container Terminal I (NPCT 1)

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang. Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan, dapat diuraikan sebagai berikut:

PT New Priok Container Terminal I (NPCT 1)

NPCT1 was established based on Certificate No. 33 dated 28 May 2014 from Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 is Rp.340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with a nominal value of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49% or as many as 490 Class B shares with a nominal value of Rp166,955,544.

At present, NPCT1 is engaged in loading and unloading services. The business activities that have been carried out, can be described as follows:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Kegiatan usaha perusahaan terdiri dari 3 (tiga) kelompok usaha yaitu:

- a. Untuk memuat dan membongkar Petikemas di Pelabuhan
- b. Untuk memindahkan Petikemas ke dan dari Pelabuhan ke Pangkalan Petikemas
- c. Untuk menangani dan mengelola petikemas di Terminal Petikemas dan kegiatan yang terkait termasuk kegiatan penampungan, pengawasan, penyusunan dan pengangkutan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan petikemas dan kegiatan Container Freight Station (CFS) pada umumnya.

The company's business activities consist of 3 (three) business groups, namely:

- a. Loading and unloading containers at the port
- b. Moving containers to and from the Port to the Petikemas Base
- c. Handling and managing containers at the Container Terminals and related activities including storage, supervision, preparation and transportation activities related to container handling and management activities and Container Freight Station (CFS) activities in general.

Adapun visi dan Misi PT New Priok Container Terminal One yakni:

The Vision and Mission of PT New Priok Container Terminal One:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
To be the leading gateway terminal operator in Indonesia.	Provide best-in-class container terminal services to energize Indonesia's international trade and achieve its full growth potential by building successful partnerships with our customers and stakeholders.

Berdasarkan Circular Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT New Priok Container Terminal One tanggal 26 maret 2018, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT NPCT 1 adalah sebagai berikut.

Based on of PT New Priok Container Terminal One Extraordinary General Meeting of Shareholders Circular Resolution dated March 26 2018, the PT NPCT 1 Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows.

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Prasetyadi
Komisaris Commissioner	M. Adji
Komisaris Commissioner	Yoshiyuki Shimizu
Komisaris Commissioner	Darwin Silalahi
Komisaris Commissioner	Eiji Onishi
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Makoto Saito
Direktur Regional Regional Director	Wee Hiang Keong
Direktur Director	Ali Mulyono
Direktur Director	Rino Wisnu Putro
Direktur Director	Hisanaga Ishida

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

ENTITAS ASOSIASI**ASSOCIATED ENTITIES**

Nama Name	Kegiatan / Bidang Usaha Activity Businesses	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Year of Establishment Establishment	Status Operasi Operation state	Jumlah Aset (dalam ribuan Rupiah) Asset (in thousands Rupiah)	Domisili Location
PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)	Terminal Petikemas Container Terminal	25,00%	2013	Belum Beroperasi Secara Komersial Not Commercially Operating	131.715.920	Jakarta
PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Terminal Petikemas Container Terminal	48,90%	1999	Beroperasi Operating	4.712.275.127	Jakarta

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA (PT TPI)

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000
2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial. Adapun visi dan Misi PT Terminal Petikemas Indonesia yakni:

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA (PT TPI)

TPI was established based on Certificate No. 36 dated 10 April 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree AHU-21873.AH.01.01. 2013 dated April 24, 2013.

TPI authorized capital of Rp500,000,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

1. The company has 25% or 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000
2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000

At present, TPI has not carried out commercial operations. The vision and mission of PT Terminal Petikemas Indonesia are:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi Operator Terminal Peti kemas terpercaya di Indonesia, yang memfasilitasi dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelayanan yang efisien, handal, dan biaya yang efektif. To Become a trusted Container Terminal Operator in Indonesia, which facilitates and fosters national economic growth through efficient, reliable, and cost-effective services.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam pelayanan terminal peti kemas di Indonesia dengan memberikan keandalan dan produktivitas terbaik. 2. Menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui pengelolaan terminal peti kemas secara terintegrasi (internasional dan terminal domestik) yang bisa memfasilitasi jadwal pelayaran yang teratur dan biaya <i>handling</i> yang efektif di seluruh terminal yang dioperasikan dalam sebuah konektivitas yang efisien. 3. Mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (dari barat ke timur Indonesia) dengan memberikan pengelolaan terminal peti kemas yang profesional dan efisien. 4. Memberikan produktivitas terbaik dan konsisten di tiap terminal yang dioperasikan melalui implementasi perbaikan proses yang berkelanjutan. 5. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Compete at the national and international level in container terminal services in Indonesia by providing the best reliability and productivity. 2. Create values for the stakeholder through the management of integrated containers (international and domestic terminals) that facilitates regular shipping schedules and cost effective handling across all terminals operated in an efficient connectivity. 3. Support and facilitate sustainable national economic growth (from west to east of Indonesia) by providing professional and efficient container terminal management. 4. Ensure productivity and consistency at every operational terminal through implementing an improving and sustainable process. 5. Provide a safe and healthy working environment for employees and other stakeholders.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Terminal Petikemas Indonesia No. UM.58/91/7/PI-18.TU, No. SK.03/22/11/1/PBI/UT/PI.II-18, No. KEP.0491/KU.04/HOFC-2018 dan No. SK.93/KP.304/DUT.2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Terminal Petikemas Indonesia, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT TPI adalah sebagai berikut:

Based on the PT Terminal Petikemas Indonesia General Meeting of Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Decision Number: UM.58/91/7/PI-18.TU, Number SK.03/22/11/1/PBI/UT/PI.II-18, Number: KEP.0491/KU.04/HOFC-2018 and Number: SK.93/KP.304/DUT.2018 dated November 22, 2018 concerning Dismissal and Appointment of PT PT Terminal Petikemas Indonesia Board of Commissioners Members, the PT TPI Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follow:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Prasetyadi
Komisaris Commissioner	Syahputera Sembiring
Komisaris Commissioner	Iman Rachman
Komisaris Commissioner	Farid Padang
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Hadi Mohammad Lukmanty
Direktur Director	Abadi Sembiring
Direktur Director	Alexander Bonar L. Sitorus

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT)

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01. TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya. Bidang usaha PT JICT yaitu melaksanakan pelayanan jasa terminal petikemas antara lain:

1. Memuat dan membongkar petikemas di dermaga terminal petikemas,
2. Memindahkan petikemas dari dermaga ke lapangan petikemas dan sebaliknya,
3. Menangani petikemas di lapangan petikemas, termasuk pengangkatan, penurunan, penyerahan dan penerimaan petikemas,
4. Memberikan jasa pengelolaan dan pengoperasian terminal petikemas,
5. Melakukan kegiatan transportasi multimoda,
6. Melakukan kegiatan gudang transit (*Container Freight Station*) yang meliputi *stuffing* dan *unstuffing* petikemas dan penumpukan barang di gudang transit, dan
7. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan terminal petikemas termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan pembersihan (*cleaning*), pemeriksaan laik guna (*Pre-Trip Inspection*), Fumigasi dan perbaikan petikemas.

PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT)

JICT was established based on Certificate No. 72 dated 27 March 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on the Amendment Certificate No. 77 and No. 78 dated 30 March 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, SH, stated that the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406 divided into 1 series A share of the Government of the Republic of Indonesia and 442,900,812 series B shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- The Company has 48.90% or 216,578,498 series B shares with a nominal value of Rp108,289,249.
- The Maritime Employee Cooperative has 0.10% or as many as 442,899 Series B shares with a nominal value of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or as many as 225,879,415 series B shares with a nominal value of Rp112,939,707.

At present, JICT is engaged in port services, container terminal services, stacking and other services. The business field of PT JICT is to carry out container terminal services including:

1. Loading and unloading containers at the container terminal dock,
2. Transfer containers from the dock to the container field and vice versa,
3. Handling containers in the container field, including lifting, dropping, submitting and receiving containers,
4. Providing management and operation services for container terminals,
5. Carry out multimodal transportation activities,
6. Carry out transit warehouse activities (*Container Freight Station*) which includes stuffing and container unstuffing and stacking of goods in the transit warehouse, and
7. Conduct activities related to container terminal activities including but not limited to cleaning activities, Pre-Trip Inspection, Fumigation and container repair.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Adapun Visi dan Misi PT Jakarta International Container Terminal yakni:

The Vision and Mission of PT Jakarta International Container Terminal are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Terminal Peti kemas Kelas Dunia.	Tumbuh berkembang dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta sumber daya yang handal
To be a World Class Container Terminal	Growing and developing by emphasizing on customer satisfaction and reliable resources

Berdasarkan Berdasarkan Circular Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tanggal 4 Juli 2018, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JICT adalah sebagai berikut :

Based on PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Extraordinary General Meeting of Shareholders Circular Resolution dated July 4, 2018, the PT JICT Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	Wibowo Suseno Wirjawan
Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Rizal Ariansyah
Komisaris Commissioner	Kamil Sjoelib
Komisaris Commissioner	Taufan Hunneman
Komisaris Commissioner	Rianti Ang
Komisaris Commissioner	John Stephen Ashworth
Komisaris Commissioner	Ruth Sin Ling Tsim
Komisaris Commissioner	Supomo Hidjazie
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
Direktur Utama President Director	Gunta Prabawa
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Riza Erivan
Direktur Komersial (Plt) Acting Commercial Director	Hudadi Soerja Djanegara
Direktur Keuangan Finance Director	Budi Cahyono
Direktur SDM dan Administrasi HR and Administration Director	Tara Hidayat
Direktur Operasi dan Teknik Operations and Technical Director	Kim Changsu

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

OPERASI BERSAMA**JOINT OPERATION**

Nama Name	Kegiatan / Bidang Usaha Activity Businesses	Kepemilikan Saham Share ownership	Tahun Pendirian Year of establishment	Status Operasi Operation state	Jumlah Aset (Rp) Asset	Domisili Location
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (TPK Koja)	Terminal Petikemas	54,91%	1994	Beroperasi Operating	523.023.618	Jakarta

KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA (TPK KOJA)

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 (Amandemen I) dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 (Amandemen II), tanggal 5 Agustus 2014 (Amandemen III) dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039.

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI. Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas. Adapun kegiatan usaha tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Discharging* adalah Kegiatan pembongkaran peti kemas dari kapal;
2. *Loading* adalah kegiatan pemuatan peti kemas ke kapal;
3. *Receiving* adalah kegiatan penerimaan peti kemas ekspor;
4. *Delivery* adalah kegiatan penyerahan peti kemas ekspor;
5. *Transshipment* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari terminal satu ke terminal lain;
6. *Over Brengen* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari container yard ke Tempat Penimbunan Sementara;
7. *Behandle* adalah kegiatan pemeriksaan isi peti kemas oleh instansi Bea Cukai;
8. Karantina adalah kegiatan pemisahan dan pemeriksaan isi peti kemas hewan dan tumbuhan oleh instansi Karantina terkait; dan
9. *Verified Gross Mass (VGM)* adalah Penimbangan berat kotor peti kemas yang terverifikasi.

KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA (TPK KOJA)

Koja TPK Operations Cooperation was established based on Certificate No. 53 dated October 23, 1996 by Imas Fatimah, S.H. and the Cooperation Agreement on Operation Koja on August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was amended substantially on March 26, 1999 (Amendment I) and subsequently amended on June 22, 2011 (Amendment II), August 5, 2014 (Amendment III) and June 22, 2015. The agreement is valid for 20 years from the date commercial operation, namely November 1, 1998 and has been extended to March 26, 2039.

The participant investment proportion for 2018 is 54.91% for the Company and 45.09% for HPI. At present, TPK Koja is engaged in the operation and management of port and container terminals. The business activities are described as follows:

1. *Discharging* is the activity of dismantling containers from the ship;
2. *Loading* is the activity of loading containers to ships;
3. *Receiving* is an export container receiving activity;
4. *Delivery* is the activity of delivering export containers;
5. *Transshipment* is the activity of moving containers from one terminal to another;
6. *Over Brengen* is the activity of transferring containers from container yards to Temporary Hoarding Places;
7. *Behandle* is an activity of checking container contents by Customs authorities;
8. *Quarantine* is the activity of separating and examining the contents of animal and plant containers by the relevant Quarantine agency; and
9. *Verified Gross Mass (VGM)* is Weighing the gross weight of verified containers.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
 Shareholder Composition

Adapun Visi dan Misi KSO Terminal Peti Kemas Koja yakni: The KSO Koja Container Terminal's Vision and Mission are:

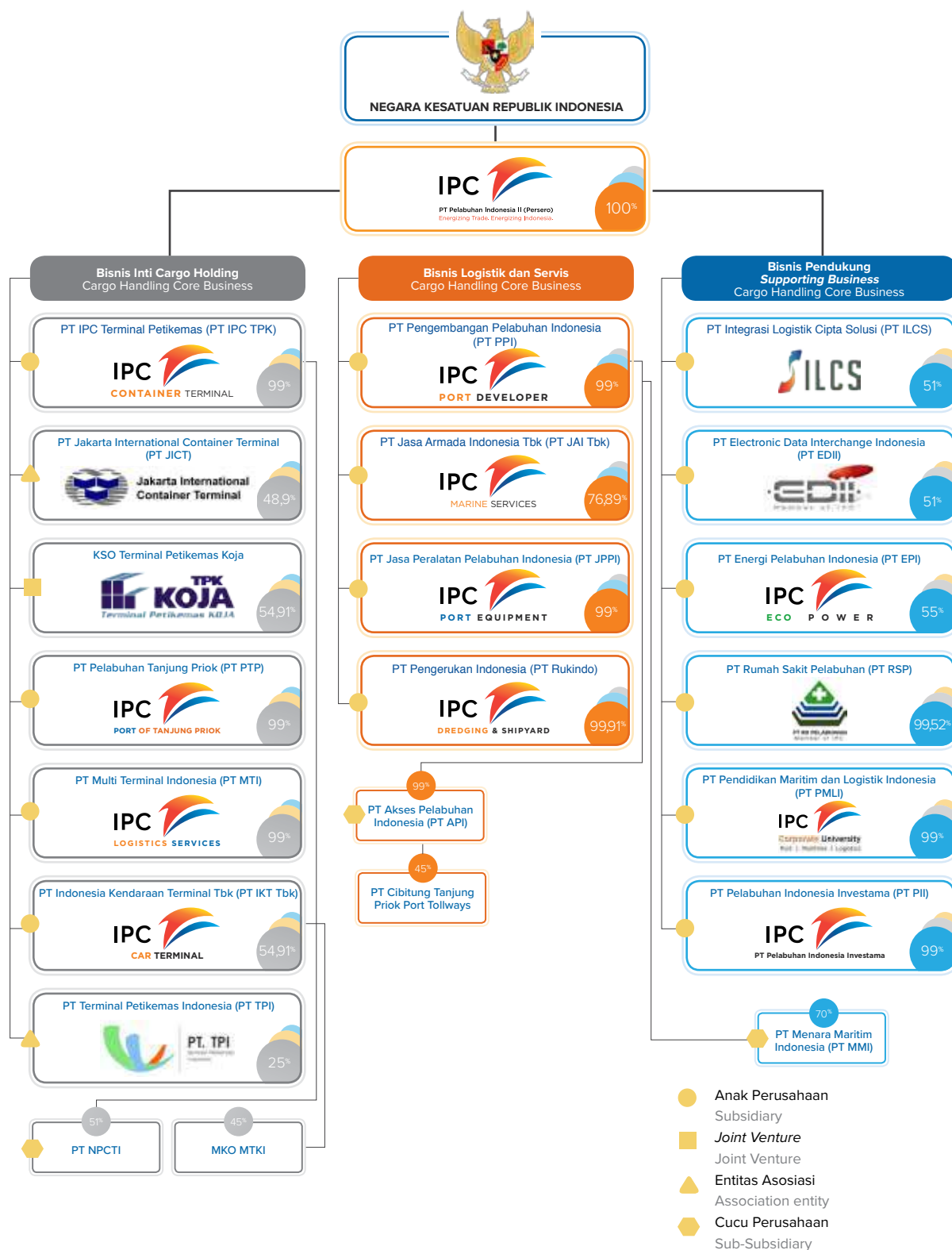
Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Terminal Peti kemas Kelas Dunia. To be a World Class Container Terminal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan layanan terminal peti kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan; 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, dan profesional; dan 3. Menjaga kepercayaan para <i>Stakeholder</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Providing comprehensive and innovative container terminal services, as well as providing added value to the customers;</i> 2. <i>Developing reliable, qualified, and professional human resources;</i> 3. <i>Maintaining the confidence of the Stakeholders</i>

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pemilik Nomor: SK.03/7/7/2/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor: 115/SKB-HPI/VII/17 tanggal 7 Juli 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TPK Koja sebagai berikut: Based on the Joint Ownership Decree Number: SK.03/7/7/2/PBI/UT/PI.II-17 and Number: 115/SKB-HPI/VII/17 dated July 7, 2017, the KSO TPK Koja Management and Supervisory Board composition is as follows.

DEWAN PENGAWAS <i>SUPERVISORY BOARD</i>	
Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Riry Syeried Jetta
Dewan Pengawas Supervisory Board	Mochammad Imron Zubaidy
Dewan Pengawas Supervisory Board	Kasman
Dewan Pengawas Supervisory Board	Yos Nugroho
Dewan Pengawas Supervisory Board	Seto Baskoro
Dewan Pengawas Supervisory Board	Tri Gunawan Bayu Aji
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
General Manager	Ade Hartono
DGM Keuangan DGM of Finance	Ida Daryaningsih
DGM Operasi DGM of Operations	Thavaneswaran Palasanthiran
DGM Teknologi Informasi DGM of Information and Technology	Marinus R. Saroengallo
DGM SDM dan Umum DGM HR & General Affairs	Nurjadin Surur
DGM Komersial DGM of Commercial	Achmad Syaicu

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Organization Group Structure



Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Until December 31, 2018, IPC does not have a *Special Purpose Vehicle* (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Chronology of Issuing Stock

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN *Non Listed/Non* Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as of December 31, 2018 is a Non Listed / Non-Financial State-Owned Enterprises and has not listed shares on Stock Exchange. Thus there is no information to relate concerning corporate actions, shares prices in the stock offering, number of listed shares after each corporate action, and the name of the exchange in which the company's shares are listed.

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP / Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Information
1	PP No. 57 Tahun 1991 PP No. 57 of 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perum Pelabuhan II transfer to a Limited Company (Persero).
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993 Republic of Indonesia Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No.4 dated May 5, 1998	Imas Fatimah, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04. TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Decree No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998	Perubahan Anggaran Dasar Amendment to Articles of Association
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-80894.AH.01.02.Year 2008 dated November 3, 2008	Perubahan Anggaran Dasar. Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008 Amendment to Articles of Association. As announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July , 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010 Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar. Amendment to Articles of Association.

KRONOLOGI PERBITAN SAHAM
Chronology of Issuing Stock

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal <i>PP / Deed No. and Date</i>	Notaris <i>Notary</i>	Pengesahan <i>Endorsement</i>	Keterangan <i>Information</i>
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012 Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-AH.01.10-35061 dated September 27, 2012	Perubahan Anggaran Dasar terakhir. Latest Amendment to the Articles of Association.
7	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notary Deed No. 03 dated August 2, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,		Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013 Additional issued and fully paid Company capital as notified to the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights through Letter of Receipt of Notification No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013
8	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notary Deed No. 03 dated August 2, 2013	-	-	Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000. Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000 The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs, increased its capital participation in the Company in the amount of Rp426,418,000,000. With the additional Government of the Republic of Indonesia capital, the Company's issued / paid up capital increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN OBLIGASI

Chronology of Bond Issuance and / or Listing

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan obligasi global (*Global Bond*) perdana senilai total USD1,60 miliar atau setara dengan Rp22,02 triliun pada tanggal 5 Mei 2015. Obligasi global tersebut terbagi menjadi 2 (dua) seri yaitu obligasi dengan jangka waktu 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Mei 2025 tingkat bunga 4,250% per tahun dan 30 tahun dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Mei 2045 tingkat bunga 5,375% per tahun yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun.

Nama Bursa Tempat Obligasi Perusahaan Dicatatkan

Obligasi Global (*Global Bond*) ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat, yaitu :

Peringkat tahun 2015 :

1. S&P : BB+ (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

Peringkat Tahun 2016 :

1. S&P : BB+ (*Outlook : Positive*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

Peringkat tahun 2017 :

1. S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Positive*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Positive*)

Peringkat tahun 2018 :

1. S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa2 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB (*Outlook : Stable*)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) issued its first global bond for a total of USD1.60 billion, equivalent to Rp22.02 trillion on May 5, 2015. The global bond was divided into 2 (two) tranches, namely bonds with a 10 years period with a maturity date of May 5, 2025, an interest rate of 4.250% per annum, and bonds with a 30 years period with a maturity date of May 5, 2045, an interest rate of 5.375% per annum, to be paid 2 (two) times a year.

Name of the Exchange where the Company's Bonds are Listed

The Global Bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and has attained international ratings from various rating agencies, namely:

2015 Rating :

1. S&P : BB+ (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

2016 Rating:

1. S&P : BB+ (*Outlook : Positive*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

2017 Rating:

1. S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa3 (*Outlook : Positive*)
3. Fitch : BBB- (*Outlook : Positive*)

2018 Rating:

1. S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
2. Moody's: Baa2 (*Outlook : Stable*)
3. Fitch : BBB (*Outlook : Stable*)

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI

Chronology of Bond Issuance and / or Listing

No.	Uraian <i>Description</i>	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang <i>Currency</i>	Jumlah Obligasi <i>Amount of Bonds</i>	Harga Penawaran per lembar (USD) <i>Price per Sheet (USD)</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran <i>Payment Status</i>	Peringkat <i>Ranking</i>		Dicatatkan di <i>Listed in</i>
										2018	2017	
1.	Obligasi Global (Global Bond) Seri 1	05 Mei 2015	10 Tahun	USD	1,1 miliar	98.996 USD	05 Mei 2025	4,250% per tahun	Pembayaran akan dilakukan pada saat jatuh tempo	S&P: BBB- (Outlook: Stable)	S&P: BBB- (Outlook: Stable)	Singapore Stock Exchange
			10 Years		1.1 billion		May 5, 2025	4.250% per Years		Payment will be made at maturity	Moody's: Baa2 (Outlook: Stable)	
2.	Obligasi Global (Global Bond) Seri 2	05 Mei 2015	30 Tahun	USD	500 juta	98.996 USD	05 Mei 2045	5,375% per tahun	Payment will be made at maturity	Fitch: BBB (Outlook: Stable)	Fitch: BBB- (Outlook: Positive)	Singapore Stock Exchange
		30 Years	500 million		May 5, 2045		5.375% per Years					

Tabel Kronologis Pembayaran Bunga Obligasi Global (Global Bond) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Payment Chronology for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Global Bonds

Bunga Ke- <i>Interest</i>	Tanggal Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Date</i>	Status Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Status</i>
1.	03 November 2015 November 03, 2015	Telah dibayarkan Has been paid
2.	27 April 2016 April 27, 2016	Telah dibayarkan Has been paid
3.	03 November 2016 November 03, 2016	Telah dibayarkan Has been paid
4.	02 Mei 2017 Mei 02, 2017	Telah dibayarkan Has been paid
5.	02 November 2017 November 02, 2017	Telah dibayarkan Has been paid
7.	02 Mei 2018 Mei 02, 2018	Telah dibayarkan Has been paid
8.	01 November 2018 November 01, 2018	Telah dibayarkan Has been paid

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Chronology of Other Securities Issuance and / Listing

Sampai dengan 31 Desember 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak memiliki efek efek lainnya dan selain obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/ atau pencatatan efek efek lainnya dan selain obligasi.

As of December 31, 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has no securities other than bonds, so there is no chronological information related to the issuance and / or recording of securities other than bonds.



NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ ATAU PROFESI PENUNJANG

Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM	<p>Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota <i>Ernest & Young Global Limited</i>) Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12190 Tel : (62-21) 52895000 Fax : (62-21) 52895555 Website : //www.ey.com Email : dudi.muhammad.kurniawan@id.ey.com dan wibisono.wibisono@id.ey.com</p> <p>Jasa Utama: Melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Main Services: Carry out a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018 which is presented in accordance with the prevailing Financial Accounting Standards in Indonesia.</p> <p>Jasa Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20182. Melaksanakan audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 20183. Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.4. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. <p>Other Services:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carry out procedures for the Performance Evaluation Results Report and Achievement of KPI (Key Performance Indicators) for the financial year ending on December 31, 20182. Carry out a Compliance audit of Legislation and Internal Control 20183. Carry out an audit of the Partnership and Community Development Program (PKBL) Financial Report for the financial year ending on December 31, 2018.4. Carry out agreed procedures for the Prudential Principle Implementation Report (KPPK) in accordance with Bank Indonesia Regulations and Circular Letters. <p>Jumlah Periode Audit : 5 Tahun (2014 – 2018) Besaran Fee : RP3.882.714.000 (Tahun 2018) Number of Audit Periods: 5 Years (2014 - 2018) Fee : Rp3,882,714,000 (Year 2018)</p>
--	---

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

PENCATATAN OBLIGASI BONDS REGISTRAR	Singapore Exchange Securities Trading Limited 2 Shenton Way #02-02 SGX Centre 1 Singapore 068804 www.sgx.com Tel : +65 6236 8888 Fax : +65 6535 6994 <i>Website</i> : https://www2.sgx.com/ <i>Email</i> : sgxnet.services@sgx.com Jasa yang diberikan : Pencatatan Obligasi Periode Penugasan : 2015 – Saat ini Services provided : Registration of Bonds Assignment Period : 2015 – Present
LEMBAGA PEMERINGKAT RATING AGENCIES	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel : +65 6398 8300 Fax : +65 6398 8301 <i>Website</i> : www.moody.com Jasa yang diberikan : Lembaga Pemeringkat Periode Penugasan : 2015 – Saat ini Services provided : Rating agencies Assignment Period : 2015 – Present Fitch Ratings Ltd 30 North Colonnade London E14 5GN United Kingdom Tel : +44 (0)20 3530 1000 Fax : +44 (0)20 3530 1500 <i>Website</i> : www.fitchratings.com Jasa yang diberikan : Lembaga Pemeringkat Periode Penugasan : 2015 – Saat ini Services provided : Rating agencies Assignment Period : 2015 – Present Standard & Poor's Singapore Pte. Ltd 12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982 Tel : +65 6438 2881 Fax : +65 6438 2320 <i>Website</i> : www.standardandpoors.com Jasa yang diberikan : Lembaga Pemeringkat Periode Penugasan : 2015 – Saat ini Services provided : Rating agencies Assignment Period : 2015 – Present

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

WALI AMANAT TRUSTEE	The Bank of New York Mellon One Temasek Avenue #03-01 Millenia Tower Singapore 039192 Tel : +65 6432 0222 Fax : +65 6883 0338 <i>Website</i> : www.bnymellon.com Jasa yang diberikan : Wali Amanat Periode Penugasan : 2015 – Saat ini Services provided : Trustee Assignment Period : 2015 – Present
NOTARIS NOTARY	Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta Tel : +62 21 8313383 Fax : +62 21 83134308 <i>Email</i> : nanda.fauz@gmail.com Jasa yang diberikan : Notaris Periode Penugasan : 8 maret 2018 s/d 7 maret 2019 Services provided : Notary Assignment Period : 8 March 2018 - 7 March 2019 (for 12 months from the agreement)

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

ADVOKAT ADVOCATE	<p>Hakim Garuda Nusantara, Harman & Partners Office 8, lantai 12 Jl. Senopati Raya No.8 B, Jakarta Selatan. Tel : (021) 29333122, 29333123, 29333124. Fax : (021) 29333125 Email : ahgn@nhplaw.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum legal consultant Periode Penugasan: Sejak Surat Kuasa Khusus (SKK) diberikan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (sampai saat ini salinan putusan kasasi belum disampaikan)</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: After the Special Power of Attorney (SKK) has been granted until the stipulation of a court ruling that has permanent legal force (until now a copy of the appeal decision has not been submitted)</p>
	<p>Kemalsjah & Associates Graha CIMB Niaga, lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman kav.58, Jakarta. Tel : (021) 2505010 Email : kemal@kemalsjahlaw.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: 25 Mei 2017 s/d 24 Mei 2018</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: May 25, 2017 to May 24, 2018</p>
	<p>Widjojanto Sonhadji & Associates City Loft Sudirman, lantai 21, Suite 2108, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta. Tel : (021) 25556740 Fax : (021)25556741 Email : wsalawfirm@gmail.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: 13 Februari 2017 s/d 12 Februari 2018</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: February 13, 2017 to February 12, 2018</p>

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

<p>ADVOKAT ADVOCATE</p>	<p>Prof. Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan Jl. Tulodong Bawah Blok D No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tel : (021) 5703299 Fax : (021) 52901930 Email : osa_lawfirm@yahoo.co.id</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Berlaku sejak ditandatangani (1 Agustus 2017) s/d putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: Valid from signing (August 1, 2017) until the court ruling is legally binding</p> <hr/> <p>Kiagus Ahmad & Associates Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan Tel : (021) 576 2722 Email : contact@kiaguslaw.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Dua tahun sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: Two years from the date of the Official Report</p> <hr/> <p>Rahmad Irwan & Partners Gandaria 8 Office Lantai 15 D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240 Tel : (021) 29303560, 29303570, 29303580 Fax : (021) 29303581 Email : rahmad.irwan@yahoo.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Dua tahun sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: Two years from the date of the Official Report</p>
-----------------------------	---

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Name and Addresses of Institutions and / or Supporting Professionals

ADVOKAT ADVOCATE	<p>SAY 'n Partners Law Firm Gedung Menara MTH, Lantai 11 – Suite 1107 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan. Tel : (021) 83788531 Fax : (021) 83788532 Email : saypartnerlawfirm@gmail.com</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Dua bulan sejak SPK 17 Januari 2018</p> <p>Service Provided: Legal Consultant Assignment period: Two months from SPK January 17, 2018</p>
	<p>Radjiman Billitea & Partners The H Tower, 19th Floor, Suite E Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C. 20 – 21 Jakarta 12940. Tel : (021) 29516868 Fax : (021) 29516869 Email : vinna@rbplaw.co.id</p> <p>Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Dua bulan sejak SPK 17 Januari 2018</p> <p>Service Provided: 6 bulan sejak perjanjian Assignment period: 6 months after the agreement</p>

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Award and Certification

1



2



3



4



5



6



7



8



9



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

PENGHARGAAN <i>Award</i>		
<p>1. Nama Penghargaan/Award Name: The Most Promising Company in Strategic Marketing Acara / Event: BUMN Marketeers Award 2018 Penyelenggara / Organizer: Forum Humas BUMN & MarkPlus, Inc. Tanggal / Date : 2 Mei 2018 May 2, 2018</p>	<p>2. Nama Penghargaan / Award Name: Platinum Award Acara / Event : Indonesia Sales and Marketing Award (ISMA) II 2018 Penyelenggara / Organizer : Economic Review Tanggal / Date : 13 April 2018 April 13, 2018</p>	<p>3. Nama Penghargaan / Award Name: Platinum Award Acara / Event : Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication-III-2018 Penyelenggara / Organizer : Economic Review Tanggal / Date : 2 Maret 2018 March 2, 2018</p>
<p>4. Nama Penghargaan / Award Name: Kategori Perusahaan BUMN Non Tbk. Terpopuler di Media Category - Most Media Popular Non Tbk SOE Acara / Event : PR Indonesia Awards 2018 (PRIA) Penyelenggara / Organizer : Majalah PR Indonesia PR Indonesia Magazine Tanggal / Date : 30 Maret 2018 March 30, 2018</p>	<p>5. Nama Penghargaan / Award Name: Gold Winner, Kategori Owned Media, Sub Kategori Video Profile Perusahaan Gold Winner, Category Owned Media, Sub Category Video Company Profile BUMN Non Tbk. Acara / Event : PR Indonesia Awards 2018 (PRIA) Penyelenggara / Organizer : Majalah PR Indonesia PR Indonesia Magazine Tanggal / Date : 30 Maret 2018 March 30, 2018</p>	<p>6. Nama Penghargaan / Award Name: Gold Winner, Kategori Program PR, Sub Kategori Program Marketing PR Perusahaan BUMN Non Tbk. "CINTA IPC" Gold Winner, PR Program Category, Sub Category Marketing Program PR Non SOE Company. "CINTA IPC" Acara / Event : PR Indonesia Awards 2018 (PRIA) Penyelenggara / Organizer : Majalah PR Indonesia PR Indonesia Magazine Tanggal / Date : 30 Maret 2018 March 30, 2018</p>
<p>7. Nama Penghargaan / Award Name: Individual Achievers - Category : Best Achiever In CEO State Owned Enterprises Acara / Event : Anugerah Obsession Awards 2018 Obsession Awards 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah Men's Obsession Men's Obsession Magazine Tanggal / Date : 22 Maret 2018 March 22, 2018</p>	<p>8. Nama Penghargaan / Award Name: Gold Winner Perusahaan BUMN Kategori Indonesia Bersatu Terbaik Gold Winner SOE Company Category – Best United Indonesia Acara / Event : Revolusi Mental Award 2018 Mental Revolution Awards 2018 Penyelenggara / Organizer : BUMN Track Tanggal / Date : 26 April 2018 April 26, 2018</p>	<p>9. Nama Penghargaan / Award Name: Elvyn G. Masassya Sebagai Top Eksekutif Muslim Bidang Manajemen Korporasi Elvyn G. Masassya as Top Muslim Executive in Corporate Management Acara / Event : Top Eksekutif Muslim 2018 Top Muslim Executive 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah Ibadah Ibadah Magazine Tanggal / Date : 7 Mei 2018 May 7, 2018</p>

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification



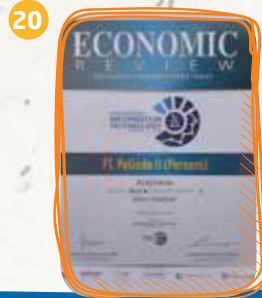
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

PENGHARGAAN

Award

- | | | |
|--|---|--|
| <p>10. Nama Penghargaan / Award Name:
 Special Mention for Innovation Leader of Digital Port Operator in Indonesia
 Acara / Event :
 Indonesia Digital Innovation Award 2018
 Penyelenggara / Organizer :
 Majalah Warta Ekonomi
 Warta Ekonomi Magazine
 Tanggal / Date :
 25 Mei 2018
 May 25, 2018</p> | <p>11. Nama Penghargaan / Award Name:
 Elvyn G. Masassya Sebagai Top Leader On CSR Commitment 2018
 Elvyn G. Masassya as Top Leader in CSR Commitment 2018
 Acara / Event :
 Top CSR 2018
 Penyelenggara / Organizer :
 Business News Indonesia
 Tanggal / Date :
 4 Oktober 2018
 October 4, 2018</p> | <p>12. Nama Penghargaan / Award Name:
 Top CSR 2018 Sektor Pelabuhan TOP CSR 2018 Port Sector
 Acara / Event :
 Top CSR 2018
 Penyelenggara / Organizer :
 Business News Indonesia
 Tanggal / Date :
 4 Oktober 2018
 October 4, 2018</p> |
| <p>13. Nama Penghargaan / Award Name:
 Juara 1 Kategori Pengembangan Talenta Terbaik
 1st Winner in Best Talent Development Category
 Acara / Event :
 Anugerah BUMN 2018
 SOE 2018 Awards
 Penyelenggara / Organizer :
 BUMN Track
 Tanggal / Date :
 August 9, 2018
 August 9, 2018</p> | <p>14. Nama Penghargaan / Award Name:
 Juara 2 Kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik
 2nd Winner in Best Corporate Governance (GCG) Category
 Acara / Event :
 Anugerah BUMN 2018
 SOE 2018 Awards
 Penyelenggara / Organizer :
 BUMN Track
 Tanggal / Date :
 9 Agustus 2018
 August 9, 2018</p> | <p>15. Nama Penghargaan / Award Name:
 Penghargaan Atas Dukungan Sepenuhnya Secara Aktif Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018
 Award for Fully Supporting Eid Transportation in 2018
 Acara / Event :
 Mudik Bareng Guyub Rukun, Mudik Bahagia
 Penyelenggara / Organizer :
 Kementerian Perhubungan
 Ministry of Communications
 Tanggal / Date :
 6 Juli 2018
 July 6, 2018</p> |
| <p>16. Nama Penghargaan / Award Name:
 Apresiasi Atas Peran Pemanfaatan Informasi Publik Dalam Pelayanan Arus Mudik 2018
 Appreciation for Utilizing Public Information For 2018 Mudik
 Acara / Event :
 Apresiasi Pelayanan Informasi Publik Arus Mudik
 Appreciation for Mudik Public Information Services in 2018
 Penyelenggara / Organizer :
 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
 Republic of Indonesia Central Information Commission
 Tanggal / Date :
 8 Agustus 2018
 August 8, 2018</p> | <p>17. Nama Penghargaan / Award Name:
 Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Memberikan Apresiasi Setinggi - tingginya kepada: Bapak Elvyn G. Masassya Karena Telah Berhasil Meningkatkan Kinerja Perusahaan Yang Berdampak Positif Pada Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Workers Gives Highest Appreciation to: Bapak Elvyn G. Masassya Because Has Successfully Improved Company Performance With a Positive Impact On Increasing Employee Welfare
 Acara / Event :
 Apresiasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II
 Pelabuhan Indonesia II Trade Union Appreciation
 Penyelenggara / Organizer :
 Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II
 Pelabuhan Indonesia II Trade Union Central Management Board
 Tanggal / Date :
 Januari 2018
 January 2018</p> | <p>18. Nama Penghargaan / Award Name:
 Prestasi Sebagai BUMN Transparan (Indeks 4) 2017
 SOE Transparency (Index 4) 2017
 Acara / Event :
 Prestasi Sebagai BUMN Transparan (Indeks 4) 2017
 SOE Transparency (Index 4) 2017
 Penyelenggara / Organizer :
 Pascasarjana Universitas Bung Hatta
 Universitas Bung Hatta Postgraduates
 Tanggal / Date :
 Januari 2018
 January 2018</p> |

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

PENGHARGAAN <i>Award</i>		
<p>19. Nama Penghargaan / Award Name: BUMN Berpredikat "Sangat Bagus" Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2018 SOE Predicate "Very Good" for Financial Performance During 2018 Acara / Event : Info Bank 9th BUMN Awards 2018 Penyelenggara / Organizer : Infobank Tanggal / Date : 26 September 2018 September 26, 2018</p>	<p>20. Nama Penghargaan / Award Name: Platinum Award Kategori BUMN Platinum Award SOE Category Acara / Event : Indonesia IT Award-I-2018 (IITA-I-2018) Penyelenggara / Organizer : Economic Review Tanggal / Date : 2 Maret 2018 March 2, 2018</p>	<p>21. Nama Penghargaan / Award Name: The Best Cash Management In Indonesia Acara / Event : Client Experience Award Penyelenggara / Organizer : PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tanggal / Date : 8 Mei 2018 May 8, 2018</p>
<p>22. Nama Penghargaan / Award Name: Peringkat Ketiga Terbaik Kategori Perusahaan BUMN Non Tbk. Sektor Kepelabuhanan Third Rank - Category for Non-Tbk SOE, Port Sector Acara / Event : Indonesia Human Capital Award-IV-2018 (IHCA-IV-2018) Penyelenggara / Organizer : Economic Review Tanggal / Date : 30 Mei 2018 May 30, 2018</p>	<p>23. Nama Penghargaan / Award Name: Elvyn G. Masassya as The Best CEO 2018 Acara / Event : Best IT & Data Technology Governance Penyelenggara / Organizer : Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Big Data & AI Association Tanggal / Date : 17 Oktober 2018 October 17, 2018</p>	<p>24. Nama Penghargaan / Award Name: The Best IT Data Governance Acara / Event : Best IT & Data Technology Governance Penyelenggara / Organizer : Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Big Data & AI Association Tanggal / Date : 17 Oktober 2018 October 17, 2018</p>
<p>25. Nama Penghargaan / Award Name: The Best IT Data Security Acara / Event : Best IT & Data Technology Governance Penyelenggara / Organizer : Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Big Data & AI Association Tanggal / Date : 17 Oktober 2018 October 17, 2018</p>	<p>26. Nama Penghargaan / Award Name: The Best IT Data Infrastructure Acara / Event : Best IT & Data Technology Governance Penyelenggara / Organizer : Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Big Data & AI Association Tanggal / Date : 17 Oktober 2018 October 17, 2018</p>	<p>27. Nama Penghargaan / Award Name: Elvyn G. Masassya Sebagai Best Communicators 2018 Kategori CEO BUMN Non Tbk. Elvyn G. Masassya as Best Communicator 2018 Kategori CEO Non Tbk. SOE Acara / Event : PR Best Communicators 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah PR Indonesia Tanggal / Date : 09 November 2018 November 9, 2018</p>

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

PENGHARGAAN <i>Award</i>		
<p>28. Nama Penghargaan / Award Name: BUMN Sector Service, Transportation, Logistics and Energy (Enhancing Competitiveness Through Technology) Terbaik Acara / Event : BUMN Branding and Marketing Award 2018 Penyelenggara / Organizer : BUMN Track Tanggal / Date : 21 November 2018 November 21, 2018</p>	<p>29. Nama Penghargaan / Award Name: BUMN Pendukung Poros Maritim SOE Supporting Maritime Axis Acara / Event : BUMN Branding and Marketing Award 2018 Penyelenggara / Organizer : BUMN Track Tanggal / Date : 21 November 2018 November 21, 2018</p>	<p>30. Nama Penghargaan / Award Name: IPC Meraih Kategori Perak Organisasi Besar Jasa IPC Silver Award in the category for Large Services Organizations Acara / Event : SNI Award 2018 Penyelenggara / Organizer : Badan Standarisasi Nasional (BSN) Tanggal / Date : 22 November 2018 November 22, 2018</p>
<p>31. Nama Penghargaan / Award Name: Elvyn G. Masassya as Top Leader on IT Leadership Acara / Event : TOP IT & TELCO 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah IT Works IT Works Magazine Tanggal / Date : 6 Desember 2018 December 6, 2018</p>	<p>32. Nama Penghargaan / Award Name: Top Leader Implementation On Port Sector 2018 Acara / Event : TOP IT & TELCO 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah IT Works IT Works Magazine Tanggal / Date : 6 Desember 2018 December 6, 2018</p>	<p>33. Nama Penghargaan / Award Name: Top Digital Transformation Readiness 2018 Acara / Event : TOP IT & TELCO 2018 Penyelenggara / Organizer : Majalah IT Works IT Works Magazine Tanggal / Date : 6 Desember 2018 December 6, 2018</p>
<p>34. Nama Penghargaan / Award Name: Global Performance Excellent Awards 2018 – Best in Class Acara / Event : Global Performance Excellent Awards 2018 Penyelenggara / Organizer : Asia Pacific Quality Organization, Inc (APQO) Tanggal / Date : 11 Desember 2018 December 11, 2018</p>	<p>35. Nama Penghargaan / Award Name: Best Water Management Initiative – Kategori Tata Kelola Lingkungan Best Water Management Initiative – Category Environmental Governance Acara / Event : Best Water Management Initiative Penyelenggara / Organizer : The Asset Publishing and Research Ltd Tanggal / Date : 10 Desember 2018 December 10, 2018</p>	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Award and Certification

PENGHARGAAN CABANG Port Branch

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:
Teluk Bayur Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Perusahaan terpercaya dalam kinerja dan pelayanan terbaik
Trusted company for best performance and service
Acara/Event:
Prestise Indonesia 2018
Indonesian Prestige 2018
Penyelenggara/Organizer:
Indonesia Achievement Center (IAC)
Indonesia Achievement Center (IAC)
Tanggal/Date:
19 Januari 2018
January 19, 2018</p> | <p>2. Cabang Pelabuhan Bengkulu:
Bengkulu Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Perusahaan terpercaya dalam kinerja dan pelayanan terbaik
Trusted company for best performance and service
Acara/Event:
Prestise Indonesia 2018
Indonesian Prestige 2018
Penyelenggara/Organizer:
Indonesia Achievement Center (IAC)
Indonesia Achievement Center (IAC)
Tanggal/Date:
19 Januari 2018
January 19, 2018</p> | <p>3. Cabang Pelabuhan Cirebon:
Cirebon Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Mitra Pembangunan Jawa Barat melalui Program CSR / PKBL Perusahaan Tahun 2017
West Java Development Partners through 2017 CSR / PKBL Program
Acara/Event:
Kegiatan Tahunan
Annual Activities
Penyelenggara/Organizer:
Gubernur Jawa Barat
Governor of West Java
Tanggal/Date:
17 April 2018
April 17, 2018</p> |
| <p>4. Cabang Pelabuhan Cirebon:
Cirebon Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Lembaga Peduli Pendidikan
Educational Care Institution
Acara/Event:
Kegiatan Tahunan
Annual Activities
Penyelenggara/Organizer:
Walikota Cirebon
Mayor of Cirebon
Tanggal/Date:
30 April 2018
April 30, 2018</p> | <p>5. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:
Teluk Bayur Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Kantor Bersih dan Hijau Tahun 2018
Clean and Green Office in 2018
Acara/Event:
Kegiatan Pemerintah Kota Padang
Padang Government Activities
Penyelenggara/Organizer:
Pemerintah Kota Padang
Padang Government
Tanggal/Date:
Juli 2018
July 2018</p> | <p>6. Cabang Pelabuhan Jambi:
Jambi Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan sebagai pengelolaan lingkungan perusahaan kategori baik ward a good environmental management company
Acara/Event:
Hari Lingkungan Hidup
Environment Day
Penyelenggara/Organizer:
Bupati Muaro Jambi
Muaro Jambi Mayor
Tanggal/Date:
31 Juli 2018
July 31, 2018</p> |
| <p>7. Cabang Pelabuhan Banten:
Banten Port Branch
Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima Madya Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Intermediate Prima Service Award for Public Service Unit in the Transportation Sector
Acara/Event:
Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018
Penyelenggara/Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of Transportation
Tanggal/Date:
17 September 2018
September 17, 2018</p> | <p>8. Cabang Pelabuhan Palembang:
Palembang Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima Madya Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Intermediate Prima Service Award for Public Service Unit in the Transportation Sector
Acara/Event:
Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018
Penyelenggara/Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of Transportation
Tanggal/Date:
17 September 2018
September 17, 2018</p> | <p>9. Cabang Pelabuhan Jambi:
Jambi Port Branch:
Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima Madya Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Intermediate Prima Service Award for Public Service Unit in the Transportation Sector
Acara/Event:
Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018
Penyelenggara/Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of Transportation
Tanggal/Date:
17 September 2018
September 17, 2018</p> |

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification

PENGHARGAAN CABANG
Port Branch

10. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayan Prima Untuk
Kategori Terminal Petikemas

Excellent Service Award in the Container
Terminal Category

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

11. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Pelayan Prima Untuk Kategori Terminal
Curah Kering

Excellent Service for Dry Bulk Terminal
Category

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

12. Cabang Pelabuhan Pontianak:

Pontianak Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima
Madya Unit Pelayanan Publik Sektor
Transportasi

Intermediate Prima Service Award for
Public Service Unit in the Transportation
Sector

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

13. Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima
Madya Unit Pelayanan Publik Sektor
Transportasi predikat Madya

Intermediate Prima Service Award for
Transportation Service Public Service
Unit, Madya Ranking

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

14. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:

Teluk Bayur Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima untuk
Terminal Curah Cair

Excellent Service Award for Liquid Bulk
Terminals

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

15. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:

Teluk Bayur Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:
Penghargaan Pelayanan Prima untuk
Terminal Petikemas

Excellent Service Award for Container
Terminal

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018
National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018
September 17, 2018

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification

PENGHARGAAN CABANG
Port Branch

16. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok:

Tanjung Priok Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Penghargaan Pelayanan Prima
Madya Unit Pelayanan Publik Sektor
Transportasi

Intermediate Prima Service Award for
Public Service Unit in the Transportation
Sector

Acara/Event:

Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018

National Transportation Day 2018

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Perhubungan RI
Republic of Indonesia Ministry of
Transportation

Tanggal/Date:

17 September 2018

September 17, 2018

17. Cabang Pelabuhan Banten:

Banten Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Penghargaan atas prestasi dan
peran sertanya dalam Pembangunan
Kabupaten Serang melalui Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum
Jatuh Tempo Tahun 2018

ward for achievement and participation
in Serang District Development through
Land and Building Tax Payments Prior to
Maturity 2018

Acara/Event:

Kegiatan Tahunan Bupati Serang

Serang Regent Annual Activity

Penyelenggara/Organizer:

Bupati Serang

Serang Regent

Tanggal/Date:

2 Oktober 2018

October 2, 2018

18. Cabang Pelabuhan Bengkulu:

Bengkulu Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Penghargaan Kemanusiaan PPID IPC
Bengkulu

Bengkulu IPC PPID Humanitarian Award

Acara/Event:

Kegiatan MRI

MRI activities

Penyelenggara/Organizer:

MRI (Masyarakat Relawan Indonesia)/

ACT

MRI (Indonesian Volunteer Society)

/ ACT

Tanggal/Date:

16 Oktober 2018

October 16, 2018

19. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Stand Terbaik Kategori BUMN/ BUMD/
Perbankan

Best Stand for BUMN / BUMD / Banking
Category

Acara/Event:

Lampung Fair 2018

Lampung Fair 2018

Penyelenggara/Organizer:

Pemerintah Provinsi Lampung

Lampung Provincial Government

Tanggal/Date:

27 Oktober 2018

October 27, 2018

20. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok:

Tanjung Priok Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Pelabuhan Sehat

Healthy Port

Acara/Event:

Program Kerja Bidang Kesehatan

Health Work Program

Penyelenggara/Organizer:

Kementerian Kesehatan RI

RI Ministry of Health

Tanggal/Date:

14 November 2018

November 14, 2018

21. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

The Best Indonesian Port Company &
Service Excellent of The Year

The Best Indonesian Port Company &
Service Excellent of The Year

Acara/Event:

Anugerah Best 50 Business &

Companies Award 2018

Best 50 Business & Companies

Award 2018

Penyelenggara/Organizer:

Indonesia Achievement Center

Indonesia Achievement Center

Tanggal/Date:

24 November 2018

November 24, 2018

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

PENGHARGAAN CABANG
Port Branch

22. Cabang Pelabuhan Palembang:

Palembang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Apresiasi sistem pembayaran

Payment system appreciation

Acara/Event:

Kontribusi kerjasama dalam mendukung kegiatan Operasional Sistem

Pembayaran Tahun 2018

Contribution for supporting Payment System Operational activities in 2018

Penyelenggara/Organizer:

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Tanggal/Date:

1 Desember 2018

December 1, 2018

23. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

The Committed Company For Contributing Community Development of The Year 2018

Committed Company For Contributing Community Development in 2018

Acara/Event:

Indonesia Business Development Award 2018

Indonesia Business Development Award 2018

Penyelenggara/Organizer:

Indonesia Development foundation

Indonesia Development foundation

Tanggal/Date:

7 Desember 2018

December 7, 2018

24. Cabang Pelabuhan Panjang:

Panjang Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Peringkat I (Satu) Anugerah

Keterbukaan Informasi Badan Publik

Kategori BUMN/BUMD

Ranking I (One) Public Agency

Information Openness Award for BUMN

/ BUMD Category

Acara/Event:

Anugerah Keterbukaan Informasi

Badan Publik

Public Agency Information Disclosure

Award

Penyelenggara/Organizer:

Komisi Informasi Provinsi Lampung

Lampung Province Information

Commission

Tanggal/Date:

19 Desember 2018

December 19, 2018

25. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:

Teluk Bayur Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Penyedia Jasa Bongkar Muat Tercepat

Fastest Loading Service Provider

Acara/Event:

Kegiatan PT Petrokopindo Cipta Selaras

PT Petrokopindo Cipta Selaras Activities

Penyelenggara/Organizer:

PT Petrokopindo Cipta Selaras

PT Petrokopindo Cipta Selaras

Tanggal/Date:

26 Desember 2018

December 26, 2018

26. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur:

Teluk Bayur Port Branch:

Nama Penghargaan/Award Name:

Pelanggan Terbaik

Best Customer

Acara/Event:

HUT PDAM ke 44 Tahun

PDAM 44th Anniversary

Penyelenggara/Organizer:

PDAM Kota Padang

Padang PDAM

Tanggal/Date:

31 Desember 2018

December 31, 2018

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Award and Certification

SERTIFIKASI Certification		
<p>1. Nama Sertifikasi / Name of Certification Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Compliance Statement Tahun Diperoleh/ Years obtained 14 Agustus 2014/ August 14, 2014 Validasi / Validity: 14 Agustus 2014-13 Agustus 2019 August 14, 2014-August 13, 2019 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Panjang Panjang Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General Sea Transportation</p>	<p>2. Nama Sertifikasi / Name of Certification Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Compliance Statement Tahun Diperoleh/ Years obtained 20 Agustus 2014/ August 20, 2014 Validasi / Validity: 20 Agustus 2014-19 Agustus 2019 August 20, 2014-August 19, 2019 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Jambi Jambi Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General Sea Transportation</p>	<p>3. Nama Sertifikasi / Name of Certification Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Compliance Statement Tahun Diperoleh/ Years obtained 14 September 2014/September 14, 2014 Validasi / Validity: 14 September 2014-14 September 2019 September 14, 2014-September 14, 2019 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Pontianak Pontianak Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General Sea Transportation</p>
<p>4. Nama Sertifikasi / Name of Certification Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Compliance Statement Tahun Diperoleh/ Years obtained 2 Oktober 2014/ October 2, 2014 Validasi / Validity: 2 Oktober 2014-1 Oktober 2019 October 2, 2014-October 1, 2019 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Cirebon Cirebon Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General Sea Transportation</p>	<p>5. Nama Sertifikasi / Name of Certification Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Compliance Statement Tahun Diperoleh/ Years obtained 21 Oktober 2014/October 21, 2014 Validasi / Validity: 21 Oktober 2014-20 Oktober 2019 October 21, 2014-October 20, 2019 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang T Palembang Palembang Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General Sea Transportation</p>	<p>6. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 29 Desember 2017/December 29, 2017 Validasi / Validity: 29 Desember 2017 - 28 Desember 2020 December 29, 2017 - December 28, 2020 Area Sertifikasi / Area of Certification: Kantor Pusat Head Office Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>
<p>7. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 5 Februari 2018/February 5, 2018 Validasi / Validity: 5 Februari 2018-4 Februari 2021 February 5, 2018-February 4, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Sunda Kelapa Sunda Kelapa Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>8. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 2 Maret 2018/March 2, 2018 Validasi / Validity: 2 Maret 2018 - 1 Maret 2021 March 2, 2018 - March 1, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Palembang Palembang Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>9. Nama Sertifikasi / Name of Certification Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety Management System and Occupational Health Tahun Diperoleh/ Years obtained 30 Juli 2018/July 30, 2018 Validasi / Validity: 30 Juli 2018-30 Juli 2021 July 30, 2018-July 30, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dikeluarkan Oleh / Issued by: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower</p>

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
 Award and Certification

SERTIFIKASI <i>Certification</i>		
<p>10. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 31 Agustus 2018/August 31, 2018 Validasi / Validity: 31 Agustus 2018 - 30 Agustus 2021 August 31, 2018 - August 30, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Tanjung Priuk Tanjung Priok Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>11. Nama Sertifikasi / Name of Certification Penyediaan Layanan Pelabuhan Untuk Gedung Cabang Tanjung Priok, Terminal Penumpang dan Reception Facilities Provision of Port Services for Tanjung Priok Branch Buildings, Passenger Terminals and Reception Facilities Tahun Diperoleh/ Years obtained 31 Agustus 2018/August 31, 2018 Validasi / Validity: 31 Agustus 2018-31 Agustus 2021 August 31, 2018-August 31, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia TUV NORD Indonesia Certification Body</p>	<p>12. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 28 November 2018/November 28, 2018 Validasi / Validity: 28 November 2018 s.d. 27 November 2021 November 28, 2018 - November 27, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Banten Banten Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>
<p>13. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 13 Desember 2018/December 13, 2018 Validasi / Validity: 13 Desember 2018 - 12 Desember 2021 December 13, 2018 -December 12, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Jambi Jambi Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>14. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 13 Desember 2018/December 13, 2018 Validasi / Validity: 13 Desember 2018 – 12 Desember 2021 December 13, 2018 - December 12, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Panjang Panjang Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>15. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2008 Tahun Diperoleh/ Years obtained 19 Desember 2018/December 19, 2018 Validasi / Validity: 19 Desember 2018 – 18 Desember 2021 December 19, 2018 - December 18, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Bengkulu Bengkulu Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>
<p>16. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 26 Desember 2018/December 26, 2018 Validasi / Validity: 26 Desember 2018 - 25 Desember 2021 December 26, 2018 - December 25, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Jambi Jambi Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>17. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2015 Tahun Diperoleh/ Years obtained 31 Desember 2018/31 Desember 2018 Validasi / Validity: 31 Desember 2018 – 30 Desember 2021 December 31, 2018 - December 30, 2021 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>	<p>18. Nama Sertifikasi / Name of Certification ISO 9001:2008 Tahun Diperoleh/ Years obtained 22 Februari 2019/February 22, 2019 Validasi / Validity: 22 Februari 2019-21 Februari 2022 February 22, 2019-February 21, 2022 Area Sertifikasi / Area of Certification: Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch Dikeluarkan Oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service</p>

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, OPERASI BERSAMA, KANTOR CABANG DAN/ATAU KANTOR WILAYAH

Name and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture, Branches and / or Subsidiaries Regional Offices

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Kantor Entitas Anak <i>Subsidiary Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
BISNIS INTI CARGO HANDLING <i>CORE BUSINESS CARGO HANDLING</i>		
PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)	Gedung Operasi Terminal 3 Jl. Raya Pelabuhan No. 23, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310	Tel : +62-214301080 ext 7051 dan 7052 Email : corp_sec@ipctpk.co.id Website : www.ipctpk.co.id Twitter : @ipctpk Instagram : ipctpk
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta 14310	Tel : +62-21 4301 080 Email : corsec@ptp.co.id Website : www.ptp.co.id Twitter : @ptpmultipurpose Instagram : @ptpmultipurpose
PT Multi Terminal Indonesia (MTI)	Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310	Tel : +62-21 2910 4000 Email : cs@multiterminal.co.id Website : www.ipclogistic.co.id Twitter : @ipcLogistic Instagram : ipc_logisticservices You tube : IPC Logistic Services
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT Tbk)	Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110	Customer Care : +62 811 933 9930 ; +62-21 4393 2251 Fax : +62-21 4393 2250 Email : info@indonesiacarterminal.co.id; ikt.care@indonesiacarterminal.co.id Website : www.indonesiacarterminal.co.id Twitter : @pt_ikt Instagram : IPC Car Terminal
LOGISTIK DAN SERVICE <i>LOGISTICS AND SERVICE</i>		
PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta 14430	Tel : +62-21 4301 380 Fax : +62-21 4353 669 Twitter : @pt_rukindo Website : www.rukindo.co.id
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI)	Kobexindo Tower, Lt. 4 Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D, Ancol Timur, Jakarta 14430	Tel : +62-21 6471 8081 Fax : +62-21 6471 8083 Email : corp.sec@portdevco.com Website : www.portdevco.com Twitter : @portdevco Instagram : @portdevco
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6A No. 1 Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara 14240	Tel : +62-21 4587 4549 Fax : +62-21 4587 4548 Email : corpsec@jppi.co.id Website : www.jppi.co.id Twitter : @jppi_official Instagram : ipcportequipment
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI, Tbk)	Rukindo Building Jl. Raya Ancol Baru, Ancol TImur, Jakarta Utara 14430	Tel : +62-21 4306 789 Fax : +62-21 4366 789 Email : contact@ipcmarine.co.id Instagram : ipcmarine Website : www.ipcmarine.co.id

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, OPERASI BERSAMA, KANTOR CABANG DAN / ATAU KANTOR WILAYAH

Name and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture, Branches and / or Subsidiaries Regional Offices

Kantor Entitas Anak <i>Subsidiary Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
BISNIS PENDUKUNG <i>SUPPORT BUSINESS</i>		
PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)	Jl. Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta 14260	Tel : +62-21 4403 026 Email : info@rspelabuhan.com Website : www.rspelabuhan.com Twitter : @rspelabuhan Instagram : @rs_pelabuhan
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)	Campus 1: Jl. Beringin I No. 1 Gadog, Pandansari, Kec. Ciawi Kab. Bogor 16720 Campus 2: Jl. Dewi-dewi No. 1 Walang, Jakarta Utara 14260	Tel : +62-251 7555 622 / +62-251 7555 614 Email : corpsec@pml.co.id Website : www.pml.co.id Twitter : @pt_pml Instagram : @pt_pml Facebook: IPC Corporate University Youtube : PT PMLI
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Lt 7 Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310	Tel : +61-21 4301080 Ect : 4113 Fax : +62-21 5701 789 Email : corsec@ipc-investco.com Website : www.ipc-investco.com Twitter : @InvestcolPC Instagram : @IPC-investco
PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Gedung PLN Area Tanjung Priok, Lt. 1 Jl. Yos Sudarso, No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1432	Tel : +62-21 4305 047 Fax : +62-21 4305 052 Email : cs@ecopowerport.co.id Website : www.ecopowerport.co.id Twitter : @energipelabuhan Facebook: Energi Pelabuhan Instagram : @energipelabuhan
PT EDI Indonesia (EDII)	Wisma SMR, Lt. 10 Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350	Tel : +62-21 6505 829 Fax : +62-21 6505 987 Email : corporate@edi-indonesia.co.id Website : www.edi-indonesia.co.id Twitter : @ediindonesia Instagram : @ediindonesia Youtube : PT EDI Indonesia
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	Plasa Telkom, Lt. 4 Jl. Yos Sudarso, Kav. 23-24, Tanjung Priok Jakarta Utara	Tel : +62-21 1500 950 Fax : +62-21 4393 6555 Email : customercare@ilcs.co.id; corcom@ilcs.co.id Twitter : @ilcs_id Instagram : ilcs.co Website : www.ilcs.co.id

CUCU PERUSAHAAN

SUB-SUBSIDIARY

Kantor Cucu Perusahaan <i>Sub-Subsidiary Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Gedung Kobexindo Lantai 1 Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D Ancol Timur. Jakarta Utara 14430	Telp : +62-21 645 6310 Website : www.portaccess.co.id Fax : +62-21 645 6311 Instagram : @portaccess_2014 Twitter : @portaccessid
PT New Priok Container Terminal (NPCT)	Gedung Terminal Operasi III, Pelabuhan Tanjung Priok	-
PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (lantai 6) (floor 6)	-

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, OPERASI BERSAMA, KANTOR CABANG DAN / ATAU KANTOR WILAYAH

Name and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture, Branches and / or Subsidiaries Regional Offices

ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATED ENTITIES

Kantor Entitas Asosiasi <i>Associated Entity Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)	Gedung Kobexindo Lantai 2 Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D Ancol Timur. Jakarta Utara 14430	Tel : +62-21 6456 301 Fax : +62-21 6456302 Email : info@petikemas-indonesia.co.id Website : www.petikeas-indonesia.co.id
PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310	Tel : +62-21 8067 8100 Fax : +62-21 8067 8111 Email : ca@jict.co.id Twitter : @JICTIndonesia Website : www.jict.co.id

OPERASI BERSAMA

JOINT VENTURE

Kantor Operasi Bersama <i>Joint Venture Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja)	Jl. Digul No 1, Koja, Jakarta Utara 14210	Tel : +62-21 4374 142 Fax : +62-21 4374 150 Email : corsec@tpkkoja.co.id Website : www.tpkkoja.co.id Twitter : @ksotpkkoja

KANTOR CABANG PELABUHAN

PORT BRANCH OFFICES

Kantor Cabang <i>Branch Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel/Fax/Website</i>
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Tanjung Priok Port Branch	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta, 14310	Tel : +62-21 4301080, +62-21 4367505 Fax : +62-21 4372933 Email : cs.tanjungpriok@indonesiaport.co.id dan pelanggan_ctpk@indonesiaport.co.id Website : www.priokport.co.id Twitter : @IPCTanjungPriok Instagram : @lpctanjungpriok
Cabang Pelabuhan Cirebon Cirebon Port Branch	Jl. Pertiagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat, 45112	Tel : +62-231 204109 Fax : +62-231 203201 Email : cirebon@indonesiaport.co.id Website : www.cirebonport.co.id Twitter : @ipccirebon Instagram : ipccirebon
Cabang Pelabuhan Panjang Panjang Port Branch	Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung, 35241	Tel : +62-721 31149, 31146 Fax : +62-721 31155 Email : cs.panjangport@indonesiaport.co.id Website : www.panjangport.co.id Twitter : @ipccpanjang Instagram : @ipccpanjang Fanpage : @ipccpanjang
Cabang Pelabuhan Jambi Jambi Port Branch	Jl. Raya Pelabuhan Km. 9, Talang Duku, Jambi, 36383	Tel : +62-741 35067 Fax : +62-741 7553323 Tel CS : 0811 7434 282 Email CS : cs.jambi@indonesiaport.co.id Website : www.jambiport.co.id Twitter : @jambi_port Instagram : ipc_pelindo2_jambi

**NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, OPERASI BERSAMA,
KANTOR CABANG DAN / ATAU KANTOR WILAYAH**

Name and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture, Branches and / or Subsidiaries Regional Offices

Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address	Telp./Fax/ Situs Web Tel/Fax/Website
Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa Sunda Kelapa Port Branch	Jl. Raya Maritim No.8, Sunda kelapa, Jakarta, 14430	Tel : +62-21 6928888 Fax : +62-21 6904759 Email : sundakelapa@indonesiaport.co.id Website : www.sundakelapa.co.id Twitter : @IPCSUNDAKELAPA Instagram : lpcsundakelapa
Cabang Pelabuhan Palembang Palembang Port Branch	Jl. Belinyu No.1, Boom Baru, Palembang, 30115	Tel : +62-711 710611 Email : palembang@indonesiaport.co.id; marketing.plg@indonesiaport.co.id Website : www.palembangport.co.id Twitter : @IPCpalembang Instagram : @ipc_palembang Facebook: IPC_Palembang
Cabang Pelabuhan Bengkulu/ Cabang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Port Branch/ Baai Port Branch	Jl. Yos Sudarso No.9, Pulau Baai, Bengkulu, 38216	Tel : +62-736 51409 Fax : +62-736 51956 Email : bengkulu@indonesiaport.co.id; cs.bengkulu@indonesiaport.co.id; bengkulu2@indonesiaport.co.id Website : www.ipcbengkulu.co.id Twitter : @IPCBengkulu Instagram : ipcbengkulu
Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port Branch	Jl. Semarang No. 3, Teluk Bayur, Sumatera Barat, 25217	Tel : +62-751 61646, 61639 Fax : +62-751 611169 Email : telukbayur@indonesiaport.co.id; telukbayuripc@gmail.com Website : www.telukbayurport.co.id Twitter : @TelukBayurIPC Instagram : @ipccabangtelukbayur
Cabang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Balam Port Branch	Jl. Yos Sudarso No. 01, Pangkalbalam, Pangkalpinang Bangka Belitung, 33114	Tel : +62-717 423500 Email : pelabuhan2_pangkalbalam@yahoo.co.id; ipcpangkalbalam@gmail.com Website : www.indonesiaport.co.id/pangkalbalam Twitter : @IPCpangkalbalam Instagram : ipc_pangkalbalam
Cabang Pelabuhan Pontianak Pontianak Port Branch	Jl. Pak Kasih No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat, 78113	Tel : +62-561 732181, 732094 Fax : +62-561 732612 Email : pontianak@indonesiaport.co.id Website : www.pontianakport.co.id Twitter : @ipcpontianak Instagram : ipcpontianak
Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Port Branch	Jl. Pelabuhan No.1, Tanjung Pandan Bangka Belitung, 33411	Tel : +62-719 21049 Fax : +62-719 21885 Email : tanjungpandan@indonesiaport.co.id Twitter : @ipc_tgpandan Instagram : ipc.tanjungpandan
Cabang Pelabuhan Banten Banten Port Branch	Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Ciwandan, Banten, 42166	Tel : +62-254 601221 / 602 703 Fax : +62-254 601419 Tel CS : 08111 250 111 Email : banten@indonesiaport.co.id Website : www.bantenport.co.id Twitter : @IPC_Banten Instagram : @IPC Banten

INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

Pada situs resmi perusahaan telah memuat berbagai informasi terkini mengenai IPC. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik, sesuai dengan kriteria ACGS. Informasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Struktur korporasi grup IPC.
2. Informasi kepemilikan saham IPC
3. Tata Kelola Perusahaan yang berisi:
 - a. Kode Etik Bisnis
 - b. Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris
 - c. *Good Corporate Governance*
 - d. IPC Bersih
 - e. Pedoman Gratifikasi
 - f. PPID
4. Profil Direksi dan Dewan Komisaris IPC
5. Piagam/*Charter* Komite-komite, dan Unit Audit Internal.
6. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5 (lima) tahun terakhir.
7. Laporan tahunan lebih dari 5 (lima) tahun terakhir (yang dapat diunduh).
8. Informasi tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

various up-to-date information about IPC. In addition to general information, the Company's website also provides more specific information, in accordance with the ACGS criteria. Such information includes the following:

1. The corporate structure of the IPC group.
2. Information on IPC share ownership
3. Tata Kelola Perusahaan yang berisi:
 - a. Kode Etik Bisnis
 - b. Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris
 - c. *Good Corporate Governance*
 - d. IPC Bersih
 - e. Pedoman Gratifikasi
 - f. PPID
4. Profile of the Board of Directors and Board of Commissioners of IPC
5. Committee Charter, and Internal Audit Unit.
6. Annual and quarterly financial reports for more than the last 5 years.
7. Annual reports over the last 5 years (which can be downloaded).
8. Informasi tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And
 Internal Supervisory Unit Education and / or Training

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

BOARD OF COMMISSIONERS' COMPETENCY DEVELOPMENT

During 2018, members of the Company's Board of Commissioners participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table.

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Competency Development

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Competency Development Training / Material</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and place</i>	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Type of Training and Organizer</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
Suaidi Marasabessy	Komisaris/ Komisaris Independen Commissioner / Independent Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		PERMEN BUMN No. PER-02/ MBU/07/2017 Pembahasan terhadap pengelolaan Risiko Penyaluran Dana PKBL BUMN & Anak Perusahaan. "Teknik Evaluasi, Penilai dan Umpan Balik Pencapaian RKAP dan KPI Berbasis KPKU dan GCG di BUMN dan Anak Perusahaan	Bandung, 27 Juli 2018 Jakarta, July 27, 2018	koran BUMN-PT Barka Cahaya Mediatama BUMN-PT Barka Cahaya Mediatama newspaper
		BUMN PERMEN No. PER-02/ MBU/07/2017 Discussion on the management of PKBL SOE & Subsidiary Funds Distribution Risk. "Evaluation Techniques, Assessors and Feedback on the Achievement of KPKU and GCG- Based RKAP and KPI in BUMN and Subsidiaries		

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		Executive Education & Strategic Discussion Forum "Directorship Program	Jakarta, 22- 23 Maret 2018 Jakarta, March 22-23, 2018	PTC (Pertamina Training & Consulting).
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		Executive Education & Strategic Discussion Forum "Directorship Program	Jakarta, 22- 23 Maret 2018 Jakarta, March 22-23, 2018	PTC (Pertamina Training & Consulting).
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2018, members of the Company's Board of Directors participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors' Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Digital Transformation for Board	Switzerland, 26-27 November 2018 Switzerland, November 26-27, 2018	IMD
		Team Dynamics for Board	Switzerland, 28-29 November 2018 Switzerland, November 28-29, 2018	IMD
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Strategy, Risk, Negotiation & Leadership : Leading Strategically, Utilising Great Negotiating Skills	Malaysia, 3 – 7 Desember 2018 Malaysia, December 3 – 7, 2018	Aztech Institute

**PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN,
 DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Competency Development Training / Material</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and place</i>	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Type of Training and Organizer</i>
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	AGLP Transforming ASEAN Organizations : The Leadership Imperative	New York, 16-20 April 2018 New York, April 16-20, 2018	SRW
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information System Director	Leading Successful Change	France, 9-11 Mei 2018 France, May 9-11, 2018	Insead
Widyaka Nusapati*	Direktur Keuangan Finance Director	-	-	-
Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum HR & Legal Director	Digital Transformation for Board	Switzerland, 26-27 November 2018 Switzerland, November 26-27, 2018	IMD
		Team Dynamics for Board	Switzerland, 28-29 November 2018 Switzerland, November 28-29, 2018	IMD
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Management Director	Building Organizational Capabilities	Yogyakarta, 28 Maret 2018	The Transformation Institute

*) Baru bergabung di IPC bulan November 2018 dan aktif di IPC pada Desember 2018, sehingga Bapak Widyaka belum mendapatkan pelatihan dari IPC

*) Just joined the IPC in November 2018 and was active in the IPC in December 2018, so Mr. Widyaka has not received training from the IPC

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Competency Development Training / Material</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and place</i>	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Type of Training and Organizer</i>
Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee	Executive Education & Strategic Discussion Forum "Directorship Program	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, Juli 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN" SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 22- 23 Maret 2018 Jakarta, March 22-23, 2018	PTC (Pertamina Training & Consulting).

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2018, the Audit Committee members of the Company participated in various competency programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Audit Committee Competency Development

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak oleh DJP dan Kaitannya dengan Audit Laporan Keuangan Tax Inspection Results Findings by DGT and their Relation to Financial Statement Audit	Bandung, 22-23 Februari 2018. Bandung, February 22-23, 2018.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
		Mendeteksi Indikasi Fraud melalui penelaahan Laporan Keuangan Fraud Detection Indicators through review of Financial Statements	Jakarta, 26 Februari 2018 Jakarta, February 26, 2018	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
		<i>The Auditor of The Future Trusted & Influencing Advisor</i>	Yogyakarta, 18 – 19 April 2018 Yogyakarta, April 18-19, 2018	YPIA
		Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN” SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
Muhdi Al Fajar	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN” SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 Pembahasan terhadap pengelolaan Risiko Penyaluran Dana PKBL BUMN & Anak Perusahaan. “Teknik Evaluasi, Penilai dan Umpan Balik Pencapaian RKAP dan KPI Berbasis KPKU dan GCG di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN PERMEN No. PER-02 / MBU/07/2017 Discussion on the management of PKBL SOE & Subsidiary Funds Distribution Risk. "Evaluation Techniques, Assessors and Feedback on the Achievement of KPKU and GCG-Based RKAP and KPI in BUMN and Subsidiaries	Jakarta, 27 Juli 2018 Jakarta, July 27, 2018	PT Barka Cahaya Mediatama

**PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN,
 DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI
 DAN REMUNERASI**

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

**REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
 COMPETENCY DEVELOPMENT**

Throughout 2018, members of the Company's Remuneration and Nomination Committee participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Remuneration and Nomination Committee Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
	Remuneration and Nomination Committee Head	Executive Education & Strategic Discussion Forum "Directorship Program	Jakarta, 22- 23 Maret 2018 Jakarta, March 22-23, 2018	PTC (Pertamina Training & Consulting).
Aries Fikirman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Remuneration and Nomination Committee Member	Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak oleh DJP dan Kaitannya dengan Audit Laporan Keuangan Tax Inspection Results Findings by DGT and their Relation to Audit of Financial Statements	Bandung, 22-23 Februari 2018. Bandung, February 22-23, 2018.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
		<i>The Auditor of The Future Trusted & Influencing Advisor</i>	Yogyakarta, 18 – 19 April 2018 Yogyakarta, 18 – 19 April 2018	YPIA
		Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
		Sertifikasi HR Professional Indonesia 3 in 1 Certification HR Professional Indonesia 3 in 1 Certification	Jakarta, 24 – 25 September 2018 Jakarta, September 24-25, 2018	HRM Club Indonesia

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAGEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Competency Development Training / Material</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and place</i>	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Type of Training and Organizer</i>
Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Head	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Jakarta, 18 Juli 2018 Jakarta, July 18, 2018	PPM Manajemen / Management
Pionir Harapan	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Member	The Auditor of The Future Trusted & Influencing Advisor Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN” SOE Performance Assessment and Talent Assessment	Yogyakarta, 18 – 19 April 2018 Yogyakarta, April 18-19, 2018	YPIA PPM Manajemen / Management
R. Nurhidayat	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Member	The Auditor of The Future Trusted & Influencing Advisor	Yogyakarta, 18 – 19 April 2018 Yogyakarta, April 18-19, 2018	YPIA

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2018, members of the Company's Risk Monitoring Committee participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Risk Monitoring Committee Competency Development

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2018, the Corporate Secretary participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, And Internal Supervisory Unit Education and / or Training

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Shanti Puruhita	EVP Sekretaris Perusahaan EVP Corporate Secretary	Advantages of Integrating Grc (Governance, Risk & Compliance)	Bali, 1 s.d. 2 Maret 2018 Bali, March 1 - 2, 2018	Asia Anti Fraud
		Project Risk Management	Ciawi, 3s.d 5 Mei 2018 Ciawi, May 3 - 5, 2018	PMLI
		Executive Development Program li Managing The Business	Ciawi, 29 November 2018 Ciawi, November 29, 2018	PMLI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2018, Satuan Pengawasan Internal telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2018, the Internal Audit Unit participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Widodo	EVP Satuan Pengawasan Internal EVP Internal Audit Unit	Internal Audit International Conference and On Site Learning	Dubai, 5 - 12 Maret 2018 Dubai, March 5 - 12, 2018	Profesi Auditor Internal Indonesia
		Project Risk Management	Ciawi, 10-13 Juli 2018 Ciawi, July 10 - 13, 2018	PMLI
		Executive Development Program II Managing The Business	Ciawi, 29 November 2018 Ciawi, November 29, 2018	PMLI
		Executive Engagement	Ciawi, 3-5 Mei 2018 Ciawi, May 3-5, 2018	PMLI

Tabel Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko Risk Management Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Competency Development Training / Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Eko Afrilianto	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	Pelatihan Hedge Accounting Hedge Accounting Training	Jakarta, 19 April 2018 Jakarta, April 19, 2018	PMLI
		Executive Engagement	Jogyakarta, 03 Mei 2018 Jogyakarta, May 03, 2018	PMLI
		Project Risk Management	Ciawi, 10 Juli 2018 Ciawi, July 10, 2018	PMLI dan CRMS
		Business Continuity Management	Ciawi, 16 Juli 2018 Ciawi, July 16, 2018	PMLI dan CRMS
		Executive Development Program li Managing The Business	Jakarta, 29 November 2018 Jakarta, November 29, 2018	PMLI

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORTING REVIEW

STRATEGI MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI FOKUS TERHADAP 5 (LIMA) DOMAIN YAITU, *STRATEGIC ALIGNMENT, VALUE DELIVERY, RISK MANAGEMENT, RESOURCE MANAGEMENT DAN PERFORMANCE MEASUREMENT.*

The information technology management strategy focuses on 5 (five) domains, namely, Strategic alignment, Value Delivery, Risk Management, Resource Management and Performance Measurement.





KERANGKA STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management Strategy Framework



IPC telah menyusun strategi pengelolaan SDM dengan menetapkan pilar kebijakan SDM diantaranya rekrutmen, pengembangan, pola karier, predikat jabatan fungsional, promosi jabatan struktural dan fungsional, serta penghasilan non bulanan. Kebijakan ini ditetapkan untuk menumbuhkan daya saing organisasi Perseroan. Dengan komitmen meningkatkan kualitas para pekerja, IPC telah mengelola SDM melalui:

1. Penyusunan *Individual Development Plan* bagi para pekerja;
2. Pelatihan baik *inhouse* maupun di luar IPC; dan
3. Pengembangan, yaitu melalui *on the job training* atau magang di dalam dan di luar IPC.

Strategi pengelolaan SDM mengacu pada *roadmap* Perusahaan periode tahun 2016-2020. Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM terdiri dari tahapan *fit in infrastructure, enhancement, establishment* dan sampai tahapan *world class port operator*.

IPC has developed the Human Capital management strategy policy by establishing the HC policy pillars, among others recruitment, development, career pattern, functional position predicate, promotion of structural and functional position, and non-monthly income. The policy is established to foster the organization's competitiveness. With a commitment improve the quality of workers, IPC manages Human Capital through:

1. Individual Development Plan for employees;
2. Training, by both inhouse and outside of IPC; and
3. Development, through on the job training or internship in the Company or outside the Company.

HC management strategy refers to the IPC roadmap established for 2016-2020 period. This HC management and development strategy consists of fit in infrastructure, enhancement, and establishment stage, up to world class port operator stage.

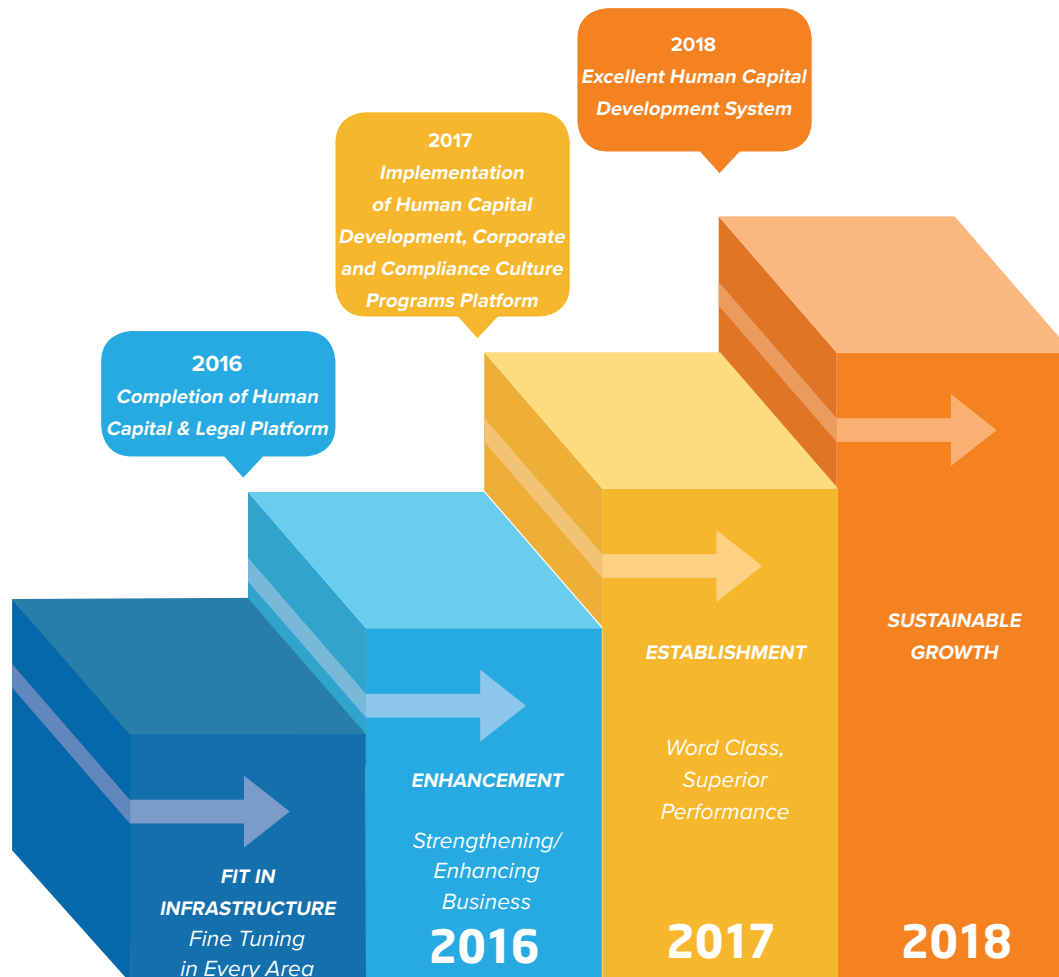
RERANGKA STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
 Human Capital Management Strategy Framework

Pengembangan talenta tersebut juga diselaraskan dengan kompetensi yang ditetapkan Kementerian BUMN. Diharapkan tahun 2020, talenta-talenta IPC tersebut memiliki daya saing yang tinggi dalam kepemimpinan lintas industri BUMN maupun untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan IPC.

Dalam menghadapi era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*), IPC telah menyiapkan beberapa program. Salah satunya identifikasi kompetensi organisasi yang dibutuhkan dalam tiga tahun ke depan, khususnya kompetensi yang belum dimiliki IPC saat ini yang dibutuhkan dalam pengembangan strategi bisnis perusahaan. Diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan, IPC dapat mempersiapkan kompetensi tersebut seperti digitalisasi *port*, automasi terminal, dan *inland waterways*, yang ke depannya akan menjadi bisnis yang akan dikelola oleh IPC.

The talent development is also aligned with the competencies set by the Ministry of SOE. It is expected that by 2020, these IPC talents will have high competitiveness in the leadership across the SOE industry and support national strategic projects carried out by IPC.

In the face of VUCA era (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), IPC has prepared a number of programs. One of them is the identification of organizational competencies needed in the next three years, especially the competencies that IPC does not currently have and are needed in developing business strategies. It is expected that in the next 1-2 years, IPC can prepare these competencies such as port digitalization, terminal automation, and inland waterways that will become businesses that will be managed by IPC in the future.



PENGEMBANGAN ORGANISASI

Organizational Development

Sepanjang tahun 2018 terdapat perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/8/1/PI.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pada Direktorat SDM dan Hukum serta Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Penambahan divisi pada Direktorat Operasi dan Sistem Informasi yaitu Divisi Pelayanan Kapal. Sementara itu, pada Direktorat SDM dan Hukum terdapat penambahan divisi yaitu Divisi Pembelajaran, kemudian terdapat perubahan singkatan penamaan divisi, bidang dan departemen dalam tata kerja manajemen. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti perihal pengalihan fungsi *Corporate University* dari PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) serta penyesuaian fungsi pelayanan kapal pada cabang dan kantor pusat, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur organisasi pada Direktorat SDM dan Hukum serta pada Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Throughout 2018, there were changes in the organizational structure as outlined in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018 amending PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree Number HK.568/30/8/1/PI.II-16 dated August 30, 2016 concerning Organization and Management Procedures in the HR and Legal Directorate and the Operations and Information Systems Directorate of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The Division added to the Directorate of Operations and Information Systems was Ship Services. Meanwhile, in the Directorate of Human Capital and Legal, the added Division was Learning Division. There were also changes in the abbreviation of the name of divisions, fields and departments in management work procedures. These changes were intended as a follow up on the transfer of Corporate University function from PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as well as adjusting the function of ship services at branches and head office, so that changes were needed in the organizational structure of the Directorate of Human Capital and Legal and the Directorate of Operations and Information Systems of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PROFIL DIVISI HUMAN CAPITAL

Profile of Human Capital Division

DIREKTUR UTAMA

PRESIDENT DIRECTOR

Struktur Organisasi:

Organizational structure:



PROFIL DIVISI HUMAN CAPITAL

Profile of Human Capital Division

FUNGSI HUMAN CAPITAL GROUP

Direktorat SDM dan Hukum membawahi 4 (empat) divisi, yaitu:

1. Divisi Sumber Daya Manusia, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu:
 - a. Departemen Perencanaan SDM dan Organisasi;
 - b. Departemen Manajemen Talenta; dan
 - c. Departemen Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas SDM.

Adapun uraian Pekerjaan SVP Sumber Daya Manusia yakni:

- a. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang kerja perencanaan SDM dan organisasi, manajemen talenta, remunerasi dan fasilitas pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan
 - b. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja bidang pengelolaan dan evaluasi kebijakan perencanaan SDM dan organisasi, manajemen talenta, remunerasi dan fasilitas SDM berdasarkan hasil putusan Direksi.
2. Divisi Pembelajaran, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu:
 - a. Departemen Perencanaan Pembelajaran;
 - b. Departemen Penyelenggaraan Pembelajaran; dan
 - c. Departemen Budaya Perusahaan.

Adapun uraian Pekerjaan SVP Pembelajaran yakni:

- a. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang kerja perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan Budaya Perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan
 - b. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja bidang pengelolaan dan evaluasi kebijakan perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan Budaya Perusahaan berdasarkan hasil putusan Direksi.
3. Divisi Hubungan Pekerja dan Layanan SDM, membawahi 3 (tiga) departemen dan 3 (tiga) unit kerja, yaitu:
 - a. Departemen Hubungan Pekerja;
 - b. Departemen Umum dan Rumah Tangga;
 - c. Unit Layanan Kearsipan dan Perkantoran;
 - d. Departemen Layanan dan Administrasi Umum;
 - e. Unit Layanan Sistem Informasi dan Administrasi SDM; dan

HUMAN CAPITAL GROUP FUNCTION

The Directorate of Human Capital and Legal oversees 4 (four) Divisions, namely:

1. Human Capital Division, in charge of 3 (three) departments, namely:
 - a. HC and Organization Planning Department;
 - b. Talent Management Department; and
 - c. HC Remuneration Policy and Facilities Department.

SVP Human Capital Job Descriptions:

- a. Arrange/formulate and propose work program plans and budgets related to HC and organizational planning, talent management, employee remuneration and facilities within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); and
 - b. Make decisions related to the implementation of work program plans in management and evaluation of HC and organizational planning policies, talent management, HC remuneration and facilities based on the decisions of Board of Directors.
2. Learning Division, in charge of 3 (three) departments, namely:
 - a. Learning Planning Department;
 - b. Learning Management Department; and
 - c. Corporate Culture Department.

SVP Learning Job Descriptions:

- a. Arrange/formulate and propose work program plans and budgets related to learning planning, implementation of learning and Corporate Culture in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); and
 - b. Make decisions related to the implementation of work program plans in management and evaluation of learning planning policies, implementation of learning and Corporate Culture based on the decisions of Board of Directors.
3. Employee Relations and HC Services Division, in charge of 3 (three) departments and 3 (three) work units, namely:
 - a. Employee Relations Department;
 - b. General Affairs and Household Departments;
 - c. Archive and Office Services Unit;
 - d. General Services and Administration Department;
 - e. Information System and HC Administration Services Unit; and

PROFIL DIVISI HUMAN CAPITAL
Profile of Human Capital Division

- f. Unit Layanan Administrasi Kesejahteraan SDM.

Adapun uraian Pekerjaan SVP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM yakni:

- a. Menyusun/merumuskan serta mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan dan implementasi kebijakan hubungan pekerja dan layanan SDM untuk mendukung seluruh proses inti/rancangan program Direktorat SDM dan Hukum meliputi bidang hubungan pekerja, layanan dan administrasi pekerja serta umum dan rumah tangga yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan
- b. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja bidang pengelolaan dan implementasi kebijakan hubungan pekerja dan layanan SDM untuk mendukung seluruh proses inti/rancangan program Direktorat SDM dan Hukum meliputi bidang hubungan pekerja, layanan dan administrasi pekerja serta umum dan rumah tangga yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan berdasarkan hasil putusan Direksi.

4. Divisi Hukum, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu:
- a. Departemen Penelaahan Hukum dan Peraturan Perusahaan;
 - b. Departemen Penanganan Masalah Hukum; dan
 - c. Departemen Jaringan dan Dokumentasi Hukum.

Adapun uraian Pekerjaan SVP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM yakni:

- a. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang hukum yang meliputi penelaahan hukum dan peraturan perusahaan, penanganan masalah hukum, jaringan dan dokumentasi hukum di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan
- b. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja bidang hukum yang meliputi penelaahan hukum dan peraturan perusahaan, penanganan masalah hukum, jaringan dan dokumentasi hukum hasil putusan Direksi.

PROFIL RINGKAS HUMAN CAPITAL GROUP HEAD

Profil ringkas *Human Capital Group Head* dapat dilihat di Profil Pejabat Eksekutif.

- f. HC Welfare Administration Services Unit.

SVP Employee Relations and HC Services Job Descriptions:

- a. Arrange/formulate and propose work program plans and budgets related to management and implementation of employee relations and HC services policies to support the entire core process/program design of the Directorate of HC and Legal covering the fields of employee relations, employee services and administration as well as general affairs and household, which are translated from the corporate strategy and policy in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); and
- b. Making decisions related to the implementation of work program plans in management and implementation of employee relations and HC services policies to support the entire core process/program design of the HC and Legal Directorate covering the fields of employee relations, employee services and administration as well as general affairs and household, which are translated from the corporate strategy and policy based on the decision of Board of Directors.

4. Legal Division, in charge of 3 (three) departments, namely:
- a. Legal and Corporate Regulation Review Department;
 - b. Legal Issues Handling Department; and
 - c. Legal Network and Documentation Department.

SVP Employee Relations and HC Services Job Descriptions:

- a. Compile/formulate and propose work program plans and budgets related to legal, which includes reviewing legal and corporate regulations, handling legal issues, legal network and documentation in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); and
- b. Making decisions related to the implementation of work program plans in legal, which includes reviewing legal and corporate regulations, handling legal issues, legal network and documentation based on the decisions of Board of Directors.

BRIEF PROFILE OF HUMAN CAPITAL GROUP HEAD

Brief profile of *Human Capital Group Head* can be seen in the Executives Profile.

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Pada tahun 2018, IPC merekrut pekerja baru dengan jumlah 1 posisi. Pola rekrutmen yang dilakukan di IPC melalui pengumuman secara terbuka, sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen di IPC dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan pekerja berdasarkan formasi kebutuhan yang disusun oleh Divisi SDM IPC. Rekrutmen dipublikasikan secara *online* melalui *website*: www.ipc.e-seleksi.com dan media surat kabar nasional.

Tahapan pelaksanaan rekrutmen adalah:

1. Pengumuman pembukaan secara terbuka;
2. Registrasi melalui *website*;
3. Seleksi administrasi;
4. Tes seleksi tahapan pertama (Tes Potensi Akademik);
5. Tes seleksi tahapan kedua (psikotes dan Bahasa Inggris);
6. *Interview user*;
7. Tes kesehatan; dan
8. *Interview* Direksi.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam menjalankan pengembangan kompetensi karyawan, IPC mengacu pada Surat Menteri BUMN No. S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham tersebut, seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System* (ITMS) dan mengirimkan talenta perusahaan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN, yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat calon Direksi minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi. Anggaran untuk Program Pengembangan *Human Capital/SDM* agar dialokasikan dalam RKAP minimal 5% dari total biaya *human capital/SDM* dalam 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut, untuk mengimplementasikan Program Pengembangan Karyawan yang terstruktur dan terencana, IPC merujuk kepada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II-16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Surat Keputusan Direksi tersebut dirancang dengan tujuan sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan Program

RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In 2018, IPC recruited 1 new employees. The pattern of recruitment carried out at IPC is through open announcement, in accordance with the position needed. Recruitment at IPC is carried out according to the analysis of the employee requirements based on the requirement formation prepared by IPC's HC Division. Recruitment is published online through the website: www.ipc.e-seleksi.com and national newspaper media.

The stages of recruitment are:

1. Publish announcement openly;
2. Register through the website;
3. Administration selection;
4. First stage selection test (Academic Potential Test);
5. Second stage selection test (psychological test and English);
6. User interview;
7. Medical check up; and
8. Directors' Interview.

COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In carrying out employee competency development, IPC refers to the Minister of SOE Letter No. S-564/MBU/08/2018 dated August, 31 2018 regarding the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of Corporate Work Plans and Budgets in 2019. Based on the shareholders' aspirations, all SOEs must build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company's talents to the talent pool of Ministry of SOE, which consists of a minimum of 20% of all officials one level below Board of Directors and candidates for Board of Directors of at least 3 (three) successors per Director position. The budget for Human Capital Development Program should be allocated in the RKAP of at least 5% of the total human capital expenses in 1 (one) year.

Furthermore, to implement a structured and planned Employee Development Program, IPC refers to the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: HK.568/30/12/7/PI.II-16 dated December, 30 2016 concerning Employee Development in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Board of Directors Decree was designed with the aim of guiding the implementation of Employee Development Program in line with the Company's Vision,

Pengembangan Karyawan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Dalam rangka mendukung Visi Perusahaan menjadi operator pelabuhan kelas dunia, IPC melakukan restrukturisasi dengan membentuk Divisi Pembelajaran pada tanggal 13 April 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18. Divisi Pembelajaran diberikan tugas untuk menjalankan fungsi *Corporate University* yang sebelumnya berada di Anak Perusahaan PT PMLI. Hal ini kemudian diikuti dengan penetapan beberapa kebijakan seperti Surat Keputusan Direksi Nomor: OT.01.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 tanggal 09 Mei 2019 tentang Struktur Organisasi Virtual IPC *Corporate University*, Berita Acara Kesepakatan Direksi Nomor: DL.01/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 tanggal 09 Mei 2019 tentang Pembentukan Dewan Pembelajaran Dalam Rangka Implementasi *Corporate University*, dan Berita Acara Kesepakatan Direksi Nomor: DL.01/9/5/2/PDM/UT/PI.II-18 tanggal 09 Mei 2019 tentang Program Pembelajaran Utama dalam Rangka Implementasi *Corporate University* yang menunjukkan komitmen direksi IPC terhadap implemmentasi *Corporate University* di Perseroan. Kemudian, disusun SK Program Pembelajaran yang memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan sehingga dapat berjalan selaras dengan Visi, Misi dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta menambah Nilai Perusahaan dihadapan *stakeholder*. Selain itu, telah disusun Surat Keputusan Direksi tentang Struktur, Kurikulum dan Silabus Pembelajaran di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bertujuan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan Program Pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

IPC merancang Program Pengembangan Karyawan secara terstruktur mulai dari program pembelajaran dasar korporat sampai dengan program kepemimpinan korporat. Sebagai gambaran, Struktur Pembelajaran IPC sebagai berikut:

Mission and Long-Term Plan.

In order to support the Company's Vision of becoming a world-class port operator, IPC performed restructuring by forming the Learning Division on April 13, 2018 according to the Board of Directors Decree No: OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18. The Learning Division is given the task of carrying out the function of Corporate University which previously in a subsidiary PT PMLI. This was followed by the establishment of several policies such as the Board of Directors Decree No: OT.01.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 dated May, 9 2019 concerning Virtual IPC Corporate University Organizational Structure, Minutes of Agreement of Board of Directors No: DL.01/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 dated May, 9 2019 concerning Establishment of Learning Boards in the Corporate University Implementation and Minutes of Agreement of Board of Directors No: DL.01/9/5/2/PDM/UT/PI.II-18 dated May, 9 2019 concerning Main Learning Programs in the Corporate University Implementation, which shows the commitment of IPC's Board of Directors to the implementation of Corporate University in the Company. Then, the Learning Program Decree was prepared, which provides guidance in employee competency development in order to run in line with the Vision, Mission and Long-Term Plan of the Company and add corporate values to stakeholders. In addition, the Board of Directors Decree has been drafted on the Learning Structure, Curriculum and Syllabus in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as a guideline in planning and implementing Learning Programs so that they can run effectively, efficiently and on target.

IPC designed a structured Employee Development Program ranging from corporate basic learning programs to corporate leadership programs. As an illustration, the Learning Structure of IPC is as follows:

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
Human Capital Management

**Pembelajaran
Kepemimpinan Korporat**
Corporate Leadership Learning

Pembelajaran Lintas Akademi
Cross Academic Learning

Pembelajaran Wajib Sekolah <i>School Mandatory Learning</i>	Akademi komersial dan pengembangan bisnis <i>Commercial and Business Development Academy</i>	Akademi operasi dan system informasi <i>Operations and Information Systems Academy</i>	Akademi Teknik dan manajemen risiko <i>Technical and Risk Management Academy</i>	Akademi keuangan <i>Finance Academy</i>	Akademi kepemimpinan dan bisnis pendukung <i>Subsidiaries Management Academy</i>	Akademi kepemimpinan dan bisnis pendukung <i>Leadership and Supporting Business Academy</i>	Pembelajaran Keahlian Sekolah <i>School Skills Learning</i>
	Sekolah pengembangan bisnis <i>School of Business developmen</i>	Sekolah operasi <i>School of operation</i>	Sekolah konstruksi sipil <i>School of civil construction</i>	Sekolah rendal keuangan <i>School of financial planning & controlling</i>	Sekolah SDM <i>School of HR</i>	Sekolah pengelolaan anak perusahaan dan cabang <i>School of subsidiaries & branches management</i>	
	Sekolah komersial <i>School of commercial</i>	Sekolah pelayanan kapal <i>School of ship services</i>	Sekolah peralatan <i>School of equipment</i>	Sekolah pengelola keuangan <i>School of financial management</i>	Sekolah hukum <i>School of law</i>	Sekolah hubungan antar Lembaga <i>School of inter-institutional relations</i>	
	Sekolah hubungan pelanggan <i>School of customer relations</i>	Sekolah system informasi <i>School of information system</i>	Sekolah manajemen risiko <i>School of risk management</i>	Sekolah layanan keuangan <i>School of financial services</i>	Sekolah strategi perusahaan <i>School of corporate strategy</i>	Sekolah pengadaan <i>School of procurement</i>	
Pembelajaran Dasar Korporat <i>Corporate Basic Learning</i>				Pembelajaran Wajib Korporat <i>Corporate Mandatory Learning</i>			

Keterangan:

1. Pembelajaran Dasar Korporat adalah program pembelajaran yang wajib diikuti seluruh calon karyawan Perseroan.
2. Pembelajaran Wajib Korporat adalah program pembelajaran yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai levelnya.
3. Pembelajaran Kepemimpinan Korporat terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Program Pengembangan Karir adalah pelatihan atau serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan zona jabatannya.
 - b. Program Persyaratan Karir adalah serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan yang akan naik zona karir.
4. Pembelajaran Wajib dan Keahlian Sekolah adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis bidang tertentu.

Description :

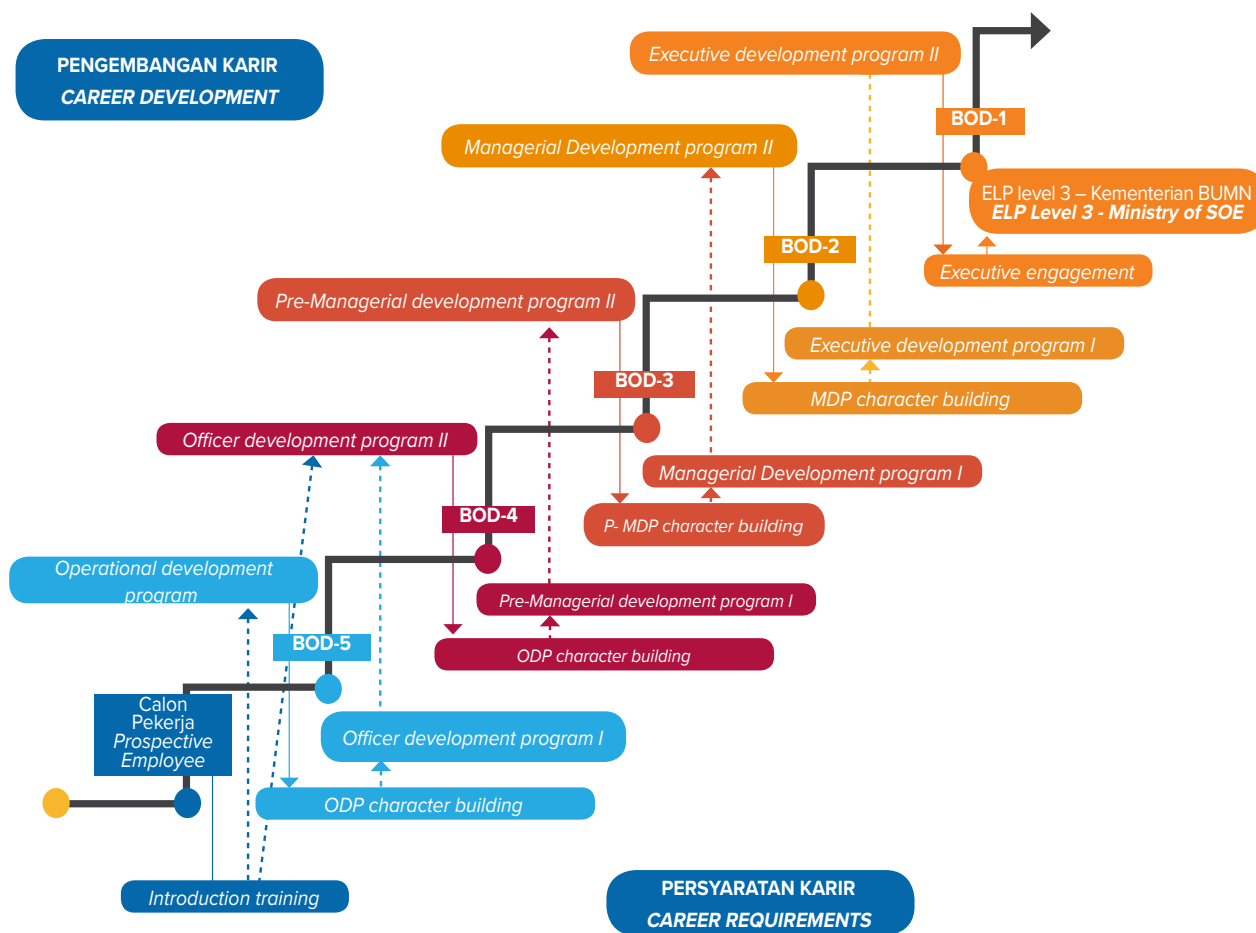
1. Corporate Basic Learning is a Learning program that must be followed by all prospective employees of the Company.
2. Corporate Mandatory Learning is a Learning Program that must be followed by all employees according to their level.
3. Corporate Leadership Learning is divided into 2 (two) categories, namely:
 - a. Career Development Program, is a training or a series of leadership training given to employees in accordance with their career zone.
 - b. Career Requirement Program is a series of leadership training given to employees who will rise in the career zone.
4. School Mandatory and Skills Learning is a Learning Program that aims to improve technical competencies in certain fields.

5. Pembelajaran Lintas Akademi adalah program pembelajaran bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi teknis akademi lainnya.

5. Cross Academic Learning is a Learning Program for employees to improve the technical competencies of other academies.

Untuk menjawab Aspirasi *Shareholders* dimana BUMN diminta untuk menyiapkan suksesor minimal 3 (tiga) orang per Direksi, IPC merancang dan menjalankan Program Pembelajaran Kepemimpinan Korporat dengan mengacu pada kamus kompetensi BUMN. Struktur Pembelajaran Kepemimpinan Korporat di IPC sebagai berikut:

To answer the aspirations of Shareholders, in which SOEs are asked to prepare successor of at least 3 (three) persons per Director, IPC designed and runs a Corporate Leadership Learning Program by referring to the SOE competency dictionary. The Corporate Leadership Learning Structure in IPC is as follows:



PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 Program pengembangan karyawan antara lain meliputi program pendidikan, pelatihan dan magang yang difasilitasi oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan kompetensi karyawan sehingga sejalan dengan pencapaian visi, misi, dan *roadmap* Perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi para Pemangku Kepentingan. Adapun program

COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT
 The employee development program includes education, training and apprenticeship programs facilitated by the Company to support the improvement of employee competencies in order to be in line with the achievement of the Company's vision, mission and roadmap and increase corporate values for stakeholders. The employee

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

pengembangan karyawan dijelaskan sebagai berikut:

1. Program pendidikan merupakan program peningkatan kompetensi karyawan melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Peserta Program Pendidikan Pasca Sarjana Luar Negeri yang lulus pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) orang. Adapun peserta Program Pendidikan Pasca Sarjana Dalam Negeri yang lulus pada tahun 2018 berjumlah 5 (lima) orang. Saat ini, pelaksanaan Program Pendidikan Pasca Sarjana sedang dievaluasi terkait dengan kebutuhan dan dampaknya terhadap Perseroan.
2. Program pelatihan merupakan program pengembangan kompetensi yang bersifat non-formal, sehingga karyawan dapat melaksanakan tugas dengan kinerja yang optimal. Dalam menyelenggarakan program pelatihan *in-house*, Perseroan bekerja sama dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) sebagai wujud sinergi pengembangan Anak Perusahaan antar IPC Group.
3. Program magang merupakan salah satu program pengembangan karyawan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara komprehensif sehingga karyawan memperoleh pengalaman nyata dari Perseroan/ pelabuhan lain yang relevan dan dapat diimplementasikan di Perseroan. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan *sisterport* seperti *Port of Guangzhou-China*, *Port of Shenzhen-China*, *Port of Ningbo-China* dan *Port of Baku-Azerbaijan*. Jumlah peserta yang mengikuti magang di *sisterport* adalah 12 (dua belas) orang yang berasal dari Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan IPC.

Secara keseluruhan realisasi anggaran pelatihan tahun 2018 adalah Rp22 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pengembangan Karyawan sebagai berikut :

development program is explained as follows:

1. The education program is an employee competency development program through formal education organized by education providers both at home and abroad. The participants of Overseas Post-Graduate Education Program who graduated in 2018 amounted to 3 (three) persons. The participants of Domestic Postgraduate Education Program who graduated in 2018 amounted to 5 (five) persons. At present, the implementation of Post-Graduate Education Program is being evaluated related to the needs and impacts on the Company.
2. Training program is non-formal competency development programs, so that employees can carry out tasks with optimal performance. In organizing in-house training program, the Company collaborates with PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) as a form of synergy in the development of Subsidiaries between IPC Group.
3. Internship program is an employee development program that aims to provide comprehensive knowledge so that employees can obtain real experience from other Companies/Ports that are relevant and can be applied in the Company. The program is organized in collaboration with sisterport such as the Port of Guangzhou-China, the Port of Shenzhen-China, the Port of Ningbo-China and the Port of Baku-Azerbaijan. The number of participants participating in the internship program at sisterport is 12 (twelve) persons from the Head Office and Port Branch of IPC.

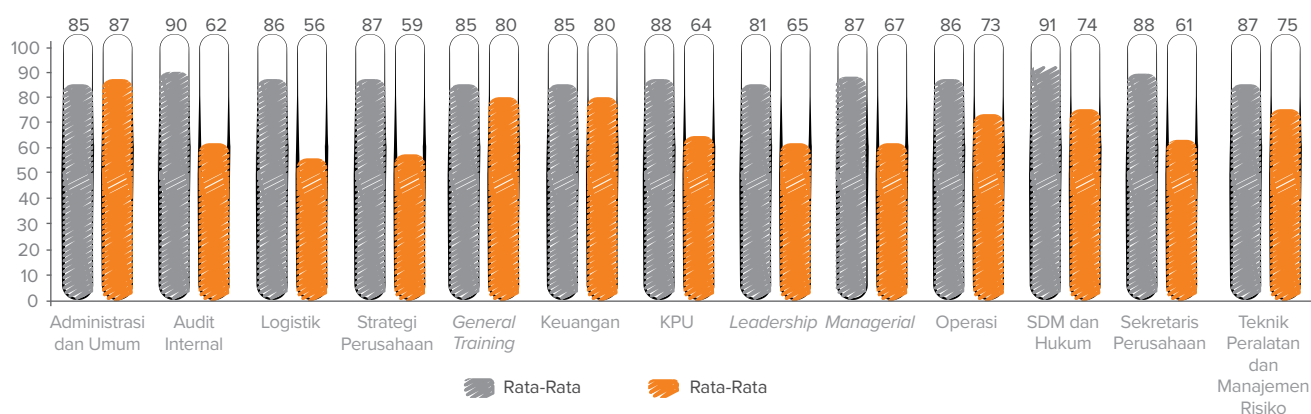
Overall, the realization of training budget for 2018 was Rp22 billion. The budget allocation for Employee Development Program was as follows:

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Level Peserta <i>Participant Level</i>	Rekapitulasi <i>Recapitulation</i>	
			Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
1	Pendidikan <i>Education</i>	BOD-4 sampai dengan BOD-2	2	8
2	Pengembangan Kompetensi Karyawan <i>Employee Competency Development</i>			
	Dasar Korporat <i>Corporate Basic</i>	Calon Pekerja <i>Prospective Employees</i>		
	Wajib Korporat <i>Corporate Mandatory</i>	All Level	20	389
	Kepemimpinan Korporat <i>Corporate Leadership</i>			

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
 Human Capital Management

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Level Peserta <i>Participant Level</i>	Rekapitulasi <i>Recapitulation</i>	
			Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
	Kepemimpinan Korporat – Pengembangan Karir <i>Corporate Leadership - Career Development</i>	BOD-4 sampai dengan BOD-1	9	211
	Kepemimpinan Korporat – Persyaratan Karir <i>Corporate Leadership - Career Requirements</i>	<i>All Level</i>	19	722
	Lintas Akademi <i>Cross Academy</i>	<i>Managerial</i>	1	73
	Pelatihan Keahlian dan Wajib Sekolah <i>Skills and School Mandatory</i>			
	Akademi Komersial <i>Commercial Academy</i>	<i>All Level</i>	10	99
	Akademi Teknik <i>Technical Academy</i>	<i>All Level</i>	24	360
	Akademi Operasi <i>Operations Academy</i>	<i>All Level</i>	46	632
	Akademi Keuangan <i>Finance Academy</i>	<i>All Level</i>	17	190
	Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung <i>Leadership and Supporting Business Academy</i>	<i>All Level</i>	62	689
	Akademi Transformasi Bisnis <i>Business Transformation Academy</i>	<i>All Level</i>	2	28
3	Magang <i>Internship</i>	BOD-4 sampai dengan BOD-3	1	12
Total			213	3413

Gambar Tingkat Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi IPC Tahun 2018
IPC Competency Development Evaluation Level in 2018



MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

CORPORATE UNIVERSITY

Corporate University atau populer dengan nama CorpU didefinisikan oleh Mark Allen (2002;p.9) sebagai sebuah entitas pembelajaran yang merupakan alat strategis (*strategic tools*) yang didesain untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan menumbuhkan individu maupun organisasional yang pembelajar, berpengetahuan dan bijaksana.

Pada tanggal 09 Agustus 2018, IPC meresmikan kembali IPC Corporate University di Pendulum Nusantara Hall, Kampus IPC Corporate University. Dengan diresmikannya IPC Corporate University, fungsi CorpU yang semula dilaksanakan oleh PT PMLI dikelola kembali oleh Kantor Pusat IPC melalui Divisi Pembelajaran. IPC CorpU mengelola pembelajaran berdasarkan *learning value chain* dimulai dari *learning need diagnosis, design and development of learning program, learning delivery and deployment, learning evaluation and assessment*.

IPC CorpU merupakan salah satu *enabler* yang dimiliki IPC, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Perseroan menjadi "Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan". Upaya yang dilakukan oleh IPC CorpU untuk mendukung terwujudnya Visi Perseroan adalah dengan menyiapkan kapabilitas SDM mulai dari level pemimpin sampai dengan level operasional.

Saat ini Perseroan menghadapi situasi bisnis yang *Volatile, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA)*. Peran IPC CorpU dalam menghadapi situasi VUCA yakni dengan menyiapkan program pembelajaran yang mampu mempertimbangkan risiko berdasarkan elemen tersebut, mengakuisisi kompetensi baru yang sejalan dengan strategi Perseroan serta menyiapkan kompetensi yang mendukung proyek strategis nasional.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

Konsep manajemen karir di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sedang dalam penyempurnaan kembali seiring dengan dinamika Perseroan seperti perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan struktur organisasi, serta regulasi yang ditetapkan.

CORPORATE UNIVERSITY

Corporate University or popularly known as CorpU is defined by Mark Allen (2002; p.9) as a learning entity in the form of a strategic tool designed to help organization to achieve the goals of growing individual and organizational learning, knowledge and wisdom.

On August 09, 2018, IPC inaugurated IPC Corporate University at Pendulum Nusantara Hall, IPC Corporate University Campus. With the inauguration of IPC Corporate University, CorpU's function which was originally carried out by PT PMLI were re-managed by IPC Head Office through the Learning Division. IPC CorpU manages learning based on learning value chains starting from learning need diagnosis, design and development of learning programs, learning delivery and deployment, learning evaluation and assessment.

IPC CorpU is one of the enablers owned by IPC to support the realization of the Company's vision to become a World-Class Port, Excellent in Operations and Services. The efforts made by IPC CorpU to support the realization of the Company's vision are to prepare Human Capital capabilities from the leader level to the operational level.

Currently, the Company is facing a Volatile, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) business situation. IPC CorpU's role in facing the VUCA situation is to prepare a learning program that is able to consider risks based on these elements, acquiring new competencies that are in line with the Company's strategy and preparing competencies that support national strategic projects.

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

The career management concept in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is being refined in line with the dynamic changing within IPC, such as the new composition of Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, there are also changes in organizational structure and regulations.

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
Human Capital Management

Pada tahun 2018, terdapat beberapa program yang telah dijalankan dalam rangka pengembangan karir pekerja, diantaranya sebagai berikut:

1. *Assessment Centre*
Assessment Centre dilakukan pada 162 (seratus enam puluh dua) orang level eksekutif dengan menggunakan kriteria kompetensi Kementerian BUMN dan kompetensi IPC. Penilaian kompetensi pekerja dilakukan melalui *job simulation* dan dinilai oleh lebih dari satu orang *assessor* eksternal. Pihak eksternal digunakan untuk menjaga *fairness* dari penilaian. Penilaian ini dijadikan referensi dalam hal promosi dan karir manajerial.
2. *Coaching and Feedback Assessment*
Sepanjang tahun 2018, telah dilakukan *coaching* dan pemberian *feedback* dari hasil *assessment centre*, sebagai bentuk umpan balik untuk membantu karyawan memahami lebih dalam mengenai area kekuatan dan pengembangan yang perlu ditingkatkan dalam diri karyawan.
3. Mutasi Pekerja
Mutasi pekerja dilakukan hampir pada seluruh level pekerja IPC guna memenuhi kebutuhan akan perubahan struktur organisasi Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan serta penyegaran di lingkungan IPC.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA SDM

Penilaian kinerja yang digunakan untuk individu adalah Penilaian Performansi Bulanan (P2B) yang dilakukan rutin setiap bulan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, P2B digunakan sebagai salah satu dasar untuk persyaratan Perseroan, pengembangan diri dan kompensasi bagi pekerja. Pada tahun 2018, hasil rata-rata nilai performansi seluruh pekerja adalah 7,52 skala 0 sampai 8 (kategori B atau "GOOD").

Untuk menunjang Visi Perseroan menuju *World Class Port 2020*, perlu dilakukan penajaman penilaian kinerja SDM yang semula berupa P2B menjadi penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian kinerja dimaksud merupakan kesatuan inisiatif *Roadmap Performance Management* Perusahaan yang selaras dengan hasil audit SDM tahun 2017 dan arahan *Board of Director (BoD)*, berupa optimalisasi *Performance Management System (PMS)* dalam bentuk penyusunan penurunan KPI Perusahaan ke target individu, yang disebut dengan KPI Individu.

In 2018, there were several programs initiated in the framework of employee career development, including:

1. Assessment Center
The Assessment Center is conducted at 162 (one hundred and sixty two) executive level employees using the criteria of Ministry of SOE competency and IPC competency. The employee competency assessment is done through job simulation and assessed by more than one external assessor. External parties are used to maintain the fairness of the valuation. This assessment is used as a reference in terms of promotion and managerial career.
2. Coaching and Assessment Feedback
Throughout 2018, coaching and feedback were provided from the results of assessment center, as a form of feedback to help employees to understand more about the areas of strength and development that need to be improved.
3. Employee Transfer
Transfers are performed at almost all levels of IPC employees to meet the needs for organizational structure changes in the Head Office, Branches and Subsidiaries, as well as for refreshment within IPC.

PERFORMANCE APPRAISAL POLICY AND IMPLEMENTATION

HC PERFORMANCE APPRAISAL

The individual performance appraisal used is Monthly Performance Appraisal (P2B), which is conducted regularly every month and serves as a basis for determining employee career, self-development, and compensation requirements. In 2018, the overall average employee performance results were 7.46 on a scale of 0 to 8 (B or "GOOD" category).

To support the Company's vision towards *World Class Port by 2020*, it is necessary to sharpen the HC performance appraisal which was originally in the form of P2B to be a performance evaluation based on Key Performance Indicators (KPI). This performance appraisal refers to the unity of the Company's Performance Management Roadmap initiative in line with the results of 2017 HC audit and directive of Board of Directors (BoD), in on optimizing the Performance Management System (PMS) in the form of the breakdown of Corporate KPI to individual targets, called Individual KPI.

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

KEBIJAKAN REMUNERASI

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen menerapkan kebijakan kesejahteraan pekerja yang berlandaskan pada tiga aspek dasar yaitu: *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance* dengan memperhatikan kompetensi, posisi jabatan, masa kerja serta kinerja dari pekerja.

Selain itu, kebijakan manajemen mengenai kesejahteraan pekerja disusun dengan mempertimbangkan aspek kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perseroan. Hal tersebut menggambarkan bahwa IPC memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan pada asas keberlanjutan (*sustainability*). IPC juga memberikan remunerasi kepada pekerja sesuai dengan kinerja masing-masing pekerja berupa Insentif Performansi yang diukur dari Penilaian Performansi Bulanan (P2B).

Di tahun 2018 ini, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja yang dibuktikan melalui penetapan kebijakan penyesuaian penghasilan Pekerja dengan menaikkan penghasilan merit sebesar 10%, dan tunjangan-tunjangan lainnya sebesar 3,61%. Pada penghujung tahun 2018, Perseroan mengungkapkan rasa syukur atas segala pencapaian terbaik dan penghargaan dengan memberikan apresiasi kepada para pekerja. Diharapkan dengan kesejahteraan yang baik, pekerja dapat lebih giat dan semangat dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA AKTIF

IPC memberikan berbagai macam fasilitas sebagai salah satu strategi memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pekerja IPC dalam bekerja. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan yaitu:

1. Fasilitas kesehatan;
2. Rumah dinas jabatan dan rumah dinas operasional bagi pejabat yang mengalami mutasi;
3. Bantuan biaya sewa rumah bagi pekerja yang mengalami mutasi;
4. Fasilitas kendaraan dinas bagi pejabat tertentu;
5. Seragam perusahaan;
6. Fasilitas makan siang;
7. Bantuan biaya pindah sekolah; dan
8. Rekreasi pekerja dan keluarga.

REMUNERATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)s, is committed to consistently providing welfare to its employees. In line with this, the management applies Employee welfare policies based on three basic aspects, namely: *Pay for Person*, *Pay for Position* and *Pay for Performance* by paying attention to competencies, position, tenure and performance of employees.

In addition, the management policies regarding employee welfare are prepared by considering the living cost increase and financial capacity of the Company. This illustrates that IPC has a concern for employee welfare while still paying attention to the principle of sustainability. IPC also provides remuneration to employees in accordance with the performance of each employee in the form of Performance Incentives as measured by Monthly Performance Assessment (P2B).

In 2018, the Company is committed to providing welfare to Employees as evidenced by the stipulation of policies on Employee income adjustments by increasing the income of merit by 10% and other benefits of 3.61%. And at the end of 2018, the Company expressed gratitude for all the best achievements and various awards by giving appreciation to its employees. It is expected that with good welfare, employees can be more active and enthusiastic in carrying out their duties to achieve the Company's Vision and Mission.

EMPLOYEE WELFARE IN ACTIVE PERIOD

IPC provides a wide range of facilities as one strategy to provide work convenience and comfort for IPC employees. The facilities provided are:

1. Health facilities;
2. Official housing and operational housing for officials who undergoing job transfer;
3. Housing rental assistance for employees undergoing job transfer;
4. Service facilities for certain officials;
5. Company uniform;
6. Lunch facilities;
7. School transfer fee assistance; and
8. Employee and family recreation.

KEPUASAN DAN KETERIKATAN PEKERJA

Setiap tahunnya, IPC telah melaksanakan survei kepuasan dan keterikatan pekerja. Survei dirancang untuk mengetahui tingkat kepuasan, motivasi kerja dan ketertarikan pekerja. Survei merupakan salah satu ukuran *Key Performance Indicator (KPI)* Perusahaan. Survei dilakukan di Kantor Pusat dan 12 (dua belas) cabang pelabuhan IPC. Tahun 2018 survei seluruhnya dilaksanakan secara *offline* yaitu responden mengisi kuesioner secara bebas.

Melalui survei ini, pekerja mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai kondisi atau faktor-faktor yang berhubungan dengan para pekerja itu sendiri. Survei digunakan sebagai media komunikasi dari pekerja ke Manajemen. Hasil survei yang didapat adalah input bagi Manajemen dalam menentukan kebijakan, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja serta meningkatkan kepuasan dan keterikatan pekerja.

Tujuan Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Keterikatan Pekerja

Memperoleh informasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat keterikatan pekerja yang selanjutnya berguna untuk:

1. Mendapatkan informasi terkait perubahan atau pergeseran sikap serta harapan pekerja terhadap organisasinya.
2. Mendapatkan informasi yang objektif terutama untuk hal-hal yang perlu perbaikan di periode berikutnya agar tidak mempengaruhi iklim kerja dan kinerja pekerja.
3. Mengetahui area perbaikan yang harus dilakukan dengan segera oleh IPC agar pekerja dapat bekerja dengan loyal dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Manfaat Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Keterikatan Pekerja

1. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi adanya ketidakpuasan karena lingkungan kerja, hubungan antar pekerja atau hubungan atasan dan bawahan.
2. Sebagai referensi yang bersifat proaktif terhadap tingkat keterikatan pekerja terutama untuk pekerja yang memiliki talenta kompeten dan potensial.
3. Mengetahui faktor yang menyebabkan pekerja dapat meningkatkan kontribusinya kepada Perseroan, baik faktor yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT

Every year, IPC has carried out an employee satisfaction and engagement survey. The survey was designed to determine the level of satisfaction, work motivation and interest of employees. The survey is one measure of the Corporate Key Performance Indicator (KPI). The survey was conducted at the Head Office and 12 (twelve) IPC port branches. In 2018, the whole survey was carried out offline, in which the respondents filled out the questionnaire freely.

Through this survey, the employees have the opportunity to express opinions regarding the conditions or factors that relate to them. The survey is used as a communication medium between employees and Management. The survey results obtained become an input for the Management in determining policies, particularly related to efforts to increase employee productivity and improve employee satisfaction and engagement.

Objectives of Employee Satisfaction and Engagement Survey

The information gained directly and indirectly on the employee engagement level is subsequently useful for:

1. Obtaining information regarding behavior changes or shifts as well as employees' expectations toward their organization.
2. Obtaining objective information particularly for issues that need improvement in the next period so as not to affect working climate and employee performance.
3. Recognizing areas that need immediate improvement by IPC to ensure that employees are able to work loyally and to create a positive work environment.

Benefits of Employee Satisfaction and Engagement Survey

1. Useful as a tool to detect any discontent due to work environment, relationships between colleagues or between supervisor and subordinate.
2. As a proactive reference for employee engagement level, particularly for employees with competent and potential talents.
3. Identifying the factors that may lead the employees to increase their contribution to the Company, both intrinsic and extrinsic factors.

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

4. Mengetahui faktor yang bisa meningkatkan kepuasan dan *engagement* pekerja disertai dengan faktor prioritas untuk pendorong *engagement* pekerja.

Adapun hasil survei kepuasan dan keterikatan pekerja IPC pada tahun 2015-2018 disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

4. Identifying the factors that may increase employee satisfaction and engagement as well as priority factors to boost employee engagement.

The IPC workers satisfaction and attachment survey results between 2015-2018 are presented in the table below:

Tabel Hasil Survei Kepuasan Pekerja IPC

Table of IPC Employee Satisfaction Survey Results

Tahun Year	Hasil Survei Survey Result	Keterangan Description
2018	4,27	Sangat Puas Very Satisfied
2017	4,16	Puas Satisfied
2016	4,13	Puas Satisfied
2015	4,19	Puas Satisfied

Tabel Hasil Survei Keterikatan Pekerja IPC

Table of IPC Employee Engagement Survey Results

Tahun Year	Hasil Survei Survey Result	Keterangan Description
2018	4,37	Sangat Terikat Very Engaged
2017	4,24	Sangat Terikat Very Engaged
2016	4,13	Terikat Engaged
2015	4,19	Terikat Engaged

KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Untuk dapat memayungi seluruh pekerja, IPC telah bersepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat seluruh ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pencapaian dalam hubungan industrial yang telah dilakukan oleh Direksi dan Manajemen Perseroan adalah pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pembaharuan tersebut dilakukan oleh Tim Perunding yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 3 Agustus 2018, telah dilaksanakan perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama untuk periode 2019-2020.

INDUSTRIAL RELATIONS POLICY

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT (PKB)

To be able to cover all employees, IPC has agreed to make a Collective Labor Agreement (PKB) which contains all provisions relating to employment. The achievement in industrial relations that has been carried out by Board of Directors and Management of the Company is the renewal of Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and Trade Union of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The renewal was done by the Negotiating Team formed by both parties. On August 03, 2018, negotiations on renewal of the collective labor agreement were held for the period 2019-2020.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Di dalam usaha memajukan IPC, Manajemen telah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan Serikat Pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjalin kelangsungan kerja perusahaan.

Manajemen memandang Serikat Pekerja sebagai mitra strategis, sehingga kebijakan-kebijakan khususnya di bidang SDM terkait masalah kesejahteraan dapat memperoleh masukan dari Serikat Pekerja. Manajemen secara aktif melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk itu, IPC telah membentuk wadah atau forum bipartit dengan Serikat Pekerja yang berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul maupun yang berpotensi menjadi masalah, dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan saran kepada Manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Wadah tersebut mempermudah pekerja dalam menyampaikan aspirasi kepada Perseroan secara berjenjang sehingga komunikasi dua arah antara IPC dan pekerja tetap terjaga.

Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) dipimpin oleh Dodi Nurdiana, diangkat berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pusat SPPI II PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 27 November 2018 di Bandung, serta tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat SPPI II Nomor 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 tentang Pengukuhan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat SPPI II Periode 2018 – 2021. Dalam mandat tersebut, seluruh karyawan IPC terdaftar sebagai anggota SPPI II.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan dimana pekerja akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. IPC telah menyiapkan kebijakan terkait hal tersebut yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor: HK.01/31/7/1/KRF/UT/PI.II-17 tanggal 31 Juli 2017.

Melalui kebijakan tersebut dijelaskan bahwa pekerja diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, atau mengikuti program *exit plan*. Selain itu, IPC fokus

FREEDOM OF ASSOCIATION

In an effort for IPC's growth, Management has established industrial relations in harmony with trade union to create a conducive working atmosphere and establish the Company's business continuity.

Management views trade union as a strategic partner, hence input from the trade union is taken into consideration HC policies related to welfare issues. Management intensively holds meeting with trade union at least 3 (three) months.

For this reason, IPC has formed a bipartite forum or union with trade union that serves to accommodate and resolve employment problems that arise as well as those that have the potential to become a problem, and intended as a forum to provide advice to management in employment decisions. This forum makes it easier for employees to convey aspirations to the Company in stages, so that two-way communication between IPC and employees is maintained.

The Head of Trade Union of Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) is Dodi Nurdiana, appointed based on minutes of central coordination meeting of SPPI II PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on November 27, 2018 in Bandung in accordance with SPPI II Central Executive Board Decree No. 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 concerning the inauguration of organizational structure and composition of SPPI II Central Executive Board for the Period of 2018-2021. All IPC employees are registered as members of SPPI II.

RETIREMENT POLICIES AND PROGRAMS

In the flow of Human Capital management system, there are stages where employees will enter a retirement or termination of employment period. IPC has prepared a Policy related to this matter as outlined in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) concerning Work Termination No: HK.01/31/7/1/KRF/UT/PI.II-17 dated July 31, 2017.

This policy explains that employees are dismissed or retired if they reach the age of retirement, due to disciplinary violations, own requests, or following an exit plan program. In addition, IPC focuses on ensuring the welfare of employees

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

untuk menjamin kesejahteraan pekerja setelah memasuki masa pensiun dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kesejahteraan Pasca Kerja Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.01/3/11/1/KRF/UT/PI.II-17 tanggal 03 November 2017 yang mengatur tentang program pensiun baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.

Pelatihan Menjelang Pensiun

Pekerja yang akan memasuki pensiun diberikan pendidikan serta pelatihan purnabakti. Program tersebut, diberikan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki masa pensiun, diantaranya terkait dengan persiapan menghadapi perubahan pola hidup, manajemen keuangan, peluang usaha dan mempertahankan pola hidup sehat. Pembekalan purnabakti tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) *batch* yaitu di bulan Februari dan April 2018. Pelatihan tersebut berisi tentang:

1. Hak dan kewajiban peserta Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4);
2. Hak dan kewajiban karyawan setelah pensiun;
3. Pola hidup sehat setelah pensiun dan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi;
4. Perencanaan keuangan dan formulasi;
5. Motivasi menghadapi masa pensiun; dan
6. Pembekalan spiritual menghadapi Masa Persiapan Pensiun (MPP).

after entering retirement by issuing the Decree of Board of Directors concerning Welfare for Post-Employment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: KP.01/3/11/1/KRF/UT/PI.II-17 dated November 03, 2017, which regulates retirement plan for both short and long-term benefits.

Pra-Retirement Training

Employees who will enter retirement are given retirement education and training. The program is given to prepare themselves for retirement, including the preparation of changes in lifestyle, financial management, business opportunities and maintaining a healthy lifestyle. The pre-retirement training for 2018 was held in 2 (two) batches, namely in February and April 2018. The training is about: Rights and obligations of participants of Port and Dredging Company Retirement Fund (DP4);

1. Rights and obligations of employees after retirement;
2. A healthy lifestyle after retirement and health checks and consultations;
3. Financial planning and formulation;
4. Motivation facing retirement;
5. Spiritual debriefing in facing the Retirement Preparation Period (MPP).

Tabel Pelaksanaan Pelatihan di tahun 2018

Table of Training in 2018

No.	Nama Pelatihan <i>Training Name</i>	Tempat Pelaksanaan <i>Venue</i>	Tanggal <i>Date</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
1.	<i>Workshop</i> Pembekalan Purnabakti Retirement Workshop	Malang	12 - 15 Februari 2018 February 12 - 15, 2018	24 Orang 24 Persons
2.	<i>Workshop</i> Pembekalan Purnabakti Retirement Workshop	Lombok	09 - 13 April 2018 April 09 - 13, 2018	27 Orang 27 Persons

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA PENSIUN

EMPLOYEE WELFARE IN RETIREMENT PERIOD

Setelah memasuki masa pensiun, pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menerima kesejahteraan sebagai berikut:

After entering retirement, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) employees receive the following welfare:

1. Program manfaat pensiun/hari tua yang diantaranya adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4);
1. Retirement benefit programs which include the Financial Institution Retirement Fund (DPLK) and Port and Dredging Company Retirement Funds (DP4);

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
 Human Capital Management

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara JPKM dari PT Rumah Sakit Pelabuhan; dan Manfaat jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan. | <ol style="list-style-type: none"> Retirement Health Care Guarantee Program organized by the JPKM Organizing Agency from PT Rumah Sakit Pelabuhan; and Old-age guarantee benefits by BPJS Employment. |
|---|---|

Perseroan memiliki peranan untuk memastikan kesejahteraan pekerja pasca kerja, dengan menetapkan beberapa program kesejahteraan pasca kerja sebagai berikut:

The Company has a role to ensure the welfare of post-employment employees, by establishing a number of post-employment welfare programs as follows:

Jenis Kesejahteraan <i>Type of Welfare</i>	Keterangan <i>Description</i>
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Financial Institution Retirement Fund (DPLK)	Merupakan program pendanaan yang iurannya ditetapkan oleh Perseroan untuk memperoleh manfaat dari iuran dan pengembangan dana iuran tersebut pada saat pekerja berhenti bekerja. Perseroan mengikutsertakan pekerja yang diangkat terhitung mulai tanggal 01 Desember 2001. Is a funding program whose contributions are determined by the Company to benefit from the contributions and development of the contributions when the employee stops working. The Company includes employees who are appointed starting December 01, 2001.
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Port and Dredging Company Retirement Fund (DP4)	Program Pensiun Manfaat Pasti pada DP4 merupakan program pensiun bagi pekerja dengan iuran dan perhitungan manfaat pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan DP4. Program Pensiun Manfaat Pasti pada DP4 ini, diberlakukan bagi pekerja yang diangkat terhitung sebelum tanggal 01 Desember 2001. The Defined Benefit Retirement Program in DP4 is a retirement program for employees with contributions and calculation of retirement benefits determined under the DP4 Regulation. The Defined Benefit Retirement Program in this DP4 applies to employees appointed before December 01, 2001.
Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan Retirement Health Care Guarantee Program	Jaminan pelayanan kesehatan bagi para pekerja pensiun beserta keluarga yang mencakup segala tindakan pelayanan preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang disediakan oleh Perseroan. Health care guarantee for retired employees and their families that cover all preventive, curative and rehabilitative service actions provided by the Company.

INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE INTERNALIZATION

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Adapun internalisasi Budaya Perusahaan sebagai berikut:

Culture Internalization as follows:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan <i>pre-survey</i> Budaya Perusahaan dan <i>re-take pre-survey</i> Budaya Perusahaan pada tanggal 26 Februari-9 Maret 2018 terhadap 639 orang pekerja dengan skor total rata-rata 4,27. Skor tertinggi pada nilai <i>Teamwork</i> sebesar 4,27 dan skor terendah pada nilai <i>Customer Centric</i> sebesar 4,18. Telah dilaksanakan <i>Workshop</i> Internalisasi Budaya Perusahaan bagi BOD-1, BOD-2, BOD-3 pada seluruh Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat pada bulan April-September 2018. Telah dilaporkan Pelaksanaan <i>Morning Briefing</i> semester I/2018 pada Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan. Telah dilakukan pengisian kolom Budaya Perusahaan secara rutin pada <i>IPC News</i>. | <ol style="list-style-type: none"> The pra-survey of Corporate Culture and re-re-take of the pra-survey of Corporate Culture were carried out from February 26 to March 9, 2018 to 639 employees with a total score of 4.23. The highest score was on Teamwork at 4.27 and the lowest score was on Customer Centric at 4.18. The Corporate Culture Internalization Workshop has been held for BOD-1, BOD-2, BOD-3 in all branches and Head Office in April-September 2018. The implementation of 1st Semester/2018 Morning Briefing at Head Office and Port Branches has been reported. Regularly filling the corporate culture column and adding Readers Suggestion column to IPC News. |
|--|--|

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

5. Telah disampaikan nilai-nilai oleh 17 (tujuh belas) Anak Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Direksi.
6. Telah dilaksanakan survei Budaya Perusahaan bagi pekerja operasional seluruh Cabang Pelabuhan pada tanggal 27 Juli-20 September 2018 terhadap 277 orang dengan skor total rata-rata 4,24. Skor tertinggi pada nilai *Teamwork* sebesar 4,37, sedangkan skor terendah pada nilai *Customer Centric* sebesar 4,12.
7. Telah dibuka K3SI *Channel* mulai bulan Agustus 2018 sebagai sarana penyampaian kritik, komplain, keluhan, saran dan isu antar divisi/cabang.
8. Telah ditandatangani panduan perilaku oleh direksi (BAKD PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: OT.02.02/21/12/1/BDP/UT/PI.II-18 tanggal 21 Desember 2018).
9. *Post survey* Budaya Perusahaan oleh lembaga independen sebagai bagian dari survei Kepuasan Pekerja dilaksanakan pada 26 November-07 Desember 2018. Hasil indeks Budaya Perusahaan pada level korporat sebesar 4.52.
10. *Morning briefing* triwulan III tahun 2018 pada Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat telah di laporkan.
11. *Morning briefing* triwulan IV tahun 2018 pada cabang dan Kantor Pusat telah dilaporkan.

RENCANA KE DEPAN**PROGRAM BUDAYA PERUSAHAAN**

Adapun program budaya perusahaan yang dilakukan IPC sebagai berikut:

1. Melanjutkan proses embedding mechanism budaya yang merupakan bagian dari langkah untuk menyukseskan *Corporate Roadmap* tahun 2018 sebagai tahun *Establishment of Performance* yang fokus pada implementasi budaya CINTA, maka di tahun 2019 akan melanjutkan proses yang sudah berjalan dengan proses yang lebih efektif dan align untuk mencapai *Wildly Important Goals* (WIGs) dari tiap unit kerja di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan demi tercapai fokus strategi di tahun 2020 sebagai *world class port*.
2. Seiring dengan berkembangnya *Corporate Roadmap* tahun 2020 – 2024, maka pada tahun 2019 akan disusun *culture roadmap* 2020 – 2024 guna menyeleraskan pencapaian roadmap IPC menjadi *world trade facilitator*.

FUTURE PLAN**THE CORPORATE CULTURE PROGRAM**

The corporate culture program IPC, as follows:

1. Continuing the culture embedding mechanism as part of the 2018 corporate roadmap steps for the year of performance establishment focusing on the CINTA culture, then in 2019 this process will continue with more effective and aligned processes to achieve Wildly Important Goals (WIGs) for each work unit at the Head Office and Port Branches in order to achieve the 2020 strategic focus to become a world class port.
2. Together with the 2020 – 2024 corporate roadmap development, in 2019 a 2020 - 2024 culture roadmap will be drawn up to streamline the achievement of IPC's roadmap to become a world trade facilitator.

3. Tahun 2018 telah dilakukan inventarisir Nilai Perusahaan pada anak perusahaan, *joint venture* dan entitas asosiasi IPC Group dan telah dilakukan sinkronisasi internal dari setiap nilai dengan nilai IPC holding yaitu CINTA. Tahun 2019 akan dilakukan *value synergy* CINTA dengan nilai-nilai anak perusahaan, *joint venture* dan entitas asosiasi, yang meliputi :
 - a. Definisi dari masing-masing nilai perusahaan;
 - b. indikator perilaku dari masing-masing nilai perusahaan;
 - c. *Culture roadmap* tahun 2020 – 2024 dari masing-masing Nilai Perusahaan;
 - d. Penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
4. Tahun 2019, program Budaya Perusahaan akan berjalan seiring dengan program pengembangan pekerja muda (milenial) yaitu IPC Muda meliputi :
 - a. Millennial event I'M CINTA (IPC Millennials CINTA);
 - b. Penyusunan dan *kick off* organisasi kepemudaan IPC Muda;
 - c. Engagement program pengurus IPC Muda;
 - d. Pengembangan talenta IPC Muda.
3. In 2018 a Company value inventory was carried out at IPC Group subsidiaries, joint venture, association entity,, and each internal value was synchronized in line with IPC CINTA values. In 2019 the synchronization of the CINTA values will be carried out on the subsidiaries, joint venture, association entity, values including:
 - a. definition of each company value;
 - b. behavioral indicators of each company value;
 - c. 2020 - 2024 culture roadmap for each company value;
 - d. Determination in the form of a Decree.
4. In 2019, the corporate culture program will work hand in hand with the young worker (millennial) development program, namely IPC Muda including:
 - a. Millennial event I'm CINTA (IPC Millennials CINTA);
 - b. Creation and kick off of the IPC Muda organization;
 - c. Engagement of the IPC Muda management program;
 - d. Development of IPC Muda talents.

PROGRAM PEMBELAJARAN

Adapun Rencana Program Pembelajaran yang akan dilaksanakan di 2019 meliputi:

1. Program Pendidikan

Ditujukan bagi karyawan yang masih melanjutkan pendidikannya sampai dengan tahun 2019.

2. Program Pelatihan

Fokus program pelatihan pada tahun 2019 adalah Program Kepemimpinan Korporat yaitu dengan memberikan pelatihan dan/atau serangkaian pelatihan bagi karyawan dengan merujuk kepada Kompetensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga diharapkan karyawan IPC dapat menjadi *talent* di Perseroan dan Kementerian BUMN. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada pengembangan karyawan yang dapat mendukung Proyek Strategis Nasional, *holding* Kemaritiman dan juga Proyek Investasi Perseroan.

3. Magang Karyawan

Melalui kerja sama dengan *sisterport*, Perseroan akan kembali mengirimkan karyawan terpilih untuk melaksanakan magang. Tidak hanya itu, IPC juga akan menjalin kerja sama dengan Pelabuhan yang dapat

THE LEARNING PROGRAM

As for the Learning Program plan to be carried out in 2019 includes:

1. Educational Program.

Intended for employees who are continuing their education until 2019.

2. Training Program

The focus of training program in 2019 is Corporate Leadership Program, i.e. by providing training and/or a series of trainings for Employees by referring to the Competencies of Ministry of State-Owned Enterprises (SOE), so that Company Employees are expected to become talent in the Company and Ministry of SOE. In addition, the Company will also focus on developing employees who can support the National Strategic Project, Maritime Holding and Investment Project of the Company.

3. Employee Internship

Through cooperation with *sisterport*, the Company will be sending again selected Employees for internship. Not only that, the Company will also collaborate with the Port that can support the implementation of National

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

mendukung implementasi Proyek Strategis Nasional seperti otomatisasi Pelabuhan dan pengembangan Pelabuhan Kijing. Perseroan juga berpartisipasi dalam program magang yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui program *talent exchange*, yakni karyawan dapat magang di Perusahaan BUMN lainnya dengan topik tertentu yang difasilitasi oleh Perusahaan BUMN tersebut. Diharapkan melalui program magang yang direncanakan, karyawan dapat mempelajari dan memperoleh pengalaman langsung sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan di Perusahaan.

Pada tahun 2019, Perusahaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk Program Pengembangan Karyawan. Adapun Rencana Program Pembelajaran tahun 2019 sebagai berikut:

Strategic Projects such as port automation and Kijing port development. The Company also participates in the apprenticeship program initiated by the Ministry of SOEs through a talent exchange program, where employees can be an intern in other SOE companies with specific topics facilitated by the SOE Company. It is expected that through the planned internship program, employees can learn and obtain direct experience, hence they can gain more comprehensive knowledge and can apply the knowledge in the Company.

In 2019, the Company allocates Rp75 billion for the Competency Development Program. While the 2019 Development Program Plan is as follows:

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Level Peserta <i>Participants Level</i>	Rekapitulasi <i>Recapitulation</i>		
			Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>	Total Biaya <i>Total Cost</i>
1	Pendidikan Education	BOD-4 sampai dengan BOD-2	2	8	357.600.00
2	Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development				
	Dasar Korporat Corporate Basic	Calon Pekerja Prospective Employees	1	124	8.118.999.200
	Wajib Korporat Corporate Mandatory	All Level	8	228	3.825.500.000
	Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership				
	Kepemimpinan Korporat – Pengembangan Karir Corporate Leadership - Career Development	BOD-2 sampai dengan BOD-1	8	311	2.770.488.000
	Kepemimpinan Korporat – Persyaratan Karir Corporate Leadership - Career Requirements	All Level	47	1361	12.702.800.000
	Lintas Akademi Cross Academy	BOD-2 sampai dengan BOD-1	20	308	3.836.800.000

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
 Human Capital Management

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Level Peserta <i>Participants Level</i>	Rekapitulasi <i>Recapitulation</i>		
			Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>	Total Biaya <i>Total Cost</i>
	Pelatihan Keahlian dan Wajib Sekolah <i>Skills and School Mandatory Training</i>				
	Akademi Komersial <i>Commercial Academy</i>	<i>All Level</i>	12	257	2.031.100.000
	Akademi Teknik <i>Technical Academy</i>	<i>All Level</i>	25	316	3.171.400.000
	Akademi Operasi <i>Operations Academy</i>	<i>All Level</i>	44	685	9.624.100.000
	Akademi Keuangan <i>Finance Academy</i>	<i>All Level</i>	25	257	1.846.850.000
	Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung <i>Leadership and Supporting Business Academy</i>	<i>All Level</i>	68	588	5.408.242.425
	Akademi Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation Academy</i>	<i>All Level</i>	23	307	2.649.890.000
3	Pengembangan Kompetensi yang mendukung Proyek Strategis Nasional <i>Competency Development that supports National Strategic Projects</i>	<i>All Level</i>			3.000.000.000
4	Pengembangan Kompetensi yang mendukung Investasi Perusahaan <i>Competency Development that supports Corporate Investment</i>	<i>All Level</i>			2.000.000.000
5	Pengembangan Kompetensi yang mendukung Holding Kemaritiman <i>Competency Development that supports Maritime Holding</i>	<i>All Level</i>			5.000.000.000
6	Magang Internship	BOD-4 sampai dengan BOD-3	3	35	864.150.000
7	Pengembangan Modul Pelatihan dan Konten E-Learning <i>Development of E-Learning Training and Content Modules</i>	BOD-4 sampai dengan BOD-1			7.792.080.375
Jumlah Total			286	4785	75.000.000.000

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

Keterangan:

1. Pembelajaran Dasar Korporat adalah program pembelajaran yang wajib diikuti seluruh calon karyawan Perusahaan.
2. Pembelajaran Wajib Korporat adalah program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai levelnya.
3. Pembelajaran Kepemimpinan Korporat terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Program Pengembangan Karir adalah pelatihan atau serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan zona jabatannya.
 - b. Program Persyaratan Karir adalah serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan yang akan naik zona karir.
4. Pembelajaran Wajib dan Keahlian Sekolah adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis bidang tertentu.
5. Pembelajaran Lintas Akademi adalah program pembelajaran bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi teknis akademi lainnya.

Description :

1. Corporate Basic Learning is a learning program that must be followed by all prospective employees of the Company.
2. Corporate Mandatory Learning is a learning program that must be followed by all employees according to their level.
3. Corporate Leadership Learning is divided into 2 (two) categories, namely:
 - a. Career Development Program, is a training or a series of leadership training given to employees in accordance with their career zone.
 - b. Career Requirement Program is a series of leadership training given to employees who will rise in the career zone.
4. School Mandatory and Skills Learning is a learning program that aims to improve technical competencies in certain fields.
5. Cross Academic Learning is a learning program for employees to improve the technical competencies of other academies.

TEKNOLOGI INFORMASI

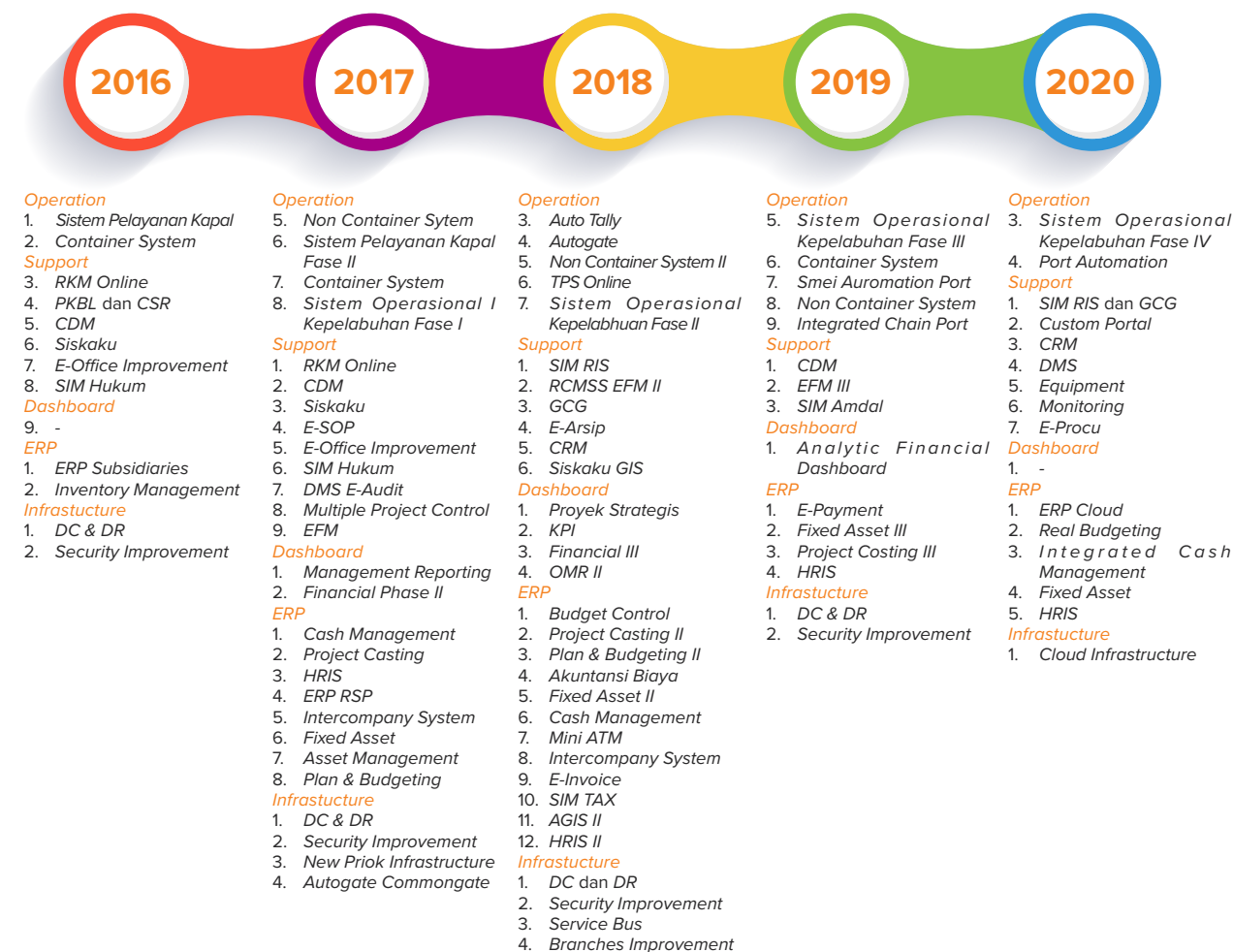
Information Technology

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dibuat dengan mengacu kepada *Corporate Roadmap*. Adapun *Roadmap* Teknologi Informasi hingga tahun 2020 seperti pada gambar di bawah. *Roadmap* ini akan ditinjau ulang sejalan dengan penyusunan IT *Master Plan* yang akan dilaksanakan tahun 2018.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The Information Technology Development Roadmap referred to the Corporate Roadmap. The Information Technology Roadmap up to 2020 as shown below. This roadmap will be reviewed in line with the preparation of the IT Master Plan to be implemented in 2018.



STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan SK Direksi Nomor OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK. 568/30/8/1/PI.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang

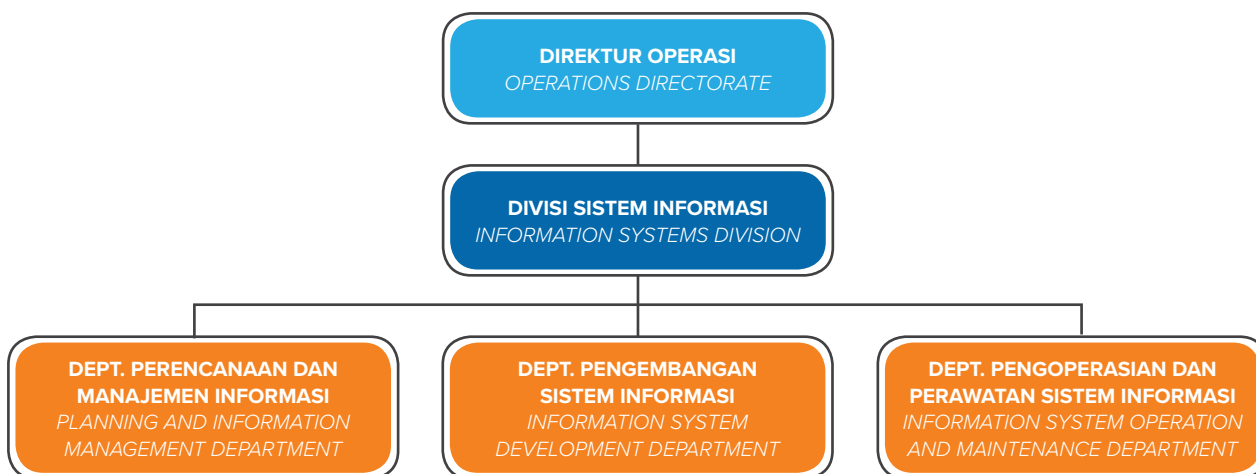
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT STRUCTURE

Based on the Board Directors Decree Number OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018 concerning Amendment to the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree of Number HK. 568/30/8/1/PI.II-16 dated August

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pada Direktorat SDM dan Hukum serta Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pengelolaan Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilaksanakan oleh Divisi Sistem Informasi yang berada di bawah Direktorat Operasi. Di dalam struktur organisasi Divisi Sistem Informasi terdapat 3 (tiga) departemen yang berfungsi layaknya *flow process* pengembangan teknologi informasi yaitu: Departemen Perencanaan dan Manajemen Informasi, Departemen Pengembangan Sistem Pemeliharaan Informasi dan Departemen Pengoperasian dan Sistem Informasi.

30, 2016 concerning Organization and Work Procedure Management in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) HR and Law Directorate and the Operations and Information Systems Directorate. Information Technology Management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is carried out by the Information Systems Division under the Operations Directorate. Within the Information System Division's organizational structure there are 3 (three) information technology development process flow departments, namely: Planning and Information Management Department, Information Maintenance System Development Department, and Operations and Information Systems Department.



PENGEMBANGAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018

Jumlah SDM pada Bidang Teknologi Informasi tahun 2018 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Pengembangan kompetensi SDM TI tahun 2018 adalah sebagai berikut.

INFORMATION TECHNOLOGY HR DEVELOPMENT IN 2018

The number of staff in Information Technology in 2018 totaled 33 people. The IT HR competency development in 2018 is as follows.

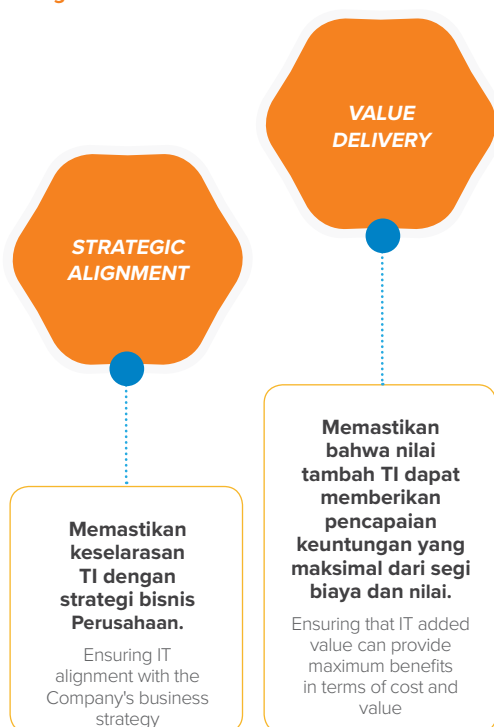


MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

STRATEGI MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Strategi manajemen teknologi informasi (TI) fokus terhadap 5 (lima) domain yaitu:

Strategi IT

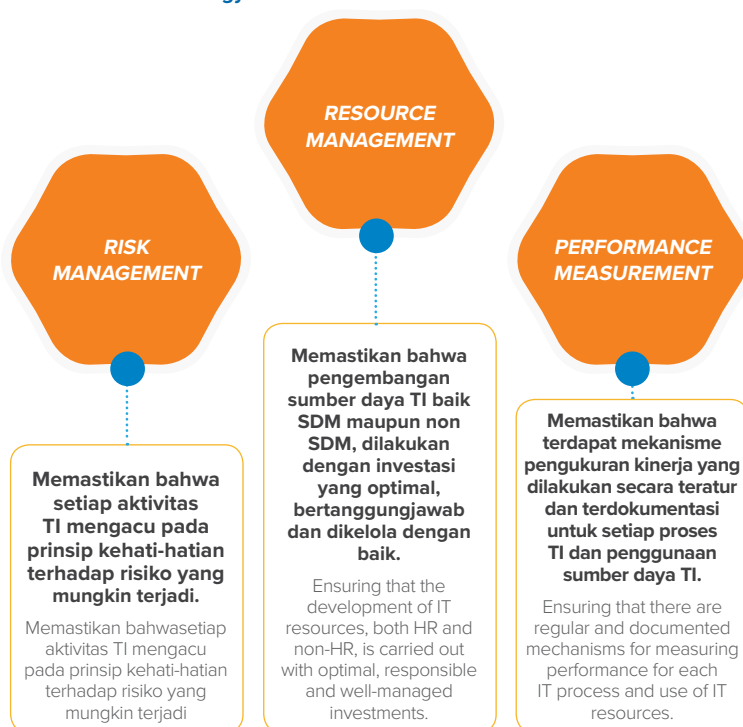


INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT STRATEGY

Strategi manajemen teknologi informasi fokus terhadap 5 (lima) domain yaitu:

IT Strategy



ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Enterprise Architecture adalah *blueprint* yang bersifat konseptual dan mendefinisikan struktur dan operasi sebuah organisasi pada suatu waktu. Tujuan dari sebuah *Enterprise Architecture* adalah untuk menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya saat ini dan di masa mendatang dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan akan *Enterprise Architecture* didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi dan kolaborasi yang makin meningkat, dan juga perubahan yang makin cepat dan kebutuhan untuk mengelola risiko.

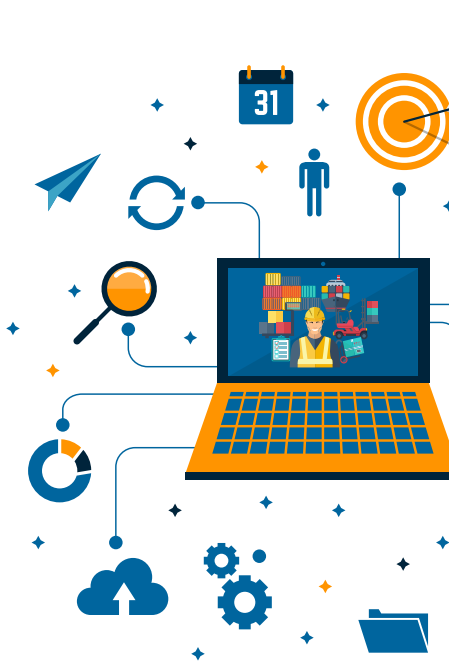
Terdapat 4 (empat) domain di dalam *Enterprise Architecture* antara lain:

INFORMATION TECHNOLOGY ARCHITECTURE

Enterprise Architecture is a conceptual blueprint that defines the structure and operation of an organization at a certain time. The purpose of Enterprise Architecture is to determine how an organization can achieve its goals now and in the future in the most effective way. The need for Enterprise Architecture is driven by increasingly technological developments and integration and collaboration, as well as faster changes and the need to manage risk.

There are 4 (four) domains in an Enterprise Architecture, including:

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology



Arsitektur Bisnis Business Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan kapabilitas bisnis.
- Memberikan pandangan terhadap seluruh segmen bisnis, fungsi-fungsi utama, dan ringkasan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing fungsi.
- The blueprint concept that describes the business capabilities.
- Providing views on all business segments, main functions, and summaries of activities carried out by each function.

Arsitektur Aplikasi Application Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan *platform* aplikasi TI.
- Memberikan pandangan terhadap kelompok aplikasi yang terdapat di dalam organisasi, selaras dengan *blueprint* bisnis beserta informasi.
- The blueprint concept that describes the IT application platform.
- Providing views on the application groups within the organization, in harmony with the business and information blueprint.

Arsitektur Infrastruktur Infrastructure Architecture

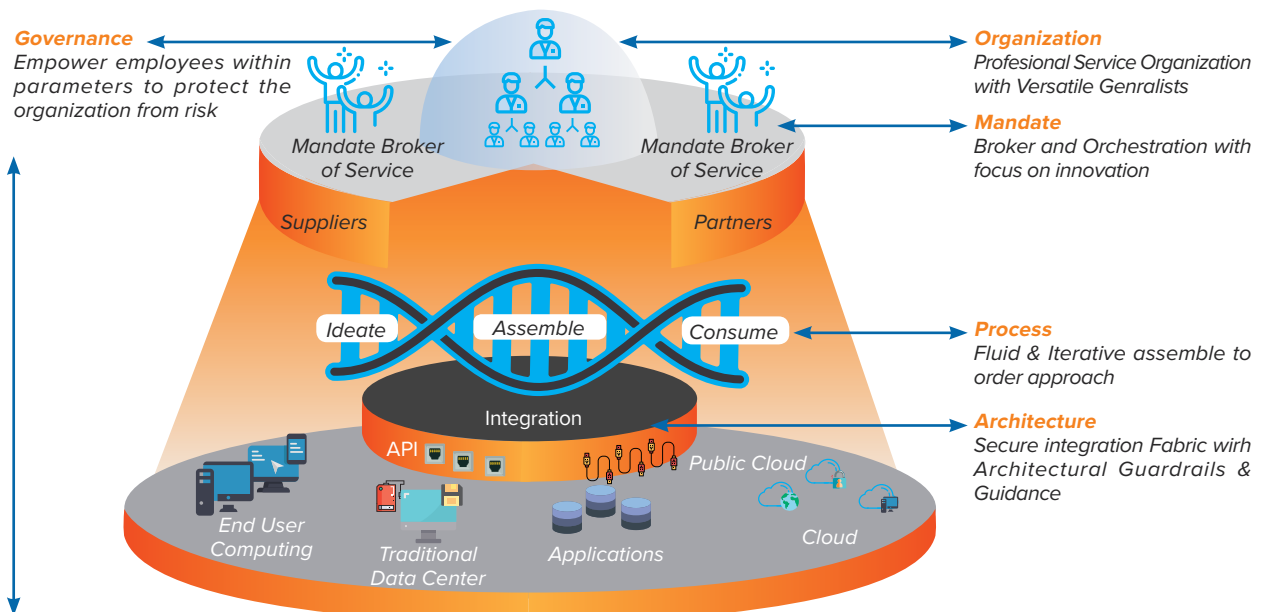
- Konsep *blueprint* yang menggambarkan infrastruktur dan perangkat keras TI.
- Memberikan pandangan terhadap *platform* infrastruktur yang mendukung aplikasi yang digunakan dalam organisasi.
- The blueprint concept that describes the IT infrastructure and hardware.
- Provide views on the infrastructure platform that supports the applications used in the organization.

Arsitektur Data Data Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan alur data dan informasi.
- Memberikan pandangan terhadap obyek informasi utama yang tersirkulasi dalam organisasi.
- The blueprint concept that describes the flow of data and information.
- Providing views of the main information objects circulated in the organization.

Berikut ini merupakan *Enterprise Architecture* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai berikut:

The following shows the *Enterprise Architecture* for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as follows:



IT GOVERNANCE

Tahun 2017 telah dilaksanakan kebijakan TI yang tercantum pada SK Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Adapun ruang lingkup dalam Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mencakup sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategis, yakni:
 - a. Penetapan Peran TI IPC;
 - b. Perencanaan TI;
 - c. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
 - d. Pengelolaan Investasi TI;
 - e. Pengelolaan Sumber Daya TI;
 - f. Pengelolaan Risiko TI;
 - g. Pengelolaan Proyek (*Project Management*); dan
 - h. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (*Identify Automated Solution*).
2. Kebijakan Operasional, yakni:
 - a. Pengelolaan Layanan dan Operasi Sistem Informasi;
 - b. Pengelolaan Sekuriti Sistem Informasi;
 - c. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga;
 - d. Pengelolaan Mutu;
 - e. *Knowledge Transfer*;
 - f. Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI;
 - g. Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal; dan
 - h. Pengelolaan *Compliance External Regulation*.

Pada tahun 2018 dilakukan review pada SK Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) serta pengesahannya.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018

Perseroan telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi teknologi informasi 2018 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis IPC, yang tertuang dengan di dalam arsitektur bisnis dan selaras dengan arsitektur aplikasi sebagai pendukung bisnis proses Perseroan. Adapun pengembangan teknologi informasi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

IT GOVERNANCE

In 2017, the draft preparation of the Information System Governance Policy Guidelines Decision within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) referenced the Ministry of SOE Regulation No. PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013 concerning the Ministry of SOE Regulation on State Owned Enterprises' Information Technology Management Development Guidelines. This Policy has been implemented in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Information System Governance Policy including:

1. Strategic Policy
 - a. IPC's IT Roles;
 - b. IT Planning;
 - c. IT Process and Organization Framework;
 - d. IT Investment Management;
 - e. IT Resource Management;
 - f. IT Risk Management;
 - g. Project Management; and
 - h. Handling Needs and Identifying Solutions (*Identify Automated Solution*).
2. Operational Policy:
 - a. Information System Operations and Services Management;
 - b. IT Security Management;
 - c. Third Party Services Management;
 - d. Quality Management;
 - e. Knowledge Transfer;
 - f. IT Data Monitoring and Performance Evaluation Management;
 - g. Internal Control Monitoring and Evaluation; and
 - h. External Regulation Compliance Management.

In 2018 a review was conducted and endorsed on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on the Information System Governance Guidelines Decree.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2018

The company carried out various information technology developments and implementations in 2018 in line with the company's business needs, as contained in the business architecture, and in line with the application architecture, as support for the company's business processes. The information technology development in 2018 included:

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology



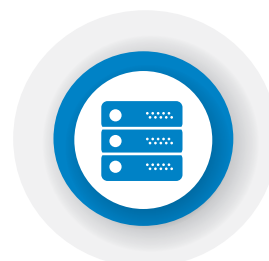
Terminal Operation Management

- Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Terminal NPK dengan implementasi NPK-TOS.
- Rollout aplikasi *Vessle Management System* di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai bagian integrasi dengan aplikasi Kementerian Perhubungan-Inaportnet.
- Digitalisasi layanan Pandu-Tunda dengan implementasi MOS (*Marine Operating System*) sebagai bagian optimalisasi proses bisnis pada Layanan Kapal.
- Implementasi TPS Online pada cabang pelabuhan sebagai bagian integrasi dengan Bea-Cukai.
- Standardization and Digitization of NPK Terminal Services with NPK-TOS implementation.
- Rollout of the Vessel Management System application in PT. Pelabuhan Indonesia II integrated with the Ministry of Transportation Inaportnet application.
- Digitization of Pandu-Tunda services with the implementation of MOS (Marine Operating System) as part of optimizing the Ship Services business processes.
- Implementation of TPS Online at the port branches integrated with Customs and Excise.



Terminal Enterprise Management

- *Enhancement* aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) bidang keuangan dengan implementasi aplikasi *project costing, budget control, cash management, AGIS (Advanced Global Intercompany System) dan e-invoice system*.
- Pengembangan ERP bidang SDM dengan implementasi *travel management* dan digitalisasi *operation* perkantoran (*e-office*) melalui aplikasi *Mobile i-move*.
- Implementasi aplikasi *monitoring* dan *controlling* fasilitas pelabuhan (suprastruktur dan infrastruktur dengan implementasi *Enterprise Facility Monitoring dan Remote Crane Monitoring System*).
- Enterprise Resource Planning application Enhancement with the implementation of project costing, budget control, and cash management applications, and the AGIS (Advanced Global Intercompany System) and e-invoice system.
- ERP Development in the HR area with the implementation of travel management and office operations digitalization (e-office) through the *Mobile i-move* application.
- Implementation of the port facilities monitoring and controlling application (superstructure and infrastructure with the implementation of *Enterprise Facility Monitoring and Remote Crane Monitoring System*).



IT Security & Infrastructure

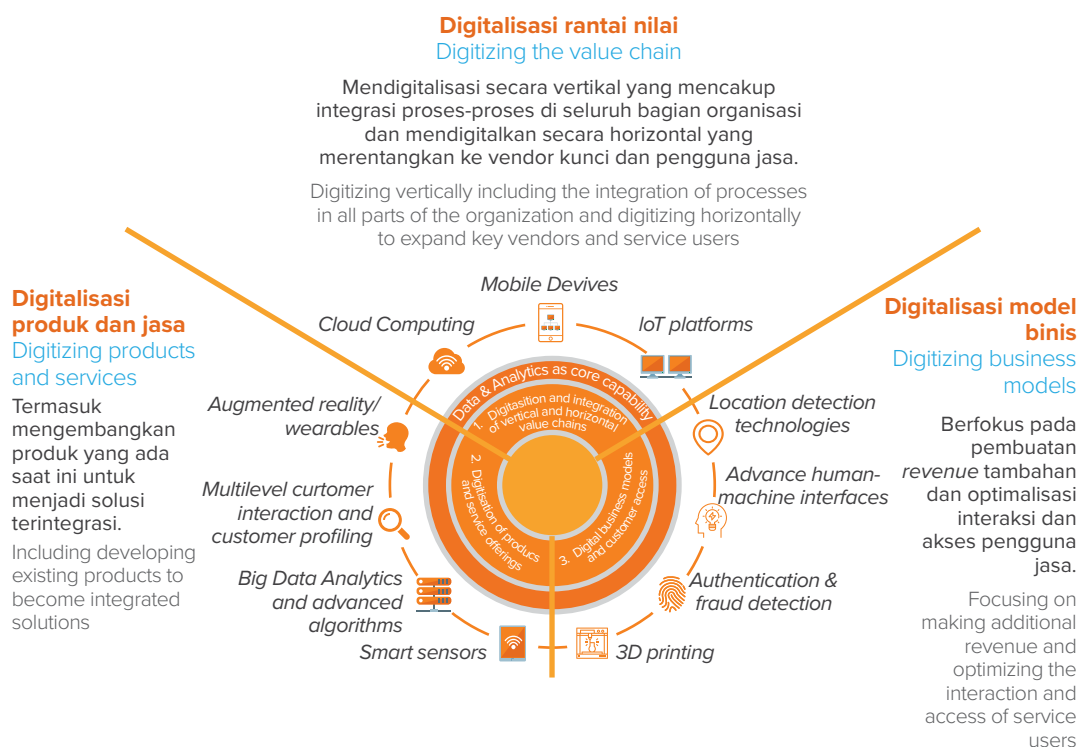
- Peningkatan Keamanan Data Center IPC dalam rangka mencegah dan mengganggu resiko dan serangan *cyber*. Serangan *cyber security* bisa berdampak pada *revenue lost, data loss, dan customer trust*. Perangkat meliputi :
- *Nest Generation Firewall*.
 - *Web Application Firewall*.
 - *Intrusion Prevention/Detection System (IPS/IDS)*.
- Dengan manfaat guna mencegah dan mengganggu *cyber security* dari luar serta mengurangi dampak terjadinya *data lost, system down dan revenue lost*.
- Improving the IPC Data Center Security to prevent and mitigate risks and cyber attacks. Cyber security bias attacks affect lost revenue, data loss, and customer trust. Devices include:
- *Nest Generation Firewall*.
 - *Web Application Firewall*.
 - *Intrusion Prevention / Detection System (IPS / IDS)*.
- With the benefit of preventing and overcoming *cyber security* attacks from outside, and reducing the impact of lost data, system down and revenue lost.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Rencana pengembangan TI IPC di tahun 2019 akan difokuskan pada adopsi terhadap tren teknologi yang telah menjadi *best-practice* seperti gambar di bawah ini:

FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN

The Information Technology Development Plan in 2019 will focus on adopting technological trends that have become best practices as shown below:



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

IPC BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN YANG BAIK DI TAHUN 2018, HAL INI TERBUKTI DARI PENINGKATAN ASET SEBESAR 8,92% YANG MENJADI RP51,43 TRILIUN. PENDAPATAN OPERASI DAN PENDAPATAN KONSTRUKSI MASING-MASING MENINGKAT SEBESAR 7,33% DAN 144,46%. LABA TAHUN BERJALAN MENINGKAT 10,20% DARI RP2,21 TRILIUN DI TAHUN 2017 MENJADI RP2,43 TRILIUN DI TAHUN 2018. PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN TERSEBUT SEJALAN DENGAN STRATEGI TAHUN 2018 IPC YANG MEMASUKI FASE ESTABLISHMENT DALAM MENDUKUNG PROGRAM INTEGRATED PORT NETWORK.

IPC managed to improve with a good financial performance in 2018, as evidenced by the increase in assets of 8.92% to Rp51.43 trillion. Operating revenue and construction revenue increased by 7.33% and 144.46% respectively. The current years profit increased 10.20% from Rp2.21 trillion in 2017 to Rp2.43 trillion in 2018. The increases were in line with IPC's 2018 strategy that had entered the Establishment phase in supporting of the Integrated Port Network program.





TINJAUAN PEREKONOMIAN

Economy Review



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Berbagai dinamika yang memengaruhi perekonomian dunia selama 2018 menahan optimisme pertumbuhan yang lebih baik. Kondisi tersebut tercermin dari koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dari sejumlah lembaga internasional. IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2018 memprakirakan pertumbuhan PDB dunia pada 2018 hingga 2020 akan relatif sama dengan 2017 yaitu sebesar 3,7% (revisi ke bawah dari 3,9% WEO Juli 2018). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bahkan lebih pesimis dengan memprediksi pertumbuhan pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 3,5%.

Divergensi ekonomi diprediksi berlanjut dan AS masih akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia, dengan pertumbuhan yang dikisaran mencapai 2,9% pada 2018

GLOBAL ECONOMY ANALYSIS

A variety of dynamics that affect the world economy during 2018 has held back the optimism for better growth. This condition is reflected in lower correction to the projected GDP growth from a number of international institutions. The IMF in the October 2018 World Economic Outlook predicted the world GDP growth in 2018 to 2020 will be relatively the same as 2017 at 3.7% (lower revision of 3.9% WEO July 2018). The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) was even more pessimistic by predicting growth in 2019 and 2020 of 3.5% respectively.

The economic divergence is predicted to continue and the US will still be the driving force of global economy, with a growth reaching 2.9% in 2018 (up significantly from 2.2% in

(naik signifikan dari 2,2% di 2017). Stimulus fiskal, konsumsi swasta, dan perbaikan sektor tenaga kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ekonomi Kawasan Euro melambat dan diprediksi tumbuh sebesar 2,0% (2018), dibandingkan 2,4% pada 2017. Kawasan tersebut kehilangan momentum akibat daya dorong kebijakan moneter yang memudar, konsumsi domestik menurun, eskalasi trade tension, dan konflik geopolitik di sejumlah negara. Tiongkok juga diprediksi tumbuh melambat menjadi 6,6% (2018) dibandingkan 2017 (6,9%). Pertumbuhan termoderasi seiring pengetatan regulasi sektor keuangan (*deleveraging*), kebijakan pemerintah untuk menekan polusi udara, dan penurunan permintaan eksternal akibat konflik perdagangan.

Sumber: Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi IV 2018, Bank Indonesia

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga didukung oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung permintaan domestik sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR). Investasi juga tetap tinggi dipengaruhi optimisme investor yang tetap terjaga terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sementara itu, ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan harga komoditas yang menurun. Secara spasial, peningkatan pertumbuhan ekonomi ditopang Jawa dan Kalimantan sejalan meningkatnya kegiatan di sektor pertanian, jasa-jasa dan pertambangan. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,07% (YoY) pada 2017 menjadi 5,17% (YoY) pada 2018 dan merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Pada triwulan IV 2018, NPI mencatat surplus 5,4 miliar dolar AS ditopang peningkatan surplus transaksi modal dan finansial sejalan persepsi investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan ketidakpastian global yang berkurang. Sementara itu, defisit transaksi berjalan pada triwulan IV 2018 tercatat 9,1 miliar dolar AS atau 3,57% PDB sehingga secara keseluruhan 2018 tetap berada dalam batas yang aman sebesar 2,98% dari PDB. Nilai tukar Rupiah menguat

2017). Fiscal stimulus, private consumption, and improvement in the labor sector resulted in increasing economic growth. But on the other hand, the Euro economy is slowing and predicted to grow by 2.0% (2018), compared to 2.4% in 2017. The Euro zone is losing momentum due to the fading thrust of monetary policy, declining domestic consumption, escalating trade tension, and geopolitical conflict in several countries. China is also predicted to slowing down to 6.6% (2018) compared to 2017 (6.9%). The growth is moderated along with tightening financial sector regulations (*deleveraging*), government policies to reduce air pollution, and a decrease in external demand due to trade conflicts.

Source: Economic Performance Development and International Cooperation Development (PEKKI) Edition IV of 2018, Bank Indonesia

NATIONAL ECONOMY ANALYSIS

The momentum of economic growth can be maintained, supported by domestic demand. Economic growth was mainly supported by domestic demand in line with the increase in household consumption and consumption of Non-Profit Institutions that Serve Households (LNPR). Investment also remained high due to the maintained investor's optimism toward Indonesia's economic outlook. Meanwhile, negative net exports were influenced by sluggish global economic growth and declining commodity prices. Spatially, the increase in economic growth was sustained by Java and Kalimantan in line with the increase in activities in the agriculture, services and mining sectors. With this development, Indonesia's economic growth increased from 5.07% (YoY) in 2017 to 5.17% (YoY) in 2018 and was the highest achievement in the last five years.

Indonesia's Balance of Payments (NPI) has improved to support the resilience of external sector. In the fourth quarter of 2018, the balance of payments recorded a surplus of 5.4 billion US dollars supported by an increase in the surplus of capital and financial account in line with foreign investors' perceptions toward Indonesia's economic outlook which remained strong and the reducing global uncertainty. Meanwhile, the current account deficit in the fourth quarter of 2018 was recorded at US\$9.1 billion or 3.57% of GDP, thus in overall, 2018 remained within the safe limit of 2.98% of GDP.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Economy Review

sehingga menopang berlanjutnya stabilitas perekonomian. Rupiah pada triwulan IV 2018, secara *point to point* menguat sebesar 3,63% dibandingkan dengan level akhir triwulan III 2018, ditopang NPI yang mencatat surplus. Inflasi 2018 tercatat 3,13% (YoY), lebih rendah dari 2017, yaitu sebesar 3,61%. Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Bank Indonesia dan Pemerintah senantiasa memperkuat koordinasi kebijakan, guna menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil.

Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2018, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

Melanjutkan tren dari beberapa tahun terakhir ini, kapasitas kapal peti kemas pun terus meningkat, pelabuhan-pelabuhan di dunia terus melakukan investasi untuk dapat mengakomodir kapal dengan ukuran yang semakin besar tersebut dan mengadopsi sistem terminal yang terautomasi. Di samping itu, industri pelabuhan saat ini semakin menantang dengan adanya integrasi global *supply chain*. Berbagai pemain di industri transportasi maritim bersaing untuk dapat menguasai penanganan kargo dari pintu ke pintu (*door to door*) yang terintegrasi, baik dari pemain bisnis pelabuhan, pelayaran, *forwarder* maupun perusahaan jasa logistik. Hal ini dimungkinkan karena semakin majunya teknologi informasi, sehingga model bisnis seperti ini bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Industri kepelabuhan saat ini pun sedang dipengaruhi oleh tren Industri 4.0, dunia terkoneksi secara elektronik dan digital. Setiap orang terkoneksi dengan sesamanya dan dengan *knowledge* yang dimiliki. Diperkirakan bahwa di masa yang akan datang, perusahaan yang dapat menguasai teknologi informasi dan digitalisasi adalah perusahaan yang akan bertahan.

Secara politis, industri kepelabuhan dan perdagangan dunia saat ini sedang dipengaruhi oleh perang dagang antara dua kekuatan besar dunia yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. *Throughput* peti kemas pada kuartal ke IV tahun 2018 mengalami perlambatan karena perang dagang ini. *Drewry Maritime Research* memproyeksikan pertumbuhan *throughput* peti kemas dunia akan mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 1% jika perang dagang masih terus berlanjut. Walaupun demikian, masih terdapat peluang

The Rupiah exchange rate was strengthened and able to sustain economic stability. In the fourth quarter of 2018, the Rupiah strengthened by 3.63% compared to the end of the third quarter of 2018, supported by the balance of payments which recorded a surplus. 2018 inflation was 3.13% (YoY), lower than 2017 at 3.61%. The controlled inflation was inseparable from the consistency of monetary policy in directing inflation expectations, including in maintaining exchange rate movements in accordance with its fundamentals. Bank Indonesia and the Government constantly strengthen policy coordination, to maintain inflation at a low and stable level.

Source: Monetary Policy Report for the 4th Quarter of 2018, Bank Indonesia

PORT INDUSTRY ANALYSIS

Continuing the trend from the past few years, the capacity of container ships has continued to increase, ports in the world continue to invest to be able to accommodate vessels with increasingly large size and adopt automated terminal system. In addition, the port industry nowadays is increasingly challenging with the integration of global supply chain. Various players in the maritime transportation industry compete to master door to door integrated cargo handling, both from the business players in port, shipping, forwarders and logistics service companies. This is possible due to the increasingly advanced information technology, thus such business models are not impossible. The port industry is currently being influenced by the trend of Industry 4.0, the world is connected electronically and digitally. Everyone is connected with each other and with the knowledge they have. It is estimated that in the future, companies that can master information technology and digitalization are the companies that will survive.

Politically, the world port and trade industry is currently being influenced by a trade war between two major world powers, the People's Republic of Tiongkok and the United States. Container throughput IV of 2018 experienced a slowdown due to this trade war. *Drewry Maritime Research* projected that world container throughput growth will decline from 3.5% to 1% if the trade war continues. Nevertheless, good opportunities were still available for Indonesia because the Southeast Asia region has relatively high container growth

yang baik untuk Indonesia karena kawasan Asia Tenggara memiliki pertumbuhan peti kemas yang relatif tinggi pada tahun 2018 yaitu rata-rata sebesar 8,00%. Diproyeksikan juga adanya peningkatan jumlah koneksi pelayaran *weekly loops* dari 7 (tujuh) menjadi 12 (dua belas) di Regional Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2021. Maka dari itu, di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia kepelabuhanan, Indonesia dan IPC khususnya masih memiliki peluang untuk tumbuh.

Sumber:

1. <https://www.drewry.co.uk/container-insight-weekly/weekly-feature-articles/where-doyou-see-yourself-in-five-years> , Desember 2018
2. Drewry Maritime Research Podcast, December 2018

ANALISIS POSISI IPC DALAM INDUSTRI PELABUHAN

IPC sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia yang berlokasi di ibukota negara, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mampu berkompetisi dengan pelabuhan lainnya di dunia, khususnya di regional Asia Tenggara. Apabila IPC dapat mempertahankan posisi yang baik dalam kancah regional, maka IPC pun dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.

Performansi pelabuhan dapat terlihat dalam Indikator Performansi Logistik (*Logistics Performance Index*, LPI) yang disusun oleh World Bank setiap tahunnya. Pada tahun 2016, ranking LPI Indonesia mengalami sedikit penurunan, yang kemudian membaik kembali hingga tahun 2018. Hal ini dimungkinkan terjadi karena negara tetangga lainnya juga melakukan pengembangan pelabuhan dan mengalami banyak perbaikan. Secara keseluruhan, LPI Indonesia semakin membaik dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sehingga Indonesia mendapatkan *ranking* sebagai salah satu *top performers*.

Terdapat indikator lainnya yaitu Indikator Konektivitas Pelayaran (*Liner Shipping Connectivity Index*, LSCI), yang disusun oleh UNCTAD untuk mengindikasikan seberapa terhubungnya suatu negara terhadap jalur pelayaran global. Posisi Indonesia dalam LSCI mengalami peningkatan yang bertahap dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Nilai LSCI Indonesia di tahun 2018 adalah 47,7, yang merupakan peningkatan sebesar 70% dibandingkan nilainya di

in the third quarter in 2018 the average was 8.00%. It is also projected that there will be an increase in the number of weekly loops shipping connections from 7 (seven) to 12 (twelve) in East Asia and Southeast Asia in 2021. Therefore, amid the uncertainty that exists in the port world, Indonesia and IPC in particular still have an opportunity to grow.

Source:

1. <https://www.drewry.co.uk/container-insight-weekly/weekly-feature-articles/where-doyou-see-yourself-in-five-years>, December 2018
2. Drewry Maritime Research Podcast, December 2018

ANALYSIS OF IPC POSITION IN PORT INDUSTRY

IPC as the largest port operator in Indonesia, located in the Nation's Capital City, has the major responsibility of competing with other ports throughout the world, especially in the Southeast Asian region. If IPC can maintain a good position in the regional arena, then IPC can also make a major contribution to the Nation's economy.

Port performance can be seen in the Logistics Performance Index (LPI) prepared by the World Bank every year. In 2016, Indonesia's LPI ranking declined slightly, which then improved again until 2018. This was possible because other neighboring countries also carried out port development and experienced many improvements. Overall, Indonesia's LPI has improved and has increased in 2018 so that Indonesia obtained the rank as one of the top performers.

Another indicator is the Shipping Connectivity Index (LSCI), compiled by UNCTAD to indicate how connected a country is to global shipping lines. Indonesia's position in LSCI has experienced a gradual increase in the last 10 (ten) years. Indonesia's LSCI score in 2018 was 47.7, an increase of 70% compared to the score in 2014. Currently, Indonesia competes very closely with Vietnam, Thailand and the Philippines. However, Indonesia's position was still very far

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Economy Review

tahun 2014. Indonesia saat ini berkompetisi sangat ketat dengan negara Vietnam, Thailand dan Filipina. Namun, posisi Indonesia masih sangat jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang memiliki pelabuhan hub besar tingkat dunia di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan penjelasan tersebut, IPC harus terus meningkatkan performansinya serta terus mencari cara baru untuk meningkatkan profitabilitas mengingat persaingan dan tantangan industri kepelabuhanan di Asia Tenggara dan di dunia semakin sulit.

Sumber: Arvis et al. (2018), World Bank.

Dalam persaingan operator pelabuhan di Indonesia, IPC masih memberikan kontribusi terbesar dalam pelayanan kargo Indonesia. Di tahun 2017 IPC telah melayani 6,92 juta TEUs peti kemas dan naik 10,40% pada tahun 2018 menjadi 7,64 juta TEUs, kondisi ini masih menempatkan IPC sebagai pengelola terminal peti kemas terbesar di Indonesia. Untuk kargo non-peti kemas, volume terbesar dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan *throughput* mencapai 79,43 juta ton pada tahun 2017 dan naik 1,03% pada tahun 2018 menjadi 80,25 juta ton. Adapun untuk layanan penumpang, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki volume terbesar dengan jumlah 5,37 juta orang penumpang dan naik 3,79% pada tahun 2018 menjadi 5,58 juta orang penumpang.

Apabila melihat dari jumlah kunjungan kapal (dalam satuan GT), maka diketahui volume GT kapal terbesar ada pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan angka 340,79 juta GT dan naik 15,78% pada tahun 2018 menjadi 394,58 juta GT. Tingginya arus kunjungan kapal ini disebabkan karena PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) banyak melayani kunjungan kapal yang akan sandar di non dermaga umum seperti pelabuhan khusus, dermaga khusus atau *loading point*. Selain itu porsi pelayanan kapal di non dermaga umum jauh lebih besar dibanding pelayanan kapal di dermaga umum yang dikelola langsung oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Detail trafik kargo yang dilayani oleh masing-masing Pelindo pada tahun 2017 dan 2018 diuraikan pada tabel berikut:

below that of Singapore and Malaysia that own a large world-level hub port in the Southeast Asia region. Based on this explanation, IPC must continue to improve its performance and to look for new ways to increase profitability, given the increasingly difficult competition and challenges of the port industry in Southeast Asia.

Source: Arvis et al. (2018), World Bank.

In the Indonesian port operators competition, IPC still maintains the largest contribution in Indonesian cargo services. In 2017 IPC served 6.92 million TEUs containers, which increased 10.40% in 2018 to 7.64 million TEUs, placing IPC once again as the largest container terminal manager in Indonesia. For non-container cargo, the largest volume is handled by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with throughput reaching 79.43 million tons in 2017 that rose 1.03% in 2018 to 80.25 million tons. For passenger services, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) had the largest number with 5.37 million passengers that rose 3.79% in 2018 to 5.58 million passengers.

Looking at the number of ship visits (in GT units), volume PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) is the largest ship with 340.79 million GT in 2017 that rose 15.78% in 2018 to 394.58 million GT. The high flow of ship visits is due to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) serving ship visits to non-standard docks such as special ports, special docks or loading points. In addition, the portion of ship services at non-standard docks is more than the ship services at standard docks managed directly by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). The cargo traffic details served by each Pelindo in 2017 and 2018 are shown in the following table:

Tabel Throughput Kapal dan Kargo Pelabuhan Indonesia Tahun 2017-2018 **Table of Indonesian Port Ship and Cargo Throughput - 2017-2018**

Operator Pelabuhan <i>Port Operator</i>	Peti Kemas (juta TEUs) <i>Container (million TEUs)</i>		Non-Peti Kemas (juta Ton) <i>Non-Container (million tons)</i>		Kapal (juta GT) <i>Ships (million GT)</i>		Penumpang (ribu Orang) <i>Passengers (thousand people)</i>	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1,27	1,15	53,17	49,89	166,23	147,31	5.755,79	5.022,97
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	7,64	6,92	61,97	57,09	224,30	202,15	714,93	612,68
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	5,11	4,92	80,25	79,43	250,01	248,84	3.127,26	2.957,36
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2,03	1,94	47,96 ⁾	50,14 ⁾	394,58	340,79	5.579,17	5.375,49

Sumber: PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero)

Source: PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero)

Keterangan: *) Ton/m³

Description: *) Ton / m³

PETA PELABUHAN DI INDONESIA

MAP OF PORTS IN INDONESIA

Tabel di bawah ini memperlihatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara.

The following table shows the management of ports in Indonesia by State-Owned Enterprises.

Perusahaan Pengelola <i>Port Corporation</i>	Cakupan (Provinsi) <i>Coverage (Province)</i>	Pelabuhan yang Dimiliki <i>Port Administrative</i>
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Aceh, Sumatera Utara, Riau Aceh, North Sumatra, Riau	Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Sibolga, Tembilahan, Malahayati, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Sungai Pangkal Batam.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat. West Sumatra, Jambi, Bangka Belitung, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, West Kalimantan, West Java.	Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Banten, Pangkal Balam, Tanjung Pandan.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Central Kalimantan, South Kalimantan, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara.	Tanjung Perak, Tanjung Intan, Tanjung wangi, sampit, Tanjung Tembaga, Bima, Tanjung Emas, Trisakti, Benoa, Kotabaru, Kumai, Maumere, Gresik, Tenau Kupang, Lembar, Celukan Bawang, TPK Semarang, Tenau Kupang
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Barat. East Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, West Papua.	Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Ternate, Kendari, Parepare, Biak, Merauke, Manokwari, Nunukan, Fakfak, Gorontalo, Tolitoli, Manado, Parepare, Bitung.

TINJAUAN OPERASIONAL

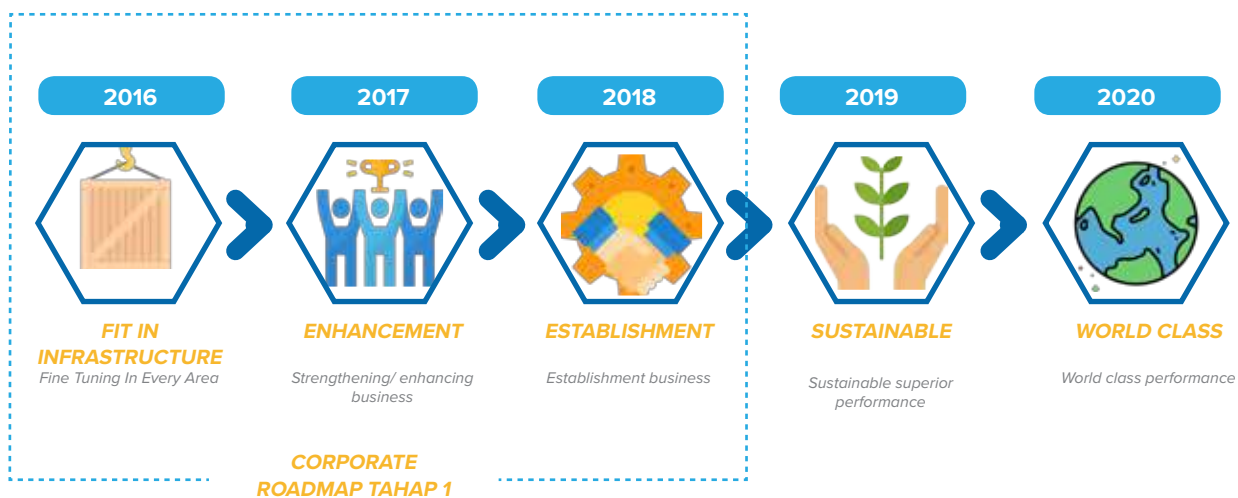
Operational Review

STRATEGI PERUSAHAAN

Dalam usaha untuk mencapai visi, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merumuskan *corporate roadmap* dan dibagi menjadi 5 (lima) tahun kedepan (2016-2020) seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

CORPORATE STRATEGY

In order to achieve its vision, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has formulated a corporate roadmap and is divided into 5 (five) years (2016-2020) as can be seen in the picture below.



Tahun 2016, merupakan tahun pertama dari tahapan *roadmap* Perseroan yang penuh optimisme serta perbaikan dan prestasi bagi Perseroan. Dengan suksesnya implementasi *Fit in Infrastructure* secara korporasi yang berfokus pada perbaikan proses bisnis dan budaya perusahaan. Dalam fase ini perseroan berhasil melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut: perbaikan proses bisnis dan budaya Perusahaan, penyusunan dan perbaikan SOP, peletakan kembali fondasi tata kelola perusahaan yang baik, perbaikan struktur organisasi, peletakan strategi budaya perusahaan dan pemurnian kembali fungsi dan peran cabang pelabuhan dengan memperjelas fungsi cabang pelabuhan, penanaman dan pengaturan kembali kelas-kelas cabang.

2016 was the first year of the Company's roadmap stage, which was full of optimism and as well as improvements and achievements for the Company. With the successful implementation of corporate Fit in Infrastructure that focused on improving business processes and corporate culture. In this stage, the Company managed to make the following improvements: improvement of business processes and corporate culture, preparation and improvement of SOPs, restoration of good corporate governance foundations, improvement of organizational structure, restoration of corporate culture strategies and repurification of port branch functions and roles by the functions of port branch, instilling and rearranging branch classes.

Tahun 2017 dalam *roadmap* Perseroan merupakan tahun *Enhancement* dimana Perseroan memperkuat kapabilitas menuju *digital port* guna mewujudkan kinerja unggul berkesinambungan. *Enhancement* mencakup 4 (empat) *point* utama yaitu pertama peningkatan kualitas operasional dan pelayanan pelabuhan dengan implementasi pelayanan 24/7, kualitas SDM, komersial dan keuangan. Point selanjutnya adalah *Infrastructure Development (Greenfield and Brownfield)* yaitu Inisiasi pembangunan proyek strategis dan pengadaan peralatan pelabuhan/perbaikan dermaga eksisting. Point ketiga adalah *Expansion Of Subsidiaries*

2017 in the Company's roadmap is a year of Enhancement, where the Company strengthened its capability towards digital port in order to embody sustainable excellent performance. Enhancement includes 4 (four) main points. The first is improving the quality of port operations and services with the implementation of 24/7 services, HC, commercial and financial quality. The next point is Infrastructure Development (Greenfield and Brownfield), which is the initiation of strategic project development and the procurement of port equipment/repairs of existing docks. The third point is Expansion of Subsidiaries, in which the

dimana Perseroan melakukan ekspansi wilayah kerja Entitas Anak dengan dilakukan IPO dan pembentukan Entitas Anak baru dan poin yang terakhir *Optimize It Utilization* merupakan Optimalisasi penggunaan IT guna menunjang kegiatan operasi dan *back office*.

Di tahun 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan memasuki fase *Establishment*. Strategi *Establishment* dilakukan setelah pengembangan dan penguatan bisnis selesai dilaksanakan di tahun 2017 dengan strategi "*Enhancement*". Saat pengembangan dan menguatkan penguatan bisnis telah dilaksanakan, maka selanjutnya perlu pembentukan bisnis maka selanjutnya perlu pembentukan bisnis Perseroan yang terdiri dari kegiatan *volume growth*, *profitabilitas growth* dan *holding establishment*, dimana Perseroan fokus pada peningkatan jumlah pangsa pasar, jumlah pelanggan, efektifitas operasi di cabang pelabuhan, peningkatan produktivitas, optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional pelabuhan dan standarisasi operasi dan infrastruktur pelabuhan guna mendukung program *integrated port network*.

INISIATIF STRATEGIS 2018

Sejumlah inisiatif strategis yang akan dijalankan oleh IPC di tahun 2018, yang berpeluang meningkatkan kinerja Perseroan serta memberikan prospek usaha baik, antara lain:

- 1. Peningkatan Volume (*Volume Growth*)**
Peningkatan volume barang atau *throughput* pelabuhan akan terus dilakukan. Di antaranya, melalui peningkatan jumlah pelanggan/*customer*, peningkatan pangsa pasar pelabuhan, peningkatan efektivitas operasi di cabang pelabuhan, dan operasi terminal baru.
- 2. Peningkatan Laba (*Profitability Growth*)**
Berbagai usaha untuk meningkatkan laba pun dilakukan. Antara lain melalui optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional pelabuhan, *volume growth* serta naiknya tarif di beberapa cabang pelabuhan, kerjasama dengan pihak eksternal, dan IPO di dua entitas anak (PT PTP dan PT IKT Tbk).
- 3. Pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Establishment*)**
Pembentukan dan penguatan perusahaan induk juga menjadi fokus tahun 2018. Adapun langkah IPC dalam hal ini adalah dengan standarisasi operasi dan infrastruktur pelabuhan guna mendukung *integrated port network*, *subsidiaries expansion*, implementasi Pelindo Incorporated, kerjasama dengan kawasan industri, dan penajakan operasi PT1 dan PT2 dengan BUMN.

Company is expanding the work area of Subsidiaries by conducting IPO and establishing new Subsidiaries, and the last points is Optimize It Utilization, which is Optimizing the use of IT to support operations and back-office activities.

In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will enter the Establishment phase. The Establishment strategy is carried out after the development and strengthening of the business is completed in 2017 with a the "Enhancement" strategy. When developing and strengthening business has been carried out, then it is necessary to form a business. Therefore, the Company needs to form a business consisting of volume growth, profitability growth and holding establishment, where the Company focuses on increasing market share, number of customers, operational effectiveness at port branches, increase productivity, optimize assets, improve port operational efficiency and standardize port operations and infrastructure to support the integrated port network program.

2018 STRATEGIC INITIATIVES

A number of strategic initiatives will be carried out by IPC in 2018, which have the opportunity to improve the Company's performance and provide good business prospects, including:

- 1. Volume Growth**
Increasing the volume of goods or port throughput will continue to be done. Among other things, through increasing the number of customers, increasing port market share, increasing operational effectiveness at the port branch, and new terminal operations.
- 2. Profitability Growth**
Various efforts to increase profits are made. Among others, through asset optimization, increasing port operational efficiency, volume growth and rising tariffs in several port branches, cooperation with external parties, and IPO in two subsidiaries (PT PTP and PT IKT Tbk).
- 3. Holding Establishment**
The establishment and strengthening of the parent company is also the focus of 2018. IPC's steps in this regard are standardization of port operations and infrastructure to support integrated port network, subsidiaries expansion, Pelindo Incorporated implementation, cooperation with industrial estates, and feasibility of PT1 and PT2 operations with SOE.

TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa IPC.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa IPC. Penjelasan mengenai strategi pemasaran dan saluran promosi IPC di uraikan sebagai berikut.

PRICE LEADERSHIP

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga dalam memasarkan produk/jasa, antara lain:

1. Menawarkan tarif yang kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan kompetitor.
2. Memberikan potongan tarif (diskon).
3. Memberikan kompensasi (*reward*).
4. Memberikan insentif.
5. Memberikan kemudahan pembayaran dalam periode waktu tertentu.
6. Strategi lainnya yang terkait dengan pendekatan *price leadership* yang ditentukan Perseroan.

SERVICE DIFFERENTIATION

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan pelayanan dengan memasarkan produk dan jasa, antara lain:

1. Meningkatkan Standar Kinerja Pelabuhan BCH yang bertambah atau berkurangnya *turn around time* kapal.
2. Memberikan kualitas pelayanan (*quality leadership*) yang terbaik kepada pengguna jasa dan atau calon mitra/investor sehingga terpenuhinya keinginan dan kebutuhan mereka.
3. Keandalan sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung kelancaran transaksi di pelabuhan sehingga mengurangi banyaknya dokumentasi dan mampu menekan biaya logistik pengguna jasa dan atau calon mitra/investor.
4. Kepemilikan alat-alat yang baru atau yang lebih modern sehingga mempercepat kegiatan bongkar muat /muat-muatan
5. Memiliki jangkauan layanan pengiriman barang dari pelabuhan ke pemilik barang (*port to door*).
6. Strategi lainnya yang terkait dengan pendekatan *service differentiation* yang ditentukan Perseroan.

MARKETING ASPECT

Description of marketing aspect, including marketing strategies and market share of IPC products and services.

MARKETING STRATEGY

The right marketing strategy will encourage the market share growth of IPC products and services. An explanation of marketing strategies and promotion channel for IPC is described as follows.

PRICE LEADERSHIP

Marketing strategy using a tariff or price approach in products/services marketing, including:

1. Offer competitive rate compared to competitor ports.
2. Give discount.
3. Provide compensation (reward).
4. Provide incentives.
5. Provide easy payment within a certain time period.
6. Other strategies related to the price leadership approach determined by the Company.

SERVICE DIFFERENTIATION

Marketing strategy by using a service approach in products and services marketing, including:

1. Increase the BCH Port Performance Standards that are increasing or decrease the turnaround time of ship.
2. Provide the best quality of service (quality leadership) to service users and/or potential partners/investors so that their needs and needs are met.
3. Reliability of Information Technology (IT) systems that support smooth transactions at the port thereby reducing the amount of documentation and able to reduce logistics costs for service users and/or potential partners/investors.
4. Ownership of new or more modern equipment so as to accelerate loading and unloading activities
5. Has a range of goods delivery services from the port to the goods owner (port to door).
6. Other strategies related to the service differentiation approach determined by the Company.

SALURAN PROMOSI

IPC memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada para pengguna jasa atau calon mitra/investor berupa Jasa Kepelabuhanan (Jasa Kapal, Jasa Barang, Jasa Rupa – Rupa). Selain produk/jasa, IPC juga menawarkan proyek pengembangan pelabuhan serta pemanfaatan asset perusahaan. Untuk itu saluran promosi yang digunakan oleh IPC adalah sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media cetak (surat kabar, Majalah, dan lainnya) dan media elektronik (TV dan media sosial).
2. *Gathering*/Bisnis forum/Forum Investor.
3. Eksibisi/pameran.
4. Kinjungan Pelabuhan dan studi banding.

PANGSA PASAR

Secara keseluruhan pangsa pasar yang dapat di layani oleh IPC untuk bongkar muat peti kemas pada tahun 2018 adalah sebesar 7.529.490 TEUs atau 98,55% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga IPC peti kemas sebesar 7.640.312 TEUs. Sedangkan untuk segmen non peti kemas, pangsa pasar bongkar muat yang dilayani oleh IPC pada tahun 2018 sebesar 36.397.079 Ton atau 58,72% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga IPC sebesar 61.971.277.

PROMOTIONAL CHANNEL

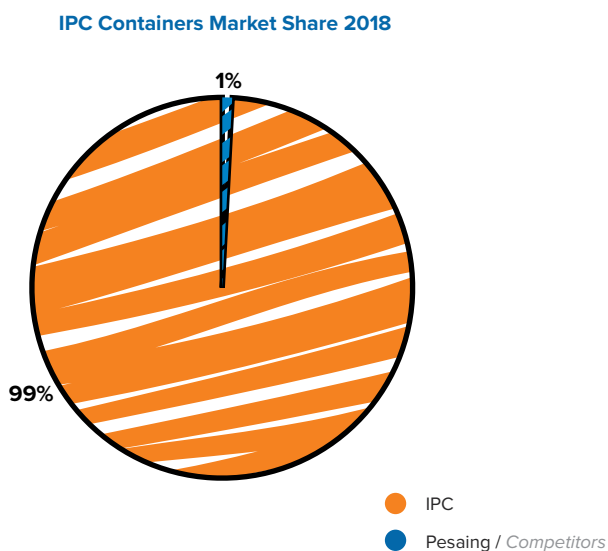
Products/services of IPC offered to service users or prospective partners/investors in the form of Port Services (Ship Services, Goods Services, Miscellaneous Services). In addition to products/services, IPC also offers port development projects and utilization of company assets. For this reason, the promotion channels used by IPC are as follows:

1. Publication through print media (newspapers, magazines and others) and electronic media (TV and social media).
2. *Gathering*/Business forum/Investor Forum.
3. Exhibition.
4. Port visit and comparative study.

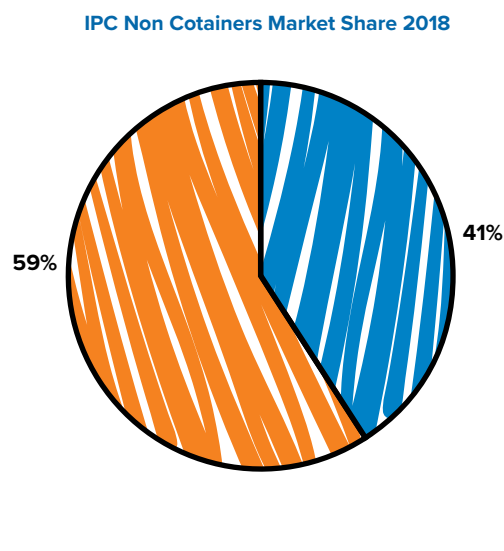
MARKET SHARE

Overall, IPC's market share for container loading and unloading in 2018 was 7,529,490 TEUs or 98.55% of the 7,640,312 TEUs total throughput passing through the IPC container dock facilities. For the non-container segment, IPC's loading and unloading market share in 2018 amounted to 36,397,079 tons or 58.72% of the 61,971,277 total throughput passing through the IPC dock facility.

PANGSA PASAR PETI KEMAS IPC 2018



PANGSA PASAR NON PETI KEMAS IPC 2018



Sumber: Data *traffic* Direktorat Operasi per Desember 2018

Source: Data traffic from the Directorate of Operations as of December 2018

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

Segmen usaha Perseroan dikelompokkan ke dalam segmen usaha operasi dan geografis. Segmen usaha operasi meliputi Segmen Operasi Kepelabuhanan dan Segmen Jasa Lainnya. Segmen Geografis terdiri dari Tanjung Priok, Panjang, Banten, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Bengkulu, Cirebon, Sunda Kelapa, Jambi, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.

Penjelasan, produktivitas, pendapatan dan profitabilitas dari masing-masing segmen usaha diuraikan sebagai berikut.

SEGMENT OPERASI KEPELABUHANAN

Segmen Operasi Kepelabuhanan meliputi Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Terminal, Pengusahaan Alat, Pelayanan Terminal Peti Kemas.

PELAYANAN JASA KAPAL

PENJELASAN PELAYANAN JASA KAPAL

Pelayanan jasa kapal merupakan pelayanan yang diberikan kepada kapal mulai masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan jasa kapal meliputi:

1. **Jasa Labuh**
Jasa yang diberikan untuk kapal melakukan lego jangkar di area kolam pelabuhan sebelum kapal sandar.
2. **Jasa Tambat**
Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat.
3. **Jasa Pandu**
Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
4. **Jasa Tunda**
Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga

PRODUKTIVITAS PELAYANAN JASA KAPAL

Realisasi untuk produksi pelayanan jasa kapal tahun 2018 di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company's business segments are grouped into operating and geographical business segments. The operating business segment includes the Port Operation Segment and Other Services Segment. The Geographical Segment consists of Tanjung Priok, Panjang, Banten, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Bengkulu, Cirebon, Sunda Kelapa, Jambi, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan.

Explanation, productivity, revenue and profitability of each business segment are described as follows.

PORT OPERATION SEGMENT

The Port Operation Segment includes Goods Services, Terminal Services, Tool Operations, Container Terminal Services.

SHIP SERVICES

EXPLANATION SHIP SERVICES

Ship services is ship operational services activities from the time the ships enter the port until their departure. Ship services include:

1. **Anchorage**
Services provided to vessels to safely await the subsequent services.
2. **Berthing**
Services to moore the ship to the dock.
3. **Pilotage**
Piloting services to assist, providing advice, information to the ship captain on the conditions of the port, water, and local navigation channels that are crucial to ensure a safe, orderly, and smooth ship navigation for the safety of the ship and the environment.
4. **Towage**
Towage services to dock the ship to the pier using Tug Boats.

PRODUCTIVITY OF SHIP SERVICES SEGMENT

The realization for Ship Services Production in 2018 in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Produksi Jasa Pelayanan Kapal

Table of Ship Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
PELAYANAN JASA KAPAL SHIP SERVICES				
Pelabuhan Umum General Port				
Labuh Anchorage	GT			
Tambatan Berthing	GT-Etm	374.750.198	331.900.421	12,91
Pemanduan Pilotage	Kpl-Grk	78.849	81.838	(3,65)
	GT	558.658.947	624.279.339	(10,51)
Penundaan Towage	Kpl-Jam	167.550	152.401	9,94
	GT	1.485.616.532	1.342.329.462	10,67

Labuh

Realisasi produksi jasa labuh di pelabuhan umum tahun 2018 tidak dipungut dan dicatatkan terkait dengan PermenHub No 69 tahun 2015.

Tambatan

Realisasi produksi jasa tambat di pelabuhan umum tahun 2018 sebesar 374.750.198 GT-Etm atau mengalami tren positif naik sebesar 12,91%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan GT untuk kapal berbendera luar negeri seiring dengan *upsized* kapal-kapal yang berkunjung di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemanduan dan Penundaan

Realisasi produksi jasa pemanduan tahun 2018 dalam jumlah gerakan tercapai sebesar 78.849 Kpl-Grk atau deviasi positif 3,65% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 110.298 Kpl-Grk. Hal ini dipengaruhi tidak tercapainya realisasi pemanduan di Teluk Bayur, Banten dan Panjang seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan kapal pelayaran dalam dan luar negeri untuk kapal *General Cargo*, Curah cair dipelabuhan Teluk Bayur karena menurunnya ekspor curah cair CPO dan turunannya serta menurunnya kunjungan kapal curah kering dipelabuhan Banten karena asumsi pengoperasian pemanduan untuk terminal KBS tidak terealisasi hingga Desember tahun 2018.

Realisasi produksi jasa penundaan tahun 2018 sebesar 167.550 Kpl-Jam atau 9,94% di atas realisasi tahun 2018 sebesar 152.401 Kpl-Jam. Sedangkan dalam satuan GT kapal

Anchorage

The realization of anchorage service production at general ports in 2018 was not collected and listed in connection with the Ministry of Transportation Regulation No. 69 of 2015.

Berthing

In 2018, the realization of berthing service production at general ports amounted to 374,750,198 GT-Etm or experienced a positive trend up by 12.91%. This was due to an increase in GT for foreign-flagged vessels along with the *upsized* of ships visiting Tanjung Priok Port.

Pilotage and Towage

In 2018, the realization of pilotage service production in the number of movements reaching 78,849 Kpl-Grk or a positive deviation of 3.65% lower than the realization in 2018 of 110,298 Kpl-Grk. This was influenced by the failure to achieve pilotage in Teluk Bayur, Banten and Panjang along with the decrease in number of domestic and foreign shipping vessel visits for General Cargo vessels, liquid bulk in Teluk Bayur port due to declining export of CPO liquid bulk and derivatives and declining visits of port dry bulk vessels in Banten port because the assumption of pilotage operations for KBS terminal was not realized until December 2018.

In 2018, the realization of towage service production was 167,550 Kpl-Jam or 9.94% above the realization in 2018 of 152,401 Kpl-Jam. While in ship GT unit reached 1,485,616 GT,

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

tercapai 1.485.616 GT atau naik 10,67 % di atas realisasi. Hal ini dipengaruhi tercapainya target jam pelayanan jasa Penundaan untuk kapal luar negeri di pelabuhan Tanjung priok dan peningkatan GT Kapal seiring dengan *upsized* kapal yang berkunjung di pelabuhan tersebut.

PENDAPATAN PELAYANAN JASA KAPAL

Pendapatan pelayanan jasa kapal tahun 2018 sebesar Rp1,42 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp221,15 miliar atau 18,50% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,20 triliun. Peningkatan tersebut karena trend upsizing kapal luar negeri dengan GT di atas 3.500 sampai dengan 18.000, 26.000 sampai dengan 75.000, dan diatas 75.001 pada Pelabuhan Cabang Tanjung Priok. Hal lainnya disebabkan peningkatan pelayanan jasa tunda pelabuhan khusus PT JAI Tbk pada Pelabuhan Cabang Palembang untuk melayani PT Bukit Asam.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan	2018	2017	Pertumbuhan
Pelayanan Jasa Kapal	1.416.634.965	1.195.489.590	221.145.375 18,50%

PROFITABILITAS PELAYANAN JASA KAPAL

Profitabilitas pelayanan jasa kapal tahun 2018 sebesar Rp420,42 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp54,93 miliar atau 15,03% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp365,49 miliar. Peningkatan profitabilitas sejalan dengan peningkatan pendapatan pelayanan jasa dan kapal.

Tabel Profitabilitas Pelayanan Jasa Kapal

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth
Pelayanan Jasa Kapal Ship Services	420.424.216	365.489.369	54.934.847 15,03%

PELAYANAN JASA BARANG

PENJELASAN PELAYANAN JASA BARANG

Merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi:

- Jasa Dermaga
 Pelayanan yang di sediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.
- Gudang dan Lapangan Penumpukan Merupakan jasa penyimpanan atau penempatan kontainer.

up by 10.67% above the realization. This was driven by the the achievement of the target of towage service hours for foreign ships in Tanjung Priok port and the increase in ship GT along with the upsized of ships visiting the port.

SHIP SERVICE REVENUE

Ship service revenue in 2018 amounted to Rp1.42 trillion, an increase of Rp221.15 billion or 18.50% compared to Rp1.20 trillion in 2017. The increase was due to the trend of larger foreign ships with GT from 3,500 to 18,000, 26,000 to 75,000, and above 75,001 in the Tanjung Priok Branch Port. The other reason is due to the increase in delay services at PT JAI Tbk's port services at the Palembang Branch Port to service PT Bukit Asam.

Table of Ship Service Revenue

(in thousands of Rupiah)

Pendapatan	2018	2017	Pertumbuhan
Pelayanan Jasa Kapal	1.416.634.965	1.195.489.590	221.145.375 18,50%

SHIP SERVICES PROFITABILITY

The of ship services profitability in 2018 amounted to Rp420.42 billion, an increase of Rp.54.93 billion or 15.03% compared to Rp365.49 billion in 2017. The increased profitability was in line with the increase in revenue from services and ships.

Tabel of Ship Services Profitability

(in thousands of Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth
Pelayanan Jasa Kapal Ship Services	420.424.216	365.489.369	54.934.847 15,03%

GOODS SERVICES

EXPLANATION GOODS SERVICES

A loading and unloading service from ship to delivery to the owner of the goods. Goods service includes:

- Dock Services
 Services provided for loading and unloading activities or boarding passengers through the dock.
- Warehouse and Stacking Fields for container storage or placement services

PRODUKTIVITAS PELAYANAN JASA BARANG

Realisasi sampai dengan periode tahun 2018 untuk Produksi Pelayanan Jasa Barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Barang

Uraian <i>Description</i>	Satuan	2018	2017	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Dermaga Pelabuhan Umum <i>General Port Dock</i>				
a. Dermaga Umum General Dock	Ton	48.585.622	43.861.304	10,77
	M ³	8.162.458	6.279.206	29,99
	Box	655.217	699.542	(6,34)
	Ekor Animals	231.613	202.460	14,40
	Unit	798.852	460.152	73,61
b. Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Day	3.956.008	3.281.820	20,54
	M ³ Hari M ³ -Day	580.742	765.971	(24,18)
c. Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ton hari Ton-Day	10.030.135	9.587.920	4,61
	M ³ hari M ³ -Day	7.886.370	8.984.689	(12,22)
	Ekor hari Animal-Day	198.234	846.005	(76,57)
	Box hari Box-Day	558.452	303.417	84,05
	Unit Hari Unit-Day	416.189	610.207	(31,80)

Dermaga Umum

Realisasi produksi pelayanan jasa dermaga untuk tahun 2018 dalam satuan Ton sebesar 48.585.622 ton atau mengalami tren pertumbuhan naik sebesar 10,77% terhadap realisasi di tahun 2017 sebesar 43.861.304 Ton. Hal ini dipengaruhi telah beroperasinya kembali conveyor setelah mengalami perbaikan yang di gunakan untuk kegiatan curah kering batubara di beberapa pelabuhan seperti Cabang Pelabuhan Cirebon dan Bengkulu.

Realisasi produksi pelayanan jasa barang di dermaga umum dalam satuan m³ sebesar 8.162.458 atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 29,99% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh tercapainya kegiatan barang jenis *spare part* alat berat dan unitize di terminal Kendaraan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

GOODS SERVICES PRODUCTIVITY

The 2018 realization for Goods Services in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be seen in the following table.

Table of Cargo Services Production

Uraian <i>Description</i>	Satuan	2018	2017	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Dermaga Pelabuhan Umum <i>General Port Dock</i>				
a. Dermaga Umum General Dock	Ton	48.585.622	43.861.304	10,77
	M ³	8.162.458	6.279.206	29,99
	Box	655.217	699.542	(6,34)
	Ekor Animals	231.613	202.460	14,40
	Unit	798.852	460.152	73,61
b. Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Day	3.956.008	3.281.820	20,54
	M ³ Hari M ³ -Day	580.742	765.971	(24,18)
c. Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ton hari Ton-Day	10.030.135	9.587.920	4,61
	M ³ hari M ³ -Day	7.886.370	8.984.689	(12,22)
	Ekor hari Animal-Day	198.234	846.005	(76,57)
	Box hari Box-Day	558.452	303.417	84,05
	Unit Hari Unit-Day	416.189	610.207	(31,80)

General Dock

Dock service production for 2018 amounted to 48,585,622 tons, an increase of 10.77% compared to 43,861,304 tons in 2017. This is influenced by the conveyor operations reopening after undergoing repairs. These are used for coal dry bulk activities in several ports such as Cirebon Port Branch and Bengkulu.

The realization of goods services at the general dock m³ units was 8,162,458 or experienced a growth trend of 29.99% compared to the realization in 2017. This was influenced by the achievement of activities of heavy equipment spare parts and unitize in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT, Tbk) Vehicle terminal, and pallet type in Sunda Kelapa and

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

(PT IKT, Tbk), serta jenis pallet dipelabuhan Sunda Kelapa dan Pangkal Balam.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga di terminal *multipurpose* dalam satuan Box sebesar 655.217 box atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 6,34% di bawah realisasi Tahun 2017 sebesar 699.542 Box. Hal ini sejalan dengan belum terealisasinya kegiatan peti kemas di Pelabuhan Cirebon dan pangkal balam serta beralihnya kegiatan bongkar muat peti kemas di terminal *multipurpose* ke terminal peti kemas di pelabuhan Pontianak dan Tanjung priok.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga dalam satuan Ekor sebesar 231.613 ekor atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 14,40% di atas realisasi tahun 2017 sebesar 202.460 Ekor sebagaimana terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Sunda Kelapa. Hal ini dipengaruhi meningkatnya permintaan daging hewan dalam bentuk ekor melalui pelabuhan tersebut.

Realisasi produksi pelayanan jasa Dermaga dalam satuan unit sebesar 798.852 unit atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 73,61% di atas realisasi tahun 2017. Hal ini dipengaruhi peningkatan realisasi realisasi barang unitize kendaraan dan alat berat di Terminal Kendaraan PT IKT Tbk dan melalui Tanjung Priok.

Gudang dan Lapangan Penumpukan

Realisasi produksi pelayanan jasa gudang untuk tahun 2018 dalam satuan Ton-Hari sebesar 3.956.008 Ton-Hari atau 20,54% di atas realisasi tahun 2017 sebesar 3.281.820 Ton-Hari. Hal ini dipengaruhi meningkatnya penumpukan barang *General cargo* di pelabuhan Tanjung Priok dan komoditi curah batu bara di pelabuhan Cirebon.

Realisasi produksi pelayanan jasa penumpukan melalui gudang dalam satuan M³-Hari sebesar 580.742 di bawah realisasi tahun 2017. Hal ini dipengaruhi tidak tercapainya kegiatan penumpukan barang *unitize* melalui gudang di pelabuhan Sunda Kelapa, Tanjung Pandan dan Bengkulu seiring dengan pola operasi *truck lossing* di cabang pelabuhan tersebut dan belum terealisasinya perbaikan gudang di Sunda Kelapa.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Penumpukan melalui lapangan dalam satuan Ton-hari tercapai 10.030.135 atau 4,61%

Pangkal Balam port.

The realization of Dock Services production in multipurpose terminal in Box unit amounted to 655,217 boxes or experienced a growth trend of 6.34% lower than the realization in 2017 of 699,542 Boxes. This was in line with the unrealized container activities in Cirebon and Pangkal Balam Port and the switching of container loading and unloading activities at multipurpose terminal to Container terminal in Pontianak and Tanjung Priok port.

The realization of Dock Services production in Animal unit amounted to 231,613 animals or experienced a growth trend of 14.40% higher than the realization in 2017 of 202,460 tails as occurred in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Sunda Kelapa port. This was influenced by the increasing demand for animal meat in the form of tails through the port.

The realization of Dock Services production in Unit amounted to 798,852 units or experiencing a growth trend of 73.61% above the realization in 2017. This was caused by the realization of unitized goods in vehicles and heavy equipment at PT IKT Tbk Vehicle Terminal and through Tanjung Priok.

Warehouse and Stacking Field

In 2018, the realization of warehouse service production in Ton-Day unit was 3,956,008 Ton-Days or 20.54% higher than the realization in 2017 of 3,281,820 Ton-Days. This was influenced by an increase in the accumulation of General cargo goods at Tanjung Priok port and coal bulk commodities in Cirebon port.

The realization of stacking warehouse services production in M³-Day unit amounted to 580,742 lower than the realization in 2017. This was influenced by the failure to achieve unitized goods stacking activities through warehouses in Sunda Kelapa, Tanjung Pandan and Bengkulu port along with the truck lossing operation pattern at the port branch and the repairs of warehouses in Sunda Kelapa which were not yet realized.

The realization of stacking field services production in Ton-day unit reaching 10,030,135 or 4.61% higher than the

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

di atas realisasi tahun 2017. Hal ini dipengaruhi meningkatnya *sparepart* di terminal kendaraan IKT. Demikian juga dalam satuan m³hari tercapai 7.913.430 M³-hari atau 20.43% di bawah realisasi sebesar 9.945.801 M³hari. Hal ini juga dipengaruhi menurunnya kegiatan Bongkar muat curah di Cabang Pelabuhan Banten dan Panjang dan adanya kecenderungan *customer* melakukan pola operasi *truck lossing* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Demikian halnya jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mengalami *trend* negatif turun sebesar 11,92%.

PENDAPATAN PELAYANAN JASA BARANG

Pendapatan pelayanan jasa barang tahun 2018 sebesar Rp151,12 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp19,37 miliar atau 14,70% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp131,75 miliar. Hal ini disebabkan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Cabang Tanjung Priok adanya kenaikan pendapatan atas transaksi di *Container Freight Station* (CFS) Center.
2. Pelabuhan Cabang Panjang melayani peningkatan permintaan komoditas Fatty Acid Methyl Ester (FAME/Bio Diesel) untuk di *supply* ke PT Pertamina Panjang, pupuk curah subsidi (PT Petrokimia dan PT Pupuk Sriwijaya) dan ekspor komoditas molasses, *Palm Oil* (Kelapa Sawit), methanol, batu bara dan clinker.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Barang

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan Revenue	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pelayanan Jasa Barang Goods Services Revenue	151.122.002	131.748.755	19.373.247	14,70%

PROFITABILITAS PELAYANAN JASA BARANG

Profitabilitas pelayanan jasa barang tahun 2018 sebesar Rp44,85 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp4,57 miliar atau 11,35% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp40,28 miliar. Peningkatan profitabilitas sejalan dengan peningkatan pendapatan pelayanan barang.

Tabel Profitabilitas Pelayanan Jasa Barang

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pelayanan Jasa Barang Goods Services Profitability	44.849.485	40.278.702	4.570.783	11,35%

realization in 2017. This was due to an increase in spare parts in IKT vehicle terminal. While in m³-day unit reaching 7,913,430 M³-days or 20.43% below the realization of 9,945,801 M³ days. This was also influenced by a decrease in bulk Bongkar muat activities in Banten and Panjang port branch, and customers' tendency to carry out truck lossing operation pattern in Tanjung Priok port branch. Likewise when compared to the previous year's achievement which experienced a negative trend fell by 11.92%.

GOODS SERVICES REVENUE

Goods services revenue in 2018 amounted to Rp151.12 billion, an increase of Rp19.37 billion or 14.70% compared to Rp131.75 billion in 2017. This was due to:

1. Tanjung Priok Port Branch increased revenue for transactions at the Container Freight Station (CFS) Center.
2. Panjang Port services increase in demand for commodities including Fatty Acid Methyl Ester (FAME / Bio Diesel) to be supplied to PT Pertamina Panjang, subsidized bulk fertilizer (PT Petrochemical and PT Pupuk Sriwijaya) and commodity exports of molasses, Palm Oil, Methanol, coal and clinker.

Tabel of Revenue from Goods Services

(in thousands of Rupiah)

GOODS SERVICES PROFITABILITY

The goods services profitability in 2018 amounted to Rp44.85 billion an increase of Rp4.57 billion or 11.35% compared to Rp40.28 billion in 2017. The increased profitability was in line with the increase in goods service revenues.

Goods Services Profitability

(in thousands of Rupiah)

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

PELAYANAN TERMINAL

PENJELASAN PELAYANAN TERMINAL

Pelayanan terminal ini, antara lain termasuk penanganan peti kemas domestik, *break bulk*, *dry bulk*, curah cair dan kendaraan domestik maupun penumpang.

PRODUKTIVITAS SEGMENT USAHA PELAYANAN TERMINAL

Realisasi sampai dengan periode tahun 2018 untuk produksi pelayanan jasa terminal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Produksi Pelayanan Terminal

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pelayanan Usaha Terminal <i>Terminal Services</i>				
Stevedoring	Ton	34.940.698	30.408.003	14,91
	M ³	2.749.800	2.811.264	(2,19)
Cargodoring	Ton	3.621.006	2.812.202	28,76
	M ³	-	12.341	-
Overbremen	TEUs	3.996	-	-
Receiving/Delivery	Ton	221.839	328.686	(32,51)
	Unit	13.452	16.205	(16,99)
	Box	15.390	12.341	24,71
Pengusahaan Alat Equipment Production	Jam Hour	305.446	746.718	(59,09)
	Ton	18.232.875	32.324.019	(43,59)
	Box	9.476	32.959	(71,25)
Ro-Ro	Paket Package	332.819	102.846	223,61
Supervisi Supervision				
a. GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo	Ton	6.449.296	4.887.908	31,94
b. Peti kemas Container	Box		-	

Realisasi produksi pelayanan terminal *stevedoring* untuk tahun 2018 dalam satuan ton sebesar 34.940.698 Ton yang mengalami kenaikan sebesar 14,91 % seiring dengan adanya trend kenaikan barang curah dan *general cargo* di beberapa Cabang Pelabuhan di Palembang, Tanjung Priok, Cirebon dan Pontianak.

TERMINAL SERVICES

EXPLANATION TERMINAL SERVICES

Terminal services include among others, the handling of domestic containers, *break bulk*, *dry bulk*, liquid bulk, and domestic and passenger vehicles.

PRODUCTIVITY OF TERMINAL SERVICES SEGMENT

The realization up to the 2018 period for Terminal Services in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Table of Terminal Services Production

In 2018, the realization of terminal service production for *stevedoring* in ton unit amounted to 34,940,698 tons, an increase of 14.91% along with the trend of increasing bulk goods and general cargo in several Port Branches in Palembang, Tanjung Priok, Cirebon and Pontianak.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Realisasi produksi pelayanan Terminal Stevedoring Tahun 2018 dalam satuan M³ sebesar 2.749.800 M³ atau 2,19 % di bawah Tahun 2017 yang terjadi di Pelabuhan Banten seiring dengan menurunnya kegiatan bongkar muat curah pangan dan *unitize* yang melewati pelabuhan tersebut.

In 2018, the realization of terminal service production for stevedoring in M³ unit was 2,749,800 M³ or 2.19% lower than 2017, which occurred in Banten Port along with a decline in loading and unloading activities of food and unitize passing through the port.

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk *Cargodoring* satuan Ton sebesar 3.621.006 ton atau 28,76% di atas tahun 2017 sebesar 2,812,202 Ton. Hal ini dipengaruhi realisasi *cargodoring* kegiatan komoditi pupuk, aspal dan handling peralatan mesin industri dan alat pabrik perkebunan Karet serta hasil perkebunan karet, pupuk dan kelapa di cabang Teluk Bayur, Tanjung Priok, Palembang, Pontianak dan Jambi.

The realization of terminal service production for Cargodoring in Ton unit amounted to 3,621,006 tons or 28.76% above 2,812,202 tons in 2017. This is influenced by the realization of *cargodoring* on the activities of fertilizer commodity, asphalt and handling of industrial machinery equipment and rubber plantation equipment as well as rubber, fertilizer and coconut plantation products in Teluk Bayur, Tanjung Priok, Palembang, Pontianak and Jambi branches.

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk *receiving/delivery* satuan Ton Tahun 2018 sebesar 221.839 ton atau 32,51% di bawah tahun 2017 sebesar 328,686 ton, yang di pengaruhi penurunan kegiatan penumpukan curah seiring dengan tidak tercapainya akuisisi KBS di Cabang Pelabuhan Banten, penurunan penumpukan karena perubahan pola operasi akibat pendangkalan kolam di Bengkulu dan pola *Truck lossing* di Pangkal Balam.

In 2018, the realization of terminal service production for receiving/delivery in Ton unit amounted to 221,839 tons or 32.51% below 2017 of 328,686 tons, which was affected by a decrease in bulk stacking activities along with the failure of KBS acquisition in Banten Port Branch, a decrease in stacking due to changes in operation pattern as a result of siltation of ponds in Bengkulu and truck lossing pattern in Pangkal Balam.

Uraian <i>Description</i>		Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
Supervisi <i>Supervision</i>					
a	GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo	Ton	6.449.296	4.887.908	31,94
b	Peti kemas Container	Box	-	468	-
c	Hewan Ternak Livestock	Ekor Animal	-	-	-
d	Alat Berat/Kendaraan Heavy Equipment/Vehicle	Unit	-	-	-
Bongkar Muat Peti kemas <i>Container Loading and Unloading</i>					
Operasi Kapal Ship Operation		Box		893.054	(12,06)
		Unit		482	(61,87)
Operasi lapangan : Field Operation		Box		1.407.729	(35,79)
Operasi Penumpukan : Stacking Operation		Box-Hari Box-day		1.994.587	(17,96)
					-
Lift On/Lift Off		Box		1.006.545	(2,60)

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Overbregen	Box		-	-
Operasi CFS : CFS Operation	Box		21.549	-
	Tonhari Ton-day		31.686	(65,52)
	Ton/M ³		6.364	-
	Ton		-	-
	M ³		-	-
	M ³ hari M ³ -day		-	-
Angkutan Langsung Direct Transport	Ton		2.538.112	-
	M ³		-	-
Lainnya Others	Ton		3.493.218	2,72
	Unit		-	-
	Jam Hour		-	-
TERMINAL KENDARAAN – PT IKT				
VEHICLE TERMINAL – PT IKT				
1 Kegiatan Bongkar muat Mobil Vehicle Loading/Unloading Activity	unit	417.174	345.863	20,62
2 General Cargo				-
a ALAT BERAT HEAVY EQUIPMENT	Unit	103.890	27.383	279,40
	M ³	2.428.115	1.864.081	30,26
b SPARE PART	PKGS	22.859	19.585	16,72
	M3	113.916	68.663	65,90
c UNITIZED CARGO (EMPTY CAN)	M3	-	12.889	-

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk bongkar muat peti kemas operasi kapal di terminal konvensional sebesar 893.054 box atau mengalami penurunan sebesar 12,06%. jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun 2017 juga Hal ini utamanya dipengaruhi perubahan *scope* bisnis anak perusahaan PTP yang fokus ke non peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya dianggarkan mengambil alih pengoperasian pelayanan peti kemas di dermaga konvensional di semua terminal Tanjung Priok (MAL,DHU,ADP,PNP,TSJ). Selain itu tidak tercapainya peti kemas di terminal konvensional juga dipengaruhi oleh beralihnya handling kegiatan bongkar muat peti kemas dari terminal *multipurpose* yang terdapat di Pelabuhan Pontianak dan Tanjung Priok ke terminal peti kemas dan tidak tercapainya kegiatan peti kemas di pelabuhan Bengkulu, Pangkal balam dan Tanjung Pandan.

The realization of terminal service production for container loading and unloading of ship operation in conventional terminal amounted to 893,054 boxes or decreased by 12.06%. compared to 2017's realization. This was mainly driven by changes in the scope of business of PTP subsidiary that focuses on non-containers in Tanjung Priok port which had previously been budgeted to take over the operation of conventional container services in all Tanjungpriok terminals (MAL, DHU, ADP, PNP, TSJ). In addition, the failure to achieve containers at conventional terminal was also affected by the shift in container loading/unloading activity handling from multipurpose terminal located in Pontianak and Tanjung Priok Port to container terminal and the failure to achieve container activities in Bengkulu, Pangkal Balam and Tanjung Pandan ports.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Realisasi produksi jasa Operasi Lapangan terealisasi sebesar 1.407.729 Box atau mengalami penurunan sebesar 35,79% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun 2017. Demikian juga dengan untuk Realisasi produksi penumpukan peti kemas di lapangan konvensional sebesar 1.994.587 Box-Hari atau 17,96% di bawah realisasi tahun 2017. Hal ini dipengaruhi menurunnya kegiatan Lo-Lo karena perubahan *scope* bisnis anak perusahaan PTP yang fokus ke non peti kemas serta karena pola operasi *Truck lossing* di pelabuhan Bengkulu dan Pangkal balam.

The realization of Field Operation services was at 1,407,729 Boxes or decreased by 35.79% compared to the realization in 2017. Likewise with the realization of conventional container stacking production of 1,994,587 boxes-day or decreased by 17.96% compared to the realization in 2017. This was influenced by a decline in Lo-Lo activities due to changes in the scope of business of PTP subsidiary that focuses on non-containers and the truck losing operation pattern in Bengkulu and Pangkal Balam ports.

Realisasi produksi jasa bongkar muat kendaraan di PT IKT, Tbk tahun 2018 terealisasi 417.174 unit atau naik 20.62%, hal ini dipengaruhi adanya Kenaikan arus bongkar kendaraan karena penambahan pelayanan penanganan kapal di Dermaga Ex. President, penanganan pelayanan kapal milik Roro Samudra Putra, penanganan kapal milik NYK SPIL Indonesia dan milik PT Duta Shipping Internasional. Demikian juga Realisasi produksi jasa Bongkar muat kendaraan di PT IKT, Tbk tahun 2018 terealisasi 103.890 unit seiring dengan Kenaikan arus bongkar alat berat disebabkan adanya penambahan pelayanan penanganan kapal yang rata-rata muatannya adalah *truck*.

In 2018, the vehicle loading/unloading production services in PT IKT, Tbk was realized at 417,174 units or an increase of 20.62%. This was caused by an increase in vehicle unloading due to additional handling services of ship at Ex. President dock, handling services of ship owned by Roro Samudra Putra, handling services of ship owned by NYK SPIL Indonesia and owned by PT. PT. Duta Shipping International. Likewise the realization of vehicle loading/unloading services production in PT IKT, Tbk for 2018 was realized at 103,890 units, in line with an increase in heavy equipment loading and unloading due to additional ship handling services whose average load was trucks.

PENDAPATAN PELAYANAN JASA TERMINAL

Pendapatan pelayanan jasa terminal tahun 2018 sebesar Rp3,24 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp394,95 miliar atau 13,87% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,85 triliun. Hal ini disebabkan sebagai berikut:

TERMINAL SERVICES REVENUE

Terminal services revenue in 2018 amounted to Rp3.24 trillion an increase of Rp394.95 billion or 13.87% compared to Rp2.85 trillion in 2017. This was due to:

1. Pelabuhan Cabang Tanjung Priok adanya kenaikan pendapatan atas transaksi di *Container Freight Station (CFS) Center*.
2. Pelabuhan Cabang Panjang melayani peningkatan permintaan komoditas *Fatty Acid Methyl Ester (FAME/Bio Diesel)* untuk di supply ke PT Pertamina Panjang, pupuk curah subsidi (PT Petrokimia dan PT Pupuk Sriwijaya) dan ekspor komoditas *molasses, Palm Oil* (Kelapa Sawit), *methanol*, batu bara dan clinker.

1. Tanjung Priok Port Branch increased revenue for transactions at the Container Freight Station (CFS) Center.
2. Panjang Port services increase in demand for commodities including Fatty Acid Methyl Ester (FAME / Bio Diesel) to be supplied to PT Pertamina Panjang, subsidized bulk fertilizer (PT Petrochemical and PT Pupuk Sriwijaya) and commodity exports of molasses, Palm Oil, Methanol, coal and clinker.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Terminal

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan Revenue	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services Revenue	3.242.900.495	2.847.950.697	394.949.798	13,87%

Tabel of Terminal Services Revenue

(in thousands of Rupiah)

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

PROFITABILITAS PELAYANAN JASA TERMINAL

Profitabilitas pelayanan jasa terminal tahun 2018 sebesar Rp962,42 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp91,73 miliar atau 10,54% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp870,69 miliar. Peningkatan profitabilitas sejalan dengan peningkatan pendapatan pelayanan jasa terminal.

TERMINAL SERVICES PROFITABILITY

The terminal services profitability in 2018 amounted to Rp962.42 billion an increase of Rp91.73 billion or 10.54% compared to Rp870.69 billion in 2017. The increased profitability was in line with the increase in terminal service revenues.

Tabel Profitabilitas Pelayanan Jasa Terminal

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services Profitability	962.417.229	870.685.710	91.731.519	10,54%

Tabel of Terminal Services Profitability

(in thousands of Rupiah)

PENGUSAHAAN ALAT

PENJELASAN PENGUSAHAAN ALAT

Jasa yang diberikan, berupa persewaan *forklift*, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, *motor boat* dan alat pemadam kebakaran.

EQUIPMENT BUSINESS

EXPLANATION EQUIPMENT BUSINESS

Services provided are rental of forklifts, cranes (land, floating, and electrical), tugboats, motorboats, and fire extinguishers.

PRODUKTIVITAS PENGUSAHAAN ALAT

Realisasi sampai dengan periode tahun 2018 untuk produksi perusahaan alat di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

PRODUCTIVITY OF EQUIPMENT BUSINESS SEGMENT

The realization until the 2018 period for equipment business production in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Tabel Produksi Perusahaan Alat

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pengusahaan Alat-alat Equipment Business	Jam / Hour	290.565	801.449	(63,75%)
	Ton	7.416.680	8.542.697	(13,18)

Table of Equipment Business Production

Realisasi produksi perusahaan alat dalam satuan jam tahun 2018 sebesar 290.565 Jam atau 63,75% seiring dan dalam satuan Ton terealisasi sebesar 7.416.680 Ton atau 13,18% di bawah realisasi Tahun 2017 sebesar 8,542,697 Ton hal ini dipengaruhi penurunan sewa alat untuk GLC di Banten dan Panjang akibat penurunan kunjungan kapal, dan perubahan kepemilikan aset alat bongkar muat serta perubahan skema kerja sama antara cabang dengan Anak perusahaan dan dengan beberapa mitra Bongkar muat yang sebelumnya berupa penyewaan alat menjadi pola *sharing* pendapatan.

In 2018, the equipment business production in hour unit was realized at 290,565 hours or 63.75% and in ton unit was realized at 7,416,680 tons or 13.18% lower than the realization in 2017 of 8.542,697 tons. This was affected by a decrease in equipment rental for GLC in Banten and Panjang due to a decrease in ship calls, and changes in ownership of loading and unloading assets and changes in the scheme of cooperation between branches and subsidiaries and with several loading/unloading partners from previously equipment rental to profit sharing pattern.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

PENDAPATAN PENGUSAHAAN ALAT

Pendapatan perusahaan alat tahun 2018 sebesar Rp98,59 miliar mengalami penurunan sebesar Rp69,90 miliar atau 41,49% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp168,49 miliar. Hal ini disebabkan penurunan pendapatan jasa sewa alat GLC milik PT MTI kepada Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang) dan Cakung.

Tabel Pendapatan Perusahaan Alat

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan Revenue	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pengusahaan Alat Equipment Business Revenue	98.587.873	168.490.895	(69.903.022)	(41,49%)

PROFITABILITAS PENGUSAHAAN ALAT

Profitabilitas perusahaan alat tahun 2018 sebesar Rp29,26 miliar mengalami penurunan sebesar Rp22,25 miliar atau 43,20% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp870,69 miliar. Peningkatan profitabilitas sejalan dengan kenaikan pendapatan perusahaan alat.

Tabel Profitabilitas Perusahaan Alat

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pengusahaan Alat Equipment Business Profitability	29.258.581	51.511.641	(22.253.060)	(43,20%)

TERMINAL PETI KEMAS

PENJELASAN TERMINAL PETI KEMAS

Merupakan terminal pengumpulan peti kemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan.

PRODUKTIVITAS SEGMENT USAHA TERMINAL PETI KEMAS

Realisasi sampai dengan periode tahun 2018 untuk produksi pelayanan jasa terminal peti kemas di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Produksi Pelayanan Terminal Peti Kemas

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Operasi Kapal Ship Operation	Box	2.161.922	1.671.742	22,67

EQUIPMENT BUSINESS REVENUE

The equipment business revenue in 2018 amounted to Rp98.59 billion a decrease of Rp69.90 billion or 41.49% compared to Rp168.49 billion in 2017. This was due to a decrease in revenue from rental services of GLC equipment owned by PT MTI to the Tanjung Mas (Semarang) and Cakung Ports.

Table of Equipment Business Revenue

(in thousands of Rupiah)

EQUIPMENT BUSINESS PROFITABILITY

The equipment business profitability in 2018 amounted to Rp29.26 billion, a decrease of Rp22.25 billion or 43.20% compared to Rp870.69 billion in 2017. The decreased profitability was due.

Table of Equipment Business Profitability

(in thousands of Rupiah)

CONTAINER TERMINAL SERVICES

EXPLANATION CONTAINER TERMINAL SERVICES

Container collection terminal to facilitate transport to destination.

PRODUCTIVITY OF CONTAINER TERMINAL SERVICES SEGMENT

The realization up to 2018 for Container Terminal Services in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Table of Container Terminal Services Production

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
	Unit	10.645	15.187	(29,91)
Operasi Lapangan <i>Field Operation</i>	Box	1.432.719	1.162.978	23,19
	Box-Shif	80.322	45.835	75,24
CFS	Ton	-	331	-
	m ³	-	-	-
	Ton-Hari <i>Ton-Day</i>	-	620	-
	m ³ -Hari <i>m³-Day</i>	-	473	-
	Box	-	-	-
Penumpukan <i>Stacking</i>	Box-Hari <i>Box-Day</i>	2.349.009	1.359.401	72,80
	Unit Hari <i>Unit-Day</i>	-	-	-
<i>Lift On/Lift Off</i>	Box	87.280	219.010	(60,15)
<i>Stripping/Stuffing</i>	Box	-	-	-
<i>Trucking/Share Handling Container</i>	Box	-	-	-

*)Termasuk operasi kapal KSO TPK Koja

*) Including the operation of the TPK Koja KSO ship

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk bongkar muat peti kemas Operasi Kapal di terminal Peti kemas tahun 2018 sebesar 2.161.922 box atau 22,67% naik dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 1.671.742 box. Hal ini di pengaruhi meningkatnya kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor terutama komoditi hasil perkebunan di pelabuhan Pontianak dan Palembang, meningkatnya jumlah *transshipment* di Tanjung priok serta meningkatnya kegiatan Bongkar muat peti kemas domestik komoditi kebutuhan barang proyek dan konsumsi menjelang akhir tahun di Teluk Bayur.

In 2018, the realization of container terminal services production for container loading and unloading of Ship Operations was 2.161.922 boxes or rose by 22,67% compared to the realization in 2017 of 1.671.742 boxes. This was influenced by an increase in export container loading and unloading activities, especially plantation commodities in Pontianak and Palembang ports, an increase in number of transshipment at Tanjung Priok and an increase in domestic container loading/unloading activities for project goods and consumption commodities at the end of the year in Teluk Bayur.

Realisasi produksi jasa operasi Lapangan tahun 2018 terealisasi sebesar 1.407.729 Box atau mengalami tren positif naik 23.19% di bandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 1,162,978 box seiring dengan meningkatnya kegiatan *Lo-Lo /receiving dan delivery* akibat dari kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor komoditi hasil perkebunan di pelabuhan Pontianak dan Palembang, meningkatnya jumlah *transshipment* di Tanjung priok serta meningkatnya kegiatan Bongkar muat peti kemas domestik komoditi kebutuhan barang proyek dan konsumsi menjelang akhir tahun di Teluk Bayur.

In 2018, the field operations services production was realized at 1,407,729 boxes or experienced a positive upward trend of 23.19% compared to the realization in 2017 of 1,162,978 boxes, along with an increase in receiving and delivery activities as a result of export container loading and unloading of plantation commodities in Pontianak and Palembang ports, increasing number of transshipment in Tanjung priok and increasing domestic container loading/unloading activities for project goods and consumption commodities at the end of the year in Teluk Bayur.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Realisasi produksi penumpukan peti kemas tahun 2018 sebesar 2.349.009 box meningkat sebesar 72,80% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 1,359,401 box hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dari kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor komoditi hasil perkebunan di pelabuhan Pontianak dan Palembang, meningkatnya jumlah *transshipment* di Tanjung priok serta meningkatnya kegiatan Bongkar muat peti kemas domestik komoditi kebutuhan barang proyek dan konsumsi menjelang akhir tahun di Teluk Bayur.

PENDAPATAN TERMINAL PETI KEMAS

Pendapatan terminal peti kemas tahun 2018 sebesar Rp2,71 triliun mengalami penurunan sebesar Rp140,84 miliar atau 4,95% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,85 triliun. Hal ini disebabkan di tahun 2018 sudah tidak ada lagi limpahan pengoperasian dermaga sepanjang 300 m milik PT JICT kepada KSO Koja.

Tabel Pendapatan Terminal Peti kemas

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan <i>Growth</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Revenue</i>	
Terminal Peti kemas Container Terminal Revenue	2.706.288.702	2.847.131.118	(140.842.416)	(4,95%)

PROFITABILITAS TERMINAL PETI KEMAS

Profitabilitas terminal peti kemas tahun 2018 sebesar Rp803,16 miliar mengalami penurunan sebesar Rp67,27 miliar atau 7,73% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp870,44 miliar. Penurunan profitabilitas sejalan dengan penurunan pendapatan terminal peti kemas .

Tabel Profitabilitas Terminal Peti kemas

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas <i>Profitability</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
Terminal Peti kemas Container Terminal Profitability	803.163.365	870.435.145	(67.271.780)	(7,73%)

SEGMENT OPERASI JASA LAINNYA

Segment Operasi Jasa Lainnya meliputi Perusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik, Fasilitas Rupa-Rupa.

The realization of container stacking production in 2018 amounted to 2,349,009 boxes or increased by 72.80% compared to the realization in 2017 of 1,359,401 boxes-day. This was driven by the increasing number of export container loading and unloading activities of plantation commodities in Pontianak and Palembang ports, increasing number of transshipment at Tanjung Priok and increasing domestic container loading/unloading activities for project goods and consumption commodities at the end of the year in Teluk Bayur.

CONTAINER TERMINAL REVENUE

The container terminal revenue in 2018 amounted to Rp2.71 trillion, a decrease of Rp140.84 billion or 4.95% compared to Rp2.85 trillion in 2017. This was due to the fact that in 2018 there was no more runoff of the 300 m long pier owned by PT JICT to KSO Koja.

Container Terminal Revenue

(in thousands of Rupiah)

CONTAINER TERMINAL PROFITABILITY

The container terminal profitability in 2018 amounted to Rp803.16 billion, a decrease of Rp67.27 billion or 7.73% compared to Rp870.44 billion in 2017. The decline in profitability was in line with the decline in container terminal revenues.

Tabel of Container Terminal Profitability

(in thousands of Rupiah)

OTHER SERVICES SEGMENT

Other services segment includes Land, Building, Water, and Electricity Business, and Miscellaneous Facility

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

PENJELASAN PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

Merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

PRODUKTIVITAS SEGMENT USAHA PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

Realisasi sampai dengan Tahun 2018 untuk produksi perusahaan TBAL di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pengusahaan TBAL

Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
Persewaan Tanah <i>Land Lease</i>		4.427.323	3.719.084	19,04
Persewaan Bangunan <i>Building Lease</i>		98.509	10.122	873,18
Pengusahaan Air <i>Water Business</i>				
Air perkantoran <i>Office Water</i>	Ton	204.546	511.686	(60,03)
Air kapal <i>Ship Water</i>	Ton	520.216	266.275	195,37
Pengusahaan Listrik <i>Electricity Business</i>	kWh	88.172.554	83.412.114	5,71

Persewaan Tanah dan Perairan

Realisasi produksi Persewaan Tanah tahun 2018 sebesar 4.427.323 atau mengalami tren positif naik 19,04% dibandingkan realisasi persewaan tanah di tahun 2017. Hal ini dipengaruhi terealisasinya beberapa kontrak kerjasama pemanfaatan lahan untuk penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Bengkulu, Jambi dan sunda kelapa.

Persewaan Bangunan

Realisasi produksi Persewaan Bangunan sebesar 98.509 di atas realisasi tahun 2017 hal ini dipengaruhi terealisasinya kontrak bangunan untuk kebutuhan komersial di Cabang Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Banten, Pontianak, Cirebon dan Tanjung Pandan.

LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY BUSINESS (TBAL)

EXPLANATION OF LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY (TBAL)

Leasing of land, building, clean water, as well as electricity services.

PRODUCTIVITY OF LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY BUSINESS (TBAL) SEGMENT

The realization up to 2018 for TBAL business production in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Table of TBAL Business

Land Lease and Water

The realization of Land Lease production in 2018 amounted to 4,427,323 or experienced a positive upward trend of 19.04% compared to the realization of land lease in 2017. This was driven by the realization of several land use cooperation contracts for stacking at Tanjung Priok, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Bengkulu, Jambi and Sunda Kelapa Ports.

Building Lease

The Building Lease production was realized at 98,509 or above the realization in 2017, due to the realization of building contracts for commercial needs in Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Banten, Pontianak, Cirebon and Tanjung Pandan branches.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Pengusahaan Air

Realisasi produksi Pengusahaan Air perkantoran tahun 2018 sebesar 204.546 ton atau 39,97% dari capaian tahun 2017 yang dipengaruhi oleh tidak berproduksiya pengusahaan air seiring dengan gangguan distribusi *supply air* di PDAM Cirebon

Realisasi produksi Pengusahaan Air Kapal tahun 2018 sebesar 520.216 dan tidak tercapainya permintaan air di pelabuhan Banten, meningkatnya permintaan air kapal Tugboat di Pelabuhan Palembang, Pontianak dan Jambi. Demikian juga jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mengalami tren positif.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi Pengusahaan listrik cabang dan PT EPII sebesar 88.172.554 KWH atau 6,86% di atas realisasi sebesar 82.508.383 KWH sebagaimana terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang dan Pontianak yang dipengaruhi oleh telah terealisasinya pekerjaan elektrifikasi Alat Bongkar muat di beberapa cabang dan kebutuhan *reefer* di terminal peti kemas pelabuhan Palembang, Pontianak dan Panjang.

PENDAPATAN PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

Pendapatan pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik tahun 2018 sebesar Rp2,87 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp331,85 miliar atau 13,06% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,54 triliun. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan listrik *reefer* sejalan dengan pemakaian listrik di beberapa terminal peti kemas dan akibat penerimaan *rental fee* dari PT JICT, KSO TPK Koja dan PT NPCT 1.

Tabel Pendapatan TBAL

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan Revenue	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Pengusahaan TBAL TBAL Revenue	2.873.048.549	2.541.196.283	331.852.266	13,06%

PROFITABILITAS PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

Profitabilitas TBAL tahun 2018 sebesar Rp852,66 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp75,76 miliar atau 9,75% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp776,90 miliar. Peningkatan profitabilitas sejalan dengan kenaikan pendapatan TBAL.

Water Business

The realization of Office Water production in 2018 amounted to 204,546 tons or 39.97% of the 2017 achievement, affected by the un-production of water business along with the disruption of water supply distribution from Cirebon PDAM (Local Water Company)

The realization of Ship Water business production in 2018 amounted to 520,216, did not achieve the water demand in Banten port, the increase of water demand of Tugboat vessels in Palembang, Pontianak and Jambi Ports. Likewise when compared to the previous year's realization which experienced a positive trend.

Electricity Business

The realization of electricity business production of branches and PT EPII amounted to 88,172,554 KWH or 6.86% higher than the realization of 82,508,383 KWH as occurred in Tanjung Priok, Panjang, Palembang and Pontianak Port Branches, which were affected by the realization of electrification work of loading/unloading tool in several branches and reffer needs at container terminal of Palembang, Pontianak and Panjang Ports.

LAND, BUILDING, WATER AND ELECTRICITY (TBAL) BUSINESS REVENUE

The land, building, water and electricity revenue in 2018 amounted to Rp2.87 trillion, an increase of Rp331.85 billion or 13.06% compared to Rp2.54 trillion in 2017. This was due to an increase in reefer electricity revenue in line with electricity usage in some container terminals and due to receipt of rental fees from PT JICT, KSO TPK Koja and PT NPCT 1.

Tabel of TBAL Revenue

(in thousands of Rupiah)

LAND, BUILDING, WATER AND ELECTRICITY (TBAL) BUSINESS PROFITABILITY

TBAL profitability in 2018 amounted to Rp852.66 billion, an increase of Rp75.76 billion or 9.75% compared to Rp776.90 billion in 2017. The increased profitability was in line with the increase in TBAL revenue.

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Profitabilitas TBAL

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas <i>Profitability</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>
Pengusahaan TBAL TBAL Profitability	852.661.021	776.903.649	75.757.372 9,75%

Tabel of TBAL Profitability

(in thousands of Rupiah)

FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

PENJELASAN FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Jasa rupa-rupa ini, antara lain termasuk jasa angkutan, jasa konsultan dan *surveyor* pelabuhan, jasa kesehatan, dan lain-lain.

PRODUKTIVITAS SEGMENT USAHA FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Realisasi tahun 2018 untuk produksi fasilitas rupa-rupa usaha di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Fasilitas Rupa-Rupa Usaha

Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
FASILITAS RUPA-RUPA USAHA <i>MISCELLANEOUS FACILITY</i>				
Pas Pelabuhan Port Entry	Lembar Piece	13.672.540	12.976.477	5,36
Kontribusi Mekanis/Alat Mechanical/Equipment Contribution	Lumpsum	19.563	15.111	29,46
Jasa Kebersihan Cleaning Service	Lembar Piece	10.546.306	14.816.473	(28,82)
Retribusi Retribution	Ton	10.553	12.403	17,53
Lainnya Others	Orang People	3.500.576	8.885.782	(60,60)

Catatan:

Pencatatan produksi untuk fasilitas rupa-rupa usaha pada tabel di atas merupakan rupa-rupa usaha dari Cabang Pelabuhan.

Tabel of Miscellaneous Facility

MISCELLANEOUS FACILITY

EXPLANATION MISCELLANEOUS FACILITY

Miscellaneous services include, among others, transportation services, consultant services and port surveyors, health services, and others.

PRODUCTIVITY OF MISCELLANEOUS FACILITY SEGMENT

The 2018 realization for Miscellaneous Facility production in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Note:

The recording for miscellaneous facility in the above table is miscellaneous business of Port Branches.

Pas Pelabuhan

Realisasi produksi Pas Pelabuhan sebesar 13.672.540 lembar atau 5,36% di atas realisasi tahun 2017 sebesar 12.976.477 lembar, hal ini dipengaruhi meningkatnya pas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Pontianak, Teluk bayur, Palembang selain itu juga di pengaruhi meningkatnya pas orang seiring dengan penerapan *pass gate system* dan adanya program mudik bareng lebaran.

Port Entry

The realization of Port Entry production amounted to 13,672,540 pieces or 5.36% higher than the 2017's realization of 12,976,477 pieces. This was caused by an increase in loading/unloading pass at Tanjung Priok, Pontianak, Teluk bayur, Palembang ports, and was also caused by an increase in passenger pass along with the application of gate system and the Eid Al-Fitr joint homecoming program.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

PENDAPATAN FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha tahun 2018 sebesar Rp948,12 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp24,53 miliar atau 2,66% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp923,57 miliar. Hal ini dikarenakan pada periode yang sama tahun 2017, pendapatan usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) hanya terdiri dari pendapatan sewa 450 m selama setahun dan pendapatan sewa atas 850 m hanya selama 9 (sembilan) bulan yang beroperasi per tanggal 16 Maret 2017, selain itu untuk pendapatan *project management fee* atas proyek Kijing yang baru terealisasi selama 2 (dua) bulan yaitu November sampai dengan Desember 2017. Sedangkan pada realisasi pendapatan usaha sampai dengan tahun 2018 terdiri dari pendapatan sewa 450 m dan 850 m dermaga CT1 serta pendapatan *project management fee* atas proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk bulan November sampai dengan Desember 2018 sedang dilakukan pembahasan kontrak payung jangka panjang untuk pembangunan proyek kijing.

Tabel Pendapatan Rupa-Rupa Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan Revenue	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Business Revenue	948.118.308	923.567.329	24.550.979	2,66%

PROFITABILITAS FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Profitabilitas fasilitas rupa-rupa usaha tahun 2018 sebesar Rp281,37 miliar mengalami penurunan sebesar Rp984,14 juta atau 0,35% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp281,37 miliar.

Tabel Profitabilitas Rupa-Rupa Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Facilities Business Profitability	281.372.177	282.356.319	(984.142)	(0,35%)

MISCELLANEOUS FACILITIES BUSINESS REVENUE

The miscellaneous facilities business revenue in 2018 amounted to Rp948.12 billion, an increase of Rp24.53 billion or 2.66% compared to Rp923.57 billion in 2017. This was due to the fact that in the same period of 2017, the operating income of PT Pelabuhan Pelabuhan Indonesia (PPI) consisted of only 450 m rental income for a year and rental income of 850 m for only 9 (nine) months operating as of March 16, 2017, plus the project management fee income for the Kijing project was only realized for 2 (two) months, namely November to December 2017. Whereas the business revenue in 2018 consisted of rental income for 450 m and 850 m dock CT1, and project management revenue fees for the Kijing Port construction project for 10 (ten) months, and for November to December 2018 discussions on long-term umbrella contracts for the construction of the Kijing project.

Tabel of Miscellaneous Facilities Business Revenue

(in thousands Rupiah)

MISCELLANEOUS FACILITIES BUSINESS PROFITABILITY

The miscellaneous facilities business profitability in 2018 amounted to Rp281.37 billion, a decrease of Rp984.14 million or 0.35% compared to Rp281.37 billion in 2017.

Tabel of Miscellaneous Facilities Business Profitability

(in thousands Rupiah)

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

SEGMENT USAHA – GEOGRAFIS

TANJUNG PRIOK

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS TANJUNG PRIOK

Cabang Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di pesisir Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada akhir abad ke-19. Ketika itu Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun pelabuhan baru karena pelabuhan yang ada yakni Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu menerima kapal-kapal besar yang datang dari berbagai belahan dunia.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal penumpang, barang domestik dan mancanegara. Fasilitas intermoda yang lengkap di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu mendistribusikan logistik ke seluruh kota di Indonesia. Letaknya yang strategis dengan *hinterland* yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadikan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa.

Tingginya aktivitas bongkar muat tersebut didukung oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan bongkar muat yang dimiliki Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan dukungan teknologi dan fasilitas modern, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir dengan kapasitas di atas 4.000 TEUs, yang langsung datang dari dan menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional.

GEOGRAPHICAL BUSINESS SEGMENT

TANJUNG PRIOK

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT TANJUNG PRIOK

Tanjung Priok Port Branch is the largest and busiest port in Indonesia, located on the coast of North Jakarta. This port serves as the gateway flow of import-export goods and goods between islands. Tanjung Priok Port was built in the late 19th century when the Dutch colonial government decided to build a new port since the existing Sunda Kelapa port was not capable of receiving large ships coming from different parts of the world.

Currently, Tanjung Priok Port serves passenger ships, domestic and foreign goods. Complete intermode facilities at Tanjung Priok Port are capable of distributing logistics to all cities in Indonesia. The strategic location with a hinterland that is the area with trade and industry activities, making Tanjung Priok Port as the main port on the island of Java.

The high activity of loading and unloading is supported by complete facilities and loading and unloading equipment owned by Tanjung Priok Port. With the support of technology and modern amenities, Tanjung Priok is able to serve ships of the latest generation with a capacity of 4,000 TEUs, which is directly coming from and going to various international trading centers.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta

Table of Facilities of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	17.350 m

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Lebar Width	30 s/d 350 m
	Kedalaman Depth	-7.0 s/d -16.0 m.LWS
2	BREAKWATER	
	Panjang Length	3.808 m
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	1.033.749 m ²
	Kedalaman Depth	-4.0 s.d -16 m.LW
4	DERMAGA BERTH	
	Kapal Niaga Commercial Ship	12.168 m
	Kapal Non Niaga Non Commercial Ship	4.548 m
	Kedalaman Depth	-4.0 s.d -16 m.LWS
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	6 Unit
	Luas Total Total Area	40.357 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Lini I (TO I) Line I Field Area (TO I)	190.601 m ²
	Luas Lapangan Lini I (TO II) Line I Field Area (TO II)	240.025 m ²
	Luas Lapangan Lini I (TO III) Line I Field Area (TO III)	221.651 m ²
	Luas Lapangan Lini II Line II Field Area	263.046 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT DATA	TAHUN 2018 2018
Alat Bongkar Muat Loading and Unloading Equipment		
1	<i>Gantry Luffing Crane</i>	11
2	<i>Rubber Tyred Gantry Crane</i>	4
3	<i>Mobile Crane</i>	10
4	<i>Dump Truck</i>	2
Total		27
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda <i>Tugboat</i>	12
2	Motor Pandu <i>Pilotage</i>	4
3	Kapal Kepil	2
4	Kapal Sampah <i>Waste Ship</i>	11
5	Tongkang <i>Barge</i>	4
Total		35

PRODUKTIVITAS TANJUNG PRIOK

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 4.851.146 box meningkat 9,68% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4.423.117 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 10,92% dari 6.079.762 TEUs di tahun 2017 menjadi 6.743.523 TEUs di tahun 2018.

TANJUNG PRIOK PRODUCTIVITY

The number containers in 2018 was 4,851,146 boxes, an increase of 9.68% compared to 4,423,117 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 10.92% from 6,079,762 TEUs in 2017 to 6,743,523 TEUs in 2018.

Tabel Produktivitas Tanjung Priok

Table of Tanjung Priok Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth		
1	Kapal Ship	Unit	15.284	14.470	814	5,63%	
		GT	160.558.455	141.808.185	18.750.270	13,22%	
2	<i>General Cargo</i>	Ton	6.641.100	5.523.390	1.117.710	20,24%	
		<i>Bag Cargo</i>	Ton	644.118	258.259	385.859	149,41%
		Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.575.394	1.871.980	703.414	37,58%
		Curah Kering Dry Bulk	Ton	8.038.889	7.079.437	959.453	13,55%
		Lain-Lain Others	Ton	4.245.360	4.254.029	(8.670)	(0,20%)
3	Peti kemas Containers	Box	4.851.146	4.423.117	428.029	9,68%	
		TEUs	6.743.523	6.079.762	663.761	10,92%	

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth
4	Penumpang Containers	Orang People	231.917	206.346	25.571 12,39%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Tanjung Priok

Tabel of Utilization of Tanjung Priok Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: <i>Docks:</i>				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	38,15	28,62	133,29%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	56,45	46,63	121,07%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: <i>Stacking Warehouse:</i>				
	SOR (Gudang Multipurpose)	%	15,51	19,59	79,21%
	SOR (Gudang CFS) SOR (Building CFS)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: <i>Stacking Field:</i>				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	43,95	35,18	124,91%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	38,12	37,13	102,68%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN TANJUNG PRIOK

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.753,28 miliar atau 15,09% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp1.523,44 miliar dan 2,51% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp1.709,31 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif pelayanan jasa tambat dan optimalisasi lahan untuk dikerjasamakan serta peningkatan pendapatan jasa terminal untuk kegiatan penyimpanan kontainer impor berstatus *Less Than Container Load (LCL)* di *Container Freight Station (CFS) Center* yang masih dalam pengawasan kepabeanan dengan tujuan memperlancar arus barang dan pengurusan dokumen pelabuhan.

REVENUES OF TANJUNG PRIOK

In 2018, the operating revenues was realized at Rp1,753.28 billion or 15.09% higher than the realization of 2017's operating revenues at Rp1,523.44 billion and 2.51% higher than the target of 2018 RKAP at Rp1,709.31 billion. This achievement was driven by an increase in the rate of berthing services and optimization of land for cooperation as well as increased revenue of terminal services for the storage of *Less Than Container Load (LCL)* containers in the *Container Freight Station (CFS) Center* which is still under customs supervision with the aim of streamlining goods flow and port documents administration.

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

PROFITABILITAS TANJUNG PRIOK

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp808,84 miliar atau 35,37% di atas realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp597,52 miliar dan realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 4,47% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp772,65 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh penerapan prinsip *cost effectiveness* terhadap komponen biaya bahan, biaya administrasi kantor dan biaya umum.

PANJANG

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS PANJANG

Pada abad ke-17, Pemerintah Hindia Belanda membangun Cabang Pelabuhan Panjang dengan dermaga sepanjang 200 meter, menggunakan konstruksi caisson dengan kedalaman -7 m.LWS beserta satu unit gudang seluas 1.000 . Pelabuhan Panjang kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar di Pulau Sumatera dan berperan sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung hingga saat ini.

Berada pada titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Cabang Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas area/ lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agrobisnis. Saat ini lingkup *hinterland* tersebut masih menunggu para investor untuk dikembangkan secara optimal.

Cabang Pelabuhan Panjang melayani kapal dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan peti kemas. Arus peti kemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu. Dengan tersedianya terminal peti kemas yang dilengkapi dengan 3 (tiga) *container crane*, 5 (lima) *transtainer*, dan *top loader* serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Cabang Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

PROFITABILITY OF TANJUNG PRIOK

The 2018 net income was realized at Rp808.84 billion or 35.37% higher than Rp597.52 billion in 2017, and the realization of net income in 2018 reaching 4.47% above the target of 2018 RKAP of Rp772.65 billion. This achievement was caused by the application of cost effectiveness principle to the components of material expenses, office administration expenses and general expenses.

PANJANG

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT PANJANG

In the 17th century, the Dutch Colonial Government built Panjang Port with 200-meter long pier, using the construction of caisson with a depth -7 m.LWS along with one unit warehouse with an area of 1,000 m². Panjang Port evolved into a major port on the island of Sumatera which serves as the lifeblood of economic growth in Lampung province until today.

Located at the transshipment node between the island of Sumatera and Java, Panjang Port Branch is a port that is highly prospective in the future. The area of the port land can still be developed for a variety of terminal development cooperation in order to serve the needs of users of port services. In addition, agricultural land and plantations that stretched in the province of Lampung is very fertile for agribusiness activities. Currently, the scope of the hinterland is still waiting for investors to be developed optimally.

Panjang Port serves ships with many kinds of goods, such as general merchandise, goods in bags, liquid bulk, dry bulk and containers. The flows of container continue to grow each year as the growth in industrial, mining and plantation activities in the region. With the availability of container terminal equipped with 3 (three) container cranes, 5 (five) transtainer, and top loader and supported by specialized bulk terminal that exist today, Panjang Port is ready to provide better service to service users.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung

Table of Facilities of Panjang Port Branch, Lampung

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	10.000 m
	Lebar Width	100 m
	Luas Total Area	1.000.000 m ²
	Kedalaman Depth	-10.0 s/d -14.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	51.042 m ²
	Kedalaman Depth	-4.0 s.d -16 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	1.644 m ²
	Kedalaman Depth	-6.0 s/d -13.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	15.560m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	11.536 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	75.000 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Panjang Port Branch, Lampung

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR
A. Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>		
1	Quay Container Crane	3
2	Gantry Luffing Crane	2
3	Gantry Jib Crane	4
4	Rubber Tyred Gantry Crane	5
5	Reach Stacker	1
6	Side Loader	1
7	Forklift Diesel	6
8	Terminal Tractor	15
9	Chassis	15
Total		52
B. Alat Apung <i>Floating Equipment</i>		
1	Kapal Tunda Tugboat	3
Total		3

PRODUKTIVITAS PANJANG

Kunjungan kapal luar negeri ke panjang mengalami kenaikan sebesar 3,78% dalam satuan GT dari 25.340.708 GT di tahun 2017 menjadi 26.299.472GT. Hal ini disebabkan *upsized* kapal peti kemas, kapal hewan dan kapal *Roll on Roll Off* (Roro).

Kenaikan arus barang terjadi pada jenis *general cargo* dengan jenis bongkar muat *plywood*, tiang pancang dan tiang listrik untuk pembangunan. Sedangkan untuk curah cair mengalami peningkatan pada komoditi *Crude Palm Oil* (CPO), biodiesel dan molasses (tetes tebu). Untuk curah kering juga mengalami peningkatan terutama komoditi *Palm Kernel Expeller* (PKE) dan batu bara, karet, lada dan kelapa.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 95.658 box menurun 6,61% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 102.434 box. TEUs peti kemas juga mengalami penurunan sebesar 2,57% dari 119.475 TEUs di tahun 2017 menjadi 116.407 TEUs di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan menurunnya komoditas unggulan seperti kopi.

PANJANG PRODUCTIVITY

Foreign ship visits to Panjang increased by 3.78% in GT unit terms from 25,340,708 GT in 2017 to 26,299,472 GT. This was due to *upsized* in container ships, livestock ships and *Roll on Roll Off* (Roro) ships

The increase in goods occurred in general cargo with the loading and unloading of *plywood*, piles and electricity poles for construction. Whereas for liquid bulk there was an increase in *Crude Palm Oil* (CPO), biodiesel and molasses. Dry bulk also experienced an increase, especially in *Palm Kernel Expeller* (PKE) and coal, rubber, pepper and coconut.

The number of containers in 2018 was 95,658 boxes, down 6.61% compared to 102,434 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also decreased by 2.57% from 119,475 TEUs in 2017 to 116,407 TEUs in 2018. This was due to the decline in leading commodities such as coffee.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Produktivitas Panjang

Tabel of Panjang Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	2.273	2.479	(206)	(8,31%)
		GT	26.299.472	25.340.708	958.764	3,78%
2	General Cargo	Ton	2.533.785	2.475.073	58.712	2,37%
	Bag Cargo	Ton	494.204	681.229	(187.025)	(27,45%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	1.711.443	1.619.300	92.143	5,69%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	4.322.474	4.110.232	212.242	5,16%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	
3	Peti kemas Containers	Box	95.658	102.434	(6.776)	(6,61%)
		TEUs	116.407	119.475	(3.068)	(2,57%)
4	Penumpang Passengers	Orang People	8.288	-	8.288	100,00%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Panjang

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Panjang

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	24,73	32,37	76,41%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	56,51	58,97	95,84%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	65,21	46,38	140,58%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	16,89	31,03	54,43%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	6,17	1,96	314,71%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN PANJANG

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp332,39 miliar atau 17,40% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp402,41 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh

REVENUES OF PANJANG

The operating revenues in 2018 was realized at Rp332.39 billion or 17.40% lower than the 2017's realization of Rp402.41 billion. This realization was influenced by the management

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

pengelolaan terminal peti kemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan entitas anak yaitu PT IPC Terminal Peti kemas. Sedangkan pendapat usaha tahun 2018 tercapai 13,63% dibawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp377,69 miliar seiring dengan pelaksanaan kerjasama pelayanan terminal non peti kemas dengan entitas anak yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir tahun 2018.

PROFITABILITAS PANJANG

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp84,89 miliar atau 8,73% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp93,01 miliar. Akan tetapi, realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 17,45% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp70,08 miliar. Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan perusahaan alat produksi utama yaitu *Jib Crane & Luffing Crane* serta penerapan prinsip *cost effectiveness* juga berdampak terhadap pencapaian laba bersih tahun 2018.

PALEMBANG

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS PALEMBANG

Cabang Pelabuhan Palembang atau dikenal sebagai Boom Baru dibangun Pemerintahan Kolonial Belanda menggantikan Pelabuhan Sungai Rendang pada tahun 1924. Pelabuhan ini terletak di antara dua muara anak sungai Musi, yaitu sungai Lawang Kidul dan sungai Belabak. Pada masa itu, Boom Baru memiliki dermaga dengan panjang sekitar 250 meter. Selain dermaga, di tempat ini juga terdapat Kantor atau Bea Cukai yang posisinya terapung.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Palembang menjadi pelabuhan sungai terbesar di wilayah Sumatera dan sekaligus merupakan tumpuan urat nadi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh barang curah kering dan peti kemas, di samping juga melayani barang dengan jenis kemasan lain. Cabang Pelabuhan Palembang memiliki sub-pelabuhan yang sangat potensial dan terbuka bagi kerjasama investasi, yaitu Pelabuhan Sungai Lais, didukung oleh areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditas di masa mendatang, pelabuhan ini telah memiliki terminal peti kemas yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

of container terminal starting from January 1, 2018 in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Peti kemas. However, the 2018 realization of operating revenues reached 13,63% the target of 2018 RKAP of Rp377.69 billion along with the increase in goods traffic in the form of PT Pacific Global Utama's coal cargo and the addition of new market share in the form of cement owned by PT Cemindo Gemilang, as well as the increase in main production equipment business, namely Jib Crane & Luffing Crane.

PROFITABILITY OF PANJANG

The 2018's net income was realized at Rp84.89 billion or 8.73% lower than the realization of 2017's net income of Rp93.01 billion. However, the realization of net income in 2018 was reaching 17.45% above the target of 2018 RKAP of Rp70.08 billion. Apart from being affected by an increase in operating revenues due to the increase in goods traffic, the application the cost effectiveness principle also has an impact on the achievement of net income in 2018.

PALEMBANG

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT PALEMBANG

Palembang Port Branch otherwise known as Boom Baru was built by the Dutch Colonial Government and replaced Sungai Rendang Port in 1924. The port is situated between two estuary tributaries of the Musi river, which is Lawang Kidul River and Belabak River. At that time, Boom Baru has a dock with a length of about 250 meters. In addition to the dock, in this place there was also a Office or Customs with floating position.

Today, Palembang Port is the largest river port in Sumatera and a foundation of the lifeblood of economic growth in the province of South Sumatera. Loading and unloading activities are dominated by dry bulk goods and containers, in addition to other forms of packaging. Palembang Port has a huge potential sub-port for cooperation and open investment, namely Sungai Lais port, supported by a wide area for the processing industry activities. In anticipation of the increased flow of commodities in the future, this port has had a container terminal equipped with a range of modern equipment that assist ships and goods service.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan

Table of Facilities of Palembang Port Branch, South Sumat

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	109.268 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -10.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	77100 m ²
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -7.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	1.275 m
	Panjang Length	1.275 m
	Kedalaman Depth	-5 s.d -7 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	7 Unit
	Luas Total Total Area	8.937 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	30.244 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	54.328 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Palembang Port Branch, South Sumatra

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>	
1	Quay Container Crane	2
2	Gantry Jib Crane	4
3	Rail Mounted Gantry Crane	4
4	Reach Stacker	4
5	Side Loader	3
6	Forklift Diesel	21
7	Head Truck	2
8	Road Truck	5
9	Terminal Trucktor	11
10	Chassis	25
	Total	81
B.	Alat Apung <i>Floating Equipment</i>	
1	Kapal Tunda Tugboat	3
2	Motor Pandu Pilotage	2
3	Tongkang Barge	2
	Total	7

PRODUKTIVITAS PALEMBANG

Kunjungan kapal luar negeri ke Palembang mengalami kenaikan sebesar 5,03% dalam satuan GT dari 3.779.517 GT di tahun 2017 menjadi 3.969.674 GT. Hal ini disebabkan *upsized* kapal Curah Cair dan Curah Kering.

Kenaikan arus barang terjadi pada jenis bag cargo dengan jenis bongkar muat pupuk, semen dan garam, sedangkan untuk curah cair mengalami peningkatan pada komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) dan aspal curah. Untuk curah kering juga mengalami peningkatan terutama komoditi *Palm Kernel Expeller* (PKE) dan pupuk curah.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 154.710 box menurun 2,24% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 158.251 box. Dalam satuan TEUs arus peti kemas juga mengalami penurunan sebesar 0,70% dari 172.799 TEUs di tahun 2017 menjadi 171.594 TEUs di tahun 2018.

PALEMBANG PRODUCTIVITY

Visits of foreign ships to Palembang increased by 5.03% in GT unit terms from 3,779,517 GT in 2017 to 3,969,674 GT. This was due to the *upsized* in Liquid Bulk and Dry Bulk vessels.

The increase in goods occurred in bag cargo with the loading and unloading of fertilizers, cement and salt, while for liquid bulk there was an increase in Crude Palm Oil (CPO) and bulk asphalt. Dry bulk also experienced an increase, especially for Palm Kernel Expeller (PKE) and bulk fertilizer.

The number of containers in 2018 was 154,710 boxes, a decrease of 2.24% compared to 158,251 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also decreased by 0.70% from 172,799 TEUs in 2017 to 171,594 TEUs in 2018.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Produktivitas Palembang **Tabel of Palembang Productivity**

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	1.723	1.870	(147)	(7,86%)
		GT	3.969.674	3.779.517	190.157	5,03%
2	General Kargo General Cargo	Ton	183.266	354.540	(171.274)	(48,31%)
	Bag Cargo Bag Cargo	Ton	470.815	366.612	104.203	28,42%
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	1.068.425	947.715	120.710	12,74%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	253.835	171.004	82.831	48,44%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
	3	Peti kemas Containers	Box	154.710	158.251	(3.541)
		TEUs	171.594	172.799	(1.205)	(0,70%)
4	Penumpang Passengers	Orang People	67.175	67.124	51	0,08%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Palembang **Utilization of Palembang Facilities and Equipmen**

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	53,14	50,78	104,65%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	58,50	63,26	92,48%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	20,07	21,51	93,34%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	48,87	54,15	90,25%

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	35,21	47,07	74,79%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN PALEMBANG

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp283,45 miliar atau 30,43% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp407,44 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal peti kemas pada awal tahun 2018 dikerjasamakan dengan entitas anak yaitu PT IPC Terminal Peti kemas. Sedangkan, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai 8,42% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp307,33 miliar seiring dengan penurunan pelayanan jasa terminal dan jasa barang untuk kebutuhan konstruksi dan perlengkapan kegiatan Asian Games tahun 2018 di Palembang.

PROFITABILITAS PALEMBANG

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp72,53 miliar atau 30,25% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp103,97 miliar. Akan tetapi, realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 4,81% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp76,01 miliar. Selain dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha khususnya peningkatan pelayanan jasa kapal, penerapan prinsip *cost effectiveness* terhadap komponen biaya juga berdampak terhadap pencapaian laba bersih tahun 2018.

PONTIANAK

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS PONTIANAK

Saat Singapura diberlakukan sebagai pelabuhan bebas internasional 1819, Pontianak menjadi poros terdepan Hindia Belanda dalam menarik sebagian perdagangan luar negeri. Pada 1834 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Pontianak dan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Cabang Pelabuhan Pontianak berada di tepi sungai Kapuas yang menghubungkan area seluas 146,8 ribu km di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini menjadi urat nadi perekonomian wilayah Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang dan Singkawang.

Cabang Pelabuhan Pontianak memiliki terminal peti kemas, dilengkapi dengan berbagai peralatan modern guna mendukung kegiatan bongkar muat secara optimal. Keberadaan sub-pelabuhan di sekitarnya, makin memperkuat posisi Cabang Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat.

VENUES OF PALEMBANG

Operating income in 2018 amounted to Rp283.45 billion, a 30.43% decrease compared to Rp407.44 billion in 2017. This was influenced by the management of container terminals starting January 1, 2018 in cooperation with subsidiary PT IPC Terminal Petikemas. Operating income in 2018 was 8.42% below the Rp307.33 billion target in the 2018 RKAP following the decline in terminal services and goods services for the 2018 Asian Games construction and equipment needs in Palembang.

PROFITABILITY OF PALEMBANG

The 2018's net income was realized at Rp72.53 billion or 30,25% lower than the realization of 2017's net income of Rp103,97 billion. However, the realization of net income in 2018 reached 4.81% above the target of 2018 RKAP of Rp76.01 billion. In addition to being influenced by an increase in operating revenues, especially the increase in ship service, the application of cost effectiveness principle to the cost component also has an impact on achieving the net income in 2018.

PONTIANAK

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT PALEMBANG

When Singapore was enacted as an international free port in 1819, Pontianak became a leading of the Dutch East Indies in attracting most foreign trade. In 1834, the Dutch government made Pontianak and Sambas as a free port. Pontianak Port Branch located on the edge of Kapuas river that connects an area of 146.8 thousand km in the province of West Kalimantan. This port is the artery of the region's economy of Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau Kapuas Hulu, Telok Air, Ketapang and Singkawang.

Pontianak Port has a container terminal, equipped with various modern equipment to support optimal loading and unloading activities. The presence of sub-port in the vicinity, further strengthened the position of Pontianak Port as the main port in West Kalimantan.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat

Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
PONTIANAK DAN KAWASAN PONTIANAK AND ESTATE		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	90.000 m
	Lebar Width	60 s/d 80 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -9.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	34.104 m ²
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -6.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	1.481 m
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -6.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	6 Unit
	Luas Total Total Area	4.251 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	20.859 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	73.906 m ²
PONTIANAK		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	31.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	- 3.5 s.d -6.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	34.104 m ²
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -6.0 m.LWS

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	812 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -6.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.750 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	17.664 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	47.794 m ²
KETAPANG		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	13.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -6.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -6.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	206 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -4.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	600 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	1.095 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
NIPAH KUNING		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	24.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	-4,5 s.d -9.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	140 m
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	26.112 m ²
PEMANGKAT		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-2.0 m.LWS

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	36 m
	Kedalaman Depth	-2,0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	611 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
SAMBAS		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	39 m
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
SINGKAWANG		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-2.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	70 m
	Kedalaman Depth	-2.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	480 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
SINTETE		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	22.000 m
	Lebar Width	80 m
	Kedalaman Depth	-2,5 s.d -8.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	140 m
	Kedalaman Depth	-3 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	2 Unit
	Luas Total Total Area	810 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	900 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
TELOK AIR		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	38 m
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>	
1	Quay Container Crane	3
2	Gantry Jib Crane	2
3	Rail Mounted Gantry Crane	8
4	Reach Stacker	4
5	Side Loader	3
6	Forklift Diesel	4
7	Head Truck	6
8	Road Truck	5
9	Terminal Tractor	13
10	Tronton	4
11	Chassis	21
Total		71
B	Alat Apung <i>Floating Equipment</i>	
1	Kapal Tunda <i>Tugboat</i>	2
2	Motor Pandu <i>Pilotage</i>	4
Total		6

PRODUKTIVITAS PONTIANAK

Kunjungan Kapal mengalami kenaikan dalam satuan unit dan GT masing-masing sebesar 0,99% dan 16,26%. Kenaikan tersebut karenapeningkatan pada pelayaran perintis dan pelayaran luar negeri yang membawa komoditi Bungkil dari Pontianak ke Vietnam. Arus barang *general cargo* juga mengalami peningkatan sebesar 24,95% atau sebesar 282.040 ton. Kenaikan arus barang pada kemasan general kargo dikarenakan meningkatnya bongkar muat komoditi beras, jagung, dan barang general kargo lainnya, sedangkan untuk muatan curah cair meningkat di pelabuhan Sintete untuk komoditi CPO.

PONTIANAK PRODUCTIVITY

Ship visits increased in unit and GT unit terms by 0.99% and 16.26% respectively. The increases were due to an increase in pioneer shipping and overseas shipping bringing palm oil from Pontianak to Vietnam. The flow of general cargo goods also increased by 24.95% or by 282,040 tons. The increase in goods occurred in general cargo packaging was due to the increase in loading and unloading of rice, corn, and other general cargo commodities, while liquid bulk cargo increased in Sintete port for CPO.

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 262.085 box meningkat 6,87% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 245.242 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 6,70% dari 278.642 TEUs di tahun 2017 menjadi 297.318 TEUs di tahun 2018, Hal ini terjadi dimana kapal icon yang semula diperkirakan tahun 2018 akan melakukan kegiatan bongkar muat di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) sedangkan realisasinya bongkar muat dilakukan Pelabuhan Pontianak.

The number of containers in 2018 was 262,085 boxes, an increase of 6.87% compared to 245,242 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 6.70% from 278,642 TEUs in 2017 to 297,318 TEUs in 2018. This happened as the icon ship which was originally due in 2018 to carry out loading and unloading activities at the DUKS (Own Dock) was loaded and unloaded was at the Pontianak Port.

Tabel Produktivitas Pontianak

Tabel of Pontianak Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	2.199	2.178	22	0,99%
		GT	5.760.994	4.955.202	805.792	16,26%
2	General Cargo	Ton	1.412.622	1.130.582	282.040	24,95%
	Bag Cargo	Ton	226.639	265.118	(38.479)	(14,51%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	125.141	72.777	52.364	71,95%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	709	-	709	100,00%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	262.085	245.242	16.843	6,87%
		TEUs	297.318	278.642	18.676	6,70%
4	Penumpang Passengers	Orang People	95.713	103.995	(8.282)	(7,96%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pontianak

Utilization of Pontianak Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	81,61	71,24	114,57%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	43,81	37,14	117,96%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	12,99	1,41	922,07%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	56,28	53,44	105,31%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	31,72	5,64	562,75%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN PONTIANAK

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp187,99 miliar atau 30,52% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp270,58 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal peti kemas pada awal tahun 2018 dikerjasamakan dengan anak perusahaan yaitu PT IPC Terminal Peti kemas. Sedangkan, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai 31,88% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp247,93 miliar seiring dengan pelaksanaan kerjasama pelayanan terminal non peti kemas dengan entitas anak yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir tahun 2018.

PROFITABILITAS PONTIANAK

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp15,85 miliar atau 59,37% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp39,02 miliar. Akan tetapi, realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 6,43% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp14,83 miliar. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh kesepakatan *business to business* dengan PT IPC Terminal Peti kemas untuk penggunaan alat dan fasilitas secara bersama-sama serta penerapan prinsip *cost effectiveness* sehingga peningkatan biaya tidak melebihi peningkatan pendapatan usaha.

TELUK BAYUR

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS TELUK BAYUR

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, sebelumnya bernama Emmahaven, dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893 di Kota Padang. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka

REVENUES OF PONTIANAK

Operating income in 2018 amounted to Rp187.99 billion, a 30.52% decrease compared to Rp270.58 billion in 2017. This was influenced by the management of container terminals starting January 1, 2018 in cooperation with subsidiary PT IPC Terminal Petikemas. Operating income in 2018 was 31.88% below the Rp247.93 billion target in the 2018 RKAP following the implementation of the non-container terminals services cooperation with subsidiary PT Pelabuhan Tanjung Priok at the end of 2018.

PROFITABILITY OF PONTIANAK

The 2018's net income was realized at Rp15.85 billion or 59.37% lower than the realization of 2017's net income of Rp39.02 billion. However, the realization of net income in 2018 reached 6.43% above the target of 2018 RKAP of Rp14.83 billion. This achievement was influenced by the increase in operating revenues, especially revenues in ship services, terminal services, TBAL and miscellaneous businesses and the application of cost effectiveness principles so that the increase in costs did not exceed the increase in operating revenues

TELUK BAYUR

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS TELUK BAYUR

Teluk Bayur Port Branch, formerly named Emmahaven, was built in the Dutch colonial era between the year of 1888 to 1893 in Padang city. Teluk Bayur Port is an open ocean port for international trade activities in the province of West

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

untuk kegiatan perdagangan internasional di provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batubara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan peti kemas seperti kayu manis, teh, moulding, furnitur dan karet, yang merupakan komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika.

Sumatera. This port has some areas that are centers of economic activity in West Sumatera include Muara Padang and Air Bangis.

Teluk Bayur Port currently has a standard service procedure based on ISO 9002. Teluk Bayur Port has been equipped with modern equipment that is capable of handling various kinds of goods among other bulk goods such as coal, cement, clinker, CPO and commodities using container such as cinnamon, tea, molding, furniture and rubber, which is the main export commodities to the United States, Europe, Asia, Australia and Africa.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Table of Facilities of Teluk Bayur Port Branch

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
TELUK BAYUR		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	150 m
	Kedalaman Depth	-10.0 s.d -11.0 m.LWS
	BREAKWATER	
	Panjang Length	550 m
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	308.900 m ²
	Kedalaman Depth	-8.0 s.d -12.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	1.578 m
	Kedalaman Depth	-8.0 s.d -12.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	13.250 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	26.221,50 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	62.520 m ²
MUARA PADANG		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	- 4.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	34.043 m ²
	Kedalaman Depth	- 1.5 s.d -2.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	137 m
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	3.369 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
AIR BANGIS		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	-2.5 m.LWS

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	15.500 m ²
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	55 m
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Teluk Bayur Port Branch

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>	
1	<i>Gantry Luffing Crane</i>	4
2	<i>Gantry Jib Crane</i>	3
3	<i>Rubber Tyred Gantry Crane</i>	3
4	<i>Reach Stacker</i>	3
5	<i>Side Loader</i>	2
6	<i>Forklift Diesel</i>	10
7	<i>Wheel Loader</i>	6
8	<i>Excavator</i>	3
9	<i>Head Truck</i>	9
10	<i>Terminal Tractor</i>	6
11	<i>Dump Truck</i>	6
12	<i>Chassis</i>	18
Total		73

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
B. Alat Apung <i>Floating Equipment</i>		
1	Kapal Tunda Tugboat	4
2	Motor Pandu Pilotage	2
Total		6

PRODUKTIVITAS TELUK BAYUR

Arus kunjungan kapal turun secara keseluruhan disebabkan kunjungan kapal dalam negeri bermuatan batubara turun untuk bahan bakar pabrik di Semen Padang dan menurunnya kunjungan kapal yang membawa muatan CPO. Untuk arus barang kemasan curah cair yaitu CPO untuk ekspor ke India dan Thailand mengalami penurunan sedangkan untuk arus kemasan curah kering dalam negeri yaitu bongkar batubara, coper slag, CPO dan pupuk bag juga mengalami penurunan.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 77.154 box meningkat 7,79% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 71.576box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 8,25% dari 78.205 TEUs di tahun 2017 menjadi 84.659 TEUs di tahun 2018, meningkatnya peti kemas untuk mengangkut muatan kayu manis, karet dan semen ke Jakarta.

Tabel Produktivitas Teluk Bayur

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	1.720	1.915	(195)	(10,18%)
		GT	6.265.077	6.448.941	(183.864)	(2,85%)
2	General Cargo	Ton	340.633	91.818	248.816	270,99%
	Bag Cargo	Ton	424.588	534.431	(109.843)	(20,55%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.337.936	2.479.986	(142.050)	(5,73%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	1.567.851	2.075.523	(507.672)	(24,46%)
	Lain-Lain Others	Ton	-	277.239	(277.239)	(100,00%)

TELUK BAYUR PRODUCTIVITY

Ship visits decreased due to fewer visits by domestic vessels loaded with coal to fuel factories in Semen Padang and declining ship visits carrying CPO loads. For liquid bulk packaging goods, CPO exports to India and Thailand decreased while for domestic dry bulk packaging, which includes loading bricks, copper slag, CPO and fertilizer bags also decreased.

The number of containers in 2018 was 77,154 boxes, an increase of 7.79% compared to 71,576 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 8.25% from 78,205 TEUs in 2017 to 84,659 TEUs in 2018, due to an increase in containers to transport cinnamon, rubber and cement to Jakarta.

Teluk Bayur Productivity

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
3	Peti kemas Containers	Box	77.154	71.576	5.578	7,79%
		TEUs	84.659	78.205	6.454	8,25%
4	Penumpang Passengers	Orang People	110.177	93.176	17.001	18,25%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Teluk Bayur

Utilization of Teluk Bayur Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	45,25	31,17	145,17%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	67,22	73,40	91,58%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	86,62	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	100,00%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	16,04	15,01	106,87%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	40,44	35,93	112,56%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	2,28	9,06	25,12%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN TELUK BAYUR

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp250,57 miliar atau 7,50% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp270,88 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal peti kemas pada awal tahun 2018 dikerjasamakan dengan anak perusahaan yaitu PT IPC Terminal Peti kemas. Sedangkan, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai 6,55% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp266,97 miliar seiring dengan penurunan komoditi batubara untuk bahan bakar pabrik di Semen Padang dan menurunnya kunjungan kapal yang membawa muatan CPO.

REVENUES OF TELUK BAYUR

Operating income in 2018 amounted to Rp250.57 billion, a 7.50% decrease compared to Rp270.88 billion in 2017. This was influenced by the management of container terminals starting January 1, 2018 in cooperation with subsidiary PT IPC Terminal Petikemas. Operating income in 2018 was 6.55% below the Rp266.97 billion target in the 2018 RKAP following the decline in coal fuel at the Semen Padang factory, and the decline in ship visits carrying CPO.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

PROFITABILITAS TELUK BAYUR

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp45,60 miliar atau 23,22% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp59,39 miliar. Akan tetapi, realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 65,88% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp75,64 miliar. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha khususnya pendapatan TBAL serta dilakukan pengendalian biaya secara selektif sebagai wujud penerapan prinsip *cost effectiveness*.

BANTEN

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS BANTEN

Cabang Pelabuhan Banten telah menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan domestik dan mancanegara selama lebih dari tiga abad. Pelabuhan yang terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Serang ini pernah menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan internasional di abad ke-15 dan disinggahi kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, China, Inggris dan Portugis.

Cabang Pelabuhan Banten memiliki potensi berkembang pesat karena ditopang daerah industri yang tumbuh pesat, seperti industri pengolahan logam, mesin, kimia, dan minyak kelapa sawit. Pelabuhan Banten memiliki 3 (tiga) terminal batu bara dan dermaga multipurpose yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat peti kemas. Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Banten didominasi pelayanan cargo curah cair dan curah kering.

PROFITABILITY OF TELUK BAYUR

The 2018's net income was realized at Rp45.60 billion or 23.22% below the realization of 2017's net income of Rp59.39 billion. However, the realization of net income in 2018 reached 65.88% below the target of 2018 RKAP of Rp75.64 billion. This achievement was influenced by an increase in operating revenues, especially ship services and TBAL revenues, and the selective cost control as a manifestation of applying the principle of cost effectiveness.

BANTEN

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT BANTEN

Banten Port Branch has facilitated domestic and foreign trade transactions for more than three centuries. The port which located about 10 kilometers from the center of Serang city was once an important port in international trade in the 15th century and visited by foreign ships coming from Persian, Arabic, Indian, Chinese, English and Portuguese areas.

Banten Port has the potential to grow rapidly because it is sustained by industrial areas that are growing rapidly, such as metal processing industry, machinery, chemical, and oil palm. Banten Port has 3 (three) coal terminals and multipurpose dock equipped with loading and unloading of containers. Stevedoring activity in Banten Port is dominated by liquid bulk and dry bulk cargo.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Banten, Banten

Table of Facilities of Banten Port Branch, Banten

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	500 m
	Lebar Width	150 m
	Kedalaman Depth	-16.0 m.LWS
2	BREAKWATER	
	Panjang Length	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	118.151 m ²
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -16.0 m.LWS
4	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	1.274 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -16.0 m.LWS
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	2 Unit
	Luas Total Total Area	2.800 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	49.600 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Banten

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Banten Port Branch

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment	
1	Gantry Luffing Crane	2
2	Forklift Diesel	1
3	Wheel Loader	4
4	Excavator	5
5	Head Truck	1
6	Chassis	1
	Total	14
B.	Alat Apung Floating Equipment	
1	Kapal Tunda Tugboat	2
2	Motor Pandu Pilotage	1
	Total	3

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

PRODUKTIVITAS BANTEN

Realisasi arus General Kargo tahun 2018 meningkat 89,65% dari 794.608 ton di tahun 2017 menjadi 1.506.935 ton di tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh kenaikan muat komoditi barang proyek seperti tiang pancang keluar dari Pelabuhan Banten dan kenaikan bongkar sparepart komponen mesin industry untuk kebutuhan pabrik sekitar provinsi Banten.

Realisasi arus Bag Kargo tahun 2018 meningkat 163,08% 25.293 ton di tahun 2017 menjadi 66.541 ton di tahun 2018. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan bongkar/muat komoditi semen.

Realisasi Curah kering tahun 2018 mengalami penurunan 26,35% dari 5.282.742 ton di tahun 2017 menjadi 3.890.940 ton di tahun 2018 terutama karena adanya penurunan kegiatan bongkar muat komoditi pangan dan turunannya di Pelabuhan Banten, seiring dengan akuisisi KBS yang tidak tercapai.

Realisasi Curah Cair tahun 2018 mengalami penurunan 2,07% dari 580.865 ton di tahun 2017 menjadi 568.820 ton di tahun 2018 terutama karena adanya penurunan kegiatan bongkar muat BBM dan Komoditi bahan Kimia dan turunannya.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 17 box meningkat 100,00% dibandingkan dengan tahun 2017. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 100,00% dari 0 TEUs di tahun 2017 menjadi 19 TEUs di tahun 2018.

BANTEN PRODUCTIVITY

The General Cargo in 2018 increased by 89.65% from 794,608 tons in 2017 to 1,506,935 tons in 2018 mainly due to the increase in commodity loadings for project items such as the Banten Port, and the increase in loading of industrial machinery component spare parts for factory needs around the province of Banten.

The Cargo Bag flows in 2018 increased 163.08% from 25,293 tons in 2017 to 66,541 tons in 2018. This was mainly due to the increase in loading / unloading of cement commodities.

Dry bulk in 2018 decreased 26.35% from 5,282,742 tons in 2017 to 3,890,940 tons in 2018 mainly due to a decrease in loading and unloading of food commodities and derivatives in the Banten Port, along with the acquisition of KBS which was not achieved.

Liquid Bulk in 2018 decreased by 2.07% from 580,865 tons in 2017 to 568,820 tons in 2018 mainly due to a decrease in the loading and unloading activities of fuel and commodity chemicals and derivatives.

The number of containers in 2018 was 17 boxes, an increase of 100.00% compared to 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 100.00% from 0 TEUs in 2017 to 19 TEUs in 2018.

Tabel Produktivitas Banten

Tabel of Banten Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	945	910	35	3,85%
		GT	7.390.835	7.459.218	(68.384)	(0,92%)
2	General Cargo	Ton	1.506.935	794.608	712.327	89,65%
	Bag Cargo	Ton	66.541	25.293	41.248	163,08%
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	568.820	580.865	(12.045)	(2,07%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	3.890.940	5.282.742	(1.391.802)	(26,35%)
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	17	-	17	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth
		TEUs	19	-	19 100,00%
4	Penumpang Passengers	Orang People	-	-	- -

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Banten

Utilization of Banten Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	49,32	47,23	104,44%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	56,96	47,23	120,62%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	21,37	47,23	45,25%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	5,42	0,00%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	16,31	22,82	71,44%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN BANTEN

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 327,70 miliar atau 17,63% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp397,86 miliar serta realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tidak tercapai sebesar 74,24% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp1.271,99 miliar seiring belum terlaksananya proses pengambil alihan PT Krakatau Bandar Samudera yang semula direncanakan terealisasi pada awal tahun 2018.

PROFITABILITAS BANTEN

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp460,65 miliar atau 295,35% di atas realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp116,52 miliar serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 0,17% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp461,43 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh belum terlaksananya

REVENUES OF BANTEN

The 2018's operating revenues was realized at Rp327.70 billion or 17.63% lower than the realization of operating revenues in 2017 amounting to Rp397.86 billion and the realization of operating revenues in 2018 was not reaching or 74.24% below the target of 2018 RKAP of Rp1,271.99 billion, in line with the unrealized of takeover process of PT Krakatau Bandar Samudera that was originally planned to be realized in early 2018.

PROFITABILITY OF BANTEN GEOGRAPHIC SEGMENT

2018 net profit amounted to Rp460.65 billion or 295.35% above the Rp116.52 billion in 2017, and 0.17% below the Rp461.43 billion target in the 2018 RKAP. This achievement was influenced by the takeover process of PT Krakatau

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

proses pengambil alihan PT Krakatau Bandar Samudera yang semula direncanakan terealisasi pada awal tahun 2018. Akan tetapi, terdapat peningkatan laba sebelum pajak terutama disebabkan adanya tambahan pendapatan di luar usaha dari penilaian aset tanah hasil reklamasi di PT Asahimas sebesar Rp 374,25 miliar.

Bandar Samudera not bing realized in early 2018. However, there was an increase in profit before tax mainly due to additional non-business income from the revaluation of land assets resulting from reclamation in PT Asahimas amounting to Rp374.25 billion.

CIREBON

CIREBON

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS CIREBON

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT CIREBON

Pada 1865, pemerintahan kolonial Belanda membangun Pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon Jawa Barat. Cabang Pelabuhan Cirebon sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan usaha bagi *hinterland* yang luas, yaitu provinsi Jawa Barat dan sebagian provinsi Jawa Tengah. Cabang Pelabuhan Cirebon juga menjadi sangat strategis karena berada di lokasi dekat lintasan jalur jalan raya dan rel kereta api ke seluruh kota di Pulau Jawa. Cabang Pelabuhan Cirebon dilengkapi dengan fasilitas penumpukan peti kemas, terminal batubara, terminal aspal curah dan tangki penampungan minyak kelapa sawit. Cabang Pelabuhan Cirebon dapat melayani barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung.

In 1865, the Dutch colonial government built the Cirebon Port in Cirebon City, West Java. Cirebon Port Branch is a very strategic port as the gateway for business activities of the broad hinterland, namely West Java province and part of Central Java province. Cirebon Port has also become very strategic since it is located close to the track lane highways and railways to all cities in Java. Cirebon Port is equipped with containers stacking facility, coal terminal, asphalt bulk terminal and palm oil storage tank. Cirebon Port Branch is able to serve dry bulk, liquid bulk and goods in sacks.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat

Table of Facilities of Cirebon Port Branch, West Java

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	2.500 m
	Lebar Width	70 m
	Kedalaman Depth	-6.0 m.LWS
2	Breakwater	
	Panjang Length	1.406 m
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total	23.103 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS
4	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	1.051 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	8.663 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	27.908 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	5.400 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Cirebon Port Branch, West Java

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A	Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment	
	1 Forklift Diesel	1
	2 Wheel Loader	3
	3 Excavator	6
	4 Dump Truck	4
Total		14
B	Alat Apung Floating Equipment	
	1 Kapal Tunda Tugboat	1
	2 Motor Pandu Pilotage	1
Total		2

PRODUKTIVITAS CIREBON

Realisasi Arus *General Cargo* mengalami kenaikan 45,25% dari 13.765 ton di tahun 2017 menjadi 19.994 ton di tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan bongkar muat barang proyek dan komponen mesin Industri melalui di Cabang Pelabuhan Cirebon.

Realisasi arus *Bag Cargo* mengalami penurunan 26,53% dari 118.232 ton di tahun 2017 menjadi 86.869 ton di tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh menurunnya bongkar pupuk di Cabang Pelabuhan Cirebon.

CIREBON PRODUCTIVITY

General Cargo flow increased by 45.25% from 13,765 tons in 2017 to 19,994 tons in 2018, mainly due to the increase in loading and unloading of project goods and components of industrial machinery through the Cirebon Port Branch.

Bag Cargo decreased by 26.53% from 118,232 tons in 2017 to 86,869 tons in 2018 mainly due to the decline in fertilizer loading in the Cirebon Port Branch.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Realisasi arus curah cair mengalami kenaikan 7,33% dari 419.569 ton di tahun 2017 menjadi 450.314 ton di tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh kenaikan bongkar aspal.

Liquid bulk increased by 7.33% from 419,569 tons in 2017 to 450,314 tons in 2018 mainly due to an increase in unloading of asphalt.

Realisasi arus curah kering mengalami kenaikan 10,00% dari 3.542.492 ton di tahun 2017 menjadi 3.896.799 ton di tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh kenaikan kunjungan kapal/bongkar komoditi batubara.

Dry bulk increased by 10.00% from 3,542,492 tons in 2017 to 3,896,799 tons in 2018 mainly due to an increase in shipments / unloading of coal commodities.

Realisasi *General Cargo* pada tahun 2018 sebesar 19.994 ton meningkat 45,25% dibandingkan dengan tahun 2017. Dari sisi curah kering realisasi tahun 2018 sebesar 3.896.799 ton, meningkat 10% dari tahun sebelumnya 2017.

General Cargo realization in 2018 amounted to 19,994 tons, an increase of 45.25% compared to 2017. In terms of dry bulk, realization in 2018 was 3,896,799 tons, an increase of 10% from 2017.

Tabel Produktivitas Cirebon

Tabel of Cirebon Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	1.881	1.708	173	10,13%
		GT	2.846.737	2.359.487	487.250	20,65%
2	<i>General Cargo</i>	Ton	19.994	13.765	6.229	45,25%
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	86.869	118.232	(31.363)	(26,53%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	450.314	419.569	30.745	7,33%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	3.896.799	3.542.492	354.307	10,00%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	-	-	-	-
		TEUs	-	-	-	-
4	Penumpang Passengers	Orang People	-	-	-	-

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Cirebon

Utilization of Cirebon Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	60,63	56,89	106,58%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	44,66	63,16	70,70%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	0,31	1,08	28,42%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN CIREBON

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp101,04 miliar atau 17,83% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp85,75 miliar serta realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai sebesar 6,80% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp107,91 miliar. Tidak tercapainya pendapatan ini dipengaruhi oleh belum terealisasinya pelayanan terminal peti kemas akibat belum terbitnya perijinan dari Kementerian Perhubungan kepada Cabang Pelabuhan Cirebon.

PROFITABILITAS CIREBON

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp96,15 miliar atau 1.038,30% di atas realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp8,45 miliar serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 404,72% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp19,05 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan laba sebelum pajak terutama disebabkan adanya tambahan pendapatan di luar usaha dari penilaian aset tanah hasil reklamasi di PT Sinar Alam Permai sebesar Rp90,00 miliar.

BENGKULU

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS BENGKULU

Cabang Pelabuhan Bengkulu merupakan kota pelabuhan tua yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Cabang Pelabuhan Bengkulu berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota

REVENUES OF CIREBON

Operating income in 2018 amounted to Rp101.04 billion, an increase of 17.83% compared to Rp85.75 billion in 2017, and 6.80% below Rp107.91 billion target in the 2018 RKAP. This was influenced by unrealized container terminal services due to the non-issuance of licenses from the Ministry of Transportation to the Cirebon Port Branch.

PROFITABILITY OF CIREBON

The 2018's net income was realized in the amount of Rp96.15 billion or 1,038.30% higher than the realization of 2017 net income of Rp8.45 billion and the realization of net income in 2018 reached 404.72% above the target of 2018 RKAP of Rp19.05 billion. This achievement was influenced by an increase in profit before tax, which was mainly due to additional out-of-operating revenues from the valuation of land assets resulting from reclamation in PT Sinar Alam Permai amounting to Rp90.00 billion.

BENGKULU

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT BENGKULU

Bengkulu Port Branch is a former port city that was transformed into an occupational and trade city by the British colony in the 18th to 19th century. Bengkulu Port is located in Baai Island, around 20 kilometers from the center

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Bengkulu. Pelabuhan ini memiliki *hinterland* yang cukup luas, dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

of Bengkulu city. This port has a fairly extensive hinterland, with the potential for mining, agriculture, and forestry.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung dan peti kemas, sementara untuk menampung kegiatan pelayanan barang curah kering, pelabuhan ini dilengkapi dengan 3 (tiga) *Belt Conveyor* pemuatan batu bara untuk percepatan pelaksanaan bongkar muat.

Stevedoring activity in Bengkulu Port Branch is mainly dominated by dry bulk, liquid bulk, and goods in sack and container services, meanwhile to accommodate dry bulk services, this port is equipped with 3 (three) coal loading conveyor belts in order to accelerate the stevedoring process.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Bengkulu

Table of Facilities of Bengkulu Port Branch

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	2.300 m
	Lebar Width	66 m
	Kedalaman Depth	-7.0 s/d -12.0 m.LWS
2	BREAKWATER	
	Panjang Length	1.072m
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	100.000 m ²
	Kedalaman Depth	-9.0 s/d -11.0 m.LWS
4	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	499,5 m ²
	Kedalaman Depth	-9.0 s/d -11.0 m.LWS
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.750 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	82.000 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Bengkulu

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Bengkulu Port Branch

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A. Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>		
1	<i>Gantry Luffing Crane</i>	1
2	<i>Reach Stacker</i>	2
3	<i>Forklift Diesel</i>	5
4	<i>Wheel Loader</i>	3
5	<i>Bulldozer</i>	1
6	<i>Head Truck</i>	4
7	<i>Chassis</i>	6
8	<i>Conveyor</i>	3
Total		25
B. Alat Apung <i>Floating Equipment</i>		
1	Kapal Tunda <i>Tugboat</i>	1
2	Motor Pandu <i>Pilotage</i>	1
Total		2

PRODUKTIVITAS BENGKULU

Kenaikan jumlah kunjungan kapal di Cabang Pelabuhan Bengkulu dalam satuan unit mengalami kenaikan 19,91% dari 1.271 unit di tahun 2017 menjadi 1.524 unit di tahun 2018. Hal tersebut karena kenaikan kunjungan kapal untuk tongkang muatan curah kering.

Arus barang kemasan general kargo meningkat 38,55% menjadi 76.999 ton di tahun 2018 diakibatkan meningkatnya alat kontruksi untuk pembangunan pembangkit listrik di Bengkulu sedangkan untuk muatan curah cair peningkatan terjadi untuk komoditi CPO sedangkan untuk curah kering mengalami peningkatan untuk batubara dan klinker untuk PT Cemindo Gemilang.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 26.818 box meningkat 18,47% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 22.637 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 19,31% dari 22.785 TEUs di tahun 2017 menjadi 27.185 TEUs di tahun 2018. Peti kemas mengalami kenaikan dikarenakan adanya *shipping line* baru yaitu PT Temas Lines yang membuka rute pelayaran ke Cabang Pelabuhan Bengkulu secara tetap.

BENGKULU PRODUCTIVITY

Ship visits in Bengkulu Port Branch increased by 19.91% from 1,271 units in 2017 to 1,524 units in 2018. This was due to the increase in ship visits for dry bulk cargo barges.

General cargo packaging goods increased 38.55% to 76,999 tons in 2018 due to an increase in construction equipment for the construction of power plants in Bengkulu, while the increase in liquid bulk occurred due to CPO, while dry bulk increased due to coal and clinker for PT Cemindo Gemilang .

The number of containers in 2018 was 26,818 boxes, an increase of 18.47% compared to 22,637 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 19.31% from 22,785 TEUs in 2017 to 27,185 TEUs in 2018. The container increase was due to the new shipping line, PT Temas Lines, which opened shipping routes to Bengkulu Port Branch on a regular basis.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Produktivitas Bengkulu

Tabel of Bengkulu Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	1.524	1.271	253	19,91%
		GT	3.005.349	2.726.970	278.379	10,21%
2	General Cargo	Ton	76.999	55.576	21.423	38,55%
	Bag Cargo	Ton	158.411	253.338	(94.927)	(37,47%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	503.874	442.069	61.805	13,98%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	2.582.958	2.469.241	113.717	4,61%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	26.818	22.637	4.181	18,47%
		TEUs	27.185	22.785	4.400	19,31%
4	Penumpang Passengers	Orang People	14.313	7.402	6.911	93,37%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Bengkulu

Utilization of Bengkulu Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	58,34	61,02	95,61%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	100,00%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	34,92	30,40	114,88%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

PENDAPATAN BENGKULU

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 129,76 miliar atau 2,95% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp126,04 miliar. Akan tetapi, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tidak tercapai sebesar 12,58% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp146,09, miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh pekerjaan pengerukan alur Cabang Pelabuhan Bengkulu yang baru selesai pada akhir bulan September 2018, sehingga menyebabkan tidak optimalnya lalu lintas kapal yang masuk ke Cabang Pelabuhan Bengkulu terutama kapal-kapal bermuatan besar yang tidak dapat sandar akibat ketidaksiapan kedalaman alur dan berpengaruh pada turunnya frekuensi kapal serta jumlah barang yang dilayani di Cabang Pelabuhan Bengkulu.

PROFITABILITAS BENGKULU

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp10,23 miliar atau 30,21% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp14,66 miliar serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 68,73% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp17,26 miliar. Ketidaktercapaian ini karena telah dioperasikannya dermaga Samudera oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Agustus 2018.

JAMBI

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS JAMBI

Cabang Pelabuhan Jambi awalnya terletak di kota Jambi (Boom Batu) dan mulai tahun 1996 dipindahkan ke Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, 10 kilometer dari kota Jambi. Sebagian besar kegiatan di Cabang Pelabuhan Jambi, adalah melayani bongkar muat barang curah, baik curah cair maupun curah kering.

Hinterland Pelabuhan Jambi menghasilkan karet, kayu lapis, dan *moulding*, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang dan Korea. Pelabuhan lain dalam lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi adalah Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak. Pelabuhan Kuala Tungkal terletak di muara sungai Pengabuan, sekitar 10 mil dari ambang luar. Dermaga Kuala Tungkal, terbuat dari beton sepanjang 156 m, saat ini lebih banyak untuk melayani kapal-kapal penumpang dengan tujuan Batam. Sedangkan Pelabuhan Muara Sabak terletak di sekitar 10 mil dari muara sungai Batanghari dan berada pada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura (IMS), serta berdampingan dengan area lintas perdagangan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO). Dengan

REVENUES OF BENGKULU

The operating revenues in 2018 was realized at Rp129.76 billion or 2.95% higher than the realization of operating revenues in 2017 of Rp126.04 billion. However, the realization of the 2018's operating revenues was not reached or 12.58% below the target of 2018 RKAP of Rp146.09, billion. This achievement was influenced by the dredging work of Bengkulu Port, which was barely completed at the end of September 2018, made the ship traffic entering Bengkulu Port Branch was not optimum, especially large loaded vessels which could not dock due to unprepared depth of channel and affected the decrease in vessel frequency and the amount of goods served at Bengkulu Port Branch.

PROFITABILITY OF BENGKULU

2018 net profit amounted to Rp10.23 billion, a decrease of 30.21% compared to Rp14.66 billion in 2017, and 68.73% below the Rp17.26 billion target in the 2018 RKAP. This was due to operations at the Samudera Dock by PT Tanjung Priok Port in August 2018.

JAMBI

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT JAMBI

Jambi Port Branch was originally located in the city of Jambi (Boom Batu) and since 1996 it was relocated to Talang Duku, at the downstream of Batang Hari River, 10 kilometers from the city of Jambi. Most of the activities at Jambi Port are stevedoring of bulk goods, both dry and liquid.

The hinterland of Jambi Port produces rubber, plywood and molding, which is a commodity export to the USA, Europe, Middle East, Japan and Korea. Other ports managed by Jambi Port Branch are Kuala Tungkal Port and Muara Sabak Port. Kuala Tungkal Port is located in the estuary of Pengabuan River, around 10 miles from the outer threshold. Kuala Tungkal berth, made from 156-meter long concrete, is currently primarily used to serve passenger ships heading to Batam. Muara Sabak Port is located around 10 miles from the estuary of Batanghari River, and is in the heart of the Triangle Growth of Indonesia, Malaysia and Singapore (IMS), and adjacent to the cross-trade area of Singapore, Batam and Johor (SIBAJO).

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

lokasinya yang strategis, Pelabuhan Muara Sabak, yang memiliki dermaga beton sepanjang 100 meter, akan berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Pelabuhan Muara Sabak dirancang untuk menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri dan perdagangan. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan terminal peti kemas, terminal barang umum, terminal curah kering dan terminal curah cair.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Jambi didominasi pelayanan cargo curah kering, curah cair dan peti kemas, terutama untuk komoditas batu bara, pupuk, CPO, BBM, dan perdagangan barang kebutuhan pokok antar pulau.

With its strategic location, Muara Sabak Port, which has a 100-meter long concrete pier, is projected to have a vital role in advancing the national economic growth and trade activities. Muara Sabak Port is designed to be a modern port that will integrate with industrial and trade areas. This port is equipped with a container terminal, general cargo terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal.

Stevedoring activity in Jambi Port is dominated by dry bulk, liquid bulk, and container services, particularly containing commodities of coal, fertilizer, palm oil, fuel, and inter-island traded basic goods.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Jambi

Table of Facilities of Jambi Port Branch

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
JAMBI DAN KAWASAN JAMBI AND ESTATE		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	200.942 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -9.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	265.800 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -8.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	477,4 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -8.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	2 Unit
	Luas Total Total Area	3.990 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	101.254,6 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	33.869 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
TALANG DUKU		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	101.254,6 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-4.5 s.d -9.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	76.500 m ²
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	302,4 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	2.040 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	87.011 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	33.869 m ²
MUARA SABAK		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	21.298 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	173.700 m ²
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	100 m
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.350 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	14.243,6 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
KUALA TUNGKAL		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	7.408 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	15.600 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	75 m
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Jambi **Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Jambi Port Branch**

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A. Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>		
1	<i>Fix Jib Crane</i>	2
2	<i>Rail Mounted Gantry Crane</i>	3
3	<i>Mobile Crane</i>	2
4	<i>Reach Stacker</i>	1
5	<i>Side Loader</i>	1
6	<i>Forklift Diesel</i>	6
7	<i>Wheel Loader</i>	1
8	<i>Excavator</i>	1
9	<i>Head Truck</i>	2
10	<i>Terminal Tractor</i>	7
11	<i>Chassis</i>	12
12	<i>Conveyor</i>	1
Total		39
B. Alat Apung <i>Floating Equipment</i>		
1	<i>Motor Pandu Pilotage</i>	1
Total		1

PRODUKTIVITAS JAMBI

Produktivitas di Cabang Pelabuhan Jambi untuk *General Cargo* mengalami peningkatan 32,17% dari 51.141 ton di tahun 2017 menjadi 67.595 ton di tahun 2018. Arus kemasan general cargo mengalami tren kenaikan untuk muatan karet, besi, dan tiang pancang untuk konstruksi. Sedangkan untuk *Bag Cargo* dan curah kering mengalami penurunan diakibatkan dermaga yang dipakai untuk bongkar muat curah cair mengalami kerusakan sehingga siklus kunjungannya terganggu.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 39.235 box meningkat 10,11% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 35.634 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 14,43% dari 42.800 TEUs di tahun 2017 menjadi 48.976 TEUs di tahun 2018.

JAMBI PRODUCTIVITY

General cargo increased by 32.17% from 51,141 tons in 2017 to 67,595 tons in 2018. The flow of general cargo packaging experienced a rising trend for rubber, iron and pile loads for construction. While for cargo and dry bulk it decreased due to the dock used for loading and discharging liquid bulk being damaged so that the visit cycle was disrupted.

The number of containers in 2018 was 39,235 boxes, an increase of 10.11% compared to 35,634 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 14.43% from 42,800 TEUs in 2017 to 48,976 TEUs in 2018.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Tabel Produktivitas Jambi

Tabel of Jambi Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	1.141	668	473	70,81%
		GT	1.223.243	480.569	742.674	154,54%
2	General Cargo	Ton	67.595	51.141	16.454	32,17%
	Bag Cargo	Ton	64.339	110.708	(46.369)	(41,88%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	201.190	212.477	(11.287)	(5,31%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	1.416.326	460.040	956.286	207,87%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	39.235	35.634	3.601	10,11%
		TEUs	48.976	42.800	6.176	14,43%
4	Penumpang Passengers	Orang People	1.784	11.885	(10.101)	(84,99%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Jambi

Utilization of Jambi Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	14,24	13,56	105,04%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	27,52	39,81	69,14%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	75,06	39,81	188,56%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	100,00%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	25,51	54,53	46,78%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	57,99	43,98	131,88%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	61,49	25,85	237,87%

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

PENDAPATAN JAMBI

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp56,17 miliar atau 22,78% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp72,74 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal peti kemas pada awal tahun 2018 dikerjasamakan dengan anak perusahaan yaitu PT IPC Terminal Peti kemas. Sedangkan, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai 1,97% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp57,28 miliar seiring dengan rencana kenaikan tarif pada tahun 2018 tidak terlaksana sesuai waktu yang telah direncanakan.

PROFITABILITAS JAMBI

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3,60 miliar atau 67,54% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp11,08 miliar serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 75,92% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp6,33 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh belum terealisasinya restrukturisasi organisasi Cabang Pelabuhan Bengkulu sehingga berdampak pada peningkatan biaya pegawai.

PANGKAL BALAM

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS PANGKAL BALAM

Cabang Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dermaga sepanjang 787 m, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, serta lapangan parkir. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang ekspor impor, perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta dengan kapal Feri/Ro-Ro dan tujuan Tanjung Pandan dengan jetfoil/kapal cepat.

Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Muntok, yang berada di pantai barat sebelah utara Pulau Bangka, selain itu Pelabuhan Sungai Selan di pedalaman sebelah selatan Pulau Bangka berdermaga kayu sepanjang 118 m, serta Pelabuhan Belinyu yang memiliki dermaga beton sepanjang 101 m.

REVENUES OF JAMBI

Operating income in 2018 amounted to Rp56.17 billion, a decrease of 22.78% compared to Rp72.74 billion in 2017. This was influenced by the management of container terminals starting January 1, 2018 in cooperation with subsidiary PT IPC Terminal Petikemas. Operating income in 2018 was 1.97% below the Rp57.28 billion target in the 2018 RKAP, following the planned tariff rates in 2018 not being implemented within the planned time.

PROFITABILITY OF JAMBI

2018 net profit amounted to Rp3.60 billion, a decrease of 67.54% compared to Rp11.08 billion in 2017, and was 75.92% below the Rp6.33 billion target in the 2018 RKAP. This was the result of restructuring of the Bengkulu Port Branch organization not happening resulting in an increase in employee costs.

PANGKAL BALAM

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT PANGKAL BALAM

Pangkal Balam Port Branch is located in Bangka Island, Bangka Belitung province. Pangkal Balam Port is equipped with various facilities, including a 787m long port, stacking facilities, passenger terminal, and a parking lot. Pangkal Balam Port Branch serves the transportation of imported and exported goods, inter-island trade, and the transportation of passengers to Jakarta by ferry boats/roll-off vessels and to Tanjung Pandan by jetfoil boats/ speedboats.

One of other ports in this area is Muntok Port, located in the west beach next to the northern part of Bangka Island, besides that Sungai Selan Port, located deep in the southern part of Bangka Island, with a 118-m long wooden berth, and Belinyu Port, which has a 101-m long concrete berth.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung

Table of Facilities of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
PANGKAL BALAM DAN KAWASAN PANGKAL BALAM AND ESTATE		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	24.375 m

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-3,0 s.d -9,0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	46.965 m ²
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -7,0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	787 m
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -7,0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	485 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	12.809 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	20.843 m ²
PANGKAL BALAM		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	3.500 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	- 2,5 S/D -5,0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	17.840 m ²
	Kedalaman Depth	- 2,5 S/D -5,0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	506 m
	Kedalaman Depth	- 2,5 S/D -5,0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	12.809 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	20.843 m ²
BELINYU		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	10.465 m
	Lebar Width	200 m
	Kedalaman Depth	-9.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	3.930 m ²
	Kedalaman Depth	-7.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	101 m
	Kedalaman Depth	-7.0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
MUNTOK		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	750 m
	Lebar Width	30 m

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Kedalaman Depth	-0,5 s.d -2,5 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	23.125 m ²
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -1,0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	42 m
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -1,0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	485 m ²
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-
SUNGAI SELAN		
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	9.660 m
	Lebar Width	10 m
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
2	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	2.070 m ²
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
3	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	138 m
	Kedalaman Depth	-1,0 m.LWS
4	GUDANG STORAGE	
	Unit	-

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
	Luas Total Total Area	-
5	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

Alat Bongkar Muat

Loading Unloading Equipment

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>	
1	<i>Fix Jib Crane</i>	1
2	<i>Mobile Crane</i>	1
3	<i>Reach Stacker</i>	1
4	<i>Forklift Diesel</i>	4
5	<i>Road Truck</i>	4
6	<i>Chassis</i>	4
	Total	15
B.	Alat Apung <i>Floating Equipment</i>	
1	Motor Pandu Pilotage	1
	Total	1

PRODUKTIVITAS PANGKAL BALAM

Kunjungan Kapal di pangkal Balam dalam satuan GT meningkat sebesar 2,77% dikarenakan *upsized* GT Kapal dimana sebelumnya kapal yang sandar rata-rata berukuran 1.000GT menjadi 1.500GT yang mengangkut muatan Peti kemas .

Arus kemasan barang *General Cargo*, curah cair dan curah kering mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya jumlah permintaan terhadap barang tersebut.

PANGKAL BALAM PRODUCTIVITY

Ship visits at Pangkal Balam in GT units increased by 2.77% due to the GT Ship *upsized* where previously ships were on an average size of 1,000GT to 1,500GT carrying Container loads.

General Cargo goods, liquid bulk and dry bulk decreased from the previous year due to a decrease in the demand for these goods.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 55.580 box meningkat 11,79% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 49.719 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 11,97% dari 49.899 TEUs di tahun 2017 menjadi 55.870 TEUs di tahun 2018.

The number of containers in 2018 was 55,580 boxes, an increase of 11.79% compared to 49,719 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 11.97% from 49,899 TEUs in 2017 to 55,870 TEUs in 2018.

Kenaikan peti kemas dikarenakan perubahan kemasan dari *bag cargo* ke peti kemas dikarenakan dengan memakai peti kemas barang lebih aman dari kerusakan.

The increase in containers was due to changes in packaging from cargo bags to containers as by using containers the goods are safer from damage.

Tabel Produktivitas Pangkal Balam

Tabel of Pangkal Balam Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	2.815	2.782	33	1,19%
		GT	3.666.115	3.567.270	98.845	2,77%
2	General Cargo	Ton	126.791	529.222	(402.431)	(76,04%)
	Bag Cargo	Ton	516.225	610.260	(94.035)	(15,41%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	554.285	738.774	(184.489)	(24,97%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	45.549	72.849	(27.300)	(37,47%)
	Lain-Lain Others	Ton	-	-		
3	Peti kemas Containers	Box	55.580	49.719	5.861	11,79%
		TEUs	55.870	49.899	5.971	11,97%
4	Penumpang Passengers	Orang People	72.338	62.350	9.988	16,02%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pangkal Balam

Utilization of Pangkal Balam Facilities and w

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	81,29	89,25	91,08%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	7,68	5,50	139,62%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN PANGKAL BALAM

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp36,57 miliar atau 11,34% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp32,85 miliar dan realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai sebesar 0,74% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp36,30 miliar. Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan trafik kapal seiring dengan meningkatnya permintaan persediaan barang kebutuhan Natal dan Tahun Baru serta adanya kenaikan tarif jasa penundaan.

PROFITABILITAS SEGMENT GEOGRAFIS PANGKAL BALAM

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3,62 miliar atau 60,36% di atas realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp2,26 miliar serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 64,24% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp1,29 miliar. Selain dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha khususnya peningkatan pelayanan jasa kapal, penerapan prinsip *cost effectiveness* terhadap komponen biaya juga berdampak terhadap pencapaian laba bersih tahun 2018.

TANJUNG PANDAN

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS TANJUNG PANDAN

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan berada di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sejak 11 Juni 2011, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki terminal penumpang yang dikenal dengan Pelabuhan Laskar Pelangi untuk mendukung kemajuan pariwisata di Pulau Belitung. Untuk mendukung kemajuan pariwisata tersebut, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan telah direnovasi menjadi terminal modern berkapasitas 200 penumpang yang dilengkapi ruang VIP dan pertokoan.

REVENUES OF PANGKAL BALAM

The 2018's operating income was realized at Rp36.57 billion or 11.34% higher than the realization of 2017's operating revenues of Rp32.85 billion and the realization of operating revenues in 2018 was 0.74% above the target of 2018 RKAP of Rp36.30 billion. This achievement was influenced by the increase in ship traffic along with the increasing demand for inventory of Christmas and New Year's goods as well as the increase in tariffs for towage services.

PROFITABILITY OF PANGKAL BALAM GEOGRAPHIC SEGMENT

The 2018's net income was realized at Rp3.62 billion or 60.36% higher than the realization of 2017's net income at Rp2.26 billion and the realization of net income in 2018 was 64.24% above the target of 2018 RKAP of Rp1.29 billion. In addition to being affected by the increase in operating revenues, especially the increase in ship service, the application of cost effectiveness principle to the cost components also has an impact on the achievement of net income in 2018.

TANJUNG PANDAN

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT TANJUNG PANDAN

Tanjung Pandan Port Branch is located in Belitung Island, Bangka Belitung province. On June 11, 2011, Tanjung Pandan Port was officially renamed to Laskar Pelangi Port in order to support the development of tourism In Belitung Island. To support the development of tourism, the passengers terminal in Tanjung Pandan Port has also been modernized to accommodate up to 200 passengers and is equipped with VIP rooms and shops.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki *hinterland* yang meliputi 80.000 hektar, perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain seperti kaolin, granit, dan pasir kuarsa.

Tanjung Pandan Port Branch has the hinterland covering 80,000 hectares of palm oil plantation, and other commodities such as kaolin, granite, and quartz sand.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung

Table of Facilities of Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	6.482 m
	Lebar Width	30 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
2	BREAKWATER	
	Panjang Length	-
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	39.000 m ²
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
4	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	384 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	750 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	1.968 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	5.880 m ²

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung

Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A. Alat Bongkar Muat <i>Loading Unloading Equipment</i>		
1	<i>Forklift Diesel</i>	2
2	<i>Road Truck</i>	1
3	<i>Chassis</i>	1
Total		4
B. Alat Apung <i>Floating Equipment</i>		
1	Motor Pandu <i>Pilotage</i>	1
Total		1

PRODUKTIVITAS TANJUNG PANDAN

Kunjungan kapal mengalami kenaikan dalam satuan unit sebesar 2,44% dari 860 unit di tahun 2017 menjadi 881 unit di tahun 2018 dikarenakan kunjungan kapal yang masuk ke pelabuhan meningkat sedangkan dalam satuan GT tetap tidak mengalami perubahan.

Untuk arus kemasan kargo dan curah cair mengalami penurunan akibat menurunnya permintaan akan komoditi tersebut. Sedangkan untuk *bag cargo* mengalami peningkatan berupa komoditi semen, karet, yang diangkut melalui kapal-kapal pelra (Pelayaran rakyat).

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 14.060 box meningkat 23,81% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 11.356 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 23,81% dari 11.356 TEUs di tahun 2017 menjadi 14.060 TEUs di tahun 2018. Hal ini disebabkan perubahan containerisasi yaitu perubahan kemasan dari *bag cargo* dan *general Cargo* kepada peti kemas supaya barang lebih aman.

TANJUNG PANDAN PRODUCTIVITY

Ship visits increased by 2.44% from 860 units in 2017 to 881 units in 2018 due to increased vessel visits to the port while GT units remain unchanged.

Cargo packaging and liquid bulk decreased due to the decline in demand for the commodities. While for cargo bags, there was an increase in cement, rubber, which was transported via pelra ships.

The number of containers in 2018 was 14,060 boxes, an increase of 23.81% compared to 11,356 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 23.81% from 11,356 TEUs in 2017 to 14,060 TEUs in 2018. This was due to changes in containerization, namely changes in packaging from cargo bags and general cargo to containers so that goods were safer.

Tabel Produktivitas Tanjung Pandan

Tabel of Tanjung Pandan Productivity

No	Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	Kapal <i>Ship</i>	Unit	881	860	21	2,44%
		GT	438.736	441.082	(2.346)	(0,53%)
2	<i>General Cargo</i>	Ton	238.323	344.315	(105.992)	(30,78%)
		<i>Bag Cargo</i>	Ton	504.246	263.512	240.734

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	17.294	29.914	(12.620)	(42,19%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	1.510	-	1.510	100,00%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	14.060	11.356	2.704	23,81%
		TEUs	14.060	11.356	2.704	23,81%
4	Penumpang Passengers	Orang People	92.982	48.221	44.761	92,82%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Tanjung Pandan

Utilization of Tanjung Pandan Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	90,90	93,17	97,57%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	95,61	99,28	96,30%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	-	100,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	67,99	47,10	144,35%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN TANJUNG PANDAN

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp8,27 miliar atau 14,41% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp7,23 miliar dan realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai sebesar 34,59% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp11,13 miliar. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh belum terealisasinya kegiatan bongkar

VENUE OF TANJUNG PANDAN

The 2018's operating revenues was realized at Rp8.27 billion or 14.41% higher than the realization of 2017's operating revenues at Rp7.23 billion and the realization of operating revenues in 2018 was 34.59% below the target of 2018 RKAP of Rp11.13 billion. This failure was influenced by the unrealized loading and unloading activities of construction

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

muat material konstruksi untuk kebutuhan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang.

PROFITABILITAS TANJUNG PANDAN

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp0,07 miliar atau 93,32% di bawah realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp0,99 miliar. Serta realisasi laba bersih tahun 2018 tercapai 3.066,29% di atas target RKAP tahun 2018 rugi sebesar Rp1,96 miliar. Capaian ini dipengaruhi oleh penerapan prinsip *cost effectiveness* terhadap komponen biaya

SUNDA KELAPA

PENJELASAN SEGMENT GEOGRAFIS SUNDA KELAPA

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan di Teluk Jakarta yang menjadi persinggahan pelayaran antar bangsa semasa Pemerintahan Portugis sejak 1527. Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa mulai dikenal pada abad ke-12 sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah yang membawa porselen, kopi, kain sutra, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya.

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa kini merupakan pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal Phinisi atau Bugis Schooner dengan bentuknya yang khas. Komoditas yang diangkut selain kayu adalah bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan.

materials for the development of Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang.

PROFITABILITY OF TANJUNG PANDAN

The net income in 2018 was realized at Rp0.07 billion or 93.32% lower than the realization of 2017's net income of Rp0.99 billion, and the realization of net income in 2018 reached 3,066.29% above the target of 2018 RKAP of loss of Rp1.96 billion. This achievement was caused by the application of cost effectiveness principle to the cost components.

SUNDA KELAPA

EXPLANATION GEOGRAPHICAL SEGMENT SUNDA KELAPA

Sunda Kelapa Port Branch is located in Jakarta Bay and served as the transit point for ships between nations during the Portuguese administration since 1527. Sunda Kelapa Port Branch became known in the 12th century as a port of transit by ships from China, Japan, South India and the Middle East that brings porcelain, coffee, silk fabric, and others in exchange for spices and other agricultural crops.

Nowadays, Sunda Kelapa Port Branch is mainly utilized for local cargo stevedoring. Inter-island ships and commercial vessels, such as Phinisi or Bugis Schooner with its distinctive shape, visits this port, carrying commodities. These commodities include wood, essential supplies, haberdashery, and building materials.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta

Table of Facilities of Sunda Kelapa Port Branch, DKI Jakarta

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
1	ALUR CHANNEL	
	Panjang Length	2.212 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	-6.0 m.LWS
2	BREAKWATER	
	Panjang Length	1.457 m

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

NO	DATA FASILITAS FACILITIES	TAHUN 2018 YEAR 2018
3	KOLAM BASIN	
	Luas Total Area	244.200 m ²
	Kedalaman Depth	-2.5 s/d -4.0 m.LWS
4	DERMAGA BERTH	
	Panjang Length	3.111 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s/d -4.0 m.LWS
5	GUDANG STORAGE	
	Unit	10 Unit
	Luas Total Total Area	8.380 m ²
6	LAPANGAN PENUMPUKAN YARD	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	21.026 m ²
	Luas Lapangan Peti Kemas Total Container Field	12,888 m ²

**Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang
 Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta**

**Table of Recapitulation of Equipment Assets Data of Sunda Kelapa
 Port Branch, DKI Jakarta**

NO	DATA PERALATAN EQUIPMENT	TAHUN 2018 YEAR 2018
A.	Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment	
1	Forklift Diesel	1
	Total	1

PRODUKTIVITAS SUNDA KELAPA

Kunjungan kapal yang mengalami penurunan 4,67% dalam satuan unit menjadi 3.385 di tahun 2018, sedangkan kapal dalam satuan GT mengalami kenaikan 3,14% dari 2.786.503 GT di tahun 2017 menjadi 2.873.932 GT di tahun 2018 dikarenakan kapal yang berkunjung mempunyai GT yang lebih besar (*upsized* kapal).

Untuk muatan *general Cargo* mengalami peningkatan 8,15% dari 77.103 ton di tahun 2017 menjadi 946.228 ton di tahun 2018. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan dari muatan *general cargo* untuk komoditi besi, barang elektronik, kendaraan roda dua, alat-alat proyek. Sedangkan untuk

SUNDA KELAPA PRODUCTIVITY

Ship visits decreased by 4.67% to 3,385 units in 2018, while ships in GT units increased 3.14% from 2,786,503 GT in 2017 to 2,873,932 GT in 2018 due to visiting vessels having Larger GT.

General cargo increased by 8.15% from 77,103 tons in 2017 to 946,228 tons in 2018. The increase was due to the increase in general cargo for iron, electronic goods, two-wheeled vehicles, project equipment. Cargo bag packaging, liquid bulk and dry bulk decreased due to lower demand for fertilizers,

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

kemasan *bag cargo*, curah cair dan curah kering mengalami penurunan akibat menurunnya permintaan pupuk, semen, terigu, beras, pakan ternak, pasir dan CPO.

Realisasi arus peti kemas pada tahun 2018 sebesar 78.953 box meningkat 16,16% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 67.970 box. Dari sisi TEUs peti kemas juga mengalami peningkatan sebesar 16,41% dari 69.323 TEUs di tahun 2017 menjadi 80.701 TEUs di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Perubahan pola kemasan dari *bag cargo* ke peti kemas terutama untuk muatan semen dan pupuk.

cement, flour, rice, animal feed, sand and CPO.

The number of containers in 2018 was 78,953 boxes, an increase of 16.16% compared to 67,970 boxes in 2017. In terms of container TEUs, it also increased by 16.41% from 69,323 TEUs in 2017 to 80,701 TEUs in 2018. This was due to changes in the pattern of packaging from cargo to containers, especially for cement and fertilizer.

Tabel Produktivitas Sunda Kelapa

Sunda Kelapa Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
1	Kapal Ship	Unit	3.385	3.551	(166)	(4,67%)
		GT	2.873.932	2.786.503	87.429	3,14%
2	General Kargo General Cargo	Ton	1.023.331	946.228	77.103	8,15%
		Bag Cargo	1.193.054	1.320.636	(127.582)	(9,66%)
		Curah Cair Liquid Bulk	12.053	14.666	(2.613)	(17,82%)
		Curah Kering Dry Bulk	716.663	740.609	(23.946)	(3,23%)
		Lain-Lain Others	-	-	-	-
3	Peti kemas Containers	Box	78.953	67.970	10.983	16,16%
		TEUs	80.701	69.323	11.378	16,41%
4	Penumpang Passengers	Orang People	20.244	12.181	8.063	66,19%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Sunda Kelapa

Utilization of Sunda Kelapa Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
1	Dermaga: Docks:				
	BOR (Terminal Peti kemas) BOR (Container)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Multipurpose)	%	107,53	121,71	88,35%
	BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%
	BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk)	%	-	-	100,00%

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization	Trend (%)
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	32,92	30,89	106,58%
	SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	100,00%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	YOR (Terminal Peti kemas) YOR (Container)	%	-	35,61	0,00%
	YOR (Terminal Multipurpose)	%	74,04	37,96	195,04%
	YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk)	%	-	-	100,00%

PENDAPATAN SUNDA KELAPA

Pendapatan usaha tahun 2018 terealisasi sebesar Rp56,61 miliar atau 11,57% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp50,73 miliar. Akan tetapi, realisasi pendapatan usaha tahun 2018 tercapai sebesar 1,18% di bawah target RKAP tahun 2018 sebesar Rp 57,28 miliar. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh penurunan kegiatan pemuatan kargo curah kering semen akibat kerusakan *packing plant* di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta perubahan distribusi semen ke Bangka Belitung yang semula dari Sunda Kelapa sekarang langsung dari Gresik. Proses pembayaran sewa lahan yang belum terealisasi serta beberapa mitra yang tidak memperpanjang kerjasama dikarenakan rencana penataan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa juga mempengaruhi ketidaktercapaian pendapatan usaha tahun 2018.

PROFITABILITAS SUNDA KELAPA

Laba bersih tahun 2018 terealisasi sebesar Rp8,76 miliar atau 7,69% di atas realisasi laba bersih tahun 2017 sebesar Rp8,13 miliar dan realisasi laba usaha tahun 2018 tercapai sebesar 27,77% di atas target RKAP tahun 2018 sebesar Rp6,33 miliar. Capaian ini dipengaruhi oleh penerapan prinsip cost effectiveness terhadap komponen biaya.

REVENUES OF SUNDA KELAPA

The operating revenues in 2018 was realized at Rp56.61 billion or 11.57% higher than the realization of operating revenues in 2017 at Rp50.73 billion. However, the realization of operating revenues in 2018 was 1.18% below the target of 2018 RKAP of Rp57.28 billion. This failure was affected by a decrease in the loading activity of dry cement bulk cargo due to damage of packing plant in DKI Jakarta area and its surroundings as well as changes in the distribution of cement to Bangka Belitung directly from Gresik, which was originally from Sunda Kelapa. The process of land lease payment that has not yet been realized and some partners who did not extend the cooperation due to the plan of Sunda Kelapa Port Branch arrangement also affected the failure to achieve the operating revenues in 2018.

PROFITABILITY OF SUNDA KELAPA

The 2018's net income was realized at Rp8.76 billion or 7.69% higher than the realization of 2017's net income at Rp8.13 billion and the realization of net income in 2018 reached 27.77% above the target of 2018 RKAP of Rp6.33 billion. This achievement was influenced by the application of cost effectiveness principle to the cost components.

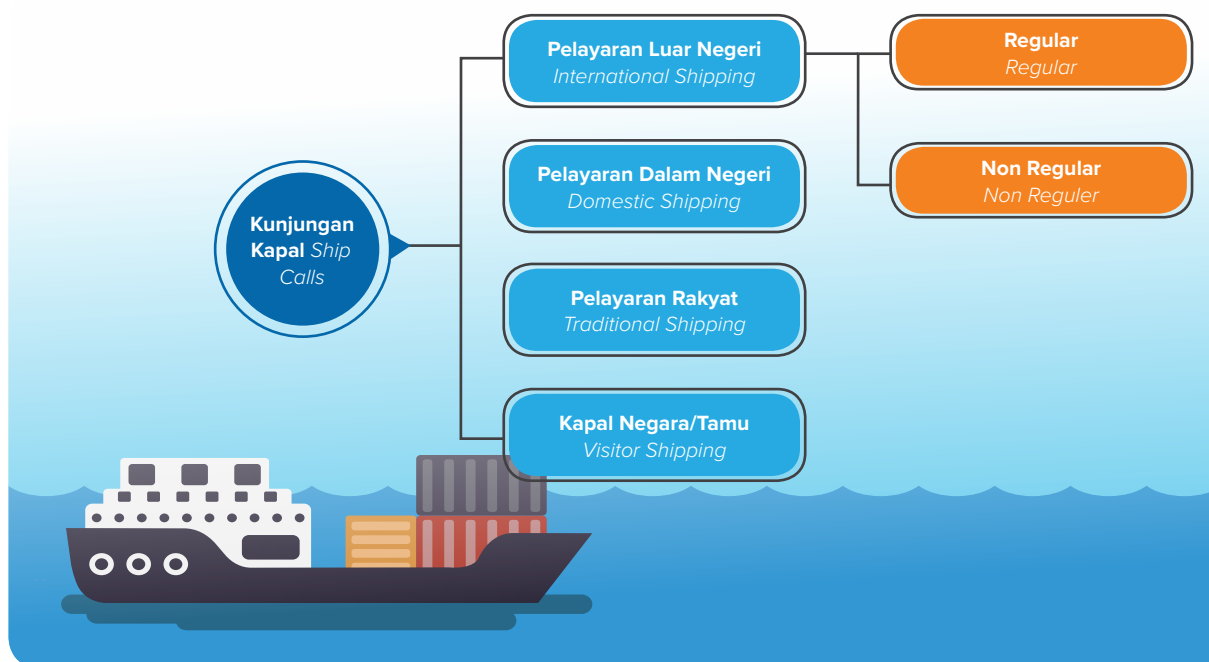
KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

LALU LINTAS PELABUHAN

PORT TRAFFIC

KUNJUNGAN KAPAL

SHIP CALLS



Secara keseluruhan kunjungan kapal pada tahun 2018 terealisasi sebesar 35.771 unit dan 224.298.619 GT. Dibandingkan dengan tahun 2017, dalam satuan unit tumbuh 3,2% dan dalam GT 10,63 %. Secara rinci, kinerja kunjungan kapal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Overall, the realization of ship calls in 2018 amounted to 35,771 units and 224,298,619 GT. Compared to 2017, there has been an increase in unit by 3.2% and in GT by 10.53%. In details, ship calls performance can be described as follows:

Tabel Kunjungan Kapal

Table of Ship Calls

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pelayaran Luar Negeri: International Shipping:				
Reguler Regular	Unit	943	1.041	(9)
	GT	16.261.976	19.053.497	(15)
Non Reguler Non Regular	Unit	5.380	4.637	16
	GT	105.711.501	84.437.533	25
Pelayaran Dalam Negeri Domestic Shipping				
	Unit	26.218	25.550	3
	GT	100.908.199	97.166.174	4
Pelayaran Rakyat Traditional Shipping				
	Unit	2.900	3.145	(8)
	GT	538.325	575.254	(6)
Pelayaran Perintis Pacer Shipping				
	Unit	148	58	155
	GT	160.684	63.761	152

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Kapal Negara/Tamu Visitor/State Shipping	Unit	182	231	(21)
	GT	717.934	857.433	(16)
Jumlah	Unit	35.771	34.662	3
Total	GT	224.298.619	202.153.652	11

KUNJUNGAN KAPAL LUAR NEGERI

Realisasi kunjungan kapal luar negeri mengalami kenaikan dalam satuan Unit kapal sebesar 6.323 Unit dari anggaran 5.765 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal 121.973.477 dari anggaran 105.028.543 GT.

Arus trafik kapal dalam satuan unit yang mengalami kenaikan terdapat di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (11,94%), Panjang (1,6%), Palembang (67,79%), Pontianak (45,33%), dan Jambi (73,33%). Traffik arus kapal luar negeri mengalami kenaikan GT di cabang Tanjung Priok (15,99%), Panjang (2,58%), Palembang (92,51%), Pontianak (10,60%), dan Jambi (87,71%).

Trafik kunjungan kapal luar negeri secara keseluruhan dalam satuan GT mengalami kenaikan disebabkan:

1. Tercapainya kunjungan kapal luar negeri di pelabuhan Tanjung Priok mengalami kenaikan sebesar 13.795.254 GT atau 100.372.763 GT dari anggaran 86.577.515 GT. Kenaikan terdapat untuk kapal *general cargo* (77,21%), kapal peti kemas (9,76%).
2. Meningkatnya GT kapal di Panjang untuk jenis kapal *general cargo* (32,44%), Peti kemas (31,78%).
3. Meningkatnya unit dan GT kapal di Cabang Pelabuhan Palembang untuk jenis kapal *general cargo* (41,08%), kapal curah cair (54,64%), kapal curah kering (26,71%), kapal peti kemas (65,54%), dan kapal ro-ro (64,4%).
4. Kenaikan GT kapal di Cabang Pelabuhan Pontianak adalah jenis kapal *general cargo* (32,12%), kapal peti kemas (13,73%), kapal ro-ro (34,5%) dan kapal penumpang (12,6%).
5. Kunjungan kapal di Cabang Pelabuhan Jambi meningkat untuk jenis kapal *general cargo*, kapal curah cair, kapal curah kering dan kapal peti kemas .

KUNJUNGAN KAPAL DALAM NEGERI

Untuk kunjungan kapal dalam negeri dalam tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,20 % atau 26.218 Unit dari yang dianggarkan sebesar 25.378 Unit, sedangkan untuk satuan GT tercapai 6,78% atau 100.908.199 GT di atas anggaran sebesar 94.068.498 GT.

INTERNATIONAL SHIP CALLS

The realization of international ship calls has increased in ship unit by 6,323 units from the budget of 5,765 units. Whereas in ship GT unit was 121,973,477 of the budget of 105,028,543 GT.

The increase in ship traffic in unit occurred in Tanjung Priok Port Branch (11.94%), Panjang (1.6%), Palembang (67.79%), Pontianak (45.33%), and Jambi (73, 33%) branches. The international ship traffic has increased in GT in Tanjung Priok (15.99%), Panjang (2.58%), Palembang (92.51%), Pontianak (10.60%), and Jambi (87.71%) branches.

Overall, international ship calls traffic in GT experienced an increase due to:

1. The achievement of international ship calls in Tanjung Priok port, which increased by 13,795,254 GT or 100,372,763 GT from the budget of 86,577,515 GT. The increase was for general cargo vessels (77.21%), container ships (9.76%).
2. The increase of ship GT in Panjang for the types of general cargo vessels (32.44%), container ships (31.78%).
3. The increase of ship unit and GT in Palembang port for the types of general cargo vessels (41.08%), liquid bulk vessels (54.64%), dry bulk vessels (26.71%), container ships (65.54%), and ro-ro ships (64.4%).
4. The increase of ship GT in Pontianak Port Branch for the types of general cargo vessels (32.12%), container ships (13.73%), ro-ro ships (34.5%) and passenger ships (12.6%).
5. The increase of ship calls in Jambi Port Branch for the types of general cargo vessels, liquid bulk vessels, dry bulk vessels and container ships.

DOMESTIC SHIP CALLS

Domestic ship calls in 2018 increased by 3.20% or 26,218 units from the budgeted amount of 25,378 units, while for GT reaching 6.78% or 100,908,199 GT above the budget of 94,068,498 GT.

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

Traffic kunjungan kapal mengalami peningkatan dalam satuan GT terdapat di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (0,64%), Panjang (18,04%), Palembang (38,87%), Pontianak (20,93%), Cirebon (5,04%), Sunda kelapa (7,26%), Jambi (164,95%), dan Bengkulu (2,83%).

Realisasi kunjungan kapal dengan ukuran GT / volume yang besar terjadi karena:

1. Meningkatnya kunjungan kapal *general cargo* dan kapal peti kemas di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Meningkatnya volume kapal, kapal curah cair, kapal peti kemas dan kapal ro-ro di cabang Panjang.
3. Meningkatnya volume untuk kapal *general cargo*, curah cair, peti kemas, ro-ro, dan kapal penumpang di pelabuhan Palembang.
4. Meningkatnya volume untuk kapal *general cargo*, curah cair, peti kemas dan penumpang di pelabuhan Pontianak.
5. Meningkatnya volume *general cargo*, kapal curah kering di Cabang Pelabuhan Cirebon.
6. Meningkatnya arus kunjungan kapal curah kering dan kapal peti kemas.
7. Kunjungan kapal dalam negeri untuk jenis kapal curah kering dan kapal peti kemas di Cabang Pelabuhan Sunda kelapa mengalami peningkatan.
8. Meningkatnya volume kapal curah cair dan kapal curah kering di Cabang Pelabuhan Jambi.
9. Meningkatnya kapal curah cair dan kapal penumpang terjadi di Cabang Pelabuhan Bengkulu.

KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

Kunjungan kapal pelayaran rakyat mengalami penurunan sebesar 11,26% atau 2.900 Unit dari anggaran 3.227 Unit. Sedangkan dalam satuan GT juga mengalami penurunan sebesar 7,14% atau 538.325 GT dari anggaran 576.749 GT. Trafik arus kunjungan kapal pelabuhan rakyat yang mengalami penurunan terdapat di Cabang Pelabuhan Cirebon, Sunda kelapa, Jambi dan Pangkal Balam. Kunjungan kapal mengalami penurunan secara umum diakibatkan karena perubahan pola kemasan dari general cargo menjadi peti kemas, hal ini terjadi terutama kapal-kapal yang membawa muatan dari Sunda kelapa ke Pontianak.

KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN PERINTIS

Realisasi kunjungan kapal negara dan tamu pada tahun 2018 mencapai 182 Unit atau 19,67% di bawah anggaran 218 Unit. Sedangkan untuk GT kapal mencapai 717.934 GT atau mengalami penurunan sebesar 0,20% dari anggaran sebesar 719.334 GT.

Traffic ship calls increased in GT unit in Tanjung Priok Port Branch (0.64%), Panjang (18.04%), Palembang (38.87%), Pontianak (20.93%), Cirebon (5.04%), Sunda Kelapa (7.26%), Jambi (164.95%), and Bengkulu (2.83%) branches.

The realization of ship calls with the size of GT/large volume was due to:

1. Increased calls of general cargo vessels and container ships in Tanjung Priok Port Branch.
2. Increased volume of ships, liquid bulk vessels, container ships and ro-ro ships in Panjang branch.
3. Increased volume of general cargo, liquid bulk, container, ro-ro and passenger vessels in Palembang port.
4. Increased volume for general cargo, liquid bulk, container and passenger vessels in Pontianak port.
5. Increased volume of general cargo, dry bulk vessels in Cirebon port.
6. Increased traffic of dry bulk vessels and container ships calls.
7. Domestic ship calls for dry bulk vessels and container ships in Sunda Kelapa Port Branch. have increased.
8. Increased volume of liquid bulk vessels and dry bulk vessels in Jambi Port Branch.
9. Increased liquid bulk vessels and passenger vessels in Bengkulu Port Branch.

TRADITIONAL SHIP CALLS

The traditional ship calls has decreased by 11.26% or 2,900 units from the budget of 3,227 units. While in GT unit, it also decreased by 7.14% or 538,325 GT from the budget of 576,749 GT. Traffic of traditional shop calls that experienced a decrease were in Cirebon, Sunda Kelapa, Jambi and Pangkal Balam Ports Branch. Ship calls were generally declined due to changes in the pattern of packaging from general cargo to container, mainly to ships carrying cargo from Sunda Kelapa to Pontianak.

PACER SHIP CALLS

The realization of visitor/state ship calls in 2018 reached 182 units or 19.67% below the budget of 218 units. While for the ship GT reached 717,934 GT or decreased by 0.20% from the budget of 719,334 GT.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

KUNJUNGAN KAPAL NEGARA/TAMU

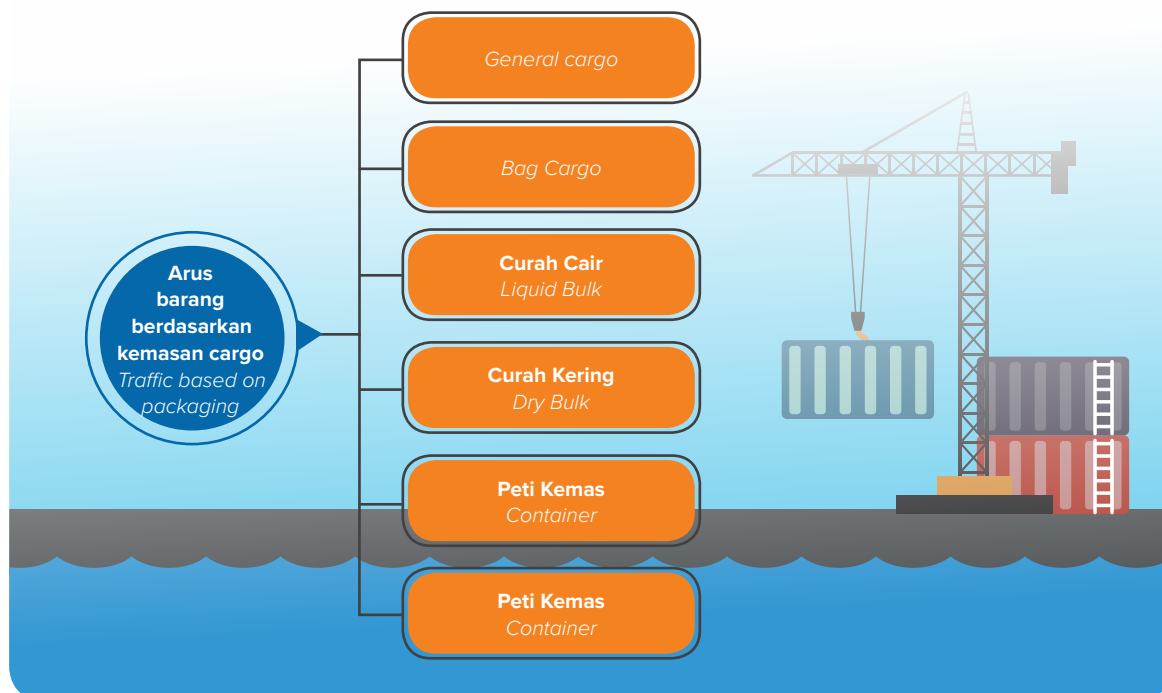
Realisasi kunjungan kapal negara dan tamu pada tahun 2018 mencapai 182 Unit atau 19,67 % di bawah anggaran 218 Unit. Sedangkan untuk GT kapal mencapai 717.934 GT atau mengalami penurunan sebesar 0,20% dari anggaran sebesar 719.334 GT .

Arus kunjungan kapal negara dan tamu mengalami penurunan dalam unit dari yang dianggarkan terdapat di cabang pelabuhan Tanjung Priok (23,08%), Panjang (43,59%), Teluk bayur (88,89%). Penurunan ini terjadi karena kapal negara lebih banyak melakukan kunjungan ke Indonesia bagian timur.

VISITOR/STATE SHIP CALLS

The realization of visitor/state ship calls in 2018 reached 182 units or 19.67% below the budget of 218 units. While for the ship GT reached 717,934 Gt or decreased by 0.20% from the budget of 719,334 GT.

The traffic of visitor/state ship calls has decreased in unit compared to those budgeted in Tanjung Priok (23.08%), Panjang (43.59%), Teluk Bayur (88.89%) port branches. This decline occurred because more visitor/state ships visited the eastern part of Indonesia.



ARUS BARANG

Secara keseluruhan, realisasi arus barang dalam kemasan non peti kemas tahun 2018 untuk satuan ton sebesar 61.971.277, sedangkan untuk kemasan peti kemas dalam satuan box, mencapai 5.770.672 dan dalam satuan TEUs sebesar 7.797.348 TEUs. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

CARGO TRAFFIC

Overall, the realization of cargo traffic in non container packaging in 2018 in tons reached 61,971,277, while for container packaging in boxes unit reached 5,770,672 and in TEUs unit reached 7,797,348 TEUs. The details are described in the following table

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

Tabel Arus Barang

Table of Cargo Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
General Cargo General Cargo	Ton	14.188.647	12.310.258	15
Bag Cargo Bag Cargo	Ton	4.850.049	4.807.628	1
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	10.126.169	9.430.092	7
Curah Kering Dry Bulk	Ton	26.734.504	26.004.169	3
Peti Kemas Container	Box	5.770.672	5.187.936	11
	TEUs	7.797.348	6.925.046	13
Lain-lain Others	Ton	6.071.882	4.539.536	34
Jumlah Total	Ton	61.971.277	57.091.681	9
	Box	5.770.672	5.187.936	11
	TEUs	7.797.348	6.925.046	13

ARUS BARANG GENERAL CARGO

Realisasi arus barang *General Cargo* mencapai 14.188.674 ton atau 9,17% di bawah anggaran sebesar 15.620.359 ton. Arus barang *general cargo* (umum) mengalami penurunan di cabang Panjang (5,80%), Palembang (11,61%), Banten (56,56%), Pangkal Balam (28,74%), dan Tanjung Pandan (37,38%). Penurunan Tahun 2018 disebabkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan penurunan volume barang *general cargo* terjadi karena turunnya produksi barang-barang material untuk pembangunan (konstruksi) seperti equipment, pipa, tiang listrik, tiang beton/tiang pancang dan barang *general cargo* lainnya.
2. Hal lainnya adalah karena belum beroperasinya PT Krakatau Bandar Samudra (KBS) yang semula akan dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimana volume general kargonya mencapai 2,6 juta ton.

ARUS BARANG BAG CARGO

Realisasi arus barang *bag cargo* mencapai 4.850.049 ton atau 12,56% di bawah anggaran sebesar 5.546.678 ton. Arus barang mengalami penurunan terjadi di Cabang Pelabuhan Panjang (8,5%), Telukbayur (23,58%), Pontianak (33,3%), Ciebon (13,76%), Banten (1,35%), Sunda kelapa (13,62%), Jambi (46,89%), Bengkulu (28,96%), Pangkalbalam (22,36%) . Volume arus bag cargo menurun terutama komoditi semen

GENERAL CARGO TRAFFIC

The realization of general cargo traffic reached 14,188,674 tons or 9.17% below the budget of 15,620,359 tons. The general cargo traffic was decreasing in Panjang (5.80%), Palembang (11.61%), Banten (56.56%), Pangkal Balam (28.74%), and Tanjung Pandan (37, 38%) branches. The decline in 2018 was due to the following:

1. Overall, the declining volume of general cargo occurred due to the decline in production of material goods for construction such as equipment, pipes, electricity poles, concrete poles/piles and other general cargo.
2. Other thing was because PT Krakatau Bandar Samudra (KBS) has not yet operated, which was originally planned to be operated by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), where gits cargo volume reached 2.6 million tons.

BAG CARGO TRAFFIC

The realization of bag cargo traffic reached 4,850,049 tons or 12.56% below the budget of 5,546,678 tons. The cargo traffic has decreased in Panjang (8.5%), Telukbayur (23.58%), Pontianak (33.3%), Ciebon (13.76%), Banten (1.35%), Sunda Kelapa (13.62%), Jambi (46.89%), Bengkulu (28.96%), Pangkal Balam (22.36%) Port Branches. The volume of bag cargo bag traffic decreased, especially the commodity of cement

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

bag and fertilizer between islands and the change in packaging pattern from bag cargo to container between islands of size 20, hence the costs incurred were more efficient and the quality of goods can be well maintained from damage caused by rain and other disturbances. In addition, the bag cargo traffic was not achieved by 660 thousand tons in KBS due to the absence of an agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT KBS.

ARUS BARANG CURAH CAIR

Realisasi arus barang curah cair mencapai 10.126.169 ton atau 22,17% di bawah anggaran sebesar 13.011.338 ton. Arus barang curah cair juga mengalami penurunan di cabang Tanjung Priok (26,71%), Teluk bayur (8,67%), Cirebon (21,32%), Sunda kelapa (36,79%), Bengkulu (11,46%), Pangkal Balam (0,12%), dan Tanjung Pandan (66,87%).

Trafik arus barang curah cair tidak mencapai target di cabang Tanjung Priok yang mencapai 1.458.596 ton dari anggaran 1.990.112 ton. Sementara realisasi arus barang curah di pelabuhan Teluk bayur hanya mencapai 2.337.936 ton dari 2.559.826 ton yang dianggarkan.

Tidak tercapainya arus barang curah cair disebabkan menurunnya kegiatan ekspor CPO ke India dan Eropa akibat tingginya bea masuk yang ditetapkan importir serta turunnya harga komoditas CPO di pasar global serta akibat penghapusan biofuel berbasis pangan di Eropa. Selain itu penurunan arus curah cair akibat berkurangnya permintaan kebutuhan dalam negeri dan menurunnya ekspor komoditi CPO dan turunannya.

ARUS BARANG CURAH KERING

Realisasi arus barang curah kering sebesar 26.734.504 ton atau 21,69% di bawah anggaran sebesar 34.138.550 ton. Realisasi arus barang curah kering mengalami penurunan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (26,34%), Teluk bayur (30,09%), Cirebon (7,56%), Banten (78,11%), Sunda kelapa (7,15%), Bengkulu (12,67%), Pangkal Balam (46,54%).

Arus barang curah kering mengalami penurunan terutama disebabkan sebagai berikut:

1. Di Cabang Pelabuhan Banten diakibatkan tidak beroperasinya PT Semen Holcim, menurunnya permintaan impor bahan curah pangan dan non pangan di dermaga umum serta tidak terlaksanannya akuisisi PT Krakatau Bandar Samudra (KBS) dimana untuk volume curah kering dianggarkan sebesar 9,9 juta ton.

and fertilizer between islands and the change in packaging pattern from bag cargo to container between islands of size 20, hence the costs incurred were more efficient and the quality of goods can be well maintained from damage caused by rain and other disturbances. In addition, the bag cargo traffic was not achieved by 660 thousand tons in KBS due to the absence of an agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT KBS.

LIQUID BULK TRAFFIC

The realization of liquid bulk traffic reached 10,126,169 tons or 22.17% below the budget of 13,011,338 tons. The liquid bulk traffic decreased in Tanjung Priok (26.71%), Teluk Bayur (8.67%), Cirebon (21.32%), Sunda Kelapa (36.79%), Bengkulu (11.46%), Pangkal Balam (0.12%), and Tanjung Pandan (66.87%) branches.

The liquid bulk traffic did not reach the target in Tanjung Priok branch, amounted to 1,458,596 tons from the budget of 1,990,112 tons. While the realization of liquid bulk traffic in Teluk Bayur port only reached 2,337,936 tons from 2,559,826 tons budgeted.

The failure to achieve liquid bulk traffic was driven by a decline in CPO export activities to India and Europe due to the high import duty set by importers, a decline in CPO commodity prices in the global market, and the elimination of food-based biofuels in Europe. Apart from that, the decline in liquid bulk traffic was also caused by the reduced domestic demand and the declined export of CPO commodities and their derivatives.

DRY BULK TRAFFIC

The realization of dry bulk traffic amounted to 26,734,504 tons or 21.69% below the budget of 34,138,550 tons. The realization of dry bulk traffic has decreased in Tanjung Priok (26.34%), Teluk Bayur (30.09%), Cirebon (7.56%), Banten (78.11%), Sunda Kelapa (7.15%), Bengkulu (12.67%), Pangkal Balam (46.54%) Port Branches.

The dry bulk traffic has experienced a decrease mainly due to the following:

1. In Banten Port Branch was caused by the non-operation of PT Semen Holcim, the decline in demand for import of food and non-food ingredients in general dock, and the non-implementation of PT KBS's acquisition (Krakatau Bandar Samudra) where the dry bulk volume was budgeted at 9.9 million tons.

KINERJA SEGMENT USAHA

Business Segment Performance

2. Di Cabang Pelabuhan Bengkulu komoditi unggulan batubara turun diakibatkan mundurnya rencana pengerukan alur kolam dermaga sehingga kapal jenis tongkang dengan GT kecil yang sandar dengan volume sedikit untuk melakukan kegiatan pemuatan batubara, cangkang, dan lain muatan curah lainnya.
3. Di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur realisasi curah kering mencapai 1.567.851 ton dari anggaran 2.136.364 ton hal ini disebabkan tidak beroperasinya kegiatan bongkar komoditi batubara milik PT Semen Padang dari Kalimantan.

ARUS BARANG PETI KEMAS

Total Arus Peti kemas pada tahun 2018 mencapai 5.770.672 Box atau mengalami kenaikan 8,56% dari anggaran 5.315.652 Box. Sedangkan untuk satuan Teu's juga mengalami kenaikan sebesar 9,78 % atau terealisasi 7.797.348 Teu's dari anggaran 7.102.776 Teu's.

Arus peti kemas mengalami kenaikan terhadap anggaran tahun 2018 di lingkungan cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero) adalah antara lain Cabang Pelabuhan Palembang (14,07%), Telukbayur (8,91%), Pontianak (21,36%), Sunda kelapa (24,84%), Jambi (11,57%), Pangkal balam (17,57%). Kenaikan yang terjadi di Anak Perusahaan maupun afiliasi adalah di Jakarta International Container Terminal (JICT) (5,48%), PT. KSO KOJA (19,23%) dan NPCT 1 (New Port Container Terminal) (41%).

Arus peti kemas yang mengalami penurunan dalam satuan Teus terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (0,25%), Panjang (0,58%), dan Tanjung Pandan (6%). Sedangkan Cabang Pelabuhan Cirebon yang sudah dianggarkan tahun 2018 belum dapat direalisasikan sesuai target.

ARUS BARANG DALAM KEMASAN LAINNYA

Realisasi arus barang kemasan lainnya untuk tahun 2018 sebesar 6.071.882 Ton atau 33,63% di atas anggaran sebesar 4.543.722 Ton. Arus kemasan barang lainnya mengalami kenaikan yang terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebesar (33,63%). Trafik arus kemasan lainnya mengalami peningkatan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan telah dicatatnya volume barang di PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (PT IKT, Tbk) yang membawa kendaraan beserta *spare part* lainnya.

2. In Bengkulu Port Branch, coal as the main commodity decreased due to the delay of the plan to dredge the dock's channel so that barge type vessels with small GT berth with a small volume will be able to carry out the activities of loading coal, shells and other bulk cargo.
3. In Teluk Bayur Port Branch, the realization of dry bulk reached 1,567,851 tons from the budget of 2,136,364 tons due to the non-operation of coal commodity unloading activities of PT Semen Padang from Kalimantan.

CONTAINER TRAFFIC

Total Container Traffic in 2018 reached 5,770,672 Boxes or an increase of 8.56% from the budget of 5,315,652 Boxes. Meanwhile, the Teu's unit also experienced an increase of 9.78% or 7,797,348 TEUs from the budget of 7,102,776 TEUs.

The container traffic has increased compared to the 2018 budget in the branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero), among others, Palembang Port Branch (14.07%), Teluk Bayur (8.91%), Pontianak (21.36%), Sunda Kelapa (24.84%), Jambi (11.57%), Pangkal Balam (17.57%). The increase in subsidiaries and affiliates occurred in Jakarta International Container Terminal (JICT) (5.48%), PT. KSO KOJA (19.23%) and NPCT 1 (New Port Container Terminal) (41%).

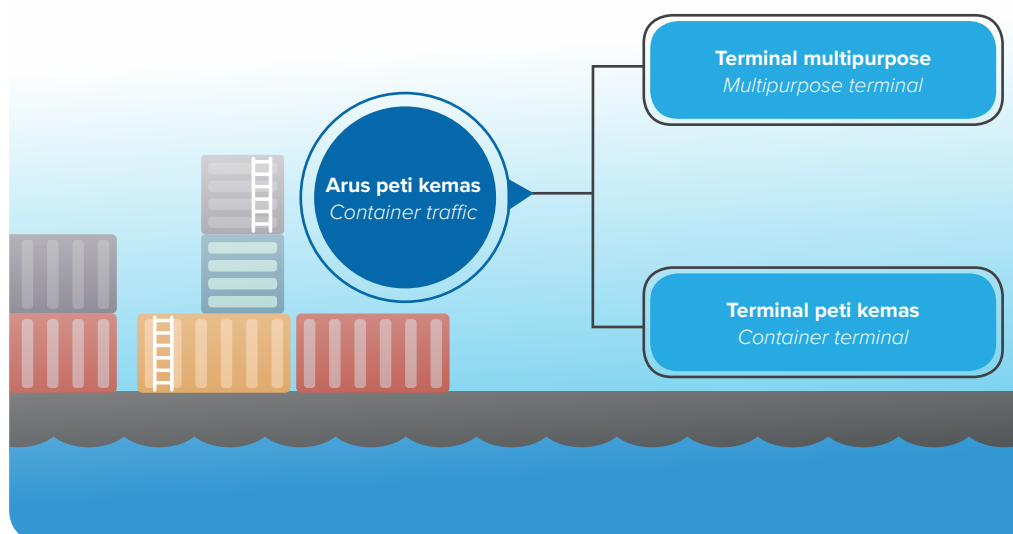
The decreased container traffic in Teus unit occurred in Tanjung Priok (0.25%), Panjang (0.58%), and Tanjung Pandan (6%) Port Branches. Whereas Cirebon Port Branch that has been budgeted for 2018 cannot yet be realized as targeted.

OTHER CARGO TRAFFIC

The realization of other cargo traffic in 2018 amounted to 6,071,882 Tons or 33.63% above the budget of 4,543,722 Tons. The other cargo traffic has increased in Tanjung Priok Port Branch (33.63%). Other cargo trafficking experienced an increase at Tanjung Priok due to the recorded volume of goods at PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), which is carrying vehicles and other spare parts.

ARUS PETI KEMAS

CONTAINER TRAFFIC



Pada tahun 2018, arus peti kemas yang dilayani pelabuhan dalam kelolaan IPC sebagian besar merupakan lalu lintas luar negeri, yaitu 64,10% atau setara dengan 4.897.148 TEUs. Sedangkan untuk peti kemas dalam negeri hanya sebesar 35,90% atau 2.743.165 TEUs, kegiatan ekspor impor mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Penurunan kegiatan ekspor impor pada tahun 2018 disebabkan menurunnya nilai mata uang rupiah sehingga impor terhadap barang – barang konsumtif mengalami penurunan. Tahun 2017 kegiatan ekspor impor di IPC mencapai 4.861.208 TEUs atau 70,19% sedangkan perdagangan domestik mencapai 2.063.838 TEUs atau 29,80%.

In 2018, the container traffic serviced by ports under IPC management was mostly foreign traffic, amounted to 64.10% or equivalent to 4,897,148 TEUs. As for domestic container was only 35.90% or 2,743,165 TEUs, import-export activities declined compared to 2017. The decline in export and import activities in 2018 was due to a decline in the value of rupiah, hence reducing the imports of consumer goods. In 2017, export and import activities in IPC reached 4,861,208 TEUs or 70.19%, while domestic trade reached 2,063,838 TEUs or 29.80%.

Tabel Arus Peti Kemas

Table of Container Traffic

	Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
1	TANJUNG PRIOK				
	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Box	2.116.328	2.026.376	4,44
		TEUs	2.627.624	2.551.921	2,97
	Dalam Negeri <i>Domestic</i>	TEUs	2.037.606	1.791.643	13,73
	Luar Negeri <i>International</i>	TEUs	590.018	760.278	(22,39)
	New Priok Container Terminal I	Box	745.918	527.986	41,28
		TEUs	1.169.759	825.471	41,71

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	-	-	-
	Luar Negeri International	TEUs	1.169.759	-	41,71
	TPK Koja	Box	590.094	734.040	(19,61)
		TEUs	889.011	1.091.562	(18,56)
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	-	-	
	Luar Negeri International	TEUs	889.011	1.091.562	(18,56)
	JICT	Box	1.398.806	1.134.715	23,27
		TEUs	2.057.131	1.610.809	27,71
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	-	-	
	Luar Negeri International	TEUs	2.057.131	1.610.809	27,71
	TOTAL 1	Box	4.851.146	4.423.117	9,68
		TEUs	6.743.523	6.079.762	10,92
2	Panjang (TPK)	Box	95.658	102.434	(6,61)
		TEUs	116.407	119.475	(2,57)
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	17.095	20.120	(15,06)
	Luar Negeri International	TEUs	99.312	99.355	(0,04)
3	Palembang (TPK)	Box	154.710	158.251	(2,24)
		TEUs	171.594	172.799	(0,70)
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	61.390	59.225	3,66
	Luar Negeri International	TEUs	110.204	113.574	(2,97)
4	Teluk Bayur (TPK)	Box	77.154	71.576	7,79
		TEUs	84.659	78.205	8,25
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	75.573	-	9,07
	Luar Negeri International	TEUs	9.086	78.205	1,92
5	Pontianak (TPK)	Box	262.085	245.242	6,87
		TEUs	297.318	278.642	6,70
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	279.411	268.172	6,23

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

	Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
	Luar Negeri International	TEUs	17.907	10.470	14,64
6	Banten	Box	17	-	100,00
		TEUs	19	-	100,00
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	19	-	100,00
	Luar Negeri International	TEUs	-	-	-
7	Cirebon	Box	-	-	-
		TEUs	-	-	-
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	-	-	-
	Luar Negeri International	TEUs	-	-	-
8	Jambi	Box	39.235	35.634	10,11
		TEUs	48.976	42.800	14,43
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	17.093	12.630	35,33
	Luar Negeri International	TEUs	31.883	30.170	5,68
9	Bengkulu	Box	26.818	22.637	18,47
		TEUs	27.185	22.785	19,31
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	27.185	22.785	19,31
	Luar Negeri International	TEUs	-	-	-
10	Sunda Kelapa	Box	78.953	67.970	16,16
		TEUs	80.701	69.323	19,31
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	80.701	69.323	19,31
	Luar Negeri International	TEUs	-	-	-
11	Pangkal Balam	Box	55.580	49.719	11,79
		TEUs	55.870	49.899	11,97
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	50.815	45.333	12,09
	Luar Negeri International	TEUs	5.055	4.566	10,71
12	Tanjung Pandan	Box	14.060	11.356	23,81
		TEUs	14.060	11.356	23,81
	Dalam Negeri Domestic	TEUs	14.060	11.356	23,81

KINERJA SEGMENT USAHA
Business Segment Performance

	Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i> (%)
	Luar Negeri International	TEUs	-	-	-
13	Sub Total Terminal Multipurpose <i>Sub Total Multipurpose Terminal</i>	Box	2.291.7562	2.178.058	5,22
		TEUs	2.805.459	2.705.284	3,70
14	Sub Total Terminal Peti Kemas <i>Sub Total Container Terminal</i>	Box	3.363.660	3.009.878	11,75
		TEUs	4.834.854	4.219.762	14,58
	Total	Box	5.655.416	5.187.936	9,01
		TEUs	7.640.312	6.925.046	10,33

TERMINAL MULTIPURPOSE

Realisasi arus peti kemas di dermaga konvensional sebesar 2.291.756 Box atau 2,23% di bawah anggaran sebesar 2.344.119 Box, sedangkan untuk satuan TEUs mencapai 2.805.459 TEUs atau 4,93% di bawah anggaran 2.951.095 TEUs. Arus barang di terminal konvensional mengalami penurunan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (5,87%), Panjang (0,58%), dan Tanjung Pandan (6%).

Adapun penurunan tersebut disebabkan menurunnya trafik peti kemas dalam negeri akibat berkurangnya kunjungan kapal dalam negeri yang membawa peti kemas ke dan dari Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dimana didalamnya membawa kebutuhan pangan dan sandang dalam kemasan peti kemas ke berbagai Cabang Pelabuhan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) serta belum terlaksana kegiatan bongkar muat di Cabang Pelabuhan Cirebon yang direncanakan pada tahun 2018.

TERMINAL PETI KEMAS

Realisasi arus peti kemas di dermaga peti kemas sebesar 3.363.660 Box atau 13,20% di atas anggaran sebesar 2.971.533 sedangkan untuk satuan TEU's mencapai 4.834.854 Teu's atau 16,46% di atas anggaran 4.151.681 TEU's.

Peningkatan arus peti kemas di terminal peti kemas khususnya di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan perubahan ukuran peti kemas yang sebelumnya memakai 20' menjadi ukuran 40'. Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat di Terminal Peti kemas mengalami peningkatan baik dari ekspor/impur untuk perdagangan luar negeri dan bongkar/muat untuk perdagangan dalam negeri.

MULTIPURPOSE TERMINAL

The realization of container traffic in conventional dock amounted to 2,291,756 Boxes or 2.23% below the budget of 2,344,119 Boxes, while in TEUs unit amounted to 2,805,459 Teu's or 4.93% below the budget of 2,951,095 TEUs. The cargo traffic in conventional terminal has decreased in Tanjung Priok (5.87%), Panjang (0.58%), and Tanjung Pandan (6%) port branches.

The decrease was due to the decline in domestic container traffic due to the reduction of domestic ship calls that brought containers to and from Tanjung Priok Port Branch wherein they brought food and clothing needs in container packaging to various port branches within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as well as the unrealized of loading and unloading activities in Cirebon Port Branch, which was planned for 2018.

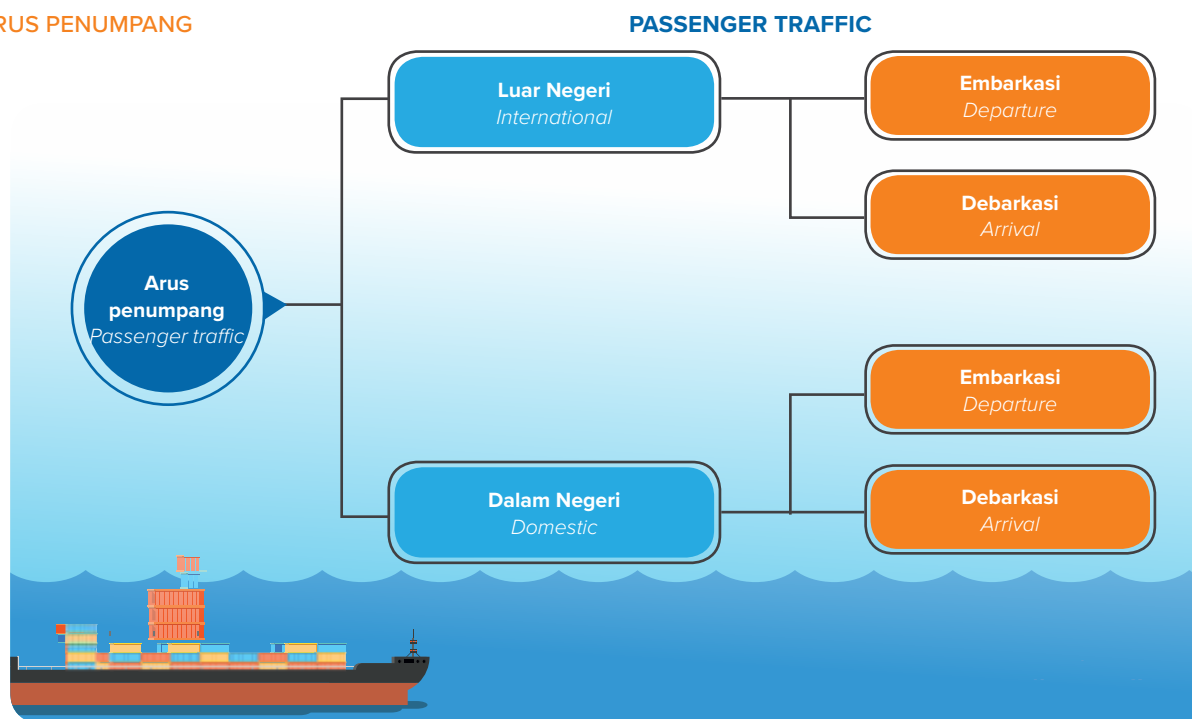
CONTAINER TERMINAL

The realization of container traffic in container dock was 3,363,660 Boxes or 13.20% above the budget of 2,971,533 while in TEU's unit was 4,834,854 Teu's or 16.46% above the budget of 4,151,681 TEU's.

The increased container traffic in container terminals, especially in Tanjung Priok Port Branch was due to changes in the size of container from previously used 20' to size 40'. Overall, the activities in Container Terminal have increased both from exports/imports for foreign trade and loading/unloading for domestic trade.

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

ARUS PENUMPANG



Realisasi arus penumpang pada tahun 2018 mencapai 714.931 orang atau 17 % di atas pencapaian tahun 2017 yang sebanyak 612.680 Orang. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

The realization of passenger traffic in 2018 reached 714,931 people or 17% higher than the achievement in 2017 of 612,680 people. The details are described in the table below:

Tabel Arus Penumpang

Table of Passenger Traffic

Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
Luar Negeri <i>International</i>				
Embarkasi <i>Departure</i>	Orang <i>People</i>	9.720	3.434	183
Debarkasi <i>Arrival</i>	Orang <i>People</i>	9.707	3.394	186
Dalam Negeri <i>Domestic</i>				
Embarkasi <i>Departure</i>	Orang <i>People</i>	341.584	284.171	20
Debarkasi <i>Arrival</i>	Orang <i>People</i>	353.920	321.681	10
Jumlah <i>Total</i>	Orang <i>People</i>	714.931	612.680	17

KINERJA SEGMENT USAHA
 Business Segment Performance

Arus penumpang mengalami penurunan di bawah realisasi tahun 2017 hampir di seluruh Cabang Pelabuhan. Hal ini disebabkan oleh pengalihan moda transportasi dari laut ke udara.

The passenger traffic experienced a decrease below the realization in 2017 in almost all Port Branches. This was caused by the shift of transportation modes from sea to air.

Kendati demikian, pada tahun 2018, beberapa Cabang Pelabuhan di bawah pengelolaan IPC menerima kedatangan sejumlah kapal pesiar. Penjelasan lengkap disampaikan pada tabel di bawah ini.

However, in 2018, several port branches under the management of IPC received the arrival of a number of cruise ships. The full description is presented in the table below.

Tabel Kedatangan Kapal Pesiar Tahun 2018

Table of Cruise Ships Arrival in 2018

Tanggal Date	Bendera Flag	Nama Kapal Name of Ship	Pelabuhan Asal Port of Origin	Pelabuhan Tujuan Destination Port
5/01/2018	NETHERLANDS/ BELANDA	VOLENDAM. MV	SINGAPORE	SINGAPORE
4/01/2018	JAPAN	R.V MIRAI	SINGAPORE	SHIMIZU/JEPANG
4/02/2018	BAHAMA	MS SEVEN SEAS VOYAGER	SINGAPORE	SEMARANG
16/02/2018	NETHERLANDS/ BELANDA	VOLENDAM. MV	SINGAPORE	TANJUNG MAS/SRG
10/03/2018	BAHAMA	EUROPA. MV*	TANJUNG MAS/SRG	SINGAPORE
10/05/2018	MALTA	MV. STAR CLIPPER	PRAMUKA	SINGAPORE
22/10/2018	MALTA	MV. STAR CLIPPER	KARIMUN JAWA	SINGAPORE
25/11/2018	NORWEGIA	MS VIKING ORION	SINGAPORE	DARWIN/AUSTRALIA
8/12/2018	MALTA	MS. AZAMARA QUEST	SINGAPORE	JAKARTA
25/12/2018	BAHAMA	MS. STAR LEGEND	SINGAPORE	SINGAPORE

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

Sampai dengan tahun 2018, IPC memiliki 14 (empat belas) Entitas Anak, 2 (dua) Entitas Asosiasi, dan 1 (satu) Kerjasama Operasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai entitas anak disajikan dalam bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini. Adapun kinerja entitas anak IPC adalah sebagai berikut.

Up to 2018, IPC has 14 (fourteen) Subsidiaries, 2 (two) Associates, and 1 (one) Joint Operation. A more complete explanation on subsidiaries is presented in the Profile section of this Annual Report. The performance of IPC subsidiaries is as follows.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	2.314.001.766	2.999.785.517	(22,86)
Beban Usaha Operating Expenses	1.818.335.838	2.428.795.000	(25,13)
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	495.665.929	570.990.517	(13,19)

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp2,31 triliun menurun 22,86% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,99 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kegiatan peti kemas ke Anak Perusahaan IPC yaitu PT IPC TPK tehitung mulai tanggal 16 Juli 2018 dan pengambilalihan pengelolaan *terminal multipurpose* pada Cabang Pelabuhan Jambi, Pontianak dan Bengkulu baru terealisasi bulan Agustus 2018 dan dermaga ex inggom terealisasi bulan September 2018 serta Cabang Pelabuhan Banten pada bulan September 2018 sedangkan untuk Cabang Pelabuhan Teluk Bayur belum terealisasi sampai akhir tahun 2018.

Operating Revenues

Overall, the net operating revenues in 2018 was Rp2.31 trillion, decreased by 22.86% compared to 2017 of Rp2.99 trillion. This was due to the shift of container activities to IPC Subsidiary, PT IPC TPK starting on July 16, 2018 and the realization of the takeover of management of multipurpose terminal in Jambi, Pontianak and Bengkulu Port Branches was recently occurred in August 2018 and Ex Inggom Dock in September 2018 and Banten Port Branch in September 2018, while Teluk Bayur Port Branch has not been realized until the end of 2018.

Beban Usaha

Secara keseluruhan realisasi beban usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp1,81 triliun atau menurun 25,13% dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp2,42 triliun. Hal ini terutama disebabkan dari sisi beban umum, khususnya kewajiban konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami penurunan disebabkan adanya kesepakatan baru terkait zonasi area dengan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok serta beban pegawai dan beban pemeliharaan yang mengalami penurunan akibat penyerahan segmen terminal peti kemas untuk dikelola oleh PT IPC TPK yang terealisasi mulai bulan 16 Juli Tahun 2018 lebih besar dari penambahan pengelolaan *terminal multipurpose* pada Cabang Pelabuhan Jambi,

Operating Expenses

Overall, the realization of operating expenses in 2018 was Rp1.81 trillion or decreased by 25.13% from the realization in 2017 of Rp2.42 trillion. This was mainly caused by the general expenses, particularly the concession obligations to the port authority and the decreasing obligations on Land and Building Taxes due to new agreement related to zoning of Tanjung Priok Branch area as well as employee expenses and maintenance expenses which decreased due to the realization of handover of container terminal segment to be managed by PT IPC TPK starting on July 16, 2018 was higher than the addition of management of multipurpose terminals in Jambi, Pontianak and Bengkulu Port Branches which were only realized in August 2018 and Ex Inggom in

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

Pontianak dan Bengkulu yang baru terealisasi bulan Agustus 2018 dan dermaga ex inggom terealisasi bulan September 2018 serta Cabang Pelabuhan Banten terealisasi pada bulan September 2018.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp495,7 miliar menurun 13,19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp570,99 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.

KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	815.873.197	875.857.323	(6,86)
Beban Usaha Operating Expenses	633.749.043	639.040.424	(0,83)
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	182.124.155	236.816.897	(23,10)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp815,87 miliar sedikit menurun 6,86% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp875,86 miliar. Hal ini disebabkan sudah tidak ada lagi limpahan pengoperasian dermaga sepanjang 300 meter milik PT JICT kepada KSO Koja.

Beban Usaha

Secara keseluruhan realisasi beban usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp633,75 miliar atau menurun 0,83% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp639,04 miliar. Berikut penjelasan terkait penurunan beban usaha:

1. Beban bahan dan Beban KSMU mengalami penurunan, khususnya dikarenakan KSO TPK Koja tidak lagi mengoperasikan dermaga PT JICT sepanjang 300 meter;
2. Penurunan beban pemeliharaan berkaitan dengan penurunan realisasi pemeliharaan untuk alat-alat fasilitas pelabuhan (QCC, RTG, *Head Truck* dan *Chasis*);
3. Beban Asuransi terkait dengan turunnya nilai aset pertanggunggunaan dan negosiasi dengan penyedia asuransi

September 2018 and Banten Port Branch in September 2018.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the net profit (loss) in 2018 was Rp495.7 billion, decreased by 13.19% compared to the realization in 2017 of Rp570.99 billion. The decreasing profit (loss) from operation was in line with the decrease in revenues earned by PT Pelabuhan Tanjung Priok.

KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

Overall, the net operating revenues in 2018 was Rp815.87 billion, a slight decrease of 6.86% compared to the realization in 2017 amounted to Rp875.86 billion. This was due to no more overflow of the 300-meter-long dock owned by PT JICT to KSO Koja.

Operating Expenses

Overall, the realization of operating expenses in 2018 amounted to Rp633.75 billion or decreased by 0.83% compared to Rp639.04 billion in 2017. The following is an explanation regarding the decreased operating expenses:

1. Material expenses and KSMU expenses decreased, especially because KSO TPK Koja is no longer operated the 300 meters dock of PT JICT;
2. Decrease in maintenance expenses related to a decrease in realization of maintenance for port facilities (QCC, RTG, *Head Truck* and *Chasis*);
3. Insurance expenses related to the decrease in the value of insurance assets and negotiations with insurance

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

serta turunnya beban asuransi pegawai terkait dengan banyaknya pegawai yang purna tugas dan kebijakan *zero growth*;

4. Beban Umum terkait dengan Penurunan beban umum terutama berkaitan dengan efisiensi kegiatan promosi, perhitungan final Imbalan Kerja (PSAK 24) penurunan beban konsesi dan PNBPN terkait dengan menurunnya pendapatan.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp182,184 miliar sedikit menurun 23,10% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp236,817 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh KSO Terminal Peti kemas Koja.

PT JASA ARMADA INDONESIA, TBK

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	727.051.393	745.132.715	(2,43)
Beban Usaha Operating Expenses	600.900.221	578.962.713	3,79
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	126.151.172	166.170.002	(24,08)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha bersih tahun 2018 sebesar Rp727,05 miliar atau turun 2,43% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp745,13 miliar. Hal tersebut terutama karena realisasi pendapatan tunda tahun 2018 di bawah realisasi tahun 2017 yang disebabkan adanya penerapan perjanjian kerjasama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan persentase bagi hasil PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 15% dan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk (PT JAI, Tbk) sebesar 85% lebih kecil dari tahun 2017.

Beban Usaha

Beban usaha terealisasi sebesar Rp600,90 miliar atau meningkat 3,79% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp578,96 miliar. Hal tersebut karena beban pegawai akibat penyesuaian remunerasi pegawai IPC yang diperbantukan ke PT JAI Tbk atas penerapan PKB 2016-2018, beban bahan akibat

providers as well as a decrease in employee insurance costs related to the number of employees who are retired and zero growth policy;

4. General expenses related to the decrease in general expenses mainly the efficiency of promotional activities, the final calculation of Employee Benefits (PSAK 24) reduction in concession expenses and PNBPN related to declining income.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the net profit (loss) from operation in 2018 amounted to Rp182,184 billion, a slight decrease of 23.10% compared to Rp236,817 billion in 2017. The declining profit (loss) from operation was in line with the decline in revenues earned by KSO Terminal Peti kemas Koja.

PT JASA ARMADA INDONESIA, TBK

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

The net operating revenues in 2018 amounted to Rp727.05 billion, down by 2.43% compared to 2017 of Rp745.13 billion. This was mainly due to the realization of towage revenues in 2018 was under the realization in 2017 due to the implementation of cooperation agreement in the provision of auxiliary facilities and pilotage infrastructure in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with profit sharing percentage of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) at 15% and PT Jasa Armada Indonesia, Tbk (PT JAI, Tbk) at 85%, smaller than 2017.

Operating Expenses

The operating expenses were realized at Rp600.90 billion, up by 3.79% compared to 2017 amounting to Rp578.96 billion. This was driven by employee expenses due to remuneration adjustments of IPC employees who were assigned to PT JAI Tbk for the application of PKB 2016-2018, material expenses

KINERJA ENTITAS ANAK
Subsidiary Performance

kenaikan harga solar industri dan frekuensi penggunaan kapal, beban pemeliharaan tahun 2018 mengalami kenaikan di atas realisasi beban pemeliharaan tahun 2017 dengan adanya beberapa pekerjaan pemeliharaan aset kapal yang belum dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2018 serta beban penyusutan tahun 2018 di atas realisasi tahun 2017 karena adanya penambahan aset *inbreng* pada bulan Oktober 2017.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp126,15 miliar menurun 24,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp166,17 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh PT Jasa Armada Indonesia, Tbk.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, TBK

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	521.835.612	422.052.835	23,64
Beban Usaha Operating Expenses	330.620.825	266.344.303	24,13
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	191.214.788	155.708.532	22,80

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha naik sebesar 23,64% menjadi Rp521,83 miliar di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp422,05 miliar. Hal ini disebabkan adanya penambahan kunjungan kapal milik NYK Line, serta perpindahan layanan kapal dalam negeri milik Roro Samudra Putra dari Cabang Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok ke PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (PT IKT, Tbk) yang pada tahun sebelumnya belum ada, dan pengoperasian dermaga eks presiden pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Beban Usaha

Beban usaha naik sebesar 24,11% menjadi Rp330,62 miliar di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp266,34 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada:

due to rising industrial diesel prices and frequency of ship use, an increase in 2018's maintenance expenses above the realization of maintenance expenses in 2017 with several ship maintenance assets that have not been fully done in 2018 and 2018's depreciation expenses was above the realization in 2017 due to the addition of injection assets in October 2017.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the net profit (loss) from operation in 2018 amounting to Rp126.15 billion, decreased by 24.08% compared to 2017's realization of Rp166.17 billion. The decrease in profit (loss) from operation was in line with the decline in revenues obtained by PT Jasa Armada Indonesia, Tbk.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, TBK

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

The operating revenues rose by 23.64% to Rp521.83 billion in 2018, an increase compared to 2017 amounting to Rp422.05 billion. This was caused by the addition of ship calls owned by NYK Line, as well as the shift of domestic ship services owned by Roro Samudra Putra from Tanjung Priok Port Branch to PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (PT IKT, Tbk) which did not exist in the previous year, and the operation of the former president's dock at Tanjung Priok Port Branch.

Operating Expenses

The operating expenses rose by 24.11% to Rp330.62 billion in 2018, an increase compared to 2017 of Rp266.34 billion. This occurred because of an increase in:

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

1. Beban Pegawai: terkait dengan adanya penambahan pegawai dan penyesuaian remunerasi karyawan IPC yang ditugaskan di PT IKT Tbk (terkait PKB 2016-2018)
2. Beban Pemeliharaan: pemeliharaan gedung parkir dan kebersihan atas meningkatnya volume penggunaan fasilitas gedung parkir.
3. Beban Penyusutan: kenaikan aset tetap sejalan dengan terealisasinya sebagian pembangunan gedung parkir.
4. Beban KSMU: meningkat sejalan dengan peningkatan nilai *rental fee* dari tahun sebelumnya.
5. Beban Umum: sejalan dengan peningkatan pendapatan sehingga berdampak pada peningkatan beban konsesi.

1. Employee Expenses: related to the addition of employees and remuneration adjustments of IPC employees assigned to PT IKT Tbk (related to PKB 2016-2018)
2. Maintenance Expenses: maintenance of parking buildings and cleanliness for the increased usage volume of parking facilities.
3. Depreciation Expenses: increased fixed assets in line with the realization of some part of parking lots construction.
4. KSMU Expenses: increased in line with the increase in rental fee values from the previous year.
5. General Expenses: in line with the increase in revenues, resulting in an increase in concession expenses.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp191,22 miliar meningkat 22,80% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp155,71 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the net profit (loss) in 2018 amounted to Rp191.22 billion, an increase of 22.80% compared to Rp155.71 billion in 2017. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues earned by PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk.

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	857.044.645	706.040.487	21,39
Beban Usaha Operating Expenses	738.976.163	593.329.443	24,55
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	118.068.483	112.711.043	4,75

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih meningkat sebesar 21,39% dari Rp706,04 miliar di tahun 2017 menjadi Rp857,04 miliar di tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan pada periode yang sama tahun 2017, pendapatan usaha hanya terdiri dari pendapatan sewa 450 m selama setahun dan pendapatan sewa atas 850 m hanya selama 9 (sembilan) bulan yang beroperasi per tanggal 16 Maret 2017. Selain itu, untuk pendapatan *project management fee* atas proyek Kijing baru terealisasi selama 2 (dua) bulan yaitu November sampai dengan Desember 2017. Sedangkan pada realisasi pendapatan usaha sampai dengan tahun 2018 terdiri dari pendapatan sewa 450 m dan 850 m dermaga CT1 serta pendapatan *project management*

Net Operating Revenues

The Net operating income increased by 21.39% from Rp706.04 billion in 2017 to Rp857.04 billion in 2018. This was due to the fact that in the same period in 2017, operating revenues consisted of only lease revenues of 450 m per year and lease revenues above 850 m only for 9 (nine) months, which were operating as of March 16, 2017. In addition, the project management fee for Kijing project has only been realized for 2 (two) months, namely November to December 2017. Meanwhile, the realization of operating revenues in 2018 consisted of lease revenues of 450 m and 850 m CT1 dock and revenues from project management fee for the construction of Kijing Port for 10 (ten) months and

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

fee atas proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk bulan November sampai dengan Desember 2018 sedang dilakukan pembahasan kontrak payung jangka panjang untuk pembangunan proyek kijing. Selain itu dipengaruhi oleh kurs Rupiah terhadap Dollar untuk penerimaan *rental fee* dari PT NPCT1.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 24,55% dari Rp593,32 miliar di tahun 2017 menjadi Rp738,97 miliar di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan terutama karena adanya kenaikan beban KSMU di atas realisasi terhadap kenaikan beban *site lease* CT I yang diterima dari PT NPCT1 untuk dibayarkan ke IPC dan terealisasinya sewa kantor pada entitas anak baru (PT MMI). Beban pegawai mengalami kenaikan 39,28% disebabkan pada tahun 2017 posisi direktur belum terisi penuh dari awal tahun sedangkan pada realisasi sampai dengan tahun 2018 posisi direktur sudah terisi penuh dan sudah ada penambahan pegawai seiring dengan bertambahnya pengembangan proyek serta penyesuaian remunerasi Komisaris, Direksi dan Pegawai.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp118,07 meningkat 4,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp112,71 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh oleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

for November to December 2018, a discussion has been conducted regarding long-term umbrella contract for Kijing project construction. In addition, also affected by the Rupiah exchange rate against the Dollar in rental fee from PT NPCT1.

Operating Expenses

The operating expenses increased by 24.55% from Rp593.32 billion in 2017 to Rp738.97 billion in 2018. This was mainly due to an increase in KSMU expenses above the realization of rising CT I site lease expenses received from PT NPCT1 to be paid to IPC and the realization of office lease to new subsidiary (PT MMI). Employee expenses increased by 39.28% because in 2017 the director's position had not been fully filled, yet in realization up to 2018, the director's position was fully filled and there were already additional employees along with the additional project development and remuneration adjustments for Commissioners, Directors and Employees.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the net profit (loss) in 2018 was Rp118.07, increased by 4.75% compared to the realization in 2017 of Rp112.71 billion. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	156.074.017	168.443.691	(7,23)
Beban Usaha Operating Expenses	133.318.053	122.403.910	8,48
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	22.753.963	46.039.781	(49,01)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha bersih secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp,156,26 miliar menurun 7,23%

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	156.074.017	168.443.691	(7,23)
Beban Usaha Operating Expenses	133.318.053	122.403.910	8,48
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	22.753.963	46.039.781	(49,01)

Operating Revenues

Overall, the net operating revenues in 2018 amounted to Rp156.26 billion, down by 7.23% compared to 2017's

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp168,44 miliar. Hal tersebut terutama karena realisasi pendapatan sektor Kepabeanan triwulan IV tahun 2018 lebih rendah sebesar 16,00% dari realisasi tahun 2017 disebabkan adanya beberapa layanan kepada Ditjen Bea dan Cukai seperti BC 2.3 dan manifest yang tidak digunakan lagi seiring dengan penerapan pertukaran data elektronik mandiri dan adanya penurunan tarif dokumen atas pekerjaan tahun 2018.

Beban Usaha

Secara keseluruhan realisasi beban usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp132,78 miliar atau meningkat 8,48% dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp122,40 miliar. Hal ini karena beban bahan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 34,11% di atas realisasi beban bahan tahun 2017 dimana adanya beban atas proyek AIM, beban proyek OSS, beban pengadaan perangkat untuk proyek pengadaan server dan jaringan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok yang terealisasi pada tahun 2018.

Laba (Rugi) Usaha

Secara keseluruhan realisasi laba (rugi) usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp23,48 miliar atau menurun 49,01% dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp46,04 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh serta meningkatnya beban PT Electronic Data Interchange Indonesia.

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	402.745.179	436.318.825	(7,69)
Beban Usaha Operating Expenses	393.294.918	395.662.534	(0,60)
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	9.450.262	40.656.291	(76,76)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp402,74 miliar sehingga mengalami penurunan sebesar 7,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp436,31 miliar. Hal ini disebabkan menurunnya volume gudang CDC Banda pada cabang Jakarta dan sudah tidak beroperasinya gudang MKT,

realization of Rp168.44 billion. This was mainly due to lower realization of Customs sector revenues in the 4th quarter of 2018 by 16.00% from the realization in 2017, caused by several services to the Directorate General of Customs and Excise such as BC 2.3 and manifests that are no longer used along with the implementation of independent electronic data exchanges and the retention of document rates for works in 2018.

Operating Expenses

Overall, the realization of operating expenses in 2018 amounted to Rp132.78 billion, an increase of 8.48% from the realization in 2017 of Rp122.40 billion. This was because the material expenses in 2018 has increased by 34.11% above the realization of material expenses in 2017, in which there were AIM project expenses, OSS project expenses, procurement expenses for the procurement of server and network in Tanjung Priok Port Branch which was realized in 2018.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the realization of profit (loss) from operation in 2018 was Rp23.48 billion or decreased by 49.01% from the 2017's realization at Rp46.04 billion. The decrease in profit (loss) from operation was in line with declining revenues and rising expenses of PT Electronic Data Interchange Indonesia.

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Net Operating Revenues

The net operating revenues achieved in 2018 was Rp402.74 billion, which decreased by 7.69% compared to the realization in 2017 of Rp436.31 billion. This was due to the declining volume of CDC Banda warehouse in Jakarta branch and the non-operation of MKT, Marunda and Margomulyo warehouses in 2018 and HLC cold storage warehouse has

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

Marunda serta Margomulyo pada tahun 2018 serta belum optimalnya gudang *cold storage* HLC.

Beban

Beban usaha tahun 2018 sebesar Rp393,29 miliar turun 0,60% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp395,66 miliar. Hal ini disebabkan karena turunnya beban bahan, beban pegawai, dan beban pemeliharaan sejalan dengan sudah tidak beroperasinya gudang MKT, Marunda serta Margomulyo pada tahun 2018 serta kurang optimalnya gudang *cold storage* HLC.

Laba (Rugi) Usaha

Secara keseluruhan realisasi laba (rugi) usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp9,45 miliar atau menurun 76,76% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp40,66 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan PT Multi Terminal Indonesia.

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	413.987.734	388.691.642	6,51
Beban Usaha Operating Expenses	390.574.505	357.223.493	9,34
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	23.413.229	31.468.148	(25,59)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha meningkat sebesar 6,51% menjadi Rp413,98 miliar di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp388,69 miliar. Hal tersebut terutama karena kenaikan pendapatan pelayanan medik (khususnya pada pendapatan rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi). Hal lain terdapat pula kenaikan pada pendapatan jaminan pemeliharaan kesehatan dibanding tahun 2017 yang merupakan premi jaminan pemeliharaan kesehatan atas pelayanan kesehatan pensiunan termasuk keluarga, serta adanya kenaikan pada pendapatan SBU *food and beverage* dibandingkan tahun 2017.

not yet operated optimally.

Expenses

The operating expenses in 2018 amounted to Rp393.29 billion, down by 0.60% compared to 2017 amounting to Rp395.66 billion. This was due to the decrease in material expenses, employee expenses, and maintenance expenses in line with the non-operation of MKT, Marunda and Margomulyo warehouses in 2018 and HLC cold storage warehouse has not yet operated optimally.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the realization of profit (loss) from operation in 2018 was Rp9.45 billion, down by 76.76% compared to 2017 amounting to Rp40.66 billion. The decrease in profit (loss) from operation was in line with the decline in revenues of PT Multi Terminal Indonesia.

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Net Operating Revenues

The operating revenues increased by 6.51% to Rp413.98 billion in 2018 compared to 2017 amounting to Rp388.69 billion. This was mainly due to an increase in medical services revenues (especially revenues from outpatient, inpatient, and operating room). There was also an increase in health care insurance revenues compared to 2017, which is a health care insurance premium for pension health services including families, as well as an increase in SBU food and beverage revenues compared to 2017.

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 9,4% menjadi Rp390,57 miliar di tahun 2018 yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp357,22 miliar. Hal tersebut terutama karena adanya kenaikan pada beban sewa sebesar 63,29% dibanding tahun 2017 (*Audited*) yaitu sewa lahan pada RS Pelabuhan Cirebon, RS Pelabuhan Palembang, RS PMC dan 12 klinik di lingkungan Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan sewa alat medis, serta adanya kenaikan pada beban pegawai dibandingkan tahun 2017 (*Audited*) sejalan dengan penyesuaian remunerasi pegawai.

Laba (Rugi) Usaha

Secara keseluruhan realisasi laba (rugi) usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp23,41 miliar atau menurun 25,59% dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp31,47 miliar. Penurunan laba (rugi) usaha sejalan dengan menurunnya pendapatan PT Rumah Sakit Pelabuhan.

PT Pengerukan Indonesia

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	226.913.135	158.290.485	43,35
Beban Usaha Operating Expenses	201.189.228	140.475.682	43,22
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	25.723.907	17.814.803	44,39

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha bersih meningkat sebesar 43,35% dari Rp158,29 miliar di tahun 2017 menjadi Rp226,91 miliar di tahun 2018. Hal tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pengerukan sejalan dengan meningkatnya volume produksi dari 958 juta m³ menjadi 1.769 juta m³ dibandingkan dengan tahun 2017. Pendapatan perusahaan alat mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa pembangunan kapal baru, pendapatan *docking repair* dan pendapatan jasa *floating repair*.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 43,22% dari Rp140,47 miliar di tahun 2017 menjadi sebesar Rp201,19 miliar. Hal ini disebabkan terutama karena adanya kenaikan beban bahan

Operating Expenses

The operating expenses increased by 9.4% to Rp390.57 billion in 2018, which previously amounted to Rp357.22 billion in 2017. This was mainly due to an increase in lease expenses by 63.29% compared to 2017 (*Audited*), namely land lease at RS Pelabuhan Cirebon, RS Pelabuhan Palembang, RS PMC, and 12 clinics in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch and medical equipment rental, as well as an increase in employee expenses compared to 2017 (*Audited*) in line with the adjustment of employee remuneration.

Profit (Loss) from Operation

Overall realization of business profit (loss) up to 2018 amounted to Rp23.41 billion or decreased by 25.59% from realization in 2017 of Rp31.47 billion. Decreasing profit (loss) in business was in line with the decline in PT Port Hospital revenues.

PT Pengerukan Indonesia

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	226.913.135	158.290.485	43,35
Beban Usaha Operating Expenses	201.189.228	140.475.682	43,22
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	25.723.907	17.814.803	44,39

Operating Revenues

The net operating revenues increased by 43.35% from Rp158.29 billion in 2017 to Rp226.91 billion in 2018. This was mainly due to an increase in dredging service revenues in line with the increase in production volume from 958 million m³ to 1,769 million m³ compared to 2017. Revenues from equipment business experienced an increase in line with the increase in revenues from new ship building services, docking repair and floating repair service.

Operating Expenses

The operating expenses rose by 43.22% from Rp140.47 billion in 2017 to Rp201.19 billion. This was mainly caused by an increase in material expenses compared to the realization in

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu mengalami kenaikan 116,98% seiring dengan meningkatnya aktivitas pekerjaan pengerukan yang menggunakan kapal sendiri dan meningkatnya usaha galangan dibandingkan tahun 2017. Beban KSMU mengalami kenaikan sebesar 40,46% terutama terkait beban subkontraktor jasa pengerukan karena sebagian besar pekerjaan menggunakan mitra dan subkontraktor galangan sejalan dengan peningkatan pendapatan jasa galangan, serta peningkatan beban jasa tenaga keamanan.

Laba (Rugi) Usaha

Secara keseluruhan realisasi laba (rugi) usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp25,72 miliar atau meningkat 44,39% dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp17,81 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Pengerukan Indonesia.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	159.249.141	138.673.505	14,84
Beban Usaha Operating Expenses	141.560.008	124.243.429	13,94
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	17.689.134	14.430.075	22,59

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih meningkat sebesar 14,84% dari Rp138,67 miliar di tahun 2017 menjadi Rp159,25 miliar di tahun 2018. Hal tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan bisnis baru yaitu pelayanan kontraktor kelistrikan di beberapa anak perusahaan dan cabang pelabuhan serta pihak swasta sejalan dengan adanya peningkatan tarif dasar listrik di sepanjang tahun 2018.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 13,94% dari Rp124,24 miliar di tahun 2017 menjadi Rp141,56 miliar di tahun 2018. Hal tersebut karena adanya kenaikan beban KSMU dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami kenaikan 307,85%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat biaya pokok atas pekerjaan kontraktor yang sejalan dengan kenaikan

2017, which increased by 116.98% in line with the increase in dredging work activities using own ships and the increase in shipyard business compared to 2017. The KSMU expenses increased by 40.46%, mainly related Dredging Services Subcontractor expenses because most of the work using shipyard partners and subcontractors in line with the increase in shipyard service revenues, as well as the increase in security services expenses.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the realization of profit (loss) from operation in 2018 was Rp25.72 billion or increased by 44.39% from the realization in 2017 of Rp17.81 billion. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues earned by PT Pengerukan Indonesia.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	159.249.141	138.673.505	14,84
Beban Usaha Operating Expenses	141.560.008	124.243.429	13,94
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	17.689.134	14.430.075	22,59

Net Operating Revenues

The net operating revenues increased by 14.84% from Rp138.67 billion in 2017 to Rp159.25 billion in 2018. This was mainly due to the fact that in 2018 the Company had implemented a new business namely electrical contractor services in several subsidiaries and port branches as well as the private sector in line with the increase in basic electricity tariffs throughout 2018.

Operating Expenses

The operating expenses increased by 13.94% from Rp124.24 billion in 2017 to Rp141.56 billion in 2018. This was caused by a 307.85% increase in KSMU expenses compared to 2017, due to the fact that in 2018 there were basic costs for contractors' work in line with the increase in PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI) revenues as an electricity

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

pendapatan PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI) sebagai kontraktor kelistrikan serta kompensasi atas penggunaan aset IPC.

Laba (Rugi) Usaha

Secara keseluruhan realisasi laba (rugi) usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp17,69 miliar atau meningkat 22,59% dari tahun 2017 sebesar Rp14,43 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Energi Pelabuhan Indonesia.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	161.264.609	91.574.732	76,10
Beban Usaha Operating Expenses	148.792.966	80.099.812	85,76
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	12.471.644	11.474.920	8,69

Pendapatan Usaha

Realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp161,26 miliar atau meningkat 76,10% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp91,57 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan *maintenance* pada tahun 2018 karena adanya perubahan pola bisnis yang semula perawatan alat dengan sistem *by-order* menjadi FMC (*Full Maintenance Contract*). Selain itu adanya kenaikan pendapatan *project* konsultasi alat di lingkungan IPC Group di mana pada tahun 2017 belum menangani sepenuhnya pekerjaan *project* tersebut.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2018 sebesar Rp148,79 miliar naik 85,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp80,09 miliar yang disebabkan kenaikan beberapa jenis beban antara lain:

1. Beban pegawai mengalami kenaikan 19,41% dibandingkan tahun 2017 karena adanya penambahan pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari 244 orang menjadi 310 orang serta penyesuaian remunerasi pegawai atas dampak dari PKB 2016-2018.
2. Kenaikan beban bahan sebesar 126,00% seiring dengan meningkatnya *project* atas penerapan FMC di lingkungan IPC Group yang dikerjakan pada tahun 2018.

contractor and compensation for the use of IPC assets.

Profit (Loss) from Operation

Overall, the realization of profit (loss) from operation in 2018 amounted to Rp17.69 billion, an increase of 22.59% from Rp14.43 billion in 2017. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Energi Pelabuhan Indonesia.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

The realization of operating revenues in 2018 amounted to Rp161.26 billion, increased by 76.10% compared to 2017 of Rp91.57 billion. This was mainly due to an increase in maintenance revenues in 2018 due to a change in business pattern, in which equipment maintenance that was previously using by-order system became FMC (Full Maintenance Contract). In addition, there was an increase in revenue from project equipment consulting in IPC Group, where in 2017 has not yet fully handled the projects.

Operating Expenses

The operating expenses in 2018 was Rp148.79 billion, up 85.76% compared to the same period in 2017 of Rp80.09 billion due to an increase in several types of expenses, including:

1. Employee expenses increased by 19.41% compared to 2017 due to the addition of employees of Limited Time Work Agreement (PKWT) from 244 employees to 310 employees and adjustments to employee remuneration for the impact of 2016-2018 PKB.
2. Material expenses increased by 126.00% in line with the increasing project for FMC implementation in IPC Group carried out in 2018.

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

3. Beban KSMU mengalami kenaikan 232,76% dari tahun sebelumnya disebabkan kenaikan harga sewa *workshop* di cabang serta adanya kontrak kerjasama dengan pihak eksternal diluar IPC Group hal tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha bersih.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp12,47 miliar meningkat 8,69% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11,47 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	69.966.324	45.039.113	55,35
Beban Usaha Operating Expenses	62.363.696	34.058.432	83,11
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	7.602.628	10.980.681	(30,76)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2018 sebesar Rp69,96 miliar atau meningkat 55,35% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp45,03 miliar. Hal tersebut terutama karena adanya kenaikan pada kegiatan pelatihan sebesar 19,82% dibanding tahun 2017, kenaikan tersebut terjadi seiring telah berjalannya fungsi Divisi Pembelajaran IPC pada tahun 2018 sehingga kegiatan pelatihan IPC Group dapat berjalan sesuai kalender akademik dan sebagian besar dilaksanakan melalui PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia serta adanya kenaikan jasa *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) sebesar 46,91% dibanding realisasi tahun 2017 seiring dengan teralisasinya pendapatan pelatihan tahun 2018 dan penggunaan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) oleh BUMN lain untuk kegiatan pelatihan atau pendidikan (PT PLN, PT Taspen, PT Indonesia Power, dan lainnya) pada tahun 2018.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2018 sebesar Rp62,36 atau meningkat 83,11% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp34,06 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan beban

3. KSMU expenses increased by 232.76% from the previous year due to the increase in lease prices for workshops in the branch and cooperation contract with external parties outside IPC Group, in line with the increase in net operating revenues.

Profit (Loss) from Operation

The net profit (loss) from operation in 2018 reached Rp12.47 billion, an increase of 8.69% compared to Rp11.47 billion in 2017. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Net Operating Revenues

The net operating revenues for 2018 was Rp69.96 billion, an increase of 55.35% compared to 2017 amounting to Rp45.03 billion. This was mainly due to an increase in training activities by 19.82% compared to 2017, the increase occurred in line with the functioning of IPC Learning Division in 2018 so that the training activities of IPC Group could run according to the academic calendar and mostly carried out through PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, and the increase in Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) services of 46.91% compared to the realization in 2017 in line with the realization of training revenues in 2018 and the use of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) by other SOEs for training or education activities (PT PLN, PT Taspen, PT Indonesia Power and others) in 2018.

Operating Expenses

The operating expenses in 2018 amounted to Rp62.36 or increased by 83.11% compared to 2017 of Rp34.06 billion. This was mainly due to an increase in employee expenses due

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

pegawai akibat pemenuhan Direktur Akademik, beban KSMU yang signifikan dibanding realisasi tahun 2017. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pendapatan pelatihan dan jasa MICE pada tahun 2018.

to the fulfillment of Academic Director, a significant KSMU expenses compared to the realization in 2017. The increase was in line with the increase in revenues from training and MICE services in 2018.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 (*Audited*) adalah sebesar Rp7,60 miliar atau 30,76% di atas realisasi tahun 2017. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

Profit (Loss) from Operation

The net profit (loss) reached in 2018 (*Audited*) was Rp7.60 billion or 30.76% above the realization in 2017. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PII)

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PII)

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Keterangan <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	111.746.400	8.996.597	1.142,10
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	47.621.216	1.641.240	2.801,54
Laba (Rugi) Usaha <i>Profit (Loss) from Operation</i>	64.125.183	7.355.357	771,82

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp111,75 miliar atau meningkat 1.142,10% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp9,00 miliar. Hal disebabkan karena pada tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) telah beroperasi penuh sedangkan pada tahun 2017 hanya beroperasi dari bulan November. Pendapatan Usaha bersih yang tercapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 tersebut terealisasi 56,61% di bawah dari target yang dianggarkan pada Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 257,55 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi kondisi pasar modal serta keterlambatan pencairan SHL tahap 1 yang baru dapat dilaksanakan pada Triwulan II 2018 dari jadwal pada Triwulan IV 2017 selain itu penyertaan modal kepada Anak Perusahaan IPC dan lainnya baru terealisasi pada akhir tahun 2018.

Net Operating Revenues

The net operating revenues achieved in 2018 amounted to Rp111.75 billion, increased by 1,142.10% compared to 2017 of Rp9.00 billion. This was because in 2018 PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) has fully operated while in 2017 its operation just started from November. The net operating revenues up to the fourth quarter of 2018 was realized at 56.61% below the target budgeted in the fourth quarter of 2018 of Rp257.55 billion. This was due to macroeconomic conditions that affect the condition of capital market as well as the delay in phase 1 of SHL disbursement that was carried out in the second quarter of 2018 from the plan to be carried out in the fourth quarter of 2017.

Beban Usaha

Beban usaha sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp47,62 miliar atau meningkat 2.801,54% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,64 miliar. Hal ini disebabkan karena pada

Operating Expenses

The operating expenses in 2018 was Rp47.62 billion, an increase of 2,801.54% compared to 2017 amounting to Rp1.64 billion. This was because in 2018 PT PII has fully operated

KINERJA ENTITAS ANAK
Subsidiary Performance

tahun 2018 PT PII telah beroperasi penuh sedangkan pada tahun 2017 hanya beroperasi dari bulan November 2018. Beban usaha sampai dengan Triwulan IV tersebut terealisasi 33,15% di bawah anggaran sebesar Rp 70,75 miliar. Hal ini terutama terjadi karena adanya akrual beberapa akun biaya seperti beban pegawai dan jasa konsultan selain itu telah dilaksanakan efisiensi operasional perusahaan untuk menjaga tingkat laba karena belum tercapainya pendapatan investasi. Selain beban pegawai, komponen terbesar adalah beban umum yang merupakan beban untuk konsultan legal, *head hunter*, konsultan keuangan dan akuntansi.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp64,13 miliar atau meningkat 771,82% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp7,36 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII).

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth (%)</i>
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	163.696.602	122.300.573	33,85
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	159.412.572	115.828.076	37,63
Laba (Rugi) Usaha <i>Profit (Loss) from Operation</i>	4.284.030	6.472.497	(33,81)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp163,70 miliar meningkat sebesar 33,85% dibandingkan tahun 2017 sebesar 122,30 miliar. Kenaikan realisasi pendapatan usaha PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS) ini disebabkan karena terealisasinya pendapatan *E-Payment* PT PTP, investasi Infrastruktur IT Cabang Pelabuhan Panjang, perpanjangan Sewa *Network and Colo* 2017-2019, pendapatan Pekerjaan Pengembangan *Marine Operating System* (Mos) Pelabuhan Cabang Tanjung Priok, pendapatan Layanan *Data Center* IPC, pendapatan Pelabuhan Panjang *ATS Lisensi Oracle* DB, dan *Weblogic*.

while in 2017 its operation just started from November. The operating expenses up to the fourth quarter were realized at 33.15% below the budget of Rp70.75 billion. This was mainly due to accruals of several accounts, such as employees and consultant service expenses, besides the Company's operational efficiency to maintain the level of profit due to the lack of investment revenues. In addition to employee expenses, the largest component is the general expenses for legal consultant, head hunter, financial and accounting consultant.

Profit (Loss) from Operation

The net profit (loss) achieved in 2018 was Rp64.13 billion, an increase of 771.82% compared to 2017 amounting to Rp7.36 billion. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII).

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

The operating revenues in 2018 amounting to Rp163.70 billion, increased by 33.85% compared to 2017 of Rp122.30 billion. The increased realization of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS) operating revenues was due to the realization of PT PTP's, *E-Payment* investment in Panjang Branch Port IT Infrastructure, extension of Network and Colo Rental 2017-2019, revenue from Tanjung Priok Port Branch Marine Operating System (Mos) Development, IPC Data Center Service revenues Panjang Port., *ATS Oracle* DB License and *Weblogic* revenue.

KINERJA ENTITAS ANAK
 Subsidiary Performance

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 37,63% menjadi sebesar Rp115,83 miliar di tahun 2018 dari Rp159,41 miliar di tahun 2017. Hal tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pada beban bahan sebesar 52,24% di atas realisasi tahun 2017 seiring dengan kenaikan pendapatan pada tahun 2018 (Audited) khususnya beban untuk *project system implementor* (infrastruktur, lisensi dan perangkat) di IPC Group.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp4,28 miliar atau meningkat 33,81% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp6,47 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS

Tabel Kinerja Usaha

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.745.355.234	92.162.491	1.793,78
Beban Usaha Operating Expenses	1.446.610.292	85.817.741	1.585,68
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operation	298.744.942	6.344.749	46.085,38

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp1,74 triliun meningkat sebesar 1.793,78% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp92,16 miliar. Hal ini terjadi karena pada tahun 2018 PT IPC Terminal Peti kemas (PT IPC TPK) mengelola Terminal Peti Kemas Cabang Pelabuhan Pontianak, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, dan Panjang beserta *Common Area* PT NPCT 1 di wilayah Tanjung Priok sejak 1 Januari 2018 dan Terminal Peti Kemas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sejak 16 Juli 2018 sedangkan pada tahun 2017 PT IPC TPK hanya mengoperasikan *Common Area* PT NPCT 1 di wilayah Tanjung Priok dengan mengembalikan pengelolaan Peti Kemas ke Cabang Pelabuhan Jambi dan Pontianak.

Operating Expenses

The operating expenses increased by 37.63% to Rp115.83 billion in 2018 from Rp159.41 billion in 2017. This was mainly due to an increase in material expenses of 52.24% above the realization in 2017, in line with the increase in 2018's revenues (Audited) especially expenses for the project system implementor (infrastructure, licenses and devices) in IPC Group.

Profit (Loss) from Operation

The net profit (loss) achieved in 2018 amounted to Rp4.28 billion or increased by 33.81% compared to 2017 of Rp6.47 billion. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS

Table of Business Performance

(in Thousand Rupiah)

Operating Revenues

Overall, the operating revenues in 2018 amounted to Rp1.74 trillion, increased by 1,793.78% compared to 2017 of Rp92.16 billion. This happened because in 2018 PT IPC Terminal Peti kemas (PT IPC TPK) managed Pontianak, Jambi, Palembang, Teluk Bayur and Panjang Container Terminal Port Branch along with the Common Area PT NPCT 1 in Tanjung Priok area since January 1, 2018 and Tanjung Priok Container Terminal Port Branch since July 16, 2018, while in 2017 PT IPC TPK only operated the Common Area PT NPCT 1 in Tanjung Priok area by returning container management to Jambi and Pontianak Port Branches.

KINERJA ENTITAS ANAK

Subsidiary Performance

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun meningkat 1.585,68% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp85,81 miliar. Hal ini sejalan dengan pada tahun 2018 PT IPC TPK mengelola Terminal Peti Kemas Cabang Pelabuhan Pontianak, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, dan Panjang sejak 1 Januari 2018 dan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok sejak 16 Juni 2018 beserta *Common Area* PT NPCT 1 di wilayah Tanjung Priok; sedangkan pada tahun 2017 PT IPC TPK hanya mengoperasikan *Common Area* PT NPCT 1 di wilayah Tanjung Priok dengan mengembalikan pengelolaan Cabang Pelabuhan Jambi dan Pontianak sehingga menyebabkan keseluruhan beban naik dengan signifikan sejalan dengan pendapatan.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) bersih yang tercapai sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp298,75 miliar atau meningkat 46.085,38% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp6,34 miliar. Peningkatan laba (rugi) usaha sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh PT IPC Terminal Peti Kemas.

Operating Expenses

The operating expenses in 2018 amounted to Rp1.44 trillion, increased by 1,585.68% compared to 2017 of Rp85.81 billion. This was in line with the condition that in 2018 PT IPC TPK managed Pontianak, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, and Panjang Container Terminals Port Branch since January 1, 2018 and Tanjung Priok Container Terminal since June 16, 2018 along with the Common Area PT NPCT 1 in Tanjung Priok area; whereas in 2017 PT IPC TPK only operated the Common Area PT NPCT 1 in the Tanjung Priok area by returning the management of Jambi and Pontianak Port Branches, so that the overall expenses rose significantly in line with the revenues.

Profit (Loss) from Operation

The net profit (loss) achieved in 2018 was Rp298.75 billion or increased by 46,085.38% compared to 2017 amounting to Rp6.34 billion. The increase in profit (loss) from operation was in line with the increase in revenues obtained by PT IPC Terminal Peti Kemas.

PROYEK STRATEGIS 2018

2018 Strategic Projects

Pembangunan Proyek Strategis pada tahun 2018 diantaranya adalah Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing di Kalimantan Barat, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) *Inland Waterway*, Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Pembangunan *Maritime Tower* dan Pembangunan *Museum Maritime*.

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program tol laut yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut serta meningkatkan daya saing produk sumber daya alam dari Kalimantan. Terminal Kijing diproyeksikan untuk menjadi hub port di kawasan regional yang dirancang berstandar internasional serta memiliki kapasitas ultimate hingga 2 juta TEUs.

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) *Inland Waterway* merupakan upaya optimalisasi alur sungai atau kanal dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan *hinterland* atau kawasan industri sehingga dapat mengurangi kongesti jalan di darat serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya.

Pembangunan Pelabuhan Sorong di Papua Barat yang direncanakan untuk menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur, sehingga arus tol laut yang ditargetkan hingga ke timur Indonesia dapat berjalan sesuai rencana. IPC berupaya untuk memulai pengembangan Pelabuhan Sorong dengan membuat kajian kelayakan bersama dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), kajian lingkungan, dan persiapan perizinan lainnya untuk pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong dengan proyeksi kapasitas 500 ribu TEUs.

Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dilaksanakan oleh afiliasi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu PT. Akses Pelabuhan Indonesia (PT. API) yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT. PPI). PT. API telah mengakuisisi 45% saham dari PT. MTD CPT Expressway yang memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cibitung-Cilincing sepanjang 34,8 kilometer. Jalan Tol Cibitung-Cilincing merupakan jalan tol yang berperan strategis sebagai salah satu jalan akses bagi Pelabuhan Tanjung Priok dari dan menuju ke *hinterland* atau kawasan industri di bagian timur (Cibitung, Cikarang dan Karawang).

The development of Strategic Projects in 2018 includes the Construction and Development of Kijing terminal in West Kalimantan, the construction and development of Cikarang-Bekasi-Laut Terminal (CBL) *Inland Waterway*, the construction of Cibitung-Cilincing Toll Road, *Maritime Tower* Construction and *Maritime Museum* Construction.

The Construction and Development of Kijing Terminal is one of the National Strategic Projects (PSN) to support the sea tolls program that has been launched by the government to improve sea connectivity and improve the competitiveness of natural resource products from Kalimantan. Kijing Terminal is projected to become a hub port in the regional area, designed with international standards and has the ultimate capacity of up to 2 million TEUs.

The construction and Development of Cikarang-Bekasi-Sea Terminal (CBL) *Interland Waterway* is an effort to optimize the flow of rivers or canals by using barges as an alternative mode of transportation that connects ports with hinterland or industrial areas so as to reduce congestion on land and is expected to improve efficiency time and cost.

The construction of Sorong Port in West Papua is planned to become a hub port in Eastern Indonesia, so that the flow of sea tolls targeted to the east of Indonesia can go according to plan. IPC seeks to begin the development of Sorong Port by making a feasibility study together with PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), environmental studies, and other licensing preparations for the construction of Phase I of Sorong Port with a projected capacity of 500 thousand TEUs.

The construction of Cibitung-Cilincing Toll Road is carried out by affiliate of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), namely PT. Akses Pelabuhan Indonesia (PT. API) which is also a subsidiary of PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT. PPI). PT. API has acquired 45% of shares from PT. MTD CPT Expressway which has a 34.8 kilometer Cibitung-Cilincing Toll Road Concession Agreement (PPJT). Cibitung-Cilincing Toll Road is a toll road that plays a strategic role as one of the access roads for Tanjung Priok Port from and to the hinterland or industrial area in the east (Cibitung, Cikarang and Karawang).

PROYEK STRATEGIS 2018
2018 Strategic Projects

Pembangunan *Maritime Tower* di kawasan Tanjung Priok bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang kemaritiman agar mempermudah komunikasi dan kolaborasi sebagai upaya penurunan biaya logistik di Indonesia.

The construction of Maritime Tower in the Tanjung Priok area aims to improve the synergy between stakeholders in the maritime sector in order to facilitate communication and collaboration as an effort to reduce logistics costs in Indonesia.

Pembangunan *Museum Maritime, Port and Shipping* di Pelabuhan Tanjung Priok bertujuan untuk melestarikan budaya, sejarah, cerita dan bukti kejayaan dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, sekaligus penyediaan fasilitas pertemuan dan media pembelajaran dunia maritim kepelabuhanan dan pelayaran di Indonesia.

The construction of Maritime, Port and Shipping Museum at Tanjung Priok Port aims to preserve culture, history, stories and proof of glory from the past, present and future, as well as providing meeting facilities and learning media for the port and shipping maritime world in Indonesia.

Berikut merupakan informasi umum dari Proyek Strategis tersebut yang dapat dirangkum pada tabel di bawah ini:

The following is the general information from Strategic Projects which can be summarized in the table below:

Tabel Proyek Strategis

Table of Strategic Projects

No	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Deskripsi <i>Description</i>	Jangka Waktu <i>Time Period</i>	Manfaat <i>Benefits</i>
1.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	<p>Spesifikasi Teknis: Untuk Pengembangan Tahap Inisial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Terminal Peti kemas dan Multipurpose dengan kapasitas 500.000 TEUs 2. Pembangunan Fasilitas di sisi laut termasuk dermaga dan <i>trestle</i>. 3. Pembangunan Fasilitas di sisi darat termasuk Lapangan Penumpukan (<i>Container Yard</i>) serta gedung perkantoran <p>Untuk Pengembangan Tahap Ultimate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas ultimate 1.950.000 Teus/Tahun 2. Pembangunan Terminal Curah Cair dengan kapasitas ultimate 12.180.000 Ton/Tahun 3. Pembangunan Terminal Curah Kering dengan kapasitas ultimate 15.000.000 Ton/Tahun 4. Pembangunan Terminal Multi Purpose dengan kapasitas ultimate 1.000.000 Ton/Tahun 5. Pembangunan Fasilitas di sisi laut. 6. Pembangunan Fasilitas di sisi darat termasuk Lapangan Penumpukan (<i>Container Yard</i>) serta gedung perkantoran 	2018-2020 (Pengembangan Tahap Inisial)	Terminal Kijing akan dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu mengakomodir potensi hinterland dan kapal berukuran besar. Terminal Kijing diproyeksikan untuk menjadi <i>hub port</i> di kawasan regional yang dirancang berstandar internasional.

PROYEK STRATEGIS 2018
 2018 Strategic Projects

No	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Deskripsi <i>Description</i>	Jangka Waktu <i>Time Period</i>	Manfaat <i>Benefits</i>
	Construction and Development of Kijing Terminal of Pontianak Port in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, West Kalimantan	<p>Technical specifications: For Initial Development Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construction of Container and Multipurpose Terminal with a capacity of 500,000 TEUs 2. Construction of facilities on the sea side including docks and trestles. 3. Construction of facilities on the land side including the Container Yard and office buildings <p>For the Ultimate Development Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construction of Container Terminal with an ultimate capacity of 1,950,000 Teus / Year 2. Construction of a Liquid Bulk Terminal with an ultimate capacity of 12,180,000 Tons/Year 3. Construction of Dry Bulk Terminal with an ultimate capacity of 15,000,000 Tons/Year 4. Construction of Multi Purpose Terminal with an ultimate capacity of 1,000,000 Tons/Year 5. Construction of facilities on the sea side. 6. Construction of facilities on the land side including the Container Yard and office buildings 	(Initial Development Phase)	Kijing Terminal will be developed as a deep-sea port that is able to accommodate the potential of hinterland and large-sized vessels. Kijing Terminal is projected to become a port hub in the regional area, designed with international standards.
2.	Pembangunan <i>Inland Waterways/</i> Cikarang- Bekasi-Laut Jawa (CBL) di Jakarta Utara, DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	<p>Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus logistik jalur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok atau sebaliknya.</p> <p>Spesifikasi Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Terminal Peti Kemas 2. Pengerukan dan pelebaran Kanal CBL (dalam pelaksanaannya akan didukung oleh Pemerintah) 	2018-2021	Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan moda transportasi alternatif yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Timur Jakarta
	Development of <i>Inland Waterways/</i> Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) in North Jakarta, DKI Jakarta and Bekasi Regency, West Java	<p>This project is expected to reduce the overcrowding of landline logistics flows from Cikarang and Karawang industrial areas to Tanjung Priok Port or vice versa.</p> <p>Technical specifications:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construction of Container Terminal 2. Dredging and widening the CBL Channel (will be supported by the Government in its implementation) 		This project is intended to provide alternative modes of transportation that are more effective, efficient and environmentally friendly, which connects Tanjung Priok Port with industrial estates in East Jakarta

PROYEK STRATEGIS 2018
 2018 Strategic Projects

No	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Deskripsi <i>Description</i>	Jangka Waktu <i>Time Period</i>	Manfaat <i>Benefits</i>
3.	Pembangunan Pelabuhan Sorong di Distrik Seget Provinsi Papua Barat	Dengan terbatasnya kapasitas pelayanan dan lahan pengembangan di Pelabuhan Sorong maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berinisiatif untuk mengembangkan pelabuhan baru yang berfungsi sebagai regional hub Indonesia bagian timur sekaligus sebagai <i>West Pacific Hub</i> .	2017-2023	Menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan industri di daerah Indonesia Timur. Pengembangan Tahap I Pelabuhan Sorong diperkirakan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs
	Construction of Sorong Port in Seget District, West Papua Province	With the limited service capacity and development land in Sorong Port, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) took the initiative to develop a new port that serves as the regional hub of eastern Indonesia as well as the West Pacific Hub.		Grow and improve industrial activities in the eastern part of Indonesia. The Phase I development of Sorong Port is estimated to have a capacity of 500 thousand TEUs
4.	Pembangunan Maritime Tower di Tanjung Priok, Jakarta Utara	Spesifikasi Teknis: Luas Lahan: 15.000 Luas Bangunan (GFA+MEP): ± 40.000 Jumlah Lantai: Bangunan utama terdiri dari 24 (dua puluh empat) lantai kantor dan 1 (satu) lantai <i>basement</i> , serta bangunan podium terdiri dari 6 (enam) lantai area retail dan parkir Konsep bangunan: ikon maritim nasional <i>Green Building: Gold</i>	2017-2020	Proyek ini akan meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan terkait dan akan mempermudah komunikasi antar pihak sebagai upaya penurunan biaya logistic di Indonesia.
	Construction of Maritime Tower in Tanjung Priok, North Jakarta	Technical specifications: Land Area: 15,000 Building Area (GFA + MEP): ± 40,000 Number of Floors: Main building consists of 24 (twenty four) office floors and 1 (one) basement floor, and the podium building consists of 6 (six) retail area floors and parking Building concept: national maritime icon Green Building: Gold		This project will improve synchronization and synergy between stakeholders and will facilitate communication between parties as an effort to reduce logistics costs in Indonesia.

PROYEK STRATEGIS 2018
 2018 Strategic Projects

No	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Deskripsi <i>Description</i>	Jangka Waktu <i>Time Period</i>	Manfaat <i>Benefits</i>
5.	Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing	IPC melalui grup usahanya PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) bekerja sama dengan PT Waskita Toll Road di badan usaha jalan tol PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways), berfokus menata akses menuju pelabuhan Tanjung Priok Jalan Tol Cibitung Cilincing/ JTCC) sepanjang 34,016 km.	Rencana Operasi 2019	Meningkatkan kapasitas akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok
	Construction of Cibitung Cilincing Toll Road	IPC through its business group, PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) cooperates with PT Waskita Toll Road in the PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP tollways) toll road business entity focuses on 34.016 km of access to Tanjung Priok Port - Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC).	Operation Plan in 2019	Increase access capacity to Tanjung Priok Port
6.	Pembangunan Museum Maritime, Port and Shipping di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta	Museum ini bertujuan melestarikan budaya, sejarah, cerita, dan bukti kejayaan bahari dari masa lalu sampai sekarang dan masa yang akan datang, sekaligus penyediaan fasilitas pertemuan dan media pembelajaran dunia maritime kepelabuhanan dan pelayaran.	2016-2018	Pelestarian budaya bangsa dan media pembelajaran dunia maritim kepelabuhanan
	Construction of Maritime, Port and Shipping Museum at Tanjung Priok Port, Jakarta	This purpose of this museum is to preserve culture, history, stories, and proof of maritime glory from the past, present and future, as well as providing meeting facilities and learning media for the world of maritime port and shipping.		Preservation of national culture and learning media for port maritime world

PROSPEK USAHA

Business Outlook

TREND GLOBAL

Sejak pertengahan tahun 2018 sampai awal tahun 2019 ini istilah VUCA sudah tidak asing lagi ditelinga pelaku bisnis, utamanya *stakeholder supply chain*. Istilah ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi di dunia bisnis adalah VUCA world. VUCA yang merupakan singkatan dari *Volatile* (bergejolak), *Uncertain* (tidak pasti), *Complex* (kompleks), dan *Ambigüe* (tidak jelas) merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini. Istilah ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika untuk menggambarkan situasi geo-politik saat itu. Namun karena kesamaan makna, maka istilah VUCA kini diadopsi oleh dunia bisnis. Lebih jelasnya, Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. *Uncertainty* bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. *Ambiguity* didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan.

Banyak organisasi yang berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam sifat VUCA tersebut karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia. Kesiapan dalam menghadapi VUCA itu bukan hanya beban 1 (satu) orang, tetapi juga seluruh tim di perusahaan. VUCA secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh praktisi SDM dan pemimpin perusahaan masa kini. Ketika dulunya orang yang mencari perusahaan untuk memberinya kerja, kini justru sebaliknya, perusahaanlah yang mencari orang terbaik untuk bekerja. Saat dulunya, mesin, modal dan kondisi geografi menjadi sebuah keunggulan, maka sekarang, karyawan yang bertalenta adalah keunggulan perusahaan. *Talent* yang dulunya hanya berperan kecil terhadap keberhasilan bisnis, sekarang menjadi penentu perubahan. Perusahaan tidak bisa mengubah VUCA yang saat ini terjadi. Tugas perusahaan menyiapkan agar dapat menghadapi VUCA yang terjadi dan telah terbukti berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam industri kepelabuhanan, terdapat 5 (lima) tren yang terbentuk akibat terjadinya VUCA. 5 (lima) tren yang dimaksud adalah:

GLOBAL TREND

Since mid-2018 until the beginning of 2019, the term VUCA is already familiar to business people, especially supply chain stakeholders. This term is one of the challenges that must be faced in the business world, VUCA world. VUCA, which stands for Volatile, Uncertain, Complex, and Ambigüe is a picture of the business world situation today. This term was originally created by the American military to describe the geo-political situation at present time. But because of the similarity of meaning, the term VUCA is now adopted by the business world. More specifically, Volatility means a very rapid dynamic change in various things such as social, economy and politics. Uncertainty means that it is difficult to predict the issues and events that are currently happening. Complexity is the disruption and chaos that surrounds each organization. Ambiguity is defined as a heavy burden of reality and meaning that blends from existing various conditions or situations that are felt to be floating and clarity is still in question.

Many organizations are struggling to stay afloat and align with the nature of VUCA, because it has a significant effect on human capital. The readiness to deal with VUCA is not only 1 borne by (one) person, but also the entire team in a company. VUCA indirectly creates a new trend that is important to be understood by HC practitioners and today's corporate leaders. Before, people were looking for a company to give him/her a job, now it's the opposite, companies are looking for the best people to work for them. And in the past, machinery, capital and geographical conditions were an advantage, now, competent employees who are a company's advantage. Talent, which used to play only a small role in business success, is now a determinant of change. Companies cannot change the VUCA that is currently happening. The task of a company is to make preparation to deal with VUCA that has occurred and has proven to have a negative impact on the business sustainability of a company.

In the port industry, there are 5 (five) trends that are formed due to VUCA, namely:

1. Ukuran Kapal

Sejak tahun 1968, kapasitas kapal meningkat sekitar 1500%. Ukuran kapal yang semakin besar ini mendorong *Shipping Line* untuk melakukan konsolidasi serta Operator Pelabuhan untuk berinvestasi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terminalnya. Selain itu berdasarkan *Alphaliner* pada tahun 2018, Terdapat 3 (tiga) aliansi utama *Shipping Line* yang menguasai hampir 80% pangsa pasar peti kemas dunia yakni The Alliance, Ocean Alliance dan 2M. The Alliance merupakan aliansi perkapalan dari 3 (tiga) *shipping line*, yakni ONE, Hapag-Lloyd dan Yang Ming. Ocean Alliance merupakan aliansi dari 4 (empat) *shipping line* yakni OOCL, Cosco Shipping, CMA CGM dan Evergreen, sedangkan 2M merupakan aliansi dari 2 (dua) *shipping line* yakni Maersk Line dan MSC.

Di sisi lain dengan berkembangnya ukuran kapal dan konsolidasi muatan kapal, pelabuhan dipaksa untuk mengalami ekspansi untuk dapat mother vessel tersebut. Semakin besar OPEX dan CAPEX karena semakin besarnya kapal Semakin meningkatnya risiko bisnis pelabuhan dari membesarnya aliansi Perusahaan Pelayaran.

2. Shipping line dan Port Operator

Semakin besar ukuran kapal dan aliansi, maka *shipping line* akan terus mencari keseimbangan antara melakukan transshipment dan direct call. Kapal besar mencari volume barang yang besar untuk dilayani dan menyeleksi pelabuhan yang disinggapinya karena *operation cost* yang tinggi. *Transshipment* dan hub dibutuhkan untuk meningkatkan *occupancy* kapal dengan ukuran besar dan peluang untuk layanan *relay transshipment* semakin besar.

Di sisi lain semakin besar volume barang di suatu pelabuhan, maka semakin mendorong adanya *direct call* ke pelabuhan tersebut. Pola operasi *shipping line* yang *point-to-point direct service* bergantian dengan *transshipment*, sehingga hub-and-spoke network semakin kompleks.

1. Ship Size

Since 1968, ship capacity has increased by around 1500%. The larger size of ships prompted the Shipping Line to consolidate and the Port Operators to invest to increase the capacity and capability of terminal. Apart from that, based on the *Alphaliner* in 2018, there are 3 (three) major Shipping Line alliances that control almost 80% of the world's container market share, namely The Alliance, Ocean Alliance and 2M. The Alliance is a shipping alliance of 3 (three) shipping lines, i.e. ONE, Hapag-Lloyd and Yang Ming. Ocean Alliance is an alliance of 4 (four) shipping lines, i.e. OOCL, Cosco Shipping, CMA CGM and Evergreen, while 2M is an alliance of 2 (two) shipping lines, i.e. Maersk Line and MSC.

On the other hand, with the expansion of ship size and ship cargo consolidation, the port was forced to expand for those mother vessels. The greater the OPEX and CAPEX due to the larger ships, the port business risks increase from the enlargement of the shipping company alliance.

2. Shipping Line and Port Operator

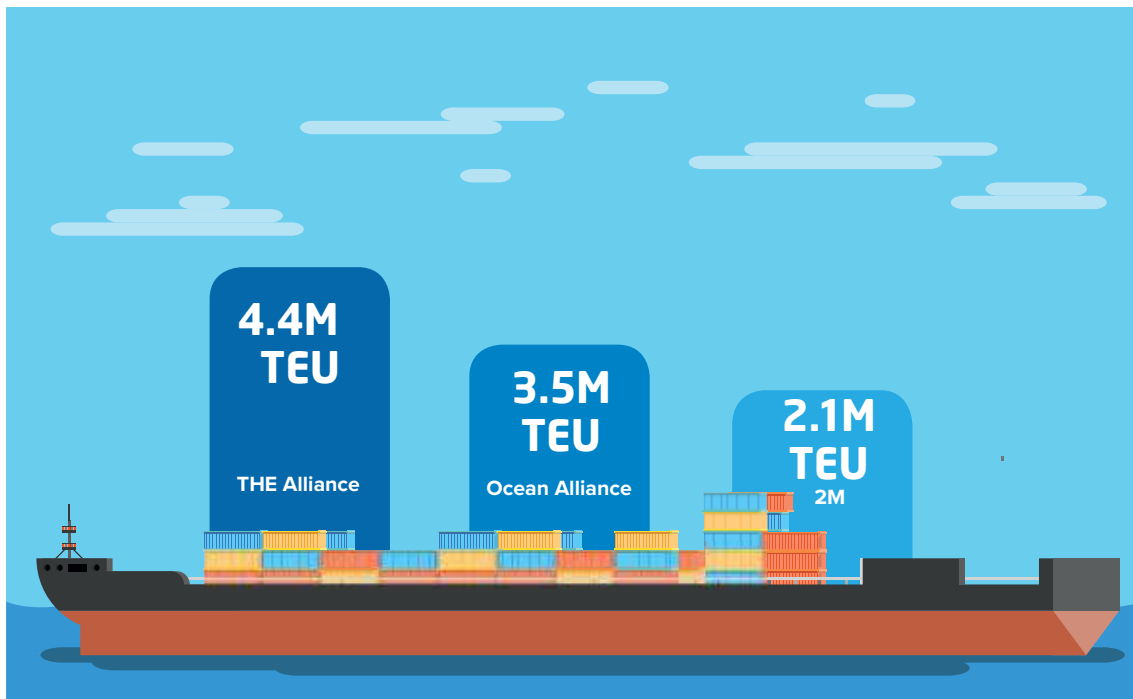
Due to the larger size of ship and alliances, the shipping line will continue to find a balance between transshipment and direct call. Large ships search for large volumes of goods to be served and select the port to be visited because of the high operation costs. Transshipment and hubs are needed to increase the occupancy of large-sized vessels and the opportunity for transshipment relay services.

On the other hand, the bigger volume of goods in a port encourages more direct direct calls to the port. The point-to-point direct service alternates with transshipment shipping line operation pattern makes the hub-and-spoke network to be more increasingly complex.

PROSPEK USAHA
Business Outlook

Selain itu, tren kolaborasi pelabuhan dengan *shipping line* juga semakin bermunculan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak *Joint Venture Agreements* antara terminal dengan *shipping line* yang belum terafiliasi. Salah satu contoh PSA Singapore akan bekerja sama dengan *Ocean Network Express* atau biasa dikenal dengan *Shipping Line ONE*.

In addition, the trend of port collaboration with shipping lines has also emerged, indicated by the increasing number of joint ventures between terminal and shipping line that has not been affiliated. One example is PSA Singapore will work with Ocean Network Express or commonly known as Shipping Line ONE.



Sumber: Alphaliner Weekly Newsletter Volume 2019 Issue 03, 09 Januari 2019-15 Januari 2019

Source: Alphaliner Weekly Newsletter Volume 2019 Issue 03, January 09, 2019 - January 15, 2019

Setiap aliansi pelayaran terdiri dari beberapa perusahaan pelayaran yang bergabung membentuk kerja sama strategis untuk saling mencakup beberapa rute perdagangan yang potensial. Selain itu aliansi dibentuk juga untuk mengimbangi tren pertumbuhan kapasitas kapal yang semakin besar sehingga kargo yang terkonsolidasi dari beberapa pelayaran dapat menambah muatan kapal dan mengurangi biaya operasional dan risiko.

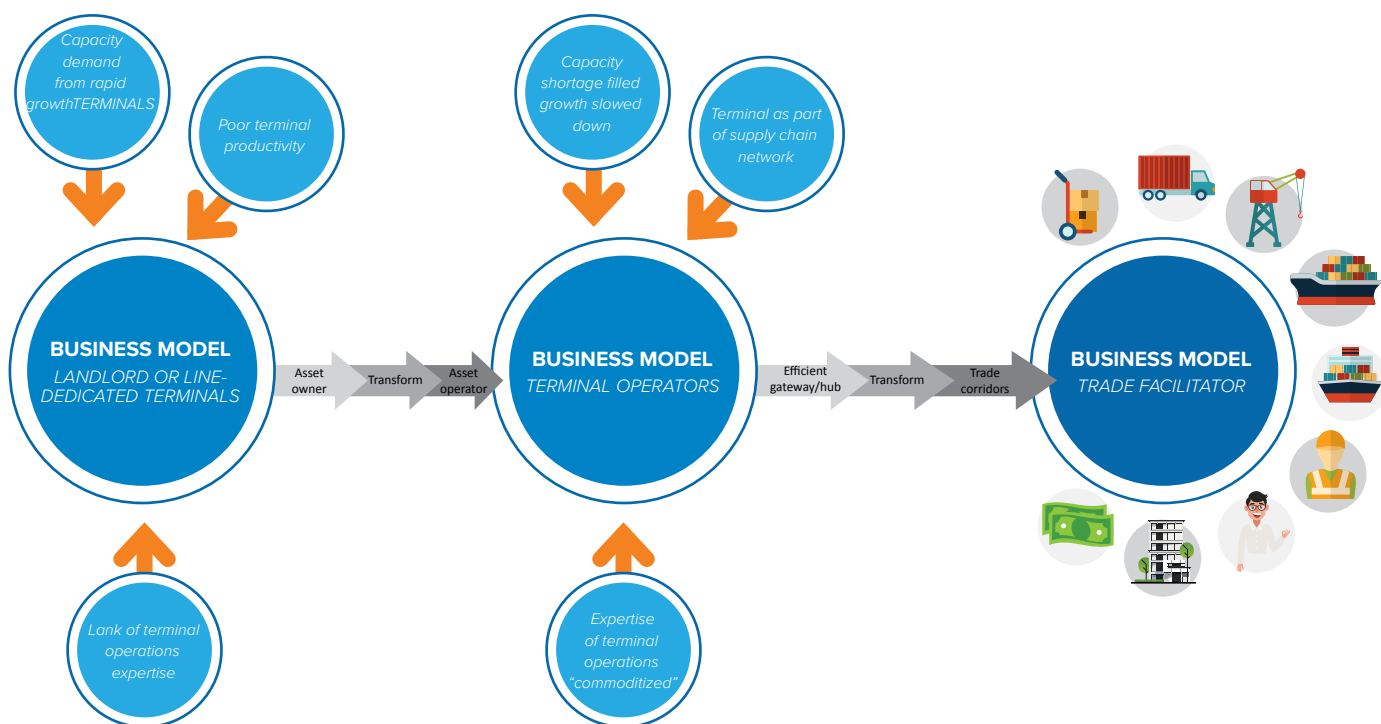
Each shipping alliance consists of several shipping companies that join forces to form strategic cooperation to cover each other in a number of potential trade routes. Besides that, the alliance is also formed to offset the trend of ship capacity growth so that consolidated cargoes from several shipping lines could increase shiploads and reduce operational costs and risks.

3. Global Supply Chain Integration

Integrasi dan kerja sama yang dilakukan pelabuhan tidak hanya berlaku dengan *shipping line*, melainkan dengan pelaku *supply chain* lainnya, seperti kawasan *industry*, *forwarder*, *warehouse* dan beberapa *stakeholder supply chain* lainnya. Peran pelabuhan yang semula menjadi pengelola pelabuhan mulai beralih menjadi *trade facilitator* atau penyedia *platform* perdagangan. Secara garis besar terkait peralihan peran pelabuhan dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

3. Global Supply Chain Integration

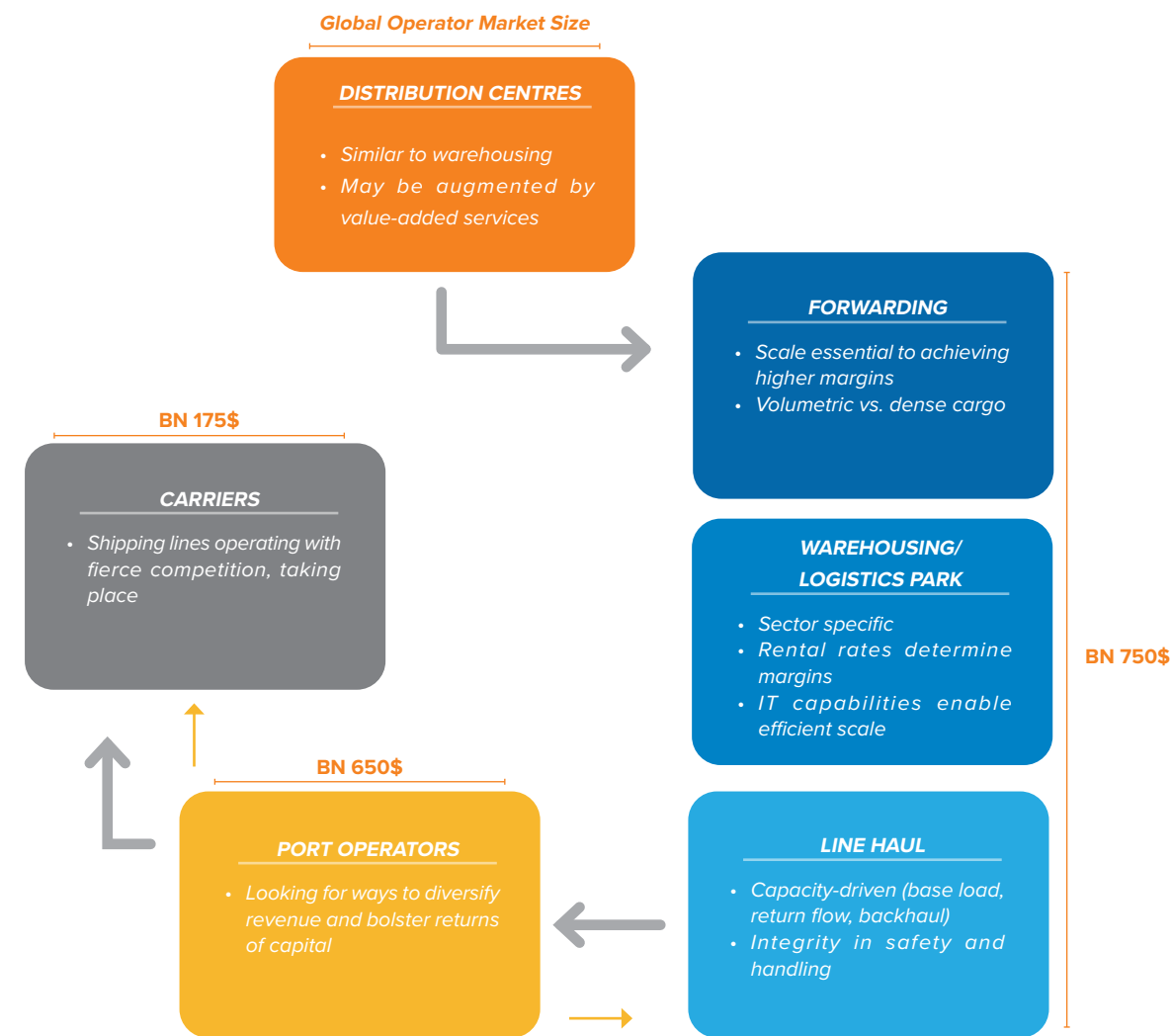
The integration and cooperation carried out by ports are not only applied in shipping lines, but also with other supply chain players, such as industrial estates, forwarders, warehouses and several other supply chain stakeholders. The role of the port which was originally managing port began to turn into trade facilitator or trade platform provider. In general, the transition of port role can be described below:



Peralihan peran ini muncul juga pelabuhan mulai melihat peluang bisnis yang cukup besar untuk pengembangan secara vertikal ini, Dilansir dari Acennture tahun 2019, secara global bisnis pelabuhan hanya mencakup 6,56% dari 100% skala bisnis *supply chain*. Hal ini tergambar dari gambar di bawah ini

This role transition also emerged as the port began to see considerable business opportunities for vertical development. Reported by Acennture in 2019, globally, the port business covers only 6.56% of 100% scale of the supply chain business, as illustrated below.

PROSPEK USAHA
Business Outlook



OPERATOR ECONOMICS

EBITDA (%)	8-20	10-15	8-20	10-15	35-55	4-7
ROCE (%)	10-30			2.5-7.5		0-5

Gambar 1 Sumber Accenture

Figure 1 Source Accenture

Untuk menjadi *trade facilitator*, terdapat beberapa transformasi yang harus dilakukan pelabuhan, diantaranya adalah sebagai berikut

a. *Diversify Into The New*

- Tersedianya *digital platform* yang terbuka dan untuk Publik agar para pelaku usaha *supply chain* dapat berpartisipasi dalam perdagangan lokal dan dunia.
- Penawaran pembiayaan dan regulasi yang jelas.
- Perpanjangan Layanan untuk operator dan pengguna pelabuhan dari kawasan *hinterland* sampai pelabuhan sebagai solusi kolaborasi antar pelaku *supply chain*.

b. *Unlock The Core*

- Perubahan pelabuhan yang semula area terisolasi menjadi area yang terintegrasi dengan kawasan industri dan *shipping line*.
- Perubahan pelabuhan yang semula area pelayanan bogkar muat menjadi *gateway service*.
- Optimalisasi aset dan produktivitas.

4. Industry 4.0

Industry 4.0 didorong oleh dunia yang terkoneksi secara elektronik dan *digital*. Setiap orang terkoneksi dengan sesamanya dan dengan *knowledge* yang dimiliki, sehingga data menjadi salah satu aset perusahaan dan hal berharga. Terdapat 4 (empat) tren yang terbentuk akibat *industry 4.0*, antara lain:

- a. *Platform Interconnection*: Kemampuan *platform* dan alat untuk saling berkomunikasi dan terhubung.
- b. *Information Transparency*: Ketersediaan data dan informasi untuk membuat keputusan strategis dan mengidentifikasi ruang untuk berinovasi.
- c. *Technical Assistance*: Ketersediaan teknologi untuk membantu manusia secara langsung dan tidak langsung, contoh *Robot Technology*.
- d. *Decentralized Decision*: Kemampuan teknologi untuk membuat keputusan dan mengerjakan tugas secara mandiri contoh *artificial intelligence*.

To become a trade facilitator, there are several transformations that must be carried out by a port, including the following

a. *Diversify Into The New*

- Availability of an open and digital platform for the Public so that supply chain business players can participate in local and world trade.
- Clear financing and regulatory offer.
- Service Extension for operators and port users from the hinterland area to the port as a collaboration solution between supply chain players.

b. *Unlock The Core*

- Changes to the port, which was originally an isolated area became an area integrated with industrial estates and shipping lines.
- Changes to the port, which was originally loading unloading service area as gateway service.
- Optimization of assets and productivity.

4. Industry 4.0

Industry 4.0 is driven by a world that is connected electronically and digitally. Everyone is connected to each other and to the knowledge they have, so that data becomes one of the assets and valuable things for a company. There are 4 (four) trends formed due to *industry 4.0*, including:

- a. *Platform Interconnection*: Ability of platforms and tools to communicate and connect with each other.
- b. *Information Transparency*: Availability of data and information to make strategic decisions and identify spaces for innovation.
- c. *Technical Assistance*: Availability of technology to help humans directly and indirectly, for example *Robot Technology*.
- d. *Decentralized Decision*: Technological ability to make decisions and carry out tasks independently, for example *artificial intelligence*.

PROSPEK USAHA
Business Outlook

5. Trade Protectionism

Terdapat 4 (empat) tren yang dibentuk dari adanya *trade war* antara United State of America dan China, yakni

- a. Pelemahan pertumbuhan kedua negara dan global. Hal ini berakibat diproyeksikan terdapat peningkatan jumlah *weekly loops* dari 7 (tujuh) menjadi 12 (dua belas) di Regional Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2021.
- b. Pengetatan kebijakan moneter AS.
- c. Pelemahan ekspor negara pemasok AS dan China hal ini dibuktikan dengan *Throughput* peti kemas pada kuartal III 2018 masih tumbuh namun mengalami perlambatan dan *Drewry Maritime Research* memproyeksikan pertumbuhan *throughput* peti kemas akan mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 1% jika perang dagang masih terus berlanjut.
- d. Penghindaran tarif dengan negara ketiga.

5. Trade Protectionism

There are 4 (four) trends that are formed due to the trade war between United State of America and China, which are:

- a. The weakening growth in both countries and globally. This resulted in a projected increase in the number of weekly loops from 7 (seven) to 12 (twelve) in the East Asia and Southeast Asia regions in 2021.
- b. The tightening of US monetary policy.
- c. The weakening of export from supplier countries of the US and China as evidenced by container throughput in the third quarter of 2018 that was still growing but experiencing a slowdown and *Drewry Maritime Research* projects the container throughput growth will decline from 3.5% to 1% if the trade war continues.
- d. The avoidance of tariffs with third countries.

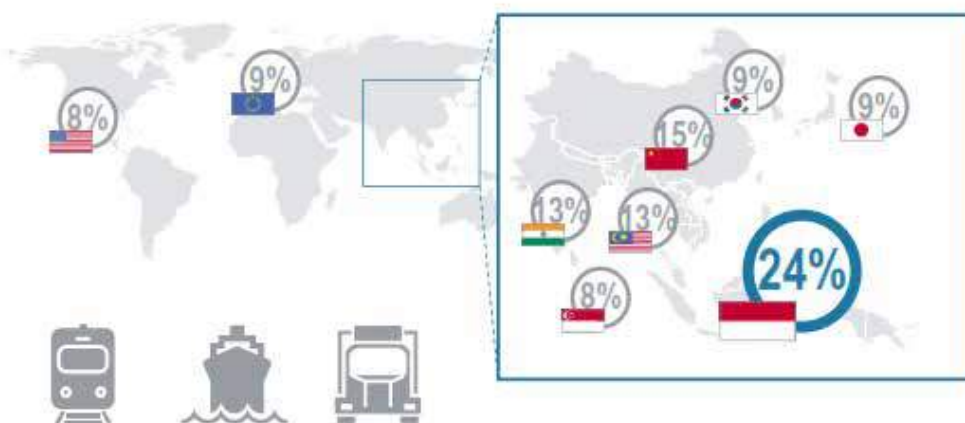
PROSPEK USAHA

Business Outlook

TREND NASIONAL

Tantangan besar lainnya yang masih menjadi tugas rumah bagi seluruh *stakeholder* pelabuhan di Indonesia adalah masih tingginya biaya logistik (*logistic cost*). Dari hasil analisis diketahui bahwa persentase biaya logistik di Indonesia terhadap total GDP adalah mencapai 24%, jauh lebih tinggi dibanding biaya logistik negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Porsi terbesar biaya logistik Indonesia secara berurutan adalah untuk keperluan inventori, transportasi darat, transportasi air, administrasi dan lainnya.

Biaya Logistik Indonesia terhadap GDP 2018 (dalam %)



Sumber: Armstrong and Associates, CIA, IMAP, World Bank, Roland Berger 2018

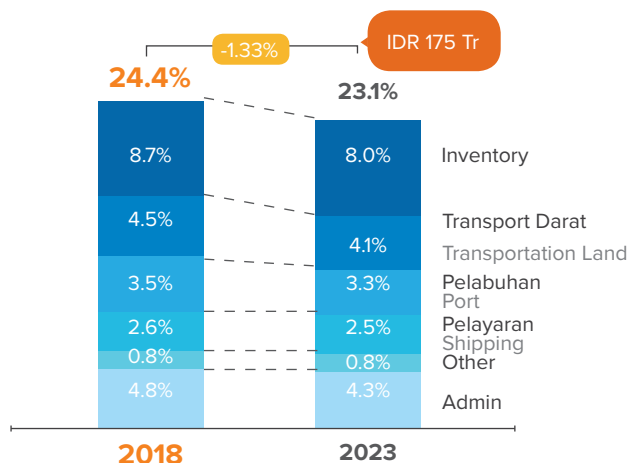
NATIONAL TREND

Another big challenge that still becomes a homework for all port stakeholders in Indonesia is the high logistic costs. From the analysis, it is known that the percentage of logistic costs in Indonesia to total GDP is 24%, far higher than the logistic costs of neighboring countries such as Singapore and Malaysia. The largest portion of Indonesia's logistic costs in sequence is for inventory, land transportation, water transportation, administration and other purposes.

Indonesia's Logistic Costs to 2018 GDP (in%)

Source: Armstrong and Associates, CIA, IMAP, World Bank, Roland Berger 2018

Proporsi Biaya Logistik terhadap GDP (dalam %)



Sumber: World Bank and Analisis PwC Strategy&.(2018)

Source: World Bank and Analisis PwC Strategy&.(2018)

PROSPEK USAHA Business Outlook

Sebagaimana ditunjukkan grafik di atas dan dari hasil analisis PwC Strategy&, biaya logistik dapat ditekan melalui 2 (dua) upaya yaitu peningkatan kualitas pelabuhan serta perbaikan konektivitas maritim.

1. Peningkatan Kualitas Pelabuhan di Indonesia
 - a. Inisiatif strategis melalui standarisasi operasi terminal peti kemas, non peti kemas, peralatan, dan pelayanan kapal bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelabuhan di Indonesia dari segi efisiensi dan produktivitas di Indonesia.
 - b. Efisiensi kegiatan pelabuhan dan pelayaran diprediksi meningkat sebanyak 20% (pengurangan waktu tunggu) sehingga menurunkan persentase biaya logistik dari GDP sebanyak 0,27%.
2. Perbaikan Konektivitas Pelabuhan dan Sarana Pendukungnya
 - a. Inisiatif strategis melalui pembangunan *integrated port network* dan integrasinya dengan kawasan, serta kolaborasi *digital* antara pelabuhan dengan *national trade system* berpotensi meningkatkan konektivitas dan efektivitas rantai pasok nasional.
 - b. Hal ini diproyeksi meningkatkan efektivitas transportasi darat dan kebutuhan *inventory* sebanyak 35% sehingga menurunkan persentase biaya logistik dari GDP logistik sebanyak 1,06%.

PELUANG

Di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia kepelabuhanan, Indonesia dan IPC khususnya masih memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki IPC antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan Proyek Strategis Nasional dengan masuknya Proyek New Priok, Kijing, CBL, dan Sorong dalam Proyek Strategis Nasional.
- b. Pengembangan Pelabuhan Umum milik Pemerintah (UPT) dengan adanya tawaran dari Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan beberapa pelabuhan UPT menjadi pelabuhan Komersial.
- c. Potensi peningkatan volume komoditas inti yang menunjukkan trend positif volume komoditas inti dan *market size* yang masih besar untuk komoditas curah.

As shown in the graph above and from the analysis results of PwC Strategy&, the logistic costs can be reduced through 2 (two) measures, which are improving port quality and improving maritime connectivity.

1. Improvement of Port Quality in Indonesia
 - a. Strategic initiatives through standardizing the operation of container terminal, non-container, equipment, and ship services in order to improve the quality of ports in Indonesia in terms of efficiency and productivity.
 - b. Efficiency of port and shipping activities is predicted to increase by 20% (reduction in waiting time), thereby reducing the percentage of logistic costs from GDP by 0.27%.
2. Improvement of Port Connectivity and Supporting Facilities
 - a. Strategic initiatives through the development of integrated port networks and integration with the region, and digital collaboration between ports and national trade systems that has the potential to increase connectivity and effectiveness of national supply chain.
 - b. This is projected to increase the effectiveness of land transportation and inventory needs by 35%, thereby reducing the percentage of logistic costs from GDP by 1.06%.

OPPORTUNITIES

Amid the uncertainty that exists in the world of ports, Indonesia and IPC in particular still have opportunities to grow. IPC opportunities include the following:

- a. Development of National Strategic Projects with the inclusion of the New Priok, Kijing, CBL and Sorong Projects in the National Strategic Projects.
- b. Development of Public Ports owned by the Government (UPT) with an offer from the Ministry of Transportation to develop several UPT ports into Commercial ports.
- c. The potential for an increase in the volume of core commodities shows a positive trend in the volume of core commodities and a large market size for bulk commodities.

- d. Rencana pemerintah dalam pengembangan industri, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa melalui peluang kerjasama dalam pengembangan industri dan KEK yang terintegrasi pelabuhan di luar Jawa.
- e. *Holding* BUMN Pelabuhan melalui rencana sinergi antara Pelindo I-IV serta entitas/cucu Perseroan yang sejenis.
- f. Kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang memudahkan kerjasama perusahaan global, khususnya negara yang bermitra dengan Indonesia.
- g. Kerjasama pengembangan pelabuhan dengan pemilik kargo (kerjasama pengembangan DUKS/TUKS baru) melalui kerjasama pengembangan dermaga/terminal dengan pemilik barang.

KEKUATAN

Kekuatan yang dimiliki IPC dalam menghadapi tantangan dan prospek usaha disajikan sebagai berikut.

- a. Memiliki struktur keuangan yang kuat.
- b. *Corporate branding* dan *networking* yang luas dengan pelaku industri nasional dan internasional sehingga investor cenderung memilih IPC sebagai mitra pengembangan pelabuhan di Indonesia.
- c. Pengalaman dalam pengembangan pelabuhan skala internasional dengan keberhasilan dalam pembangunan New Priok Container Terminal 1.
- d. Lokasi geografis wilayah operasi Perseroan yang berada pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- e. Memiliki kemampuan *handling* kargo untuk seluruh jenis kargo dengan fasilitas dan peralatan cabang-cabang pelabuhan yang dapat melayani hampir semua jenis kargo.
- f. Memiliki hubungan dengan *stakeholder* pelabuhan yang baik antara lain dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan *Global Network*.
- g. Memiliki talenta yang telah terdidik serta berwawasan kepelabuhanan dan logistik. Insan Perseroan yang berwawasan global, sarjana, dan master bidang kepelabuhanan dan logistik di universitas internasional.

- d. Government plans for industrial development, industrial estates, and Special Economic Zones (SEZ) outside Java through opportunities for cooperation in industrial development and SEZ integrated ports outside Java.
- e. SOE Holding Port through a synergy plan between Pelindo I-IV and similar entities of the Company.
- f. Indonesian free trade cooperation and Comprehensive Economic Partnership Agreement that facilitates cooperation with global companies, especially countries that partner with Indonesia.
- g. Cooperation in developing ports with cargo owners (cooperation in the development of new DUKS / TUKS) through cooperation in the development of docks / terminals with goods owners.

STRENGTHS

IPC strengths in facing challenges and business prospects is presented as follows.

- a. Has a strong financial structure.
- b. Extensive corporate branding and networking with national and international industry players so investors tend to choose IPC as a port development partner in Indonesia.
- c. Experience in developing international scale ports with success following the construction of New Priok Container Terminal 1.
- d. Geographical location of the Company's operations in areas with high economic growth.
- e. The ability to handle all types of cargo with port facilities and equipment that can service almost all types of cargo.
- f. Good relations with port stakeholders including the Government, Higher Education, and Global Network.
- g. Educated talent and port and logistical insight. Company people who are globally-minded, undergraduates, and masters in ports and logistics in international universities.

PROSPEK USAHA

Business Outlook

Berdasarkan *trend* global dan nasional yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, dengan menerapkan strategi-strategi Perseroan, IPC optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal tersebut juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan. Saat ini Perseroan telah memiliki pangsa pasar peti kemas IPC sebesar 77% dan non peti kemas sebesar 50% dibandingkan dengan kompetitor yang ada di wilayah kerja Pelabuhan IPC. Dengan telah dilaksanakannya *Corporate Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan yang telah ditetapkan, Perseroan optimis akan memiliki prospek kedepan yang baik.



Based on the global and national trends described above together with the various opportunities, by implementing the Company's strategies, IPC is optimistic that it can always improve its performance over the long term. In other words, the Company has very good business prospects. This is also supported by the strengths of the Company. At present the Company has a market share of IPC containers of 77% and non containers of 50% compared to competitors in the IPC Port working areas. Through the implementation of the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Corporate Roadmap, the Company is optimistic that it will have good future prospects.

STRATEGI KE DEPAN

Future Strategies

Dalam rangka perwujudan visi, misi dan target Perseroan tahun 2019, RKAP dan RKM tahun 2019 telah disusun dengan mengacu pada beberapa aspek, antara lain Arahan Pemegang Saham, Arahan Direksi, Rencana Jangka Panjang Perseroan tahun 2016–2020 yang telah disampaikan kepada kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Nomor: UT.022/12/4/1/PI.II-17 pada tanggal 12 April 2017 dan SK nomor: HK.568/8/9/PI.II-16 tentang Penetapan Visi, Karakter Perseroan, Nilai-Nilai Perseroan dan *Corporate Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Adapun *corporate roadmap* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

In the pursuit of achieving the Company's vision, mission and targets for 2019, the 2019 RKAP and RKM have been prepared by referring to a number of aspects, including Shareholders' Directives, Board of Directors' Directives, the Company's 2016-2020 Long-Term Plan that has been submitted to the Ministry of State-Owned Enterprise (SOE) through Letter number: UT.022/12/4/1/PI.II-17 on April 12, 2017 and Decree Number: HK.568/8/9/PI.II-16 concerning the Establishment of the Company's Vision, Characters, Values and Corporate Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The corporate roadmap is as follows:

2016	2017	2018	2019	2020
				
FIT IN INFRASTRUCTURE	ENHANCEMENT	ESTABLISHMENT	SUSTAINABLE	WORLD CLASS
Fine tuning in every area	strengthening/ enhancing business	Establishment of performance	Sustainable superior performance	World class performance
<i>Governance: Business Process, SOP, Structure Culture Corporate and Sub Business Model/ Restructuring Re-define Business</i>	<i>Operational and Service improvement Expansion of Subsidiaries Infrastructure Development (Greenfield Project and brownfield project) Optimize IT Utilization</i>	<i>Volume Growth Profitability Growth Holding Establishment (Synergize among BUMN)</i>	<i>Growth Strategy: Non Organic and Organic growth National Connectivity Program by implementing strategic project Global Expansion Program</i>	<i>Establishment of Global foot print. Establishment of world class terminal operator Implementation of green port and smart port Excellence competing subsidiaries</i>

Seperti yang dilihat pada gambar di atas bahwa terdapat 3 (tiga) target kualitatif Perseroan yang hendak di capai pada tahun 2019, antara lain:

- Growth Strategy – Non Organic and Organic Growth**
 Strategi ini diambil untuk menangkap tren global dimana ukuran kapal yang semakin besar, pembentukan aliansi antara pelabuhan dan shipping line, serta aliansi antar *shipping line* dan terjadi *Global Supply Chain Integration*. Adapun beberapa inisiatif tahun 2019 yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini antara lain:
 - KEK Kijing
 - KEK Bengkulu
 - Pembangunan New Priok Eastern Access
 - Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing, CBL

As seen in the figure above, there are 3 (three) qualitative targets of the Company to be achieved by 2019, including:

- Growth Strategy - Non Organic and Organic Growth**
 This strategy is taken to capture the global trend where ship sizes are increasing, alliance is formed between ports and shipping lines as well as alliance between shipping lines and Global Supply Chain Integration. The 2019 initiatives that will be implemented to execute this strategy include:
 - KEK Kijing
 - KEK Bengkulu
 - Construction of New Eastern Priok Access
 - Construction of Cibitung-Cilincing Toll Road, CBL

STRATEGI KE DEPAN Future Strategies

- e. Pengoperasian Pelabuhan Kijing
- f. Pengoperasian gedung Maritime Tower
- g. Pengoperasian Museum Maritim
- h. Pengoperasian Pelabuhan Kalibaru

2. National Connectivity Program by Implementing Strategic Project

Strategi ini diambil untuk menangkap trend Nasional dimana kondisi logistik di Indonesia yang masih dinilai tinggi dan minimnya konektivitas antar pelabuhan. Adapun beberapa inisiatif tahun 2019 yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini antara lain:

- a. Pelindo *Incorporated*
- b. Standarisasi 7 (tujuh) Pelabuhan diberbagai bidang
- c. Integrasi Pelabuhan di wilayah Banten
- d. *Review* pengembangan pelabuhan Cirebon dan Tanjung Carat
- e. *Review* pengembangan pelabuhan Sorong-Seget dan integrasi dengan Pelabuhan Arar dan Sorong *eksisting*
- f. *Joint Venture* Operator pelabuhan Patimban

3. Global Expansion Program

Strategi ini diambil untuk menangkap peluang bisnis *supply chain* secara global yang telah di bahas sebelumnya. Adapun beberapa inisiatif tahun 2019 yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini antara lain:

- a. Inisiasi Kerjasama dengan *Port Operator/Authority* beberapa pelabuhan (Vietnam, Australia, dan wilayah asia lainnya seperti Bangladesh)
- b. Follow up kerja sama dengan *Port Operator/Authority* beberapa pelabuhan (Djibouti, Baku, Ning Bo, dan lainnya)

Mengacu pada Keputusan Menteri badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: SK-295/MBU/11/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), pada tahun 2018 IPC telah melakukan transformasi struktur organisasi. Terkait hal tersebut, Untuk dapat mendukung dan mewujudkan target di paragraf sebelumnya, masing-masing direktorat berdasarkan struktur organisasi baru telah menyusun tema dan rencana kerja manajemen prioritas, sebagai berikut:

1. Direktorat Utama: **Integrated Port Network Implementation and Compliance**

- a. Implementasi Cascading KPI

- e. Kijing Port operation
- f. Maritime Tower building operation
- g. Maritime Museum operation
- h. Kalibaru Port Operation

2. National Connectivity Program by Implementing Strategic Project

This strategy is taken to capture the national trend where logistical conditions in Indonesia are still highly valued and the lack of connectivity between ports. The 2019 initiatives that will be implemented to execute this strategy include:

- a. Pelindo Incorporated
- b. Standardization of 7 (seven) ports in various fields
- c. Port Integration in Banten region
- d. Review of the development of Cirebon and Tanjung Carat ports
- e. Review of the development of Sorong-Seget port and the integration with existin Arar and Sorong ports
- f. Joint Venture Operator at Patimban port

3. Global Expansion Program

This strategy is taken to capture the opportunity of global supply chain business as discussed earlier. The 2019 initiatives that will be implemented to execute this strategy include:

- a. Initiation of cooperation with Port Operators/Authority of several ports (Vietnam, Australia and other Asian regions such as Bangladesh)
- b. Follow-up of cooperation with Port Operators/Authority for several ports (Djibouti, Baku, Ning Bo, etc.)

Referring to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: SK-295/MBU/11/2018 concerning Dismissal, Nomenclature Changes of Position, Transfer of Assignment of, and Appointment of Members of PT Pelabuhan Indonesia's Board of Directors II (Persero), in 2018 IPC has transformed its organizational structure. Related to this, to be able to support and deliver the aforementioned targets, each directorate based on the new organizational structure has prepared the theme and priority management work plan, as follows:

1. Main Directorate: **Integrated Port Network Implementation and Compliance**

- a. KPI cascading implementation

- b. *Digital Port Strategy and Implementation*
 - c. Implementasi *Integrated Port Network* untuk mendukung *Holding*
 - d. Peningkatan Kapasitas Fungsi Internal Audit pada Level 3 (tiga)
 - e. *Quality Assurance Improvement Program (QAIP)*
 - f. Pengendalian Internal IPC Berbasis COSO
 - g. Implementasi *IPC Brand Guideline*
 - h. *IPC GCG Compliance* (Implementasi *Roadmap GCG Fase Sustainable*)
 - i. *Management Tracking (E-Mantrack)*
 - j. Standarisasi GCG dan *Engagement* Penerapan Prinsip GCG di Cabang dan Entitas Anak
- 2. Direktorat Komersial: Excellent Performance of ROA, Organic and Unorganic Growth**
- a. Penyusunan kajian optimalisasi aset tanah / HBU Study di 3 (tiga) Cabang Pelabuhan
 - b. Pengadaan tanah proyek strategis pembangunan pelabuhan kijing 200 Ha
 - c. Melakukan Penyusunan Strategi dan Program Pemasaran/Penjualan yang Mengintegrasikan Layanan Jasa IPC, serta Memasarkan Proyek Strategis IPC Secara Intensif dalam Mendapatkan Calon Pengguna Jasa/Mitra
 - d. Peningkatan Layanan kepada Pelanggan berbasis teknologi
 - e. Implementasi dan desain segmentasi pelanggan
 - f. Kerjasama Pengoperasian Pelabuhan PT KBS
 - g. Melanjutkan sertifikasi yang sedang berjalan dan melakukan proses sertifikasi lahan yang sudah lengkap secara administrasi
 - h. Penetapan standar pelayanan pelanggan di lingkungan IPC
 - i. Sinkronisasi kebijakan atau regulasi pentarifan di lingkungan IPC Group
 - j. Penyusunan Strategi Aliansi Bisnis
- 3. Direktorat Teknik: National Strategic Project Implementation and Equipment Modernization**
- a. Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I
 - b. Perencanaan Jalan Akses Timur Kalibaru
 - c. Pengadaan Peralatan terminal Kijing
 - d. Perencanaan Peralatan untuk Pelabuhan Patimban
 - e. Pengembangan perangkat Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS) tahap II
 - f. Pengembangan perangkat *Remote Ship Condition dan Monitoring System (RSCMS)*
- b. Digital Port Strategy and Implementation
 - c. Implementation of Integrated Port Network to support holding
 - d. Capacity Building for Internal Audit Function at Level 3 (three)
 - e. Quality Assurance Improvement Program (QAIP)
 - f. COSO-based IPC Internal Control
 - g. Implementation of IPC Brand Guideline
 - h. IPC GCG Compliance (Implementation of Sustainable Phase of GCG Roadmap)
 - i. Management Tracking (E-Mantrack)
 - j. Standardization of GCG and Engagement in the Implementation of GCG Principles in Branches and Subsidiaries
- 2. Commercial Directorate: Excellent Performance of ROA, Organic and Unorganic Growth**
- a. Preparation of land asset optimization/HBU Study in 3 (three) Port Branches
 - b. Strategic project land procurement for the construction of 200 Ha Kijing port
 - c. Preparing Marketing/Sales Strategies & Programs that Integrate IPC Services and Intensively Marketing IPC Strategic Projects in Obtaining Prospective Service Users/Partners
 - d. Technology-based Customer Service Improvement
 - e. Implementation and design of customer segmentation
 - f. Port Operational Cooperation of PT KBS
 - g. Continuing the ongoing certification and conducting land certification process that has been complete administratively
 - h. Establishment of customer service standards within IPC environment
 - i. Synchronization of tariff policies or regulations within IPC Group environment
 - j. Preparation of Business Alliance Strategy
- 3. Directorate of Engineering: National Strategic Project Implementation and Equipment Modernization**
- a. Phase I Construction of Kalibaru Terminal
 - b. Planning of East Kalibaru Access Road
 - c. Procurement of Kijing Terminal Equipment
 - d. Planning of Patimban Port Equipment
 - e. Phase II Development of Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS)
 - f. Development of devices for Remote Ship Condition and Monitoring System (RSCMS)

STRATEGI KE DEPAN
Future Strategies

- g. Implementasi Kajian Program *Green Port* Sub Bidang Pengelolaan Energi
- h. *Monitoring* Pelaksanaan Elektrifikasi Alat Bongkar Muat di Cabang Pelabuhan IPC
- i. Konstruksi Infrastruktur Mekanikal dan Elektrikal Pengembangan dan Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat
- j. Implementasi *Dashboard Monitoring* Terintegrasi Proyek Strategis.

4. Direktorat Operasi: Fully Implementation of Digital Operation

- a. Implementasi dan integrasi NPKTOS dengan VMS dan *E-Service* (implementasi NPKTOS di Cabang Jambi, Cirebon, Teluk Bayur, Tj Priok (TO1), Bengkulu (TCK), Pontianak (MP); integrasi NPKTOS dengan VMS di Cabang Jambi, Cirebon, Teluk Bayur, Tj Priok (TO1); Implementasi *E-Service* modul NPK di Cabang Banten;
- b. Implementasi NPK-S di lingkungan IPC (Cabang Panjang, Pontianak, Palembang, dan Jambi)
- c. Implementasi pola operasi berbasis TOS di cabang Bengkulu dan Sunda Kelapa
- d. Implementasi Pola Operasi Berbasis *Autogate System* di TPK Panjang
- e. Implementasi dan roll out ESB Tahap II
- f. Pembangunan Aplikasi *Vessel Management System* untuk platform IOS dan Android
- g. DC dan DRC *enhancement* fase 2
- h. *IT Service Management* Fase II;
- i. Program Pengembangan/Penyelarasan SOP pada kegiatan Operasional dengan Kebijakan SMK3
- j. Implementasi *Marine Operating System* (MOS) Di Cabang Panjang dan Teluk Bayur.

5. Direktorat Keuangan: Financial Superior Performance

- a. Pengembangan Sistem *Oracle Project Costing* Tahap III: Entitas Anak
- b. Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntansi Biaya Pelayanan Terminal Peti kemas pada PT IPC Terminal Peti kemas
- c. Pelaksanaan Pengembangan *Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service* (EPBCS) Tahap II
- d. *Roll Out Oracle Cash Management* ke Cabang-Cabang Pelabuhan

- g. Implementation of Green Port Program Study on the Energy Management Sub-Sector
- h. Monitoring the Implementation of Electrification of Loading and Unloading Equipment at IPC Port Branches
- i. Construction of Mechanical and Electrical Infrastructure of the Initial Phase Development and Construction of Kijing Terminal in Mempawah District, West Kalimantan
- j. Implementation of Integrated Monitoring Dashboard Strategic Project.

4. Directorate of Operations: Fully Implementation of Digital Operation

- a. Implementation and integration of NPKTOS with VMS and *E-Service* (NPKTOS implementation in Jambi, Cirebon, Teluk Bayur, Priok Tj (TO1), Bengkulu (TCK), Pontianak (MP) branches; NPKTOS integration with VMS in Jambi, Cirebon, Teluk Bayur, Tj Priok (TO1) branches; NPK module *E-Service* Implementation in Banten branch;
- b. NPK-S implementation in IPC (Panjang, Pontianak, Palembang and Jambi branches)
- c. Implementation of TOS-based operation pattern in Bengkulu and Sunda Kelapa branches
- d. Implementation of *Autogate System*-based Operation Pattern in TPK Panjang
- e. Implementation and roll out of ESB Phase II
- f. Development of *Vessel Management System* Application for IOS and Android platforms
- g. DC and DRC *enhancement* phase 2
- h. *IT Service Management* Phase II;
- i. SOP Development/Alignment Program on Operational activities with SMK3 Policy
- j. Implementation of *Marine Operating System* (MOS) in Panjang and Teluk Bayur branches.

5. Directorate of Finance: Financial Superior Performance

- a. Development of *Oracle Project Costing* System Phase III: Subsidiary
- b. Implementation of Accounting System for Container Terminal Services at PT IPC Terminal Peti kemas
- c. Development of *Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service* (EPBCS) Phase II
- d. *Roll Out Oracle Cash Management* to Port Branches

- e. Sosialisasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan *E-Payment*
- f. Pengembangan IPC *Intercompany System* Fase III
- g. Pengembangan Datamart Keuangan Berbasis BI Fase II
- h. Pengembangan Sistem Administrasi Nota Jasa Kepelabuhanan Lain-lain
- i. Implementasi Tata Kelola Entitas Anak
- j. Penyiapan dan Pelaksanaan IPO PT PTP

6. Direktorat SDM: Digital Culture, Excellent People, and Strengthening Legal Documentation

- a. Implementasi Program *Exit Plan* Pekerja;
- b. Aplikasi Performance Management System melalui implementasi KPI Individu
- c. Penyempurnaan sistem Kebijakan dan Aplikasi Pola Karir Perusahaan
- d. Integrasi antar Aplikasi sistem *Human Capital*
- e. Proses Percepatan Penegakkan Disiplin Pekerja
- f. Pembangunan HR Dashboard Demografi
- g. Integrasi LMS dengan Sistem SDM
- h. Pengembangan Sistem *Knowledge Management*
- i. Pengembangan Modul Pelatihan dan Konten *E-Learning*
- j. Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pekerja Dalam Mendukung *Holding* Kemaritiman
- k. Asistensi hukum program strategis perusahaan
- l. Implementasi dan Pengolahan *Data Strategic Sourcing*
- m. Implementasi E- Katalog di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero)

- e. Dissemination and Monitoring of E-Payment Policy Implementation
- f. Development of IPC Intercompany System Phase III
- g. Development of BI Phase II-based Financial Datamart
- h. Development of Other Port Services Note Administration System
- i. Implementation of Subsidiary Governance
- j. Preparation and Implementation of PT PTP's IPO

6. Directorate of HC: Digital Culture, Excellent People, and Strengthening Legal Documentation

- a. Implementation of Employee Exit Plan Program;
- b. Performance Management System application through implementation of Individual KPI
- c. Refinement of Corporate Career Pattern Application and Policy
- d. Integration between Human Capital system applications
- e. The Process of Accelerating Employee Discipline
- f. Development of HC Demographic Dashboard
- g. Integration of LMS with HC System
- h. Development of Knowledge Management System
- i. Development of Training Modules and E-Learning Content
- j. Planning for Employee Competency Development to support Maritime Holding
- k. Legal assistance for the Company's strategic programs
- l. Implementation and Processing of Strategic Sourcing Data
- m. E-Catalog Implementation in PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero)

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

- 7. Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis: *New strategy of business development, excellent Risk Management IPC Group and Excellent quality control system***
- Pemetaan Potensi Pengembangan Bisnis Anorganik dan Organik
 - Penyiapan *Business Intelligence* Untuk Pengembangan Bisnis Pelabuhan Sebagai *Ecosystem*
 - Penyusunan *Blueprint* Transformasi IPC Sejalan Dengan RJPP 2016-2020 (RJPP 2015-2019 perubahan)
 - Evaluasi *New Development* Industri Pelabuhan Di Dunia
 - Review Business Model* IPC Group Secara Menyeluruh
 - Lanjutan Pembentukan Pelindo *Incorporated*
 - Menerapkan manajemen risiko sebagai unsur *decision making* proses di bidang komersial, operasional, teknik dan keuangan;
 - Kajian Risiko atas proyek strategis
 - Implementasi *Business Continuity Management* Berkelanjutan
 - Pembangunan Lanjutan Sistem OMR Tahap 3.

- 7. Directorate of Business Transformation and Development: *New strategy of business development, excellent Risk Management IPC Group and Excellent quality control system***
- Mapping of Potentials for Inorganic and Organic Business Development
 - Preparation of Business Intelligence for Port Business Development as an Ecosystem
 - Preparation of IPC Transformation Blueprint In Line With 2016-2020 RJPP (2015-2019 RJPP revision)
 - Evaluation of New Port Industry Development in the World
 - Comprehensive Review of IPC Group Business Model
 - Continued Formation of Pelindo Incorporated
 - Implement risk management as an element of decision making process in the commercial, operational, technical and financial fields;
 - Risk Assessment of strategic projects
 - Implementation of Sustainable Business Continuity Management
 - Continued Development of OMR System Phase 3.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review described below refer to the Financial Statements for years ended on December 31, 2018 and 2017 and presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Purwanto, Sungkoro, and Surja Public Accountants (Member of Ernst and Young Global) and received unqualified opinion, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2018 and the consolidated financial performance and cash flows for the then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

The Company's financial performance consists of the performance of Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Comprehensive Income and Consolidated Consolidated Statement of Cash Flows and presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Consolidated Statement of Financial Position

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
ASET	ASSETS				
ASET LANCAR	CURRENT ASSETS				
Kas dan Setara Kas	Cash and cash equivalents	18.018.671.479	14.207.330.332	3.811.341.147	26,83%
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investments	3.836.007.289	6.999.082.698	(3.163.075.409)	(45,19%)
Piutang Usaha – Neto	Trade Receivables – Net				
Pihak Ketiga	Third Parties	634.078.032	549.154.117	84.923.915	15,46%
Pihak Berelasi	Related Parties	155.875.322	149.599.560	6.275.762	4,20%
Piutang Lain-Lain – Neto	Other Receivables - Net				
Pihak Ketiga	Third Parties	9.530.083	49.765.763	(40.235.680)	(80,85%)
Pihak Berelasi	Related Parties	640.168.731	738.312.346	(98.143.615)	(13,29%)
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka	Advances and Prepaid Expenses	120.068.178	144.716.602	(24.108.424)	(16,72%)
Pendapatan Masih Akan Diterima	Accrued Revenues				
Pihak Ketiga	Third Parties	305.866.345	303.926.301	1.940.044	0,64%
Pihak Berelasi	Related Parties	17.001.727	26.573.499	(9.571.772)	(36,02%)
Persediaan	Inventories	59.139.424	56.480.952	2.658.472	4,71%
Pajak Dibayar Di Muka	Prepaid taxes	751.789.998	557.236.979	194.553.019	34,91%
Aset Lancar Lainnya	Other Current Assets	6.139.521	-	6.139.521	100,00%
Total Aset Lancar	Total Current Assets	24.554.336.129	23.781.639.149	772.696.980	3,25%
ASET TIDAK LANCAR	NON-CURRENT ASSETS				
Investasi Jangka Panjang	Long-Term Investment	3.211.737.431	1.554.888.854	1.656.848.577	106,56%
Properti Investasi – Neto	Investment Properties - Net	377.142.447	394.342.020	(17.199.573)	(4,36%)
Aset Tetap – Neto	Fixed Assets - Net	12.628.997.433	11.325.850.596	1.303.146.837	11,51%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Aset Kerjasama Operasi – Neto	Joint Operation Assets - Net	482.390.189	507.560.396	(25.170.207)	(4,96%)
Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets	47.498.765	44.644.534	2.854.231	6,39%
Aset Tak Berwujud – Neto	Intangible Assets - Net	9.038.949.144	8.296.435.366	742.513.778	8,95%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak	Estimated Claims for Tax Refund	841.931.567	839.786.756	2.144.811	0,26%
Aset Lain-Lain	Other Assets	249.893.918	474.940.688	(225.046.770)	(47,38%)
Total Aset Tidak Lancar	Total Non-current Assets	26.878.540.894	23.438.449.210	3.440.091.684	14,68%
TOTAL ASET	TOTAL ASSETS	51.432.877.023	47.220.088.359	4.212.788.664	8,92%
LIABILITAS DAN EKUITAS	LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS	LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK	CURRENT LIABILITIES				
Pinjaman Bank Jangka Pendek	Short-term Bank Loans	4.000.000	-	4.000.000	100,00%
Utang Usaha	Trade Payables				
Pihak Ketiga	Third Parties	404.693.466	367.571.206	37.122.260	10,10%
Pihak Berelasi	Related Parties	1.261.214.247	999.183.968	262.030.279	26,22%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek	Short-term Unearned Revenues	834.098.021	778.706.786	55.391.235	7,11%
Utang Pajak	Taxes Payable	389.495.675	441.919.999	(52.424.324)	(11,86%)
Beban Akrua	Accrued Expenses	2.290.832.616	2.168.022.495	122.810.121	5,66%
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	Current Maturities of Long-Term Liabilities				
Utang Bank	Bank Loans	-	1.860.603	(1.860.603)	(100,00%)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi	Other Long-term Liabilities - Related Parties	38.272.280	54.127.289	(15.855.009)	(29,29%)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other Current Liabilities				
Pihak Ketiga	Third Parties	185.350.553	165.639.036	19.711.517	11,90%
Pihak Berelasi	Related Parties	90.237.622	95.916.891	(5.679.269)	(5,92%)
Total Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	5.498.194.480	5.072.948.273	425.246.207	8,38%
LIABILITAS JANGKA PANJANG	NON-CURRENT LIABILITIES				
Utang Obligasi	Bonds Payable	22.890.166.969	21.376.332.500	1.513.834.469	7,08%
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	Long-term Liabilities – Net of Current Maturities				

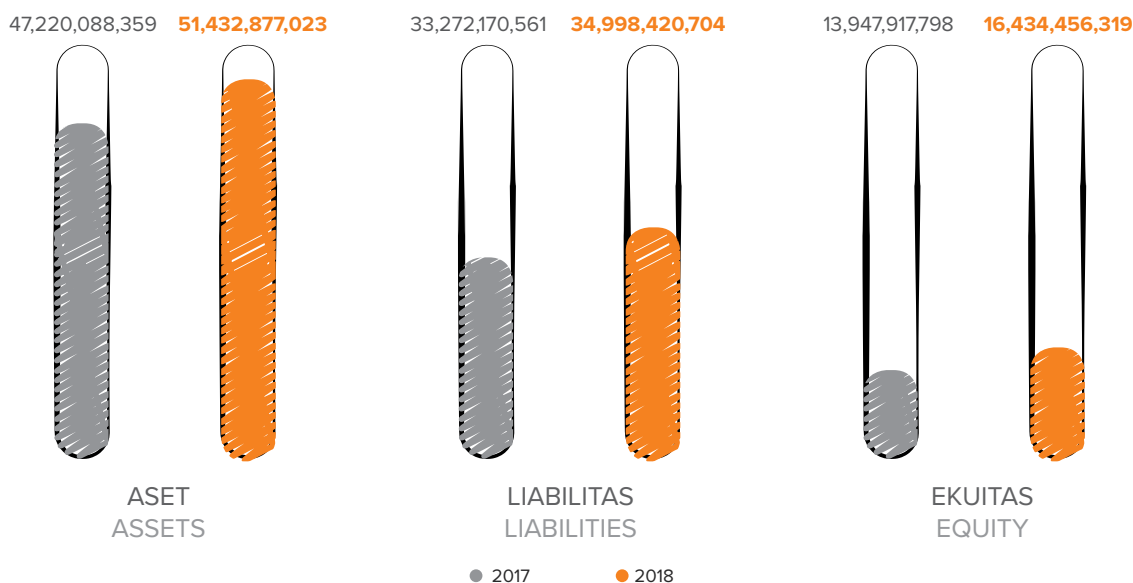
KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Ketiga	Other Long-term Liabilities - Third Parties	234.402.238	219.299.877	15.102.361	6,89%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	Long-term Unearned Revenues	4.290.892.916	4.496.181.101	(205.288.185)	(4,57%)
Liabilitas Imbalan Kerja	Employee Benefit Liabilities	1.776.917.294	1.806.109.326	(29.192.032)	(1,62%)
Liabilitas Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liabilities	307.846.807	301.299.484	6.547.323	2,17%
Total Liabilitas Jangka Panjang	Total Non-current Liabilities	29.500.226.224	28.199.222.288	1.301.003.936	4,61%
TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITIES	34.998.420.704	33.272.170.561	1.726.250.143	5,19%
EKUITAS	EQUITY				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1,000,000 (Nilai Penuh) Per Saham	Share Capital – Par Value of Rp1,000,000 (Full Amount) Per Share				
Modal Dasar – 4,000,000 Saham	Authorized Capital - 4,000,000 Shares				
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham	Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	-	0,00%
Modal Donasi	Donated Capital	26.825.982	26.825.982	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor	Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	-	0,00%
Saldo Laba	Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya	Appropriated	11.726.994.846	10.201.069.392	1.525.925.454	14,96%
Belum Ditentukan Penggunaannya	Unappropriated	2.379.261.695	2.179.893.506	199.368.189	9,15%
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	(112.143.427)	(72.365.832)	(39.777.595)	54,97%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto	Equity Attributable to Owners of Parent Entity - Net	15.147.370.621	13.461.854.573	1.685.516.048	12,52%
Kepentingan Nonpengendali	Non-controlling interests	1.287.085.698	486.063.225	801.022.473	164,80%
Ekuitas – Neto	Equity - Net	16.434.456.319	13.947.917.798	2.486.538.521	17,83%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	51.432.877.023	47.220.088.359	4.212.788.664	8,92%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Grafik Laporan Keuangan Konsolidasian
Graph of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam Ribuan Rupiah)
(in Thousand Rupiah)



ASET

Aset tahun 2018 mencapai Rp51,43 triliun, meningkat 8,92% atau Rp 4,21 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp47,22 triliun. Peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp3,44 triliun.

ASSETS

Assets in 2018 reached Rp51.43 trillion, an increase of 8.92% or Rp4.21 trillion compared Rp47.22 trillion in 2017. The increase in assets mainly came from an increase in non-current assets amounted toRp3.44 trillion.

Tabel Aset

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Assets

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Aset Lancar	Current Assets	24.554.336.129	23.781.639.149	772.696.980	3,25%
Aset Tidak Lancar	Non-current Assets	26.878.540.894	23.438.449.210	3.440.091.684	14,68%
Total Aset	Total Assets	51.432.877.023	47.220.088.359	4.212.788.664	8,92%

ASET LANCAR

Aset lancar tahun 2018 mencapai Rp24,55 triliun, meningkat 3,25% atau Rp772,70 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp23,78 triliun. Peningkatan aset lancar terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp3,81 triliun.

CURRENT ASSETS

Current assets in 2018 reached Rp24.55 trillion, increased by 3.25% or Rp772.70 billion compared to 2017 of Rp23.78 trillion. The increase in current assets mainly came from an increase in cash and cash equivalents amounted to Rp3.81 trillion.

Tabel Aset Lancar

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Current Assets

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Kas dan Setara Kas	Cash and cash equivalents	18.018.671.479	14.207.330.332	3.811.341.147	26,83%
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investments	3.836.007.289	6.999.082.698	(3.163.075.409)	(45,19%)
Piutang Usaha – Neto	Trade Receivables – Net				
Pihak Ketiga	Third Parties	634.078.032	549.154.117	84.923.915	15,46%
Pihak Berelasi	Related Parties	155.875.322	149.599.560	6.275.762	4,20%
Piutang Lain-Lain – Neto	Other Receivables - Net				
Pihak Ketiga	Third Parties	9.530.083	49.765.763	(40.235.680)	(80,85%)
Pihak Berelasi	Related Parties	640.168.731	738.312.346	(98.143.615)	(13,29%)
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka	Advances and Prepaid Expenses	120.068.178	144.176.602	(24.108.424)	(16,72%)
Pendapatan Masih Akan Diterima	Accrued Revenues				
Pihak Ketiga	Third Parties	305.866.345	303.926.301	1.940.044	0,64%
Pihak Berelasi	Related Parties	17.001.727	26.573.499	(9.571.772)	(36,02%)
Persediaan	Inventories	59.139.424	56.480.952	2.658.472	4,71%
Pajak Dibayar Di Muka	Prepaid taxes	751.789.998	557.236.979	194.553.019	34,91%
Aset Lancar Lain-Lain	Other Current Assets	6.139.521	-	6.139.521	100%
Total Aset Lancar	Total Current Assets	24.554.336.129	23.781.639.149	772.696.980	3,25%

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tahun 2018 mencapai Rp18,02 triliun, meningkat 26,83% atau Rp3,81 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp14,21 triliun. Peningkatan tersebut karena adanya pencairan deposito di Induk Perusahaan dan Entitas Anak sampai dengan bulan Desember 2018, serta adanya peningkatan capaian laba tahun berjalan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in 2018 reaching Rp18.02 trillion, an increase of 26.83% or Rp3.81 trillion compared to Rp14.21 trillion in 2017. The increase was due to deposit disbursements in the Parent Company and Subsidiaries up to December 2018, as well as an increase in the profit for the year 2018 compared to 2017.

Tabel Kas dan Setara Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Cash and Cash Equivalents

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Kas	Cash on hand	2.637.178	5.204.210	(2.567.032)	(49,33%)
Bank	Cash in banks	3.399.196.648	5.068.282.916	(1.669.086.268)	(32,93%)
Deposito berjangka	Time deposits	14.616.837.653	9.133.843.206	5.482.994.447	60,03%
Total kas dan setara kas	Total cash and cash equivalents	18.018.671.479	14.207.330.332	3.811.341.147	26,83%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek tahun 2018 mencapai Rp3,84 triliun, menurun 45,19% atau Rp3,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp7 triliun. Penurunan ini karena turunnya investasi jangka pendek dari deposito berjangka sebesar Rp3,10 triliun.

Tabel Investasi Jangka Pendek

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Total deposito berjangka	Total time deposits	3.544.253.994	6.645.462.592	(3.101.208.598)	(46,67%)
Negotiable certificate of deposits	Negotiable certificate of deposits	-	200.000.000	(200.000.000)	(100,00%)
Efek yang diperdagangkan	Marketable securities	291.753.295	77.007.997	214.745.298	278,86%
Aset keuangan tersedia untuk dijual	Available-for-sale financial assets	-	76.612.109	(76.612.109)	(100,00%)
Total investasi jangka pendek	Total short-term investments	3.836.007.289	6.999.082.698	(3.163.075.409)	(45,19%)

Short-Term Investments

Short-term investments in 2018 reached Rp3.84 trillion, down by 45.19% or Rp3.16 trillion compared to 2017 of Rp7 trillion. This decrease was due to a decline in short-term investments from time deposits amounted to Rp3.10 trillion.

Table of Short-term Investments

(in thousand Rupiah)

Piutang Usaha – Neto

Piutang usaha neto tahun 2018 mencapai Rp789,95 miliar, meningkat 13,05% atau Rp91,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp698,75 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha neto di Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak sejalan dengan peningkatan pendapatan. Kenaikan piutang usaha neto terbesar antara lain yaitu Cabang Pelabuhan Jambi sebesar Rp13,31 miliar, PT IPC TPK sebesar Rp86,21 miliar, PT IKT,Tbk sebesar Rp 20,49 miliar, dan PT PPI sebesar Rp20,22 miliar.

Tabel Piutang Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga - neto	Third parties - net	634.078.032	549.154.117	84.923.915	15,46%
Pihak berelasi - neto	Related parties - net	155.875.322	149.599.560	6.275.762	4,20%
Piutang usaha - neto	Trade receivables - net	789.953.354	698.753.677	91.199.677	13,05%

Trade Receivables - Net

Net trade receivables in 2018 reached Rp789.95 billion, an increase of 13.05% or Rp91.20 billion compared to 2017 which reached Rp698.75 billion. This was mainly due to an increase in net trade receivables at the Port Branches and Subsidiaries in line with the increase in revenue. The largest increase in net trade receivables was in the Jambi Port Branch with Rp13.31 billion, PT IPC TPK with Rp86.21 billion, PT IKT,Tbk with Rp.2049 billion, and PT PPI with Rp20.22 billion.

Table of Trade Receivables

(in thousand Rupiah)

Piutang Lain-Lain – Neto

Piutang lain-lain neto tahun 2018 mencapai Rp649,70 miliar, menurun 17,56% atau Rp138,38 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp788,08 miliar. Penurunan tersebut berasal dari penurunan piutang lain-lain neto dari pihak berelasi sebesar Rp98,14 miliar.

Other Receivables - Net

Net other receivables in 2018 reached Rp649.70 billion, down by 17.56% or Rp138.88 billion compared to 2017 of Rp788.08 billion. The decrease was derived from a decrease in net other receivables from related parties amounting to Rp98.14 billion.

Tabel Piutang Lain-Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga - neto	Third parties - net	9.530.083	49.765.763	(40.235.680)	(80,85%)
Pihak berelasi - neto	Related parties - net	640.168.731	738.312.346	(98.143.615)	(13,29%)
Piutang Lain-Lain Neto	Other Receivables Net	649.698.814	788.078.109	(138.379.295)	(17,56%)

Table of Other Receivables

(in thousand Rupiah)

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka dan beban dibayar dimuka tahun 2018 mencapai Rp120,07 miliar, menurun 16,72% atau Rp24,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp144,18 miliar. Penurunan tersebut berasal dari turunnya uang muka operasional sebesar Rp25,99 miliar.

Advances and Prepaid Expenses

Advances and prepaid expenses in 2018 amounted to Rp120.07 billion, decreased by 16.72% or Rp24.11 billion compared to 2017 of Rp144.18 billion. The decrease came from a decrease in operational advances amounting to Rp25.99 billion.

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Uang Muka	Advances				
Operasional	Operational	20.006.571	45.998.814	(25.992.243)	(56,51%)
Lain-lain	Others	2.183.435	4.121.206	(1.937.771)	(47,02%)
Subtotal		22.190.006	50.120.020	(27.930.014)	(55,73%)
Beban dibayar di muka	Prepaid expenses				
Pegawai	Employee	41.911.549	41.305.877	605.672	1,47%
Umum	General	7.063.765	11.940.325	(4.876.560)	(40,84%)
Asuransi	Insurance	17.783.362	5.962.152	11.821.210	198,27%
Sewa	Rental	12.918.214	14.655.536	(1.737.322)	(11,85%)
Lain-lain	Others	18.201.282	20.192.692	(1.991.410)	(9,86%)
Subtotal		97.878.172	94.056.582	3.821.590	4,06%
Total		120.068.178	144.176.602	(24.108.424)	(16,72%)

Table of Advances and Prepaid Expenses

(in thousand Rupiah)

Pendapatan Masih Akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima tahun 2018 mencapai Rp322,87 miliar, menurun 2,31% atau Rp7,63 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp330,50 miliar. Hal ini diakibatkan karena penurunan pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi sebesar Rp9,57 miliar.

Accrued Revenues

Accrued revenues in 2018 reached Rp322.87 billion, down by 2.31% or Rp7.63 billion compared to Rp330.50 billion in 2017. This was due to a decrease in accrued revenues from related parties in the amount of Rp9.57 billion.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Pendapatan Yang Masih Akan Diterima

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga - neto	Third parties – net	305.866.345	303.926.301	1.940.044	0,64%
Pihak berelasi - neto	Related parties - net	17.001.727	26.573.499	(9.571.772)	(36,02%)
Total		322.868.072	330.499.800	(7.631.728)	(2,31%)

Persediaan

Persediaan tahun 2018 mencapai Rp59,14 miliar, meningkat 4,71% atau Rp2,66 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp56,48 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya persediaan dari suku cadang sebesar Rp4,25 miliar

Table Of Accrued Revenues

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga - neto	Third parties – net	305.866.345	303.926.301	1.940.044	0,64%
Pihak berelasi - neto	Related parties - net	17.001.727	26.573.499	(9.571.772)	(36,02%)
Total		322.868.072	330.499.800	(7.631.728)	(2,31%)

Inventories

In 2018, inventories were recorded at Rp59.14 billion, an increase of 4.71% or Rp2.66 billion compared to 2017 at Rp56.48 billion. The increase was originated from an increase in inventories of spare parts amounting to Rp.4.25 billion

Tabel Persediaan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Suku cadang	Spare Parts	46.300.884	42.052.260	4.248.624	10,10%
Obat, bahan, dan alat medis	Medicines, materials, and medical devices	13.236.622	11.350.279	1.886.343	16,62%
Alat tulis dan barang cetakan	Stationeries and printings	1.706.454	2.502.036	(795.582)	(31,80%)
Bahan bakar	Fuels	1.866.460	1.645.712	220.748	13,41%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	Others (each less than Rp1 billion)	949.230	2.841.785	(1.892.555)	(66,60%)
Total		64.059.650	60.392.072	3.667.578	6,07%
Dikurangi:	Less:				
Penyisihan persediaan usang	Allowance for inventory obsolescence	(4.920.226)	(3.911.120)	(1.009.106)	25,80%
Neto	Net	59.139.424	56.480.952	2.658.472	4,71%

Table of Inventories

(in thousand Rupiah)

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar dimuka tahun 2018 mencapai Rp751,79 miliar, meningkat 34,91% atau Rp194,55 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp557,24 miliar. Kenaikan tersebut diantaranya terdapat pada:

1. Pajak dibayar dimuka PT PPI meningkat sebesar Rp84,42 miliar diantaranya karena terdapat pembayaran PPN Masukan atas pembayaran *site lease* kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Pajak dibayar dimuka PT IKT Tbk meningkat sebesar Rp50,00 miliar karena terdapat lebih bayar PPN.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes in 2018 were Rp751.79 billion, an increase of 34.91% or Rp194.55 billion compared to 2017 amounted to Rp557.24 billion. These increases included:

1. Taxes paid in advance by PT PPI increased by Rp84.42 billion, due to PPN payments on site leases for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Taxes paid in advance by PT IKT Tbk increased by Rp50.00 billion due to increased PPN payments.

Tabel Pajak Dibayar Dimuka

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company				
Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax	235.183.098	260.028.618	(24.845.520)	(9,55%)
Pajak penghasilan pasal 19 - Penilaian kembali aktiva tetap	Income Tax Article 19 - Revaluation of fixed assets	32.438.878	-	32.438.878	100,00%
Pajak penghasilan lainnya	Other Income Taxes	8.436.907	7.408.526	1.028.381	13,88%
Subtotal		276.058.883	267.437.144	8.621.739	3,22%
Entitas anak	Subsidiaries				
Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax	171.572.101	234.477.380	(62.905.279)	(26,83%)
Pajak penghasilan lainnya	Other Income Taxes	304.159.014	55.322.455	248.836.559	449,79%
Subtotal		475.731.115	289.799.835	185.931.280	64,16%
Total		751.789.998	557.236.979	194.553.019	34,91%

Table of Prepaid Taxes

(in thousand Rupiah)

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2018 mencapai Rp26,88 triliun, meningkat 14,68% atau Rp3,44 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp23,44 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan investasi jangka panjang mencapai 51,96% atau Rp807,94 miliar.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2018 amounted to Rp26.88 trillion, an increase of 14.68% or Rp3.44 trillion compared to Rp23.44 trillion in 2017. This was due to a 51.96% increase in long-term investments or Rp807.94 billion.

Tabel Aset Tidak Lancar

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Investasi Jangka Panjang	Long term investment	3.211.737.431	1.554.888.854	1.656.848.577	106,56%
Properti Investasi – Neto	Investment Properties - Net	377.142.447	394.342.020	(17.199.573)	(4,36%)
Aset Tetap – Neto	Fixed Assets - Net	12.628.997.433	11.325.850.596	1.303.146.837	11,51%
Aset Kerjasama Operasi – Neto	Joint Operation Assets - Net	482.390.189	507.560.396	(25.170.207)	(4,96%)
Aset Pajak Tanggahan	Deferred Tax Assets	47.498.765	44.644.534	2.854.231	6,39%
Aset Tak Berwujud – Neto	Intangible Assets - Net	9.038.949.144	8.296.435.366	742.513.778	8,95%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak	Estimated Claims for Tax Refund	841.931.567	839.786.756	2.144.811	0,26%
Aset tidak lancar lain-lain	Other Non-current Assets	249.893.918	474.940.688	(225.046.770)	(47,38%)
Total Aset Tidak Lancar	Total Non-current Assets	26.878.540.894	23.438.449.210	3.440.091.684	14,68%

Table of Non-current Assets

(in thousand Rupiah)

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang tahun 2018 mencapai Rp3,21 triliun, meningkat 106,56% atau Rp1,66 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp1,55 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp807,94 miliar atau 51,96%

Investment in Associates

Investment in associates in 2018 was Rp3,21 trillion, increased by 106,56% or Rp1,66 billion compared to 2017 of Rp1.55 trillion. The increase arose from an increase in investments in associated entities of Rp807.94 billion or 51.96%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Investasi Jangka Panjang

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Investasi pada entitas asosiasi	Long term investment	2.362.825.278	1.554.888.854	807.936.424	51,96%
Investasi pada penyertaan saham	Investment in equity participation	524.362.036	-	524.362.036	100,00%
Investasi pada surat utang	Investment in debt securities	324.550.117	-	324.550.117	100,00%
Investasi Jangka Panjang	Long term investments	3.211.737.431	1.554.888.854	1.656.848.577	106,56%

Table of Investment in Associates

(in thousand Rupiah)

Properti Investasi – Neto

Properti investasi tahun 2018 mencapai Rp377,14 miliar, menurun 4,36% atau Rp17,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp394,34 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan.

Investment Properties - Net

Investment properties in 2018 reached Rp377.14 billion, down by 4.36% or Rp17.20 billion compared to 2017 amounting to Rp394.34 billion. The decrease was caused by the addition of accumulated depreciation.

Tabel Properti Investasi

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Harga perolehan	Acquisition costs				
Tanah	Land	45.011.598	45.011.598	0	0,00%
Bangunan fasilitas pelabuhan	Port facilities	652.779.657	650.817.393	1.962.264	0,30%
Jalan dan bangunan	Roads and buildings	12.799.354	14.761.618	(1.962.264)	(13,29%)
Total	Total	710.590.609	710.590.609	0	0,00%
Akumulasi penyusutan	Accumulated depreciation				
Bangunan fasilitas pelabuhan	Port facilities	(326.645.743)	(305.962.211)	(20.683.532)	6,76%
Jalan dan bangunan	Roads and buildings	(6.802.419)	(10.286.378)	3.483.959	(33,87%)
Total	Total	(333.448.162)	(316.248.589)	(17.199.573)	5,44%
Nilai buku neto	Net book value	377.142.447	394.342.020	(17.199.573)	(4,36%)

Table of Investment Properties

(in thousand Rupiah)

Aset Tetap – Neto

Aset tetap neto tahun 2018 mencapai Rp12,63 triliun, meningkat 11,51% atau Rp1,30 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp11,32 triliun. Peningkatan tersebut karena penambahan tanah dan kapal serta kenaikan aset tetap antara lain dari:

1. Induk Perusahaan seperti di Cabang Pelabuhan Banten sebesar Rp398,75 miliar, Kantor Pusat sebesar Rp128,37 miliar, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp225,60 miliar, Cabang Pelabuhan Cirebon sebesar Rp99,52 miliar, dan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebesar Rp75,01 miliar.

Fixed Assets - Net

In 2018, net fixed assets were recorded of Rp12.63 trillion, increased by 11.51% or Rp1.30 trillion compared to 2017 amounting to Rp11.32 trillion. The increase was due to the addition of land and vessels, and an increase in fixed assets, including:

1. Parent company in Banten Port Branch amounting to Rp398.75 billion, Head Office with Rp128.37 billion, Tanjung Priok Port Branch with Rp225.60 billion, Cirebon Port Branch with Rp99.52 billion, and Teluk Bayur Port Branch with Rp75.01 billion.

2. Entitas Anak seperti di PT IKT Tbk sebesar Rp175,76 miliar, PT RSP sebesar Rp74,33 miliar, dan PT EPI sebesar Rp26,95 miliar.

2. Subsidiaries including PT IKT Tbk amounting to Rp175.76 billion, PT RSP with Rp74.33 billion, and PT EPI with Rp26.95 billion.

Tabel Aset Tetap

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Fixed Assets

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Harga perolehan	Acquisition costs				
Tanah	Land	2.253.903.307	1.728.032.428	525.870.879	30,43%
Bangunan fasilitas pelabuhan	Port facilities	5.666.729.950	5.453.147.825	213.582.125	3,92%
Kapal	Vessels	1.694.204.431	1.577.588.016	116.616.415	7,39%
Alat fasilitas pelabuhan	Port facilities	2.611.900.537	2.586.792.790	25.107.747	0,97%
Instalasi fasilitas pelabuhan	Port installation	966.492.385	848.367.746	118.124.639	13,92%
Jalan dan bangunan	Roads and buildings	1.990.567.548	1.906.437.903	84.129.645	4,41%
Peralatan	Equipment	597.516.344	562.978.254	34.538.090	6,13%
Kendaraan	Vehicles	65.026.632	72.079.786	(7.053.154)	(9,79%)
Emplasemen	Emplacement	40.000.139	38.245.826	1.754.313	4,59%
Subtotal		15.886.341.273	14.773.670.574	1.112.670.699	7,53%
Aset dalam penyelesaian	Construction in progress	1.272.325.406	538.543.736	733.781.670	136,25%
Total		17.158.666.679	15.312.214.310	1.846.452.369	12,06%
Akumulasi penyusutan	Accumulated depreciation	(4.501.766.262)	(3.967.299.032)	(534.467.230)	13,47%
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	Less: Allowance for impairment	(27.902.984)	(19.064.682)	(8.838.302)	46,36%
Nilai buku neto	Net book value	12.628.997.433	11.325.850.596	1.303.146.837	11,51%

Aset Kerjasama Operasi – Neto

Aset kerjasama operasi – neto tahun 2018 mencapai Rp482,39 miliar, menurun 4,96% atau Rp25,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp507,56 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena penyusutan atas aset kerjasama operasi.

Joint Operation Assets - Net

Joint operating assets - net in 2018 amounted to Rp482.39 billion, down 4.96% or Rp25.17 billion compared to Rp507.56 billion in 2017. This was due to depreciation of joint operating assets.

Tabel Aset Kerjasama Operasi

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Joint Operation Assets

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Harga perolehan	Acquisition costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan	Port facilities	764.725.479	764.768.859	(43.380)	(0,01%)
Alat fasilitas pelabuhan	Port equipment	86.424.760	86.424.760	0	0,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	Port installation	10.504.447	5.898.284	4.606.163	78,09%
Jalan dan bangunan	Roads and buildings	602.861	602.861	0	0,00%
Peralatan	Equipment	609.224	609.224	0	0,00%
Emplasemen	Emplacement	4.530.520	4.530.520	0	0,00%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Total		867.397.291	862.834.508	4.562.783	0,53%
Akumulasi penyusutan	Accumulated depreciation	(385.007.102)	(355.274.112)	(29.732.990)	8,37%
Nilai buku neto	Net book value	482.390.189	507.560.396	(25.170.207)	(4,96%)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2018 mencapai Rp47,50 miliar, meningkat 6,39% atau Rp2,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp44,64 miliar. Peningkatan tersebut karena kenaikan aset pajak tangguhan dari entitas anak.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets in 2018 reached Rp47.50 billion, an increase of 6.39% or Rp2.85 billion compared to 2017 amounted to Rp44.64 billion. The increase was due to an increase in deferred tax assets from subsidiaries.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Deferred Tax Assets

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets				
Entitas Anak	Subsidiaries	47.498.765	44.644.534	2.854.231	6,39%

Aset Tak Berwujud – Neto

Aset tak berwujud tahun 2018 mencapai Rp9,04 triliun, meningkat 8,95% atau Rp742,51 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp8,30 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari adanya kenaikan aset hak konsensi sebesar Rp849,88 miliar diantaranya adanya penambahan investasi oleh Kantor Pusat antara lain untuk pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat beserta pembebasan lahan sebesar Rp417,55 miliar dan Pembangunan Terminal Kalibaru sebesar Rp364,11 miliar (nilai tersebut di luar penyusutan dan amortisasi).

Intangible Assets - Net

Intangible assets in 2018 were recorded at Rp9.04 trillion, an increase of 8.95% or Rp742.51 billion compared to 2017 of Rp8.30 trillion. The increase came from an increase in concession rights assets of Rp849.88 billion, and additional investments by the Head Office, including the construction of Kijing Port, West Kalimantan together with land acquisition of Rp417.55 billion, and Construction of the Kalibaru Terminal for Rp364.11 billion (this value excludes depreciation and amortization).

Tabel Aset Takberwujud

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Intangible Assets

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Aset hak konsensi	Concession rights assets	9.150.801.841	8.300.923.917	849.877.924	10,24%
Piranti lunak	Software application	284.412.704	257.213.127	27.199.577	10,57%
Aset takberwujud lainnya	Other intangible assets	25.828.087	20.241.980	5.586.107	27,60%
Subtotal		9.461.042.632	8.578.379.024	882.663.608	10,29%
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	Accumulated amortization and allowance for impairment	(422.093.488)	(281.943.658)	(140.149.830)	49,71%
Neto	Net	9.038.949.144	8.296.435.366	742.513.778	8,95%

Taksiran Tagihan Restitusi Pajak

Taksiran Tagihan Restitusi Pajak tahun 2018 mencapai Rp841,93 miliar, meningkat 0,26% atau Rp2,14 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp839,79 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan restitusi pajak dari Perusahaan sebesar Rp9,56 miliar.

Tabel Taksiran tagihan Restitusi Pajak

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company	716.911.819	707.350.922	9.560.897	1,35%
Entitas anak	Subsidiaries	125.019.748	132.435.834	(7.416.086)	(5,60%)
Total		841.931.567	839.786.756	2.144.811	0,26%

Aset Tidak Lancar Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2018 mencapai Rp249,89 miliar, menurun 47,38% atau Rp225,05 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp474,94 miliar. Penurunan tersebut karena pajak final dibayar dimuka.

Tabel Aset Tidak Lancar Lain-Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Uang muka aset tetap	Fixed assets advances	60.439.650	430.885	60.008.765	13926,86%
Pajak final dibayar dimuka	Prepaid final tax	-	321.623.875	(321.623.875)	(100,00%)
Jaminan pelaksanaan	Performance bond	37.000.000	37.000.000	-	0,00%
Piutang pemulihan investasi	Investment recovery receivables	30.145.691	21.620.188	8.525.503	39,43%
Uang jaminan	Security deposits	47.922.193	17.902.531	30.019.662	167,68%
Aset lain-lain - neto	Other assets - net	74.386.384	76.363.209	(1.976.825)	(2,59%)
Total		249.893.918	474.940.688	(225.046.770)	(47,38%)

LIABILITAS

Liabilitas tahun 2018 mencapai Rp35 triliun, meningkat 5,19% atau Rp1,73 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp33,27 triliun. Hal ini diakibatkan karena peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,30 triliun.

Estimated Claims For Tax Refund

The Estimated Claims for Tax Refund in 2018 were Rp841.93 billion, increased by 0.26% or Rp2.14 billion compared to 2017 of Rp839.79 billion. The increase came from an increase in tax refund from the Company amounting to Rp9.56 billion.

Table of Estimated Claims for Tax Refund

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company	716.911.819	707.350.922	9.560.897	1,35%
Entitas anak	Subsidiaries	125.019.748	132.435.834	(7.416.086)	(5,60%)
Total		841.931.567	839.786.756	2.144.811	0,26%

Other Non-Current Assets

In 2018, other assets were recorded at Rp249.89 billion, down by 47.38% or Rp225.05 billion compared to 2017 at Rp474.94 billion. The decrease was due to the prepaid final tax.

Table of Other Non-current Assets

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Uang muka aset tetap	Fixed assets advances	60.439.650	430.885	60.008.765	13926,86%
Pajak final dibayar dimuka	Prepaid final tax	-	321.623.875	(321.623.875)	(100,00%)
Jaminan pelaksanaan	Performance bond	37.000.000	37.000.000	-	0,00%
Piutang pemulihan investasi	Investment recovery receivables	30.145.691	21.620.188	8.525.503	39,43%
Uang jaminan	Security deposits	47.922.193	17.902.531	30.019.662	167,68%
Aset lain-lain - neto	Other assets - net	74.386.384	76.363.209	(1.976.825)	(2,59%)
Total		249.893.918	474.940.688	(225.046.770)	(47,38%)

LIABILITIES

In 2018, liabilities were recorded at Rp35 trillion, an increase of 5.19% or Rp1.73 trillion compared to 2017 reaching Rp33.27 trillion. This was due to an increase in non-current liabilities of Rp1.30 trillion.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Liabilities

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	5.498.194.480	5.072.948.273	425.246.207	8,38%
Liabilitas Jangka Panjang	Non-current Liabilities	29.500.226.224	28.199.222.288	1.301.003.936	4,61%
TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITIES	34.998.420.704	33.272.170.561	1.726.250.143	5,19%

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2018 mencapai Rp5,50 triliun, meningkat 8,38% atau Rp425,25 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp5,07 triliun. Hal ini diakibatkan karena peningkatan utang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp262,30 miliar.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2018 reached Rp5.50 trillion, an increase of 8.38% or Rp425.25 billion compared to 2017 amounted to Rp5.07 trillion. This was due to an increase in business loans from related parties amounting to Rp262.30 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Current Liabilities

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek	Short-term Bank Loans	4.000.000	-	4.000.000	100,00%
Utang Usaha	Trade payables				
Pihak Ketiga	Third Parties	404.693.466	367.571.206	37.122.260	10,10%
Pihak Berelasi	Related Parties	1.261.214.247	999.183.968	262.030.279	26,22%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek	Short-term Unearned Revenues	834.098.021	778.706.786	55.391.235	7,11%
Utang Pajak	Taxes Payable	389.495.675	441.919.999	(52.424.324)	(11,86%)
Beban Akrua	Accrued Expenses	2.290.832.616	2.168.022.495	122.810.121	5,66%
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	Current Maturities of Long-Term Liabilities				
Utang Bank	Bank Loans	-	1.860.603	(1.860.603)	(100,00%)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi	Other Long-Term Liabilities - Related Parties	38.272.280	54.127.289	(15.855.009)	(29,29%)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other Current Liabilities				
Pihak Ketiga	Third Parties	185.350.553	165.639.036	19.711.517	11,90%
Pihak Berelasi	Related Parties	90.237.622	95.916.891	(5.679.269)	(5,92%)
Total Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	5.498.194.480	5.072.948.273	425.246.207	8,38%

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek tahun 2018 mencapai Rp4,0 miliar, meningkat 100,00% atau Rp4,0 miliar dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini karena pada tahun 2017 Anak Perusahaan IPC yaitu PT JPPI tidak melakukan pinjaman bank jangka pendek.

Short-Term Bank Loans

In 2018, short-term bank loans reached Rp4.0 billion, an increase of 100.00% or Rp4.0 billion compared to 2017. This was due to the IPC Subsidiary, PT JPPI, not carrying out short-term bank loans in 2017.

Utang Usaha

Utang usaha tahun 2018 mencapai Rp1,67 triliun, meningkat 21,89% atau Rp299,15 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp1,37 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang usaha dari Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp262,03 miliar.

Tabel Utang Usaha Berdasarkan Pemasok

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga	Third Parties				
Swasta	Private	404.693.466	367.571.206	37.122.260	10,10%
Pihak berelasi	Related Parties	1.261.214.247	999.183.968	262.030.279	26,22%
Total		1.665.907.713	1.366.755.174	299.152.539	21,89%

Trade Payables

Trade payables in 2018 reached Rp1.67 trillion, increased by 21.89% or Rp299.15 billion compared to 2017 of Rp1.37 trillion. The increase mainly came from an increase in trade payables from State-Owned Enterprises amounting to Rp262.03 billion.

Table of Trade Payables by Suppliers

(in thousand Rupiah)

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek

Pendapatan diterima dimuka jangka pendek tahun 2018 mencapai Rp834,10 miliar, meningkat 7,11% atau Rp55,40 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp778,71 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari adanya kenaikan sewa kuartalan sebesar 93,02%.

Tabel Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek

dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Uang untuk diperhitungkan	Advances from customers				
Swasta	Private	16.658.521	19.398.795	(2.740.274)	(14,13%)
Pihak Beralasi	Related Parties	1.028.107	3.720.117	(2.692.010)	(72,36%)
Lain-lain	Others	11.283.684	3.016.172	8.267.512	274,11%
Subtotal		28.970.312	26.135.084	2.835.228	10,85%
Sewa kuartalan	Quarterly rent	555.358.299	287.725.000	267.633.299	93,02%
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	Land, building, water and electricity services	101.043.778	85.010.861	16.032.917	18,86%
Lain-lain	Others	1.727.923	5.231.732	(3.503.809)	(66,97%)
Subtotal		658.130.000	377.967.593	280.162.407	74,12%
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang	Current portion of long-term unearned revenues	146.997.709	374.604.109	(227.606.400)	(60,76%)
Total		834.098.021	778.706.786	55.391.235	7,11%

Short-Term Unearned Revenues

Short-term unearned revenues of 2018 were Rp834.10 billion, an increase of 7.11% or Rp55.40 billion compared to Rp778.71 billion in 2017. The increase came from an increase in quarterly rent by 93.02%.

Table of Short-term Unearned Revenues

(in thousand Rupiah)

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2018 mencapai Rp389,50 miliar, menurun 11,86% atau Rp52,42 miliar dibandingkan dengan tahun

Tax Debt

Tax payable in 2018 reached Rp 389.50 billion, a decrease of 11.86% or Rp 52.42 billion compared to 2017 which reached

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

2017 mencapai Rp441,92 miliar. Penurunan utang pajak terutama berasal dari turunnya pembayaran utang pajak pada perusahaan di tahun 2018.

Rp 441.92 billion. The decrease in tax debt mainly came from the decline in tax debt payments to companies in 2018.

Tabel Utang Pajak

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Taxes Payable

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company	206.429.435	293.285.135	(86.855.700)	(29,61%)
Entitas anak	Subsidiaries	183.066.240	148.634.864	34.431.376	23,17%
Total		389.495.675	441.919.999	(52.424.324)	(11,86%)

Beban Akruai

Beban akrual tahun 2018 mencapai Rp2,29 triliun, meningkat 5,66% atau Rp122,81 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,17 triliun. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan beban akrual umum sebesar Rp328,51 miliar.

Akrued Expenses

Accrued expenses in 2018 reached Rp2.29 trillion, an increase of 5.66% or Rp122.81 billion compared to 2017 which reached Rp2.17 trillion. The increase was due to an increase in general accrued expenses of Rp328.51 billion.

Tabel Beban Akruai

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Accrued Expenses

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Umum	General	843.328.993	514.816.570	328.512.423	63,81%
Pegawai	Employee	623.923.785	595.409.909	28.513.876	4,79%
Kerjasama mitra usaha	Partnership	273.197.247	273.821.237	(623.990)	(0,23%)
Bunga	Interest	163.363.780	152.838.375	10.525.405	6,89%
Bahan bakar dan bahan habis pakai	Fuels and supplies	80.085.854	42.979.035	37.106.819	86,34%
Pemeliharaan	Maintenance	77.873.897	65.022.565	12.851.332	19,76%
Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI	Provision for construction of DKI Regional Government assets	39.089.633	39.089.633	-	0,00%
Biaya konsesi	Concession fee	2.267.336	15.941.339	(13.674.003)	(85,78%)
PPH 4 (2) final	Final Income Tax 4 (2)	-	359.022.000	(359.022.000)	(100,00%)
Lain-lain	Others	187.702.091	109.081.832	78.620.259	72,07%
Total		2.290.832.616	2.168.022.495	122.810.121	5,66%

Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tahun 2018 mencapai Rp38,27 miliar, menurun 31,64% atau Rp17,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp55,99 miliar. Hal tersebut karena menurunnya liabilitas jangka panjang lainnya pihak berelasi sebesar Rp15,86 miliar.

Current Maturities of Long-Term Liability

Current maturities of long-term liabilities in 2018 were recorded at Rp38.27 billion, a decrease of 31.64% or Rp17.71 billion compared to Rp55.99 billion in 2017. This was due to a decrease in other long-term liabilities of related parties by Rp15.86 billion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Utang Bank	Bank Loans	-	1.860.603	(1.860.603)	(100,00%)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi	Other Long-Term Liabilities - Related Parties	38.272.280	54.127.289	(15.855.009)	(29,29%)
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	Current Maturities of Long-Term Liabilities	38.272.280	55.987.892	(17.715.612)	(31,64%)

Table of Current Maturities of Long-term Liabilities

(in thousand Rupiah)

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2018 mencapai Rp275,59 miliar, meningkat 5,36% atau Rp14,03 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp261,55 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek lainnya dari pihak ketiga sebesar Rp19,71 miliar.

Other Current Liabilities

In 2018, other current liabilities reached Rp275.59 billion, increased by 5.36% or Rp14.03 billion compared to 2017 which reached Rp261.55 billion. The increase was due to an increase in other current liabilities from third parties amounting to Rp19.71 billion.

Tabel Liabilitas jangka Pendek Lainnya

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak Ketiga	Third Parties	185.350.553	165.639.036	19.711.517	11,90%
Pihak Berelasi	Related Parties	90.237.622	95.916.891	(5.679.269)	(5,92%)
Total		275.588.175	261.555.927	14.032.248	5,36%

Table of Other Current Liabilities

(in thousand Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2018 mencapai Rp29,50 triliun, meningkat 4,61% atau Rp1,30 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp28,20 triliun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan atas saldo utang obligasi net (setelah dikurangi diskonto obligasi) yaitu dari Rp21,38 triliun per 31 Desember 2017 menjadi Rp22,89 triliun per 31 Desember 2018, mengalami peningkatan sebesar Rp1,51 triliun atau 7,08%. Peningkatan tersebut akibat dari peningkatan kurs USD dalam pencatatan per 31 Desember 2017 menggunakan kurs Rp13.548/USD sedangkan per 31 Desember 2018 menggunakan kurs Rp14.481/USD.

NON-CURRENT LIABILITIES

In 2018, non-current liabilities were recorded at Rp29.50 trillion, an increase of 4.61% or Rp1.30 trillion compared to 2017 which were recorded at Rp28.20 trillion. This was partly due to an increase in the net bond debt balance (after deducting bond discount) from Rp21.38 trillion as at 31 December 2017 to Rp22.89 trillion as v 31 December 2018, an increase of Rp1.51 trillion or 7.08%. The increase was due to an increase in the USD exchange rate as of December 31, 2017 using an exchange rate of Rp13,548 / USD while as of December 31, 2018 the exchange rate was Rp14,481 / USD.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Liabilitas Jangka Panjang

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Utang Obligasi	Bonds payable	22.890.166.969	21.376.332.500	1.513.834.469	7,08%
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	Long-term Liabilities – Net of Current Maturities				
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Ketiga	Other Long-Term Liabilities - Third Parties	234.402.238	219.299.877	15.102.361	6,89%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	Long-term Unearned Revenues	4.290.892.916	4.496.181.101	(205.288.185)	(4,57%)
Liabilitas Imbalan Kerja	Employee Benefit Liabilities	1.776.917.294	1.806.109.326	(29.192.032)	(1,62%)
Liabilitas Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liabilities	307.846.807	301.299.484	6.547.323	2,17%
Total Liabilitas Jangka Panjang	Total Non-current Liabilities	29.500.226.224	28.199.222.288	1.301.003.936	4,61%

Table of Non-current Liabilities

(in thousand Rupiah)

Utang Obligasi

Utang obligasi tahun 2018 mencapai Rp22,89 triliun, meningkat 7,08% atau Rp1,51 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp21,38 triliun. Peningkatan tersebut akibat dari peningkatan kurs USD dalam pencatatan dimana per 31 Desember 2017 menggunakan kurs sebesar Rp 13.548/USD sedangkan per 31 Desember 2018 menggunakan kurs Rp14.481/USD.

Bonds Payable

Bonds payable in 2018 amounted to Rp22.89 trillion, an increase of 7.08% or Rp1.51 billion compared to Rp21.38 trillion in 2017. This was due to an increase in the USD exchange rate, where as of December 31, 2017 the exchange rate was Rp13,548 / USD while as of December 31, 2018 the exchange rate was Rp14,481 / USD.

Tabel Utang Obligasi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Senior Notes penerbitan tahun 2015	Senior Notes issued in 2015				
USD1.100.000.000	USD 1,100,000,000	15.929.100.000	14.902.800.000	1.026.300.000	6,89%
USD500.000.000	USD500,000,000	7.240.500.000	6.774.000.000	466.500.000	6,89%
Dikurangi:	Less:				
Diskonto yang belum diamortisasi	Unamortized discount	(210.621.288)	(225.580.023)	14.958.735	(6,63%)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	Unamortized transaction costs	(68.811.743)	(74.887.477)	6.075.734	(8,11%)
Utang obligasi - neto	Bonds payable - net	22.890.166.969	21.376.332.500	1.513.834.469	7,08%

Table of Bonds Payable

(in thousand Rupiah)

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar tahun 2018 mencapai Rp234,40 miliar, meningkat 6,89% atau Rp15,10 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai

Long-Term Liabilities – Net Of Current Maturities

Long-term liabilities net of the current portion in 2018 amounted to Rp234.40 billion, an increase of 6.89% or Rp15.10 billion compared to Rp219.30 billion in 2017. This

Rp219,30 miliar. Hal tersebut karena kenaikan Liabilitas Jangka Panjang dari Sea Terminal Management & Service Pte.Ltd., Singapura serta faktor peningkatan kurs.

was due to an increase in Long-Term Liabilities from Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. Singapore, and the factor of increasing exchange rates.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Lancar
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pihak ketiga	Third parties				
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	234.402.238	219.299.877	15.102.361	6,89%
Pihak berelasi	Related parties				
PT Pelabuhan Indonesia III	PT Pelabuhan Indonesia III	29.349.280	40.595.467	(11.246.187)	(27,70%)
PT Pelabuhan Indonesia IV	PT Pelabuhan Indonesia IV	8.923.000	13.531.822	(4.608.822)	(34,06%)
Subtotal		38.272.280	54.127.289	(15.855.009)	(29,29%)
Total		272.674.518	273.427.166	(752.648)	(0,28%)
Bagian lancar	Current portion	(38.272.280)	(54.127.289)	15.855.009	(29,29%)
Bagian jangka panjang	Long-term portion	234.402.238	219.299.877	15.102.361	6,89%

Table of Long-term Liabilities – Net of Current Maturities
(in thousand Rupiah)

Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang tahun 2018 mencapai Rp4,29 triliun, menurun 4,57% atau Rp205,29 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp4,50 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena turunnya sewa tanah dan/atau bangunan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Long-Term Unearned Revenues

Long-term unearned revenues in 2018 were recorded of Rp4.29 trillion, down by 4.57% or Rp205.29 billion compared to 2017 at Rp4.50 trillion. This was due to a decrease in land and/or building rental from PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Premium JICT	JICT Premium	2.444.876.979	2.564.139.271	(119.262.292)	(4,65%)
Sewa diterima di muka -NPCT1	Advance rental fee - NPCT1	809.528.380	880.201.883	(70.673.503)	(8,03%)
Premium TPK Koja	TPK Koja Premium	568.576.042	596.311.458	(27.735.416)	(4,65%)
Sewa tanah dan/atau bangunan	Land and/or building rental				
PT Indofood Sukses Makmur Tbk		517.584.342	700.300.382	(182.716.040)	(26,09%)
PT Jakarta Tank Terminal		34.634.861	39.429.389	(4.794.528)	(12,16%)
PT Tunas Baru Lampung		23.378.016	26.378.403	(3.000.387)	(11,37%)
PT Intiboga Sejahtera		3.772.473	7.529.445	(3.756.972)	(49,90%)
PT Bogasari Sentra Flour Mills		5.978.898	7.473.623	(1.494.725)	(20,00%)

Table of Long-term Unearned Revenues

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
PT Wilmar Nabati Indonesia		4.488.750	-	4.488.750	-
PT Dok Duasatu Nusantara		3.723.693	4.243.278	(519.585)	(12,24%)
PT Indokarya Internusa		3.467.415	-	3.467.415	-
Lain-lain	Others	17.880.776	39.752.100	(21.871.324)	(55,02%)
Pendapatan bunga diterima di muka <i>negotiable certificate of deposit</i>	Unearned interest income from negotiable certificate of deposit		5.025.978	(5.025.978)	(100,00%)
Total		4.437.890.625	4.870.785.210	(432.894.585)	(8,89%)
Bagian lancar	Current portion	(146.997.709)	(374.604.109)	227.606.400	(60,76%)
Total bagian jangka panjang	Total long-term portion	4.290.892.916	4.496.181.101	(205.288.185)	(4,57%)

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2018 mencapai Rp1,78 triliun, menurun 1,62% atau Rp29,19 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp1,81 triliun. Hal ini diakibatkan karena penurunan liabilitas imbalan kerja pada perusahaan sebesar Rp33,57 miliar.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company	1.476.971.384	1.510.538.258	(33.566.874)	(2,22%)
Entitas anak	Subsidiaries	299.945.910	295.571.068	4.374.842	1,48%
Total		1.776.917.294	1.806.109.326	(29.192.032)	(1,62%)

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2018 mencapai Rp307,85 miliar, meningkat 2,17% atau Rp6,55 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp301,30 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan penyisihan imbalan kerja karyawan sebesar Rp56,13 miliar.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Perusahaan	The Company				
Penyusutan	Depreciation	(687.207.680)	(638.937.738)	(48.269.942)	7,55%

Employee Benefit Liabilities

In 2018, employee benefit liabilities reached Rp1.78 trillion, a decrease of 1.62% or Rp29.19 billion compared to 2017 which reached Rp1.81 trillion. This was caused by a decrease in employee benefit liabilities of the Company amounted to Rp33.57 billion.

Table of Employee Benefit Liabilities

(in thousand Rupiah)

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax liabilities in 2018 reached Rp307.85 billion, up by 2.17% or Rp6.55 billion compared to Rp301.30 billion in 2017. The increase came from an increase in provision for employee benefits amounted to Rp56.13 billion.

Table of Deferred Tax Liabilities

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Amortisasi	Amortization	(18.595.544)	(6.026.402)	(12.569.142)	208,57%
Penyisihan penurunan nilai piutang	Provision for impairment of receivables	60.653.106	73.546.366	(12.893.260)	(17,53%)
Penyisihan imbalan kerja karyawan	Provision for employee benefits	369.242.847	313.112.199	56.130.648	17,93%
Subtotal		(275.907.271)	(258.305.575)	(17.601.696)	6,81%
Entitas Anak	Subsidiaries	(31.939.536)	(42.993.909)	11.054.373	(25,71%)
Total		(307.846.807)	(301.299.484)	(6.547.323)	2,17%

EKUITAS

Ekuitas tahun 2018 mencapai Rp16,43 triliun, meningkat 17,83% atau Rp2,49 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp13,95 triliun. Hal ini terutama saldo laba per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp14,11 triliun (meningkat sebesar Rp1,72 triliun atau 13,94% dibandingkan saldo laba per 31 Desember 2017) yang dipengaruhi atas pengakuan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 2018 dikurangi pembayaran dividen kepada negara atas laporan keuangan 2017 sebesar Rp653,97 miliar. Serta adanya kenaikan kepentingan non pengendali atas aktivitas *Initial Public Offering* (IPO) PT IKT Tbk.

EQUITY

In 2018, equity amounted to Rp16.43 trillion, an increase of 17.83% or Rp2.49 trillion compared to 2017 amounted to Rp13.95 trillion. This was mainly due the profit as of December 31, 2018 amounting to Rp14.11 trillion (an increase of Rp1.72 trillion or 13.94% compared to December 31, 2017) that affected by the recognition of current year's profit attributable for 2018, minus parent entities payment of dividends to the state for the 2017 financial statements of Rp.683.37 billion. As well as an increase in non-controlling interest in the Initial Public Offering (IPO) of PT IKT Tbk.

Tabel Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Equity

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1,000,000 (Nilai Penuh) Per Saham	Share Capital – Par Value of Rp1,000,000 (Full Amount) Per Share				
Modal Dasar – 4,000,000 Saham	Authorized Capital - 4,000,000 Shares				
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham	Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	-	0.00%
Modal Donasi	Donated Capital	26.825.982	26.825.982	-	0.00%
Tambahan Modal Disetor	Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	-	0.00%
Saldo Laba	Retained earnings				
Ditentukan Penggunaannya	Appropriated	11.726.994.846	10.201.069.392	1.525.925.454	14.96%
Belum Ditentukan Penggunaannya	Unappropriated	2.379.261.695	2.179.893.506	199.368.189	9.15%

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	(112.143.427)	(72.365.832)	(39.777.595)	54,97%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto	Equity Attributable to Owners of Parent Entity - Net	15.147.370.621	13.461.854.573	1.685.516.048	12,52%
Kepentingan Nonpengendali	Non-controlling interests	1.287.085.698	486.063.225	801.022.473	164,80%
Ekuitas – Neto	Equity - Net	16.434.456.319	13.947.917.798	2.486.538.521	17,83%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pendapatan Operasi	Operating Revenues	11.436.700.894	10.655.574.667	781.126.227	7,33%
Pendapatan Konstruksi	Construction Revenues	781.658.834	319.744.293	461.914.541	144,46%
Beban Operasi	Operating Expenses	(8.042.554.820)	(7.397.914.132)	(644.640.688)	8,71%
Beban Konstruksi	Construction Expenses	(781.658.834)	(319.744.293)	(461.914.541)	144,46%
Pendapatan (beban) Operasi Lainnya - Neto	Other Operating Income (expenses) - Net	(196.360.574)	11.410.021	(207.770.595)	(1820,95%)
LABA USAHA	INCOME FROM OPERATIONS	3.197.785.500	3.269.070.556	(71.285.056)	(2,18%)
Pendapatan Keuangan	Finance Income	688.914.300	534.789.328	154.124.972	28,82%
Beban Keuangan	Finance Expenses	(1.130.782.016)	(1.064.136.560)	(66.645.456)	6,26%
Bagian Laba Entitas Asosiasi	Equity in Income of Associates	376.200.594	79.081.852	297.118.742	375,71%
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	3.132.118.378	2.818.805.176	313.313.202	11,12%
Beban pajak final	Final tax expense	(357.113.222)	(345.222.944)	(11.890.278)	3,44%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	2.775.005.156	2.473.582.232	301.422.924	12,19%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN	CORPORATE INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)				
Kini	Current	(353.981.768)	(291.831.888)	(62.149.880)	21,30%
Tangguhan	Deferred	9.686.466	23.976.675	(14.290.209)	(59,60%)
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.430.709.854	2.205.727.019	224.982.835	10,20%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	OTHER COMPREHENSIVE INCOME				

KINERJA KEUANGAN
 Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Items that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Remeasurement of Defined Benefit Plan	32.019.693	(159.232.831)	191.252.524	(120,11%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	Items that will be reclassified to profit or loss				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Exchange Differences due to Financial Statements Translation	(18.329.765)	23.609.863	(41.939.628)	(177,64%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Changes in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	(54.279.223)	8.946.393	(63.225.616)	(706,72%)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.390.120.559	2.079.050.444	311.070.115	14,96%
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.379.261.695	2.179.893.506	199.368.189	9,15%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling interests	51.448.159	25.833.513	25.614.646	99,15%
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.430.709.854	2.205.727.019	224.982.835	10,20%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.339.484.100	2.053.853.310	285.630.790	13,91%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling interests	50.636.459	25.197.134	25.439.325	100,96%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.390.120.559	2.079.050.444	311.070.115	14,96%
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	1.647.655	1.509.591	138.064	9,15%

PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan operasi tahun 2018 mencapai Rp11,44 triliun, meningkat 7,33% atau Rp781,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp10,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya pelayanan jasa terminal sebesar Rp394,95 miliar.

OPERATING REVENUES

The 2018 operating revenues were recorded at Rp11.44 trillion, an increase of 7.33% or Rp781.13 billion compared to 2017 reaching Rp10.66 trillion. This increase was mainly originated from an increase in terminal services by Rp394.95 billion.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Pendapatan Operasi

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Operating Revenues

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pelayanan jasa terminal	Terminal services	3.242.900.495	2.847.950.697	394.949.798	13,87%
Pelayanan terminal peti kemas	Container services	2.706.288.702	2.847.131.118	(140.842.416)	(4,95%)
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	Land, building, water and electricity business	2.873.048.549	2.541.196.283	331.852.266	13,06%
Pelayanan jasa kapal	Vessel services	1.416.634.965	1.195.489.590	221.145.375	18,50%
Pelayanan kesehatan	Medical services	264.847.834	335.466.647	(70.618.813)	(21,05%)
Jasa logistik	Logistic services	314.494.106	298.668.383	15.825.723	5,30%
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	Network services and information system consulting	137.146.663	193.870.458	(56.723.795)	(29,26%)
Jasa Keuangan	Financial services	111.746.400	8.996.597	102.749.803	1142,10%
Pengusahaan peralatan	Equipment services	98.587.873	168.490.895	(69.903.022)	(41,49%)
Pelayanan jasa barang	Cargo service	151.122.002	131.748.755	19.373.247	14,70%
Pendapatan pas pelabuhan	Port entry fee	86.651.881	71.867.487	14.784.394	20,57%
Pendapatan kebersihan	Cleaning services	12.403.493	9.875.661	2.527.832	25,60%
Lain-lain	Others	20.827.931	4.822.096	16.005.835	331,93%
Total		11.436.700.894	10.655.574.667	781.126.227	7,33%

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi tahun 2018 mencapai Rp781,66 miliar, meningkat 144,46% atau Rp461,91 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp319,74 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing.

CONSTRUCTION REVENUES

The 2018 construction revenues were achieved at Rp781.66 billion, increased by 144.46% or Rp461.91 billion compared to Rp319.74 billion in 2017. The increase was due to the construction of Kalibaru and Kijing terminals.

Tabel Pendapatan Konstruksi

(dalam ribuan Rupiah)

Table of Construction Revenues

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pendapatan Kosntruksi	Construction Revenues	781.658.834	319.744.293	461.914.541	144,46%

BEBAN OPERASI

Beban operasi tahun 2018 mencapai Rp8,04 triliun, meningkat 8,71% atau Rp644,64 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp7,40 triliun. Peningkatan tersebut terutama

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2018 reached Rp8.04 trillion, up by 8.71% or Rp644.64 billion compared to 2017 amounted to Rp7.40 trillion. The increase was mainly due to an increase

KINERJA KEUANGAN
 Financial Performance

berasal dari meningkatnya beban pegawai karena adanya penyesuaian atas berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2016 – 2018 untuk perhitungan Tunjangan Pendidikan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bantuan cuti dari yang semula dihitung berdasarkan penghasilan tetap menjadi penghasilan/take home pay. Serta Peningkatan beban kerjasama mitra usaha yang sejalan dengan kenaikan pendapatan jasa barang dan terminal atas penggunaan tenaga kerja dan buruh dibandingkan Tahun 2017.

in employee costs, due to adjustments for the 2016 - 2018 Collective Labor Agreement (CLA) for Education Allowances, Holiday Allowances (THR) and leave assistance, which was previously calculated based on fixed income / take home pay. As well as an increase in the expense of business partners cooperations, in line with the increase in revenue from goods and terminals for the use of labor compared to 2017.

Tabel Beban Operasi

dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Kerja sama mitra usaha	Partnership	2.561.594.144	2.361.056.039	200.538.105	8,49%
Pegawai	Employee	2.355.638.314	2.025.256.300	330.382.014	16,31%
Umum	General	1.050.157.293	1.115.790.747	(65.633.454)	(5,88%)
Penyusutan dan amortisasi	Depreciation and amortization	773.359.280	769.787.855	3.571.425	0,46%
Bahan bakar dan bahan habis pakai	Fuels and supplies	884.189.512	693.717.483	190.472.029	27,46%
Pemeliharaan	Maintenance	265.089.798	274.442.520	(9.352.722)	(3,41%)
Administrasi kantor	Office administration	98.934.022	102.576.791	(3.642.769)	(3,55%)
Asuransi	Insurance	52.834.385	55.174.310	(2.339.925)	(4,24%)
Lain-lain	Others	758.072	112.087	645.985	576,32%
Total		8.042.554.820	7.397.914.132	644.640.688	8,71%

Table of Operating Expenses

(in thousand Rupiah)

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tahun 2018 mencapai Rp781,66 miliar, meningkat 144,46% atau Rp461,91 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp319,74 miliar. Peningkatan beban sejalan dengan adanya aktivitas konstruksi dalam pembangunan terminal kalibaru dan kijing.

CONSTRUCTION EXPENSES

Construction expenses in 2018 reached Rp781.66 billion, increased by 144.46% or Rp.461.91 billion compared to 2017 amounting to Rp319.74 billion. The increase in expenses was in line with the construction activities in Kalibaru and Kijing terminals construction.

Tabel Beban Konstruksi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Beaban Konstruksi	Construction Expenses	(781.658.834)	(319.744.293)	(461.914.541)	144,46%

Table of Construction Expenses

(in thousand Rupiah)

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA- NETO

Pendapatan operasi lainnya tahun 2018 mencapai Rp196,36 miliar, menurun 1.820,95% atau Rp207,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp11,41 miliar. Hal tersebut akibat dari laba (rugi) selisih kurs – neto sebesar Rp633,62 miliar

OTHER OPERATING REVENUES - NET

Other operating revenues in 2018 were recorded at Rp196.36 billion, down by 1,820.95% or Rp207.77 billion compared to 2017 of Rp11.41 billion. This was a result of gain (loss) on foreign exchange – net amounted to Rp633.62 billion.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya- Neto
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Amortisasi premium	Amortization of premium	146.997.708	146.997.708	-	0,00%
Pendapatan denda	Income from penalties	58.039.661	23.543.381	34.496.280	146,52%
Pendapatan atas pengalihan aset	Income from assets transfer	535.961.600	880.270	535.081.330	60786,05%
Beban pajak penghasilan final	Final income tax expense	(121.554.898)	(110.317.575)	(11.237.323)	10,19%
Laba (rugi) selisih kurs - neto	Gain (loss) on foreign exchange – net	(672.041.473)	(38.425.742)	(633.615.731)	1648,94%
Beban denda	Expenses from penalties	(219.167.681)	(24.691.803)	(194.475.878)	787,61%
Laba (rugi) penjualan aset tetap	Gain (loss) on sale of fixed assets	6.546.554	(3.949.652)	10.496.206	(265,75%)
Lain-lain - neto	Others - net	68.857.955	17.373.434	51.484.521	296,34%
Total		(196.360.574)	11.410.021	(207.770.595)	(1,820,95%)

Table of Other Operating Revenues
(in thousand Rupiah)

LABA USAHA

Laba usaha tahun 2018 mencapai Rp3,20 triliun, menurun 2,18% atau Rp71,28 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp3,27 triliun. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengakuan rugi selisih kurs di pendapatan (beban) operasi lainnya-neto.

Tabel Laba Usaha
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pendapatan Operasi	Operating Revenues	11.436.700.894	10.655.574.667	781.126.227	7,33%
Pendapatan Konstruksi	Construction Revenues	781.658.834	319.744.293	461.914.541	144,46%
Beban Operasi	Operating Expenses	(8.042.554.820)	(7.397.914.132)	(644.640.688)	8,71%
Beban Konstruksi	Construction Expenses	(781.658.834)	(319.744.293)	(461.914.541)	144,46%
Pendapatan Operasi Lainnya - Neto	Other Operating Income - Net	(196.360.574)	11.410.021	(207.770.595)	(1820,95%)
Laba Usaha	Income from Operations	3.197.785.500	3.269.070.556	(71.285.056)	(2,18%)

INCOME FROM OPERATIONS

Operating income in 2018 amounted to Rp3.20 trillion, down 2.18% or Rp71.28 billion compared to Rp3.27 trillion in 2017. This was due to recognition of foreign exchange losses as other operating-net income (expenses).

Table of Income from Operations
(in thousand Rupiah)

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan tahun 2018 mencapai Rp688,91 miliar, meningkat 28,82% atau Rp154,12 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp534,79 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya pendapatan bunga deposito sebesar Rp110,76 miliar karena adanya penambahan penempatan deposito Kantor Pusat dan

FINANCE INCOME

The financial income in 2018 amounted to Rp688.91 billion, an increase of 28.82% or Rp154.12 billion compared to Rp534.79 billion in 2017. This was due to an increase in deposit interest income of Rp110.76 billion due to additional deposit placements of the Head Office and a number of Subsidiaries in line with the absorption of investment value

KINERJA KEUANGAN
 Financial Performance

beberapa Entitas Anak sejalan dengan tidak terserapnya nilai investasi sehingga nilai saldo tersedia dioptimalkan dengan melakukan penambahan deposito.

so that any available balance were optimized by making additional deposits.

Tabel Pendapatan Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pendapatan bunga deposito	Interest income from deposits	580.413.469	469.651.024	110.762.445	23,58%
Pendapatan jasa giro	Interest income on current account	108.500.831	65.138.304	43.362.527	66,57%
Total		688.914.300	534.789.328	154.124.972	28,82%

Table of Finance Income

(in thousand Rupiah)

BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2018 mencapai Rp1,13 triliun, meningkat 6,26% atau Rp66,65 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp1,06 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi sebesar Rp66,61 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Belum terealisasinya *hedging* di sepanjang tahun 2018 yang preminya diasumsikan sebesar Rp200 miliar.
2. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar dimana kurs realisasi Tahun 2018 sebesar Rp14.481/USD dan kurs realisasi Tahun 2017 sebesar Rp13.548/USD.

FINANCE EXPENSES

Finance expenses of 2018 amounted to Rp1.13 trillion, an increase of 6.26% or Rp66.65 billion compared to Rp1.06 trillion in 2017. The increase mainly came from an increase in interest expenses and amortization of discount and transaction cost amounted to Rp66.61 billion. This is influenced by:

1. Hedging was not realized throughout 2018, with a premium assumed at Rp200 billion.
2. Weakening of the rupiah exchange rate against the USD, where the realized exchange rate in 2018 was Rp14,481/ USD compared to the 2018 RKAP rate of Rp13,500 / USD and the realized rate for 2017 of Rp13,548 / USD.

Tabel Beban Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost	1.128.468.251	1.061.854.580	66.613.671	6,27%
Beban administrasi	Administration expenses	2.313.765	2.281.980	31.785	1,39%
Total		1.130.782.016	1.064.136.560	66.645.456	6,26%

Table of Finance Expenses

(in thousand Rupiah)

BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2018 mencapai Rp376,20 miliar, meningkat 375,71% atau Rp297,12 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp79,08 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan bagian laba entitas asosiasi JICT sebesar Rp168,21 miliar.

EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

Equity in income of associates in 2018 reached Rp 376,20 billion, increased by 375.71% or Rp297.12 billion compared to 2017 of Rp79.08 billion. This increase was mainly originated from an increase in equity in income of associate from JICT amounted to Rp168.21 billion.

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			(Rp)	(%)
JICT	202.616.584	34.406.563	168.210.021	488,89%
NPCT1	171.964.086	43.601.125	128.362.961	294,40%
CTP (dahulu MTDX)	2.857.275	2.053.125	804.150	39,17%
TPI	(1.237.352)	(978.961)	(258.391)	26,39%
Total	376.200.594	79.081.852	297.118.741	375,71%

Table of Equity in Income of Associates

(in thousand Rupiah)

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Labanya sebelum pajak final dan pajak penghasilan tahun 2018 mencapai Rp3,13 triliun, meningkat 11,12% atau Rp313,31 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,82 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan bagian laba entitas asosiasi sebesar Rp297,12 miliar.

INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX

Income before final tax and income tax of 2018 was Rp3.13 trillion, an increase of 11.12% or Rp313.31 billion compared to 2017 reaching Rp2.82 trillion. The increase came from an increase in equity in income of associates amounting to Rp297.12 billion.

Tabel Laba Sebelum pajak Final dan Pajak Penghasilan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			(Rp)	(%)
Labanya Usaha	3.197.785.500	3.269.070.556	(71.285.056)	(2,18%)
Pendapatan Keuangan	688.914.300	534.789.328	154.124.972	28,82%
Beban Keuangan	(1.130.782.016)	(1.064.136.560)	(66.645.456)	6,26%
Bagian Laba Entitas Asosiasi	376.200.594	79.081.852	297.118.742	375,71%
Total	3.132.118.378	2.818.805.176	313.313.202	11,12%

before Final Tax and Corporate Income Tax

(in thousand Rupiah)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Labanya sebelum pajak penghasilan badan tahun 2018 mencapai Rp2,78 triliun, meningkat 12,19% atau Rp301,42 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,47 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan labanya sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax of 2018 amounted to Rp2.78 trillion, an increase of 12.19% or Rp301.42 billion compared to 2017 of Rp2.47 trillion. The increase was in line with an increase in income before final tax and corporate income tax.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			(Rp)	(%)
Labanya Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan	3.132.118.378	2.818.805.176	313.313.202	11,12%

Table of Income before Corporate Income Tax

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Beban Pajak Final	Final Tax Expenses	(357.113.222)	(345.222.944)	(11.890.278)	3,44%
Total		2.775.005.156	2.473.582.232	301.422.924	12,19%

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan pada tahun 2018 mencapai Rp2,43 triliun, meningkat 10,20% atau Rp224,98 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,21 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan badan.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	Income Before Corporate Income Tax	2.775.005.156	2.473.582.232	301.422.924	12,19%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan	Corporate Income Tax Benefits (Expenses)				
Kini	Current	(353.981.768)	(291.831.888)	(62.149.880)	21,30%
Tangguhan	Deferred	9.686.466	23.976.675	(14.290.209)	(59,60%)
Laba Tahun Berjalan	Income for the year	2.430.709.854	2.205.727.019	224.982.835	10,20%

INCOME FOR THE YEAR

Income for the year 2018 was recorded at Rp2.43 trillion, increased by 10.20% or Rp224.98 billion compared to 2017 which was recorded at Rp2.21 trillion. This increase as in line with an increase in income before corporate income tax.

Table of Income for the Year

(in thousand Rupiah)

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2018 mencapai Rp2,38 triliun, meningkat 9,15% atau Rp199,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,18 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2018 mencapai Rp51,45 miliar, meningkat 99,15% atau Rp25,61 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp25,83 miliar, sejalan dengan telah dilakukannya IPO PT IKT, Tbk dan PT JAI, Tbk.

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pemilik entitas induk	Owners of parent entity	2.379.261.695	2.179.893.506	199.368.189	9,15%
Kepentingan nonpengendali	Non-controlling interests	51.448.159	25.833.513	25.614.646	99,15%

CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE PROFIT

The current year's profit attributable to owners of the parent in 2018 amounted to Rp2.38 trillion, an increase of 9.15% or Rp199.37 billion compared to Rp2.18 trillion in 2017. Whereas the current year's profit attributable to non-controlling interests in 2018 reached Rp51.45 billion, an increase of 99.15% or Rp25.61 billion compared to Rp25.83 billion in 2017, in line with the implementation of PT IKT, Tbk's and PT JA I, Tbk. IPOs.

Table of Attributable Income for the Year

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan	Attributable Income for the Year	2.430.709.854	2.205.727.019	224.982.835	10,20%

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2018 mencapai Rp(40,59) miliar, menurun 67,96% atau Rp86,09 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp(126,68) miliar. Hal tersebut terutama berasal dari penurunan pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp191,25 miliar.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Items that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Remeasurement of Defined Benefit Plans	32.019.693	(159.232.831)	191.252.524	(120,11%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	Items that will be reclassified to profit or loss				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Exchange Difference due to Financial Statements Translation	(18.329.765)	23.609.863	(41.939.628)	(177,64%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Changes in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	(54.279.223)	8.946.393	(63.225.616)	(706,72%)
Total		(40.589.295)	(126.676.575)	86.087.280	(67,96%)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The 2018's other comprehensive income was Rp(40.59) billion, decreased by 67.96% or Rp86.09 billion compared to 2017 of Rp(126.68 billion). That's mainly came from an decrease in remeasurement of defined benefit plans amounted to Rp191.25 billion.

Table of Other Comprehensive Income

(in thousand Rupiah)

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2018 mencapai Rp2,39 triliun, meningkat 14.96% atau Rp311,07 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,08 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Laba Tahun Berjalan	Income for the Year	2.430.709.854	2.205.727.019	224.982.835	10,20%

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Comprehensive income for the year 2018 reached Rp2.39 trillion, an increase of 14.96% or Rp311.07 billion compared to 2017 amounting to Rp2.08 trillion. This increase was in line with an increase in income for the year.

Table of Comprehensive Income for the Year

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
 Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	(40.589.295)	(126.676.575)	86.087.280	(67,96%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Comprehensive Income for the Year	2.390.120.559	2.079.050.444	311.070.115	14,96%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan

Adapun laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2018 mencapai Rp2,34 triliun, meningkat 13,91% atau Rp285,63 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp2,05 triliun. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2018 mencapai Rp50,64 miliar, meningkat 100,96% atau Rp25,44 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp25,20 miliar.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Diatribusikan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.339.484.100	2.053.853.310	285.630.790	13,91%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	50.636.459	25.197.134	25.439.325	100,96%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Diatribusikan	Attributable Comprehensive Income for the Year	2.390.120.559	2.079.050.444	311.070.115	14,96%

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan. Laba bersih per saham dasar tahun 2018 mencapai Rp1.647.655 meningkat 9,15% atau Rp138.064 dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai Rp1.509.591. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Tabel Laba Per Saham Dasar

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
Laba Per Saham Dasar	Basic Earnings per Share	1.647.655	1.509.591	138.064	9,15%

Attributable Comprehensive Income for the Year

Comprehensive income for the year attributable to owners of parent entity in 2018 was recorded at Rp2.34 trillion, an increase of 13.91% or Rp285.63 billion compared to 2017 of Rp2.05 trillion. While comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2018 was recorded at Rp50.64 billion, an increase of 100.96% or Rp25.44 billion compared to 2017 of Rp25.20 billion.

Table of Attributable Comprehensive Income for the Year

(in thousand Rupiah)

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share are calculated based on the weighted average number of outstanding shares during the year. Basic earnings per share in 2018 reached Rp1,647,655, increased by 9.15% or Rp138,064 compared to Rp1,509,591 in 2017. This increase was in line with an increase in income for the year.

Table of Basic Earnings Per Share

(in full Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Dengan arus kas operasi yang kuat, Perseroan memiliki posisi solid untuk tumbuh di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam pengungkapan dalam arus kas sebagai berikut.

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	Cash Receipt from Customers	10.419.622.862	9.545.892.387	873.730.475	9,15%
Pembayaran Kepada Kontraktor, Pemasok dan Lainnya	Payment to Contractors, Suppliers and Others	(4.849.497.861)	(4.316.101.188)	(533.396.673)	12,36%
Pembayaran Kepada Karyawan	Payment to Employees	(2.324.087.858)	(2.245.546.714)	(78.541.144)	3,50%
Pembayaran Pajak Penghasilan	Payment for Income Tax	(541.932.045)	(391.972.308)	(149.959.737)	38,26%
Penghasilan Bunga	Interests received	604.025.265	439.649.013	164.376.252	37,39%
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan Lainnya	Payment of Interest and Other Financial Charges	(1.064.789.688)	(984.317.563)	(80.472.125)	8,18%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	Net Cash Provided by Operating Activities	2.243.340.675	2.047.603.627	195.737.048	9,56%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Penerimaan Dividen	Receipt of Dividend	272.747.364	130.367.400	142.379.964	109,21%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(1.984.667.658)	(775.034.171)	(1.209.633.487)	156,07%
Penempatan Investasi Jangka Pendek	Placement of Short Term Investments	3.163.075.409	2.011.922.698	5.174.998.107	(257,22%)
Penerimaan Sewa Di Muka	Receipt of Advance Rental Fee	318.174.500	308.934.500	9.240.000	2,99%
Investasi Pada Penyertaan Saham	Investment in Shares of Stock	(327.615.532)	449.500.127	(777.115.659)	(172,88%)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	Net Cash Used in Investing Activities	1.441.714.083	(1.898.154.842)	3.339.868.925	(175,95%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Pembayaran Pinjaman Bank Keuangan Lainnya	Payment of Bank Loans and Other Financial Institution	2.139.397	(2.360.172)	4.499.569	(190,65%)
Pembayaran Dividen	Payment of Dividend	(653.968.052)	(453.437.932)	(200.530.120)	44,22%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	Net Cash Used in Funding Activities	(651.828.655)	(455.798.104)	(196.030.551)	43,01%
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas	Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	778.115.044	45.803.973	732.311.071	1598,79%
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	3.811.341.147	(260.545.346)	4.071.886.493	(1562,83%)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

With strong operational cash flows, the Company has a solid position for future growth. This is reflected in the following disclosures of cash flows.

Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(in thousand Rupiah)

KINERJA KEUANGAN
 Financial Performance

Uraian	Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
				(Rp)	(%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	14.207.330.332	14.467.875.678	(260.545.346)	(1,80%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR	18.018.671.479	14.207.330.332	3.811.341.147	26,83%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2018 mencapai Rp2,24 triliun, meningkat sebesar Rp195,74 miliar atau 9,56% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,05 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari:

1. Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan lebih tingginya pendapatan kapal, perusahaan alat, terminal, dan rupa-rupa usaha di Cabang Tanjung Priok, peningkatan pendapatan Entitas Anak seperti PT IPC TPK, PT PPI, dan PT IKT, Tbk serta berasal dari adanya penguatan kurs USD terhadap rupiah atas penerimaan rental fee dari PT NPCT1, PT JICT, dan KSO TPK KOJA (nilai kurs per 31 Desember 2017: Rp13.548/USD; nilai kurs per 31 Desember 2018: Rp14.481/USD).
2. Penerimaan penghasilan bunga meningkat yang disebabkan adanya peningkatan penempatan dana deposito di Kantor Pusat dan Entitas Anak. Hal tersebut sejalan dengan rendahnya serapan investasi tahun 2018.

Di samping itu, terdapat penurunan arus kas dari aktivitas operasi antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan meningkat seiring dengan kenaikan remunerasi karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2016-2018. Selain itu disebabkan oleh kenaikan pembayaran bonus dan tantiem atas kinerja tahun 2017 yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Pembayaran kepada pihak ketiga mengalami kenaikan sejalan kenaikan beban operasi di luar beban pegawai dan penyusutan.
3. Pembayaran beban bunga terealisasi lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD per 31 Desember 2018 terealisasi Rp14.481/USD, sedangkan per 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp13.548/USD.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash obtained from operating activities in 2018 was Rp2.24 trillion, increased by Rp195.74 billion or 9.56% compared to 2017 of Rp2.05 trillion. The increase was originated from:

1. Increased cash receipts from customers in line with higher vessel revenue, business equipment, terminals, and various business in the Tanjung Priok Branch, increased revenue for Subsidiaries such as PT IPC TPK, PT PPI, and PT IKT, Tbk as well as from the Rupiah exchange rate strengthening against the USD for receipt of rental fees from PT NPCT1, PT JICT, and KSO TPK KOJA (exchange rate as of December 31, 2017: Rp13,548 / USD; exchange rate per December 31, 2018: Rp14,481 / USD).
2. The increase in interest income was due to an increase in the placement of deposit funds at the Head Office and Subsidiaries. This was in line with the low investment absorption in 2018.

In addition, there was a decrease in cash flows from operating activities, including the following:

1. Payments to employees and payment of income taxes increases with the increase in employee remuneration in accordance with the 2016-2018 Collective Labor Agreement (PKB). In addition, it was caused by an increase in bonuses and bonus payments for the 2017 performance that increased compared to the previous year.
2. Payments to third parties increased in line with the increase in operating expenses excluding employee expenses and depreciation.
3. Payments of realized interest expense was higher than in 2017 due to the weakening of the rupiah exchange rate against the USD as of December 31, 2018, Rp14,481 / USD, while as of December 31, 2017 it was Rp13,548 / USD.

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2018 mencapai Rp1,44 triliun, meningkat sebesar Rp3,34 triliun miliar atau 175,95% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar (Rp1,90) triliun. Hal tersebut berasal dari:

1. Pemerolehan aset tetap dan aset tidak berwujud mengalami kenaikan seiring dengan terealisasinya investasi yang terbesar diantaranya: Pembangunan Pelabuhan Kijing, Pembangunan Pelabuhan Kalibaru, dan penyertaan modal ke PT CTP Tollways;
2. Penempatan investasi saham oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) atas penyertaan saham pihak ketiga dan investasi pada surat hutang.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2018 mencapai Rp651,83 miliar meningkat sebesar Rp196,03 miliar atau 43,01% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp455,80 miliar.

Hal ini karena realisasi pembayaran dividen tahun 2018 sebesar Rp653,97 miliar atas laba tahun berjalan 2017, sebagaimana surat Direktur Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: KU.02.04/8/5/3/BEN/KEU/PI.II-18 tanggal 8 Mei 2018 perihal Pelunasan Dividen Tahun Buku 2017. Pembayaran dividen tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pembayaran dividen tahun 2017 sebesar Rp453,44 miliar atas laba tahun berjalan 2016. Dividend Payout Ratio (DPR) tahun 2017 dan 2018 yang ditentukan oleh Kementerian BUMN sebesar 30% dari laba tahun berjalan.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash obtained from investing activities in 2018 was recorded at Rp1.44 trillion, a increased of Rp3.34 trillion or 175.95% compared to 2017 of (Rp1.90) trillion.

This arose from:

1. Acquisition of fixed assets and intangible assets increasing together with the realization of the largest investments including: Construction of Kijing Port, Development of Kalibaru Port, and capital participation in PT CTP Tollways;
2. Placement of share investment by PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) for the participation of third party shares and investments in debt securities.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used for financing activities in 2018 reached Rp651.83 billion, an increase of Rp.196.03 billion or 43.01% compared to 2017 amounting to Rp455.80 billion.

This was due to dividend payments in 2018 amounting to Rp653.97 billion for the 2017 current year profits, as per the Finance Director's letter to the Ministry of Finance's Directorate General of Budget Number: KU.02.04/8/5/3/BEN/KEU/PI.II-18 dated May 8, 2018 concerning payment of 2017 Fiscal Year Dividend. The dividend payment increased compared to the dividend payments in 2017 amounting to Rp453.44 billion for the current year's profit. The Dividend Payout Ratio (DPR) in 2017 and 2018 as determined by the Ministry of SOEs was 30% of current year's profit.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan IPC dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya: kondisi keuangan jangka pendek, kondisi keuangan jangka panjang, rasio aktivitas dan rasio hasil usaha.

Indikator-indikator tersebut hingga tahun 2018 masih sangat memadai. Misalnya, *current ratio* yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek masih 4,47 kali. Begitu juga dengan rasio kas yang berada di posisi 3,00 kali. Walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017, indikator tersebut menunjukkan bahwa kemampuan IPC dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih sangat kuat.

Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas 2018 baik diukur dengan menggunakan Rasio Kas (*Cash Ratio*) dan Rasio Lancar (*Current Ratio*) dengan pencapaian secara berurutan antara lain: 3,00%, dan 4,47%. Berdasarkan besarnya rasio lancar, bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang di 2018 masih relatif baik.

ABILITY TO PAY DEBT

The Company is always committed to fulfilling the creditors' rights by paying the loan principal and interest in a timely manner. IPC's ability to meet its liabilities can be seen from a number of indicators, for example: short-term financial conditions, long-term financial conditions, activity ratios and performance ratios.

Until 2018, these key indicators were still very adequate. For example, the current ratio, which is a comparison between current assets and current liabilities was 4.47 times. The cash ratio was equally good at 3.00 times. Although slightly lower than 2017, these indicators show that IPC's ability to meet its short-term liabilities has remained strong.

The ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. The liquidity ratio and solvency ratio are presented as follows.

ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBT (LIQUIDITY)

The 2018 liquidity ratio, measured using Cash Ratio and Current Ratio was 3.00% and 4.47%. Based on the current ratio, the Company's ability to pay debts in 2018 remained to be relatively good.

Tabel Likuiditas

Table of Liquidity

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Perubahan Change	
Kondisi Keuangan Jangka Pendek (Likuiditas) <i>Short Term Financial Condition (Liquidity)</i>					
Rasio Lancar Current Ratio	Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek Current Assets/Current Liabilities	x	4,47	4,69	(0,22)
Rasio Kas Cash Ratio	Kas + Deposito + Surat Berharga Jangka Pendek / Liabilitas Jangka Pendek Cash + Time Deposit + Securities/Current Liabilities	x	3,97	4,18	(1,18)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Nilai solvabilitas Perseroan cenderung stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari Rasio *Total Assets to Total Debt*, tingkat solvabilitas Perseroan relatif baik yaitu sebesar lebih dari 2,00. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG-TERM DEBT (SOLVENCY)

The solvency ratio shows the Company's ability to pay its obligations, especially long-term liabilities. The Company's solvency was stable compared to the previous year. Based on the *Total Assets to Total Debt Ratio*, the Company's solvency rate is relatively good at more than 2.00. A description of the solvability ratio is shown as follows.

Tabel Solvabilitas

Table of Solvency

Uraian <i>Description</i>		Satuan <i>Unit</i>	2018	2017	Perubahan <i>Change</i>
Kondisi Keuangan Jangka Panjang (Solvabilitas) <i>Long Term Financial Condition (Solvency)</i>					
Total Assets to Total Debt	Jumlah Aset/Jumlah Pinjaman <i>Total Assets/Total Loans</i>	x	2,22	2,19	0,03
Total Debt to Equity	Jumlah Pinjaman /Total Ekuitas <i>Total Loans/Total Equity</i>	x	1,41	1,55	(0,14)
Total Debt to Total Fixed Assets	Jumlah Pinjaman /Jumlah Aset Tetap + Properti Investasi + Aset Pengelolaan Bersama <i>Total Loans/Total Fixed Assets + Investment Properties + Assets Under Joint Operations</i>	x	1,71	1,77	(0,06)
Longterm Debt to Equity	Pinjaman Jangka Panjang /Total Ekuitas <i>Long-term Loans/Total Equity</i>	x	1,41	1,55	(0,14)
Net Debt to EBITDA	Jumlah Pinjaman + Kas dan Setara Kas /EBITDA <i>Total Loans + Cash and Cash Equivalents/EBITDA</i>	x	1,23	1,83	(0,6)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, obligasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu *Standar and Poor's (S&P)*, *Moody's* dan *Fitch*.

ABILITY TO PAY DEBT FROM SECURITIES ISSUED

The ability to pay debts can also be reflected based on bond ratings, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bonds are routinely assessed by rating agencies to support the feasibility of bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have obtained international rating from various rating agencies, namely *Standard and Poor's (S & P)*, *Moody's* and *Fitch*.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG
 Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global **Table of Ability to Pay Debts from Global Bonds**

Uraian Description	Peringkat Rating	
	2018	2017
Obligasi Global Global Bonds	<ul style="list-style-type: none"> • S&P : BBB- (Outlook: Stable) • Moody's : Baa2 (Outlook: Stable) • Fitch : BBB (Outlook: Stable) 	<ul style="list-style-type: none"> • S&P : BBB- (Outlook: Stable) • Moody's : Baa3 (Outlook: Positive) • Fitch : BBB- (Outlook: Positive)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

The definition of each bond rating given is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global

Table of Definition of Global Bond Rating

Pemeringkat Rating		
Standar and Poor's (S&P)	BBB -	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Moody's	Baa2	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.
Fitch	BBB -	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Outlook		
Stable		Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. Indicating a stable prospect, hence the rating results will be stable.
Positive		Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospect that has the potential to increase rating.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Rasio perputaran piutang tahun 2017 mengalami penurunan dari 20 (dua puluh) hari di tahun 2017 menjadi 24 (dua puluh empat) hari di tahun 2018, atau mengalami perubahan selama 4 hari. Namun demikian, tingkat kolektibilitas Perseroan masih dalam kategori lancar yaitu kurang dari 1 (satu) bulan.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The accounts receivable turnover ratio in 2017 has increased from 20 days in 2017 to 24 days in 2018, or has changed by 4 days. However, the Company's collectability level is still in the current category, which is less than 1 (one) month.

Tabel Kolektibilitas Piutang

Table of Receivables Collectibility

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017	Perubahan Change
Average Collection Period (ACP)	Hari Days	24	20	6
		365/(Pendapatan Operasi/ Rata-Rata Piutang)		
		365/(Operating Revenues/Receivables in Average		

STRUKTUR MODAL

Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2018 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 68,05% berasal dari Liabilitas dan 31,95% berupa Ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2017, Komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami penurunan 0,68% sedangkan Ekuitas meningkat 0,68%.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	2018		2017		Pertumbuhan Growth	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek	Current liabilities	5.498.194.480	10,69%	5.072.948.273	10,74%	425.246.207	8,38%
Liabilitas Jangka Panjang (utang berbasis bunga)	Non-current Liabilities	29.500.226.224	57,36%	28.199.222.288	59,72%	1.301.003.936	4,61%
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	34.998.420.704	68,05%	33.272.170.561	70,46%	1.726.250.143	5,91%
Jumlah Ekuitas	Total Equity	16.434.456.319	31,95%	13.947.917.798	29,54%	2.486.538.521	17,83%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Total Liabilities and Equity	51.432.877.023	100,00%	47.220.088.359	100,00%	4.212.788.664	8,92%

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

IPC memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan liabilitas jangka panjang sebagai sumber modalnya. Hal ini dilaksanakan dengan menerbitkan obligasi untuk rencana ekspansi Perseroan.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

IPC menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Struktur modal tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis IPC dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), dan Menteri Negara BUMN.

DETAILS OF CAPITAL STRUCTURE

In 2018, the composition of capital structure owned by the Company was 68.05% derived from Liabilities and 31.95% from Equity, this composition underwent changes change compared to 2017, in which the composition of capital structure derived from Liabilities decreased by 0.68% while Equity increased by 0.68%.

Table of Details of Capital Structure

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018		2017		Pertumbuhan Growth	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek	Current liabilities	5.498.194.480	10,69%	5.072.948.273	10,74%	425.246.207	8,38%
Liabilitas Jangka Panjang (utang berbasis bunga)	Non-current Liabilities	29.500.226.224	57,36%	28.199.222.288	59,72%	1.301.003.936	4,61%
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	34.998.420.704	68,05%	33.272.170.561	70,46%	1.726.250.143	5,91%
Jumlah Ekuitas	Total Equity	16.434.456.319	31,95%	13.947.917.798	29,54%	2.486.538.521	17,83%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Total Liabilities and Equity	51.432.877.023	100,00%	47.220.088.359	100,00%	4.212.788.664	8,92%

Capital structure is related to the term working capital structure short (liquidity) has been presented in the ability section pay debts in this Annual Report.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

IPC has a policy to emphasize the use of non-current liabilities as a source of capital. Accordingly, IPC issues bonds to fund its expansion plans.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

IPC prepares its Capital Plan based on a review and assessment of the required capital adequacy requirements and combines this with a review of the latest economic developments. The capital structure plan is prepared by the Board of Directors as part of the IPC Business Plan and approved by the Board of Commissioners, Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Foreign Commercial Loan Team (PKLN), and the Ministry of SOEs.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Material Capital Goods Investments

IPC tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Namun demikian, pada tahun 2018 IPC memiliki perjanjian perikatan dengan *vendor* yang disajikan sebagai berikut:

IPC has no material related investment. capital goods. However, in 2018 IPC engagements with vendors as follows:

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal

Tabel of Material Commitments For Capital Goods Investment

NO	Jenis Ikatan <i>Type of Commitment</i>	Nama Pihak (<i>Vendor</i>) Pelaksana Program <i>Party Name (Vendor)</i>	Mata Uang yang menjadi Denominasi <i>Currency Denomination</i>
1	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I <i>Construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I</i>	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Rupiah dan USD <i>Rupiah and USD</i>
2	Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat <i>Phase 1</i> <i>Construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase 1</i>	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Rupiah
3	Peningkatan Dermaga 114 SS Cabang Pelabuhan Tanjung Priok <i>Increasing Dock 114 SS at Tanjung Priok Port Branch</i>	PT Karisma Ciptatunggal	Rupiah
4	Elektrifikasi Alat Bongkar muat sebanyak 11 (sebelas) unit <i>Gantry Luffing Crane</i> Cabang Pelabuhan Tanjung Priok <i>B/M Electrification Equipment for 11 (eleven) Gantry Luffing Cranes at Tanjung Priok Port Branch</i>	PT Energi Pelabuhan Indonesia PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah
5	Perbaikan Lapangan Penumpukan 106 -107 Cabang Pelabuhan Tanjung Priok <i>Improvement of Stacking Field 106 -107 at Tanjung Priok Port Branch</i>	PT Probicindo Tunggal Taruna	Rupiah
6	Peningkatan Dermaga dan Lapangan Penumpukan 005, 006, 007 Cabang Pelabuhan Tanjung Priok <i>Improvement of Dock and Stacking Field 005, 006, 007 at Tanjung Priok Port Branch</i>	PT Nindya Karya (Persero)	Rupiah
7	Renovasi berat Gedung Cabang sebagai Gallery IPC (Museum Maritim Indonesia) <i>Major renovation of the Branch Building to become the IPC Gallery (Indonesian Maritime Museum)</i>	PT Buaran Megah Sejahtera	Rupiah
8	Pelebaran Dermaga C1 Cabang Pelabuhan Panjang <i>Widening of C1 Dock at Panjang Port Branch</i>	PT Brantas Abipraya	Rupiah
9	Pekerjaan Elektrifikasi 2 (Dua) Unit Alat Bongkar Muat Luffing Crane Di Terminal Curah Kering Cabang Pelabuhan Panjang <i>Electrification Equipment Work for 2 (Two) Loading Unloading Luffing Cranes at Panjang Port Branch Dry Bulk Terminal</i>	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah
10	Perbaikan dan Peningkatan Dermaga A Cabang Pelabuhan Panjang <i>Repair and Improvement to Dock A at Panjang Port Branch</i>	PT Galatama PT Andhikarya Teknik Perkasa	Rupiah
11	Perbaikan Berat Gudang CFS, 001, dan 007 Cabang Pelabuhan Panjang <i>Major Repairs to CFS Warehouse, 001, and 007 at Panjang Port Branch</i>	PT Lambok Ulina	Rupiah
12	Elektrifikasi 4 (empat) unit RMGC dan 1 unit Gantry Jib Crane dan penambahan daya Cabang Pelabuhan Palembang <i>Electrification of 4 (four) RMGC and 1 Gantry Jib Crane and additional power at the Palembang Port Branch</i>	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah
13	Perbaikan Berat Lapangan Penumpukan Terminal Peti kemas Cabang Pelabuhan Palembang <i>Major Repairs to Palembang Port Container Terminal Stacking Field</i>	PT Media Karyacitra Persada	Rupiah

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Material Capital Goods Investments

NO	Jenis Ikatan <i>Type of Commitment</i>	Nama Pihak (<i>Vendor</i>) Pelaksana Program <i>Party Name (Vendor)</i>	Mata Uang yang menjadi Denominasi <i>Currency Denomination</i>
14	Perkuatan dan Perpanjangan Dermaga TKS Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Strengthening and Extending to TKS Dock at Teluk Bayur Port Branch	PT Cemerlang Samudera Kontrindo	Rupiah
15	Perbaikan Berat Lapangan Penumpukan Peti kemas termasuk penyediaan sistem operasi terminal peti kemas dan fasilitas penunjang Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Major Container Stacking Field Repairs including container terminal operating systems and supporting facilities at Teluk Bayur Port Branch	PT Rimbo Peraduan PT Agera Harapan Mandiri	Rupiah
16	Pembangunan Gudang A di Area Eks. Pembebasan Lahan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Construction of Warehouse A at the Ex Land Acquisition Area, Teluk Bayur Port Branch	PT Wika Industri & Konstruksi	Rupiah
17	Pembangunan Dermaga antara Dermaga 003 dan Dermaga 007 Cabang Pelabuhan Banten Construction of Dock between Dock 003 and Dock 007 at Banten Port Branch	PT Syarif Maju Karya	Rupiah
18	Pengerukan Alur dan Kolam Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa Dredging and Pools at Sunda Kelapa Port Branch	PT Pengerukan Indonesia	Rupiah
19	Pekerjaan Perbaikan Berat Dermaga Peti kemas Pelabuhan Talang Duku Cabang Pelabuhan Jambi Major Improvement Work at the Container Dock at Talang Duku, Jambi Port Branch	PT Budigraha Perkasa Utama	Rupiah
20	Pekerjaan Perbaikan Berat Dermaga Apung Ferrocement 02 Cabang Pelabuhan Jambi Major Repair Work for Ferrocement 02 Floating Dock at Jambi Port Branch	PT Kharisma Mufida	Rupiah
21	Pengadaan rampdoor dan perbaikan jetty konvensional Cabang Pelabuhan Bengkulu Rampdoor procurement and repair of conventional jetty at Bengkulu Port Branch	PT Jasmanindo Sapta Perkasa	Rupiah
22	Modifikasi conveyor A dengan kapasitas 1 x 1500 Ton/jam lengkap dengan ship loader dan fasilitas stock pile pendukung Cabang Pelabuhan Bengkulu Modification of conveyor A with a capacity of 1 x 1500 Ton / hour complete with a ship loader and supporting stock pile facilities at Bengkulu Port Branch	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat dan pengerukan.

PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

During 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) made material commitments for goods and capital investments with the aim of increasing capacity, productivity and services to build docks, stacking fields, and to complement loading / unloading and dredging equipment.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL
 Material Capital Goods Investments

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal IPC dan penerbitan *global bond* dengan nilai total USD1,6 miliar. Seri pertama *global bond* bernilai USD1,1 miliar dan seri kedua bernilai USD500 juta.

Sumber dana *global bond* dipergunakan untuk mengembangkan proyek pelabuhan dan fasilitas pendukung yang terangkum dalam proyek-proyek strategis Perseroan.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2018, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Laba atau rugi yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat dan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif pada tahun berjalan. Posisi keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Laporan Keuangan dengan menggunakan kurs laporan akhir tahun, sebagai berikut:

Tabel Nilai Kurs

Mata Uang Currency	31 Desember 2018 December 31, 2018	31 Desember 2017 December 31, 2017
Dolar Amerika Serikat (USD) 1 1 US Dollar (USD)	14.481	13.548
Euro Eropa (EUR) 1 1 Euro (EUR)	16.560	16.174
Dolar Singapura (SGD) 1 1 Singapore Dollar (SGD)	10.603	10.134

Saat ini risiko keuangan yang dihadapi oleh Perusahaan adalah risiko mata uang. Perseroan berupaya untuk meminimalkan risiko mata uang melalui pendekatan manajemen risiko. Paparan risiko ini terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing di pasar. Fluktuasi tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan. IPC mengelola risiko dengan menerapkan *natural hedging*. Saat ini Perseroan telah memiliki kebijakan lindung nilai (*hedging*).

SOURCE OF FUNDS

The funding source for capital expenditure comes from internal IPC funds and a Global Bond issuance with a total value of USD1.6 billion. The Global Bond first series is for USD1.1 billion and the second series is for USD500 million.

The Global Bond funds realization was used to develop port projects and supporting facilities that are summarized in the Company's strategic projects.

CURRENCY RISK PROTECTION STEPS

There were no commitments in 2018 in foreign currencies in accordance with Bank Indonesia Regulations related to the obligation to use Rupiah for transactions within the Republic of Indonesia. In addition, the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Statements are prepared in Rupiah, while transactions in foreign currencies are converted into Rupiah using the exchange rate on the date of the transaction.

Profit or Losses arising from converting assets and liabilities in foreign currencies are recorded and recognized in the Comprehensive Income Statement for the current year. Financial positions in foreign currencies are translated into the financial statements using the year-end exchange rates, as follows:

Tabel of exchange rate table

At present the financial risk faced by the Company relates to currency risk. The Company endeavors to minimize currency risk using a risk management approach. Risk exposures occur due to market fluctuations in the foreign exchange rates. These fluctuations can have a negative impact on the financial position of the Company. IPC manages risk by applying natural hedging. At present the Company has a hedging policy.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal dan penyertaan modal yang terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp3,01 triliun, Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal dan penyertaan modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis	Description	Nilai Valuew
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Port Buildings	1.234.083.966
Kapal	Vessels	28.069.151
Alat Fasilitas Pelabuhan	Port Equipment	86.063.247
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	Port Installation	56.246.788
Tanah	Land	7.090.703
Jalan dan Bangunan	Roads and Buildings	111.864.418
Peralatan	Equipment	40.120.438
Kendaraan	Vehicle	-
Emplasemen	Emplacement	2.458.453
Investasi Non Fisik	Non-physical Investment	82.753.446
Kapitalisasi Bunga	Interest Capitalization	63.570.113
Investasi Perusahaan Induk	Parent Company's Investment	1.712.329.721
Investasi Entitas Anak	Subsidiaries' Investment	1.100.509.668
Total Investasi Konsolidasi	Total Consolidated Investment	2.812.830.389
Penyertaan Modal	Equity Participation	200.000.000
Total Investasi + Penyertaan Modal	Total Investment + Equity Participation	3.012.830.389

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi bangunan fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp1,23 triliun atau 22,49% dari anggaran. Serapan terbesar terdapat pada Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Tahap I sebesar Rp417,55 miliar.

Progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Tahap I sebagai berikut:

Investment in the form of Capital Goods (*Capital Expenditure*) is an activity of spending funds used to purchase a number of fixed assets or increase the value of fixed assets, which are expected to provide benefits in the future.

TYPE AND VALUE OF INVESTMENT

The realization of capital goods investment and equity participation amounted to Rp3,01 trillion. The details of each type on the investment value of capital goods and equity participation are described in the table as follows:

Table of Type and Values of Investment

(in thousand Rupiah)

PORT BUILDINGS

The realization of port buildings investment was Rp1.23 trillion or 22.49% of the budget. The biggest absorption was in the Phase I Construction of Kijing Port, West Kalimantan amounting to Rp417.55 billion.

The progress of Phase I construction of Kijing Port, West Kalimantan is as follows:

INVESTASI BARANG MODAL
 Capital Goods Investment



Kegiatan Pemancangan
Drafting Activities

KAPAL

Realisasi investasi kapal adalah sebesar Rp28,07 miliar atau 112,44% dari anggaran. Realisasi terbesar berupa pengadaan kapal tunda di Cabang Tanjung Priok.

ALAT FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi alat fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp86,06 miliar atau 6,97% dari anggaran. Realisasi terbesar terdapat pada investasi elektrifikasi alat bongkar muat di Cabang Tanjung Priok.

INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi instalasi fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp56,25 miliar atau 90,37% dari anggaran. Realisasi terbesar berupa investasi penataan jaringan listrik Pelabuhan Teluk Bayur.

TANAH

Realisasi investasi tanah adalah sebesar Rp7,09 miliar atau 8,07% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya berupa Pembelian Lahan di Pelabuhan Kawasan Belinyu Cabang Pelabuhan Pangkalbalam.

JALAN DAN BANGUNAN

Realisasi investasi Jalan dan Bangunan adalah sebesar Rp111,86 miliar atau 13,26% dari anggaran. Realisasi terbesar berupa investasi renovasi berat Gedung Cabang sebagai Gallery IPC Cabang Tanjung Priok (Museum Maritim).

PERALATAN

Realisasi investasi Peralatan adalah sebesar Rp40,12 miliar atau 43,00% dari anggaran. Realisasi terbesar terdapat pada Pengembangan Infrastruktur Layanan Terpadu ICT untuk pekerjaan:



Kegiatan Pematangan Lahan
Designation of Land Maturation Activities

VESSELS

The realization of vessels investment was Rp28.07 billion or 112.44% of the budget. The biggest realization was the procurement of tugboats in Tanjung Priok Branch.

PORT EQUIPMENT

The port equipment investment was realized at Rp86.06 billion or 6.97% of the budget. The biggest realization was in the investmet on electrification of loading and unloading equipment at Tanjung Priok Branch.

PORT INSTALLATION

The realization of port installation investment was recorded at Rp56.25 billion or 90.37% of the budget. The biggest realization was in the form of investment on electricity network arrangement in Teluk Bayur Port.

LAND

The land investment was realized at Rp7.09 billion or 8.07% of the budget. The realization included Land Purchase at Belinyu Port area of Pangkalbalam Port Branch.

ROADS AND BUILDINGS

The realization of Roads and Buildings investment amounted to Rp111.86 billion or 13.26% of the budget. The biggest realization was the heavy renovation investment of Branch Building as IPC Gallery of Tanjung Priok Branch (Maritime Museum).

EQUIPMENT

The realization of equipment investment was Rp40.12 billion or 43.00% of the budget. The biggest realization is in the Integrated ICT Infrastructure Services Development for the following works:

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

1. Implementasi *Enterprise Service Bus* (ESB)
2. Peningkatan Keamanan dan Layanan Infrastruktur IT *Disaster Recovery Center* (DRC)
3. Peningkatan Keamanan Data Center

EMPLASEMEN

Realisasi investasi Emplasemen adalah sebesar Rp2,46 miliar atau 41,33% dari anggaran. Realisasi tersebut berupa Penataan Area Dermaga Ketapang I Cabang Pangkalbalam.

INVESTASI NON FISIK

Realisasi Investasi Non Fisik adalah sebesar Rp82,75 miliar atau 32,51% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya berupa pekerjaan:

1. Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak Sistem Informasi
2. Pengembangan dan Implementasi ERP untuk Bidang Keuangan dan Personalia
3. Pengembangan dan Support untuk Layanan ICT

PENYERTAAN MODAL

Realisasi penyertaan modal Perusahaan adalah sebesar Rp200 miliar yang diberikan kepada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI). Dana atas penyertaan modal tersebut diantaranya akan digunakan PT PPI untuk melakukan tambahan setoran modal kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API).

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang dan modal yang dilakukan Perseroan berdasarkan sifatnya terdiri atas investasi yang bertujuan untuk investasi pengembangan dan rutin. Investasi pengembangan bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pelayanan jasa, sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Investasi rutin bertujuan memenuhi minimal requirement, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif.

Selain itu, beberapa investasi yang dilakukan Perseroan turut berperan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 58 tahun 2017. Proyek Strategis Nasional yang akan dilakukan oleh Perusahaan antara lain: Pembangunan Pelabuhan Kijing Kalimantan Barat, Pembangunan Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterways, Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, Pengembangan Pelabuhan Patimban, dan Jalan Tol Cibitung – Cilincing.

1. Implementation of *Enterprise Service Bus* (ESB)
2. Improvement of IT *Disaster Recovery Center* (DRC) Security and Infrastructure Services
3. Improvement of Data Center Security

EMPLACEMENT

The realization of Emplacement investment amounted to Rp2.45 billion or 44.33% of the budget. The realization was in the form of the Pangkalbalam Branch Ketapang I Dock Area Arrangement.

NON-PHYSICAL INVESTMENT

The Non-Physical investment was realized at Rp82.75 billion or 32.51% of the budget. The realization included the following works:

1. Procurement of Information System Software Licenses
2. Development and Implementation of ERP for Finance and Personnel
3. ICT Services Development and Support

EQUITY PARTICIPATION

The Company's equity participation was realized at Rp200 billion, which was granted to PT Pelabuhan Indonesia (PT PPI). The funds obtained from the equity participation will be used by PT PPI to perform additional capital payment to PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API).

PURPOSES OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Based on its nature, the goods and capital investments made by the Company consisting of investments with the purpose of development and routine investments. Development investment aims to increase production capacity and service quality, thereby increasing the productivity of the Company. Routine investment aims to meet minimum requirements, improve work security and safety, and support administrative objectives.

In addition, several investments made by the Company have a role in accelerating the implementation of National Strategic Project (PSN), in accordance with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 58 of 2017. National Strategic Projects to be carried out by the Company include: Construction of Kijing West Kalimantan Port, Development of Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL), Construction of Sorong Seget Port, Patimban Port, and Cibitung – Cilincing Toll Road.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring

INVESTASI

IPC melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan. Informasi mengenai investasi jangka pendek dan jangka panjang IPC disajikan sebagai berikut.

Tabel Investasi

(dalam ribuan Rupiah)

INVESTMENT

IPC makes short-term and long-term investments to improve the Company's profitability and financial performance. Information on IPC's short-term and long-term investments is presented as follows.

Table of Investment

(in thousand Rupiah)

Uraian	Description	2018	2017
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investment		
Deposito berjangka	Time deposits		
Rupiah	Rupiah		
Pihak ketiga	Third parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		372.000.000	
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		50.000.000	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga		17.000.000	
PT Bank Panin Syariah		2.000.000	
PT Bank DKI			80.000.000
Pihak berelasi	Related parties		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		203.053.994	64.518.592
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		4.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			20.000.000
Dolar AS:	US Dollar:		
Pihak ketiga	Third parties		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			5.000.000
Pihak berelasi			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		2.099.745.000	2.682.504.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		796.455.000	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			3.793.440.000
Total deposito berjangka	Total time deposits	3.544.253.994	6.645.462.592
Efek yang diperdagangkan	Securities traded	291.753.295	77.007.997
<i>Negotiable certificate of deposits</i>	<i>Negotiable certificate of deposits</i>		200.000.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual	Available-for-sale financial assets		76.612.109
Total investasi jangka pendek	Total Short-term Investments	3.836.007.289	6.999.082.698
Investasi Jangka Panjang	Long-term Investment		
Investasi pada entitas asosiasi	Investment in associates	2.362.825.278	1.554.888.854
Investasi pada penyertaan saham	Investment in equity participation	524.362.036	-
Investasi pada surat utang	Investment in debt securities	324.550.117	-
Total Invesasi Jangka Panjang	Total Long-term Investments	3.211.737.431	1.554.888.854

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring

EKSPANSI

Selama tahun 2018, IPC tidak melakukan kegiatan ekspansi.

DIVESTASI

Selama tahun 2018, IPC tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2018, IPC tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2018, IPC tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

EXPANSION

In 2018, IPC did not carry out any expansion activities.

DIVESTMENT

In 2018, IPC did not conduct any divestment activities.

ACQUISITION

In 2018, IPC did not conduct any acquisition activities.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

In 2018, IPC did not carry out any debt and capital restructuring activities.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

Target Achievement and Future Target

PENCAPAIAN TARGET

Pencapaian target IPC secara keseluruhan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2018. IPC berhasil melampaui target laba tahun berjalan di tahun 2018 yaitu sebesar 118,33% dan pendapatan operasional lainnya sebesar 101,78%. Meskipun pendapatan operasi sedikit di bawah target yaitu sebesar 97,88% karena tertundanya kerjasama dengan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) dan penurunan trayek RoRo tujuan Panjang-Jakarta karena perbaikan atau perawatan (*docking*). Akan tetapi pendapatan keuangan mampu melampaui target yang sangat signifikan sebesar 249,88% lebih tinggi dibandingkan dengan RKAP tahun 2018. Kedepannya, IPC akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja IPC di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

ACHIEVEMENT OF TARGET

The overall achievement of IPC targets exceeded the targets set out in the 2018 RKAP. IPC managed to surpass the income of the year target in 2018 by 118.33% and other operating revenues by 101.78%. Even though the operating revenues was slightly below the target by Rp97.88% due to the delay in cooperation with PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) and the decline of the Panjang-Jakarta RoRo route due to repairs or maintenance, with the financial revenue exceeding the target by 249.88% compared to the 2018 RKAP. In the future, IPC will continue to implement the established strategies, so that IPC future performance can be sustainably improved.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Comparison of Target and Realization of Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	Pencapaian Achievement
Pendapatan Operasi	Operating Revenues	11.684.763.333	11.436.700.894	97,88%
Pendapatan Konstruksi	Construction Revenues	5.706.000.000	781.658.834	13,70%
Beban Operasi	Operating Expenses	(8.370.150.931)	(8.042.554.820)	96,09%
Beban Konstruksi	Construction Expenses	(5.706.000.000)	(781.658.834)	13,70%
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya-Neto	Other operating income – net	(192.927.334)	(196.360.574)	101,78%
LABA USAHA	INCOME FROM OPERATIONS	3.344.346.369	3.197.785.500	95,62%
Pendapatan Keuangan	Finance Income	275.697.904	688.914.300	249,88%
Beban Keuangan	Finance Expenses	(974.148.131)	(1.130.782.016)	116,08%
Bagian Laba Entitas Asosiasi	Equity in Income of Associates	166.822.951	376.200.594	225,51%
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	2.812.719.093	3.132.118.378	111,36%
Beban Pajak Final	Final Tax Expenses	(585.004.183)	(357.113.222)	61,04%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	2.227.714.910	2.775.005.156	124,57%
Pajak Penghasilan Badan	Corporate Income Tax	(173.477.453)	-	0,00%
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.054.237.457	2.430.709.854	118,33%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi	Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Remeasurement of Defined Benefit Plans	-	32.019.693	-
Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Exchange Differences due to Financial Statements Translation	-	(18.329.765)	-

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

Target Achievement and Future Target

Uraian	Description	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	Pencapaian Achievement
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Change in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	-	(54.279.223)	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.054.237.457	2.390.120.559	116,35%
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:			
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.021.496.979	2.379.261.695	117,70%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	32.740.479	51.448.159	157,14%
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.054.237.457	2.430.709.854	118,33%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:			
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.021.496.979	2.339.484.100	115,73%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	32.740.479	50.636.459	154,66%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.054.237.457	2.079.050.444	101,21%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statements of Financial Position

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	Pencapaian Achievement
ASET	ASSETS			
ASET LANCAR	CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalents	8.873.986.133	18.018.671.479	203,05%
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investments	2.314.912.198	3.836.007.289	165,71%
Piutang Usaha – Neto	Trade Receivables - Net	655.149.164	789.953.354	120,58%
Piutang Lain-Lain – Neto	Other Receivables - Net	75.198.511	649.698.814	863,98%
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka	Advances and Prepaid Expenses	240.301.336	120.068.178	49,97%
Pendapatan Masih Akan Diterima	Accrued Revenues	362.801.748	322.868.072	88,99%
Persediaan	Inventories	58.078.668	59.139.424	101,83%
Pajak Dibayar Di Muka	Prepaid Taxes	612.563.212	751.789.998	122,73%
Aset Lancar Lainnya	Other Current Assets	-	6.139.521	-
Total Aset Lancar	Total Current Assets	13.192.990.971	24.554.336.129	186,12%
ASET TIDAK LANCAR	NON-CURRENT ASSETS			
Investasi Pada Entitas Asosiasi	Investment in Associates	3.527.398.223	3.211.737.431	91,05%
Properti Investasi – Neto	Investment Properties - Net	405.742.546	377.142.447	92,95%
Aset Tetap – Neto	Fixed Assets - Net	14.639.215.896	12.628.997.433	86,27%

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN
Target Achievement and Future Target

Uraian	Description	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	Pencapaian Achievement
Aset Kerjasama Operasi – Neto	Joint Operation Assets - Net	526.775.666	482.390.189	91,57%
Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets	90.996.551	47.498.765	52,20%
Aset Tak Berwujud – Neto	Intangible Assets - Net	14.135.837.293	9.038.949.144	63,94%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak	Estimated Claims for Tax Refund	-	841.931.567	-
Aset Lain-Lain	Other Assets	2.207.829.067	249.893.918	11,32%
Total Aset Tidak Lancar	Total Non-current Assets	35.533.795.243	26.878.540.894	75,64%
TOTAL ASET	TOTAL ASSETS	48.726.786.214	51.432.877.023	105,55%
LIABILITAS	LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK	CURRENT LIABILITIES			
Pinjaman Bank Jangka Pendek	Short-term Bank Loans	-	4.000.000	-
Utang Usaha	Trade Payables	3.304.126.691	1.665.907.713	50,42%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek	Short-term Unearned Revenues	521.159.231	834.098.021	160,05%
Utang Pajak	Taxes Payable	140.936.976	389.495.675	276,36%
Beban Akrua	Accrued Expenses	1.345.291.281	2.290.832.616	170,29%
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	Current Maturities of Long-term Liabilities	85.743.022	38.272.280	44,64%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other Current Liabilities	417.098.596	275.588.175	66,07%
Total Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	5.814.355.795	5.498.194.480	94,56%
LIABILITAS JANGKA PANJANG	NON-CURRENT LIABILITIES			
Utang Obligasi	Bonds Payable	21.320.391.324	22.890.166.969	107,36%
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	Long-term Liabilities – Net of Current Maturities	302.897.477	234.402.238	77,39%
Liabilitas Imbalan Kerja	Employee Benefit Liabilities	1.521.761.099	1.776.917.294	116,77%
Liabilitas Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liabilities	366.046.478	307.846.807	84,10%
Pendapatan Diterima Di Muka	Unearned Revenues	4.677.926.290	4.290.892.916	91,73%
Total Liabilitas Jangka Panjang	Total Non-current Liabilities	28.189.022.668	29.500.226.224	104,65%
TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITIES	34.003.378.463	34.998.420.704	102,93%
EKUITAS	EQUITY			
Modal Dasar – 4,000,000 Saham	Authorized Capital - 4,000,000 Shares			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham	Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	100,00%

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

Target Achievement and Future Target

Uraian	Description	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization 2018	Pencapaian Achievement
Modal Donasi	Donated Capital	26.825.982	26.825.982	100,00%
Tambahan Modal Disetor	Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	100,00%
Saldo Laba	Retained Earnings			
Ditentukan Penggunaannya	Appropriated	11.306.067.337	11.726.994.846	103,72%
Belum Ditentukan Penggunaannya	Unappropriated	2.021.496.979	2.379.261.695	117,70%
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	50.716.015	(112.143.427)	(221,12%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Equity Attributable to Owners of Parent Entity	14.531.537.838	15.147.370.621	104,24%
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	191.869.913	1.287.085.698	670,81%
Total Ekuitas	Total Equity	14.723.407.751	16.434.456.319	111,62%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	48.726.786.214	51.432.877.023	105,55%

PENCAPAIAN ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham IPC adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan 100%. Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menyampaikan surat edaran kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus tahun 2017 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018.

Untuk realisasi tahun 2018, kinerja IPC telah memenuhi aspirasi pemegang saham. Bahkan pencapaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata industri. Rinciannya di sampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Shareholder Aspiration (SHA)

No	Sasaran Keuangan Finance Target	Satuan Unit	Share Holder Aspiration (SHA)	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization	Realisasi 2017 Realization	Keterangan Description
	Main Target		Target				
1.	Sales to Average Asset	%	harus lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan atau lebih tinggi dari RKAP 2018	24,95	23,19	24,07	Tidak Memenuhi Not Met
2.	Debt to Equity Ratio (DER)	x		1,45	1,50	1,55	Memenuhi Met
3.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	%		3,60	3,84	3,55	Memenuhi Met
4.	EBTIDA Margin	%		35,21	36,44	36,90	Memenuhi Met
5.	Net Income Margin	%		17,58	21,25	20,21	Memenuhi Met

PENCAPAIAN ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

IPC's shareholders are the Government of the Republic of Indonesia with 100% ownership. The Ministry of State-Owned Enterprises sent a circular letter to the Board of Directors and Board of Commissioners / BUMN Supervisors through No. S-487/MBU/08/2017 dated August 31, 2017 concerning the Submission of Shareholders / Capital Owners Aspirations for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget in 2018.

For 2018, IPC's performance fulfilled the shareholders' aspirations, better than the previous year and even higher than the industry average. The details are presented in the table below:

Tabel of Shareholder Aspiration (SHA)

No	Sasaran Keuangan Finance Target	Satuan Unit	Share Holder Aspiration (SHA)	RKAP 2018	Realisasi 2018 Realization	Realisasi 2017 Realization	Keterangan Description
	Main Target		Target				
1.	Sales to Average Asset	%	harus lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan atau lebih tinggi dari RKAP 2018	24,95	23,19	24,07	Tidak Memenuhi Not Met
2.	Debt to Equity Ratio (DER)	x		1,45	1,50	1,55	Memenuhi Met
3.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	%		3,60	3,84	3,55	Memenuhi Met
4.	EBTIDA Margin	%		35,21	36,44	36,90	Memenuhi Met
5.	Net Income Margin	%		17,58	21,25	20,21	Memenuhi Met

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN
 Target Achievement and Future Target

No	Sasaran Keuangan <i>Finance Target</i>	Satuan Unit	Share Holder Aspiration (SHA)	RKAP 2018	Realisasi 2018 <i>Realization</i>	Realisasi 2017 <i>Realization</i>	Keterangan <i>Description</i>	
6.	<i>Return on Equity (ROE)</i>	%	The target must be better than the achievement of the previous year and / or higher than the 2018 RKAP	16,42	17,31	18,59	Memenuhi Met	
7.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	%		4,22	4,73	4,67	Memenuhi Met	
8.	<i>Market Share</i>	%		98,91	114,58	111,29	Memenuhi Met	
9.	<i>Current Ratio</i>	x		2,27	4,47	4,69	Memenuhi Met	
10	<i>Operating Cash flow Sales</i>	%		14,00	19,62	18,76	Memenuhi Met	
11	<i>Cash Flow to Debt Ratio</i>	x		0,08	0,04	0,04	Memenuhi Met	
<i>Specific Target</i>								
1	<i>EBTIDA/Interest</i>	%		4,03	3,69	3,78	Tidak Memenuhi Not Met	
2	<i>Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR)</i>	%		44,47	44,07	42,29	Memenuhi Met	
3	<i>Number of Customer Served (Ships)</i>	GT		200.445.020	224.298.619	202.153.652	Memenuhi Met	

Secara umum SHA tahun 2018 memenuhi target. Namun ada 2 (dua) sasaran yang tidak memenuhi target yaitu:

1. *Sales to Average Assets* yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan operasi.
2. *EBTIDA/Interest* yang disebabkan oleh tidak tercapainya serapan investasi yang mengakibatkan tingginya beban bunga Perseroan.

PROYEKSI TARGET KE DEPAN

Perseroan mengajukan RKAP tahun 2019 berdasarkan taksasi tahun 2018 yang berdasar pada Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 dari Kementerian BUMN Nomor: S-564/MBU/08/2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan asumsi sebagai berikut :

Tabel Asumsi Dasar Makro

Indikator <i>Indicators</i>	Asumsi Makro Ekonomi 2019 <i>Macroeconomic Assumptions 2019</i>
Pertumbuhan Ekonomi <i>Economic growth</i>	5,3%
Tingkat Inflasi <i>Inflation rate</i>	3,5%
Kurs Rupiah per USD <i>Exchange rate of Rupiah per USD</i>	Rp15.000

In general, the 2018 SHA met its target. But there were 2 (two) targets that missed the target, namely:

1. *Sales to Average Assets* that was due to not achieving the operating revenue target.
2. *EBTIDA / Interest* due to the failure to achieve investment absorption resulting in the Company's high interest expense.

FUTURE TARGET

The Company proposed the 2019 RKAP based on the 2018 assessment based on Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of Company's 2019 Work Plan and Budget from the Ministry of SOE No: S-564/MBU/08/2018 on August 31, 2018 with the following assumptions :

Table of Macro Basic Assumptions

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

Target Achievement and Future Target

Sumber :

1. <http://www.kemenkeu.go.id/rapbn2019>
2. [https://www.msn.com/id-id/news/other/kurs-rupiah-
rapbn-2019-dipatok-di-rp-15000-per-dolaras/ar-BBOspvH](https://www.msn.com/id-id/news/other/kurs-rupiah-rapbn-2019-dipatok-di-rp-15000-per-dolaras/ar-BBOspvH)

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Perseroan menyusun proyeksi untuk tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Source

1. <http://www.kemenkeu.go.id/rapbn2019>
2. [https://www.msn.com/id-id/news/other/kurs-rupiah-
rapbn-2019-dipatok-di-rp-15000-per-dolaras/ar-BBOspvH](https://www.msn.com/id-id/news/other/kurs-rupiah-rapbn-2019-dipatok-di-rp-15000-per-dolaras/ar-BBOspvH)

Based on the above assumptions, the Company compiled the following 2019 projections.

Tabel Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Projection of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Comprehensive Income

(in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	Proyeksi 2019 Projection 2019
Pendapatan Operasi	Operating Revenues	13.503.396.813
Pendapatan Konstruksi	Construction Revenues	3.100.000.000
Beban Operasi	Operating Expenses	(9.192.912.630)
Beban Konstruksi	Construction Expenses	(3.100.000.000)
Pendapatan Operasi lainnya – neto	Other operating income – net	351.440.730
Beban operasi lainnya	Other Operating Expenses	(634.068.514)
LABA USAHA	INCOME FROM OPERATIONS	4.027.856.400
Pendapatan Keuangan	Finance Income	205.263.438
Beban Keuangan	Finance Expenses	(1.083.511.253)
Bagian Laba Entitas Asosiasi	Equity in Income of Associates	430.529.964
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	3.580.138.548
Beban Pajak Final	Final Tax Expenses	(396.610.176)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	2.610.493.265
Pajak Penghasilan Badan	Corporate Income Tax	(573.035.107)
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.610.493.265
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi	Items that will not be reclassified to profit or loss	-
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Remeasurement of Defined Benefit Plans	-
Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	Items that will be reclassified to profit or loss	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Exchange Differences due to Financial Statements Translation	(12.820.162)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Change in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	(1.675.338)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.595.997.766
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:	
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.507.991.620

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN
 Target Achievement and Future Target

Uraian	Description	Proyeksi 2019 Projection 2019
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	102.501.645
LABA TAHUN BERJALAN	INCOME FOR THE YEAR	2.610.493.265
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:	
Pemilik Entitas Induk	Owners of Parent Entity	2.493.496.120
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	102.501.645
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	2.595.997.766

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
 (dalam Ribuan Rupiah)

Table of Projections of Consolidated Statements of Financial Position
 (in Thousand Rupiah)

Uraian	Description	Proyeksi 2019 Projection 2019
ASET	ASSET	
ASET LANCAR	CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalents	10.346.942.577
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investments	4.045.454.205
Piutang Usaha – Neto	Trade Receivables - Net	888.174.380
Piutang Lain-Lain – Neto	Other Receivables - Net	1.025.787.074
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka	Advances and Prepaid Expenses	143.080.380
Pendapatan Masih Akan Diterima	Accrued Revenues	410.811.251
Persediaan	Inventories	72.565.193
Pajak Dibayar Di Muka	Prepaid Taxes	853.252.953
Total Aset Lancar	Total Current Assets	17.786.068.014
ASET TIDAK LANCAR	NON-CURRENT ASSETS	
Investasi Pada Entitas Asosiasi	Investment in Associates	6.445.590.196
Properti Investasi – Neto	Investment Properties - Net	354.643.022
Aset Tetap – Neto	Fixed Assets - Net	14.186.968.812
Aset Kerjasama Operasi – Neto	Joint Operation Assets - Net	510.465.923
Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets	43.316.202
Aset Tak Berwujud – Neto	Intangible Assets - Net	13.250.501.341
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak	Estimated Claims for Tax Refund	1.161.410.631
Aset Lain-Lain	Other Assets	426.080.880
Total Aset Tidak Lancar	Total Non-current Assets	36.378.977.008
TOTAL ASET	TOTAL ASSETS	54.165.045.021

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

Target Achievement and Future Target

Uraian	Description	Proyeksi 2019 Projection 2019
LIABILITAS	LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	CURRENT LIABILITIES	
Utang Usaha	Trade Payables	2.025.609.364
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek	Short-term Unearned Revenues	1.542.107.299
Utang Pajak	Taxes Payable	459.375.839
Beban Akrual	Accrued Expenses	2.825.289.647
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	Current Maturities of Long-term Liabilities	54.405.122
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other Current Liabilities	223.135.830
Total Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	7.129.923.101
LIABILITAS JANGKA PANJANG	NON-CURRENT LIABILITIES	
Utang Obligasi	Bonds Payable	22.939.011.556
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	Long-term Liabilities – Net of Current Maturities	325.617.105
Liabilitas Imbalan Kerja	Employee Benefit Liabilities	1.871.526.550
Liabilitas Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liabilities	429.963.034
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	Long-term Unearned Revenues	3.979.214.285
Total Liabilitas Jangka Panjang	Total Non-current Liabilities	29.545.332.530
TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITIES	36.675.255.631
EKUITAS	EQUITY	
Modal Dasar – 4,000,000 Saham	Authorized Capital - 4,000,000 Shares	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham	Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000
Modal Donasi	Donated Capital	26.825.982
Tambahan Modal Disetor	Additional Paid-in Capital	(317.597.475)
Saldo Laba	Retained Earnings	
Ditentukan Penggunaannya	Appropriated	13.215.103.513
Belum Ditentukan Penggunaannya	Unappropriated	2.507.991.620
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	(193.167.373)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Equity Attributable to Owners of Parent Entity	16.683.185.268
Kepentingan Non Pengendali	Non-controlling Interests	806.604.122
Total Ekuitas	Total Equity	17.489.789.390
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	54.165.045.021

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts After the Audit Report Date

Terdapat pergantian Direksi dengan tanggal dan SK Pengangkatan sebagai berikut.

There were changes to the Board of Directors with the dates and Appointment Decrees as follows.

Tabel Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts After the Audit Report Date

Direksi Director	No SK Pengangkatan/Pemberhentian Appointment / Dismissal SK No.	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Direktur Lama Previous Director	Direktur Baru New Director
Riry Syeried Jetta	SK-04/MBU/01/2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) SK-04/MBU/01/2019 concerning Dismissal of Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	04 Januari 2019 January 4, 2019	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan Director of Corporate Business Transformation and Development	-
Saptono R Ironto	SK-80/MBU/04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) SK-80/MBU/04/2019 concerning Dismissal and Appointment of Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	08 April 2019 April 8, 2019	Direktur Komersial Commercial Director	-
Arif Suhartono	SK-80/MBU/04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) SK-80/MBU/04/2019 concerning Dismissal and Appointment of Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	08 April 2019 April 8, 2019	-	Direktur Komersial Commercial Director
Ogi Rulino	SK-80/MBU/04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) SK-80/MBU/04/2019 concerning Dismissal and Appointment of Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	08 April 2019 April 8, 2019	-	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan Director of Corporate Business Transformation and Development

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-295/MBU/11/2018 pada tanggal 26 November 2018, terkait perubahan nomenklatur jabatan *Board of Director*. Maka struktur organisasi IPC mengalami perubahan kembali, dengan perubahan terakhir yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan No. OT.01.03/7/11/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 07 Januari 2019. Adapun perihal susunan struktur organisasi Perseroan diuraikan di bawah ini:

As a follow up to the Ministry of SOEs Decree No. SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018, concerning changes in the position nomenclature of the Board of Directors, the IPC organizational structure changed, with the latest changes determined through the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No OT.01.03/7/11/PSO/UT/PI.II-19 dated January 7, 2019. The Company's organizational structure is described below:

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts After the Audit Report Date

Tabel Susunan Struktur Organisasi

Organizational Structure

Direktorat <i>Directorate</i>	Divisi <i>Division</i>
Direktorat Utama <i>Main Directorate</i>	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Perencanaan Strategi Korporasi. Corporate Secretariat Division, Internal Audit Unit Division, and Corporate Strategy Planning Division.
Direktorat Komersial <i>Directorate of Commercial</i>	Divisi Pemasaran, Divisi Manajemen Aset dan Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan. Marketing Division, Asset Management Division, and Business Alliance and Customer Relations Division
Direktorat Teknik <i>Directorate of Engineering</i>	Divisi Konstruksi Sipil, Divisi Peralatan dan Divisi Manajemen Proyek Strategis. Civil Construction Division, Equipment Division, and Strategic Project Management Division.
Direktorat Operasi <i>Directorate of Operations</i>	Divisi Pelayanan Kapal, Divisi Pelayanan Terminal dan Divisi Sistem Informasi. Ship Services Division, Terminal Services Division, and Information System Division.
Direktorat Keuangan <i>Directorate of Finance</i>	Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, Divisi Pengelolaan Keuangan, Divisi Layanan Keuangan dan Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang. Financial Planning and Control Division, Financial Management Division, Financial Services Division, and Subsidiary and Branch Management Division.
Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Directorate of Human Resources</i>	Divisi Strategi SDM, Divisi Pembelajaran SDM, Divisi Layanan SDM, Divisi Hukum dan Divisi Pengadaan. HR Strategy Division, HR Learning Division, HR Services Division, Legal Division, and Procurement Division.
Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Directorate of Business Transformation and Development</i>	Divisi Transformasi dan Pengembangan Bisnis, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kendali Mutu. Business Transformation and Development Division, Risk Management Division, and Quality Control Division.

Tidak terdapat informasi kuantitatif yang signifikan terhadap kinerja dan risiko usaha IPC di masa yang akan datang atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode Laporan Akuntan.

There was no significant quantitative impact on IPC's performance and risks of the IPC business due to events that occurred after the date of the Audit Report.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Selama tahun 2018 IPC tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

During 2018, IPC did not have any reported financial information containing extraordinary and rare events

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Impact of Price Changes on Sales or Net Income of The Company

Selama tahun 2018 IPC tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perseroan.

During 2018 IPC was not significantly affected by changes in sales prices or net income of the company.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Substantial Components of Other Income And Expenses

Selama tahun 2018 tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

During 2018 there were no components of other income and expenses whose value was equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Material Increases / Decreases In Sales / Net Income

Selama tahun 2018 tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

During 2018 there were no material increases / decreases in net sales / revenues.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dividend Policy, Announcement and Payment

KEBIJAKAN DIVIDEN

IPC melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai dengan PMK No. 05/PMK,02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham, Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) IPC yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha IPC.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 03 April 2018 menetapkan penyetoran dividen sebesar Rp653.968.051.800 untuk kinerja keuangan tahun buku 2017. Pembayaran dividen tahun buku 2017 dilakukan pada tanggal 30 April 2018, adapun untuk kinerja keuangan tahun buku 2018 akan diputuskan pada RUPS tahun 2019.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2017

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

Penggunaan laba neto konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp653.968.052.
- Penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.525.925.454.

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 April 2018.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2016

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

Penggunaan laba neto konsolidasian Perseroan tahun buku

DIVIDEND POLICY

IPC carries out dividend payment every year based on the resolution of General Meeting of Shareholders (GMS), In accordance with PMK No. 05/PMK,02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenues from dividend, dividend payment is made no later than 1 (one) month after dividend is determined by Shareholders, the amount of dividend determined is equal to a certain percentage of IPC's net income (after tax) attributable to Shareholders. The dividend policy is based on meeting the interests of the Shareholders and the IPC business development plan.

DIVIDEND ANNOUNCEMENT AND PAYMENT

Based on the Resolution of General Meeting of Shareholders on April 3, 2018, established the payment of dividend amounting to Rp653,968,051,800 for financial performance of fiscal year 2017. The payment of 2017 fiscal year dividend will be conducted on April 30, 2018, while the financial performance of fiscal year 2018 will be decided at the 2019 GMS.

DIVIDEND 2017

Based on the the Company's General Meeting of Shareholders that has been notarized in the Minutes of the Company's General Meeting of Shareholders No. 02 dated April 3, 2018 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., the Company's shareholders agreed on, among others:

The use of the Company's consolidated net income for the fiscal year 2017 as follows:

- Distribution of cash dividend amounting to 30% of net income or Rp653,968,052.
- Determination of reserves amounting to 70% of net income or Rp1,525,925,454.

The Company has carried out the payment of dividend mentioned above on April 30, 2018.

DIVIDEND 2016

Based on the Company's General Meeting of Shareholders that has been notarized in the Minutes of the Company's General Meeting of Shareholders No. 02 dated May 8, 2017 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., the Company's shareholders agreed on, among others:

The use of the Company's consolidated net income for the

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
 Dividend Policy, Announcement and Payment

2016 sebagai berikut:

- a. Pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp453.438.000.000.
- b. Penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.058.021.775.000.

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 06 Juni 2017.

fiscal year 2016 as follows:

- a. Distribution of cash dividend amounting to 30% of net profit or Rp453,438,000,000.
- b. Determination of reserves amounting to 70% of net income or Rp1,058,021,775,000.

The Company has carried out the payment of dividend mentioned above on June 6, 2017.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Table of Dividend Announcement and Payment

Uraian <i>Description</i>	Tahun Buku 2017 <i>Fiscal Year 2017</i>	Tahun Buku 2016 <i>Fiscal Year 2016</i>	Tahun Buku 2015 <i>Fiscal Year 2015</i>
Laba Bersih setelah Pajak (dalam Ribuan Rupiah) Net Income after Tax (in Thousand Rupiah)	2.179.893.506.000	1.511.459.775.000	1.328.335.292.000
Jumlah Dividen (dalam Rupiah penuh) Amount of Dividend (in full Rupiah)	653.968.051.800	453.438.000.000	371.934.000.000
Rasio Dividen (<i>Payout Ratio</i>) Dividend Ratio (<i>Payout Ratio</i>)	30%	30%	28%
Jumlah saham (dalam lembar) Number of shares (in sheets)	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Dividen per Saham (dalam Rupiah Penuh) Dividend per Share (in Full Rupiah)	453	314	258
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	03 April 2018 April 03, 2018	08 Mei 2017 May 08, 2017	17 Mei 2016 May 17, 2016
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	30 April 2018 April 30, 2018	06 Juni 2017 June 06, 2017	15 Juni 2016 June 15, 2016

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Employee and Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2018, sesuai dengan karakteristik IPC yang 100% dimiliki oleh Pemerintah maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) di IPC. Dengan demikian tidak terdapat informasi program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

As of December 31, 2018, according to the characteristics of IPC which is 100% owned by the Government, there was no employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP) carried out by the Company in IPC. As such, does not have any information regarding employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP) such as the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, employee requirements and/or eligible management and exercise prices.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak melakukan penerbitan saham untuk publik sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Meskipun demikian, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan dua seri *global bond* dengan nilai total USD1,6 miliar. Seri pertama *global bond* tersebut bernilai USD1,1 miliar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 tahun atau pada tahun 2025, dengan bunga 4,25% dan *yield* 4,375%. Sementara seri kedua bernilai USD500 juta dengan jangka waktu 30 tahun atau jatuh tempo pada tahun 2045, dengan bunga 5,375 persen dan *yield* 5,5%.

Berdasarkan surat perjanjian tanggal 5 Mei 2015 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran, Agen Transfer dan Panitera, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak disyaratkan untuk melaporkan penggunaan dana tersebut.

Realisasi penggunaan dana obligasi yang diperoleh digunakan untuk pelunasan utang sindikasi 7 (tujuh) bank, juga untuk keperluan proyek strategis seperti Proyek Terminal Peti kemas Kalibaru (New Priok), Proyek Pelabuhan Kijing sebagaimana yang telah disebutkan pada *offering circular*. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk Proyek Cikarang Bekasi Laut Waterway serta untuk *capital expenditure* lainnya. Selain itu penggunaan dana obligasi juga ditujukan untuk modal kerja IPC.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has not issued its shares for the public, hence information about the realization of the use of proceeds from public offering is not available for disclosure in this annual report.

However, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has issued two series of global bonds with a total value of USD1.6 billion. The first global bond series was worth USD1.1 billion that will mature in 10 years or in 2025, with an interest rate of 4.25% and yield rate of 4.375%. The other series is worth USD500 million that will mature in 30 years or in 2045, with an interest rate of 5.375% and a yielding rate of 5.5%.

Based on the letter of agreement dated May 5, 2015 between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Bank of New York Mellon as Trustee Agency, Payment Agency, Transfer Agency and Registrar, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not required to report the use of the funds.

The proceeds from the bonds were used for the repayment of loan from 7 (seven) syndicated banks, and for the development of strategic projects such as Kalibaru Container Terminal (New Priok), Kijing Port as mentioned in the offering circular. In addition, the proceeds were also used for Cikarang Bekasi Laut Waterway Project and for other capital expenditure. Some of the proceeds will be allocated as working capital.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.

Sepanjang tahun 2018 IPC tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

NAMA PIHAK DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	Jasa Konsesi Concession Services

CONFLICT OF INTEREST/AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS

Conflict of Interest is the difference between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, or major shareholders that may harm the Company.

Throughout 2018, IPC did not have any material transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

In normal business activities, the Business Group enters into transactions with related parties. The entity is considered to be related if the entity, among others, either directly or indirectly, can control or jointly control, or has a significant influence on the Business Group in financial and operational decision making. The entity is also considered to be related if the entity is under common control with the Business Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the Company's shareholder. All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and entities where the Government of the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

NAME OF RELATED PARTIES AND NATURE OF RELATIONSHIP

A summary of the nature of relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Table of Transaction Related Parties

INFORMASITRANSAKSIMATERIALYANGMENGANDUNGBENTURANKEPENTINGANDAN/ATAUTRANSAKSIDENGANPIHAKAFILIASI
 Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Entity having relationship with the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman Banking Services and Loans
	PT Bank BNI Syariah	Jasa Perbankan dan Pinjaman Banking Services and Loans
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman Banking Services and Loans
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Timah	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Semen Padang	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Industri Kereta Api (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	Perum BULOG	Penjualan jasa Sales of Services
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services	
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services	

INFORMASITRANSAKSIMATERIALYANGMENGANDUNGBENTURANKEPENTINGANDAN/ATAUTRANSAKSIDENGANPIHAKAFILIASI
 Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales of Services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales of Services
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa Sales of Services
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pupuk Sriwidjaja	Penjualan jasa Sales of Services
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Adhi Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction Services
	PT BNI Life Insurance	Jasa pension Pension Services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension Pension Services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman Loans

INFORMASITRANSAKSIMATERIALYANGMENGANDUNGBENTURANKEPENTINGANDAN/ATAUTRANSAKSIDENGANPIHAKAFILIASI
 Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Entitas Asosiasi Associates	JICT	Sewa dan Royalti Rental and Royalty
	NPCT1	Investasi Investment
Operasi Bersama Joint Operations	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

KEWAJARAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Perseroan serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

REALISASI TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Description	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>		31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>	
		Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas	Cash and cash equivalents				
Bank	Bank				
Rupiah	Rupiah	2.486.847.153	4,88	2.405.463.893	5,13
Dolar AS	US dollar	63.895.201	0,13	1.434.663.697	3,06
Euro	Euro	320.652	0,00	908.511	0,01
Deposito Berjangka	Time Deposit				
Rupiah	Rupiah	2.378.010.277	4,62	1.444.793.912	2,76
Dolar AS	US dollar	8.705.884.489	16,92	3.354.872.273	7,14
Dolar Singapura	Singapore Dollar	471.954.525	0,92	447.540.715	0,96
Investasi Jangka Pendek	Short-term Investment				
Deposito berjangka	Time Deposit	3.103.253.994	6,03	6.560.462.592	13,94

FAIRNESS AND REASONS OF TRANSACTIONS

Transactions with related parties were carried out fairly in accordance with the interests of the Company (*Arm's Length Transaction*). Transactions have been carried out in accordance with the laws and regulations and were free from conflicts of interest.

REASONS FOR TRANSACTIONS

All transactions with related parties are carried out on the basis of reasons for the Company's business needs and are intended to improve the Company's performance.

REALIZATION OF TRANSACTION

Details of significant account with related parties (government, government entities or otherwise stated) are as follows.

Table of Realization of Related Party Transaction

(in thousand Rupiah).

INFORMASITRANSAKSIMATERIALYANGMENGANDUNGBENTURANKEPENTINGANDAN/ATAUTRANSAKSIDENGANPIHAKAFILIASI
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Uraian	Description	31 Desember 2018 December 31, 2018		31 Desember 2017 December 31, 2017	
		Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Negotiable certificate of deposits	Negotiable certificate of deposits	-	-	200.000.000	0,42
Piutang Usaha	Trade Receivables	155.875.322	0,68	149.599.560	0,35
Piutang Lain-lain	Other Receivables	640.168.731	1,23	738.312.346	1,57
Pendapatan Masih Akan Diterima	Accrued Revenues	17.001.727	0,03	26.573.499	0,05
Utang Usaha	Trade Payables	1.261.214.247	3,61	999.183.968	3,11
Uang untuk diperhitungkan	Advances from customers	1.028.107	0,00	3.720.117	0,00
Uang titipan pelanggan	Deposits from customers	14.748.481	0,04	16.659.416	0,03
Liabilitas jangka pendek lainnya dan Liabilitas jangka panjang lainnya	Other short-term liabilities and other long-term liabilities	38.272.280	0,11	54.127.289	0,12
Utang bank Jangka Panjang	Long-term bank loans	-	0,00	1.860.603	0,01

Rincian pihak-pihak berelasi untuk tiap-tiap transaksi pihak berelasi telah disajikan secara rinci dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018.

Details of related parties for each related party transaction are presented in detail in the Financial Statements for Fiscal Year 2018.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIU TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme revidu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di revidu oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

POLICY ON TRANSACTION REVIEW MECHANISM

All transactions with related parties must go through a review mechanism as determined by the Company. All significant transactions and balances with related parties are carried out following normal and reasonable terms. Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as transactions conducted with unrelated parties. The requirements and conditions of related party transactions are generally carried out similar to those with third parties, and are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi.

FULFILMENT OF RELATED REGULATIONS

In 2018, there was no violation of laws and regulations related to transactions related parties.

ASPEK PERPAJAKAN

Taxation Aspect

PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

IPC dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, dimana hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAYARAN PAJAK

Total Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan periode Januari sampai dengan Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP

(dalam miliar Rupiah)

Uraian Pajak	Tax Description	Tahun 2018 2018 Year	Tahun 2017 2017 Year
Kontribusi Pajak	Tax Contribution		
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29	Deposit of Income Tax Article 25 and Article 29	126,00	114,43
Penyetoran PPN + PPN Impor + PPN WAPU	Deposit of VAT + Import VAT + WAPU VAT	623,35	362,33
Penyetoran PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 (2), PPh 26	Deposit of Income Tax 21, Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	371,10	275,80
Penyetoran Pajak Lainnya (termasuk PBB)	Deposit of Other Taxes (including United Nations)	43,67	23,39
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Non-Tax State Revenues (PNBP)		
Pandu dan Tunda	Pilotage and Towage	41,85	39,53
Konsesi	Concession	221,99	198,98
Total		2.0819,94	1.467,90

Pembayaran PPh untuk realisasi tahun 2018 terealisasi sebesar Rp371,10 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp275,80 miliar, sejalan dengan meningkatnya PPh Pasal 21 yang dikarenakan adanya penyesuaian remunerasi dan pembayaran bonus pegawai dan PPh 23 yang sejalan dengan meningkatnya beban operasi KSMU (Kerja Sama Mitra Usaha)

Pajak lainnya terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp2,06 miliar dan PBB sebesar Rp41,61 miliar. Pembayaran PNBP Pandu Tunda untuk realisasi tahun 2017 merupakan pembayaran sampai dengan periode Desember 2017 dan pembayaran untuk realisasi tahun 2018 sampai dengan periode Desember 2018 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pembayaran konsesi untuk realisasi tahun 2017 merupakan pembayaran atas beban konsesi periode Triwulan IV tahun 2016 dan Triwulan I, II, III tahun 2017, untuk realisasi tahun 2018 merupakan pembayaran atas beban konsesi periode Triwulan IV tahun 2017 dan Triwulan I, II, III tahun 2018.

TAX PAYMENT PUBLICATION

In its operational activities, IPC has implemented good corporate governance in a transparent and accountable manner, especially in managing its tax rights and obligations, where its tax rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations.

TAX PAYMENT

Total Tax Payment and Non-Tax State Revenues for the period of January to December 2018, is as follows,

Table of Tax and PNBP Payment

(in billion Rupiah)

The Income Tax payment for 2018 was realized at Rp371.10 billion, higher than the realization in 2017 of Rp275.80 billion, in line with the increase in Income Tax Article 21 due to adjustments in employee remuneration and bonus payments and Income Tax 23 that was in line with the increased operating expenses of KSMU (Partnership)

Other taxes consist of Income Tax Article 22 amounting to Rp2.06 billion and the United Nations amounting to Rp41.61 billion. The realization of payment for Pandu Tunda PNBP in 2017 represents the payment up to the period of December 2017 and the realization of payment in 2018 to December 2018 was according to Government Regulation No: 11 of 2015 concerning the types and rates of PNBP applicable to the Ministry of Transportation.

Concession payment for realization in 2017 represent payment for concession fee for the fourth quarter of 2016 and the first, second, and third quarter of 2017, for realization in 2018 represent payment for concession fee for the fourth quarter of 2017 and the first, second and third quarter of 2018

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Regulatory changes and the impact

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Table of Regulatory Changes

<i>Nama Peraturan Perundang-Undangan Name of Law and Regulation</i>	Dampak Perubahan Peraturan Perundang-Undangan pada IPC <i>Impact of Changes in Law and Regulation on IPC</i>
Peraturan menteri Perhubungan republik Indonesia nomor Pm 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Perhubungan nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan regulation of the minister of Transportation of the republic of Indonesia no. Pm 76 of 2018 concerning second amendment to regulation of the minister of Transportation regulation no. Pm 36 of 2012 concerning organization and Work Procedure of Port authority and Port authority office	Perubahan peraturan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap IPC. This regulation changes have no significant impact on IPC.
Peraturan menteri Perhubungan republik Indonesia nomor Pm 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan menteri Perhubungan nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan regulation of the minister of Transportation of the republic of Indonesia no. Pm 77 of 2018 regarding Third amendment to regulation of the minister of Transportation no. Km 62 of 2010 concerning organization and Work Procedure of Port operator unit offices	Perubahan peraturan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap IPC. This regulation changes have no significant impact on IPC.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes in Accounting Policy

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BARU

ALASAN PENERAPAN

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku dalam tahun berjalan. IPC telah menerapkan sejumlah amandemen/PSAK baru yang relevan dengan operasinya.

PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN DAMPAKNYA

Efektif tanggal 1 Januari 2018, IPC menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap IPC berikut ini:

APPLICATION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS

REASONS OF APPLICATION

The application of financial accounting standards is carried out to comply with the prevailing PSAK in the current year. IPC has applied a number of PSAK/amendments that are relevant to its operations.

CHANGES OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND THE IMPACT

Effective from January 1, 2018, IPC applied several new accounting standards that are relevant to IPC as follows:

Tabel Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Table of Changes in New Financial Accounting Standards

Penerapan Standar Akuntansi Baru <i>Application of New Accounting Standards</i>	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Baru pada IPC <i>Impact of Application of New Accounting Standards on IPC</i>				
Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan Amendment to PSAK 2: Cash Flows Report on Disclosure Initiatives.	Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut. Changes to liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flows statement are as follows Tabel Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan Pada Laporan Arus Kas Konsolidasian Changes to Liabilities arising from Funding Activities in the Consolidated Cash Flow Statement (dalam ribuan Rupiah) (in thousands of Rupiah)				
	Non Arus Kas <i>Non Cash Flow</i>				
Uraian <i>Description</i>	1 Januari 2018 <i>January 1, 2018</i>	Arus kas <i>Cash Flow</i>	Selisih kurs <i>Exchange Rate Gap</i>	Lainnya <i>Others</i>	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	-	4.000.000	-	-	4.000.000
Utang bank Bank Payables	1.860.603	(1.860.603)	-	-	-
Utang obligasi Bonds Payables	21.376.332.500	-	1.513.834.469	-	22.890.166.969
Dividen Dividends	-	(653.968.052)	-	-	(653.968.052)
Total	21.378.193.103	(651.828.655)	1.513.834.469	-	22.240.198.917
Amandemen PSAK 13 - Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi. Amendment to PSAK 13 - Investment Properties: Transfer of Investment Properties.	Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian This application did not have a significant impact on financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements				
Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi. Amendment to PSAK 13 - Investment Properties: Transfer of Investment Properties.	Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian This application did not have a significant impact on financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements				

PERUBAHAN PERATURAN
Regulatory changes and the impact

Penerapan Standar Akuntansi Baru <i>Application of New Accounting Standards</i>	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Baru pada IPC <i>Impact of Application of New Accounting Standards on IPC</i>					
PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. PSAK 15 (2017 Adjustment): Investment in Associates and Joint Ventures.	Tabel Perubahan Investasi Pada Entitas Asosiasi					
	Changes in Investment in Associated Entities					
	(dalam ribuan Rupiah) (in thousands of Rupiah)					
	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>					
	Uraian <i>Description</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage Ownership</i>	Harga Perolehan <i>Acquisition cost</i>	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi <i>Accumulated portion of profit (loss) of Associated Entities</i>	Penghasilan Kompre-hensif Lain <i>Other Com-pre-hensive Income</i>	Nilai Tercatat <i>Recorded</i>
	Metode ekuitas <i>Equity method</i>					
	Dimiliki melalui Perusahaan <i>Owned through the Company</i>					
	JICT	48,90%	108.289.248	1.098.225.725	425.454.856	1.631.969.829
	TPI	25,00%	37.500.000	(4.198.798)	-	33.301.202
	Dimiliki melalui API <i>Owned via API</i>					
CTP	45,00%	436.255.820	12.550.371	-	448.806.191	
Dimiliki melalui IPC TPK <i>Owned through IPC TPK</i>						
NPCT1	51,00%	173.770.056	41.145.336	33.832.664	248.748.056	
Total		755.815.124	1.147.722.634	459.287.520	2.362.825.278	

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

These applications did not have a significant impact on financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

Selama tahun 2018, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi sehingga tidak terdapat dampak atas perubahan kebijakan akuntansi.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND THE IMPACT

In 2018, there were no changes in accounting policies, hence there was no impact of changes in accounting policies.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Soundness Level of the Company

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat 3 (tiga) aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional manajemen Perseroan menggunakan indikator-indikator berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) Tahun 2015 No. SEKTAP.02/09/ PI. I, II, III, dan IV/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Indikator *Key Performance Indicators* (KPI), asumsi-asumsi yang digunakan dalam Penyusunan RJPP Tahun 2015-2019 dan Indikator aspek operasional Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2018 sebagai berikut:

1. *Waiting time for pilot*
2. Tingkat efektivitas tambatan peti kemas
3. Produktivitas Bongkar muat peti kemas
4. Produktivitas Bongkar muat curah kering
5. *Yard occupancy ratio* peti kemas

Pursuant to the Minister of SOE Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the assessment of soundness level of State-Owned Enterprises, there are 3 (three) assessment aspects: financial, operational and administrative aspects. For financial and administrative aspects, the indicators are determined in the Minister of SOE Decree No. KEP-100/MBU/2002, while for operational aspect, the Company's management uses the indicators based on the Minutes of Joint Agreement of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) of 2015 No. SEKTAP.07/10/PI. I, II, III, & IV/2016 dated September 2, 2016 on Key Performance Indicators (KPI), assumptions used in the Preparation of 2015-2019 RJPP and Operational Aspect indicators of Corporate Soundness Level of 2018 as follows:

1. *Waiting time for pilots*
2. Container Mooring Effectiveness level
3. Container Loading/Unloading Productivity
4. Dry bulk Container Loading/Unloading Productivity
5. Container Yard Occupancy Ratio.

Tabel Realisasi Tingkat Kesehatan Perseroan

Table of Realization of Company's Soundness Level

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weighted</i>	2018	
				Nilai <i>Value</i>	Skor <i>Score</i>
I.	ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT				
	Return on Equity (ROE)	%	15,00	17,31%	15,00
	Return on Investmen (ROI)	%	10,00	11,15%	6,00
	Rasio Kas Cash Ratio	%	3,00	397,49%	3,00
	Rasio Lancar Current Ratio	%	4,00	446,59%	4,00
	Collection Period	Hari Days	4,00	26	4,00
	Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Hari Days	4,00	2	4,00
	Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	%	4,00	27,32%	1,00
	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	%	6,00	31,95%	6,00
	SKOR UNTUK ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT SCORE		50,00	44,00	43,00
II.	ASPEK OPERASIONAL OPERATIONAL ASPECT				
	Waiting Time For Pilot	Jam Hours	7,00	BS (0,26)	7,00

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Soundness Level of the Company

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weighted</i>	2018	
				Nilai <i>Value</i>	Skor <i>Score</i>
	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti kemas Container Mooring Effectiveness	%	7,00	BS (68,65)	7,00
	Produktivitas Bongkar muat Peti kemas Loading/Unloading Container Productivity	B/S/H	7,00	BS (48,73)	7,00
	Yard Occupancy Ratio Peti kemas Container Yard Occupancy Ratio	%	7,00	BS (44,07)	7,00
	SKOR UNTUK ASPEK OPERASIONAL SCORE FOR OPERATIONAL ASPECT		35,00		35,00
III.	ASPEK ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE ASPECT				
	Laporan Perhitungan Tahunan Annual Calculation Report	Bulan Months	3	< 4	3,00
	Rancangan RKAP RKAP Draft	bulan Months	3	< 2	3,00
	Laporan Periodik Periodic Report	Tanggal Date	3	≤ 0	3,00
	Efektivitas Penyaluran Dana Fund Distribution Effectiveness	%	3	2,89%	0,00
	Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman Loan Collectibility Rate	%	3	26,78%	1,00
	SKOR UNTUK ASPEK ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE ASPECT SCORE		15		10,00
	TOTAL SKOR TOTAL SCORE		100.00		88.00
	KETERANGAN REMARK				AA (SEHAT)

Secara keseluruhan realisasi skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar 88,00 dengan kualifikasi AA dan SEHAT.

Overall the realization of the Company's soundness level score in 2018 was 88.00 with AA and HEALTHY qualification.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Kelangsungan usaha Perseroan tidak menghadapi risiko yang signifikan. Perubahan kondisi di industri kepelabuhanan dapat diakomodir dengan baik oleh Perseroan dengan melakukan berbagai inisiatif strategi yang tepat, sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dengan baik.

ASESMEN MANAJEMEN

Manajemen IPC telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa IPC memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen IPC tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan IPC untuk melanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Posisi Perseroan dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.
2. Pangsa Pasar peti kemas sebesar 77% dan non peti kemas sebesar 50% dibandingkan dengan kompetitor yang ada di wilayah kerja Pelabuhan IPC.
3. Trend dan peluang di Industri Kepelabuhanan.
4. Kondisi Keuangan yang baik dengan profitabilitas pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp2,43 triliun.
5. Tingkat kesehatan Perseroan dengan kualifikasi AA dan SEHAT.

MATTERS POTENTIALLY INFLUENCING BUSINESS CONTINUITY

The Company's business continuity does not face significant risks. Changes in conditions in the port industry are well accommodated by the Company by carrying out appropriate strategy initiatives, so that the Company's business continuity can be maintained properly.

MANAGEMENT ASSESSMENT

IPC management has assessed the Company's ability to continue its business and believes that IPC has the resources to continue its business in the future. In addition, IPC management does not see any material uncertainty that could raise significant doubts about the ability of IPC to continue its business.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT FOR THE ASSESSMENT

Some factors that are considered by management in conducting the assessment on business continuity are as follows:

1. The position of the Company in a good industry in the regional arena, which makes a major contribution to the country's economy.
2. Container market share of 77% and non container share of 50% compared to competitors in the IPC Port working area.
3. Trends and opportunities in the Port Industry.
4. Good financial conditions with profitability for the current year of Rp2.43 trillion.
5. The Company's health level at AA with a HEALTHY qualification.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

IPC MEMANDANG BAHWA PENERAPAN GCG BUKAN SEKADAR MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH REGULATOR. OLEH KARENA ITU, IPC TELAH BERKOMITMEN UNTUK MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GCG. HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN CAPAIAN ASSESSMENT PENERAPAN GCG IPC PADA TAHUN BUKU 2018 MENCAPAI 98,30 YANG MENINGKAT DARI TAHUN BUKU SEBELUMNYA DENGAN SKOR 96,37. KENAIKAN INI SECARA UMUM DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN WUJUD KOMITMEN IPC DALAM PENERAPAN GCG.

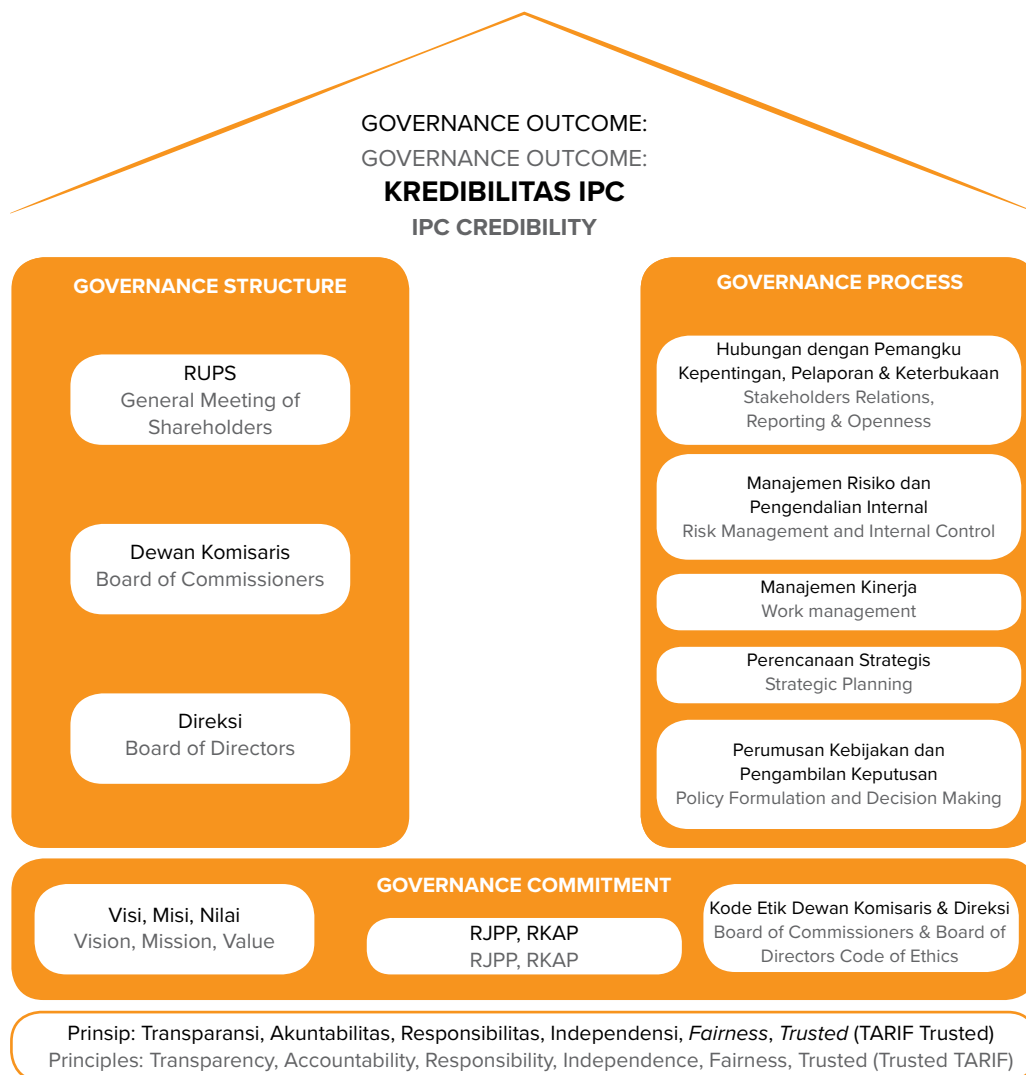
IPC's view is that the application of GCG is not merely to comply with the provisions set by the Regulator. Therefore, IPC has committed to implementing GCG principles, and this effort was evidenced by IPC's GCG in 2018 being assessed with a score of 98.30, an increase from 96.37 the previous year. This increase was generally due to the increase in IPC's commitment in implementing GCG.





KERANGKA PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Application Framework



Kerangka kerja tata kelola IPC memuat lima elemen pokok:

1. *Governance Principles* yaitu prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di IPC;
2. *Governance Commitment* yakni wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi (*board*) dan satuan kerja untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola IPC yang termuat dalam visi, misi, *values*, *code of etics* dan menjadi rujukan dalam menyusun RJPP dan RKAP;
3. *Governance Structure* yakni organ internal dan eksternal IPC yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas IPC dan pengawasan terhadap IPC;
4. *Governance Process* yakni serangkaian standar an prosedur yang digunakan oleh organ dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPC dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan;
5. *Governance Outcome* yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG IPC terhadap *stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

The IPC governance framework contains five key elements:

1. *Governance Principles, the principles underlying the governance implementation in Pelindo II,*
2. *Governance Commitment, the Board of Commissioners, Board of Directors and work units commitment to implement and enforce Pelindo II Governance as contained in the vision, mission, values, code of ethics and as a reference to developing RJPP and RKAP.*
3. *Governance Structure, Pelindo II's internal and external bodies authorized to carry out the mandate to implement Pelindo II's duties, and to supervise Pelindo II,*
4. *Governance Process, series of standards and procedures used by the bodies and work units to ensure Pelindo II's Governance implementation and enforcement is conducted in a planned, consequential, and sustainable manner.*
5. *Governance Outcome, results of Pelindo II's GCG implementation and enforcement for stakeholders having a positive impact on value creation and business continuity.*

DASAR PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Basis for Corporate Governance Application

Dalam menerapkan *corporate governance* IPC mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Tahun 2006.

For applying corporate governance IPC refers to:

1. Republic of Indonesia Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies (PT).
2. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs).
3. Ministry of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance for State-Owned Enterprises (SOEs), as amended by Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.
4. Indonesia's General GCG Guidelines issued by the National Committee of Governance Policy (KNKG) Year 2006.

TUJUAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Objectives

IPC memandang bahwa penerapan GCG bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Lebih dari itu, ada sejumlah tujuan penting dalam implementasi GCG.

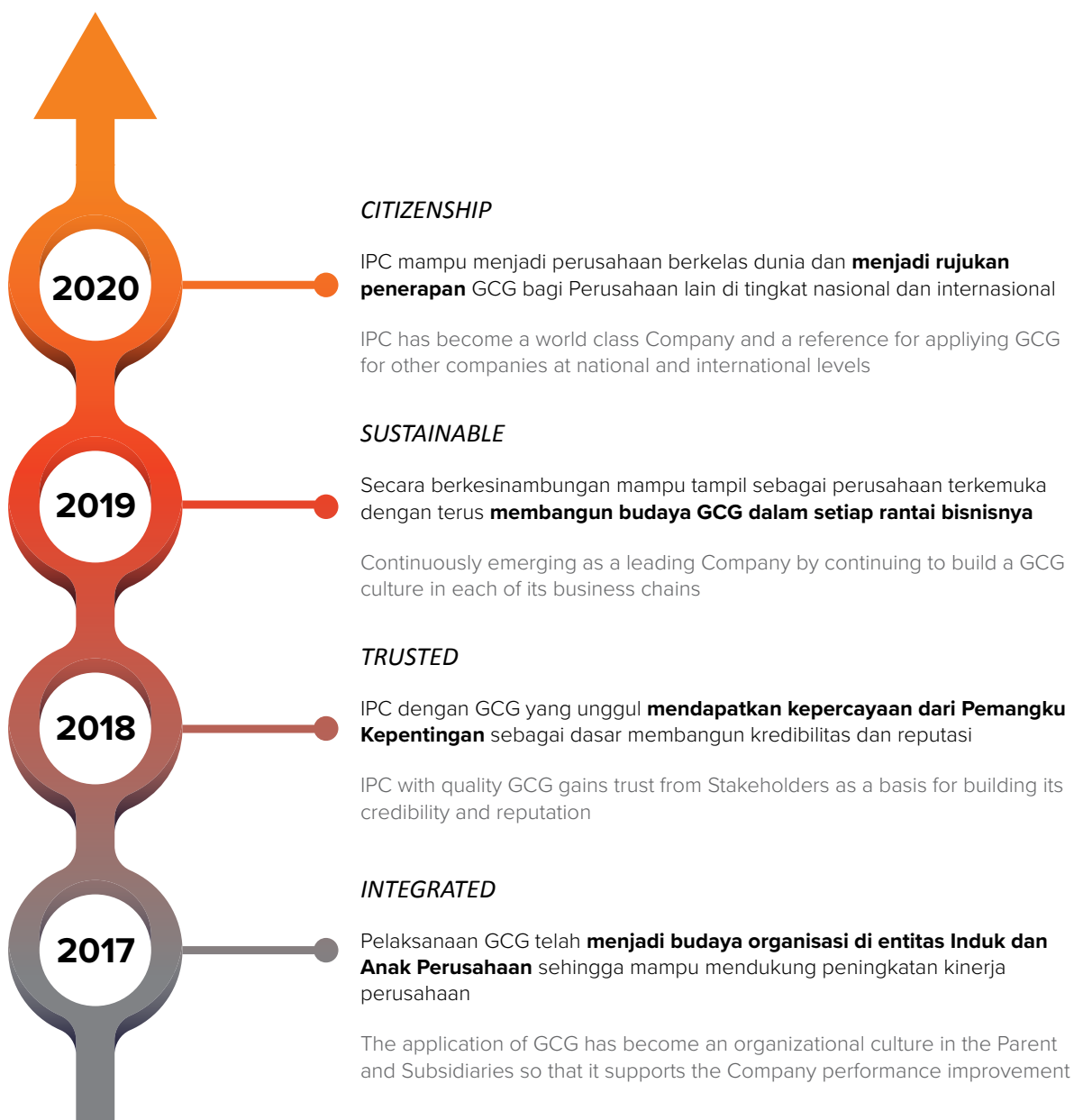
1. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.
2. Meningkatkan pengelolaan IPC secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
3. Menjadi acuan pengelolaan IPC dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial IPC terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan kelestarian lingkungan di sekitar IPC.
4. Meningkatkan *stakeholders value* dengan memperhatikan *stakeholders* lainnya.
5. Meningkatkan daya saing IPC secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

IPC sees GCG as more than a tool to comply with all regulations by the authorities, as it also helps the Company to achieve many other objectives.

1. To leverage the Company's performance and values for the sake of stakeholders through the transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness principles so that the Company has a strong competitive edge.
2. To improve IPC management professionally, transparently, and efficiently, and encourage the functional empowerment and independency of the General Meetings of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors.
3. To serve as references for IPC management in making decisions and taking actions based on high moral standards and legal compliance and awareness as well as IPC'S social corporate responsibility for all stakeholders and environmental preservation in the vicinity of IPC.
4. To improve stakeholder value by paying attention to stakeholders.
5. To enhance the IPC's competitive edge on a national and international scale, so it improves market trust that can later boost investment flows and sustainable national economic growth.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Roadmap



Roadmap GCG ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan *Roadmap Good Corporate Governance (GCG) 2017-2020* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The above Roadmap was approved by the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Decision No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) GCG Roadmap 2017-2020.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Roadmap

Selaras dengan Rencana Strategis Perusahaan, *roadmap* GCG disusun untuk jangka panjang. Penyusunan *roadmap* GCG IPC 2017-2020 ini dilakukan untuk menentukan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola yang dapat mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan manfaat bersama dengan *stakeholder* (*shared value*).

Roadmap GCG dengan seluruh kelengkapannya harus menjadi rujukan seluruh Insan IPC dalam menjalankan bisnis. *Roadmap* GCG ini juga bisa memberikan kesadaran kepada seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal tentang pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan adanya *roadmap* GCG ini, *stakeholder* dapat memahami komitmen serta posisi IPC dalam menegakkan bisnis yang beretika.

Sejak disahkan, *roadmap* GCG ini berjalan dengan baik. Sebagian hasil dari pelaksanaan *roadmap* GCG 2017-2020 sudah dapat dirasakan sebagai sebuah capaian jangka pendek (*quick win*), di antaranya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *roadmap* penyempurnaan GCG), meningkatnya nilai *assessment* GCG berdasarkan aturan Kementerian BUMN, dan diperolehnya penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

Consistent with the Company's Strategic Plan, the GCG Roadmap is designed for long-term accomplishments. The IPC 2014-2020 GCG Roadmap provides guidance for long-term governance achievements that can support business performance and create shared values with stakeholders.

Given its grounded approach, the GCG Roadmap is a key reference for all IPC employees in running the business. The GCG Roadmap also creates awareness on the part of stakeholders, both internal and external, of the importance of Good Corporate Governance. This GCG roadmap will help stakeholders evaluate IPC's corporate status and its commitment towards ethical business practices.

Since it was ratified, the GCG Roadmap has functioned well and as expected. Some of the GCG 2017-2020 Roadmap results are considered to be a quick win, including governance structure and GCG infrastructure (guidelines and Roadmap for GCG improvements), which have increased the GCG assessment scores based on the Ministry of SOEs regulations has earned GCG awards at the national level.

PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Principles

Sejalan dengan SK Penetapan *roadmap*, IPC juga telah menetapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam pengelolaan perusahaan berbasis GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG IPC adalah sebagai berikut:

At the same time the Circular Letter for Roadmap composition was issued, IPC also stipulated that GCG principles are the foundation for a GCG-based business management. The IPC GCG principles are as follows:

Transparansi <i>Transparency</i>	Keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan. Transparency in every decision-making process and in disclosing material and relevant information
Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ hingga setiap unit IPC. Clarity of function, implementation and accountability of all IPC organs until units
Responsibilitas <i>Responsibility</i>	Kesesuaian pengelolaan IPC terhadap peraturan dan perundang-undangan serta SOP yang berlaku. Management of IPC compliance to all applicable laws and regulations, as well as SOPs.
Independensi <i>Independency</i>	Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain. Professional management that is free from conflict of interest or pressure and influence of others.
Fairness <i>Fairness</i>	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan. Fairness and equity in fulfilling the rights of stakeholders.
Terpercaya <i>Trusted</i>	Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. Earning the trust and full support of all stakeholders.

PENCAPAIAN ROADMAP 2018

2018 Roadmap Achievement

No.	Hasil Pekerjaan <i>Results</i>	Keterangan <i>Description</i>
1.	Penghargaan Awards	Anugerah BUMN 2018: Juara 2 Kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik. SOE Award 2018: 2nd Place in the Best Corporate Governance (GCG) Category.
2.	Assessment GCG Tahun 2017 2017 GCG Assessment	Assessment GCG tahun 2017 dilaksanakan oleh auditor eksternal, PT Multi Utama Indojasa. Capaian <i>assessment</i> penerapan GCG Perusahaan pada tahun 2017 mencapai angka 96,36, atau mengalami kenaikan skor sebesar 3,05 poin dari pencapaian di tahun sebelumnya sebesar 93,31. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen perusahaan dalam penerapan GCG, dengan salah satunya capaian pengisian Pakta Integritas pegawai pada tahun 2017 sebesar 90.16%. The 2017 GCG assessment was carried out by an external auditor, PT Multi Utama Indojasa. The assessment results for the Company's GCG in 2017 was 96.36, an increase of 3.05 points from the previous year's 93.31. This increase was mainly due to an increase in the company's commitment to implementing GCG, one being the employee Pact of integrity that in 2017 scored 90.16%.
3.	Update Progress Area of Improvement (Aol) Area of Improvement (Aol) Progress Update	Divisi Sekeretaris Perusahaan mensosialisasikan hasil <i>assessment</i> GCG kepada seluruh divisi terkait sebagai tindaklanjut dari <i>assessment</i> GCG yang telah dilaksanakan. Hasil dari <i>update progress</i> Aol tersebut hingga akhir Desember 2018 telah ditindaklanjuti dengan progres penyelesaian 100% dari 25 rekomendasi. As a follow-up to the GCG assessment in letter a above, the Corporate Secretary Division socialized the 2017 GCG assessment results to all relevant divisions, with recommendations for improvements. The Aol progress update at the end of December 2018 have been followed up with 100% completion of 25 recommendations.
4.	Kode Etik Bisnis dan Pakta Integritas Code of Business Ethics and Integrity Pact	Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja IPC yang berada di wilayah Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan telah diimbau menandatangani Janji Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Hingga akhir 2018, persentase penandatanganan pakta ini oleh karyawan IPC mencapai 100%. All IPC employees including the Board of Commissioners and Board of Directors, in the Head Offices, Port Branches and Subsidiaries were encouraged to sign the Company's Code of Ethics and Integrity Pact as a form of joint commitment to the GCG principles. By the end of 2018, 100% of IPC employees had signed the Pact.

PENCAPAIAN ROADMAP 2018
 2018 Roadmap Achievement

No.	Hasil Pekerjaan <i>Results</i>	Keterangan <i>Description</i>
5	<p>Survey Internal Pemahaman GCG</p> <p>Internal Survey of GCG Understanding</p>	<p>Pelaksanaan <i>survey</i> pemahaman GCG tahun 2018 pada Insan IPC, yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja organik, didapatkan skor sebesar 78 dengan kategori Baik.</p> <p>2018 GCG understanding survey by IPC Personnel, including the Board of Commissioners, Board of Directors and organic employees, received a score of 78 in the Good category for filling out the survey.</p>
6	<p>Update Pedoman terkait GCG</p> <p>GCG Guidelines Update</p>	<p>IPC telah melakukan <i>review</i> internal atas pedoman-pedoman GCG perusahaan, yang mengacu pada kriteria dalam SK-16/S.MBU/2011.</p> <p>An internal review of the company's GCG guidelines was conducted, with reference to the criteria in SK-16/S.MBU/2011.</p>
7	<p>Menyusun <i>Blueprint</i> CSR Berbasis ISO 26000</p> <p>ISO 26000 based CSR Blueprint preparation</p>	<p>IPC telah melaksanakan analisis <i>GAP Mapping</i> pengelolaan program CSR dan dilanjutkan dengan penyusunan <i>Roadmap</i> PKBL CSR IPC 2018 – 2020.</p> <p>GAP Mapping analysis of the CSR programs management and the preparation of the IPC CSR PKBL Roadmap 2018 - 2020.</p>
8	<p>Sosialisasi Pemahaman GCG dan Implementasi pada Unit Kerja</p> <p>GCG Understanding and Implementation Work Unit Socialization</p>	<p>IPC telah melaksanakan sosialisasi GCG di seluruh Divisi Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.</p> <p>GCG socialization in Head Office, Port Branches and Subsidiaries.</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

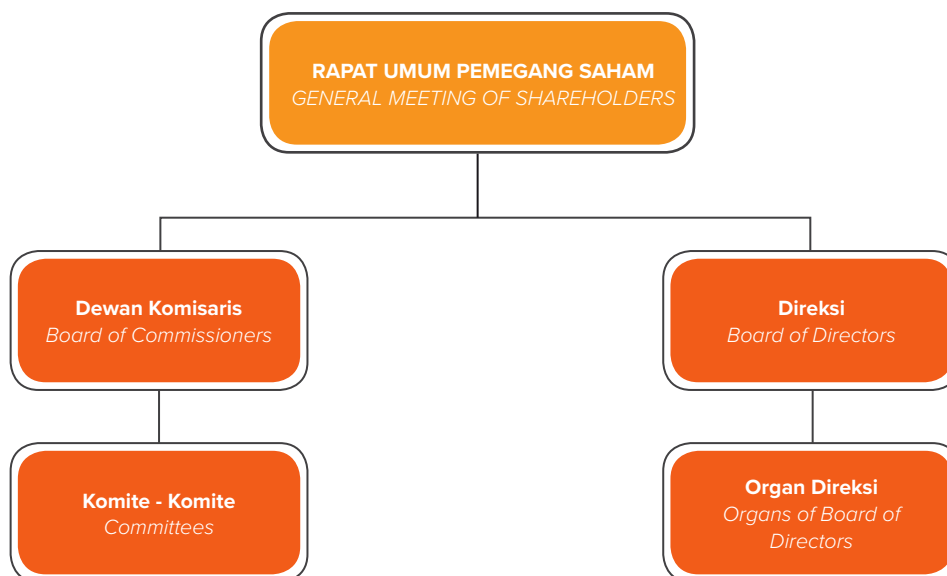
GCG Structure and Mechanism

Struktur tata kelola IPC mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

The GCG structure of IPC refers to Law No 40 of 2007 on Limited Liability Companies that states there should be at least 3 (three) organs; General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision making forum for the Shareholders, a Board of Commissioners as the highest supervisory body and a Board of Directors as the caretaker of the business. The Board of Commissioners and Board of Directors hold respectively certain authorities and responsibilities based on the Articles of Association and all applicable laws and regulations.

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

CORPORATE STRUCTURE



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, IPC memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki IPC antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar
2. *Board Manual* Dewan Komisaris
3. *Board Manual* Direksi
4. *Charter* Komite Audit
5. *Charter* Komite Pemantau Manajemen Risiko
6. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi
7. Kode Etik Bisnis
8. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan
9. Kebijakan *Whistleblowing System*

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, IPC has established policies / guidelines covering its functions and duties, called the *governance soft structure*. IPC's *governance soft structures* includes the following:

1. Articles of Association
2. Board of Commissioners Board Manual
3. Board of Directors Board Manual
4. Audit Committee Charter
5. Risk Management Monitoring Committee Charter
6. Nomination and Remuneration Committee Charter
7. Code of Business Ethics
8. Corporate GCG Implementation Guidelines
9. Whistleblowing System Policy

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure and Mechanism

10. Kebijakan Gratifikasi
11. *Roadmap* GCG
12. Piagam Satuan Pengawasan Internal
13. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
14. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
15. Kebijakan Manajemen Risiko

MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi IPC dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor IPC. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan IPC setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan IPC dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan IPC. Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

HAK PEMEGANG SAHAM

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS.
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS.
3. Hak untuk mengajukan usulan untuk dibahas dalam acara RUPS.
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur.
6. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

10. Gratification Policy
11. GCG Roadmap
12. Internal Audit Unit Charter
13. Quality Management System Policy
14. Internal Control System Policy
15. Risk Management Policy

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest institutional body in IPC and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to the Boards of Directors and Commissioners as stipulated in IPC's Articles of Association and all applicable laws. The authorities include:

Conducting the GMS through a process of announcing and calling the GMS in accordance with applicable regulations. After the announcement and call letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at the IPC office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

The GMS consists of the Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS). AGMS are held annually by IPC, and includes the AGMS for the IPC Annual Report and the AGMS for the Company's Work Plan and Budget (RKAP GMS), while the EGMS can be held at any time based on the needs and for the benefit of IPC. The GMS starts with a GMS call, in accordance with applicable regulations.

SHAREHOLDERS RIGHTS

1. The right to request a GMS.
2. The right to request information on the GMS agenda.
3. The right to submit proposals to be discussed at the GMS.
4. The right to attend and vote at the GMS.
5. The right to obtain information about the Company, in a timely and regular manner.
6. The right to receive a portion of the Company's profits for the Shareholders in the form of dividends and other profit sharing.

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

PELAKSANAAN RUPS RKAP TAHUN 2018 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2018 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2018

Undangan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>GMS Results</i>
<p>Diumumkan pada tanggal 19 Januari 2018 Nomor Undangan SK.02/19/1/1/TUD/UT/PI.II-18 perihal Undangan RUPS RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018.</p> <p>Announced on January 19, 2018 Invitation Number SK.02/19/1/1/TUD/UT/PI.II-18 concerning Invitation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2018 RKAP GMS.</p>	<p>Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 13.00-14.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN RI.</p> <p>Conducted on Tuesday January 23, 2018 at 13.00-14.00 WIB in the 6th Floor Meeting Room, Ministry of SOE.</p>	<p>Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.</p> <p>The GMS results were recorded in the PT Pelabuhan Indonesia II 2018 RKAP GMS Minutes of the Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.</p>

GMS MANAGEMENT PROCESS

The Company's Articles of Association stipulates that the GMS is held at the Company's place of domicile or where the Company conducts its main business activities. The GMS call is carried out 15 (fifteen) days before the date of the GMS request. The GMS can be held if at least 51% (fifty one percent) of the total shareholders with voting rights are present or represented.

2018 RKAP GMS AND ITS REALIZATION

The 2018 RKAP GMS stages are shown in the following table:

2018 RKAP GMS Implementation

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS RKAP TAHUN 2018

RUPS RKAP Tahun 2018 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2018

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>
1.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Attended
2.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Attended
3.	Iman Rachman	Direksi Director	Hadir Attended

2018 RKAP GMS ATTENDANCE

The 2018 RKAP GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

2018 RKAP GMS Attendance Recapitulation

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure and Mechanism

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
4.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Attended
5.	Riry Syeried Jetta	Direksi Director	Hadir Attended
6.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Attended
7.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Attended
8.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
9.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
10.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
11.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
12.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
13.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
14.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended

KEPUTUSAN RUPS RKAP TAHUN 2018

Agenda Pertama

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018.

Keputusan

Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi dan Penghasilan Komprehensif Lain:

Uraian Description	Jumlah Total
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp11.684.763 Juta/Million
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	Rp2.054.237 Juta/Million

2018 RKAP GMS DECISIONS

First Agenda

Ratification of the 2018 Corporate Budget Work Plan (RKAP) and Corporate Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget in 2018.

Decision

To approve/ratify the Company's 2018 business plan and budget, and the business and budget plan for the Community Development Partnership Program of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II with the following main points:

1. Financial Position, Income Statements and Other Consolidated Comprehensive Income:

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	
Diatribusikan Kepada: Attributable to:	
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	Rp2.021.497 Juta/Million
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	Rp32.740 Juta/Million

2. Posisi Keuangan Konsolidasi:

2. Consolidate Financial Position

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Total Aset Total Assets	Rp48.726.786 Juta/Million
Liabilitas Total Liabilities	Rp34.003.378 Juta/Million
Ekuitas Equity	Rp14.723.408 Juta/Million

3. Investasi:

3. Investments

a. Rencana Investasi tahun 2018 sebagai berikut:

a. Investment plan of 2018 as follows:

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Jumlah Investasi Perusahaan Induk Total Holding Company Investments	Rp8.529.606 Juta/Million
Jumlah Investasi Anak Perusahaan Total Subsidiary Investments	Rp1.574.274 Juta/Million
Jumlah Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investments	Rp10.103.880 Juta/Million
Penyertaan Modal Perusahaan Induk Parent Company Equity Participation	Rp1.579.013 Juta/Million
Total Investasi + Penyertaan Modal Total Investments + Equity Participation	Rp11.682.893 Juta/Million

b. Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya.

b. Investment expenditure is based on priority, based on standard operating procedures, transparency and accountability of price fairness.

c. Pelaksanaan penyertaan modal kepada Anak Perusahaan agar berdasarkan Kajian Studi Kelayakan dan diusulkan secara tersendiri kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

c. Capital participation in the Subsidiaries is based on Feasibility Studies, and is proposed separately to the Shareholders for approval.

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan:

4. Partnership and Community Development Program

	Kemitraan <i>Partnership</i>	Bina Lingkungan <i>Community Development</i>
Dana Tersedia Available Funds	Rp62.743 Juta/Million	Rp34.600 Juta/Million
Penggunaan Dana Funds Disbursement	Rp62.743 Juta/Million	Rp34.600 Juta/Million
Sisa Dana Remaining Funds	-	-

- Rencana penyaluran dana Kemitraan sebesar dana tersedia yaitu Rp62.743.287.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) bersumber dari saldo dana Program Kemitraan (termasuk pendapatan dari sumber lainnya) dengan tidak mengalokasikan tambahan dana untuk Program Kemitraan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang berasal dari beban perusahaan tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- Rencana penyaluran Bina Lingkungan bersumber dari alokasi dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp34.599.669.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) yang dibebankan pada perusahaan atau diperhitungkan setara/equivalen 2,00% (dua koma nol nol persen) dari proyeksi laba tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan mempertimbangkan alokasi dana dapat mencukupi program tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

- Partnership distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp62,743,287,000.00 (sixty two billion seven hundred forty three million two hundred eighty seven thousand Rupiah) sourced from the Partnership Program fund balance (including income from other sources) with no additional funds allocated for the 2018 (two thousand and eighteen) Partnership Program derived from the company's expenses in 2018 (two thousand and eighteen).
- The Community Development distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp 34,599,669,000 (thirty four billion five hundred ninety nine million six hundred sixty nine thousand Rupiah) charged to the company or calculated as 2 00% (two point zero zero percent) of the 2017 profit projection (two thousand and seventeen) after considering the sufficient allocation of funds for 2018 (two thousand and eighteen) program.

Status : Terealisasi

Realized

Agenda Kedua

Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.

Second Agenda

Determination of Board of Directors and Board of Commissioners' *Key Performance Indicators* (KPI) in 2018.

Keputusan

- Menetapkan *Key Performance Indicator* (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Decision

- Established *Key Performance Indicators* in 2018 (two thousand and eighteen) contained in the Management Contract signed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.
- The said Management Contract is an integral part of this decision.

Status : Terealisasi

Realized

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Agenda Ketiga

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018.

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Perubahan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut:

Indikator <i>Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>
<i>Waiting Time for Pilot (Jam)</i> Waiting Time for Pilot (Hour)	7%
Tingkat Efektivitas Tambahan Peti Kemas (%) Extra Containers Effectivity Level (%)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/H/S) Container Cargo loading and unloading (B/H/S)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering (T/G/J) Productivity of Dry Bulk Loading and Unloading (T / G / J)	7%
<i>Yard Occupancy Ratio</i> Peti Kemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	7%
Jumlah Bobot Total Weight	35%

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-Tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi dengan Nilai Maksimum 10% (sepuluh persen) dari Total Nilai Investasi Termasuk Perubahan Item Investasi RKAP Tahun 2018.

Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan Alokasi Anggaran Investasi dengan nilai maksimum 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari Total Nilai Investasi termasuk perubahan Item Investasi RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Third Agenda

Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of Company Health in 2018.

Decision

Established PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Operational Aspect Indicators for calculating the Health Level for 2018 (two thousand and eighteen), as follows:

Realized

Fourth Agenda

Delegation of Authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes in the Investment Budget Allocation with a maximum value of 10.00% (ten percent point zero zero) of the Total Investment Value including changes in RKAP Investment Items in 2018 (two thousand and eighteen)

Decision

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes in the Investment Budget Allocation with a maximum value of 10.00% (ten percent point zero zero) of the Total Investment Value including changes in RKAP Investment Items in 2018 (two thousand and eighteen)

Realized

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

**ARAHAN RUPS RKAP TAHUN 2018 DAN
TINDAKLANJUTNYA**

2018 RKAP AGMS DIRECTIVES AND FOLLOW UP

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
1.	<p>RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>The RKAP for 2018 (two thousand and eighteen) has been ratified with specific targets per month cascading to all levels of the company. The Board of Commissioners must report the results of the cascading to the Shareholders in the first quarter of 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
2.	<p>Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan.</p> <p>The income increase and cost reduction programs in all business lines to realize a more effective and efficient corporate management, and net income to reach at least the minimum target must be achieved by all levels of company management.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
3.	<p>Memonitor dan meningkatkan implementasi standarisasi TOS (<i>Terminal Operating System</i>) pada terminal peti kemas di seluruh cabang.</p> <p>Monitor and improve the implementation of standardized TOS (Terminal Operating System) at container terminals in all branches.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
4.	<p>Seluruh layanan kepelabuhanan harus menerapkan ICT (<i>Information and Communication Technology</i>) dalam rangka memenuhi SLA/SLG yang telah disepakati. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan atas hal tersebut dan melakukan hasil <i>review</i> secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>All agency services must implement the ICT (Information and Communication Technology) in order to fulfill the agreed SLA / SLG. The Board of Commissioners must supervise this matter and report the periodic review results to the Shareholders.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
5.	<p>Melakukan peninjauan dan menindaklanjuti dengan kerja sama dan sinergi dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i>, serta pemanfaatan dan pengembangan IT.</p> <p>Investigate and follow up in cooperation and synergy with Port SOEs and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HR development, joint procurement, and IT utilization and development.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
6.	<p>Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, segera menyelesaikan Paket Kebijakan Ekonomi terkait Kepelabuhanan dan melaporkan secara periodik kepada Kementerian BUMN. Khusus untuk kebijakan Pemerintah tentang logistik, Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) agar saling berkoordinasi untuk segera menentukan <i>pricing management system</i>.</p> <p>The Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners, to immediately complete the Economic Policy Package related to the Port Authority and report periodically to the Ministry of SOE. Especially for Government policies regarding logistics, The Boards of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to coordinate with each other to immediately determine a pricing management system.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
7.	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>The Board of Directors must increase its guidance and supervision of the Subsidiaries and Joint Ventures performance, especially those that make a significant contribution to the company's performance on a consolidated basis.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
8.	<p>Direksi agar memastikan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i>.</p> <p>The Board of Directors must ensure that the HR Management and Development Program is carried out comprehensively by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of the HC development policies, career paths and talent management to support the achievement of short or long term corporate targets must be improved, as well as an evaluation of HC policies so that they are always in accordance with best practices.</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
9.	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi <i>talent management</i> dengan sistematika yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan dan kesiapan <i>talent</i> untuk <i>Sustainable Growth</i> dari BUMN, diminta kepada Direksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan <i>talent management system</i> sekaligus menyiapkan <i>talent</i> perusahaan menjadi <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN. 2. Menyediakan <i>talent pool</i> di setiap minimal sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen). 3. Menyiapkan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 (tiga) suksesor per posisi BOD. <p>For a better systematic talent management function, as well as to ensure the availability and readiness of talent for Sustainable Growth from SOEs, the Board of Directors are requested to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizing a talent management system for preparing the company's talent as part of the Ministry of SOE talent pool. 2. Providing a talent pool at a minimum of 20.00% (twenty point zero zero percent). 3. Preparing candidates for the Board of Directors from BOD-1 with 3 (three) successors per BOD position. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
10.	<p>Terkait PKBL diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id. 2. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN dimaksud. <p>Related PKBL was asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliver periodic reports in a timely manner as stipulated in the Ministry of SOE Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 dated 03-07-2015 (July third, two thousand and fifteen) concerning BUMN PKBL through the PKBL Portal at the address http://pkbl.bumn.go.id. 2. With the issuance of the Ministry of SOE Regulation Number: PER-02/MBU/07/2017 concerning the Second Amendment to the Ministry of SOE Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning BUMN PKBL, the Board of Directors are asked to establish adjusted SOP for PKBL implementation based on the Ministry of SOE Regulation. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
11.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, auditor independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>The Board of Directors must pay attention to the findings and recommendations of the BPK, independent auditors and the company's Internal Control Unit that have not been resolved in 2017 (two thousand and seventeen) and make this a target for completion in 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
12.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: 02/DK/PI.II/I-2018 tanggal 03-01-2018 (tiga Januari dua ribu delapan belas).</p> <p>The Board of Directors must pay attention and follow up on the Board of Commissioners advice and recommendations for the 2018 (two thousand and eighteen) RKAP as submitted by letter Number: 02/DK/PI.II/I-2018 dated 03-01-2018 (third January two thousand and eighteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
13.	<p>Buku RKAP, RKA, PKBL dan RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The RKAP, RKA, PKBL, Board of Commissioners RKA and Board of Commissioners KPI (Key Performance Indicator) for 2018 (two thousand eighteen) that have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), and form an integral part of the GMS Decision Minutes, are a guideline for the Board of Directors to implement the work programs and performance targets in 2018 (two thousand and eighteen) as well as a guideline for the Board of Commissioners to monitor and supervise.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

PELAKSANAAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN REALISASINYA

2017 GMS ANNUAL REPORT ENDORSEMENT AND REALIZATION

Tahapan pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 tergambar dalam tabel berikut:

The 2017 GMS Annual Report Endorsement stages are shown in the following table:

Tabel Pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

2017 GMS Annual Report Endorsement Implementation

Undangan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>GMS Results</i>
<p>Diumumkan pada tanggal 19 Maret 2018 Nomor Undangan SK.03/19/3/1/TUD/UT/PI.II-18 perihal Undangan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017.</p> <p>Announced on March 19, 2018 Invitation Number SK.03/19/3/1/TUD/UT/PI.II-18 concerning Invitation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2017 Annual Report Endorsement GMS.</p>	<p>Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 10.00-11.00 WIB di Kementerian BUMN RI Lt. 21.</p> <p>Conducted on Tuesday April 3, 2018 at 10.00-11.00 WIB in the 21st Floor Meeting Room, Ministry of SOE.</p>	<p>Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.</p> <p>The GMS results were recorded in the PT Pelabuhan Indonesia II 2017 Annual Report Endorsement GMS Minutes of the Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure and Mechanism

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Attended
2.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Attended
3.	Iman Rachman	Direksi Director	Hadir Attended
4.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Attended
5.	Riry Syeried Jetta	Direksi Director	Hadir Attended
6.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Attended
7.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Attended
8.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
9.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
10.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
11.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
12.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
13.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended
14.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended

2017 Annual Report Endorsement GMS

The 2017 Annual Report Endorsement GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

2017 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

KEPUTUSAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.

2017 ANNUAL REPORT ENDORSEMENT GMS DECISIONS

First Agenda

The approval of the Company's Annual Report for the 2017 fiscal year includes the Report on the Implementation of Supervisory Tasks of the Board of Commissioners and Ratification of Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2017 and the approval of the Partnership and Community Development Program Report for the Fiscal Year 2017.

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkono & Surja dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" sebagaimana Laporan Auditor Independen Nomor RPC-5826/PSS/2018 tanggal 21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas).

Decision

- Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report carried out by the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkono & Surja with the opinion "REASONABLE IN ALL MATERIAL THINGS" in the Independent Auditor's Report Number RPC- 5826/PSS/2018 dated 21-02-2018 (twenty-first of February two thousand and eighteen).

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Dalam Juta Rupiah

	31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>
Aset <i>Assets</i>	
Aset Lancar Current Assets	23,781,639
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	23,438,449
Total Aset Total Assets	47,220,088
Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i>	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	5,072,948
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	28,199,222
Ekuitas Equity	13,947,918
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	47,220,088

a. Consolidated Financial Position Report

In Million Rupiah

	31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>
Aset <i>Assets</i>	
Aset Lancar Current Assets	23,781,639
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	23,438,449
Total Aset Total Assets	47,220,088
Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i>	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	5,072,948
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	28,199,222
Ekuitas Equity	13,947,918
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	47,220,088

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Dalam Juta Rupiah

	31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>
Pendapatan Operasi Operating Income	10,913,967
Pendapatan Konstruksi Construction Income	319,744
Beban Operasi Operating Expenses	(7,656,307)

b. Financial Position, Income Statements and Other Consolidated Comprehensive Income

In Million Rupiah

	31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>
Pendapatan Operasi Operating Income	10,913,967
Pendapatan Konstruksi Construction Income	319,744
Beban Operasi Operating Expenses	(7,656,307)

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

	31 Desember 2017 <i>December 31, 2017</i>
Beban Konstruksi Construction Expenses	(319,744)
Pendapatan Operasi Lainnya Netto Other Operating Income Net	11,410
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	3,269,071
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pre-Tax Profit (Loss)	2,473,582
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	2,205,727
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit Attributable to Owner of the Parent Entity	2,179,894
Laba Kepentingan Non Pengendali Profit Attributable to Non-controlling interests	25,834

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen.
2. Ratified the Partnership Program and Community Development Program Financial Report for the fiscal year 2017 (two thousand and seventeen) ending on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen) audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with the Independent Auditor's Report.

a. Laporan Posisi Keuangan PKBL

Dalam Ribu Rupiah

	Tahun 2017 <i>2017</i>
Aset <i>Assets</i>	
Aset Lancar Current Assets	69,529,391
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	19,486,486
Total Aset Total Assets	89,015,877
Liabilitas dan Aset Bersih <i>Net Liabilities and Assets</i>	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	5,191,930
Aset Bersih Net Assets	83,823,947
Total Liabilitas dan Aset Bersih Total Net Liabilities and Assets	89,015,877

a. PKBL Financial Position Report

In Million Rupiah

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

b. Laporan Aktivitas PKBL

Dalam Ribu Rupiah

	Tahun 2017 2017
Alokasi dan dari BUMN Pembina Allocation from State-Owned Trustees	-
Pendapatan Income	5,379,447
Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Distribution, Charges and Expenses	16,617,107
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Increase (decrease) in net assets	(11,237,661)
Aset Bersih Awal Tahun Net Assets at Beginning of Year	95,061,608
Aset Bersih Akhir Tahun Net Assets at End of Year	83,823,947

b. PKBL Activity Report

In Million Rupiah

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

3. With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report carried out by the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen) and the Program Partnership and Community Development Financial Statements for the fiscal year on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), the GMS provided full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the company management and supervision actions carried out during the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), insofar as such actions were not criminal actions and the actions were reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen).

Status : Terealisasi

Realized

Agenda Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017.

Second Agenda

Determination of the Net Profit Use for the 2017 Fiscal Year.

Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp2.179.893.506.000,00

Decision

Determined the consolidated net profit of 2017 (two thousand and seventeen) in the amount of Rp2,179,893,506,000.00

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE GCG Structure and Mechanism

(dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp653.968.051.800,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) ditetapkan sebagai dividen.
2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.525.925.454.200,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

Status : Terealisasi

Agenda Ketiga

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

(two trillion one hundred seventy nine billion eight hundred ninety three million five hundred and six thousand Rupiah) as described below:

1. 30% (thirty percent) of net profit or Rp653,968,051,800.00 (six hundred fifty three billion nine hundred sixty eight million fifty one thousand eight hundred Rupiah) was to be distributed as dividends.
2. 70% (seventy percent) of net profit or Rp1,525,925,454,200.00 (one trillion five hundred twenty five billion nine hundred twenty five million four hundred fifty four thousand two hundred Rupiah) was to be posted as a reserve.

Realized

Third Agenda

Determination of the Public Accountant Office to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2018 Fiscal Year and the Partnership and Community Development Program Financial Report for 2018.

Decision

1. Established the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2018 (two thousand and eighteen).
2. Gave authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant Office (KAP), as well as to establish a substitute Public Accountant Office (KAP) in the case the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountants Office for any reason were unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for the Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen).

Realized

Fourth Agenda

Determination of the 2017 Fiscal Year Tantiem, Salary, Honorarium and Benefits and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Keputusan

Tantiem tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Decision

Tantiem for fiscal year 2017 (two thousand and seventeen), and the Salary, Honorarium, allowances and other facilities for members of the Boards of Directors and Commissioners for 2018 (two thousand and eighteen) was determined in a separate decision.

Status : Terealisasi

Realized

ARAHAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN TINDAKLANJUTNYA

2017 ANNUAL REPORT GMS ENDORSEMENT DIRECTIVES AND FOLLOW UP

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
1.	<p>Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor eksternal (SPI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi.</p> <p>The Board of Directors were asked to follow up on the findings, suggestions from external auditors, namely the Republic of Indonesia BPK and / or KAP and the 2017 (two thousand and seventeen) and previous years external auditors, and resolve them thoroughly so that the auditor's findings in the future are not the same.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
2.	<p>Direksi harus terus berupaya melaksanakan pengendalian biaya serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>The Board of Directors must strive to implement cost control and optimize corporate management performance to realize a more effective and efficient corporate management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
3.	<p>Direksi diminta untuk meningkatkan <i>monitoring</i> dan pembinaan terhadap kinerja kantor cabang dan anak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada induk perusahaan.</p> <p>The Board of Directors were asked to improve monitoring and guidance for the branch offices and subsidiaries performance so that they can increase revenue contributions to the parent company.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
4.	<p>Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan lahan dan meningkatkan penataan administrasi asset untuk mengantisipasi permasalahan asset yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.</p> <p>The Board of Directors must immediately resolve land issues and improve asset administration arrangements to anticipate asset problems that might arise later.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
5.	<p>Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penagihan pengambilan pinjaman/piutang mitra binaan, sehingga kolektibilitas PK dapat ditingkatkan. Mengupayakan pengelolaan PKBL tahun 2018 agar lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Menyalurkan dana PK sesuai dengan dana tersedia yang telah direncanakan. <p>Regarding PKBL activities, The Board of Directors are asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimize billing of loan / receivables collection from fostered partners, so that PK collectability can be increased. Strive for PKBL management in 2018 to be more optimal and more targeted. Distribute PK funds in accordance with the planned available funds. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
6.	<p>Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan <i>compliance</i>/pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data portal aset, portal <i>Financial Information System</i> (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen.</p> <p>The Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners were asked to continue to improve compliance/fulfillment of the asset portal data filling and updating, including the financial information system (FIS) portals, HR portals, PKBL portals, and Public portals. In connection with improving the quality of supervision and guidance of the Company, we request that data updates, the accuracy and completeness of filling out the portals be the main concern of the Board of Commissioners, Board of Directors and Management.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
7.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS ini.</p> <p>The Board of Directors must pay attention to and follow up on the advice and recommendations of the Board of Commissioners presented at this GMS.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
8.	<p>Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.</p> <p>The Financial Reports, PKBL Implementation Reports, Performance Evaluation Reports, Legislation and Internal Control Compliance Reports, Key Performance Indicators (KPI) Assessment Reports that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) and the Board of Commissioners' responses are an integral part of the minutes this meeting.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
9.	<p>Menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2019 (dua ribu sembilan belas).</p> <p>Submit the Company's Annual Report including the Financial Statements of 2018 (two thousand and eighteen) Years that have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2019 (two thousand and nineteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

PELAKSANAAN RUPS RKAP TAHUN 2017 DAN REALISASINYA **2017 RKAP GMS AND ITS REALIZATION**

Tabel Pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2017

2017 RKAP GMS Implementation

Undangan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>GMS Results</i>
Diumumkan pada tanggal 18 Januari 2017 Nomor Undangan UM.332/18/1/17/PI.II-17 perihal Undangan RUPS RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017.	Dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Januari 2017 pukul 17.00 WIB s.d. selesai di Kementerian BUMN RI Lt. 6.	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.
Announced on January 18, 2017 Invitation Number UM.332/18/1/17/PI.II-17 concerning Invitation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2017 RKAP GMS.	Conducted on Thursday January 19, 2018 at 17.00 WIB - end in the 6th Floor Meeting Room, Ministry of SOE.	The GMS results were recorded in the PT Pelabuhan Indonesia II 2017 RKAP GMS Minutes of the Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS RKAP TAHUN 2017 **2017 RKAP GMS ATTENDANCE**

RUPS RKAP Tahun 2017 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

The 2017 RKAP GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2017

2017 RKAP GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hadir <i>Attended</i>	Tidak Hadir <i>Absent</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
1.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Attended		
2.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Attended		
3.	Iman Rachman	Direksi Director	Hadir Attended		
4.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Attended		
5.	Riry Syeried Jetta	Direksi Director	Hadir Attended		
6.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Attended		
7.	Disril Revolin Putra	Direksi Director	Hadir Attended		
8.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		
9.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		
10.	Fadjar Judisiawan	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		
11.	Cris Kuntadi	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure and Mechanism

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Attended	Tidak Hadir Absent	Keterangan Explanation
12	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		
13.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Attended		
14.	Heru Pambudi	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Tidak Hadir Absent	Mendapat tugas dari Kementerian Keuangan Tasks assigned by the Ministry of Finance

KEPUTUSAN RUPS RKAP TAHUN 2017

Agenda Pertama

Perserujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017.

Keputusan

Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Perhitungan Laba (Rugi)

Dalam Juta Rupiah

Uraian Description	Jumlah Total
Pendapatan Usaha Operating Income	10,564,612
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	1,728,795
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Current Year Profit Attributable to Owner of the Parent Entity	1,699,523
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali Current Year Profit Attributable to Non-controlling interests	29,273

2. Posisi Keuangan:

Dalam Juta Rupiah

Uraian Description	Jumlah Total
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	17,098,535
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	33,926,956

DECISION OF GMS RKAP 2017

First Agenda

Approval for/Ratification of Business Plan and Budgeting of the Company (BPBC) and Work plan and Budget of Partnership and Community Development Program (PKBL) for fiscal 2017.

Decision

To approve/ratify the Company's 2017 business plan and budget, and the business and budget plan for the Community Development Partnership Program of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II with the following main points:

1. Profit (Loss) Calculation

In Million Rupiah

2. Financial Position

In Million Rupiah

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Total Aset Total Assets	51,025,491
Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i>	
Liabilitas Liabilities	32,085,593
Ekuitas Equity	18,939,898
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	51,025,491

3. Rencana Investasi tahun 2017, sebagai berikut:

Dalam Juta Rupiah

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Investasi Perusahaan Induk Investment in Parent Company	3,251,973
Investasi Anak Perusahaan Investment in Subsidiaries	1,210,177
Total Investasi Total Investment	4,462,150
Penyertaan Modal Equity Participation	780,802
Total Investasi & Penyertaan Modal Total Investment & Equity Participation	5,242,952

3. Investment Plan 2017, as follows:

In Million Rupiah

- Pendanaan untuk investasi dimaksud direncanakan berasal dari dana internal dan sisa dana obligasi global yang diterbitkan tahun 2015.
- Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya.
- Pelaksanaan penyertaan modal kepada Anak Perusahaan agar berdasarkan kajian studi kelayakan dan diusulkan secara tersendiri kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan.
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

a. Program Kemitraan

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Dana Tersedia Available Funds	80,910
Penggunaan Dana Funds to be Allocated	80,910
Sisa Dana Funds Balance	-

- The funds for the investments will be taken from internal funds and the remaining global bond funds issued in 2015.
- Expenditure for the investments is made based on priority, in accordance with standard operating procedures, transparent, and at accountably fair prices.
- The implementation of equity participation to Subsidiaries is based on a feasibility study and proposed in a next occasion to the Shareholder for approval.

4. Partnership and Community Development Program (PKBL)
a. Partnership Program

In Million Rupiah

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

b. Program Bina Lingkungan

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Dana Tersedia Available Funds	31,427
Penggunaan Dana Funds to be Allocated	31,427
Sisa Dana Funds Balance	-

- Rencana penyaluran Dana Kemitraan sebesar dana tersedia, yaitu Rp80.909.619.000 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari saldo Program Kemitraan (termasuk pendapatan dari sumber lainnya) dengan tidak mengalokasikan tambahan dana untuk Program Kemitraan tahun 2017 yang berasal dari beban perusahaan tahun 2017.
- Rencana penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp31.427.134.000 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) bersumber dari saldo dana Bina Lingkungan (termasuk pendapatan dari sumber lainnya) sebesar Rp10.868.943.000 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan tambahan alokasi dana Bina Lingkungan yang berasal dari beban perusahaan tahun 2017 sebesar Rp20.558.191.000 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Status : Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicator* Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.

Keputusan

Menetapkan *Key Performance Indicator* (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Status : Terealisasi

b. Community Development Program

In Million Rupiah

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Dana Tersedia Available Funds	31,427
Penggunaan Dana Funds to be Allocated	31,427
Sisa Dana Funds Balance	-

- The funds distributed were all available, at Rp80,909,619,000 (eighty billion nine hundred nine million six hundred nineteen rupiahs), sourced from the balance of the Partnership Program fund (including income from other sources). But, IPC did not spend from its accounts that would otherwise be posted as an expense.
- The Community Development fund of Rp31,427,134,000 (thirty one billion four hundred twenty seven million one hundred thirty four thousand rupiah) to be distributed was sourced from the balance of the Community Development fund (including from other sources) of Rp10,868,943,000 (ten billion eight hundred sixty eight million nine hundred forty three thousand rupiah). This will be added to from the Company allocation of Rp20,558,191,000 (twenty billion five hundred fifty eight million one hundred and ninety thousand rupiah).

Realized

Second Agenda

Approval and ratification of 2017 Key Performance Indicators of Boards of Directors and Commissioners

Decision

Establish Key Performance Indicators for fiscal 2017 as stipulated in the management contract signed by the Shareholder, the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Realized

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 GCG Structure and Mechanism

Agenda Ketiga

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017.

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagai berikut:

Third Agenda

The determination of Operational Indicators for the Measurement of Company's Soundness Level for fiscal 2017

Decision

Establish Operational Indicators of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the measurement of Company's Soundness Level Calculation 2017, as follows:

Uraian <i>Description</i>	Jumlah <i>Total</i>
Waiting Time for Pilot (Jam) Waiting Time for Pilot (hour)	7%
ET/BT (%) ET/BT (%)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/H/S) Container Loading/unloading Productivity (B/C/H)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering (T/G/J) Dry Bulk loading and unloading Productivity (T/G/H)	7%
Yard Occupancy Ratio Peti Kemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	7%
Jumlah Bobot Total Weight	35%

Status : Terealisasi

Realized

ARAHAN RUPS RKAP TAHUN 2017 DAN TINDAKLANJUTNYA **2017 RKAP GMS DIRECTIVES AND FOLLOW UP**

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
1.	RKAP Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2018 (dua ribu delapan belas). The 2017 Work Plan and Budget was ratified and further translated into monthly targets and cascaded throughout the Company. The Board of Commissioners shall report the details and cascading results to the Shareholder in the first quarter of 2017	Telah terealisasi Realized
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha (<i>cost reduction program</i>) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan. Work to increase revenue and improve cost control in all business lines (cost reduction program) in order to realize a more effective and efficient management of the Company, and net profit as the minimum target that must be achieved by the entire management	Telah terealisasi Realized

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
3.	<p>Menyelaraskan standarisasi <i>Terminal Operating System (TOS)</i> pada terminal peti kemas yang dimulai dari Pelabuhan Utama dengan target penyelesaian dalam triwulan I 2017 (dua ribu tujuh belas) dan dilanjutkan pada Pelabuhan Pendukung dengan target penyelesaian dalam triwulan III tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>Align standardization of Terminal Operating System (TOS) at container terminal starting from main port with target of completion in the first quarter of 2017, followed by supporting port with target of completion in quarter III year 2017</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
4.	<p>Seluruh layanan kepelabuhanan sudah harus menerapkan ICT (<i>Information and Communication Technology</i>) dalam rangka memenuhi SLA/SLG yang telah disepakati. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan atas hal tersebut dan melakukan hasil <i>review</i> secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>All port services have to apply ICT (Information and Communication Technology) in order to meet the agreed SLA/SLG. The Board of Commissioners shall supervise all matters as a result of this initiative and make periodic reviews of the results to the Share</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
5.	<p>Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang logistik, Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) agar saling berkoordinasi untuk menyusun definisi dan <i>variable cost of logistic</i> di pelabuhan dengan didasarkan pada <i>benchmark</i> pelabuhan internasional, untuk selanjutnya segera menentukan <i>pricing management strategy</i>.</p> <p>Following up on the government policy on logistics, the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) shall have a coordination amongst themselves to formulate the definition and variable cost of logistics at ports based on international port benchmarks, to further determine a pricing management strategy</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
6.	<p>Sinergi BUMN Kepelabuhanan agar ditingkatkan khususnya terkait <i>joint procurement</i> dan diselesaikan dalam triwulan I 2017 (dua ribu tujuh belas) tanpa mengganggu proses yang sudah ada. <i>Joint procurement</i> yang disusun tidak terbatas pada SOP, namun pada pemilihan <i>vendor</i>.</p> <p>Port State-Owned Enterprise shall enhance synergy especially related to joint procurement and have it completed in the first quarter of 2017 without disrupting any existing process. Joint procurement is not limited to SOPs, but on vendor selection.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
7.	<p>Melakukan penataan SDM baik di induk maupun di anak-anak perusahaan serta peningkatan mutu secara berkesinambungan guna meningkatkan produktivitas.</p> <p>Perform human resource management both in the parent company and subsidiaries with continuous improvements in quality in order to improve productivity.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
8.	<p>Posisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perusahaan agar diperkuat dalam rangka <i>early warning system</i>. Selanjutnya Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.</p> <p>Strengthen the Position of Internal Control Unit (SPI) of the Company in the context of early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners shall evaluate the effectiveness of the Unit's role and report the results to the Shareholder.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
9.	<p>Melanjutkan langkah dan tahapan menuju <i>holding</i> maritim, termasuk meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholders</i>. Make further steps towards maritime holding, including improving coordination with stakeholders</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
10.	<p>Menunjuk konsultan independen secara bersama-sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) untuk menyusun kajian <i>grand design</i> penataan Anak Perusahaan dalam rangka pembentukan <i>holding</i> maritim. Jointly appoint an independent consultant with PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) to prepare a grand design review of the subsidiary arrangement as an effort to establish maritime holding</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
11	<p>Melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka pembentukan <i>Holding</i> Rumah Sakit BUMN dan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) selaku koordinator pembentukan <i>Holding</i> Rumah Sakit BUMN dimaksud. Take further preparatory steps to establish SOE Hospital Holding with a coordination with PT Pertamina (Persero) as the coordinator of the formation of Holding of the referred SOE Hospital concerned</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
12.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan rekomendasi auditor internal maupun eksternal yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). The Board of Directors shall observe findings of recommendations of internal and external auditors that had not been realized by end of 2016 and target this to be competed in 2017</p>	<p>Telah terealisasi Realized</p>
13.	<p>Terkait PKBL, diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN melalui portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id. Menganggarkan program BL yang diprioritaskan pada kegiatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam rangka membantu menurunkan angka kemiskinan melalui elektrifikasi rumah tangga, penyediaan sarana air bersih dan MCK bagi masyarakat. Memprioritaskan penyaluran PK maupun BL di daerah wilayah kerja Perusahaan atau kegiatan berkaitan dengan rantai nilai/pasok Perusahaan dalam skema klaster sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan sekaligus memitigasi risiko gagal bayar. Penyaluran dapat melibatkan lembaga yang mempunyai kompetensi seperti perguruan tinggi dalam hal pendampingan. <p>Related to PKBL, asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Submit periodic reports in a timely manner as stipulated in Minister of SOEs Regulation No.PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on PKBL at SOEs through PKBL portal with address http://pkbl.bumn.go.id. Make a budget priority in Community Development programs on activities to improve human development index in order to help reduce poverty through household electrification, provision of clean water facilities and public toilets for the neighboring communities. Prioritize the distribution of Partnership Program and Community Development within the Company's work areas or activities related to the Company's value chain/supply in the cluster scheme so as to encourage improvements in quality of people's lives while increasing the Company's values on a continuous basis and mitigating the risk of default. Distribution may involve institutions with proven competence such as universities for mentoring purpose. 	<p>Telah terealisasi Realized</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure and Mechanism

No.	Arahan <i>Directive</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up</i>
14.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagaimana disampaikan melalui surat No. 11/DK/PI.II/I-2017</p> <p>The Board of Directors shall observe and follow up advice and recommendations given to it by the Board of Commissioners with regards to the implementation of 2017 RKAP 2017 as expressed through letter No.11/DK/PI.II/I-2017</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>
15.	<p>Buku RKAP, RKA-PKBL dan RKA Dewan Komisaris dan KPI Dewan Komisaris tahun 2017 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta sebagaimana sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The RKAP, RKA-PKBL books and the RKA of the Board of Commissioners and KPI of the Board of Commissioners for fiscal 2017 that have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS) are an integral part of the minutes of this GMS Decision that serves as guidelines for the Board of Directors in implementing all work programs and performance targets for 2017 that can also be used by the Board for monitoring and overseeing purposes</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Realized</p>

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ IPC yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai IPC maupun usaha IPC, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IPC, sesuai dengan maksud dan tujuan IPC. Acuan utama Dewan Komisaris adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun tugas dan lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

The Board of Commissioners is IPC's organ that is in charge of overseeing the management policies, the general management of IPC, and IPC's business, and advising the Board of Directors on behalf of IPC, in accordance with the intent and purpose of IPC. The key reference of the Board is Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises. In performing its duties, the Board is assisted by supporting organs that include the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES, AUTHORITY, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

The Board of Commissioners duties are regulated by the Working Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners duties and scope of responsibilities includes:

1. To supervise the policies and the Company's management by the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors, covering the Company's development plans, the annual Work Plans and Budget, the implementation of the Articles of Association, and GMS decisions, and the prevailing laws and regulations for the benefit of IPC and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. To carry out duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association and decisions of the GMS and prevailing laws and regulations.
3. To carry out the interests of the Company with due regard to the interests of the Shareholders and be responsible to the GMS.
4. To examine and review the Annual Reports prepared by the Board of Directors and to sign the reports.
5. To approve transactions or actions within the scope of the Board of Commissioners or the GMS authority.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen IPC, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan IPC.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IPC.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IPC.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar IPC.
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IPC.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IPC, jika dianggap perlu.

In performing its duties, each Commissioner shall be personally liable for the Company's losses if the person is guilty or negligent in performing their duties as a member of the Board of Commissioners. This responsibility shall apply jointly to each member of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses if they can prove:

1. They conducted supervision with good faith and prudence in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. They had no direct or indirect personal interest in the Board of Directors' management actions resulting in losses.
3. They had given advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of losses

BOARD OF COMMISSIONERS AUTHORITIES

In conducting its supervisory duties, the Board of Commissioners is authorized to

1. Inspect IPC's books, letters, and documents, examine cash for purposes of verification and others, examine IPC's securities and assets.
2. Enter IPC's yards, buildings, and offices.
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to IPC's management.
4. Know about all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting.
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners if deemed necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association.
8. Establish Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by observing IPC's capabilities.
9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at IPC's expense, if deemed necessary.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

10. Melakukan tindakan pengurusan IPC dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan IPC.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IPC.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP IPC dan RKAP IPC mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP IPC.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan IPC, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan IPC.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja IPC.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP IPC.
9. Membentuk Komite Audit. Keanggotaan komite tersebut, terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS yang disertai dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang akan diberikan untuk auditor eksternal.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

10. Carry out IPC's management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attend Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed.
12. Carry out other supervisory authority to the extent that it is not contrary to law, regulation, the Articles of Association and/or the GMS decision.

BOARD OF COMMISSIONERS OBLIGATIONS

In relation to the execution of the Board of Commissioners duties, it is obliged to:

1. Advise the Board of Directors in conducting the management of IPC.
2. Examine, review and sign the RJPP and BPBC stipulated by the Board of Directors, in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association.
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's RJPP and the Company's BPBC regarding the reasons the Board of Commissioners signed IPC's RJPP and BPBC.
4. Follow the development of IPC's activities, provide opinions and suggestions to the GMS on any issues deemed important to IPC's management.
5. Report immediately to the GMS in the event of any symptoms of declining performance in IPC.
6. Study and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports.
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS on the annual report, if requested.
8. Prepare an annual work program incorporated in IPC's BPBC.
9. Establish an Audit Committee, the membership of which to consist of one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
10. Propose a Public Accountant to the GMS accompanied by the reasons for nominations and the amount of honorarium/fee to be provided for the external auditor.
11. Take minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep copies thereof.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

12. Melaporkan kepada IPC mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada IPC dan Perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dikeluarkan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16, yaitu sebagai berikut:

1. Segala Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris;

12. Report to IPC regarding their own and/or their families share ownership in IPC and other Companies.
13. Provide reports on supervisory duties issued during the past fiscal year to the GMS;
14. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory tasks, as long as they are not contrary to statutory regulations, statutes, and/or decisions of the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS RESPONSIBILITIES

Within the context of its duties, the Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. In performing its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS;
2. The Board of Commissioners shall supervise the management policies, the general management of IPC and its business and provide advice to the Board of Directors;
3. Each Commissioners shall act in good faith, be prudent and be responsible in carrying out their supervisory and advisory roles to the Board of Directors;
4. Each Commissioner shall be personally liable for the losses IPC bears if they fail to carry out their duties;
5. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) Board members or more, the responsibility referred to apply jointly to each member of the Board of Commissioners.

DECISIONS THAT NEED APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

BOARD OF COMMISSIONERS DECISION-MAKING PRINCIPLES

The Board of Commissioners decision making Principles for their supervisory and advisory duties to the Board of Directors refer to the Articles of Association No. 16 as follows

1. All Board of Commissioners decisions are taken in the Board of Commissioners meeting;

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;
 3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan;
 4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditandatangani oleh ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir;
 5. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya;
 6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia;
 7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
 8. Dewan komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dan jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
 9. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 9 harus mencantumkan area, tanggal, waktu dan tempat rapat;
 11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Dewan Komisaris hadir dalam rapat;
 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris;
2. Decisions may also be taken outside of the Board of Commissioners meetings as long as all Board of Commissioners members agree on the method and decision;
 3. At each Board of Commissioners meeting, Minutes of meetings are made on the matters discussed (including any dissenting opinions by members of the Board of Commissioners, if any) and matters decided;
 4. The Minutes of the meeting referred to in paragraph 3 are signed by the Meeting Chairman and all Commissioners present at the meeting;
 5. The original Board of Commissioners Minutes of meetings are submitted to the Board of Directors to be kept and maintained, while the Board of Commissioners keeps a copy;
 6. Board of Commissioners Meetings are valid if held at IPC's domicile or elsewhere within the territory of the Indonesian Republic;
 7. The Board of Commissioners holds meetings at least once every month, in which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors;
 8. The Board of Commissioners may hold meetings at any time upon request of one or more members of the Board of Commissioners, the request of the Board of Directors, or, by law, at the written request of one or more Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights, By mentioning the matters to be discussed;
 9. The Board of Commissioners meetings call is submitted in writing by the President Commissioner or a member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and notified within three days before the meeting or in a shorter time if urgent, excluding the call date and the meeting date;
 10. The call referred to in paragraph 9 shall include the event, date, time and place of the meeting;
 11. A meeting call is not required if all Commissioners are present at the meeting;
 12. Board of Commissioner meetings are valid and entitled to make binding decisions when attended or represented by more than ½ (one-half) of the total members of the Board of Commissioners;

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris;
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 18 ini yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat;
20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa;
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 suara ditambah 1 suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya;
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar IPC, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemulihan secara tertutup;
24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat;
13. During ad hoc topics at Board of Commissioner meetings, decisions will be valid only if all Commissioners or their proxies are present and approve the addition to the agenda;
14. A Commissioner may be represented in a meeting only by another Commissioner by written authority granted exclusively for that purpose;
15. A member of the Board of Commissioners may only represent one other member of the Board of Commissioners;
16. All meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner;
17. In the event that the President Commissioner is absent, the Board of Commissioners meeting is chaired by another Commissioner appointed by the President Commissioner;
18. In the event that the President Commissioner does not appoint, the longest serving member of the Board of Commissioners shall serve as chairman of the Board of Commissioners meeting;
19. In the event that more than one Commissioner is the longest serving, then the Commissioners referred to in paragraph 18 will be the oldest to serve as chairman of the Board of Commissioners meeting;
20. All decisions in a Board of Commissioners Meeting are taken by deliberation for consensus;
21. If through deliberation a consensus is not reached, then the decision of the Board of Commissioners meeting is taken through a majority vote;
22. Each Commissioner is entitled to one vote plus one vote for the Commissioner he represents, if any;
23. If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the decision of the meeting shall be the same as the opinion of the Chairman of the meeting, keeping in mind the provisions on accountability as referred to in Article 15 paragraph 4, 5 and 6, except on the person, the decision of the meeting shall be conducted by election in private;
24. A blank vote (abstain) is considered to approve the result of the meeting decision;

25. Dalam hal usulan lebih dari 2 alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemulihan ulang terhadap 2 usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

25. In the case of proposals with more than two alternatives and the result of voting does not choose an alternative with a vote of more than 1/2 (one per two) of the total votes cast, then the proposal with the most votes will be the one to receive over 1/2 (one-half) of the total votes cast;
26. Unauthorized votes are considered absent and not counted in determining the number of votes cast in the meeting.

PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

BOARD OF DIRECTORS ACTIONS THAT REQUIRE BOARD OF COMMISSIONERS WRITTEN APPROVAL

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris terdiri atas:

The Board of Directors' actions that must obtain written approval from the Board of Commissioners consist of:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian kewenangan sesuai keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Applying fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Collaborating with business entities or other parties in the form of licensing cooperations, management contacts, leasing assets, Operational Cooperations (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other partnerships with a certain value or time period determined by the General Meeting of Shareholders. The division of authority according to the GMS decision is as follows:

Pihak Party	Kewenangan Authority	
	Nilai Value	Jangka Waktu Period
Direksi Board of Directors	Sampai dengan Rp25 Miliar Up to Rp25 Billion	Sampai dengan 5 Tahun Up to 5 Years
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Di atas Rp25 Miliar sampai dengan Rp100 Miliar Above Rp25 Billion up to Rp100 Billion	Di atas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun Above 5 Years Up to 10 Years
RUPS GMS	Di atas Rp100 Miliar Above Rp100 Billion	Di atas 10 Tahun More than 10 Years

Dengan ketentuan apabila dalam kerja sama tersebut baik secara besaran (nilai) atau jangka waktu kerja sama salah satu kriteria (nilai atau jangka waktu) ada yang lebih tinggi maka digunakan kriteria yang tertinggi.

Cooperation provided if either the amount (value) or the period of cooperation as one of the criteria (value or time period) is higher then the highest criteria used.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusannya.

PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS DAN PERSETUJUAN DARI RUPS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS, terdiri atas:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
3. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu melebihi jangka penetapan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

3. Receiving or providing medium/long-term loans, except loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans given to the Company's subsidiaries with the loan terms reported to the Board of Commissioners;
4. Writing of bad debts and goods inventory;
5. Releasing movable fixed assets of an economic age that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years;
6. Establishing the organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors.

Within 30 (thirty) days of receiving the application or explanation and the complete documentation from the Board of Directors, the Board of Commissioners must give its decision.

BOARD OF DIRECTORS ACTIONS THAT REQUIRE A WRITTEN RESPONSE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND AGREEMENT FROM THE GMS

The Board of Directors actions that must obtain a written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS, include:

1. Applying fixed assets for medium/long term loans;
2. Conducting capital participation in other companies;
3. Establishing a subsidiary and/or joint venture company;
4. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures
5. Performing mergers, consolidations, acquisitions, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
6. Binding the company as guarantor (*borg* or *avalist*);
7. Organizing cooperations with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Operational Cooperation (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a value or a certain period of time exceeding the stipulation period by the General Meeting of Shareholders;
8. Ceasing collection of bad debts that have been written off;

9. Melepaskan dan menghapusbukukan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 10. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
 11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
 12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP;
 13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
 14. Pembebanan biaya Perseoran yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS
9. Releasing and writing off the fixed assets of the Company, except for movable fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years;
 10. Establishing the blue print for the Company's organization;
 11. Establishing and changing the Company's logo;
 12. Performing other actions as referred to in actions that require written approval from the Board of Commissioners that have not been specified in the RKAP;
 13. Forming foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company that can affect the Company;
 14. Charging permanent and routine Personnel costs for the activities of the organization's foundation and/or association both directly or indirectly related to the Company;
 15. Proposing Company representatives to become candidates as members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or strategic value determined by the GMS

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris mencakup persyaratan formal yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan material serta persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan

If within 30 (thirty) days of receiving the application or explanation and the complete documentation from the Board of Directors, and the Board of Commissioners has not provided a written response, the GMS may make a decision without a written response from the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders. The Board of Commissioners can be terminated at any time. After the term of office ends, members of the Board of Commissioners can be reappointed for 1 (one) term of office by the General Meeting of Shareholders.

REQUIREMENTS FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

The requirements to become a member of the Board of Commissioners includes formal requirements which are the basic requirements determined by the Articles of Association, applicable laws and regulations, material requirements and other requirements which are requirements that are adjusted

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit.
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu IPC atau Perum dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Persyaratan Material

- a. Memiliki integritas, dedikasi dan moral. Artinya calon anggota Dewan Komisaris tidak pernah baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang, cidera janji dan perbuatan lainnya yang merugikan Perseroan baik pada saat bekerja maupun pernah bekerja pada Perusahaan lain.
- b. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Perseroan.
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Persyaratan Lainnya

- a. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- c. Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lainnya, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pada jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lainnya jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

to the needs and nature of the Company's business. The criteria for members of the Board of Commissioners are as follows:

1. Formal Requirements

Those who can be appointed to the Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:

- a. Have been declared bankrupt;
- b. Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners or a member of a Supervisory Board that was found guilty of causing IPC or a Public Company to be declared bankrupt; or
- c. Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector.

2. Material Requirements

- a. Has integrity, dedication and morals. This means that prospective members of the Board of Commissioners have never been directly or indirectly involved in practices that deviate, breach promises, and other actions that affected the Company they worked at or other companies.

- b. Must understand the Company's management issues relating to one of the management functions.

- c. Have sufficient knowledge in the Company's business area.

- d. Can provide sufficient time to carry out their duties and obligations.

3. Other Requirements

- a. Cannot be administrators of political parties and / or legislative candidates and/or legislators.

- b. Cannot be a Regional Head/Deputy Head candidate and/or a Regional Head/Deputy Head.

- c. Cannot currently be serving as a member of the Board of Commissioners and/or the Supervisory Board in other SOEs/Companies, except by signing a statement of willingness to resign from their other position if elected as a member of the Company's Board of Commissioners.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

- d. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pada salah satu jabatan tersebut jika dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - e. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - f. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris).
 - g. Memiliki kriteria independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Cannot hold a position as a member of the Board of Directors in another SOE, Private Owned Business Entity, or hold a position prohibited by laws and regulations on holding concurrent positions as a Member of the Board of Commissioners, or a position that has the potential to cause a conflict of interest except by signing a statement of willingness to resign from one of these positions if elected as a member of the Board of Commissioners.
 - e. Has not served as a member of the Board of Commissioners of the Company for 2 (two) consecutive periods.
 - f. Is physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could hinder their duties as a member of the Board of Commissioners).
 - g. Has the independence criteria in accordance with applicable laws and regulations.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

SUMBER BAKAL CALON DEWAN KOMISARIS

Sumber bakal calon Dewan Komisaris berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional Pemerintah;
4. Sumber lain.

PENJARINGAN

1. Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, Deputy Kementerian BUMN mencari bakal calon dari berbagai sumber;
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputy Kementerian BUMN yang membidangi pengelolaan data dan informasi Dewan Komisaris BUMN (Deputi).

PENILAIAN

1. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain;

BOARD OF COMMISSIONERS NOMINATION AND SELECTION PROCESS

PROSPECTIVE CANDIDATES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The prospective members for the Board of Commissioners comes from:

1. Former SOE Directors;
2. SOE Commissioners;
3. Structural officials and functional government officials;
4. Other sources.

NETWORK

1. Ministry of SOE, Secretary to the Ministry of SOE, Deputy Minister of SOEs will look for candidates from various sources;
2. All candidates will be administered by the Deputy Ministry of SOEs in charge of managing the data and information of the SOE Board of Commissioners (Deputy).

ASSESSMENT

1. Candidates nominated as candidates for membership of the Board of Commissioners are those who have been declared to meet formal requirements, material requirements, and other requirements;

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

2. Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain oleh bakal calon yang bersangkutan;
 3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komiasris dan Menteri BUMN memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Penilaian pemenuhan persyaratan materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri;
 5. Penilaian pemenuhan persyaratan materiil dilakukan dengan cara:
 - a. Menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan
 - b. Khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau
 - c. Wawancara.
 6. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan";
 7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan Pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden;
 8. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi Teknis dan Sekretaris Kementerian BUMN atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
2. Compliance evaluations for formal requirements and other requirements are carried out by the deputy. In the event that the Deputy does not have sufficient data and/or information, proof can be by a signed statement by the prospective candidate regarding fulfillment of the formal requirements and other requirements;
 3. If in the future it turns out that the statement referred to in number 2 has been proven to be incorrect, then the person concerned is disrespectfully discharged from their position on the Board of the Commissioner, and the Ministry of SOEs will handle the incorrect statement in accordance with the applicable provisions;
 4. The assessment of material requirements fulfillment will be carried out by a Team formed by the Minister;
 5. The assessment for fulfillment of material requirements is carried out by:
 - a. Assessing the curriculum vitae and supporting documents; and
 - b. Specifically for assessing integrity, by a written statement from the candidate concerned; and / or
 - c. By interview
 6. The assessment results will be presented in the form of qualitative narratives with "Recommended" or "Not Recommended " criteria;
 7. The assessment referred to in number 5 is not carried out if the prospective candidate is an *ex officio* official and a Government official appointed by a Presidential Decree;
 8. Reappointment for Board of Commissioners members in the same SOE, is carried out based on an evaluation by the Technical Deputy and Secretary of the Ministry of SOE on the ability of the concerned person in carrying out their duties during their term of office. The results of the study will be presented in the form of qualitative narratives.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS BOARD MANUAL

In greater detail, the Board of Commissioners guidelines and work rules are specified in the Board Manual which outlines the Work Procedures that cover guidelines for the Board of Commissioners describing the stages of activities in a structured, systematic, easy to comprehend and consistent manner as a reference for the Commissioners in discharging their respective duties to achieve IPC's vision and mission.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris.
2. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris.
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris dan Benturan Kepentingan.
5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
6. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

PERIODE 1 JANUARI 2018 - 22 JANUARI 2018

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris IPC periode 1 Januari – 22 Januari 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

The Board of Commissioners Working Procedure are specifically explained in Chapter III, which includes:

1. The Board of Commissioners function.
2. The Board of Commissioners Criteria, Composition and Terms of office.
3. The Introduction and Capability Improvement Programs
4. The Board of Commissioners Ethics and Conflict of Interest.
5. The Board of Commissioners Duties, Authorities, and Responsibilities.
6. The Board of Commissioners Members General Provisions.
7. The Board of Commissioners Performance Appraisal.
8. The Board of Commissioners Supporting Organs.

BOARD OF COMMISSIONER COMPOSITION AND APPOINTMENT BASIS

During 2018 there was 1 (one) change in the Board of Commissioners composition as explained below:

PERIOD JANUARY 1 - JANUARY 22, 2018

The number and membership composition of IPC's Board of Commissioners for the period of 1 January - 22 January 2018 amounted to 6 (six) people consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 4 (four) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of the IPC Head Office.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Tumpak H. Pangabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen The President Commissioner and Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-79/MBU/06/2015 Tanggal 03 Juni 2015 dan SK Komisaris Independen No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-79/MBU/06/2015 dated June 3, 2015 and Independent Commissioner Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	3 Juni 2015 June 3, 2015
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	01 Maret 2016 March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	01 Maret 2016 March 1, 2016

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/ MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	01 Maret 2016 March 1, 2016
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-133/ MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 SOE Ministry Decree No. SK-133/ MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-215/ MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 SOE Ministry Decree No. SK-215/ MBU/10/2017 dated October 4, 2017	04 Oktober 2017 October 4, 2017

PERIODE 22 JANUARI 2018 - 31 DESEMBER 2018

Berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/MBU/01/2018, Bapak R. Agus H. Purnomo diangkat sebagai Komisaris IPC. Maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD JANUARY 22 - DECEMBER 31, 2018

Based on SOE Ministry Decree No. SK-26/MBU/01/2018, R. Agus H. Purnomo was appointed as Commissioner of IPC. The number and membership composition of IPC's Board of Commissioners for the period until December 31, 2018 amounted to 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of the IPC Head Office.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen The President Commissioner and Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-79/ MBU/06/2015 Tanggal 03 Juni 2015 dan SK Komisaris Independen No. SK-40/ MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-79/ MBU/06/2015 dated June 3, 2015 and Independent Commissioner Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	3 Juni 2015 June 3, 2015
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/ MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/ MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-40/ MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 SOE Ministry Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-133/ MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 SOE Ministry Decree No. SK-133/ MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No. SK-215/ MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 SOE Ministry Decree No. SK-215/ MBU/10/2017 dated October 4, 2017	4 Oktober 2017 October 4, 2017
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN No SK-26/ MBU/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018 SOE Ministry Decree No. SK-26/ MBU/01/2018 dated January 22, 2018	22 Januari 2018 January 22, 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan IPC kepada Komisaris, IPC memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru. Tujuan program memberikan gambaran tentang Profil Perusahaan yang berisi: materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan, strategi yang sedang dijalankan, aktivitas bisnis, RJPP, Tata Kelola Perusahaan serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh IPC karena latar belakang anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program pengenalan adalah agar para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi IPC secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

In the framework of competency development and the introduction of a specialized IPC Commissioner, IPC has an introduction program for new Commissioners that aims to give an overview of the Company profile such as Company's condition in general, financial condition, business activity, Long-term Plans, Governance and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

IPC provides the introduction program due to the diverse background of members of the Board of Commissioners as representatives of the Shareholder. The program aims to let members of the Board of Commissioners get to know each other so they can work together as a solid, comprehensive and effective team. The following outline the introduction program:

1. For newly appointed members of the Board of Commissioners, an introduction program should be conducted to give a general overview of IPC's condition.
2. The person in charge of the introduction program is the Corporate Secretary or a competent official appointed specifically for the task.
3. The Introduction Program must cover:
 - a. Implementation of *Good Corporate Governance* principles at IPC;
 - b. Information about the duties and responsibilities of the Boards of Commissioners and Directors and matters unlawful for them;
 - c. An overview of IPC in relation to its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, risks, internal controls and other strategic issues;

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

- d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas IPC, kunjungan ke Kantor-kantor Cabang, pengkajian dokumen IPC atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Komisaris baru yakni Bapak R. Agus H. Purnomo dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Januari 2018 bertempat di Kantor Pusat IPC.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Adapun pembagian tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- d. An overview related to delegation of authority, internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee.

4. This introduction program may be given as presentations, meetings, visit to IPC's facilities, visits to Branches, reviews of IPC documents or other programs that serve the purpose.

The introduction program for the new Board of Commissioners Member, R. Agus H. Purnomo, was held on Friday, January 26, 2018 at the IPC Head Office.

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISORY DUTIES

The Board of Commissioners' job descriptions are as follows:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Board of Commissioners Job Descriptions

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Area
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Koordinator Umum dan GCG. Coordinator
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Bidang Teknik, Manajemen Risiko dan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Engineering, Risk Management and Risk Management Monitoring Committee Chairman.
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Sosial, PKBL, CSR dan Kemasyarakatan. Social Affairs, PKBL, CSR and Community.
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Bidang Operasional dan Sistem Informasi. Operations and Information Systems.
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Bidang Audit, Keuangan dan Ketua Komite Audit. Audit, Finance and Audit Committee Chairman.
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Bidang Sumber Daya, Remunerasi, Hukum dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Resources, Remuneration, Law and Nomination and Remuneration Committee Chairman.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Bidang Komersial, Pengembangan Usaha dan Fungsi Pembinaan Anak Perusahaan. Commercial, Business Development and Subsidiaries Guidance Functions.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN PENERAPANNYA

Dalam kebijakan tertulis IPC, tidak terdapat pengaturan mengenai keragaman Dewan Komisaris. Hal ini mengingat pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dengan persyaratan dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam bidang usaha kepelabuhanan, tidak terdapat peraturan dari regulator yang mewajibkan persyaratan tertentu bagi anggota Dewan Komisaris.

Namun demikian, dapat disampaikan keberagaman Dewan Komisaris IPC adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
2. Dari sisi usia, usia anggota Dewan Komisaris memiliki rentang yang cukup panjang, dari yang termuda berusia 52 (lima puluh dua) tahun dan usia tertinggi adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun.
3. Latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris cukup beragam, antara lain dari bidang studi ekonomi, manajemen, hukum, teknik, dan militer, yang berasal baik dari institusi pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.
4. Dari sisi latar belakang pengalaman pekerjaan, terdapat anggota Dewan Komisaris baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas di bidang Regulator Perhubungan, Militer, Penegak Hukum, Kepabeanan, dan Keuangan.

Keanekaragaman usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pekerjaan tersebut menjadikan Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan perusahaan, serta menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pada periode 2018, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY POLICY

In IPC's written policy, there is no regulation regarding the diversity of the Board of Commissioners. This is in line with the appointment of the Board of Commissioners by the Shareholder with the requirements and procedures set forth in Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 regarding Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises. In addition, there is no regulation from a regulator in the seaports business for certain requirements for the members of the Board of Commissioners.

Nevertheless, the diversity IPC'S Board of Commissioners is described as follows:

1. Board of Commissioners has 5 (five) Commissioners and 2 (two) Independent Commissioners.
2. In terms of age, the age of members of the Board of Commissioners has a fairly wide range, from the youngest 52 (fifty-two) years old and the highest age is 75 (seventy five) years.
3. Educational background of the members of the Board of Commissioners is quite diverse, from economic, management, legal, technical, and military studies from both domestic and foreign educational institutions.
4. From background of work experience, there are members of the Board of Commissioners who are still active and who have retired from their previous works in transportation sectors, military officers, law enforcement officers and auditor regulators.

The diversity of age, educational background, and work experience enriches the Board of Commissioners' perspectives so to have a comprehensive understanding of the management of the Company, as well as the added value for the execution of duties and functions of the Board of Commissioners. In 2018, the Board of Commissioners composition diversity was reflected in education, work experience, age and genders shown in the table below:

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition Diversity

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Usia <i>Age</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	75 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Hukum Law	Aparat Penegak Hukum Law Enforcement Official	Hukum Law
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	55 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Teknik Sipil, Sistem Transportasi, Perencanaan Kota, Keuangan Civil Engineering, Transportation Systems, Urban Planning, Finance	Peneliti dan Birokrat Researcher and Bureaucrat	Teknik Sipil, manajemen transportasi Civil Engineering, transportation management
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	71 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Ilmu politik, militer Political science, military	Militer Military	Kepemimpinan Leadership
Djadmiko	Komisaris Commissioner	63 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Administrasi Negara, Keuangan State Administration, Finance	Birokrat Bureaucrat	Administrasi dan manajemen
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	52 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Akuntansi, Ekonomi, Manajemen SDM Accounting, Economics, HR Management	Kepabeanan Customs	Akuntansi dan SDM Administration and management

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Usia <i>Age</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	62 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Hukum, Manajemen Internasional Law, International Management	Aparat Penegak Hukum Law Enforcement Official	Hukum, Manajemen Law, Management
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	57 Tahun / Years	Laki-Laki Male	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management	CEO BUMN, Birokrat CEO of SOE, Bureaucrat	Manajemen, transportasi Management, transportation

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan IPC yang dapat mempengaruhi independensinya.

BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATE RELATIONSHIPS

Members of the Board of Commissioners have no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or Shareholder or any other relationship with the IPC that may affect its independence.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Affiliations

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris <i>Board of Commissioners Financial, Family and Management Affiliations</i>					
Nama Komisaris <i>Commissioner's Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relationship with</i>			
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
		Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>		✓		✓
Montty Girianna	Komisaris <i>Commissioner</i>		✓		✓
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>		✓		✓
Djadmiko	Komisaris <i>Commissioner</i>		✓		✓
Kushari Suprianto	Komisaris <i>Commissioner</i>		✓		✓
D. Andhi Nirwanto	Komisaris <i>Commissioner</i>		✓		✓
R. Agus H. Purnomo	Komisaris <i>Commissioner</i>		✓		✓

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 14 ayat 32, anggota Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD maupun Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS POLICY

In accordance with the Company's Articles of Association, Article 14 paragraph 32, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in SOE, Regional SOE and Privately Owned Enterprises.
2. Other positions in accordance with the provisions of legislation, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads.
3. Other positions that may cause conflicts of interest.
4. Members of the Board of Commissioners and or the Supervisory Board of other SOE/Companies. Board of Commissioners Concurrent Positions

During 2018, the Board of Commissioners did not occupy concurrent positions that were prohibited in the Company's Articles of Association.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relationship with</i>											
	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>				Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>		Hubungan Kepengurusan <i>Relationship Management</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Concurrent Positions

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain <i>Position in Other Companies / Agencies</i>	Nama Perusahaan/ Instansi Lain <i>Name of Other Companies / Agencies</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>	-	-
Monty Girianna	Komisaris <i>Commissioner</i>	Deputi Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <i>Deputy Coordinating Minister for the Management of Energy, Natural Resources and the Environment</i>	Kementerian Koordinator Perekonomian <i>Coordinating Ministry for Economic Affairs</i>
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-	-

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies / Agencies	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies / Agencies
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) Head of Indonesia National Single Window Portal (PP-INSW) Management Unit	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	-	-
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris IPC telah diatur dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai dilingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Management of the Board of Commissioners conflict of interest in IPC is covered in the Board Manual. The Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, including:

1. Any activity that can affect their independence in carrying out their duties.
2. Completing the Special Register containing information on their and/or their families share ownership in other Companies, including if they do not have any share ownership, to be periodically update at the end of each year and notifying the Company if there is a change in data in accordance with the applicable legislation.
3. Not responding to requests from any party and for any reason, both for requests directly from certain parties including and not limited to officials / employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company insofar as this can affect decision making.
4. Guided not to use their position for personal interests or for the benefit of other people or parties involved that are contrary to the interests of the Company.
5. Disclosures in the event of a conflict of interest and the member of the Board of Commissioners concerned who may not be involved in the Company's decision-making process relating to this matter.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

Setiap awal tahun, semua anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Daftar Kepemilikan Saham dan Benturan Kepentingan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di IPC dan atau Perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Tiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perseroan maupun hubungan dengan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris IPC bertindak independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Dalam setiap surat rekomendasi dan persetujuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, selalui dilengkapi dengan pernyataan bebas benturan kepentingan, sehingga dapat menghindari adanya *conflict of interest* anggota Dewan Komisaris dalam setiap keputusan yang diambil.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris IPC telah melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki. Dewan Komisaris tidak memiliki saham baik di IPC maupun pada Perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	
		IPC	Perusahaan Lain <i>Other Company</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil

At the beginning of each year, all members of the Board of Commissioners sign an Integrity Pact, Business Code of Conduct Compliance, List of Share Ownership and Conflict of Interest. Members of the Board of Commissioners are also obliged to report if there is a change in status that affects their independence, including if there is a change in share ownership both personally and familial in IPC and / or other companies. The Secretary to the Board of Commissioners is tasked with ensuring this practice is carried out in accordance with the GCG principles.

Each member of the Board of Commissioners is required to act independently, without any conflict of interest that could interfere with their ability to carry out their tasks independently and critically, both in relation to any party related to the Company and relations with the Board of Directors.

All IPC Board of Commissioners members act independently and are free from any intervention from any party. In each recommendation and approval letter from the Board of Commissioners, there is a statement of free from conflict of interest, to avoid any conflict of interest of members of the Board of Commissioners in every decision taken.

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

All members of the IPC Board of Commissioners have reported their share ownership. The Board of Commissioners does not have any shares in either IPC or other companies.

Board of Commissioners Share Ownership

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	
		IPC	Perusahaan Lain <i>Other Company</i>
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil

KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris IPC saat ini adalah 7 (tujuh) orang dengan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang atau 28,57% dari jumlah Dewan Komisaris.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, Komisaris Independen IPC telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen <i>Independent Commissioners Criteria</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	
	Tumpak H. Panggabean	Suaidi Marasabessy
Tidak memiliki hubungan keuangan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no financial relationships that can affect their ability to act independently.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no management relationships that can affect their ability to act independently.	✓	✓
Tidak memiliki kepemilikan saham yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no share ownership that can affect their ability to act independently.	✓	✓

INDEPENDENT COMMISSIONER

In accordance with SOE Ministry Regulation No. PER-01/MBU/2011 at least 20% (twenty percent) of the Board of Commissioners members must be Independent Commissioners. IPC's Board of Commissioners currently has 7 (seven) members with 2 (two) Independent Commissioners or 28.57% of the total Board of Commissioners.

INDEPENDENT COMMISSIONER'S DETERMINATION CRITERIA

In accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011, the IPC Independent Commissioners have met the criteria as none of the members has financial relationship, management, share ownership and/or familial relationships with fellow members of BOC, members of the BOD, nor Controlling Shareholders of related SOEs, which may keep them from acting independently.

INDEPENDENT COMMISSIONERS' STATEMENT

Kriteria Komisaris Independen <i>Independent Commissioners Criteria</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	
	Tumpak H. Panggabean	Suaidi Marasabessy
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no family relationship with other members of the Board of Commissioners that can affect their ability to act independently.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no family relationship with members of the Board of Directors that can affect their ability to act independently.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no family relationship with the Controlling Shareholder that can affect their ability to act independently.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no relationship with other relevant BUMN that can affect their ability to act independently.	✓	✓



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* IPC.

JADWAL RAPAT

Rapat Internal Dewan Komisaris pada tahun 2018 direalisasikan 1 (satu) kali dalam satu minggu, walaupun dalam ketentuan perundang-undangan maupun *board manual* ditetapkan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Sementara Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi direalisasikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih Dewan Komisaris.
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Peserta rapat Dewan Komisaris terdiri dari semua anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadiri dalam rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

UNDANGAN RAPAT

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut rapat Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Board of Commissioners meetings are regulated in the IPC Articles of Association and the Manual Board.

MEETING SCHEDULE

The Board of Commissioners Internal Meeting in 2018 were held 1 (one) time per week, even though the statutory provision and board manual states they be held at least 1 (one) time per month. While the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors were held 1 (one) time per month.

Board of Commissioners meetings can be held at any time, if deemed necessary by:

1. One or more members of the Board of Commissioners.
2. A written request from one or more members of the Board of Commissioners.
3. These Board of Commissioners meetings may be immediate and/or strategic meetings.

MEETING PLACE

The Board of Commissioners meetings can be held at the place of IPC's domicile or place of business activities, or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING PARTICIPANTS

Participants in the Board of Commissioners' meetings consists of all members of the Board of Commissioners. If the Board of Commissioners deems it necessary, other parties can attend a Board of Commissioners meeting to provide any necessary explanations.

MEETING CALL

The meeting call is set as follows:

1. The Board of Commissioners meeting call is in writing by a President Commissioner (or member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner) and delivered within a period of at least 3 (three) days before the meeting, or in a shorter time for urgent matters;
2. The Board of Commissioners meetings call and implementation may be delegated to the Secretary to the Board of Commissioners, unless arranged otherwise by the Board of Commissioners meeting;

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

3. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

PIMPINAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

RISALAH RAPAT

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

3. The Board of Commissioners meetings call will include the event, date, time and venue;
4. The Board of Commissioners meetings call may be sent through electronic means (SMS, email and other electronic means) so that notices of the meeting agenda may be delivered more quickly, by following the procedures outlined in the Articles of Association concerning the formatting of written notices.

Meetings calls are not needed if all Board of Commissioners members are present at the meeting.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING QUORUM

The Board of Commissioners' meeting is legal and has the right to make binding decisions when attended or represented by more than 1/2 (one-half) of the number of members of the Board of Commissioners. Representing other members of the Board of Commissioners in meetings can only be done with written permission from the other member of the Board of Commissioners specifically given for this purpose and provided that 1 (one) member of the Board of Commissioners can only represent 1 (one) other member of the Board of Commissioners.

MEETING CHAIRMAN

The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, the Meeting shall be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

In the event that the President Commissioner does not make such an appointment, the longest serving member of the Board of Commissioners shall act as chair of the meeting, or if there are more than 2 (two) longest serving members, the oldest shall act as chair of the meeting.

MINUTES OF MEETINGS

Minutes of meeting must be made for each Board of Commissioners meeting.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

Minutes of meetings are signed by the Meeting Chairman and by all members of the Board of Commissioners present at the meeting. Minutes of meetings are made and administered by the Secretary to the Board of Commissioners, or other official appointed by the Board of Commissioners. The original minutes of the Board of Commissioners' meeting are submitted to the Board of Directors for safekeeping and maintenance, while the Board of Commissioners keeps a copy.

PENCATATAN/NOTULIS RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pencatatan/notulis rapat Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris.

MINUTE TAKER FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

The Minute Taker for Board of Commissioners Meetings is the Secretary to the Board of Commissioners

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS (DENGAN MENGUNDANG KOMITE)

THE BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING PLAN (INVITING THE COMMITTEES)

No.	Minggu Week	Agenda
1.	Minggu #01 Januari 2018 Week # 01 January 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan KPI Dewan Komisaris Tahun 2017. Pembahasan Realisasi Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2017. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Discussion of 2017 Board of Commissioners KPI. Discussion on the Board of Commissioners of the 2017 Work Plan and Activity Realization Report. Others.
2.	Minggu #02 Januari 2018 Week # 02 January 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Others
3.	Minggu #03 Januari 2018 Week # 03 January 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan Bahan Radirkom. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Radirkom Materials Discussion. Others

No.	Minggu Week	Agenda
4.	Minggu #01 Februari 2018 Week # 01 February 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
5.	Minggu #02 Februari 2018 Week # 02 February 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
6.	Minggu #03 Februari 2018 Week # 03 February 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan atas Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. 4. Pembahasan Bahan Radirkom. 5. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the 2017 Financial Statements Audit Results. 4. Radirkom Materials Discussion. 5. Others
7.	Minggu #01 Maret 2018 Week # 01 March 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
8.	Minggu #02 Maret 2018 Week # 02 March 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
9.	Minggu #03 Maret 2018 Week # 03 March 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Minggu Week	Agenda
10.	Minggu #01 April 2018 Week # 01 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan KPI Dewan Komisaris Triwulan I/2018. 4. Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017. 5. Pembahasan Realisasi Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan I/2018. 6. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of Quarter I / 2018KPI Decree. 4. Discussion of the Board of Commissioners 2017 Annual Report. 5. Discussion of the Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Reports for the Quarter I/2018. 6. Others.
11.	Minggu #02 April 2018 Week # 02 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I/2018. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of Responses to the Quarterly/2018 Management Report. 4. Others.
12.	Minggu #03 April 2018 Week # 03 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
13.	Minggu #01 Mei 2018 Week # 01 May 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
14.	Minggu #02 Mei 2018 Week # 02 May 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others

No.	Minggu Week	Agenda
15.	Minggu #03 Mei 2018 Week # 03 May 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
16.	Minggu #01 Juni 2018 Week # 01 June 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
14.	Minggu #02 Juni 2018 Week # 02 June 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
18.	Minggu #03 Juni 2018 Week # 03 June 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
19.	Minggu #01 Juli 2018 Week # 01 July 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Laporan Pengawasan dan KPI Dekom Semester I/2018. 4. Pembahasan Realisasi Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Komite Dewan Komisaris Semester I/2018. 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the Board of Commissioners of Supervision and KPI Report Concept for the Semester I / 2018. 4. Discussion of realization on Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Report for Semester I / 2018. 5. Others.
20.	Minggu #02 Juli 2018 Week # 02 July 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I/2018. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of Responses to Management Reports for Semester I / 2018. 4. Others.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Minggu Week	Agenda
21.	Minggu #03 Juli 2018 Week # 03 July 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
22.	Minggu #01 Agustus 2018 Week # 01 August 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Evaluasi dan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan Pengelolaan Perusahaan. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies. 4. Others.
23.	Minggu #02 Agustus 2018 Week # 02 August 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Others
24.	Minggu #03 Agustus 2018 Week # 03 August 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radikom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
25.	Minggu #01 September 2018 Week # 01 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Evaluasi dan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan Pengelolaan Perusahaan. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies. 4. Others.

No.	Minggu Week	Agenda
26.	Minggu #02 September 2018 Week # 02 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Persiapan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion on Preparation of Financial Report Audit for Fiscal Year 2018. 4. Others.
27.	Minggu #03 September 2018 Week # 03 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
28.	Minggu #01 Oktober 2018 Week # 01 October 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Evaluasi dan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan Pengelolaan Perusahaan. 4. Pembahasan Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Triwulan III/2018. 5. Pembahasan Realisasi Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan III/2018. 6. Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. 7. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies. 4. Discussion of the Supervision and KPI Report for Quarter III / 2018. 5. Discussion of the Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Reports for the Quarter III/2018. 6. Discussion of the Board of Commissioners RKA for 2019. 7. Others.
29.	Minggu #02 Oktober 2018 Week # 02 October 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III/2018. 4. Pembahasan Usulan RKAP 2019. 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of Responses to the Quarter III/2018 Management Report. 4. Discussion of the 2019 RKAP Proposal. 5. Others.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Minggu Week	Agenda
30.	Minggu #03 Oktober 2018 Week # 03 October 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
31.	Minggu #01 November 2018 Week # 01 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Evaluasi dan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan Pengelolaan Perusahaan. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies. 4. Others
32.	Minggu #02 November 2018 Week # 02 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Usulan RKAP 2019. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion of the 2019 RKAP Proposal. 4. Others.
33.	Minggu #03 November 2018 Week # 03 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Bahan Radirkom. 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Radirkom Materials Discussion. 4. Others
34.	Minggu #01 Desember 2018 Week # 01 December 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. 3. Pembahasan Konsep Evaluasi dan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan Pengelolaan Perusahaan. 4. Pembahasan atas Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2019. 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results. 2. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Discussion Discussion of the Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies. 4. Discussion of the Board of Commissioners Response to the 2019 RKAP Proposal Concept. 5. Others.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Minggu Week	Agenda
35.	Minggu #02 Desember 2018 Week # 02 December 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Others
36.	Minggu #03 Desember 2018 Week # 03 December 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. Pembahasan atas Hal-hal yang perlu Mendapatkan Persetujuan/Tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan Bahan Radirkom. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results. Discussion of matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Radirkom Materials Discussion. Others

**AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DEWAN
 KOMISARIS**

**BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS AGENDA,
 DATES AND PARTICIPANTS**

RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

For 2018, the Board of Commissioners Meeting agenda, dates and participants were as follows:

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
1.	3 Januari 2018 January 3, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan <i>Assessment</i> GCG. Finalisasi Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP PT Pelindo II (Persero) Tahun 2018. Arahan Dewan Komisaris atas Penerapan Manajemen Risiko di PT Pelindo II (Persero). Evaluasi Kinerja Individu Anggota Dewan Komisaris Tahun 2017. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> GCG Assessment Preparation. Finalization of Board of Commissioners' Response to PT Pelindo II (Persero) RKAP 2018. Board of Commissioners Direction on Implementation of Risk Management at PT Pelindo II (Persero). 2017 Board of Commissioners Members Individual Performance Assessments. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Sedang menjalankan ibadah umroh Conducting Umrah
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang menjalankan ibadah umroh Conducting Umrah
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Sedang menjalankan ibadah umroh Conducting Umrah
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended				

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence	
2.	10 Januari 2018 January 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Usulan-Usulan Direksi yang perlu memperoleh Persetujuan/ Rekomendasi Dewan Komisaris. Penyusunan bahan paparan Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) dalam Konferensi IPC 2018. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended		
			Montty Girianna	Hadir Attended		
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended		
			Djadmiko	Hadir Attended		
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended		
3.	17 Januari 2018 January 17, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Lanjutan atas Usulan-Usulan Direksi yang perlu memperoleh Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris. Pembahasan Lanjutan atas Penyusunan bahan paparan Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) dalam Rakernas IPC 2018. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended		
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
			Djadmiko	Hadir Attended		
			Kushari Suprianto	Hadir Attended		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended		

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
4.	24 Januari 2018 January 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara Calon Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Finalisasi Hasil <i>Review</i> atas Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2017. 3. Finalisasi bahan paparan Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) dalam Rakernas IPC 2018. 4. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Interviewing Candidates for Nomination and Remuneration Committee Members. 2. Finalize Review Results for the 2017 SPI Audit Results Report. 3. Finalization of Preparation of materials by the PT Pelindo II (Persero) Board of Commissioners presentation at the 2018 IPC National Working Meeting. 4. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
5.	31 Januari 2018 January 31, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meeting. 2. Other Strategic Things. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
6.	7 Februari 2018 February 7, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Progres Report</i> Audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2017. 2. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements and PKBL Reports for 2017 Fiscal Year Progress Report. 2. Other Strategic Things. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Monttly Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
7.	14 Februari 2018 February 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Draft</i> Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja sama dengan Mitra di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) 2. Usulan yang perlu memperoleh persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. 3. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation with Partners in PT Pelindo II (Persero) 2. Proposals that need approval / recommendations from the Board of Commissioners. 3. Other Strategic Things. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Monttly Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	
8.	21 Februari 2018 February 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Progres Report</i> Audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Pelindo II (Persero) Tahun Buku 2017. 2. Usulan yang perlu memperoleh persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. 3. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements and PKBL Reports for 2017 Fiscal Year Progress Report. 2. Proposals that need approval/ recommendations from the Board of Commissioners. 3. Other Strategic Things. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Monttly Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
9.	28 Februari 2018 February 28, 2018	1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Februari 2018. 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meeting on 28 February 2018. 2. Other Strategic Things.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
10	7 Maret 2018 March 7, 2018	1. Pembahasan rencana pemberian pinjaman (<i>shareholder loan</i>) kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama. 2. Pembahasan usulan yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero). 3. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion for lending plan (<i>shareholder loan</i>) to PT Pelabuhan Indonesia Investama. 2. Discussion on proposals that need approval/recommendation from the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero). 3. Other Strategic Matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
11.	14 Maret 2018 March 14, 2018	1. Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi. 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion of proposed changes in organizational structure. 2. Other Strategic Matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
12.	21 Maret 2018 March 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Rencana IPO PT IKT Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> PT IKT's IPO plan Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
13.	28 Maret 2018 March 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Komisaris dengan Direksi tanggal 27 Maret 2018. Usulan yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero). Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Preparation for the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on March 27, 2018. Proposals that need approval/ recommendation from the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero). Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
14.	11 April 2018 April 11, 2018	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan calon Direksi Anak Perusahaan. 2. Hal- hal strategis lainnya. 1. Board of Commissioners Response on proposal for prospective Directors of Subsidiaries. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Menghadiri pencaanangan pembangunan Terminal Kijing Attending the Kijing Terminal construction
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Menghadiri pencaanangan pembangunan Terminal Kijing Attending the Kijing Terminal construction
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
15.	18 April 2018 April 18, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 2. Konsep KPI Individual Dewan Komisaris. 1. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 2. Concept for Board of Commissioners Individual KPI.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
16.	25 April 2018 April 25, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 2. Konsep KPI Individual Dewan Komisaris. 1. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 2. Concept for Board of Commissioners Individual KPI.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
17.	2 Mei 2018 May 2, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
18.	9 Mei 2018 May 9, 2018	1. Progres proyek-proyek strategis PT Pelindo II (Persero) 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Progress of PT Pelindo II (Persero) strategic projects 2. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
19.	16 Mei 2018 May 16, 2018	1. Arahan/nasihat Dewan Komisaris atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada PT Pelindo II (Persero). 2. Pemenuhan permintaan data bakal calon Direktur PT Pelindo II (Persero). 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Direction/advice from the Board of Commissioners on National Strategic Projects at PT Pelindo II (Persero). 2. Fulfillment of data requests for prospective Directors of PT Pelindo II (Persero). 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
20.	23 Mei 2018 May 23, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Matters that that need approval/ response from the Board of Commissioners. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
21.	30 Mei 2018 May 30, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar negeri, Overseas
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar negeri, Overseas
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
22.	6 Juni 2018 June 6, 2018	1. Pembahasan Data Talenta PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Talent Data of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
23.	28 Juni 2018 June 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Penghapusbukuan Aset dalam rangka IPO PT IKT. Persiapan Rapat Komisaris dengan Direksi tanggal 28 Juni 2018. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Proposed write-off of assets in the framework of PT IKT's IPO. Preparation for the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on 28 June 2018. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
24.	4 Juli 2018 July 4, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Progres Pengembangan Aplikasi <i>Digital Port</i>. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Progress in Developing Digital Port Applications. Matters that need approval/response from the Board of Commissioners. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
25.	11 Juli 2018 July 11, 2018	1. Usulan Kerja sama Pengelolaan Peti Kemas di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IPC TPK. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Cooperation in Container Management in the Tanjung Priok Port Branch with PT IPC TPK. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar kota Outside the City
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
26.	18 Juli 2018 July 18, 2018	1. Pengembangan <i>Human Capital Management System</i> . 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Development of Human Capital Management System. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
27.	25 Juli 2018 July 25, 2018	1. Persiapan Rapat Komisaris dengan Direksi tanggal 25 Juli 2018. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Preparation for the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on July 25, 2018. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
28.	1 Agustus 2018 August 1, 2018	1. PKBL PT Pelindo II (Persero). 2. Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Pelindo II (Persero) Semester I Tahun 2018. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. PKBL PT Pelindo II (Persero). 2. Board of Commissioners Concept Response for Management Report of PT Pelindo II (Persero) for the first semester of 2018. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
29.	8 Agustus 2018 August 8, 2018	1. Laporan dan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Komite. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Report and follow-up on Committee Coordination Meeting results. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
30.	15 Agustus 2018 August 15, 2018	1. Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2019. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Results of Board of Commissioners' Visit to Branches. 2. Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2019. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
31.	29 Agustus 2018 August 29, 2018	1. Usulan Penghapusbukuan Aset Lahan HPL di Cabang Bengkulu. 2. Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang. 3. Persiapan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 29 Agustus 2018. 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Writeoff of HPL Land Assets in Bengkulu Branch. 2. Follow-Up of Board of Commissioners Visit to Branches Results. 3. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on 29 August 2018. 4. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Sedang melaksanakan ibadah haji Conducting Haj
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
32.	5 September 2018 September 5, 2018	1. Finalisasi Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang. 2. Rencana penyusunan kajian Dewan Komisaris. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Finalization of Board of Commissioners Visit to Branches Results. 2. Plans for preparation of Board of Commissioners studies. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
33.	12 September 2018 September 12, 2018	1. Lanjutan mengenai rencana penyusunan kajian Dewan Komisaris. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Continuation of Plans for preparation of Board of Commissioners studies. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
34.	19 September 2018 September 19, 2018	1. Pembahasan usulan penghapusbukuan aset tetap. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on proposed fixed asset write-offs. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar negeri Overseas
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
35.	21 September 2018 September 21, 2018	1. Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Appointment of Acting Finance Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar negeri Overseas
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
36.	27 September 2018 September 27, 2018	1. Persiapan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 27 September 2018. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on September 27, 2018. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Sedang berada di luar negeri Overseas
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
37.	3 Oktober 2018 October 3, 2018	1. Perkembangan kajian atas pemanfaatan aset/lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 3. Arahan Dewan Komisaris atas penerapan Manajemen Risiko. 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Development on study for use of assets / land of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Progress of Financial Statements Audit for Fiscal Year 2018 3. Board of Commissioners Directives for Risk Management. 4. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
38.	10 Oktober 2018 October 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Kerja sama Optimalisasi Terminal Peti Kemas Ex JICT Terminal 2. Progres Penyusunan RKAP Tahun 2019. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Proposed Cooperation for Optimizing Ex JICT Terminal 2 Container Terminals. Progress of 2019RKAP Preparation. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang melaksanakan tugas di luar kotOutside the City
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
39.	17 Oktober 2018 October 17, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Progres penyusunan kajian pemanfaatan aset/lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pembahasan Proyek Strategis Pembangunan Terminal Kalibaru. Penetapan KPI Individual Dewan Komisaris Tahun 2018. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Progress on Development on study for use of assets/land of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on Kalibaru Terminal Development Strategic Project. Determination of Board of Commissioners Individual 2018 KPI. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
40.	24 Oktober 2018 October 24, 2018	1. Pembahasan Konsep RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019 RKAP Concept. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabea	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
41.	30 Oktober 2018 October 30, 2018	1. Persiapan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 30 Oktober 2018. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on October 30, 2018. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabea	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
42.	7 November 2018 November 7, 2018	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Board of Commissioners Responses to the 2018 Quarter III Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
43.	14 November 2018 November 14, 2018	1. Hasil Kajian Pemanfaatan Lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Land Use Study Results. 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
44.	21 November 2018 November 21, 2018	1. Penyempurnaan hasil kajian lahan. 2. Persiapan Rapat Komisaris dengan Direksi tanggal 21 November 2018. 3. Persiapan rapat kerja nasional. 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Improvement to the land studies results. 2. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meeting on November 21, 2018. 3. Preparation for national work meetings. 4. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
45.	28 November 2018 November 28, 2018	1. Pembahasan Finalisasi kajian Optimalisasi Lahan PT PTP. 2. Pembahasan Usulan IPO PT PTP. 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Finalization of PT PTP's Land Optimization study. 2. Discussion on Proposed PT PTP IPO. 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
46.	5 Desember 2018 December 5, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Surat Dewan Komisaris Penyerahan Hasil Kajian Optimalisasi Lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Konsep Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019. Usulan Kerja sama Aset Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Laporan Progres Pelaksanaan <i>Shareholder Loan</i> kepada PT PII. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
47.	12 Desember 2018 December 12, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
48.	19 Desember 2018 December 19, 2018	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Persiapan Rakomdir tanggal 19 Desember 2018; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Matters that need approval/ recommendation from the Board of Commissioners; 2. Preparation for Coordination Meeting on December 19, 2018; 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS PLAN

No.	Bulan Month	Agenda
1.	Januari 2018 January 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2017. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2018. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in December 2017. 3. Report on Performance Progress in each Directorate. 4. Discussion on 2018 RKAP Plan. 5. Discussion on Other Strategic Matters.
2.	Februari 2018 February 2018	1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2017. 5. Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2018. 6. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in January 2018. 3. Report on Performance Progress in each Directorate. 4. Discussion of 2017 Audit Year Results. 5. Discussion on Plan for Appointment of External Auditors (KAP) for 2018 Fiscal Year. 6. Discussion on Other Strategic Matters.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Bulan Month	Agenda
3.	Maret 2018 March 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2018. 3. Pembahasan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hasil Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya 5. Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2017. 6. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in February 2018. 3. Discussion on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on Audit Findings and Follow-Up Results 5. Discussion on GMS Preparation for Ratification of 2017 Annual Report. 6. Discussion on Other Strategic Matters.
4.	April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 3. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2018. 4. Pembahasan Hasil RUPS. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Report on Performance Progress of each Directorate. 3. Discussion on Quarterly I / 2018 Management Reports. 4. Discussion on GMS Results. 5. Discussion on Other Strategic Matters.
5.	Mei 2018 May 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan April 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in April 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on Other Strategic Matters.
6.	Juni 2018 June 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in May 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on Other Strategic Matters.
7.	Juli 2018 July 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Telaah atas Pelaksanaan RKAP 2018. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Management Semester I. Report 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Review on 2018 RKAP. 5. Discussion on Other Strategic Matters.

No.	Bulan Month	Agenda
8.	Agustus 2018 August 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in July 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on Other Strategic Matters.
9.	September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Usulan RKAP 2019. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in August 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on 2019 RKAP Proposal. 5. Discussion on Other Strategic Matters.
10.	Oktober 2018 October 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Usulan RKAP 2019. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Quarter III / 2018 Management Reports. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on 2019 RKAP Proposal. 5. Discussion on Other Strategic Matters.
11.	November 2018 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2018. 3. Laporan Progres Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Usulan RKAP 2019. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in October 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on 2019 RKAP Proposal. 5. Discussion on Other Strategic Matters.
12.	Desember 2018 December 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Rapat Terdahulu. 2. Pembahasan Kinerja Bulan November 2018. 3. Laporan <i>Progress</i> Kinerja Masing-masing Direktorat. 4. Pembahasan Hasil Audit Interim. 5. Pembahasan Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Previous Meeting Results. 2. Discussion on Performance in November 2018. 3. Report on Performance Progress of each Directorate. 4. Discussion on Interim Audit Results. 5. Discussion on Other Strategic Matters.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda
1.	31 Januari 2018 January 31, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 22 Desember 2017. Laporan Konsolidasi IPC <i>unaudited</i> tahun 2017. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Target Kinerja tahun 2018 (tindak lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS Pengesahan RKAP tahun 2018). Hal-hal strategis lainnya.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Throughout 2018, the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors agenda, dates and participants were as follows:

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>
Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended
Montty Girianna	Hadir Attended
Suaidi Marasabessy	Hadir Attended
Djadmiko	Tidak Hadir Absent
Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent
D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended
R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Prasetyadi	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	
2.	28 Februari 2018 February 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 31 Januari 2018. Laporan Keuangan dan Laporan PKBL Audited IPC Tahun Buku 2017. Hasil <i>assessment</i> GCG PT Pelindo II (Persero) Tahun 2017. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended	
3.	28 Maret 2018 March 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Februari 2018. Laporan Konsolidasi IPC sampai dengan bulan Februari 2018. Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2017. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR-RI Accompanying the working visit of DPR-RI Members
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR ke Palembang Accompanying the working visit of DPR Members to Palembang
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Menjalankan ibadah umroh Conducting Umroh

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	
4.	25 April 2018 April 25, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Maret 2018. Laporan Konsolidasi IPC Triwulan I 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on the Coordination Meeting results on March 28, 2018. First Quarter 2018 IPC Consolidation Report. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Hadir Attended	
5.	30 Mei 2018 May 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Maret 2018. Laporan Konsolidasi IPC Triwulan I 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on the Coordination Meeting results on March 28, 2018. First Quarter 2018 IPC Consolidation Report. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Tidak Hadir Absent	Berada di luar negeri Overseas
	Berada di luar negeri Overseas	Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Prasetyadi	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	
6.	28 Juni 2018 June 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 Mei 2018. Laporan Konsolidasi IPC sampai dengan bulan Mei 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow-up on the Coordination Meeting results on 30 May 2018. IPC Consolidation Report until May 2018. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Tidak Hadir Absent	
7.	25 Juli 2018 July 25, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Juni 2018. Laporan Manajemen Konsolidasian IPC sampai dengan Triwulan II Tahun 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on the Coordination Meeting results on 28 June 2018. IPC Consolidated Management Reports up to Quarter II of 2018. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Traveling Overseas.
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	
8.	29 Agustus 2018 August 29, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 25 Juli 2018. Laporan Konsolidasi IPC sampai dengan bulan Juli 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on the Coordination Meeting results on July 25, 2018. Consolidation Report of the IPC until July 2018. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Hadir Attended	
9.	27 September 2018 September 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 29 Agustus 2018. Laporan Manajemen Konsolidasian IPC sampai dengan bulan Agustus 2018. Progres Penyusunan RKAP IPC Tahun 2019. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow-up on the Coordination Meeting results on 29 August 2018. IPC Consolidated Management Reports up to August 2018. Progress of IPC 2019 RKAP Preparation. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Hadir Attended	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Traveling Overseas.
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
	Berada di luar negeri Overseas	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Iman Rachman	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan lain Carrying out other assignment

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	
10.	30 Oktober 2018 October 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2018. Usulan RKAP IPC Tahun 2019. Laporan Manajemen Triwulan III IPC Tahun 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on the Coordination Meeting results on September 27, 2018. Proposed IPC RKAP in 2019. Management Report for IPC Third Quarter 2018. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Hadir Attended	
			Kushari Suprianto	Hadir Attended	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo*	Tidak Hadir Absent	
11.	21 November 2018 November 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 Oktober 2018. Laporan Konsolidasi IPC sapa dengan bulan Oktober 2018. Laporan masing-masing Direktur Bidang. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Follow-up on the Coordination Meeting results on 30 October 2018. IPC Consolidation Report reaches October 2018. Report of each Director. Other strategic matters. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended	
			Montty Girianna	Hadir Attended	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah (Plt. Dir Keu)	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Prasetyadi	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Rizal Ariansyah (Plt. Dir Keu)	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan lain Carrying out other assignment

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>BOC Participants</i>	Kehadiran <i>Attended</i>
12.	19 Desember 2018 December 19, 2018	1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 21 November 2018. 2. Laporan Konsolidasi IPC sampai dengan bulan November 2018. 3. Laporan masing-masing Direktur Bidang. 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the Coordination Meeting results on 21 November 2018. 2. IPC Consolidation Report until November 2018. 3. Report of each Director. 4. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Attended
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent
			Suaidi Marasabessy	Hadir Attended
			Djadmiko	Hadir Attended
			Kushari Suprianto	Hadir Attended
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Attended
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Attended

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

During 2018, the Board of Commissioners held 48 (forty eight) Board of Commissioners meetings, and 12 (twelve) joint meetings with the Board Directors. The frequency and attendance for each Board of Commissioners meeting is as follows:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Frequency and Attendance

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meeting</i>			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage Attended</i>			Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage Attended</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>	Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	48	43	90%	12	11	92%
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	48	23	48%	12	6	50%

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat Direksi <i>BOD Participant</i>	Kehadiran <i>Attended</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
		Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Saptono R. Irianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan lain Carrying out other assignment
		Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		Prasetyadi	Hadir Attended	
		Widyaka Nusapati	Hadir Attended	
		Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan lain Carrying out other assignment
		Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meeting</i>			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage Attended</i>			Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage Attended</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>	Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	48	41	85%	12	11	92%
Djadmiko	Komisaris Commissioner	48	40	83%	12	8	67%
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	48	34	71%	12	9	75%
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	48	48	100%	12	12	100%
R. Agus H. Purnomo*	Komisaris Commissioner	45	13	29%	12	5	42%
Rata-rata Presentase Kehadiran Average Percentage Presence		-	-	72,92%	-	-	74,28%

*Mulai menjabat sejak 22 Januari 2018 sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-26/MBU/01/2018

* Started in office on January 22, 2018 in accordance with Ministry of SOE Decree Number: SK-26/MBU/01/2018

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018.

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-547/MBU/D4/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

The Board of Commissioners competency development can be seen in the Board of Commissioners Profile Chapter, Competency Development Sub-Chapter in this Annual Report.

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION POLICY

Formulation of remuneration refers to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determination of Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Ministry of SOEs Regulation NO. PER-06/MBU/06/2018.

The remuneration determination for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners covering salary/honorarium, allowances, facilities and tantiem/incentives is stipulated in Ministry of SOEs Letter No. S-547/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018 concerning the Submission of remuneration determination for the Board of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The procedures for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors starts with a proposal from the Board of Directors. The Board of Directors requests a third party (consultant) to perform a review of the remuneration of the President Director. The results of the consultant's review are submitted to the Board of Commissioners for recommendation. The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. The Board of Commissioners recommendations are submitted to the Shareholder for approval dalam RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

Income in the form of salary/honorarium, allowances and facilities are set by taking into account factors such as revenue, assets, financial conditions and ability of the

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

company, rate of inflation and other relevant factors, and should not conflict with legislation.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

Determination of variable income in the form of allowances and tantiem is conducted by considering the factors such as target achievement, the level of soundness and financial ability and other relevant factors.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION STRUCTURE AND NOMINAL / REMUNERATION COMPONENTS

Adapun struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

The structure for determining the Board of Commissioners remuneration is as follows:

Jabatan <i>Position</i>	Remunerasi <i>Remuneration</i>	Jumlah <i>Total</i>	Nominal
Komisaris Utama President Commissioner	Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor pejabat 90% dari Komisaris Utama. The President Commissioner Honorarium is determined as a factor of 45% from the President Director while the other Commissioners Honorarium is determined as a factor of 90% of the President Commissioner.	90.000.000,00
Dewan Komisaris Board of Commissioner	Honorarium	Gaji anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Komisaris Utama. Salary for members of the Board of Commissioners is determined by a factor of 90% from the President Commissioner	81.000.000,00
Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris President Commissioner and Board of Commissioner Member	Tunjangan Allowance		
	Hari Raya led Celebration	1 kali honorarium 1 time honorarium	90.000.000,00
	Transportasi Transportation	20% x honorarium per bulan 20% x honorarium per month	18.000.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximum premium of 25% x annual salary	270.000.000,00
Dewan Komisaris Board of Commissioner	Tunjangan Allowance		
	Hari Raya led Celebration	1 kali honorarium 1 time honorarium	81.000.000,00
	Transportasi Transportation	20% x honorarium per bulan 20% x honorarium per month	16.200.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximum premium of 25% x annual salary	243.000.000,00

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal
Fasilitas Facilities			
Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris President Commissioner and Board of Commissioner Member	Kesehatan Healthcare	<p>Setiap Dewan Komisaris berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018.</p> <p>Each member of Board of Commissioners is entitled to healthcare service facilities provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with details stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOE No. PER-06/MBU/06/2018.</p>	Biaya pengobatan/ Asuransi kesehatan Medical expenses/Health insurance
	Bantuan Hukum Legal Assistance	<p>Setiap Dewan Komisaris berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018.</p> <p>Each Board of Commissioners is entitled to a legal assistance with details as stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018.</p>	Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan. Funding of attorney's office/legal consultant services to include examination process as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished, the funding become the person's burden
	Tantiem	<p>Sesuai dengan Surat dari Kementerian BUMN Nomor S-547/MBU/D4/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penyerahan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</p> <p>In accordance with the Ministry of SOE Letter No. S-547/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018 concerning Submission for Determining Income for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Directors and Commissioners</p>	

Remunerasi Dewan Komisaris dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners remuneration for one year is grouped in a range of income levels as follows:

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration by Group

Jumlah Remunerasi <i>Total Remuneration</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Above Rp1 billion - Rp2 billion	7 orang / people
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Above Rp500 million - Rp1 billion	
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	

*) sebelum memperhitungkan tantiem

*) before take into account the tantiem

**KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN
 TUGAS DEWAN KOMISARIS**

**BOARD OF COMMISSIONERS DECISIONS,
 RECOMMENDATIONS AND DUTIES**

KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

**BOARD OF COMMISSIONERS DECISIONS AND
 RECOMMENDATIONS**

No.	Tanggal <i>Date</i>	Perihal <i>Subject</i>
1.	3 Januari 2018 January 3, 2018	02/DK/PI.II/I-2018 Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo II (Persero) Tahun 2018. 02/DK/PI.II/I-2018 The Board of Commissioners response to PT Pelindo II (Persero) 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).
2.	10 Januari 2018 January 10, 2018	04/DK/PI.II/I-2018 Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Pelindo II (Persero) Triwulan III Tahun 2017. 04/DK/PI.II/I-2018 Evaluation of Risk Management Implementation at PT Pelindo II (Persero) Third Quarter of 2017.
3.	17 Januari 2018 January 17, 2018	06/DK/PI.II/I-2018 Persetujuan Kerja sama Penyaluran Dana Program Kemitraan. 06/DK/PI.II/I-2018 Cooperation Agreement on Distribution of Partnership Program Funds.
4.	17 Januari 2018 January 17, 2018	07/DK/PI.II/I-2018 Rekomendasi Kerja sama Pemanfaatan Lahan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan PT Asianagro Agungjaya. 07/DK/PI.II/I-2018 Cooperation Recommendations for Land Use at Teluk Bayur Port Branch with PT Asianagro Agungjaya.
5.	15 Februari 2018 February 15, 2018	14/DK/PI.II/I-2018 Tanggapan atas <i>Draft</i> Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan PT Pelindo II (Persero). 14/DK/PI.II/I-2018 Response to the Draft Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation with Partners in PT Pelindo II (Persero).
6.	21 Februari 2018 February 21, 2018	18/DK/PI.II/I-2018 Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Belinyu, Cabang Pelabuhan Pangkal Balam. 18/DK/PI.II/I-2018 Plans for Cooperation in Land Use in the Belinyu Area, Pangkal Balam Port Branch.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Perihal Subject
7.	7 Maret 2018 March 7, 2018	22/DK/PI.II/III-2018 Tanggapan atas Usulan Penghapusbukuan Persediaan di Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. 22/DK/PI.II/III-2018 Response to the Proposal for Inventory write-off at the Sunda Kelapa Port Branch.
8.	7 Maret 2018 March 7, 2018	23/DK/PI.II/III-2018 Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. 23/DK/PI.II/III-2018 Recommendations for the Proposal for write-off of Fixed Assets at Tanjung Priok Port Branch.
9.	14 Maret 2018 March 14, 2018	26/DK/PI.II/III-2018 Usulan Perubahan Anggaran Dasar. 26/DK/PI.II/III-2018 Proposed Amendment to Articles of Association.
10.	14 Maret 2018 March 14, 2018	27/DK/PI.II/III-2018 Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Anak Perusahaan. 27/DK/PI.II/III-2018 Process for Dismissal and Appointment of Directors at Subsidiaries.
11.	21 Maret 2018 March 21, 2018	29/DK/PI.II/III-2018 Persetujuan Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 29/DK/PI.II/III-2018 Approval of Cooperation Guidelines with Partners in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
12.	21 Maret 2018 March 21, 2018	30/DK/PI.II/III-2018 Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. 30/DK/PI.II/III-2018 Approval of Change in Head Office Organizational Structure.
13.	26 Maret 2018 March 26, 2018	33/DK/PI.II/III-2018 Laporan Dewan Komisaris Tahun 2017 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 33/DK/PI.II/III-2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners 2017 Report.
14.	28 Maret 2018 March 28, 2018	34/DK/PI.II/III-2018 Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Operasi dan Sistem Informasi. 34/DK/PI.II/III-2018 Approval of Amendment to the Organizational Structure of Operations and Information Systems Directorate.
15.	28 Maret 2018 March 28, 2018	35/DK/PI.II/III-2018 Tanggapan atas Rencana IPO PT IKT. 35/DK/PI.II/III-2018 Response to PT IKT's IPO Plan.
16.	2 April 2018 April 2, 2018	36/DK/PI.II/IV-2018 Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2017. 36/DK/PI.II/IV-2018 Board of Commissioners Response on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audited Annual Report for the 2017 Fiscal Year.
17.	18 April 2018 April 18, 2018	40/DK/PI.II/IV-2018 Tanggapan atas Usulan Calon Direksi Anak Perusahaan. 40/DK/PI.II/IV-2018 Response to the Proposal for Prospective Directors at Subsidiaries.
18.	26 April 2018 April 26, 2018	46/DK/PI.II/IV-2018 Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 46/DK/PI.II/IV-2018 Board of Commissioners Report on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2018 First Quarter.
19.	2 Mei 2018 May 2, 2018	49/DK/PI.II/V-2018 Pemberian Pinjaman (<i>Shareholder loan</i>) Kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama. 49/DK/PI.II/V-2018 Shareholder loan to PT Pelabuhan Indonesia Investama.

No.	Tanggal Date	Perihal Subject
20.	2 Mei 2018 May 2, 2018	50/DK/PI.II/V-2018 Tanggapan Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 50/DK/PI.II/V-2018 Response on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2018 First Quarter Management Report.
21.	9 Mei 2018 May 9, 2018	52/DK/PI.II/V-2018 Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan eks Bangunan Milik PT Berdikari (Persero). 52/DK/PI.II/V-2018 Recommendations on Proposal for Writing Off Buildings of PT Berdikari (Persero).
22.	9 Mei 2018 May 9, 2018	53/DK/PI.II/V-2018 Tanggapan atas Usulan Calon Direksi Anak Perusahaan. 53/DK/PI.II/V-2018 Response to Proposal for Prospective Directors at Subsidiaries.
23.	9 Mei 2018 May 9, 2018	54/DK/PI.II/V-2018 Tanggapan atas Usulan Calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. 54/DK/PI.II/V-2018 Response to Proposal for Prospective Directors and Commissioners at Subsidiaries .
24.	16 Mei 2018 May 16, 2018	56/DK/PI.II/V-2018 Permintaan Data Talenta PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 56/DK/PI.II/V-2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Talent Data Request.
25.	16 Mei 2018 May 16, 2018	57/DK/PI.II/V-2018 Progres Proyek Strategis Nasional pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 57/DK/PI.II/V-2018 National Strategic Project Progress at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
26.	24 Mei 2018 May 24, 2018	60/DK/PI.II/V-2018 Tanggapan atas Usulan Calon Direktur Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal. 60/DK/PI.II/V-2018 Response to the Proposed Candidate for Independent Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal .
27.	24 Mei 2018 May 24, 2018	61/DK/PI.II/V-2018 Pemenuhan Permintaan Data/Dokumen Pemeriksaan BPK RI. 61/DK/PI.II/V-2018 Fulfillment of Requests for Examination of BPK RI Data / Documents.
28.	24 Mei 2018 May 24, 2018	62/DK/PI.II/V-2018 Penunjukan Kantor Akuntan Publik. 62/DK/PI.II/V-2018 Appointment of Public Accountant Office.
29.	30 Mei 2018 May 30, 2018	65/DK/PI.II/V-2018 Penunjukan Kantor Akuntan Publik. 65/DK/PI.II/V-2018 Appointment of Public Accountant Office.
30.	6 Juni 2018 June 6, 2018	67/DK/PI.II/VI-2018 Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Cirebon. 67/DK/PI.II/VI-2018 Recommendations for Proposal to Write Off Fixed Assets at Cirebon Port Branch.
31.	6 Juni 2018 June 6, 2018	68/DK/PI.II/VI-2018 Penyampaian Usulan Bakal Calon Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 68/DK/PI.II/VI-2018 Submission of Proposal for Prospective Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
32.	6 Juni 2018 June 6, 2018	69/DK/PI.II/VI-2018 Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan I Tahun 2018. 69/DK/PI.II/VI-2018 Evaluation of Risk Management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Quarter I of 2018.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Perihal Subject
33.	4 Juli 2018 July 4, 2018	74/DK/PI.II/VII-2018 Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan dan Penjualan Aktiva Tetap kepada PT IKT. 74/DK/PI.II/VII-2018 Recommendations for Proposal to Write-Off and Sale of Fixed Assets to PT IKT.
34.	4 Juli 2018 July 4, 2018	75/DK/PI.II/VII-2018 Rekomendasi atas Persetujuan Kerja sama Sewa Menyewa antara Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IKT. 75/DK/PI.II/VII-2018 Recommendation on Leasing Cooperation Agreement between Tanjung Priok Port Branch and PT IKT.
35.	11 Juli 2018 July 11, 2018	77/DK/PI.II/VII-2018 Persetujuan Rencana Optimalisasi Pengelolaan Petikemas oleh PT IPC TPK di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. 77/DK/PI.II/VII-2018 Approval of Plan for Optimizing Container Management by PT IPC TPK at the Tanjung Priok Port Branch.
36.	11 Juli 2018 July 11, 2018	78/DK/PI.II/VII-2018 Rekomendasi Kerja Sama Sewa Jangka Panjang Optimalisasi Pengelolaan Petikemas oleh PT IPC TPK di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. 78/DK/PI.II/VII-2018 Recommendations for Long-Term Rental Cooperation Optimization of Container Management by PT IPC TPK in the Tanjung Priok Port Branch.
37.	26 Juli 2018 July 26, 2018	87/DK/PI.II/VII-2018 Laporan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 87/DK/PI.II/VII-2018 Board of Commissioners Report for Quarter II 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
38.	1 Agustus 2018 August 1, 2018	90/DK/PI.II/VIII-2018 Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 90/DK/PI.II/VIII-2018 Response to 2018 Semester I Management Report PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
39.	29 Agustus 2018 August 29, 2018	98/DK/PI.II/VIII-2018 Rekomendasi Usulan Penghapusbukuan Aset Sebagian Luasan HPL Cabang Bengkulu. 98/DK/PI.II/VIII-2018 Recommendation for Proposal for Partial Asset Write-off at Bengkulu Branch HPL Area.
40.	5 September 2018 September 5, 2018	102/DK/PI.II/IX-2018 Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang PT Pelindo II (Persero) dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama SPI dan Divisi MR. 102/DK/PI.II/IX-2018 Results of Board of Commissioners Visit to PT Pelindo II (Persero) Branches and the Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the SPI and MR Division.
41.	19 September 2018 September 19, 2018	108/DK/PI.II/IX-2018 Tanggapan atas Usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset. 108/DK/PI.II/IX-2018 Response to the Proposed Write-off and Transfer of Assets.
42.	3 Oktober 2018 October 3, 2018	115/DK/PI.II/X-2018 Evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan II Tahun 2018. 115/DK/PI.II/X-2018 Evaluation of Risk Management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Quarter II of 2018.42.

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Perihal Subject
43.	10 Oktober 2018 October 10, 2018	119/DK/PI.II/X-2018 Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja sama Optimalisasi Terminal Petikemas Ex-Jakarta International Container Terminal 2 (Ex-JICT Terminal 2) Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT IPC Terminal Petikemas. 119/DK/PI.II/X-2018 Response to Request for Approval of Plan for Cooperation to Optimize the Ex-Jakarta International Container Terminal 2 Container Terminal (Ex-JICT Terminal 2) of Tanjung Priok Port by PT IPC Terminal Petikemas.
44.	17 Oktober 2018 October 17, 2018	122/DK/PI.II/X-2018 Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019. 122/DK/PI.II/X-2018 Submission of Work Plan and Budget for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners for 2019.
45.	31 Oktober 2018 October 31, 2018	127/DK/PI.II/X-2018 Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019. 127/DK/PI.II/X-2018 Submission of Work Plan and Budget for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners for 2019.
46.	31 Oktober 2018 October 31, 2018	128/DK/PI.II/X-2018 Laporan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 128/DK/PI.II/X-2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners Report for Quarter III of 2018.
47.	7 November 2018 November 7, 2018	131/DK/PI.II/XI-2018 Tanggapan atas Laporan Manajemen sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 131/DK/PI.II/XI-2018 Response to Management Reports for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Quarter III 2018.
48.	28 November 2018 November 28, 2018	141/DK/PI.II/XI-2018 Kelengkapan Dokumen Rencana IPO PT Pelabuhan Tanjung Priok. 141/DK/PI.II/XI-2018 Document Completeness of PT Priok Port's IPO Plan.
49.	11 Desember 2018 December 11, 2018	147/DK/PI.II/XI-2018 Penyampaian Hasil Kajian Dewan Komisaris tentang Pemanfaatan Lahan. 147/DK/PI.II/XI-2018 Submission of Board of Commissioners Study of Land Use Results.
50.	12 Desember 2018 December 12, 2018	148/DK/PI.II/XII-2018 Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 148/DK/PI.II/XII-2018 Approval to Change Organizational Structure of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office.
51.	19 Desember 2018	153/DK/PI.II/XII-2018 Rekomendasi atas Persetujuan Rencana Kerja sama Sewa Pemanfaatan Lapangan dan Gudang 222X (Ex MKT) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok
52.	19 Desember 2018	154/DK/PI.II/XII-2018 Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan
53.	19 Desember 2018	155/DK/PI.II/XII-2018 Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva tetap di Cabang Pelabuhan Bengkulu
54.	21 Desember 2018	156/DK/PI.II/XII-2018 Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo II (Persero) Tahun 2019

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Rapat-Rapat

- a. Rapat internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris.

Pada tahun 2018, tidak terdapat rapat internal khusus yang hanya dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris.

Seluruh rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung.

- b. Rapat internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris dan seluruh anggota Komite.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 48 (empat puluh delapan) kali rapat internal Dewan Komisaris dan Organ Pendukung. Materi yang dibahas dalam rapat secara umum sesuai dengan rencana rapat tahun 2018, yang pada pokoknya membahas mengenai hal-hal yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris, rencana kerja dan realisasi kerja Dewan Komisaris, perkembangan pengurusan Perusahaan, tindak lanjut rapat sebelumnya, dan hal-hal lain yang memerlukan pembahasan.

- c. Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi merupakan bagian dari rapat internal Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung sebagaimana butir b. di atas yang dalam pelaksanaannya mengundang Direksi sesuai dengan materi pembahasan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 6 (enam) kali rapat yang mengundang Direksi.

- d. Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja Perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya.

- e. Rapat Umum Pemegang Saham (RKAP 2019 dan Laporan Tahunan 2017).

Pada tahun 2018 telah dilakukan RUPS sebagai berikut:

- Pengesahan RKAP Tahun 2018 pada tanggal 23 Januari 2018.
- Pengesahan Laporan Tahunan 2017 pada tanggal 4 April 2018.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners' duties during 2018 included the following:

1. Meetings

- a. Internal meetings of the Board of Commissioners that were attended by all members of the Board of Commissioners.

In 2018, there were no special internal meetings attended by the members of the Board of Commissioners alone.

All meetings were attended by the Board of Commissioners with their Supporting Bodies.

- b. Board of Commissioners Internal meetings were attended by all members of the Board of Commissioners and all members of the Committees.

In 2018, 48 (forty eight) internal meetings of the Board of Commissioners and Supporting Bodies were held. The material discussed in the meetings in general were in accordance with the 2018 meeting plan, which basically discussed matters that required Board of Commissioners recommendations/approvals, work plans and realization of the Board of Commissioners' work, developments in the management of the Company, follow-up of previous meetings, and other matters that needed discussion.

- c. Board of Commissioners Internal Meetings inviting Directors.

The Internal Board of Commissioners Meeting inviting Directors form part of the Board of Commissioners internal meetings with Supporting Bodies as in point b. above, and involves inviting the Directors related to the discussion material. In 2018 there were 6 (six) meetings with invited Directors.

- d. Board of Commissioner Coordination Meetings with the Board of Directors.

In 2018, 12 (twelve) such meetings were held.

The meeting discussions included periodic Company performance, reports from each Directorate, follow-up of previous meetings, as well as other agenda items.

- e. General Meeting of Shareholders (2019 RKAP and 2017 Annual Report).

In 2018 the following GMS were held:

- Endorsement of the 2018 RKAP on January 23, 2018.
- Ratification of the 2017 Annual Report on April 4, 2018.

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019 baru dilaksanakan pada bulan Januari 2019.

2. Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan

a. Evaluasi RJPP.

Pada tahun 2018 tidak terdapat usulan perubahan RJPP Tahun 2015-2019. Dewan Komisaris melakukan evaluasi keselarasan antara RJPP dengan perkembangan yang terjadi serta RKAP 2018 dan 2018. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi pencapaian target dalam RJPP.

b. Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2019 dan menyusun tanggapan Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor 02/DK/PI.II/I-2018 tanggal 3 Januari 2018.

c. Evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang Realisasi Triwulan I, II dan III disampaikan ke Pemegang Saham.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan menyampaikan tanggapan setiap triwulanan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Pemegang Saham melalui surat sebagai berikut:

- Tanggapan atas kinerja Triwulan I melalui surat Nomor 50/DK/PI.II/V-2018 tanggal 2 Mei 2018.
- Tanggapan atas kinerja Triwulan II melalui surat Nomor 90/DK/PI.II/VIII-2018 tanggal 1 Agustus 2018.
- Tanggapan atas kinerja Triwulan III melalui surat Nomor 131/DK/PI.II/XI-2018 tanggal 7 November 2018.

d. Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2017.

Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Buku 2017 disampaikan melalui surat Nomor 36/DK/PI.II/IV-2018 tanggal 2 April 2018.

e. Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui rapat, surat, kunjungan lapangan, maupun dalam tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan/tanggapan tertulis Dewan Komisaris. Pada tahun buku 2017, nilai GCG sebesar 96,369 dan seluruh Aol telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris pada tahun 2018.

Ratification of the 2019 RKAP GMS was only held in January 2019.

2. Evaluation/Direction/Response/ Approval

a. RJPP evaluation.

In 2018 there were no proposed changes to the RJPP for 2015-2019. The Board of Commissioners conducted an alignment evaluation between the RJPP and the developments taking place as well as the 2018 and 2018 RKAPs. In addition, the Board of Commissioners also evaluated the RJPP target achievements.

b. Evaluation of 2019 RKAP Proposal and compilation of the Board of Commissioners' responses.

Based on the evaluation, the Board of Commissioners submitted its response to the Shareholders through letter Number 02/DK/PI.II/I-2018 dated January 3, 2018.

c. Evaluated the 2018 RKAP implementation and submitted the Board of Commissioners' responses regarding Realization of First, Second and Third Quarter to the Shareholders.

The Board of Commissioners evaluated and submitted quarterly response to the Board of Directors and to the Shareholders by mail as follows:

- First Quarter performance through letter Number 50/DK/PI.II/V-2018 dated May 2, 2018.
- Second Quarter performance through letter Number 90/DK/PI.II/VIII-2018 dated 1 August 2018.
- Third Quarter performance through letter Number 131/DK/PI.II/XI-2018 dated 7 November 2018.

d. Prepared Responses to the Financial Accountability Statements for the 2017 Fiscal Year.

The Board of Commissioners' response to the Financial Responsibility Report for Fiscal Year 2017 was submitted by letter Number 36/DK/PI.II/IV-2018 dated 2 April 2018.

e. Supervision of the Good Corporate Governance Principles Implementation.

The Board of Commissioners supervised the implementation of good corporate governance through meetings, letters, field visits, and actions that required written approval/written response from the Board of Commissioners. In the 2017 fiscal year, the GCG value reached 96,369 and all Aols had been followed up by the Board of Commissioners in 2018.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

- f. **Evaluasi Kinerja Direksi.**
Evaluasi kinerja Direksi telah dilaksanakan yaitu melalui tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan tahun buku 2017 serta tanggapan kinerja Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan I, II, dan III Tahun 2018.
- g. **Tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.**
Berdasarkan hasil kajian atas usulan remunerasi, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas penetapan remunerasi melalui surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Nomor 36/DK/PI.II/IV-2018 tanggal 2 April 2018.
- h. **Pengawasan Kepatuhan Direksi terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.**
Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan kepatuhan Direksi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, baik terkait perkembangan permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan, maupun potensi permasalahan hukum yang kemungkinan ada.
- i. **Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal.**
Pemantauan dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- j. **Pengawasan pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal.**
Pengawasan pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan melalui Komite Audit. Pengajuan usulan auditor eksternal untuk tahun buku 2018 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP pada tahun buku sebelumnya.
- k. **Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan.**
Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap beberapa hal yang diperkirakan berdampak pada kinerja Perusahaan.
- l. **Evaluasi dan arahan.**
Evaluasi dan arahan oleh Dewan Komisaris tentang:
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal
 - Manajemen Risiko
 - Teknologi Informasi
 - Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier Pekerja
 - Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK
- f. **Board of Directors Performance Evaluation.**
The Board of Directors performance evaluation was carried out through the Board of Commissioners responses to the Company's performance for the fiscal year 2017 and the Board of Commissioners responses on the performances of Quarter I, II, and III of 2018.
- g. **Responses to the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration.**
Based on the proposed remuneration review results, the Board of Commissioners provided recommendations on the remuneration determination through letter Number 36/DK/PI.II/IV-2018 dated 2 April 2018.
- h. **Supervision of Board of Directors' Compliance with Laws and Regulations.**
The Board of Commissioners actively supervises the Board of Directors compliance with laws and regulations, both related to the development of legal issues faced by the Company, as well as potential legal issues that may exist.
- i. **Monitoring the follow-up of the internal auditor's audit results.**
Monitoring is carried out by the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- j. **Supervision of the external audits and submitting proposals for external auditors.**
Supervision of the KAP audit is carried out through the Audit Committee. Submission of proposals for external auditors for the 2018 fiscal year is based on the evaluation results of the audit conducted by the KAP in the previous fiscal year.
- k. **Providing direction for business changes that are expected to have a major impact on the Company's business and performance.**
The Board of Commissioners provided direction on several matters that are expected to have an impact on the Company's performance.
- l. **Evaluations and directives.**
Evaluations and directives by the Board of Commissioners regarding:
- Strengthening the Internal Control System
 - Risk management
 - Information Technology
 - Employee Career Development Policy and Implementation
 - Accounting policies and preparation of financial statements in accordance with PSAK

- Pengadaan dan Pelaksanaan
 - Kebijakan Mutu Pelayanan dan Pelaksanaan Perusahaan
- m. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon anggota Direksi (apabila diperlukan), serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan calon anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham. Selain itu, berdasarkan usulan dari Direksi, Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan tertulis atas usulan pengangkatan calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

- n. Memberikan Tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan/persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan/persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan, menyusun telaahan, pendapat dan saran atas beberapa area sebagai berikut:

- Pembahasan perkembangan pengelolaan Perusahaan.
- Pengelolaan PKBL/CSR.
- Permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
- Kajian Pemanfaatan Lahan oleh Dewan Komisaris.
- Pengelolaan Anak Perusahaan.

3. Kunjungan Kerja

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan kerja ke Cabang-Cabang baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu seperti pengecekan fisik aset yang akan dihapusbukukan dan dipindahtangankan.

4. Peningkatan Profesionalisme Dewan Komisaris melalui menghadiri Seminar, *Workshop*, dan Sosialisasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Selama tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa kegiatan seminar, *workshop*, dan sosialisasi.

- Procurement and Implementation
- Company Service Quality Policy and Implementation

- m. Evaluated proposals/recommendations to the GMS regarding prospective members to the Board of Directors (if needed), as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries.

In 2018, the Board of Commissioners submitted proposals for candidates as members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the request of the Shareholders. In addition, based on proposals from the Board of Directors, the Board of Commissioners also provided written responses to the proposed appointment of prospective Directors and Commissioners of the Subsidiaries.

- n. Provided responses to matters relating to the Board of Commissioners' main duties and functions for managing the Company.

During 2018, the Board of Commissioners made responses/approvals for the actions of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association provisions requiring responses/approvals from the Board of Commissioners. In addition, during 2018 the Board of Commissioners conducted discussions, compiled reviews, opinions and suggestions on several areas as follows:

- Discussions on the Company's management developments.
- PKBL/CSR Management.
- Problems faced by the Company.
- Land Use Study by the Board of Commissioners.
- Management of Subsidiaries.

3. Working Visits

During 2018, the Board of Commissioners and Supporting bodies of the Board of Commissioners conducted work visits to Branches specifically regarding performance, as well as visits in the context of certain activities such as physical checking of assets to be written off and transferred.

4. Increased the Professionalism of the Board of Commissioners by attending Seminars, Workshops and Socialization domestically and overseas.

During 2018, all members of the Board of Commissioners attended seminars, workshops and socialization activities.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

5. Laporan Dewan Komisaris

Pada tahun 2018, laporan yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemegang Saham yaitu:

- a. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017 melalui surat Nomor 33/DK/PI.II/III-2018 tanggal 26 Maret 2018.
- b. Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 46/DK/PI.II/IV-2018 tanggal 26 April 2018.
- c. Laporan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 87/DK/PI.II/VII-2018 tanggal 26 Juli 2018.
- d. Laporan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 128/DK/PI.II/X-2018 tanggal 31 Oktober 2018.

6. Penugasan Khusus

Selama tahun 2018 tidak terdapat penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

5. Board of Commissioners Report

In 2018, reports prepared and submitted to the Shareholders, included:

- a. 2017 Board of Commissioners Supervision Report through letter Number 33/DK/PI.II/III-2018 dated March 26, 2018.
- b. Board of Commissioners Report on Q1 2018 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 46/DK/PI.II/IV-2018 dated April 26, 2018.
- c. Board of Commissioners Report on QII 2018 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 87/DK/PI.II/VII-2018 dated July 26, 2018.
- d. Board of Commissioners Report on QIII 2018 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 128/DK/PI.II/X-2018 dated October 31, 2018.

6. Special assignments

During 2018 there were no special assignments carried out by the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang kemudian dievaluasi secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun.
3. Dewan Komisaris atau Organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam risalah rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris.
4. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN.
5. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*.
6. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Commissioners performance assessment was based on a Board of Commissioners' Decree that is evaluated periodically under the following conditions:

1. The Board of Commissioners has a policy regarding the Board of Commissioners performance measurement and assessment.
2. The Board of Commissioners sets out the Indicators for Performance Achievement that is approved by the GMS every year.
3. The Board of Commissioners or a Board of Commissioners support organ evaluates the Board of Commissioners performance, and submits the results in minutes to the Board of Commissioners meeting and includes them in the Board of Commissioners' Acting Report.
4. The GMS must establish Key Performance Indicators for the Board of Commissioners to measure of the success of their duties and responsibilities based on proposals from the Board of Commissioners, and submit quarterly reports on the development to the SOE Shareholders / Minister of State.
5. Board of Commissioners performance assessments are carried out using a self assessment method.
6. The Board of Commissioners performance assessment results will be included in the annual report and informed to the GMS with supporting data / evidence.

7. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KPI yang ditetapkan.
8. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan mengusulkan capaiannya berdasarkan data dan masukan dari setiap komite penunjang Dewan Komisaris dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dirapatkan di tingkat Dewan Komisaris.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku yang lalu.

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris telah menyampaikan Usulan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan surat Nomor 195/DK/PI.II/X/II-2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan telah ditetapkan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2018.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menetapkan KPI Individual Anggota-anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/X-2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan *Key Performance Indicator Individual* Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 2018.

7. The Board of Commissioners performance assessment is determined based on the established KPI.
8. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for preparing the data needed for evaluating and proposing the achievements based on data and input from each Board of Commissioners supporting committees and proposes these to the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT IMPLEMENTATION PROCEDURE

The Board of Commissioners performance is evaluated by the Shareholder in the GMS based on the Company's performance as set forth in the ratification of the Company's Financial Statements by the GMS. Assessment of the performance of the Board of Commissioners in the GMS is reflected in the resolutions of the GMS that grant approval and ratification of the Financial Statements including the Report of the Board of Commissioners concerning the Company's supervisory duties for the past financial year.

This refers to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of State Minister State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Board of Commissioners has submitted the Proposal for Performance Indicators for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners in letter number 195/DK/PI.II/X/II-2017 dated October 3, 2017 and they have been established by the Shareholders together with the RKAP Ratification in the 2018 AGMS.

In addition, the Board of Commissioners also determined the Individual KPI for the Board of Commissioners based on Board of Commissioners' Decree Number 05/KEP-DK/PI.II/X-2018 dated October 24, 2018 concerning the Determination of Key Performance Indicators for Individual Members of PT Pelabuhan Indonesia II Company's Board of Commissioners in 2018.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan.
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris.
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG.
4. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan.
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Key Performance Indicator (KPI) individual sebagai berikut:

1. KPI Umum
 - a. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris
 - b. Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris
 - c. Kunjungan kerja Dewan Komisaris.
2. KPI Khusus
KPI Khusus ditetapkan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kategori penilaian KPI individual Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **"Sangat Baik"** apabila pencapaian KPI 100%-120%.
2. **"Baik"** apabila pencapaian KPI 85%-99%.
3. **"Kurang Baik"** apabila pencapaian KPI 60%-84%.
4. **"Tidak Baik"** apabila pencapaian KPI kurang dari 60%.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan Komisaris juga dapat melakukan sendiri penilaian atas kinerjanya, yang antara lain mencakup ketajaman pengawasan, kehadiran dalam rapat, pengetahuan bisnis, identifikasi risiko usaha dan implementasi GCG.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2018 dilakukan secara *self assessment* dan bersifat kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) are as follows:

1. Contribution to the Company's Performance Achievement
2. Timeliness of Delivery of Mandatory Board of Commissioners' Opinions and Advice
3. Contribution to GCG implementation
4. Attendance record of Member of Board of Commissioners/ Supervisory Board
5. Supervision and directives to the Board of Directors on the Company's plans and policies.
6. Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners

Individual Key Performance Indicators (KPI) include:

1. General KPI
 - a. Level of attendance at the Board of Commissioners Meeting
 - b. Participation in the Board of Commissioners' competency development program
 - c. Board of Commissioners working visits
2. Special KPI
Special KPI are determined based on the division of duties and functions of each member of the Board of Commissioners.

The KPI Individual assessment categories for the Board of Commissioners are as follows:

1. **"Very good"** when achieving KPI 100% -120%.
2. **"Good"** if the KPI reaches 85% -99%.
3. **"Not good"** if the KPI reaches 60% -84%.
4. **"Not good"** if the achievement of KPI is less than 60%.

PARTIES CONDUCTING ASSESSMENT

In carrying out its main functions, the Board of Commissioners may conduct its own performance assessment, which includes supervisory acumen, meeting attendance, business knowledge, business risk identification and GCG implementation.

The Board of Commissioners performance assessment in 2018 was conducted in a self-assessment and collegial manner as part of the BOC's Supervisory Task Report. Implementation of duties and responsibilities has been planned at the beginning of each year in the Business Plan

DEWAN KOMISARIS
 Board of Commissioners

Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

and Budgeting of the Company/BPBC. At the end of the year, the Board of Commissioners prepares a Supervisory Task Report submitted to the Shareholder at the AGMS for evaluation and approval.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS juga tercermin dari keputusan RUPS untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris atas aktivitas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Performance Assessment of the Board of Commissioners in the AGMS is also reflected in the resolution of the AGMS to grant a full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Commissioners for supervisory activities carried out during the past financial year, provided that such action is neither a criminal act nor a violation of the provisions and applicable legal procedures.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris kolegial sebagai berikut:

Board of Commissioners' Collegial Performance Assessment Results are as follows:

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to achievement realization		10.00				10.13
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to BOD's' KPIs achievement	Poin Point	10.00	100	101,26	101%	10.13
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Time Accuracy of Delivery of Mandatory Board of Commissioners' Opinions and Advice		20.00				24.00
a.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2019, Laporan Triwulanan 2018, dan Laporan Tahunan 2017 Board of Commissioners Opinions and suggestions on the 2019 RKAP, 2018 Quarterly Report, and 2017 Annual Report	Hari Days	5.00	30	6.2	120%	6.00
b.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Response to Board of Directors actions that must be approved by the GMS/Ministry	Hari Days	5.00	14	9.2	120%	6.00

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Response to Board of Directors actions that must be approved by by the Board of Commissioners	Hari Days	5.00	14	10.1	120%	6.00
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Report of the Board of Commissioners	Hari Days	5.00	30	1.25	120%	6.00
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to GCG implementation		10.00				10.61
	a. Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG Implementation	Poin Point	5.00	30.45	34.19	112%	5.61
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG – Dewan Komisaris Following-up recommendation from GCG assessment – BoC	%	5.00	100	100	100%	5.00
4.	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Attendance Rate of Member of Board of Commissioners/Supervisory Board		18.00				16.88
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris BOC Internal Meeting	Jumlah Total	5.00	12	48	120%	6.00
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Meeting	Jumlah Total	5.00	12	12	100%	5.00
	c. Tingkat Kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance Level at Internal BOC Meetings	%	4.00	100	73	73%	2.92
	d. Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Attendance Level at BOC and BOD Meeting	%	4.00	100	74	74%	2.96
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and directives to the Board of Directors on company plans and policies	Jumlah Total	14.00	7	7	100%	14.00
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28.00				29.80

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
a.	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Improvement of Competency of BoC						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency Improvement of BoC	Pelaksanaan Implementation	10.00	3	3	100%	10.00
b.	Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
1)	Komite Audit Audit Committee						
a.	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Total	3.00	12	37	120%	3.60
b.	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00
2)	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee						
a.	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of Internal RMC Committee Meeting	Jumlah Total	3.00	12	23	120%	3.60
b.	Laporan Penugasan Komite PMR RMC Committee Assignment Report	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00
3)	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
a.	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi Implementation of Internal Nomination and Remuneration Committee Meeting	Jumlah Total	3.00	12	18	120%	3.60
b.	Laporan Penugasan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Assignment Report	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00
	Jumlah Total		100.00				105.42

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018.
2. *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
3. Evaluasi kinerja SPI.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT AND THE BASIS FOR THE ASSESSMENT

The Commissioners are assisted by 3 (three) Committees who report to the Board of Commissioners, including:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Management Monitoring Committee

During 2018, the Board of Commissioners considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly.

The Audit Committee is a committee formed to help the Board of Commissioners supervise that the management of IPC is in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). During 2018, the Audit Committee has carried out its duties well. The basis of consideration is that Audit Committee held 37 (thirty seven) meetings and its tasks included:

1. Evaluating the KAP performance, and the appointment process for the KAP to audit the financial statements for fiscal year 2018.
2. Monitoring and evaluating follow-up findings of external and internal auditors.
3. Evaluating the SPI performance.
4. Monitoring and evaluating the port branches.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to assist and provide support to the Board of Commissioners in supervising the Nomination and Remuneration policies application for Directors, Management Teams and employees. During 2018, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties well. The basis of consideration is that Nomination and Remuneration Committee held 18 (eighteen) meetings and carried out tasks including:

1. Evaluating the proposals for prospective Directors for the Company and its Subsidiaries.
2. Evaluating the proposed remuneration.
3. Monitoring and evaluating the port branches.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan Enterprise Risk Management (ERM). Selama tahun 2018, Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi, *monitoring*, dan evaluasi penerapan manajemen risiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit manajemen risiko.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi cabang pelabuhan

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan jumlah rapat Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100% dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120%.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan sebagai berikut:

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SEWAKTU-WAKTU OLEH RUPS

RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

The Risk Management Monitoring Committee was established to improve the quality of supervision and advice from the Board of Commissioners for managing the Enterprise Risk Management (ERM) Company risk. During 2018, the Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties well. The basis of consideration is that Risk Management Monitoring Committee held 23 (twenty three) meetings and carried out tasks including:

1. Evaluating and monitoring the application of risk management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Periodically coordinating with the risk management units.
3. Monitoring and evaluating the port branches

The Committees below the Board of Commissioners performance assessments form part of the Board of Commissioners' KPI, namely the criteria of effectively executing its duties, and the number of Committee meetings held. Based on these KPI performance measurements, all the Committees below the Board of Commissioners achieve the set KPI targets. All Committees carried out their tasks achieving 100%, and conducted their meetings achieving 120%.

BOARD OF COMMISSIONERS MECHANISM FOR DISMISSAL AND RESIGNATION

The mechanism for dismissal and resignation of the Board of Commissioners is stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Working Procedure as follows:

DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AT ANY TIME BY THE GMS

The GMS can dismiss the Board of Commissioners at any time by stating the reasons, notifying the plan of termination to the Members of the Board of Commissioners concerned, both verbally and in writing. Dismissal of the Board of Commissioners members is carried out based on the following:

1. Unable to carry out their duties properly.
2. Not implementing the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association.
3. Engaging in actions that harm the Company and/or the State.
4. Conducting actions that violate ethics and/or

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN.

5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima (dalam hal tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri), tidak terdapat keputusan RUPS, maka permohonan pengunduran diri tersebut diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

compliance that should be respected as a SOE Board of Commissioners Member.

5. Have been declared guilty by a court ruling that has a permanent legal force.
6. Has resigned.
7. Has family relations up to the third degree, both according to straight lines and side lines, including relationships arising marriages between Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners.
8. Based on other reasons that are appropriately valued by the GMS for the interests and objectives of the Company.

COMMISSIONER RESIGNATION

Commissioners have the right to resign as follows:

1. Notify in writing about their intention to the Shareholders with copies to other Members of the Board of Commissioners and Board of Directors at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation.
2. If up to the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of application is received (in the case of not mentioning the effective date of resignation), and there is no GMS decision, then the application for resignation will be accepted without the approval of the GMS.

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan IPC seperti Strategi Perusahaan, Pengawasan Internal, Kegiatan Sekretaris Perusahaan, Komersial dan Pengembangan Usaha, Teknik dan Manajemen Risiko, Operasi dan Sistem Informasi, Keuangan, SDM dan Hukum, Pengelolaan Anak Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus pengelolaan dan perlindungan kekayaan perusahaan, pengelolaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur.

Secara khusus, Direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, dan *Corporate Roadmap*. Direksi juga memastikan agar seluruh komponen IPC bekerja dalam koridor nilai-nilai Perusahaan secara konsisten.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan IPC untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan IPC serta mewakili IPC baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Setiap Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IPC. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan IPC dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar IPC dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan IPC;

The Board of Directors is the Company Body with the responsibility to ensure that all IPC management activities such as Corporate Strategy, Internal Supervision, Corporate Secretary Activities, Commercial and Business Development, Engineering and Risk Management, Operations and Information Systems, Finance, HR and Law, and Management of Subsidiaries run efficiently and effectively and are in accordance with the principles of GCG. The Board of Directors also represents the Company both internally and externally. The Board of Directors always carries out business management as well as manages and protects company assets, management, strategies, and budget plans on a regular basis.

In particular, the Board of Directors continuously implements the strategies set in an effort to achieve the Company's vision, mission, values and Corporate Roadmap. The Board of Directors also ensures that all components of IPC work within the corridors of the Company's values consistently.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

BOARD OF DIRECTORS DUTIES

The Board of Directors is responsible for carrying out all actions relating to the IPC management for and in the best interest of IPC and in accordance with the intent and purpose of IPC, and to represent IPC inside and outside court on all matters and events except for matters considered unlawful by legislation and GMS Decisions for the Board to do so.

Each Director shall in good faith and full responsibility carry out the duties for the interests and business of IPC. The Board of Directors is fully responsible for discharging its duties for the benefit of IPC in achieving its goals and objectives.

In discharging its duties, the Board of Directors complies with IPC's Articles of Associations and all applicable regulations and implements the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness.

BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

The Board of Directors has authority to:

1. Stipulate the Company's management policy;

DIREKSI

Board of Directors

2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan;
 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IPC baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan;
 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja IPC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja IPC berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IPC, mengikat IPC dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IPC serta mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Arrange the transfer of Board of Directors power to one or more members of Board of Directors to take decisions for and on behalf of Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
 3. Arrange the submission of the power of Board of Directors to a person or several employees of the Company individually or jointly or to others, to represent the Company in and out of court;
 4. Arrange provisions concerning the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age pensions and other income for the Company's workers under applicable laws and regulations, with the provision that salaries, pension or old age benefits and other income for workers exceeding the obligations stipulated by law and regulations must obtain prior approval from the GMS;
 5. Appoint and dismiss Company employees in accordance with the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
 6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
 7. Conduct all other actions and acts concerning the administration or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company and representing the Company in and out of court of all matters and events, with limitations as stipulated in legislation, the Articles of Association and/or GMS decisions.

KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IPC sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPC;
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan IPC, serta dokumen keuangan IPC sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

BOARD OF DIRECTORS OBLIGATIONS

In carrying out its main duties, the Board of Directors is obliged to:

1. Undertake and ensure implementation of IPC business and activities in accordance with the purposes and objectives and business activities of IPC;
2. Prepare in due course the RJPP, BPBC, and any changes and submit to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain ratification of the GMS;
3. Provide explanation to the GMS regarding the RJPP and BPBC;
4. Prepare lists of Shareholders, Special Register, minutes of the GMS and minutes of Board of Directors meetings;
5. Prepare the Annual Report as a form of accountability of IPC management, as well as the IPC financial documents as referred to in the law on Company Documents;

6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak IPC yang tidak tercatat dalam pembukuan sebagai akibat penghapusan bukuan piutang;
 8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
 11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya;
 12. Menyimpan di tempat kedudukan IPC: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya;
 13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham dengan ditembuskan ke Dewan Komisaris;
 15. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan perincian tugasnya;
 16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi IPC;
 18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;
 7. Submit Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and ratification, as well as reports on IPC rights that are not recorded in the books as a result of the write-off of accounts receivable;
 8. Provide an explanation to the GMS on the Annual Report;
 9. Deliver the balance sheet and Income Statement already ratified by the GMS to the Ministry in charge of law and human rights in accordance with the provisions of the Laws and Regulations;
 10. Convey reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry in charge of law and human rights;
 11. Maintain lists of Shareholders, Special Register, minutes of meeting, minutes of Board of Commissioners meetings and minutes of meetings of the Board of Directors, IPC Annual Report and financial documents and other IPC documents;
 12. Retain at the Company domicile: the Shareholder Register, Special Register, briefing of shareholders, minutes of Board of Commissioners meetings, minutes of Board of Directors meetings, Annual Reports and financial documents and other IPC documents;
 13. Develop an accounting system in accordance with the financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the functions for handling, recording, storage, and supervision;
 14. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder forwarded to the Board of Commissioners;
 15. Prepare the IPC organizational structure complete with details of duties;
 16. Provide an explanation of all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and the Shareholders;
 17. Prepare and establish the blueprint of IPC organization;
 18. Carry out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are stipulated by the GMS based on legislation.

DIREKSI

Board of Directors

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal IPC menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan IPC.

TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI

TERKAIT DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Direksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS;
2. Pemanggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor IPC sebelum RUPS diselenggarakan;
3. RUPS dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan.

TERKAIT DENGAN STRATEGI DAN RENCANA KERJA

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan.

1. Susunan Materi RJPP
RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan IPC yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN:

BOARD OF DIRECTORS RESPONSIBILITIES

1. In executing its duties, the Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that IPC shows any symptoms of a setback, the Board of Directors must immediately report to the GMS, accompanied by a proposal on corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding important management issues for IPC.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

RELATED TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The Board of Directors is responsible for organizing the GMS in accordance with the procedures set forth in IPC's Articles of Association and all applicable laws and regulations:

1. The call for every GMS is announced no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS;
2. The call for every GMS shall include information on each agenda items to be discussed, including proposals planned by the Board of Directors to be submitted to the GMS, provided that if such information is not available at the time the call is announced, then they must be made available at IPC's office before the GMS begins;
3. The GMS will begin on time in accordance with all prevailing provisions.

RELATED TO STRATEGY AND WORK PLAN

Preparation And Delivery Of Corporate Long Term Plan (RJPP)

The Board of Directors prepares the Company's Long Term Plan (RJPP) on time and submits the RJPP draft to the GMS for approval.

1. RJPP Material
The RJPP is a strategic plan that contains IPC goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The RJPP format referred to the preparation of the Company's Long-Term Plan as issued by from the Ministry of State-Owned Enterprises:

- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang baru;
 - c. Posisi Perusahaan Saat Ini;
 - d. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - e. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.
2. Penyampaian RJPP kepada RUPS
Tata laksana penyampaian RJPP kepada RUPS diatur sebagai berikut:
- a. Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
 - b. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP dalam RUPS;
 - c. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;
 - d. Sebelum waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.
3. Perubahan RJPP
Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;
 - b. Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20%;
 - c. Perubahan RJPP harus ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN dan/ atau berdasarkan Keputusan RUPS yang berisikan sekurang-kurangnya:

1. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
2. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3. Proyeksi keuangan perusahaan dan Anak Perusahaannya; dan

- a. Introduction
 - b. Evaluation of the new Long Term Plan;
 - c. The Company's current situation;
 - d. All assumptions used in preparing the Long Term Plan;
 - e. Goals, targets and strategies used to achieve them.
2. Submission of RJPP to the GMS
The order that the RJPP is submitted in to the GMS is regulated as follows:
- a. The draft RJPP signed by the Board of Commissioners is submitted to the GMS for approval;
 - b. The RJPP ratification will be given no later than 60 (sixty) days after the draft is approved by the GMS;
 - c. If within 60 (sixty) days such ratification has not been issued then the RJPP Draft is considered to have been ratified;
 - d. Prior to 60 (sixty) days before the end of the current RJPP, the Board of Directors shall propose the draft RJPP for the following period;
3. Changes in RJPP
In case change in the RJPP is necessary, the following provisions apply:
- a. Changes to RJPP can only be made when there are significant changes over which the Board of Directors has no control;
 - b. The referred changes are changes that result in a more than 20% (twenty percent) downward deviation in terms of achievement;
 - c. Any changes made in RJPP must be signed by the Board of Commissioners and Board of Directors to be further submitted to the GMS for ratification.

PREPARATION, DELIVERY AND CHANGE OF BUSINESS PLAN AND BUDGETING OF THE COMPANY (BPBC)

The Company's Work Plan and Budget is an elaboration of the Company's Long Term Plan. The BPBC format refers to the Work Plan and Corporate Budget issued by the State Ministry of State-Owned Enterprises and/or is based on the GMS Decision and contains at least:

1. Mission, business goals, business strategy, company policy and work program/activity;
2. The Company's budgets that are presented in details for each work/activity program budget;
3. Company and its Subsidiaries Financial projections; and

DIREKSI

Board of Directors

4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Rancangan RKAP yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
3. Pengesahan RKAP tahun buku berikutnya diadakan selambat-lambatnya hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku dimulai;
4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan RKAP adalah sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi yang signifikan di luar kendali Direksi; dan/atau
2. Terdapat tambahan rencana sesuai kebutuhan IPC; dan/atau
3. Berdasarkan penugasan /kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah.

Perubahan RKAP memerlukan persetujuan RUPS apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Terdapat tambahan rencana yang belum ditetapkan dalam RKAP; dan/atau
2. Adanya penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah yang belum ditetapkan dalam RKAP.

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN MANAJEMEN

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

4. Other matters that require GMS decisions.

The Board of Directors prepares the BPBC for each fiscal year to be ratified and made official by an AGMS.

The order in which the BPBC is submitted to GMS is shown below:

1. The draft BPBC signed by the Board of Directors will be submitted to the Board of Commissioners to be reviewed and signed before it is submitted to the Shareholders;
2. The draft BPBC signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors will be submitted by the Board of Directors to the Shareholders no later than 60 (sixty) days prior to the beginning of new fiscal year for approval by the GMS;
3. The BPBC ratification for the following fiscal year will be given no later than the 30th (thirtieth) day of the first month after the fiscal year begins;
4. In the event that the draft BPBC has not been submitted by the Board of Directors and/or in the case the BPBC has not been approved in the period as referred then what automatically applies is the previous year's BPBC;

Conditions that may cause changes to be necessary to the BPBC are as follows:

1. A significant change in assumptions over which the Board of Directors has no control; and/or
2. When there are additional plans based on IPC's needs; and/or
3. A mandatory assignment/policy from the Shareholders and/or the Government.

Any change in the BPBC requires approval from the GMS if it meets any of the following criteria:

1. There are one or more plans that have not been covered in the BPBC; and/or
2. There are one or more assignments/policies from the Shareholders and/or the Government not covered in the BPBC.

PREPARATION AND SUBMISSION OF PERIODIC REPORTS

The Board of Directors shall submit periodic reports in a manner and time that is in accordance with applicable

laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.

Selain laporan Manajemen Perusahaan, bagi BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara terpisah yang pedoman penyusunan dan penyampaian diatur melalui ketentuan tersendiri.

Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian BUMN.

1. Laporan Manajemen Triwulanan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.

2. Laporan Manajemen Tahunan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

regulations and this also applies to other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders. A periodic report is a Company Management Report that contains the implementation of the Company's Work Plan and Budget and covers Quarterly Management Reports, Annual Management Reports and Annual Reports.

In addition to the Management reports, a SOE that runs the Partnership and Community Development Program shall submit a separate accountability report whose guidelines for preparation and submission are stipulated in a separate provision.

The format of Quarterly Management Reports and Annual Management Reports refer to the preparation of management reports issued by the Ministry of SOEs.

1. Quarterly Management Report

The Board of Directors shall submit the Quarterly Management Report signed by the President Director and the President Commissioner no later than 1 (one) month after the end of the quarter for which the report is made. The quarterly Management Report for Q4 shall be attached to the Annual Management Report.

2. Annual Management Report

The Board of Directors shall submit an Annual Management Report signed by all Directors and the Board of Commissioners to the Shareholders no later than 2 (two) months after the end of the fiscal year. The Board of Directors shall submit the Annual Financial Statements that have been audited by internal Auditors to the shareholders no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year. Should there be any discrepancy between the Annual Management Report submitted to the Shareholders and the Annual Financial Statements that have been audited by an External Auditors, the Board of Directors shall first make revisions to the former and then submit them to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification. Approval for the Annual Management Report and Ratification of Financial Statements that have been audited by an External Auditors shall be given by GMS no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.

DIREKSI
Board of Directors

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan IPC. Format Laporan Tahunan merujuk pada Anggaran Dasar IPC dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS

Tata laksana penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku IPC berakhir dan/atau dalam bulan Mei setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan;
2. Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
3. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham;
4. Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor IPC sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS atau dikirim untuk diperiksa oleh Pemegang Saham.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka:

1. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis; atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
2. Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

PREPARATION AND SUBMISSION OF ANNUAL REPORTS

The Board of Directors shall prepare and submit the Annual Report as a form of accountability for the management of IPC and the Annual Report format refers to IPC's Articles of Associations and includes Financial Statements that have been prepared based on the Financial Accounting Standards and audited by a Public Accountant appointed by the General Meeting of Shareholders.

Submission of Annual Report to the GMS

The procedural steps for the submission of Annual Report to GMS are described below:

1. The Board of Directors submits the Annual Report to the GMS after it is reviewed by the Board of Commissioners no later than 5 (five) months after IPC's fiscal year ends and/or in May following the close of the fiscal year concerned;
2. The draft Annual Report, including the audited financial statements by an External Auditor and signed by all members of the Board of Directors is submitted to the Board of Commissioners to be reviewed and signed before its submitted to the Shareholders;
3. The Annual Report signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is submitted by the Board of Directors to the Shareholders;
4. The Annual Report must be made available at IPC's office from the date on which a GMS call is announced to the date the GMS is held, or sent for a prior review by the Shareholders.

Members of the Board of Directors who do not sign the Annual Report

If there is one or more members of the Boards of Directors or the Board of Commissioners who have not signed the Annual Report, then:

1. The referred members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall state the reason for not signing in writing; or such statement can be made by the Board of Directors or the Board of Commissioners in a letter that is attached to the Annual Report.
2. If one or more members of the Board of Directors or the Board of Commissioners decides not to sign the Annual Report without giving their reason in writing, then they are considered to have approved the contents of the Annual Report.

TERKAIT DENGAN MANAJEMEN RISIKO

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, dengan cara:

1. Identifikasi Risiko, yaitu proses menemukan dan mengenali kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan;
2. Analisis Risiko, yaitu proses mengukur tingkat risiko berdasarkan besaran nilai dampak dan kemungkinannya untuk menentukan peringkat risiko sebagai dasar prioritas tindakan penanganan risiko;
3. Evaluasi Risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan batas toleransi risiko guna menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak;
4. Perlakuan Risiko, yaitu proses tindak lanjut terhadap risiko yang dalam proses evaluasi risiko sebelumnya merupakan risiko yang tidak diterima berdasarkan toleransi Perusahaan;
5. Pemantauan dan Peninjauan Risiko, yaitu proses memantau realisasi kinerja manajemen risiko berdasarkan rencana awal dan pengukuran ulang tingkat risiko;
6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses melaporkan pelaksanaan sistem manajemen risiko beserta pengungkapan risiko kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Direksi memiliki unit kerja Manajemen Risiko yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi risiko Perusahaan dan berkewajiban memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan memiliki kaitan erat dengan Pedoman Komite Manajemen Risiko.

TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;
3. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di IPC.

TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan uraian tugasnya;
2. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi sistem perencanaan

RELATED TO RISK MANAGEMENT

The Board of Directors shall develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of the GCG program with:

1. Risk Identification, a process of finding and recognizing the possibility of an event that can be a constraint to the achievement of the Company's goals and objectives;
2. Risk Analysis, a process of measuring risk levels based on the magnitude of the impact value and the possibility to determine risk rating as the priority basis for risk management measures;
3. Risk Evaluation, a process of comparing the results of risk analysis with risk tolerance limits to determine whether or not a risk is acceptable;
4. Risk treatment, a follow up process on a certain risk that based on previous evaluation was not unacceptable based on Company's tolerance;
5. Risk Monitoring and Review, a process of monitoring the realization of risk management performance based on the initial plan and re-measurement of risk level;
6. Reporting and Disclosure, a process of reporting the implementation of the risk management system and risk disclosure to related parties in accordance with applicable provisions.

The Board of Directors has a Risk Management Unit responsible for monitoring and evaluating the Company's risks where it is made mandatory to work with a Risk Management Unit Charter as a part of the risk management system that is closely related to the Risk Management Committee Charter.

RELATED TO INFORMATION TECHNOLOGY

1. Establish effective information technology governance;
2. Submit periodic reports on the implementation of information technology governance to the Board of Commissioners;
3. Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions at IPC.

RELATED TO HUMAN RESOURCES

1. Prepare the organizational structure of IPC complete with job descriptions;
2. Develop and implement human resource management guidelines that covers Planning, Recruitment, Selection,

DIREKSI

Board of Directors

Sumber Daya Manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi IPC, promosi dan demosi serta mutasi;

3. Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi IPC;
4. Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
5. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan;
6. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan;
7. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan;
8. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
9. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TERKAIT DENGAN ETIKA BISNIS DAN ANTI KORUPSI

1. Mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada IPC;
3. Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman Gratifikasi IPC;
4. Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga Pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dalam lingkungan IPC;

TERKAIT DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin

Placement of Workers and Positions across IPC's organizational structure, promotion and demotion and mutation;

3. Ensure that workers are assigned according to the criteria for positions in IPC's organizational structure;
4. Request approval from the Board of Commissioners for the organizational structure up to 1 (one) level under the Board of Directors;
5. Request approval from the Board of Commissioners on the appointments of the Head of Internal Control Unit and Corporate Secretary;
6. Ensure that education and training to Workers is given in accordance with competencies needed for each position;
7. Conduct performance evaluations and assessments on work units and positions in the organization in an objective and transparent manner;
8. Make provisions on IPC employment including salary determination, pension or post-retirement benefits and other income for workers in compliance with applicable laws and regulations and resolutions made by GMS;
9. Hire and dismiss workers following IPC personnel regulations and all other laws that apply in employment;

RELATED TO BUSINESS ETHICS AND ANTI-CORRUPTION

1. Develop and lead the implementation of Good Corporate Governance Guidelines (GCG).
2. Establish all provisions to govern reporting the mechanism for alleged violations (*Whistleblowing system*) at IPC.
3. Refrain from practices of offering or receiving either directly or indirectly any gift of high worth to and/or from any public servant and/or other parties that may affect objectivity or lead to the need to return such favor that is common in such practice and from other actions unlawful by fiat of bylaws and IPC's Gratuity Guidelines.
4. Ensure that all obligations for entitled high rank officials at IPC as specified in the Decision of IPC's BOD to submit report of wealth of public servants (LHKPN) to the authorized government agency are fulfilled.

RELATED TO INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors must establish an effective Internal Control System policy to ensure confidence in the reliability

keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun Piagam Satuan Pengawasan Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan memiliki kaitan yang erat dengan Piagam Komite Audit.

TERKAIT DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Direksi wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
2. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris IPC;
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

of financial statements, protection of assets, efficient and effective operations, and encourage compliance with internal policies and regulations.

The Internal Control System includes the following:

1. Internal structured corporate control environment carried out in a disciplined manner;
2. Assessment of business risk management as a process for identifying, analyzing, assessing the management of relevant risks;
3. Control activities as actions taken in a control process of Company activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of duties, and security of Company assets;
4. Information and communication systems as a process of presenting reports on operational, financial, and compliance activities and compliance with the provisions of laws and Company regulations;
5. Monitoring of internal control system quality assessment process, including the internal audit function at each level and unit within the organizational structure of the Company, so that control can be implemented optimally.

The Board of Directors has the obligation to develop an Internal Control Unit Charter as part of the internal control system that is closely linked to the Audit Committee Charter.

RELATED TO INFORMATION DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY

The Board of Directors must provide the public with information that includes:

1. Name and domicile, intent, purpose and type of business activity, time of establishment and capital, as stated in IPC's Articles of Association;
2. Full names of Shareholders, Directors, and Commissioners of IPC;
3. Annual report, financial report, balance sheet and income statement, and corporate social responsibility report that have been audited;

DIREKSI

Board of Directors

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;6. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang Terbuka sebagai Informasi Publik;8. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang (obligasi);9. Penggantian akuntan yang mengaudit;10. Perubahan tahun fiskal IPC;11. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi;12. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan13. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara. | <ol style="list-style-type: none">4. Results of audits by external auditors, assessment by credit and other rating agencies;5. Remuneration system and allocation for Commissioners and Directors;6. Mechanism to determine Directors and Commissioners;7. Legal cases and bylaws open to the Public;8. Announcement of issuance of debt securities (bonds);9. Replacement of accountants that audit IPC;10. Changes in the IPC fiscal year;11. Activities and/or public services or subsidies assigned to IPC by government assignment;12. Mechanism for procurement of goods and services; and13. Other information that by law is mandatory for IPC to disclose as a State-Owned Enterprise. |
|---|--|

TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) GCG di IPC melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di IPC yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*) dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (*self assessment*);
2. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan;
3. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di IPC melalui mekanisme rapat Direksi;
4. Terkait dengan pengawasan kepatuhan IPC, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam IPC.

TERKAIT HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

Direksi mengembangkan hubungan dengan *Stakeholders* IPC berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Menghormati hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan *Stakeholders*;

RELATED TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Measure Good Corporate Governance (GCG) in terms of:
 - a. GCG Assessment through a measurement on GCG applications conducted once every 2 (two) years;
 - b. Review and implementation of GCG at SOEs conducted in the year following the assessment, which covers an evaluation of assessment results and follow-up actions on recommended improvements (self assessment);
2. The assessment and evaluation results are reported to the same GMS in which IPC's annual report is submitted;
3. Appointing a Director as the person in charge for monitoring GCG at IPC at Board of Directors meetings;
4. Related to monitoring IPC compliance, it is exercised jointly by related functions within IPC.

RELATED TO RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

The Board of Directors develops relationships with IPC *Stakeholders* based on the following principles:

1. Respect of *Stakeholder* rights that are regulated by applicable regulations and/or become due under agreements made by the Company and the *Stakeholders*.

2. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 4. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Karyawan, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
 5. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.
2. Ensuring that the Company carries out its social responsibility. One form being the Partnership and Community Development Program in accordance with prevailing laws and regulations.
 3. Ensuring that the Company assets and premises and other facilities are in compliance with applicable laws and regulations when it comes to environmental conservation, and work health and safety.
 4. In recruiting, setting base salary, training, establishing career paths, and determining other employment requirements for its employees, the Company does not discriminate based on ethnic background, religious belief, gender, age, and disability of a person nor is discriminative in other specific circumstances as detailed by laws and regulations;
 5. Provides a work environment that is free from all forms of pressure.

TERKAIT SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN

1. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
2. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi IPC untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisis keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu IPC.

TERKAIT RESPON TERHADAP PELUANG BISNIS DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS

1. Mekanisme untuk merespon peluang bisnis dan merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis melalui langkah:
 - a. Usulan peluang bisnis dapat berasal dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris;
 - b. Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dan/atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak

RELATED TO ACCOUNTING AND BOOKKEEPING SYSTEM

1. Develops an accounting system based on the principles of internal control, specifically the necessary separation of functions of management, entry, filing and supervision;
2. Prepares financial statements based on financial accounting standards and hand them over to public accountants for auditing purpose;
3. Maintains and manages IPC's bookkeeping and administration to provide neatly ordered bookkeeping, efficient working capital adequacy, a sound and robust balance sheet structure, timely and accurate presentation of reports and financial analysis and other principles in accordance with all prevailing norms that are applicable to IPC;

RELATED TO RESPONSE TO BUSINESS OPPORTUNITIES AND CHANGES IN ENVIRONMENT

1. The mechanism used to respond to business opportunities and respond to current external issues in business environment includes the following steps:
 - a. Business opportunities proposed by the executives under the Board of Directors or Boards of Directors and Commissioners;
 - b. The Board of Directors identifies business opportunities and environmental changes that may

DIREKSI

Board of Directors

- besar pada Perusahaan secara intensif, termasuk di dalamnya analisis risiko atas peluang dan/atau perubahan kondisi tersebut;
- c. Direksi mengambil keputusan atas usulan tersebut;
 - d. Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.
2. Pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan dimaksudkan untuk menangkap peluang bisnis atau yang berakibat menjadi permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja perusahaan;
 3. Direksi harus segera merespon informasi yang diterima pada setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja IPC dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris.

TERKAIT DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.

PERSYARATAN DIREKSI

Persyaratan anggota Direksi yang diatur dalam *Board Manual* yaitu:

1. Persyaratan formal
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit.

- have a major impact on the Company via, among other measures, analysis of risk within opportunities and possible changes in those conditions;
- c. The Board of Directors makes a decision on any proposal ;
 - d. Based on an approved proposal for a business opportunity, if the task to approve is within the scope of authority of the Board of Commissioners and/or AGMS, then the Board of Directors submits it and/or discusses the proposal with the Board of Commissioners for further study.
2. Discussions on current issues concerning changes in business environment and issues that may or do have a major impact on the Company's business and performance are held to capture business opportunities or overcome issues that may otherwise develop into major constraints;
 3. All information on changes in the business will be responded to quickly by the Board of Directors who then reports this immediately to the Board of Commissioners.

RELATED TO OTHER TASKS AND OBLIGATIONS

Fulfil other obligations in accordance with the provisions set forth in IPC's Articles of Association or made by the GMS and contained in all applicable laws.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time. After the term of office ends, members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office by the GMS.

BOARD OF DIRECTORS REQUIREMENTS

Requirements for members of the Board of Directors are set out in the Board Manual, including:

1. Formal requirements
Those who can be appointed to the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:
 - a. Have been declared bankrupt.
 - b. Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners declared bankrupt.

- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara/BUMN, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD MANUAL)

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana Kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi IPC. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* IPC dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

1. Kebijakan Umum
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Independensi (Kemandirian) Direksi
5. Etika Jabatan dan Keanggotaan Direksi
6. Tugas dan Wewenang Direksi
7. Kewajiban Direksi
8. Tanggung Jawab Direksi
9. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
10. Organ Pendukung Direksi
11. Penilaian Kinerja Direksi
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
13. Hubungan IPC dengan Anak Perusahaan

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dengan susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi selama periode tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut.

- c. Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the State/SOE, the Company and/or relating to the financial sector.
2. Other requirements as determined by the Articles of Association and statutory regulations.

BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES AND WORK RULES

In more detail, the Board of Directors guidelines and work rules are stipulated in the Board Manual that regulates the Board of Directors and Board of Commissioners Working Procedures. Among other matters, it contains instructions to the Board of Directors on their work procedures, elaborating the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand and consistent manner. It can, therefore, be a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of IPC. With the Board Manual, it is expected they achieve high standards of work in line with GCG principles.

The Board of Directors Code of Conduct in the IPC Board Manual is explained specifically in Chapter II, which includes:

1. General Policy
2. Board of Directors Requirements and Composition, Membership and Term of Office
3. Introduction and Capacity Improvement Program
4. Board of Directors Independence
5. Board of Directors Ethics of Position/Membership
6. Board of Directors Duties and Authorities
7. Board of Directors Obligations
8. Board of Directors Responsibilities
9. Board of Directors Decision-Making Principles
10. Board of Directors Organs/Committees
11. Board of Directors Performance Assessment
12. Board of Directors Evaluation Criteria
13. IPC Relationships with Subsidiaries

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AND BASIS

The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of a Director or more with the composition, requirements, nominations and appointment of Members of the Board of Directors determined by the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors during 2018 were as follows.

DIREKSI
Board of Directors

PERIODE 1 JANUARI 2018 – 18 SEPTEMBER 2018

Jumlah dan komposisi anggota Direksi IPC periode 1 Januari – 18 September 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD JANUARY 1, 2018 - SEPTEMBER 18, 2018

The number and membership composition of the IPC Board of Directors for the period of January 1 - September 18 2018 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of the Board of Directors reside in the working area of the IPC Head Office.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Development Usaha Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Iman Rachman	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

PERIODE 19 SEPTEMBER 2018 – 25 NOVEMBER 2018

Jumlah dan komposisi anggota Direksi IPC periode 19 September – 25 November 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD SEPTEMBER 19, 2018 - 25 NOVEMBER 2018

The number and membership composition of the IPC Board of Directors for the period of January 1 - September 18 2018 consisted of 6 (six) people including 1 (one) President Director and 5 (five) Directors. All members of the Board of Directors reside in the working area of the IPC Head Office.

DIREKSI
 Board of Directors

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

PERIODE 26 NOVEMBER 2018 – 31 DESEMBER 2018

Pada tanggal 26 November 2018 terdapat perubahan nomenkelatur Direksi yang telah disahkan melalui Salinan Keputusan Menteri BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK-295/MBU/11/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Namun perubahan nomenkelatur tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2019. Sehingga jumlah dan komposisi anggota Direksi IPC periode 26 November – 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD NOVEMBER 26 - DECEMBER 31, 2018

On November 26, 2018 there was a change in the nomenclature of the Board of Directors that was ratified through a copy of the Ministry of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-295/MBU/11/2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Assignment and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The change in nomenclature will be implemented in 2019, so the number and composition of the IPC Board of Directors for November 26 - December 31, 2018 comprised 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of the Board of Directors reside in the IPC Head Office working area.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014

DIREKSI
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Riry Syeried Jetta	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan.
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkungan kegiatan kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - c. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Kantor Cabang/Unit Operasi/Unit Bisnis/Fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

Provisions regarding the orientation program include the following:

1. For newly appointed members of the Board of Directors, an orientation program must be provided regarding the condition of the Company in general.
2. The person in charge of the orientation program is the Corporate Secretary or anyone who can function as a Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
 - a. Implementation of Good Corporate Governance principles at the Company.
 - b. An overview of the Company in relation to its objectives, nature, and financial and operating performance activities, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, internal controls and other strategic issues.
 - c. Information regarding the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Commissioners and Directors.
4. This orientation program may be given as presentations, meetings, visits to the Company's Branch office/operating unit/business unit/facilities, reviews of Company documents or other programs that serve the purpose.

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan/*annual report*, dokumen terkait GCG, *product knowledge*.

Pada tahun 2018 Direksi yang mengikuti program pengenalan Direksi baru adalah Direktur Keuangan, Widyaka Nusapati pada tanggal 4 Desember 2018 bertempat pada Kantor Pusat IPC.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK. 568/30/8/1/PI.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pada Direktorat SDM dan Hukum serta Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

DIREKTORAT UTAMA

Direktorat Utama mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pemeriksaan internal, pengelolaan strategi Perusahaan dan pengelolaan kesekretariatan Perusahaan sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi:

1. Sekretaris Perusahaan
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan kegiatan Komunikasi Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Protokoler dan Tata Usaha Direksi serta Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan.

In the context of developing competencies and introducing companies, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has an orientation program for new members of the Board of Directors that aims to provide an overview of business activities, strategies, long-term plans of the company, and the duties and responsibilities of the Directors.

The orientation program for new Directors is prepared by the Corporate Secretary in collaboration with the HC Division and other related divisions, delivered in the form of presentations, annual report documents, documents related to GCG, product knowledge.

In 2018 the Director participating in the New Directors orientation program was the Finance Director, Widyaka Nusapati on December 4, 2018 at the IPC Head Office

BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY ASSIGNMENTS

In carrying out its duties, the Directors are divided into the following task areas:

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18 dated April 13, 2018 as Amendment to the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. HK. 568/30/8/1/PI.II-16 dated August 30, 2016 concerning Management Organization and Work Procedures in the HC and Legal Directorate and the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Operations and Information Systems Directorate.

MAIN DIRECTORATES

The Main Directorates have the main duty to plan, manage and carry out internal audit activities, management of corporate strategy and management of corporate secretariat in accordance with the strategy and company policies that have been established and include:

1. Corporate Secretary
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the management of Corporate Communications activities, Corporate Governance, Protocol Affairs and Administration of the Board of Directors as well as the Partnership and Community Development of the Company.

DIREKSI
Board of Directors

2. Biro Strategi Perusahaan

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pelaksanaan dan *monitoring* implementasi strategi Perusahaan, pengendalian kinerja perusahaan serta tanggung jawab terhadap pengelolaan *Project Management Office* (PMO) untuk mencapai tujuan Perusahaan.

3. Satuan Pengawas Internal

Menyusun dan merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penilaian atas penerapan kebijakan Perusahaan pada seluruh Direktorat dan seluruh jajaran organisasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2. Company Strategy Bureau

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the implementation and monitoring of corporate strategy, performance management and be responsible for the management of Project Management Office (PMO) to achieve the objectives of the Company.

3. Internal Audit Unit

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the implementation of monitoring and assessment activities on the implementation of the Company's policies at all directorates and all levels of organization within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

DIREKTORAT KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di pengembangan bisnis, komersial dan hubungan pelanggan sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Pengembangan Bisnis

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap kegiatan perencanaan dan analisis bisnis inti dan pendukung, serta optimalisasi pengelolaan properti (dan segmen usaha lain terkait properti) berikut implementasinya yang dijabarkan dalam strategi dan kebijakan Perusahaan.

2. Komersial

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap kegiatan pemasaran, kerja sama usaha dan penerapan tarif jasa kepelabuhanan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dijabarkan dalam strategi dan kebijakan Perusahaan.

3. Hubungan Pelanggan

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan pelanggan serta pengelolaan pelanggan utama yang dijabarkan dalam strategi dan kebijakan Perusahaan.

COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORATE

The Commercial and Business Development Directorate has the main duty to plan, control and carry out activities in business development, commercial and customer relations in accordance with the strategy and company policies that have been established, including:

1. Business Development

Prepare or formulate, propose, execute work policies and program as well as coordinate core and supporting business planning and analysis. The Directorate also optimizes the Company's property (and other property-related business) management and implementation which is elaborated in the Company's strategy and policies.

2. Commerce

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate marketing activities, business cooperation and application of port service tariff in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) areas of operations as described in Company strategy and company.

3. Customer Relations

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate customer and key customer service management activities described in Company strategy and policy.

DIREKTORAT TEKNIK DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Teknik dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan bidang teknik dan manajemen risiko sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Konstruksi Sipil
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pelaksanaan konstruksi/pembangunan meliputi perencanaan, pengambilan data, pelaksanaan survei, konstruksi dan pengendalian proyek.
2. Peralatan
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang meliputi alat apung, alat bongkar muat, teknik mesin dan teknik listrik.
3. Manajemen Risiko
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap identifikasi risiko, pengelolaan Sistem Manajemen Risiko dan *monitoring* pengendalian implementasi Manajemen Risiko serta membangun lingkungan kerja yang sadar risiko.
4. Satuan Kerja Proyek Strategis
Mengawasi dan memastikan pelaksanaan konstruksi proyek-proyek strategis dalam kurun waktu tertentu.

DIREKTORAT OPERASI DAN SISTEM INFORMASI

Direktorat Operasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dalam kegiatan operasional pelabuhan, manajemen mutu, K3, keamanan (PFSO), serta sistem informasi pendukung sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Operasi
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi pelabuhan yang meliputi operasi peti kemas, barang dan penumpang, serta kapal dan pemanduan.

TECHNICAL AND RISK MANAGEMENT DIRECTORATE

The Technical and Risk Management Directorate has the main duties to plan, control and execute technical and risk management activities in accordance with the Company's strategy and policies, including:

1. Civil Engineering
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the implementation of construction/development including planning, data collection, survey implementation, construction and project management.
2. Equipment
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the management of equipment procurement and maintenance which includes floating equipment, loading and unloading equipments, mechanical and electrical engineering.
3. Risk Management
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate risk identification and management system, and monitor risk management implementation to also build a risk-conscious work environment.
4. Strategic Project Task Force
Supervise and ensure the construction of strategic projects within the time specified.

OPERATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTORATE

The Operations and Information Systems Directorate has the main duty to plan, control and carry out management of port operational activities, quality management, K3, safety (PFSO), as well as management of supporting information systems in accordance with established corporate strategies and policies, including:

1. Operations
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs; coordinate on the management of port operations which includes container, goods and passenger operations, as well as vessel and ship pilotage.

DIREKSI
Board of Directors

2. Pelayanan Kapal

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi pelabuhan yang meliputi pemanduan dan penundaan, sarana dan prasarana pemanduan dan penundaan.

3. Kendali Mutu

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait pengelolaan jaminan mutu, manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penerapan *International Ships and Port – Facility Security (ISPS – Code)*.

4. Sistem Informasi

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

2. Ship Services

Arrange or formulate, propose, implement policies and work programs and coordinate the management of and control of port operations activities which include piloting and towage, guiding and delay facilities and infrastructure.

3. Quality Control

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs and coordinate the management of planning, implementation and control of activities related to quality assurance, Occupational Safety and Health (OSH) management, and application of International Ships and Ports - Facility Security (ISPS - Code).

4. Information Systems

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the implementation of information systems management including its planning & management, development, operation and maintenance of information systems.

DIREKTORAT KEUANGAN

Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dalam kegiatan bidang keuangan perusahaan sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi kegiatan:

1. Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pelaksanaan RKAP *holding* Perusahaan, evaluasi dan pengendalian realisasi, memastikan pencapaian KPI Perusahaan bidang keuangan serta anggaran investasi.

2. Pengelolaan Keuangan

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap perencanaan dan pengelolaan kas Perusahaan, investasi keuangan di Pasar Uang ataupun Pasar Modal, *monitoring* penerimaan dan pembayaran utang jangka menengah/panjang dan pengelolaan aset Perusahaan.

FINANCE DIRECTORATE

The Finance Directorate has the main duty to plan, control and carry out Company financial activities in accordance with the Company's strategy and policies in the below activities:

1. Financial Planning and Control

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs and coordinate the implementation of holding Company's Business Plan and Budgeting of the Company/BPBC, evaluation and control of its realization, ensure the achievement of KPIs in the financial sector and investment budget.

2. Financial Management

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate corporate cash planning and management, financial investment in the money or capital market, monitoring receipts and payment of medium/long term debt and management of company assets.

3. Layanan Keuangan

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap layanan akuntansi dan sistem keuangan, pajak, dan pusat layanan keuangan pelanggan (CSC).

3. Financial Services

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs and coordinate on accounting and financial system services, taxes, and customer financial service centers (CSC).

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUKUM

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Hukum mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dalam kegiatan bidang Sumber Daya Manusia, Pembelajaran SDM, Hubungan Pekerja dan Layanan SDM serta Hukum sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap sistem SDM dan perencanaan organisasi, manajemen talenta serta remunerasi dan fasilitas SDM yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan Perusahaan.

2. Pembelajaran SDM

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan bidang pembelajaran SDM meliputi perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan budaya Perusahaan.

3. Hubungan Pekerja dan Layanan SDM

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan bidang hubungan pekerja, umum dan rumah tangga serta layanan dan administrasi SDM.

4. Hukum

Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan dalam bidang hukum meliputi penanganan dan pembinaan kegiatan penelaahan hukum & peraturan Perusahaan, menyusun/meneliti peraturan internal perusahaan, pemantauan penerapan ketentuan hukum Perusahaan dan penanganan masalah hukum dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan, jaringan dan dokumentasi hukum.

HUMAN CAPITAL AND LEGAL DIRECTORATE

The Human Capital and Legal Directorate has the main duty to plan, manage and carry out Human Resources-related activities and relationships as well as provide HR and legal service in accordance with the strategy and company policies that have been established to include:

1. Human Capital

Compile, formulate, propose, implement policies and work programs and coordinate development of corporate culture, HR systems, HR training development and performance evaluation outlined from corporate strategies and policies.

2. Human Capital Learning

Compile, formulate, propose, implement policies and work programs and coordinate management of the HR learning including learning planning, implementing learning and corporate culture.

3. Employee Relationships and Human Capital Services

Compile, formulate, propose, implement work policies and programs; coordinate the management of human resources policies, services and administration.

4. Legal Affairs

Compile, formulate, propose, implement policies and work programs and coordinate the management of legal matters including the conduct and direction of corporate legal review and regulation, drafting/examining internal Company regulations, monitoring execution of corporate legal provisions and handling of legal cases with third parties related to the Company's interests, network and legal documentation.

DIREKSI
Board of Directors

DIREKTORAT PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN

Direktorat Pengelolaan Anak Perusahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, melaksanakan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan Anak Perusahaan dan Cabang, hubungan eksternal dan pengadaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *group* sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, yang meliputi:

1. Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terkait pengelolaan dan evaluasi kinerja Anak Perusahaan dan Cabang.
2. Hubungan Lembaga
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terkait pengelolaan dan membina hubungan dengan instansi baik Pemerintah dan/atau non Pemerintah, Mitra ataupun Investor dalam rangka ruang lingkup bisnis.
3. Pengadaan
Menyusun atau merumuskan, mengusulkan, melaksanakan kebijakan dan program kerja serta berkoordinasi terhadap pengelolaan program kerja menuju sinergi pengadaan barang dan jasa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang meliputi bidang Teknik, Non Teknik serta Administrasi dan Dokumentasi Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PENDELEGASIAN WEWENANG

Direksi yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk sementara waktu membutuhkan adanya Pelaksana Harian sebagai wujud pendelegasian wewenang untuk menjalankan tugas rutin sehari-hari.

Penunjukan Pelaksana Harian bagi Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Direktur Utama berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

SUBSIDIARY DEVELOPMENT DIRECTORATE

The Subsidiary Development Directorate has the main duty of planning, controlling, conducting coaching in the Company's Subsidiaries and Branches, external relations and procurement within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group in accordance with the Company's strategy and policies, which include:

1. Management of Company's Subsidiaries and Branches
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs and coordinate the management and performance evaluation of Subsidiaries and Branches.
2. Institutional Relationships
Compile, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate management of institutional relationship including fostering relationships with both government and/or non-government agencies, and with business partners or investors.
3. Procurement
Prepare, formulate, propose, implement work policies and programs as well as coordinate the management of the work program towards the synergy of procurement for goods and services of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including Engineering, Non Engineering, Administration and Documentation Procurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

DELEGATION OF AUTHORITY

Directors who are temporarily absent in carrying out their duties and obligations are required to propose an Acting Director as a delegation of authority to carry out daily routine tasks.

The appointment of Daily Executives for Directors is carried out with the following conditions:

1. If the President Director is absent, one of the Directors will be appointed in writing by the President Director and shall have the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
 3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang terlama dalam jabatan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
 4. Dalam hal salah seorang Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Direksi yang berhalangan;
 5. Prioritas penunjukan Pelaksana Harian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.566/19/5/1/PI.II-16 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Harian bagi Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. In the event that the President Director does not make such an appointment, the longest-serving Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director;
 3. In the event that there is more than 1 (one) longest-serving Director, the oldest longest-serving Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director;
 4. In the event that a Director other than the President Director is temporarily absent for any reason, other members of the Board of Directors may appoint one member of the Board of Directors to perform the duties of the absent Director;
 5. Priority for appointment as Acting Directors is stated in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors HK.566/19/5/1/PI.II-16 dated May 19, 2016 regarding the Appointment of Acting Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI DAN PENERAPANNYA

Dalam kebijakan tertulis IPC, tidak terdapat pengaturan mengenai keragaman Direksi. Hal ini mengingat pengangkatan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dengan persyaratan dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam bidang usaha kepelabuhanan, tidak terdapat peraturan dari regulator yang mewajibkan persyaratan tertentu bagi anggota Direksi.

Masing-masing telah mengenyam pendidikan yang mumpuni, telah memiliki pengalaman kerja yang beragam untuk menunjang pelaksanaan tugas di Perseroan, memiliki sertifikasi dan penghargaan yang telah diraih serta telah menjalani peningkatan kompetensi yang memadai. Secara lebih terperinci, keberagaman tersebut dapat terlihat pada profil masing-masing Direktur.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

IPC written in policy, there is no regulation regarding the diversity of Directors. This is due to the appointment of the board of directors held by shareholders requirements and procedures had been established in the Minister SOE Number PER-03/MBU/02/2015 about the Requirements and Procedures of Appointment and Dismissal of the the Board of Directors Member of State Enterprises. In addition, there is no port sector regulations from regulators that Requirements certain for the Board of Directors Member.

Each has a strong educational background, has extensive working experience, is supportive of the implementation of their duties in the Company, has certifications and awards and achievements and have undergone adequate competence improvement. In more detail, the diversity can be seen in the profiles of each Director.

DIREKSI
 Board of Directors

Keanekaragaman usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan serta keahlian tersebut menjadikan Direksi memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan Perusahaan, serta menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Keragaman dari masing-masing anggota Direksi serta aspek strategis yang diharapkan, dapat digambarkan sebagai berikut:

The age, educational background and work experience and expertise diversity reveals that the Board of Directors has a comprehensive understanding of the management of the company, and can added value when conducting the Board of Directors duties and functions. The diversity of each member of the Board of Directors and the expected strategic aspects are shown as follows:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Of Board Of Directors Diversity

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Usia <i>Age</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	51 tahun years	Laki-Laki Male	Magister Keuangan Master's degree in Finance	Industri Keuangan Financial Industry	Ekonomi dan Keuangan Economics and Finance
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Commercial and Development Director	61 tahun years	Laki-Laki Male	Master bidang Hydraulic Engineering Master's degree in Hydraulic Engineering	Industri Kepelabuhan Port Industry	Teknik Sipil Civil Engineering
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	47 tahun years	Laki-Laki Male	Magister Manajemen Bidang Master's degree in Infrastructure Management	Industri Kepelabuhan Port Industry	Teknik Sipil Civil Engineering
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	49 tahun years	Laki-Laki Male	Magister bidang Manajemen Master's degree in Management	Industri Keuangan Financial Industry	Teknik Mesin Mechanical Engineering
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director	46 tahun years	Laki-Laki Male	MBA Keuangan Master's degree in Finance	Industri Keuangan Financial Industry	Keuangan Finance

DIREKSI
 Board of Directors

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Usia <i>Age</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
Widyaka Nusapati**	Direktur Keuangan Finance Director	51 tahun years	Laki-Laki Male	Master in Business Administration (MBA) Bidang Financial Management/ Quantitative Analysis, MBA in Financial Management/ Quantitative Analysis	Industri Keuangan Financial Industry	Keuangan Finance
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director	44 tahun years	Laki-Laki Male	Master bidang hukum Master's degree in Law	Hukum Law	Hukum Law
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director	49 tahun years	Laki-Laki Male	Doktor bidang Keuangan Master's degree in Finance	Industri Kepelabuhan Port Industry	Teknik Mesin Mechanical Engineering

Keterangan:

*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018

**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

Information:

* Served until September 18, 2018

** Served since November 26, 2018

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Antar anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATE RELATIONSHIPS

Members of the Board of Directors do not have financial relationship and familial relationships to the third degree both through a straight line or side lines, including relationships arising from married.

DIREKSI
Board of Directors

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliate Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi <i>Board of Directors Financial, Family and Management Affiliations</i>			
		Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relationship with</i>			
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director		√		√
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Commercial and Development Director		√		√
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director		√		√
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director		√		√
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director		√		√
Widyaka Nusapati**	Direktur Keuangan Finance Director		√		√
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director		√		√
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director		√		√

Keterangan:

*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018

**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

Information:

* Served until September 18, 2018

** Served since November 26, 2018

DIREKSI
 Board of Directors

	Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relationship with</i>										Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain <i>Management Relationship with Other companies</i>	
	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Ya Yes	Tidak No		
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No				
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓		✓		✓		✓

DIREKSI
Board of Directors

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Pasal 10 ayat 34, anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran rangkap jabatan Direksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS POLICY

The members of the Board of Directors may not hold concurrent positions as follows:

1. Members of the Board of Directors in SOE, Regional SOE and Privately Owned Enterprises.
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in SOE.
3. Other structural and functional positions in the central and or regional government agencies/institutions.
4. Other positions in accordance with the provisions of legislation, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads.
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

During 2018, there were no violations of concurrent positions by the Board of Directors that have been stipulated in the Articles of Association of the Company.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Board of Directors Concurrent Positions

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain <i>Position in Other Companies/Agencies</i>	Nama Perusahaan /Instansi Lain <i>Name of Other Companies /Agencies</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pelabuhan Tanjung Priok
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Saptono R. Irianto	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT IPC Terminal Petikemas
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Multi Terminal Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	New Priok Container Terminal 1
Dani Rusli Utama	Direktur Komersial dan Pengembangan Commercial and Development Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Jasa Armada Indonesia
		Komisaris Commissioner	PT Pengerukan Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan /Instansi Lain Name of Other Companies /Agencies
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	Komisaris Commissioner	PT Electronic Data Interchange Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Terminal Petikemas Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
		Komisaris Utama President Commissioner	New Priok Container Terminal 1
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Energi Pelabuhan Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Pelabuhan Indonesia Investama
Widyaka Nusapati**	Direktur Keuangan Finance Director	-	-
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Rumah Sakit Pelabuhan
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
		Dewan Pengawas Supervisory Board	KSO TPK Koja

Keterangan:

*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018

**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

Information:

* Served until September 18, 2018

** Served since November 26, 2018

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Members of the Board of Directors who have a conflict of interest are not authorized to represent the Company if:

1. A case occurs before a court between the Company and members of the Board of Directors concerned.
2. The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.
3. In the event that there is a situation referred to above, the person entitled to represent the Company is:
 - a. Another member of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company.

DIREKSI
Board of Directors

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
4. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Setiap tahun Direksi juga menandatangani Pernyataan Independensi yang tercermin dalam naskah Pakta Integritas, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Daftar Khusus serta Pernyataan Benturan Kepentingan. Karena itulah, IPC menjamin independensi seluruh anggota Direksi dalam mengelola Perusahaan.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi IPC tidak memiliki saham baik di IPC maupun pada Perusahaan lainnya.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		IPC	Perusahaan Lain Other Company
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Commercial and Development Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Technical and Risk Management Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Widyaka Nusapati**	Direktur Keuangan Finance Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum Human Capital and Legal Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Director	Nihil Nil	Nihil Nil

Keterangan:
*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018
**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

- b. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company.
 - c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
4. In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company and there are no members of the Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the GMS.

Each year the Board of Directors signs a statement of independence reflected in the text of the Integrity Pact, Compliance with Business Ethics, Special Lists and Conflict of Interest Statements. For this reason, IPC guarantees the independence of all members of the Board of Directors in managing the company.

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

All IPC Board of Directors not have shares in either IPC or other companies.

Board of Directors Share Ownership

Information:
* Served until September 18, 2018
** Served since November 26, 2018

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi. Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

JADWAL RAPAT

Rapat Direksi pada tahun 2018 telah direalisasikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Sementara rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi juga dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan IPC atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

PESERTA RAPAT DIREKSI

Peserta rapat Direksi terdiri dari semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagai Notulen. Selain itu, Direksi memiliki wadah komunikasi dengan jajaran manajemen di bawahnya yaitu dalam Rapat Kerja Direksi (Rakerdir) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

A Board of Directors meeting is held whenever it is deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors meetings can be held at the Company's place of domicile or at its place of business or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors. Board of Directors meetings can be held through teleconferencing, video conferences or other electronic means that allow all participants at the Board of Directors meeting to see each other and hear directly and participate in the meeting.

MEETING SCHEDULE

The Board of Directors are held weekly meetings in 2018. Joint meetings of the Boards of Directors and Commissioners were held once a month. Meetings of the Board of Directors may also be held outside the regular schedule, if deemed necessary by:

1. One or more Director.
2. Written request from one or more Commissioner.
3. A written request of, by law, the Shareholders with the largest number of shares by mentioning matters to be discussed.
4. That this Board of Directors meeting is an immediate and strategic meeting, with agenda that requires decision-making at the Board of Directors level.

MEETING VENUE

Board of Directors Meetings may be held at the domicile of IPC or at the operational business location of IPC or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS PARTICIPANTS

The participants of Board of Directors meetings consist of all members of the Board of Directors and the Corporate Secretary as minute taker of the meeting. In addition, the Board of Directors has a communication forum with their subordinates in Working Meetings of the Board of Directors held every 3 (three) months per 1 (one) year.

DIREKSI

Board of Directors

UNDANGAN RAPAT DIREKSI

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi;
3. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
4. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

KUORUM RAPAT

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

PIMPINAN RAPAT

Pimpinan rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;

CALL FOR BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

The meeting call is set as follows:

1. The call for Board of Director meetings is in writing by a member of the Board of Directors entitled to represent the Company and delivered within a period of at least 3 (three) days before the meeting, or in a shorter time for urgent matters;
2. The call and implementation of the Board of Directors meetings may be delegated to the Corporate Secretary, unless arranged otherwise by a meeting of the Board of Directors;
3. A call for a meeting of the Board of Directors will include the event, date, time and venue, as well as agenda and material;
4. The call for Board of Director meeting may be conducted through electronic means (SMS, email and other electronic means) so that notices of the meeting agenda may be delivered more quickly, by following the procedures outlined in the Articles of Association concerning the formatting of written notices.

MEETING QUORUM

Meetings of the Board of Directors are valid and entitled to make legally binding decisions, when attended by more than 1/2 (one-half) the number of members of the Board of Directors or their representatives. A member of the Board of Directors may be represented in a meeting only by one other Director by virtue of a written authority granted exclusively for that purpose. A member of the Board of Directors may only represent one other member of the Board of Directors. In the event that a member of the Board of Directors is not present at a routine meeting, a member of the Board of Directors may represent the other member of the Board of Directors by providing a Power of Attorney with a statement of consent or rejection of the meeting agenda stipulating their reasons

MEETING CHAIRMAN

The Board of Directors' Meeting Chairman is stipulated as follows:

1. All meetings of the Board of Directors are chaired by the President Director;
2. In the event that the President Director is absent, the Board of Directors' meeting shall be chaired by an Acting President Director/Director appointed or authorized by the President Director;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan sebagaimana dijelaskan dalam butir di atas, maka:
 - a. Salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi;
 - b. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

3. In the event that the President Director does not make the appointment as described in above, then:
 - a. One of the longest-serving Director in office is appointed as chairman of the Board of Directors' meeting;
 - b. In the event that the longest serving directors are more than 1 (one) person, then the longest serving Director and the oldest by age will act as the Chairman of the Board of Directors' meeting.

RISALAH RAPAT

Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

MINUTES OF MEETINGS

Each Board of Directors meeting shall have minutes of meetings. The minutes of the meeting shall be signed by the meeting Chairman and all Directors who are present. Minutes of meetings shall be made and administered by the Corporate Secretary or other officers appointed by the Board Of Directors.

PENCATATAN/NOTULIS RAPAT DIREKSI

Pencatatan/Notulis Rapat Direksi adalah EVP Sekretaris Perusahaan.

MINUTE TAKER FOR BOARD OF DIRECTOR MEETINGS

The Minute Taker for Board of Directors Meetings is the EVP Corporate Secretary.

RENCANA RAPAT DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS MEETING PLAN

Bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Januari 2018 January 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan Pending Matters dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. Perpanjangan Kontrak PT PP untuk Proyek Kalibaru. 5. Laporan <i>Cascading</i> KPI Direktorat dan Divisi. 6. Tindak Lanjut Akuisisi KBS. 7. Progres Pembangunan <i>Matirime Tower</i>. 8. Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017 Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan. 9. Pengadaan Kapal Tunda PT JAI. 10. Realisasi dan Rencana Pengerukan Tahun 2017-2018. 11. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Extension of PT PP Contract for Kalibaru Project. 5. Cascading KPI Reports of the Directorate and Division. 6. Follow-up of KBS Acquisition. 7. Development Progress of Matirime Tower. 8. Follow Up of Audit Results for 2017 Head Office, Branch and Subsidiaries. 9. Procurement of PT JAI tugs. 10. Realization and Dredging Plans for 2017-2018. 11. Others 	Minggu ke-1 1st week

DIREKSI
Board of Directors

Bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2017. 5. Desain Optimalisasi Aset. 6. Tindak Lanjut KSMU. 7. Persiapan IPO Anak Perusahaan. 8. Restrukturisasi Dana Pensiun DP4. 9. RKM Tahun 2018. 10. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Achievement of Financial Performance in 2017. 5. Asset Optimization Design. 6. KSMU Follow Up. 7. IPO Preparation of Subsidiaries. 8. Restructuring the DP4 Pension Fund. 9. RKM for 2018. 10. Others 	Minggu ke-3 3rd week
Februari 2018 February 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan Pending Matters dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Desain <i>Unorganic Growth</i>. 4. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Januari Tahun 2018. 5. <i>Review</i> Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Sunda Kelapa <i>Heritage Port</i>. 6. Progres Sinergi BUMN. 7. Proses Seleksi Operator CT2/3. 8. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Inorganic Growth design. 4. Achievement of January 2018 Financial Performance. 5. Review of Feasibility Study on the Development Plan of Sunda Kelapa Heritage Port. 6. Progress of SOE Synergy. 7. CT2 / 3 Operator Selection Process. 8. Others. 	Minggu ke-1 1st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Implementasi <i>Corporate Culture</i> 2018. 4. Reviu Organisasi Cabang. 5. Program Konsolidasi Anak Perusahaan. 6. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Implementation of Corporate Culture 2018. 4. Review of Branch Organizations. 5. Subsidiary Consolidation Program. 6. Others. 	Minggu ke-3 3rd week
Maret 2018 March 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Februari Tahun 2018. 4. Pembahasan Permasalahan Strategis Perusahaan. 5. Persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017. 6. Reviu SOP. 7. Progres Standarisasi Premises Tahun 2018. 8. Progres Restrukturisasi Anak Perusahaan. 9. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Achievement of Financial Performance in February 2018. 4. Discussion of the Company's Strategic Problems. 5. Preparation of AGM for the 2017 Annual Report. 6. Review of SOP. 7. Progress on Standardization of Premises in 2018. 8. Progress of Restructuring Subsidiaries. 9. Others 	Minggu ke-1 1st week

Bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
April 2018 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I dan Rencana Kerja Triwulan II. 5. Pembahasan Permasalahan Strategis Perusahaan. 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Triwulan I. 7. Laporan Pelaksanaan Investasi Perusahaan Triwulan I. 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Achievement of Financial Performance Quarter I and Quarterly Work Plan II. 5. Discussion on the Company's Strategic Problems. 6. Report on the Implementation of Activities of the Corporate Secretary for Quarter I. 7. Quarterly I. Investment Company Implementation Report 8. Others 	Minggu ke-1 1st week
Mei 2018 May 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan April Tahun 2018. 4. Progres Monostatus Karyawan. 5. Struktur Biaya Logistik Pelabuhan. 6. Tindak Lanjut Kerja sama dengan Pelindo I, III dan IV. 7. Laporan <i>Top List</i> Risiko dan Mitigasinya. 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Achievement of Financial Performance in April 2018. 4. Employee Monostatus Progress. 5. Port Logistics Cost Structure. 6. Follow-Up Collaboration with Pelindo I, III and IV. 7. Report on Top Risk and Mitigation Lists. 8. Etc 	Minggu ke-1 1st week
Juni 2018 June 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Mei Tahun 2018. 4. Evaluasi Operasional Cabang dan Anak Perusahaan. 5. Pembahasan Usulan Program SDM dan Kepegawaian. 6. Persiapan Penanganan Arus Barang dan Penumpang Terkait Idul Fitri. 7. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Achievement of Financial Performance in May 2018. 4. Branch and Subsidiary Operational Evaluation. 5. Discussion of Proposals for HR and Staffing Programs. 6. Preparation for Handling Goods and Passengers Related to Eid Al-Fitr. 7. Others. 	Minggu ke-1 1st week

DIREKSI
Board of Directors

Bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Juli 2018 July 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. Capaian Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2018. 5. Rencana Kerja Perusahaan Semester II. 6. Laporan Rencana Kerja Manajemen Semester I Tahun 2018. 7. Reviu Penanganan Arus Barang dan Penumpang Setelah Idul Fitri. 8. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Achievement of 2018 Semester 1 Financial Performance. 5. Semester II Company Work Plan. 6. Report of the 2018 Management Semester 1 Work Plan. 7. Review of Handling Goods and Passengers After Idul Fitri. 8. Others. 	Minggu ke-1 1st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. Progres <i>Digital Port Project</i>. 5. Progres KSMU Cabang dan Anak Perusahaan. 6. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Digital Port Project Progress. 5. Progress of Branch KSMU and Subsidiaries. 6. Others 	Minggu ke-3 3rd week
Agustus 2018 August 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Pembahasan Permasalahan Strategis Perusahaan. 4. <i>Update Earning Asset</i> dan <i>Fixed Asset</i>. 5. Progres INSW. 6. Penyelesaian Masalah Hukum. 7. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Juli Tahun 2018. 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Discussion of the Company's Strategic Problems. 4. Update Earning Asset and Fixed Asset. 5. NSW Progress. 6. Resolution of Legal Problems. 7. Achievement of Financial Performance in July 2018. 8. Others 	Minggu ke-1 1st week
September 2018 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Agustus Tahun 2018. 4. Pembahasan Usulan Investasi Tahun 2018 Cabang dan Anak Perusahaan. 5. <i>Progress Dwelling Time</i>. 6. Tindak Lanjut Forum Manajemen. 7. Proyek Strategis Perusahaan. 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Achievement of Financial Performance in August 2018. 4. Discussion of 2018 Branch and Subsidiary Investment Proposals. 5. Progress Dwelling Time. 6. Management Forum Follow-Up. 7. Corporate Strategic Project. 8. Others 	Minggu ke-1 1st week

Bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Oktober 2018 October 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Dirbina. 4. <i>Review</i> Pengelolaan <i>Common Gate</i>. 5. Pembahasan Usulan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2018. 6. Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2018. 7. Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III dan Rencana Kerja Triwulan IV. 8. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Dirbina report. 4. Review of Common Gate Management. 5. Discussion of the Proposed Management Work Plan for 2018. 6. Discussion of the 2018 RKAP Proposal. 7. Achievement of Financial Performance in Quarter III and Quarterly Work Plan IV. 8. Others. 	Minggu ke-1 1st week
November 2018 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Oktober Tahun 2018. 4. Progres Proyek Strategis. 5. Persiapan Rakernas. 6. Pembahasan Finalisasi Usulan RKAP Tahun 2018. 7. Persiapan HUT IPC. 8. Tindak Lanjut Pengelolaan PKBL. 9. Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun 2018. 10. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Achievement of Financial Performance in October 2018. 4. Strategic Project Progress. 5. Preparation of National Working Meeting. 6. Discussion on Finalizing the Proposed RKAP in 2018. 7. Preparation of the IPC Anniversary. 8. Follow-up Management of PKBL. 9. Discussion on Preparation of RKAP AGM 2018. 10. Others. 	Minggu ke-1 1st week
Desember 2018 December 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Persiapan Penanganan Arus Barang dan Penumpang Terkait Natal dan Tahun Baru. 5. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners. 4. Preparation of Handling Goods and Passenger Flow Regarding Christmas and New Year. 5. Others 	Minggu ke-1 1st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat. 3. Laporan Kinerja Sekretaris Perusahaan Semester II. 4. Progres Proses Pengadaan Tahun 2018. 5. Laporan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2019. 6. Progres RKM Strategis. 7. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Directives. 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate. 3. Corporate Secretary Performance Report Semester II. 4. Progress of the Procurement Process in 2018. 5. Management Work Plan Report for 2019. 6. Strategic RKM Progress. 7. Others 	Minggu ke-3 3rd week

DIREKSI
Board of Directors

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
1.	9 Januari 2018 January 9, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Perpanjangan kontrak PP untuk Proyek Kalibaru 3. Tindak lanjut KSMU (PT IKPP Merak/ASDP, PT Holcim, PT ABS, Semen Baturaja, Jetty PTPN, PT DKB, PT Prima Batavia, PT IFU, dan pembelian aset DKB Cirebon) 4. Laporan <i>Cascading</i> KPI Direktorat dan Divisi 5. Desain optimalisasi aset 6. Tindak lanjut KSMU (Siskaku) 7. Laporan hasil <i>survey</i> pelanggan 8. Pembangunan akses jalan tol kalibaru 9. Realiasi dan rencana pengerukan tahun 2017-2018 10. Pengadaan kapal tunda PT JAI 11. Lain-lain 	<p>Elvyn G. Masassya</p> <hr/> <p>Saptono R. Irianto</p> <hr/> <p>Dani Rusli Utama</p> <hr/> <p>Prasetyadi</p> <hr/> <p>Iman Rachman*</p> <hr/> <p>Rizal Ariansyah</p> <hr/> <p>Riry Syeried Jetta</p>	<p>Hadir Attended</p> <hr/> <p>Hadir Attended</p> <hr/> <p>Hadir Attended</p> <hr/> <p>Hadir Attended</p> <hr/> <p>Tidak Hadir Absent</p> <hr/> <p>Tidak Hadir Absent</p> <hr/> <p>Tidak Hadir Absent</p>	<p></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Cuti Leave</p> <hr/> <p>Sakit Sick</p> <hr/> <p>Cuti Leave</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Extension of PP Contract for Kalibaru Project 3. KSMU Follow-up Actions (PT IKPP Merak / ASDP, PT Holcim, PT ABS, Semen Baturaja, PT Jetty, PT DKB, PT Prima Batavia, PT IFU, and purchase of DKB Cirebon assets) 4. Cascading KPI Reports to the Directorate and Division 5. Asset optimization design 6. KSMU Follow-up (Siskaku) 7. Customer survey reports 8. Development of Kalibaru toll road access 9. Realization and dredging plans for 2017-2018 10. Procurement of PT JAI tugs 11. Others 			

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS AGENDA, DATES AND PARTICIPANTS

For 2018, the Board of Directors Meeting agenda, dates and participants were as follows.

Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
2.	16 Januari 2018 January 16, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Perpanjangan kontrak PT PP untuk Kalibaru <i>project</i>	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Realisasi dan rencana pengerukan tahun 2017-2018	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. <i>Progress</i> proses Kijing, CBL, Maritim Tower, Kalibaru, Tanjung Carat dan Patimban	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Pengadaan kapal tunda PT JAI	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		6. <i>Progress Inaportnet</i> pelayanan barang di Pelabuhan Tanjung Priok	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		7. Program normalisasi pelayanan operasional JICT	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		8. <i>Progress</i> implementasi CFS dan Buffer Trucking			
		9. Tindak lanjut <i>Investment Company</i>			
		10. Sistem Informasi Keuangan IPC <i>Group</i>			
		11. Optimalisasi dana pensiun DP4			
		12. <i>Progress</i> persiapan IPO PT. IKT dan PT. PTP			
		13. Realisasi RKM 2017			
		14. Realisasi KPKU IPC 2017			
		15. Laporan implementasi Komite-komite IPC			
		16. Lain-lain			
3.	23-24 Januari 2018 January 23-24 2018	1. CEO <i>Direction</i> .	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Evaluasi 2017 dan program kerja 2018,	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Hasil Audit Cabang dan Anak Perusahaan 2017	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. RKM 2018	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Program <i>Branding/ Komunikasi</i> IPC	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		6. Evaluasi Investasi 2017 dan Rencana Investasi 2018	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		7. Lain-lain.	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		1. CEO of Directives,			
		2. 2017 evaluation and 2018 work program,			
		3. Results of Branch Audit and Subsidiaries 2017			
		4. 2018 RKM			
		5. IPC <i>Branding/Communication</i> Program			
		6. 2017 Investment Evaluation & 2018 Investment Plan			
		7. Others.			

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
4.	6 Februari 2018 February 6, 2018	1. CEO <i>Direction</i> .	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Design <i>Unorganic Growth</i>			
		3. <i>Progress</i> Sinergi BUMN	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. Reviu Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Sunda Kelapa <i>Heritage Port</i>			
		5. <i>Progress</i> Transformasi Bisnis PT EPI	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		6. Proses seleksi operator CT2/3			
		7. Proses Seleksi Operator PT1 atau PT2			
		8. Implementasi komite investasi dan manajemen risiko	Prasetyadi	Hadir Attended	
		9. Evaluasi GM dan Pengurus Anak Perusahaan			
		10. Program Corporate <i>Culture Implementation</i> 2018	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		1. CEO of Directives.	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		2. Design Unorganic Growth			
		3. Progress of BUMN Synergy			
		4. Review of Feasibility Study on the Development Plan of Sunda Kelapa Heritage Port	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		5. Progress of PT EPI's Business Transformation			
		6. CT2 / 3 operator selection process			
		7. PT1 or PT2 Operator Selection Process			
		8. Implementation of investment committees and risk management			
		9. Evaluation of GM and Management of Subsidiaries			
		10. Corporate Culture Implementation Program 2018			

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
5.	15 Februari 2018 February 15, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. Reviu Keputusan, <i>pending matter</i>, serta laporan progres masing-masing Direktorat 3. Laporan dirbina. 4. Proyek Strategis Pelabuhan Kijing, Cikarang Bekasi Laut (CBL), Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Tanjung Carat 5. Tower Maritime (Adminitrasi Pelaksanaan) 6. Laporan 10 <i>top list</i> risiko IPC dan mitigasinya 7. Penyelesaian Kapal Tunda Eks. PT TKA Batam 8. Rencana Investasi 2018 9. Perpanjangan kontrak PT PP 10. Program konsolidasi anak perusahaan pelindo 11. <i>Progress Merger</i> PT ILCS dan PT EDII 12. Tindak lanjut pasca IPO dan program <i>market update</i> PT JAI Tbk 13. Draft SK pedoman Pengadaan barang/jasa 14. Lain-lain 15. FS Final KSO di Pelabuhan Ambon PT Pelindo IV 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
6.	20 Februari 2018 February 20, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. <i>Exit meeting asesment</i> GCG 2017 3. KPI dan <i>Performance management system</i> 4. <i>Progress</i> audit laporan keuangan konsolidasi tahun 2017 5. Persetujuan desain renovasi eksterior gedung Kantor Pusat 6. Bisnis proses <i>buffer trucking</i> dan potensi pendapatannya 7. Penamaan aset IPC 8. Final proses restrukturisasi keuangan dan bisnis PMLI, JPPI, IPC TPK, PPI 9. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO of Directives. 2. Exit 2017 GCG assessment meeting 3. KPI and Performance management system 4. Progress audit 2017 consolidated financial statements 5. Approval of exterior renovation design for the Head Office building 6. Business of trucking buffer processes and potential revenue 7. IPC assets 8. Final process of financial and business restructuring for PMLI, JPPI, IPC TPK, PPI 9. Others 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke Cabang Banten Official trip to Banten Branch
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
7.	26 Februari 2018 February 26, 2018	Program penataan Kampung Nelayan Bengkulu Program for structuring Bengkulu Fisheries Villages	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
8.	27 Februari 2018 February 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. Pembahasan materi Rakomdir 3. Pemeriksaan hukum atas pemilihan mitra CT2 dan CT3 4. Opini hukum atas pengadaan konsultan dan kontraktor proyek Kalibaru 5. Program <i>golden handshake</i> 6. Kebijakan pelayanan kesehatan karyawan dengan BPJS kesehatan 7. Program Monostatus karyawan 8. Penyelesaian kontrak konsultan PT LAPI ITB dan Royal Haskoning 9. Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR RI ke Pontianak Working visit of the Indonesian House of Representatives Commission VI Team to Pontianak
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
9.	6 Maret 2018 March 6, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i>. 2. Mekanisme Pelaksanaan Proyek CBL 3. Kajian IPO IKT 4. Penyelesaian Kontrak Royal Haskonig 5. Tindak Lanjut Investasi TPK KOJA 6. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan BPJS Kesehatan 7. Perpanjangan Kontrak PT PP dari aspek teknis dan legal 8. Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
10.	15-16 Maret 2018 March 15-16, 2018	1. CEO <i>Direction</i> .	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Kalender Internalisasi Budaya Kerja			
		3. Progress Penyelesaian Program Pinjaman Kemitraan dan Implementasi Bina Lingkungan	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. Rencana <i>Launching</i> Divisi Pembelajaran			
		5. Program Optimalisasi BPJS dan pelayanan kesehatan untuk karyawan dan pensiunan			
		6. Pemilihan Mitra Kerja sama CT2 dan CT3			
		7. Restrukturisasi Anak Perusahaan PT PPI	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		8. <i>Draft</i> SK Pedoman Pengadaan Barang/Jasa			
		9. <i>Hedging</i> dan <i>Buy Back Global Bond</i>			
		10. Proses seleksi operator CT2/CT3 dan PT1/ PT2			
		11. Investasi, PIC dan nilai investasi	Prasetyadi	Hadir Attended	
		12. Mekanisme pelaksanaan proyek CBL secara komprehensif			
		13. Laporan dirbina.			
		14. Lain-lain	Iman Rachman*	Hadir Attended	
1. CEO Directives.					
2. Calendar of Work Culture Internalization					
3. Progress on Completion of the Partnership Loan Program and Implementation of Community Development	Rizal Ariansyah	Hadir Attended			
4. Plan for Launching Div. Learning (Corpu)					
5. BPJS Optimization Program and health services for employees and retirees					
6. Selection of CT2 and CT3 Collaborative Partners					
7. Restructuring of PT PPI's Subsidiaries					
8. Draft Decree on Procurement of Goods/Services Guidelines					
9. Global Bond Hedging and Buy Back					
10. The process of selecting CT2/CT3 and PT1/PT2 operators	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended			
11. investment, PIC and investment value					
12. Comprehensive mechanism for implementing CBL projects					
13. Report dirbina.					
14. Others					

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
11.	28 Maret 2018 March 28, 2018	1. CEO <i>Direction</i> . 2. Pembahasan materi Rakomdir 3. <i>Progress E-Service Digital Port</i> 4. Persiapan Pencanangan Pelabuhan Kijing 5. Laporan terkait permasalahan Cabang 1. CEO Directives. 2. Discussion of Rakomdir material 3. Digital Port Pro-Service Progress 4. Preparation for Kijing Launch 5. Reports related to Branch issues	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke Cabang Palembang Official trip to Palembang Branch
			Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir	Cuti umroh Conducting umroh
12.	6 April 2018 April 6, 2018	1. <i>Progress report Implementasi Capex 2018 per TW I</i> 2. Implementasi <i>Corporate Culture</i> yang melibatkan Direksi (jadwal Pelaksanaan ke Cabang-cabang) 3. <i>Progress Standarisasi Premises</i> 4. Tindak Lanjut Pelindo <i>Incorporated</i> 5. Tindak Lanjut Divestasi PT TPI 6. Kalender wawancara Direksi selama 1 tahun 7. Tindak Lanjut Lelang CT2/3 Kalibaru 8. Finalisasi Rencana Penggunaan Terminal Eks JICT2 9. Lain-lain 1. Progress report for Capex 2018 implementation per TW I 2. Implementation of Corporate Culture involving the Directors (Implementation schedule to Branches) 3. Premises Standardization Progress 4. Pelindo Incorporated Follow-Up 5. TPI Divestment Follow-up 6. Calendar of interviews of Directors for 1 year 7. Follow-up of Kalibaru CT2 / 3 Auction 8. Finalize Plan to Use the Ex JICT2 Terminal 9. Others	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
13.	10 April 2018 April 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan IPO PT PTP 2. Presentasi Final <i>Heritage Port</i> 3. Penyesuaian Remunerasi BOD Anak Perusahaan IPC dan Penyesuaian Remunerasi Karyawan IPC 4. <i>Launching</i> Corpu 5. Penyiapan Seragam Karyawan 6. Formula Bonus 7. Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas dalam rangka persiapan acara pencaangan pembangunan Terminal Kijing
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Tandatangan MoU antara IPC & DPFZA
			Iman Rachman*	Hadir Attended	Signing of the MoU between IPC & DPFZA
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
14.	24 April 2018 April 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Regulasi Baru dari Kementerian Perhubungan yang harus Dimonitor 2. Penyelesaian Aset Bermasalah 3. Progres Konsesi Kijing 4. Progres CBL dan Maritim Tower 5. <i>Launching</i> Museum Maritim 6. Laporan Tahunan 2017 Anak Perusahaan 7. Kronologis Pengadaan X-ray di <i>Common Area</i> Terminal Kalibaru 8. Reviu SOP 9. Revisi RJPP 2016-2020 10. Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Rapat di kementerian BUMN
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	Meeting at the Ministry of SOE

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
15.	15 Mei 2018 May 15, 2018	1. CEO <i>Direction</i> 2. Daftar regulasi Baru dari Kemenhub yang harus dimonitor 3. <i>Road Map Digital Port</i> (Linkage dengan <i>Digital Culture</i>) 4. Implementasi PCS 5. <i>Progress Implementasi Port Financing</i> 6. Finalisasi Tindak Lanjut Penamaan Aset IPC 7. <i>Shareholder Agreement NPCT1</i> 8. Lain-lain	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Rapat di kementerian BUMN Meeting at the Ministry of SOE
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
16.	28 Mei 2018 May 28, 2018	1. CEO <i>Direction</i> 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Rakomdir Material Discussion 3. Others	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke luar negeri terkait IPO PT IKT Official travel abroad related to PT IKT IPO
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
17.	26 Juni 2018 June 26, 2018	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> Pembahasan Materi Rakomdir Laporan <i>Ekspose</i> Keuangan Bulan Mei 2018 Perubahan anggaran dasar IPC <i>Progress</i> COP untuk Karyawan Perubahan Organisasi Cabang dan Kantor Pusat <i>Update</i> Rencana Kerja sama Cabang-cabang Pelabuhan dengan PT PTP dan PT IPC TPK Dividen Anak Perusahaan Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Rapat dengan kementerian koordinator bidang kemaritiman Meeting with maritime coordinating ministry
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
18.	28-29 Juni 2018 June 28-29, 2018	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> Reviu Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan <i>Progress</i> masing-masing Direktorat Proses Penyiapan KEK (Seluruh IPC) Standar Pengelolaan Terminal <i>Progres update Digital Port Strategy</i> Rencana Pengadaan Alat Terminal Kijing Kontrak Pendukung Beberapa Pekerjaan Bidang Teknik Reviu BPKP Terkait Biaya Kerja sama IPC PPI dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Tindak Lanjut <i> Holding Maritim</i> Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan IPC Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
19.	6-7 Juli 2018 July 6-7, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Reviu Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan <i>Progress</i> masing-masing Direktorat 3. Laporan Dirbina 4. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Decision & Pending Review Matters and Progress Reports of each Directorate 3. Dirbina report 4. Others 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Iman Rachman*	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
20.	24 Juli 2018 July 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. <i>Achievement</i> 10 Prioritas Masing-masing Direktorat 4. Progres <i>Integrated Port Project</i> 5. <i>Digital Port: Culture and Technology</i> 6. Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan SPI 7. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontraktor Kalibaru 8. Reviu Kelengkapan Organisasi IPC 9. Audit Yayasan Barunawati 10. Restrukturisasi dana Pensiun (DP4) 11. Program Rekrutmen Pegawai dari <i>fresh graduate</i> dan TNO 12. Tindak Lanjut Pengadaan X-ray 13. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Rakomdir Material Discussion 3. Achievement of 10 Priorities for each Directorate 4. Progress on the Integrated Port Project 5. Digital Port: Culture and Technology 6. Settlement of SPI Findings Follow-up 7. Completion of the Kalibaru Contractor's Rights and Obligations 8. Review of IPC Organizational Features 9. Barunawati Foundation Audit 10. Pension fund restructuring (DP4) 11. Recruitment Program for Fresh Graduates and TNO Employees 12. Follow-up on Procurement of X-rays 13. Others 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Rapat di kementerian BUMN Meeting at the Ministry of SOE
			Iman Rachman*	Tidak Hadir Absent	Menghadiri panggilan dari pengadilan pajak dan rapat dengar pendapat dari DPR RI Attended a call from the tax court and a hearing from the Indonesian Parliament
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
21.	25 Juli 2018 July 25, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pengadaan X-ray Persetujuan Permohonan Penambahan Dana Investasi Belinyu Progres Lelang Ulang CT2/3 Rencana Komersialisasi Terminal JICT2 Implementasi Kerja sama Terminal Operator dengan Cabang Kontrak Pendukung Beberapa Pekerjaan Bidang Teknik Reviu BPKP Terkait Biaya Kerja sama IPC dan PPI dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Progres Penyelesaian Aset Bermasalah di Cabang Pelayanan Kesehatan Pekerja Persiapan Idul Adha dan 17 Agustus 2018 Persoalan Rumah Susun Cilincing Implementasi Restrukturisasi EPI Progres Kerja sama IPC-PPI/ PIA-NPCT-1 Pengadaan <i>Reach Staker</i> 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Kunjungan kerja dari Menteri Perhubungan RI di Pangkal Pinang Working visit from the Indonesian Minister of Transportation in Pangkal Pinang
			Iman Rachman*	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke New York dalam rangka NDR Official travel to New York in the context of NDR
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
22.	7 Agustus 2018 August 7, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Paparan Pekerjaan Pembangunan Terminal Kalibaru oleh Konsultan Independen			
		3. <i>Progress</i> RKM Semester 1 tahun 2018	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. Tindak Lanjut Pengembangan Tanjung Carat			
		5. <i>Progress</i> Optimalisasi Aset			
		6. <i>Progress</i> Kerja sama Komersial Anak Perusahaan dengan Cabang - cabang			
		7. <i>Progress</i> Kebijakan Tarif di Cabang	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		8. <i>Progress</i> Komersialisasi ex JICT 2			
		9. Patimban (Komersial, Operasi, Teknik)			
		10. <i>Progress</i> Capex per Cabang			
		11. Usulan Relokasi Peralatan antar Cabang	Prasetyadi	Hadir Attended	
		12. <i>Review</i> Kesiapan dan Utilisasi Peralatan per Cabang			
		13. <i>Progress</i> Digital Port /Modernisasi 12 Cabang	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		14. <i>Progress</i> Buffer Trucking			
		15. <i>Progress</i> Pelindo Incorporated			
		1. CEO Directives			
		2. Exposure to the Kalibaru Terminal Construction Work by an Independent Consultant	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Menghadiri penanda-tanganan Kerja sama elektrifikasi
		3. RKM Progress for 1st Semester 2018			Attending the signing of electrification
		4. Tanjung Carat Development Follow-Up			Cooperation
		5. Asset Optimization Progress			
		6. Progress of Commercial Cooperation of Subsidiaries with Branches			
		7. Policy Rates at Branches Progress			
		8. Commercialization ex JICT 2Progress			
		9. Patimban (Commercial, Operations, Engineering)			
		10. Capex Progress per Branch	Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Cuti Leave
		11. Proposed Equipment Relocation between Branches			
		12. Review of Equipment Readiness and Utilization per Branch			
		13. Progress Digital Port / Modernization of 12 Branches			
		14. Progress Buffer Trucking			
		15. Progress Pelindo Incorporated			

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
23.	14 Agustus 2018 August 14, 2018	1. <i>Progress</i> Perbaikan <i>Physical Appearance</i> Tanjung Priok	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. <i>Progress Digital Port/</i> Modernisasi 12 Cabang	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. <i>Progress Buffer Trucking</i>			
		4. <i>Progress Dashboard Management</i>	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		5. Presentasi Jasindo terkait asuransi DNO			
		6. Pembahasan Hasil Perundingan Amendemen PKB			
		7. <i>Progress Implementasi Corporate Culture Program</i>	Prasetyadi	Hadir Attended	
		8. <i>Progress Pembebasan Lahan Kalibaru dan Sunda Kelapa</i>			
		9. <i>Progress Reviu SK Direksi</i>	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		10. <i>Progress Evaluasi Organisasi IPC</i>			
		11. <i>Progress Penyertaan Modal Anak Perusahaan</i>			
		12. Kinerja Cabang dan Anak Perusahaan Semester I tahun 2018	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		13. Lain-lain			
1. <i>Progress on the Improvement of Tanjung Priok's Physical Appearance</i>					
2. <i>Progress Digital Port / Modernization of 12 Branches</i>					
3. <i>Buffer Trucking Progress</i>					
4. <i>Dashboard Management Progress</i>	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended			
5. <i>Jasindo's presentation regarding DNO insurance</i>					
6. <i>Discussion of the PKB Amendment Negotiations results</i>					
7. <i>Progress on the implementation of the Corporate Culture Program</i>					
8. <i>Progress of Kalibaru and Sunda Kelapa Land Acquisition</i>					
9. <i>Review Progress of Directors' Decree</i>					
10. <i>PC Organizational Evaluation Progress</i>					
11. <i>Progress of Equity Participation of Subsidiaries</i>					
12. <i>Performance of Branches and Subsidiaries of Semester I of 2018</i>					
13. Others					

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
24.	21 Agustus 2018 August 21, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. <i>Progress</i> Akuisisi PT KBN			
		3. Rencana Bisnis Tambang Pasir di Bengkulu	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. FS Pengembangan Tanjung Carat			
		5. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		6. Rencana Pelaksana Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing			
		7. Posisi <i>Risk Profile</i> IPC	Prasetyadi	Hadir Attended	
		8. Usulan Reviu <i>eastern access</i>			
		9. Implementasi CFS untuk <i>plan</i> jangka panjang	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		10. <i>Update</i> Persiapan Pengoperasian JICT Terminal 2			
		11. <i>Progress Hedging</i> dan <i>Buy Back Bond</i>	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke Bengkulu Official trip to Bengkulu
		12. Laporan Keuangan Ekspose Juli 2018			
		13. Lain-lain	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
25.	29 Agustus 2018 August 29, 2018	1. CEO <i>Directives</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. PT KBN Acquisition Progress			
		3. The Sand Mine Business Plan in Bengkulu	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. FS Development of Tanjung Carat			
		5. Investment and Risk Management Committee Report	Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Rapat di kementerian BUMN Meeting at the Ministry of SOE
		6. Implementation Plan for Procurement of Loading and Unloading Equipment at Kijing Port			
		7. Position of IPC Risk Profile	Prasetyadi	Hadir Attended	
		8. Proposed eastern access review			
		9. CFS implementation for long-term plans	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		10. Update JICT Terminal 2 Operating Preparation	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		11. Hedging and Buy Back Bond Progress			
		12. Exposed Financial Report July 2018	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		13. Others			

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
26.	14 September 2018 September 14, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Pemaparan Kriteria Seleksi Calon Mitra Patimban	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Optimalisasi Lahan 222x/ Ex MKT	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. Progres Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, dan CBL	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Progres mengenai Konsesi atau Kompensasi Pengerukan	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		6. Hal-hal yang perlu mendapat Keputusan Direksi terkait RKAP 2019	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		7. Presentasi Peserta Program Internship Sisterport	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		8. Pembahasan Kampung Nelayan			
		9. Kajian Transformasi PT EPI			
		10. Optimalisasi Lahan PMLI oleh PT PPI			
		11. Lain-lain (Penyertaan PT PII pada Anak-anak Perusahaan)			
27.	18 September 2018 September 18, 2018	1. CEO Directives	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Presentation of Criteria for Prospective Partner Patimban Selection	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Land Optimization 222x / Ex MKT	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. Progress of Kalibaru, Kijing and CBL	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Progress regarding Concession or Dredging Compensation	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		6. Matters that need Directors Decree regarding the 2019 RKAP	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		7. Internship Sisterport Program Participant Presentation	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		8. Discussion of Fishermen's Villages			
		9. PT EPI's Transformation Study			
		10. PMLI Land Optimization by PT PPI			
		11. Others (PII Participation in Subsidiaries)			
27.	18 September 2018 September 18, 2018	1. Penyiapan X-Ray	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. <i>Port Physical Presence Progress</i>	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Peremajaan Terminal Penumpang	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. Hasil Audit AUP KAP EY atas biaya yang telah dikeluarkan PPI	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Merger EDII/ ILCS	Iman Rachman*	Hadir Attended	
		6. Lain-lain (<i>Business Model</i> PT JPPI)	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		1. X-Ray setup	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		2. Physical Presence Progress port			
		3. Rejuvenation of Passenger Terminals			
		4. Results of Audit by KAP EY AUP for costs incurred by PPI			
		5. EDII / ILCS merger			
6. Others (Business Model PT JPPI)					

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
28.	20-21 September 2018 September 20- 21, 2018	1. CEO <i>Direction</i> 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat 3. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate 3. Others	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
29.	27 September 2018 September 27, 2018	1. CEO <i>Direction</i> 2. Persiapan Rakomdir 3. Optimalisasi Lapangan 222x 4. Reviu tata Kelola Operasional Kepanduan (termasuk sisi Komersial dan SDM) 5. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Rakomdir preparation 3. Field Optimization 222x 4. Review of Operational Governance (including Commercial and HR sides) 5. Others	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Rapat pembahasan Proyek Pantauan dengan Kementerian BUMN Meeting to discuss Monitoring Projects with the Ministry of SOE
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Employee Gathering Direktorat PAP PAP Directorate Employee Gathering

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
30.	2 Oktober 2018 October 2, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Rencana Optimalisasi Lahan yang digunakan instansi militer di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		3. Rencana Komersialisasi Lahan HPL No.1 Kalibaru	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		4. Mekanisme Komersial Kerja sama IPC dengan PPI terkait Proyek Kalibaru	Prasetyadi	Hadir Attended	
		5. Kajian Optimalisasi Peralatan dan Presentasi Demo Modernisasi <i>Monitoring</i> Peralatan	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Perjalanan dinas ke Surabaya Official trip to Surabaya
		6. Reviu BPKP terkait Biaya Kerja sama IPC dengan PPI dalam Pembangunan Terminal Kijing	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		1. CEO Directives			
		2. Planned Land Optimization used by military agencies in the Tanjung Priok Branch			
		3. Plans for the Commercialization of Land for HPL No.1 Kalibaru			
		4. Commercial Mechanism of IPC Collaboration with PPI related to Kalibaru Project			
		5. Equipment Optimization Review and Demo Presentation for Modernization of Equipment Monitoring			
		6. Review of BPKP related to the Cost of IPC Cooperation with PPI in the Construction of Kijing Terminal			

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
31.	18 Oktober 2018 October 18, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Transformasi PT JPPI			
		3. Usulan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara IPC dengan PT PPI dalam pengembangan dan Pembangunan Terminal Kijing	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. Penyelesaian Permasalahan Keramba Nelayan di Perairan Sekitar Lokasi Proyek Pelabuhan Kijing			
		5. Reviu Operasional Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pangkal Balam terkait Rencana Pelimpahan Operasional non TPK ke Anak Perusahaan	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		6. Penyesuaian <i>Grand Design</i> Anak Perusahaan			
		7. Rencana Pembentukan IPC <i>Sub Utility</i>	Prasetyadi	Hadir Attended	
		8. Optimalisasi Lahan Ciawi			
		9. Penyelesaian Administrasi Pembangunan <i>Common Gate eks Eastern Polimer</i>			
		10. Besaran <i>Cost of Fund</i> atas <i>Claim Capex</i> PT PPI Periode 2013-2016	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Rapat koordinasi dengan PT PN Holding Coordination meeting with PT PN Holding
		11. Lain-lain (Pelabuhan Muara Sabak, Jambi dan Lain-lain Direktur Bidang)			
1. CEO Directives					
2. JPPI transformation					
3. Proposed Extension of Cooperation Agreement between IPC and PT PPI for the development and Construction of Kijing Terminal	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended			
4. Settlement of Fisherman Problems in Waters Around the Kijing Project Site					
5. Operational Review of Tanjungpandan and Pangkal Balam Branches related to Planned Delegation of Non TPK Operations to Subsidiaries					
6. Grand Design Adjustment for Subsidiaries					
7. Plans for Establishing IPC Sub Utility					
8. Ciawi Land Optimization					
9. Completion of the former Common Gate Development Administration of Eastern Polymers					
10. Amount of Cost of Fund for PT PPI Capex Claim for the 2013-2016 Period					
11. Others (Port of Muara Sabak, Jambi and Others Field Directors)					
32.	13 November 2018 November 13, 2018	1. CEO <i>Direction</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
		2. Hasil Kajian Delloitte terkait KBS			
		3. Penawaran Request of Proposal (RIP) di Pelabuhan Laem Cabang Thailand	Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
		4. Penyelesaian Administrasi Pembangunan <i>Common Gate</i> eks Eastern Polymer	Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
		5. <i>Update Progress</i> Evaluasi Organisasi IPC			
		6. Lain-lain	Prasetyadi	Hadir Attended	
		1. CEO Directives			
		2. Results of the Delloitte Study related to KBS			
		3. Request for Proposal (RIP) at Laem Chabang Port in Thailand	Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
		4. Completion of the former Eastern Polymer Common Gate Development Administration	Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
		5. Update of IPC Organizational Evaluation Progress			
6. Others					

DIREKSI
Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
33.	19 November 2018 November 19, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat 3. Laporan Dirbina 4. Pembahasan Rakomdir 5. Mekanisme Komersial Kerja sama IPC dengan PPI terkait Proyek Kalibaru 6. Hasil Kajian Penggabungan Usaha PT EDII dan PT ILCS 7. Lain-lain 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Rapat dengan Kementerian BUMN tentang pembahasan kelanjutan Proyek Kalibaru Tahap 2
			Prasetyadi	Hadir Attended	Meeting with the Ministry of SOE to discuss continuation of Phase 2 Kalibaru Project
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	
34.	4 Desember 2018 December 4, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Usulan Struktur Organisasi IPC Terkait Perubahan Nomenklatur Direksi 3. <i>Progress</i> Hasil Perundingan PKB 2018 	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Tidak Hadir Absent	Pelatihan di Kuala Lumpur, Malaysia
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	Training in Kuala Lumpur, Malaysia
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Widyaka Nusapati**	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Hadir Attended	
			Riry Syeried Jetta	Tidak Hadir Absent	Rapat di Kementerian BUMN SOE Ministry Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reasons for Absence
35.	17-18 Desember 2018 December 17-18, 2018	1. CEO <i>Direction</i> 2. <i>Review</i> Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres masing-masing Direktorat 3. Laporan Dirbina 4. Realisasi RKM Strategis 2018 dan <i>Draft</i> RKM Strategis 2019 5. Tindak Lanjut Temuan Audit 6. Lain-lain 1. CEO Directives 2. Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of each Directorate 3. Dirbina report 4. Realization of 2018 Strategic RKM and 2019 Strategic RKM Draft 5. Follow-up of Audit Findings Others	Elvyn G. Masassya	Hadir Attended	
			Saptono R. Irianto	Hadir Attended	
			Dani Rusli Utama	Hadir Attended	
			Prasetyadi	Hadir Attended	
			Widyaka Nusapati**	Hadir Attended	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Sakit Sick
			Riry Syeried Jetta	Hadir Attended	

Keterangan:

*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018

**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

Information:

* Served until September 18, 2018

** Served since November 26, 2018

DIREKSI
Board of Directors

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

The agenda and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been presented in the Board of Commissioners Meeting Corporate Governance Chapter on in this annual report.

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

During 2018, the Board of Directors held 35 (thirty-five) Board of Directors meetings and 12 (twelve) joint Board of Commissioners and Board of Directors meetings. The frequency and attendance of the meetings of each of the Directors is as follows:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Board of Directors Meetings Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Board of Directors and Board of Commissioners meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage Attended			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage Attended		
		Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase	Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	35	35	100%	12	12	100%
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Development Director	35	33	94,29%	12	10	83,33%
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik dan Manajemen Resiko Technical and Risk Management Director	35	31	88,57%	12	12	100%
Prasetyadi	Direktur Operasi dan Sistem Informasi Operations and Information Systems Director	35	30	85,71%	12	11	91,67%
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director	27	24	88,89%	8	7	87,50%
Widyaka Nusapati**	Direktur Keuangan Finance Director	2	2	100%	1	1	100%
Rizal Ariansyah	Direktur SDM dan Hukum HR and Legal Director	35	25	71,43%	12	10	83,33%
Riry Syeried Jetta	Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiary Management Director	35	30	85,71%	12	9	75%
Rata-rata Presentase Kehadiran Average Percentage Presence		-	-	89,32%	-	-	90,10%

Keterangan:

*Menjabat sampai tanggal 18 September 2018

**Menjabat sejak tanggal 26 November 2018

Information:

* Served until September 18, 2018

** Served since November 26, 2018

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018.

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-547/MBU/D4/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 bahwa anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, menerima honorarium sebagai anggota Dewan Komisaris dari Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan maksimal 30% dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN. Jika menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, akumulasi honorarium dari Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang diterima oleh yang bersangkutan maksimal 30% dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

The Board of Directors competency can be seen in the Board of Directors Profile Chapter, Competency Development Sub-Chapter in this Annual Report.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

Formulation of remuneration refers to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determination of Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Ministry of SOEs Regulation NO. PER-06/MBU/06/2018.

The remuneration determination for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners covering salary/honorarium, allowances, facilities and tantiem/incentives is stipulated in Ministry of SOEs Letter No. S-547/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018 concerning the Submission of remuneration determination for the Board of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.

As stipulated in Ministry of SOEs No. PER-04/MBU/2014 that Members of the Board of Directors serving as members of the Board of Commissioners in Subsidiaries/Joint Venture Companies receive an honorarium as a member of the Board of Commissioners of a Subsidiary/Joint Venture Company up to 30% of the salary as members of the SOE Board of Directors. If serving as a member of the Board of Commissioners in more than one Subsidiary/Joint Venture Company, the accumulation of honorarium from the Subsidiaries/Joint Venture Companies received shall be a maximum of 30% of the salary of the relevant member of the Board of Directors in the SOE.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The procedures for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors starts with a proposal from the Board of Directors. The Board of Directors requests a third party (consultant) to perform a review of the remuneration of the President Director. The results of the consultant's review are submitted to the Board of Commissioners for recommendation. The Board of Commissioners, assisted

DIREKSI
Board of Directors

telaah dan evaluasi remunerasi Direksi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI

by the Nomination and Remuneration Committee, reviewed and evaluated the Board of Directors remuneration. The Board of Commissioners recommendations were submitted to the Shareholders for approval at the GMS.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

Income in the form of salary/honorarium, allowances and facilities are set by taking into account factors such as revenue, assets, financial conditions and ability of the company, rate of inflation and other relevant factors, and should not conflict with legislation.

Determination of variable income in the form of allowances and tantiem is conducted by considering the factors such as target achievement, the level of soundness and financial ability and other relevant factors.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND NOMINAL/REMUNERATION COMPONENTS

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal
Direktur Utama President Director	Honorarium	Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp200.000.000/bulan Salary of the President Director is set at Rp 200,000,000/month	200.000.000,00
	Tunjangan Hari Raya Iled Celebration	1 kali gaji 1 time salary	200.000.000,00
Direktur Director	Honorarium	Gaji anggota Direksi ditetapkan dengan faktor jabatan 85% dari Direktur Utama Salary for members of the Board of Directors is determined by a factor of 90% from the President Director	170.000.000,00
	Tunjangan Hari Raya Iled Celebration	1 kali gaji 1 time salary	170.000.000,00
Direktur Utama President Director	Tunjangan Allowance		
	Perumahan Housing	27.500.000 per bulan 27,500,000 per month	27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximal premium of 25% x annual salary	600.000.000,00
Direktur Director	Tunjangan Allowance		
	Perumahan Housing	27.500.000 per bulan 27,500,000 per month	27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximal premium of 25% x annual salary	510.000.000,00

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal
Fasilitas Facilities			
Direktur Utama dan Direktur President Director and Director	Kendaraan Dinas Dinas Vehicle	Setiap anggota Direksi berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perusahaan, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 Each Director is entitled to 1 (one) vehicle facility of the Company, including maintenance and operational costs provided with due consideration to the Company's financial condition and is guided by the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018	Fasilitas Kendaraan Dinas Official Car facility
	Kesehatan Healthcare	Setiap anggota Direksi berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 Each member of the Board of Directors is entitled to a health facility provided in the form of medical insurance or reimbursement of medical expenses, with details in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018	Biaya pengobatan/Asuransi kesehatan Medical Expenses/Health insurance
	Bantuan Hukum Legal Assistance	Setiap anggota Direksi berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 Each member of the Board of Directors is entitled to a legal assistance with details as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018	Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga Pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan Payment disbursement of attorney's office/legal consultant services includes the process of examination as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished, this become the burden of the person
	Tantiem Bonus	Sesuai dengan Surat dari Kementerian BUMN Nomor S-547/MBU/D4/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	

DIREKSI
Board of Directors

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

The Board of Directors remuneration for one year is grouped in a range of income levels as follows.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Board of Directors Remuneration by Group

Jumlah Remunerasi <i>Total Remuneration</i>	Jumlah Orang <i>Number of People</i>
Di atas Rp2 miliar <i>Above Rp2 billion</i>	7
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar <i>Above Rp1 billion - Rp2 billion</i>	
Di atas Rp500 Juta - Rp1 miliar <i>Above Rp500 million - Rp1 billion</i>	1
Rp500 Juta ke bawah <i>Below Rp500 million</i>	

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS DECISIONS AND DUTIES

KEPUTUSAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS DECISIONS

NO	NOMOR DAN TANGGAL <i>NUMBER AND DATE</i>	PERIHAL <i>SUBJECT</i>
1	PD.05.02/5/2/1/SPS/UT/ PI.II-18 Tanggal 5 Februari 2018 PD.05.02/5/2/1/SPS/UT/ PI.II-18 dated 5 February 2018	Pedoman Implementasi Proyek Strategis PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Strategic Project Implementation Guidelines PT pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
2	HK.01/19/2/1/MKK/UT/PI.II-18 Tanggal 19 Februari 18 HK.01/19/2/1/MKK/UT/PI.II-18 dated 19 February 18	Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (Smk3) Di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Implementation Guidelines For Work Safety Management System (Smk3) In PT pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
3	HK.01/9/4/1/THP/UT/PI.II-18 Tanggal 9 April 18 HK.01/9/4/1/THP/UT/PI.II-18 Tanggal 9 April 18	Penetapan Direktur Pembina Pada Cabang Pelabuhan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Determination Of The Board Of Directors In The PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Port Branch</i>
4	PU.04.01/24/4/1/RBI/UT/ PI.II-18 Tanggal 24 April 18 PU.04.01/24/4/1/RBI/UT/PI.II-18 Tanggal 24 April 18	Pedoman Pengembangan Bisnis Secara Anorganik Di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Inorganic Business Development Guidelines In PT pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
5	PU.01.01/18/5/1/RBI/UT/ PI.II-18 Tanggal 18 Mei 2018 PU.01.01/18/5/1/RBI/UT/PI.II-18 Tanggal 18 May 2018	Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor PU.02.01/22/12/2/RBI/UT/PI.II-17 tentang Zonasi Bisnis Anak Perusahaan dan Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Amendment to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree number PU.02.01/22/12/2/RBI/UT/PI.II-17 concerning Business Zoning of Subsidiaries and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
6	HK.02/18/5/1/KIE/UT/PI.II-18 Tanggal 18 Mei 18 HK.02/18/5/1/KIE/UT/PI.II-18 dated 18 May 18	Pedoman Pengelolaan Media Komunikasi Dan Pemberian Informasi Perusahaan di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Communication Media Management Guidelines And Company Information at PT Pelabuhan Indonesia li (Persero)</i>
7	HK.02/9/7/1/KIE/UT/PI.II-18 Tanggal 09 Juli 18 HK.02/9/7/1/KIE/UT/PI.II-18 dated 09 July 18	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Sponsorship Atau Bentuk Partisipasi Lainnya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia li (Persero) <i>Guidelines For Implementation Of Sponsorship Or Other Participation In PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
8	HK.01/10/7/1/PMH/UT/PI.II-18 Tanggal 10 Juli 18 HK.01/10/7/1/PMH/UT/PI.II-18 dated 10 July 18	Pedoman Pelaksanaan Tindakan Hukum (<i>Legal Action</i>) Di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Guidelines For Implementing Legal Action In PT Pelabuhan Indonesia li (Persero)</i>

NO	NOMOR DAN TANGGAL NUMBER AND DATE	PERIHAL SUBJECT
9	PW.06.02/7/8/1/KIN/UT/ PI.II-18 Tanggal 07 Agustus 18 PW.06.02/7/8/1/KIN/UT/PI.II-18 Tanggal 07 August 18	Kamus Indikator Kinerja Perusahaan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Company Performance Indicators Dictionary For PT pelabuhan Indonesia II (Persero)
10	OT.01.03/27/8/1/PSO/UT/ PI.II-18 Tanggal 27 Agustus 18 OT.01.03/27/8/1/PSO/UT/ PI.II-18 dated 27 August 18	Perubahan Surat Keputusan Direksi PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: Hk.568/20/11/1/Pi.ii-16 Tanggal 29 November 2016 Tentang Penamaan Fungsi/Jabatan Dalam Bahasa Inggris Pada Direktorat Sdm & Hukum Serta Direktorat Operasi & Sistem Informasi Pt. Pelabuhan Indonesia li (Persero) Amendment Of PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Board Of Directors Decision Number: Hk.568/20/11/1/Pi.ii-16 Dated November 29, 2016 Concerning Functions / Positions In English For The Hr & Legal Director And The Operations & Information Systems Directorate At Pt. Pelabuhan Indonesia li (Persero)
11	PP-02/31/8/1/KAP/UT/PI.II-18 Tanggal 31 Agustus 18 PP-02/31/8/1/KAP/UT/PI.II-18 dated 31 August 18	Pedoman Manajemen Keamanan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Security Management Guidelines For Port Facilities In PT pelabuhan Indonesia II (Persero) (Persero)
12	HK.03/29/10/1/MTA/UT/PI.II-18 Tanggal 29 Oktober 18 HK.03/29/10/1/MTA/UT/PI.II-18 Tanggal 29 October 18	Perubahan Atas Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Changes To Guidelines For Members Of The Board Of Directors And Board Of Commissioners Of Subsidiaries Of PT pelabuhan Indonesia II (Persero)

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2018 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018.
2. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan* Tahun 2017-2021.
3. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2018 telah terselenggara sebanyak 35 (tiga puluh lima kali).
4. Menyusun RAKP dan RKM Perseroan Tahun 2018.
5. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham.
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas).
7. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.
8. Melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh Direksi, seluruh Manajerial Kantor Pusat, *General Manager* Cabang Pelabuhan dan Direksi Anak Perusahaan.
9. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IMPLEMENTATION

In accordance with their duties and responsibilities, during 2018 the Board of Directors carried out its duties related to the management of the Company. The tasks carried out by the Board of Directors included:

1. Preparing the Annual Report and Sustainability Report for 2018 Fiscal Year.
2. Compiling and implementing the 2017-2021 Corporate Plan.
3. Holding 35 (thirty five) Board of Directors meetings in 2018.
4. Preparing the Company's RAKP and RKM in 2018.
5. Developing an Integrity Pact in the context of implementing GCG, Compliance with the Business Ethics Code, Conflict of Interest Statement, and Special List of Share Ownership.
6. Attending 12 (twelve) Board of Commissioners' meetings where Directors were invited.
7. Conducting work visits to the Port Branches and Subsidiaries.
8. Conducting a national work meeting attended by all Directors, all Head Office Managers, Port Branch General Managers and Directors of Subsidiaries.
9. Preparing the organizational structure for the Company complete with details of its duties.

DIREKSI
Board of Directors

10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2018.
11. Melakukan hapus buku piutang pokok macet, bunga, denda, dan/atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham.
12. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan *support*.
13. Melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai dunia kepelabuhanan.
14. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
15. Mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
16. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dll.
17. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2018 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan.
18. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.
19. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
10. Holding a General Meeting of Shareholders regarding the Ratification of the 2018 RKAP on January 23, 2018 and the Annual General Meeting of Shareholders held on April 3, 2018.
11. Writing off bad debts, interest, penalties, and / or fees that were subsequently reported to the Board of Commissioners and obtaining Shareholders' approval.
12. Cooperating with third parties in various areas including business, operations and support.
13. Carrying out educational activities in order to increase understanding of the world of ports.
14. Applying Good Corporate Governance in all business activities.
15. Representing the Company inside and outside the Court with other parties and other parties with the Company.
16. Regulating provisions regarding the Company's staffing including salaries, pensions, promotions, training, retirement benefits, health insurance, etc.
17. Carrying out CSR activities, during 2018 CSR funds have been channeled for social and environmental activities.
18. Implementing other duties related to the management of the Company.
19. Establishing other Company policies in accordance with the provisions of the Law.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolektif berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS. Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Penyusunan KPI mengacu pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The collective performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholders in the GMS based on the Company's performance as set forth in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the GMS. At the beginning of each year, the Board of Directors prepares Key Performance Indicators (KPIs) as an elaboration of the BPBC approved by the GMS and set forth in the management contract. The compilation of KPIs refers to Ministry of SOEs.

MBU/2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Kinerja Unggul pada BUMN. Berita Acara Kesepakatan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) Tahun 2017 No. SEKTAP.52/12/PI.I,II,III, dan IV/2017.

Hasil kinerja Direksi secara kolegal dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegal berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang ditetapkan dalam RUPS yaitu:

1. Keuangan dan pasar.
2. Fokus pelanggan.
3. Efektivitas produk dan layanan.
4. Fokus tenaga kerja.
5. Kepemimpinan tata kelola dan tanggung jawab masyarakat.
6. Agen Pembangunan.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi tahun 2018 dilihat dari pencapaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya dan diaudit setiap tahunnya oleh KAP. Penilaian tersebut bersifat kolegal yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Direksi. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP dan pada akhir tahun, Direksi menyusun Laporan Kinerja Direksi yang disampaikan kepada Direksi yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Letter No. S-08/ S.MBU/2013 on Guidelines for Determination of KPI and Criteria of Superior Performance in SOEs. Berita Acara Kesepakatan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) Tahun 2017 No. SEKTAP.52/12/PI.I,II,III, dan IV/2017.

The results of the Board of Directors performance is collectively reported by the Board of Commissioners to the GMS in the Board of Commissioners Supervisory Report. The collective performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholder in a GMS based on the Company's performance as set forth in the approval and ratification of the Annual Report of the Company by the GMS.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The Board of Directors performance assessment criteris is submitted by the Board of Directors to be determined in the GMS, namely:

1. Finance and markets.
2. Customer focus.
3. Effectiveness of products and services.
4. Workforce focus.
5. Leadership in governance and community responsibility.
6. Agent Development

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The performance assessment of the Board of Directors in 2018 was conducted through self assessment and audited by Public Accountant's Office. The assessment is of collegial nature that is part of the Board of Directors Performance Report. Implementation of duties had been planned at the beginning of the year in a Work Program drafted in the BPBC and at the end of the year, the Board of Directors prepares a Performance Report of the Board of Directors submitted to the Shareholder at the GMS to be evaluated and ratified.

DIREKSI
Board of Directors

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

ASSESSMENT BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE RESULTS

No.	Nama KPI <i>KPI</i>	Satuan <i>Unit</i>	Polaritas <i>Deviation</i>
I	KEUANGAN DAN PASAR FINANCIAL AND MARKET		
	EBITDA Margin	%	+
	Capaian Pangsa Pasar Petikemas Market Share of Container Market	%	+
	EBITDA/Interest	Kali Times	+
II	FOKUS PELANGGAN COSTUMER FOCUS		
	Indeks Kepuasan Pelanggan Consumer Satisfaction Index	Likert	+
	Indeks Keterikatan Pelanggan Consumer Engagement Index	%	+
	Persentase Tindak Lanjut Complain Pelanggan Percentage of Customer Complaints Follow-up	%	+
III	EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS		
	<i>Waiting Time for Pilot</i>	Jam Hours	-
	Produktivitas B/M Terminal Petikemas Container Terminal Loading/Unloading Productivity	B/S/H	+
	<i>Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR)</i>	%	-
	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas Container Mooring Effectiveness	%	+
	<i>Number of Customer Served (Ships)</i>	GT	+
IV	FOKUS TENAGA KERJA LABOR FOCUS		
	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index	Likert	+
	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	Rp/Orang RP/Person	+

	Realisasi Audited <i>Audited Realization</i>			RKAP	Audited
	2015	2016	2017	2018	2018
	39,54	35,31	36,90	35,21	36,44%
	54,52	20,24	100,00	98,91	100%
	-	3,02	3,78	4,03	3,69%
	3,90	4,02	4,17	4,26	4,58%
	-	-	91,54	88,21	91,81%
	-	100,00	100,00	100,00	100%
	-	0,52	0,30	0,50	0,26
	43,91	41,13	46,83	45,11	48,65
	-	47,08	42,29	44,47	44,07
	-	-	64,55	66,40	68,65
	-	173.468.382,00	206.030.374,00	200.455.679,00	224.298.618,78
	4,03	4,13	4,16	4,26	4,27
	-	225.889.578,00	284.144.675,98	290.373.404,00	308.477.919,98

DIREKSI
Board of Directors

No.	Nama KPI <i>KPI</i>	Satuan <i>Unit</i>	Polaritas <i>Deviation</i>
V	KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN LEADERSHIP, GOVERNANCE AND CORPORATE RESPONSIBILITIES		
	Ketepatan Penyampaian Berkala pada BUMN Accuracy of regular delivery to SOEs	%	+
	Skor GCG GCG Score	Skor Score	+
	Skor KPKU KPKU Score	Skor Score	+
	Penyerapan Investasi (CAPEX) Investment Absorption (CAPEX)	%	+
VI	AGEN PEMBANGUNAN DEVELOPMENT AGENT		
	Sinergi BUMN SOE Synergy	%	+
	Hilirisasi dan Kandungan Lokal (TKDN) Downstreaming and Local Content (TKDN)	%	+
	Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu / Penugasan Pemerintah Integrated Regional Economic Development / Government Assignment	%	+
	Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai Financial Independence and Value Creation	%	+
	SKOR KPI KPI SCORE		

Kriteria penilaian Direksi yaitu agen pembangunan belum menjadi komponen penilaian di tahun 2017, akan tetapi Direksi menyampaikan pencapaian kriteria agen pembangunan dalam RUPS.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi yang terdiri atas 2 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko
2. Komite IPC Bersih

Selama tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

The criteria for evaluating the Board of Directors, namely as development agents, was not a component of assessment in 2017, but the Board of Directors conveyed the achievement of this criteria as development agents in the GMS.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT AND THE BASIS FOR THE ASSESSMENT

In carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by committees under the Board of Directors consisting of 2 (two) Committees. These committees include:

1. Investment and Risk Management Committee
2. IPC Bersih Committee

During 2018, the Board of Directors considered that the committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities properly.

	Realisasi Audited <i>Audited Realization</i>			RKAP	Audited
	2015	2016	2017	2018	2018
	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	83,21	93,32	96,37	88,00	98,30
	479,25	532,25	553,50	560,00	593,50
	74,55	63,28	67,05	87,50	64,22
	-	100,00	100,00	100,00	142,86
	83,21	93,32	96,37	40,00	250
	479,25	532,25	553,50	100,00	400
	74,55	63,28	67,05	100,00	118,33
	97,82	101,71	102,28	100,00	101,26

Komite Investasi dan Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan investasi dan risiko Perseroan. Selama tahun 2018, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite IPC Bersih merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas penerapan *whistleblowing system* di IPC. Selama tahun 2018, Komite IPC Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

PENILAIAN KINERJA UNIT DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian dan dasar atas kinerja unit audit

Penilaian kinerja Unit audit internal merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria hasil Temuan Audit yang telah selesai ditindaklanjuti. Penilaian tersebut didasari

The Investment and Risk Management Committee is a committee established to assist the Board of Directors in managing the Company's investments and risk. During 2018, the Investment and Risk Management Committee held 5 (five) meetings and carried out their duties well.

The IPC Bersih Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of a whistleblowing system in IPC. During 2018, the IPC Bersih Committee held 6 (six) meetings and carried out their duties well.

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR UNITS BELOW THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF THE ASSESSMENT

Audit Unit Performance Assessment And Basis

The Internal Audit Units performance evaluation forms part of the Company's KPI, including the followed up Audit Findings criteria. The assessment is based on a performance contract

DIREKSI Board of Directors

oleh kontrak kinerja yang di tandatangani oleh EVP Satuan Pengawas Internal dan Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Audit Internal telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

Penilaian dan dasar kinerja unit manajemen risiko

Penilaian kinerja Unit Manajemen Risiko merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria risk maturity level. Penilaian tersebut didasari oleh kontrak kinerja yang di tandatangani oleh VP Manajemen Risiko dan Direktur Teknik dan Manajemen Risiko yang diketahui oleh Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Manajemen Risiko telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi terdapat di Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10, yaitu:

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

signed by the Internal Audit Unit EVP and the President Director. Based on the KPI performance measurements as above, the Internal Audit Division has achieved the targets set by the KPI.

Risk management unit performance Assessment and basis

The Risk Management Units performance assessment part of the Company's KPI, including risk maturity level criteria. The assessment is based on a performance contract signed by the Risk Management VP and the Director of Engineering and Risk Management with the knowledge of the President Director. Based on the KPI performance measurements as above, the Risk Management Division has achieved the targets set by the KPI.

BOARD OF DIRECTORS MECHANISM FOR DISMISSAL AND RESIGNATION

The mechanism for dismissal and resignation of the Board of Directors is found in Article 10 of the Company's Articles of Association, namely:

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders decision regarding the appointment and dismissal of members of the Board of Directors also stipulates when it takes force and when the appointment and dismissal begins. In the event that the General Meeting of Shareholders does not stipulate, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall take effect from the closing of the General Meeting of Shareholders.

In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is carried out through a Shareholder's decision outside the General Meeting of Shareholders, then the date it comes into force will be contained in the Shareholder's decision. In the event that the Shareholders' decision outside the General Meeting of Shareholders does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors, it becomes effective from the decision of the Shareholders.

Pemberhentian Direksi Diatur di Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 13 - 22:

Ayat 13: Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Ayat 14 : Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Mengundurkan diri.

Ayat 15: Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Ayat 16: Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a,b,c,d,e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Ayat 17: Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

Dismissal of the Board of Directors is regulated in the Articles of Association Article 10 paragraph 13-22:

Paragraph 13: The General Meeting of Shareholders may terminate the members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.

Paragraph 14: The reason for dismissal of the members of the Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this article is carried out based on the following:

1. Unable to fulfill the obligations agreed upon in the management contract;
2. Unable to carry out their duties properly;
3. Has not followed the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
4. Has engaged in actions that harm the Company and/or the State;
5. Has taken actions that violate ethics and/or decisions that should be respected as a member of a State Owned Board of Directors;
6. Has been declared guilty of a court ruling that has a permanent legal force;
7. Has resigned.

Paragraph 15: In addition to the reason for terminating members of the Board of Directors as referred to in paragraph 14 letters a to g of this article, the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.

Paragraph 16: Decision on dismissal as referred to in paragraph 14 letters a, b, c, d, e and paragraph 15 of this article are taken after the person concerned has been given the chance of self-defense

Paragraph 17: The termination of the members of the Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this article is notified to the members of the Board of Directors concerned verbally or in writing by the Shareholders

DIREKSI
Board of Directors

Ayat 18: Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.

Ayat 19: Dalam hal anggota Direksi diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap telah terpenuhi.

Ayat 20: Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.

Ayat 21: Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Ayat 22: Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengunduran Diri Direksi Diatur di Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 28 - 32:

Ayat 28: Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Paragraph 18: In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, then the defense as referred to in paragraph 16 of this article shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days by the member of the Board of Directors notified as referred to in paragraph 17 of this article

Paragraph 19: In the event that a member of the Board of Directors is dismissed after defending themselves, or stated that they has no objection to the planned dismissal when notified, then the provisions of the time referred to in paragraph 18 are considered to have been fulfilled.

Paragraph 20: In the event that a dismissal is made at the General Meeting of Shareholders, then the defense as referred to in paragraph 16 of this article shall be carried out at the General Meeting of Shareholders ignoring the provisions of the time limit referred to in paragraph 18 of this article

Paragraph 21: As long as the plan for dismissal as referred to in paragraph 17 of this article is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out their duties

Paragraph 22: Dismissal due to the reasons referred to in paragraph 14 letter d and f of this article constitutes dismissal with disrespect

Resignation of Directors is regulated in Article 10 Article 28 -32 of the Articles of Association:

Paragraph 28: A member of the Board of Directors has the right to resign from their position by notifying in writing the purpose to the Company with copies to the Shareholders, Board of Commissioners and other Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of their resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter was received, it is deemed not to mention the effective date of resignation.

Ayat 29: Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat 30: Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat 31: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 angka 4 (empat) termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

Ayat 32: Bagi anggota direksi yang berhenti sebelum maupun setelah jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Paragraph 29: If up to the date requested by the relevant member of the Board of Directors or within 30 (thirty) days from the date the application for resignation in the case does not mention the effective date of resignation, there is no decision from the General Meeting of Shareholders. It ceases on the date requested above or with the passing of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation request received without the approval of the General Meeting of Shareholders

Paragraph 30: The position of members of the Board of Directors ends if:

1. They pass away;
2. Their term of office ends;
3. They are dismissed based on a decision by the General Meeting of Shareholders;
4. They no longer fulfill the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and Legislation.

Paragraph 31: Provisions as referred to in paragraph 30 letter d includes but are not limited to concurrent positions which are prohibited and resignation

Paragraph 32: For members of the Board of Directors who stop before or after their position expires, unless they stop due to death, then the person concerned must submit responsibility for their actions that have not yet been accepted by the General Meeting of Shareholders.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary to the Board of Commissioners is appointed to assist the smooth functioning of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioner's function is to provide administrative and secretarial support to the Board of Commissioners to facilitate the implementation of their duties.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Secretary of the Board of Commissioners carries out the following tasks:

1. Preparing meetings, including the Board of Commissioners briefing sheet.
2. Taking minutes of meetings of the Board of Commissioners
3. Administering documents of the Board of Commissioners, such as incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents.
4. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
5. Preparing the draft report of the Board of Commissioners.
6. Carrying out other duties tasked by the Board of Commissioners.

The Secretary to the Board of Commissioners also performs other duties such as:

1. Ensuring that the Board of Commissioners comply with laws and regulations and apply GCG principles.
2. Providing information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested.
3. Coordinating the members of the Committee, if necessary, to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
4. Acting as liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY TO BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Mukhammad Syaiful Anam

Warga Negara Indonesia, kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 19 Juli 1984 (34 tahun), berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 04/KEPDK/PI.II/III-2017 tanggal 31 Maret 2017.

Memperoleh gelar Diploma III bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2005 dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 2010. Karier sebelumnya adalah sebagai Plt Kepala Subbidang Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan BUMN II (Oktober 2012-September 2013), Plt Kepala Subbidang Usaha Industri Primer IIIb2 (September 2013-Mei 2014), Plt Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib (Mei 2014-Desember 2014), Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib (Desember 2014-Oktober 2015), Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-1 (Oktober 2015-Juli 2017), Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi 1a1 (Juli 2017-sekarang). Selain itu penugasan di BUMN yaitu sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2007-2012), Staf Komite Audit PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2012), Sekretaris Dewan Komisaris PT Askes (Persero) (2012-2014), Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan (2014), dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-Maret 2017).

Indonesian citizen, born in Magelang, Central Java, July 19, 1984 (34 years), domiciled in Tangerang. Serves as Secretary to the Board of Commissioners based on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners Decree Number 04/KEPDK/PI.II/III-2017 dated March 31, 2017.

Obtained a Diploma III degree in Accounting from the State College of Accountancy in 2005 and Bachelor of Accounting from the University of Indonesia in 2010. His previous career was as Acting Head of Sub Division of Inventory and Mutation of State Owned Enterprises II (October 2012-September 2013), Acting Head of Sub Division of Primary Industry IIIb2 (September 2013-May 2014), Acting Head of Business Sub Division of Transportation Facilities and Infrastructure Ib (May 2014-December (December 2014-October 2015), Head of Sub-Division of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Ia-1 (October 2015-July 2017), Head of Agro and Pharmaceutical Industry Sub-Sector 1a1 (July 2017-present). In addition, the assignments at SOEs were as Secretariat Staff of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2007-2012), Staff of Audit Committee of PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2012), Secretary of Board of Commissioners of PT Askes (Persero) (2012-2014), Secretary of Supervisory Board of BPJS Kesehatan (2014), and Secretary of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-March 2017).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY TO BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

TANGGAL & NOMOR SURAT PENUGASAN ASSIGNMENT LETTER DATE & NUMBER	TUJUAN PURPOSE	KEGIATAN ACTIVITY
12 Juli 2018 79/DK/PI.II/VII-2018 dan 12 Juli 2018 80/DK/PI.II/VII-2018 (Narasumber) July 12, 2018 79/DK/PI.II/VII-2018 and July 12, 2018 80/DK/PI.II/VII-2018 (resource person)	Kantor Pusat IPC IPC Head Office	"Penilaian Kinerja dan <i>Assessment</i> Talenta BUMN" pada tanggal 18 Juli 2018 R.R. PAP Lt 1. Inhouse Training PPM Manajemen "SOE Talent Assessment and Performance Assessment on July 18, 2018 R.R. PAP Lt 1. PPM Management Inhouse Training

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Tugas Utama

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris telah mempersiapkan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, termasuk mempersiapkan bahan rapat yang diperlukan Dewan Komisaris. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 48 (empat puluh delapan) kali rapat internal dan 12 (dua belas) kali rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.

- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam setiap pelaksanaan rapat, telah disusun risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Konsep risalah disampaikan kepada seluruh peserta rapat melalui email untuk memperoleh penyempurnaan sebelum difinalisasi melalui penandatanganan.

- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

Sekretaris Dewan Komisaris menyusun konsep-konsep surat/keputusan/bahan Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Komite. Beberapa materi surat Dewan Komisaris tahun 2018 antara lain:

- Rekomendasi/persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap.
- Rekomendasi/persetujuan kerja sama aktiva tetap.
- Rekomendasi IPO Anak Perusahaan.
- Rekomendasi pengangkatan calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- Rekomendasi usulan bakal calon Direksi IPC.
- Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- Laporan hasil kunjungan ke Cabang.
- Tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja triwulanan dan tahunan.
- Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Main Duties

- a. Preparing meetings, including the Board of Commissioners briefing sheet.

The Secretary to the Board of Commissioners prepares meetings for the Board of Commissioners, both internal meetings and Joint meetings with the Board of Directors, including preparing meeting material needed by the Board of Commissioners. In 2018, 48 internal meetings and 12 Joint Board of Commissioners and Board of Directors meetings were held.

- b. Taking minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association.

In each meeting, minutes of meetings are signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting. The minutes are delivered to all meeting participants via email to obtain improvement before being finalized for signing.

- c. Administering documents for the Board of Commissioners, such as incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents.

The Secretary to the Board of Commissioners prepares concepts letters/Decisions/material for the Board of Commissioners in coordination with the Committees. Some of the materials in 2018 for the Board of Commissioners included:

- Recommendations/approvals for write-off of fixed assets.
- Recommendations/approvals on the cooperation of fixed assets.
- Recommendations for IPOs of Subsidiaries.
- Recommendations for the appointment of prospective Directors/Commissioners for Subsidiaries.
- Recommendations for proposals for prospective PT Pelindo II Directors.
- Proposed appointment of the Public Accountant Office.
- Reports on results of visits to Branches.
- Board of Commissioners responses to quarterly and annual performance.
- Board of Commissioners responses to the RKAP.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

- Rencana kerja Dewan Komisaris.
- Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan tahunan.

Seluruh surat masuk dan keluar diadministrasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris, baik berupa dokumen fisik maupun *softcopy* yang menggunakan *cloud* melalui penyedia *dropbox*, sehingga seluruh anggota Sekretariat Dewan Komisaris dapat terhubung dan mengubah folder dan file yang sama dan tersinkronisasi.

Selain itu, dalam rangka mendukung tugas Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris juga menyusun dan menyampaikan surat-surat terkait kegiatan administrasi.

- d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- Pada tahun 2018, telah disusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Nomor 127/DK/PI.II/X-2018 tanggal 31 Oktober 2018.

- e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
- Sekretaris Dewan Komisaris telah menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris pada tahun 2018, yang terdiri atas:

- Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, melalui surat kepada Pemegang Saham Nomor 33/DK/PI.II/III-2018 tanggal 26 Maret 2018.
- Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2018, melalui surat kepada Pemegang Saham Nomor 46/DK/PI.II/IV-2018 tanggal 26 April 2018.
- Laporan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2018, melalui surat kepada Pemegang Saham Nomor 87/DK/PI.II/VII-2018 tanggal 26 Juli 2018.
- Laporan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2018, melalui surat kepada Pemegang Saham Nomor 128/DK/PI.II/X-2018 tanggal 31 Oktober 2018.

- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris, antara lain:

- Menyusun jadwal dan melakukan koordinasi serta kegiatan administrasi terkait kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Cabang.

- Board of Commissioners work plans.
- Quarterly and annual Board of Commissioners reports.

All incoming and outgoing letters is administered by the Board of Commissioners Secretariat, both in the form of physical and softcopy documents that use the cloud through a dropbox provider, so that all members of the Board of Commissioners Secretariat can connect and change the same and synchronized folders and files.

In addition, to support the duties of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretariat also prepares and submits letters relating to administrative activities.

- d. Drafting the Board of Commissioners Work Plan and Budget.

In 2018, the Board of Commissioners Work Plan and Budget was prepared and delivered through a Board of Commissioners letter to Shareholders Number 127/DK/PI.II/X-2018 dated October 31, 2018.

- e. Preparing the Board of Commissioners draft reports.

The Secretary to the Board of Commissioners drafted the Board of Commissioners report in 2018, which included:

- Board of Commissioners Report for the Fiscal Year 2017, through a letter to Shareholders Number 33/DK/PI.II/III-2018 dated March 26, 2018
- Board of Commissioners Report for Quarter I of 2018, through a letter to Shareholders Number 46/DK/PI.II/IV-2018 dated April 26, 2018
- Board of Commissioners Report for Quarter II of 2018, by letter to Shareholders Number 87/DK/PI.II/VII-2018 dated July 26, 2018
- Board of Commissioners Report for Quarter III of 2018, through a letter to Shareholders Number 128/DK/PI.II/X-2018 dated October 31, 2018.

- f. Carrying out other duties tasked by the Board of Commissioners.

Other activities carried out by the Secretary to the Board of Commissioners include:

- Arranging a schedule and coordinating and administrative activities related to the Board of Commissioners working visits to the Branches.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

- Menyusun jadwal, mengatur, dan melakukan kegiatan administrasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
 - Tugas-tugas lainnya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas lain berupa:
- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
Pada tahun buku 2018, nilai GCG IPC yang diperoleh berdasarkan hasil *assessment* dari pihak ketiga adalah sebesar 98,30. Untuk aspek Dewan Komisaris, diperoleh skor 99,531. Seluruh *area of improvement* hasil asesment GCG tahun buku 2018 akan ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2019.
 - b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan data kepada Dewan Komisaris, antara lain berupa bahan rapat, bahan dan data yang diperlukan dalam pembahasan atau persetujuan, bahan paparan yang disampaikan dalam rapat kerja nasional IPC, dan bahan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris. Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komite, khususnya terkait penyediaan bahan kajian/telaahan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris atau bahan pembahasan lainnya.
 - d. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan. Tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris melalui administrasi dokumen surat masuk, keluar, maupun bahan-bahan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan organ, baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy*.
- Arranging schedules, organizing, and carrying out administrative activities related to the competency development activities of the Board of Commissioners.
 - Other duties needed to support the activities of the Board of Commissioners.
2. In addition to performing the above duties, the Secretary to the Board of Commissioners performs other duties including:
- a. Ensuring that the Board of Commissioners comply with laws and regulations and apply GCG principles.
In the 2018 fiscal year, PT Pelindo II's GCG score based on assessment results from third parties was 98,30. For of the Board of Commissioners aspect, the score was 99,531. All areas for GCG improvement for the 2018 fiscal year assessment results were followed up in 2019.
 - b. Providing information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested.
The Secretary to the Board of Commissioners submits data to the Board of Commissioners, including meeting material, material and data needed for discussions or approvals, material presented at the PT Pelindo II national work meeting, and other material and information needed by the Board of Commissioners.
 - c. Coordinating the members of the Committee, if necessary, to facilitate the Board of Commissioners duties.
The Secretary coordinates the Committee's duties, especially regarding the provision of study material/ reviews needed for the Board of Commissioners decision making or other discussion material.
 - d. Acting as liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
The Secretary to the Board of Commissioners coordinates with relevant parties, both internally and externally.
3. In the framework of orderly administration and the implementation of GCG, the Board of Commissioners Secretariat must ensure that documents for activities are properly stored in the company. The task is carried out by the Secretary to the Board of Commissioners through the administration of incoming, outgoing and material documents required by the Board of Commissioners and organs, both in the form of hardcopy and softcopy.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Organ Pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas Perusahaan, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Komite Audit IPC telah terbentuk sejak tahun 2002 dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. 17/DK/PI.II/I-2002 tanggal 23 Januari 2002.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Pelaksanaan tugas Komite Audit IPC mengacu pada Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ under the Board of Commissioners. This committee was established to assist the Board of Commissioners to oversee the management of the Company as in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee members are appointed and dismissed by Board of Commissioners and reported to the GMS.

AUDIT COMMITTEE ESTABLISHMENT BASIS

The establishment of the Audit Committee refers to Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises Article 70 paragraph 1 stating that the Board of Commissioners is required to form Audit Committees that work collectively and function as corporate supervisors, as well as the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/2006 Dated December 20, 2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprises amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the supporting organ of Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN.

The Company's Audit Committee has been established since 2002 with Board of Commissioners Decision Letter (SK) No. 17/DK/PI.II/I-2002 dated January 23, 2002.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Implementation of IPC Audit Committee duties refers to the Audit Committee Charter as follows:

1. The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.
2. The Audit Committee is independent in the performance of its duties as well as in the report and is accountable to the Board of Commissioners.
3. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the auditor's performance of the Public Accounting Firm (KAP) and the Internal Audit Unit (IAU).
4. The Audit Committee assesses the implementation of activities and audit results conducted by IAU as well as KAP auditors.
5. The Audit Committee provides recommendations on the improvement of the internal control system and its implementation.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
9. Tugas khusus dari Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
3. Tugas
4. Kewenangan
5. Persyaratan Keanggotaan
6. Tanggung Jawab
7. Rapat
8. Laporan
9. Akses Kerahasiaan Informasi
10. Rencana Kerja dan Anggaran
11. Penghasilan Anggota
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
13. Penilaian Kinerja
14. Lain-Lain
15. Penutup

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen

6. The Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the company.
7. The Audit Committee identifies matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties granted by the Board of Commissioners.
8. The Audit Committee proposes to the Board of Commissioners the candidate auditor of the Annual Financial Reporting Firm along with the reasons for nomination and the amount of fee proposed for the said KAP auditor.
9. Special Duty from the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee is guided by the Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee. The Charter contains provisions that must be complied with in forming and implementing the activities of the Audit Committee in order to be able to work independently, objectively, independently, transparently and responsibly. The charter is organized in the following section:

1. Legal Basis
2. Appointment and Dismissal of Members
3. Duty
4. Authority
5. Membership Requirements
6. Responsibility
7. Meeting
8. Report
9. Access to Information Confidentiality
10. Work Plan and Budget
11. Members Income
12. Education and Supporting Personnel
13. Performance Appraisal
14. Others
15. Closing

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

In performing its duties the Audit Committee is authorized:

1. To look at the books, letters, and other documents, check

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

- lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

- cash for verification purposes and other promissory notes and check the Company's assets.
2. To enter the yards buildings and offices used by the Company.
 3. To request explanations from the Directors and / or other officials regarding all matters related to the Company's management.
 4. To understand all policies and actions that have been and will be carried out by the Company.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan anggota. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

AUDIT COMMITTEE STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE

The Board of Commissioners must establish an Audit Committee consisting of a Chairperson and Members. The Audit Committee Chairman and members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Audit Committee Chairman is a member of the Board of Commissioners who is Independent or a Member of the Board of Commissioners who can act independently. The Audit Committee members can come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company.

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The Audit Committee structure, membership and expertise is shown in the table below.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Audit Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Legal Basis of Appointment	Keahlian Expertise	Keterangan Information	Bidang Tugas Area
Kushari Suprianto	Ketua Chairman	11 Oktober 2017 16/KEP-DK/ PI.II/X-2017 October 11, 2017 16/KEP-DK/ PI.II/X-2017	Keuangan, Audit, Manajemen SDM Finance, Audit, HR Management	Komisaris Commissioner	Pelaksanaan tugas dalam bidang Audit dan Keuangan Execution of Audit and Finance duties
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	06 Maret 2017 03/KEP-DK/PI.II/ III-2017 March 6, 2017 03/KEP-DK/PI.II/ III-2017	Keuangan, Audit Finance, Audit	Pihak Independen Independent Party	Membantu Ketua Komite Audit untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Audit dan Keuangan Assists the Audit Committee Chairman by finding additional information, analysis and providing input for formulating responses or recommendations in the Audit and Finance Sector

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Legal Basis of Appointment	Keahlian Expertise	Keterangan Information	Bidang Tugas Area
Muhamad Al Fajar*	Anggota Member	17 Maret 2016 (KNR) 08/KEP-DK/PI.II/ III-2016 01 Februari 2018 (KA) 01/KEP-DK/ PI.II/I-2018 March 17, 2016 (KNR) 08/KEP-DK/PI.II/ III-2016 February 1, 2018 (KA) 01/KEP-DK/ PI.II/I-2018	Keuangan, Audit Finance, Audit	Pihak Independen Independent Party	Membantu Ketua Komite Audit untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Audit dan Keuangan Assists the Audit Committee Chairman by finding additional information, analysis and providing input for formulating responses or recommendations in the Audit and Finance Sector

*Mulai menjabat sejak 1 Februari 2018

* Served since February 1, 2018

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The Audit Committee profiles as of December 31, 2018 are as follows.



Kushari Suprianto
 Ketua Komite Audit
 Audit Committee Chairman

Profil Beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
 His profile has been presented in the Profile section of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Periode jabatan sebagai Komite Audit sama dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
 The term of office on the Audit Committee is equivalent to the term of office on the Board of Commissioners.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners



Rakhmat Adi Santosa
 Anggota Komite Audit
 Audit Committee Member

Usia <i>Age</i>	49 Tahun	49 years old
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991). Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997). Magister Akuntansi di bidang Manajemen Strategic & Finance dari Universitas Indonesia (2005). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991). Bachelor Accounting degree from Universitas Indonesia (1997). Master's degree in Strategic & Finance Management from Universitas Indonesia (2005).
Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	6 Maret 2017	March 6, 2017
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Senior Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP) (1991-2000). Financial Due Diligence dan Internal Control Reviewer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2002). Senior Consultant di Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2002-2003). Manager Riset dan Standar Akuntansi Keuangan di IAI (2003-2004). Audit Manager di AAJ Associates (Public Accounting Firm). Audit Committee di PT Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) (2004-2009). Dosen Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Al-Azhar Indonesia (2005-sekarang). Partner di KAP Zainal Juhana dan Rekan (2006-2015). Partner di KAP Sohibil, Kaslani, Komarianto Santosa (2016-sekarang). Managing Partner di PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-sekarang). 	<p>Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Senior Auditor at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP) (1991-2000). Financial Due Diligence and Internal Control Reviewer at Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2002). Senior Consultant at Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2002-2003). Research and Financial Accounting Standards Manager at IAI (2003-2004). Audit Manager at AAJ Associates (Public Accounting Firm). Audit Committee at PT Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) (2004-2009). Permanent Lecturer at the Faculty of Economics at Universitas Al-Azhar Indonesia (2005-sekarang). Partner at KAP Zainal Juhana dan Rekan (2006-2015). Partner at KAP Sohibil, Kaslani, Komarianto Santosa (2016-sekarang). Managing Partner at PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-sekarang).
Periode Jabatan <i>Term of office</i>	6 Maret 2017-6 Maret 2019	March 6, 2017 - March 6, 2019

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Organs and Committee Under the Board of Commissioners



Muhdi Al Fajar
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia <i>Age</i>	50 Tahun	50 years old
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1998). • Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> • Degree in Accounting from Universitas Gadjah Mada (1998). • Master's degree from Universitas Indonesia (2013).
Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	1 Februari 2018	February 1, 2018
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accounting Staff di PT Rika Surya Purnama (1998). 2. Accounting Staff di PT Hadico Persada (1999-2000). 3. Auditor dan Konsultan Akuntansi di Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (2000-2003). 4. Special Audit di PT Brantas Abipraya (Persero) (2004). 5. Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Wijaya Karya (Persero) (2003-2007). 6. Anggota Komite Audit di PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) (2005-2008). 7. Auditor Supervisor di PT Timah (Persero) (2009-2010). 8. Special Audit di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (2011). 9. Anggota Komite Audit di PT Sucofindo (Persero) (2010-2013). 10. Anggota Komite Audit di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010-sekarang). 11. General Manager of Finance and Accounting di PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010-sekarang). 	<p>Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accounting Staff at PT Rika Surya Purnama (1998). 2. Accounting Staff at PT Hadico Persada (1999-2000). 3. Auditor and Accountancy Consultant at Public Accounting Firm Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (2000-2003). 4. Special Audit at PT Brantas Abipraya (Persero) (2004). 5. Member of the Audit Committee and Member of the Risk Management Committee at PT Wijaya Karya (Persero) (2003-2007). 6. Member of the Audit Committee at PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) (2005-2008). 7. Auditor Supervisor at PT Timah (Persero) (2009-2010). 8. Special Audit at PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (2011). 9. Member of the Audit Committee at PT Sucofindo (Persero) (2010-2013). 10. Member of the Audit Committee at PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010-sekarang). 11. General Manager of Finance and Accounting at PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010-sekarang).
Periode Jabatan <i>Term of office</i>	1 Februari 2018 - 1 Februari 2020	February, 1 2018 - Februari, 1 2020

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATION AND WORK EXPERIENCE

As of December 31, 2018, the educational qualifications and work experience of the Audit Committee Head and Members are as follows.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Audit Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Kushari Suprianto	Ketua Head	Akuntansi, Ekonomi, Manajemen SDM Accounting, Economics, HR Management	Kepabeanan Customs
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Akuntansi/Ekonomis Accounting / Economics	Partner KAP Managing Partner Dosen tetap Konsultan KAP Partner Managing Partner Permanent lecturer Consultant
Muhdi Al Fajar*	Anggota Member	Sarjana Akuntansi/Ekonomi Bachelor of Accounting / Economics	Auditor dan konsultan di KAP GM of finance and accounting Anggota Komite Audit di beberapa BUMN KAP Auditor and consultant GM of finance and accounting Audit Committee member in several SOE

*Mulai menjabat sejak 1 Februari 2018

* Started office on February 1, 2018

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal serta praktik *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

In accordance with the Charter of the Audit Committee, the Committee performs its duties and responsibilities professionally and independently. The Committee supports the Board of Commissioners in conducting evaluations and oversight of the financial reporting process, internal and external audit processes and Good Corporate Governance practices well and in accordance with procedures.

Tabel Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Kushari Suprianto	Rakhmat Adi Santosa	Muhdi Al Fajar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Kushari Suprianto	Rakhmat Adi Santosa	Muhdi Al Fajar
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Having no ownership relationship in the Company</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or any other member of the Audit Committee</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as political party manager, official and government</i>	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Sepanjang tahun 2018, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut:

During 2018, the Audit Committee meeting dates, agenda and participants were as follows:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1.	10 Januari 2018 January 10, 2018	1. Pembahasan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environmental Development Partnership Program. 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa
2.	10 Januari 2018 January 10, 2018	1. Pembahasan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environmental Development Partnership Program. 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa
3.	16 Januari 2018 January 16, 2018	1. Pembahasan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) "Program Kemitraan Bekerja sama Dengan Bahana Artha Ventura". 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Community Development Partnership Program "Partnership Program in Collaboration with Bahana Artha Ventura". 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa
4.	30 Januari 2018 January 30, 2018	1. Pembahasan Draft Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Draft Management Report. 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Organs and Committee Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5.	7 Februari 2018 February 7, 2018	Pembahasan Rapat Koordinasi Hasil Pengarahan Dewan Komisaris atas Hasil Audit SPI pada Rapat Kerja di PMLI. Board of Commissioners Coordination Meeting Results Discussion on the IAU Audit Results at the PMLI Working Meeting.	Rakhmat Adi Santosa
6.	12 Februari 2018 February 12, 2018	Pembahasan <i>Draft</i> SOP Kerja sama. Discussion on the SOP Cooperation Draft.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
7.	20 Februari 2018 February 20, 2018	Pembahasan Persiapan Rapat Internal Dewan Komisaris. Discussion on Preparation for the Board of Commissioners Internal Meeting.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
8.	26 Februari 2018 February 26, 2018	Pembahasan Persiapan Rapat Internal Dewan Komisaris. Discussion on Preparation for the Board of Commissioners Internal Meeting.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
9.	28 Februari 2018 February 28, 2018	Pembahasan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Umur Ekonomis di atas 5 Tahun Berupa Perahu Air PA.VI Tk. Air 204 di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2017. Discussion on Proposals for Writing off Fixed Assets of Economic Age above 5 Years including Water Boat PA.VI Tk. 204 at the Tanjung Priok Port Branch in 2017.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
10.	28 Februari 2018 February 28, 2018	Pembahasan Komite Audit dengan KAP EY atas Tindak Lanjut Rapat tanggal 21 Februari 2018 di Ruang Rapat Dewan Komisaris. Discussion on the Audit Committee with KAP EY for the Follow-Up Meeting on February 21, 2018 in the Board of Commissioners Meeting Room.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
11.	6 Maret 2018 March 6, 2018	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Temuan SPI. Monitoring Follow Up of IAU Findings.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
12.	21 Maret 2018 March 21, 2018	Pembahasan Pelaksanaan Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017. Discussion on 2017 Port Indonesia II (Persero) Audit Implementation in 2017.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
13.	20-21 April 2018 April 20-21 2018	1. Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2018 Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Rapat Koordinasi Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Manajemen Risiko. 3. Hal-hal Strategis lainnya. 1. 2018 First Quarter Coordination Meeting by the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Committee with the Internal Audit Unit. 2. Coordination Meeting between the Risk Management Monitoring Committee with Risk Management. 3. Other Strategic Matters.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
14.	24 April 2018 April 24, 2018	Evaluasi Komite Audit dan Rencana Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Palembang. Audit Committee Evaluation and Planned Visit to Palembang Port Branch.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
15.	16 Mei 2018 May 16, 2018	Pembahasan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan SPI. Discussion on the Audit Committee Coordination Meeting with IAU.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
16.	16 Mei 2018 May 16, 2018	Pembahasan Proses Penetapan KAP. Discussion on the Process of Determining the KAP.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
17.	28 Mei 2018 May 28, 2018	Rapat Teknis Pembahasan Finalisasi Pengadaan KAP untuk Audit PT Pelindo II (Persero) Tahun Buku 2018. Technical Meeting to Discuss Finalization of KAP Procurement for the PT Pelindo II (Persero) 2018 Fiscal Year Audit.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
18.	4 Juni 2018 June 4, 2018	Pembahasan Usulan Penghapusan Aset Cabang Pelabuhan Cirebon. Discussion on the Proposed Write-off of Cirebon Port Branch Assets.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
19.	Juli 2018 July 2, 2018	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja ke PT IKT dalam Rangka Penghapusbukuan Aset IPO PT IKT. Discussion on Follow-Up Results of Work Visits to PT IKT in the Context of the PT IKT's IPO Assets Write-off.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
20.	17 Juli 2018 July 17, 2018	Pembahasan Pengadaan KAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Procurement Discussion for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) KAP.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
21.	1 Agustus 2018 August 1, 2018	Pembahasan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environmental Development Partnership Program.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
22.	3-4 Agustus 2018 August 3-4, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Triwulan II Tahun 2018 Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Rapat Koordinasi Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Manajemen Risiko. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 2018 Second Quarter Coordination Meeting between the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Committee and the Internal Audit Unit. Coordination Meeting between the Risk Management Monitoring Committee with Risk Management. Other Strategic Matters. 	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
23.	21 Agustus 2018 August 21, 2018	Rapat Internal Komite-Komite Pembahasan Laporan Hasil Kunjungan Komite-Komite. Internal Meeting on the Committee Visits Results.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
24.	28 Agustus 2018 August 28, 2018	Rapat KA-Keuangan-Hukum Pembahasan Penjelasan Penghapusan Aset di Cabang Pelabuhan Bengkulu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). KA-Finance-Law Meeting Discussion to Explain the Write-Off of Assets in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Port Branch.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
25.	6 September 2018 September 6, 2018	Rapat KA-Hukum Koordinasi Komite Audit dengan Direktorat Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Audit Committee Coordination Meeting with the of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Directorate of Law.	Muhdi Al Fajar
26.	20 September 2018 September 20, 2018	Pembahasan Diskusi Mengenai Surat-Surat Permohonan Penghapusan Aset. Discussion Regarding Application for Assets Write-Off.	Muhdi Al Fajar
27.	26 September 2018 September 26, 2018	Rapat KA-KPMR-DVP Properti Pembahasan Mengenai Manajemen Pengelolaan Aset. KA-KPMR-DVP Property Discussion Meeting Regarding Asset Management.	Muhdi Al Fajar
28.	1 Oktober 2018 October 1, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pra Rakor, SPI dan Komisaris. Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan KAP. Hasil Audit PKBL. Hal-hal Strategis Lainnya <ol style="list-style-type: none"> Pre Coordination, IAU and Commissioners Meeting. Progress of KAP Work Implementation. PKBL Audit Results. Other Strategic Matters. 	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
29.	1 Oktober 2018 October 1, 2018	1. Kemitraan dan Bina Lingkungan. 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Partnership and Community Development. 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
30.	9 Oktober 2018 October 9, 2018	Pembahasan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Subsidiaries.	Rakhmat Adi Santosa
31.	22 Oktober 2018 October 22, 2018	Undangan Rapat KA-KPMR-KNR dengan Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko, Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2019. Invitation to the KA-KPMR-KNR Meeting with the Finance and Risk Management, Division Discussion on the Proposed RKAP for 2019.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
32.	23 Oktober 2018 October 23, 2018	Undangan Rapat Komite dengan VP Properti - DVP Manajemen Aset, Pembahasan Review Peran dan Fungsi Pengelolaan Properti dan Manajemen Aset pada Direktorat Keuangan dan KPU PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Invitation to Committee Meetings with Property VP - DVP Asset Management, Discussion to Review Roles and Functions of Property Management and Asset Management in the Finance Directorate, and KPU of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
33.	23 Oktober 2018 October 23, 2018	Undangan Rapat KA-KPMR-KNR dengan Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko, Tindak Lanjut Pembahasan Usulan RKAP tahun 2019. Invitation to the KA-KPMR-KNR Meeting with the Finance and Risk Management Division, Follow-Up Discussion on the Proposed RKAP for 2019.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
34.	8-10 November 2018 November 8-10, 2018	1. Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan III Tahun 2018 Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Rapat Koordinasi Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko. 3. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on the 2018 Quarterly Coordination Meeting between the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Committee and the Internal Audit Unit. 2. Coordination Meeting between the Risk Management Monitoring Committee with the Risk Management Division. 3. Other Strategic Matters.	Kushari Suprianto Muhdi Al Fajar
35.	14 November 2018 November 14, 2018	1. Paparan Hasil Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Lain-lain. 1. Results of the Land Use Optimization Study for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Other Strategic Matters.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
36.	10 Desember 2018 December 10, 2018	Undangan Rapat KA pembahasan. Invitation to the KA Meeting discussion.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
37.	19 Desember 2018 December 19, 2018	Undangan Rapat KA dengan Keuangan Pembahasan Pengajuan Penghapusan Aset Cabang Pelabuhan Bengkulu, Tanjung Pandan dan Teluk Bayur. Invitation to KA Meeting with Finance to Discuss Submission of Assets Write-off in Bengkulu, Tanjung Pandan and Teluk Bayur Port Branches.	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings Attendance Levels

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	Persentase Percentage
Kushari Suprianto	Ketua Head	37	7	19%
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	37	33	89%
Muhdi Al Fajar	Anggota Member	37	35	94%
Rata-rata Presentase Kehadiran Average Percentage Presence		-	-	67,3%

PENGHASILAN KOMITE AUDIT

Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain Penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE INCOME

The Audit Committee Members income is determined by the Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of the President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as the Audit Committee Head / Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Audit Audit Committee	Gaji Salary	20% x Gaji Direktur Utama 20% x President Director's salary	40.000.000,00
--	----------------	--	---------------

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE KEY PERFORMANCE INDICATOR ACHIEVEMENTS

Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Total	3.00	12	37	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Organs and Committee Under the Board of Commissioners

**LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE
AUDIT TAHUN 2018**

Beberapa kegiatan utama Komite Audit tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018.
2. *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
3. Evaluasi kinerja SPI.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan SPI.
5. Bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kajian pemanfaatan lahan.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kecabang-cabang pelabuhan.
7. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.
8. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
9. Mengikuti rapat internal komite, rapat dengan komite lain/manajemen, dan rapat dengan Dewan Komisaris.
10. Menyusun kajian dan konsep surat Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap Perusahaan yang sebagian besar dikarenakan aset sudah rusak/tidak digunakan.
 - b. Penghapusbukuan aset kapal dalam rangka IPO PT IKT.
 - c. Pemenuhan data yang diperlukan oleh BPK RI.
 - d. Tanggapan atas laporan berkala manajemen (triwulanan dan tahunan).
 - e. Usulan penetapan KAP yang akan melakukan audit tahun buku 2018.
 - f. Penyampaian KAK dalam penetapan kontrak dengan KAP.
 - g. Laporan hasil kunjungan ke Cabang dan hasil koordinasi Komite dengan SPI dan Divisi Manajemen Risiko.
 - h. Penyampaian arahan Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian mengenai pemanfaatan lahan.

**BRIEF REPORT ON THE AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES
IN 2018**

The Audit Committee's main activities in 2018 included:

1. Evaluating the KAP performance and appointment process for KAP to audit the financial statements for fiscal year 2018.
2. Monitoring and evaluating external and internal auditors follow-up findings.
3. Evaluating IAU performance.
4. Periodically coordinating with IAU.
5. Together with the Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee, compiling a land use study.
6. Monitoring and evaluating the port branches.
7. Following competency enhancement activities.
8. Preparing work plans and periodic reports on the execution of tasks.
9. Attending internal committee meetings, meetings with other committees / management, and meetings with the Board of Commissioners.
10. Preparing studies and concepts for Board of Commissioners' letters regarding:
 - a. Writing-off and transferring company fixed assets, mostly due to damaged / unused assets.
 - b. Writing-off ship assets in the framework of PT IKT's IPO.
 - c. Fulfilling data required by the Republic of Indonesia BPK.
 - d. Responding to management periodic reports (quarterly and annual).
 - e. Proposing KAP to audit the 2018 fiscal year.
 - f. Submitting KAK for contracts with KAP.
 - g. Reporting Branch visits results, and results of coordination with IAU and Risk Management Division.
 - h. Submitting Board of Commissioners directives based on the results of studies on land use.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program peningkatan kompetensi Komite Audit telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dasar hukum kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi IPC adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor: 1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH nomor: 2 tanggal 15 Agustus 2008).
5. Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Audit Committee's competency improvement program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) as a supporting organ of the Board of Commissioners assists the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is to provide support to the Board of Commissioners in overseeing the implementation of the nomination and remuneration policies of Directors, Management Teams and employees.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE ESTABLISHMENT BASIS

IPC Nomination and Remuneration Committee legal basis for activities are:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Minister of State-Owned Enterprises Decree Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
4. PT Pelabuhan Indonesia II Articles of Association (Notary Deed Imas Fatimah, SH number: 1 dated December 1, 1992 which has been amended several times with Notary Deed Agus Sudiono Kuntjoro, SH number: 2 dated August 15, 2008).
5. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Organs and Committee Under the Board of Commissioners

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
3. Tugas
4. Kewenangan
5. Persyaratan Keanggotaan
6. Tanggung Jawab
7. Rapat
8. Laporan
9. Akses Kerahasiaan Informasi
10. Rencana Kerja dan Anggaran
11. Penghasilan Anggota
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
13. Penilaian Kinerja
14. Lain-Lain
15. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomination and Remuneration Committee Charter as stipulated by Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Legal Basis
2. Appointment and Dismissal of Members
3. Duty
4. Authority
5. Membership Requirements
6. Responsibility
7. Meeting
8. Report
9. Access to Information Confidentiality
10. Work Plan and Budget
11. Members Income
12. Education and Supporting Personnel
13. Performance Appraisal
14. Others
15. Closing

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of the Nomination and Remuneration Committee are based on Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, as follows:

1. To provide recommendation on candidate members for the Company's subsidiaries' Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. To prepare and provide recommendations on the system and procedure for the selection and/or replacement of Board of Commissioners and Board of Directors members to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. To evaluate the remuneration policy;
4. To provide recommendations to the Board of Commissioners, regarding:
 - a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
 - b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. *Mereview*, memeriksa, melakukan analisis dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat komite.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AUTHORITIES

The Nomination and Remuneration Committee authorities includes:

1. Reviewing, examining, analyzing and providing opinions and recommendations within the scope of their duties.
2. Searching for and receiving relevant information (unlimited access) from the Management Information System (MIS), reports, or from all members of the Board of Directors, employees or individuals or related sources.
3. Inviting management to attend committee meetings.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Structure, Membership and Expertise

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	SK Penetapan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keahlian <i>Expertise</i>	Keterangan <i>Information</i>	Bidang Tugas <i>Area</i>
D. Andhi Nirwanto	Ketua Head	11 Oktober 2017 18/KEP-DK/PI.II/X-2017	Komisaris Commissioner	Hukum, Manajemen Law, Management	Pelaksanaan tugas dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Implementation of Human Resources and Remuneration duties

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	SK Penetapan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keahlian <i>Expertise</i>	Keterangan <i>Information</i>	Bidang Tugas <i>Area</i>
Aries Fikiranman	Anggota Member	01 Februari 2018 01/KEP-DK/PI.II/II-2018	Pihak Independen Independent Party	SDM, Manajemen Keuangan HR, Financial Management	Membantu Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Assisting the Nomination and Remuneration Committee Head in the smooth running their duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Human Resources and Remuneration

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILES

The Nomination and Remuneration Committee profiles as of December 31, 2018 were as follows.



D. Andhi Nirwanto

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
 Head of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

His profile has been presented in the Profile section of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Periode jabatan sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sama dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee's term of office is the same as to the Board of Commissioners' term of office.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Organs and Committee Under the Board of Commissioners



Aries Fikiran
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Usia <i>Age</i>	54 Tahun	54 Years old
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Warga negara Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Education History:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III di bidang Postal dan Ilmu Akademis Umum dari Pusdiklatpos Perum Pos dan Giro (1986). Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Pusdiklatpos bekerja sama dengan Universitas Terbuka dalam Program Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan (1993). Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran (2005). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III in Postal and General Academic Studies from Pusdiklatpos Perum Pos dan Giro (1986). Bachelor's degree in Economics and Development Studies from Pusdiklatpos together with Universitas Terbuka in the Advanced Post Higher Education Program (1993). Master's degree in Financial Management from Universitas Padjadjaran (2005).
Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	1 Februari 2018	February 1, 2018
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Satuan Pengawas dan Penjaminan Mutu Akademik, Anggota Tim Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi, Anggota Tim Perumus Sistem Pengendalian Kinerja Perusahaan dan Anggota Tim Pendamping Auditor KAP di Politeknik Pos Indonesia (2007). Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bidang Pusat Kajian Postal di Politeknik Pos Indonesia (2008). Spesialis Madya di Sekretariat Perusahaan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) (2008). Sekretaris Komite Audit di Sekretariat Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2009). Sekretaris Dewan Komisaris di Sekretariat Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2009-2014). Staf Ahli Direktur Utama di Sekretariat Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2011). Manajer Kinerja Unit Bisnis di Kantor Pusat Pos Properti (2014). Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Bisnis Syariah dan Pasar dan Pejabat Sementara Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah di Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero) (2017). 	<p>Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Head of the Audit Unit and Academic Quality Assurance, Member of the Accounting Policy Improvement Team, Member of the Company Performance Control System Formulation Team, and Member of the Auditor Assistance Team, at Politeknik Pos Indonesia (2007). Researcher at the Research Institute and Community service (LPPM) Postal Center Study at Politeknik Pos Indonesia (2008). Associate Specialist at the Corporate Secretariat at PT Pos Indonesia (Persero) Head Office (2008). Secretary to the Audit Committee at the Board of Commissioners Sekretariat at PT Pos Indonesia (Persero) (2009). Secretary to the Board of Commissioners Sekretariat at PT Pos Indonesia (Persero) (2009-2014). Expert Staff to the President Director the Board of Commissioners Sekretariat at PT Pos Indonesia (Persero) (2011). Business Unit Performance Manager at Pos Properti Head Office (2014). Head of Planning, Sharia Business and Market Development, and Acting Head of Sharia Business Development Project at PT Pos Indonesia (Persero) (2017).
Periode Jabatan <i>Term of office</i>	1 Februari 2018 – 1 Februari 2020	1 Februari 2018 – 1 Februari 2020

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA
 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
D. Andhi Nirwanto	Ketua Head	Hukum, Manajemen Internasional Law, International Management	Aparat Penegak Hukum Law Enforcement Official
Aries Fikiran	Anggota Member	Ekonomi, Manajemen Keuangan Economics, Financial Management	Berbagai jabatan di PT Pos Indonesia, Sekretaris Dewan Komisaris PT Pos Indonesia Various positions at PT Pos Indonesia, Secretary to the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
 EDUCATION QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE**

The Remuneration and Nomination Committee Head and Member's educational qualifications and work experience as of December 31, 2018, were as follows.

Remuneration and Nomination Committee Educational Qualifications and Work Experience

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	D. Andhi Nirwanto	Aries Fikiran
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Having no ownership relationship in the Company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Having no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/ or any other member of the Nomination and Remuneration Committee	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as political party manager, official and government	√	√

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
 INDEPENDENCE**

Nomination and Remuneration Committee Independence

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING AGENDA

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	28 Februari 2018 February 28, 2018	Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on Proposed Changes in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office Organizational Structure.	Aries Fikiranman
2.	27 Maret 2018 March 27, 2018	Pembahasan Konfirmasi Usulan Direksi tentang Kenaikan Gaji Dirut Tahun 2018 dan Tantiem Tahun 2017. Discussion on the Board of Directors' Proposal Confirmation for the President Director Salary Increase for 2018, and for the 2017 Tantiem.	Aries Fikiranman
3.	27 Maret 2018 March 27, 2018	Pembahasan Konfirmasi Usulan Direksi tentang Kenaikan Gaji Direktur Utama Tahun 2018 dan Tantiem Tahun 2017. Discussion on the Board of Directors' Proposal Confirmation for the President Director Salary Increase for 2018, and for the 2017 Tantiem.	Aries Fikiranman
4.	5 April 2018 April 5, 2018	Pembahasan Indikator Kinerja Individual Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion of the Individual Performance Indicators for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners.	Aries Fikiranman
5.	10 April 2018 April 10, 2018	Pembahasan Permintaan Penjelasan atas Surat Dirut Perihal Tanggapan Tertulis atas Usulan Calon Direksi Anak Perusahaan. Discussion on Request for Explanation of the President Director's Letter Regarding a Written Response to the Proposal for Prospective Directors for the Subsidiaries.	Aries Fikiranman
6.	9 Mei 2018 May 9, 2018	1. Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan "SM 159". 2. Tanggapan Tertulis atas Usulan Calon Direksi Anak Perusahaan "SM 161" 1. Official Directive for the Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors "SM 159". 2. Written Response to the Subsidiaries' Prospective Directors Proposal "SM 161"	Aries Fikiranman
7.	16 Mei 2018 May 16, 2018	Pembahasan Permintaan Data Talenta PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Talent Data Request.	Aries Fikiranman
8.	5 Juni 2018 June 5, 2018	Pembahasan Konfirmasi dan Permintaan Penjelasan Sistem Pola Karier di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Confirmation and Request Discussion on the Explanation of Career Pattern Systems at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Aries Fikiranman
9.	31 Juli 2018 July 31, 2018	Pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Komisaris dan Direksi Bidang SDM dan Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Follow-up Discussion on the Evaluation of HR and Law Coordination Meeting Results of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Aries Fikiranman

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
10.	31 Juli 2018 July 31, 2018	Pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Komisaris dan Direksi Bidang SDM dan Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Discussion on the Evaluation of HR and Law Coordination Meeting Results of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran
11.	15 Agustus 2018 August 15, 2018	Pembahasan Evaluasi KNR atas Tindak Lanjut Hasil Rapat Teknis Rapat Koordinasi SPI dan Manajemen Risiko pada Triwulan I Tahun 2018 pada tanggal 20-21 April 2018. NRC Evaluation Discussion on the Follow-Up Results of the SPI Coordination Meeting and Risk Management Technical Meeting for Q1 of 2018 on April 20-21 2018.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran
12.	28 Agustus 2018 August 28, 2018	Tindak Lanjut Pembahasan <i>Issue</i> Bidang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Follow-up Discussion on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomination and Remuneration Committee Issues.	Aries Fikiran
13.	29 Agustus 2018 August 29, 2018	Tindak Lanjut Pembahasan <i>Issue</i> Bidang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Follow-up Discussion on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomination and Remuneration Committee Issues.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran
14.	5 September 2018 September 5, 2018	Tindak Lanjut Pembahasan <i>Issue</i> Bidang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/Serikat Pekerja JICT. Follow-up Discussion on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Labor Union of JICT Nomination and Remuneration Committee Issues.	Aries Fikiran
15.	10 Oktober 2018 October 10, 2018	Tindak Lanjut Pembahasan <i>Issue</i> Bidang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Follow-up Discussion on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomination and Remuneration Committee Issues.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran
16.	23 Oktober 2018 October 23, 2018	Pembahasan <i>Review</i> Peran dan Fungsi Pengelolaan Properti dan Manajemen Aset. Discussion on the Role & Function of Property Management & Asset Management.	Aries Fikiran
17.	7 November 2018 November 7, 2018	Rapat Komite dengan Biro Hukum, Pembahasan Permasalahan Hukum di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Committee Meeting with the Legal Bureau, Discussion on Legal Problems at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Aries Fikiran
18.	12 Desember 2018 December 12, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kajian Komite Nominasi dan Remunerasi atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. <i>Review Charter</i> Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan III Tahun 2018. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Nomination and Remuneration Committee Study on Proposed Changes in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office Organizational Structure. 2. Nomination and Remuneration Committee Charter Review. 3. Nomination and Remuneration Committee Report for Quarter III of 2018. 	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Attendance Levels

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Meetings</i>		
		Jumlah dan (%) Kehadiran <i>Amount and (%) Attendance</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	%
D. Andhi Nirwanto	Ketua Head	18	5	27
Aries Fikiran	Anggota Member	18	18	100

PENGHASILAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INCOME

Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan Penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee Members income is determined by the Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of the President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as the Nomination and Remuneration Committee Head / Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	Gaji <i>Salary</i>	20% x Gaji Direktur Utama <i>20% of the President Director's salary</i>	40.000.000,00
--	-----------------------	--	---------------

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE KEY PERFORMANCE INDICATORS ACHIEVEMENT

Indikator Pencapaian Kinerja <i>Key Performance Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weight</i>	Target	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Skor Capaian <i>Achievement Score</i>
Pelaksanaan Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Implementation of the Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings</i>	Jumlah Total	3.00	12	18	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Assignment Reports</i>	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Organs and Committee Under the Board of Commissioners

**LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2018**

Beberapa kegiatan utama Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2018, antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi.
3. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Direktorat SDM.
4. Bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Audit menyusun kajian pemanfaatan lahan.
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.
6. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.
7. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
8. Mengikuti rapat internal komite, rapat dengan komite lain/manajemen, dan rapat dengan Dewan Komisaris.
9. Menyusun kajian dan konsep surat Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Usulan bakal calon anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - b. Usulan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - c. Usulan Tantiem 2017 dan Gaji Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018.
 - d. Persetujuan perubahan struktur organisasi Perusahaan.
 - e. Penyampaian arahan Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian mengenai pemanfaatan lahan.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi IPC dan Direksi Anak IPC kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, di mana prosesnya akan mengikuti Kebijakan Suksesi Direksi.

**BRIEF REPORT ON THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE ACTIVITIES IN 2018**

The Nomination and Remuneration Committee's main activities in 2018 included:

1. Evaluating the proposals for prospective company and subsidiary Directors.
2. Evaluating proposed remuneration.
3. Periodically coordinating with HR Directorate.
4. Together with the Risk Management Monitoring Committee and the Audit Committee compiling a land use study.
5. Monitoring and evaluating port branches.
6. Following competency enhancement activities.
7. Preparing work plans and periodic reports on the execution of tasks.
8. Attending the Committee's internal meetings, meetings with other committees/management, and meetings with the Board of Commissioners.
9. Preparing studies and concepts for the Board of Commissioners' letters regarding:
 - a. Proposals for prospective Board of Directors members at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - b. Proposals for appointment of Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners.
 - c. Proposals for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Directors 2017 Tantiem and 2018 Salaries.
 - d. Approvals for changes in the company's organizational structure.
 - e. Submission of directives from the Board of Commissioners based on the results of studies on land use.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

One Nomination and Remuneration Committee task is to provide recommendations regarding prospective members of IPC and IPC Subsidiaries Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders, where the process will follow the Directors' Succession Policy.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Kebijakan tentang pencalonan Direksi kepada Pemegang Saham telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Beberapa pokok kebijakan tersebut adalah:

1. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham yang berasal dari Perusahaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku.
2. Dewan Komisari meminta akses *database* personel satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, yang memuat:
 - a. *Curriculum Vitae*
 - b. Hasil penilaian kinerja pegawai
 - c. Laporan harta kekayaan
3. Dewan Komisaris menetapkan kriteria calon dari *database* personel yang diterima dari Direksi untuk selanjutnya ditetapkan bakal calon-calon yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan
4. Dewan Komisaris menunjuk lembaga profesional yang dalam keputusan Kementerian BUMN untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, selanjutnya menetapkan calon yang memperoleh nilai "Disarankan" dan "Disarankan dengan Pengembangan" untuk mengikuti wawancara dengan Dewan Komisaris sebagai calon yang akan diusulkan.
6. Dewan Komisaris berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta wawancara menetapkan calon-calon Direksi yang akan diusulkan kepada RUPS.
7. Dewan Komisaris dalam melakukan proses pelaksanaan pencalonan Direksi menggunakan perangkat Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Program peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The policy for nominating Directors to the Shareholders is based on the Board of Commissioners' Decree Number 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 dated August 4, 2017 concerning Establishment of Standard Operating Procedure (SOP) for the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners Duties and Functions.

The key policies include:

1. The Board of Commissioners proposes candidates as members of the Board of Directors to the Company Shareholders in accordance with the applicable guidelines.
2. The Board of Commissioners requests access to a database of personnel one level below the Company's Board of Directors and Subsidiaries' Board of Directors to contain:
 - a. *Curriculum Vitae*
 - b. Employee performance appraisal results
 - c. Wealth report
3. The Board of Commissioners determines the criteria for candidates from the personnel database received from the Board of Directors to determine the candidates to take fit and proper tests.
4. The Board of Commissioners appoints professional institutions based on the Ministry of SOEs resolution to conduct fit and proper tests in accordance with applicable regulations.
5. The Board of Commissioners evaluates the fit and proper test results, then determines the candidates in the "Suggested" and "Suggested with Development" categories to undertake interviews with the Board of Commissioners as candidates to be proposed.
6. Based on the results of the fit and proper tests and interviews, the Board of Commissioners will determine the candidates for Directors to be proposed to the GMS.
7. During the process of nominating the Board of Directors, the Board of Commissioners uses the nomination and remuneration committee.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Nomination and Remuneration Committee's competency improvement program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Organs and Committee Under the Board of Commissioners

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 421A/DK/PI.II/ XII-2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Komite Pemantau Manajemen Risiko.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Nomor 4297, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara di antaranya menyangkut pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC telah terbentuk sejak tahun 2012 dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris NO.421A/DK/PI.II/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
3. Tugas
4. Kewenangan
5. Persyaratan Keanggotaan
6. Tanggung Jawab
7. Rapat

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee (RMMC) was established to improve the quality of supervision and advice by the Board of Commissioners in Enterprise Risk Management (ERM), based on Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decision No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated December 10, 2012 regarding Guidelines of Risk Management Monitoring Committee.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE ESTABLISHMENT BASIS

Establishment of the Risk Management Monitoring Committee refers to Law No. 19 of 2003 on SOEs (State Gazette Year 2003 No. 70, Supplement to State Gazette No. 4297, and Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including the establishment of a Supporting Board of the Board of Commissioners/Board of Supervisory for the establishment of the Risk Management Committee.

IPC's Risk Management Monitoring Committee has been established since 2012 through Board of Commissioners Decision Letter (SK) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated December 10, 2012.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Monitoring Committee is entrusted with the Charter of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Legal Basis
2. Appointment and Dismissal of Members
3. Duty
4. Authority
5. Membership Requirements
6. Responsibility
7. Meeting

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

8. Laporan
9. Akses Kerahasiaan Informasi
10. Rencana Kerja dan Anggaran
11. Penghasilan Anggota
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
13. Penilaian Kinerja
14. Lain-Lain
15. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/ Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
6. Tugas khusus dari Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang *asset* dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan.

8. Report
9. Access to Information Confidentiality
10. Work Plan and Budget
11. Members Income
12. Education and Supporting Personnel
13. Performance Appraisal
14. Others
15. Closing

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Management Monitoring Committee Duties are based on the Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. The Risk Management Monitoring Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners;
2. The Risk Management Monitoring Committee is independent in its performance of duties as well as in reports and reports to the Board of Commissioners;
3. The Risk Management Monitoring Committee provides recommendations on improvements to the Risk Management system and its implementation;
4. The Risk Management Monitoring Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the company;
5. The Risk Management Monitoring Committee identifies matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties granted by the Board of Commissioners;
6. Special Duty from the Board of Commissioners.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties the Risk Management Monitoring Committee is authorized to:

1. Access records or information regarding assets and other resources and enter the yards, buildings, and offices used by the Company.
2. Have the right to obtain and request any risk assessment results carried out by the risk owners, related structural officials, risk champions, Internal Audit Unit and the Board of Directors of the Company.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

- | | |
|---|---|
| <p>3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.</p> <p>4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para <i>risk owner</i>, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.</p> | <p>3. Request an explanation from the Board of Directors and / or other officials regarding all matters relating to the management of the Company.</p> <p>4. In carrying out its authority, the Committee cooperates with related work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.</p> |
|---|---|

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Structure, Membership and Expertise

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	SK Penetapan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keahlian <i>Expertise</i>	Keterangan <i>Information</i>	Bidang Tugas <i>Area</i>
Montty Giriana	Ketua Head	11 Oktober 2017 17/KEP-DK/PI.II/IX-2017 October 11, 2017 17/KEP-DK/PI.II/IX-2017	Komisaris Commissioner	Teknik Sipil, Manajemen Transportasi Civil Engineering, Transportation Management	Pelaksanaan tugas dalam Bidang Manajemen Implementation of Management duties
Pionir Harapan	Anggota Member	17 Maret 2016 07/KEP-DK/PI.II/III-2016 March 17, 2016 07/KEP-DK/PI.II/III-2016	Pihak Independen Independent Party	Manajemen Risiko, Keuangan Risk Management, Finance	Membantu Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Manajemen Assisting the Risk Management Monitoring Committee Head in the smooth running their duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Management

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	SK Penetapan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keahlian <i>Expertise</i>	Keterangan <i>Information</i>	Bidang Tugas <i>Area</i>
R. Nurhidayat	Anggota Member	31 Mei 2017 08/KEP-DK/Pl.II/V-2017 May 31, 2017 08/KEP-DK/Pl.II/V-2017	Pihak Independen Independent Party	Manajemen Risiko, Keuangan Risk Management, Finance	Membantu Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Manajemen Assisting the Risk Management Monitoring Committee Head in the smooth running their duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Management

PROFIL KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PROFILES

The Risk Management Monitoring Committee profiles as of December 31, 2018 were as follows.



Montty Giriana

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
 Head of the Risk Management Monitoring Committee

Profil Beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

His profile has been presented in the Profile section of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Periode jabatan sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sama dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee's term of office is the same as to the Board of Commissioners' term of office.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners



Pionir Harapan

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
 Member of the Risk Management Monitoring Committee

Usia <i>Age</i>	62 Tahun	62 Years Old
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Post Graduate of Economic di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1984). Magister Manajemen Keuangan dari IPWI Jakarta (2002). 	<ul style="list-style-type: none"> Post Graduate of Economic in Accountancy from Universitas Padjadjaran (1984). Master's degree in Financial Management from IPWI Jakarta (2002).
Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	17 Maret 2016	March 17, 2016
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Puslitbang di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1984-1990). Head Supervisory of Human Resources Management Audit di PT Garuda Indonesia (1995-1996). Head of Teknik & Operation Audit di PT Garuda Indonesia (1998-1999). Head of Finance & Administration International Route & Sales, Commercial Department di PT Garuda Indonesia (1999). Head of Planning, Analysis, Evaluation & Investigation di PT Garuda Indonesia (1999-2000). GM Commercial & Garuda Information System Audit di PT Garuda Indonesia (2000-2005). GM Commercial, Business Support & Corporate Affair Audit di PT Garuda Indonesia (2005-2008). Member of The Board Supervisory of Koperasi Karyawan Garuda di PT Garuda Indonesia (2005-2008). Senior Manajer Commercial & General Audit di PT Garuda Indonesia (2008). Excutive Project Manager Enterprise Risk Management di PT Garuda Indonesia (2008-2009). Member of GCG & Risk Management Committee di PT Garuda Maintenance Facility – Aero Asia (2009-2010). Member of Risk Management Committee di PT Angkasa Pura II (2010-2014). Member of Risk Management Committee di PT Dirgantara Indonesia (2014-2016). 	<p>Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Research Center at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1984-1990). Head Supervisory of Human Resources Management Audit at PT Garuda Indonesia (1995-1996). Head of Teknik & Operation Audit at PT Garuda Indonesia (1998-1999). Head of Finance & Administration International Route & Sales, Commercial Department at PT Garuda Indonesia (1999). Head of Planning, Analysis, Evaluation & Investigation at PT Garuda Indonesia (1999-2000). GM Commercial & Garuda Information System Audit at PT Garuda Indonesia (2000-2005). GM Commercial, Business Support & Corporate Affair Audit at PT Garuda Indonesia (2005-2008). Member of The Board Supervisory of Koperasi Karyawan Garuda at PT Garuda Indonesia (2005-2008). Senior Manajer Commercial & General Audit at PT Garuda Indonesia (2008). Excutive Project Manager Enterprise Risk Management at PT Garuda Indonesia (2008-2009). Member of GCG & Risk Management Committee at PT Garuda Maintenance Facility – Aero Asia (2009-2010). Member of Risk Management Committee at PT Angkasa Pura II (2010-2014). Member of Risk Management Committee at PT Dirgantara Indonesia (2014-2016).
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	17 Maret 2016 - 17 Maret 2018	17 March 2016 - 17 March 2018

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners



R. Nurhidayat

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of the Risk Management Monitoring Committee

Usia <i>Age</i>	45 Tahun	45 Years Old
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III di bidang Anggaran dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994). Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (2000). Diploma IV di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004). Magister Ekonomi Pembangunan di bidang Penilaian Aset dan Properti/Bisnis dari Universitas Gajah Mada (2012). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III in Budgeting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994). Bachelor's degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (2000). Diploma IV in Accountancy from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004). Master's degree in Economic Development and Asset and Property / Business Valuation from Universitas Gajah Mada (2012).
Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	31 Mei 2017	May 31, 2017
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	<p>Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Puslitbang di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1984-1990). Aktif pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PPAK-STAN) (2002-2005). Delegasi APEC Meeting di Cairns Queensland, Australia (2007). Delegasi ACMF (ASEAN <i>Capital Markets Forum</i>) di Kuala Lumpur (2008). Delegasi Working Committee on Financial Services Liberalization-AFAS di Hanoi, Vietnam (2009). Pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen-IMMI dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2014-2015). Peneliti bidang Ekonomi dan Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan (2006-sekarang) Peneliti tentang Efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Kredit Peternakan Sapi, Efektivitas Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD-Nias dan Pengembangan Kredit Mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (2015-2016). 	<p>Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Research and Development Center in the Financial Supervisory Agency and Development (BPKP) (1984-1990). Active in the Accounting and Finance Development Center at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PPAK-STAN) (2002-2005). APEC Meeting Delegation at Cairns Queensland, Australia (2007). ACMF (ASEAN Capital Markets Forum) Delegation at Kuala Lumpur (2008). Working Committee on Financial Services Liberalization-AFAS Delegation at Hanoi, Vietnam (2009). Teacher at Sekolah Tinggi Manajemen-IMMI and Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2014-2015). Researcher in Economics and Finance at Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan (2006-present) Researcher on the Effectiveness of People's Business Loans, Cattle Farm Loans, Entrepreneur Empowerment Loan Effectiveness for NAD-Nias and Development of Micro Credit through Non-Bank Financial Institutions (2015-2016).
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	31 Mei 2017 - 31 Mei 2019	31 May 2017 - 31 May 2019

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA
 KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO**

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Montty Giriana	Ketua Head	Teknik Sipil, Sistem Transportasi, Perencanaan Kota, Keuangan Civil Engineering, Transportation Systems, Urban Planning, Finance	Peneliti dan Birokrat Researcher and Bureaucrat
Pionir Harapan	Anggota Member	Akuntansi, Manajemen Keuangan Accounting, Financial Management	BPKP, berbagai jabatan di PT Garuda Indonesia, Komite Manajemen Risiko di beberapa BUMN BPKP, various positions at PT Garuda Indonesia, Risk Management Committee in several SOE
R. Nurhidayat	Anggota Member	Akuntansi, Penilaian Properti/Bisnis Accounting, Property / Business Valuation	Peneliti dan Birokrat Researcher and Bureaucrat

**RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE
 EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK
 EXPERIENCE**

The Risk Management Monitoring Committee Head and Members educational qualifications and work experience as of December 31, 2018 were as follows.

Risk Management Monitoring Committee Education Qualifications and Work Experience

**INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN
 RISIKO**

Tabel Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Montty Giriana	Pionir Harapan	R. Nurhidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Having no ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Having no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or any other member of the Risk Management Monitoring Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as political party manager, official and government	✓	✓	✓

**RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE
 INDEPENDENCE**

Risk Management Monitoring Committee Independence

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2018, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING AGENDA

During 2018, the Risk Management Oversight Committee meeting dates, meeting agenda and participants were as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	3 Januari 2018 January 3, 2018	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018. Board of Commissioners response to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2018 Work Plan and Budget (RKAP) Changes.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
2.	3 Januari 2018 January 3, 2018	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan III Tahun 2017. Risk Management Evaluation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Quarter III of 2017.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
3.	17 Januari 2018 January 17, 2018	Rekomendasi Kerja sama Pemanfaatan Lahan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan PT Asianagro Agungjaya. Recommendation on Cooperation in Land Use at the Teluk Bayur Port Branch with PT Asianagro Agungjaya.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
4.	20 Februari 2018 February 20, 2018	Rencana Kerja sama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Belinyu, Cabang Pelabuhan Pangkal Balam. Plans for Collaborating on Land Use in the Belinyu Area, Pangkal Balam Port Branches.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
5.	27 Maret 2018 March 27, 2018	Rencana IPO IKT. IKT IPO Plan.	Pionir Harapan R. Nurhidayat
6.	28 Maret 2018 March 28, 2018	IPO IKT. IKT IPO.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
7.	4 April 2018 April 4, 2018	Rapat Internal KPMR Pembahasan Konsep Laporan KPMR Triwulan II Tahun 2018. KPMR Internal Meeting Discussion of Concept for KPMR Q2 2018 Report.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
8.	9 Mei 2018 May 9, 2018	Progres CBL. CBL Progress.	Pionir Harapan
9.	9 Mei 2018 May 9, 2018	Rapat Internal KPMR Pembahasan Progres CBL. KPMR Internal Meeting Discussion on CBL Progress.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
10.	7 Juni 2018 June 7, 2018	Rapat Internal KPMR Pembahasan Usulan Penghapusbukuan dan Penjualan Aset PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam rangka IPO PT IKT. KPMR Internal Meeting Discussion on Proposed PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Asset Write-Offs and Sales in the framework of PT IKT's IPO.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
11.	26 Juni 2018 June 26, 2018	Usulan Penghapusbukuan Aset dalam Rangka IPO PT IKT. Proposed write-off of assets in the framework of PT IKT's IPO.	Pionir Harapan R. Nurhidayat

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Organs and Committee Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
12.	27 Juni 2018 June 27, 2018	Rapat Internal KPMR Pembahasan Kerja sama Sewa Lahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh PT IKT. KPMR Internal Meeting Discussion on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Land Rental Cooperation by PT IKT.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
13.	3 Juli 2018 July 3, 2018	Pembahasan Sewa menyewa lahan PT IKT Discussion on leasing PT IKT land	Pionir Harapan R. Nurhidayat
14.	3 Juli 2018 July 3, 2018	Pembahasan Sewa menyewa lahan PT IKT Discussion on leasing PT IKT land	Pionir Harapan R. Nurhidayat
15.	9 Juli 2018 July 9, 2018	Rapat internal KPMR, sewa menyewa lahan oleh IKT KPMR internal meeting, rent for land by IKT	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
16.	6 Agustus 2018 August 6, 2018	Rapat pembahasan KSU PT IPC TPK KSU PT IPC TPK discussion meeting	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
17.	20 Agustus 2018 August 20, 2018	Rapat internal KPMR, progres proyek kalibaru KPMR internal meeting, kalibaru project progress	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
18.	17 September 2018 September 17, 2018	Rapat internal KPMR, pembahasan dampak finansial keterlambatan proyek kalibaru KPMR internal meeting, discussion on the financial impact of the Kalibaru project delay	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
19.	26 September 2018 September 26, 2018	Rapat rencana kunjungan ke Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Meeting on planned visit to Teluk Bayur Port Branch	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
20.	3 Oktober 2018 October 3, 2018	Rapat internal KPMR Pembahasan laporan KPMR TW III KPMR internal meeting Discussion of KPMR TW III report	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
21.	5 November 2018 November 5, 2018	Rapat internal KPMR, usulan IPO PTP KPMR internal meeting, proposed PTP IPO	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
22.	12 Desember 2018 December 12, 2018	Rapat internal KPMR, usulan optimalisasi lapangan dan gudang 222X pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok KPMR internal meeting, proposed optimization of 222X field and warehouse at Tanjung Priok Port Branch	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
23.	19 Desember 2018 December 19, 2018	Rapat internal KPMR Pembahasan usulan IPO PTP KPMR internal meeting Discussion on PTP IPO proposal	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Meeting Attendance

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko <i>Risk Management Monitoring Committee Meetings</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage of Attendance</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number Attended</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Montty Girianna	Ketua Head	23	18	78

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organs and Committee Under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	Persentase Percentage
Pionir Harapan	Anggota Member	23	23	100
R. Nurhidayat	Anggota Member	23	22	95

PENGHASILAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Penghasilan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Pemantau manajemen Risiko maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Pemantau manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE INCOME

The Risk Management Monitoring Committee Members income is determined by the Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of the President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as the Risk Management Monitoring Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee	Gaji Salary	20% x Gaji Direktur Utama 20% of the President Director's salary	40.000.000,00
--	----------------	---	---------------

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
Pelaksanaan Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko Implementation of the RISK Management Monitoring Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3.00	12	23	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Assignment Reports	Laporan Report	3.00	4	4	100%	3.00

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE KEY PERFORMANCE INDICATORS ACHIEVEMENT

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

- Melakukan evaluasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit manajemen risiko.

BRIEF REPORT ON THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE ACTIVITIES IN 2018

- Evaluated, monitored and evaluated the application of risk management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Periodically coordinated with the risk management unit.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Organs and Committee Under the Board of Commissioners

3. Bersama dengan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kajian pemanfaatan lahan.
4. Melakukan monitor dan evaluasi cabang cabang pelabuhan.
5. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.
6. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
7. Mengikuti rapat internal Komite, rapat dengan komite lain/manajemen, dan rapat dengan Dewan Komisaris.
8. Menyusun kajian dan konsep surat Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kerja sama pemanfaatan aset dengan Anak Perusahaan dan pihak ketiga.
 - b. Rekomendasi IPO PT IKT.
 - c. Tanggapan atas permohonan persetujuan rencana kerja sama optimalisasi terminal petikemas Ex-Jakarta *International Container Terminal 2* (Ex-JICT Terminal 2) Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT IPC Terminal Petikemas.
 - d. Tanggapan Dewan Komisaris atas implementasi manajemen risiko triwulanan dan tahunan.
 - e. Persetujuan Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - f. Arahan mengenai Pemberian Pinjaman (*Shareholder loan*) kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama.
 - g. Arahan mengenai Progres Proyek Strategis Nasional pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - h. Penyampaian arahan Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian mengenai pemanfaatan lahan.
3. Together with the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee prepared a land use study.
4. Monitored and evaluated port branches.
5. Followed competency improvement activities.
6. Prepared work plans and periodic reports on the implementation of tasks.
7. Attended Committee internal meetings, meetings with other committees / management, and meetings with the Board of Commissioners.
8. Prepared studies and concepts for Board of Commissioners' letters regarding:
 - a. Cooperation in the use of assets with subsidiaries and third parties.
 - b. PT IKT's IPO recommendations.
 - c. Responses to requests for approval for the cooperation plan to optimize the Ex-Jakarta International Container Terminal 2 container terminal (Ex-JICT Terminal 2) at Tanjung Priok Port by PT IPC Terminal Petikemas.
 - d. Board of Commissioners' responses to the implementation of quarterly and annual risk management.
 - e. Approvals for Cooperation Guidelines with Partners in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - f. Directives for Granting Loans (Shareholder loan) to PT Pelabuhan Indonesia Investama.
 - g. Directives for Progress on National Strategic Projects at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - h. Directives from the Board of Commissioners based on land use study results.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Program peningkatan kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Risk Management Monitoring Committee's competency improvement program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

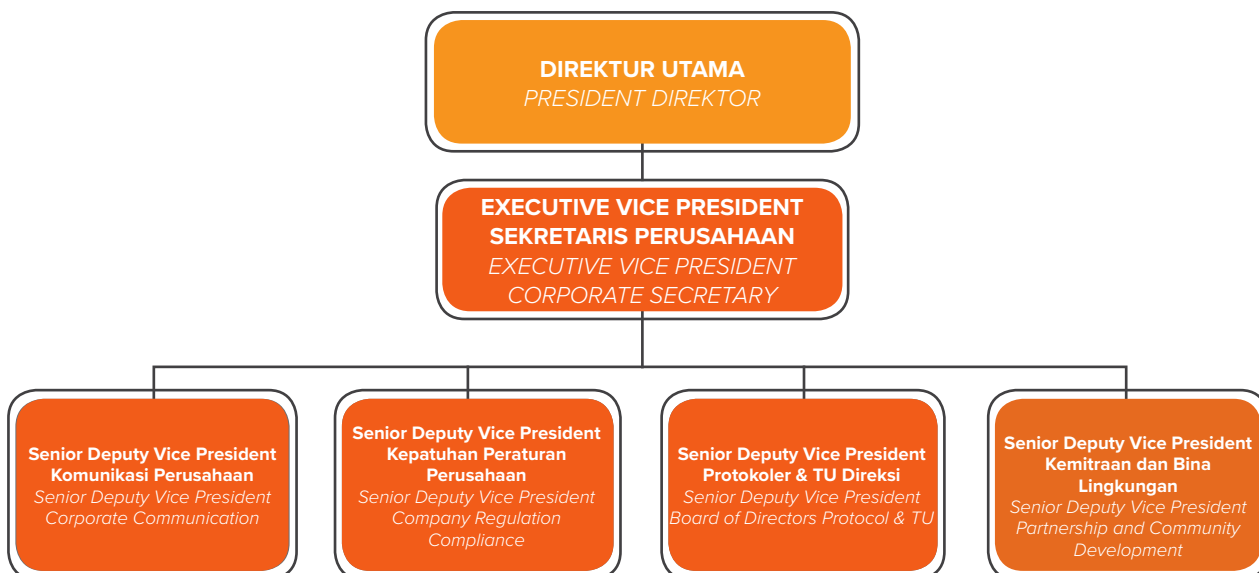
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ tata kelola Perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. Sekretaris Perusahaan IPC bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program pengelolaan komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan Nomor KP 420/29/3/PI.II-17 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN



CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a corporate governance organ that holds a significant role as the Compliance Officer who assists the Board of Directors in implementing GCG principles, and fulfilling GCG practices requirements. The IPC Corporate Secretary is responsible directly to the President Director, and is tasked with developing a mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image, by managing effective communication programs with all stakeholders.

CORPORATE SECRETARY ESTABLISHMENT BASIS

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the Board of Commissioners approval. This is in accordance with Minister of State Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The Corporate Secretary Appointment Letter was stipulated by Board of Directors Decision No. KP420/29/3/PI.II-17 dated March 29, 2017 and submitted to the Board of Commissioners regarding Appointment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Corporate Secretary.

CORPORATE SECRETARY STRUCTURE

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Organs and Committees Under the Board of Directors

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara umum, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi membantu Direksi dalam pengelolaan program kerja bidang pengelolaan kegiatan komunikasi Perusahaan, tata kelola Perusahaan, tata usaha Direksi, kegiatan protokoler, kegiatan kemitraan dan bina lingkungan di lingkungan Perseroan. Adapun fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).
4. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/8/1/Pl.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tugas Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Melakukan *review* terhadap:
 - a. Rencana kegiatan terkait dengan penyebaran informasi kepada pihak internal ataupun eksternal serta peningkatan citra Perusahaan.
 - b. Usulan kebijakan terkait dengan GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Perusahaan.
 - c. Usulan *framework/metode* pengendalian peraturan perusahaan (GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Perusahaan).
 - d. Metode pengawasan yang digunakan saat ini atas penerapan GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Perusahaan.
 - e. Usulan rencana kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 - f. Hasil evaluasi terhadap proposal atau usulan kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari pihak eksternal.
 - g. Hasil evaluasi penerapan program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

CORPORATE SECRETARY FUNCTION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In general, the Corporate Secretary functions are to assist the Board of Directors in managing their corporate communications activities, corporate governance, and administration of the Board of Directors, protocol activities, partnership activities and community development within the Company. The Corporate Secretary functions are in accordance with the Ministry of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance, including:

1. Ensuring that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles.
2. Providing information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or at any time when requested.
3. Acting as a liaison officer.
4. Administering and storing Company documents, including but not limited to Special Lists, Shareholders List, and Minutes of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners' Meetings and the GMS.

Based on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree number HK.568/30/8/1/Pl.II-16 dated August 30, 2016 concerning the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Organization and Administration of Management, the Corporate Secretary duties include:

1. Reviewing:
 - a. Activity Plans related to information disclosure to internal or external parties as well as improving the company's image
 - b. Policy proposals related to the Company's GCG, Board Manual and Code of Ethics
 - c. Proposed framework/method for controlling company regulations (Company's GCG, Board Manual and Code of Ethics)
 - d. The supervisory method used currently for the implementation of the Company's GCG, Board Manual and Code of Ethics
 - e. Proposed partnership and community development programs activity plans
 - f. The proposed evaluation results, or proposed Partnership and Community Development activities originating from external parties
 - g. The evaluation partnership and community development program results

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

- h. Usulan rencana pelaksanaan rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin ataupun insidental.
 - i. Konsolidasi bahan/materi yang akan menjadi bahan untuk pelaksanaan Pra RUPS dan RUPS Perseroan
 - j. Usulan pengelolaan dan penggunaan dana promosi Direksi Perseroan.
2. Merekomendasikan usulan terkait:
 - a. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pegawai dan/atau pihak eksternal.
 - b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan citra Perusahaan.
 - c. Kebijakan *corporate identity* Perusahaan.
 - d. Jenis kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan dilaksanakan.
 - e. Kebijakan perusahaan terkait dengan GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Bisnis Perusahaan.
 - f. Tindak lanjut apabila terdapat pelanggaran GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Bisnis Perusahaan.
 - g. Agenda dan jadwal pelaksanaan rapat Dewan Direksi.
 - h. Rencana anggaran promosi Dewan Direksi Perseroan.
 - i. Jenis informasi yang dapat/tidak dapat disebarakan kepada pegawai internal dan/atau pihak eksternal.
 3. Melakukan *monitoring* terhadap:
 - a. Pengelolaan informasi untuk pegawai internal Perusahaan dan pihak eksternal Perusahaan.
 - b. Keberhasilan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan.
 - c. Hasil evaluasi penerapan GCG, *Board Manual* dan Kode Etik Perusahaan.
 - d. Keberjalanan rapat Direksi secara rutin ataupun insidental.
 4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan komunikasi Perusahaan, penerapan GCG, *Board Manual* dan Kode Etik, Protokoler dan Tata Usaha Direksi serta pelaksanaan program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan.
- h. Proposed plans for conducting regular or incidental board meetings
 - i. Consolidation of resource materials for the Company's Pre-GMS and GMS
 - j. Proposed management and use of promotion funds by the Company's Board of Directors
2. Recommend related proposals:
 - a. Media used to disseminate information to employees and/or external parties
 - b. Activities to be carried out to improve the company's image
 - c. Corporate identity policy
 - d. Types of partnership program and community development activities to be carried out
 - e. Company policies related to the Company's GCG, Board Manual and Code of Ethics
 - f. Follow-up if there are GCG, Board Manual and Code of Ethics violations
 - g. Agenda and schedule for conducting board meetings
 - h. Promotional and Board of Directors budget plan
 - i. Types of information that can/cannot be distributed to internal employees and/or external parties
 3. Monitoring:
 - a. Management of information for internal company employees and external companies
 - b. The success of the partnership and community development programs carried out by the Company
 - c. The Company's GCG, Board Manual and Code of Ethic evaluation results
 - d. Board of Directors Routine or incidental meetings
 4. Coordinating the management of corporate communications activities, implementation of GCG, Board Manual and the Code of Ethics, Board of Directors Protocol and Administration, and the implementation of the company's partnership and community development programs

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 Organs and Committees Under the Board of Directors

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Shanti Puruhita
 Executive Vice President Sekretaris Perusahaan
 Executive Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Warga negara Indonesia	Indonesian
Tempat Tanggal lahir <i>Date and place of birth</i>	Surabaya, 12 Mei 1977	Surabaya, May 12, 1977
Usia <i>Age</i>	41 tahun	41 years old
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Menjabat sebagai Executive Vice President Sekretaris Perusahaan sejak 10 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan No. 428/10/3/1/Pl.II-17.	Appointed as Executive Vice President of Corporate Secretary on March 10, 2017 based on Decision Letter No. 428/10/3/1/Pl.II-17.
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister dari Kuhne Logistics University, Hamburg, Jerman pada tahun 2014.	Bachelor's degree in law from Universitas Airlangga Surabaya in 1999 and Master's degree from Kuhne Logistics University, Hamburg, Jerman in 2014.
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	Kariernya di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimulai dari Staf Hukum Junior 2000-2006, Staf Hukum Senior 2006 – 2007, Spv. Hukum 2007 – 2008, Advisor Manajemen K3 Dan Manajemen Risiko 2008 – 2009, Advisor Pengadaan bidang Adm. & Hukum Cabang Pelabuhan Tanjung Priok 2009 – 2010, Asisten Kepala Biro Strategi Perusahaan Bidang Restrukturisasi & Manajemen Perubahan 2010 - 2012, Senior Manager Layanan SDM & Umum 2012-2015, Senior Manager Layanan SDM & Umum Merangkap Senior Manager Kesejahteraan 2013-2015, Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2015-2016, Vice President Hubungan Lembaga 2016-2017, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan 2017-Sekarang	Started at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a Junior Law Staff from 2000 to 2006, Senior Legal Staff 2006 - 2007, Spv. Legal 2007 - 2008, OHS Management Advisory and Risk Management Advisor 2008 - 2009, Procurement Adm. & Legal Advisor Tanjung Priok Port Branch 2009 - 2010, Assistant Head of Corporate Strategy Bureau for Restructuring & Change Management 2010 - 2012, Senior Manager of HR & General Services 2012-2015, Senior Manager of HR & General Services and Senior Manager of Welfare 2013-2015, Commercial Director PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2015-2016, Vice President of Corporate Relations 2016-2017, Executive Vice President Corporate Secretary 2017-Now.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan IPC selama tahun 2018, antara lain:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terjadi di tahun 2018, yaitu:
 - a. RUPS RKAP Tahun 2018 yang diselenggarakan pada 19 Januari 2018.
 - b. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada 19 Maret 2018.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi pada tahun 2018 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, serta Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris pada tahun 2018 sebanyak 12 (dua belas) kali.
3. Pembuatan notulen hasil rapat Direksi.
4. Pendokumentasian notulen Rapat Direksi dan Rapat Gabungan. Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menerbitkan Majalah Internal IPC News sebanyak 11 (sebelas) kali edisi.
6. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Acara Korporasi, baik acara internal maupun eksternal, seperti Rakernas Semester I 2018, *Media Port Visit*, *Field Trip*, Buka Puasa Bersama Media, Perayaan Kemerdekaan, *CEO Talk*, Lomba Foto dan Karya Tulis Jurnalis IPC, *IPC Goes to Campus*, Perayaan HUT IPC dan lainnya.
8. Menyampaikan CEO *Letter* yang merupakan informasi dari Direktur Utama kepada seluruh karyawan/insan IPC yang dilakukan setiap akhir bulan, baik melalui *email corporate*, majalah *IPC News* maupun *E-Office*.
9. Portal Intranet (*Pop Up* sejumlah 50, Materi Intranet 92).
10. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumentasi Perusahaan (PPID), Pedoman Media Komunikasi.
11. Melakukan *monitoring Website* sehingga dapat meningkatkan kemudahan bagi *stakeholder* dalam mengakses informasi dengan selalu menyediakan informasi yang *up to date* dan akurat pada *Website*.

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Corporate Secretary competency improvement program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2018

The IPC Corporate Secretary duties during 2018 included:

1. Organizing and documenting the Annual General Meetings of Shareholders in 2018, namely:
 - a. RKAP AGMS 2018 held on January 19, 2018
 - b. RUPS Ratification of the Company's Annual Report 2017 held on March 19, 2018
2. Organizing and attending Board of Directors Meetings in 2018 35 times, as well as Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2018 12 times.
3. Keeping minutes of the Board of Directors meeting results
4. Documenting the minutes of Board of Directors' Meetings and joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners
5. Publishing 11 internal editions of the IPC News Magazine.
6. Conducting information disclosure in accordance with applicable regulations
7. Coordinating the implementation of both internal and external Corporate Events, including the 2018 National Semester Meeting, Media Port Visits, Field Trips, Breaking Fast with the Media, Independence Celebrations, CEO Talks, IPC Journalistic Photo and Writing Competition, IPC Goes to Campus, IPC and other anniversary celebrations.
8. Submitting CEO Letters containing information from the President Director to all IPC employees at the end of each month, either through corporate e-mail, IPC News and E-Office magazines.
9. Intranet Portal (50 Pop Ups, 92 Intranet Materials)
10. Disseminating Guidelines for Management of Company Information, Data and Documentation (PPID), Communication Media Guidelines
11. Monitoring the Website to increase stakeholder access to information by always providing up to date and accurate information.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

12. Mengoordinasikan wawancara Direksi dengan media.
13. Melakukan *Press Release* sebanyak 65 (enam puluh lima) kali selama tahun 2018.
14. Melakukan kerja sama baik media cetak, media elektronik serta media *online*.
15. Melakukan dan mereviu media *monitoring* Perseroan.
16. Pengelolaan media komunikasi digital Perusahaan (Facebook, Instagram, Twitter, *Website*, Portal BUMN dan Youtube).
17. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2017 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu.
18. GCG *Awareness* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai Perseroan.
19. Melakukan *review* terhadap pedoman GCG, *Board Manual*, Kode Etik Bisnis, Gratifikasi, *Whistleblowing System*.
20. Melakukan *monitoring* pelanggaran gratifikasi termasuk dengan pelaksanaan sosialisasinya.
21. *Monitoring* dan memastikan seluruh Insan IPC melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis Perusahaan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.
22. Melakukan *monitoring* pelaksanaan *Whistleblowing System*.
23. Penyaluran Kemitraan dengan Sinergi BUMN, Bina Lingkungan, dan CSR.
24. Pelaksanaan kegiatan program-program Cinta IPC, seperti Cinta Ramadhan, Idul Adha, Idul Fitri dan Perayaan Natal.
25. Penyusunan *roadmap* CSR dan PKBL berbasis ISO 26000.
26. Penyusunan RKAP PKBL 2018 dan Laporan Audit PKBL 2017.
12. Coordinating the Directors' interviews with the media.
13. Preparing 65 (sixty five) Press Releases during 2018.
14. Working together in both print media, electronic media and online media.
15. Conducting and reviewing the Company's media monitoring.
16. Managing the company's digital communication media (Facebook, Instagram, Twitter, Website, BUMN Portal and Youtube).
17. Preparing the 2017 Annual Report and Financial Sustainability Report and submitting them to the relevant Regulators in a timely manner.
18. GCG Awareness for Directors, Board of Commissioners and all employees of the Company
19. Reviewing the GCG guidelines, Board Manual, Code of Ethics, Gratification, Whistleblowing System.
20. Monitoring gratification violations and the implementation of its socialization
21. Monitoring and ensuring all IPC Personnel sign the Integrity and Compliance Pact for the Company's Code of Ethics including the Board of Directors and Board of Commissioners
22. Monitoring the execution of the Whistleblowing System.
23. Distributing Demham Partnerships, BUMN Synergy, Community Development, and CSR
24. Executing IPC Cinta program activities, including Cinta Ramadhan, Eid Al-Adha, Eid Al-Fitr and Christmas Celebration
25. Preparing ISO 26000 based CSR and PKBL roadmap
26. Preparing 2018 PKBL RKAP and 2017 PKBL Audit Report

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja Perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

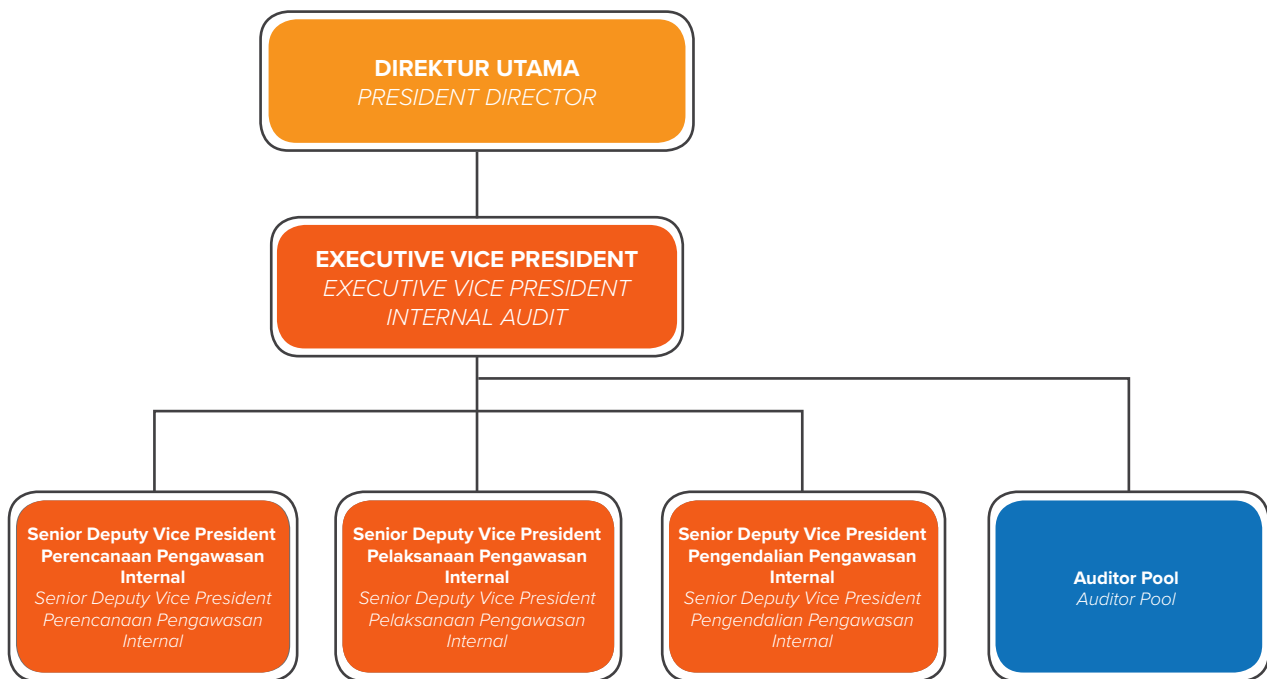
INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is the Company's work unit that performs internal audits, as mandated by Law No. 11 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER.01/MBU/2011 year 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as renewed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 Organs and Committees Under the Board of Directors

**STRUKTUR ORGANISASI DAN KETUA SATUAN
 PENGAWASAN INTERNAL**

**INTERNAL AUDIT UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE
 AND HEAD**



**KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM
 STRUKTUR ORGANISASI**

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal dalam struktur organisasi Perseroan berada di bawah langsung Direktur Utama. Dalam Hal ini Executive Vice President sebagai pemimpin Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama.

**POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT IN THE
 ORGANIZATIONAL STRUCTURE**

The Internal Audit Unit position within the Company's organizational structure is directly below the President Director. The Executive Vice President as the Head of the Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director. The Internal Audit Unit reports the Company's internal audit results directly to the President Director.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Organs and Committees Under the Board of Directors

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE



Widodo

Executive Vice President Satuan
Pengawasan Internal
Executive Vice President Internal Audit

Warga Negara Indonesia kelahiran Semarang pada 28 September 1969 (48 tahun), berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal IPC sejak 1 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP.428/31/8/1/Pl.II-16.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993, gelar Magister Manajemen dari STIE Budi Luhur Jakarta pada tahun 2001, gelar Magister Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2005 dan meraih gelar Master di bidang Shipping & Transport dari Netherland Maritime University, Rotterdam pada tahun 2013, serta meraih Qualified Internal Auditor dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS – QIA) tahun 2016.

Bergabung dengan IPC sejak 1 Januari 1996. Pernah menempati berbagai posisi di IPC, di antaranya: Staf Evaluasi & Penyusunan Rencana Perusahaan (1997), Staf Analisa dan Evaluasi Program Dana Desain Sarana (1999), Staf Analisa dan Evaluasi Penendalian Proyek (2000), Asisten Manajer Teknik Sipil (2000), Staf Koordinator Pengadaan Barang Teknik (2006-2008), Manager Teknik (2009), Staf Madya SDM & Umum Senior Kantor Pusat, SM. Perencanaan Teknik Kantor Pusat (2013) dan Kepala Biro Pengadaan Kantor Pusat (Juni 2016), EVP Satuan Pengawasan Internal (September 2016).

Indonesian citizen born in Semarang on September 28, 1969 (49 years old), domiciled in Jakarta. Appointed as Head of IPC Internal Audit Unit since September 1, 2016 based on Decision Letter Number KP.428/31/8/1/Pl.II-16.

He earned a Bachelor degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1993, a Master of Management degree from STIE Budi Luhur Jakarta in 2001, a Master degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 2005 and earned his Master degree in Shipping & Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam in 2013, and earned the Qualified Internal Auditor from the Qualified Internal Auditor Certification Board (DS - QIA) in 2016.

He joined IPC since January 1, 1996 and held various positions at IPC, including: Staff Evaluation & Preparation of Corporate Plans (1997), Analysis and Evaluation Staff of Dana Desain Sarana Program (1999), Project Control and Evaluation Staff (2000), Assistant Manager of Civil Engineering (2000), Staff Coordinator of Procurement of Engineering Goods (2006-2008), Engineering Manager (2009), Senior Human Resources & General at Tanjung Priok Port Branch (2011), Senior Human Resources & General at Head Office (2011-2012), SM. Head Office Technical Planning (2013), Head of Procurement Bureau at Head Office (2014), Head of Procurement Bureau at Head Office (2016), EVP Internal Audit Unit (September 2016).

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Program peningkatan kompetensi Satuan Pengawasan Internal telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Internal Audit Unit's competency improvement program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawas Internal dipimpin seorang Executive Vice President (EVP). Satuan Pengawas Internal dapat melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama. EVP Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP.428/31/8/1/PI.II-16 tanggal 31 Agustus 2016.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Satuan Pengawas Internal telah memiliki Piagam (*Audit Charter*) yang diterbitkan pada 13 Oktober tahun 2016. Adapun Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) tersebut merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Perusahaan. Piagam ini berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola Perusahaan.
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.
3. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Program Kerja dimaksud dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.
4. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan.
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
6. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PARTIES THAT APPOINT AND DISMISS THE INTERNAL AUDIT HEAD

The Internal Audit Unit is led by an Executive Vice President (EVP). The Internal Audit Unit reports the Company's internal audit results directly to the President Director. The IAU EVP is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The IAU EVP is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Directors Decree No. KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit has an Audit Charter, which was issued on 13 October 2016. The Internal Audit Charter is a formal document stating the purpose, authorities, and responsibilities of internal audit activities by Internal Audit within the company. The Charter contains recognition of the presence and commitment of the head on the functions of the Internal Audit Unit (IAU) in the Company.

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Internal Audit duties and responsibilities include:

1. Evaluating the adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.
2. Preparing a risk-based audit program and submitting it to the Board of Commissioners, also to the Audit Committee for consideration and suggestions.
3. Implementing the Annual Audit Work Program approved by the President Director and Work Program to be communicated to the Board of Directors and Board of Commissioners, also to the Audit Committee.
4. Maintaining auditor professionalism by providing sufficient knowledge, skills and experience, as well as the necessary certifications.
5. Providing recommendations and information about the activities examined on all work units within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
6. Reporting the Audit results to the President Director and Board of Commissioners.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

7. Memonitor, menganalisis dan melaporkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi audit.
 8. Melakukan audit investigasi atau audit khusus atas aktivitas yang terindikasi *fraud*/kecurangan dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 9. Melakukan rapat koordinasi secara periodik dengan Komite Audit.
 10. Membuat program penilaian untuk mengevaluasi mutu pelaksanaan audit yang dilakukan.
 11. Berkoordinasi dengan audit eksternal.
 12. Melaksanakan *Probity Audit* terhadap objek-objek tertentu atas perintah Direktur Utama.
 13. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.
7. Monitoring, analyzing and reporting the audit recommendations follow-up results.
 8. Conducting special investigations or audits of fraud induced activities, and reporting the results of such investigations to the President Director and the Board of Commissioners.
 9. Conducting coordination meetings periodically with the Audit Committee.
 10. Creating an assessment program to evaluate the quality of the audit performed.
 11. Coordinating with external audit.
 12. Implementing Probity Audit of certain objects on the orders of the President Director.
 13. Conducting follow-up monitoring of audit findings by internal and external auditors and reporting results to the President Director with copies submitted to the Board of Commissioners, particularly the Audit Committee.

KEWENANGAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal berwenang untuk:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Direktorat/Divisi/Unit/Satuan Kerja terhadap dokumen (*hardcopy* dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit.
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih objek pemeriksaan, menemukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
4. Meminta bantuan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada *auditee* dan tenaga ahli lainnya, yang berasal dari pihak internal maupun eksternal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
5. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama.
6. Terhadap adanya hambatan yang membatasi wewenang dan mempersulit pelaksanaan pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal wajib melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Internal tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktifitas yang diaudit, antara lain:

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

The Internal Audit Unit is authorized to:

1. Arrange, change and implement internal audit policies including determining the audit procedures and scope of implementation.
2. Have unlimited access to all directorates/divisions/units/work units documents (hard copy and electronics), property, and personnel related to audit assignments.
3. Allocate resources, determine the frequency of checks, select the examination objects, examination scope, and determine the examination techniques needed to achieve the examination objectives.
4. Request assistance needed during the audit from the auditee and other experts, from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) internal and external parties.
5. Have direct communication access to the President Director.
6. Report any obstacles that limit the Internal Audit Unit authority and make it difficult to carry out the audit, to the President Director.

The Internal Audit Unit does not have the authority to carry out, or the responsibility for the activities audited, including:

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi operasional secara langsung untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun Entitas Anak Perusahaan. 2. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal. 3. Memberikan pengarahan/perintah secara langsung kepada karyawan di luar personil Satuan Pengawasan Internal, kecuali karyawan tersebut diperbantukan di Satuan Pengawasan Internal. 4. Bertanggung jawab langsung terhadap personil, Departemen atau aktivitas yang menjadi obyek pemeriksaan. 5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan Departemen terkait dengan temuan audit. 6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi milik obyek pemeriksaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting operational functions directly for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries. 2. Starting and approving transactions that are not related to the Internal Audit Unit. 3. Providing directives/orders directly to employees outside the Internal Audit Unit, unless the employee is seconded to the Internal Audit Unit. 4. Being directly responsible for personnel, departments or activities that are the object of examination. 5. Dismissing employees or dissolving the department related to audit findings. 6. Arranging and implementing procedures, systems or operational activities that belong to the inspection object. |
|---|--|

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Komposisi Satuan Pengawasan Internal berjumlah 25 (dua puluh lima) personil dan telah memiliki sertifikasi profesi. Rincian komposisi dan sertifikasi profesi personil Satuan Pengawasan Internal adalah sebagai berikut.

INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL COMPOSITION AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

The Internal Audit Unit comprises 25 (twenty five) professionally certified personnel. The Internal Audit Unit composition and professional certification is as follows.

Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Personil SPI <i>Number of IAU Personnel</i>
EVP. SPI	1
Senior Deputy Vice President (SDVP)	3
Senior Auditor	3
Junior Auditor	10
Asisten Auditor	5
Senior Officer	2
Senior Assistant Officer	1
Jumlah Total	25

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 Organs and Committees Under the Board of Directors

**SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN
 PENGAWASAN INTERNAL**

**INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL
 PROFESSIONAL CERTIFICATION**

Sertifikasi Profesi <i>Professional Certification</i>	Jumlah Personil SPI <i>Number of IAU Personnel</i>
QIA	18
CIA	1
CPA	1
Dalam proses QIA <i>In the Process QIA</i>	4

KODE ETIK AUDITOR

ITOR CODE OF ETHICS

INDEPENDENSI DAN OBYEKTIFITAS

INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY

- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan internal dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, dan kerja sama operasi yang dapat mengganggu independensi Satuan Pengawasan Internal.
- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal dilarang merangkap jabatan dari kegiatan operasional di lingkungan Perusahaan baik induk maupun Entitas Anak Perusahaan yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif dan independen, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- All auditors in the Internal Audit Unit are prohibited from being involved in decisions and operational activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), subsidiaries, affiliated companies, and operational cooperation that could disrupt the independence of the Internal Audit Unit.
- All auditors in the Internal Audit Unit are prohibited from concurrently holding positions in operational activities within the parent company or subsidiaries that could lead to a conflict of interest.
- All auditors in the Internal Audit Unit must have an objective and independent mental attitude, be impartial and avoid the possibility of conflicts of interest.

PRINSIP DASAR

BASIC PRINCIPLES

Seluruh personil auditor di Satuan Pengawasan Internal harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

All personnel auditors in the Internal Audit Unit are expected to conform to the following principles:

- Integritas**
 Dapat membangun kepercayaan sehingga menghasilkan pendapat (*judgement*) yang andal.
- Objektivitas**
 Dapat membuat penilaian yang seimbang di setiap keadaan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

- Integrity**
 Build trust so that it produces reliable judgment.
- Objectivity**
 Make balanced judgments in every situation and not be influenced by self-interests or other people in making judgments.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

3. Kerahasiaan

Menjaga nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dengan tidak mengungkapkannya tanpa izin otoritas yang berwenang, kecuali ada ketentuan perundang-undangan/hukum atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Confidentiality

Maintain the value and ownership of information received by not disclosing it without the permission of a competent authority, unless there are statutory / legal provisions or professional obligations to do so.

4. Competence

Apply the knowledge, skills, and experience needed in the implementation of their tasks and responsibilities.

STANDAR PERILAKU

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, profesional dan cermat dalam melaksanakan tugas, serta memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap profesi, Perusahaan dan unit kerja Satuan Pengawasan Internal, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat merugikan profesi dan Perusahaan.
4. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Internal Audit, kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan Perusahaan.
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi sikap profesionalisme dan objektivitas pelaksanaan audit.
7. Melaporkan semua hasil pemeriksaan yang bersifat material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan atau menjadi permasalahan hukum.
8. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang dapat meragukan kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara objektif.

STANDARDS OF BEHAVIOR

1. Behave and be honest, objective, professional and careful in carrying out their duties, and fulfill their professional responsibilities.
2. Have high integrity and loyalty towards the profession, company, and Internal Audit Unit, and not consciously engage in activities that are deviant or illegal.
3. Avoid activities or actions that can harm the profession and company.
4. Comply fully with Internal Audit Professional Standards, management policies and applicable laws and regulations.
5. Not use information obtained for personal or group interests that can harm the company.
6. Not accept gifts in any form and from anyone, directly or indirectly, which could affect the professionalism and objectivity of the audit.
7. Report all results of material examinations truthfully, based on the facts and not hide anything that could harm the company or become a legal issue.
8. Refrain from activities that could cause a conflict of interest or bring doubt on their ability to objectively carry out their tasks and responsibilities.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI Organs and Committees Under the Board of Directors

9. Melakukan tugas sesuai kompetensi profesional yang dimilikinya.
10. Meningkatkan kompetensi, efektivitas dan kualitas tugasnya.
11. Menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun.

KAJIDAH ACUAN

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Satuan Pengawasan Internal harus mematuhi dan mengacu pada:

1. Piagam Satuan Pengawasan Internal.
2. Standar Profesi Audit Internal yang berlaku, yaitu IPPF (International Professional Practices Framework of Internal Auditing), termasuk *practical guide* dan *practice advisory*.
3. Peraturan-peraturan pengawasan internal lainnya yang berlaku di Perusahaan.
4. Peraturan-peraturan internal lainnya yang berlaku di Perusahaan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2018

Dalam melaksanakan kegiatan internal audit, Satuan Pengawasan Internal menggunakan metode *risk based audit*. Pada tahun 2018, Satuan Pengawasan Internal telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan/audit pada Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, Satuan Kerja dan Anak Perusahaan yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) objek pemeriksaan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) objek pemeriksaan di Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat, 14 (empat belas) objek pemeriksaan di Anak Perusahaan, 1 (satu) Audit Investigatif dan 4 (empat) Audit Khusus.
2. Aplikasi *Audit Management System AMS & Data Analytic* telah diimplementasikan dalam pelaksanaan audit.
3. Hasil *Assessment Maturity Level* Unit SPI (IACM) yang divalidasi oleh BPKP telah selesai dilaksanakan, dan mencapai level 3 dengan catatan.

Hasil pelaksanaan audit tahun 2018, secara keseluruhan menghasilkan 423 temuan. Selanjutnya, terhadap temuan atau rekomendasi tersebut akan dilakukan *monitoring* progres tindak lanjut penyelesaiannya.

9. Perform tasks based on the professional competency they have.
10. Improve their competency, effectiveness and quality of work.
11. Sign the Integrity Pact at the beginning of the year.

RULES FOR REFERENCE

In carrying out their duties the Internal Audit Unit must comply with and refer to:

1. Internal Audit Unit Charter.
2. Applicable Internal Audit Professional Standards, namely IPPF (International Professional Practices Framework of Internal Auditing), including a practical guide and practice advisory.
3. Other internal audit regulations that apply to the Company.
4. Other related internal regulations that apply in the Company.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2018

The Internal Audit Unit uses the risk-based audit method when conducting its internal audit activities. In 2018, the Internal Audit Unit performed the following duties:

1. Conducted 38 (thirty eight) examinations/audits at the Head Office, Port Branches, Work Units and Subsidiaries including: 19 (nineteen) inspection objects in Port Branches and Head Office, 14 (fourteen) inspection objects in the Subsidiaries, 1 (one) Investigative Audit and 4 (four) Special Audits.
2. The Audit Management System AMS & Data Analytic was implemented during the audits.
3. The IAU Assessment Maturity Level results validated by the BPKP were completed, and achieved level 3 with notes.

The 2018 audit results yielded 423 findings. These findings or recommendations will be monitored during the follow-up process

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal telah melakukan pemantauan terhadap progres tindak lanjut atas temuan Satuan Pengawasan Internal tahun 2011-2018, dimana berdasarkan evaluasi sebanyak 3,896 (80%) rekomendasi sudah dapat diselesaikan, 888 (18%) rekomendasi dengan status pantau dan 105 (2%) rekomendasi dengan status tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).

PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI

Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil audit eksternal (BPK RI), manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melakukan koordinasi dengan Tim *Monitoring* BPK. Pemantauan terhadap *progress* tindak lanjut tahun 2018 adalah 83 rekomendasi telah Sesuai (SR), 26 rekomendasi Belum Sesuai (BS) dan 3 rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD), sebagaimana Surat BPK Nomor 262/SXX/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung peningkatan performansi dan transformasi bisnis, serta meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko Perseroan dalam pelaksanaan tugas Direksi, Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 tanggal 21 Juli 2017.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) anggota sebagai berikut:

1. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sebagai Ketua.
2. Direktur Keuangan sebagai anggota 1.
3. Direktur Teknik dan Manajemen Risiko sebagai anggota 2.

AUDIT RESULTS FINDINGS AND FOLLOW UP

INTERNAL AUDIT UNITS FINDINGS AND FOLLOW-UP PROGRESS

The Internal Audit Unit monitored the progress of follow-up on the findings of the 2011-2018 Internal Audit Unit, resulting in 3,896 (80%) completed recommendations, 888 (18%) monitoring status recommendations, and 105 (2%) recommendations with status not actionable (TPTD).

BPK RI FINDINGS FOLLOW-UP PROGRESS

For monitoring the follow-up of the external audit (BPK RI) results, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) coordinates with the BPK Monitoring Team. The follow-up progress in 2018 resulted in 83 recommendations that were in accordance (SR), 26 recommendations that were not yet in line (BS) and 3 recommendations that could not be followed up (TDD), as per BPK Letter Number 262/SXX/10/2018 dated October 16, 2018 concerning Follow-up of Audit Result Recommendations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

To support business performance and transformation, as well as to improve the good corporate governance aspects, the Board of Directors decision-making process related to managing the Company's investments and risks, to carry out the Board of Directors duties, an Investment and Risk Management Committee has been formed based on Decree No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 dated July 21, 2017.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Investment and Risk Management Committee Membership consists of 1 (one) Chairman and 2 (two) Members as follows:

1. Director of Commercial and Business Development as Chairman.
2. Director of Finance as Member 1.
3. Director of Engineering and Risk Management as Member 2.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Organs and Committees Under the Board of Directors

Profil seluruh anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah disajikan pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi atas usulan program investasi Perusahaan dan strategi manajemen risikonya, berdasarkan hasil studi kelayakan terkait program kerja/proyek dan investasi Perseroan.
2. Dapat melakukan analisis ulang atas studi kelayakan dan/ atau usulan investasi Perseroan yang telah dianggarkan dalam RKAP di tahun berjalan, baik atas permintaan Direktorat Teknis Terkait atau inisiatif Komite Investasi.
3. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan terkait rencana investasi atas pengembangan pelabuhan dan strategi pengimplementasiannya.
4. Dapat meminta bantuan dan melakukan penunjukan konsultan atau ahli independen dalam analisis dan evaluasi atas investasi tertentu.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah meliputi:

1. Investasi dalam ruang lingkup fungsi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yaitu untuk investasi Perseroan atas suatu program kerja/proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar.
2. Pengkualifikasian proyek strategis untuk proyek-proyek tertentu yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Dikategorikan merupakan investasi strategis karena merupakan proyek investasi lebih dari Rp500 Miliar.
 - b. Proyek investasi yang melibatkan koordinasi dan kerja sama dengan banyak Instansi Pemerintahan.
 - c. Proyek investasi yang oleh dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Direksi sebagai investasi strategis.
 - d. Proyek strategis nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perseroan.

Profil of Investment and Risk Management Committee Membership has been presented in the Profile section of the Board of Directors in this Annual Report.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITY

The Investment and Risk Management Committee has the following duties and authorities:

1. Analyzing, evaluating and providing recommendations on the company's investment program proposals and risk management strategies, based on feasibility study results related to the Company's work / project programs and investments.
2. Re-analyzing the Company's feasibility studies and / or proposed investments that have been budgeted in the RKAP in the current year, either at the request of the Related Technical Directorate or the Investment Committee.
3. Evaluating and recommending policies related to investment plans for port development and implementation strategies.
4. Requesting assistance and appointing consultants or independent experts for the analysis and evaluation of certain investments.

The Investment and Risk Management Committee duties and authorities include:

1. Investments within the Investment and Risk Management Committee scope, namely for the Company's Investment in work programs/projects with an investment value of more than Rp50 billion.
2. Strategic Project Qualification for certain projects that meet at least one of the following criteria:
 - a. Categorized as a Strategic Investment as it is an investment project worth more than Rp500 billion.
 - b. Investment projects that involve coordination and cooperation with multiple government agencies.
 - c. Investment projects that are considered and determined by the Board of Directors as a strategic investment.
 - d. National strategic projects and/or accelerated national development assigned by the Government to the Company.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Organs and Committees Under the Board of Directors

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2018, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat yang telah diadakan sebanyak 5 (lima) kali. Melalui rapat tersebut, Komite Investasi membahas antara lain pengelolaan investasi dan risiko Perusahaan perlu dilakukan analisis, evaluasi serta rekomendasi atas usulan investasi. Usulan investasi yang direviu dan direkomendasikan keberlanjutannya adalah investasi Kantor Pusat dan Cabang yang memiliki nilai lebih dari Rp50 Miliar dan masuk kategori investasi strategis untuk selanjutnya investasi yang sudah diseleksi berdasarkan parameter tersebut dianalisis oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk direkomendasikan keberlanjutannya kepada Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi untuk diambil keputusan akhirnya. Untuk pengajuan Investasi Kantor Pusat dan Cabang tahun 2019 terdapat 12 (dua belas) investasi yang memiliki nilai pengajuan investasi lebih dari Rp50 Miliar. rupiah. Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi dari Komite Investasi dan Manajemen Risiko, terdapat 8 (delapan) pengajuan investasi yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2019 baik secara langsung maupun dengan syarat tertentu, dan terdapat 4 (empat) investasi yang tidak disetujui untuk dianggarkan pada tahun 2019 sehingga perlu dikaji mendalam terlebih dahulu.

KOMITE IPC BERSIH

Dalam rangka pelaksanaan GCG di IPC dan sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, IPC menerapkan *Whistleblowing System* (WBS). Untuk efektivitas penerapan WBS di IPC Direksi membentuk Komite IPC Bersih berdasarkan Surat Keputusan No. SK.01.02/5/7/1/KPP/UT/PI.II-17 tanggal 5 Juli 2017.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES

During 2018, the Investment and Risk Management Committee carried out their duties in 5 (five) meetings, where the Committee discussed the Company's investment and risk management and analyzed, evaluated and made recommendations related to investment proposals. The investment proposals that were monitored and recommended for continuation were Head Office and Branch investments with a value of more than Rp50 Billion and were included in the strategic investment category. They were then passed on to the Board of Directors through a Board of Directors Meeting for a final decision. In the Head Office and Branches in 2019 there were 12 investments with an investment value of more than 50 billion rupiah. Based on the Investment and Risk Management Committee analysis and recommendation results, 8 (eight) Investment Submissions were approved in 2019 either directly or with certain conditions, and 4 investments were not approved for 2019 as it was felt that further in depth study was needed.

IPC BERSIH COMMITTEE

In the context of implementing GCG in IPC and in line with the BUMN Bersih program launched by the Ministry of BUMN, IPC has implemented a Whistleblowing System (WBS). For the WBS effectiveness in IPC, the Board of Directors established an IPC Bersih Committee based on Decree No. SK.01.02/5/7/1/KPP/UT/PI.II-17 dated July 5, 2017.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 Organs and Committees Under the Board of Directors

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE IPC BERSIH

IPC BERSIH COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Anggota Komite IPC Bersih terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil, 1 (satu) Sekretaris, dan 4 (empat) anggota sebagai berikut:

IPC Bersih Committee Membership consists of 1 (one) Chairman, 1 (one) Deputy, 1 (one) Secretary, and 4 (four) Members as follows:

Jabatan dalam Tim <i>Team Position</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>
Ketua Chairman	EVP Sekretaris Perusahaan EVP Corporate Secretary
Wakil Deputy	SVP Hukum SVP Legal
Anggota Member	VP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM VP of Employee Relations and Human Capital Services
Anggota Member	VP Manajemen Risiko VP Risk Management
Anggota Member	EVP Satuan Pengawas Internal EVP Internal Audit Unit
Anggota Member	VP/SVP/EVP Terkait Related VP / SVP / EVP
Sekretaris Secretary	SDVP GCG/Kepatuhan Peraturan Perusahaan SDVP GCG / Compliance with Company Regulations

Profil seluruh anggota IPC Bersih telah disajikan pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Profil of IPC Bersih Committee Membership has been presented in the Profile section of the Executive Officers' Profiles in this Annual Report.

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE IPC BERSIH

IPC BERSIH COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITIES

Komite IPC Bersih bertugas untuk:

The IPC Bersih Committee duties include:

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran WBS.
2. Melakukan rapat Internal Komite IPC Bersih minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
3. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations through in the WBS channel.
2. Conducting Internal Meetings of the IPC Bersih Committee at least once every month and / or every report of alleged violations through the WBS.
3. Supervise the independence and effectiveness of the implementation of the Company's WBS.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE IPC BERSIH

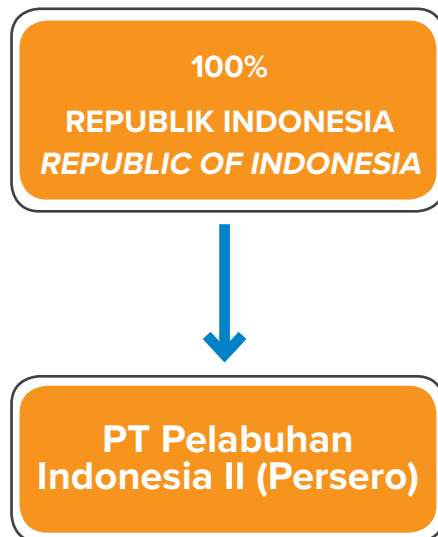
IMPLEMENTATION OF IPC BERSIH COMMITTEE DUTIES

Selama tahun 2018, Komite IPC Bersih telah melaksanakan tugasnya melalui rapat yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Melalui rapat Komite IPC Bersih membahas antara lain tindak lanjut atas laporan WBS yang telah masuk di IPC.

During 2018, the IPC Bersih Committee conducted its duties through 6 (six) meetings, where the Committee discussed, among others, follow-up of the WBS reports entered into the IPC system.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Information on Majority and Controlling Shareholders



IPC per 31 Desember 2018 merupakan Perusahaan BUMN *Non Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di IPC.

IPC as of December 31, 2018 is a Non Listed BUMN Company. Therefore, there is no information on the majority or controlling shareholders in IPC, as the ownership of capital is owned by the Ministry of State-Owned Enterprises.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar *auditing* yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan independen.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 No. 02 Tanggal 3 April 2018.

Salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 No. 02 Tanggal 3 April 2018 menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi KAP tersebut serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Komite Audit menyusun *draft* kerangka acuan kerja beserta rencana anggaran biaya untuk dapat disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah terdapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Manajemen melakukan proses pengadaan melalui

In carrying out its duties, the Public Accountant performs auditing standards established and endorsed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Professional Standards of Certified Public Accountants (SPAP). In such standards, public accountants are required to plan and conduct an audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. The audits include examination on the basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes an assessment of accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of comprehensive and independent financial statements.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Annual General Meeting of Shareholders Minutes concerning Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2017 No. 02 dated April 3, 2018.

One of the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) agenda items is the determination of the Public Accountant Office to audit the company's consolidated financial statements for the 2018 fiscal year and the financial statements for the partnership and environmental development program for 2018. In the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) AGMS concerning Ratification of the Financial Statements for the 2017 Fiscal Year Minutes No. 02 dated April 3, 2018 Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*) was appointed to audit the company's consolidated financial statements and financial statements for the partnership and environmental development program for 2018, and authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the KAP, and to stipulate a replacement KAP in case Purwantono, Sungkoro & Surja for any reason could not complete the aforementioned audits.

Based on this GMS resolution, the Audit Committee drafted the terms of reference together with a budget plan to be approved by the Board of Commissioners. After approval from the Board of Commissioners, Management conducted a procurement process using the Direct Procurement

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

mekanisme Pengadaan Langsung dan selama proses pengadaan berlangsung Manajemen memberikan laporan *progress* rutin kepada Komite Audit sampai dengan terbitnya perjanjian audit dengan Nomor Perjanjian PD.02/10/12/2/ADP/PAP/PI.II-18.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan sampai dengan 30 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksaaan audit Laporan Keuangan terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan selambat-lambatnya sampai tanggal 28 Februari 2019.
2. Pelaksanaan audit KPPK dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan penerbitan laporan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE PERIODE 5 TAHUN TERAKHIR

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Responsible Partner)	Periode Period	Fee Jasa Audit Audit Services	Izin AP AP License
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	2 tahun / years	Rp 3.882.714.000,-	AP.0240
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan		Rp 3.945.700.000,-	AP.0240
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna	3 tahun / years	Rp 3.991.020.000,-	AP.0697
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna		Rp 3.748.360.000,-	AP.0697
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna		Rp 3.106.719.000,-	AP.0697

mechanism and during the procurement process Management provides regular progress reports to the Audit Committee until the issuance of the audit agreement PD.02/10/12/2/ADP/PAP/PI.II-18.

ASSIGNMENT PERIOD

The work assignment period starts from the date of signing the Work Assignment Minutes until April 30, 2019, as follows:

1. The financial statement audit starts from the Work Assignment Minutes no later than February 28, 2019.
2. The KPPK audit begins on March 1, 2019 until the issuance of the report, not later than April 30, 2019.

PUBLIC ACCOUNTANT OFFICES, ACCOUNTANTS NAMES, AND FEE FOR THE LAST 5 YEAR PERIODS

Table of Public Accountant Offices, Accountant Names, KAP Fees and Permits for the Last 5 Years Period

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE ACCOUNTANTS

Selain memberikan jasa audit Laporan Keuangan, Akuntan Publik memberikan jasa lainnya sebagai berikut:

In addition to the financial statements audit services, the Public Accountant provided the following services as follows:

Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of work	Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Carry out procedures for the Performance Evaluation Results Report and Achievement of KPI (Key Performance Indicator) for the fiscal year ended December 31, 2018
	Melaksanakan audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2018 Carry out a 2018 Legislation and Internal Control Compliance audit
	Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Audit the Partnership and Community Development Program (PKBL) Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2018.
	Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Implement procedures agreed upon in the Prudential Principle Implementation Report (KPPK) in accordance with the Bank Indonesia Regulations and Circular.

Fee jasa audit sudah termasuk *fee* jasa lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

The audit services fees includes the fees for the other services as mentioned above

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO

Filosofi Manajemen Risiko Perusahaan saat ini adalah "kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melindungi seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan, menjaga kelangsungan kegiatan operasional dan non operasional dengan menerapkan manajemen risiko secara komprehensif untuk mendukung upaya Perusahaan dalam meningkatkan nilai Perusahaan bagi para Pemegang Saham dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia".

VISI MANAJEMEN RISIKO

Visi Manajemen Risiko adalah "membuat seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan adanya risiko yang melekat pada kegiatan operasional dan non operasional yang dijalankan dan mampu mengelola dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders* melalui proses bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip *Good Corporate Governance*".

MISI MANAJEMEN RISIKO

Misi Manajemen Risiko adalah menjaga dan meningkatkan kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan meminimalisir berbagai potensi ancaman dan risiko yang timbul dengan cara:

1. Menumbuhkan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan perbandingan antara risiko dan hasil dalam setiap pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Mendorong terciptanya budaya risiko disetiap elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan guna meningkatkan kesadaran akan risiko.
3. Meningkatkan proses Manajemen Risiko yang dapat berjalan secara berkala dan konsisten sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan.
4. Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada *Stakeholders* bahwa seluruh risiko Perusahaan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.
5. Melakukan upaya perbaikan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan.
6. Melakukan upaya perbaikan atas proses Manajemen Risiko yang telah ada berdasarkan hasil *monitoring* dan kaji ulang.

RISK MANAGEMENT PHILOSOPHY

The Company's Risk Management Philosophy is currently "a high awareness and commitment to protect all of the Company's resources, to maintain the continuity of current operational and non operational, by following comprehensive risk management in support of increasing the Company's value to shareholders, and to encouraging Indonesia's economic growth".

RISK MANAGEMENT VISION

The Risk Management Vision is "to ensure all parts of the Company and Subsidiaries have a high level of awareness of the risks inherent in the operational and non operational activities carried out, and can manage and control these risks, as well as increase stakeholders' trust through business processes that follow Good Corporate Governance principles".

RISK MANAGEMENT MISSION

The Risk Management Mission is to maintain and improve the Company and Subsidiaries performance by identifying and minimizing potential threats and risks that arise by:

1. Building the principle of prudence and making comparisons between risks and results when allocating resources owned by the Company and its Subsidiaries.
2. Encouraging the creation of a risk culture in all parts of the Company and Subsidiaries to increase risk awareness.
3. Improving the Risk Management process so it runs periodically and consistently and facilitates the decision making process.
4. Providing confidence and trust to stakeholders that all company risks have been identified and managed appropriately.
5. Making improvements in all operational activities carried out throughout the Company and Subsidiaries.
6. Improving the existing Risk Management process based on monitoring and review results.

- Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi di bidang Manajemen Risiko.

- Consulting with parties with a high competence and reputation in Risk Management.

TARGET MANAJEMEN RISIKO

Target Manajemen Risiko adalah:

- Melindungi seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan.
- Mencegah terjadinya hal-hal tidak terduga yang dapat merugikan Perusahaan.
- Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam organisasi dan dalam proses pengambilan keputusan.

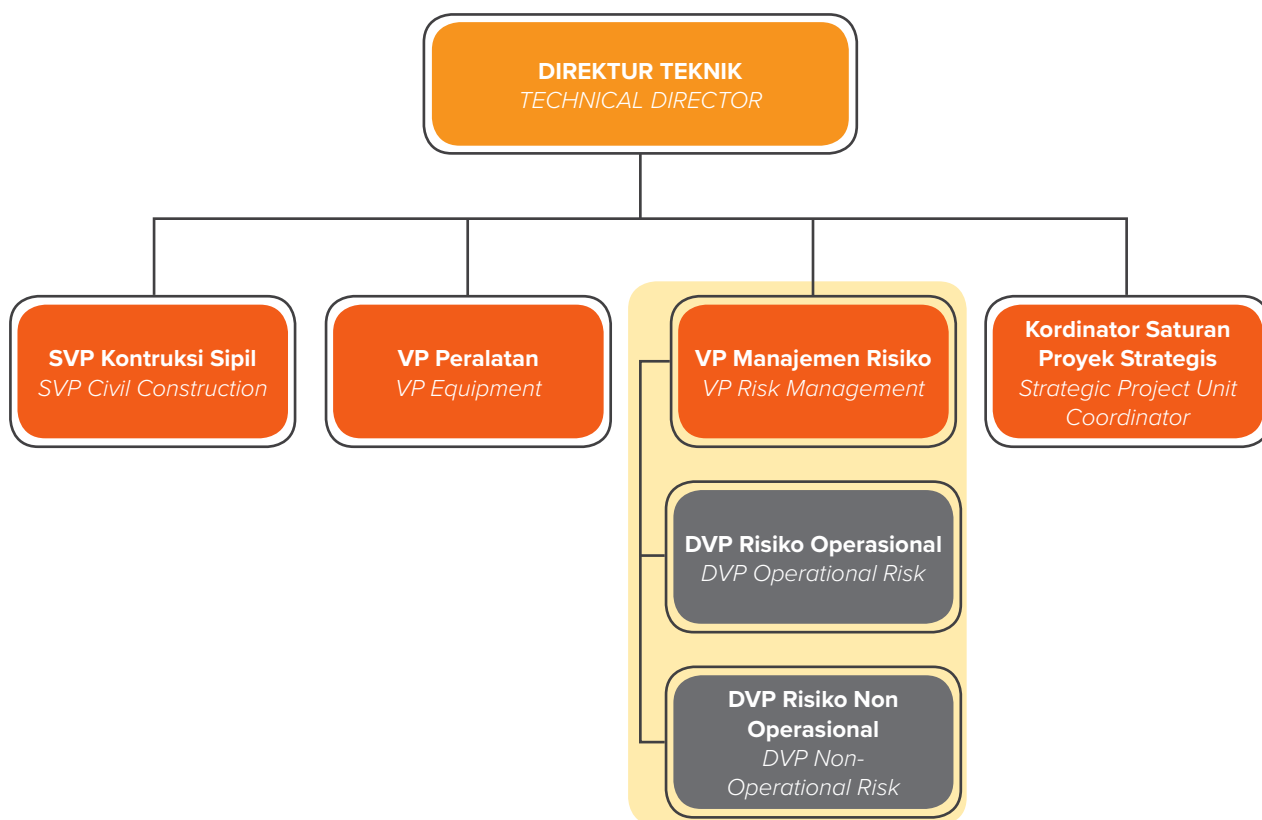
RISK MANAGEMENT TARGETS

The Risk Management Targets include:

- Protecting all Company assets and resources.
- Preventing unexpected events that could harm the Company.
- Integrating Risk Management into the organization and into the decision making process.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE



MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN VP MANAJEMEN RISIKO

Unit Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Teknik yaitu Divisi Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh Vice Preseident (VP) Manajemen Risiko. VP Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 tanggal 27 Februari 2018. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari dua departemen yaitu Departemen Risiko Operasional yang dipimpin oleh Deputy Vice President (DVP) Risiko Operasional dan Departemen Risiko Non Operasional yang dipimpin oleh Deputy Vice President (DVP) Risiko Non Operasional.

JUMLAH PEGAWAI UNIT KERJA MANAJEMEN RISIKO

Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat memiliki jumlah anggota sebanyak 10 orang yang dipimpin oleh VP Manajemen Risiko, dengan profil anggota sebagai berikut :

VP RISK MANAGEMENT APPOINTMENT AND DISMISSAL MECHANISM

The Risk Management Division reports to the Technical Director, and is led by the Vice President (VP) Risk Management. The Management Risk VP is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Directors Decree KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018. The Risk Management Division consists of two departments namely the Operational Risk Department led by the Deputy Vice President (DVP) Operational Risk and the Non-Operational Risk Department led by the Deputy Vice President (DVP) Non-Operational Risk.

NUMBER OF RISK MANAGEMENT UNIT EMPLOYEES

The Head Office's Risk Management Division has a total of 10 members led by Risk Management VP, with member profiles as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tingkat Pendidikan Education Level	Bidang Studi Major	Lembaga Pendidikan Educational Institute	Tahun Pendidikan Education Year
1	Eko Afrilianto	VP Manajemen Risiko Risk Management VP	MBA	Business Administration	Kuhne Logistics University	2015
2	Basril Nofaris	DVP Risiko Non Operasional Non Operational Risk DVP	MBA	Business Administration	Kuhne Logistics University	2015
3	Irma Mardiyani	Junior Officer Risiko Non Operasional Non Operational Risk Junior Officer	Diploma	Akuntansi Accounting	Politeknik Negeri Bandung	2010
4	Hermansyah	Junior Officer Risiko Non Operasional Non Operational Risk Junior Officer	Sarjana Bachelor's degree	Ekonomi Akuntansi Economic Accounting	Stie Muhammadiyah	2008
5	Dahlan	Junior Officer Risiko Non Operasional Non Operational Risk Junior Officer	Magister Master's degree	Manajemen Management	Universitas Krisnadwipayana	2014
6	Sumarman	DVP Risiko Operasional Operational Risk DVP	Sarjana Bachelor's degree	Teknik Mesin Mechanical Engineering	Universitas Muhammadiyah	1998

No	Nama Name	Jabatan Position	Tingkat Pendidikan Education Level	Bidang Studi Major	Lembaga Pendidikan Educational Institute	Tahun Pendidikan Education Year
7	RIKI PUTRA	Senior Officer Risiko Operasional Operational Risk Senior Officer	Sarjana Bachelor's degree	Teknik Mesin Mechanical Engineering	Institut Teknologi Bandung	2010
8	BAHARI KUSUMAWARDANI	Senior Officer Risiko Operasional Operational Risk Senior Officer	Magister Master's degree	Business Management	Binus University	2014
9	SETIYA BUDI	Junior Assistant Officer Risiko Operasional Operational Risk Junior Assistant Officer	Sarjana Bachelor's degree	Teknik Mesin Mechanical Engineering	Universitas Iba	2013
10	TATI SRI SUGIARTATI	Junior Analyst Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development Junior Analyst	Sarjana Bachelor's degree	Bidang Sosial Social Field	Universitas Pajajaran	1993

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO

- Melakukan reviu terhadap:
 - Hasil analisis *risk objective*, *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan;
 - Usulan strategi pengendalian/mitigasi risiko operasional dan non operasional yang signifikan terhadap keberlangsungan Perusahaan;
 - Usulan pengembangan metodologi *Enterprise Risk Management* (ERM).
- Merekomendasikan usulan terkait kebijakan manajemen dan penanganan risiko operasional dan risiko non operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang signifikan dan memerlukan perhatian segera.
- Melakukan *monitoring* terhadap:
 - Implementasi kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan terkait risiko operasional dan risiko non operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik.

RISK MANAGEMENT DIVISION DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Reviewing:
 - The Company's risk objective analysis, risk appetite and risk tolerance results;
 - Proposed operational and non-operational risk control/mitigation strategies that are significant to the sustainability of the company;
 - Proposed Enterprise Risk Management (ERM) methodology development.
- Recommended proposals related to significant PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) management policies and operational and non-operational risks that require immediate attention.
- Monitoring:
 - Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) policies and/or company regulations related to operational and non-operational risks;
 - Periodic risk control follow-up for significant risks.

MANAJEMEN RISIKO
 Risk Management

- | | |
|--|--|
| <p>4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan <i>Risk & Control Self Assessment</i> (RCSA) secara berkala di masing-masing bagian untuk memastikan pencapaian target Perusahaan, penyelesaian proyek yang tepat waktu dengan kualitas yang sesuai dengan kepala Divisi dan bidang Kantor Pusat, General Manager dan Direktur Anak Perusahaan.</p> <p>5. Membangun lingkungan sadar risiko di Perusahaan dengan menerapkan tata kelola yang baik.</p> | <p>4. Coordinating periodic Risk & Control Self Assessments (RCSA) in all areas to ensure the achievement of company's targets, and timely project completion in accordance with the Head Office Division Heads, General Managers and Director of Subsidiaries quality requirements.</p> <p>5. Building a risk-aware environment in the company by implementing good governance.</p> |
|--|--|

PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO

VICE PRESIDENT RISK MANAGEMENT DIVISION PROFILES



Eko Afrillianto
 Vice President Manajemen Risiko
 Vice President Risk Management

Usia <i>Age</i>	43 Tahun	43 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi	Bekasi
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ol style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil - ITB tahun 1998. S2 Teknik Sipil - ITB tahun 2001. S2 Infastructure Management - Yokohama National University (Jepang) tahun 2007. S2 Bisnis Administrasi - Kuhne Logistic University (Jerman) tahun 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> Bachelor's degree in Civil Engineering - ITB in 1998. Master degree in Civil Engineering - ITB in 2001. Master's degree in Infastructure Management – Yokohama National University (Jepang) in 2007. Master's degree in Business Administration – Kuhne Logistic University (Germany) in 2015.
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	<ol style="list-style-type: none"> Manager Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (Juli 2009 – Oktober 2010). Manager Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Palembang (November 2010 – September 2011). Manager Teknik Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (Oktober 2011 – Maret 2014). SM. Perencanaan Teknik Kantor Pusat (April 2014 – Agustus 2016). SVP Konstruksi Sipil Kantor Pusat (September 2016 – Februari 2018). VP Manajemen Risiko (Maret 2018 – Sekarang). 	<ol style="list-style-type: none"> Engineering & Information Systems Manager Teluk Bayur Port (July 2009 - October 2010) Engineering & Information System Manager Palembang Port (November 2010 - September 2011) Technical Manager Tanjung Priok Port Branch (October 2011 - March 2014) SM Technical Planning Head Office (April 2014 - August 2016) SVP Civil Construction Head Office (September 2016 - February 2018) VP Risk Management (March 2018 - Now.)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Pelatihan Manajemen Risiko Bersertifikasi
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai penyelenggara uji kompetensi bidang Manajemen Risiko dalam rangka membangun sumber daya insani yang mumpuni untuk mendukung implementasi GRC yang efektif di organisasi. Adapun pelatihan Manajemen Risiko Bersertifikasi yang diikuti antara lain:
 - a. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*
Sertifikasi QRGP diperuntukan bagi manajemen puncak (para anggota Direksi di seluruh Direktorat) yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan strategis, serta pihak pengawas (para Komisaris) yang mengemban tugas pemantauan efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh organisasi, termasuk di dalamnya adalah anggota Komite yang berperan sebagai *Risk Adviser* bagi pihak pengawas organisasi.
 - b. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*
Sertifikasi QCRO diperuntukan bagi manajemen senior di seluruh Direktorat yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan strategis dan mengemban tugas pemastian efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit-unit kerja di bawah koordinasinya, termasuk di dalamnya adalah anggota manajemen puncak yang membidangi penerapan manajemen risiko yang berperan sebagai *Risk Adviser* bagi anggota manajemen puncak organisasi.
 - c. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*
Sertifikasi QRMP diperuntukan bagi Pimpinan Unit Kerja/para manajer di seluruh unit kerja, yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan operasional dan mengemban tugas pemastian proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah Manajer Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai *Risk Consultant* bagi organisasi.
 - d. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*
Sertifikasi QRMA diperuntukan bagi para Staf di seluruh Unit Kerja, Staf Penyelia, serta para Asisten Manajer, yang berfungsi sebagai *Risk Officer* tingkat madya/*Risk Champion/Risk Taking Unit* dan mengemban tugas pelaksanaan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah para Staf Unit Manajemen Risiko tingkat madya yang berperan sebagai *Risk Analyst* bagi organisasi.

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

1. Certified Risk Management Training
To develop qualified human resources to support effective GRC, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) works with the Professional Certification Institute (LSP) as the organizer of Risk Management competency tests. The Certified Risk Management training includes:
 - a. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*
QRGP certification is intended for top management (members of the Board of Directors in all directorates) who function as Risk Owners at the strategic level, as well as supervisors (Commissioners) who monitor the organization's risk management process effectiveness, including committee members acting as Risk Advisers for the organization.
 - b. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*
QCRO certification is intended for senior management throughout the directorates who function as Risk Owners at the strategic level, and ensure the risk management process effectiveness in the units under their coordination, and includes top management with risk management roles as Risk Advisers for the organization's top management.
 - c. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*
QRMP Certification is intended for Work Unit Managers/Heads in all work units, who function as Risk Owners at the operational level, and who ensure the risk management process is carried out by the work unit, and includes Risk Management Unit managers who act as a Risk Consultants within the organization.
 - d. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*
QRMA certification is intended for staff in all work units, supervisory staff, and assistant managers, who function as middle level Risk Officers/Risk Champions/Risk Taking Unit and carry out the task of implementing the risk management process carried out by the work unit, including the staff at the middle level Risk Management Units who act as Risk Analysts for the organization.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

- e. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*
Sertifikasi QRMO diperuntukan bagi para *Entry Level* atau Staf di seluruh Unit Kerja yang berfungsi sebagai *Risk Officer* tingkat mula dan mengemban tugas administratif pendukung proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah para Staf Unit Manajemen Risiko tingkat mula yang berperan sebagai *Risk Facilitator* bagi organisasi.

- e. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*
QRMO Certification is intended for entry level or staff in all work units functioning as the initial Risk Officers, and who carry out administrative duties to support the risk management process carried out by the work units, including the initial level Risk Management Unit staff who act as

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Berikut adalah rekapitulasi jumlah pekerja IPC yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko:

RISK FACILITATORS FOR THE ORGANIZATION.

The Risk Management certification held in IPC is shown below:

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

No.	Nama Pelatihan <i>Name of Training</i>	Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jumlah Peserta Kompeten <i>Number of Participants</i>
1.	QRGP	Direksi Directors	1 Orang / Person
2.	QCRO	Kepala Divisi & Departemen Manajemen Risiko Division & Risk Management Department Heads	3 Orang / People
3.	QRMP	Kepala Divisi & General Manager Division & General Manager Heads	23 Orang / People
4.	QRMA	Kepala Departemen & Kepala Bagian Department & Section Heads	95 Orang / People
5.	QRMO	Staf & ADGM Manajemen Risiko Cabang Staff & ADGM Branch Risk Management	13 Orang / People

Selain pelatihan Manajemen Risiko bersertifikasi, berikut adalah pelatihan-pelatihan Manajemen Risiko lainnya yang diikuti oleh pekerja IPC dalam rangka meningkatkan kompetensi dibidang manajemen risiko:

In addition to certified risk management training, the following shows the risk management training attended by IPC as part of risk management competency improvements:

Tabel kompetensi di bidang manajemen risiko.

Risk management competencies.

No.	Nama Pelatihan <i>Name of Training</i>	Level Jabatan <i>Position Level</i>	Jumlah Peserta Kompeten <i>Number of Participants</i>
1.	Risk Assessment Technique	Kepala Departemen, Kepala Bagian dan ADGM Management Risiko Department Head, Section Head and ADGM Risk Management	102 Orang / People
2.	Project Risk Management	Kepala Divisi & Kepala Departemen Division Head & Department Head	20 Orang / People
3.	Business Continuity Management	Kepala Divisi & Kepala Departemen Terkait Division Head & Related Department Head	20 Orang / People
Total			142 Orang / People

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Hal-hal fundamental terkait fungsi Manajemen Risiko yang harus dianut oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan agar Manajemen Risiko dapat secara efektif diterapkan. Prinsip-prinsip ini merupakan suatu landasan proses pengelolaan risiko yang baik. Berikut adalah penjabaran secara umum mengenai prinsip-prinsip tersebut:

1. Memberi nilai tambah.
2. Merupakan bagian terpadu dari organisasi.
3. Merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
4. Secara khusus menangani aspek ketidakpastian.
5. Bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
6. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
7. Khas untuk penggunaannya.
8. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.
9. Transparan dan inklusif.
10. Bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.
11. Memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

1. Mandat dan Komitmen
Untuk melaksanakan Manajemen Risiko yang efektif, maka Manajemen Puncak harus:
 - a. Mengartikulasikan dengan jelas pentingnya Manajemen Risiko bagi organisasi dan menetapkan kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Memastikan bahwa sasaran Manajemen Risiko selaras dengan strategi dan sasaran organisasi.
 - d. Menetapkan indikator kinerja Manajemen Risiko yang selaras dengan indikator kinerja Perusahaan.
 - e. Menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab pada tingkatan yang memadai.
 - f. Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan Manajemen Risiko.
 - g. Mengkomunikasikan manfaat Manajemen Risiko ke seluruh Pemangku Kepentingan terkait.
 - h. Memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko senantiasa sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

Fundamental Risk Management principles must be adopted by the Company and Subsidiaries so that Risk Management can be effectively implemented. These principles form the cornerstone of a good risk management process. The following is a general description of these principles:

1. They add value
2. Are an integrated part of the organization.
3. Are part of the decision making process
4. They specifically deal with aspects of uncertainty.
5. They are of a systematic, structured and timely nature
6. They are based on the best information available.
7. They are intended for users.
8. They consider human and cultural factors.
9. They are transparent and inclusive.
10. They are dynamic, repetitive, and responsive to change.
11. They facilitate continuous refinements and improvements of the organization.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

1. Mandate and Commitment
To implement effective Risk Management, Senior Management must:
 - a. Articulate clearly the importance of Risk Management for the organization and establish Risk Management policies.
 - b. Ensure compliance with laws and regulations.
 - c. Ensure the Risk Management objectives are aligned with the organization's strategies and objectives.
 - d. Establish risk management performance indicators in line with the Company's performance indicators.
 - e. Assign clear and accountable responsibilities for adequate levels.
 - f. Ensure sufficient resources are available for Risk Management activities.
 - g. Communicate Risk Management benefits to all relevant Stakeholders.
 - h. Ensure the Risk Management framework is in accordance with the Company's development.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

2. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Dalam merencanakan Kerangka Manajemen Risiko, Manajemen Puncak harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap kondisi dan sifat organisasi serta konteks internal maupun eksternalnya. Hal ini sangat penting karena akan menentukan bentuk rencana dari kerangka kerja tersebut.
- b. Menyusun suatu Kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Manajemen terhadap penerapan Manajemen Risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Mengintegrasikan proses Manajemen Risiko menjadi bagian dari seluruh praktik Manajemen serta proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses Manajemen perubahan.
- d. Manajemen harus menetapkan secara jelas akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan Manajemen Risiko. Termasuk dalam tugas ini adalah penerapan, perawatan, pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tindakan Pengendalian Risiko.
- e. Pemenuhan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan Manajemen Risiko baik personalia, proses dan prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan Manajemen Risiko.
- f. Pembuatan Mekanisme Pelaporan dan Komunikasi Internal yang diperlukan untuk memastikan berjalannya komunikasi antara pihak terkait, tersedianya laporan efektifitas kerangka Manajemen Risiko dan hasilnya, kecukupan informasi hasil penerapan Manajemen Risiko dan berjalannya proses Konsultasi dengan para Pemangku Kepentingan Internal.
- g. Pembuatan Mekanisme Pelaporan dan Komunikasi Eksternal (Pemangku Kepentingan) yang diperlukan untuk memastikan adanya proses Komunikasi yang efektif, pelaporan sesuai dengan kepatuhan hukum dan tata kelola Perusahaan, informasi yang disajikan sesuai dengan perundangan yang berlaku, adanya umpan balik terhadap proses Komunikasi dan Konsultasi, adanya peningkatan kepercayaan kepada Perusahaan dan adanya Komunikasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat.

2. Risk Management Framework Planning

In planning the Risk Management Framework, Senior Management must pay attention to several matters as follows:

- a. Understanding the organization condition and nature and its internal and external context. This is very important as it helps determine the framework plan.
- b. Preparing a Risk Management Policy clearly stating management's commitment to the implementation of Risk Management and the objectives to be achieved by implementing Risk Management.
- c. Integrating the Risk Management process as part of all organizational management and business process practices. The Risk Management process must be part of the business policy development process, strategic planning, business plan preparation and change management processes.
- d. Defining clear Risk Management accountability and responsibility, including implementation, maintenance, development of the Risk Management process and ensuring the adequacy of Risk Control measures.
- e. Providing adequate resources for implementing Risk Management both personnel, processes and procedures, systems and other resources needed at each stage of Risk Management.
- f. Preparing a Reporting and Internal Communication Mechanism to ensure communication between the parties concerned, reports on the effectiveness of the Risk Management framework and the results, adequate results information on the implementation of Risk Management, and ongoing consultation with internal Stakeholders.
- g. Preparing a reporting and external communication (Stakeholders) mechanism to ensure effective Communication, reports on legal and corporate governance compliance, information in accordance with applicable legislation, feedback on the Communication and Consultation process, to increase trust in the company, and communication with all stakeholders, especially in the event of a crisis or emergency.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Proses penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian dari praktik-praktik terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Dalam menerapkan Manajemen Risiko, Manajemen Puncak wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko pada aktivitas organisasi Perusahaan.
- b. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menetapkan strategi dan manajemen waktu yang sesuai.
- d. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses Manajemen Risiko.
- e. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Manajemen Risiko.
- f. Melakukan Komunikasi dan Konsultasi dengan para Pemangku Kepentingan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diterapkan dengan efektif dan sesuai kebutuhan.

4. *Monitoring* dan Kaji Ulang

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diterapkan dengan efektif dan menunjang kinerja Perusahaan, maka Manajemen Puncak harus:

- a. Menetapkan ukuran kinerja.
- b. Mengukur kemajuan penerapan Manajemen Risiko secara berkala.
- c. Melakukan tinjauan ulang atas kesesuaian antara kerangka kerja Manajemen Risiko, Kebijakan Risiko, Rencana Penerapan Risiko dengan Konteks Internal dan Eksternal.
- d. Memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko.
- e. Melakukan tindak lanjut atas laporan dan hasil kaji ulang.
- f. Memantau efektivitas Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

5. Perbaikan Kerangka Kerja Secara Berkelanjutan

Perbaikan atas kerangka kerja secara berkelanjutan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko dan Implementasi Manajemen Risiko. Kaji ulang dan perbaikan kerangka kerja harus dilakukan oleh Departemen terkait minimal 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya harus mendapat persetujuan dari pihak terkait.

3. Implementation of Risk Management

Implementing Risk Management forms part of the organization's best practices and organizational business processes. When implementing Risk Management, Senior Management must pay attention to the following:

- a. Applying Risk Management Policies and Risk Management processes in the Company's organization activities.
- b. Complying with all applicable laws and regulations.
- c. Establishing strategies and appropriate time management.
- d. Documenting the decision-making process, including the process for determining targets in accordance with the Risk Management process results.
- e. Organizing Risk Management socialization and training.
- f. Communicating and Consulting with Stakeholders to ensure that Risk Management is implemented effectively and as needed.

4. Monitoring and Review

To ensure Risk Management is implemented effectively and supports the Company's performance, Senior Management must:

- a. Set performance measures.
- b. Measuring the progress of implementing Risk Management regularly.
- c. Reviewing the compatibility between the Risk Management framework, risk policy, risk application plan with internal and external Contexts.
- d. Ensuring compliance with the Risk Management Policy
- e. Following up on Review reports and results.
- f. Monitoring the Risk Management Framework effectiveness.

5. Continuous Improving the Framework

Continuous framework improvement is required as part of the process of improving the Risk Management Framework, Risk Management Policy and implementation of Risk Management. A framework review and improvement must be carried out by the relevant department at least once a year and the results must be approved by the relevant parties.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Strategi Manajemen Risiko merupakan acuan terhadap pendekatan mengenai cara pencapaian tujuan Manajemen Risiko. Agar berjalan dengan efektif, Divisi Manajemen Risiko melakukan sinergi atas 3 (tiga) kegiatan yang merupakan alat atau sarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan Manajemen Risiko, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan Risiko.
Menerapkan dan mengkomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan di seluruh Perusahaan serta meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko di semua lini organisasi. Semua alur transaksi dievaluasi dan bila diperlukan dilakukan proses kaji ulang dengan tujuan agar Risiko dapat diminimalkan.
2. Mengembangkan Infrastruktur Manajemen Risiko.
Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko secara menyeluruh sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang berlaku di dunia kepelabuhanan.
3. Pengelolaan lingkungan Manajemen Risiko.
Membentuk suatu lingkungan kerja yang meliputi budaya, Komunikasi, pengukuran kinerja berbasis risiko dan sebagainya untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan. Menciptakan budaya peduli risiko di seluruh lingkungan perusahaan dengan penekanan bahwa risiko perusahaan adalah tanggung jawab seluruh pegawai Perusahaan.

RISK MANAGEMENT STRATEGY

The Risk Management Strategy is a reference for the approach to achieve risk management goals. The Risk Management Division synergizes the following 3 (three) tools or facilities to support the effective achievement of Risk Management objectives:

1. Risk management process.
Applying and communicating the Risk Management Policy consistently and continuously throughout the Company, and improving the quality of the risk management processes across the organization. All transaction flows are evaluated and a review process is conducted if necessary in order that risks can be minimized.
2. Developing a Risk Management Infrastructure.
Developing an infrastructure that supports the overall application of Risk Management in accordance with the best practices that apply in the world of ports.
3. Risk Management environment management.
Establishing a work environment including culture, communication, and risk-based performance measurement to support overall Risk Management. Creating a culture of risk awareness throughout the organization emphasizing that corporate risk is the responsibility of all Company employees.

MANAJEMEN RISIKO
 Risk Management



PROSES PENGELOLAAN RISIKO

1. Komunikasi dan Konsultasi
 Komunikasi dan Konsultasi menjadi penting karena Manajemen Risiko seharusnya dikembangkan oleh pihak-pihak yang telah paham mengenai Risiko yang akan dihadapi Perusahaan, sebab Manajemen Risiko bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak di dalam Perusahaan. Komunikasi dan Konsultasi menjadi tahap pertama pengelolaan risiko karena merupakan proses tukar-menukar informasi dan pendapat mengenai risiko dan pengelolannya.

RISK MANAGEMENT PROCESS

1. Communication and Consultation
 Communication and Consultation is important as Risk Management should be developed by parties who understand the risks faced by the Company, Risk Management is not the responsibility of one or two parties, but the responsibility of all parties within the Company. Communication and Consultation is the first stage of Risk management as it involves the process of exchanging information and opinions regarding Risk and its management.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

2. Menentukan Konteks

Menentukan konteks bertujuan untuk menyelaraskan proses Manajemen Risiko dengan budaya, proses bisnis dan struktur organisasi Perusahaan.

3. Penilaian Risiko

Divisi Manajemen Risiko melakukan Penilaian Risiko terhadap seluruh kejadian risiko sesuai dengan parameter-parameter yang telah disepakati. Penilaian Risiko mencakup Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko pada setiap aktivitas fungsional dan operasional yang berpotensi merugikan Perusahaan. Hasil dari kegiatan identifikasi tersebut akan dituangkan dalam Daftar Risiko.

b. Analisis Risiko

Divisi Manajemen risiko melakukan Analisis Risiko untuk memahami risiko lebih mendalam. Metode yang dapat digunakan adalah:

- Skema Pemeringkatan Risiko
- Analisis Sebab Akibat
- Metode Kuantitatif

Analisis Risiko ditujukan untuk menentukan Tingkat Risiko berdasarkan hasil perbandingan antara Selera Risiko dengan Toleransi Risiko yang telah ditetapkan Manajemen Perusahaan. Saat ini Metode Analisis Risiko yang digunakan oleh Perusahaan terbatas pada Skema Pemeringkatan Risiko dan Analisis Sebab Akibat.

c. Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko melakukan Evaluasi Risiko berdasarkan Tingkat Risiko dari hasil Analisis Risiko. Metode yang digunakan oleh Perusahaan adalah Metode Evaluasi Kualitatif.

d. Perlakuan Risiko

Divisi Manajemen Risiko menjalankan Perlakuan Risiko berdasarkan hasil Evaluasi Risiko. Tujuan dari Perlakuan Risiko adalah untuk menurunkan atau mengurangi Tingkat Risiko hingga menghasilkan Tingkat Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan.

e. *Monitoring* dan Kaji Ulang

Pelaksanaan Pengawasan dan Kaji Ulang dilakukan oleh tiga pihak:

- Pemantauan mandiri yang dilakukan oleh Pemangku Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- Pemantauan oleh atasan yang dilakukan oleh Manajemen Puncak di Perusahaan.

2. Determining Context

Determining Context aims to harmonize the Risk Management process with the Company's culture, business processes and organizational structure.

3. Risk Assessment

The Risk Management Division carries out a Risk Assessment of all Risk events in accordance with agreed parameters. Risk Assessment includes Risk Identification, Risk Analysis and Risk Evaluation.

a. Risk identification

Risk identification identifies all types of risks in each functional and operational activity that has the potential to harm the Company. The identification activities results are included in a Risk List.

b. Risk Analysis

The Risk Management Division carries out Risk Analysis to understand the Risk more deeply. The methods that can be used include:

- Risk Rating Scheme
- Analysis of causation
- Quantitative methods

Risk Analysis determines the Risk Level based on the results of a comparison between the Risk Appetite and Risk Tolerance set by the Company's management. Currently the Risk Analysis Method used by the Company is limited to the Risk Rating Scheme and causal analysis.

c. Risk Evaluation

The Risk Management Division conducts Risk Evaluations based on Risk Levels from the Risk Analysis results. The Company uses a Qualitative Evaluation Method.

d. Risk Treatment

The Risk Management Division carries out Risk Treatment based on Risk Evaluation results. The purpose of Risk Treatment is to lower or reduce the Risk Level to achieve a Risk Level that can be accepted by the Company.

e. Monitoring and Review

Monitoring and Review is carried out by three parties:

- Self-monitoring carried out by Risk Stakeholders and the Risk Management Division.
- Monitoring by Senior Management at the Company.

- Pemantauan oleh pihak ketiga yaitu Pengawasan dan Kaji Ulang terhadap proses Manajemen Risiko dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak terkait di dalam proses penerapannya.

- Monitoring by third parties who are independent and not related in the implementation process.

PERTAHANAN 3 (TIGA) LAPIS

Pertahanan Pengelolaan Risiko di Perseroan dijalankan dengan penuh perhitungan melalui konsep Pertahanan 3 (tiga) Lapis. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan seluruh internal organisasi Perseroan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dalam model Pertahanan 3 (tiga) Lapis tersebut, fungsi dan tanggung jawab setiap lapis pertahanan adalah sebagai berikut.

1. Pertahanan Lapis Pertama.

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh Pemangku Risiko yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, dengan tugas antara lain:

- a. Memastikan adanya lingkungan pengendalian internal yang kondusif di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- b. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Manajemen Pucak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
- c. Dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan;
- d. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di Divisi atau Departemen masing-masing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal.

2. Pertahanan Lapis Kedua

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko dan dibantu oleh *Risk Officer*. Dalam hal ini Unit Manajemen Risiko harus terpisah dengan bagian operasional maupun bisnis agar terdapat independensi dalam membuat kebijakan. Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan terhadap *limit* dan toleransi risiko tersebut. Seluruh *limit* dan toleransi risiko yang dapat diterima Perseroan harus disetujui oleh Direksi. Sebagai pertahanan lapis kedua, *unit* Manajemen Risiko memiliki tugas di antaranya:

- a. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan;

THREE LINES OF DEFENSE

Risk Management in the Company is conducted using the concept of Three Lines of Defense. The concept aims to improve the durability of the whole internal organization of the Company against various risks that may be faced. In the three lines of defense model, the functions and responsibilities of each layer are as follows.

1. First Line of Defense

This first line of defense is carried out by risk stakeholders conducting day-to-day Company operations, with the following tasks:

- a. Ensure a conducive internal control environment at Head Office and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- b. Applying the Risk Management Policy established by top management in carrying out its roles and responsibilities;
- c. Consciously considering the risk factors in making decisions and actions taken;
- d. Be able to demonstrate effective internal controls in their respective Divisions or Departments and also monitoring and transparency of the effectiveness of internal controls.

2. Second Line of Defense.

The second line of defense is implemented by the Risk Management unit and assisted by the Risk Officer. In this case, the Risk Management Unit is separate from the operational and business sections to ensure independence in policy making. The Risk Management Unit is responsible for establishing a policy on such risk limits and tolerances. All limit and tolerance of acceptable risk of the Company is approved by the Board of Directors. As the second line of defense, the Risk Management unit has the following tasks:

- a. Responsible for developing and monitoring the implementation of the overall Risk Management of the Company;

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

- b. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
 - c. Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan;
 - d. Melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Kebijakan Manajemen Risiko ke seluruh pegawai, termasuk melakukan revisi atau pengkinian. Sedangkan *Risk Officer* memiliki tanggung jawab antara lain:
 - Membantu Unit Manajemen Risiko dalam melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh pegawai;
 - Memastikan Kebijakan tersebut dijalankan dengan benar di area kerjanya.
3. Pertahanan Lapis Ketiga
- Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Peran Auditor Internal jauh lebih intens dalam model Pertahanan 3 (tiga) Lapis ini karena merupakan bagian Internal Perseroan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, Auditor Internal bertugas untuk:
- a. Melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan; dan
 - b. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

KLASIFIKASI RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Dalam Kebijakan Manajemen Risiko, risiko-risiko Perusahaan dibagi atas 7 klasifikasi risiko, yaitu:

1. Risiko Hukum dan Kepatuhan
Risiko kerugian yang disebabkan sebagai akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, serta akibat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Komunitas
Risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam mengelola standar minimum keselamatan, kesehatan, standar minimum lingkungan dan nilai-nilai kemasyarakatan.
3. Risiko Operasional
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,

- b. Monitor how business functions are carried out within the corridor of Risk Management policy and standard operating procedures established by the Company;
- c. Monitor and report the Company risks thoroughly to the highest accountable organs in the Company;
- d. Conduct development, dissemination and distribution of Risk Management policy to all employees, including revision or updating. Meanwhile, the Risk Officer has responsibilities, among others:
 - Assist the Risk Management unit in conducting the development, dissemination and distribution of Risk Management Guidelines to all employees;
 - Ensure the policy is properly implemented in its work area.

3. The Third Line of Defense.

The third line of defense is carried out by auditors of both Internal Audit and the external auditor. The Internal Auditor role is much more intense in the 3 (three) Lines of Defense model as it is an internal part of the Company but which is independent of other functions. In this case, Internal Audit is tasked with:

- a. Reviewing and evaluating the overall framework and implementation of Risk Management, and
- b. Ensuring that the first and second lines of defense run as expected

RISK CLASSIFICATION AND MANAGEMENT

In the Risk Management Policy, the Company risks are divided into 7 risk classifications, namely:

1. Legal and Compliance Risk
Risk of losses caused by lawsuits and / or weaknesses in juridical aspects, as well as the consequences of not complying with laws and regulations and applicable provisions
2. Health, Safety, Environmental and Community Risks
Risk of losses caused by failure to manage minimum standards of safety, health, minimum environmental standards and community values
3. Operational Risk
Risk of losses caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Finansial/Keuangan
Risiko kerugian yang diakibatkan ketidaktepatan dalam pengelolaan aset dan kewajiban Perusahaan yang berdampak terhadap laba aktual dari operasi yang akan lebih rendah.
5. Risiko Proyek
Risiko kerugian yang diakibatkan akibat ketidakpastian kondisi yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan proyek atau tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
6. Risiko Reputasi
Risiko kerugian yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
7. Risiko Strategis
Risiko kerugian yang terkait akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam mengelola risiko-risiko Perusahaan, IPC menurunkan rencana penanganan risiko tersebut dalam beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja
Pedoman, prosedur dan instruksi kerja termasuk dalam penanganan risiko yang sudah dilakukan atau biasa disebut sebagai aktivitas kontrol. Adanya efektivitas kontrol dapat menurunkan tingkat risiko residual. Apabila dengan adanya aktivitas kontrol ini tingkat risiko menjadi rendah atau sangat rendah, maka tidak perlu lagi adanya rencana penanganan lanjutan, cukup dengan melakukan *monitoring* terkait dengan aktivitas kontrol tersebut.
2. Rencana Kerja Manajemen (RKM)
Setiap Unit Kerja mempunyai risikonya masing-masing, selain risiko rutin ada juga risiko yang sifatnya strategis sesuai dengan visi IPC menuju *World Class Port*. Risiko ini di mitigasi melalui program kerja atau rencana kerja Manajemen. Adanya program kerja atau rencana kerja Manajemen ini outputnya diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko.
3. Investasi
Sesuai visi dan misi IPC menuju *World Class Port*, IPC dituntut untuk mengembangkan infrastruktur modern. Merencanakan investasi pembangunan pelabuhan adalah salah satu cara untuk menjawab tantangan atau risiko untuk menuju *World Class Port*.

and/or the presence of external events that affect the Company's operations.

4. Financial Risk
Risk of losses caused by inaccuracies in company assets and liabilities management that impact and lower actual profits from operations
5. Project Risk
Risk of losses caused by uncertainty in conditions that have a negative impact on achieving project objectives or not operating as expected
6. Reputation Risk
Risk of losses caused by a decrease in the level of stakeholder trust from negative perceptions of the Company
7. Strategic Risk
Risk of losses caused by inaccuracies in making and/or implementing strategic decisions, and failure to anticipate changes in the business environment

In managing the Company risks, IPC has lowered the risk management plan in several areas, including:

1. Guidelines, Work Procedures and Instructions
Guidelines, procedures and work instructions are used for handling risks and are commonly referred to as control activities. The effectiveness of controls can reduce the level of residual risk. If with this control activity the risk level becomes low or very low, then there is no need for further management plans, just monitoring related to the control activity.
2. Management Work Plan (RKM)
Each work unit has its own risks, in addition to routine risks there is also risks that are strategic to IPC achieving its vision to be a world class port. These risks are mitigated through a work program or management work plan, the output of which is expected to reduce the risk level.
3. Investment
In accordance with IPC's vision to be a world class port, IPC needs to develop a modern infrastructure. Planning a port development investment is one way to answer the challenges or risks to become a world class port.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

PROGRAM KERJA MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Program Kerja Manajemen Risiko antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan *Business Continuity Management (BCM)*
Business Continuity Management (BCM) adalah merupakan proses manajemen menyeluruh yang membantu mengelola risiko terhadap kelancaran Perusahaan, memastikan dapat terus beroperasi jika terjadi gangguan. Manfaat implementasi BCM adalah:
 - a. Mengurangi biaya dan waktu yang timbul terkait dengan gangguan operasi.
 - b. Meningkatkan kepercayaan dan citra Perusahaan yang terpercaya dan dapat diandalkan.
 - c. Bermanfaat meramalkan tingkat gangguan melalui *Business Impact Analysis (BIA)*.
 - d. Meningkatkan operasi bisnis dan kemampuan Perusahaan secara berkelanjutan untuk menyediakan produk/layanan tanpa batas dalam kasus gangguan yang tidak terduga.
 - e. Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko untuk operasi keberlanjutan.
Business Continuity Management (BCM) merupakan suatu proses identifikasi dan evaluasi risiko yang berpotensi menghambat kelangsungan bisnis Perusahaan. BCM mengembangkan kerangka kerja untuk membangun ketahanan organisasi dengan kemampuan merespon suatu kejadian terkait risiko katastrofik secara cepat, efektif dan terstruktur untuk menjaga kepentingan para *stakeholder* serta reputasi Perusahaan. Dalam rangka implementasinya diperlukan penyusunan kebijakan dan rencana implementasi dimana mencakup Strategi *Business Continuity Management, Business Continuity Plan* dan *Business Continuity Team*

2. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRISK)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko adalah salah satu infrastruktur dalam melaksanakan implementasi Manajemen Risiko. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko ini diharapkan dapat mempermudah *Risk Owner* melakukan serta *monitoring* risiko di bagiannya masing-masing. Selain itu implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko diharapkan dapat mempermudah Divisi Manajemen Risiko dalam melakukan analisis, *monitoring* dan pelaporan kepada Manajemen.

RISK MANAGEMENT WORK PROGRAM IN 2018

In 2018, the Risk Management Work Program included:

1. Preparation of Operational Risk Management Policy and Business Continuity Management (BCM)
Business Continuity Management (BCM) is a comprehensive management process to manage risks to ensure the smooth running of the company, so that it can continue to operate in the event of a disruption. The benefits of BCM are:
 - a. Reducing costs and time incurred related to operating disruptions
 - b. Increasing trust and a trusted company image
 - c. Predicting the level of interference through a Business Impact Analysis (BIA)
 - d. Increasing business operations & the Company's ability to continuously provide unlimited products / services in case of unexpected disruptions
 - e. Increasing risk mitigation capabilities for sustainable operations
Business Continuity Management (BCM) is a process for identifying and evaluating risks that has the potential to hinder the company's business continuity. BCM develops a framework for organizational resilience with the ability to respond to catastrophic risk events quickly, effectively and structurally to safeguard the interests of stakeholders and the reputation of the company. In its framework, it is necessary to formulate policies and implementation plans including the Business Continuity Management Strategy, Business Continuity Plan and Business Continuity Team

2. Risk Management Information System (SIMRISK) Implementation

The risk management information system application is part of the risk management implementation infrastructure. The risk management information system facilitates the Risk Owner in carrying out and monitoring risks. In addition, the risk management information system helps the Risk Management Division in conducting analysis, monitoring and reporting to management.

3. Implementasi *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Early Warning System* (EWS)

Key Risk Indicator (KRI) adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa suatu risiko dapat dijaga selalu pada tingkat (*threshold limit*) yang dapat diterima oleh suatu organisasi. KRI dapat memberikan informasi penting terhadap penetapan dan pencapaian tujuan strategis (*strategic goal setting and achievement*). *Early Warning System* (EWS) merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan informasi berupa peringatan atau notifikasi apabila target yang telah ditetapkan berada tingkat (*threshold limit*) yang tidak dapat diterima.

Dengan ditetapkannya KRI, maka aktivitas *monitoring* risiko tidak hanya dilakukan dengan mencatat peristiwa risiko dan realisasi tindakan mitigasi saja, namun *monitoring* atas dinamika perubahan besaran metrik KRI perlu dilakukan guna mengambil langkah antisipasi yang diperlukan secara lebih dini (*early warning*) agar terjadinya risiko dapat dicegah atau apabila memang tidak dapat dicegah karena keterbatasan kontrol maka dampaknya dapat dikurangi.

4. Forum Pertemuan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero)

Pada bulan Februari tahun 2018, PT Pelabuhan Indonesia Koordinasi Terbatas (Rakortas) Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia yang di hadiri oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero). Tujuan dari Rakortas ini adalah sebagai wadah atau kegiatan untuk pertukaran informasi seputar dunia kepelabuhanan serta implementasi Manajemen Risiko di masing-masing Perusahaan.

5. Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur

Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur Lanjutan mencakup pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko berjenjang untuk *Risk Champion* dan *Risk Agent* di tingkat Kantor Pusat dan Cabang yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan *awareness* Manajemen Risiko, meningkatkan kemampuan dengan menggunakan *tools* Manajemen Risiko dalam mengelola risiko dan menerapkan *project risk management*. Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur di Tahun 2018 sudah

3. Implementation of *Key Risk Indicators* (KRI) and *Early Warning System* (EWS)

Key Risk Indicators (KRI) are used to control and ensure that a risk can be kept at a threshold limit that is acceptable to the organization. KRI can provide important information on strategic goal setting and achievement. *Early Warning System* (EWS) is a method used to provide information in the form of a warning or notification if the set target is unacceptable.

With the establishment of KRI, risk monitoring activities are not only carried out by recording risk events and realization of mitigation actions. Monitoring the changes in KRI metric quantities needs to be carried out to take anticipatory steps early so that risks can be prevented, or if it cannot be prevented, to reduce the impact.

4. PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) Forum Meeting

In February 2018, PT Pelabuhan Indonesia II held a PT Pelabuhan Indonesia Risk Management Coordination Meeting (Rakortas) attended by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero). The purpose of this Rakortas forum was to exchange information about the world of ports and the implementation of risk management in each company.

5. Structured Risk Management Training

Advanced Structured Risk Management training includes training and tiered risk management certification for Risk Champions and Risk Agents at Head Office and Branch levels, to increase competency & risk management awareness, improve capabilities by using risk management tools, and implementing project risk management. Structured Risk Management Training in 2018 comprised 3 types of training, namely Risk Assessment Technique Training in 5 batches, 1 batch

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

dilakukan 3 (tiga) jenis pelatihan yaitu Pelatihan *Risk Assessment Technique* (Teknik Asesmen Risiko) sebanyak 5 (lima) *batch*, Pelatihan *Project Risk Management* sebanyak 1 (satu) *batch* dan pelatihan *Business Continuity Management* sebanyak 1 (satu) *batch*.

Selain program kerja di atas, Divisi Manajemen Risiko juga bertugas menjadi fasilitator Divisi Komersial dan Divisi Pengembangan Bisnis dalam membuat laporan atau kajian risiko terkait dengan kajian kerja sama usaha dan pengembangan bisnis.

PROFIL, PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

Sesuai dengan *Corporate Roadmap* IPC, tema tahun 2018 adalah "*Establishment – Establishment Performance*". Tema Perusahaan serta target-target Perusahaan yang tercantum dalam RJPP dan RKAP menjadi sasaran dalam menetapkan konteks risiko tahun 2018. Selain sasaran Perusahaan, kondisi internal dan eksternal Perusahaan serta aspirasi dari *stakeholder* menjadi bagian dari konteks risiko tahun 2018.

Proses penilaian risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi) dilakukan berdasarkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan *Top-Down* dan pendekatan *Bottom-Up*. Risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Top-Down* adalah risiko yang diidentifikasi melalui penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi secara korporat sedangkan risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Bottom-Up* adalah yaitu risiko-risiko yang teridentifikasi oleh *Risk Owner*.

Berdasarkan dua pendekatan tersebut, dengan menggunakan *Risk Control & Self Assessment* (RCSA) diperoleh risiko-risiko Korporat yang meliputi risiko Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan. Dari risiko-risiko tersebut dipilih 10 (sepuluh) risiko signifikan Perusahaan atau Korporat yaitu:

Project Risk Management Training and 1 batch of Business Continuity Management training.

In addition to the above work program, the Risk Management Division is also in charge of the Commercial Division facilitator and Business Development Division in making risk reports or studies related to the study of business cooperation and business development.

RISK PROFILE, ASSESSMENT AND MANAGEMENT

Based on the IPC Corporate Roadmap, the theme for 2018 was "Establishment - Establishment Performance". The theme and company targets listed in the RJPP and RKAP are targeted at the risk context for 2018. In addition to the company targets, the company's internal and external conditions and aspirations from stakeholders formed part of the risk context in 2018.

The risk assessment process (identification, analysis and evaluation) follows two approaches, namely the Top-Down approach and the Bottom-Up approach. The risks obtained/identified through a top-down approach are risks identified through assessing the corporate goals achievement, while the risks obtained / identified through a bottom-up approach are those risks identified by the risk owner.

Based on these two approaches, using Risk Control & Self Assessment (RCSA), the corporate risks including the head office, port branches and subsidiaries risks were obtained. Of these risks 10 (ten) significant business or corporate risks were chosen, namely:

No.	Nama Risiko <i>Type of Risk</i>	Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>
1.	Risiko tertundanya proyek strategis <i>Risk of delayed strategic projects</i>	Sangat Tinggi Very high
2.	Risiko tidak tercapainya pendapatan operasi <i>Risk of not achieving operating income</i>	Sangat Tinggi Very high
3.	Risiko rendahnya penyerapan investasi <i>Low risk of investment absorption</i>	Sangat Tinggi Very high
4.	Risiko rugi selisih kurs <i>Foreign exchange loss risk</i>	Sangat Tinggi Very high

MANAJEMEN RISIKO
 Risk Management

No.	Nama Risiko <i>Type of Risk</i>	Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>
5.	Risiko piutang tinggi/Tidak tertagihnya piutang Risk of high receivables / uncollectible receivables	Sangat Tinggi Very high
6.	Risiko kehilangan aset perusahaan Risk of loss of company assets	Tinggi High
7.	Risiko persaingan usaha oleh kompetitor baru Risk of business competition by new competitors	Menengah Medium
8.	Risiko tidak optimalnya pengelolaan Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan Risk is non-optimal management of branches and subsidiaries	Menengah Medium
9.	Risiko keamanan sistem informasi (IT Security) Information system security risk (IT Security)	Menengah Medium
10.	Risiko menurunnya pangsa pasar Risk of declining market share	Rendah Low

MITIGASI RISIKO TAHUN 2018

Penanganan risiko atau mitigasi risiko bisa berupa pembuatan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja, Program Kerja (Rencana Kerja Manajemen) dan Investasi. Berikut adalah penanganan atau mitigasi risiko yang dilakukan, khususnya pada risiko-risiko signifikan Perusahaan:

RISK MITIGATION 2018

Risk management or risk mitigation can be in the form of Guidelines, Work Procedures and Instructions, Management Work Plans, and investments. The following shows the handling or mitigation of risks carried out, especially for significant company risks:

No	Nama Risiko <i>Risk Name</i>	Penanganan Risiko <i>Risk Management</i>
1	Risiko tertundanya proyek strategis Risk of delayed strategic projects	<ol style="list-style-type: none"> Membuat <i>Project Planning</i> yang lebih detail dan menyepakati <i>project charter</i> sebagai bagian dari proses perencanaan proyek strategis Koordinasi antar Divisi terkait <ol style="list-style-type: none"> Create more detailed Project Planning and agree on project charter as part of the strategic project planning process Coordination between related Divisions
2	Risiko tidak tercapainya pendapatan operasi Risk of not achieving operating income	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan spesialisasi operasional melalui kerja sama dengan anak perusahaan Melakukan optimalisasi aset-aset yang <i>idle</i> Melakukan penyesuaian tarif pada Cabang-cabang Pelabuhan Reviu kontrak-kontrak kerja sama usaha yang merugikan perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Conduct operational specialization by collaboration with subsidiaries Perform idle assets optimization Adjust tariffs at Port Branches Review business cooperation contracts that are detrimental to the company
3	Risiko rendahnya penyerapan investasi Low risk of investment absorption	<ol style="list-style-type: none"> Prioritisasi investasi-investasi yang nilainya besar untuk segera dilaksanakan Pembentukan Tim <i>Task Force</i> Percepatan pelaksanaan investasi Pemenuhan regulasi terkait dengan perizinan pelaksanaan investasi <i>Monitoring</i> Pekerjaan Investasi : aplikasi <i>monitoring</i> investasi, pelaporan MMR, <i>Dashboard</i> MMR <ol style="list-style-type: none"> Prioritize large value investments to be begin immediately Establish Task Force Team Acceleration of investments Comply with regulations related to investment licensing Investment Job Monitoring: investment monitoring application, MMR reporting, MMR Dashboard
4	Risiko rugi selisih kurs Foreign exchange loss risk	Implementasi <i>Hedging</i> Hedging Implementation

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No	Nama Risiko <i>Risk Name</i>	Penanganan Risiko <i>Risk Management</i>
5	Risiko piutang tinggi/tidak tertagihnya piutang Risk of high receivables/uncollectible receivables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SCF (<i>Supply Chain Financing</i>) 2. Penerapan program sistem pembayaran <i>e-payment</i> di cabang-cabang, 3. Membentuk <i>Tim Task Force</i> Piutang untuk menginventarisasi piutang lama dan piutang baru. 4. Penerapan sistem pembayaran secara <i>autocollection</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. SCF (Supply Chain Financing) Program 2. Implement an e-payment payment system program in branches, 3. Establish a Debt Task Force Team to inventorize old receivables and new receivables. 4. Apply an autocollection payment system
6	Risiko Kehilangan aset perusahaan Risk of loss of company assets	<p><i>Legal Action :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan gugatan terkait dengan penggunaan lahan milik IPC oleh pihak lain 2. Melakukan pengosongan lahan-lahan milik IPC yang digunakan oleh warga 3. Melakukan sertifikasi lahan-lahan milik IPC <p><i>Legal Action:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pursue claims related to IPC's land use by another party 2. Empty IPC land used by residents 3. Certify IPC-owned land
7	Risiko persaingan usaha oleh kompetitor baru Risk of business competition by new competitors	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembuatan Kajian <i>Grand Desain</i> Pertumbuhan Anorganik 5. Melakukan pendekatan serta menjaga hubungan baik dengan para pengguna jasa <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare Grand Design Study for Inorganic Growth 2. Approach and maintain good relations with service users
8	Risiko tidak optimalnya pengelolaan cabang dan anak perusahaan Risk is non-optimal management of branches and subsidiaries	<p>Membentuk sinergi antar/antara anak perusahaan dan cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menciptakan nilai tambah bagi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>Form synergies between PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) subsidiaries and branches to create added value for PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>
9	Risiko keamanan sistem informasi (IT Security) Information system security risk (IT Security)	<p>Pengaturan dan peningkatan keamanan akses terhadap sistem</p> <p>Establish and enhance system access security</p>
10	Risiko menurunnya pangsa pasar Risk of declining market share	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemasaran untuk meningkatkan <i>throughput</i> peti kemas melalui penguatan pemasaran di Cabang-cabang 2. Program pemasaran untuk proyek strategis (Proyek Kijing, <i>Product Terminal 1 & 2 New Priok</i>, CT 2 & 3 New Priok) dan pemasaran dalam rangka optimalisasi lahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Marketing program to increase container throughput through strengthening marketing in Branches 2. Marketing program for strategic projects (Kijing Project, New Priok Product Terminal 1 & 2, CT 2 & 3 New Priok) and marketing to optimize land

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, IPC memiliki beberapa jenis bentuk pengelolaan risiko. Ada 4 (empat) jenis bentuk pengelolaan risiko, yaitu:

RISK MANAGEMENT EFFORTS

In accordance with the Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy, IPC maintains several types of risk management. The 4 (four) types of risk management includes:

1. Menerima Risiko (*Accept Risk*): mempertahankan risiko pada tingkat risiko saat ini dengan tidak mengambil tindakan lanjutan. Pilihan ini dapat dilakukan untuk risiko yang dianggap tidak signifikan atau memiliki tingkat kepentingan yang rendah bagi Perusahaan;
 2. Memindahkan Risiko (*Transfer Risk*): memindahkan/menggeser risiko yang ada kepada pihak ketiga yang independen dan memiliki kemampuan finansial yang kuat (seperti: Perusahaan Asuransi) dengan biaya yang sewajarnya dan pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang bermuatan hukum;
 3. Menghindari Risiko (*Avoid Risk*): menghindari eksposur terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko yang berpotensi terjadi (contoh: menghentikan kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan risiko tersebut). Tindakan ini dapat dipilih sebagai perlakuan terhadap risiko yang memiliki tingkat risiko yang tidak dapat ditoleransi ataupun diterima oleh Perusahaan karena memiliki dampak yang signifikan;
 4. Mengurangi Risiko (*Reduce Risk*): strategi untuk mengambil tindakan mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan memfokuskan pada penurunan kemungkinan dan dampak risiko. (contoh: mengurangi tingkat risiko dengan menempatkan pengendalian tambahan atau menguatkan pengendalian dan proses yang sudah ada).
1. Accept Risk: maintaining the current level of risk by not taking further action. This choice can be made for risks that are considered insignificant or have a low level of importance for the Company;
 2. Transfer Risk: transferring existing risks to independent third parties with strong financial capabilities (such as: insurance companies) at reasonable costs and generally based on agreements that are legally binding;
 3. Avoid Risk: avoiding exposure to the possibility of risk occurrence that has the potential to occur (example: stopping events/activities that can cause these risks). This action can be taken to treat risks that have a level of risk that cannot be tolerated or accepted by the Company due to its significant impact;
 4. Reduce Risk: A strategy for reducing the risk level to an acceptable level by focusing on reducing the likelihood and impact of risk. (example: reducing the risk level by placing additional controls or strengthening existing controls and processes).

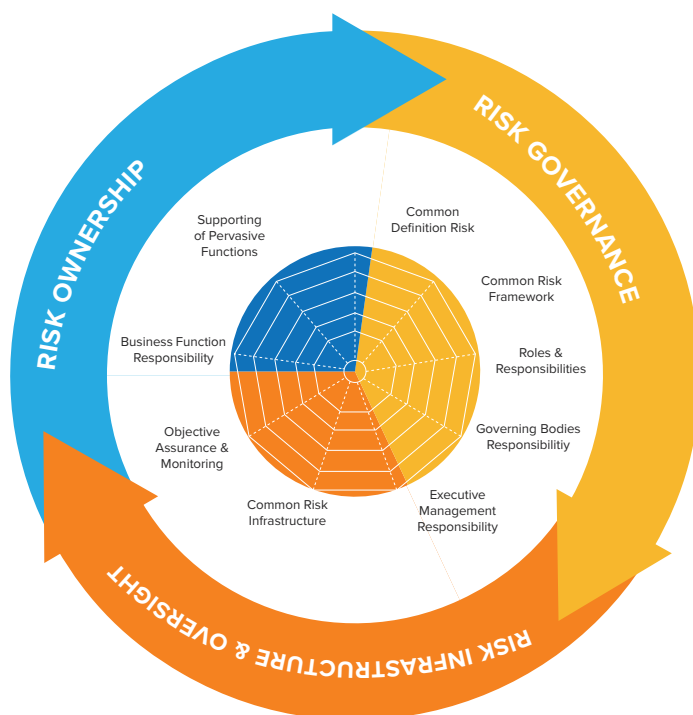
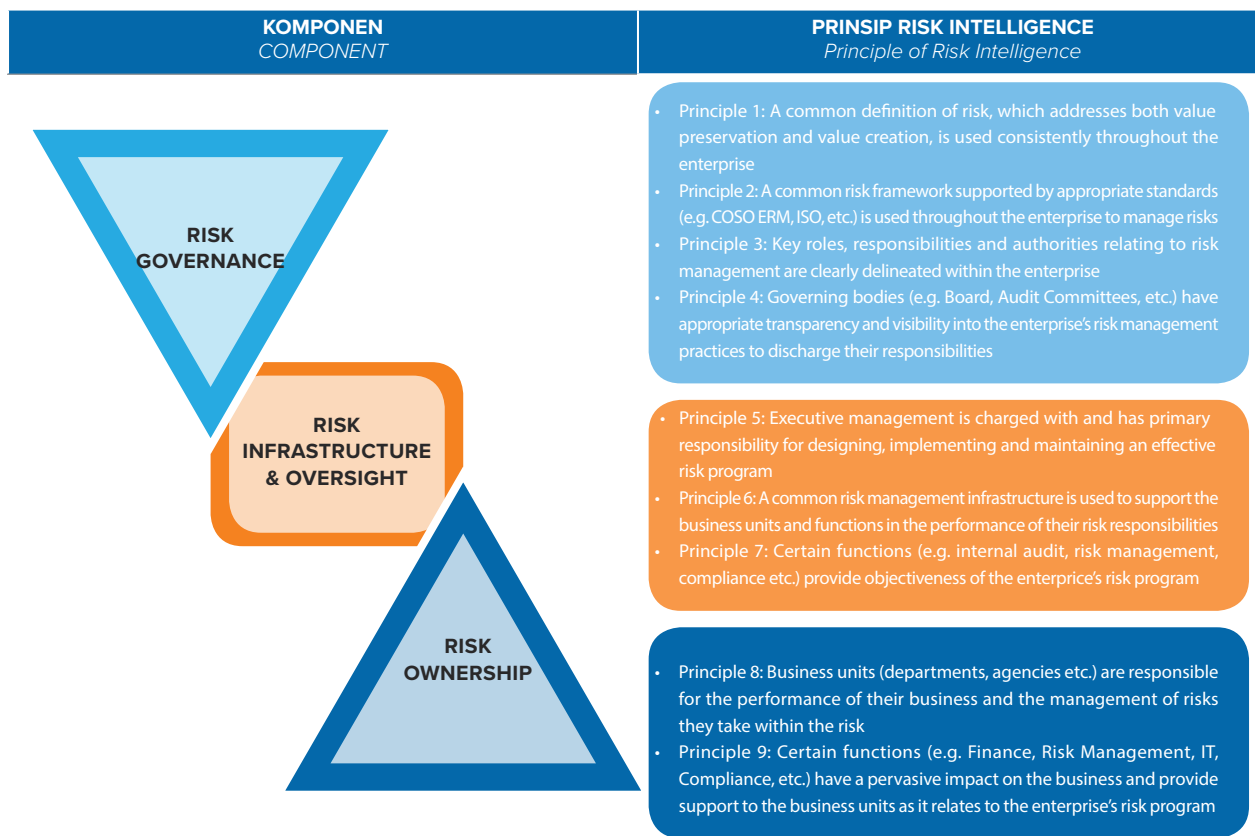
EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

IPC khususnya Divisi Manajemen Risiko senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan agar implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan dapat dilakukan dengan efektif. Dalam rangka menuju *world class port*, tingkat kematangan Manajemen Risiko (*risk maturity*) harus ditingkatkan. Pada tahun 2018 sudah dilakukan pengukuran tingkat kematangan Manajemen Risiko (*risk maturity level*) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan menggunakan *Risk Intelligence Diagnostic* sebagai alat pengukurannya (*tools*). Dengan menggunakan *Risk Intelligence Diagnostic* ini pengukuran tingkat kematangan Manajemen Risiko ini meliputi 3 (tiga) komponen yaitu *Risk Governance*, *Risk Infrastructure & Oversight* dan *Risk Ownership*.

2018 RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION EVALUATION

IPC, especially the Risk Management Division, conducts evaluations and improvements so that the Company's risk management can run effectively. To become a world class port, the risk maturity level needs to be increased. In 2018 the risk maturity level in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was measured using a Risk Intelligence Diagnostic tool, focusing on 3 components, namely Risk Governance, Risk Infrastructure & Oversight and Risk Ownership.

MANAJEMEN RISIKO
 Risk Management



MANAJEMEN RISIKO
 Risk Management

Berikut adalah model tingkat kematangan manajemen risiko yang didefinisikan sebagai acuan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko di IPC.

The following shows the management maturity level model that is used as a reference for assessing the risk management maturity level in IPC.



Dari hasil pengukuran tingkat kematangan Manajemen Risiko ini didapat hasil akhir atau nilai tingkat kematangan di angka 3,43 (Top-Down).

The risk management maturity level results resulted in a maturity level value of 3.43 (Top-Down).

Beberapa hal atau hasil evaluasi Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan *risk maturity* yang sudah dilakukan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Based on the risk management evaluation results, and to improve the risk maturity, the following efforts were carried out in 2018:

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

1. Pembuatan kajian implemetasi *Key Risk Indicator* dan *Early Warning System*.
2. Pembuatan kebijakan *Business Continuity Management*.
3. *Development* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Ketiga program kerja di atas sudah dilakukan pada tahun 2018 dan implementasinya akan dilakukan di tahun 2019.

IPC senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada Kebijakan Manajemen Risiko adalah melakukan *update* Kebijakan Manajemen Risiko yang sebelumnya mengacu pada ISO 31000 tahun 2009 menjadi mengacu pada ISO 31000 tahun 2018.

1. Conducting Key Risk Indicator and Early Warning System studies.
2. Establishing Business Continuity Management policies.
3. Developing risk management information system applications.

These three work programs were conducted in 2018 and their implementation will be carried out in 2019.

IPC always evaluates the risk management system effectiveness, including adjusting the strategy and risk framework as part of risk management policies, the adequacy of the risk management information systems and the risk identification, measurement, monitoring and control processes. Another step was to update the risk management policies from ISO 31000 - 2009 to ISO 31000 - 2018.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

IPC memiliki Pedoman umum Sistem Pengendalian Internal yang disusun berdasarkan pada COSO *Framework Principles* dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 56/6/19/PI.II-2013 Tanggal 10 Desember 2013.

TUJUAN PENGENDALIAN

Tujuan pengendalian intern adalah:

1. Efisiensi dan efektivitas operasional
Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
2. Keandalan pelaporan keuangan
Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif pada sistem pengelolaan data akuntansi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan.

PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern yang efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Perusahaan, yaitu:

1. Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh dalam mendesain serta mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif. Pernyataan komitmennya terhadap perlunya pengendalian intern yang merupakan "*tone at the top*" yang akan mendorong integritas dan etika dalam membentuk lingkungan yang positif bagi sistem pengendalian intern.

IPC's General Guidelines for its Internal Control Systems is based on the COSO Framework Principles as determined by the Board of Directors Decree No. 56/6/19/PI.II-2013 dated December 10, 2013.

CONTROL OBJECTIVES

The internal control objectives is:

1. Operational efficiency and effectiveness
Intended to increase the effectiveness and efficiency in managing the Company's resources to achieve the Company's objectives.
2. Reliability of financial reporting
Intended to guarantee that reports are reasonable, timely, and relevant, as a basis for making appropriate and accountable decisions.

The financial statements presentation and information disclosure is more assured with effective internal controls on the accounting data management system. This is intended to provide assurances that all data refers to legitimate authorized transactions, and that the transactions have been recorded on the date they happened for the true amount.

3. Compliance with laws and regulations
Intended to ensure that all Company activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, issued by the government or other authorities, as well as the Company's established policies, provisions, and procedures.

INTERNAL CONTROL SYSTEM INTERESTED PARTIES

All parties in the Company's organization are responsible for running an effective Internal Control System, including:

1. Board of Directors
The Board of Directors is fully responsible for designing and implementing an effective internal control system. Their commitment statement - "*tone at the top*" - encourages integrity and ethics in forming a positive environment for the internal control system.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Direksi memberikan arah dan mendelegasikan kewenangan kepada para pejabat senior atau *second layer management* (*General Manger* Cabang Pelabuhan, EVP, SVP dan VP) serta menilai cara mereka menjalankan aktivitas fungsi dan peran masing-masing. Selanjutnya para pejabat senior ini bertanggung jawab untuk mendisain kebijakan sistem pengendalian dan prosedur yang lebih spesifik sesuai dengan fungsi dan peran mereka.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab memastikan adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) melakukan pengawasan terhadap penerapannya dan memastikan pengendalian intern yang berjalan secara efektif.

Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern, dapat mendeteksi risiko lebih dini sehingga dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar.

3. Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Intern, sebagaimana Auditor Internal sangat berkepentingan dengan keberadaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif. Hal ini terkait dengan luasnya ruang lingkup dan kedalaman audit yang harus dilakukan. Semakin efektif sistem pengendalian intern Perusahaan, pekerjaan auditor akan semakin mudah.

Sebagai *third line of defence*, Satuan Pengawasan Intern harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah sistem pengendalian intern telah didesain dengan tepat, diimplementasikan secara konsisten, serta berjalan dengan baik. Hal ini juga dilakukan terhadap sistem pengendalian intern pada pengelolaan teknologi informasi.

Auditor harus dapat memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan baik dalam desain, penerapan, maupun fungsinya.

4. Pegawai

Setiap individu *front liner* yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari (*first line of defence*) wajib memahami dan melaksanakan sistem dan prosedur yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan tanggung jawab semua individu untuk memiliki sistem deteksi dini sehingga memudahkan identifikasi dan segera

The Board of Directors provides direction and delegates authority to senior or second level management officials (GM's Port Branch, EVP, SVP and VP) and assesses the way they carry out their respective functions and roles. In addition, these senior officials are responsible for designing more specific control system policies and procedures in accordance with their functions and roles.

2. Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for good corporate governance, and supervises the effective implementation of internal control.

The Board of Commissioners' effective supervision of the internal control system implementation can detect risks early to prevent problems becoming larger.

3. Internal Audit Unit

As the Internal auditor, the Internal Audit Unit relies on an effective Internal Control System, as it affects the extent of the scope and depth of their audits. The more effective the Company's internal control system, the easier the auditor's work will be.

As a third line of defense, the Internal Audit Unit conduct evaluations to determine whether the internal control system has been properly designed, consistently implemented, and runs well. This is also conducted on the internal control system in the information technology management.

Auditors must provide improvement recommendations if they find weaknesses in the design, implementation or function.

4. Employees

Every front liner in charge of carrying out day-to-day activities must understand and implement systems and procedures as part of the internal control system. A good control environment will increase the responsibility of all individuals as an early detection system to help immediately identify and find out if performance does not match the standards and targets, and the occurrence

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System

mengetahui jika kinerja tidak sesuai standar dan target, terjadinya penyimpangan, ataupun kelemahan sistem.

5. Pihak-pihak Ekstern

Pihak-pihak ekstern Perusahaan antara lain Pemegang Saham, regulator, pelanggan, serta pihak-pihak ekstern lainnya berkepentingan terhadap keberadaan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang efektif karena akan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

of irregularities, or system weaknesses.

5. External parties

External parties to the Company include shareholders, regulators, customers, and other external parties. They have an interest in the Company's Internal Control System as it encourages the application of good corporate governance principles.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Komponen utama sistem pengendalian internal Perusahaan menurut COSO terdiri dari 5 (lima) unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

Uraian mengenai masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi semua komponen pengendalian yang lain. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern dan mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian yang merupakan prinsip sistem pengendalian intern yang efektif:

a. Integritas dan Etika

Seluruh insan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga para individu *front liner* harus memiliki integritas dan etika dalam melaksanakan peran dan fungsinya terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan harus memiliki kode etik tertulis yang mengatur perilaku semua insan Perusahaan.

Dalam meningkatkan integritas dan etika kerja seluruh insan Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi harus mendorong penciptaan perilaku dan budaya yang menyadari akan pentingnya pengendalian intern. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan kode etik (aturan perilaku).

COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The main component of the Company's internal control system, based on COSO, consists of five main interrelated elements, namely the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

A description of each component follows:

1. Environmental Control

The control environment is the foundation for all other control components. Environmental conditions greatly influence the internal controls effectiveness, and reflects the commitment, behavior and awareness of the Commissioners and Directors in implementing an internal control system.

The control environment constitutes the principle of an effective internal control system:

a. Integrity and Ethics

All Company personnel from the Board of Commissioners and Board of Directors to the front liners must have integrity and ethics in carrying out their roles and functions related to the Company's operational activities. The company must have a written code of ethics that regulates the behavior of all Company personnel.

In improving the integrity and work ethics of all Company personnel, the Board of Commissioners and Board of Directors must encourage the creation of a behavior and culture that is aware of the importance of internal control. To support the achievement of these objectives, the following methods are taken:

- Arrange and set a code of ethics (rules of behavior).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

- Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan keteladanan (*role model*) dalam penerapan aturan perilaku dimaksud.
 - Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan dan prosedur, maupun pelanggaran terhadap aturan perilaku.
 - Memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dalam hal adanya tindakan yang tidak mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional, baik kegiatan utama (*core business*) maupun kegiatan pendukung (*supporting activity*) harus didokumentasikan secara tertulis, disosialisasikan, dipahami, diterapkan dan diawasi penerapannya.
- b. Komitmen terhadap Kompetensi
- Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam Perusahaan.
 - Spesifik dalam menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tertentu dan dituangkan dalam persyaratan (*job requirement*) yang diperlukan.
 - Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu para pekerja mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
 - Mengangkat pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis.
 - Mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses pengangkatan dan penempatan pekerja yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan dan perilakunya.
- c. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
- Kebijakan permasalahan penerimaan karyawan dan *training* SDM yang kompeten.
 - Melakukan perbaikan yang tepat.
 - Kebijakan promosi.
 - Kebijakan pegawai untuk ketaatan terhadap standar etika dan moral.
- d. Struktur Organisasi
- Struktur organisasi disusun dengan memperhatikan dan sesuai dengan strategis yang telah ditetapkan dalam RJPP, yang memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memonitor operasi.
- The Board of Commissioners and Board of Directors must be role models in the application of the intended rules of behavior.
 - Enforce appropriate disciplinary actions for irregularities in policies and procedures, as well as violations of rules of behavior.
 - Provide explanation and accountability in the event of any action that does not follow applicable policies and procedures.
 - To support the control culture, all policies, standards and operational procedures, both core business and supporting activities, must be documented in writing, socialized, understood, applied and monitored.
- b. Commitment to Competence
- Identify and determine the activities needed to complete the tasks and functions of each position in the Company.
 - Specify the competencies needed for each particular activity and set down in the requirements needed.
 - Organize training and mentoring to help workers maintain and improve their competencies.
 - Appoint officials with managerial skills and technical experience.
 - Manage human resources, including the process of appointing and placing workers in accordance with their skills, knowledge and behavior.
- c. Human resource policies and practices
- Policy on recruitment and training issues for competent human resources.
 - Make appropriate improvements.
 - Promotion Policy.
 - Employee policies for compliance with ethical and moral standards.
- d. Organizational structure
- The organization is structured by taking into account and in accordance with the strategy stipulated in the RJPP, which provides a framework for planning, implementing, controlling and monitoring operations.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

- Setiap pegawai harus memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem pengendalian intern.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Wewenang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan Perusahaan.
 - Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait peran dan fungsi mereka.
 - Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab memperhatikan aspek penerapan sistem pengendalian intern.
 - f. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
 - Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab secara aktif dan efektif berperan penting untuk efektivitas pengendalian intern dan mengawasi pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Buku Panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Etika Dewan Komisaris yang telah disepakati.
 - Komite Audit
Komite Audit sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian intern dan ketaatan dalam penerapannya, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan.
 - g. Filosofi dan gaya operasi manajemen
Filosofi dan gaya operasi manajemen sangat berpengaruh terhadap bentuk sistem pengendalian intern Perusahaan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa profil risiko sangat mempengaruhi bentuk pengendalian intern suatu
- Every employee must understand their respective roles and functions in the internal control system.
 - e. Delegation of authority and responsibility
Appropriate delegation of authority and responsibility must be carried out with due regard to the following matters:
 - Authority is given to subordinates in accordance with their level of responsibility in achieving company goals.
 - Employee who are authorized must understand that the authority and responsibility given is related to their roles and functions.
 - Employees who are authorized must understand that the authority and responsibility takes into account aspects of the implementation of the internal control system.
 - f. Participation of the Board of Commissioners and Audit Committee
 - Board of Commissioners
The Board of Commissioners is the main Company body whose duties and responsibilities includes actively and effectively playing an important role in the effectiveness of internal control, and supervises the Company's management and provides advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors under any conditions has the ability to carry out its duties. In carrying out its duties, the Board of Commissioners always adheres to the applicable legislation, the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners and the Board of Directors Board Manual, and the agreed Board of Commissioners Ethics.
 - Audit Committee
The Audit Committee is formed by the Board of Commissioners with the task of assisting them in assessing the internal control system adequacy and compliance, and the adequacy of its reporting and disclosure of financial statements.
 - g. Management's philosophy and operating style
The management philosophy and style has an influence on the form of the Company's internal control system. As explained earlier, the risk profile greatly influences the form of internal control of

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Perusahaan. Hal ini berarti lingkungan pengendalian yang dibentuk oleh manajemen konservatif yang cenderung menghindari risiko akan sangat berbeda dengan lingkungan pengendalian yang dibentuk oleh manajemen yang agresif.

Demikian pula halnya antara manajemen yang menganut filosofi sentralisasi dan desentralisasi juga akan melahirkan lingkungan pengendalian dan bentuk sistem pengendalian intern yang sangat berbeda. Selain itu sifat dan intensitas komunikasi antar level manajemen, kebijakan manajemen, target keuangan maupun target operasi lainnya, juga berpengaruh terhadap bentuk dan sifat lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan komponen yang mengawali proses pengendalian intern secara keseluruhan. Komponen ini juga sangat menentukan bentuk desain sistem pengendalian.

- a. Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah memberikan keyakinan bahwa manajemen dapat mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menggagalkan ataupun menghambat Perusahaan dalam mencapai tujuan. Ketika risiko-risiko ini telah diidentifikasi dan dinilai, pada saat itu manajemen mengetahui bentuk desain sistem pengendalian intern yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

- b. Tujuan Perusahaan harus dikomunikasikan dan didelegasikan ke semua level dan unit kerja, sampai dengan individu, pada saat itu mereka harus memahami dan dapat mengidentifikasi risiko atas masing-masing tujuan, serta merumuskan bentuk desain pengendalian spesifik yang mereka butuhkan.
- c. Risiko timbul dan berubah sesuai dengan perkembangan Perusahaan demikian halnya dengan bentuk sistem pengendalian intern yang dibutuhkan. Dengan demikian untuk terciptanya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif, Perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko.
- d. Secara berkala pengendalian intern perlu harus direviu secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah

a company, meaning that a control environment formed by a conservative management tends to avoid risk, which will be very different from a control environment formed by an aggressive management.

Likewise, the management using centralized and decentralized philosophies will also give birth to very different control environments and internal control systems. In addition, the nature and intensity of communication between management levels, management policies, financial targets and other operating targets also impacts the shape and nature of the control environment.

2. Risk Assessment

Risk assessment is a component at the start of the overall internal control process.

- a. The purpose of the Internal Control System is to provide confidence that management can realize its vision, carry out its mission, and achieve its intended goals.

While risk is the possibility of an event that can prevent or hinder the company in achieving its goals, these risks have been identified and assessed, so that management understood the form of internal control system design needed by the Company.

- b. The purpose of the company's goals must communicated and delegated to all levels and work units and individuals, they must be able to understand and identify the risks of each goal, and formulate the specific control design needed.
- c. Risks arise and change according to the Company's development and form the internal control systems needed. Therefore the Company continuously identifies and assesses risks to ensure a reliable and effective Internal Control System.
- d. Internal control needs to be periodically reviewed in the event there are risks that are not being controlled, both for risks that previously existed

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System

ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan reviu tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap lingkungan dan kondisi serta tampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasi dan organisasi Perusahaan.

- e. Hal utama yang dalam penilaian risiko adalah kesadaran (*awareness*) seluruh pegawai dan Pimpinan Manajemen bahwa setiap kegiatan aktivitas pengelolaan Perusahaan, memiliki risiko yang harus dikelola.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko, ataupun aktivitas yang harus dilakukan jika suatu peristiwa risiko terjadi. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis berupa kebijakan dan prosedur yang harus ditaati dalam melaksanakan arahan manajemen.

Aktivitas pengendalian harus melibatkan semua tingkatan manajemen mulai Direksi sampai dengan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Aktivitas pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian, serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah dipatuhi secara konsisten sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap peran dan fungsi atau kegiatan operasional sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern, aktivitas pengendalian mencakup operasional, pelaporan operasional, pelaporan keuangan, ketaatan, yang terdiri dari lima kategori yaitu:

- a. Pemisahan fungsi yang memadai.
- b. Otorisasi terhadap transaksi dan aktivitas.
- c. Dokumentasi dan catatan yang memadai.
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatannya.
- e. Penilaian yang independen atas kinerja.

Aktivitas pengendalian yang harus ditetapkan pada semua tingkatan manajemen terdiri dari:

- a. Reviu Manajemen (*Top Level Reviews*)
Berdasarkan laporan rutin maupun informasi lain yang diterima, Direksi melakukan reviu untuk menilai

and for emerging risks. The review includes, conducting a continuous evaluation regarding the influence of every environment and condition, as well as the achievement of targets, or effectiveness of internal controls, in the Company's operations and organization.

- e. Risk assessment involves awareness by all employees and Management Leaders that all Company management activities have risks that must be managed.

3. Control Activities

Control activities are needed to prevent the occurrence of a risk event, or activities that must be carried out if a risk event occurs. These control activities are stated in the policies and procedures that must be adhered to in carrying out management directives.

Control activities must involve all levels of management from the Board of Directors to individuals tasked with carrying out daily operations. Control activities include the establishment of control policies and procedures, and the verification processes to ensure that these policies and procedures have been consistently adhered to, as these activities are inseparable from everyday roles and functions or operational activities.

In accordance with the internal control system objectives, control activities include operational, operational reporting, financial reporting, compliance, which includes five categories:

- a. Adequate separation of functions.
- b. Authorization of transactions and activities.
- c. Adequate documentation and records.
- d. Physical control of assets and records.
- e. independent performance assessment.

Activity controls that must be applied at all levels of management consists of:

- a. Top Level Reviews
Based on routine reports and other information received, the Board of Directors' review assesses the

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

pencapaian kinerja Perusahaan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan target/ standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat deviasi negatif atau adanya kinerja yang tidak mencapai karget, harus diketahui penyebabnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

b. *Direct functional of Activity Management*

Reviu lebih dalam dilaksanakan oleh SPI, yaitu:

- Melakukan reviu terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Mutu.
- Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data operasional dan keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi.
- Melakukan reviu terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - Menetapkan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

c. Pengendalian Sistem Informasi

- Perusahaan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan data transaksi dan melaksanakan prosedur otoritas, sesuai prosedur standar.
- Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan dalam mengelola transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

Company's performance achievement compared to the previous period against the set targets / standards. If there is a negative deviation or a performance that does not reach its target, the cause must be known so that the necessary corrective action can be immediately taken.

b. Direct functional of Activity Management

A deeper review is carried out by IAU, namely:

- Reviewing the risk profile report produced by the Risk Management Division and the Quality Division.
- Analyzing operational data, both risk-related data and operational and financial data, to verify details and transaction activities.
- Reviewing the work plans and budgets implementation realization, in order to:
 - Identify the causes of significant irregularities.
 - Establish corrective actions.

c. Information System Control

- The Company verifies the accuracy and completeness of transaction data and implements authority procedures, according to standard procedures.
- Information system control activities can be classified into two criteria, namely general control and application control.
 - General control includes control of data center operations, software procurement and maintenance systems, security access, and the development and maintenance of application systems. This general control is applied to the mainframes, servers, and user workstations, as well as internal-external networks.
 - Application control is applied to the programs used for managing transactions and to ensure that all transactions are correct, accurate and properly authorized. In addition, application control must ensure the availability of an effective audit process and check the correctness of the audit process.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System

d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)

- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin adanya pengamanan fisik terhadap aset Perusahaan.
- Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perusahaan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

4. Informasi dan Komunikasi

Terjaminnya kepastian bahwa Perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien, andal dalam pelaporan keuangan, serta taat terhadap peraturan yang berlaku, komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian intern Perusahaan secara keseluruhan.

Dalam sistem pengendalian intern, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan oleh semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi first line of defense. Demikian halnya dengan komunikasi yang menjamin bahwa semua insan mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam Perusahaan. Informasi yang berkualitas tidak ada maknanya jika tidak dapat diakses dengan baik pada saat diperlukan. Informasi terkait visi, misi, strategi, dan tujuan Perusahaan harus dapat dikomunikasikan (*cascaded*) dengan baik oleh Direksi kepada para *General Manager* Cabang Pelabuhan, EVP, SVP dan VP selaku *second layer* sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama. Hal ini penting karena mereka dengan fungsi dan perannya masing-masing bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap terwujudnya visi, terlaksananya misi, diterapkannya strategi, dan tercapainya tujuan Perusahaan.

Para *second layer management* ini merancang sistem, prosedur dan kebijakan untuk memastikan bahwa mandat yang mereka terima dari Direksi dapat dikomunikasikan (*cascaded*) kepada bawahannya untuk dilaksanakan, serta dapat dikendalikan dan informasinya dapat dikomunikasikan kepada Direksi sebagai *feedback*.

d. Physical Asset Controls

- Physical asset control is carried out to ensure the physical security of Company assets.
- This activity includes asset security, records and limited access to computer programs and data files, and comparisons of the Company assets and liabilities with the values recorded in the controlling records, specifically checking asset value regularly.

4. Information and Communication

The information and communication component is a vital part of the Company's overall internal control system, ensuring certainty that the Company operates effectively and efficiently, is reliable in its financial reporting, and adheres to applicable regulations.

In the internal control system, relevant, accurate and timely information is needed by all lines of management, and individuals in the position of the first line of defense. Similarly to communication ensures that all people have access to information in accordance with their roles and responsibilities in the company. Quality information has no meaning if it is not properly accessed when needed. Information regarding the Company's vision, mission, strategy, and objectives must be cascaded properly by the Board of Directors to GM's Port EVP, SVP and VP at the second level, so they have the same understanding. This is important as they, with their respective functions and roles, are responsible for contributing to the vision's realization, the mission's implementation, the strategies' implementation, and the achievement of the company's goals.

The second level management designed systems, procedures and policies ensure that the mandates received from the Board of Directors can be cascaded down to their subordinates to be implemented, and can be controlled, and the information communicated to the Board of Directors as feedback.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Manajemen akan sangat menyadari bahwa pemantauan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian intern Perusahaan.

Pemantauan, baik yang dilakukan secara rutin (*on going basis*) oleh *first line of defence* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Komisaris, maupun Auditor Internal/Eksternal, dimaksud untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tetap berjalan dengan efektif.

Sistem pengendalian intern yang baik harus dapat memonitor dirinya sendiri. Hal ini berarti, pemantauan yang baik adalah pemantauan yang terus menerus oleh para *first line of defence* yang setiap hari melakukan kegiatan operasional.

Pemantauan yang dilakukan secara teratur lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Selain itu, sistem pengendalian intern Perusahaan akan lebih siap setiap saat, dalam hal pelaksanaan evaluasi dan penilaian oleh pihak independen.

Hal yang sangat penting dalam pemantauan adalah dapat mengetahui kelemahan sistem dan prosedur dalam rangka memperbaiki proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Tindakan perbaikan ini menjadikan aktivitas pemantauan sangat penting karena memberikan nilai tambah atas keberadaan sistem pengendalian intern dalam Perusahaan, tidak hanya sebagai alat untuk pencegahan penyimpangan (*fraud*) tetapi lebih ke arah perbaikan sistem prosedur, penyempurnaan bisnis model, dan peningkatan kinerja.

KESESUAIAN DENGAN THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO)

Hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip COSO pada masing-masing komponen, adalah:

1. Pedoman perilaku (*Code of Conduct*) telah disampaikan ke setiap Insan IPC. Di samping itu, dapat pula diakses melalui *website* IPC, sehingga tidak hanya Insan IPC tetapi *stakeholder* lainnya seperti pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui serta memahami aturan dan perilaku

5. Monitoring

Management is very aware that monitoring the internal control system's effectiveness is a very important component in the overall Company internal control system.

Monitoring, whether carried out on an going basis by the first line of defense and above, as well as through separate evaluations by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Internal/External Auditors, is intended to ensure that the control system runs effectively.

A good internal control system must be able to monitor itself, meaning that good monitoring is continuous monitoring by the first line of defense that carry out operational activities every day.

Regular monitoring makes it easier to identify weaknesses so that corrective actions can be taken immediately. In addition, the Company's internal control system will be better prepared at all times, in terms of conducting evaluations and assessments by independent parties.

The most important thing in monitoring is knowing the systems and procedures weaknesses so that business processes improvements can be more effective and efficient. Monitoring activities become very important as they provide added value to the Company's internal control system, not only as a tool for prevention of fraud, but more towards improving system procedures, improving business models, and improving performance.

CONFORMITY WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO)

The results of the Company's internal control system evaluation shows of principles on each component as follows:

1. The Code of Conduct has been submitted to everyone in IPC. In addition, it can also be accessed through the IPC website, so that not only IPC employees but other stakeholders such as customers, suppliers, and other interested parties can identify and understand the rules and behavior. To encourage compliance with these

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

tersebut. Untuk mendorong ditaatinya pedoman ini, Manajemen menerapkan *whistleblowing system* dengan menunjuk PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai pihak independen yang menerima dan mengelola pelaporan atas pelanggaran kode etik;

2. Independensi Dewan Komisaris terhadap Manajemen ditunjukkan ketika harus memberikan rekomendasi atas usulan bisnis dari Direksi. Semua usulan tidak akan mendapat rekomendasi jika tanpa melalui kajian dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko. Melalui rapat koordinasi rutin dengan SPI, Komisaris melalui Komite Audit meminta laporan pelaksanaan fungsi pengawasan SPI termasuk perkembangan penerapan atas Sistem Pengendalian Internal IPC.
 3. Sejalan dengan transformasi IPC, struktur organisasi mengalami penyempurnaan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan dan strategi IPC dengan tetap memperhatikan prinsip pendelegasian wewenang tanggung jawab dan garis pelaporan yang jelas.
 4. Manajemen IPC memiliki kepedulian tinggi untuk memiliki SDM yang andal dan berkualitas melalui program pendidikan pasca sarjana baik di dalam maupun luar negeri, accelerated development program untuk mempersiapkan pemimpin masa depan sampai dengan perbaikan paket remunerasi untuk menjamin kesejahteraan yang lebih baik.
 5. Dengan SDM yang berintegritas, berkualitas dan andal maka Manajemen lebih yakin dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada second layer. Termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab terhadap berfungsinya Sistem Pengendalian Internal dalam unit dan aktivitasnya.
- guidelines, management implements a whistleblowing system by appointing Deloitte as an independent party that receives and manages reporting for violations of the code of ethics;
2. The Board of Commissioners' independence towards the Management is shown, as it must provide recommendations on business proposals from the Board of Directors. Proposals will not receive a recommendation without going through an Audit Committee or the Risk Management Monitoring Committee review. Through regular coordination meetings with SPI, the Commissioners, through the Audit Committee, will request a report on the implementation of the SPI supervisory function including the development of the IPC Internal Control System.
 3. In line with IPC's transformation, the organizational structure underwent improvements by adjusting to IPC's needs and strategies in line with the principle of clear delegation of authority and clear lines of reporting;
 4. IPC management has a high level of concern regarding having reliable and quality human resources through postgraduate education programs both at home and abroad, and accelerated development programs to prepare future leaders with improved remuneration packages to ensure a better welfare.
 5. Having HR with integrity, quality and reliability, Management is more confident in delegating its authority and responsibility to the second layer. This includes responsibility for the Internal Control System in the units and activities.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2018

IPC secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal IPC serta konsistensi implementasinya. Jika hasil evaluasi menyatakan adanya prosedur yang memiliki kecenderungan untuk dapat menghambat kelancaran kualitas pelayanan, maka IPC akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ini.

Pemeriksaan khusus tidak hanya dilakukan terhadap Kantor Pusat, namun juga dilakukan pada sejumlah Cabang Pelabuhan. IPC juga menindaklanjuti temuan dari sejumlah auditor seperti BPKP, KAP, dan SPI, serta terus memonitor tindak lanjut pelaksanaan rekomendasinya, baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan.

Selama 2018, seluruh Sistem Pengendalian Internal IPC terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPC telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

2018 INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS EVALUATION

IPC routinely evaluates the Internal Control System's effectiveness. This evaluation aims to assess the reliability of IPC's internal control system as well as its consistency of implementation. If the evaluation results indicate a procedure that has a tendency to hinder the smoothness of service quality, then IPC will take the necessary action to improve this system.

Special inspections are not only done at the Head Office, but also at a number of Port Branches. IPC also follows-up the findings of a number of auditors such as BPKP, PAF, and IAU, and continues to monitor the follow-up of its recommendations, both at the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.

Throughout 2018, the entire IPC Internal Control System has proven itself to be quite effective. This shows that IPC has complied with internal control elements that have been prepared.

PERKARA PENTING

Legal Issues

Sepanjang tahun 2018, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

During 2018, the number of civil and criminal legal issues that have been completed (which have permanent legal force), and those still in the process of being resolved are shown in the following table.

Tabel Perkara Penting

Legal Issues

No.	Perkara Penting Important Case	Jumlah Number		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (has fixed legal force)	4	0	0
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	5	2	0
Total		9	2	0

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

LEGAL ISSUES FACING THE COMPANY

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan Principal Case / Claim	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Influence on the Company	Sanksi Administrasi Administrative Sanctions
Hukum Pidana Criminal Law				
1.	Kantor Pusat Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane tahun 2011 Head Office Case of alleged corruption in the procurement of 10 (ten) mobile cranes in 2011.	1. Pengadilan Tipikor: kalah (Sdr. Haryadi Budi Kuncoro dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda 50 juta rupiah). 2. Pengadilan Tinggi Tipikor: kalah (menguatkan putusan Pengadilan Tipikor). 3. Mahkamah Agung: berdasarkan informasi dari situs kepaniteraan Mahkamah Agung diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 Mahkamah Agung telah menolak perbaikan permohonan kasasi yang diajukan oleh Haryadi Budi Kuncoro, namun salinan putusan belum diterima oleh kuasa hukum sehingga belum diketahui isi putusan selengkapnya. 1. Corruption Court: defeated (Haryadi Budi Kuncoro was found guilty and sentenced to prison term of 1 year 4 months and a fine of 50 million rupiah). 2. The Corruption Court High Court: defeated (upheld the Corruption Court decision). 3. Supreme Court: based on information from the Supreme Court website, it is known that on February 7, 2018 the Supreme Court rejected the appeal filed by Haryadi Budi Kuncoro, but the copy of the decision has not been received by the attorney so that the full verdict is unknown.	Tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Did not affect the company's financial condition	Tidak ada None

PERKARA PENTING
 Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
2.	<p>Pelabuhan Panjang</p> <p>Dugaan tindak pidana lingkungan kenaikan ambang baku mutu air laut di perairan Teluk Lampung yang diduga diabaikan oleh pekerjaan pengerukan alur pelayanan Pelabuhan Panjang, dimana diduga tidak dilakukan pengawasan oleh pekerja selaku Manager Teknik Cabang Pelabuhan Panjang terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.</p> <p>Panjang Port</p> <p>The alleged environmental crime increased the seawater quality standards threshold in the Lampung Bay waters, allegedly due to negligence when dredging the Panjang Port service line, where it was alleged the Technical Manager did not supervise the work carried out by workers at the Panjang Port Branch.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri: kalah (Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp2 miliar). 2. Pengadilan Tinggi: kalah (Terdakwa dinyatakan bersalah namun dengan pengurangan masa tahanan menjadi 1 tahun dan denda yang harus dibayar menjadi Rp1 miliar). 3. Mahkamah Agung: sesuai informasi dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung, permohonan kasasi telah ditolak namun salinan putusan resmi belum diterima. <ol style="list-style-type: none"> 1. District Court: defeated (Defendant was found guilty and sentenced to imprisonment for 2 years and a fine of Rp.2 billion). 2. High Court: defeated (Defendant was found guilty but with a reduction in detention period to 1 year and a fine to be paid of Rp1 billion). 3. Supreme Court: according to information from the Registrar's Office of the Supreme Court, a request for cassation has been rejected but a copy of the official decision has not been received. 	<p>Tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Did not affect the company's financial condition</p>	<p>Tidak ada None</p>

PERKARA PENTING
 Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
Hukum Perdata Tanah di Pengadilan <i>Land Civil Law in Court</i>				
3.	<p>Pelabuhan Teluk Bayur</p> <p>Gugatan Sdr. Bakri Abdullah terkait ganti rugi atas pemutusan kontrak penggunaan lahan di Jalan By Pass Padang seluas 5.000 dan 10.000 m2 antara Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera Barat yang telah diklaim telah menimbulkan kerugian kepada penggugat.</p> <p>Teluk Bayur Port</p> <p>Bakri Abdullah lawsuit related to compensation for the termination of the land use contract on Padang By Pass Road covering an area of 5,000 and 10,000 m2 between the Teluk Bayur Port Branch and the West Sumatra Puskoppolda which claimed to have caused losses to the plaintiff.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri: menguatkan perusahaan (perkara nebis in idem). Pengadilan Tinggi: kalah (memerintahkan agar perkara diperiksa kembali di PN). Pengadilan Negeri: menang (gugatan Bakri Abdullah ditolak, gugatan rekompensi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dikabulkan sehingga Pengadilan memerintahkan Bakri Abdullah membayar Rp16,5 miliar). Pengadilan Tinggi: menang (perkara nebis in idem). Kasasi: permohonan kasasi Bakri Abdullah dan permohonan kasasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ditolak. Telah diterbitkan SKK Litigasi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk proses di Pengadilan Kelas I A Padang guna eksekusi dan pengambil alihan lahan. <ol style="list-style-type: none"> District Court: strengthened the company (case of nebis in idem). High Court: loses (orders that cases be re-examined in PN). District Court: won (Bakri Abdullah's claim was rejected, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) claim for reconciliation was granted so that the Court ordered Bakri Abdullah to pay Rp. 16.5 billion). High Court: won (case of nebis in idem). Cassation: Bakri Abdullah's cassation application and appeal request from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) rejected. SKK Litigation has been issued to the State Attorney at the West Sumatra High Prosecutor's Office for proceedings in the Padang Class I A Court for the execution and takeover of land. 	<p>Perusahaan kehilangan potensi pendapatan atas pemanfaatan lahan seluas 10.000 M2 dan 5.000M2 apabila belum dieksekusi terhadap lahan tersebut.</p> <p>The company loses potential revenue for the use of 10,000M2 and 5,000M2 of land if it has not been executed on the land.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

PERKARA PENTING

Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
4.	<p>Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>Permasalahan sewa menyewa lahan yang timbul karena CV Sinar Mas menjual bangunan milik Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Indonesia Oriental Lines yang kemudian dijual kepada PT Bumi Jasa Internasional (PT BJI) tanpa sepengetahuan dan seijin PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>Tanjung Priok port</p> <p>The land leasing problem arises because CV Sinar Mas sold buildings belonging to the Tanjung Priok Port Concession Agency to PT Indonesia Oriental Lines which were then sold to PT Bumi Jasa International (PT BJI) without the knowledge and permission of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah menunjuk Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai kuasa. Telah ada Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.294/PDT/2018/PT.DKI. PT BJI telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dimana Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Februari 2019 dan didapat informasi bahwa berkas-berkas Kasasi (Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi) telah lengkap dan siap dikirim dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung. <ol style="list-style-type: none"> The Tanjung Priok Port Branch has appointed the North Jakarta District Attorney General's Attorney as the attorney. There has been a Notice of Relation for the Contents of the Appeal Decision from the DKI Jakarta High Court No.294/PDT/2018 / PT.DKI. PT BJI has taken legal action to appeal to the Supreme Court where the Tanjung Priok Port Branch has submitted a Counter Memory of Cassation on October 19, 2018. The Tanjung Priok Port Branch coordinated with the North Jakarta District Court on February 13, 2019 and obtained information that the Cassation files (Memory of Cassation and Counter Memory of Cassation) have been complete and ready to be sent from the District Court to the Supreme Court. 	<p>Perusahaan kehilangan potensi pendapatan atas pemanfaatan lahan apabila Perusahaan kalah dalam proses di Pengadilan.</p> <p>The company loses potential revenue from land use if the Company loses in court.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

PERKARA PENTING
 Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
5.	<p>Pelabuhan Sunda Kelapa</p> <p>Gugatan Sdr. Wiryanto Khong (PT Carvil) atas wanprestasi terhadap perjanjian penyerahan penggunaan bagian tanah HPL dengan pemberian HGB Nomor: HK.566/1/5/C-Pska-93 antara Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dengan PT Putra Jaya Giri.</p> <p>Sunda Kelapa Port</p> <p>Wiryanto Khong (PT Carvil) lawsuit for the default on agreement to surrender the use of HPL land with the granting of HGB Number: HK.566/1/5/C-Pska-93 between the Sunda Kelapa Port Branch and PT Putra Jaya Giri.</p>	<p>Perkara 294: Pengadilan Negeri: menang. Salinan putusan belum diterima. Dimungkinkan pihak lawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ditangani oleh Kantor Advokat Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <p>Case 294: District Court: won. A copy of the decision has not been received. It is possible for the opposing party will appeal to the DKI Jakarta High Court. Handled by Advocate Office Widjojanto Sonhadji & Associates.</p>	<p>Perusahaan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik</p> <p>The company has the potential to receive revenue from the intended use of the land if the land has been physically controlled</p>	<p>Tidak ada None</p>
6.	<p>Pelabuhan Sunda Kelapa</p> <p>Hak Guna Bangunan atas nama PT Artha Sempana di atas HPL N0.7/Ancol melebihi jangka waktu perjanjian dengan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa.</p> <p>Sunda Kelapa Port</p> <p>Hak Guna Bangunan on behalf of PT Artha Sempana over HPL N0.7/Ancol exceeding the term of the agreement with the Sunda Kelapa Port Branch.</p>	<p>Pengadilan tinggi Jakarta Utara telah memutuskan bahwa gugatan PT Artha Sempana tidak dapat diterima sehingga perkara dimenangkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>The North Jakarta High Court has ruled that the lawsuit of PT Artha Sempana was unacceptable so that the case was won by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>	<p>Perusahaan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik</p> <p>The company has the potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled</p>	<p>Tidak ada None</p>

PERKARA PENTING
Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
7.	<p>Pelabuhan Palembang</p> <p>Gugatan PT Resources Alam Indonesia terkait pembatalan Sertipikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diklaim tumpang tindih dengan Sertipikat HGB No.100/Sei Selincah dan HGB No.101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya).</p> <p>Palembang Port</p> <p>PT Resources Alam Indonesia lawsuit related to cancellation of HPL No.91/Selincah River Certificate on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which claimed to overlap with HGB No.100/Sei Selincah Certificate and HGB No.101/Sei Selincah on behalf of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which has expired.</p>	<p>Perkara Lama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri: kalah. 2. Pengadilan Tinggi: kalah. 3. Mahkamah Agung: menang. 4. Permasalahan Selesai. <p>Tahap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ditangani oleh Kantor Advokat Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <p>Tahap Kasasi di Mahkamah Agung ditangani oleh Kantor Advokat Rahmad Irwan & Partners.</p> <p>Perkara Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditangani oleh Kantor Advokat Widjojanto Sonhadji & Associates. 2. Pengadilan Negeri: kalah. 3. Pengadilan Tinggi: kalah 4. Mahkamah Agung: sedang proses. <p>Old Case:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. District Court: loses. 2. High Court: loses. 3. Supreme Court: win. 4. Issue Completed. <p>The stages of the District Court and the High Court were handled by the Advocate Office Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <p>The Cassation Stage at the Supreme Court was handled by Advocate Office Rahmad Irwan & Partners.</p> <p>New Case:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Treated by Advocate Office Widjojanto Sonhadji & Associates. 2. District Court: loses. 3. High Court: loses 4. Supreme Court: in process. 	<p>Perusahaan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik</p> <p>The company has the potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled</p>	<p>Tidak ada None</p>

PERKARA PENTING
 Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
8.	<p>Pelabuhan Banten</p> <p>Gugatan Ir Nuraini Udaya dkk terkait berada tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Bojonegara. Perkara sudah diputus dalam tingkat Kasasi (inkracht) yang pada pokoknya alas hak kepemilikan para penggugat dinyatakan sah sedangkan HPL No 1 dan 2 atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga melemahkan posisi hukum Perusahaan dan berpotensi kehilangan bagian HPL seluas 22 Ha.</p> <p>Banten Port</p> <p>Ir Nuraini Udaya's lawsuit related to the overlapping with HPL on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in Bojonegara Port. The case has been decided at the Cassation (inkracht) level, which in principle means the plaintiffs ownership rights are declared valid while HPL No. 1 and 2 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) do not have binding legal force, thus weakening the legal position of the Company and potentially losing the HPL portion covering 22 hectares.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri: kalah. 2. Pengadilan Tinggi: kalah. 3. Mahkamah Agung: kalah. 4. Peninjauan Kembali: telah ditempuh upaya Peninjauan Kembali. <ol style="list-style-type: none"> 1. District Court: loses. 2. High Court: loses. 3. Supreme Court: loses. 4. Review: PK efforts have been taken. 	<p>Perusahaan akan kehilangan aset tanah seluas 22 Ha apabila pada Upaya Peninjauan Kembali, kalah.</p> <p>The company will lose 22 hectares of land assets if the Judicial Review is lost.</p>	<p>Tidak ada None</p>

PERKARA PENTING

Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
Hukum Perdata Non Tanah di Pengadilan <i>Non-Land Civil Law in Court</i>				
9.	<p>Kantor Pusat</p> <p>Serikat Pekerja PT JICT menggugat pembatalan perpanjangan perjanjian kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT di Pelabuhan Tanjung Priok karena dianggap merugikan para pekerja PT JICT.</p> <p>Head Office</p> <p>Serikat Pekerja PT JICT sued for the cancellation of the cooperation agreement extension between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT at the Tanjung Priok Port as it was considered detrimental to PT JICT workers.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri : menang. Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Maret 2018 telah menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara karena perkara merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Pemberitahuan pernyataan banding dari Serikat Pekerja PT JICT telah diterima pada tanggal 12 Juli 2018. Penanganan perkara di tingkat banding sedang dilakukan. <ol style="list-style-type: none"> District Court: wins. The District Court on March 1, 2018 has stated that it is not authorized to examine cases as the case comes under the authority of the Industrial Relations Court. Notification of the appeal statement from Serikat Pekerja PT JICT has been received on 12 July 2018. Case handling at the appeal level is being carried out. 	<p>Perpanjangan perjanjian kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi dibatalkan.</p> <p>Extension of the cooperation agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT at Tanjung Priok Port has the potential to be canceled.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

PERKARA PENTING
 Legal Issues

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case / Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian <i>Nominal of Demands and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
10.	<p>Kantor Pusat</p> <p>Perkara di Pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.</p> <p>Head Office</p> <p>Jakarta Tax Court case at the Appeal stage based on the Director General of Tax Decree No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 concerning Taxpayer Objection for Paying Income Tax Underpayments.</p>	<p>Sedang dalam proses di Pengadilan Pajak Jakarta.</p> <p>In the process at the Jakarta Tax Court.</p>	<p>Akan ada pembayaran atas pajak apabila kalah dalam putusan pengadilan tersebut</p> <p>There will be payments for taxes if the court decision is lost</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL ISSUES FACED BY THE SERVING BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

There were no legal issues faced by the incumbent Board of Commissioners and Board of Directors.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Anak Perusahaan.

LEGAL ISSUES FACED BY THE SUBSIDIARIES

There are no legal issues faced by the Subsidiaries.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Social and/or Political Funding

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas bina lingkungan berdasarkan sektor penyaluran selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SOCIAL ACTIVITIES FUNDING

Costs incurred in community development activities based on distribution sector during 2018 were as follows:

Uraian <i>Description</i>	Nominal (Rp) <i>Nominal (Rp)</i>
Bencana Alam Natural disasters	437.820.000
Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and / or Training	3.529.951.000
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	744.554.000
Pengembangan prasarana dan sarana umum Development of public infrastructure and facilities	4.237.894.000
Sarana Ibadah Places of worship	7.029.136.000
Pelestarian Alam Nature Conservation	611.719.000
Lainnya Others	-
Pengentasan Kemiskinan Poverty Alleviation	2.845.887.000
BUMN Peduli SOE Care	-
BUMN Peduli Pulau-Pulau Terbatas SOE Care for the Islands	-
Uang Muka Bina Lingkungan Environmental Development Advances	-
Jumlah Program Bina Lingkungan Total Community Development Programs	19.436.961.000

PEMBERIAN DANA KEGIATAN POLITIK

IPC memiliki kebijakan terkait dengan pemberian dana kegiatan politik yang tertuang dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia. IPC tidak diperkenankan untuk mendukung dan memberikan donasi untuk kepentingan politik.

POLITICAL FUNDING

IPC has policies related to the provision of funds for political activities in the PT Pelabuhan Indonesia Code of Ethics. IPC is not permitted to support and donate for political purposes.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Information and Company Data

IPC menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi material dan relevan mengenai IPC yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. IPC percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para Pemangku Kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan IPC.

Untuk itu, IPC membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha IPC melalui:

1. *Website* : www.indonesiaport.co.id,
Website Perseroan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Laporan Tahunan : www.indonesiaport.co.id/sub/annual-report.html
Pada *website* Perseroan terdapat akses informasi Laporan Tahunan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Media Sosial :
 - a. Twitter : @indonesiaport
 - b. Facebook : IndonesiaPort
 - c. Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC
 - d. Instagram : @indonesiaportcorp
4. Portal BUMN : <http://bumn.go.id/pelindo2/application>

Khusus untuk pegawai IPC, informasi mengenai Perusahaan dapat diakses pada portal internal yaitu *e-office* IPC dan majalah *IPC News*. Perusahaan juga memberikan *CEO Letter*, yaitu penyampaian informasi dari Direktur Utama kepada seluruh pegawai melalui *email corporate* masing-masing pegawai. *CEO Letter* disebarakan kepada seluruh pegawai 1 (satu) bulan sekali.

Selain itu, publik dapat mengakses informasi dengan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

corp_sec@indonesiaport.co.id
Facebook : Pelabuhan Indonesia II /IndonesiaPort
Twitter : @indonesiaport
Instagram : @indonesiaportcorp
Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC

IPC guarantees transparency in implementing decision-making processes and conveying materials and relevant information on IPC that are accessible to Stakeholders in accordance with their rights. IPC believes that the dissemination of information to all Stakeholders is an essential part of the realization of the internal and external information transparency principles, which are expected to assist, maintain and enhance the stakeholders' knowledge, understanding and positive perceptions of IPC policies and activities.

To that end, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) provides the widest access to the public on the acquisition of information regarding identity and track record, business development, products and services offered, and latest news related to IPC business through:

1. *Website* : www.indonesiaport.co.id
The Company's website is presented in Indonesian and English.
2. Annual Report : www.indonesiaport.co.id/sub/annual-report.html
Indonesian and English Annual Report can be accessed in the Company's website.
3. Media Sosial :
 - a. Twitter : @indonesiaport
 - b. Facebook : IndonesiaPort
 - c. Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC
 - d. Instagram : @indonesiaportcorp
4. Portal BUMN : <http://bumn.go.id/pelindo2/application>

Especially for IPC employees, information about the Company can be accessed on the internal portal of *e-office* IPC and *IPC News* magazine. The Company also provides a *CEO Letter*, which is the delivery of information from the President Director to all employees through corporate email of each employee. A *CEO Letter* is distributed to all employees once a month.

In addition, the public can access information by contacting:

Corporate Secretary

corp_sec@indonesiaport.co.id
Facebook : Pelabuhan Indonesia II /IndonesiaPort
Twitter : @indonesiaport
Instagram : @indonesiaportcorp
Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Information and Company Data

PRESS RELEASES

SIARAN PERS

NO	TANGGAL DATE	JUDUL SIARAN PERS PRESS RELEASES
1	10 Januari 2018 January 10, 2018	Penanganan Aset Tanah, IPC Jalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Land Asset Management, IPC Collaborates with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning
2	17 Januari 2018 January 17, 2018	Kembangkan Pelabuhan Panjang, IPC Gandeng Pemprov Lampung Develop Panjang Port, IPC Collaborates with Lampung Provincial Government
3	23 Januari 2018 January 23, 2018	<i>Standby Statement</i> - Layanan Operasional IPC Berjalan Lancar Standby Statement - IPC Operational Services Run Smoothly
4	29 Januari 2018 January 29, 2018	Awali Tahun 2018 IPC Gelar Rapat Kerja Nasional Beginning of 2018 IPC Holds a National Work Meeting
5	5 Februari 2018 February 5, 2018	Catatkan Peningkatan Pendapatan Usaha IPC Mantap Jalani 2018 Record Increase in Operating Income of IPC 2018
6	19 Februari 2018 February 19, 2018	IPC Melalui Anak Usahanya Resmikan <i>Billing Center</i> di Pelabuhan Tanjung Priok IPC Through Its Subsidiaries Inaugurates Billing Center at Tanjung Priok Port
7	23 Februari 2018 February 23, 2018	IPC Awali Pembangunan Terminal Kijing dengan Melakukan Pembayaran Ganti Rugi Lahan IPC Begins Construction of Kijing Terminal by Paying Land Compensation
8	7 Maret 2018 March 7, 2018	Peringati Bulan K3, IPC Kantor Pusat Selenggarakan Kegiatan Apel Kesadaran Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Commemorating OHS Month, IPC Head Office Holds Occupational Health and Safety Culture Awareness Activity
9	12 Maret 2018 March 12, 2018	NPCT1 Berhasil Mencatatkan Akumulasi <i>Throughput</i> Satu Juta Teus NPCT1 Successfully Records One Million Containers
10	2 April 2018 April 2, 2018	<i>Sharing Session</i> Pelayanan Kepelabuhanan di Lingkungan IPC Group Port Services Session Sharing in IPC Group
11	6 April 2018 April 6, 2018	IPC Tandatangani MOU dengan ASKRINDO IPC Signs MOU with ASKRINDO
12	11 April 2018 April 11, 2018	IPC Canangkan Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak IPC Development of Pontianak Port Kijing Terminal
13	11 April 2018 April 11, 2018	Mengakhiri Triwulan I 2018, IPC Bukukan Peningkatan Pendapatan Usaha For the first quarter of 2018, IPC posts an increase in business income
14	20 April 2018 April 20, 2018	Sambut Hari Kartini, IPC Salurkan Paket Alat Tulis untuk 1.000 Pelajar SD di Sekitar Pelabuhan Welcoming Kartini Day, IPC Distributes Stationery Packages for 1,000 Elementary Students Around the Ports
15	8 Mei 2018 May 8, 2018	IPC Dukung Pengembangan Ekspor Nasional melalui Digitalisasi Pelabuhan IPC Supports National Export Development through Port Digitization
16	10 Mei 2018 May 10, 2018	Direktur Utama IPC Wakil Indonesia Bicara Pelabuhan di IAPH Baku 2018 World Port Conference President Director of IPC Represents Indonesia Ports Talk at IAPH Baku 2018 World Port Conference
17	15 Mei 2018 May 15, 2018	Pelepasan Ekspor dan Peninjauan Infrastruktur Pelabuhan oleh Presiden RI di Tanjung Priok Release of Exports and Review of Port Infrastructure by the Republic of Indonesia President at Tanjung Priok
18	17 Mei 2018 May 17, 2018	IPC Tandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerja sama Sinergi Antar BUMN IPC Signs Memorandum of Understanding and Synergy between SOEs Cooperation Agreement
19	30 Mei 2018 May 30, 2018	Optimistis Investor Tanggapi Positif Pelepasan Saham PT IKT, Tbk Optimistic Investors Respond to PT IKT, Tbk Shares Release

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Information and Company Data

NO	TANGGAL DATE	JUDUL SIARAN PERS PRESS RELEASES
20	31 Mei 2018 May 31, 2018	IPC Tandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan BNN IPC Signs Memorandum of Understanding and Synergy between SOEs Cooperation Agreement
21	31 Mei 2018 May 31, 2018	Semarakkan Ramadhan, IPC Siapkan Paket Umroh untuk Juara MTQ Ramadhan, IPC Prepares Umrah Packages for MTQ Champions
22	31 Mei 2018 May 31, 2018	Sinergi IPC dan Kejaksaan Optimalikan Fungsi Pelabuhan dalam Perdagangan IPC and Prosecutor's Office Synergy to Optimize the Function of Ports in Trade
23	4 Juni 2018 June 4, 2018	IPC Serahkan Santunan Lebaran untuk 1000 Anak Yatim di Jabotabek IPC donates Lebaran Benefits to 1000 Orphans in Jabotabek
24	6 Juni 2018 June 6, 2018	IPC Gelar Safari Ramadhan sebagai Ajang Berbagi IPC Holds Ramadan Safari as a Sharing Event
25	7 Juni 2018 June 7, 2018	Mudik Gratis Bersama IPC Group, Ribuan Pemudik Diberangkatkan ke 17 Kota Tujuan Jawa dan Sumatera Free Homecoming Together with IPC Group, Thousands of Homecomers Departed to 17 Destination Cities in Java and Sumatera
26	8 Juni 2018 June 8, 2018	Sinergi IPC dan Pelindo I Kerjasamakan Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar Synergy of IPC and Pelindo I in the Management of Batu Ampar Port
27	8 Juni 2018 June 8, 2018	IPC Bukukan Pendapatan Usaha Rp 3,59 Triliun pada Kuartal Pertama 2018 IPC Records Operating Revenues of Rp 3.59 Trillion in the First Quarter of 2018
28	4 Juli 2018 July 4, 2018	Dukung Program Kebersihan Pemrov DKI Jakarta, IPC Beri Bantuan Kapal Pembersih Sampah Supporting DKI Jakarta Provincial Government's Clean-up Program, IPC Gives Aid for Waste Cleaning Boats
29	6 Juli 2018 July 6, 2018	IPC Lakukan Uji Coba Gate Pass System IPC Tests the Gate Pass System
30	9 Juli 2018 July 9, 2018	Resmi Melantai di BEI, IPC Apresiasi Antusiasme Investor Officially on the IDX, IPC Appreciates Investor Enthusiasm
31	12 Juli 2018 July 12, 2018	Konsesi Ditandatangani, IPC Bersiap Realisasikan Pembangunan Terminal Kijing Concession Signed, IPC Prepares to Realize Construction of Kijing Terminal
32	15 Juli 2018 July 15, 2018	IPC Tunjuk PT IPC TPK untuk Kelola Terminal 2 dan Terminal 3 Tanjung Priok IPC Appoints PT IPC TPK to Manage Terminal 2 and Terminal 3 of Tanjung Priok
33	31 Juli 2018 July 31, 2018	IPC Terapkan Enam Fitur Digital untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Pelanggan IPC Apply Six Digital Features to Improve Services to Customers
34	1 Agustus 2018 August 1, 2018	IPC dan Balitbang ESDM Tandatangani MoU untuk Kembangkan Energi Terbarukan IPC and ESDM Balitbang Sign MoU to Develop Renewable Energy
35	7 Agustus 2018 August 7, 2018	Dukung IPC, BNI Salurkan Port Service Financing dan IPC Smart Card Support IPC, BNI Distributes Port Service Financing and IPC Smart Card
36	8 Agustus 2018 August 8, 2018	IPC Bantu Pemasangan Listrik Gratis untuk 2.000 Keluarga Tidak Mampu di Bogor IPC Helps Install Free Electricity for 2,000 Underprivileged Families in Bogor
37	8 Agustus 2018 August 8, 2018	IPC Resmi Membuka Program Siswa Mengenal Nusantara di Kepulauan Bangka Belitung IPC Officially Opens the Students Know the Archipelago Program in the Bangka Belitung Islands
38	9 Agustus 2018 August 9, 2018	IPC Resmikan IPC Corporate University untuk Pengembangan SDM IPC Inaugurates IPC Corporate University for HR Development
39	14 Agustus 2018 August 14, 2018	Tanamkan Cinta Tanah Air, IPC Fasilitasi Program Siswa Mengenal Nusantara di Bangka Belitung Cultivating Cinta Tanah Air, IPC Facilitates the Know Your Archipelago Student Program in Bangka Belitung
40	16 Agustus 2018 August 16, 2018	IPC Catat Laba Bersih 1,21 Triliun Rupiah pada Semester I 2018 IPC Records Net Profit of 1.21 Trillion Rupiah in the First Semester 2018

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Information and Company Data

NO	TANGGAL DATE	JUDUL SIARAN PERS PRESS RELEASES
41	17 Agustus 2018 August 17, 2018	IPC Peringati Hari Kemerdekaan RI Ke-73 di Belitung IPC Commemorates the 73rd RI Independence Day in Belitung
42	21 Agustus 2018 August 21, 2018	Sambut Idul Adha, IPC Sebar 316 Ekor Hewan Qurban untuk Warga Sekitar Pelabuhan Welcoming Eid Al-Adha, IPC donates 316 Sacrificial Animals to Residents Around the Port
43	4 September 2018 September 4, 2018	Satu Lagi, Terminal Internasional di IPC Group Aplikasikan TPS Online One More, International Terminal in IPC Group Online TPS
44	5 September 2018 September 5, 2018	Ekspor Toyota Capai 1,3 Juta Unit, IPC Buktikan Siap Fasilitas Ekspor Industri Otomotif Nasional Toyota Exports Reach 1.3 Million Units, IPC Proves Ready to Facilitate National Automotive Industry Exports
45	17 September 2018 September 17, 2018	Delapan Cabang dan Empat Anak Perusahaan IPC Raih Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Eight Branches and Four IPC Subsidiaries Win Excellent Service Award in the Transportation Sector
46	20 September 2018 September 20, 2018	IPC Apresiasi Penugasan Baru Direktur Keuangan oleh Kementerian BUMN IPC Appreciation on the New Finance Director by the Ministry of BUMN
47	2 Oktober 2018 October 2, 2018	IPC Uji Coba <i>Buffer Area</i> Pelabuhan Tanjung Priok IPC Trial Buffer of Tanjung Priok Port Area
48	11 Oktober 2018 October 11, 2018	IPC Group Salurkan Bantuan Logistik ke Sulawesi Tengah IPC Group Distributes Logistics Assistance to Central Sulawesi
49	18 Oktober 2018 October 18, 2018	IPC Raih 4 Penghargaan Terbaik di Ajang Data GovAI 2018 IPC Wins 4 Best Awards at the Data GovAI 2018 Event
50	29 Oktober 2018 October 29, 2018	IPC Pastikan Dua Stafnya Ikut Dalam Penerbangan Lion Air Yang Jatuh di Perairan Tanjung Karawang Two of IPC Staff on Flight of Lion Air That Crashed in Tanjung Karawang Waters
51	30 Oktober 2018 October 30, 2018	IPC Kerahkan Dua Kapal Untuk Pencarian Korban Lion Air IPC Deploys Two Ships for Lion Air Search
52	7 November 2018 November 7, 2018	Kedua Stafnya Ditemukan, IPC Serahkan Santunan Kepada Pihak Keluarga IPC Gives Compensation to Families of IPC Staff on Flight
53	8 November 2018 November 8, 2018	Rayakan HUT Ke 26, IPC Laksanakan Program IPC Mengajar Celebrate 26th HUT, IPC Conducts the IPC Teaching Program
54	9 November 2018 November 9, 2018	IPC Siap Jalin Kerjasama dengan Otoritas Industri Pelabuhan Meksiko IPC Ready to Collaborate with the Mexican Port Industry Authority
55	14 November 2018 November 14, 2018	Semarak Program IPC Mengajar di Bumi Sriwijaya IPC Teaching Program in Bumi Sriwijaya
56	15 November 2018 November 15, 2018	Promosikan Pelabuhan, IPC Meriahkan Program Direksi Mengajar di Bumi Khatulistiwa Promote the Port, IPC Enlivens the Directors Teaching Program on the Equator
57	15 November 2018 November 15, 2018	Kenalkan Dunia Maritim dan Kepelabuhanan, Dirut IPC Mengajar di Serambi Mekkah Introducing the Maritime and Port World, IPC President Director Teaching at Serambi Mekkah
58	19 November 2018 November 19, 2018	Tingkatkan Efisiensi, Laba IPC Meningkat 20% di Triwulan III 2018 Increase Efficiency, IPC Profit Increases 20% in Quarter III 2018
59	27 November 2018 November 27, 2018	Widyaka Nusapati Menjabat Direktur Keuangan IPC Yang Baru Widyaka Nusapati appointed as Director of Finance at IPC
60	28 November 2018 November 28, 2018	Berbagi Pengetahuan Mengenai Transformasi Pelabuhan, IPC Meriahkan Program Mengajar di Bandar Lampung Knowledge Sharing about Port Transformation, IPC Enlivens the Teaching Program in Bandar Lampung

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
 Access to Information and Company Data

NO	TANGGAL DATE	JUDUL SIARAN PERS PRESS RELEASES
61	29 November 2018 November 29, 2018	Tingkatkan Pelayanan, IPC Dukung PTP Lakukan Kerjasama Dengan KBN Improve Services, IPC Supports PTP to Collaborate with KBN
62	29 November 2018 November 29, 2018	Berbagi Ilmu, IPC Perluas Pengetahuan 700 Mahasiswa Cirebon Knowledge Sharing, IPC Expands Knowledge of 700 Cirebon Students
63	4 Desember 2018 December 4, 2018	Perkaya Khasanah Kemaritiman, IPC Luncurkan Museum Maritim Indonesia Enriching Maritime Affairs, IPC Launches Indonesian Maritime Museum
64	7 Desember 2018 December 7, 2018	Museum Maritim Indonesia Jadi Pusat Edukasi Pelabuhan Era <i>Digital</i> The Indonesian Maritime Museum Becomes a Digital Age Port Education Center
65	10 Desember 2018 December 10, 2018	HUT Ke-26, IPC Berikan Penghargaan kepada Pelanggan Terbaik dan Jurnalis 26th HUT, IPC Awards for the Best Customers and Journalists
66	12 Desember 2018 December 12, 2018	Di Penghujung 2018, IPC Menangkan Dua Penghargaan Internasional At the end of 2018, IPC Wins Two International Awards
67	14 Desember 2018 December 14, 2018	Maju Bersama Era Baru Pelabuhan Indonesia, IPC Jalin Kerjasama dengan Pelindo III dan IV Forward With the New Era of Indonesian Ports, IPC Collaborates with Pelindo III and IV
68	14 Desember 2018 December 14, 2018	Pelindo Gelar <i>Charity Run</i> 2018 di Surabaya Pelindo Holds 2018 Charity Run in Surabaya

BULETIN

Selama tahun 2018, IPC telah menerbitkan buletin IPC News sebanyak 11 (sebelas) kali dengan mencetak 1.000 (seribu) eksemplar yang disebarakan ke Cabang, Anak Perusahaan serta Pengguna Jasa. Adapun daftar buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

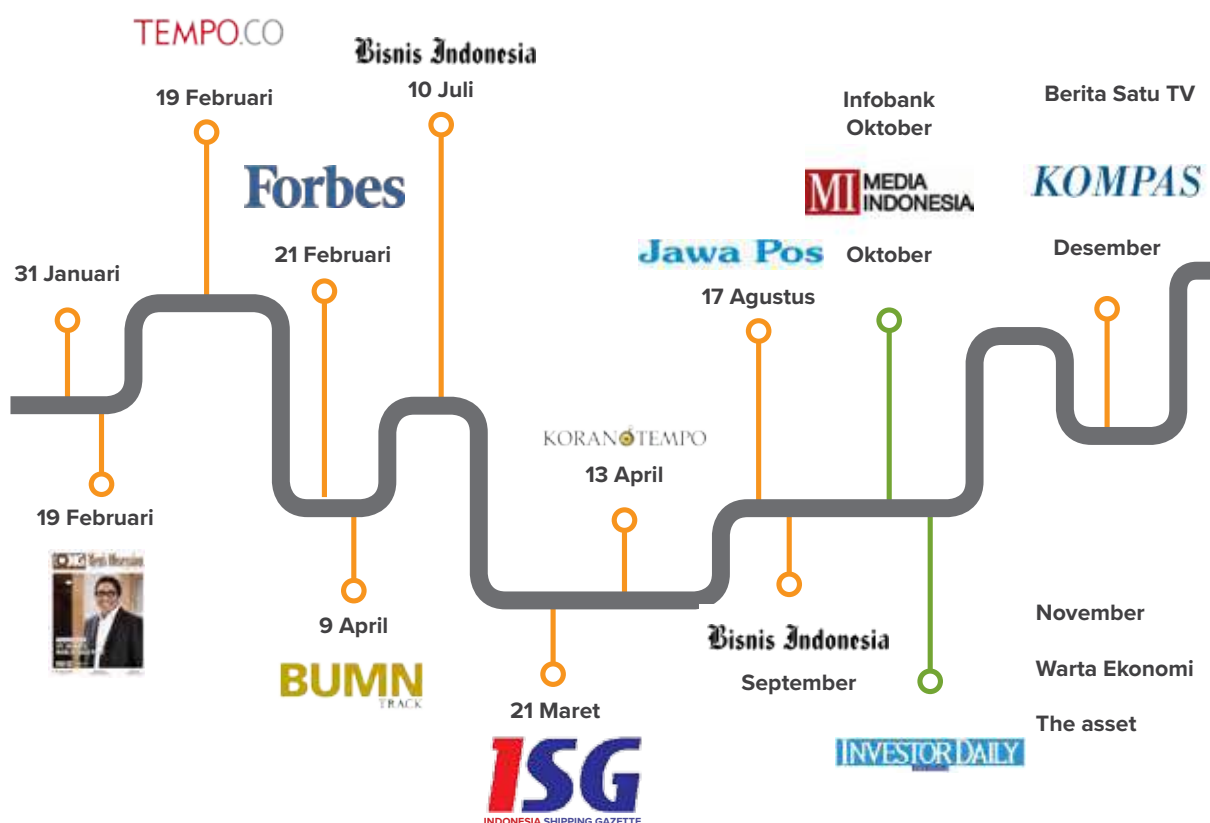
BULLETINS

During 2018, IPC published 11 (eleven) IPC News bulletins printing 1,000 (one thousand) copies of each and distributed to Branches, Subsidiaries and Service Users. The bulletins published during 2018 were as follows.

No.	Bulan Terbit Month Publication	Tema Theme
1.	Januari 2018 January 2018	IPC Semakin Berinovasi di Tahun 2018 IPC Increases Innovations in 2018
2.	Februari 2018 February 2018	Tingkatkan Budaya K3 Increased OHS Culture
3.	Maret 2018 March 2018	Direksi <i>Roadshow</i> Board of Directors Roadshow
4.	April-Mei 2018 April-May 2018	<i>Confidence, Commitment, Collaboration</i>
5.	Juni 2018 June 2018	IPC Cinta Ramadhan IPC Loves Ramadan
6.	Juli 2018 July 2018	<i>Teamwork Makes The Dream Work</i>
7.	Agustus 2018 August 2018	IPC Cinta Merdeka IPC Loves Freedom
8.	September 2018 September 2018	Pedulih Palu & Donggala Care for Palu & Donggala
9.	Oktober 2018 October 2018	Menuju <i>World Class Port</i> Towards a World Class Port
10.	November 2018 November 2018	Semarak 26 Tahun IPC 26 Years of IPC
11.	Desember 2018 December 2018	Tahap Akhir Lepas Landas Menuju <i>World Class</i> Final Takeoff Stage Towards World Class

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
 Access to Information and Company Data

LIPUTAN MEDIA



MEDIA COVERAGE

ADVERTISEMENTS

IKLAN

LIST DISPLAY 2018			
NO	WAKTU DATE	JUDUL TITLE	MEDIA
1	12 Maret 2018 March 12, 2018	Pencapaian IPC Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Tahunan 2017 2017 IPC Achievement and 2017 Annual Financial Report	Kompas
2	12 Maret 2018 March 12, 2018	Pencapaian IPC Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Tahunan 2017 2017 IPC Achievement and 2017 Annual Financial Report	Bisnis Indonesia
3	14 Maret 2018 March 14, 2018	Pencapaian IPC Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Tahunan 2017 2017 IPC Achievement and 2017 Annual Financial Report	Koran Tempo
4	1 April 2018 April 1, 2018	Kerjasama Publikasi 1 Tahun 1 Year Publication Cooperation	Indonesia Shipping Line
5	5 Juni 2018 June 5, 2018	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Gratification	Kompas

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
 Access to Information and Company Data

LIST DISPLAY 2018			
NO	WAKTU DATE	JUDUL TITLE	MEDIA
6	5 Juni 2018 June 5, 2018	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Gratification	Bisnis Indonesia
7	14 Juni 2018 June 14, 2018	Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1439 H Idul Fitri 1439 H Greetings	Kompas
8	14 Juni 2018 June 14, 2018	Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1439 H Idul Fitri 1439 H Greetings	Media Indonesia
9	30 Juli 2018 July 30, 2018	Laporan Keuangan Perusahaan Semester I Tahun 2018 2018 Semester 1 Financial Statements of the Company	Kompas
10	30 Juli 2018 July 30, 2018	Laporan Keuangan Perusahaan Semester I Tahun 2018 2018 Semester 1 Financial Statements of the Company	Bisnis Indonesia
11	16 Agustus 2018 August 16, 2018	Ucapan HUT RI ke-73 HUT RI-73 Greetings	Kompas
12	16 Agustus 2018 August 16, 2018	Ucapan HUT RI ke-73 HUT RI-73 Greetings	Media Indonesia
13	7 Desember 2018 December 7, 2018	Ucapan Terima Kasih IPC atas 26 Tahun IPC 26 years Greetings	Kompas
14	7 Desember 2018 December 7, 2018	Ucapan Terima Kasih IPC atas 26 Tahun IPC 26 years Greetings	Bisnis Indonesia
15	18 Desember 2018 December 18, 2018	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Gratification	Kompas
16	18 Desember 2018 December 18, 2018	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Gratification	Koran Sindo
17	26 Desember 2018 December 26, 2018	Ucapan Natal dan Tahun Baru 2019 Christmas and 2019 New Year Greetings	Kompas
18	26 Desember 2018 December 26, 2018	Ucapan Natal dan Tahun Baru 2019 Christmas and 2019 New Year Greetings	Jawa Pos

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik, dll. Selain itu, juga memberikan laporan secara berkala kepada Kementerian BUMN diantara nya sebagai berikut:

TRANSPARENCY FOR REPORT SUBMISSIONS

During 2018, the Corporate Secretary provided information for the public through the Mass Media, Company Website, Public Expose, Electronic Reporting Facilities, etc. In addition, it also delivered periodic reports to the Ministry of SOEs as follows:

Jenis Laporan Report Type	Tujuan Purpose	Periode Laporan Report Period	Jumlah Total
Laporan Tahunan Annual report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan The Company's Consolidated Financial Statements	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Pelaksanaan <i>Assessment</i> GCG GCG Implementation Assessment Report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Manajemen Perseroan Company Management Report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Triwulan Quarterly	1

PROGRAM ANTI KORUPSI

Anti Corruption Program

Program Anti Korupsi Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing System* serta pedoman gratifikasi Perseroan. IPC berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan (*Fraud*). Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing System* yaitu sistem yang disediakan oleh IPC bagi seluruh *stakeholders* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan IPC dan Anak Perusahaan.

The Company's Anti Corruption Program is regulated by a code of ethics, guidelines for the Whistleblowing System and guidelines for the Company's gratification. IPC is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of a Whistleblowing System, a system provided by IPC for all stakeholders who have information and want to report an act indicated of violations committed by IPC and Subsidiaries Personnel.

KODE ETIK

Code of Conduct

Kode Etik Bisnis merupakan panduan berisi prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan (IPC). Kode Etik ini diharapkan menjadi aspirasi bagi Insan IPC untuk mencapai visi dan misi IPC.

The Code of Business Conduct is a guide to the principles governing behavior in applying corporate values (IPC). This Code of Conduct is expected to be an aspiration for the IPC employees to achieve the vision and mission of IPC.

Kode Etik Bisnis IPC dibangun atas fondasi yang kuat dari visi, misi, tata nilai serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha IPC. Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan IPC yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan IPC.

The Code of Business Conduct of IPC is built on a strong foundation of vision, mission, values and good governance principles in running the IPC business activities. This Code of Ethics applies to all IPC employees, Board of Commissioners, Board of Directors and all IPC employees.

Kode Etik Bisnis ini akan membantu IPC dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang berpotensi dihadapi dalam bekerja. Sesuai visi IPC, "Menjadi Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan", diharapkan dapat dicapai dengan penerapan Kode Etik Bisnis ini, terlepas dari peran, fungsi, atau lokasi geografisnya. IPC telah memiliki Pedoman Kode Etik Perseroan yang telah dimutakhirkan dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 13 November 2017.

This Code of Business Conduct will assist IPC employees in addressing ethical issues or potential dilemmas encountered in work. In accordance with the IPC vision, "Being a Superior World Class Port Manager in Operations and Services", it is expected to be achieved with the application of this Code of Business Ethics, regardless of its role, function, or geographic location. This manual has been updated and approved by the President Director and the President Commissioner on November 13, 2017.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penerapan Kode Etik Bisnis bagi IPC dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Insan IPC memahami bahwa segala aktivitas IPC berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PURPOSE AND OBJECTIVES

The objective of applying the Code of Business Conduct in IPC can be explained as follows:

1. Each IPC employee understands that all IPC activities are based on good corporate governance principles.

KODE ETIK
Code of Conduct

2. Mendorong seluruh Insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.
3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.
4. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perusahaan lebih baik.

Tujuan penerapan Kode Etik Bisnis bagi IPC adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi IPC secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha.
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan IPC yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis.
3. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis.
4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan IPC dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi Perusahaan yang berdaya saing tinggi.

Penerapan Kode Etik Bisnis ini oleh Insan IPC secara konsisten dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Perseroan

1. Mendorong kegiatan operasional IPC agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya harus didasari dengan standar etika.
2. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa IPC dikelola secara bertanggung jawab, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

Insan IPC

1. Memberikan pedoman kepada setiap Insan IPC tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan.

2. Encourage all IPC employees to behave well in carrying out all Company activities.
3. Create a healthy and comfortable working environment within the Company.
4. Minimize opportunities for deviations and build a better Company reputation.

The purpose of applying the Code of Business Conduct for IPC is as follows:

1. As a joint commitment to realize the vision and carry out IPC mission in a professional and ethical way to conduct business.
2. As a behavioral guide for all IPC employees to be obeyed in carrying out all business activities.
3. As a guide to avoid conflict of interest in carrying out all business activities.
4. Developing a harmonious, synergic and mutually beneficial relationship between IPC employees and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive company.

The implementation of this Code of Business Conduct by IPC individuals consistently and comprehensively is expected to provide benefits for:

Company

1. Encouraging IPC operations to be more efficient and effective as relationships with customers, communities, governments and other stakeholders must be based on ethical standards.
2. Increasing the value of the Company by providing assurance and protection to Stakeholders in dealing with the Company resulting in a good reputation, which ultimately realizes the long-term success of the business.

Shareholder

Increase awareness that IPC is managed responsibly, prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the level of profitability expected by the Shareholder while taking into account the interests of the Company.

IPC Employees

1. Provide guidance to every IPC employee about the behavior desired or prohibited by the Company.

KODE ETIK

Code of Conduct

2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan IPC secara menyeluruh.

Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *Stakeholders*, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan IPC dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, *Vendor*, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran terkait dengan etika profesional dan etika kerja, sebagai berikut.

Etika Profesional

Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan *Stakeholders*. Dalam etika profesional mengatur mengenai:

1. Insan IPC
2. Pelanggan Kami
3. Vendor Kami
4. Kompetitor Kami
5. Komunitas dan Lingkungan Kami
6. Institusi Pemerintah
7. Aktivitas Politik
8. Anak Perusahaan
9. Penghormatan Perusahaan Terhadap Hak Intelektual (HAKI)

Etika Kerja

Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan IPC seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas. Dalam etika kerja mengatur mengenai:

1. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan

2. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and openness so as to improve the performance and productivity of every IPC employee.

Society and other related parties

Creating harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders, ultimately creating socio-economic welfare for communities and other concerned parties.

CODE OF ETHICS

The Code of Business Ethics reflects the actions and values that guide IPC Personnel when interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships aimed at providing information, understanding and ways to report any violations or obscurity related to professional ethics and work ethics as follows.

Professional Ethics

Professional Ethics is ethics related to the field of work to ensure quality and process undertaken in accordance with the rules in the profession as well as a reference for dealing with Stakeholders. The professional ethics governing:

1. IPC Employees
2. Our Customers
3. Our Vendors
4. Our Competitors;
5. Our Community and Environment
6. Government institution
7. Political Activity
8. Subsidiary
9. Corporate Respect for Intellectual Property (IPR)

WORK ETHICS

Work Ethics is a system of values or norms used in employment that based on hard work and persistence is expected to improve the moral character of IPC Personnel such as honesty, openness, sincerity and loyalty.

The work ethics governing:

1. Documenting and Listing of Companies

2. Pengelolaan Arsip
3. Kontrol Internal
4. Perjalanan Dinas
5. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
6. Menghadapi Konflik Kepentingan
7. Anti Penyuapan
8. Media Komunikasi dan Penyebaran Informasi
9. Etika Kerja Atasan terhadap Bawahan
10. Etika Kerja Bawahan terhadap Atasan
11. Etika Sesama Rekan Kerja
12. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lainnya
13. Gratifikasi/Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi
14. Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
15. Aktivitas Politik dan Sosial
16. Pelanggan
17. Pemangku Kepentingan Lain
18. Pencurian dan Penyelewangan Sejenisnya
19. Pencucian Uang

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

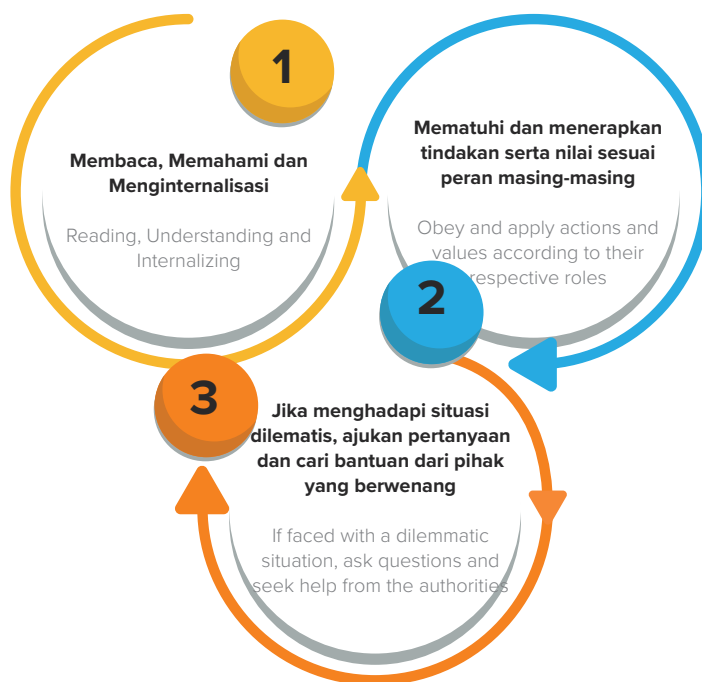
Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan IPC yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan IPC. Setiap tahun seluruh Insan IPC menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Penandatanganan pakta integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis di IPC pada tahun 2017 dan 2018 tercapai penuh, sehingga IPC mampu mempertahankan trend positif pemenuhan penandatanganan tersebut sebesar 100%.

2. Archive Management
3. Internal Control
4. Official travel
5. Data and/or Confidentiality Information
6. Confronting Conflict of Interest
7. Anti Bribery
8. Media Communications and Information Dissemination
9. Work Ethics Superiors against Subordinates
10. Work Ethics Subordinate to Superiors
11. Ethics of Fellow Colleagues
12. Compliance with Laws, Legislation and Other Terms
13. Gratuity/Reception and Giving Present/Souvenirs, Dinner, Entertainment and Donation
14. Equal Opportunities for Getting Jobs and Promotions
15. Political and Social Activity
16. Customer
17. Other Stakeholders
18. Theft and Similar Dissolution
19. Money Laundering

CODE OF ETHICS COMPLIANCE

This Code of Business Ethics applies to all IPC Personnel, namely the Board of Commissioners, Board of Directors and all IPC Employees. Every year all IPC Personnel sign the Business Ethics Code of Integrity and Compliance Pact as a form of joint commitment to adherence to the GCG principles. The signing pact of integrity and compliance codes of conduct businesses in IPC in 2017 and 2018 reached full of, so that positive trend ipc capable of sustaining the fulfillment of the signing took as much as 100 %.

KODE ETIK
 Code of Conduct



PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, IPC telah menyebarkan Kode Etik Perusahaan:

1. Telah dilakukan sosialisasi kode etik bisnis kepada Direksi dan pegawai IPC di Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan.
2. Melakukan sosialisasi dalam bentuk media cetak dan sosial media penerapan pedoman kode etik bisnis Perusahaan.
3. Pedoman Kode Etik Bisnis bisa diakses oleh Insan IPC dengan media buku yang telah di distribusikan kepada seluruh Insan IPC baik di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan. Serta media digital komunikasi internal dan eksternal perusahaan seperti E-Office, sistem I-Good, website perusahaan.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pelaksanaan Kode Etik Bisnis merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan IPC. Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan maka Insan IPC wajib melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui:

1. *Whistleblowing system*;

CODE OF ETHICS DISSEMINATION

By the end of fiscal year 2018, IPC successfully disseminated the Company Code of Conduct.

1. The code of business ethics has been disseminated to the Directors and employees socialization of the code of ethics and business conduct was conducted to IPC employees at Head Office and all Port Branches.
2. Socialization was in the form of print media and social media of the application of the code of ethics and business conduct guidelines of the Company.
3. The Code of Business Ethics Guidelines can be accessed by all IPC Personnel through the distributed media books in both the Head Office and at Port Branches. As well as through the Company's internal and external digital media communication such as E-Office, I-Good systems, corporate websites.

EFFORTS TO IMPLEMENT AND ENFORCE THE CODE OF ETHICS

Implementation of the Code of Ethics and Business Conduct is the commitment and responsibility of all IPC employees. In case of alleged violation or alleged irregularities, IPC employees shall report the alleged violation through:

1. *Whistleblowing System*;

2. Pimpinan Cabang/Unit/Anak Perusahaan;
3. Atasan Langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
4. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/ atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
5. Pimpinan Unit Pengelola SDM.

Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu kepentingan/keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu dalam Perusahaan ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Segenap Insan IPC dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Bisnis yang dilakukan oleh oknum Insan IPC. Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, korupsi dan lain sebagainya.

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri dan penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. IPC wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

PELAPORAN DAN KEPATUHAN

Insan IPC akan mengimplementasikan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur dalam setiap tindakan terkait kode etik bisnis. Komitmen IPC terhadap integritas dan etika tidak dapat dijalankan apabila Insan IPC tidak berkomunikasi, berbagi informasi serta berkolaborasi terkait isu-isu seputar etika. Insan IPC dihimbau untuk berbicara kapanpun mereka melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi.

Kapanpun Insan IPC menghadapi dilema, kebingungan, ketidakjelasan, atau pertanyaan, Insan IPC dapat segera menghubungi salah satu dari pihak-pihak berikut:

1. Atasan langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
2. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/ atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
3. Pimpinan Unit Pengelola SDM. Sedangkan untuk permasalahan/pertanyaan yang belum dapat diselesaikan agar dilaporkan kepada Direksi.

2. Branch Manager/Unit/Subsidiary;
3. Direct supervisor (one level above the concerned);
4. Indirect supervisor (superior from the direct supervisor/ two levels above the concerned);
5. Head of Human Resource Management Unit.

Reporting of alleged offenses must be done in good faith and not a personal interest/complaint over a particular policy in the Company (grievance) or based on bad will/defamation. All IPC employees and Company external persons (Customers, Business Partners and Communities) may report alleged violations of the Code of Ethics and Business Conduct conducted by IPC employees. The Company is obliged to follow up reporting which is potentially harmfully material and may damage the Company's image, among others, caused by irregularities, manipulations, corruption and so on.

Submission of reports of alleged violations anonymously (without providing personal data) is allowed. To accelerate and facilitate the follow-up process of reporting alleged violations, the reporter is expected to provide information on the self data and the recipient of the report shall keep the identity of the reporter. IPC shall follow up any reports received pursuant to applicable procedures and mechanisms.

REPORTING AND COMPLIANCE

IPC personnel should follow a transparent, open and honest communication culture in all actions related to the business code of ethics. IPC's commitment to integrity and ethics cannot be carried out if IPC personnel do not communicate, share information and collaborate on issues surrounding ethics. IPC personnel are encouraged to speak whenever they see an ethical or compliance violation.

Whenever IPC personnel face any dilemmas, confusion, obscurity, or questions, they can immediately contact one of the following parties:

1. Their direct supervisor (one level above);
2. Their indirect supervisor (supervisor above direct supervisor / supervisor two levels above);
3. HR Management Unit Head. For unresolved problems / questions to be reported to the Board Directors.

KODE ETIK
Code of Conduct

BUDAYA PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan erat kaitannya dalam pembentukan budaya Perusahaan yang dilakukan dengan penanaman dan aktualisasi nilai-nilai Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Proses penanaman dan aktualisasi ini dilakukan kepada seluruh Pekerja IPC, baik di Kantor Pusat maupun Cabang Pelabuhan secara berkesinambungan melalui media-media internal Perusahaan (intranet, majalah Perusahaan, poster dan banner) dan juga melalui pertemuan-pertemuan langsung antara manajemen dan pekerja. Selain kepada internal Perusahaan, nilai-nilai Perusahaan juga diperkenalkan kepada pihak eksternal melalui *website* dan juga pada saat kunjungan-kunjungan ke IPC. Adapun nilai Perusahaan IPC dapat dijelaskan sebagai berikut:



Informasi lebih lanjut terkait budaya perusahaan ada di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan IPC yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan di mana salah satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), sebagai berikut:

CORPORATE CULTURE

The Company's Code of Ethics is closely related to the Company's culture that follows the values of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The process of conveying the culture to all IPC Workers, both at Head Office and port branches, is through the Company's internal media (intranet, Company magazine, posters and banners) and also through direct meetings between management and workers. As well as internally in the company, the Company's values are explained to external parties through its website and also during visits to IPC. IPC's values can be explained as follows:

Further information related to corporate culture can be found in the profile chapter of this Annual Report.

CODE OF ETHICS VIOLATIONS SANCTIONS

Any IPC employee proven to be in violation of this Code of Ethics and Business Conduct will be sanctioned in accordance with the rules and regulations applicable in the Company, one of which is the Collective Work Agreement (PKB) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), as follows:

Tingkat Sanksi <i>Sanction Rate</i>	Jenis Sanksi <i>Type of Sanction</i>
Disiplin Ringan Light Sanction	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran Secara Tertulis dari Atasan Langsung 2. Pernyataan Tidak Puas dari Pengusaha 3. Pemberian Bonus Tahunan sebesar 70% <ol style="list-style-type: none"> 1. Written Reprimands from Direct Superiors 2. Unsatisfied Statement from Entrepreneur 3. Annual Bonus Granting of 70%
Disiplin Sedang Medium Sanction	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda sebesar 10% dari Penghasilan Sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku 2. Denda sebesar 20% dari Penghasilan Sebulan selama 2 (dua) bulan, sesuai peraturan yang berlaku 3. Pemberian Bonus Tahunan sebesar 40% <ol style="list-style-type: none"> 1. A fine of 10% of the monthly income for 3 (three) months, in accordance with applicable regulations 2. Fines of 20% of monthly income for 2 (two) months, in accordance with applicable regulations 3. Annual Bonus Granting of 40%
Disiplin Berat Heavy Sanction	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Jabatan dan atau Kelas Jabatan 1 (satu) Tingkat Lebih Rendah dari Jabatan dan atau Kelas Jabatan Semula 2. Penurunan Jabatan dan atau Kelas Jabatan 2 (dua) Tingkat Lebih Rendah dari Jabatan dan atau Kelas Jabatan Semula 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri 4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Hormat 5. Tidak Diberikan Bonus Tahunan <ol style="list-style-type: none"> 1. Demotion and/or Class of Position 1 (one) Level Lower from the Current Position and/or Class of Position 2. Demotion and/or Class of Position 2 (two) Levels Lower from the Current Position and/or Class of Position 3. Termination of Employment (PHK) with Honor not on Own Request 4. Termination of Employment (PHK) with Honor 5. Not Given Annual Bonus

Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Indisipliner.

1. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/ mekanisme indisipliner.
2. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
3. Bila mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Jumlah pelanggaran kode etik selama tahun 2018 sebanyak 1 (satu) pelanggaran dan telah ditindaklanjuti dengan diberikannya sanksi disiplin berat.

Sanctions for the offending Employee are stipulated by the Board of Directors upon receipt of recommendation from the Disciplinary Team.

1. The Board of Commissioners and/or the Board of Directors decide on the provision of guidance, disciplinary and/or other measures and prevention to be carried out by the direct supervisor in the environment of the respective work unit/disciplinary mechanism.
2. Sanctions for the Board of Directors and Board of Commissioners committing the violation are decided by the Shareholder.
3. If the partners or other stakeholders committed the violation, will be subject to the provisions as contained in the contract and other governing provisions. If related to a crime can be forwarded to the authorities.

NUMBER OF VIOLATION SANCTIONS GIVEN

The number of code of ethics violations during 2018 was 1 (one) violation that has been followed up with a heavy disciplinary sanction.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Gratuity Policy

IPC telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama IPC pada 3 November 2017. Sebagai Perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan isu anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi Manajemen Perusahaan. Dalam semangat tersebut, Manajemen IPC terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk upaya pengendalian praktik Gratifikasi.

IPC menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan Pihak Ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan IPC memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan IPC untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan IPC yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat insan IPC tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/ melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan IPC, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui UPG sesuai mekanisme yang telah diatur.

IPC has gratuity control guidelines approved by the President Director and President Commissioner of IPC on November 3, 2017. As a professional, independent, integrity and sustainable company, the Anti Corruption Collusion and Nepotism (KKN) issue is a priority for the Company's management. In that spirit, IPC management continues to make efforts to distance themselves from KKN practices, including the control of gratuity practices.

IPC recognizes that in establishing working relationships with third parties, it often deals with gratuity practices, so a guide is needed to control the practice. This matter is done so that all IPC employees have the same understanding about the treatment of gratuities and help IPC employees not to get entangled in the practice of gratuities that include criminal acts of bribery.

Understanding of Gratuities according to Law No. 20 Year 2001 Article 12B is a grant in the broad sense that includes giving and/or acceptance of gifts/souvenirs and entertainment, whether received domestically or abroad, which is done by using electronic means or without electronic means given or received by IPC employees that occurred because it relates to the position/authority in the Company that may cause a conflict of interest and/or affect its independence in work and against its obligations or duties.

MANAGEMENT OF GRATIFICATION CONTROL

Under certain conditions, when IPC personnel cannot avoid receiving gifts from Third Parties with the provision in the wild the provisions or gifts already exist in a place that is entrusted to / through other people without the knowledge of the IPC Personnel, the concerned person must report both directly to the KPK or through the UPG in accordance with the regulated mechanism.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI
Gratuity Policy

PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk berdasarkan SK Direksi IPC No. SK.01.01/7/91/KPP/UT/PI-II-17 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berfungsi sebagai pengendali gratifikasi di lingkungan IPC. UPG bersifat *ad-hoc*, dan terdiri dari:

Ketua	: EVP Sekretaris Perusahaan
Wakil Ketua	: EVP Satuan Pengawasan Internal
Sekretaris	: SDVP GCG/Kepatuhan Peraturan Perusahaan
Anggota	: SVP Hukum, dan VP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi.
3. Mereviu dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

GRATIFICATION REPORTING MANAGEMENT

The Gratification Control Unit (UPG) is a unit formed based on IPC Board of Directors Decree No. SK.01.01/7/91/KPP/UT/PI-II-17 concerning Formation of the Gratification Control Unit (UPG) Team for Gratification Prevention and Countermeasures System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), to function as a gratification controller in IPC. UPG is ad-hoc, and consists of:

Chairperson	: EVP Corporate Secretary
Deputy Chair	: EVP Internal Audit Unit
Secretary	: SDVP GCG/Company Regulations Compliance
Members	: SVP Legal, and VP Employee Relations and HR Services

GRATIFICATION CONTROL UNIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

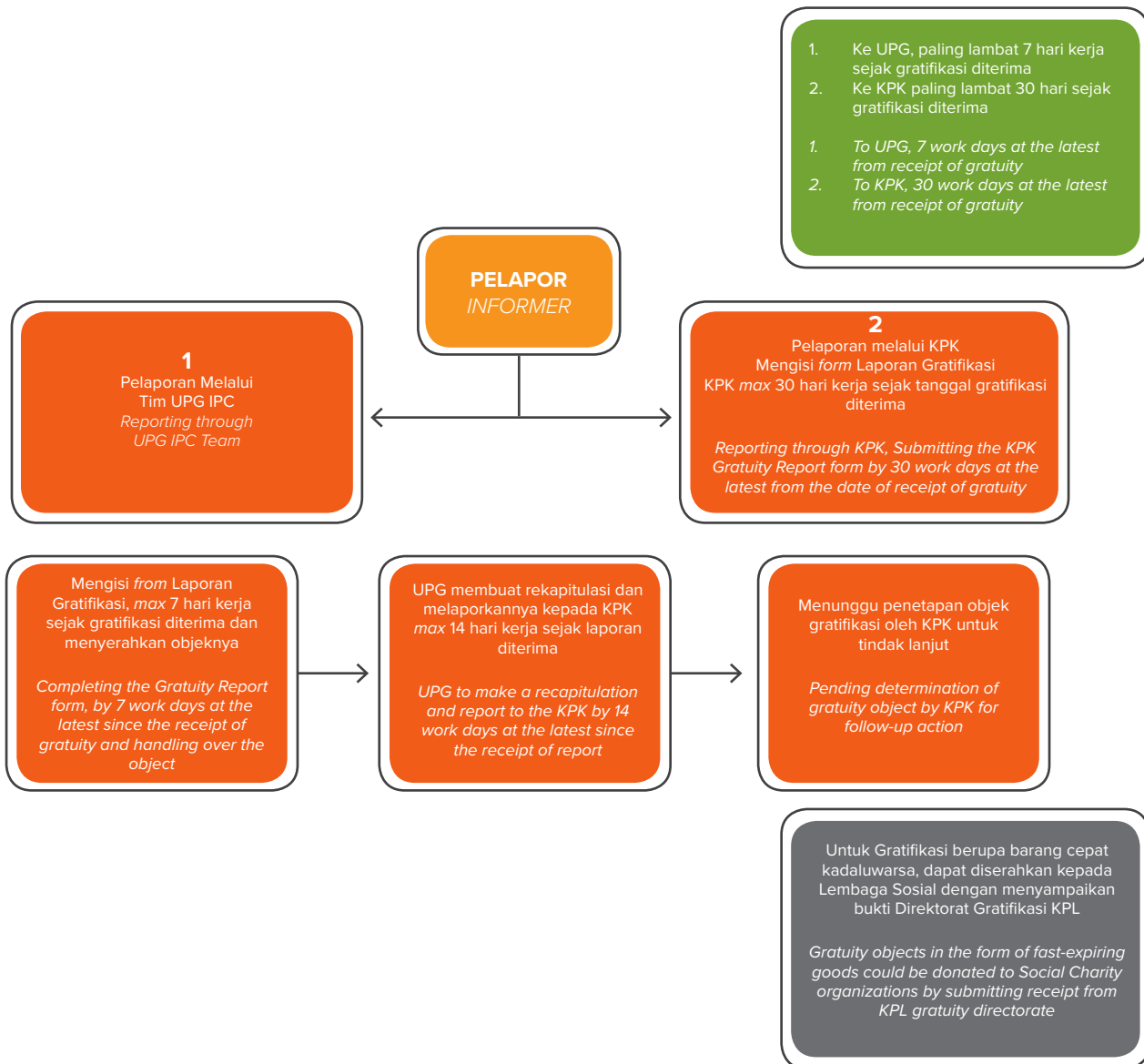
The Gratification Control Unit duties and responsibilities include

1. Disseminating gratification control within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Coordinating with units or sections related to the effectiveness of gratification control.
3. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification and corruption prevention environment in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and Receiving reports, recapitulating and reporting gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the Corruption Eradication Commission.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI
 Gratuity Policy

MEKANISME PELAPORAN

REPORTING MECHANISM



1. Apabila terdapat gratifikasi sebagaimana yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan IPC wajib melaporkan baik melalui Tim UPG IPC atau KPK dengan tata cara sebagai berikut:

1. If there is gratification as stipulated by the Company, the IPC Personnel must report either through the IPG or the KPK UPG Team through the following procedure:

KEBIJAKAN GRATIFIKASI Gratuity Policy

- a. Pelaporan Melalui KPK
Mengisi *form* Laporan Gratifikasi KPK yang dapat di unduh pada tautan: www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi. Laporan Gratifikasi wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di <https://gol.kpk.go.id>.
 - b. Pelaporan Melalui Tim UPG IPC
Mengisi *form* Laporan Gratifikasi UPG IPC sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.
2. UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG IPC untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek gratifikasi oleh KPK.
 3. Untuk penerimaan gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
 4. Untuk penerimaan gratifikasi yang merupakan barang seperti cinderamata/uang/makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
- a. Reporting Through KPK
Completing the KPK Gratification Report form that can be downloaded from www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi. The Gratification Report must be submitted to KPK no later than 30 (thirty) working days from the date the gratification was received by the recipient. For more detailed information, please see <https://gol.kpk.go.id>.
 - b. Reporting Through the UPG IPC Team
Completing the UPG IPC Gratification Report form, no later than 7 (seven) working days from the date the gratification is received by submitting the object of gratification received.
2. The UPG recapitulates the Gratification Report and reports to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification Report is received by the UPG IPC Team to obtain the status of the gratuity object by KPK.
 3. For receipt of gratification that have expired (for example: food and drink), they can be sent to the Social Institution, by submitting the receipt to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of gratification as provided in the Guidelines.
 4. For receipt of gratification such as souvenirs / money / food that does not expire quickly, awaits the determination of the object of gratification by KPK for follow-up.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program, IPC senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan gratifikasi secara khusus serta kebijakan penerapan GCG secara umum, kepada Insan IPC pada setiap tingkatan/jenjang organisasi. Sosialisasi dilakukan melalui pembagian buku pedoman, *website* internal, promosi melalui media cetak terkait IPC Bersih dan larangan gratifikasi, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki IPC. Sosialisasi dilakukan di Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan.

GRATIFICATION SOCIALIZATION

In an effort to support the success of the program, IPC continues to socialize the specific gratuity policy and general GCG policy to IPC employees at every level of the organization. Socialization is done through the sharing of manuals, internal websites, promotion through print media related to "IPC Bersih" and the prohibition of gratuities, as well as through activities and other media owned by IPC. Socialization is done in the Head Office and all Port Branches.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Gratuity Policy

Sosialisasi telah dilakukan baik melalui tatap muka di seluruh Departemen Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan, sementara sosialisasi lainnya dalam bentuk media promosi seperti *banner* dan *poster*. Setiap tahun IPC juga mengiklankan larangan penerimaan gratifikasi untuk Insan IPC di media massa, tahun 2018 di Koran Kompas dan Sindo sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan. Setiap tahun juga Direksi IPC mengeluarkan surat pengumuman kepada seluruh Insan IPC di Kantor Pusat dan Cabang Perusahaan terkait larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan. Serta memberikan surat larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan ke Anak Perusahaan.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, tidak terdapat laporan atas gratifikasi.

The socialization is carried out both through face-to-face meetings at all Head Office Offices, Port Branches and Subsidiaries, and through promotional media such as banners and posters. Every year IPC also advertises a ban on the acceptance of gratuities to IPC personnel in the mass media, in the Kompas and Sindo newspapers before the religious holidays. Every year the IPC Board of Directors issue an announcement letter to all IPC Staff at the Head Office and Branches regarding prohibiting receipt of gifts / parcels on religious holidays. The same letter is also sent to subsidiaries

GRATIFICATION REPORTS IN 2018

During 2018, there were no reports of gratuities.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut IPC Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan IPC dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

IPC Bersih merupakan sebuah program nyata dari Manajemen IPC untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Laporan terkait WBS dapat disampaikan dengan saluran yang telah disediakan sebagai berikut:

Telepon : +6221 1500 969
Faksimili : +6221 1500 979
SMS/WA : +62812 9006 0606
Email : ipcbersih@tipoffs.asia
Website : <https://www.tipoffs.asia/ipc/bersih>
Surat : "IPC Bersih" Po Box 3325 JKP 10033

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Pengelolaan dan penerapan WBS di IPC dibantu oleh mitra atau pihak ketiga yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia. Dalam sistem pelaporan, pemilih bebas untuk menyampaikan identitas atau tidak. Pelapor memilih tidak menyebutkan namanya maka Tim pengelola WBS atau Tim IPC Bersih tidak mengetahui identitas pelapor.

Melalui sistem ini Insan IPC atau *stakeholders* yang melaporkan akan diberikan perlindungan baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor. IPC memandang laporan yang masuk akan sangat membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi serta membantu IPC meminimalisir tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penggelapan, penipuan, pemerasan.

The Whistleblowing System (WBS), or IPC Bersih, was introduced to strengthen the implementation in order to provide an opportunity for all IPC employees and other stakeholders to be able to submit reports on indications of violation of applicable ethical values, based on reliable and well-informed evidences.

IPC Bersih is a tangible program of IPC Management to create a clean workplace away from fraud, corruption and extortion.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

VIOLATION REPORT SUBMISSION

WBS related reports can be submitted through the channels provided as follows:

Telephone : +6221 1500 969
Fax : +6221 1500 979
SMS/WA : +62812 9006 0606
Email : ipcbersih@tipoffs.asia
Website : <https://www.tipoffs.asia/ipc/bersih>
Letter : "IPC Bersih" Po Box 3325 JKP 10033

WHISTLEBLOWER PROTECTION SYSTEM

The management and application of WBS in IPC is assisted by partners or third party, namely PT Deloitte Konsultan Indonesia. In the reporting system, the rapporteur is free to reveal the identity or not. If the rapporteur chooses not to mention his or her name then WBS management team or "IPC Bersih" Team does not know the identity of the complainant.

Through this system IPC employees or stakeholders who report will be given protection both in terms of identity confidentiality or the possibility of countermeasures by the reported party. IPC views that the incoming reports will greatly help create a favorable working environment for interaction and transactions as well as to help IPC to minimize fraud, corruption, theft, violation of Company policies and regulations, conflict of interests, bribery/gratuities, embezzlement, fraud, and extortion.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Kategori Pelanggaran yang dapat dilaporkan pada *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan Kecurangan

Adalah tindakan yang dilakukan oleh Insan IPC dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh:

- a. Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki hubungan istimewa.
- b. Merekrut staf yang memiliki “hubungan istimewa” dengannya sementara terdapat kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi

Adalah tindakan insan IPC, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki “hubungan istimewa” dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh:

- a. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi Perusahaan serta Anak Perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan guna memperkaya diri sendiri.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Pencurian

Adalah kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Contoh:

- a. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik Perusahaan di lingkungan kerja.
- b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan IPC baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan.

Contoh:

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

The violation categories that can be reported on the Whistleblowing System are:

1. Fraudulent Actions

It is an act committed by an IPC individual for personal benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

Example:

- a. Approved an order to supplier with special relationship.
- b. Recruit staff that has a “special relationship” with them while there are candidates with better qualifications.

2. Corruption

It is an IPC employee action which improperly and illegally enriches or enriches those who have a “special relationship”, by abusing positions and powers

Example:

- a. Using budgets, assets, services and information of companies and subsidiaries for activities outside the service for personal enrichment.
- b. Abusing power for personal or group interests

3. Theft

It is the activity/action to take a good, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully

Example:

- a. Abusing/taking without reason in the form of money/goods/data/documents owned by the company in the workplace
- b. Using the identity of others to get goods and services

4. Violations of Company Policies and Regulations

It is an activity/action intentional performed or planned by IPC employees that is contrary to Company’s internal policies and regulations.

Example:

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

- a. Membocorkan informasi Perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak.
 - b. Pemberian fasilitas kredit dan perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/*supplier* yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis.
5. Benturan Kepentingan
- Sebuah situasi di mana Insan IPC atau Pemegang Saham Utama karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.
- Contoh:
- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, di mana Insan IPC tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
 - b. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*.
6. Penyuapan/Gratifikasi
- Suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- Contoh:
- a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam tertentu dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaannya.
 - b. Menerima keuntungan—keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis yang akan diambil.
7. Penggelapan
- Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- a. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people.
 - b. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner.
5. Conflict of Interest
- A situation in which IPC employees or the Shareholder due to the position of the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.
- Example:
- a. Provision of decisions on the appointment of certain parties as providers of goods/services, where the IPC employee has an economic interest to the appointed party.
 - b. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers.
6. Bribery/Gratuities
- A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest.
- Example:
- a. Receive direct or indirect benefits from any parties related to a business transaction of his or her company.
 - b. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.
7. Embezzlement
- Activities deliberately and consciously violate the law to own a thing that wholly or partially belong to another person, who is currently in his or her power not out of a crime.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

Contoh:

- a. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan tanpa sepengetahuan Perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Perusahaan yang dalam kekuasannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.

8. Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Contoh:

- a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan.
- b. Bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

9. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Contoh:

- a. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon *supplier* sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan.
- b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan pihak lainnya.

Example:

- a. Carry out dishonest acts by hiding the goods/property of the company without the knowledge of the company for the purpose of owning, controlling, or being used for other purposes
- b. Intentionally and unlawfully possessing an object that wholly or partly belongs to the Company which is in his or her power either because of his or her position or not because of his or her position

8. Fraud

Activities intentionally and consciously intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable

Example:

- a. A trick used by one of the parties to cause the other party to sign the contract, whereas without such tricks the other party will not sign the contract in question.
- b. Work alone or cooperate with other parties to deceive superiors or Company by using false signatures or fake invoices

9. Extortion

Activities/actions committed with the intent to benefit themselves or others unlawfully, compel a person with violence or the threat of force to provide something, wholly or partially belonging to that person or other person, or in order to make debt or to waive the receivable

Example:

- a. Requesting a sum of money or gifts to prospective suppliers as a substitute for a job
- b. Perform any unlawful levies of any kind in the performance of their duties for the benefit of the private/other parties

WHISTLEBLOWING SYSTEM
 Whistleblowing System

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

IPC bersama PT Deloitte Konsultan Indonesia selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eskternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim IPC Bersih sebagai *counterpart* yang diatur dalam SK Direksi No. SK.01.02/5/7/1/KPP/UT/PI.II -17 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pembaharuan Komite IPC Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diketuai oleh EVP Sekretaris Perusahaan, Wakil Ketua SVP Hukum, Sekretaris SDVP Kepatuhan Peraturan Perusahaan dan beranggotakan EVP Satuan Pengawas Internal, VP Hubungan Pekerja & Layanan SDM, VP Manajemen Risiko serta VP/SVP/EVP terkait.

REPORT COMPLAINTS WHISTLEBLOWING MANAGEMENT SYSTEM

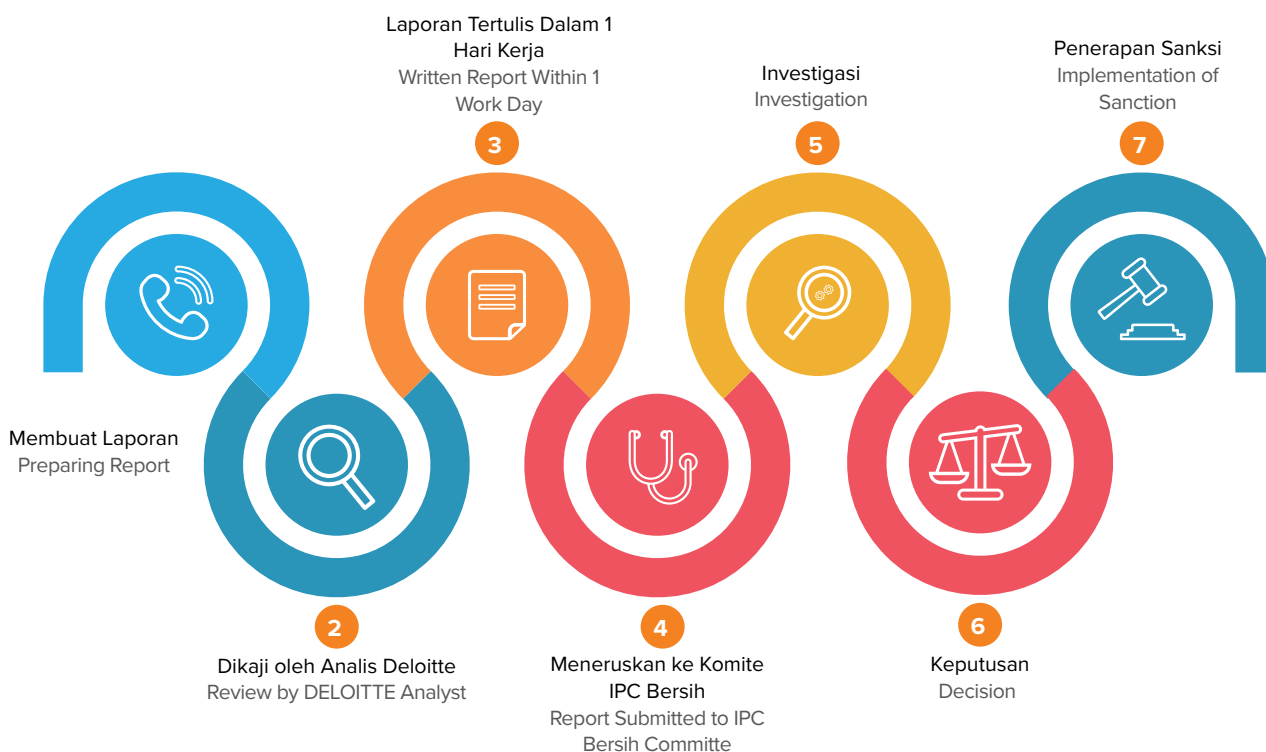
IPC and PT Deloitte Konsultan Indonesia as partners in the implementation of WBS system have received and monitor complaints, both internal and external, and make monthly reports to "IPC Bersih" Team as counterpart as regulated in Board of Directors Decision No. SK.01.02/5/7/1/KPP/UT/PI.II -17 dated July 5, 2017 on "IPC Bersih" Committee Renewal In the Implementation of the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) chaired by EVP Corporate Secretary, SVP Law as vice chairman, SDVP Company Compliance Regulation as secretary, and consists of EVP Internal Audit Unit, VP Worker Relations & HR Service, VP Risk Management and Related VP/SVP/EVP as members.

ALUR PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM'S COMPLAINTS MANAGEMENT FLOWS

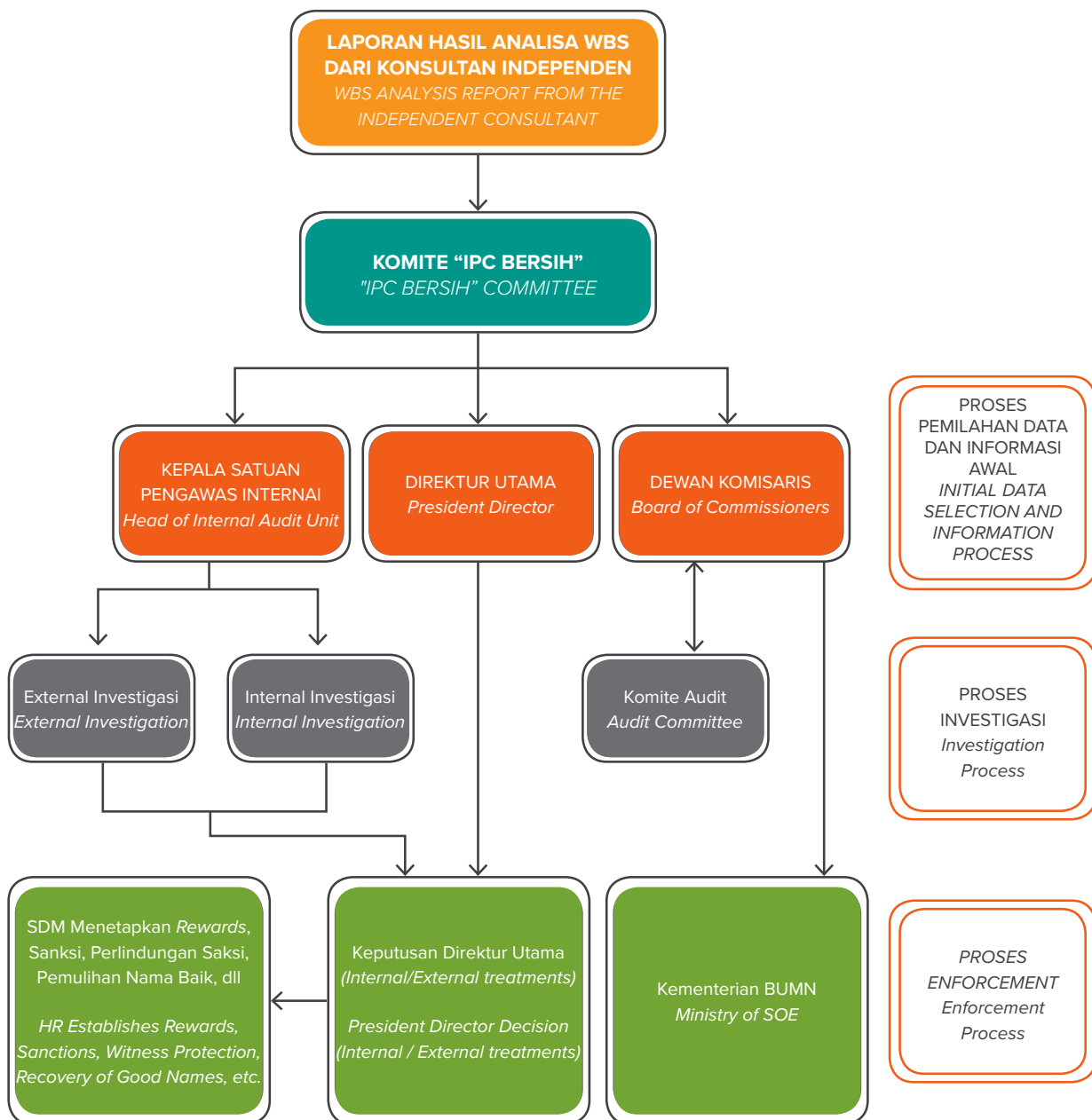
ALUR PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system's complaints management flows



WHISTLEBLOWING SYSTEM
 Whistleblowing System

FLOW TINDAK LANJUT LAPORAN DI KANTOR PUSAT HEAD OFFICE FOLLOW-UP REPORT FLOW

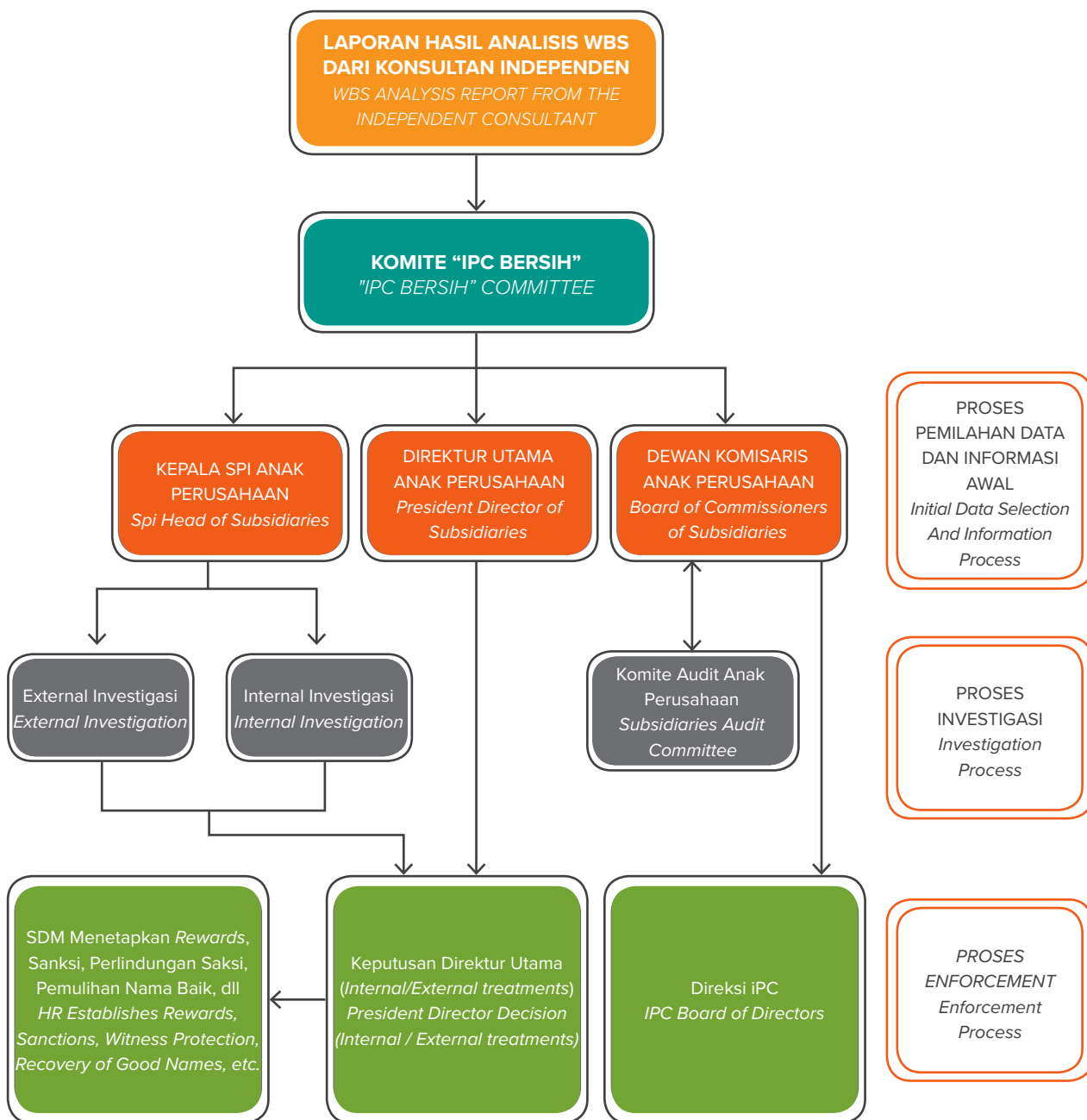


"Komite IPC Bersih dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor HK.56/3/5/9/PUI-14 tentang Pembentukan Komite IPC Bersih yang terdiri dari SDM, Hukum, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal"

"The IPC Bersih Committee was formed based on the Board of Directors' Decree Number HK.56/3/5/9/PUI-14 concerning the Establishment of the IPC Bersih Committee consisting of HR, Legal, Risk Management, Corporate Secretary and Internal Audit Unit"

WHISTLEBLOWING SYSTEM
 Whistleblowing System

FLOW TINDAK LANJUT LAPORAN UNTUK ANAK PERUSAHAAN **SUBSIDIARIES FOLLOW-UP REPORT FLOW**



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sosialisasi atas WBS dilaksanakan bersama dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

The WBS socialization was conducted together with the gratification control socialization.

JUMLAH PENGADUAN

NUMBER OF COMPLAINTS

No	Kategori Pengungkapan <i>Categories of Disclosure</i>	Jumlah Pelaporan Masuk <i>Number of Reports</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>		Persentase <i>Percentage</i>
			Laporan pelanggaran selesai/tertutup <i>Report violation complete/closed</i>	Laporan Pelanggaran Baru/ terbuka <i>New/open violation report</i>	
1.	Indikasi tindak kecurangan <i>Indication of Fraud</i>	0	0	0	0
2.	Indikasi Korupsi <i>Indication of Corruption</i>	0	0	0	0
3.	Indikasi Pencurian <i>Indication of Theft</i>	0	0	0	0
4.	Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan <i>Indication of Violations of Company Policies and Regulations</i>	4	3	1	89
5.	Indikasi Benturan Kepentingan <i>Indication of Conflicts of Interest</i>	1	1	0	100
6.	Indikasi Penyuapan/Gratifikasi <i>Indication of Bribery/Gratuities</i>	0	0	0	0
7.	Indikasi Penggelapan <i>Indication of Embezzlement</i>	0	0	0	0
8.	Indikasi Penipuan <i>Indication of Fraud</i>	0	0	0	0
9.	Indikasi Pemerasan <i>Indications of Extortion</i>	1	1	0	100
10.	<i>Out of Scope</i>	11	11		100
	Total	17	16	1	96

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2018

IPC telah menetapkan standar prosedur operasional terkait dengan pelaporan WBS. Setiap laporan yang masuk, setelah sesuai dengan kriteria yang ada, akan ditindaklanjuti oleh Komite IPC Bersih. Dalam pelaksanaannya, Komite dibantu oleh Satuan Pengawasan Internal dan Tim Indisipliner Kantor Pusat untuk melakukan investigasi pengaduan yang masuk. Dari temuan yang didapat, kemudian dianalisis untuk dikeluarkan rekomendasi yang disampaikan dalam hasil kajian terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada pejabat lebih tinggi yang akan menetapkan keputusan atas temuan dan rekomendasi tersebut untuk pemberian sanksi yang sesuai dengan aturan Perseroan.

SANCTIONS OR FOLLOW-UP ON INCOMING COMPLAINTS IN 2018

IPC has set standard operating procedures related to WBS reporting. Each incoming report, after being checked with existing criteria, will be followed up by the IPC Bersih Committee. The Committee is assisted by the Internal Monitoring Unit and the Head Office Disciplinary Team to conduct complaints investigations. From the findings obtained, recommendations can be issued from the results of the complaints followed up. Furthermore, reports are submitted to the President Director or to higher officials to determine decisions based on the findings and recommendations to giving sanctions in accordance with the rules of the Company.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Assets Reports (LHKPN)

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

IPC memiliki kebijakan mengenai Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan SK Direksi No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 tanggal 16 Maret 2017 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang merupakan pemutakhiran dari SK Direksi No. HK.56/17/3/PI.II-14 tanggal 1 Juli 2014. Kebijakan ini mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, Pegawai yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN dan sanksi bagi pegawai terkait yang tidak melaporkan LHKPN. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Wajib Laport LHKPN di lingkungan IPC adalah:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
3. Pejabat Struktural, pejabat yang menduduki satu tingkat di bawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PENGELOLA LHKPN

Koordinator Pengelolaan LHKPN di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah VP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM pada Divisi SDM. Dengan rincian tugas sebagai berikut:

LHKPN DELIVERY AND MANAGEMENT POLICY

IPC has a policy regarding Submission and Management of State Operator Assets Reports (LHKPN) based on Board of Directors Decree No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 dated March 16, 2017 concerning Obligations to Report Assets of Board of Directors, Board of Commissioners and Structural Officials at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), an update to Board of Directors Decree No. HK.56/17/3/PI.II-14 dated July 1, 2014. This policy regulates the procedures for submitting, managing LHKPN, employees who are required to submit LHKPN, and sanctions for employees who do not report LHKPN. This policy refers to KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Assets.

MANDATORY LHKPN REPORT

Based on the Submission Policy and Management of State Assets Reports. Mandatory Reporting of LHKPN in IPC includes:

1. Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) workers assigned as Directors or Commissioners of Subsidiaries
3. Structural Officers, officials who occupy one level below the Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

LHKPN MANAGEMENT

The LHKPN Management Coordinator at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the VP of Employee Relations and HR Services in the Division HR. With details as follows:

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Assets Reports (LHKPN)

Nama Jabatan <i>Nama Jabatan</i>	Rincian Tugas <i>Rincian Tugas</i>
VP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM Selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN VP Employee Relations and HR Services as LHKPN Management Coordinator	<p>Adapun tugas dari Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam pelaporan dan mengumumkan harta kekayaannya. b. Pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id. c. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN. 2. Melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh KPK. mengenai kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada KPK 3. Menyampaikan data kepada KPK mengenai data kepegawaian dan data setiap adanya perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun. 4. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ke dalam Aplikasi e-LHKPN. 5. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 6. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN pada Kementerian BUMN mengenai pengelolaan LHKPN dan kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK. <p>The LHKPN Management Coordinator tasks are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinating with KPK in terms of: <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring and evaluation of LHKPN Obligatory compliance in reporting and announcing their assets. b. Using the e-LHKPN Application through "http://www.elhkpn.kpk.go.id" www.elhkpn.kpk.go.id. c. Socializing LHKPN obligations and technical guidance on procedures for filling in LHKPN. 2. Verifying data submitted by KPK regarding the LHKPN's Report compliance, and submitting the verification results to KPK 3. Submitting data to KPK regarding employment data and any position changes in the LHKPN Report by 15th of December each year. 4. Updating the data as referred to in number 3 (three) in the e-LHKPN Application. 5. Reminding Mandatory LHKPN to comply with their obligation to submit and announce LHKPN. 6. Coordinating with the LHKPN Coordinator at the Ministry of SOE regarding LHKPN management and LHKPN Mandatory compliance when submitting the LHKPN to the KPK.

PENGLOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Management of State Assets Reports (LHKPN)

LAPORAN LHKPN TAHUN 2017

Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pelaporan LHKPN akan dilakukan secara tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah tahun berjalan dan dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-LHKPN. Penyampaian melalui e-LHKPN ini baru diberlakukan untuk periode pelaporan tahun buku 2017 yang akan ditutup pada 31 Maret 2018. Untuk dapat melaksanakan pelaporan e-LHKPN tersebut dengan baik, maka IPC melakukan sosialisasi pengisian LHKPN kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi.

2017 LHKPN REPORT

In accordance with the KPK Circular No. 08 of 2016 concerning Technical Guidelines for Submission and Management of LHKPN after the enactment of KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of Assets of State Administrators, LHKPN reporting will be conducted on an annual basis not later than March 31 after the current year, and is carried out electronically using the e-LHKPN application. Submission through e-LHKPN has only been implemented for the 2017 fiscal year reporting period, and will be closed on March 31, 2018. To be able to conduct the e-LHKPN report properly, IPC has disseminated information about LHKPN to Board of Directors, Board of Commissioners, PT Pelabuhan Indonesia II Workers (Persero), and the Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries and structural officials one level below the Board of Directors

PENILAIAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GCG Implementation Assessment

IPC melakukan asesmen pelaksanaan Praktik GCG dengan tujuan mengukur tingkat implementasi praktek GCG sekaligus mendapatkan umpan balik bagi perbaikannya di masa mendatang. Metode penilaian terhadap penerapan GCG IPC di tahun 2018 mengacu pada alat ukur (*score card*) yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur pelaksanaan penilaian GCG IPC mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assesment* dan *Review* Pelaksanaan GCG;
6. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017;
7. Praktek *best practice* yang berkembang Perusahaan juga telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait perencanaan dan pelaksanaan penilaian GCG, yaitu SOP Perencanaan Penilaian GCG, SOP Pelaksanaan Penilaian GCG dan SOP Evaluasi dan *Monitoring* Pelaksanaan GCG.

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang

IPC conducts assessments on GCG Practices with the objective to measure GCG and to obtain feedback for future improvements. The appraisal method of GCG in 2018 refers to the scorecard as stated in the Ministry of SOEs Secretary Letter No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on the Indicators for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises.

The implementation procedure for IPC GCG assessment refers to several regulations as follows:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
2. Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Minister of SOEs Regulation Amendment No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
3. Minister of SOEs Decision No. KEP-117/M-MBU/2002 dated 1 August 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
4. Secretary of the Ministry of SOEs. Decision No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on the Indicators/Parameters of Evaluation and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Ministry of State Owned Enterprise Circular Letter No. SE-14/MBU/2010 dated 11 November 2010 on the GCG and Review Program
6. Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Year 2017
7. The best practice practices that the company has developed have also been established related to planning and implementation of GCG assessment, namely SOP of GCG Assessment Plan, SOP of GCG Assessment and SOP of GCG Implementation Evaluation & Monitoring.

ASSESSMENT CRITERIA

The GCG assessment refers to the Ministry of SOE Decree Secretary Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Direksi.
5. Pengungkapan informasi dan transparansi.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian implementasi GCG di tahun buku 2017 adalah PT Multi Utama Indojasa yang dilakukan pada Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. PD.02/18/12/5/PBN/ADA/PI.II-17.

SKOR PENILAIAN

Tabel Hasil GCG Assessment

Tahun Buku Assessment GCG <i>Assessment GCG GCG Assessment</i>	Skor GCG Assessment <i>GCG Assessment Score</i>	Kategori <i>Category</i>	Pelaksana <i>Executor</i>
2018	98,30	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2017	96,37	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2016	93,32	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2015	83,21	(Baik) (Good)	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
2014	83,48	(Baik) (Good)	<i>Self Assessment</i>
2013	78,12	(Baik) (Good)	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Hasil GCG *assessment* IPC pada tahun buku 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Hasil Penilaian Tahun Buku 2017 dan 2018

No.	Apek Penilaian <i>Assessment Aspect</i>	Bobot <i>Weight</i>	Capaian Tahun Buku 2017 <i>Achievement 2017</i>		Capaian Buku 2017 <i>Achievement 2018</i>		Keterangan <i>Description</i>
			Skor <i>Score</i>	%	Skor <i>Score</i>	%	
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Continuous Commitment to GCG</i>	7,00	6,924	98,913	6,962	99,456	Sangat Baik Very good

Evaluating Good Corporate Governance in BUMN. The indicators used in the GCG assessment include:

1. Commitment to implementing good corporate governance in a sustainable manner.
2. Shareholders and GMS/Capital Owners.
3. Board of Commissioners/Supervisory Board.
4. Board of Directors.
5. Information disclosure and transparency.

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The party conducting the GCG implementation assessment in 2017 was PT Multi Utama Indojasa who conducted the assessment in December 2017 based on Work Order Letter (SPK) No. PD.02/18/12/5/PBN/ADA/ PI.II-17.

ASSESSMENT SCORE

The IPC GCG assessment results in 2017 and 2018 were as follows:

2017 and 2018 Fiscal Year Assessment Results

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
GCG Implementation Assessment

No.	Apek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun Buku 2017 Achievement 2017		Capaian Buku 2017 Achievement 2018		Keterangan Description
			Skor Score	%	Skor Score	%	
2.	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal Shareholder and GMS/Principal Owner	9,00	8,568	95,194	8,611	95,674	Sangat Baik Very good
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/ Supervisory Board	35,00	34,193	97,695	34,836	99,531	Sangat Baik Very good
4.	Direksi Board of Directors	35,00	34,238	97,824	34,621	98,917	Sangat Baik Very good
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,071	89,681	8,274	91,933	Sangat Baik Very good
6.	Aspek lainnya Other Aspects	5,00	4,375	87,500	5,000	100,000	Sangat Baik Very good
Jumlah Total		100,00	96,369		98,303		Sangat Baik Very good

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Dari hasil penilaian GCG untuk tahun buku 2018, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi IPC untuk segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan GCG di IPC semakin baik. Adapun *area of improvement* untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

From the GCG assessment results for fiscal year 2018, there were several matters that needed IPC's immediate follow up in order to improve GCG in IPC. The improvement areas for fiscal year 2018 included:

Area of Improvement	
Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Continuous Commitment to GCG Implementation	Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu. Encourage all officials obliged to report their LHKPN, to prepare the report in a timely manner.
	Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu. Encourage all officials obliged to report their LHKPN, to comply with the obligation to submit the LHKPN to the KPK in a timely manner.
	Mendokumentasikan laporan tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK secara berkala. Document reports on fulfilling the obligation to submit LHKPN to KPK on a regular basis.

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	
Aspek RUPS GMS	Penetapan anggota Direksi oleh RUPS tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir. Determine that members of the Board of Directors at the GMS have not exceeded 30 days from the end of their term of office.
	Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap rancangan RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Shareholders endorse the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJPP design
	Pengesahan terhadap rancangan RJPP dan revisi RJPP oleh Pemegang Saham dilakukan tepat waktu yaitu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap. The RJPP design and RJPP revision ratification by shareholders is carried out on time, not exceeding 60 days after receipt of the complete RJPP design.
	RUPS/Pemegang Saham menetapkan dan mengesahkan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja individu Direksi. The GMS / Shareholders establish and ratify the Management Contract that contains individual Directors' performance targets.
	RUPS/Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi. The GMS / Shareholders provide a performance assessment for individual Directors based on the Board of Directors' performance report with consideration to the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' performance.
	RUPS memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara spesifik. The GMS provides a specific Board of Commissioners' Performance assessment.
Aspek Dewan Komisaris Board of Commissioners	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. Members of the Board of Commissioners attendance at Board of Commissioners meetings
	Mendokumentasikan Surat Kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Document the power of attorney from members of the Board of Commissioners who were unable to attend the Board of Commissioners meetings
Aspek Direksi Board of Directors	Meningkatkan pencapaian target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen setiap tahun untuk seluruh aspek, termasuk indikator KPI (Ebitda) dan penyerapan investasi. Increase the Directors' performance targets achievement in the Management Contracts every year for all aspects, including KPI (Ebitda) indicators and investment absorption.
	Menyelesaikan tindak lanjut hasil audit dalam Profil Rekap Temuan Audit Tahun 2018 terkait fokus audit proses pengadaan dan implementasi kontrak maupun perjanjian IPC dengan Anak Perusahaan. Complete the audit results follow-up for the 2018 Audit Findings Profile, related to the audit focus on the procurement and implementation process for IPC contracts and agreements with subsidiaries.
	Memastikan pelaksanaan dan penyaluran anggaran kegiatan tanggung jawab sosial termasuk program Bina Lingkungan sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP. Ensure the implementation and distribution of budgeting for social responsibility activities including the Community Development program in accordance with the program plan and budget stipulated in the RKAP.
	Memenuhi tingkat kehadiran masing-masing Direksi paling sedikit mencapai 85% pada Rapat Direksi maupun pada Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris. Fulfill the Directors attendance rates to reach at least 85% at the Board of Directors' Meetings and at joint meetings with the Board of Commissioners
	RUPS mengesahkan/menyetujui RJPP dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan. GMS to ratify / approve the RJPP less than 60 days after receipt of the complete RJPP design or before the RJPP period expires.
Aspek Transparansi Transparency	Menyempurnakan muatan dan kualitas <i>Annual Report</i> sehingga dapat meraih juara. Improve the content and quality of the Annual Report so it can win an award.

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
GCG Implementation Assessment

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN TAHUN BUKU 2017 DAN TINDAKLANJUTNYA **ASSESSMENT RESULT 2017 AND RECOMMENDATIONS**

Bab	Aspek Pengujian GCG Asesmen <i>Review Aspects of GCG Assessment</i>	Jumlah Aol Asesmen Tahun 2017 <i>Number of Aol in 2017</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Continuous commitment to Implement GCG</i>	2
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholder and GMS/principal owner</i>	4
III	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	7
IV	Direksi <i>Board of Directors</i>	7
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	4
VI	Aspek lainnya <i>Other Aspects</i>	1
	Total Rekomendasi <i>Total Recommendations</i>	25

Penjelasan rinci dari rekomendasi-rekomendasi dan tindak lanjut hasil asesmen tahun buku 2017 atas penilaian penerapan GCG, dijelaskan di bawah ini:

A detailed description of the recommendations and follow-up to the 2017 fiscal year GCG assessment results, is explained below:

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan yang telah direncanakan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No.13/KEP-DK/PI/VIII-2017 tentang Penetapan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris tanggal 4 Agustus 2017 hal.11-12 <i>All members of the Board of Commissioners participate in the planned training program as stipulated in the Board of Commissioners Decision 13/KEP-DK/PI/VIII-2017 dated August 4, 2017, p.11-12, regarding Standard Operating Procedure (SOP) for the Board of Commissioners' Duties and Functions</i>	Telah dilaksanakan <i>inhouse training</i> pada tanggal 18 Juni 2018 yang diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Inhouse training was held on June 18, 2018 attended by all members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris mencakup seluruh bidang tugas Direksi. <i>The division of duties of members of the Board of Commissioners covers all areas of Board of Directors duties.</i>	Telah ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang telah mencakup seluruh bidang tugas Direksi <i>The Board of Commissioners has determined the Assignments of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Company covering all Board of Directors duties</i>

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
<p>Rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga dimuat dalam RKA Dewan Komisaris telah memuat kegiatan pemantauan.</p> <p>The Board of Commissioners plan on monitoring the Board of Directors compliance with the legislation and agreements with third parties contained in the Board of Commissioners RKA to be included in the monitoring activities.</p>	<p>RKA Dewan Komisaris tahun 2018 yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah memuat mengenai pengawasan kepatuhan Direksi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>The 2018 RKA Declaration submitted to the Shareholders included supervision of the Board of Directors' compliance with laws and regulations.</p>
<p>Dewan Komisaris melakukan proses telah atau pemeriksaan terhadap calon Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS, apabila menjelang berakhir masa jabatan Direksi atau ada permintaan dari Pemegang Saham.</p> <p>The Board of Commissioners to conduct the process of reviewing candidates for the Board of Directors before being submitted to the GMS, if the Board of Directors' term ends or there is a request from the Shareholders.</p>	<p>Telah dilaksanakan telaahan oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi atas bakal calon Direksi sesuai dengan Permintaan Pemegang Saham</p> <p>A review has been carried out by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee for prospective Directors in accordance with Shareholder Requests</p>
<p>Dewan Komisaris memberikan usulan calon Direksi kepada RUPS, apabila menjelang berakhir masa jabatan Direksi atau ada permintaan dari Pemegang Saham.</p> <p>The Board of Commissioners to propose candidates for the Board of Directors to the GMS, if it is approaching the end of the Board of Directors' term or there is a request from the Shareholders.</p>	<p>Telah disampaikan usulan Dewan Komisaris atas bakal calon Direksi sesuai dengan permintaan Pemegang Saham</p> <p>The Board of Commissioners proposal for prospective Directors has been submitted according to the request of the Shareholders</p>
<p>Rencana untuk memantau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dimuat dalam RKA Dewan Komisaris.</p> <p>Plan to monitor the application of good corporate governance principles contained in the Board of Commissioners RKA.</p>	<p>RKA Dewan Komisaris tahun 2018 yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah memuat mengenai pengawasan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>The 2018 RKA submitted to the Shareholders contained supervision on the application of good corporate governance principles.</p>
<p>Melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu berdasarkan KPI.</p> <p>Conduct individual performance evaluations of the Board of Commissioners based on KPI.</p>	<p>Telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Penetapan KPI Individual anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 2018</p> <p>Has been determined based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners decision letter regarding KPI for Individual members of PT Pelabuhan Indonesia II Board of Commissioners for 2018</p>
<p>Pendokumentasian penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris</p> <p>Document the assessments for prospective members of the Board of Commissioners</p>	<p>Telah dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN cq Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan</p> <p>Has been coordinated by the Ministry of SOEs, Deputy for Construction Business and Transportation Facilities and Infrastructure</p>
<p>Memastikan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP.</p> <p>Ensure the implementation of social responsibility activities in accordance with the program plan and budget stipulated in the RKAP.</p>	<p>Telah dilakukan penyesuaian untuk penyusunan RKAP selanjutnya</p> <p>Adjustments have been made in the preparation of the next Company's Annual Report.</p>

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
<p>Memastikan pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP. Ensure the implementation of the Partnership Program activities in accordance with the program plan and budget stipulated in the RKAP.</p>	<p>Telah dilakukan penyesuaian untuk penyusunan RKAP selanjutnya Adjustments have been made in the preparation of the next Company's Annual Report.</p>
<p>Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. The Call for the GMS to be carried out no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, without taking into account the summons and date of the GMS.</p>	<p>Telah dilakukan pemanggilan RUPS sebelum jangka waktu 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan The GMS was called within the period of 14 days before the date of the GMS</p>
<p>Melengkapi muatan Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi pengembangan kompetensi Karyawan: Pelatihan karyawan yang akan dilakukan, Persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan. • Mempertimbangkan informasi mengenai Akuntan Perseroan terkait waktu periode audit akuntan publik mengaudit laporan keuangan Perusahaan dan besarnya fee audit dan jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit dimuat dalam bab Profil Perusahaan. <p>Description of employee competency development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training of employees to be carried out, Equal opportunities for all employees. • Consider information regarding the Company's Accountants for the audit period, the public accountant auditing the Company's financial statements and the amount of audit fees and other services provided by accountants other than financial audit services, to be included in the Company Profile chapter. 	<p>Telah dilakukan pada penyusunan <i>Annual Report</i> Perusahaan tahun 2017. Adjustments have been made in the preparation of the Company's Annual Report 2017.</p>
<p>Melengkapi muatan Laporan Tahunan pada bagian informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan antara lain terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahasan tentang Struktur Modal (<i>capital structure</i>), mengenai Tingkat likuiditas Perusahaan yaitu rasio likuiditas. • Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. • Informasi material, antara lain mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi utang/Modal. <p>Completing the Annual Report content in the Company Performance Management Analysis and Discussion information section, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussion of Capital Structure, Company liquidity level, namely liquidity ratio. • Reporting financial information for events that are extraordinary and rare. • Material information, concerning Investments, Expansions, Divestments, Acquisitions, Debt / Capital Restructuring. 	<p>Telah dilakukan pada penyusunan <i>Annual Report</i> Perusahaan tahun 2017. Adjustments have been made in the preparation of the Company's Annual Report 2017.</p>

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
<p>Melengkapi muatan Laporan Tahunan pada bagian praktik Tata Kelola Perusahaan, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uraian Unit Audit Internal tentang Penjelasan Piagam Satuan Pengawasan Intern. • Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Konsumen tentang Informasi Biaya yang telah dikeluarkan. • Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai "Community Development Program", memuat informasi Program Pengembangan Seni Budaya. • Mempertimbangkan uraian program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dimuat dalam bab Tata Kelola Perusahaan. <p>Complete the Annual Report contents in the Corporate Governance practices section, regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description of the Internal Audit Unit explaining the Internal Audit Unit Charter. • Description of the corporate social responsibility activities, especially regarding the Company's commitment to Consumer protection regarding Costs incurred. • Description of the company's social responsibility activities and costs incurred, especially regarding the "Community Development Program", including information on the Cultural Arts Development Program. • Consider the training program descriptions to improve the Board of Directors competence in the Corporate Governance chapter. 	<p>Telah dilakukan pada penyusunan <i>Annual Report</i> Perusahaan tahun 2017.</p> <p>Adjustments have been made in the preparation of the Company's Annual Report 2017.</p>
<p>Menyempurnakan muatan dan kualitas <i>Annual Report</i> sesuai yang ditentukan dalam SK-16/S.MBU/2012</p> <p>Improve the content and quality of the Annual Report as determined in SK-16/S.MBU/2012</p>	<p>Annual Report Tahun 2017, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam K-16/S.MBU/2012</p> <p>The 2017 Annual Report has been prepared based on the provisions in SK-16/S.MBU/2012</p>
<p>Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap rancangan RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</p> <p>Shareholders to endorse the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJPP design</p>	<p>Berdasarkan pasal 6 butir (5) dan pasal 6 butir (6) Keputusan Menteri BUMN KEP-102/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, jika dalam 60 hari sejak Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap belum disahkan, maka Rencana Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan</p> <p>Based on article 6 item (5) and article 6 point (6) SOE Minister Decree KEP-102/MBU/2002 dated June 4, 2002, if the Draft of the Long Term Plan has not been fully ratified within 60 days, then the Long Term Plan Plan is deemed to have been approved</p>

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
<p>Pengesahan terhadap rancangan RJPP dan revisi RJPP oleh Pemegang Saham dilakukan tepat waktu yaitu tidak melebihi 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap</p> <p>Ratification of the RJPP design and revision by the Shareholders to be carried out on time, not exceeding 60 days after receipt of the complete RJPP design</p>	<p>Berdasarkan pasal 6 butir (5) dan pasal 6 butir (6) Keputusan Menteri BUMN KEP-102/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, jika dalam 60 hari sejak Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan</p> <p>Based on article 6 item (5) and article 6 point (6) SOE Minister Decree KEP-102/MBU/2002 dated June 4, 2002, if the Draft of the Long Term Plan has not been fully ratified within 60 days, then the Long Term Plan Plan is deemed to have been approved</p>
<p>RUPS mengesahkan/menyetujui RJPP dalam waktu kurang dari 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan.</p> <p>GMS ratification/approval of the RJPP to be less than 60 days after receipt of the complete RJPP design or before the RJPP period starts.</p>	<p>Berdasarkan pasal 6 butir (5) dan pasal 6 butir (6) Keputusan Menteri BUMN KEP-102/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, jika dalam 60 hari sejak Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan</p> <p>Based on article 6 item (5) and article 6 point (6) SOE Minister Decree KEP-102/MBU/2002 dated June 4, 2002, if the Draft of the Long Term Plan has not been fully ratified within 60 days, then the Long Term Plan Plan is deemed to have been approved</p>
<p>Menyelesaikan tindak lanjut audit dalam Rekapitulasi Daftar Temuan Audit tahun 2017 Bidang Pengadaan di Kantor Pusat maupun cabang.</p> <p>Complete the audit follow-up for the 2017 Audit Findings Recapitulation List in the Procurement Sector at Head Office and branches.</p>	<p>Pelaporan tindak lanjut audit dalam rekapitulasi daftar temuan audit tahun 2017 bidang pengadaan</p> <p>Audit follow-up reporting is in the recapitulation of the 2017 audit findings in the procurement sector</p>
<p>Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu</p> <p>Encourage all officials obliged to report their LHKPN, to prepare the report in a timely manner.</p>	<p>Perusahaan telah mendorong pejabat wajib lapor LHKPN dan menyusun LHKPN tepat waktu dengan memberikan surat</p> <p>The company encourages officials to report their LHKPN and compile the LHKPN on time by letter</p>
<p>Mendorong kepada sebagian pejabat wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu</p> <p>Encourage all officials obliged to report their LHKPN, to comply with the obligation to submit the LHKPN to the KPK in a timely manner.</p>	<p>Telah dilakukan surat pemberitahuan kepada pejabat wajib lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK tepat waktu</p> <p>A notification letter was sent to the officials requesting them to comply with the obligation to submit LHKPN to the KPK on time</p>
<p>Penilaian kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah RUPS</p> <p>The Board of Commissioners' performance assessment to be stated in the Minutes of GMS</p>	<p>Telah tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.</p> <p>As stated in the PT Pelabuhan Indonesia II Annual General Meeting of Shareholders regarding Ratifying the Annual Report for the Fiscal Year 2017.</p>

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 GCG Implementation Assessment

Area of Improvement	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
<p>Mengupayakan penyelesaian sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Endeavor to resolve disputes / problems related to business transactions with third parties.</p>	<p>Telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak ketiga dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Efforts have been made to resolve disputes / problems related to business transactions with third parties and have been reported to the Board of Commissioners.</p>
<p>Meningkatkan kinerja di setiap bidang antara lain kinerja organisasi dan strategi, sehingga layak untuk menjadi Perusahaan terbaik dan menjadi <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain Improve performance in all areas, including organizational performance and strategy, to enable the company to become the best and a benchmark for other companies</p>	<p>Kinerja setiap bidang telah ditingkatkan, beberapa kunjungan tamu juga telah dilakukan sesuai dengan daftar list tamu kunjungan 2018 dan daftar hadir tamu Performances in each field has improved, several guest visits have also been conducted according to the 2018 visiting guest list and guest attendance list.</p>
<p>Menginformasikan secara terbuka SOP Layanan dan SPM dalam website Perusahaan bagian "Our Service" sehingga publik dapat mengetahui standar pelayanan minimal operasional pelabuhan yang ditetapkan. Openly disclose the Service SOP and SPM on the Company's "Our Service" website so that the public can know the minimum port operational service standards.</p>	<p>Penyampaian SOP telah dilakukan secara terbuka pada website e-sop, sedangkan SPM terdapat pada website cabang pelabuhan SOP have been openly submitted to the e-sop website, while SPM is available on the port branch website.</p>

Seluruh rekomendasi *Area of Improvement* (Aoi) penilaian GCG tahun sebelumnya telah dilakukan, guna meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan IPC.

All previous Aoi recommendations on GCG assessment have been undertaken to improve Good Corporate Governance practices within the IPC

ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL

Superior Performance Assessment Criteria

IPC telah melaksanakan evaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Evaluasi ini mengacu pada standar Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui posisi IPC dalam mencapai Perusahaan kelas dunia sekaligus mendapatkan skor KPKU yang merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat dalam KPI Direksi.

KPKU diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE), mengingat MBCFPE telah terbukti sebagai sistem pengelolaan kinerja Perusahaan paling komprehensif yang dapat membuat sebuah Perusahaan menjadi unggul.

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan *self-assessment* pengelolaan BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN. Selain itu, KPKU memiliki 3 (tiga) peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN:

1. Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN, baik finansial maupun non finansial.
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik.
3. Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja dan untuk memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria Kinerja unggul BUMN terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Strategis
3. Pelanggan
4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan
5. Tenaga Kerja
6. Operasional
7. Hasil

Evaluasi kinerja ini berdasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian; proses dan hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

IPC has conducted a company performance evaluation based on Criteria for Superior Performance (KPKU) of SOEs. This evaluation refers to the standard of Excellence Performance Rating Criteria (KPKU) of SOEs issued by the Ministry of SOEs. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013. Evaluation is done to determine the position of IPC to reach world class company status while at the same time, to obtain KPKU score that is one of performance indicator of Board of Directors KPIs.

The KPKU is adopted and adapted from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE), as MBCFPE has proven to be the most comprehensive enterprise performance management system that can create successful company.

Performance Superior Performance Criteria (KPKU) is the foundation and reference in managing SOEs to achieve superior performance. KPKU can also be used as a tool for self-assessment implementation of SOE management and feedback mechanism to each SOE.

In addition, KPKU has 3 (three) important roles in strengthening SOEs' competitiveness, to:

1. Assist to improve the capability and performance of SOEs, both in financial and non-financial area.
2. Facilitate communication and sharing information on best practices.
3. Serve as a working tool for understanding and managing performance and for guiding organizational planning and learning.

ASSESSMENT CRITERIA

Criteria for superior performance of SOEs consists of 7 (seven) categories, namely:

1. Leadership
2. Strategic Planning
3. Customer Focus
4. Knowledge Measurement, Analysis, and Management
5. Labor Focus
6. Operation Focus
7. Business Results

This performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions; processes and results. The assessment factors for each of these dimensions are as follows:

ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL
Superior Performance Assessment Criteria

1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

- a. "Metode/Sistem (*Approach*)" adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada: (1) Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan,, (2) Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut, (3) Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- b. "Penerapan (*Deployment*)" mengacu pada sejauh mana: (1) metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, (2) Metode/Sistem diterapkan secara konsisten, (3) Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
- c. "Pembelajaran (*Learning*)" mengacu pada: (1) Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*), (2) Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*), (3) Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam Perusahaan.
- d. "Integrasi (*Integration*)" mengacu pada: (1) Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan Perusahaan. (2) Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses. (3) Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.

2. Faktor Penilaian hasil-hasil faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil Perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LETCI).

- a. "*Level*" mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini dibandingkan dengan target tahun ini maupun realisasi pencapaian tahun sebelumnya.

1. Process Assessment Factor

Factors used to assess Process are: Method/System (*Approach*), Deployment, Learning, and Integration or all is abbreviated as ADLI.

- a. "Method/System (*Approach*)" is a method/system designed to carry out the work. Assessment refers to: (1) Compliance of method/system with requirements in State-Owned Enterprise KPKU and operating environment, (2) Effectiveness of the use of the method/system, (3) The extent to which the method/system is repeatable and based on data and reliable information (e.g., structured and systematic).
- b. "Deployment" refers to the extent to which: (1) Method/System is applied according to its design, (2) Method/System is applied consistently, (3) Method/System is implemented by all function/work unit relevant according to design .
- c. "Learning" refers to: (1) Enhancement of Methods/systems through the cycle of evaluation and improvement, (2) Method/system innovation to promote breakthrough, (3) Sharing the results of refinement and innovation of methods/systems to other work units and other relevant process owners in the company.
- d. "Integration" refers to: (1) Alignment of the system/method with the requirements of the company. (2) Size, information and system of improvements have been complementary to each other across work units and across processes. (3) Work programs, processes, outcomes, analyzes, learning, and actions, are harmonized across processes and across work units to support the achievement of corporate objectives.

2. Assessment Factors: results of the factors used to evaluate company outcomes are *Level*, *Trend*, *Comparison* and *Integration* (LETCI).

- a. "*Level*" refers to: the current level of performance achievement compared to this year's target as well as the realization of previous year's achievements.

ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL

Superior Performance Assessment Criteria

- b. *“Trend”* mengacu pada: (1) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data *trend*) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir), (2) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil kinerja.
- c. *“Comparison”* mengacu pada: (1) Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap pembandingan yang sesuai misalnya, pesaing atau Perusahaan dalam industri sejenis, (2) Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan Perusahaan kelas dunia.
- d. *“Integration”* mengacu pada: (1) Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama. (2) Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang; (3) Hasil-hasil diharmonisaiakan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.

- b. *“Trend”* refers to: (1) Level of performance or ability improvement to maintain good performance (i.e., sharpness of trend data) over time (minimum in the last 3 (three) years), (2) Extent (level of implementation) of performance results.
- c. Comparison refers to: (1) Comparative performance of a firm relative to an appropriate comparison e.g., a competitor or company in a similar industry; (2) Comparison of firm performance relative to benchmarks or its industry leader, or to a world-class company.
- d. *“Integration”* refers to: (1) the size of results relating to performance requirements such as customers, products, markets, processes and work programs. (2) results that include valid indicators of future performance; (3) results are harmonized in various process and with other unit’s processes to support the Company’s objectives.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) Tahun 2017 Nomor: SEKTAP.48/11/PI.I, II, III, & IV/2017 dan Nota Dinas EVP Perencanaan Strategi Korporasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.: PW .06.01/20/12/1/KIN/REN/UT-18 tanggal 20 Desember 2018 perihal Permohonan Bantuan untuk menjadi Asesor Internal KPKU BUMN tahun 2018 di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), telah ditentukan bahwa Asesor KPKU PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

Based on the PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) Minutes of Agreement in 2017 Number: SEKTAP.48/11/PI.I, II, III, & IV / 2017 and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) EVP Corporate Strategy Planning Official memo No. : PW .06.01/20/12/1/KIN/REN/UT-18 dated December 20, 2018 regarding the Request for Assistance to become a KPKU BUMN Internal Assessor for 2018 in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), whereby it was determined that the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) KPKU Assessor in 2018 would be as follows:

No.	Nama Asesor Assessor Name	Instansi/Perusahaan Agency / Company	Dasar Penugasan Assignment Basis
1.	Puguh Harianto	PT Telkom Indonesia-Purnabakti	Surat Keluar EVP Perencanaan Strategi Korporasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. PW.06.01/20/12/2/KIN/REN/PI.II-18 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Asesor KPKU BUMN 2018 EVP Corporate Strategy Planning PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Outgoing Letter No: PW.06.01/20/12/2/KIN/REN/PI.II-18 concerning Request for Assistance as 2018 KPKU BUMN Assessor
2.	Wartono		Surat Keluar EVP Perencanaan Strategi Korporasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. PW.06.01/20/12/1/KIN/REN/PI.II-18 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Asesor KPKU BUMN 2018 EVP Corporate Strategy Planning PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Outgoing Letter No: PW.06.01/20/12/1/KIN/REN/PI.II-18 concerning Request for Assistance as 2018 KPKU BUMN Assessor

ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL
 Superior Performance Assessment Criteria

No.	Nama Asesor Assessor Name	Instansi/Perusahaan Agency / Company	Dasar Penugasan Assignment Basis
3.	Sumarman	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Surat Perintah EVP Perencanaan Strategi Korporasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.20.01/9/1/1/KIN/REN/PI.II-19 EVP Corporate Strategy Planning PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Outgoing Letter No: KP.20.01/9/1/1/KIN/REN/PI.II-19
4.	Riawan Raden		
5.	Raden Istafako Tawakal		

SKOR PENILAIAN

ASSESSMENT SCORE

	2018	2017	2016	2015	2014
Skor KPKU KPKU Score	593,5	553,50	532,25	479,25	448
	<i>Emerging Industry Leader</i>	<i>Good Performance</i>	<i>Good Performance</i>	<i>Good Performance</i>	<i>Early Improvement</i>

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Dari *Feedback Report* KPKU 2 (dua) tahun terakhir, berikut adalah jumlah *Opportunity for Improvement* (OFI) Asesmen KPKU khusus untuk penilaian proses. Pada tahun 2018, Manajemen sudah membuat rencana dan menindaklanjuti 82 OFI dalam *Action for Improvement* (AFI) dari Asesmen KPKU tahun 2017 dalam rangka persiapan asesmen KPKU berikutnya.

Pada Asesmen KPKU tahun 2018 terdapat 75 OFI yang akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

From the KPKU Feedback Reports for the last 2 (two) years, the following shows the number of KPKU Assessment Opportunities for Improvement (OFI) specifically for process evaluation. In 2018, Management planned and followed up 82 OFI in the Action for Improvement (AFI) for the 2017 KPKU Assessment in preparation for the next KPKU assessment.

In the 2018 KPKU Assessment there were 75 OFIs to be followed up in the following year.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TAHUN 2018, IPC MEMENANGKAN DUA PENGHARGAAN BERTARAF INTERNASIONAL. PENGHARGAAN PERTAMA ADALAH *GLOBAL PERFORMANCE EXCELLENT AWARD 2018 – BEST IN CLASS*, DARI ASIA PACIFIC QUALITY ORGANIZATION, INC. (APQO) DI ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB. PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KARENA IPC DINILAI MEMILIKI KINERJA YANG SANGAT BAIK DAN BERHASIL MENERAPKAN SISTEM BISNIS BERKELAS DUNIA.

PENGHARGAAN BERIKUTNYA ADALAH *BEST WATER MANAGEMENT INITIATIVE* UNTUK KATEGORI TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH THE ASSET PUBLISHING AND RESEARCH LTD., DI HONGKONG. PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KARENA IPC DINILAI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI BESAR DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN.

In 2018, IPC won two international awards. The first award was the 2018 Global Performance Excellent Award - Best in Class, from the Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO) in Abu Dhabi, United Arab Emirates. This award was given as IPC was considered as achieving an excellent performance and successfully implementing a world-class business system.

The next award was the Best Water Management Initiative in the Environmental Management Category given by The Asset Publishing and Research Ltd., in Hong Kong, this award was given as IPC was considered to have made a major contribution to maintaining environmental sustainability.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Social Responsibility Governance



Sebagai BUMN yang harus memberikan kontribusi positif bagi negeri, IPC memandang keberlanjutan dalam bisnis kepelabuhanan sebagai segenap upaya untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan yang sejalan dengan kerangka pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan memfasilitasi kegiatan yang menciptakan peluang kerja dan berusaha bagi banyak orang, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, mencegah pencemaran dan melakukan perlindungan lingkungan serta terlibat dalam upaya pengembangan masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan.

As a SOE that must contribute positively to the country, IPC looks at sustainability in the port business as all efforts to become a world-class port manager that excels in operations and services in line with the national economic growth framework. The Company facilitates activities that create employment and business opportunities for many people, protects human health and safety, prevents pollution and carries out environmental protection and is involved in efforts to develop communities around the Company's work area.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 Social Responsibility Governance

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal termasuk masyarakat di sekitar wilayah beroperasi melalui perilaku transparan dan etis. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada para Pemangku Kepentingan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dimiliki berbagai kebijakan Perseroan dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II-16 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan IPC;
2. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.56/6/1/PI.II-13 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja dan Pensiunan Beserta Keluarganya di Lingkungan IPC;
3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: KP.07.02/24/4/1/KRF/UT/PI.II-18 tentang Penghasilan bagi Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR); dan
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.568/19/1/2/PI.II-17 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Pelanggan.

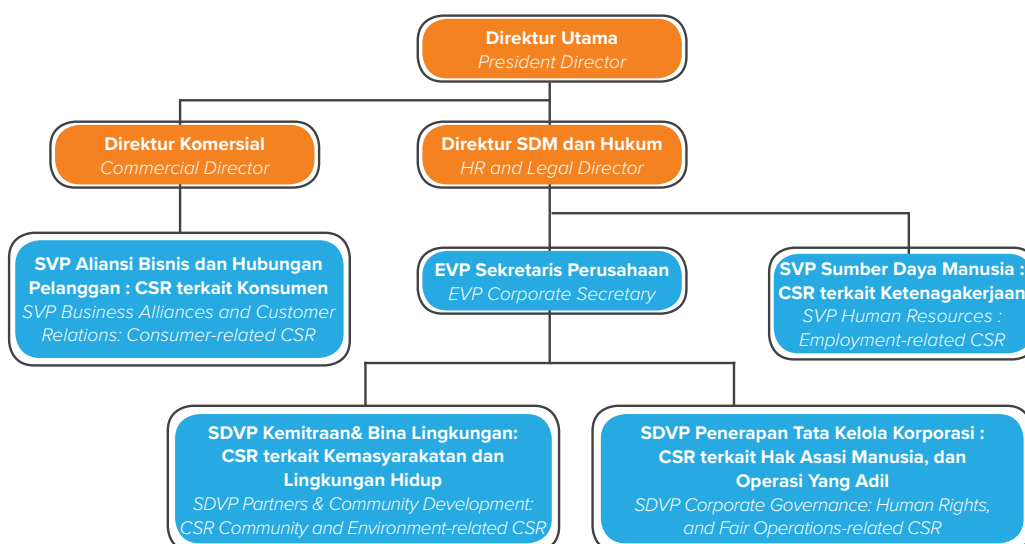
Organisasi dan pengorganisasian inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan disajikan pada bagan di bawah ini:

COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company is fully aware that business sustainability is highly dependent on the creation of mutually beneficial relationships between all stakeholders, both external and internal, including communities around the operating area, through transparent and ethical behavior. The Company is committed to implementing the principles of transparency and accountability to Stakeholders. This is represented by the Company's sustainable development policies. These policies include:

1. IPC Board of Directors Decree Number: HK.568/30/12/7/PI.II-16 concerning Development of Workers in IPC;
2. IPC Board of Directors Decree Number: HK.56/6/1/PI.II-13 concerning maintenance and health services for workers and retirees and their families in IPC;
3. IPC Board of Directors Decree Number: KP.07.02/24/4/1/KRF/UT/PI.II-18 concerning income for workers in PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. IPC Directors Decree concerning PKBL & CSR (Number HK.568/8/5/1/PI.II-17);
5. Board of Directors Decree No HK.568/19/1/2/PI.II-17 dated January 19, 2017 concerning Guidelines for Managing Customer Relations.

The Corporate Social Responsibility Organization and Organizing Initiatives can be seen in in the chart below:



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL Social Responsibility Governance

METODE DAN RUANG LINGKUP DUE DILIGENT TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERSEROAN

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, IPC terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada kegiatan yang dilakukan. Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan telah memenuhi prinsip:

1. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memenuhi harapan para stakeholder;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Konsisten dengan norma perilaku internasional;
5. Terintegrasi ke seluruh kegiatan usaha dan hubungan kerjasama Perseroan; dan
6. Mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh bagian organisasi.

Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki *due diligent* dari kegiatan tanggung jawab perusahaannya yang meliputi:

- Survei kepuasan karyawan,
- Survei pelanggan,
- Survei kepuasan pemasok, dan
- *Focus Group Discussion*.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan.

Perseroan telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di masing-masing Cabang Pelabuhan. Perseroan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan dari perspektif pelanggan dengan survei kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, survei pelanggan dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga transparansi, independensi dan akuntabilitas hasil. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang menggunakan layanan jasa kapal, layanan bongkar muat peti kemas, bongkar muat barang non peti kemas, serta layanan terminal penumpang yang merupakan kriteria survei.

DUE DILIGENT METHODS AND SCOPE ON THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

To support the Company's business continuity that is oriented towards economic, social and environmental aspects, the Company conducts sustainable activities as part of its corporate social responsibility that have a positive impact and reduces any negative impact on the activities carried out. The Company always ensures that the Company's social responsibility activities meet the principles of:

1. Contributing towards sustainable development, including community health and welfare;
2. Meeting the expectations of stakeholders;
3. Complying with laws and regulations;
4. Consistency with international behavioral norms;
5. Integrated with all business activities and Company cooperative relations; and
6. Encouraging responsible behavior in all parts of the organization.

Therefore, the Company performs due diligent on its corporate responsibility activities through:

- Employee satisfaction surveys
- Customer surveys
- Supplier satisfaction surveys
- Focus Group discussions
- Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Reports.

The Company provides a means for delivering customer complaints through various channels in each Port Branch. The Company monitors and evaluates the performance of port services from a customer's perspective with customer satisfaction and loyalty surveys. Customer surveys are carried out by third parties to maintain transparency, independence and accountability of results. The selected respondents are customers who use ship services, container loading and unloading services, loading and unloading of container goods, and passenger terminal services as survey criteri

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERSEROAN

IPC mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perseroan, yakni pelanggan, Pemegang Saham dan investor, karyawan, Pemerintah, mitra kerja, media massa, masyarakat dan asosiasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, keterlibatan Pemangku Kepentingan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

IMPORTANT STAKEHOLDERS IMPACTED OR AFFECTED BY THE COMPANY'S ACTIVITIES

IPC has identified its stakeholders based on their interests and relationships with the Company, namely customers, shareholders and investors, employees, government, work partners, mass media, society and associations. Based on this identification, the involvement of IPC Stakeholders can be seen in the following table:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode Pelibatan Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Topik Utama yang Diajukan Main Topics
Pelanggan Customers	<ol style="list-style-type: none"> Customer Gathering di masing-masing Cabang Pelabuhan. Pertemuan langsung dengan Pelanggan. Coffee Morning di masing-masing Cabang Pelabuhan. Customer Award 	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di tiap Cabang Pelabuhan. 125 pertemuan di seluruh Cabang Pelabuhan. 1 (satu) tahun 4 (empat) kali di tiap Cabang Pelabuhan. 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di kantor pusat. 	Hubungan komersial/customer retention/kualitas layanan Commercial relations / customer retention / service quality
Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal 2 (dua) pertemuan dalam 1 (satu) tahun At least 2 (two) meetings per year	Dividen/pengembangan usaha/ tata kelola/manajemen Dividends / business development / governance / management
Karyawan Employees	Pertemuan dengan Serikat Pekerja Meeting with Workers' Union	Minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun Minimum 4 (four) times per year	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan Employment / welfare
Pemerintah Government	Pelaporan Kinerja Performance Reporting	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah terkait Performed throughout the year based on invitations from the relevant government	Development/ pengembangan usaha/investasi Development / business / investment
Mitra Kerja Work Partners	Proses Operasional Operational Process	Sepanjang tahun Throughout the year	Hubungan komersial Commercial relations
Media Massa Mass Media	Konferensi Pers/Siaran Pers/ Keterbukaan Informasi Press Conference / Press Release / Information Disclosure	Sepanjang tahun Throughout the year	Kinerja usaha/ tata kelola/ keterbukaan informasi Business performance / governance / information disclosure
Masyarakat Communities	Penerapan CSR Implementation of CSR	Sepanjang tahun Throughout the year	Pelaksanaan program Program implementation
Asosiasi Associations	Pertemuan anggota asosiasi Association member meeting	Minimal 4 (empat) pertemuan dalam 1 (satu) tahun At least 4 (four) meetings per year	Pengembangan dunia kepelabuhanan dan peningkatan kerja sama The development of the port world and increased cooperation

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 Social Responsibility Governance

ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERSEROAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, IPC melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

IMPORTANT STAKEHOLDERS IMPACTED OR AFFECTED BY THE COMPANY'S ACTIVITIES

IPC has identified its stakeholders based on their interests and relationships with the Company, namely customers, shareholders and investors, employees, government, work partners, mass media, society and associations. Based on this identification, the involvement of IPC Stakeholders can be seen in the following table:

Isu Penting <i>Important Issues</i>	Keterangan <i>Description</i>
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja IPC selama tahun pelaporan. Describes IPC's achievements and performance during the reporting year.
Anti Korupsi Anti Corruption	Menggambarkan komitmen IPC dalam mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan <i>fraud</i> . Describes IPC's commitment to creating a workplace that is clean from fraud.
Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance	Menggambarkan komitmen IPC dalam mewujudkan dalam menjalankan seluruh kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan, yaitu menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait dengan lingkungan, pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, serta perbaikan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan (continual improvement). Describes IPC's commitment to carrying out all operational activities that are environmentally sound, by obeying the laws and regulations and other requirements related to the environment, preventing environmental pollution, and improving the sustainable management system (continual improvement).
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	Menggambarkan Komitmen IPC dalam mengendalikan risiko kecelakaan di tempat kerja yang dapat berpengaruh produktivitas. Describes IPC's commitment to controlling the risk of accidents in the workplace that can affect productivity.
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Menggambarkan Komitmen IPC dalam memberikan pelatihan serta peningkatan kompetensi secara merata, aktif dan berkesinambungan untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkualitas dan berkinerja tinggi. Describes IPC's Commitment to providing training and competency enhancement evenly, actively and continuously to create competent, high quality and high-performing human resources.
Masyarakat Setempat Local Community	Menggambarkan Komitmen IPC untuk menopang kesejahteraan masyarakat setempat melalui bimbingan ataupun bantuan. Describes IPC's Commitment to supporting the welfare of the local community through guidance or assistance.
Sosial Ekonomi Socio Economics	Menggambarkan Komitmen IPC dalam memberikan kebutuhan pelanggan dan menerapkan program-program yang fokus dan berorientasi pelanggan. Describes IPC's commitment to providing customer needs and implementing focused and customer-oriented programs.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perseroan dengan dimilikinya rencana kerja dan anggaran yang relevan. Strategi CSR menekankan pada upaya menciptakan manfaat bagi perusahaan, *stakeholders* dan pembangunan berkelanjutan. Perseroan menitikberatkan

STRATEGY AND WORK PROGRAMS FOR ADDRESSING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

Social, economic and environmental issues have been well managed by the Company with the right relevant work plans and budgets. The CSR strategy emphasizes the efforts required to create benefits for the Company, stakeholders and sustainable development. The Company emphasizes

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Social Responsibility Governance

pengelolaan isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Rencana Kerja Manajemen terkait dengan program kemitraan meliputi upaya preventif dan upaya penyehatan kembali. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan meningkatnya pinjaman macet yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pinjaman (termasuk proses evaluasi dan analisis yang akurat serta pemberlakuan jaminan) serta optimalisasi dan pengintensifan fungsi Pembinaan, Monitoring dan Penagihan Langsung untuk memantau perkembangan usaha Mitra Binaan dan kedisiplinan Mitra Binaan dalam penggunaan dana pinjaman dan dalam pengembalian pinjaman. Upaya penyehatan kembali pinjaman macet dilakukan melalui prosedur *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (penyesuaian persyaratan) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/07/2017/ tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Rencana Kerja Manajemen terkait dengan program Bina Lingkungan disusun Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/07/2017/ tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, manajemen telah menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan meliputi 7 objek bantuan, yaitu :

1. Bantuan kepada Korban Bencana Alam
2. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
5. Bantuan Sarana Ibadah
6. Bantuan Pelestarian Alam
7. Bantuan Sosial Masyarakat Pengentasan Kemiskinan

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan (*assets safeguarding*).

social, economic and environmental management through the partnership and community development programs. The partnership program Management Work Plan covers preventive efforts and restructuring efforts. Preventive measures are taken to prevent any increase in bad loans made by applying the precautionary principle during loan disbursements (using an accurate evaluation and analysis process and enforcing guarantees), and optimizing and intensifying the Guidance, Direct Monitoring and Billing functions to monitor the Partners' business development and discipline in their use of loan funds and its repayment. Efforts for restructuring bad loans are made by rescheduling and reconditioning in accordance with the provisions in the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/07/2017/ July 5, 2017 as the Second Amendment to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the SOE Small Business Partnership and Community Development Program.

The Community Development Program Management Work Plan was prepared in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-02/MBU/07/2017/ dated July 5, 2017 as the Second Amendment to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the SOE Small Business Partnership and Community Development Program. Management has distributed Community Development Program assistance covering 7 areas of assistance, including:

1. Assistance to Victims of Natural Disasters
2. Education and / or training assistance
3. Health Improvement Assistance
4. Assistance for Public Facilities and Infrastructure Development
5. Place of worship Facilities
6. Nature Conservation Assistance
7. Social Assistance for Poverty Alleviation

The target of the Community Development Program are communities located near the Company using the assistance for community empowerment so as to create a pattern of harmonious and mutually beneficial relationships, namely by creating a conducive climate for the continuity of business activities and safeguarding of Company assets.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Social Responsibility Governance

Selain rencana kerja jangka pendek, Perseroan juga telah menyusun *Roadmap* kebijakan implementasi CSR yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 yang sejalan dengan *Roadmap Corporate*, seperti yang diuraikan di atas. Dalam *roadmap* telah ditetapkan sasaran untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu *Synergize*, *Energize* dan *Sustainable*.

As well as the short-term work plan, the Company has also compiled a Roadmap for implementing its CSR policies covering 2018 to 2020 in line with the Corporate Roadmap, as described above. In the roadmap, the targets set for 2018, 2019 and 2020 are called Synergize, Energize and Sustainable.

TEMA ROADMAP IPC

Tema :“ALIGNING SUSTAINABLE PORT”
Sub Tema :Menyelaraskan Strategi Menuju Pelabuhan Berkelanjutan

IPC ROADMAP THEME

Theme :“ALIGNING SUSTAINABLE PORT”
Sub Theme :Aligning Strategies Towards Sustainable Ports

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting tanggung jawab sosial. Perseroan telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Peraturan-Peraturan yang telah dipatuhi oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IS MORE THAN JUST AN OBLIGATION

The Company also reviews all regulations related to important social responsibility issues. The Company carries out social responsibility as an obligation and exceeds its obligations well. The regulations that have been complied with by the Company include:

Kegiatan <i>Activities</i>	Dasar Regulasi <i>Basic Regulations</i>
Ketenagakerjaan Employment	Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
Keselamatan Kerja Work Safety	1. Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1. Law No. 01 of 1970 concerning Occupational Safety and Health. 2. Republic of Indonesia Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management Systems.
Lingkungan Hidup Environment	Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In accordance with the 2003 Law No. 19 mandate regarding State-Owned Enterprises and the 2007 Law No. 40 regarding Limited Liability Company, and in accordance with the 2009 Law No. 32 regarding Environmental Protection and Management
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Partnership Program and Community Development Program	Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. SOE Ministry Regulation Per-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to SOE Ministry Regulation No. Per-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership Program and Community Development Program.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 Social Responsibility Governance

Kegiatan <i>Activities</i>	Dasar Regulasi <i>Basic Regulations</i>
Program Anti Korupsi Anti-Corruption Program	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Selain memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan di atas, IPC juga memiliki berbagai macam kebijakan internal yang telah dilaksanakan dengan baik.

In addition to fulfilling the laws and regulations above, IPC also has internal policies that have been implemented.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang rutin dilaksanakan oleh IPC, sebagai berikut:

Social responsibility activities IPC, as follows:

- a. Kapal dan Mobil Pembersih Sampah
- b. Penyulingan Air Laut
- c. Pengelolaan Limbah Kapal

- a. Garbage Cleaning Ships and Vehicles
- b. Seawater Distillation
- c. Ship Waste Management

BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Selama tahun 2018 IPC telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk Program Kemitraan sebesar Rp1,5 miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp19,44 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan tanggung jawab sosial di luar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melekat pada tiap-tiap kegiatan operasional yang terkait.

COST OF SOCIAL RESPONSIBILITY

During 2018 IPC implemented the Partnership and Community Development Program with costs incurred for the Partnership Program amounting to Rp1.5 billion and the Community Development Program amounting to Rp19.44 billion. Whereas the social responsibility financing other than the Partnership and Community Development Program is inherent in each of the related operational activities.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related to Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin meninggalkan pekerjaan. Perseroan juga telah memiliki sarana penanganan keluhan kesah karyawan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Dalam rumusan terhadap hak asasi manusia didasari dalam pengelolaan hubungan industrial dimulai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memayungi kepentingan pekerja dan Perusahaan dalam aspek ketenagakerjaan. Dengan ruang lingkup yakni hubungan kerja (meliputi pengakuan para pihak, jaminan para pihak, kewajiban dan fasilitas Serikat Pekerja), Waktu kerja, serta keluhan kesah, Bipartit dan Tripartit.

RENCANA KEGIATAN

Perseroan menargetkan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini ditujukan untuk membina hubungan industrial secara proporsional serta menciptakan hubungan yang sinergis, *mutual understanding*, *mutual respect*, *mutual trust*, dan *mutual benefit*. Selain itu, kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan *stakeholder*.

LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia meliputi:

1. Pengakuan dan Jaminan Bagi Serikat Karyawan
Perseroan telah mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi Pekerja yang didirikan secara sah yang mewakili anggotanya untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan perundingan dengan manajemen mengenai hubungan kerja. Serikat Pekerja juga telah mengakui bahwa Perseroan mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin dan menjalankan Perseroan sesuai dengan kebijakan manajemen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

COMMITMENT AND POLICIES

IPC is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). Social responsibility related to human rights includes prevention of acts of discrimination, freedom of association, work time arrangements, permission to leave work. The company also has facilities for handling complaints from employees. The policies are contained in the Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the Pelabuhan Indonesia II Workers Union.

SCOPE AND FORMULATION OF RIGHTS HUMAN ASSOCIATION

In the formulation of human rights based on industrial relations management starts from implementation Collaborative Collective Labour Agreement (CLA) workers and companies in the aspect of employment. With the scope of work relations (including recognition of the parties, guarantees of the parties, obligations and Trade Union facilities), Working time, and complaints, Bipartite and Tripartite.

ACTIVITY PLAN

The company targets to always follow the principles of human rights. This is intended to foster proportional industrial relations and create synergic relationships, mutual understanding, mutual respect, mutual trust, and mutual benefits. In addition, the responsibility activities related to human rights are expected to have a positive impact on improving the productivity and performance of the Company so that in the end it can have an influence on improving employee welfare improvement in accordance with stakeholder expectations.

SCOPE AND IMPLEMENTATION

Corporate social responsibility activities related to human rights include:

1. Recognition And Guarantees For Employees
The Company recognizes Workers Unions as organizations established to legally represent their members to coordinate, consult and negotiate with management regarding work relations. The Workers Union has also acknowledged that the Company has the rights and obligations to lead and run the Company in accordance with management policies with due observance of the applicable provisions.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Corporate Social Responsibility Related to Human Rights

Perseroan juga telah menjamin untuk tidak melakukan diskriminasi atau tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pekerja yang dipilih oleh Serikat Pekerja atau ditunjuk oleh Pengurus menjadi Wakil Serikat Pekerja di dalam kapasitasnya untuk melaksanakan tugas. Perseroan juga menjamin untuk menyelesaikan dengan Serikat Pekerja atas setiap keluhan Pekerja, baik yang diajukan secara langsung kepada Pengusaha maupun melalui Serikat.

IPC memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan yang tidak mengikat serta perijinan/dispensasi untuk menunjang kegiatan operasional dan melaksanakan program kerja serikat pekerja. Dalam hal ini, Perseroan menyediakan fasilitas ruang kantor kesekretariatan beserta kelengkapannya yang memadai. Hal ini merupakan salah satu upaya Perseroan untuk pencegahan pelanggaran HAM.

2. Waktu Kerja, Lembur, Cuti Dan Izin Meninggalkan Pekerjaan

Perseroan telah menetapkan waktu kerja, lembur, cuti dan izin meninggalkan pekerjaan dan upah lembur dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Jumlah waktu kerja para Konsistensi IPC selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Jumlah jam kerja IPC adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- b. Bagi Pekerja yang bekerja melebihi jumlah jam kerja selama 1 (satu) bulan karena pengaturan sistem kerja diberikan uang lembur. Dengan besaran uang lembur per jam ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi Pekerja yang bekerja pada hari libur nasional berhak mendapat kompensasi kehadiran yang besarnya di atur dalam Surat Keputusan Pengusaha.
- d. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus terhitung sejak diangkat sebagai Pekerja dalam Masa Percobaan.
- e. Cuti sakit diberikan kepada Pekerja yang sakit minimal selama 1 (satu) hari dan maksimal selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Dokter Ahli.
- f. Cuti bersalin diberikan kepada Pekerja wanita yang melahirkan. Lama cuti bersalin adalah 1,5 (satu

The Company has guaranteed not to discriminate or pressure either directly or indirectly against workers selected by the Workers Union or appointed by the Management to become a Representative of the Workers Union in their capacity to carry out their duties. The Company also guarantees to settle with the Workers' Union any employee complaints, whether submitted directly by the Employer or through the Union.

The Company provides non-binding facilities and funding as well as licensing / dispensation to support operational activities and carry out Workers Union work programs. In this case, the company provides secretarial office space facilities along with adequate equipment. This is one of the Company's efforts to prevent human rights violations.

2. Working Time, Overtime, Leave And Permission To Be Absent From Work

The Company established work hours, overtime, leave and permission to be absent, and overtime wages by taking into account the following human rights principles:

- a. Total working hours for IPC Consistency for 5 (five) days. The number of IPC working hours at 8 (eight) hours in 1 (one) day with a maximum of 40 (forty) hours in 1 (one) week.
- b. For workers who work more than the number of working hours in 1 (one) month due to the work system arrangement is given overtime. With the amount of overtime pay set according to the applicable legal provisions.
- c. Workers who work on national holidays are entitled to compensation in the form of the amount set in the Company Decree.
- d. Annual leave is given to employees who have worked for at least 1 (one) year continuously from the time they are appointed as Workers in their Trial Period.
- e. Sick leave is given to sick workers for at least 1 (one) day and a maximum of 1 (one) year based on a doctor's certificate.
- f. Maternity leave is given to pregnant female workers. The length of maternity leave is 1.5 (one and a half)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related to Human Rights

setengah) bulan sebelum persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah persalinan.

- g. Cuti gugur kandungan diberikan kepada Pekerja wanita sesuai rekomendasi dokter.
- h. Cuti karena alasan penting diberikan kepada karyawan dengan alasan sebagai berikut:
 - Ibu/bapak, istri/suami, anak, mertua sakit keras atau meninggal dunia diberikan cuti selama 2 (dua) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender.
 - Melangsungkan perkawinan yang pertama diberikan cuti selama 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kalender.
 - Melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, diberikan cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- i. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan kepada karyawan adalah sebagai berikut:
 - Khitanan anak Pekerja selama 2 (dua) hari kerja.
 - Pernikahan anak Pekerja selama 2 (dua) hari kerja.
 - Pekerja pindah rumah selama 2 (dua) hari kerja.
 - Istri Pekerja melahirkan atau keguguran selama 2 (dua) hari kerja.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan HAM yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham.

BIAYA

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait Hak Asasi Manusia (termasuk biaya tunjangan cuti untuk karyawan IPC) sebesar Rp28.690.903.539

DAMPAK, PENCAPAIAN DAN RISIKO

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip HAM, pada tahun 2018 hasil *Engagement Ratio Index* (ERI) mengalami kenaikan menjadi 4,27 skala Likert dibandingkan tahun 2017 dengan skor sebesar 4,16 skala Likert.

Namun demikian Perseroan akan menghadapi risiko jika terjadi pelanggaran di bidang HAM. Risiko tersebut antara lain adalah risiko tingginya *turnover* karyawan atau rendahnya *engagement* karyawan. Di samping itu, jika pelanggaran HAM terekspos di media maka akan memunculkan risiko reputasi bagi perusahaan.

months before delivery and 1.5 (one and a half) months after delivery.

- g. Abortion leave is given to female workers as recommended by the doctor.
- h. Leave due to important reasons are given to employees for the following:
 - Mother / father, wife / husband, child, parents-in-law are seriously ill or dies, leave is given for 2 (two) days to 7 (seven) calendar days.
 - For first marriage leave is given for 2 (two) to 7 (seven) calendar day.
 - Carrying out pilgrimage to the holy land, leave is given for a maximum of 45 (forty five) calendar day.
- i. Permits to be absent from work are given as follows:
 - Circumcision of workers' children of 2 (two) working days.
 - Marriage of workers' children of 2 (two) working days.
 - Workers moving house of 2 (two) working days.
 - Workers' Wife giving birth or miscarriage of 2 (two) working days.

The Company has a mechanism for reporting human rights implementation activities results as part of the management report. The management report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners for submission to the shareholders.

COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to Human Rights (including the cost of leave for IPC employees) was Rp28,690,903,539

IMPACT, ACHIEVEMENT AND RISK

By applying the human rights principles, in 2018 the Engagement Ratio Index (ERI) increased to 4.27 on the Likert scale compared to 4.16 in 2017.

However, the Company will face risks if violations occur in the field of human rights. These risks include the risk of high employee turnover or low employee engagement. In addition, if human rights violations are exposed in the media, there will be a risk to the reputation of the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI ADIL

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Salah satu komitmen membangun budaya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang dilakukan oleh Insan IPC adalah dengan melakukan kepatuhan pada Kode Etik Bisnis. IPC telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakannya operasi yang adil diantaranya kebijakan kode etik dan *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan tersebut dibangun di atas fondasi yang kuat dari visi, misi serta tata nilai Perseroan yang diimplementasikan di seluruh fungsi serta seluruh wilayah operasional Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di industri jasa pelabuhan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Kode Etik merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA KEGIATAN

IPC senantiasa berusaha dalam menjalankan operasi yang adil. IPC menargetkan seluruh insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perseroan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi pencegahan *fraud*, *Whistleblowing System* (WBS), penghormatan terhadap Hak Intelektual (HAKI), larangan gratifikasi/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, aktivitas politik dan sosial, serta pencegahan benturan kepentingan.

LINGKUP DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN FRAUD

Fraud adalah tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan atau gratifikasi, penggelapan, penipuan, maupun pemerasan di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari semangat untuk menciptakan BUMN

COMMITMENT AND POLICIES

One of the commitments to building a culture of good corporate governance (GCG) carried out by IPC personnel is through Compliance with the Business Ethics Code. IPC has various policies governing fair operations including a code of ethics and a Whistleblowing System (WBS). The policies are built on the strong foundation of the Company's vision, mission and values that are implemented in all functions and all operational areas of the Company.

The Company is committed to complying with all government provisions and implementing those standard that apply in the port service industry, in the field of governance and in general business practices. The Code of Ethics is a form of commitment and compliance with applicable laws and regulations.

TARGET ACTIVITIES

IPC always endeavors to carry out fair operations. IPC targets all IPC personnel to behave well in carrying out the Company's activities as well as creates a healthy and comfortable working atmosphere within the Company. This is to minimize opportunities for irregularities and to build a good Company reputation. Therefore, the Company constantly strives to uphold the fair operations policies to increase the value for the Company's stakeholders, which in turn will impact on the Company's rating.

SCOPE AND FAIR OPERATION FORMULATION

The fair operations activities included fraud prevention, Whistleblowing System (WBS), respect for Intellectual Rights, prohibition from gratification / acceptance of gifts / souvenirs and entertainment, political and social activities, and prevention of conflicts of interest.

SCOPE AND IMPLEMENTATION FRAUD PREVENTION

Fraud is cheating, corruption, theft, violation of Company policies and regulations, conflicts of interest, bribery or gratuities, embezzlement, fraud, and extortion in the Company. As part of the spirit to create Clean SOEs, the Company takes preventive and curative approaches to

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI ADIL Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

Bersih, Perseroan melakukan pendekatan preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan *reminder* tentang Kode Etik Bisnis yang harus dilakukan seluruh Insan IPC setiap tahun serta kegiatan pelatihan dan promosi anti korupsi di lingkungan Perusahaan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Whistleblowing System diperkenalkan sejak tahun 2014 untuk memperkuat pelaksanaan GCG yang memberikan jalan bagi seluruh Insan IPC dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis maupun *fraud*, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Untuk menjaga independensi, WBS dikelola oleh pihak ketiga yang bertugas menerima dan mengawasi pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim IPC Bersih sebagai *counterpart*.

PENGHORMATAN TERHADAP HAK INTELEKTUAL (HAKI)

Dalam menjalankan bisnis, IPC senantiasa menghargai karya seseorang atau institusi dan memberikan penghormatan terhadap hak intelektual seseorang atau institusi. Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merek dagang. IPC mengedepankan sikap:

1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
2. Seluruh insan IPC harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan.
3. Insan IPC harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.
4. Seluruh Insan IPC harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perseroan. IPC berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.

LARANGAN GRATIFIKASI/PENERIMAAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN

Insan IPC dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan/ atau hiburan dari setiap pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis atau pesaing IPC, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kedudukan/

prevent fraud. The preventive approach is carried out through socialization and reminders of the Code of Business Ethics that must be carried out by all IPC Personnel every year as well as training and promotion of anti-corruption activities within the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Whistleblowing System was introduced in 2014 to strengthen the implementation of GCG and provides a way for all IPC Personnel and other Stakeholders to report indications of violations of the Business Ethics Code or fraud, based on evidence that can be accounted for and with good intentions. To maintain independence, the WBS is managed by a third party tasked with receiving and supervising complaints both internally and externally and making monthly reports to the IPC Bersih Team as a counterpart.

RESPECT FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In conducting business, IPC always respects the work of a person or institution and respects the intellectual rights of a person or institution. Intellectual property rights are intangible assets that are the result of creativity such as patents, copyrights and trademarks. IPC promotes the following attitudes:

1. Respect the intellectual property rights of others.
2. All IPC personnel must actively participate in protecting the intellectual property rights of the Company.
3. IPC personnel must comply with the laws and regulations governing intellectual property rights.
4. All IPC personnel must report the work they produce both during and outside working hours, if the work is related to the business or operations of the Company. IPC has the right to all benefits (exclusive benefits) from patents, and others related to the results of the work referred to above.

PROHIBITION AGAINST GRATIFICATION / RECEIPT OF GIFTS / SOUVENIRS AND ENTERTAINMENT

IPC Persons are prohibited from receiving or requesting directly or indirectly gifts / favors and / or entertainment from any party that does not have a business relationship or is a competitor of IPC, which aims to obtain information, or something that is not justified by the applicable legal provisions, or to influence parties to do and / or not do anything related to their position / title. If IPC Personnel

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI ADIL

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

jabatan. Apabila Insan IPC ditawarkan/diberikan Hadiah/Cenderamata dan/atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi wajib melakukan penolakan dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL

IPC memberikan hak bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi politik, mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan politik.

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada Insan IPC yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau rekan kerja. Dalam menghadapi adanya benturan kepentingan maka setiap Insan IPC dilarang untuk:

1. Terlibat dalam pengembalian keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan IPC dalam proses pengadaan untuk kepentingan Perseroan yang dimiliki keluarga atau teman, atau perusahaan dimana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan.
2. Berupaya selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan yang harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan langsung, atasan tidak langsung maupun Pemimpin Unit Pengelola SDM.

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi kepada *vendor* terkait dengan operasi yang adil yang telah dituangkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa.

BIAYA

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait operasi yang adil (termasuk pelaksanaan program *Whistleblowing System* yang bekerjasama dengan pihak ketiga) sebesar Rp515.718.000

are offered / given Gifts / Favors and / or Entertainment that are not in accordance with the provisions stipulated in the Gratuity Control Guidelines, they must refuse politely, by explaining these policies and rules to the Third Parties.

POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

IPC honors the rights for employees to convey political aspirations, IPC requires that the Directors and employees comply with all laws and regulations governing the Company's involvement in political affairs.

PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

Conflicts of interest occur or may occur if IPC personnel have family relationships or friendships with competitors, vendors, or coworkers. In the face of conflicts of interest, all IPC Personnel are prohibited from:

1. Engaging in decision making or trying to influence IPC's decisions in the procurement process for the interests of a company owned by family or friends, or a company where family or friends are decision-making officials.
2. Try to always avoid all forms of family involvement in business relationships to avoid conflicts of interest. All forms of transactions carried out with involvement must be avoided and discussed in advance with direct supervisors, indirect supervisors or HR Management Unit Leaders.

The Company always carries out socialization with vendors regarding fair operations, as outlined in the procurement of goods and services guidelines.

COST

For 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to fair operations (including operating the Whistleblowing System program in collaboration with a third party) amounted to Rp515,718,000.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI ADIL

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

DAMPAK, PENCAPAIAN DAN RISIKO

Dengan komitmen penuh dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan serta kegiatan usaha IPC dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh para Pemangku Kepentingan. Selama tahun 2018, IPC telah mampu meningkatkan laba tahun berjalan sebesar 10,20% di tahun 2018.

Namun demikian Perseroan akan menghadapi risiko jika terjadi pelanggaran terkait operasi yang adil. Perseroan akan menghadapi risiko materiil yaitu hilangnya aset Perseroan maupun imateriil yaitu menurunnya reputasi Perseroan. Di samping itu, beberapa *Stakeholder* juga akan dirugikan karena tingginya biaya transaksi yang muncul dari adanya benturan kepentingan yang merupakan pelanggaran praktik operasi yang adil.

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK

Penanganan konflik terkait operasi yang adil dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system* dan *code of conduct*. Uraian tentang *whistleblowing system* dan *code of conduct* disajikan dalam tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Stakeholder berharap bahwa mekanisme *whistleblowing system* dan *code of conduct* ditegakkan sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

SERTIFIKASI PRAKTEK OPERASI YANG ADIL

Sampai dengan Desember 2018, Perseroan belum memiliki sertifikasi dan penghargaan terkait operasi yang adil.

PENGHARGAAN PRAKTEK OPERASI YANG ADIL

IPC telah memperoleh penghargaan sebagai Juara 2 Kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik yang diselenggarakan oleh BUMN Track pada tahun 2018.

IMPACT, ACHIEVEMENT AND RISK

With full commitment to the implementation of social responsibility related to fair operation practices, IPC has been able to increase trust, and business activities have run well and produced achievements as expected by the Stakeholders. During 2018, IPC increase its current year's profit by 10.20%. IPC received the 2nd Winner Award in the Best Corporate Governance (GCG) Category from BUMN Track in 2018.

However, the Company will face risks if violations occur regarding fair operations. The Company could face material risks, such as the loss of the Company's assets, and non-material risks, such a decline in the Company's reputation. In addition, some Stakeholders could also be disadvantaged due to high transaction costs arising from conflicts of interest that are violation of fair operation practices.

CONFLICT HANDLING MECHANISM

Handling conflicts related to fair operations is carried out through the whistleblowing system and code of conduct. A description of the whistleblowing system and code of conduct can be found in the corporate governance section of this annual report.

Stakeholders expect the whistleblowing system and code of conduct mechanisms are enforced so that the Company's value to the stakeholders will increase, which in turn will have an impact on increasing the Company's value.

CERTIFICATION OF FAIR OPERATION PRACTICES

As of December 2018, the Company has no certification and awards related to fair operations.

FAIR OPERATION PRACTICES AWARD

IPC received a 2nd Winner award in the Best Corporate Governance (GCG) Category held by BUMN Track in 2018.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan telah memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut terlihat dengan adanya penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama IPC pada tanggal 10 Oktober 2018. Kebijakan ini juga telah disosialisasikan dengan baik kepada para karyawan IPC, salah satunya disosialisasikan di setiap lantai Gedung Kantor Pusat IPC. Adapun isi kebijakan tersebut yakni IPC sebagai perusahaan penyedia layanan pelabuhan terkemuka di Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi operator pelabuhan kelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, IPC berkomitmen untuk menerapkan kebijakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan, persyaratan lain dan prosedur yang berlaku baik Nasional dan Internasional terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran;
2. Menerapkan konsep *Green Port* dalam kegiatan operasional perusahaan;
3. Memberikan keteladanan perilaku dan mengembangkan inovasi kreatif untuk peduli lingkungan;
4. Melakukan pembinaan terhadap komunitas dan partisipasi perlindungan ekosistem di sekitar pelabuhan; dan
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Lingkungan demi terciptanya lingkungan kerja yang baik di wilayah perusahaan.

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pekerja dan mitra kerja serta dilaksanakan dalam bidang tugas masing-masing.

Untuk langkah di tahun selanjutnya, Perseroan tidak hanya aktif mensosialisasikan dan menerapkan di Kantor Pusat, melainkan di seluruh Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak. Sosialisasi tersebut, termasuk menginformasikan mengenai perlu adanya program kerja yang mendukung implementasi kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan.

RENCANA KEGIATAN

Pada tahun 2018, Perseroan memiliki beberapa rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilaksanakan sebagai RKM (Rencana Kerja Manajemen) maupun non RKM. Adapun pada divisi konstruksi sipil-departemen survei dan lingkungan telah melakukan rencana kerja terkait:

COMMITMENT AND POLICIES

The Company has a commitment to environmental protection and management as can be seen in the existing Environmental Management System Policy signed by the President Director of IPC on October 10, 2018. This policy has also been well socialized to IPC employees, one way by displaying it on each floor of IPC Head Office Building. The contents of the policy are IPC, as a leading port service provider company in Indonesia, aims to become a world-class port operator. To achieve this goal, IPC is committed to applying the following environmental policies:

1. Complying with and implementing laws and regulations, other requirements and procedures that apply both Nationally and Internationally related to environmental protection and prevention of pollution;
2. Applying the Green Port concept in the company's operational activities;
3. Providing behavioral modeling and developing creative innovations to care for the environment;
4. Fostering community and participation in protecting ecosystems around the port; and
5. Carrying out continuous improvements to the Environmental Management System to create a good work environment in the company's area.

Responsibility for environmental protection is a shared responsibility of all workers and partners and is carried out in their respective fields of duty.

Moving into the following year, the Company will not only be active in socializing and implementing at the Head Office, but in all Port Branches and Subsidiaries. The socialization includes information regarding the need for work programs that support the implementation of the Environmental Management System policy.

ACTIVITY PLAN

In 2018, the Company has several work plans related to environmental protection and management, carried out as part of the RKM (Management Work Plan) and non RKM. In the civil construction division, the survey and environment department carried out the following work plan:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

1. Pengelolaan energi diantaranya melakukan elektrifikasi dan pengembangan *Remote Crane Management and Monitoring System* (RCMMS);
 2. Efisiensi penggunaan energi diantaranya melakukan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 3. Pengendalian emisi diantaranya adalah pemantauan dan pengelolaan emisi;
 4. Pengolahan limbah diantaranya pengendalian emisi limbah padat, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan limbah cair; serta
 5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 14001:2015.
1. Energy management includes electrification and development in the Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS);
 2. Efficient use of energy including Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) technology;
 3. Emission control including emissions monitoring and management;
 4. Processing waste including controlling solid waste emissions, B3 waste (Hazardous and Toxic Materials), and liquid waste; and
 5. Implementing ISO 14001: 2015 Certification.

Dalam perencanaan kegiatan CSR terhadap lingkungan hidup, Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan Perseroan terhadap lingkungan hidup diantaranya: penghematan energi, pengendalian emisi dan dampak yang diakibatkan dari limbah padat dan cair. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yaitu tercapainya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut perwujudan upaya untuk menciptakan manfaat bersama inisiatif bidang lingkungan hidup bagi *stakeholder* dan Perseroan.

When planning CSR activities concerning the environment, the Company considers the important direct or indirect impact of its activities and decisions on the environment including: energy saving, emissions control and the effects of solid and liquid waste. In addition, the Company also considers the expectations of stakeholders, especially the communities for the environmental preservation. This embodiment effort will create environmental benefits for stakeholders and the Company.

Dalam melaksanakan CSR terkait dengan lingkungan hidup, Perseroan senantiasa mendorong seluruh pegawai perusahaan baik di kantor pusat dan cabang untuk turut aktif berperan dalam kegiatan CSR terkait dengan lingkungan hidup di atas.

In implementing CSR concerning the environment, the Company encourages all Company employees both at the head office and branches to play an active role the CSR environment activities.

DAMPAK DAN RISIKO

Kegiatan kepelabuhanan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, dampak tersebut terutama timbul dari pemakaian energi, limbah dari kapal-kapal yang sandar di pelabuhan, pemanfaatan air, perubahan bentang alam, sampah dan limbah serta perubahan kualitas udara ambien dari tingginya aktivitas peralatan dan manusia dengan demikian lingkup pengaruh perusahaan pada para pemangku kepentingan terkait isu lingkungan adalah pada masyarakat di sekitar kegiatan operasional perusahaan.

IMPACT AND RISK

Port activities can have a significant impact on the environment, and the impacts mainly arise from energy use, waste from ships anchored in ports, water use, landscape changes, garbage and waste, and changes in ambient air quality from high equipment and human activities the Company's sphere of influence on stakeholders concerning environmental issues is in the community areas around the company's operations.

Bila tidak ditangani dengan benar, hal-hal tersebut dapat berkembang menjadi masalah lingkungan seperti pencemaran (air, udara dan tanah), kebisingan dan keselamatan kerja, polusi bau, debu, dan degradasi kualitas lingkungan hidup, kekeruhan air dan pencemaran perairan yang berdampak pada keanekaragaman hayati perairan.

If not handled properly, these issues can develop into environmental problems such as pollution (water, air and soil), noise and work safety, odor pollution, dust, degradation of environmental quality, turbidity of water and water pollution that could impact the water biodiversity.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

KEGIATAN

Menuju implementasi *green port* pada tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam *Corporate Roadmap* Tahun 2016-2020, IPC terus aktif melakukan sejumlah kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut meliputi program pengelolaan energi, efisiensi penggunaan air, pengendalian emisi, dan pengelolaan limbah.

PENGELOLAAN ENERGI

Perseroan melakukan pengelolaan energi di lingkungan pelabuhan, meliputi pengelolaan energi pada bangunan/gedung, peralatan, dan sistem utilitas. Pengelolaan energi ini penting untuk dilakukan terutama agar mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Sebagai bentuk pencapaian dari pengelolaan energi, pada tahun 2018, telah dimulai untuk pertama kalinya program audit energi peralatan dan kajian efisiensi energi di lima cabang pelabuhan IPC, yaitu Banten, Pontianak, Panjang, dan Palembang. Di dalam audit energi, dilakukan pengukuran *baseline* penggunaan energi pada peralatan operasional, yang nantinya akan menjadi acuan awal dalam melakukan analisis pengelolaan energi peralatan. Pelaksanaan program audit energi ditargetkan selesai pada Mei 2019. Program elektrifikasi diharapkan akan berdampak pada penghematan energi bahan bakar.

Di samping program audit energi, telah dimulai pula program elektrifikasi di beberapa peralatan bongkar muat di Cabang Pelabuhan Palembang, Tanjung Priok, Panjang dan Pontianak. Program elektrifikasi ini merupakan pekerjaan memodifikasi sumber daya listrik alat, yang semula menggunakan *diesel generator set on board*, menjadi *fully electric* dengan sumber daya listrik darat (*shore power plant*). Diperkirakan, pelaksanaan program elektrifikasi di cabang-cabang tersebut akan selesai pada tahun 2019.

Selain itu, pencapaian yang telah dilakukan pada tahun 2018 yaitu, telah dimulai pilot project pengembangan perangkat *Remote Crane Management and Monitoring System* (RCMMS) tahap I pada 3 (tiga) unit *Crane* di cabang pelabuhan Palembang, di dalam salah satu fitur yang ada pada RCMMS ini adalah memonitor penggunaan energi (listrik atau bahan bakar minyak) pada peralatan *crane* tersebut. Dengan memonitor penggunaan energi ini di peralatan *crane* akan didapat profil penggunaan energi yang nantinya dapat dievaluasi dan dianalisis untuk peningkatan efisiensi penggunaan energi.

ACTIVITIES

For the implementation of a green port in 2020, as determined in the Corporate Roadmap for 2016-2020, IPC continues to actively carry out activities related to environmental protection and management. These activities include energy management, water use efficiency, emissions control, and waste management programs.

ENERGY MANAGEMENT

The Company conducts energy management in the ports, including energy management in buildings, equipment, and utility systems. Energy management is important to increase the efficiency of energy use.

As a form of achievement from energy management in 2018, the first energy equipment audit programs and energy efficiency studies have been initiated in five IPC port branches, namely Banten, Pontianak, Panjang, and Palembang. In the energy audit, energy usage baseline measurements were carried out on operational equipment, which will later become the initial baseline for analyzing the energy management of the equipment. The energy audit program is targeted for completion in May 2019. The electrification program is expected to have an impact on fuel energy savings.

In addition to the energy audit program, an electrical program has also begun for loading and unloading equipment in the Palembang, Tanjung Priok, Panjang and Pontianak Ports. This electrification program is to modify the electrical sources of the equipment, which originally used on board diesel generators, to be fully electric with a shore power plant. It is estimated that the electrification programs in these branches will be completed in 2019.

In addition, the achievements made in 2018 included, a pilot project for the development of the Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS) phase I was started for 3 (three) Crane units in the Palembang port branch, where one feature in this RCMMS is to monitor the use of energy (electricity or fuel oil) by the crane's equipment. By monitoring this energy use in crane equipment a profile of energy use can be obtained that can later be evaluated and analyzed to increase the energy use efficiency.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

Pada tahun 2018 telah dibuat program-program inisiatif lebih lanjut yang akan dilaksanakan di tahun 2019, di antaranya:

1. Pengembangan dan pembangunan *Building Automation System (BAS)* dan *Smart Panel* di Kantor Pusat IPC
Dengan menggunakan *Building Automation System* dan *smart panel* ini, maka sistem kelistrikan di dalam gedung dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan tingkat pemakaian ruangan sehingga lebih efisien. Melalui sistem ini pula dapat dilakukan *monitoring* dan pencatatan penggunaan listrik di seluruh ruangan di Gedung Kantor Pusat, sehingga diperoleh profil penggunaan listrik sebagai bahan analisis dan evaluasi peningkatan efisien energi ke depannya.
2. Pengembangan perangkat RCMMS tahap II di 10 cabang pelabuhan
Sebagai tindak lanjut program *pilot project* RCMMS tahap I di Cabang Pelabuhan Palembang, direncanakan di tahun 2019 seluruh peralatan bongkar muat utama akan dilengkapi perangkat RCMMS, yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2020. Fitur *energy monitoring* akan ditampilkan lebih komprehensif dengan ditambahkan *analytical dashboard* pada perangkat RCMMS tahap II ini, sehingga profil penggunaan energi dapat diperoleh dan dianalisis dengan lebih cepat dan akurat.
3. Elektrifikasi
IPC akan terus melakukan program elektrifikasi di di seluruh peralatan bongkar muat pada 12 (dua belas) cabang Pelabuhan. Dalam jangka waktu terdekat yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini adalah cabang kelas utama, seperti Pelabuhan Teluk Bayur. Program elektrifikasi diharapkan akan berdampak pada penghematan energi bahan bakar.
4. Pilot Program penerapan teknologi hemat energi pada alat bongkar muat
Program ini merupakan tindak lanjut dari kajian efisiensi energi yang dilakukan di tahun 2018, dengan penerapan teknologi hemat energi khususnya pada alat bongkar muat yang masih menggunakan *diesel generator set*, berupa penggunaan *hybrid system*, *variable speed generator*, *solar panel*, dan lain sebagainya. Dengan penerapan teknologi hemat energi ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penggunaan bahan bakar fosil pada peralatan bongkar muat dimaksud.

Like 2018 further initiative programs will be implemented in 2019, including:

1. Development and construction of Building Automation Systems (BAS) and Smart Panels at the IPC Head Office
By using BAS and smart panels, the electrical system in the building can be controlled automatically based on the level of room usage so that it is more efficient. Through this system, monitoring and recording of electricity usage can be carried out in all rooms in the Head Office Building, so that the profile of electricity usage is obtained as an analysis and evaluation for future energy efficient improvements.
2. Development of Phase II RCMMS Anchors in 10 port branches.
As a follow-up to the phase I RCMMS pilot program in the Palembang port branch, it is planned that in 2019 all the main loading and unloading equipment will be equipped with RCMMS devices, which are targeted for completion in 2020. The energy monitoring feature will be displayed more comprehensively by adding analytical dashboards to phase II RCMMS devices so that the profile of energy use can be obtained and analyzed more quickly and accurately.
3. Electrification
IPC will continue to conduct electrification programs in all loading and unloading equipment at 12 Port branches. In the short-term, the priority for implementation of this program will be the main class branches, such as Teluk Bayur Port. The electrification program is expected to have an impact on fuel energy savings.
4. Pilot Program for the Implementation of Energy-Saving Technology in Load Disassembly Tools
This program is a follow-up to the energy efficiency studies conducted in 2018, with the application of energy-saving technology specifically for loading and unloading equipment that still uses diesel generator sets, in the form of hybrid systems, variable speed generators, solar panels, and others. With the implementation of energy-saving technology, it is expected to reduce the amount of fossil fuel use in the loading and unloading equipment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pelabuhan Tanjung Priok memanfaatkan fasilitas pengelolaan air bersih dengan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). Sistem ini menggunakan air laut yang dimurnikan dan disuling untuk kebutuhan non konsumsi seperti kebutuhan sanitasi dan kebutuhan penunjang operasional lainnya termasuk kebutuhan air untuk kapal. Dengan teknologi tersebut, akan terdapat penghematan penggunaan air tanah.

Selain 2 (dua) unit instalasi SWRO dengan kapasitas 1.000 ton/hari dan 500 ton/hari, Pelabuhan Tanjung Priok memasok air bersih komersial dengan bersinergi dengan Perusahaan Air Minum. Jaringan pipa air bersih tersedia dalam pelabuhan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan atau keterbatasan suplai dari SWRO.

PENGENDALIAN EMISI

Pengendalian emisi di IPC dilakukan melalui dua (2) metode, yaitu pemantauan dan pengelolaan emisi. Pemantauan adalah pengukuran emisi secara langsung seperti pada kendaraan/peralatan (*crane & genset*) ataupun kualitas udara pada suatu area (*indoor & outdoor/ambient*). Pada pelaksanaannya, IPC rutin melakukan pemantauan kualitas udara ambien khusus pada parameter TSP (debu) dan Karbon Monoksida (CO).

Pengelolaan emisi adalah langkah untuk menjaga nilai emisi atau kualitas udara agar tetap di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sesuai Izin Lingkungan kegiatan terkait. Emisi yang dihasilkan oleh kegiatan usaha IPC berasal dari kegiatan operasional kantor dan terminal.

Pemantauan Emisi

Kegiatan operasional kantor menghasilkan emisi dari mobil operasional kantor, kendaraan yang berlalu lintas di area kantor, dan *genset*. Pemantauan emisi mobil operasional kantor dilakukan secara rutin oleh vendor/pihak ketiga yang dikoordinasi oleh Departemen Umum dan Rumah Tangga. Berikut ini data uji emisi mobil operasional 2018 untuk kendaraan operasional sebanyak 8 (delapan) unit yang pelaksanaan uji emisinya dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2018 yakni sebagai berikut:

WATER USE EFFICIENCY

The Head Office and Tanjung Priok Port Branch Office use clean water management facilities using *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). This system uses purified and refined seawater for non-consumption needs such as sanitation needs and other operational support needs include water requirements for ships. Through this technology, there will be savings in the use of ground water.

In addition to 2 (two) SWRO installation units with a capacity of 1,000 tons / day and 500 tons / day, Tanjung Priok Port supplies commercial clean water by synergizing with the Water Supply Company. Clean water pipelines are available in ports to anticipate damage or limited supply from SWRO.

EMISSION CONTROLS

Emission controls at IPC are carried out using two (2) methods, namely monitoring and management of emissions. Monitoring is direct measurement of emissions such as vehicles / equipment (cranes & generators) or air quality in indoor & outdoor / ambient areas. In its implementation, IPC routinely monitors ambient air quality specifically for TSP (Dust) and Carbon Monoxide (CO) parameters.

Emission management is a step to maintain the emissions or air quality to remain below the quality standard that has been set according to the Environmental Permit related activities. Emissions generated by the business activities of IPC originate from office and terminal operations.

Emission Monitoring

Office operational activities produce emissions from operational cars, vehicles in the office areas, and generators. Monitoring of operational office car emissions is carried out routinely by vendors / third parties coordinated by the General and Household Departments. The following shows the 2018 operational car emission test data for 8 operational vehicles that carried out emission tests on October 20, 2018:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

NO	4 GAS EMISSION ANALYZER	Hasil Pemantauan Monitoring Results							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Mobil Operational Vehicles								
2	Tahun Mobil	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
3	CO	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	HC	136 PPM	78 PPM	89 PPM	62 PPM	39 PPM	169 PPM	50 PPM	32 PPM
5	CO2	16%	16.2%	15.7%	15.9%	16%	15.7%	16%	16%
6	O2	0.07%	0.07%	0.09%	0.07%	0.12%	0.41%	0.00%	0.15%
7	LAMBDA	0.996	1.000	1.000	1.000	1.003	1.011	0.998	1.005
8	AFR	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.7
9	FUEL	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE	GASOLINE
10	H/C	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500
11	O/C	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Pemantauan emisi kendaraan yang berlalu lintas di area kantor dapat mempengaruhi kualitas udara di area kantor. Maka perlu adanya pemantauan melalui pengukuran kualitas udara di area kantor, baik di dalam maupun di luar gedung (*ambient*). Untuk pemantauan kualitas udara pada 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan IPC dilakukan tersebar di area Kantor Pusat & Terminal/Operasional masing-masing Cabang Pelabuhan. Kualitas udara di area Terminal/Operasional dapat dipengaruhi oleh emisi kendaraan yang berlalu lintas di area Terminal, seperti truk, kontainer, mobil, motor, dan lainnya, ada pula yang dipengaruhi oleh emisi dari peralatan bongkar muat, seperti *crane*. Berikut ini data pemantauan kualitas udara pada 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

Monitoring of vehicle emissions that pass through the office area can affect the air quality. This is monitored by measuring the air quality in the office area, both inside and outside the building (*ambient*). Monitoring of air quality at 12 (twelve) Port Branches of IPC was conducted across the area of Head Office & Terminal / Operations of each Port Branch. Air quality in the Terminal / Operational areas is affected by vehicle emissions that pass through the Terminal area, such as container trucks, cars, motorbikes, and is also affected by emissions from loading and unloading equipment, such as cranes. The following shows the air quality monitoring data at 12 (twelve) Port Branches in 2017 to 2018.

Tabel Monitor IPC pada Kualitas Udara Selama Tahun 2017 – 2018

IPC Monitor Table on Air Quality During 2017 - 2018

No	Lokasi IPC IPC Location	2018				2017			
		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DID NOT MEET QUALITY STANDARDS		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DID NOT MEET QUALITY STANDARDS	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	14	14	0	0	14	14	0	0
2	Tanjung Pandan	6	6	0	0	6	6	0	0
3	Panjang	8	6	0	0	6	8	0	0

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
 Corporate Social Responsibility Related to the Environment

No	Lokasi IPC IPC Location	2018				2017			
		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DID NOT MEET QUALITY STANDARDS		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DID NOT MEET QUALITY STANDARDS	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
4	Sunda Kelapa	6	6	0	0	0	5	0	0
5	Jambi (Talang Duku)	0	3	0	0	3	0	0	0
6	Pontianak	8	8	0	0	8	8	0	0
7	Teluk Bayur	6	0	0	0	0	6	0	0
8	Palembang	5	5	0	0	5	5	0	0
9	Bengkulu	6	6	0	0	6	6	0	0
10	Bojonegara	2	2	0	0	2	2	0	0
11	Kantor Pusat Head Office	2	2	0	0	2	2	0	0

Pada tahun 2018, hasil *monitoring* pada kualitas udara terdapat 10 Kantor Cabang Pelabuhan dan 1 (satu) Kantor Pusat Perseroan yang memiliki pemenuhan baku mutu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengelolaan Emisi

Secara umum kegiatan pengelolaan kualitas udara yang dilakukan oleh IPC, antara lain:

1. Melakukan penanaman pohon di area kegiatan usaha;
2. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan lolos emisi gas buang;
3. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan memiliki sertifikat layak jalan/KIR; dan
4. Melakukan uji petik terhadap emisi yang dihasilkan kendaraan yang masuk ke Terminal.

PENGELOLAAN LIMBAH

IPC telah melakukan pengendalian limbah B3 dengan baik. Pengendalian limbah tersebut dilakukan berdasarkan jenis limbah. Jenis limbah terdapat di wilayah operasional dibedakan menjadi limbah padat/sampah, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan limbah cair domestik. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pengendalian limbah-limbah tersebut.

Limbah Padat/Sampah

Baik di area gedung perkantoran, maupun di area Terminal/Operasional, sampah dari kegiatan yang dihasilkan oleh Perseroan, selama ini telah dikelola dengan baik. Bentuk pengelolaan ini, antara lain adanya penyediaan wadah sampah dengan jumlah yang memadai pada area-area

In 2018, the air quality monitoring results included 10 Port Branch Offices and 1 Head Office that had better quality standards than the previous year.

Emission Management

In general the air quality management activities carried out by IPC includes:

1. Planting trees in the area of business activities;
2. Requiring vehicles entering the Terminal to pass exhaust emission tests;
3. Requiring vehicles entering the Terminal to be have a roadworthy certificate / KIR;
4. Conducting emission tests on vehicles entering the Terminals.

WASTE MANAGEMENT

IPC carries out B3 waste control properly. Waste control is carried out based on the type of waste. The type of waste is divided into solid / waste, B3 waste (Hazardous and Toxic Materials), and domestic liquid waste. The following further explains the control of these wastes.

Solid Waste

Both in the office building area, as well as in the Terminal / Operational area, waste produced from the Perseroan activities has been well managed so far. This form

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

tersebut, pengangkutan sampah secara rutin dari wadah sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), dan pengangkutan dari TPS ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pada tahun 2017, Perseroan melakukan kajian sistem pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) untuk area Kantor Pusat. Pada tahun 2018, Departemen Rumah Tangga & Umum telah menyediakan wadah sampah terpilah/ segregasi untuk tiap lantai di Gedung Kantor Pusat IPC. Selanjutnya, pada tahun 2019, akan dilanjutkan dengan rencana kerja implementasi pengelolaan sampah terpilah dengan konsep 3R. Setelah area Kantor Pusat, program kerja tersebut juga akan diterapkan pada Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan IPC.

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 di Perseroan dihasilkan dari kegiatan perkantoran dan terminal/operasional. Dari kegiatan perkantoran, limbah B3 yang dihasilkan antara lain seperti *toner, cartridge*, kain majun, oli bekas *genset*, bangkai lampu, dan sebagainya. Dari kegiatan terminal/operasional, limbah B3 yang dihasilkan antara lain bahan bakar bekas dari *crane*, oli bekas *genset*, bangkai lampu, dan sebagainya. Salah satu anak perusahaan IPC yang telah mengelola limbah B3 tersebut adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut ini data limbah B3 yang dikelola pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

Limbah B3 yang dihasilkan dari kapal juga dikelola oleh Perseroan, seperti oli pelumas bekas, *sludge oil*, minyak kotor/bekas, dan lainnya. Di bidang kepelabuhanan, limbah B3 tersebut dikelola dengan menggunakan RF (*Reception Facility*). Hingga saat ini, IPC telah memiliki 1 (satu) Izin RF, yaitu pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut ini data limbah B3 yang dikelola pada RF Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Tabel Fasilitas di Reception Facilities Tanjung Priok

No	Perlengkapan Equipment	Unit	Kapasitas Capacity	Penjelasan Explanation
1	TUG BOAT	2		3 (tiga) <i>Captains</i> , 3 (tiga) Kepala Kamar Mesin (KKM)/ <i>Chief Engineer</i> , dan 3 (tiga) <i>Crews</i>
	- TB TANJUNG V		350 HP	
	- KT TANJUNG VII		350 HP	
2	BARGE	3		6 (enam) <i>crews</i>
	- TK DPS I		185 M ³	
	- TK BPP 105		285 M ³	
	- TK RF 1		300 M ³	
	TK RF 2		200 M ³	
3	RECEPTION TANK	1	25 M ³	<i>Steel Material</i>
4	CONTAINER	2	60 M ³	<i>Steel Material</i>

of management, includes providing adequate waste containers in all areas, routine transportation of waste from waste containers to TDS (Temporary Disposal Sites), and transportation from TDS to FPS (Final Processing Site). In 2017, Perseroan conducted a study of 3R waste management systems (Reduce, Reuse, Recycle) for the Head Office area. In 2018, the Household & General Department provided segregated waste containers for each floor in IPC Head Office Building. Furthermore, in 2019, a work plan for waste management disaggregated by the 3R concept will be implemented. After the Head Office, the work program will also be applied to Port Branches and Subsidiaries of IPC.

B3 Waste (Hazardous and Toxic Materials)

B3 waste at Perseroan is generated from office and terminal / operational activities. From office activities, the B3 waste produced includes toner, cartridges, woven cloth, used generator oil, used bulbs, and so on. From terminal / operational activities, B3 waste produced includes used fuel from cranes, used generator oil, used bulbs, and so on. One of the subsidiaries of IPC managing its B3 waste is PT Tanjung Priok Port. The following shows the B3 waste data managed in 2017 until 2018.

B3 waste produced from ships is managed by Perseroan, and includes used lubricating oil, sludge oil, dirty / used oil, and others. In the port sector, B3 waste is managed using an RF (Reception Facility). At present, IPC has 1 (one) RF license at the Tanjung Priok Port Branch. The following shows B3 waste data managed in the RF Tanjung Priok Port Branch.

Tanjung Priok Reception Facilities

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
 Corporate Social Responsibility Related to the Environment

No	Perlengkapan <i>Equipment</i>	Unit	Kapasitas <i>Capacity</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>
5	SAPARATOR	1	10 M ³ /Jam	3 (tiga) officer
6	OIL BOOM	1	200 M	
7	BRIDGE FACILITY	1	6 M	

Di tahun 2018, IPC melakukan penambahan RF di 3 (tiga) Cabang Pelabuhan sebagai berikut :

In 2018, the IPC will add RF to the 3 (three) Port Branches as follows:



Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan kajian *Assessment* Kondisi RF pada 11 (sebelas) Cabang Pelabuhan selain Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Kajian tersebut meliputi kondisi *existing* RF dan rekomendasi tahapan yang perlu dilakukan untuk membangun infrastruktur fisik RF beserta izinnya pada tiap Cabang Pelabuhan. Saat ini, terdapat tiga Cabang Pelabuhan, meliputi Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Teluk Bayur, sedang dalam proses pengajuan Izin RF kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

In 2018, Perseroan conducted an RF Condition Assessment at 11 (eleven) port branches in addition to the Tanjung Priok Port Branch. The study covered the existing RF conditions together with recommendations for the steps needed to build an RF physical infrastructure along with permits at each port branch. At present, three port branches, including Panjang, Palembang and Teluk Bayur, are in the process of applying for RF Permits from KLHK (Ministry of Environment and Forestry).

Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan oleh Perseroan dapat mempengaruhi kualitas badan air. Secara keseluruhan badan air yang dimaksud adalah air laut, kecuali hanya pada Cabang Pelabuhan Jambi, Palembang dan Pontianak berupa air sungai. Limbah cair ini dipengaruhi oleh kegiatan *toilet, pantry* dan kegiatan operasional di terminal. Beberapa unit kerja di Perseroan yang telah mengelola limbah ini,

Liquid waste

The liquid waste produced by the Company can affect the quality of water bodies. Overall, the water body in question is sea water, except for Jambi, Palembang and Pontianak port branches where it is river water. This liquid waste is influenced by the activities of toilets, pantries and operational activities in the terminal. Several work units at Perseroan managing this

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

antara lain Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT IKT, PT PPI, dan PT PMLI.

Untuk pengelolaan limbah domestik dari kegiatan operasional perkantoran khususnya di Kantor Pusat IPC dan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas masing-masing sebesar 50 m³ untuk memastikan air yang dibuang ke badan air sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Fasilitas ini telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04.37.12 tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Nomor 04.38.12 tahun 2014 tentang Pembuangan Air Limbah ke Laut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok.

waste include Head Office, Tanjung Priok Port Branch, PT Tanjung Priok Port, PT IKT, PT PPI, and PT PMLI.

For Domestic Waste Management from Office Operational Activities, especially at the IPC Head Office and PT Tanjung Priok Port Office, Waste Water Treatment Plants (WWTP) with a capacity of 50 m³ each ensure that water discharged into water bodies meets the required quality standards. These facilities received permits from the Ministry of Environment and Forestry Number 04.37.12 in 2014 concerning permits to dispose of waste water into the sea at the Head Office of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Number 04.38.12 in 2014 concerning the disposal of wastewater into the sea PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch.

Tabel Monitor IPC Pada Kualitas Air Laut/Air Sungai Selama Tahun 2017 – 2018

IPC Sea Water / River Water Quality Monitoring for 2017 - 2018

No	Lokasi IPC IPC Location	2018				2017			
		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DOES NOT MEET QUALITY STANDARDS		MEMENUHI BAKU MUTU MEETS QUALITY STANDARDS		TIDAK MEMENUHI DOES NOT MEET QUALITY STANDARDS	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	10	10	0	0	10	10	0	0
2	Tanjung Pandan	7	7	0	0	7	7	0	0
3	Banten	10	10	0	0	10	10	0	0
4	Panjang	9	9	0	0	9	6	0	0
5	Sunda Kelapa	6	6	0	0	2	0	0	0
6	Jambi (Talang Duku)	2	2	0	0	2	2	0	0
7	Pontianak	9	9	0	0	8	8	0	0
8	Pangkal Balam	3	3	0	0	3	3	0	0
9	Teluk Bayur	8	8	0	0	0	8	0	0
10	Palembang	5	5	0	0	5	5	0	0
11	Bengkulu	8	8	0	0	5	5	0	0
12	Bojonegara	4	4	0	0	0	2	0	0
13	Kantor Pusat Head Office	2	0	0	0	0	2	0	0

Pada tahun 2018, hasil *monitoring* pada kualitas air terdapat 12 (dua belas) Kantor Cabang Pelabuhan dan 1 (satu) Kantor Pusat Perseroan yang memiliki pemenuhan baku mutu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2018, the water quality monitoring results for 12 (twelve) Port Branch Offices and 1 (one) Head Office showed better quality standards than the previous year.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
Corporate Social Responsibility Related to the Environment

IPC juga melaksanakan Program CSR yang dilaksanakan dalam praktik bisnis Perusahaan untuk meminimalisir penggunaan air bersih dan pembersihan sampah di wilayah perairan.

IPC also implements CSR programs in the Company's business practices to minimize the use of clean water and clean up waste in the waters.

Adapun program CSR tersebut yakni:

1. Kapal dan Mobil Pembersih Sampah

Sebagai komitmen kepedulian Perusahaan terhadap pencemaran lingkungan, IPC mengoperasikan kapal sampah dan penyapu jalan untuk pelayanan menjalankan bisnis kepelabuhanan.

1. Garbage cleaning Ship and Vehicles

As a commitment of the Company's concern for environmental pollution, IPC operates garbage ships and road sweepers for the Port Business services.



2. Penyulingan Air Laut

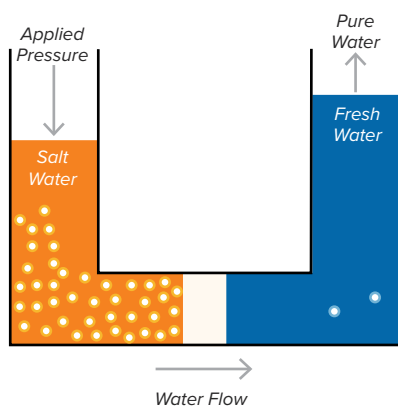
Sebagai kepedulian Perseroan terhadap lingkungan, dalam penggunaan air bersih IPC menerapkan Penyulingan Air Laut untuk meminimalisir penggunaan air tanah yang dapat merusak permukaan tanah.

2. Seawater Distillation

As part of the Company's concern for the environment, for clean water IPC uses a Sea Water Distillation to minimize the use of ground water that can damage the soil surface.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment



3. Pengelolaan Limbah

Untuk mendukung bisnis Perseroan dalam melindungi lingkungan hidup, IPC menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kapal untuk menciptakan perusahaan yang ramah terhadap lingkungan.

3. Ship Waste Management

To support the Company's business to become world class, IPC provides ship waste management facilities to create a company that is environmentally friendly.



Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang lingkungan hidup yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham.

The Company has a reporting mechanism on the results of environment-related CSR activities of consumers as a part of the Management Report. The Management Report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners before being submitted to the shareholders.

PELIBATAN STAKEHOLDER

Sampai saat ini Perseroan masih menitikberatkan pada pelibatan *Stakeholder* internal Perseroan yaitu Direksi dan seluruh pegawai dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan. Pencegahan, penurunan dan perbaikan lingkungan hidup secara umum masih dilakukan oleh pihak internal Perseroan.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

To date, the Company has focused on the involvement of the Company's internal stakeholders, namely the Directors and all employees in the Company's various environmental activities. Prevention, reduction and improvement of the environment in general is still carried out by the internal parties in the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

BIAYA

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup (*Emplasemen*) sebesar Rp 17.736.280.312.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mengelola pengaduan terkait masalah lingkungan. Untuk mengadukan permasalahan lingkungan, masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui nomor telepon: +62-21 4367505/+62-21 4301080 atau alamat e-mail: corp_sec@indonesiaport.co.id

Selanjutnya, Tim Sekretaris Perusahaan akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan mencatat perihal pengaduan dan berkoordinasi dengan Tim Lingkungan, untuk pengelolaan masalah yang dilaporkan agar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat.

DAMPAK

DAMPAK PENGELOLAAN ENERGI

Dengan dilakukannya program pengelolaan energi yang lebih baik dan berkesinambungan, maka hal ini memberikan dampak positif bagi terjadinya efisiensi dalam penggunaan energi. Sebagai contoh, berikut ini adalah dampak dari dilakukannya elektrifikasi peralatan yaitu perubahan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi listrik pada 3 (tiga) unit QCC di Panjang. Dampak dari perubahan penggunaan energi tersebut, berupa penurunan biaya operasi dan polusi udara. Sebelum dilakukan elektrifikasi, biaya bahan bakar fosil rata-rata perbulan adalah sekitar Rp225 juta dengan penggunaan volume bahan bakar fosil sebanyak 22.520 Liter Solar dengan harga rata-rata solar industri sebesar Rp11.100/liter.

Setelah dilakukan elektrifikasi pada sumber daya listrik darat, maka biaya listrik yang dibayarkan oleh Perseroan per bulan hanya sekitar Rp83 juta, sehingga terdapat penghematan biaya sebesar 67%. Dampak langsung lainnya dengan dilakukannya elektrifikasi adalah penurunan emisi gas buang, yakni setelah elektrifikasi, emisi gas buang menjadi minimal yang diakibatkan penggunaan *diesel generator set* saat terjadi pemadaman listrik.

COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to the environment (*Emplasemen*) was Rp17,736,280,312.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS COMPLAINTS MECHANISM

The Company plays an active role in environmental protection and management, including managing complaints related to environmental issues. To complain on environmental issues, the public and all interested parties can contact the Corporate Secretary by telephone at + 62-21 4367505 / + 62-21 4301080 or E-mail at the address corp_sec@indonesiaport.co.id

Furthermore, the Corporate Secretary Team follow up complaints by recording the complaint and coordinating with the Environmental Team to manage the reported problems so that they can be resolved properly and appropriately.

IMPACT

IMPACT OF ENERGY MANAGEMENT

A positive impact on the energy use efficiency was achieved by implementing a better and sustainable energy management program. This was shown in the impact of electrification of equipment, namely changes in energy use from fossil fuels to electrical energy in 3 (three) QCC units in Panjang. The impact of energy use changes reduced operating costs and air pollution. Before electrification, the average cost of fossil fuels per month was around Rp225 million, and the use of fossil fuels amounted to 22,520 liters of diesel at an average price of Rp11,100 per liter.

After electrification, the electricity costs paid by the Company per month amounted to around Rp83 million, a cost savings of 67%. Another direct impact of electrification saw the reduction in exhaust emissions, where after electrification, exhaust emissions become minimal due to the use of diesel generators during power outages.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

Tabel Perbandingan Tingkat Efisiensi Biaya Penggunaan Energi Di Unit QCC Panjang yang Dielektifikasi **Comparison of Energy Usage Cost Efficiency Levels in Electrified Panjang QCC Units**

Uraian <i>Description</i> <i>Energy Costs for Operating 1 QCC Unit in Panjang Port Branch</i>	Sebelum Elektrifikasi <i>(Rata-Rata Biaya Listrik dan BBM/Bulan)</i> <i>Before Electrification (Fuel Cost / Month)</i>	Sesudah Eletrifikasi <i>(Biaya Listrik/Bulan)</i> <i>After Electrification (Electricity Fee / month)</i>
Biaya Energi Untuk Pengoperasian 3 (tiga) Unit QCC di Cabang Pelabuhan Panjang <i>Energy Costs for 3 (three) Operational QCC Units at the Panjang Port Branch</i>	Rp252.000.000	Rp83.000.000

Tabel Volume Penggunaan Listrik **Volume of Electricity Usage**

NO	NAMA PERUSAHAAN <i>COMPANY NAME</i>	2018	2017	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>				
1	IPC	4.034.021 8.933.965	4.059.339	(0,62)
Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>				
1	CABANG PELABUHAN PALEMBANG PALEMBANG PORT BRANCH	5.916.857	6.978.600	(15,21)
2	CABANG PELABUHAN PANJANG PANJANG PORT BRANCH	9.097.448	9.462.337	(3,86)
Entitas Anak <i>Subsidiary Offices</i>				
1	PT JASA ARMADA INDONESIA	782.614	797.975	(1,92)
2	PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	15.995.920	16.636.684	(3,85)
3	PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK	9.191.831	10.102.235	(9,01)
Total		45.018.691	47.239.195	(4,70)

Merujuk pada tabel tersebut, pada tahun 2018 terjadi efisiensi penggunaan listrik di beberapa kantor operasional IPC yakni di kantor pusat, dua kantor cabang (Cabang Pelabuhan Palembang dan Panjang) serta tiga kantor Entitas Anak (PT Jasa Armada Indonesia, PT Jakarta International Container Terminal dan PT Pelabuhan Tanjung Priok).

Referring to the table, in 2018 there were electricity efficiencies in several IPC operational offices, namely at the Head Office, two branch offices (Palembang Port and Panjang Branch) and three Subsidiary offices (PT Jasa Armada Indonesia, PT Jakarta International Container Terminal and PT Pelabuhan Tanjung Priok).

Tabel Persentase Beban Operasi Terhadap Total Aset di IPC **Percentage of Operating Expenses Against Total Assets in IPC**

Uraian <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan % <i>Growth %</i>
Persentase Beban Operasi terhadap Total Aset <i>Percentage of Operating Expenses against Total Assets</i>	15.64%	15.67%	(0.0019)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
 Corporate Social Responsibility Related to the Environment

Pada tahun 2018, terjadi penghematan pada operasional IPC disebabkan oleh menurunnya beban operasi terhadap total aset IPC dari 15,67% tahun 2017 menjadi 15,64% pada tahun selanjutnya.

In 2018, savings on IPC operations resulted from a decrease in operating expenses against IPC's total assets from 15.67% in 2017 to 15.64% in 2018.

Tabel Volume Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Volume of Fuel Used

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Jumlah Liter Total Liters	85.562.965	91.043.469	(6,02)

Pada tahun 2018, IPC juga melakukan penghematan pada penggunaan energi terutama bahan bakar minyak. Hal ini terjadinya penurunan volume penggunaan bahan bakar minyak dari sebesar 91,04 juta liter di tahun 2017 menjadi 85,56 juta liter di tahun 2018.

In 2018, IPC also made savings on energy use, especially fuel oil. This has decreased the volume of fuel use by 10.46 million liters of fuel oil.

DAMPAK EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

IMPACT OF WATER USE EFFICIENCY

Tabel Volume Penggunaan Air (m3)

Water Usage Volume (m3)

Uraian Description	Wilayah Region	2018	2017	Peningkatan/ Penurunan Growth
Volume Air dari <i>Water Recycle</i> Water volume from recycled water	Cabang priok Priok branch	89.481	94.557	(5.076)
	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)	23.798	43.026	(19.228)

Pada tahun 2018, IPC telah melakukan penghematan penggunaan air di salah satu kantor cabang yakni Kantor Cabang Pelabuhan Priok dan satu kantor Entitas Anak yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini terlihat menurunnya penggunaan volume air dari *water recyle* di Kantor Cabang Pelabuhan sebesar 5.076 m3 sedangkan di Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok mengalami penurunan sebesar 19.228 m3.

In 2018, IPC made savings on water use in the Priok Port Branch Office, and in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Subsidiary office. The use of water from the water recycling decreased in the Port Branch Office by 5,076 m3 while in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Office it decreased by 19,228 m3.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

ENVIRONMENT CERTIFICATION

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan, IPC telah menerapkan standard internasional ISO 14001 yang meliputi:

To support environmental management, IPC has implemented the ISO 14001 international standard which includes:

1. PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk ruang lingkup: Terminal Operasi III, *Container Yard*, *Technical Support*, *Customer Service and Office Management*;
2. PT Jasa Armada Indonesia untuk ruang lingkup: *Office Based Activity of Supporting Pilotage and Towage*;
3. PT Indonesia Kendaraan Terminal untuk ruang lingkup: Pelayanan Jasa Bongkar Muat dan Penumpukan di Lapangan Terminal Domestik, Lapangan Terminal Internasional dan Perkantoran;

1. PT Pelabuhan Tanjung Priok for: Operation Terminal III, Container Yard, Technical Support, Customer Service and Office Management;
2. PT Jasa Armada Indonesia for: Office Based Activities of Supporting Pilotage and Towage;
3. PT Indonesia Kendaraan Terminal scope: Loading and Stacking Services at Domestic Terminal Fields, International Terminal Fields and Offices;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to the Environment

4. PT Pengerukan Indonesia untuk ruang lingkup: *Provision of Dredging and Reclamation Services; dan*
5. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk ruang lingkup: *Provision of Project Management for Port Development Work.*

PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Pada tahun 2018, IPC telah memperoleh penghargaan adalah *Best Water Management Initiative* untuk Kategori Tata Kelola Lingkungan yang diberikan oleh The Asset Publishing and Research Lt d., di Hongkong.

Selain ISO 14001, Perseroan juga telah melakukan kajian terkait *Green Port*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Indonesia dan juga agar dapat IPC dapat menjadi *World Class Port*. Mengingat, kriteria *World Class Port* salah satunya adalah menjadi *Green Port*. Kajian yang telah dilakukan antara lain:

1. Laporan *Green Port Design* IPC;
2. Laporan Rencana Teknis Program Implementasi *Green Port Design* IPC.

Selain itu, IPC mendapatkan apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI atas kajian yang telah disusun tersebut melalui Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada tanggal 3 September 2018 perihal Apresiasi dan Penerapan Kriteria *Green Port* dan *Online Port Waste Management System* di Seluruh Pelabuhan di Indonesia.

4. PT Pengerukan Indonesia for: *Dredging and Reclamation Services;*
5. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for: *Project Management for Port Development Work.*

AWARDS IN THE FIELD OF ENVIRONMENT

In 2018, IPC was awarded a *Best Water Management Initiative Award* in the Environmental Management Category by The Asset Publishing and Research Lt d., In Hong Kong.

In addition to ISO 14001, Persero has also conducted studies related to *Green Port*. The aim is to create an *Eco-Friendly Port* in Indonesia and also so that IPC can become a *World Class Port*. The criteria for *World Class Port* includes being a *Green Port*. Studies have been carried out including:

1. *Green Port Design Report* by IPC;
2. *Technical Plan Report for the Green Port Design Program* by IPC.

In addition, IPC received the appreciation from the Indonesian Ministry of Maritime Affairs Coordinating Ministry for the study through their letter on September 3, 2018 concerning *Appreciation and Application of the Green Port Criteria and the Online Port Waste Management System in All Ports* in Indonesia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC telah mengatur beberapa kebijakan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang tertuang pada:

1. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II -16 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan IPC;
2. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.56/6/1/PI.II -13 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja dan Pensiunan Peserta Keluarganya di Lingkungan IPC; dan
3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: KP.07.02/24/4/1/ KRF/UT/PI.II-18 tentang Penghasilan bagi Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting bidang ketenagakerjaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi program ketenagakerjaan (kesetaraan gender dan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, kesetaraan kesempatan pengembangan kompetensi, remunerasi, kebebasan berserikat serta program pensiun), program pengelolaan kesehatan kerja serta program keselamatan kerja (pengelolaan keselamatan kerja pegawai dan penerapan *international ship and port security code*).

RENCANA KEGIATAN

IPC berupaya untuk menjadi Perusahaan yang taat azas dan selalu menaati setiap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menurunkan dampak operasional Perusahaan pada ketenagakerjaan.

Perseroan berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan Perseroan sehingga Perseroan berusaha untuk meminimalisir risiko-risiko pada kegiatan Perseroan. Salah satunya yaitu kebakaran di area pelabuhan yang dapat berimbas pada masyarakat di sekitar pelabuhan. Untuk itu, Perseroan telah memberikan saluran pengaduan agar dapat memberikan tindakan langsung pada risiko kebakaran tersebut.

Sampai saat ini Perseroan masih menitikberatkan pada pelibatan Stakeholder internal Perusahaan, khususnya Serikat Pekerja dalam berbagai kegiatan ketenagakerjaan yang

COMMITMENT AND POLICY

IPC has several policies related to employment, occupational health and safety including:

1. IPC Board of Directors Decree Number: HK.568/30/12/7/PI.II -16 concerning Worker Development in IPC;
2. IPC Board of Directors Decree Number: HK.56/6/1/PI.II -13 concerning maintenance and health services for workers and retirees and their families in IPC;
3. IPC Board of Directors Decree Number: KP.07.02/24/4/1/ KRF/UT/PI.II-18 concerning income for workers at PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

The Company also reviews all regulations related to important issues in the employment sector.

SCOPE AND FORMULATION AGAINST EMPLOYMENT

The occupational health and safety activities included the employment program (gender equality and employment opportunities, the use of local labor, equal opportunities for competency development, remuneration, freedom of association and pension programs), occupational health and safety program management (employee work safety management and application of the *international ship and port security code*).

ACTIVITY PLAN

IPC endeavors to be a Company that is fully compliant with the principles, and adheres to all laws and regulations including those related to employment so as to reduce any impact on the Company's operations.

The Company also strives to create conducive conditions in the Company's activities, to minimize risks in the Company's activities. One such risk is fire in the port areas that can affect the communities around the ports. For this, the Company has provided a complaints channel to provide direct action regarding the risk of fire.

To date, the Company has focused on the involvement of internal Stakeholders, especially the Workers' Union in employment activities carried out by the Company. In

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

dilakukan Perseroan. Pelaksanaan, kegiatan ketenagakerjaan secara umum masih dilakukan oleh pihak internal Perseroan.

Untuk itu IPC memberikan komitmen dan perhatian yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pekerja, serta sistem imbal jasa yang sepadan sehingga memberikan dampak positif bagi karyawan maupun Perseroan.

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait bidang ketenagakerjaan, baik risiko bagi perusahaan maupun *stakeholder* dalam melakukan perencanaan keboatan bidang ketenagakerjaan. Risiko yang dipertimbangkan antara lain tingginya *turnover* karyawan yang akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Ekspektasi karyawan terkait dengan kompensasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kenyamanan kerja menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan *due diligence* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan data-data terkait *turnover* dan kepuasan karyawan.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei kebutuhan karyawan yaitu survei *engagement*, kepuasan karyawan dan survei industri sejenis terkait ketenagakerjaan (*benchmarking*).

KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Perseroan mendorong pada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan CSR bidang ketenagakerjaan. Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham. Seluruh karyawan, jajaran manajemen, dan serikat pekerja terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan kebijakan Perseroan terkait bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

general, the employment activities are still carried out by the Company's internal parties.

For this, IPC is highly committed, and pays attention to gender equality and employment opportunities, job training to improve worker professionalism, and commensurate reward systems so as to have a positive impact on the employees and the Company.

The Company always considers those risks related to the field of employment, both for the Company and stakeholders when planning labor issues. The risks include high employee turnover that could disrupt the Company's operational activities.

Employee expectations related to compensation, freedom to express opinions and work comfort are taken into consideration in planning employment activities.

When planning employment activities, the Company conducts due diligence towards corporate social responsibility by analyzing turnover and employee satisfaction data.

Planning involves surveys of employee's needs, including engagement surveys, employee satisfaction and similar industry surveys related to employment (*benchmarking*).

EMPLOYMENT ACTIVITIES

The Company encourages all authorized employees and management to commit to carrying out CSR activities related to employment. The Company has a reporting mechanism on the results of employment-related CSR activities as a part of the Management Report. The Management Report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners before being submitted to the shareholders. All employees, management and trade unions are actively involved in the implementation of CSR activities in the employment sector. The Company's policies related in the employment sector include.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

IPC memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria atau wanita tanpa memandang perbedaan etnik agama, ras, *gender* ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja di lingkungan IPC didasarkan atas hasil seleksi, evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja. Perseroan juga menetapkan waktu kerja yang fleksibel bagi karyawan wanita, seperti memberikan cuti untuk karyawan wanita yang melahirkan atau keguguran dan fasilitas ibu menyusui.

Bagi karyawan yang berkebutuhan khusus, Perseroan memberikan fasilitas yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh kesempatan kerja yang sama.

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Perseroan senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional.

KESETARAAN KESEMPATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

IPC telah memiliki *Corporate University* yang berlokasi di Ciawi. Fungsi *Corporate University* ini adalah tempat pekerja untuk memperoleh kesempatan belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif untuk tumbuh menjadi Insan IPC yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kinerja bisnis Perseroan.

Seluruh Program Pengembangan Kompetensi Pekerja yang dilakukan oleh *Corporate University* ditentukan sesuai kebutuhan IPC dan juga kebutuhan pekerja dengan memperhatikan persamaan kesempatan kepada seluruh level organisasi. Untuk program pengembangan kompetensi lainnya, IPC juga mengikutkan pekerja yang pelaksanaannya dilakukan di luar *Corporate University*.

REMUNERASI

Tahun 2018 merupakan tahun "*establishment*", dimana Perseroan memposisikan sebagai *world class modern port, excellent in operation and services*. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung penerapan strategi "*establishment*", Perseroan menerapkan kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu *Internal Equity* dan *Market Competitiveness*. Melalui prinsip tersebut,

GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The company provides equal opportunities for all people, both men and women regardless of ethnic, religion, racial, occupational, gender or physical qualities to participate in the employee recruitment programs. The appointment of a prospective employee is based on the results of the selection results as well as the evaluation during the employee probation and orientation period. The Company has also established flexible working hours for female employees, such as giving leave to female employees from pregnancies or miscarriage and provides nursing mothers' facilities.

For employees with special needs, the Company provides the facilities needed so that they can obtain the same employment opportunities.

USE OF LOCAL EMPLOYEE

When carrying out its recruitment process, the Company always prioritizes the principles of openness, fairness and equality based on competency needs and competencies possessed by candidates, and by taking into account the availability of local / national labor

EQUALITY OF COMPETENCE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

IPC has a *Corporate University* located in Ciawi. The *Corporate University* function is as a place for workers to gain learning opportunities and obtain knowledge to grow into better IPC Personnel able to contribute significantly to the Company's business performance.

All Worker Competency Development Programs carried out by *Corporate University* are determined according to the needs of IPC and also the needs of workers by paying attention to equal opportunities at all levels of the organization. For other competency development programs, IPC also includes workers whose implementation is carried out outside the *Corporate University*.

REMUNERATION

2018 was the year of "*establishment*", where the Company positioned itself as a *world class modern port, excellent in operation and services*. In an effort to support the "*establishment*" strategy, the Company established a remuneration policy based on 2 (two) basic principles, namely *Internal Equity* and *Market Competitiveness*. Through this principle, the Company ensures that the remuneration

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Perseroan memastikan bahwa remunerasi yang diberikan sesuai dengan kinerja Pekerja (*pay for performance*). Perseroan juga senantiasa menjaga posisi kompetitif remunerasi perusahaan di dalam industri dengan mengikuti *salary survey* yang dilaksanakan oleh konsultan bidang Sumber Daya Manusia yang independen dan *qualified*.

KEBEBASAN BERSERIKAT

IPC senantiasa berkomitmen untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari karyawan. Di dalam usaha memajukan IPC, Manajemen telah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjalin kelangsungan kerja perusahaan.

Manajemen memandang serikat pekerja sebagai mitra strategis, sehingga kebijakan-kebijakan khususnya di bidang SDM terkait masalah kesejahteraan dapat memperoleh masukan dari serikat pekerja. Manajemen secara aktif melakukan pertemuan dengan serikat pekerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk itu, IPC telah membentuk wadah atau forum bipartit dengan serikat pekerja yang berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul maupun yang berpotensi menjadi masalah dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan saran kepada Manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Wadah tersebut mempermudah pekerja dalam menyampaikan aspirasi kepada Perseroan secara berjenjang sehingga komunikasi dua arah antara IPC dan pekerja tetap terjaga. Kegiatan Serikat Pekerja dengan Manajemen IPC adalah sebagai berikut :

provided is in accordance with the performance of the Worker (*pay for performance*). The company also maintains a competitive remuneration position in the industry by following salary surveys carried out by independent and qualified Human Resources consultants.

FREEDOM OF ASSOCIATION

IPC is committed to promoting the harmonious industrial relations with the Workers' Union as representatives of the employees. In an effort to advance IPC, Management has established harmonious industrial relations with trade unions to create a conducive working atmosphere and establish the continuity of the company's work.

Management views the unions as strategic partners, so policies especially in HR related to welfare issues can receive input from the unions. Management intensively conducts meetings with trade unions at least every 3 (three) months.

For this reason, IPC has formed a bipartite forum or union with trade unions that serves to accommodate and resolve labor problems that arise as well as those that have the potential to become problems and as a forum provides advice to management in employment decisions. This makes it easier for workers to convey their aspirations to the Company so that two-way communication between IPC and the workers is maintained. The Unions activities with IPC Management are as follows:

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date	Tempat Place
1	Rapat Kerja Pusat ke IV tahun 2018 dengan agenda pembahasan program kerja serikat pekerja tahun 2018. The 4th Central Working Meeting in 2018 with the agenda to discuss the trade union work programs for 2018.	1 - 3 Februari 2018 February 1 – 3, 2018	Jakarta
2	Pembahasan pembentukan LKS (Lembaga Kerja Sama) BIPARTIT antara PT. Pelabuhan Indonesia II dengan SPPI II, menghasilkan kesepakatan Berita Acara Nomor : KP.08.01/12/3/1/HUP/SUM/PI.II-18 tanggal 12 Maret 2018 tentang pembentukan lembaga kerjasama BIPARTIT PT. Pelabuhan Indonesia II dan SPPI II. Discussion on the formation of a BIPARTIT Cooperation Institution (LKS) between PT. Pelabuhan Indonesia II with SPPI II, resulted in agreement Number: KP.08.01/12/3/1/HUP/SUM/PI.II-18 dated 12 March 2018 concerning its establishment.	12 Maret 2018 March 12, 2018	Jakarta

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date	Tempat Place
3	Rapat Kerja Pusat ke V tahun 2018 membahas agenda musyawarah pusat ke VI tahun 2018. Fifth Central Vocational Working Meeting in 2018 to discuss the agenda for the sixth central meeting in 2018.	12 - 14 September 2018 September 12-14, 2018	Tanjung Pandan
4	Kick of Meeting Amandemen Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Bersama 2019-2020 membahas perubahan ketentuan PKB. Kick off Meeting for Amendments to the Joint Collective Labor Agreement 2019-2020 to discuss changes to the PKB provisions.	26 – 27 Juli 2018 July 26-27, 2018	Bogor
5	Kick of Meeting Perundingan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019 – 2020 Kick off Meeting for the Collective Bargaining Agreement Meeting in 2019-2020	3 – 4 Agustus 2018 August 3 – 4, 2018	Bogor
6	Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam palu dan donggala tahun 2018 Distribution of assistance to victims of the Palu and Donggala natural disasters in 2018	15 - 19 Oktober 2018 October 15 – 19, 2018	Sulawesi Tengah
7	Musyawarah Pusat ke VI tahun 2018 pembahasan pemilihan Ketua Umum SPPI II periode 2018-2021. Sixth Central Conference in 2018 to discuss the selection of the SPPI II Chairperson for the 2018-2021 period.	26 - 28 November 2018 November 26-28, 2018	Bandung

Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) dipimpin oleh Dodi Nurdiana yang diangkat berdasarkan Musyarah Pusat SPPI II IPC tanggal 27 November 2018 di Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat SPPI II nomor 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 tentang Pengukuhan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat SPPI II periode 2018 – 2021. Seluruh karyawan IPC terdaftar sebagai anggota SPPI II.

PROGRAM PENSIUN

IPC menyadari pentingnya kesejahteraan pasca kerja bagi Pekerja Perseroan, sehingga Perseroan memastikan agar para Pekerja Perusahaan sejahtera ketika memasuki masa pensiun melalui program pensiun. Program pensiun Perseroan diselenggarakan dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta sebagai wujud apresiasi IPC atas kontribusi dan kinerja Pekerja selama bekerja di Perseroan. Beberapa program pensiun yang diselenggarakan Perusahaan antara lain:

1. Program pensiun
 - a. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - c. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - d. Program Tambahan Manfaat Purna Bakti;
 - e. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. Program Asuransi Jiwa.

The Head of the Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) Workers Union is Dodi Nurdiana who was appointed based on the minutes of the SPPI II IPC on November 27, 2018 in Bandung in accordance with the SPPI II Board Decree number 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 concerning the inauguration of the organizational structure and composition of the SPPI II Central Leadership Board for the period 2018 - 2021. All IPC employees are registered as SPPI II members.

PENSION PROGRAM

The company realizes the importance of post-employment welfare for Company Workers, so the Company ensures that its workers prosper when entering retirement through the Pension Program. The Company's pension program is carried out based on statutory provisions and as a manifestation of the Company's appreciation for the contribution and performance of employees while working at the Company. The pension programs organized by the Company include:

1. Retirement Program
 - a. Defined Benefit Retirement Plan under the Employer Retirement Fund;
 - b. Defined Contribution Retirement Program under Financial Institution Retirement Fund;
 - c. Life Insurance Benefit Program;
 - d. Supplementary Benefit Retirement Program;
 - e. Employment Social Security Program by Social Security Administering Agency, BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Life Insurance Program;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

2. Penghargaan atas jasa pengabdian
 - a. Pemberian Penghargaan Masa Bakti;
 - b. Penghargaan Kenaikan Kelas Jabatan Pengabdian; dan
 - c. Pemberian Cinderamata.
 3. Fasilitas Pasca Kerja
 - a. Fasilitas Kesehatan Pensiunan beserta Keluarga;
 - b. Bantuan Pindah Pensiun;
 - c. Bantuan Musibah Kematian; dan
 - d. Bantuan Uang Duka dan Sumbangan Kematian.
2. Reward for work dedication
 - a. Provision of Period of Service Award;
 - b. Class Position Promotion Award;
 - c. Token of Appreciation Reward.
 3. Post Employment Facilities
 - a. Health Facilities for Retirees and Families;
 - b. Retirement Relocation Assistance;
 - c. Accidental Death Assistance;
 - d. Mourning Assistance.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

IPC membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pekerja untuk berperan serta dalam perkembangan IPC ke arah yang lebih baik. Komitmen ini ditunjukkan dengan disediakannya sarana pengaduan. Jika pekerja memiliki keresahan terkait masalah ketenagakerjaan, dapat mengikuti tata cara sebagaimana tertuang dalam pasal 41 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IPC dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) Periode 2016-2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerja menyampaikan kepada atasan langsung di unit kerjanya untuk didiskusikan agar mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.
2. Apabila tidak dicapai kesepakatan atau penyelesaian yang belum maka Pekerja dapat meneruskan kepada pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan diketahui oleh atasan langsung.
3. Apabila cara sebagaimana poin 1 dan 2 tidak dicapai kesepakatan atau mendapatkan penyelesaian yang belum memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan kepada Pengurus Cabang Serikat Pekerja setempat untuk diselesaikan dalam forum komunikasi tingkat cabang setempat.
4. Jika cara sebagaimana dimaksud poin 3 juga tidak tercapai kesepakatan dan atau permasalahannya merupakan wewenang pengusaha, maka dapat diteruskan kepada Lembaga Bipartit tingkat pusat.

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan atau penyelesaian yang belum memuaskan setelah ditempuh tahapan sebagaimana poin 1, 2, 3 dan 4 maka penyelesaiannya dapat diteruskan kepada Lembaga Tripartit sebelum ditempuh prosedur penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

COMPLAINT MECHANISM ON EMPLOYMENT MATTERS

The Company opens the widest opportunity for employees to participate in the development of IPC towards a better direction. This commitment is demonstrated by the provision of a complaints submission media. In the event an employee has concerns related to employment matters, they follow the procedures as set forth in Article 41 of the Collective Work Agreement (PKB) of IPC and Indonesian Port Workers Union II (SPPI II) Period 2016-2018, with the following details:

1. Employees communicate to Immediate Supervisors in their work units to be discussed in order to achieve an understanding or settlement that satisfy both parties.
2. In the event an agreement or settlement cannot be reached, the Employee may forward it to a higher Authority Officer with the notice of the immediate superior.
3. In the event the issue in which the letters 1 and 2 are not reached by agreement or obtain a satisfactory settlement, the Employee may forward the issue to the Branch Manager of the local Workers Union to be resolved in the local Branch level communication forum.
4. d. In the event the measure referred in item 3 is also not able to reach an understanding and or the issue is the authority of the Company, it can be forwarded to the Central Bipartite Institution.

In terms of any unsettled agreement or satisfied settlement after stages 1, 2, 3, and 4 have been pursued, the settlement may be forwarded to the Tripartite Institution prior to the dispute settlement procedure in accordance with the applicable laws and regulations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

DAMPAK KUANTITATIF DAN RISIKO

Perseroan rutin melaksanakan survei kepuasan karyawan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan karyawan berada pada level 4,27 skala likert dengan kategori "Sangat Puas". Dibandingkan pada tahun 2017, tingkat kepuasan karyawan IPC berada pada level 4,16 skala likert dengan kategori "Puas". Berdasarkan hasil survei kepuasan karyawan dapat dikatakan bahwa karyawan IPC loyal terhadap Perseroan. Hal ini sejalan dengan adanya tingkat kesejahteraan, peluang, dan lingkungan kerja yang mendukung. Sementara itu, IPC juga rutin melakukan survei keterikatan pekerja pada tiap tahunnya. Di tahun 2018, hasil pada survei tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,37 skala likert dengan kategori "Sangat Terikat" dibandingkan tahun 2017 hanya sebesar 4,24 skala likert. Adapun hasil survei kepuasan karyawan dan survei keterikatan karyawan IPC disajikan dalam tabel di bawah ini:

QUANTITATIVE IMPACT AND RISK

The employee satisfaction survey carried out by the Company showed a good level of employee satisfaction in 2018 reaching the level of 4.27 on the Likert scale in the Very Satisfied category. Compared to the year 2017, the level of satisfaction of IPC employees is at the level of 4.16 Likert scale with the category "Satisfied". Based on survey results employee satisfaction can be said that IPC employees loyal to the Company. This is in line with the existence level of welfare, opportunity, and work environment support. Meanwhile, the IPC also regularly conducts surveys attachment to workers each year. In 2018, results the survey experienced an increase to amounting to 4.37 Likert scale with the category "Very Tied" compared to 2017 only 4.24 likert scale. The results of the employee satisfaction survey and attachment survey IPC employees are presented in the table below:

Tabel Hasil Survei Kepuasan Pekerja IPC

Results of the IPC Employee Satisfaction Survey

Tahun Year	Hasil Survei Survey Results	Keterangan Description
2018	4,27	Sangat Puas
2017	4,16	Puas
2016	4,13	Puas
2015	4,19	Puas

Dengan adanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman memberikan dampak penurunan pada *turnover* karyawan IPC. Hal ini dibuktikan menurunnya angka *turnover* karyawan pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,58% dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,70%. Adapun jumlah tingkat *turnover* karyawan IPC selama tahun 2017-2018 disajikan pada tabel di bawah ini:

The existence of a safe and comfortable work environment has a reduced impact on employee turnover rates in 2018 to be 2.58% compared to in 2017 at 2.70%. The number of turnover rates IPC employees during 2017-2018 are presented in the table below this:

Tabel Hasil Survei Keterikatan Pekerja IPC

Results of the IPC Employee Engagement Survey

Tahun Year	Hasil Survei Survey Results	Keterangan Description
2018	4,37	Sangat Terikat
2017	4,24	Sangat Terikat
2016	4,13	Terikat
2015	4,19	Terikat

Tabel Tingkat Turnover Tahun 2017-2018

Turnover Rate - 2017-2018

Uraian Description	2018	2017
Jumlah Karyawan Masuk Number of Employees Joining	1	11

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Uraian <i>Description</i>	2018	2017
Jumlah Karyawan Keluar Number of Employees Leaving		
Pensiun Normal Normal Retirement	48	58
Meninggal Dunia Death	13	5
Mengundurkan Diri Resignation	5	5
Diangkat menjadi Direksi BUMN Appointed as SOE Director	1	0
Diberhentikan dengan Tidak Hormat Dismissed Disrespectfully	1	5
Total Jumlah Karyawan Keluar Total Number of Employees Leaving	68	73
<i>% Turnover</i>	2,58%	2,70%

Dengan meningkatnya kepuasan karyawan dan menurunnya *turnover* karyawan, maka hal ini menunjukkan rendahnya risiko ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Perseroan. Penurunan *turnover* juga berdampak pada efisiensi biaya yang timbul karena pelaksanaan kegiatan rekrutmen.

Increasing employee satisfaction and reduced employee turnover indicates the low employment risks faced by the Company. The reduced turnover also has an impact on cost efficiencies due to lower recruitment activities.

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2018, IPC Kantor Pusat memperoleh sertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 tahun 2012 pada tanggal 30 Juli 2018 dengan hasil pencapaian 85,54% untuk katagori Tingkat Lanjutan (166 kriteria audit). Oleh karena itu, IPC Kantor Pusat memperoleh Bendera Emas yang telah dipasang di halaman IPC Kantor Pusat IPC di area sebelah kiri bendera merah putih.

EMPLOYEE CERTIFICATION

In 2018, the IPC Head Office received an OHMS Certification in accordance with PP 50 of 2012 on July 30, 2018 after achieving 85.54% in the Advanced Level Category (166 Audit Criteria). As a result, the IPC Head Office received a gold Flag that has been installed at the IPC Head Office on the left side of the red and white flag.

PENGHARGAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2018, Perseroan telah memperoleh penghargaan bidang ketenagakerjaan yaitu Juara 1 Kategori Pengembangan Talenta Terbaik dalam acara Anugerah BUMN 2018 yang diselenggarakan oleh BUMN Track.

EMPLOYMENT AWARDS

In 2018, the Company received an employment award, namely 1st Place in the Best Talent Development Category in the 2018 BUMN Award event organized by BUMN Track.

KEGIATAN KESEHATAN

PENGLOLAAN KESEHATAN KERJA

Pekerja merupakan aset penting yang berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Oleh karenanya pekerja IPC termasuk keluarganya mendapatkan fasilitas kesehatan dengan pola *fee for service* yang diberikan melalui jaringan Rumah Sakit Pelabuhan dan pola *reimbursement*, termasuk fasilitas alat bantu kesehatan. Perseroan senantiasa melakukan tindakan pencegahan dan deteksi dini atas kondisi kesehatan para pekerja, dengan memberikan fasilitas *general check up* bagi seluruh pekerja.

HEALTH ACTIVITIES

Occupational Safety Management

Workers are important assets that contribute greatly to achieving the Company's goals. Therefore, Company Workers, including their families, receive health facilities in the form of reimbursement for services provided through the Port Hospital, including health aid facilities. As a precautionary measure and early detection of workers' health, the Company provides general check-up facilities for all workers.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen atas kesehatan pekerja, Perseroan mengikutsertakan seluruh Pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta jaminan hari tua bagi seluruh Pekerja.

BIAYA KESEHATAN

Pada tahun 2018, Perseroan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab untuk kesehatan kerja sebesar Rp 32.912.737.673.

DAMPAK KUANTITATIF DAN RISIKO

Dengan pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik dari Perseroan, sepanjang tahun 2018 telah memberikan dampak pada tingkat produktivitas karyawan IPC. Pada 2018 produktivitas karyawan Perseroan tercatat sebesar Rp2,68 miliar per karyawan meningkat sebesar 11,47% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp2,40 miliar per karyawan.

Dengan meningkatnya produktivitas karyawan, maka hal ini menunjukkan rendahnya risiko kesehatan yang dihadapi oleh Perseroan.

KEGIATAN KESELAMATAN KERJA PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA

Dalam hal keselamatan kerja, IPC menerapkan ketentuan dasar sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kerja yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di seluruh wilayah operasional IPC, antara lain:

1. Perseroan berperan aktif melaksanakan pembinaan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja sebagai upaya meningkatkan keselamatan kerja. IPC telah memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah dibentuk di Kantor Pusat dan beberapa Cabang Pelabuhan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi setempat. Sedangkan beberapa Cabang Pelabuhan lainnya sedang dalam proses pembentukan.
2. Memasang kelengkapan rambu-rambu dan/atau tanda peringatan terkait keselamatan kerja di seluruh lingkungan kerja operasional, terutama pada lokasi-lokasi yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja.
3. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan bagi seluruh pekerja operasional, termasuk pihak lain

As a form of compliance with the prevailing laws and regulations and a commitment to the health of workers, the Company includes all Workers in the BPJS Health and BPJS Employment program. This facility is provided to provide health insurance, work accident and death guarantees as well as retirement benefits for all workers.

HEALTH COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to occupational health was Rp32,912,737,673

QUANTITATIVE IMPACT

The management of good health facilities by the Company throughout 2018 impacted the level of productivity of the Company's employees. In 2018 the Company's employee productivity was recorded at RpRp2.68 million per employee, an increase of 11.47% from Rp2.40 million per employee in 2017.

The increase in employee productivity indicates the low health risks faced by the Company.

WORK SAFETY ACTIVITIES WORK SAFETY MANAGEMENT

For work safety, IPC applies basic provisions in accordance with work safety requirements in the applicable laws and regulations. This is done to encourage the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in all operational areas of the IPC, including:

1. The company plays an active role in implementing work safety guidance for all workers in an effort to improve work safety. IPC has an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) that was formed at the Head Office and several Port branches that have been approved by the local Provincial Manpower Office. While several other port branches are in the process of forming Committees.
2. Installing warning signs related to work safety in all operational work environments, especially in locations at risk of workplace accidents.
3. Providing Personal Protective Equipment (PPE) needed for all operational workers, including other parties in IPC

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

- yang berada di lingkungan IPC (*visitor*) dalam upaya menjamin keselamatan kerja dalam melaksanakan aktivitas pelayanan jasa kepelabuhanan.
4. Menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lokasi kerja.
 5. Membentuk organisasi kelembagaan K3 dengan menempatkan pekerja yang berkualifikasi ahli keselamatan kerja yang berperan membantu manajemen, dalam menyiapkan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di seluruh wilayah operasional IPC.
 6. Menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, antara lain berupa 13 (tiga belas) unit mobil pemadam kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah operasional perusahaan, menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berupa Tabung APAR, *hydrant*, *bonpet* dan *sprinkle* pada seluruh bangunan kantor rumah dinas dan fasilitas pelayanan termasuk pelayanan produksi yang dimiliki.
 7. Melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap darurat sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kesiagaan seluruh pekerja dalam menghadapi kondisi darurat di tempat kerja.
 8. Melakukan sertifikasi terhadap seluruh fasilitas pelayanan, peralatan produksi termasuk pekerja yang mengoperasikan peralatan produksi sesuai dengan kualifikasi kelayakan keselamatan kerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menerapkan standar SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 sebagai bagian dari sistem manajemen IPC, khususnya pada pelabuhan kelas utama (hal ini telah mendapat pengakuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tenaga Kerja).
 10. Partisipasi dalam bulan K3 Nasional di kantor pusat, 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan, dan 17 (tujuh belas) Anak Perusahaan.
- (visitor) in an effort to guarantee work safety in carrying out port service activities.
4. Providing First Aid Equipment (P3K) at the work site.
 5. Establishing an OHS organization by placing qualified workers as occupational safety experts who play a role in helping management prepare the implementation of the Occupational Health and Safety Management System in all operational areas of IPC.
 6. Providing fire fighting facilities and infrastructure, including 13 (thirteen) fire engines spread throughout the company's operational areas, providing Light Fire Extinguishers in the form of APAR, Hydrant, Bonpet and Sprinkle Tubes in all office buildings, official houses and service facilities including production services owned.
 7. Conducting fire fighting and emergency response simulations in an effort to improve preparedness and alertness of all workers in the face of emergencies in the workplace.
 8. Conducting certification of all service facilities, production equipment including workers who operate production equipment in accordance with work safety feasibility qualifications in the applicable laws and regulations.
 9. Implementing SMK3 standards in accordance with PP 50 of 2012 and OHSAS 18001: 2007 as part of the IPC management system, especially in the main class ports (this has received recognition from the Ministry of Manpower).
 10. Participating in the National OHS month at the Head Office, 12 Port Branches, and 17 Subsidiaries.

PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE

Selain menerapkan SMK3 dan OHSAS 18001, IPC menerapkan instrumen *International Ship and Port Security* (ISPS) sesuai dengan standar internasional yang mengacu kepada ISPS Code yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization* (IMO). Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

IMPLEMENTATION INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE

In addition to implementing OHSMS and OHSAS 18001, IPC has implemented the *International Ship and Port Security* (ISPS) instrument in accordance with international standards that refer to the ISPS Code issued by *International Maritime Organization* (IMO). Indonesia is one of its members.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

ISPS telah diimplementasikan secara prinsip di 11 (sebelas) Cabang Pelabuhan dan telah dilakukan asesmen eksternal atau verifikasi pertengahan untuk menilai konsistensi penerapan ISPS Code yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) sebagai persyaratan wajib terhadap fasilitas pelabuhan yang sudah memenuhi persyaratan ISPS Code.

Untuk mendukungnya penerapan ISPS, IPC menyelenggarakan *Training, Drill & Exercise* yang dipersyaratkan dalam ISPS Code serta pelatihan *awareness* (IMO Model Course 3.24 *Security Awareness Training*) dan *internal auditor* ISPS Code. IPC juga aktif terlibat dalam Seminar Temu Nasional Forum ISPS Code 2018.

Pada tahun 2019, akan direalisasikan pada 10 (sepuluh) Cabang Pelabuhan untuk comply terhadap ISPS Code dengan melaksanakan perpanjangan SoCPF (*Statement of Compliance of A Port Facility*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI.

BIAYA

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait keselamatan kerja di area Pelabuhan sebesar Rp38.346.731.965.

DAMPAK KUANTITATIF DAN RISIKO

Perseroan menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan, telah memberikan dampak yang cukup efektif. *Stakeholder* berharap dengan pengelolaan keselamatan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja Perseroan yang selanjutnya akan memberikan dampak peningkatan nilai perusahaan. Selama tahun 2018, Perseroan telah mencatat bahwa penurunan kecelakaan kerja para karyawan dibandingkan tahun sebelumnya, Disampaikan dalam tabel rekap kecelakaan kerja tahun 2017-2018.

Meskipun telah terjadi penurunan kecelakaan kerja namun demikian Perseroan masih menghadapi risiko kecelakaan kerja yang perlu diupayakan untuk tidak terjadi kecelakaan kerja.

ISPS has been implemented in principle in 11 Port Branches, with external assessments performed to assess consistency of ISPS Code implementation. The assessments are conducted by the Directorate General of Sea Transportation as a mandatory requirement for port facilities to meet ISPS code requirements.

To support the implementation of ISPS, IPS organizes training, drills and exercises as required in the ISPS Code as well as awareness training (IMO Model Course 3.24 Security Awareness Training) and internal auditor of ISPS Code. IPC is also actively involved in the 2018 ISPS Code National Forum Gathering Seminar.

In 2019, the 10 (ten) Port Branches that have complied with ISPS Code will carry out an extension of the SoCPF (Statement of Compliance of A Port Facility) issued by the Government through the Directorate General of Sea Transportation.

COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to work safety in port area was Rp32,912,737,673.

QUANTITATIVE IMPACT AND RISK

The Company considers that the occupational safety and health management, supported by socialization activities and various trainings, has had a quite effective impact. Stakeholders hopes the good work safety management improves the Company's performance, which in turn will have an impact on increasing the value of the Company. During 2018, the Company has noted the decline in workplace employee accidents compared to the previous year, as shown in the 2017-2018 work accident recap table.

Even though there has been a decrease in workplace accidents, the Company still faces the risk of work accidents that need to be addressed to avoid work accidents.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Selain itu, IPC Cabang Pelabuhan Jambi telah meraih penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident Award*) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Jambi H. Zumi Zolla Zulkifli, S.TP, MA, pada 31 Juli 2017.

IPC Jambi earned a zero accident award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, which was delivered by the Governor of Jambi Province, H. Zumi Zolla Zulkifli, S.TP, MA, on 31 July 2017.

IPC Cabang Pelabuhan juga meraih penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018 yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP pada 28 Februari 2019.

IPC Banten earned a zero accident award and Provincial Work Safety Guidance Committee (P2K3) in 2018, which was delivered by the Deputy Governor of Banten H. Andika Hazrumy, S. Sos., M.AP on February 28, 2019.

Penghargaan 2018

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sertifikasi bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2018 IPC Kantor Pusat memperoleh sertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 tahun 2012 pada tanggal 30 Juli 2018.

Awards 2018

As explained in the employment certification section, in 2018 the IPC Head Office received OHSM certification in accordance with PP No. 50 of 2012 on 30 July 2018.



Adapun tabel rekap kecelakaan kerja di Kantor Pusat IPC maupun Kantor Cabang Pelabuhan disampaikan sebagai berikut.

Table of work accident recap in Head Office IPC and the Port Branch Office as follows.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Tabel Rekap Kecelakaan Kerja 2017 – 2018

Work Accident Recap 2017 - 2018

Unit Kerja <i>Work Unit</i>	2018		2017	
	Kecelakaan <i>Accident</i>	Kematian <i>Fatal</i>	Kecelakaan <i>Accident</i>	Kematian <i>Fatal</i>
Kantor Pusat Head Office	0	0	0	0
Tanjung Priok	8	1	33	3
Panjang	2	0	0	0
Palembang	3	0	2	0
Teluk Bayur	0	0	2	0
Pontianak	0	0	1	0
Cirebon	1	1	0	0
Banten	0	0	0	0
Sunda Kelapa	6	0	5	0
Jambi	0	0	0	0
Bengkulu	0	0	0	0
Pangkal Balam	2	1	0	0
Tanjung Pandan	0	0	0	0
Jumlah	22	3	43	3

SALURAN PENGADUAN

Untuk saluran pengaduan yang dilakukan IPC dapat disampaikan selama 24 jam, jika terjadi keadaan darurat di area pelabuhan dan sekitarnya. Adapun PIC Operator Damkar pada setiap Cabang Kepelabuhan yang dimiliki IPC sebagai berikut:

COMPLAINT CHANNELS

Complaints made to IPC can be delivered 24 hours a day, in the event of an emergency in the port area and its surroundings. The Damkar PIC Operators in each IPC port branch are as follows:

Tabel PIC Operator Damkar di Setiap Cabang

Damkar Operator in Each Branch

No.	Cabang Pelabuhan <i>Port Branch</i>	No. telp darurat <i>Tel Number</i>
1	Kantor Pusat Head Office	021-4352229 ext. 2633 021-4301080 ext. 2633
2	Tanjung Priok	
3	Panjang	0721-31146 ext. 849 0721-31149
4	Palembang	0711-710611 ext. 4316 0812-7146-9565
5	Teluk Bayur	0751-61746 ext. 184
6	Pontianak	0561-732181 0811-4348-508 0822-5414-2118

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

No.	Cabang Pelabuhan <i>Port Branch</i>	No. telp darurat <i>Tel Number</i>
7	Cirebon	0813-1025-0923
		0898-3552-534
		0823-1766-6573
8	Banten	0254-601221 ext. 2531
9	Sunda Kelapa	-
10	Jambi	0811-7434-282
11	Bengkulu	0736 - 51409 ext. 105
12	Pangkal Balam	-
13	Tanjung Pandan	-

Pada Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Tanjung Pandan dan Sunda Kelapa tidak memiliki sarana mobil pemadam kebakaran sehingga pada saat keadaan darurat, saluran yang dapat dihubungi adalah Damkar PEMDA setempat.

The Pangkal Balam, Tanjung Pandan and Sunda Kelapa Port Branches do not have fire truck facilities so that during an emergency, the Local Government Damkar can be contacted.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM PKBL DAN CSR

Struktur pengelolaan PKBL dan CSR di lingkungan IPC berada di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan pada Direktorat Utama. Dengan demikian, secara teknis pengelolaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berada dalam pengawasan Sekretaris Perusahaan. Dalam pelaksanaan PKBL dan CSR terdapat pendelegasian kewenangan kepada Direktur SDM dan Hukum hingga batasan tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi IPC. Adapun struktur organisasi pengelola program PKBL dan CSR IPC adalah sebagai berikut:

PKBL AND CSR PROGRAM MANAGEMENT STRUCTURE

The PKBL and CSR management structure in IPC is under the Corporate Secretary Division in the Main Directorate. Therefore, the management of corporate social responsibility activities is technically under the supervision of the Corporate Secretary. For the implementation of PKBL and CSR, there is a delegation of authority to the Director of HR and Legal up to certain limits as stipulated in the Minutes of Agreement of the Board of Directors of IPC.

The organizational structure of IPC PKBL and CSR program managers is as follows.



Sumber: Berita Acara Kesepakatan Direksi No. UM.339/18/8/3/Pl.II-16 Tanggal 18 Agustus 2018 Tentang Pendelagasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia Persero.
Source: Minutes of Agreement of Directors No. UM.339 / 18/8/3 / Pl. II-16 dated 18 August 2018 concerning Delegation of Internal Authority Implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program and the PT Pelabuhan Indonesia Partnership and Community Development Program (PKBL).

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait pengembangan masyarakat, pendekatan yang dilakukan Perseroan difokuskan pada pemberdayaan sosial masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan untuk masyarakat dan komunitas di wilayah operasional IPC. Adapun pelaksanaan tanggung jawab Perseroan terkait pemberdayaan sosial masyarakat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan berikut:

COMMITMENT AND POLICY

For implementing social responsibility related to community development, the approach taken by the Company is focused on community social empowerment through partnership and community development programs for communities in the IPC operational areas. The implementation of the Company's responsibilities related to social empowerment is carried out by referring to the following provisions:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

1. Pelaksanaan CSR (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
 2. Pelaksanaan PKBL BUMN (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara); dan
 3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17 tentang PKBL dan CSR.
1. For CSR (Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies).
 2. For BUMN PKBL (Ministry of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the SOEs Partnership Program and Community Development Program).
 3. IPC Board of Directors Decree concerning PKBL & CSR Number HK.568/8/5/1/PI.II-17

ROADMAP PKBL DAN CSR

Sebagai salah satu komitmen untuk menjalankan bisnis berkelanjutan IPC, dengan mewujudkan dalam menyusun *Roadmap* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Roadmap* tersebut, ini menjadi panduan bagi Insan IPC dalam melaksanakan kegiatan CSR yang meliputi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Salah satu tujuan disusunnya *Roadmap* PKBL dan CSR adalah untuk menentukan strategi dari setiap kegiatan atau program CSR yang akan dilaksanakan. Tentunya dibutuhkan program yang efektif dan terintegrasi dengan visi, misi, *value* serta strategi bisnis Perusahaan. Dengan demikian strategi dan program CSR ini akan menjadi bagian dari strategi bisnis IPC. Tahapan dalam *Roadmap* PKBL dan CSR ini dikembangkan dengan memperhatikan tema tahunan *Corporate Roadmap* IPC 2016-2020.

Roadmap PKBL dan CSR ini juga disusun sesuai dengan ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* yang secara komprehensif memiliki 7 (tujuh) *core subject* sebagai acuan dalam melakukan CSR. Pada tahap awal penyusunan dokumen *Roadmap* PKBL dan CSR ini, dilakukan asesmen atas kegiatan CSR saat ini berbasis 7 (tujuh) *core subject* ISO 26000. Hasil asesmen tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan *Roadmap* PKBL dan CSR yang berisi berbagai inisiatif untuk mensinergikan kekuatan Perusahaan dengan *stakeholder* terkait. Kemudian, penyusunan *Roadmap* PKBL dan CSR ini dituangkan dalam Nomor MB.02/24/12/1/LMS/UT/PI.II-18 tanggal 24 Desember 2018.

PKBL AND CSR ROAD MAP

As a commitment to running a sustainable business, IPC has developed a Roadmap for Corporate Social Responsibility (CSR). This CSR roadmap is a guide for IPC employees in carrying out CSR activities and includes the activities for the Partnership and Community Development Program (PKBL) and the Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities.

One of the CSR Roadmap objectives is to determine the strategy for each IPC CSR activity or program that will be implemented. An effective and integrated program is needed with the Company's vision, mission, values and business strategy. Thus this CSR strategy and program forms part of the IPC business strategy. The CSR roadmap stages were developed taking into account the annual theme of the 2016-2020 IPC Corporate Roadmap.

The CSR Roadmap was also compiled based on ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* that has seven core subjects as a reference in conducting CSR. In the initial stages of the CSR Roadmap document preparation an assessment of current CSR activities was carried out based on the ISO 26000 seven core subjects. The assessment results were used as a reference in the preparation of the CSR Roadmap that contained various initiatives to synergize the Company's strengths with related stakeholders. Drafting the PKBL Roadmap & This CSR is stated in MB.02 / 24/12/1 / LMS / UT / Numbers PI.II-18 dated December 24, 2018.

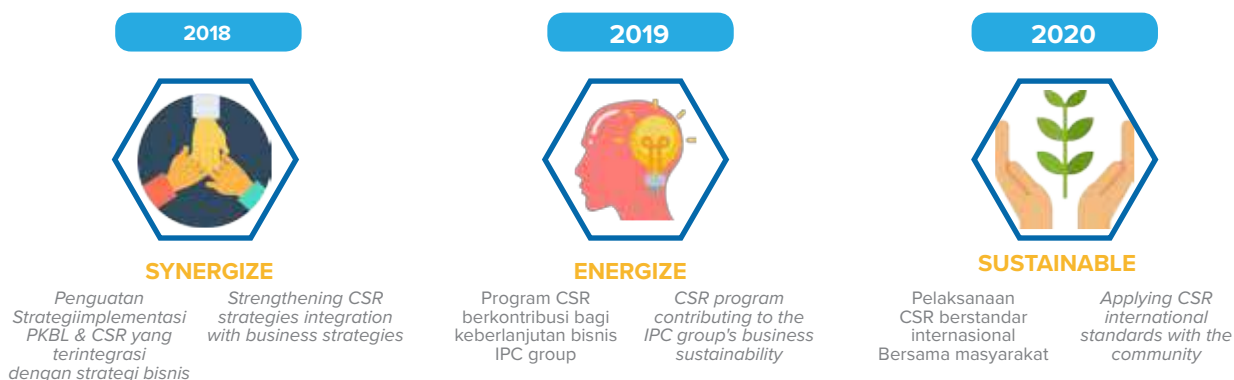
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
 Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Dengan diberlakukannya *Roadmap* PKBL dan CSR tersebut, tanggal 24 Desember 2018, diharapkan kinerja keberlanjutan dapat tercapai dengan baik dan terjalin sinergi dari berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja Perusahaan. Dengan demikian akan berdampak pula pada kinerja IPC secara keseluruhan baik di kantor pusat, kantor cabang pelabuhan dan anak perusahaan juga dapat meningkat dan lebih *sustainable*. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan kontribusi IPC bagi seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal juga terus meningkat.

With the enactment of the CSR Roadmap dated December 24, 2018, it is expected that sustainability performance can be achieved well, and established synergies from various parties will improve the Company's performance. Thus the overall performance of IPC both at the Head Office, port branch offices and subsidiaries will increase and be more sustainable. In line with this, IPC's contribution to all internal and external stakeholders is also expected to continue to increase

Dalam menjalankan perannya, organisasi seharusnya bekerja berdasarkan standar pedoman perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. ISO 26000 ini, menetapkan tujuh subyek inti (*core subject*) yang penting untuk diperhatikan dan menjadi bagian integral dalam perencanaan aktivitas tanggung jawab sosial organisasi. Berdasarkan hal tersebut IPC menyusun *Roadmap* kebijakan implementasi CSR yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 yang sejalan dengan *Roadmap Corporate*.

In carrying out its role, organizations should work based on standards of behavior guidelines that are in accordance with the principles of social responsibility. ISO 26000 defines seven core subjects that are important and become an integral part of planning the organizational social responsibility activities. Based on this, IPC compiled a CSR policy roadmap for 2018 to 2020 in line with the Corporate Roadmap.



Synergize

1. Mendesain program PKBL dan CSR yang mendukung strategi bisnis berbasis ISO 26000;
2. Kelengkapan kebijakan dan infrastruktur PKBL dan CSR;
3. Memotret dan mengevaluasi pelaksanaan PKBL dan CSR;
4. Mendesain komunikasi perusahaan tentang PKBL dan CSR;
5. Integrasi PKBL dan CSR lintas unit kerja di Pusat dan Cabang, dan
6. Penyiapan SDM pelaksana program.

Energize

1. Penumbuhan kesadaran dan inisiatif sinergi PKBL dan CSR di sepanjang rantai/rentang kendali bisnis IPC;

Synergize

1. Designing CSR and PKBL programs that support ISO 26000 based business strategies;
2. Completeness of CSR policies and infrastructure;
3. Recording and evaluating the CSR and PKBL implementation;
4. Designing Corporate Communication regarding CSR and PKBL;
5. CSR integration across work units at the Head Office and Branches; and
6. Preparing HR for program implementation.

Energize

1. Awareness raising and CSR synergy initiatives throughout the IPC chain / range of business control;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

2. Pengorganisasian masyarakat untuk melaksanakan sinergi PKBL dan CSR ;
 3. Pelaksanaan program-program PKBL dan CSR kolaboratif yang memberikan manfaat bersama (*shared value*);
 4. Pelaksanaan program-program PKBL dan CSR di lokasi proyek-proyek strategis IPC;
 5. Meningkatkan branding IPC sebagai perusahaan yang ramah lingkungan; dan
 6. Membuat internal *award* di IPC Group (cabang dan anak perusahaan).
2. Organizing the community to implement CSR synergies;
 3. Implementing collaborative CSR programs that provide shared value;
 4. Implementing CSR and PKBL programs at the location of IPC strategic projects;
 5. Increasing IPC's Branding as an environmentally friendly company; and
 6. Creating internal awards in the IPC Group (branches and subsidiaries).

Sustainable

1. Tumbuh inisiatif pelaksanaan PKBL dan CSR secara mandiri oleh *stakeholder*;
2. Integrasi pelaksanaan PKBL dan CSR di seluruh rantai bisnis IPC;
3. Aktif di forum-forum internasional dalam pengembangan bisnis berkelanjutan;
4. Pelaksanaan PKBL dan CSR IPC menjadi rujukan bagi perusahaan di tingkat nasional dan internasional;
5. Memiliki program PKBL dan CSR yang menjadi simbol IPC; dan
6. Audit PKBL dan CSR berdasarkan ISO 26000.

Tema Roadmap IPC

Tema : "ALIGNING SUSTAINABLE PORT"
Sub Tema : Menyelaraskan Strategi Menuju Pelabuhan Berkelanjutan

IPC memiliki inisiatif *green port* sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap bisnis berkelanjutan. Inisiatif ini terus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja terkait di Perseroan. Inisiatif ini juga akan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan, negara dan lingkungan jika dilakukan secara partisipatif bersama *stakeholder*.

IPC mendapatkan manfaat profit dan reputasi yang optimal, *stakeholder (people)* akan mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih baik, ekologi (*planet*) lebih terjaga dan negara merasakan kontribusi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (3P).

RENCANA KEGIATAN

Pada tahun 2018, fokus kegiatan PKBL & CSR IPC mengacu pada "3P", yaitu *Planet*, *People* dan *Profit* yang diwujudkan dalam tiga program utama: IPC Cinta Pendidikan, IPC Cinta Lingkungan dan IPC Cinta Kesehatan.

Sustainable

1. Growing CSR implementation initiatives independently by stakeholders;
2. Integrating the CSR implementation throughout the IPC business chain;
3. Being active in international forums in sustainable business development;
4. IPC's CSR implementation as a reference for companies at national and international levels;
5. Having CSR and PKBL program that become a symbol of IPC; and
6. CSR audits based on ISO 26000.

IPC Roadmap Theme

Theme : "ALIGNING SUSTAINABLE PORT"
Sub Theme : Aligning Strategies Towards Sustainable Ports

IPC has a green port initiative as a form of commitment to support sustainable business. This initiative continues to be carried out in all relevant work units in IPC. This initiative will provide added value for the Company, the State, and the environment if it is carried out in a participatory manner with stakeholders.

IPC will receive profit benefits and an optimal reputation, the stakeholders (*people*) will receive better economic benefits, the ecology (*planet*) will be better maintained and the State will feel the economic contribution, and job creation for the community (3P).

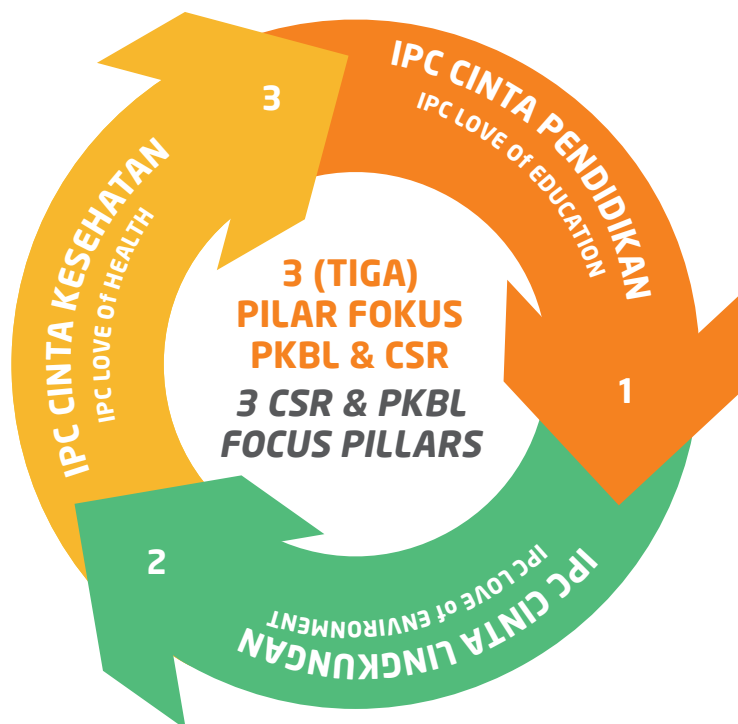
ACTIVITY PLAN

In 2018, the focus of IPC's CSR and PKBL activities refers to "3P", namely *Planet*, *People* and *Profit* which is realized in three main programs: IPC Love Education, IPC Love Environment and IPC Love Health.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

3 (Tiga) pilar fokus PKBL & CSR IPC

3 (Three) pillars of the IPC PKBL and CSR



Dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang pengembangan masyarakat, Perseroan telah melakukan *due diligence* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan masyarakat dengan melakukan *monitoring* dan tindak lanjut kegiatan khususnya Program Kemitraan. *Monitoring* dan tindak lanjut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak kegiatan dilaksanakan. Hasil *monitoring* dijadikan dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan dalam merencanakan kegiatan CSR selanjutnya.

When planning community development activities, the Company conducts due diligence towards corporate social responsibility by monitoring and following up on activities, especially in the Partnership Program. The monitoring and follow-up covers a period of 1 (one) up to 5 (five) years since the activity was carried out. The results of monitoring are used as a basis in assessing the effectiveness of program implementation and in planning subsequent CSR activities.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei kebutuhan masyarakat dan hasil monitoring kegiatan CSR yang telah dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kegiatan CSR terkait pengembangan kemasyarakatan diharapkan akan tepat sasaran. Perencanaan kegiatan CSR pengembangan kemasyarakatan telah dituangkan dalam *Roadmap* PKBL dan CSR tahun 2018 - 2020.

Planning is carried out using a community needs survey approach, and the results of CSR activity monitoring carried out. With this approach, CSR activities related to community development are expected to be on target. Community development CSR planning activities has been outlined in the PKBL and CSR Roadmap in 2018 - 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan perusahaan pada CSR terkait pengembangan masyarakat. Program Kemitraan diharapkan akan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui bantuan yang diberikan diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif. Sedangkan Program Bina Lingkungan diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara IPC dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting terkait pengembangan masyarakat seperti Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta peraturan terkait lainnya.

CSR terkait pengembangan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan melalui pelibatan Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan serta masyarakat guna efektifnya pelaksanaan kegiatan CSR. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaan CSR dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian BUMN dalam Program BUMN Hadir Untuk Negeri yang diikuti oleh seluruh perusahaan BUMN.

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait dengan aspek masyarakat, risiko tersebut antara lain komplain dari masyarakat sekitar atas dampak kegiatan perusahaan seperti kondisi keamanan sekitar pelabuhan, kebisingan, polusi udara, dan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu tercipta suasana lingkungan yang kondusif, nyaman dan sejahtera. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain bantuan sarana ibadah dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian akan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat dan perusahaan.

When planning CSR activities concerning community development, the Company considers the important direct or indirect impact of its activities and decisions. The Partnership Program is expected to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of SOE funds. Through the assistance provided, it is expected that all Partners can develop more, become independent and discover the potential for their products, making them more competitive. While the Community Development Program is expected to create a harmonious and mutually beneficial relationship pattern between IPC and the community, and create a conducive climate for the continuity of the business activities and safeguard the Company's assets.

The Company also reviews all regulations related to important community development issues including Ministry of SOE Regulation No. Per-03/MBU/12/2016 as an Amendment to Ministry of SOE Regulation No. Per-09/MBU/07/2015 concerning the SOE Small Partnership and Community Development Program and other related regulations.

Community development CSR is formulated and implemented by the Partnership and Community Development Department with the community to effectively implement the CSR activities. For certain activities, the CSR implementation is carried out in collaboration with the Ministry of SOE in the SOE Hadir Untuk Negeri Program that is followed by all SOE companies.

The Company always considers risks related to social aspects, these risks include complaints from surrounding communities on the impact of Company activities such as security conditions around the ports, noise, air pollution, and others. This is conducted to meet the expectations of the community in creating a conducive, comfortable and prosperous environment. Efforts made to date include assistance with places of worship and poverty alleviation. Thus it will create mutual benefits for the community and the company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Di samping itu, Perseroan juga menghadapi risiko terkait dengan kolektibilitas dana kemitraan. Perseroan telah memitigasi risiko tersebut dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan survei dan *collecting* dana kemitraan yang telah disalurkan.

RISIKO SOSIAL

Dalam menyalurkan Program Kemitraan, Perseroan menghadapi beberapa resiko terutama terkait piutang macet, maka perlu adanya upaya-upaya khusus untuk melakukan *collecting* piutang mitra binaan dan melakukan investigasi internal. Selain itu, perlu melakukan monitoring terhadap perkembangan pengembalian dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya kerugian.

KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Kegiatan CSR terkait pengembangan kemasyarakatan melibatkan Direksi, Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan seluruh karyawan sesuai dengan penugasan dari Perseroan. Bahkan beberapa kegiatan Direksi ikut terlibat dalam pelaksanaan secara langsung di lapangan, seperti pada kegiatan BUMN Hadir di Kampus dimana Direksi menjadi narasumber kegiatan tersebut. Seluruh karyawan, jajaran manajemen, dan serikat pekerja terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR bidang ketenagakerjaan.

Untuk menunjang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan IPC terus melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan PKBL & CSR terutama dalam bidang operasional PKBL sendiri, terlihat pada tahun 2018 telah meluncurkan untuk *go live* aplikasi PKBL & CSR berbasis *web* untuk mempercepat penyaluran ke masyarakat. Aplikasi PKBL milik IPC ini telah menjadi *role model* bagi BUMN lain untuk menjalankan PKBL diperusahaannya.

IPC selaku perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan memiliki 12 (dua belas) cabang Pelabuhan, yang mana masing-masing cabang pelabuhan memiliki perwakilan yang bertanggung jawab pada pengelolaan PKBL. Untuk menjamin pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan perusahaan secara tepat dan benar, IPC telah melakukan *training* CSR berbasis ISO 26000 kepada seluruh pengelola PKBL di lingkungan Perseroan.

The Company also faces risks related to the collectibility of partnership funds. The Company mitigates these risks by working with third parties to conduct surveys and collect channeled partnership funds.

SOCIAL RISK

In channeling the Partnership Program, the Company faces several risks, especially related to bad debt, so it is necessary to make special efforts to collect accounts receivables from partners, and carry out internal investigations. In addition, it is necessary to monitor the development of repayments and take steps to reduce losses.

ACTIVITIES PARTNERSHIPS AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

CSR activities related to community development involve the Board of Directors, the Partnership and Community Development, and all employees in accordance with their assignments from the Company. In fact, the Board of Directors are sometimes involved directly in the field, such as in the SOE Hadir di Kampus where the Directors became the resource persons for the activity. All employees, management and trade unions are actively involved in the implementation of CSR activities in the employment sector.

To support the Partnership Program and Community Development Program IPC continues to optimize the management of its PKBL & CSR, especially in the operational field of PKBL itself, as can be seen in the 2018 Go Live PKBL & CSR-based Web applications that speed up distribution of assistance. The company's PKBL application has become a role model for other SOEs to run PKBL in their companies.

IPC as a SOE is engaged in Port Services with 12 port branches where each port branch has a representative responsible for the management of PKBL. To guarantee the Company's Partnership Program and Community Development Program management, IPC conducted ISO 26000-based CSR training for all PKBL managers within the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
 Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan IPC mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Aturan tersebut menyebutkan, Program Kemitraan BUMN dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

Untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam aturan tersebut, IPC melakukan seleksi ketat dan memberikan kesempatan pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki produk dengan daya saing tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pemasaran, SDM, manajemen, permodalan dan teknologi. Terhadap para pengusaha yang telah terpilih untuk menjadi Mitra Binaan, IPC memberikan bantuan dengan beberapa metode berikut:

1. Pemberian pinjaman modal kerja;
2. Pemberian wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajerial;
3. Keikutsertaan Mitra Binaan pada beragam pameran dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan pemasaran produk, investasi maupun kerja sama bisnis; dan
4. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif.

Kinerja IPC dalam Program Kemitraan pada tahun 2017 dan 2018 menyalurkan bantuan sebesar Rp21.500.000.000 untuk mendukung usaha kecil di Indonesia agar menjadi tangguh dan mandiri. Hingga akhir 2018, jumlah mitra binaan mencapai 3.958 usaha kecil yang tersebar di seluruh sektor usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SEKTOR PENYALURAN DISTRIBUTION SECTOR	Tahun 2018 2018 Year	Tahun 2017 2017 Year
1	Sektor Industri Industrial Sector	839	851
2	Sektor Perdagangan Trade Sector	1.627	1.664
3	Sektor Pertanian Agriculture Sector	87	89

IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP PROGRAM ACTIVITIES

IPC's Partnership Program refers to the Ministry of SOEs Regulation No. Per-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning the Amendment to Ministry of SOEs Regulation No. Per-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program of State Owned Enterprises. The regulation states that the SOE Partnership Program is conducted to improve the ability of small enterprises to become resilient and independent through the utilization of SOE funds.

To fulfill the mandate contained in the regulation, IPC performs rigorous selection and provides opportunities for small entrepreneurs with high competitiveness but with limitations in marketing, HR, management, capital and technology. For the entrepreneurs selected to be Partners, IPC provides assistance through the following methods:

1. Provision of working capital loan;
2. Provision of knowledge and skills to develop the business in form of education and managerial training;
3. Participation of Partners in various exhibitions in pursuant of opening and developing a product marketing network, investments, and business cooperations; and
4. Through this assistance, all Partners are expected to become more developed, independent, and able to find potentials that will make their products more competitive.

IPC's performance in the Partnership Program in 2017 and 2018 channeled assistance amounting to Rp21,500,000,000 to support small businesses in Indonesia to become resilient and independent. By the end of 2018, the number of fostered partners reached 3,958 small businesses spread across all business sectors as shown in the following table:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
 Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

NO	SEKTOR PENYALURAN DISTRIBUTION SECTOR	Tahun 2018 2018 Year	Tahun 2017 2017 Year
4	Sektor Peternakan Livestock Sector	83	84
5	Sektor Perkebunan Plantation Sector	52	52
6	Sektor Perikanan Fisheries Sector	122	122
7	Sektor Jasa Service Sector	588	601
8	Sektor Lainnya Other Sectors	560	566
Jumlah Mitra Binaan Total Foster Partners		3.958	4.029

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar IPC dengan sifat bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara IPC dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan. Rencana Kerja Manajemen PKBL dan CSR Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITY

The Community Development Program target is the Company's surrounding communities through assistance to develop the communities. Thus we expect that the creation of harmonious and mutual relations, through the creation of a favorable climate for continuous business activities and the safeguarding of the Company's assets.

The Community Development Program is an activity in the field of community development. The reference standard for the implementation of the 2018 Community Development Program Work Plan in detail can be seen in the following table:

KEGIATAN ACTIVITY	KETERANGAN DESCRIPTION
Penyaluran pinjaman modal antara lain melalui sinergi BUMN Distribution of capital loans, among others, through the synergy of SOEs	Penyaluran Kemitraan melalui sinergi BUMN/anak perusahaan BUMN (PT BAV) telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp1,5 miliar. Rp1,5 miliar Distribution of the Partnership through the synergy of SOE / SOE subsidiaries (PT BAV) has been implemented with a value of Rp1.5 billion
Penyaluran Bantuan Dana Bina Lingkungan dan CSR seperti HUT IPC, Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri & Idul Adha), serta HUT BUMN Distribution of Community Development & CSR Fund Assistance such as on IPC's Anniversary, Religious Holidays (Eid Al-Fitr & Eid al-Adha), SOE Anniversary	Telah dilaksanakan program-program IPC Cinta Ramadhan, dan akan dilaksanakan Program-program peringatan HUT RI dan Idul Adha pada bulan Agustus 2018. IPC Cinta Ramadhan programs have been implemented, and programs were held to commemorate the Republic of Indonesia Anniversary, and Eid al-Adha in August 2018.
Laporan Audit PKBL Tahun 2017 2017 PKBL Audit Report	Telah selesai laporan Audit PKBL 2017. The PKBL 2017 Audit report has been completed
RKAP PKBL Tahun 2018 PKBL RKAP in 2018	Telah tersusun Rencana Kerja dan Anggaran PKBL 2018. The 2018 PKBL Work Plan and Budget has been prepared

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

KEGIATAN ACTIVITY	KETERANGAN DESCRIPTION
<p><i>Training</i> untuk pengelola PKBL Training for PKBL managers</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>training</i> CSR berbasis ISO 26000 pada tanggal 17-18 Juli 2018. ISO 26000 based CSR training was held on July 17-18 2018</p>
<p><i>Roadmap</i> PKBL dan CSR oleh Konsultan CSR & PKBL Roadmap by Consultants</p>	<p>Draft <i>final Roadmap</i> PKBL dan CSR berbasis ISO 26000. Final draft of ISO 26000 based CSR & PKBL Roadmap</p>

Adapun 7 (tujuh) bidang yang menjadi sasaran program Bina Lingkungan, yaitu:

1. Bantuan Kepada Korban Bencana Alam Di Spasi Bawah Bentuk Kepedulian Perusahaan Terhadap Terdampak Bencana Yang Terjadi, Bantuan Tersebut Terdiri Dari:

- a. Bantuan Bencana Banjir di Cirebon,
- b. Bantuan Bencana Gempa di Lombok,
- c. Bantuan Bencana Gempa di Palu,
- d. Bantuan Bencana Gunung Meletus di Bali, serta
- e. Bantuan Tsunami di Banten dan Lampung.

2. Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan.

a. Pelatihan vokasi las kepada masyarakat sekitar Perusahaan

Program ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada masyarakat dengan harapan dapat menjadi pengusaha kecil atau menengah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.

b. Beasiswa Cinta IPC kepada masyarakat wilayah Sumatera Selatan:

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak, bantuan ini meliputi pembiayaan terhadap biaya sekolah, memberikan pengetahuan lain seperti kunjungan lapangan tempat-tempat wisata dan bisnis yang ada di wilayah Jakarta, serta memberikan pelatihan *e-commerce* untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perdagangan dunia *online*.

c. Program Pengenalan Dunia Maritim kepada Siswa/i SD di Sekitar Perusahaan

Program ini bertujuan untuk mengenalkan masyarakat sekitar Perseroan bahwa peran IPC sebagai Perusahaan Jasa Kepelabuhan sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu Bangsa, karena Perseroan (pelabuhan) merupakan tempat ekspor dan impor barang-barang yang ingin masuk dan keluar suatu wilayah.

The 7 (seven) fields targeted by the Community Development program includes:

1. Assistance To Victims Of Natural Disasters Is A Form Of The Company's Concern, Such Assistance Consists Of:

- a. Flood Disaster Assistance in Cirebon,
- b. Earthquake Disaster Assistance in Lombok,
- c. Earthquake Disaster Assistance in Palu,
- d. Volcano Eruption Assistance in Bali,
- e. Tsunami Assistance in Banten and Lampung,

2. Educational And / Or Training Assistance.

a. Vocational training for the communities around the company

This program aims to provide expertise to the communities in the hope that they can become small or medium entrepreneurs so they can improve the economy of the communities around the company.

b. Cinta IPC Scholarship for the people of the South Sumatra region:

This program aims to provide opportunities for disadvantaged people to continue to receive proper education, and includes funding for school fees, providing other knowledge through field trips to tourist attractions and businesses in the Jakarta area, and providing e commerce training to prepare the community to face the online trade world.

c. Introduction to the World Maritime Program for elementary school students in the Company's areas

This program aims to introduce the people around the Company that the role of the Company (port services) is very important in supporting the economy of the nation as the Company (port) is a place of export and import of goods that want to enter and leave a region.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

- d. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Universitas melalui Program Direksi Mengajar**
Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta mengenalkan kepada mahasiswa/i peranan Perusahaan (Pelabuhan). Dalam kesempatan ini juga Perusahaan menginspirasi mahasiswa/i yang berprestasi dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, dengan adanya bantuan ini diharapkan mahasiswa/i lebih berpikiran luas untuk kepentingan Bangsa dan Negara.
- e. Pendidikan Gratis dan Berkualitas kepada Masyarakat**
IPC memberikan program pendidikan gratis dan berkualitas kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara melalui program SD Juara Cinta IPC. IPC memberikan program pendidikan gratis dan berkualitas kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara melalui program SD Juara Cinta IPC. Bentuk memberikan kesempatan kepada putra/i yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta Utara mendapatkan pengetahuan dasar.
- 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan.**
- a. Bantuan Peralatan Kesehatan Kepada Veteran di Pontianak**
Sebagai salah satu kepedulian Perseroan kepada Veteran Republik Indonesia wilayah Pontianak, IPC memberikan peralatan kesehatan sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada para Veteran.
- b. Donor Darah & Mobil Transfusi Donor Darah**
Untuk memenuhi kebutuhan darah yang diperlukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Jakarta Utara, Perseroan membuat program donor darah yang dilakukan secara berkala pada setiap triwulan. Selain itu untuk mendukung operasional Palang Merah Indonesia, Perusahaan memberikan bantuan mobil unit donor darah bertujuan untuk mempermudah PMI Jakarta Utara dalam mencari dan mendistribusikan darah kepada masyarakat.
- c. IVA Test & Sadernis**
Kegiatan ini merupakan kepedulian terhadap perempuan di lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja Perusahaan yang sehat dan bebas dari kanker serviks.
- 4. Bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Umum.**
- a. Sarana Sekolah Terpencil (Mentawai)**
Program Pembangunan Sekolah ini merupakan langkah Perusahaan untuk memastikan bahwa setiap
- d. Assistance with tuition fees for universities through the Board of Directors Teaching program**
This program aims to provide knowledge and introduce students to the role of the Company (Port), on this occasion the Company aspires to students who excel by providing tuition assistance. With this assistance, students are expected to be more broad-minded in the interests of the Nation and Country.
- e. Free and quality education to the community in the IPC**
IPC provides free and educational programs quality to the community in the Jakarta area North through the SD program Champion of Love IPC. IPC provide free and quality education programs to the community in the Jakarta area North through the SD program Champion of Love IPC. Form give opportunity to the son / i who from poor families in North Jakarta get basic knowledge.
- 3. Health Improvement Assistance.**
- a. Veterans' Health Equipment Assistance in Pontianak**
As one of the Company's concerns for the Republic of Indonesia Veterans in Pontianak, the Company provided medical equipment as a reward to Veterans.
- b. Blood Donation & Blood Donation Transfusion Vehicle**
To meet the blood needs of the North Jakarta Indonesian Red Cross, the Company held blood donation programs on a quarterly basis. As well as this support the Company provided a mobil blood donation unit to facilitate North Jakarta Red Cross in finding and distributing blood to the public.
- c. IVA Test & Sadernis**
This activity is a concern for women in the Company with the aim of ensuring that the Company's work environment is healthy and free of cervical cancer.
- 4. Assistance In Developing Public Facilities And Infrastructure.**
- a. Remote School Facilities (Mentawai)**
The School Development Program is a Company step to ensure that every citizen has the right to proper

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

warga negara mendapatkan hak pendidikan yang layak dengan menyediakan sarana pendidikan di wilayah Mentawai.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Program IPC Mengajar

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta mengenalkan kepada Mahasiswa/i peranan Perseroan (Pelabuhan). Dalam kesempatan ini, Perseroan juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas Universitas sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran. Dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan ini, diharapkan Universitas di lingkungan IPC dapat bersaing dengan Universitas yang bertaraf Internasional.

5. Bantuan Sarana Ibadah.

Merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, guna untuk memberikan tempat ibadah yang layak bagi pemeluk agama yang menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan warga negara. Tujuan program ini agar masyarakat lebih agamis sehingga berdampak pada lingkungan kerja Perseroan yang bebas dari kriminalisasi.

6. Bantuan Pelestarian Alam.

Penanaman Trumbu Karang

Indonesia sendiri merupakan Negara kepulauan, dengan 2/3 wilayahnya adalah laut. Pelabuhan merupakan terminal bagi kapal dan laut adalah jalannya, untuk menjamin bisnis Perusahaan tetap berjalan dengan baik serta menjaga ekosistem laut melalui program penanaman terumbu karang IPC, yang telah berperan dalam pelestarian wisata alam khususnya wisata bawah laut yang akhirnya akan berdampak pula terhadap ekonomi masyarakat.

7. Bantuan Sosial Masyarakat Pengentasan Kemiskinan.

a. Pembagian Sembako Gratis Ramadhan

Sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat, IPC melakukan pembagian Sembako Gratis di wilayah Perseroan dengan tujuan agar masyarakat dapat merayakan bulan Ramadhan dengan menyediakan sembako gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

b. Pembagian Hewan Qurban

Untuk merayakan hari Idul Adha, IPC memiliki program pembagian hewan qurban untuk memeriahkan perayaan hari besar Islam.

education by providing educational facilities in the Mentawai region.

b. School Facilities and Infrastructure Assistance for the IPC Teaching Program

This program aims to provide an understanding and introduce students to the role of the Company (Port). And on this occasion the Company also provided facilities and infrastructure to improve the quality of the University as a place of education and learning. By providing educational facilities and infrastructure, it is expected that universities in the Company's environment can compete with international-standard universities.

5. Aid For Places Of Worship Facilities.

As a form of corporate support for the construction and repair of religious facilities, to provide a place of worship that is appropriate for religious believers to carry out worship in accordance with their beliefs, so that more religious communities have an impact in the Company's work environment free from criminalization.

6. Nature Conservation Assistance.

Coral Reef Planting

Indonesia itself is an archipelago, with 2/3 of its territory being sea. The ports as terminals for ships and the sea ensure the Company's business continues to exist, and by maintaining the marine ecosystems through a program of planting coral reefs IPC plays a role in the preservation of nature tourism, especially underwater tourism which will ultimately help the community economy.

7. Community Social Assistance To Alleviate Poverty.

a. Distribution of Ramadhan Free Food

As a form of the Company's concern for the community, IPC distributes Free basic needs in the Company's areas with the aim that the community can celebrate the month of Ramadhan by providing free basic needs for the poor.

b. Distribution of Sacrificial Animals

To celebrate Eid al-Adha, IPC has a program to distribute sacrificial animals to enliven the celebration of Islamic holidays.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

RANGKAIAN KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI

1. Siswa Mengetahui Nusantara

Untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB, keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintah dan masyarakat di Provinsi yang di kunjungi. Pada tahun 2018 IPC berkesempatan memberangkatkan 23 siswa serta 3 (tiga) guru teladan di Provinsi Bangka Belitung menuju Provinsi Sulawesi Tengah (Palu).



ACTIVITIES IN THE BUMN HADIR UNTUK NEGERI PROGRAM

1. Students Explore the Nation

To instill a sense of pride and love for the homeland early on for high school / vocational / high school students. The diversity of the archipelago's wealth and regional potential is introduced through direct interaction of students with the Government and the people in the provinces visited. In 2018 IPC had the opportunity to send 23 students and 3 (three) teachers from Bangka Belitung Province to the Central Sulawesi Province (Palu).



2. BUMN Hadir di Kampus

Tujuan program ini untuk membangun *awareness & engagement* generasi muda terhadap BUMN melalui program kegiatan edukatif dan menarik, ajang *sharing* dan *transfer knowledge* dari para praktisi antara lain Direksi dan jajaran Manajemen kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kerja profesional serta merupakan ajang informasi dan pencarian *talent* muda berbakat untuk SDM di BUMN.



2. SOEs Present on Campus

The aim of the program is to build awareness & engagement of the younger generation towards SOEs through educational and interesting program activities, through knowledge sharing and transfer events from practitioners include Directors and Management to students as prospective professional workforce, as well as information and searching for young talent for HR in the SOEs.



3. Upacara HUT RI

Untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta untuk memeriahkan HUT RI bersama masyarakat, IPC ditunjuk

3. Indonesian Independence Day Ceremony

To instill a sense of love for the homeland and to enliven

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Kementerian BUMN untuk merayakan HUT RI di Provinsi Bangka Belitung.

4. Jalan Sehat

Untuk memeriahkan peringatan HUT RI serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam jalan sehat agar tercipta lingkungan kerja yang sehat.

5. Mudik Gratis BUMN

Untuk membantu Pemerintah dalam menekan kepadatan serta sebagai wujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan mudik.

6. Program Anti Korupsi

Perseroan telah memiliki beberapa mekanisme pencegahan korupsi yaitu sistem pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan Kebijakan Gratifikasi. Prosedur sistem pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan Kebijakan Gratifikasi telah disajikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PROGRAM CSR KEMASYARAKATAN LAINNYA

Program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR* kemasyarakatan lainnya) IPC merupakan kegiatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan kegiatan ini berada dalam lingkungan Divisi Sekretaris Perusahaan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, merupakan bentuk kepedulian IPC terhadap lingkungan sosial, sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Program ini berbeda dengan pelaksanaan PKBL seperti telah diuraikan di atas, karena PKBL direalisasikan dalam kapasitas IPC sebagai BUMN yang kegiatannya telah terikat dengan *frame work* yang dibuat oleh Pemerintah.

IPC juga melaksanakan PKBL dan CSR dalam rangka menyajahterakan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perusahaan.

1. Pelabuhan Kalibaru

Pembangunan Terminal Kalibaru yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional.

2. Pelabuhan Kijing/Mempawah

Terminal Kijing sebagai pengembangan Pelabuhan Pontianak, karena adanya keterbatasan area pengembangan di Kota Pontianak, dengan keterbatasan

the Republic of Indonesia's Independence Day with the community, IPC was appointed by the Ministry of SOEs to celebrate Indonesia's Independence Day in Bangka Belitung Province.

4. Healthy Walk

To enliven the Republic of Indonesia anniversary and foster a sense of togetherness in a healthy way to create a healthy working environment.

5. Free SOE Homecoming

To help the government reduce congestion and as a manifestation of the Company's concern for the community, through a sense of security and comfort in carrying out the Homecoming trips.

6. Anti Corruption Program

The Company maintains several corruption prevention mechanisms, namely the internal control system, the Whistleblowing System and the Gratification Policy. The internal control system procedures, Whistleblowing System and Gratification Policy are included in the Corporate Governance section of this Annual Report.

OTHER COMMUNITY CSR PROGRAMS

Corporate social responsibility programs (Other Community Corporate Social Responsibility / CSR) programs focus on community empowerment. Management of this activity is held by the Corporate Secretary Division. The purpose of this activity is primarily a form of IPC's concern for the social environment, as well as contributing to sustainable development. This program is different from the implementation of PKBL as described above, as PKBL is realized in the capacity of IPC as a SOE where activities are tied to the government frame work.

IPC also implements PKBL and CSR to improve welfare and help communities affected by the Company's strategic projects.

1. Kalibaru Port

Construction of the Kalibaru Terminal located in Tanjung Priok, North Jakarta. This port is planned to increase the capacity of Tanjung Priok Port to support national logistics distribution

2. Kijing/Mempawah Port

Kijing Terminal as the development of the Pontianak Port, where there are limited development areas in Pontianak, limited river depth and high sedimentation levels and to

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

kedalaman sungai dan tingkat sedimentasi yang tinggi serta untuk mendukung program Pemerintah "Tol Laut". Program Tol Laut ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas laut, guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Sumber Daya Alam di Indonesia.

3. Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut

Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways*/CBL sebagai alternatif moda transportasi yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus logistik jalur darat, dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan atau sebaliknya.

support the Government's "Sea Toll" program to improve sea connectivity to reduce logistics costs and improve the competitiveness of natural resource products

3. Construction of the Cikarang Bekasi Laut Terminal and *Inland Waterways*

Construction of CBL Terminal and *Inland Waterways* as an alternative mode of transportation is expected to reduce the density on the logistics routes from the Cikarang and Karawang industrial areas to Tanjung Priok Port and vice versa

PROGRAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA

IPC meresmikan Museum Maritim Indonesia pada 7 Desember 2018, museum ini didirikan oleh IPC dalam rangka memberikan kesempatan kepada generasi muda mengetahui bagaimana sejarah dan budaya maritim Indonesia. Di museum ini akan dilihat berbagai artefak bagaimana perjalanan pembuatan pelabuhan di Indonesia dan bagaimana Indonesia menjadi negara maritim. Museum Maritim Indonesia dibuka untuk umum dan dapat menjadi salah satu tujuan wisata yang bersifat pendidikan.

CULTURAL ARTS DEVELOPMENT PROGRAM

IPC inaugurated the Indonesian Maritime Museum on December 7, 2018, a museum founded by IPC to provide opportunities for the younger generation to learn about the history and culture of Indonesian maritime culture. In this museum various artifacts can be seen on how ports in Indonesia were developed and how Indonesia became a maritime country. The Indonesian Maritime Museum is open to the public and can become an educational destination.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR terkait pengembangan kemasyarakatan yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham.

The Company has a reporting mechanism on the results of community development-related CSR activities as a part of the Management Report. The Management Report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners before being submitted to the shareholders.

BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA PELAKSANAAN PKBL

Pada tahun 2018, IPC merealisasikan penyaluran PKBL sebesar Rp 1,5 miliar bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura yang merupakan anak perusahaan BUMN, hal ini dikarenakan IPC sangat memperhatikan kolektibilitas dan prinsip kehati-hatian serta bentuk upaya sinergi BUMN dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Realisasi Penyaluran tersebut terdiri dari:

COST OF ACTIVITIES

PKBL COST REALIZATION

Realization in 2018 amounted to Rp1.5 Billion in collaboration with PT Bahana Artha Ventura, which is a SOE subsidiary, this is because IPC is very attentive about collectibility, and the principle of prudence, and forms synergies with SOEs in an effort to empower communities. The realization consisted of:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Tabel Realisasi Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha

(dalam ribu rupiah)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Sektor Perdagangan Trade Sector	-	-	-
Sektor Jasa Service Sector	-	-	-
Sektor Lainnya Other Sectors	1.500.000	20.000.000	9,25
Total Penyaluran Pinjaman Total Loan Distribution	1.500.000	20.000.000	(92,5)

Realization of Partnership Programs Distribution by Business Sector

(in thousand rupiah)

Tabel Realisasi Program Bina Lingkungan berdasarkan Wilayah

(dalam ribu rupiah)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
DKI Jakarta	7.818.183	8.940.939	(12,5)
Kantor Pusat / Head Office	5.884.323	7.935.884	(25,8)
Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Port Branch	1.629.328	360.480	351,98
Cabang Sunda Kelapa Sunda Kelapa Port Branch	304.532	644.575	(52,75)
Lampung	776.280	293.200	164,76
Sumatera Selatan	447.012	142.398	213,91
Sumatera Barat	2.997.408	966.267	210,20
Kalimantan Barat	3.260.783	777.520	319,38
Banten	230.877	507.864	(54,53)
Cirebon	1.974.141	928.399	112,63
Jambi	-	359.995	-
Bengkulu	1.001.865	1.341.960	(25,34)
Bangka Belitung	624.164	659.585	(5,37)
Bangka (Cabang Pangkal Balam/Pangkal Balam Branch)	-	384.460	-
Belitung (Cabang Tanjung Pandan/Tanjung Pandan Branch)	624.164	275.125	126,86
Total Penyaluran Pinjaman Total Loan Distribution	19.436.961	14.918.127	30,29

Realization of Community Development Program by Region

(in thousand rupiah)

REALISASI BIAYA PELAKSANAAN CSR KEMASYARAKATAN LAINNYA

Sepanjang tahun 2018, total dana kegiatan CSR kemasyarakatan lainnya yang disalurkan IPC mencapai Rp7,19 miliar. Adapun rincian pemanfaatannya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

OTHER COMMUNITY CSR COSTS REALIZATION

During 2018, the total funding for other community CSR activities channeled by IPC reached Rp7.19 billion. The details are shown in the table below.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
 Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Tabel Realisasi Pelaksanaan CSR

(dalam ribu rupiah)

CSR Cost Realization

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pemberdayaan/pembinaan masyarakat kurang mampu Empowerment / guidance of disadvantaged communities	258.000	1.538.235	(83,22)
Pembangunan/pengembangan lingkungan, fasilitas serta pelestarian alam Development of the environment, facilities and nature conservation	1.431.052	2.699.093	(46,98)
Pendidikan/pelatihan, kegiatan olah raga dan kesenian Education / training, sports and arts activities	633.355	437.766	44,67
Kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan Community and religious social activities	4.285.382	992.811	331,64
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	1.675.000	-	-
Total Pelaksanaan CSR Total CSR Implementation	7.189.483	5.667.905	26,84

DAMPAK KEGIATAN

Program Kemitraan yang dilakukan IPC untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif.

Sedangkan Program Bina Lingkungan yang dilakukan IPC untuk masyarakat sekitar Perseroan dengan sifat bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara IPC dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

Untuk kegiatan CSR lainnya juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mensejahterakan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perusahaan. Dengan demikian, secara umum bisa disampaikan bahwa kegiatan CSR telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

IMPACT OF ACTIVITIES

The Partnership Program conducted by IPC aims to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of SOE funds. By using the assistance provided, it is expected that all partners can develop more, become independent and find the potential to make their products more competitive.

Whereas the Community Development Program conducted by IPC for the communities around the Company takes the form of assistance for community empowerment activities that are expected to create a harmonious and mutually beneficial relationship between IPC and the communities, and create a conducive climate for business continuity and for safeguarding the Company's assets.

Other CSR activities also provide benefits to the community by prospering and helping communities affected by the Company's strategic projects. Thus, in general it can be stated that CSR activities have provided benefits for sustainable development, especially related to poverty alleviation, eliminating hunger and improving the quality of public education.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

SALURAN PENGADUAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Untuk saluran pengaduan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dapat disampaikan pada Divisi Corporate Secretary atau dapat *email*: ipcckbl@gmail.com maupun corp_sec@indonesiaport.co.id.

PENGHARGAAN BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pada tahun 2018, Perseroan telah memperoleh penghargaan bidang pengembangan kemasyarakatan yaitu Direktur Utama sebagai *Top Leader On CSR Commitment 2018* dan Penghargaan *Top CSR 2018* Sektor Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Business News Indonesia dalam acara *Top CSR 2018*.

COMMUNITY DEVELOPMENT COMPLAINT CHANNELS

For channeling complaints related to social development, they can be submitted via email to ipcckbl@gmail.com or corp_sec@indonesiaport.co.id.

AWARDS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

In 2018, the Company received a community development award, namely the President Director as the Top Leader On 2018 CSR Commitment, and the 2018 Port Sector Top CSR Award from Business News Indonesia at the 2018 Top CSR event.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, yang salah satunya adalah dengan secara aktif meluncurkan berbagai program yang fokus dan berorientasi kepada pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan, beberapa program yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pelayanan berbasis teknologi.

Dengan mewujudkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan ke para pelanggan, IPC memiliki kebijakan dalam pengelolaan pelanggan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor HK.568/19/1/2/PI.II-17 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Pelanggan. SK tersebut mengatur tentang:

1. Pelayanan Pendaftaran Pelanggan;
2. Pelayanan Perubahan Data Pelanggan;
3. Pelayanan Keluhan Pelanggan;
4. Pelayanan Klaim Pelanggan;
5. Pengelolaan Hubungan Pelanggan; dan
6. Survei dan *Monitoring* Survei Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Loyalitas Pelanggan.

Dengan demikian rumusan lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen meliputi;

1. Informasi produk/jasa,
2. Kesehatan dan keselamatan konsumen,
3. Layanan pengaduan konsumen, dan
4. Program peningkatan kepuasan dan loyalitas bagi konsumen.

RENCANA KEGIATAN

Dalam rangka mencapai Visi Perusahaan menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan, IPC memiliki rencana maupun target dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. Adapun rencana tersebut antara lain:

1. Melakukan pemahaman untuk informasi layanan IPC kepada seluruh masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai layanan kepelabuhan yang dimiliki Perseroan, yang dilakukan dalam kegiatan *coffee morning* yang ditargetkan diadakan setiap triwulan;
2. IPC memberikan kemudahan pengaduan bagi para pelanggan, sebagai upaya Perseroan dalam meningkatkan loyalitas pelayanan bagi para pelanggan, yang dituangkan dalam kegiatan *customer visit*, direct mailing dan *web portal*;

COMMITMENT AND POLICY

IPC is highly committed to improving the quality of services to customers, including actively launching various customer focused and oriented programs. As a company engaging in the port services field, programs undertaken to support customers include technology-based services.

IPC has a policy for managing customers as stated in the Board of Directors' Decree (SK) No HK.568/19/1/2/PI.II-17 dated January 19, 2017 concerning Guidelines for Managing Customer Relations. The decree regulates:

1. Customer Registration Services;
2. Services for Changing Customer Data;
3. Customer Complaint Services;
4. Customer Claim Services;
5. Customer Relations Management;
6. Surveys and Monitoring of Customer Satisfaction, Dissatisfaction and Loyalty Surveys.

The Company's scope of corporate social responsibility towards consumers includes;

1. Information on products / services,
2. Consumer health and safety,
3. Customer complaint services, and
4. Program to increase satisfaction and loyalty for consumers.

ACTIVITY PLAN

To achieve the Company's Vision to become a world-class port manager that excels in operations and services, IPC plans and targets to improve the quality of service for customers. The plans include:

1. Carrying out an understanding of IPC services information for the community in an effort to improve understanding of the Company's port services, in targeted morning coffee activities held quarterly;
2. IPC provides convenience for customers, in an effort by the Company to increase customers service loyalty, in the form of customer visits, direct mailing and through the web portal;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

3. Melakukan kegiatan survei kepuasan pelanggan setiap tahun sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas pelayanan yang diberikan Perusahaan kepada pelanggan, dengan memonitor dan mengevaluasi hasil tindak lanjut survei kepuasan tersebut.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait dengan konsumen, Perseroan telah melakukan *due diligence* dengan memperhatikan hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan yang menggambarkan informasi kebutuhan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan evaluasi hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai bahan untuk menyusun program kerja tahun berikutnya.

Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan perusahaan pada konsumen yaitu meningkatnya kepuasan dan loyalitas konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting bidang konsumen dalam perencanaan CSR terkait dengan konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya .

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait konsumen dalam melakukan perencanaan kegiatan. Risiko tersebut antara lain adanya komplain dari konsumen yang berdampak pada loyalitas konsumen. Dengan kata lain, Perseroan senantiasa mempertimbangkan harapan konsumen antara lain kecepatan pelayanan, kebersihan pelabuhan, dan tarif yang kompetitif dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait konsumen.

Perseroan menitikberatkan pada pelibatan *stakeholders* internal yang terkait dengan pelayanan kepada konsumen. Pelayanan yang diberikan untuk kegiatan bongkar muat adalah mulai dari proses *gate in* sampai dengan *gate out*. Sementara dari sisi *back office* pelayanan dimulai dari bagian keamanan, *receptionist* dan pegawai IPC. Semua pihak yang terlibat dari proses tersebut terlibat dalam pelaksanaan CSR terkait konsumen. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan manajemen dan *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagai upaya perusahaan dalam melindungi konsumen.

3. Carrying out customer satisfaction surveys every year as part of improving the quality of services provided by the Company to customers, by monitoring and evaluating the results of the satisfaction survey follow-up.

When planning consumer-related CSR activities, the Company conducts due diligence by paying attention to the results of customer satisfaction and loyalty surveys that describe information on consumer needs. The approach used involves evaluating the customer satisfaction and loyalty surveys results of as material for developing the following year's work program.

The Company pays attention to the important direct or indirect impact of Company activities and decisions on consumers, namely increasing customer satisfaction and loyalty that in turn will increase the Company's revenue.

The Company also reviews all regulations related to important consumer issues in CSR planning related to consumers such as the Consumer Protection Act and other regulations.

The Company considers the risks related to consumers when planning its activities, including those risks complaints that could have an impact on consumer loyalty. In other words, the Company always considers consumer expectations, including speed of service, port cleanliness and competitive rates in planning CSR activities related to consumers.

The Company focuses on involving internal stakeholders related to service to consumers. Services provided for loading and unloading are through the gate in to the gate out process. While from the back office side the services starts with the security, receptionist and IPC employees. Thus all parties involved in the processes are involved in implementing consumer-related CSR. This is laid down in the management policies and Standard Operating Procedures (SOPs) as the Company's effort to protect consumers.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

KEGIATAN

Perseroan mendorong pada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan CSR bidang konsumen. Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang konsumen yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham. Seluruh karyawan dan jajaran manajemen terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR terkait konsumen khususnya Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan.

INFORMASI PRODUK/JASA

IPC melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan bagi pelanggan antara lain:

1. Survei pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan setahun sekali oleh Cabang Pelabuhan untuk mendapatkan hasil indeks kepuasan, indeks loyalitas, dan keterikatan pelanggan;
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil survei yang dilakukan seluruh cabang;
3. *Coffee morning* merupakan pertemuan yang sifatnya tukar menukar informasi dengan pelanggan yang dilakukan oleh Cabang Pelabuhan satu kali per triwulan. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar Cabang Pelabuhan dapat mensosialisasikan program-program yang sejalan dengan kebijakan serta informasi perkembangan Perseroan yang terkini serta target-target apa saja yang akan dilakukan di tahun mendatang;
4. *Visit customer* merupakan kunjungan Manajemen Perusahaan ke tempat pelanggan yang dilakukan oleh Cabang Pelabuhan pada tiap bulan dan Kantor Pusat satu kali per semester, khususnya kepada pelanggan utama di masing-masing Cabang Pelabuhan yang dilakukan secara reguler, berkesinambungan, dan terjadwal;
5. *Customer gathering* merupakan pertemuan pelanggan dalam suatu acara tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas para pelanggan dalam kurun waktu satu kali dalam setahun, sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan setianya; dan

ACTIVITIES

The Company encourages all authorized employees and management to commit to carrying out consumer-related CSR activities. The Company has a reporting mechanism on the results of consumer-related CSR activities as a part of the Management Report. The Management Report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners before being submitted to the shareholders. All employees and management are actively involved in implementing CSR activities related to consumers, especially the Business Alliance and Customer Relations Division.

PRODUCT / SERVICE INFORMATION

IPC conducts several activities for improving services for customers, including:

1. Customer surveys conducted once a year by Port Branches to obtain satisfaction indexes, loyalty indexes and customer attachments;
2. Conducting monitoring and follow-up evaluation of the survey results by all branches.
3. Coffee Morning is a meeting to exchange information with customers and is conducted by the port branches every quarter. The purpose of the meetings is so that the port branch can socialize programs related to the company's policies and information on developments to date and any targets for the coming year;
4. Customer Visits involve the Company's management going to visit the customers and is conducted by the branch every month and the head office every semester, especially regular, continuous, and scheduled visits to the major customers at each port branch;
5. Customer Gatherings are customer events aimed at increasing customer loyalty during the year, as a form of corporate appreciation for loyal customers;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

6. *Customer of the year* merupakan kegiatan yang dilakukan Perseroan kepada pelanggannya dalam bentuk apresiasi penghargaan yang diberikan setiap tahun;
7. Serta *direct mailing customer* yang merupakan komunikasi Perseroan kepada pelanggan dalam bentuk surat, *email*, telepon, yang disampaikan pada momen tertentu.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Kesehatan dan keselamatan konsumen telah tertuang dalam kebijakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berisi seluruh karyawan, mitra kerja dan tamu wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dan kebutuhan berdasarkan prosedur kerja dalam lingkup area kerja IPC. Merujuk kebijakan pada kebijakan tersebut, Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3) diberikan kepada setiap orang untuk setiap orang yang melakukan aktivitas di lingkungan kerja pelabuhan (tamu, vendor, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pelanggan dan lain sebagainya).

LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Jika terdapat keluhan atas layanan yang diberikan, IPC telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di masing-masing Cabang Pelabuhan, antara lain:

1. Datang langsung ke *customer service*;
2. Penyampaian melalui surat, telepon dan surat elektronik; dan
3. *Web portal*.

6. Customer of The Year is an activity conducted by the company for its customers in the form of appreciation awards given every year;
7. Direct Mailing Customer involves corporate communication to customers in the form of letters, e-mail, telephone, delivered at specific times.

CONSUMER HEALTH AND SAFETY

Consumer health and safety is stated in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Occupational Health and Safety System (OHS) policy that states that all employees, work partners and guests must use Personal Protective Equipment (PPE) according to the provisions and requirements in the IPC work procedures. The Occupational Safety and Health (OHS) policy is given to everyone involved in port work activities (guests, vendors, unloading workers (TKBM), customers etc.).

CONSUMER COMPLAINTS SERVICES

If there are complaints about the services provided, IPC has provided a means of delivering customer complaints with various channels in each of the Port Branches, including:

1. Coming directly to customer services
2. Submissions by mail, telephone and e-mail
3. Web portal (for customers at Tanjung Priok and Panjang Port Branches)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN
 Corporate Social Responsibility Related to Consumers



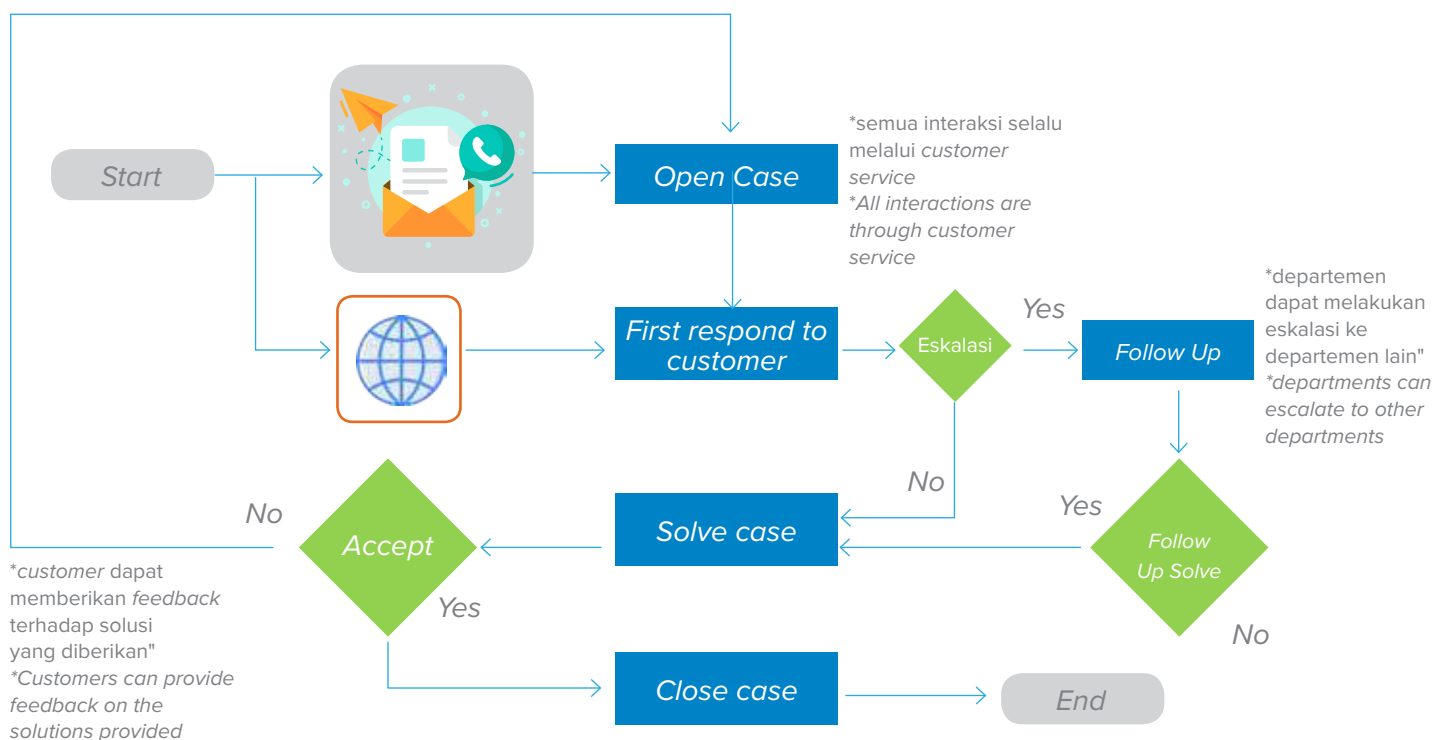
Customer



Customer Service Cabang Pelabuhan / Anak Perusahaan
 Customer Service Branch / Subsidiary



Department Support



Gambar Single Channel Untuk Interaksi Dengan Customer
 Single Channel for Customer Interaction

Tabel Penyelesaian Pengaduan Konsumen Selama Tahun 2018 Consumer Complaint Settlement in 2018

Jenis Interaksi Type of Interaction	Jumlah Pengaduan Masuk Number of Complaints Received	Jumlah Pengaduan Selesai Number of Complaints Completed	Persentase Penyelesaian Percentage Settled
Keluhan Complaint	155	155	100%
Permintaan Request	128	128	100%
Pertanyaan Question	24	24	100%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

Pada tahun 2018, Perseroan dapat menyelesaikan seluruh jenis interaksi, yang terdiri dari keluhan pelanggan (antara lain fasilitas, nota tidak muncul, *billing*, dan lain sebagainya), permintaan (antara lain koreksi nota, tambah limit cetak kartu dan pengalihan agen) dan pertanyaan (antara lain simulasi tarif CFS, jadwal bongkaran kapal dan status *handling container*).

PROGRAM PENINGKATAN KEPUASAN DAN LOYALITAS BAGI KONSUMEN

IPC secara berkala melakukan *monitoring* terhadap seluruh cabang dalam menindaklanjuti permintaan atau keluhan yang diterima dari pelanggan. Selain itu, IPC juga telah menyiapkan sistem pengelolaan *customer* berbasis IT yang disebut sebagai *Customer Relationship Management* (CRM) yang didalamnya terdapat 6 (enam) modul yakni: *Master Customer Data*, *Customer Survey*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Profiling*, dan Pencatatan Peluang Bisnis. Melalui sistem tersebut, diharapkan IPC dapat menjaga hubungan baik dengan seluruh pelanggannya dan secara bersama-sama menjaga hubungan menjadi lebih baik. Selain itu, bentuk upaya lain dalam menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan melaksanakan program pembinaan seperti *customer award* dan *customer gathering*.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR terkait konsumen yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para pemegang saham.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen (termasuk anggaran pemasaran dan kreditor Perseroan) sebesar Rp35.202.671.200.

DAMPAK KUANTITATIF

Melalui survei kepuasan dan loyalitas pelanggan, IPC melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil survei pelanggan. Hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan ini digunakan IPC sebagai pengukuran capaian KPI Kontrak Manajemen Tahun 2017 dan juga sebagai upaya peningkatan kinerja unggul dalam pelayanan jasa kepelabuhanan berbasis KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul). Hal ini agar IPC mampu bersaing dengan kinerja para pesaing dan sebagai data pendukung penilaian Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

In 2018, the Company completed the following types of interactions: customer complaints (including facilities, notes not appearing, billing, etc.), requests (including note corrections, additional card printing limits and agent transfers) and questions (including simulating CFS rates, shiploading schedules and container handling status).

CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IMPROVEMENT PROGRAM

IPC periodically monitors all branches by following up on requests or complaints received from customers. In addition, IPC has also prepared an IT-based customer management system called Customer Relationship Management (CRM) that includes 6 modules: Customer Data Master, Customer Survey, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Profiling, and Business Opportunity Records. Through this system, IPC can maintain good relations with all its customers and together with customers improve. In addition, other efforts to maintain customer satisfaction are through guidance programs such as customer awards and customer gatherings.

The Company has a reporting mechanism on the results of consumer-related CSR activities as a part of the Management Report. The Management Report is always reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners before being submitted to the shareholders.

COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to consumers (including the marketing budget and the Company's creditors) was Rp35,202,671,200.

QUANTITATIVE IMPACT

Through the customer satisfaction and loyalty surveys, IPC conducted monitoring and evaluation of customer survey results follow-up. The customer satisfaction and loyalty survey results are used by IPC as a measure of achieving the 2017 Management Contract KPI, and also as an effort to improve the superior performance of KPKU-based port services (Superior Performance Assessment Criteria). So as to compete with competitors, and as supporting data for evaluating Excellent Services organized by the Ministry of Transportation.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN
 Corporate Social Responsibility Related to Consumers

Dalam melakukan survei kepuasan dan loyalitas pelanggan, IPC menggunakan pihak ketiga agar lebih transparan, independen dan akuntabel. Responden survei kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang menggunakan layanan jasa kapal, layanan bongkar muat peti kemas, bongkar muat barang non peti kemas, serta layanan terminal penumpang. Indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2018 mencapai 4,58 skala *likert*. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,17 skala *likert* serta melampaui target yang ditetapkan di tahun 2018 yaitu sebesar 4,26 skala *likert*.

To conduct customer satisfaction and loyalty surveys, IPC uses third parties so they are transparent, independent and accountable. Customer satisfaction and loyalty survey respondents are customers who use ship services, container loading and unloading services, loading and unloading of container goods, and passenger terminal services. The customer satisfaction index in 2018 reached 4.58, higher than 4.17 in 2017, and exceeding the target set in 2018 of 4.26.

Sementara indeks loyalitas pelanggan pada tahun 2018 mencapai 4,59 skala *likert*. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,25 skala *likert* serta melampaui target yang ditetapkan di tahun 2018 yaitu sebesar 4,35 skala *likert*.

While the customer loyalty index in 2018 reached 4.59, higher than 4.25 in 2017, and exceeding the target set in 2018 of 4.35.

Tabel Indeks Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Tahun 2017-2018

Customer Satisfaction and Loyalty Index 2017-2018

Indeks Index	Skala Scale	2018			2017		
		Target	Pencapaian Achievement	Kesimpulan Result	Target	Pencapaian Achievement	Kesimpulan Result
Kepuasan Pelanggan Customer satisfaction	<i>Likert</i>	4,26	4,58	Tercapai Achieved	4,15	4,17	Tercapai Achieved
Loyalitas Pelanggan Customer loyalty	<i>Likert</i>	4,35	4,59	Tercapai Achieved	4,25	4,26	Tercapai Achieved

Tercapainya target kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan telah memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan Perseroan seperti yang diuraikan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. Hal ini menunjukkan bahwa CSR terkait konsumen telah mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

Achieving customer satisfaction targets and customer loyalty provides benefits for increasing the Company's revenue as described in the Management Analysis and Discussion Chapter in this Annual Report. This shows that consumer-related CSR has achieves sustainable development, especially in the economic and social aspects.

SERTIFIKASI CSR TERKAIT KONSUMEN

Sampai dengan 31 Desember 2018, IPC belum memperoleh sertifikasi CSR terkait konsumen.

CONSUMER RELATED CSR CERTIFICATION

As of December 31, 2018, IPC has not yet obtained CSR certification related to consumers.

PENGHARGAAN CSR TERKAIT KONSUMEN

Pada tahun 2018, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang seperti yang telah disampaikan bagian Penghargaan pada bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

CSR CONSUMER RELATED AWARDS

In 2018, the Company received various awards both at the Head Office and at the Branch Offices as stated in the Awards section of the Profile chapter in this Annual Report.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Suppliers

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan IPC, Divisi pengadaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.568/2/6/2/PI.II-17 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan IPC dan saat ini telah diperbaharui menjadi Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019. Perseroan memiliki kebijakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan akuntabel. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kebijakan untuk memprioritaskan pemasok lokal dalam pemilihan pemasok.

RENCANA KEGIATAN

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kepentingan para pemasok. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa merencanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kepuasan pemasok, antara lain memberikan pelayanan yang terbaik, menyediakan saluran pengaduan dan mengembangkan sistem *e-procurement* yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.

KEGIATAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan pemilihan pemasok dilakukan melalui metode pelelangan/seleksi umum, pemilihan langsung/seleksi langsung, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung. Proses pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. Proses pelelangan diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, *website* dan media massa,
2. Semua tahapan pemilihan pemasok diikuti dan diketahui oleh seluruh pemasok yang mendaftar,
3. Seluruh peserta pemilihan pemasok melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama-sama dengan penyelenggara pengadaan, dan
4. Seluruh hasil proses pemilihan pemasok disampaikan dan diketahui oleh pemasok yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk menjamin dilakukannya pengadaan barang dan jasa yang transparan dan adil, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi Kebijakan Gratifikasi dan *Whistleblowing System* kepada para pemasok. Pada tahun 2018 sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang

COMMITMENT AND POLICY

In carrying out the procurement of goods and services in the IPC, the procurement division is guided by the IPC Board of Directors Decree Number HK.568/2/6/2/PI.II-17 dated June 2, 2017 concerning the Procurement of Goods / Services Guidelines in IPC, and updated through IPC Board of Directors Decree Number HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 dated March 1, 2019. The Company's policy states that the procurement of goods and services is carried out based on the principles and ethics of the procurement of goods and services, namely efficient, effective, competitive, transparent, fair and accountable. In addition, the Company also has a policy to prioritize local suppliers when selecting suppliers.

ACTIVITY PLAN

The Company is committed to meeting the interests of its suppliers. In this regard, the Company plans activities to increase supplier satisfaction, including providing the best service, providing complaints channels and developing *e-procurement* systems that enable the implementation of activities to be more effective, efficient and transparent.

ACTIVITIES

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Supplier selection is carried out through public auction / selection methods, direct selection, direct appointment and direct procurement. The supplier selection process is based on the following conditions:

1. The auction process is publicly announced through official announcement boards, websites and mass media,
2. All stages of supplier selection is followed and known by all suppliers who register,
3. All supplier selection participants sign an Integrity Pact together with procurement providers,
4. The results of the supplier selection process is conveyed and known to the suppliers involved in the procurement of goods and services process.

SOCIALIZATION OF GRATIFICATION AND WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICIES

To ensure the procurement of goods and services is transparent and fair, the Company socializes its Gratification and Whistleblowing Systems Policies to suppliers. In 2018 socialization was held on October 15, 2018 at the IPC Head Office. With the dissemination of these two policies, it is

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK
 Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Suppliers

bertempat di Kantor Pusat IPC. Dengan disosialisasikannya dua kebijakan tersebut, diharapkan para pemasok memiliki kesadaran untuk menyampaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak para pemasok.

PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT

Pada tahun 2018, Perseroan telah mengembangkan sistem *e-procurement* yang terdiri dari *e-tendering* dan *Vendor Management System (VMS)*. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah mengimplementasikan VMS, sedangkan *e-tendering* direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2019.

SURVEI KEPUASAN PEMASOK

Untuk memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial terhadap pemasok berjalan dengan baik, maka dilaksanakan survei kepuasan pemasok. Pada tahun 2018, survei kepuasan pemasok dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat IPC. Penjelasan mengenai pelaksanaan survei kepuasan pemasok adalah sebagai berikut.

RESPONDEN

Tabel Responden pada Survei Kepuasan Pemasok Tahun 2018

Bidang <i>Field</i>	Jumlah <i>Total</i>
Jasa Konstruksi Construction Services	5
Pengadaan Barang Procurement of Goods	10
Jasa Konsultan Consultant Services	34
Jasa Lainnya Other Services	16
Total	65

expected that suppliers will report any violations of the rights of suppliers.

E-PROCUREMENT SYSTEM DEVELOPMENT

In 2018, the Company developed an e-procurement system consisting of e-tendering and Vendor Management System (VMS). As of the end of 2018, the Company has implemented VMS, while e-tendering is planned to be implemented in 2019.

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY

To ensure that social responsibility activities for suppliers run well, a supplier satisfaction survey is conducted. In 2018, the supplier satisfaction surveys were carried out in the IPC Head Office. An explanation of the supplier satisfaction survey is as follows.

RESPONDENTS

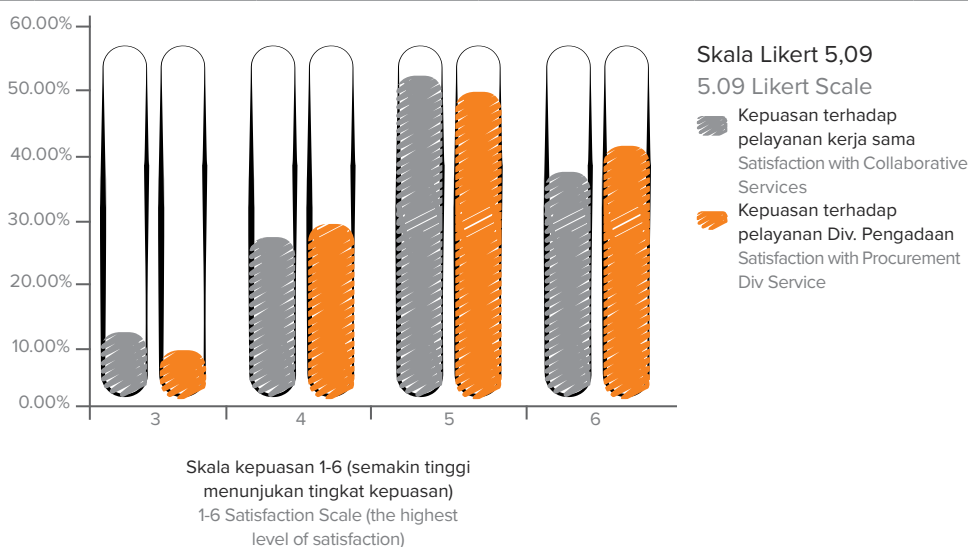
Supplier Satisfaction Survey Respondents in 2018

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK
Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Suppliers

HASIL SURVEI KEPUASAN PEMASOK TERHADAP PELAYANAN DIVISI PENGADAAN

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY RESULTS ON THE PROCUREMENT SERVICE DIVISION

Skala Kepuasan <i>Satisfaction Scale</i>	Kepuasan Terhadap Pelayanan Kerjasama (skala presentase) <i>Satisfaction with Collaborative Services (percentage scale)</i>	Kepuasan Terhadap Pelayanan Div Pengadaan (skala presentase) <i>Satisfaction with Procurement Div Service (percentage scale)</i>	Kepuasan Terhadap Pelayanan Kerjasama (skala likert) <i>Satisfaction with Collaborative Services (Likert scale)</i>	Kepuasan terhadap Pelayanan Div Pengadaan (skala likert) <i>Satisfaction with Procurement Div Service (Likert scale)</i>	AVG Kepuasan Vendor (skala likert) <i>Satisfaction with AVG Vendor (likert scale)</i>
3	4,12	1,96	0,1236	0,0588	0,0912
4	12,94	14,3	0,5176	0,572	0,5445
5	54,51	49,6	2,7255	2,48	2,60275
6	27,84	33,9	1,6704	2,034	1,8522
					5,09095



Adapun skala survei kepuasan pelanggan, antara lain:

- 1 = Sangat Tidak Puas
- 2 = Tidak Puas
- 3 = Kurang Puas
- 4 = Cukup Puas
- 5 = Puas
- 6 = Sangat Puas

The customer satisfaction survey scales includes:

- 1 = Very Dissatisfied
- 2 = Dissatisfied
- 3 = Dissatisfaction
- 4 = Quite Satisfied
- 5 = Satisfied
- 6 = Very Satisfied

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Suppliers

Pada tahun 2018, hasil dalam survei kepuasan pemasok yang dilakukan Perseroan memperoleh 5,09 skala *likert* dengan kategori sangat puas.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemasok (termasuk pengembangan sistem *e-procurement*) sebesar Rp3.237.525.000.

DAMPAK KEGIATAN

Perseroan telah merasakan dampak dari kegiatan tanggung jawab terhadap pemasok yaitu:

1. Tidak adanya komplain dari penyedia barang/jasa atas kegiatan/interaksi selama tahun 2018 yang telah berlangsung antara penyedia dan penyelenggara Kantor Pusat.
2. Tidak adanya sanggahan dari penyedia barang/jasa atas proses pemilihan penyedia yang telah berlangsung selama tahun 2018 antara peserta/calon penyedia dan penyelenggara Kantor Pusat.
3. Tingkat kepuasan pemasok yang tinggi yaitu sebesar 5,09 dengan interval 1 – 6, atau secara rata-rata tingkat kepuasan pemasok adalah pada tingkat sangat puas.

SALURAN PENGADUAN UNTUK PEMASOK

Perseroan telah menyediakan saluran pengaduan untuk pemasok melalui:

Telepon : +62-21 430-1080 Ext: 1333
Fax : +62-21 43911704
Email : procurement_hq@indonesiaport.co.id

In 2018, the supplier satisfaction survey results reached 5.09 on the Likert scale, in the very satisfied categories.

COSTS INCURRED

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility for suppliers (including developing e-procurement system) amounted to Rp3,237,525,000.

IMPACT OF ACTIVITIES

The Company has felt the impact of its responsibility towards suppliers, namely through:

1. No complaints from goods/services providers for activities/interactions during 2018 between the providers and Head Office organizers, as well as
2. No objections from the goods/services providers on the process of selecting suppliers during 2018 between the participants/prospective providers and Head Office organizers.
3. A high supplier satisfaction level of 5.09, on a scale of 1-6, or on average supplier satisfaction level at the very satisfied level.

COMPLAINT CHANNELS FOR SUPPLIERS

The Company provides complaints channels for suppliers through:

Phone : +62-21 430-1080 Ext: 1333
Fax : + 62-21 43911704
Email : procurement_hq@indonesiaport.co.id

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KREDITOR

Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Creditors

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kebijakan terkait dengan hubungan dengan kreditor dituangkan menjadi tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* (IR) yakni menjembatani komunikasi antara IPC dengan kreditor dan Perusahaan Pemeringkat yang mencakup informasi keuangan, operasional, keadaan industri dan lainnya baik skala nasional maupun internasional, dalam rangka mendukung upaya IPC dalam menjaga hubungan baik dengan para kreditor.

RENCANA KEGIATAN

Lingkup kerja *Investor Relations* dituangkan dalam rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada Bursa Efek Singapura dan melakukan korespondensi kepada Wali Amanat secara periodik terkait dengan informasi laporan keuangan;
2. Mengaudiensi kunjungan investor, *Analyst* maupun Perusahaan Pemeringkat;
3. Melakukan *Non-Deal Roadshow*; dan
4. Pembayaran bunga sesuai jadwal pembayaran.

KEGIATAN

Adapun program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh *Investor Relation* IPC selama tahun 2018, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

COMMITMENT AND POLICY

Policies related to creditor relationships include the Investor Relations (IR) duties and responsibilities, namely facilitating communication between IPC and its creditors and Rating Companies, and includes the national and international financial, operational, industrial and other information needed to support IPC efforts in maintaining good creditor relationships.

ACTIVITY PLAN

The Investor Relations work is set forth in the activity plan as follows:

1. Informing the Singapore Stock Exchange and preparing correspondence to the Trustee periodically related to financial statement information;
2. Handling investors, analysts and rating companies visits;
3. Conducting Non-Deal Roadshows; and
4. Paying interest according to the payment schedule.

ACTIVITIES

The programs or activities Investor Relations IPC during 2018, in the table below:

No	Tanggal Date	Instansi / Investor Agency / Investor	Acara Event	Tempat Place
1	25 January 2018 January 25, 2018	PT Bahana Artha Ventura	Kunjungan klien tentang <i>Outlook Maritime 2018</i> Client visit about 2018 Maritime outlook	Jakarta
2	16 April 2018 April 16, 2018	CIMB-Principal AM Kumpulan Wang Persaraan Affin Hwang AM	Non-Deal Roadshow Non-Deal Roadshow	Kuala Lumpur
3	17 April 2018 April 17, 2018	Group Meeting GSAM BlackRock	Non-Deal Roadshow Non-Deal Roadshow	Singapore
4	18 April 2018 April 18, 2018	GAM UK BlueBay AM Investec	Non-Deal Roadshow Non-Deal Roadshow	London
5	19 April 2018 April 19, 2018	Port of Marseille & CMA CGM	Non-Deal Roadshow Non-Deal Roadshow	Marseille
6	20 April 2018 April 20, 2018	AXA IM	Non-Deal Roadshow Non-Deal Roadshow	Paris
7	23 April 2018 April 23, 2018	S&P Global Rating	Investor Meeting Investor Meeting	Jakarta
8	26 April 2018 April 26, 2018	PIMCO (Singapore)	Conference Call	Jakarta
9	09 May 2018 May 9, 2018	Fitch Rating Visit	Investor Meeting	Jakarta

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KREDITOR
 Corporate Social Responsibility Related to Responsibilities to Creditors

No	Tanggal Date	Instansi / Investor Agency / Investor	Acara Event	Tempat Place
10	23 July 2018 July 23, 2018	Johor Port	Port Visit	Jakarta
11	08 August 2018 August 8, 2018	investor Malaysia	Kunjungan dari malaysia Visit from Malaysia	Jakarta
12	13 August 2018 August 13, 2018	Moodys Credit Rating	Annual Review	Jakarta
13	07 September 2018 September 7, 2018	Annual Review	Annual Review Guna Penjajakan Kerjasama dengan IPC Site Visit For Exploring Collaboration with IPC	Jakarta
14	07 November 2018 November 7, 2018	Yokkaichi Port Authority (YPA) Jepang : (IAPH)	Annual Review	Jakarta
15	08 November 2018 November 8, 2018	Japan International Cooperation Agency (JICA)	For Interview and discussion for Asian Region Data Collection Survey fo Management for Port Projects and Privatizing Airport Projects.	Jakarta

BIAYA

Pada tahun 2018, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditor yang besaran anggarannya sudah termasuk dalam anggaran terhadap Konsumen.

COST

In 2018, IPC's budget for corporate social responsibility related to creditors was included in the consumer budget.

DAMPAK KEGIATAN

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan seimbang kepada para kreditor dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pada *Investor Relations* ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada para kreditor. Hal ini diharapkan Perseroan mendapatkan kepercayaan dari kreditor dan apabila pada tahun-tahun berikutnya Perseroan membutuhkan pendanaan kembali, Perseroan akan mendapatkan perspektif positif dari kreditor.

IMPACT OF ACTIVITIES

As part of its Good Corporate Governance practices, the company applies a balanced treatment with its creditors by providing accurate and timely information. Investor Relations is responsible for coordinating the delivery and dissemination of material and non-material information for creditors. It is expected that the Company will gain the trust of investors, and if in the following years the Company requires refinancing, for companies needing refinancing, the Company will gain a positive perspective from creditors.

SALURAN PENGADUAN BAGI KREDITOR

Para Investor dapat menyampaikan saran dan masukan kepada Divisi Investor Relation IPC, dengan informasi sebagai berikut:

Jl. Pasoso No 1,
 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Indonesia
 Telepon : +62 21 430 1080
 Faksimili : +62 21 435 1225
 Email : investor.relations@indonesiaport.co.id
 Website : www.indonesiaport.co.id

COMPLAINTS CHANNEL FOR CREDITORS

Investors can submit suggestions and input to the IPC Investor Relations Division, as follows:

Jl. Pasoso No 1,
 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Indonesia
 Tel. : +62 21 430 1080
 Facs. : +62 21 435 1225
 Email : investor.relations@indonesiaport.co.id
 Website : www.indonesiaport.co.id

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT





Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2018 and for the year then ended
with independent auditors' report



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with
personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with
personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
- Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

- : Elvyn G. Masassya
: Pelabuhan Indonesia II
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Jl. Pondok Jaya V/4 C RT 005/006,
: Mampang Prapatan
: Jakarta, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur Utama/President Director

- : Widyaka Nusapati
: Pelabuhan Indonesia II
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Jl. Cempaka Putih Barat 26/11 RT 009/007,
: Cempaka Putih
: Jakarta, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur/Director

declare that:

- I am responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2018 and for the year then ended.*
- The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and*
 - The Company's consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
- I am responsible for the Company's internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 15 Maret 2019 / Maret 15, 2019






Elvyn G. Masassya
 Direktur Utama/President Director

Widyaka Nusapati
 Direktur/Director



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019

The Shareholder and the Board of Commissioners and Board of Directors Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019 (continued)

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00192/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019 (continued)

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

15 Maret 2019/ March 15, 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-189	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	18.018.671.479	2c,2d,2f,2u,4 40,41,42,43	14.207.330.332	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.836.007.289	2c,2d,2f,2u 2c,2g,2u 6,41,42,43	6.999.082.698	Short-term investments
Piutang usaha - neto				Trade receivables - net
Pihak ketiga	634.078.032		549.154.117	Third parties
Pihak berelasi	155.875.322	2d,40	149.599.560	Related parties
Piutang lain-lain - neto		2g,2u,7,42,43		Other receivables - net
Pihak ketiga	9.530.083		49.765.763	Third parties
Pihak berelasi	640.168.731	2d,40	738.312.346	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	120.068.178	2i,8 2c,2u,9 41,42,43	144.176.602	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima				Accrued revenues
Pihak ketiga	305.866.345		303.926.301	Third parties
Pihak berelasi	17.001.727	2d,40	26.573.499	Related parties
Persediaan	59.139.424	2h,10	56.480.952	Inventories
Pajak dibayar di muka	751.789.998	2s,21a	557.236.979	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	6.139.521	2u,42,43	-	Other current assets
Total Aset Lancar	24.554.336.129		23.781.639.149	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	3.211.737.431	2j,24,11	1.554.888.854	Long-term investment
Properti investasi - neto	377.142.447	2k,12	394.342.020	Investment properties - net
Aset tetap - neto	12.628.997.433	2l,13	11.325.850.596	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	482.390.189	2n,14	507.560.396	Joint operation assets - net
Aset pajak tangguhan	47.498.765	2s,21f	44.644.534	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	9.038.949.144	2o,15	8.296.435.366	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	841.931.567	2s,21a	839.786.756	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	249.893.918	2u,16,42,43	474.940.688	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	26.878.540.894		23.438.449.210	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	51.432.877.023		47.220.088.359	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	42	-	Short-term bank loans
Utang usaha		2c,2u		Trade payables
Pihak ketiga	404.693.466	17,41,42,43	367.571.206	Third parties
Pihak berelasi	1.261.214.247	2d,40	999.183.968	Related parties
Pendapatan diterima di muka		2d,2q,18		
jangka pendek	834.098.021	24,40	778.706.786	Short-term unearned revenues
Utang pajak	389.495.675	2s,21b	441.919.999	Taxes payable
Beban akrual	2.290.832.616	2u,19,42,43	2.168.022.495	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas				Current maturities of
jangka panjang		2u,42,43		long-term liabilities
Utang bank	-	2c,22,41	1.860.603	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya				Other long-term liabilities
- pihak berelasi	38.272.280	2c,25	54.127.289	- related parties
Liabilitas jangka pendek lainnya		2u,20,42,43		Other current liabilities
Pihak ketiga	185.350.553		165.639.036	Third parties
Pihak berelasi	90.237.622	2d,40	95.916.891	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.498.194.480		5.072.948.273	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang obligasi	22.890.166.969	2c,2u,23	21.376.332.500	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang - setelah				Long-term liabilities - net
dikurangi bagian lancar		2u,42,43		of current maturities
Liabilitas jangka panjang lainnya				Other long-term liabilities
- pihak ketiga	234.402.238	2c,25,43	219.299.877	- third party
Pendapatan diterima di muka				
jangka panjang	4.290.892.916	2q,24	4.496.181.101	Long-term unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	1.776.917.294	2t,26	1.806.109.326	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	307.846.807	2s,21f	301.299.484	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	29.500.226.224		28.199.222.288	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	34.998.420.704		33.272.170.561	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	27	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	28	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	2e,32	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	11.726.994.846		10.201.069.392	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.379.261.695		2.179.893.506	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(112.143.427)	1e,31	(72.365.832)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	15.147.370.621		13.461.854.573	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.287.085.698	2b,29	486.063.225	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	16.434.456.319		13.947.917.798	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51.432.877.023		47.220.088.359	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2018	Catatan/ Notes	2017	
Pendapatan operasi	11.436.700.894	2r,33	10.655.574.667	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	781.658.834	2r,34	319.744.293	Construction revenues
Beban operasi	(8.042.554.820)	2r,35	(7.397.914.132)	Operating expenses
Beban konstruksi	(781.658.834)	2r,34	(319.744.293)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	(196.360.574)	2r,36	11.410.021	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	3.197.785.500		3.269.070.556	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	688.914.300	2r,37	534.789.328	Finance income
Beban keuangan	(1.130.782.016)	2r,38	(1.064.136.560)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	376.200.594	2j,2n,39	79.081.852	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.132.118.378		2.818.805.176	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(357.113.222)	21d	(345.222.944)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.775.005.156		2.473.582.232	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(353.981.768)	2s 21d,21e	(291.831.888)	Current
Tangguhan	9.686.466	21d,21f	23.976.675	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	2.430.709.854		2.205.727.019	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	32.019.693	2t,31	(159.232.831)	Remeasurements of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(18.329.765)	1e,31	23.609.863	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(54.279.223)	2f,31	8.946.393	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.390.120.559		2.079.050.444	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2018	Catatan/ Notes	2017	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.379.261.695		2.179.893.506	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	51.448.159	2b,29	25.833.513	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	2.430.709.854		2.205.727.019	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.339.484.100		2.053.853.310	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	50.636.459	2b,29	25.197.134	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.390.120.559		2.079.050.444	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.647.655	2v	1.509.591	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements include herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambahan modal/ Additional paid- in capital	Saldo laba/Retained earnings	Pengaruhian komprehensif lain/ Other comprehensive income		Salah satu perbedaan keuangan/ Exchange difference financial statement translation	Pengukuran kembali program imbalan pensiun/ Reversals of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available for-sale financial assets	Keuntungan/ non-controlling interests	Ekuitas - neto/ Equity - net
					Salah satu perbedaan keuangan/ Exchange difference financial statement translation	Pengukuran kembali program imbalan pensiun/ Reversals of defined benefit plans					
	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	9.143.947.550	1.511.459.774	(453.437.932)	388.242.144	(31.457.790)	-	80.186.748	11.911.293.941
Saldo per 31 Desember 2016				9.143.947.550	1.511.459.774	(453.437.932)	388.242.144	(31.457.790)	-	80.186.748	11.911.293.941
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	(453.437.932)	-	-	-	-	-	(453.437.932)
Cadangan umum	-	-	-	1.058.021.842	(1.058.021.842)	-	-	-	-	-	-
Saldo modal pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.709.345	410.709.345
Selanjutnya penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	23.609.590	-	-	283	23.609.883
Pengukuran kembali program imbalan pensiun	16.31	-	-	-	-	-	(158.595.274)	-	-	(637.587)	(159.232.861)
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	16.31	-	-	-	-	-	8.945.498	-	-	895	8.946.393
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.179.893.506	2.179.893.506	-	2.179.893.506	-	-	25.833.513	2.205.727.019
Saldo per 31 Desember 2017		26.825.982	(317.597.475)	10.201.069.392	2.179.893.506	(1.526.926.454)	391.857.724	(473.163.054)	8.945.498	486.083.225	13.847.917.998
Pembagian dividen kas	30	-	-	-	(653.965.052)	-	-	-	-	-	(653.965.052)
Cadangan umum	30	-	-	1.525.925.454	(1.525.925.454)	-	-	-	-	-	-
Saldo modal pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.386.014	750.386.014
Selanjutnya penjabaran laporan keuangan	16	-	-	-	-	-	(18.333.952)	-	-	4.187	(18.329.765)
Pengukuran kembali program imbalan pensiun	16.31	-	-	-	-	-	3.284.125	-	-	(821.560)	32.019.693
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	16.31	-	-	-	-	-	(54.284.896)	-	-	5.673	(54.279.223)
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.379.261.695	2.379.261.695	-	2.379.261.695	-	-	51.448.159	2.430.709.854
Saldo per 31 Desember 2018		26.825.982	(317.597.475)	11.726.094.946	2.379.261.695	(1.547.270.421)	440.321.801	(440.321.801)	46.339.388	1.287.065.698	16.434.665.319

Ekuitas yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas individu/Equity attributable to owners of the parent entity

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
		2018	Catatan/ Notes	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		10.419.622.862		9.545.892.387
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya		(4.849.497.861)		(4.316.101.188)
Pembayaran kepada karyawan		(2.324.087.858)		(2.245.546.714)
Pembayaran pajak penghasilan		(541.932.045)		(391.972.308)
Penghasilan bunga		604.025.265		439.649.013
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya		(1.064.789.688)		(984.317.563)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		2.243.340.675		2.047.603.627
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen		272.747.364		130.367.400
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud		(1.984.667.658)		(775.034.171)
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek	5	3.163.075.409		(2.011.922.698)
Penerimaan sewa di muka		318.174.500		308.934.500
Penerimaan (penempatan) investasi saham		(327.615.532)		449.500.127
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		1.441.714.083		(1.898.154.842)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	22	2.139.397		(2.360.172)
Pembayaran dividen	30	(653.968.052)		(453.437.932)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(651.828.655)		(455.798.104)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		778.115.044		45.803.973
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		3.811.341.147		(260.545.346)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	14.207.330.332		14.467.875.678
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	18.018.671.479		14.207.330.332

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE"), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 03 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Based on the Notarial Deed No. 03 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company amounting to Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in PT Pengerukan Indonesia for restructuring of PT Pengerukan Indonesia.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company's increased from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decision of Minister of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 44a dan 45m).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2018	2017
<u>Kepemilikan Langsung/Direct Ownership</u>						
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,99%	1.882.166.289	1.341.475.724
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan Pelabuhan/ Port Development	2012	99,99%	2.159.484.557	1.677.063.640
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	2002	99,00%	898.058.263	851.895.620
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ****)	Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider	2013	76,89%	1.192.128.218	1.455.285.673
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan Alur/ Dredging	1991	99,90%	352.868.336	395.455.609
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	1999	99,77%	423.222.370	394.109.934
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ****)	Jakarta	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2012	77,38%	1.254.556.394	335.622.282
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	2012	51,00%	179.025.159	177.002.587
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	1995	51,00%	138.970.919	156.514.721
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider	2012	55,00%	164.452.796	131.811.166
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,99%	1.221.341.130	251.854.781

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

- Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession Agreement (Notes 44a and 45m).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2018	2017
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services	2012	99,99%	143.759.943	96.908.940
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistic training and education services	2013	99,99%	50.067.630	46.950.691
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	2017	99,99%	1.428.675.682	227.917.991
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>						
<u>Dimiliki melalui/Owned through PP</u>						
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	2014	99,99%	776.783.899	580.541.909
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti / Building management service	2018	70,00%	88.512.621	-
<u>Entitas Asosiasi/Associate Entities</u>						
<u>Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK</u>						
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 44d/Note 44d) *)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2014	50,99%	4.326.430.446	3.945.894.744
<u>Dimiliki melalui/Owned through AP</u>						
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 11/Note 11) **)	Jakarta	Operasi Jalan Tol/Toll Road Operation	2006	45,00%	4.217.335.404	1.771.559.735
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 45b/Note 45b)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1999	48,90%	4.712.275.127	4.156.289.445
PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI")	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2013	25,00%	131.715.920	135.742.777
<u>Operasi Bersama/Joint Operation</u>						
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 45a/Note 45a)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1994	54,91%	523.023.618	684.756.228
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") (Catatan 45o/Note 45o) ***)	Gresik	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2015	45,00%	3.253.132	3.032.952

*) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1. (Catatan 44d)

**) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP (Catatan 11).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
		2018	2017
2012	99,99%	143.759.943	96.908.940
2013	99,99%	50.067.630	46.950.691
2017	99,99%	1.428.675.682	227.917.991
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>			
<u>Dimiliki melalui/Owned through PP</u>			
2014	99,99%	776.783.899	580.541.909
2018	70,00%	88.512.621	-
<u>Entitas Asosiasi/Associate Entities</u>			
<u>Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK</u>			
2014	50,99%	4.326.430.446	3.945.894.744
<u>Dimiliki melalui/Owned through AP</u>			
2006	45,00%	4.217.335.404	1.771.559.735
1999	48,90%	4.712.275.127	4.156.289.445
2013	25,00%	131.715.920	135.742.777
<u>Operasi Bersama/Joint Operation</u>			
1994	54,91%	523.023.618	684.756.228
2015	45,00%	3.253.132	3.032.952

*) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1. (Note 44d)

**) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP (Note 11).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

- ***) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45% (Catatan 45o).
- ****) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.
- *****) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

- ***) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45% (Note 45o).
- ****) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- *****) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

As of December 31, 2016, the authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 51% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.
- PT Sisindokom Teknologi owns 49% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik.

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,52% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,48% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in logistic services.

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.52% or 37,452 shares with total amount of Rp37,452,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.48% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (Employee Stock Option).

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- Karyawan IKT memiliki 0,03% atau sebanyak 472.400 saham dengan nilai sebesar Rp47.240.
- Masyarakat memiliki 27,97% atau sebanyak 508.675.300 saham dengan nilai sebesar Rp50.867.530.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (Employee Stock Option) program.

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follow:

- The Company owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,615,475.
- MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237
- IKT Employees own 0.03% or 472,400 shares with total amount of Rp47,240
- Public own 27.97% or 508,675,300 shares with total amount of Rp50,867,530.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/cargodoring, yard operation and other logistic services.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 51% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000.
- PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.

Currently, ILCS' activities consist of providing *e-trade logistic services* and other services including data management, *e-commerce*, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0230843 dated August 9, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, PPI engages in port development.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EPI (lanjutan)

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 55% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EPI (continued)

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 55% or 8,250,000 shares with total amount of Rp82,500,000.
- PT Haleyora Power owns 45% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portopel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company. The Company's shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.93% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.07% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agrees among others:

- change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- Karyawan (Program ESA) memiliki 0,14% atau sebanyak 7.162.700 saham dengan nilai sebesar Rp716.270.
- Masyarakat memiliki 22,86% atau sebanyak 1.208.343.800 saham dengan nilai sebesar Rp120.834.380.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.
- Employees (ESA Programme) owns 0.14% or 7,162,700 shares with total amount of Rp716,270.
- Public owns 22.86% or 1,208,343,800 shares with total amount of Rp120,834,380.

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.*
- *PII owns 1% or 300 shares with total amount of Rp300,000.*

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training .

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan addendum II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, diantaranya tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company agreed to add and change several articles, among others, no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 30 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Panjang, Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Based on Company's Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), a related party.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's Panjang branch, Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IPC TPK (continued)

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 1% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 99% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.
- PTP owns 1% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

TPI

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

TPI

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPI (lanjutan)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsyie Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsyie Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 45b, 45c, 45d dan 45e):

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPI (continued)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsyie Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsyie Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Notes 45b, 45c, 45d and 45e):

- The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amandemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amandemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amandemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 45a).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

Selama tahun 2018, API mengambil bagian atas 349.182 saham baru dengan total nilai nominal Rp317.755.620 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 45a).

The investment proportions of the participants for the year 2018 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in MTDX.

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

During 2018, API subscribed to 349,182 new shares with a total nominal amount of Rp317,755,620 (representing 45% share ownership) issued by CTP.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45% and 55%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.
- MTI owns 1% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2017 dated July 16, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MMI (lanjutan)

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 70% atau sebanyak 612.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp61.250.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 30% atau sebanyak 262.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.250.000.
- Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Tumpak H. Panggabean
Suaidi Marasabessy
Kushari Suprianto
Montty Giriana
D. Andhi Nirwanto
Djadmiko
R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama
Direktur Komersial
Direktur Teknik
Direktur Operasi
Direktur Keuangan
Direktur SDM
Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis

Elvyn G. Masassya
Saptono R. Irianto
Dani Rusli Utama
Prasetyadi
Widyaka Nusapati
Rizal Ariansyah
Riry Syeried Jetta

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MMI (continued)

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 70% or 612,500,000 shares with total amount of Rp61,250,000.
- PT PP Properti Tbk owns 30% or 262,500,000 shares with total amount of Rp26,250,000.
- At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2018 and 2017, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

December 31, 2018

Board of Commissioners

President/Independent
Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources
Director of Transformation and
Business Development

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan
(lanjutan)**

31 Desember 2017

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Tumpak H. Panggabean
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha	Saptono R. Irianto
Direktur Teknik dan Manajemen Risiko	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi dan Sistem Informasi	Prasetyadi
Direktur Keuangan	Iman Rachman
Direktur SDM dan Hukum	Rizal Ariansyah
Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan	Riry Syeried Jetta

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakhmad Adi Santosa
Anggota	Muhdi Al Fajar

Sekretaris Perusahaan Shanti Puruhita

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakhmad Adi Santosa

Sekretaris Perusahaan Shanti Puruhita

1. GENERAL (continued)

**c. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees (continued)**

December 31, 2017

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director of Commercial and Business Development
Director of Engineering and Risk Management
Director of Operations and Information System
Director of Finance
Director of Human Resources and Law
Director of Subsidiary Management

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2018 are as follows:

Audit Committee

Head
Member
Member
Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2017 are as follows:

Audit Committee

Head
Member
Corporate Secretary

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 4.560 dan 4.566 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali PPI, TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan PPI, TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Saldo awal	434.334.222	410.724.359	Beginning balance
Efek penjabaran - neto	(18.329.765)	23.609.863	Effect due to translation - net
Saldo akhir	416.004.457	434.334.222	Ending balance

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2018 and 2017 are 4,560 and 4,566 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Group's reporting currency is Rupiah, except PPI, TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

e. Translation into Presentation Currency

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of PPI, TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Maret 2019. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 15, 2019. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada.
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries.
- derecognizes the carrying amount of any NCI.
- derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.
- recognizes the fair value of the consideration received.
- recognizes the fair value of any investment retained.
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (nilai penuh):

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

c. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Notes 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2018 and 2017 (full amount):

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang
Asing (lanjutan)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	14.481
Euro Eropa (EUR) 1	16.560
Dolar Singapura (SGD) 1	10.603

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "tambahan modal disetor".

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Foreign Currency Transactions and
Balances (continued)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
13.548		<i>United States Dollar (USD) 1</i>
16.174		<i>European Euro (EUR) 1</i>
10.134		<i>Singapore Dollar (SGD) 1</i>

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

**e. Business combinations entities under
common control**

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the "additional paid-in capital" account.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan metode roll rate. Berdasarkan keyakinan manajemen, metode pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan basis individual. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Trade Receivables and Allowance for Losses

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management's evaluation on the collectability of the balances using roll rate method. Based on the management beliefs, the impairment method will not have a significant difference compared to management evaluation on the collectability of the balances using individual basis. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the useful life.

j. Investment in Associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

- (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- (b) jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

The Group's share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangement". On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 50
Kapal	5 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25
Jalan dan bangunan	10 - 40
Peralatan	4 - 25
Kendaraan	5
Emplasemen	3 - 25

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

<u>Type of Assets</u>
Building and port facilities
Vessels
Port equipment
Port facility installation
Road and building
Equipment
Vehicles
Emplacement

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

1. Aset tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Fixed assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Pengaturan bersama (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditanggungkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Joint arrangements (continued)

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal Kalibaru yang akan diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan sejak tanggal pengoperasian terminal. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal Kalibaru diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are Kalibaru terminal concession rights which are amortized over the period of assets are expected to use from the date of operation of the Kalibaru terminal. During the construction period, the accumulated Kalibaru terminal construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Capitalization of Borrowing Cost
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

r. Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.
- Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.
- Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the customer.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.
- Pendapatan konstruksi
Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue from training services is recognized when the activities are completed.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.
- Construction revenues
The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Perpajakan

s. Taxation

Pajak Final

Final Tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Pajak Kini

Current Tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara reguler merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang". Kelompok Usaha juga memiliki investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments

i) Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables". The Group also has short-term investments which are classified as financial assets measured at fair value through profits or losses and long-term investments which are classified as available-for-sale financial assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

- (a) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the Group's statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

The Group has short-term investment classified under this category.

- (b) Loan and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets are classified under this category.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham - tersedia untuk dijual.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

**(c) Available-For-Sale ("AFS") financial
Assets**

AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

The Company has long-term investment in share of stock - available-for-sale.

ii) Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included direct attributable transaction costs.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang obligasi, utang bank serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The financial liabilities of the Group, which include short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, bonds payable, bank loans and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

v) Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

vi) Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

iv) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi) Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

u. Financial Instruments (continued)

- vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

- vii) Derecognition of financial assets and liabilities**

Aset keuangan

Financial assets

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

- vii) Derecognition of financial assets and liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Kelompok Usaha menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Kelompok Usaha berikut ini:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
- Amandemen PSAK 13 - Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi.
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Impairment of Non-financial Assets

Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2018, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Group as follows:

- Amendments to PSAK 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative.
- Amendments to PSAK 13 - Investment Property: Transfer of Investment Property.
- Amendments to PSAK 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses.
- PSAK 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures.
- PSAK 67 (2017 Improvement): Disclosure of Interests in Other Entities.

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.

These amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.

This Interpretation which is the interpretation of PSAK 46: Income Taxes, clarifies and provides guidance to reflex the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

These amendments provides that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

- Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This amendments provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

- Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This amendments provides clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after plan amendment, curtailment or settlement because they use the new actuarial assumptions (previously using actuary assumptions at the beginning of the period of annual report). In addition, Amendment to PSAK 24 also clarifies how the accounting requirements for plan amendment, curtailment or settlement can affect the upper limit of asset requirements which can be seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset's upper limit to change.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.

- Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- 2018 Improvement to PSAK 22 - Business Combinations, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement clarifies that when one party in a joint arrangement, obtains control over a business which is a joint operation (as defined in PSAK 66), and has rights to assets and liabilities related to the joint operation shortly before date of acquisition, the transaction is a business combination that is achieved in stages.

- 2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing Costs, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement clarifies that the capitalization rate of borrowing costs is the weighted average of borrowing costs on all loan balances over the period but the entity excludes from the calculation the borrowing costs of loans obtained specifically to obtain qualifying assets up to substantially all activities needed to prepare the assets so that can be used according to the intensity or sold has done.

- 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- 2018 Improvement to PSAK 66 - Joint Arrangements, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

This improvement clarifies that the parties participating in, but not having joint control over, a joint operation can obtain joint control over joint operations in the case that joint operating activities are a business (as defined in PSAK 22: Business Combinations). In such cases, the interests held previously in joint operations are not measured again.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2u.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan Catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2u.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

OP memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 44a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

The allowance of impairment of receivables (continued)

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 6.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

OP granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 44a). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp715.708.838 dan Rp319.744.293.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Group recognized construction revenue amounting to Rp715,708,838 and Rp319,744,293, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 42.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 21. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 42.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 21. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 dan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 21.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Further details are disclosed in Notes 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 and 16.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 21.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 21.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp1.776.917.294 dan Rp1.806.109.326 (Catatan 26).

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Kas	2.637.178	5.204.210
Bank	3.399.196.648	5.068.282.916
Deposito berjangka	14.616.837.653	9.133.843.206
Total kas dan setara kas	18.018.671.479	14.207.330.332

a. Kas

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Rupiah	2.637.178	5.204.210

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2018 and 2017, employee benefits liability amounted to Rp1,776,917,294 and Rp1,806,109,326 (Note 26).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Total cash and cash equivalents

a. Cash on hand

Rupiah

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	353.646.552	1.015.460.840	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	156.706.420	35.634.909	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	120.164.092	34.063.289	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	15.564.961	57.752.003	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	10.813.821	3.782.727	PT Bank Victoria International Tbk
PT DBS Indonesia	4.192.132	-	PT Bank DBS Indonesia
Citibank, N.A.	-	8.880.069	Citibank, N.A.
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	3.761.984	4.920.796	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	873.774.196	922.815.724	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	802.805.464	42.617.879	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	767.519.280	1.320.332.887	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	32.711.087	107.463.906	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	7.222.415	8.806.935	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	2.814.711	3.426.562	PT Bank Syariah Mandiri
Subtotal	3.151.697.115	3.565.958.526	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	169.057.553	23.438.035	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.589.763	18.366.236	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.333.711	4.016.459	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.918.130	4.063.049	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	1.165.193	15.644.295	PT Bank DBS Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	219.330	1.224.108	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.066.025	1.251.298.488	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.766.760	153.404.369	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.062.416	29.960.840	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	247.178.881	1.501.415.879	Sub-total
Euro Eropa:			European Euro:
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	320.652	908.511	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total bank	3.399.196.648	5.068.282.916	Total cash in banks

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000.000	50.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	65.670.648	698.500.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Syariah	50.000.000	60.000.000	PT Bank CIMB Niaga Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	37.200.337	475.670.648	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	4.000.000	4.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Mega Tbk	2.578.052	3.000.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank BCA Syariah	2.000.000	2.000.000	PT Bank BCA Syariah
PT Bank DKI	-	375.000.000	PT Bank DKI
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	15.102.945	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	13.500.000	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	3.000.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	3.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	930.074.000	555.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	854.768.648	361.781.994	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	557.631.769	489.011.918	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	25.000.000	15.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.535.860	20.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	-	4.000.000	PT Bank BNI Syariah
Subtotal	2.639.459.314	3.147.567.505	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.785.869.325	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia	1.013.670.000	1.287.060.000	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	-	501.276.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	-	187.149.362	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	-	118.131.351	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	90.246.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.032.416.814	2.271.032.273	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.673.467.675	1.083.840.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	11.505.423.814	5.538.734.986	Sub-total
Dolar Singapura:			Singapore Dollar:
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	471.954.525	447.540.715	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	14.616.837.653	9.133.843.206	Total time deposits

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Rupiah	4,00% - 9,50%	4,50% - 9,50%	Rupiah
Dolar AS	1,25% - 3,70%	0,50% - 2,26%	US Dollar
Dolar Singapura	1,60%	1,00%	Singapore Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	372.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	50.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	17.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
PT Bank Panin Syariah	2.000.000	-	PT Bank Panin Syariah
PT Bank DKI	-	80.000.000	PT Bank DKI
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	203.053.994	64.518.592	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	20.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	5.000.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.099.745.000	2.682.504.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	796.455.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.793.440.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	3.544.253.994	6.645.462.592	Total time deposits
Efek yang diperdagangkan	291.753.295	77.007.997	Marketable securities
Negotiable certificate of deposits (Catatan 40)	-	200.000.000	Negotiable certificate of deposits (Note 40)
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	76.612.109	Available-for sale financial assets
Total investasi jangka pendek	3.836.007.289	6.999.082.698	Total short-term investments

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2018	2017	
Rupiah	4,44% - 9,25%	7,25% - 8,00%	Rupiah
Dolar AS	3,00% - 3,50%	1,00% - 1,97%	US Dollar

Negotiable certificate of deposits merupakan deposito pada Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia dengan jangka waktu 18 bulan yang jatuh tempo pada bulan Maret 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018 diskonto telah sepenuhnya diamortisasi sedangkan pada 31 Desember 2017 masih tersisa Rp5.025.978 dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan diterima di muka jangka panjang" (Catatan 24).

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang dibeli melalui PT Syailendra Capital, PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Sinarmas Asset Management, manajer investasi.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

31 Desember/December 31,

	2018	2017	
Pihak ketiga Swasta Perorangan	945.087.249 5.604.648	866.936.844 6.493.936	Third parties Private Individuals
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(316.613.865)	(324.276.663)	Less: Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	634.078.032	549.154.117	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 40)	210.172.437	202.111.127	Related parties (Note 40)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(54.297.115)	(52.511.567)	Less: Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	155.875.322	149.599.560	Related parties - net
Piutang usaha - neto	789.953.354	698.753.677	Trade receivables - net

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Negotiable certificate of deposits represents deposits in Bank Mandiri and Bank Negara Indonesia with period of 18 months which will be due on March 2018. As of December 31, 2018 the discount are fully amortized, whereas December 31, 2017, discount unamortized amounted to Rp5,025,978, respectively are recorded as part of "long-term unearned revenue" (Note 24).

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock purchased through PT Syailendra Capital, PT Mandiri Investment Management and PT Sinarmas Asset Management, investment manager.

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah	1.036.949.327	982.217.917	Rupiah
Dolar AS	91.475.032	93.246.518	US Dollar
Dolar Singapura	32.439.975	77.472	Singapore Dollar
Total	1.160.864.334	1.075.541.907	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(370.910.980)	(376.788.230)	Allowance for impairment
Neto	789.953.354	698.753.677	Net

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Saldo awal	376.788.230	343.573.010	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(5.877.250)	33.215.220	Provision (recovery) for the year
Saldo akhir	370.910.980	376.788.230	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Belum jatuh tempo	186.544.320	206.798.566	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-30 hari	185.984.771	341.556.381	1-30 days
31-60 hari	147.141.362	185.084.404	31-60 days
61-150 hari	71.231.027	129.814.203	61-150 days
Lebih dari 150 hari	569.962.854	212.288.353	Over 150 days
Saldo awal	1.160.864.334	1.075.541.907	Beginning balance
Penyisihan penurunan nilai	(370.910.980)	(376.788.230)	Allowance for impairment
Neto	789.953.354	698.753.677	Net

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. By currency

c. The movements in the allowance for impairment of receivables is as follows:

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Swasta	40.109.643	73.046.665	<i>Private</i>
Perorangan	943.136	833.015	<i>Individuals</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(31.522.696)	(24.113.917)	<i>Allowance for impairment</i>
Pihak ketiga - neto	9.530.083	49.765.763	<i>Third parties - net</i>
Pihak berelasi (Catatan 40)	672.932.848	775.968.744	<i>Related parties (Note 40)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(32.764.117)	(37.656.398)	<i>Allowance for impairment</i>
Pihak berelasi - neto	640.168.731	738.312.346	<i>Related parties - net</i>
Piutang lain-lain - neto	649.698.814	788.078.109	<i>Other receivables - net</i>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Saldo awal	61.770.315	60.066.266	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan tahun berjalan	2.516.498	1.704.049	<i>Provision for the year</i>
Saldo akhir	64.286.813	61.770.315	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Uang muka			Advances
Operasional	20.006.571	45.998.814	Operational
Lain-lain	2.183.435	4.121.206	Others
Subtotal	22.190.006	50.120.020	Sub-total
Beban dibayar di muka			Prepaid expenses
Pegawai	41.911.549	41.305.877	Personnel
Umum	17.783.362	5.962.152	General
Asuransi	12.918.214	14.655.536	Insurance
Sewa	7.063.765	11.940.325	Rental
Lain-lain	18.201.282	20.192.692	Others
Subtotal	97.878.172	94.056.582	Sub-total
Total	120.068.178	144.176.602	Total

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat uang muka operasional yang telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan namun belum dilakukan pertanggungjawaban sebesar Rp13.561.377.

As of December 31, 2018, there are advances for operational which has been charged to the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income but has not been accounted amounted to Rp13,561,377.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga			Third parties
Pelayanan jasa terminal	120.261.350	81.937.762	Terminal services
Pelayanan kesehatan	71.611.964	76.966.424	Medical services
Jasa logistik	33.526.077	18.559.505	Logistic services
Pengusahaan peralatan	21.608.684	7.477.702	Equipment services
Pelayanan terminal petikemas	17.255.930	63.532.454	Container terminal services
Pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik	10.743.824	16.986.979	Land, building, water and electrical services
Pelayanan jasa barang	10.353.249	10.979.478	Cargo services
Pelayanan jasa kapal	9.976.452	11.450.354	Vessel services
Lain-lain	10.528.815	16.035.643	Others
Subtotal	305.866.345	303.926.301	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 40)	17.001.727	26.573.499	Related parties (Note 40)
Total	322.868.072	330.499.800	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Suku cadang	46.300.884	42.052.260	Spareparts
Obat, bahan, dan alat medis	13.236.622	11.350.279	Medicines, materials and equipment
Bahan bakar	1.866.460	1.645.712	Fuels
Alat tulis dan barang cetakan	1.706.454	2.502.036	Stationaries and printings
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	949.230	2.841.785	Others (each below Rp1 billion)
Total	64.059.650	60.392.072	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan persediaan usang	(4.920.226)	(3.911.120)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	59.139.424	56.480.952	Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Saldo awal	3.911.120	615.836	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	797.211	3.290.147	Provision for the year
Efek penjabaran mata uang asing	211.895	5.137	Effect of foreign exchange translation
Saldo akhir	4.920.226	3.911.120	Ending balance

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

11. LONG-TERM INVESTMENT

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Investasi pada entitas asosiasi	2.362.825.278	1.554.888.854	Investment in associates
Investasi pada penyertaan saham	524.362.036	-	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	324.550.117	-	Investment in bonds
Total	3.211.737.431	1.554.888.854	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
JICT (Catatan 45b, 45c, 45d dan 45e)	1.631.969.829	1.322.446.813	JICT (Notes 45b, 45c, 45d and 45e)
CTP	448.806.191	128.193.297	CTP
NPCT1 (Catatan 44d)	248.748.056	69.710.190	NPCT1 (Notes 44d)
TPI	33.301.202	34.538.554	TPI
Total	2.362.825.278	1.554.888.854	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2018					
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.098.225.725	425.454.856	1.631.969.829
TPI	25,00%	37.500.000	(4.198.798)	-	33.301.202
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	12.550.371	-	448.806.191
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	41.145.336	33.832.664	248.748.056
Total		755.815.124	1.147.722.634	459.287.520	2.362.825.278

Equity method
Owned through the Company
JICT
TPI

Owned through API
CTP

Owned through IPC TPK
NPCT1

Total

31 Desember/December 31, 2017

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	895.609.140	318.548.425	1.322.446.813
TPI	25,00%	37.500.000	(2.961.446)	-	34.538.554
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	118.500.200	9.693.097	-	128.193.297
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	(130.818.750)	26.758.884	69.710.190
Total		438.059.504	771.522.041	345.307.309	1.554.888.854

Equity method
Owned through the Company
JICT
TPI

Owned through API
CTP

Owned through IPC TPK
NPCT1

Total

b. Investasi pada penyertaan saham

31 Desember/December 31,

	2018	2017	
PT United Tractors Tbk	26.286.085	-	PT United Tractors Tbk
PT Djakarta Lloyd	20.628.000	-	PT Djakarta Lloyd
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	17.212.965	-	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	13.495.422	-	PT Vale Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	11.497.500	-	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	10.185.318	-	PT XL Axiata Tbk
PT Adaro Energy Tbk	7.310.655	-	PT Adaro Energy Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	6.286.098	-	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	5.481.140	-	PT Astra International Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk	5.172.300	-	PT Delta Dunia Makmur Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.868.177	-	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	2.664.000	-	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.343.132	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	392.931.244	-	Others (each below Rp2 billion)
Total	524.362.036	-	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Investasi pada surat utang

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	95.000.000	-
PT Medco Power Indonesia	86.700.775	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	50.000.000	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	22.940.425	-
PT Lontar Papyrus	20.000.000	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	49.908.917	-
Total	324.550.117	-

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investment in bonds

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	95.000.000	-
PT Medco Power Indonesia	86.700.775	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	50.000.000	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	22.940.425	-
PT Lontar Papyrus	20.000.000	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	49.908.917	-
Total	324.550.117	-

12. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	-	45.011.598	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	650.817.393 14.761.618	- -	- -	1.962.264 (1.962.264)	652.779.657 12.799.354	Port facilities Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	-	710.590.609	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(305.962.211) (10.286.378)	(11.458.812) (5.740.761)	- -	(9.224.720) 9.224.720	(326.645.743) (6.802.419)	Port facilities Roads and buildings
Total	(316.248.589)	(17.199.573)	-	-	(333.448.162)	Total
Nilai buku neto	394.342.020				377.142.447	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	46.236.254	-	-	(1.224.656)	45.011.598	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	650.710.444 14.868.567	- -	- -	- -	650.710.444 14.868.567	Port facilities Roads and buildings
Total	711.815.265	-	-	(1.224.656)	710.590.609	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(286.203.312) (9.789.162)	(19.758.899) (497.216)	- -	- -	(305.962.211) (10.286.378)	Port facilities Roads and buildings
Total	(295.992.474)	(20.256.115)	-	-	(316.248.589)	Total
Nilai buku neto	415.822.791				394.342.020	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.035.926.908 dan Rp8.336.633.780.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

The fair value of investment properties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are calculated amounting to Rp10,035,926,908 and Rp8,336,633,780, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.728.032.428	525.870.879	-	-	2.253.903.307	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.453.147.825	47.440.586	-	166.141.539	5.666.729.950	Port facilities
Kapal	1.577.588.016	114.057.373	(565.745)	3.124.787	1.694.204.431	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.586.792.790	16.245.067	(7.594.413)	16.457.093	2.611.900.537	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	848.367.746	11.669.632	(218.293)	106.673.300	966.492.385	Port installation
Jalan dan bangunan	1.906.437.903	21.597.414	(45.223)	62.577.454	1.990.567.548	Roads and buildings
Peralatan	562.978.254	46.723.014	-	(12.184.924)	597.516.344	Equipment
Kendaraan	72.079.786	770.745	(1.397.179)	(6.426.720)	65.026.632	Vehicles
Emplasemen	38.245.826	1.716.105	-	38.208	40.000.139	Emplacement
Subtotal	14.773.670.574	786.090.815	(9.820.853)	336.400.737	15.886.341.273	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	538.543.736	1.075.058.340	-	(341.276.670)	1.272.325.406	Construction in progress
Total	15.312.214.310	1.861.149.155	(9.820.853)	(4.875.933)	17.158.666.679	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.177.445.767)	(112.744.121)	-	(1.964.573)	(1.292.154.461)	Port facilities
Kapal	(700.135.110)	(89.736.742)	1.693.268	(332.142)	(788.510.726)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.077.698.551)	(167.739.169)	7.991.198	(935.430)	(1.238.381.952)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(176.170.561)	(97.020.040)	487.073	66.627	(272.636.901)	Port installation
Jalan dan bangunan	(388.168.692)	(73.417.432)	3.710.170	-	(458.559.758)	Roads and buildings
Peralatan	(389.480.308)	(3.158.773)	-	(1.018.561)	(393.657.642)	Equipment
Kendaraan	(41.378.812)	(3.632.369)	1.111.137	5.190.023	(38.710.021)	Vehicles
Emplasemen	(16.821.231)	(2.011.430)	-	(322.140)	(19.154.801)	Emplacement
Total	(3.967.299.032)	(549.460.076)	14.992.846	-	(4.501.766.262)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(19.064.682)	(8.838.302)	-	-	(27.902.984)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	11.325.850.596				12.628.997.433	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.418.115.362	210.112.768	-	99.804.298	1.728.032.428	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.236.526.645	-	(149.919)	216.771.099	5.453.147.825	Port facilities
Kapal	1.675.090.747	40.136.942	(138.019.606)	379.933	1.577.588.016	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.495.247.230	55.603.884	(18.389.984)	54.331.660	2.586.792.790	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	478.128.278	7.536.820	(48.887)	362.751.535	848.367.746	Port installation
Jalan dan bangunan	1.543.746.696	4.619.008	(1.571.060)	359.643.259	1.906.437.903	Roads and buildings
Peralatan	459.344.683	48.824.749	(1.543.973)	56.352.795	562.978.254	Equipment
Kendaraan	57.537.915	14.489.373	(242.678)	295.176	72.079.786	Vehicles
Emplasemen	31.648.309	807.250	-	5.790.267	38.245.826	Emplacement
Subtotal	13.395.385.865	382.130.794	(159.966.107)	1.156.120.022	14.773.670.574	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	575.573.364	566.507.919	-	(603.537.547)	538.543.736	Construction in progress
Total	13.970.959.229	948.638.713	(159.966.107)	552.582.475	15.312.214.310	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.019.784.175)	(163.850.002)	-	6.188.410	(1.177.445.767)	Port facilities
Kapal	(751.784.299)	(70.017.138)	121.666.327	-	(700.135.110)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(910.344.683)	(174.529.872)	13.693.130	(6.517.126)	(1.077.698.551)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(132.190.484)	(43.961.603)	43.998	(62.472)	(176.170.561)	Port installation
Jalan dan bangunan	(310.189.895)	(75.036.022)	107.596	(3.050.371)	(388.168.692)	Roads and buildings
Peralatan	(338.571.004)	(48.972.511)	1.315.340	(3.252.133)	(389.480.308)	Equipment
Kendaraan	(37.839.570)	(3.539.242)	-	-	(41.378.812)	Vehicles
Emplasemen	(14.539.668)	(2.252.283)	-	(29.280)	(16.821.231)	Emplacement
Total	(3.515.243.778)	(582.158.673)	136.826.391	(6.722.972)	(3.967.299.032)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(19.074.031)	-	9.349	-	(19.064.682)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	10.436.641.420				11.325.850.596	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated to operating expenses.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Berdikari Insurance, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT IBS Insurance Broking Service dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp7.061.715.528 dan USD565.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp4.688.158.490 dan USD522.000.000 pada tanggal 31 Desember 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tahun 2018 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp4.562.783, serta reklasifikasi akun aset dalam penyelesaian menjadi akun aset takberwujud hak konsesi sebesar Rp313.150.

Reklasifikasi pada tahun 2017 termasuk reklasifikasi dari akun aset takberwujud ke aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp599.903.446 dan nilai buku sebesar Rp593.180.473, reklasifikasi tanah dari akun properti investasi ke akun aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp1.224.656 serta reklasifikasi peralatan dari akun aset tetap dalam penyelesaian ke akun aset tidak berwujud dengan nilai perolehan sebesar Rp14.840.979.

Penghapusan Aset Tetap

Perusahaan

Pada tahun 2018, Perusahaan menghapusbukukan aset tetap tertentu berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 74/DK/PI.II/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018, SK Direksi KU.02.08/31/12/1/MAT/UT/PI.II-18 tanggal 31 Desember 2018 serta telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN berdasarkan surat No. S-706/MBU/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2018 sebesar Rp8.443.975 dengan nilai buku sebesar Rp183.492.

13. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2018 and 2017, the Group insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Berdikari Insurance, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and PT IBS Insurance Broking Service with total insurance coverage amounting to Rp7,061,715,528 and USD565,000,000 as of December 31, 2018 and Rp4,688,158,490 and USD522,000,000 as of December 31, 2017. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification in 2018 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp4,562,783, and reclassification of assets under construction to concession rights assets on intangible assets amounting to Rp313,150.

Reclassification in 2017 includes reclassification from intangible assets account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp599,903,446 and book value amounting to Rp593,180,473, land reclassification from investment properties account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp1,224,656 and equipment reclassification from construction in progress account to intangible assets account with acquisition cost amounting to Rp14,840,979.

Write-off of Fixed Assets

The Company

In 2018, the Company has written-off certain fixed assets based on SK Dewan Komisaris No. 74/DK/PI.II/VII-2018 dated July 4, 2018, SK Direksi No. KU.02.08/31/12/1/MAT/UT/PI.II-18 dated December 31, 2018 and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. S-706/MBU/10/2018 dated October 19, 2018.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2018 amounting to Rp8,443,975, with book value amounting to Rp183,492.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di 2018, Perusahaan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp2.014.142 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Rukindo

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. SK.03/7/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan PPI-400-005799 tanggal 7 Agustus 2018, Perusahaan menghapusbukukan aset tetap tertentu yaitu aset kapal CSD Kapuas, SB 54 dan SB 56. Perusahaan menjual aset tetap tersebut di tahun 2018 dan mencatat penjualan aset tetap sebesar Rp3.100.000 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

EDII

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0593/E01-EDII/PL.400/02/2018 dated 27 Februari 2018 Perusahaan menghapusbukukan aset tetap tertentu yaitu aset Kendaraan. Perusahaan menjual aset tetap tersebut di tahun 2018 dengan mencatat keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp144.825 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Bangunan fasilitas pelabuhan	710.107.751	219.275.045	Port facilities
Peralatan	199.706.147	50.689.984	Equipment
Alat fasilitas pelabuhan	146.352.194	89.493.317	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	95.081.015	40.942.260	Port installation
Jalan dan bangunan	89.772.941	30.706.440	Roads and buildings
Emplasemen	2.385.002	-	Emplacement
Kapal	28.920.356	107.436.690	Vessels
Total	1.272.325.406	538.543.736	Total

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp5.734.460 dan Rp7.252.241 masing-masing pada tahun 2018 dan 2017.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

The Company (continued)

Due to write-off and sales of fixed asset which were already performed in 2018, the Company recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp2,014,142 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Rukindo

Based on Keputusan Direksi No. SK.03/7/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and PPI-400-005799 dated August 7, 2018, the Company has written-off certain fixed assets, namely CSD Kapuas, SB 54 and SB 56. The Company sold such fixed asset in 2018 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp3,100,000 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

EDII

Based on Decree of Board of Directors No. 0593/E01-EDII/PL.400/02/2018 dated February 27, 2018, the Company disposed certain fixed assets which are vehicles. The Company sold the fixed assets in 2018, recorded gain in fixed asset disposals amounted to Rp144,825 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Bangunan fasilitas pelabuhan	710.107.751	219.275.045	Port facilities
Peralatan	199.706.147	50.689.984	Equipment
Alat fasilitas pelabuhan	146.352.194	89.493.317	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	95.081.015	40.942.260	Port installation
Jalan dan bangunan	89.772.941	30.706.440	Roads and buildings
Emplasemen	2.385.002	-	Emplacement
Kapal	28.920.356	107.436.690	Vessels
Total	1.272.325.406	538.543.736	Total

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp5,734,460 and Rp7,252,241 in 2018 and 2017, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,5% - 87,18%	2019	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
Pekerjaan pembangunan kapal	40%	2019	Construction of ship
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	51%	2019	Construction of yard
Alat Fasilitas Pelabuhan	63% - 95%	2019	Port Equipment Facilities
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30% - 52,47%	2019	Port Facility Installation

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	5% - 87%	2018	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
Pekerjaan pembangunan kapal	85%	2018	Construction of ship
Pekerjaan pembangunan gedung kantor	14,25%	2018	Construction of office building
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	11,72% - 57,91%	2018	Construction of yard

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2018 are as follows:

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2017 are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 45a) dan PT Maspion Industrial Estate (Catatan 45o), sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.768.859	-	-	(43.380)	764.725.479	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.898.284	-	-	4.606.163	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	862.834.508	-	-	4.562.783	867.397.291	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(319.669.018)	(19.452.372)	-	-	(339.121.390)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(33.046.147)	(8.644.792)	-	-	(41.690.939)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.791.447)	(1.252.076)	-	-	(3.043.523)	Port installation
Jalan dan bangunan	(113.788)	(56.894)	-	-	(170.682)	Roads and buildings
Peralatan	(298.520)	(149.260)	-	-	(447.780)	Equipment
Emplasemen	(355.192)	(177.596)	-	-	(532.788)	Emplacement
Total	(355.274.112)	(29.732.990)	-	-	(385.007.102)	Total
Nilai buku neto	507.560.396				482.390.189	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.768.859	-	-	-	764.768.859	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.898.284	-	-	-	5.898.284	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	862.834.508	-	-	-	862.834.508	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(299.927.345)	(19.741.673)	-	-	(319.669.018)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(25.406.447)	(7.639.700)	-	-	(33.046.147)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.196.832)	(594.615)	-	-	(1.791.447)	Port installation
Jalan dan bangunan	(56.894)	(56.894)	-	-	(113.788)	Roads and buildings
Peralatan	(149.260)	(149.260)	-	-	(298.520)	Equipment
Emplasemen	(177.596)	(177.596)	-	-	(355.192)	Emplacement
Total	(326.914.374)	(28.359.738)	-	-	(355.274.112)	Total
Nilai buku neto	535.920.134				507.560.396	Net book value

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Aset hak konsesi	9.150.801.841	8.300.923.917	Concession rights assets
Piranti lunak	284.412.704	257.213.127	Software application
Aset takberwujud lainnya	25.828.087	20.241.980	Other intangible assets
Subtotal	9.461.042.632	8.578.379.024	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(422.093.488)	(281.943.658)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	9.038.949.144	8.296.435.366	Net

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak kepada Perusahaan masing-masing untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 44a dan 45p), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Biaya perolehan	8.300.923.917	849.564.774		313.150	9.150.801.841	Cost
Akumulasi amortisasi	(92.626.304)	(93.718.182)	-	-	(186.344.486)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.208.297.613				8.964.457.355	Carrying amount

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Biaya perolehan	8.544.531.977	356.295.386		(599.903.446)	8.300.923.917	Cost
Akumulasi amortisasi	(18.516.939)	(80.832.337)	-	6.722.972	(92.626.304)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.526.015.038				8.208.297.613	Carrying amount

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 62,57% dan 70,41%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 and 2017 adalah sebesar Rp57.835.654 dan Rp36.551.093.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan *VGM* untuk sistem operasi terminal.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok and Port Authority office of Class II Pontianak Port to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port and Kijing Terminal at Pontianak Port, respectively, based on Concession Agreement (Notes 44a and 45p), with details as follows:

As of December 31, 2018 and 2017, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 62.57% and 70.41%, respectively.

Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp57,835,654 and Rp36,551,093.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2018 and 2017.

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal* services, *container terminal* services and *warehouse and Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for *electronic data interchange*, *operational application*, *ERP (finance, human resources, technical information system)*, *development of Port Community System/Inaportnet*, *dash board system* application to present information regarding operational performance, *system integration*, *autogate integration* and *VGM* for terminal operating system.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Uang muka aset tetap	60.439.650	430.885	Advance of fixed assets
Uang jaminan	47.922.193	17.902.531	Security deposits
Jaminan pelaksanaan	37.000.000	37.000.000	Performance bond
Piutang pemulihan investasi	30.145.691	21.620.188	Investment recovery receivables
Pajak final dibayar di muka (Catatan 21g)	-	321.623.875	Prepaid final tax (Note 21g)
Aset lain-lain - neto	74.386.384	76.363.209	Other assets - net
Total	249.893.918	474.940.688	Total

Uang muka aset tetap merupakan uang muka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) terkait pembangunan Menara Maritim.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru (Catatan 44a).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan vessel traffic service, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultasi kegiatan Basic Ship Management Fleet.

Advance of fixed assets represents advance to PT Pembangunan Perumahan (Persero) for construction of Maritim Tower.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal (Note 44a).

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Other assets - others - net mainly represents deferred charge of dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship Management Fleet.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga Swasta	404.693.466	367.571.206	Third parties Private
Pihak berelasi (Catatan 40)	1.261.214.247	999.183.968	Related parties (Note 40)
Total	1.665.907.713	1.366.755.174	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Rupiah	1.659.372.623	1.362.185.171	Rupiah
Dolar AS	6.535.090	4.570.003	US Dollar
Total	1.665.907.713	1.366.755.174	Total

17. TRADE PAYABLES

a. By supplier

b. By currency

18. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Uang untuk diperhitungkan Swasta	16.658.521	19.398.795	Advances from customers Private
Pihak berelasi (Catatan 40g)	1.028.107	3.720.117	Related parties (Note 40g)
Lain-lain	11.283.684	3.016.172	Others
Subtotal	28.970.312	26.135.084	Sub-total
Sewa kuartalan (Catatan 44h dan 45a)	555.358.299	287.725.000	Quarterly rent (Notes 44h and 45a)
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	101.043.778	85.010.861	Land, building, water and electricity services
Lain-lain	1.727.923	5.231.732	Others
Subtotal	658.130.000	377.967.593	Sub-total
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 24)	146.997.709	374.604.109	Current portion of long-term unearned revenue (Note 24)
Total	834.098.021	778.706.786	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Pendapatan diterima di muka - pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik terutama merupakan pendapatan sehubungan dengan penggunaan tanah HPL Perusahaan.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

Unearned revenues - land, building, water and electricity services mainly represents revenue derived from usage of Company's Right to Manage (HPL) land.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Umum	843.328.993	514.816.570
Pegawai	623.923.785	595.409.909
Kerjasama mitra usaha	273.197.247	273.821.237
Bunga	163.363.780	152.838.375
Bahan bakar dan bahan habis pakai	80.085.854	42.979.035
Pemeliharaan	77.873.897	65.022.565
Provisi atas pembangunan aset		
Pemda DKI	39.089.633	39.089.633
Biaya konsesi	2.267.336	15.941.339
PPH 4(2) final (Catatan 21g)	-	359.022.000
Lain-lain	187.702.091	109.081.832
Total	2.290.832.616	2.168.022.495

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian dan pembangunan aset tetap.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi tanggal 11 November 2015 (Catatan 45m).

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 May 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangunan kepada Perusahaan.

Beban akrual - PPh 4(2) final merupakan cadangan pembayaran pajak final atas ketentuan pajak kurang bayar tahun fiskal 2015 (Catatan 21g).

20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pihak ketiga	185.350.553	165.639.036
Pihak berelasi (Catatan 40)	90.237.622	95.916.891
Total	275.588.175	261.555.927

19. ACCRUED EXPENSES

31 Desember/December 31,

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Umum	514.816.570	514.816.570	General
Pegawai	595.409.909	595.409.909	Employee
Kerjasama mitra usaha	273.821.237	273.821.237	Partnership
Bunga	152.838.375	152.838.375	Interest
Bahan bakar dan bahan habis pakai	42.979.035	42.979.035	Fuels and supplies
Pemeliharaan	65.022.565	65.022.565	Maintenance
Provisi atas pembangunan aset			Provision for construction of Pemda
Pemda DKI	39.089.633	39.089.633	DKI assets
Biaya konsesi	15.941.339	15.941.339	Concession fee
PPH 4(2) final (Catatan 21g)	359.022.000	359.022.000	Final income tax article (Note 21g)
Lain-lain	109.081.832	109.081.832	Others
Total	2.168.022.495	2.168.022.495	Total

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for purchase and construction of fixed assets.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement dated November 11, 2015 (Note 45m).

Provision of construction of Pemda DKI assets represents the Company's obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

Accrued expense - final income tax article 4(2) represents provision for final tax payment in relation to tax assessment for fiscal year 2015 (Note 21g).

20. OTHER CURRENT LIABILITIES

31 Desember/December 31,

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak ketiga	185.350.553	165.639.036	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 40)	90.237.622	95.916.891	Related parties (Note 40)
Total	275.588.175	261.555.927	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Uang titipan dari pelanggan <u>Pihak ketiga</u>			<i>Deposit from customers</i>
Swasta	120.764.703	113.815.273	<i>Third parties</i>
Lain-lain	40.054.582	34.459.130	<i>Private</i>
			<i>Others</i>
Pihak berelasi (Catatan 40h)	14.748.481	16.659.416	<i>Related parties (Note 40h)</i>
Subtotal	175.567.766	164.933.819	<i>Sub-total</i>
Pihak ketiga	24.531.268	17.364.633	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 40i)			<i>Related parties (Note 40i)</i>
JICT (Catatan 45f)	38.980.725	38.980.725	<i>JICT (Note 45f)</i>
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)	31.666.118	31.666.118	<i>PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)</i>
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	4.842.298	8.610.632	<i>Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)</i>
Subtotal	100.020.409	96.622.108	<i>Sub-total</i>
Total	275.588.175	261.555.927	Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/II/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

20. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Details of other current liabilities as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

Other current liabilities to DKB represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/II/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Other current liabilities to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	235.183.098	260.028.618
Pajak penghasilan pasal 19 - Penilaian kembali aktiva tetap	32.438.878	-
Pajak penghasilan lainnya	8.436.907	7.408.526
Subtotal	276.058.883	267.437.144
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	171.572.101	234.477.380
Pajak penghasilan lainnya	304.159.014	55.322.455
Subtotal	475.731.115	289.799.835
Total	751.789.998	557.236.979

21. TAXATION

a. Prepaid taxes

The Company
Value Added Tax
Income taxes article 19 -
Revaluation of fixed assets
Other income taxes
Sub-total
Subsidiaries
Value Added Tax
Other income taxes
Sub-total
Total

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Perusahaan		
Pajak penghasilan		
2013	-	10.819.128
2014	14.423.973	-
2015	377.958.339	381.563.183
2016	-	162.202.769
2017	153.078.948	152.765.842
2018	171.450.559	-
Subtotal	716.911.819	707.350.922
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai		
2016	-	1.938.178
2017	7.620.728	55.805.513
2018	10.278.804	-
Pajak penghasilan		
2014	10.193.276	-
2015	18.226.979	-
2016	7.658.230	51.036.946
2017	13.455.592	23.655.197
2018	57.586.139	-
Subtotal	125.019.748	132.435.834
Total	841.931.567	839.786.756

The Company
Income tax
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sub-total
Subsidiaries
Value Added Tax
2016
2017
2018
Income tax
2014
2015
2016
2017
2018
Sub-total
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai	150.325.249	242.891.067	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	684.648	1.763.970	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	33.022.872	35.670.113	<i>Article 21</i>
Pasal 22	86.239	149.655	<i>Article 22</i>
Pasal 23	12.547.108	2.827.206	<i>Article 23</i>
Pasal 25	9.750.759	9.750.759	<i>Article 25</i>
Lainnya	12.560	232.365	<i>Others</i>
Subtotal	206.429.435	293.285.135	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai	22.365.260	28.066.349	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	51.780.203	7.957.221	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	37.631.713	32.584.984	<i>Article 21</i>
Pasal 23	7.932.378	10.267.297	<i>Article 23</i>
Pasal 25	23.950.376	18.925.251	<i>Article 25</i>
Pasal 29	36.423.783	46.144.257	<i>Article 29</i>
Lainnya	2.982.527	4.689.505	<i>Others</i>
Subtotal	183.066.240	148.634.864	<i>Sub-total</i>
Total	389.495.675	441.919.999	Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2018 and 2017 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.775.005.156	2.473.582.232	<i>Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.415.927.072	1.167.327.552	<i>Income before corporate income tax of subsidiaries</i>
Pendapatan kena pajak final	3.009.884.361	2.499.963.788	<i>Income subject to final tax</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.650.806.277)	(1.193.709.108)	<i>Loss before corporate income tax expenses - the Company</i>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Beda temporer:		
Penyisihan imbalan kerja karyawan	28.254.134	34.955.657
Penyisihan penurunan nilai piutang	(12.477.994)	17.336.042
Amortisasi aset lain-lain	19.282.281	(143.615)
Penyusutan aset tetap	(133.260.394)	(158.527.508)
Beda permanen:		
Beban bunga	692.220.214	360.367.032
Beban umum	77.737.103	139.837.727
Beban kesejahteraan karyawan	121.208.223	137.087.228
Beban promosi	39.206.898	44.989.477
Beban administrasi	9.449.417	23.653.355
Bagian laba entitas asosiasi	(201.379.233)	(33.427.601)
Lainnya	355.552.915	124.229.410
Subtotal	995.793.564	690.357.204
Taksiran rugi pajak	(655.012.713)	(503.351.904)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Laba sebelum pajak penghasilan Badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.775.005.156	2.473.582.232
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.415.927.072	1.167.327.552
Pendapatan kena pajak final	3.009.884.361	2.499.963.788
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.650.806.277)	(1.193.709.108)
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(412.701.569)	(298.427.277)
Dampak perbedaan permanen:		
Beban bunga	173.055.054	90.091.758
Beban umum	19.434.276	34.959.432
Beban kesejahteraan karyawan	30.302.056	34.271.807
Beban promosi	9.801.725	11.247.369
Beban administrasi	2.362.354	5.913.339
Bagian laba entitas asosiasi	(50.344.808)	(8.356.900)
Lainnya	88.888.229	31.057.353
Perusahaan	(139.202.683)	(99.243.119)
Entitas anak	483.497.984	367.098.332
Beban pajak penghasilan badan	344.295.301	267.855.213

21. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Temporary differences:	
Provision for employee benefits	34.955.657
Provision for impairment of receivables	17.336.042
Amortization of other assets	(143.615)
Depreciation of fixed assets	(158.527.508)
Permanent differences:	
Interest expenses	360.367.032
General expenses	139.837.727
Employees social welfare expenses	137.087.228
Promotion expenses	44.989.477
Administration expenses	23.653.355
Income portion from associates	(33.427.601)
Others	124.229.410
Sub-total	690.357.204
Estimated tax loss	(503.351.904)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	2.775.005.156
Less:	
Income before corporate income tax of subsidiaries	1.415.927.072
Income subject to final tax	3.009.884.361
Loss before corporate income tax expenses - the Company	(1.650.806.277)
Income tax calculated at applicable rate	(412.701.569)
Effect of permanent differences:	
Interest expenses	173.055.054
General expenses	19.434.276
Employees social welfare expenses	30.302.056
Promotion expenses	9.801.725
Administration expenses	2.362.354
Income portion from associates	(50.344.808)
Others	88.888.229
The Company	(139.202.683)
Subsidiaries	483.497.984
Corporate income tax expense	344.295.301

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Beban pajak final		
Perusahaan	249.720.243	260.054.566
Entitas anak	107.392.979	85.168.378
Subtotal	357.113.222	345.222.944
Beban pajak penghasilan badan Kini		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	353.981.768	291.831.888
Subtotal	353.981.768	291.831.888
Tangguhan		
Perusahaan	7.195.030	(17.127.068)
Entitas anak	(16.881.497)	(6.849.607)
Subtotal	(9.686.467)	(23.976.675)
Total	344.295.301	267.855.213

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Taksiran penghasilan kena pajak		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	1.415.927.072	1.167.327.552
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.415.927.072	1.167.327.552
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	353.981.768	291.831.888
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	353.981.768	291.831.888

21. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2018 will be used as a basis in filling the 2018 annual corporate income tax return.

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

Final tax expense The Company Subsidiaries
Sub-total
Corporate income tax expense Current The Company Subsidiaries
Sub-total
Deferred The Company Subsidiaries
Sub-total
Total

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

Estimated taxable income The Company Subsidiaries
Total estimated taxable income
Corporate income tax expense - current The Company Subsidiaries
Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			Less prepaid income tax
Perusahaan	171.450.559	152.765.842	The Company
Entitas anak	375.144.124	269.342.828	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	546.594.683	422.108.670	Total prepaid income tax
Taksiran hutang pajak penghasilan - Pasal 29			Estimated income tax payable - Article 29
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	36.423.783	46.144.257	Subsidiaries
Total	36.423.783	46.144.257	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			Estimated claims for tax refund
Perusahaan	171.450.559	152.765.842	The Company
Entitas anak	57.586.139	23.655.197	Subsidiaries
Total	229.036.698	176.421.039	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/Year Ended December 31, 2018						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	44.644.534	10.322.756	(2.528.584)	(4.939.941)	47.498.765	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(638.937.738)	(48.269.942)	-	-	(687.207.680)	Depreciation
Amortisasi	(6.026.402)	(12.569.142)	-	-	(18.595.544)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	73.546.366	(12.893.260)	-	-	60.653.106	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	313.112.199	45.723.981	10.406.667	-	369.242.847	Provision for employee benefits
Subtotal	(258.305.575)	(28.008.363)	10.406.667	-	(275.907.271)	Sub-total
Entitas anak	(42.993.909)	5.493.923	3.431.362	2.129.088	(31.939.536)	Subsidiaries
Total	(301.299.484)	(22.514.440)	13.838.029	2.129.088	(307.846.807)	Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/Year Ended December 31, 2017						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	37.017.244	6.947.784	170.250	509.256	44.644.534	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(622.282.269)	(16.655.469)	-	-	(638.937.738)	Depreciation
Amortisasi	(3.092.456)	(2.933.946)	-	-	(6.026.402)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	69.212.356	4.334.010	-	-	73.546.366	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	241.692.952	32.382.472	39.036.775	-	313.112.199	Provision for employee benefits
Subtotal	(314.469.417)	17.127.067	39.036.775	-	(258.305.575)	Sub-total
Entitas anak	(42.404.563)	(696.700)	(6.773)	114.127	(42.993.909)	Subsidiaries
Total	(356.873.980)	16.430.367	39.030.002	114.127	(301.299.484)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut.

Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan sedang dalam proses pengajuan banding ke pengadilan pajak.

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 24 Mei 2017, IPC TPK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2015 berupa pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp14.788.285 dan Rp5.028.017. IPC TPK membayar sebagian tagihan pajak tersebut sebesar Rp3.063.854 dengan rincian jumlah pajak penghasilan terutang Rp2.438.761, koreksi atas restitusi pajak tahun 2015 yang dilaporkan sebesar Rp152.302 dan sanksi pajak Rp777.395 pada 16 Juni 2017. Selisih dengan hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp317.627 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, IPC TPK mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tahun 2015. Pada tanggal 20 Juli 2018, keberatan untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2015 ditolak oleh Kantor Pajak.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filed an objection to the DJP for the SKPKB.

As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

Until the date of the completion of this consolidated financial statement, the Company is still in the process of filing an appeal to tax court.

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2015

On May 24, 2017, IPC TPK received a Tax Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2015 corporate income tax in the form of principal and fine amounting to Rp14,788,285 and Rp5,028,017, respectively. IPC TPK paid a portion of the tax bill amounting to Rp3,063,854 with details of the amount of outstanding income tax Rp2,438,761, correction of reported 2015 tax refunds amounting to Rp152,302 and tax penalty of Rp777,395 on June 16, 2017. Difference with the results of the tax audit amounting to Rp317,627 has been charged to the statement of profit or loss and comprehensive income for the year.

On August 22, 2017, IPC TPK has filed an objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax. On July 20, 2018, the objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax was rejected by the Tax Office.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2018, IPC TPK mengajukan banding untuk pajak penghasilan badan tahun 2015 ke Pengadilan Pajak. IPC TPK membayar kekurangan tagihan pajak tersebut sebesar Rp15.938.774 pada 23 Oktober 2018. Pada tanggal 21 Desember 2018, Pengadilan Pajak menolak banding atas pajak penghasilan badan tahun 2015. Selisih atas kekurangan pembayaran ketetapan pajak penghasilan badan tahun 2015 telah dibebankan dan dicatat sebagai bagian dari pajak kini sebesar Rp12.501.828, denda pajak sebesar Rp4.250.621 dan utang pajak lainnya sebesar Rp813.675.

Surat Tagihan Pajak

Pada tanggal 7 Mei 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN dari Kantor pajak untuk masa pajak Juni, September - Desember 2016 sebesar Rp2.662.188 dan telah dibayar oleh IPC TPK pada tanggal 6 Juni 2018 serta telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 26 November 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Kantor pajak untuk masa pajak Desember 2017 - Juni 2018 dan Agustus 2018 sebesar Rp1.689.698 dan telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak dan utang pajak lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK (continued)

Tax assessment for fiscal year 2015 (continued)

On October 19, 2018, IPC TPK filed an appeal for the 2015 corporate income tax to the Tax Court. IPC TPK paid for the remaining tax bill in the amount of Rp15,938,774 on October 23, 2018. On December 21, 2018, the Tax Court rejected the appeal of the 2015 corporate income tax. The difference in the underpayment of the 2015 corporate income tax assessment has been charged and recorded as part of the current tax of Rp12,501,828, tax penalties amounting to Rp4,250,621 and other tax payable of Rp813,675.

Tax Collection Letters

On May 7, 2018, IPC TPK receive a Tax Collection Letter (STP) for VAT from the Tax Office for the tax period of June, September - December 2016 amounting to Rp2,662,188 and was paid by IPC TPK on June 6, 2018 and has been recorded as part of tax penalty on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On November 26, 2018, IPC TPK received a Tax Collection Letter (STP) for Income Tax Article 25 from the Tax Office for the period of December 2017 - June 2018 and August 2018 amounting to Rp1,689,698 and has been recorded as part from tax penalties and other tax debts in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI

Pada tanggal 25 April 2016, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 23 dan PPh 25 tahun 2014 sebesar Rp10.691.727 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2014 sebesar Rp20.888.914. Pada tanggal 26 Mei 2016, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2016, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2017, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp11.861. Pada tanggal 10 Oktober 2017, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Pada tanggal 4 Februari 2019, MTI menerima Surat Putusan Pengadilan Pajak atas banding Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh 25 Tahun 2014 yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp6.073.151.

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Perusahaan mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 11 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI

On April 25, 2016, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 23 and 25 for 2014 amounting to Rp10,691,727 against the overpayment reported in tax return of Rp20,888,914. On May 26, 2016, MTI has received the overpayment. On July 22, 2016, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On July 11, 2017, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp11,861. On October 10, 2017, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation.

On February 4, 2019, MTI received a Tax Court Decree on the appeal of the Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 25 for 2014 which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp6,073,151.

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on PPN for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp2,795,914. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting Rp2,795,914. On October 11, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp37.746.806 dan telah dibayar sebesar Rp4.485.294 pada tanggal 7 Agustus 2017 serta telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 7 Agustus 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.029.244. Pada tanggal 15 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2.792.602 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2015 dengan posisi lebih bayar sebesar Rp14.570.141. Pada tanggal 15 September 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp14.502.241. Pada tanggal 21 November 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp37,746,806 and have been paid by MTI amounting to Rp4,485,294 on August 7, 2017 and was recorded as part of "Current Tax Expense" in statement of profit or loss and other comprehensive income. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax that has to be paid amounting to Rp6,029,244. On October 15, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

On June 20, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp2,792,602 against the overpayment reported in tax return of Rp14,570,141. On September 15, 2017, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax to be overpayment amounting to Rp14,502,241. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp15.098.395. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp10.268.107 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 5 Juli 2018, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.316.452 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp8.781.943.

JAI

Pada tanggal 23 Februari 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp15.098.395. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp10.268.107 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 5 Juli 2018, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.316.452 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp8.781.943.

Pada tanggal 9 Mei 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp18.326.999. JAI telah membayar atas kurang bayar tersebut beserta utang pajak penghasilan pasal 15, 21, 23 dan PPN sebesar Rp23.845.304. JAI masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut dan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka.

RUKINDO

Pada tanggal 10 September 2018, Rukindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2014 dan 2015 sebesar Rp7.201.615. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp7.591.762 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Rukindo telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.161.936 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN sebesar Rp1.039.839.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting to Rp16,748,687. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

JAI

On February 23, 2018, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2016 amounting to Rp15,098,395. The difference of the tax assessment with the JAI's record amounting to Rp10,268,107 has been recorded as part of current tax expense. On July 5, 2018, JAI has received this overpayment assessment amounting to Rp6,316,452 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23, 26 dan VAT amounting to Rp8,781,943.

On May 9, 2018, JAI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2014 amounting to Rp18,326,999. JAI has paid this underpayment assessment and income tax payable of articles 15, 21, 23 and VAT amounting to Rp23,845,304. JAI is still in the process of filing an objection of the SKPKB and recorded it as prepaid tax.

RUKINDO

On September 10, 2018, Rukindo received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax ("VAT") for fiscal years 2014 and 2015 amounting to Rp7,201,615. The difference of the tax assessment with Rukindo's record amounting to Rp7,591,762 has been recorded as part of current tax expense. On October 30, 2018, Rukindo has received this overpayment assessment amounting to Rp6,161,936 after being compensated with income tax payable of VAT amounting to Rp1,039,839.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 40j) PT Bank BNI Syariah	-	1.860.603	Related party (Note 40j) PT Bank BNI Syariah
Bagian lancar utang bank jangka panjang	-	(1.860.603)	Current maturities of long-term bank loans
Total bagian jangka panjang	-	-	Total long-term portion

PT Bank BNI Syariah

RSP

Pada tanggal 29 September 2010, RSP memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dengan jumlah maksimum sebesar Rp19.401.817. Fasilitas ini dikenakan nisbah bagi hasil sebesar 54% dan denda sebesar 5,00% per tahun atas pembiayaan yang belum dilunasi.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018. Fasilitas tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah sakit di Jakarta.

Saldo fasilitas pinjaman tersebut telah dilunasi pada bulan Agustus 2018.

PT Bank BNI Syariah

RSP

On September 29, 2010, RSP obtained a Murabahah financing facility from PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) with a maximum facility of Rp19,401,817. This facility bears profit sharing ratio of 54% and penalty fee of 5.00% per annum from the outstanding financing.

The loan will be paid in monthly installments and will mature on September 28, 2018. This facility is used to renovate the hospital building in Jakarta.

The loan facility balance has been fully paid in August 2018.

23. UTANG OBLIGASI

23. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Senior Notes penerbitan tahun 2015 USD1.100.000.000 USD500.000.000	15.929.100.000 7.240.500.000	14.902.800.000 6.774.000.000	Senior Notes issued in 2015 USD1,100,000,000 USD500,000,000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(210.621.288) (68.811.743)	(225.580.023) (74.887.477)	Less: Unamortized discount Unamortized transaction cost
Utang obligasi - neto	22.890.166.969	21.376.332.500	Bonds payable - net

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

23. BONDS PAYABLE (continued)

Obligasi/Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Interest Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Senior Notes due 2025	USD1.100.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,250%
Senior Notes due 2045	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/Semi- Annually	5,375%

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

The obligation is not guaranteed by any special collateral.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners are Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.

Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company's expansion plan and general Corporate purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Group dan Fitch Ratings Ltd. masing-masing adalah Baa2, BB- dan BBB.

On December 31, 2018, the Company's bond rating by Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Group and Fitch Ratings Ltd. are Baa2, BB- and BBB, respectively.

Berdasarkan *Offering Circular*, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.

Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

24. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Premium JICT (Catatan 45e)	2.444.876.979	2.564.139.271	JICT Premium (Note 45e)
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 44h)	809.528.380	880.201.883	Advance rental fee - NPCT1 (Note 44h)
Premium TPK Koja (Catatan 45a)	568.576.042	596.311.458	TPK Koja Premium (Note 45a)
Sewa tanah dan/atau bangunan:			Land rental and/or building:
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 45j)	517.584.342	700.300.382	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 45j)
PT Jakarta Tank Terminal (Catatan 45k)	34.634.861	39.429.389	PT Jakarta Tank Terminal (Note 45k)
PT Tunas Baru Lampung	23.378.016	26.378.403	PT Tunas Baru Lampung
PT Bogasari Sentra Flour Mills	5.978.898	7.473.623	PT Bogasari Sentra Flour Mills
PT Wilmar Nabati Indonesia	4.488.750	-	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Intiboga Sejahtera	3.772.473	7.529.445	PT Intiboga Sejahtera
PT Dok Duasatu Nusantara	3.723.693	4.243.278	PT Dok Duasatu Nusantara
PT Indokarya Internusa	3.467.415	-	PT Indokarya Internusa
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	17.880.776	39.752.100	Others (each below Rp2 billion)
Pendapatan bunga diterima di muka negotiable certificate of deposit (Catatan 5)	-	5.025.978	Unearned interest income from negotiable certificate of deposit (Note 5)
Total	4.437.890.625	4.870.785.210	Total
Bagian lancar (Catatan 18)	(146.997.709)	(374.604.109)	Current portion (Note 18)
Total bagian jangka panjang	4.290.892.916	4.496.181.101	Total long-term portion

25. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

25. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third party</u>
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	234.402.238	219.299.877	Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
<u>Pihak berelasi (Catatan 40i)</u>			<u>Related parties (Note 40i)</u>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	29.349.280	40.595.467	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	8.923.000	13.531.822	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Subtotal	38.272.280	54.127.289	Sub-total
Total	272.674.518	273.427.166	Total
Bagian lancar	(38.272.280)	(54.127.289)	Current portion
Bagian jangka panjang	234.402.238	219.299.877	Long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terutang (Catatan 44e).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 44e).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**25. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Rukindo sesuai Surat Perjanjian tanggal 13 Agustus 2007. Pinjaman ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 6,50% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit kapal keruk yang terdiri dari KK Natuna, KK Timor dan KK Halmahera.

25. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Liabilities to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) represent working capital loan to Rukindo under the Letter of Agreement dated August 13, 2007. This agreement is valid for 5 (five) years and bears an annual interest rate of 6.50%. These loans are secured by 3 unit of dredgers consisting of KK Natuna, KK Timor and KK Halmahera.

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2018 and 2017, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, using the "Projected Unit Credit" method.

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

	2018	2017	
Tingkat diskonto	8,39% - 8,77%	7,00% - 7,20%	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	7,00% - 10,00%	7,00% - 10,00%	Salary increase projection rate
Tingkat mortalitas	TMI 2011	TMI 2011	Mortality rate
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	1% - 10%	1% - 10%	Permanent disability rate (from mortality table)
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00%	1,00% - 5,00%	Level of resignation
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
Perusahaan				The Company
Program pensiun	164.769.363	114.148.670		Pension program
Program penghargaan masa bhakti	653.641.759	670.427.967		Gratuity and compensation benefits
Program kesehatan pensiunan	634.268.491	698.738.087		Pension healthcare program
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	24.291.771	27.223.534		Other long-term employee benefits
Subtotal	1.476.971.384	1.510.538.258		Sub-total
Entitas anak				Subsidiaries
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	299.945.910	295.571.068		Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program
Total	1.776.917.294	1.806.109.326		Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,		
2018	2017	
Nilai kini liabilitas	481.507.390	528.186.379
Nilai wajar aset program	(316.738.027)	(414.037.709)
Defisit program	164.769.363	114.148.670
Dampak batas atas aset	-	-
Liabilitas yang diakui	164.769.363	114.148.670
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2018	2017	
Biaya jasa kini	4.112.560	5.346.879
Biaya bunga	7.990.407	7.564.201
Beban yang diakui	12.102.967	12.911.080
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2018	2017	
Liabilitas awal tahun	114.148.670	88.990.604
Beban yang diakui dalam laba rugi	12.102.967	12.911.080
Penghasilan komprehensif lain	65.654.789	48.985.289
luran pemberi kerja	(27.137.063)	(36.738.303)
Liabilitas akhir tahun	164.769.363	114.148.670
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	528.186.379	531.330.645
Biaya jasa kini	4.112.560	5.346.879
Biaya bunga	36.973.047	45.163.105
luran peserta program	871.048	1.102.185
Ekspektasi pembayaran imbalan	(67.474.150)	(88.194.506)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(21.161.494)	33.438.071
Nilai kini liabilitas akhir tahun	481.507.390	528.186.379

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Nilai wajar aset program awal tahun	414.037.709	442.340.041
Imbal hasil ekspektasian aset program	28.982.640	37.598.904
luran pemberi kerja	27.137.062	36.738.303
luran peserta program	871.048	1.102.185
Imbalan yang dibayarkan	(67.474.150)	(88.194.506)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(86.816.282)	(15.547.218)
Nilai wajar aset program akhir tahun	316.738.027	414.037.709

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

- Aset tetap 42,38%
- Reksa dana 42,08%
- Investasi saham 9,45%
- Surat utang negara 5,53%
- Deposito on-call 0,43%
- Deposito berjangka 0,14%

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 tahun	15.928.821	22.433.371
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	43.561.602	39.140.147
Jatuh tempo > 5 tahun	196.405.395	255.635.418
Total	255.895.818	317.208.936

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	13.288.842	(16.408.721)
Biaya jasa kini	586.164	(725.779)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	(6.550.151)	6.053.047
Biaya jasa kini	(299.643)	276.163

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Fair value of program assets - beginning of year	442.340.041
Expected return from program assets	37.598.904
Employer's contributions	36.738.303
Plan participants' contributions	1.102.185
Benefits paid	(88.194.506)
Actuarial gain (loss)	(15.547.218)
Fair value of program assets - end of year	414.037.709

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Fixed assets 42.38%
- Mutual funds 42.08%
- Investment in shares 9.45%
- State bonds 5.53%
- Deposit on-call 0.43%
- Time deposits 0.14%

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

Maturity <= 1 year	22.433.371
Maturity > 1 year and <= 5 years	39.140.147
Maturity > 5 years	255.635.418

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2018:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2018:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Penghargaan masa bhakti

b. Gratuity and compensation benefits

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
Nilai kini liabilitas		653.641.759	670.427.967	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program		-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui		653.641.759	670.427.967	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2018	2017	
Biaya jasa kini		45.360.904	55.648.979	Current service cost
Biaya bunga		46.929.958	47.812.018	Interest cost
Keuntungan aktuarial		(195.745)	(31.452)	Actuarial gain
Beban imbalan kerja lain		-	-	Other employee benefit cost
Beban yang diakui		92.095.117	103.429.545	Recognized expense
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2018	2017	
Liabilitas awal tahun		670.427.967	562.494.329	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi		92.095.117	103.429.545	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain		(63.006.199)	45.588.942	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan		(45.875.126)	(41.084.849)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun		653.641.759	670.427.967	Liabilities at end of year
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun		670.427.967	562.494.329	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini		45.360.904	50.976.205	Current service cost
Biaya bunga		46.929.958	47.812.018	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan		(45.875.126)	(41.084.849)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial		(63.201.944)	45.557.491	Actuarial loss (gain)
Biaya jasa lalu		-	4.672.773	Past service cost
Nilai kini liabilitas akhir tahun		653.641.759	670.427.967	Present value of liabilities - end of year

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 tahun	38.409.724	37.374.774
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	150.015.210	145.968.847
Jatuh tempo > 5 tahun	4.987.064.913	5.120.358.662
Total	5.175.489.847	5.303.702.283

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	53.237.948	(61.730.106)
Biaya jasa kini	5.028.776	(6.022.879)
Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:		
Nilai kini liabilitas	(60.658.532)	53.187.528
Biaya jasa kini	(5.916.589)	5.019.868

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Nilai kini liabilitas	634.268.491	698.738.087
Nilai wajar aset program	-	-
Liabilitas yang diakui	634.268.491	698.738.087

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2018:

Present value of liabilities
Current service cost

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2018:

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

Present value of liabilities
Fair value of plan assets

Recognized liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Biaya jasa kini	9.104.564	9.546.420	Current service cost
Biaya bunga	48.911.666	54.738.380	Interest cost
Beban yang diakui	58.016.230	64.284.800	Recognized expense
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Liabilitas awal tahun	698.738.087	643.980.938	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	58.016.230	64.284.800	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(44.275.256)	61.572.867	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(78.210.570)	(71.100.518)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	634.268.491	698.738.087	Liabilities at end of year
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	698.738.087	643.980.938	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	9.104.564	9.546.420	Current service cost
Biaya bunga	48.911.666	54.738.380	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(78.210.570)	(71.100.518)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(44.275.256)	61.572.867	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	634.268.491	698.738.087	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2018 dan 2017 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Jatuh tempo <= 1 tahun	70.202.653	69.610.653	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	317.711.319	315.032.149	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	704.691.488	773.449.247	Maturity > 5 years
Total	1.092.605.460	1.158.092.049	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	46.188.324	(54.279.230)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	1.515.404	(1.932.962)	Current service cost

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

d. Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas	24.291.771	27.223.534	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	24.291.771	27.223.534	Recognized liabilities
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Biaya jasa kini	3.886.261	5.027.578	Current service cost
Biaya bunga	1.905.647	2.616.755	Interest cost
Kerugian atau (keuntungan) aktuarial	(7.814.219)	9.848.026	Actuarial loss or (gain)
Beban imbalan kerja lain	-	(7.097.181)	Other employee benefit cost
Beban (keuntungan) yang diakui	(2.022.311)	10.395.178	Recognized expense (income)
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Liabilitas awal tahun	27.223.534	30.785.350	Liabilities at beginning of year
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi	(2.022.311)	10.395.177	Expense (income) recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(909.452)	(13.956.994)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	24.291.771	27.223.534	Liabilities at end of year
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	27.223.534	30.785.350	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	3.886.261	5.027.578	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	(7.097.181)	Past service cost
Biaya bunga	1.905.647	2.616.755	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(909.451)	(13.956.993)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(7.814.220)	9.848.026	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	24.291.771	27.223.534	Present value of liabilities - end of year

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 tahun	4.716.702	3.447.206
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	21.179.476	28.601.437
Jatuh tempo > 5 tahun	147.505.843	163.083.816
Total	173.402.021	195.132.459

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	1.415.078	(1.597.099)
Biaya jasa kini	220.245	(248.590)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2018 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	(1.602.290)	1.444.349
Biaya jasa kini	(249.398)	224.801

e. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2018 dan 2017, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp25.137.815 dan Rp22.253.066.

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits (continued)

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	2018	2017
Jatuh tempo <= 1 year	4.716.702	3.447.206
Jatuh tempo > 1 year and <= 5 years	21.179.476	28.601.437
Jatuh tempo > 5 years	147.505.843	163.083.816
Total	173.402.021	195.132.459

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2018:

Present value of liabilities
Current service cost

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2018:

Present value of liabilities
Current service cost

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. In 2018 and 2017, contribution plan paid by the Group amounted to Rp25,137,815 and Rp22,253,066, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100,00%	1.444.029.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

27. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No.58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional of Share Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

- 2) menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:
- sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
 - sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

28. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

27. SHARE CAPITAL (continued)

- 2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
- Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
 - Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

28. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	Aset Neto/Net Assets	
	31 Desember/ December 31,	
	2018	2017
IKT	653.584.179	22.733
JAI	458.295.885	339.560.288
EDII	47.867.154	52.588.551
EPI	47.475.705	42.696.265
ILCS	44.028.484	43.178.878
API	28.902.764	1.384.887
MTI	5.938.965	5.780.912
RSP	917.987	817.908
PTP	58.517	57.699
IPC TPK	25.576	(11.459)
PPI	2.206	(6.125)
JPPI	(356)	(857)
PMLI	(2.850)	(3.665)
PII	(4.243)	1.660
Rukindo	(4.276)	(4.448)
Total	1.287.085.697	486.063.225

29. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)	
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2018	2017
IKT	17.048.717	13.044
JAI	18.459.323	12.025
EDII	8.669.646	18.459.497
EPI	7.071.063	5.731.392
ILCS	622.252	1.370.240
API	(911.689)	(144.056)
MTI	312.339	224.824
RSP	88.612	113.586
PTP	36.944	40.134
IPC TPK	35.894	3.898
PPI	13.794	6.993
JPPI	501	9
PMLI	819	971
PII	(230)	766
Rukindo	174	190
Total	51.448.159	25.833.513

30. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp653.968.052.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.525.925.454.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 April 2018.

30. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on April 3, 2018 of Nanda Fauz Iwan, S.H., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp653,968,052.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,525,925,454.

The Company has paid the above mentioned dividend on April 30, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp453.437.932.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.058.021.842.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 6 Juni 2017.

30. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 02 on May 8, 2017 of Nanda Fauz Iwan, S.H. as the Notary, the shareholders approved, among others:

- utilization of 2016 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp453,437,932.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,058,021,842.

The Company has paid the above mentioned dividend on June 6, 2017.

31. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

31. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(440.321.801)	(473.163.054)	Remeasurement of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	373.517.772	391.851.724	Exchange difference due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(45.339.398)	8.945.498	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Total	(112.143.427)	(72.365.832)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan merupakan penjabaran laporan keuangan PPI, JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation represents translation of financial statements of PPI, JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)	(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entities under common control</i>
<p>Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000 (Catatan 27). Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.</p> <p>Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:</p>			
Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan		108.820.525	<i>Net assets of Rukindo as of transfer date</i>
Nilai pengalihan		426.418.000	<i>Transfer amount</i>
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali		(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entity under common control</i>

33. PENDAPATAN OPERASI

33. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2018	2017	
Pelayanan jasa terminal	3.242.900.495	2.847.950.697	<i>Terminal services</i>
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	2.873.048.549	2.541.196.283	<i>Land, building, water and electricity services</i>
Pelayanan terminal petikemas	2.706.288.702	2.847.131.118	<i>Container services</i>
Pelayanan jasa kapal	1.416.634.965	1.195.489.590	<i>Vessel services</i>
Jasa logistik	314.494.106	298.668.383	<i>Logistic services</i>
Pelayanan kesehatan	264.847.834	335.466.647	<i>Medical services</i>
Pelayanan jasa barang	151.122.002	131.748.755	<i>Cargo services</i>
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	137.146.663	193.870.458	<i>Network services and consultant of information system</i>
Jasa keuangan	111.746.400	8.996.597	<i>Financial service</i>
Pengusahaan peralatan	98.587.873	168.490.895	<i>Equipment services</i>
Pendapatan pas pelabuhan	86.651.881	71.867.487	<i>Port entry fee</i>
Pendapatan kebersihan	12.403.493	9.875.661	<i>Cleaning services</i>
Lain-lain	20.827.931	4.822.096	<i>Others</i>
Total	11.436.700.894	10.655.574.667	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

34. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru and Kijing terminal. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2018	2017	
Pendapatan konstruksi	781.658.834	319.744.293	Construction revenues
Beban konstruksi	(781.658.834)	(319.744.293)	Construction expenses

35. BEBAN OPERASI

35. OPERATING EXPENSES

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2018	2017	
Kerja sama mitra usaha	2.561.594.144	2.361.056.039	Partnership
Pegawai	2.355.638.314	2.025.256.300	Employee
Umum	1.050.157.293	1.115.790.747	General
Bahan bakar dan bahan habis pakai	884.189.512	693.717.483	Fuels and supplies
Penyusutan dan amortisasi	773.359.280	769.787.855	Depreciation and amortization
Pemeliharaan	265.089.798	274.442.520	Maintenance
Administrasi kantor	98.934.022	102.576.791	Office administration
Asuransi	52.834.385	55.174.310	Insurance
Lain-lain	758.072	112.087	Others
Total	8.042.554.820	7.397.914.132	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

36. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Pendapatan atas pengalihan aset	535.961.600	880.270
Amortisasi premium (Catatan 45a, 45b dan 45e)	146.997.708	146.997.708
Pendapatan denda	58.039.661	23.543.381
Laba (rugi) penjualan aset tetap	6.546.554	(3.949.652)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(672.041.473)	(38.425.742)
Beban denda	(219.167.681)	(24.691.803)
Beban pajak penghasilan final	(121.554.898)	(110.317.575)
Lain-lain - neto	68.857.955	17.373.434
Total	(196.360.574)	11.410.021

Pendapatan atas pengalihan aset merupakan perolehan aset tetap karena berakhirnya perjanjian kerjasama.

Beban denda merupakan denda pajak.

37. PENDAPATAN KEUANGAN

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Pendapatan bunga deposito	580.413.469	469.651.024
Pendapatan jasa giro	108.500.831	65.138.304
Total	688.914.300	534.789.328

38. BEBAN KEUANGAN

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.128.468.251	1.061.854.580
Beban administrasi	2.313.765	2.281.980
Total	1.130.782.016	1.064.136.560

39. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
JICT	202.616.584	34.406.563
NPCT1	171.964.086	43.601.125
CTP	2.857.275	2.053.125
TPI	(1.237.352)	(978.961)
Total	376.200.594	79.081.852

36. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

*Income from assets transfer
Amortization of premium
(Notes 45a, 45b and 45e)
Income from penalties
Gain (loss) on sale of fixed assets
Gain (loss) on foreign exchange - net
Expenses from penalties
Final income tax expense
Others - net*

Income from assets transfer represents acquisition of fixed assets as a result of end of cooperation agreement.

Expense from penalties represents tax penalty.

37. FINANCE INCOME

*Interest income from deposits
Interest income on current account*

38. FINANCE COSTS

*Interest expenses and amortization of
discount and transaction cost
Administration expenses*

39. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

*JICT
NPCT1
CTP
TPI*

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sependengalan dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank BNI Syariah	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>

40. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia have significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity		
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational
	PT Timah	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/Sales
	PT Industri Kereta Api (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	Perum BULOG	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa/Sales
	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa/Sales

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Adhi Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT BNI Life Insurance	Jasa pension/ Pension services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension/ Pension services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman/Loan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman/Loan	
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan Royalti/ Rental and Royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
Operasi bersama/Joint operation	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	873.774.196	1,75	922.815.724	1,96	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	802.805.464	1,56	42.617.879	0,10	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	767.519.280	1,49	1.320.332.887	2,81	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	32.711.087	0,06	107.463.906	0,23	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	7.222.415	0,01	8.806.935	0,02	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	2.814.711	0,01	3.426.562	0,01	PT Bank Syariah Mandiri
Total	2.486.847.153	4,88	2.405.463.893	5,13	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.066.025	0,08	1.251.298.488	2,66	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.766.760	0,03	153.404.369	0,33	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.062.416	0,02	29.960.840	0,07	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	63.895.201	0,13	1.434.663.697	3,06	Total
Euro					Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	320.652	0,00	908.511	0,01	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	320.652	0,00	908.511	0,01	Total
Deposito Berjangka					Time Deposits
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	930.074.000	1,81	555.000.000	1,18	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	854.768.648	1,66	361.781.994	0,77	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	557.631.769	1,08	489.011.918	0,58	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	25.000.000	0,05	15.000.000	0,04	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.535.860	0,02	20.000.000	0,18	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	-	-	4.000.000	0,01	PT Bank BNI Syariah
Total	2.378.010.277	4,62	1.444.793.912	2,76	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.032.416.814	9,78	2.271.032.273	4,83	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.673.467.675	7,14	1.083.840.000	2,31	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	8.705.884.489	16,92	3.354.872.273	7,14	Total
Dolar Singapura					Singapore Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	471.954.525	0,92	447.540.715	0,96	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	471.954.525	0,92	447.540.715	0,96	Total

*) dari total aset

*) from total assets

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito berjangka				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	203.053.994	0,39	64.518.592	0,14
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000	0,01	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	20.000.000	0,04
Dolar AS				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.099.745.000	4,08	2.682.504.000	5,70
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	796.455.000	1,55	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	3.793.440.000	8,06
Total	3.103.253.994	6,03	6.560.462.592	13,94
Negotiable certificate of deposits				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	100.000.000	0,21
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	100.000.000	0,21
Total	-	-	200.000.000	0,42

*) dari total aset

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Short-term investment (Note 5)

Time deposits	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0,14
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	0,04
Total	0,18
US Dollar	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,70
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,06
Total	13,76
Negotiable certificate of deposits	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	0,21
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0,21
Total	0,42

*) from total assets

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Piutang usaha (Catatan 6)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	46.293.536	0,09
PT Pertamina Trans Kontinental	27.555.316	0,05
NPCT1	21.167.307	0,04
Tentara Nasional Indonesia	19.839.702	0,04
PT Semen Padang	12.849.176	0,02
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.605.742	0,02
PT Pertamina (Persero)	10.441.787	0,02
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	7.619.639	0,01
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	5.752.618	0,01
PT Dharma Lautan Nusantara	5.391.534	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	5.294.060	0,01
PT Industri Kereta Api (Persero)	4.075.562	0,01
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	3.360.219	0,01
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	1.725.917	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	1.413.766	0,00
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1.345.519	0,00
Perum BULOG	1.090.132	0,00
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-
Instansi Pemerintah	2.290.123	0,41
Lain-lain	20.060.782	0,04
Subtotal	210.172.437	0,79
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(54.297.115)	(0,11)
Total	155.875.322	0,68

*) dari total aset

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*
JICT	617.883.980	1,20
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,02
Instansi Pemerintah	2.359.080	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00
NPCT1	1.171.307	0,00
Tentara Nasional Indonesia	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00
Lain-lain	36.243.544	0,07
Subtotal	672.932.848	1,29
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(32.764.117)	(0,06)
Total	640.168.731	1,23

*) dari total aset

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	3.045.006	0,01
PT Pertamina Trans Kontinental	2.280.298	0,01
NPCT1	99.000	0,03
Indonesian Armed Forces	16.802.609	0,03
PT Semen Padang	36.048.133	0,08
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.863.258	0,04
PT Pertamina (Persero)	40.775.356	0,09
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	6.008.460	0,01
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.113.683	0,02
PT Dharma Lautan Nusantara	6.277.876	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	7.720.944	0,02
PT Indonesia Kereta Api (Persero)	404.465	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	18.152.848	0,04
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	-	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	-
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	-	-
Perum BULOG	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	823.151	0,00
Government Institutions	1.191.792	0,00
Others	31.504.248	0,07
Sub-total	202.111.127	0,46
Less: Allowance for impairment	(52.511.567)	(0,11)
Total	149.599.560	0,35

*) from total assets

d. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*
JICT	739.275.370	1,57
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,03
Government Institutions	2.359.080	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00
NPCT1	826.914	0,00
Indonesian Armed Forces	2.770.893	0,01
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00
Others	16.396.050	0,04
Sub-total	775.968.744	1,65
Less: Allowance for impairment	(37.656.398)	(0,08)
Total	738.312.346	1,57

*) from total assets

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	7.757.513	0,02
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	3.673.517	0,01
PT Graha Sarana Duta	1.798.307	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	1.469.544	0,00
Lainnya	2.302.846	0,00
Total	17.001.727	0,03

*) dari total aset

f. Utang usaha (Catatan 17)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	981.127.161	2,80
PT Hutama Karya (Persero)	45.800.631	0,13
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	31.091.334	0,09
PT Waskita Karya (Persero)	19.640.664	0,06
PT Jakarta Internasional Container Terminal	18.982.268	0,05
Koperasi Pegawai Maritim	15.967.235	0,05
PT Wijaya Karya (Persero)	9.569.863	0,03
PT Multimedia Nusantara	7.150.728	0,02
PT Nusantara Regas	5.023.508	0,01
PT Pertamina (Persero)	4.699.556	0,01
PT Pertamina Patra Niaga	1.930.142	0,01
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.715.265	0,00
PT PLN (Persero)	1.612.737	0,00
PT Berdikari (Persero)	-	0,00
PT Adhi Karya (Persero)	-	0,00
PT Timah Tbk	-	0,00
Lain-lain	116.903.155	0,35
Total	1.261.214.247	3,61

**) dari total liabilitas

g. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 18)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT. Semen Padang	169.011	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	74.770	0,00
PT. Pertamina Trans Kontinental	38.799	0,00
Instansi Pemerintah	19.194	0,00
PT Pertamina (Persero)	14.230	0,00
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.995	0,00
Tentara Nasional Indonesia	8	0,00
PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)	7	0,00
Lain-lain	710.093	0,00
Total	1.028.107	0,00

**) dari total liabilitas

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	1.510.887	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	16.641.880	0,04
PT Graha Sarana Duta	1.554.160	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	6.575.159	0,01
Lainnya	291.413	0,00
Total	26.573.499	0,05

*) from total assets

f. Trade payables (Note 17)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	664.985.366	2,00
PT Hutama Karya (Persero)	66.557.485	0,20
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	31.355.278	0,09
PT Waskita Karya (Persero)	2.006.520	0,01
PT Jakarta Internasional Container Terminal	63.655.103	0,19
Koperasi Pegawai Maritim	1.552.885	0,00
PT Wijaya Karya (Persero)	-	0,00
PT Multimedia Nusantara	3.949.729	0,01
PT Nusantara Regas	-	0,00
PT Pertamina (Persero)	2.249.120	0,01
PT Pertamina Patra Niaga	-	0,00
Koperasi Karyawan TPK KOJA	95.785	0,01
PT PLN (Persero)	-	0,00
PT Berdikari (Persero)	90.531.500	0,27
PT Adhi Karya (Persero)	5.812.695	0,02
PT Timah Tbk	4.874.800	0,01
Lain-lain	61.557.702	0,20
Total	999.183.968	3,11

**) from total liabilities

g. Advances from customer (Note 18)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT. Semen Padang	343.705	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	552.669	0,00
PT. Pertamina Trans Kontinental	432.765	0,00
Government Institutions	18.495	0,00
PT Pertamina (Persero)	569.859	0,00
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	920.947	0,00
Indonesian Armed Forces	8	0,00
PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)	55.689	0,00
Lain-lain	825.980	0,00
Total	3.720.117	0,00

**) from total liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

h. Uang titipan pelanggan (Catatan 20)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	4.351.784	0,01	7.841.247	0,02
Instansi Pemerintah	2.918.247	0,01	1.182.890	0,00
BPJS Kesehatan	2.336.222	0,01	-	-
PT Bhandha Ghara Rekasa	1.211.447	0,00	-	-
PT Dharma Lautan Nusantara	-	-	1.131.091	0,00
Lain-lain	3.930.781	0,01	6.504.188	0,01
Total	14.748.481	0,04	16.659.416	0,03

***) dari total liabilitas

**i. Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas
jangka panjang lainnya**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Jangka pendek (Catatan 20)				
JICT	38.980.725	0,11	38.980.725	0,12
PT Dok & Perkapalan				
Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,09	31.666.118	0,10
DP4	4.842.298	0,01	8.610.632	0,03
Total	75.489.141	0,21	79.257.475	0,25
Jangka panjang (Catatan 25)				
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	29.349.280	0,08	40.595.467	0,09
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	8.923.000	0,03	13.531.822	0,03
Total	38.272.280	0,11	54.127.289	0,12

***) dari total liabilitas

j. Utang bank jangka panjang (Catatan 22)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank BNI Syariah	-	0,00	1.860.603	0,01

***) dari total liabilitas

k. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp169.747.210 dan Rp131.195.044, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Deposits from customer (Note 20)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	7.841.247	0,02
Government Institutions	1.182.890	0,00
BPJS Kesehatan	-	-
PT Bhandha Ghara Rekasa	-	-
PT Dharma Lautan Nusantara	1.131.091	0,00
Others	6.504.188	0,01
Total	16.659.416	0,03

***) from total liabilities

**i. Other short-term liabilities and other long-term
liabilities**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Short-term (Note 20)		
JICT	38.980.725	0,12
PT Dok & Perkapalan		
Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,10
DP4	8.610.632	0,03
Total	79.257.475	0,25
Long-term (Note 25)		
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	40.595.467	0,09
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	13.531.822	0,03
Total	54.127.289	0,12

***) from total liabilities

j. Long-term bank loan (Note 22)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank BNI Syariah	1.860.603	0,01

***) from total liabilities

k. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp169,747,210 and Rp131,195,044 for 2018 and 2017, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		31 Desember 2018/ December 31, 2018			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	811.587.784	11.752.602.695	Cash and cash equivalents	
	EUR	19.363	320.652		
	SGD	44.511.540	471.954.525		
Investasi jangka pendek	USD	200.000.000	2.896.200.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	6.316.900	91.475.032	Trade receivables	
	SGD	3.059.518	32.439.975		
Piutang lain-lain	USD	299.916	4.343.080	Other receivables	
Total aset			15.249.335.959	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.580.703.471	22.890.166.969	Bonds payables	
Utang usaha	USD	384.978	6.535.090	Trade payables	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.691.853	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	234.402.238	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			23.170.085.022	Total liabilities	
Liabilitas neto			7.920.749.063	Net liabilities	

		31 Desember 2017/ December 31, 2017			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	519.645.030	7.040.150.866	Cash and cash equivalents	
	EUR	56.172	908.511		
	SGD	44.164.410	447.540.715		
Investasi jangka pendek	USD	478.369.058	6.480.944.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	6.420.159	93.246.518	Trade receivables	
	SGD	7.645	77.472		
Piutang lain-lain	USD	320.728	4.345.217	Other receivables	
Total aset			14.067.213.299	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.577.822.003	21.376.332.500	Bonds payables	
Utang usaha	USD	337.319	4.570.003	Trade payables	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.914.453	39.485.008	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	219.299.877	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			21.639.687.388	Total liabilities	
Liabilitas neto			7.572.474.089	Net liabilities	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31 Desember 2018/ December 31, 2018		
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan		Financial Assets
Kas dan setara kas	18.018.671.479	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.836.007.289	Short-term investments
Piutang usaha - neto	789.953.354	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	649.698.814	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	322.868.072	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	6.139.521	Other current assets
Investasi jangka panjang	3.211.737.431	Long term investment
Aset tidak lancar lainnya	67.145.691	Other non-current assets
Total	26.902.221.651	Total
Liabilitas Keuangan		Financial Liabilities
Utang usaha	1.665.907.713	Trade payables
Beban akrual	2.316.108.053	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	275.588.175	Other current liabilities
Utang obligasi	22.890.166.969	Bonds payable
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	Short-term bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	272.674.518	Other non-current liabilities
Total	27.424.445.428	Total
31 Desember 2017/ December 31, 2017		
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan		Financial Assets
Kas dan setara kas	14.207.330.332	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	6.999.082.698	Short-term investments
Piutang usaha - neto	698.753.677	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	788.078.109	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	330.499.800	Accrued revenues
Aset tidak lancar lainnya	54.712.531	Other non-current assets
Total	23.078.457.147	Total
Liabilitas Keuangan		Financial Liabilities
Utang usaha	1.366.755.174	Trade payables
Beban akrual	2.168.022.495	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	261.555.927	Other current liabilities
Utang obligasi	21.376.332.500	Bonds payable
Utang bank	1.860.603	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	219.299.877	Other non-current liabilities
Total	25.393.826.576	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - *negotiable certificate of deposits*, investasi jangka pendek - aset keuangan tersedia untuk dijual, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri dari investasi pada saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena investasi pada instrumen ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - *negotiable certificate of deposits*, short-term investments - available-for-sale financial assets, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.
- Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.
- Available-for-sale financial asset that comprised investments in shares with percentage of ownership interest less than 20% are recognized at cost due to such investments in equity instruments have no quoted market price in an active market and their fair value cannot be reliably measureable.
- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Estimasi nilai wajar utang obligasi, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions: (continued)

- The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
- Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018/December 31, 2018				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				
Aset tidak lancar				
Properti investasi	10.035.926.908	-	10.035.926.908	-
				Assets for which fair value are disclosed Non-current Assets Investment properties
31 Desember 2017/December 31, 2017				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				
Aset tidak lancar				
Properti investasi	8.336.633.780	-	8.336.633.780	-
				Assets for which fair value are disclosed Non-current Assets Investment properties

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan di atas.

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

As of December 31, 2018 and 2017, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

As of December 31, 2018, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 41. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 41. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2018	(+)-100bps (-)-100bps	(816.458.423) 816.458.423	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2018</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2017	(+)-100bps (-)-100bps	(753.925.528) 753.925.528	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2017</i>

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 41. Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 41. Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	18.018.671.479	-	-	-	18.018.671.479	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	-	-	3.475.253.995	-	3.475.253.995	Short-term investments
Total aset	18.018.671.479	-	3.475.253.995	-	21.493.925.474	Total assets
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>			
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	Total	
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	4.000.000	-	4.000.000	Short-term bank loan
Obligasi	-	-	-	22.890.166.969	22.890.166.969	Bonds
Total liabilitas	-	-	4.000.000	22.890.166.969	22.894.166.969	Total liabilities

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2018.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	18.018.671.479	14.207.330.332
Investasi jangka pendek	3.836.007.289	6.999.082.698
Piutang usaha - neto	789.953.354	698.753.677
Piutang lain-lain - neto	649.698.814	788.078.109
Pendapatan masih akan diterima	322.868.072	330.499.800
Aset lancar lainnya	6.139.521	-
Investasi jangka panjang	3.211.737.431	1.554.888.854
Aset tidak lancar lainnya	249.893.918	474.940.688
Total	27.084.969.878	25.053.574.158

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk (continued)

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Other current assets
Long-term investment
Other non-current assets

Total

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	2018				Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	-	-	-	4.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha	1.665.907.713	-	-	-	1.665.907.713	Trade payables
Beban akrual	2.290.832.616	-	-	-	2.290.832.616	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	275.588.175	-	-	-	275.588.175	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	22.890.166.969	22.890.166.969	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	38.272.280	234.402.238	-	-	272.674.518	Other Long-term liabilities
Total	4.274.600.784	234.402.238	-	22.890.166.969	27.399.169.991	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Aset tidak lancar lainnya" (Catatan 16).

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office**

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.
- Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other non-current assets" (Note 16).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.
- Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- *The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Vessels and other supporting facilities.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company will consult with the Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide advice.*
- *The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
 - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.
- The Company may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.
- At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.
- At the end of the concession period, the Company is obliged to:
 - Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.
 - Transfer the authorization of the intangible assets of the Company to the Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.
 - For movable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.
 - Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
 - Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
 - Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp8.489.070.748 dan Rp8.208.297.613 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)
 - Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Port Authority.
 - Move or take out from the concession area all current assets which the Company decides to move or take out.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp8,489,070,748 and Rp8,208,297,613 and recorded them as part of "Intangible assets - concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the Company (Note 15).

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

On November 23, 2015, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.

On November 28, 2016, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan
Pengembangan Terminal Kalibaru**

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019:

- Polis *Construction All Risks* dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), pihak berelasi, sebagai *insurer* utama dan batas pertanggungan sebesar USD2.425.000.000.
- Polis *Third Party Liability* dengan Jasindo sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan PT Asuransi Astra Buana ("AAB") sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan AAB sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD50.000.000 per peristiwa.

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

**c) Insurance Agreement on Construction and
Development of Kalibaru Terminal**

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019:

- *Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of USD2,425,000,000.*
- *Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana ("AAB") as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with AAB as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD50,000,000 per one event.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS**

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

On November 10, 2016, the Company and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok pinjaman ke STMS masing-masing sebesar USD15.096.000 dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan principal to STMS amounted to USD15,096,000 and recorded as part of other long-term liabilities account.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 44h).

f) Project Implementation Agreement - PPI

The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 44h).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.

**f) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

In accordance with the PIA, the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the novation process of these agreements have not yet occurred.

g) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

g) Project Management Agreement - PPI

On February 24, 2014, the Company and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru Terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1**

Berdasarkan PIA (Catatan 44f), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1**

Based on PIA (Note 44f), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of amounting to USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PPI tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PPI telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan sebesar USD10.347.826 (setara dengan Rp137.742.143).

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a *Liquidated Damages Notice* from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a *Liquidated Damage Event*.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, PPI has not received any *Liquidated Damages Notice* from NPCT1 in relation to these delays.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation. Therefore, for the year ended December 31, 2016, PPI has recorded the revenue from quarterly site rent amounting to USD10,347,826 (equivalent to Rp137,742,143).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan *pressure tank* dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

- Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;
- Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;
- Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;
- PPI will complete the following works within the time specified for each item:
 - Strengthening of north side by March 16, 2017;
 - Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;
 - Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;
 - Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;
 - Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.
- Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;
- Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;
- If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI undertaking* telah diselesaikan.

- If any one of the *PPI Undertakings* has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all *PPI Undertakings* have been completed.

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018.
 - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- PPI will complete the following works within the time specified for each item:

- East area exit access road of CGA by December 15, 2017;
- Go-live IT system operation by December 31, 2017;
- Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;
- Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
- Entry access road west side CGA by February 28, 2018.
- Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018.
- Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018.
- Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018.
- Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018.
- Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.

- If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work;

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan
HPI

52,12%
47,88%

Company
HPI

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Agreement on Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

52,12%
47,88%

Company
HPI

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.
- Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.
- The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (lanjutan)**

- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang ada di KSO TPK Koj, sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koj tahun 2013.

Pada tanggal 17 November 2014, auditor independen selesai dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2013. Para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koj, untuk tahun 2013 sebesar USD23,66 juta atau setara dengan Rp247,29 miliar untuk Perusahaan dan USD23,54 juta atau setara dengan Rp245,98 miliar untuk HPI pada bulan Desember 2014 (setelah memperhitungkan distribusi interim sebesar USD13,73 juta atau setara dengan Rp143,47 miliar untuk Perusahaan dan USD11,27 juta atau setara dengan Rp117,81 miliar untuk HPI pada bulan Februari 2014). Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2013 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

- Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.
- Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual targets.
- If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.
- The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

On June 3, 2014, the Participants appointed an independent auditor to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of KSO TPK Koj's fixed assets in relation to the distribution of KSO TPK Koj's 2013 net income.

On November 17, 2014, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2013. The Participants approved and distributed the above outstanding return of investment from KSO TPK Koj's escrow account for the year 2013 of USD23.66 million or equivalent to Rp247.29 billion to the Company and USD23.54 million or equivalent to Rp245.98 billion to HPI in December 2014 (after considering interim distribution of USD13.73 million or equivalent to Rp143.47 billion for the Company and USD11.27 million or equivalent to Rp117.81 billion for HPI in February 2014). The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2013 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juni 2015, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba TPK Koja tahun 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2015, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2014 dimana para Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2014 sebesar USD6,56 juta atau setara dengan Rp77,97 miliar untuk Perusahaan dan USD9,17 juta atau setara dengan Rp108,91 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2014 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2015.

Pada tanggal 18 November 2016, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2015 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2015 sebesar USD10,78 juta atau setara dengan Rp143,60 miliar untuk Perusahaan dan USD12,74 juta atau setara dengan Rp169,74 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2017 dan 2016.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 11, 2015, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of TPK Koja's 2014 net income.

On December 15, 2015, the independent auditors has completed and released the investment audit report for the year 2014 whereby the Participants approved the outstanding return on investment for the year 2014 of USD6.56 million or equivalent to Rp77.97 billion for the Company and USD9.17 million or equivalent to Rp108.91 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for year 2014 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 22, 2016, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2015 net income.

On November 18, 2016, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2015 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2015 of USD10.78 million or equivalent to Rp143.60 billion for the Company and USD12.74 million or equivalent to Rp169.74 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On March 27, 2018, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2017 and 2016 net income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2018, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2017 dan 2016 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2017 dan 2016 sebesar USD19,43 juta dan USD14,54 juta atau setara dengan Rp263,27 miliar dan Rp195,31 miliar untuk Perusahaan serta USD21,81 juta dan USD19,28 juta atau setara dengan Rp295,53 miliar dan Rp259,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Kojas akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Kojas kepada Perusahaan.

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp491.575.000) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp471.686.250).

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

On April 30, 2018, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2017 and 2016 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2017 and 2016 of USD19.43 million and USD14.54 million or equivalent to Rp263.27 billion and Rp195.31 billion for the Company and also USD21.81 million and USD19.28 million or equivalent to Rp295.53 billion and Rp259.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfillment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Kojas will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000, while royalty will no longer be paid by TPK Kojas to the Company.

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

For the year ended December 31, 2018 and 2017, the Company has recorded the revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,000,000 (equivalent to Rp491,575,000) and USD35,000,000 (equivalent to Rp471,686,250), respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp568.576.042 dan Rp596.311.458 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2018 and 2017, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2018 and 2017, the balance of unamortized premium amounted to Rp568,576,042 and Rp596,311,458 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 45c), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 45f). Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 45e).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee amounting to USD21,250,000 (Note 45c), while royalty, equipment rental of 4 RTGC and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 45f). Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 45e).

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of State Owned Enterprise and letter of the Minister of Transportation below.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri Badan Usaha Milik Negara secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan diharuskan melakukan revisi terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of State Owned Enterprise regarding Cooperation of Management/Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of State Owned Enterprise principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.
- To execute letter of Vice Minister of State Owned Enterprise to President Director of State Owned Enterprises No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of State Owned Enterprises dated January 7, 2016, the Company was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya – JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amandemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut sebesar Rp1.191.912.500 dan Rp1.143.165.000.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilization period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company. For the year ended December 31, 2018 and 2017, the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to Rp1,191,912,500 and Rp1,143,165,000, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham – JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan, HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amandemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan.
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

Atas penyesuaian kepemilikan ini, kepemilikan saham Perusahaan di JICT meningkat menjadi sebesar 50,9%. Amandemen Perjanjian Pemegang Saham ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Peningkatan kepemilikan saham Perusahaan di JICT belum efektif pada tanggal 31 Desember 2015 karena Perusahaan belum melakukan penyetoran tambahan modal dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh JICT belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company, HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- Authorized Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.
- Additional 18,059,505 B series shares for the Company.
- Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.

In consideration to the ownership adjustment, the Company's share ownership in JICT increased to 50.9%. The Amended Shareholder Agreement will commence on the date of the fulfillment of the last condition precedent. The increase of the Company's ownership in JICT has not become effective as of December 31, 2015 since the Company has not paid the additional paid-in capital and the increase of JICT's authorized capital, issued and fully paid capital has not been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).
- Untuk tujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh JICT, agar diterbitkan 18.077.583 lembar saham Seri B sebesar Rp9.038.792 dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan proporsi sebagai berikut:
 - 18.059.505 lembar saham Seri B sebesar Rp9.029.752 akan diambil oleh Perusahaan.
 - 18.079 lembar saham Seri B sebesar Rp9.039 akan diambil oleh Kopegmar.

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Disamping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- For the purpose of the increase of JICT's authorized, issued and fully paid capital, to issue 18,077,583 B Series shares amounting to Rp9,038,792 with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) with proportion as follows:
 - 18,059,505 B Series shares amounting to Rp9,029,752 will be subscribed by the Company.
 - 18,079 B Series shares amounting to Rp9,039 will be subscribed by Kopegmar.

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 45b). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp119.262.292. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp2.444.876.979 dan Rp2.564.139.271 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720. Pada tanggal 31 Desember 2018 Perusahaan belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 20).

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 45b). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium. For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp119,262,292, each year. As of December 31, 2018 and 2017, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,444,876,979 and Rp2,564,139,271 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

f) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to The Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720. As of December 31, 2018, the Company has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 20).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- g) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.
- h) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) untuk pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna untuk melayani kapal barang/petikemas milik IKPP. Perjanjian tersebut meliputi pembayaran pendapatan jasa kapal dan barang dengan persentase yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal yaitu paling lambat tanggal 15 April 1999, Penggunaan hasil reklamasi dikenakan tarif minimal sebesar 30% dari besaran tarif sesuai Kelompok Usaha yaitu sebesar Rp111,54 juta per tahun.
- i) Perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi dalam bentuk BOT (*Build, Operate and Transfer*) berupa Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). Perjanjian tersebut berlaku sejak 14 Mei 1992 hingga 13 Mei 2017.

Pada saat perjanjian berakhir seluruh fasilitas Terminal Curah Kering seperti dermaga, gudang dan peralatan pelabuhan menjadi milik Perusahaan. Selain itu, selama masa perjanjian Perusahaan juga mendapatkan bagian pendapatan atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan barang berdasarkan persentase tertentu.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, penyerahan aset belum dilakukan dan Perusahaan sedang dalam proses penyelesaian perjanjian tersebut.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- g) *The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.*
- h) *The Company entered into Joint control entity agreement with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) for managing and operating a multipurpose terminal that serves vessels/containers owned by IKPP. The agreement covers revenue from vessels and cargo service payments with certain agreed percentage. This agreement is effective for 30 (thirty) years from the date of terminal management and operation. On April 15, 1999, The minimum rate from land reclamation usage is 30% based on the appropriate rate of the Group or amounting to Rp111.54 million per annum.*
- i) *The Company entered into a Joint control entity agreement in the form of BOT (Build, Operate and Transfer) on Construction & Operation of Bulk Terminal at Port of Panjang with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). The agreement commenced since May 14, 1992 until May 13, 2017.*

At the end of the agreement, all facilities for Bulk Terminal, such as dock, warehouses and port equipment will be owned by the Company. In addition, during the period of the agreement the Company receives a portion of income on the vessel services, cargo services and loading services based on a certain percentage.

Until the completion date of the consolidation financial statements, the transfer of assets has not been done and the Company is still in the process of ending the agreement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- j) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo yang belum di amortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp517.584.342 dan Rp700.300.382 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2).

- k) Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT AKR Corporindo Tbk mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 130.000 m² untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (*flammable*) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *breakwater*. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- j) On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2018 and 2017, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp517,584,342 and Rp700,300,382, respectively (before deducting final income tax article 4(2)).

- k) Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk-04 dated May 27, 2004, the Company and PT AKR Corporindo Tbk entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 130,000 m² to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which passes the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai penggunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan break water seluas 1.400 m² serta perubahan luas lahan menjadi 130.004 m².

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Petikemas dan kargo

Pada tanggal 12 Juni 2012, Perusahaan dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo pada wilayah kerja Perusahaan.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, Perusahaan dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%, kecuali dengan PT PBM Olah Jasa Andal masing-masing sebesar 50% dan 50%.

Jangka waktu perjanjian adalah 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Based on a letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company's Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south breakwater with area of 1,400 m² and change of land area to 130,004 m².

l) Loading and Unloading Activities Cooperation

Container and cargo

On June 12, 2012, the Company and several Stevedoring Companies (PBM) entered into Service Level Agreement (SLA) whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for container and cargo in the Company's working area.

For the activities that have been performed, the Company and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively, except with PT PBM Olah Jasa Andal which is 50% and 50%, respectively.

The term of the agreement is from September 14, 2011 until September 13, 2015.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat
(lanjutan)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Mitra Sentosa Abadi	HK.566/16/3/16/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
2	PT Adipurusa	HK.566/16/3/5/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
3	PT Kaluku Maritama Utama	HK.566/16/3/15/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
4	PT Sarana Bandar Nasional	HK.566/16/3/11/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
5	PT Mitra Karunia Samudera	HK.566/16/3/14/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
6	PT Dwipa Hasta Utamaduta	HK.566/16/3/19/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
7	PT Tangguh Samudera Jaya	HK.566/16/3/18/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
8	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	HK.566/16/3/1/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
9	PT Prima Nur Panurjwan	HK.566/16/3/3/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
10	PT Mahardi Sarana Tama	HK.566/16/3/17/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
11	PT Andhika Andalan Tama	HK.566/16/3/6/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
12	PT Daisy Mutiara Samudera	HK.566/16/3/9/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
13	PT Escorindo Stevedoring	HK.566/16/3/10/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
14	PT PBM Olah Jasa Andal	HK.566/16/3/4/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
15	PT Srikreasi Unggul Persada	HK.566/16/3/13/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**l) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Container and cargo (continued)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Pada berbagai tanggal dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan dan PBM mengadakan Berita Acara Kesepakatan (BAK) tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal sebagai berikut:

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
1	PT Antho Tama	UM.339/19/4/2 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
2	PT Daisy Mutiara Samudra	UM.339/19/4/2 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
3	PT Escorindo Mitra Setia	UM.339/19/4/1 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
4	PT Escorindo Stevedoring	UM.339/19/4/2 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
5	PT Jasa Anugerah Samudera	UM.339/19/4/3 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
6	PT Kaluku Maritima Utama	UM.339/19/4/1 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
7	PT Karya Abadi Luhur	UM.339/19/4/2 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
8	PT Lapantiga Lintas Buana	UM.339/19/4/1 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
9	PT Mahardi Saranatama	UM.339/19/4/2 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
10	PT Mitra Karunia Samudera	UM.339/19/4/2 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
11	PT Sinar Berlian Indrapura	UM.339/19/4/1 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
12	PT Sarana Bandar Nasional	UM.339/19/4/1 7/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
13	PT Sinatra Dewa Samudra	UM.339/19/4/1 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
14	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	UM.339/19/4/1 9/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
15	PT Srikreasi Unggul Persada	UM.339/19/4/2 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
16	PT PBM Tao Abadi Jaya	UM.339/19/4/3 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
17	PT Tangguh Samudera Jaya	UM.339/19/4/1 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

I) Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

Container and cargo (continued)

On various dates from April 19, 2018 until December 31, 2018, the Company and PBM entered into Minutes of Agreement (BAK) regarding SLA cooperation of terminal operating activities as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Petikemas dan kargo (lanjutan)

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
18	PT Tubagus Jaya Maritim	UM.339/19/4/3 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
19	PT Dharma Lautan Nusantara	UM.339/28/5/8/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
20	PT Hemprisa Karyasaksama	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
21	PT Terminal Jasa Maritim	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
22	PT Andhika Andalantama	UM.339/19/4/2 8/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
23	PT Prima Bandar Samudera	UM.339/31/10/ 9/PTP-18	31 Oktober 2018	Terminal I & II	1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/October 1, 2018 until released date of SLA
24	PT Maritim Polykarya Tama	UM.339/30/11/ 13/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
25	PT Roswell Pasific Indonesia	UM.339/30/11/ 2/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
26	PT Sinar Citra Lestari	UM.339/30/11/ 5/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA

Kendaraan dan alat berat

Pada tanggal 7 November 2013, Perusahaan dan PBM terseleksi mengadakan SLA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dan alat berat pada wilayah kerja Perusahaan. Jangka waktu perjanjian adalah 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

45. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

I) Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

Container and cargo (continued)

Vehicles and heavy equipment

On November 7, 2013, the Company and several selected PBM entered into SLA whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for vehicles and heavy equipment in the Company's working area. The term of the agreement was from December 3, 2011 until December 3, 2015.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Sapta Kencana Buana	HK.566/16/3/8/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	13.004 ton per tahun/ton per year
2	PT Adimas Bahtera Harapan	HK.566/16/3/2/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	95.000 unit kendaraan per tahun/vehicles per year
3	PT Jaya Cargo Gemilang Indonesia	HK.566/16/3/7/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	57.775 ton per tahun/ton per year
4	PT Triutama Karuna Samudera	HK.566/16/3/12/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	59.667 ton per tahun/ton per year

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Kendaraan dan alat berat (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thruput minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thruput minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

m) Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi. Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

45. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

l) Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

Vehicles and heavy equipment (continued)

Based on the above mentioned agreements, the Company has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM has an obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and other equipment needed to perform the loading and unloading activities.

In performing the loading and unloading activities, PBM has an obligation to provide minimum throughput which was agreed by the parties.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

m) Concession Agreement

On November 11, 2015, the Company and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping. Based on the Concession Agreement, the Company is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja KMK (KMK) No. 48 tanggal 18 September 2012 dan Perjanjian KMK No. 50 tanggal 18 September 2012, Perusahaan menerima fasilitas *club deal* KMK sebesar Rp1.000.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tingkat bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65%.

Fasilitas tersebut telah beberapa kali diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian KMK No. 22 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum I Perjanjian KMK No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum II Perjanjian KMK No. 22 tanggal 22 Agustus 2014 dan Adendum II Perjanjian KMK No. 20 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2015.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan *negative pledge*, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian KMK.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan Mandiri dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2016 melalui Adendum III Perjanjian KMK No. TOP.CRO/CCL.553/ADD/2015 tanggal 11 September 2015. Berdasarkan Adendum III Perjanjian KMK tersebut, jumlah fasilitas kredit modal kerja diubah menjadi Rp300.000.000 dengan suku bunga JIBOR 3 bulan + 2,50%.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan BNI dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2016 melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 48 tanggal 17 September 2015. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut, suku bunga diubah menjadi JIBOR 3 bulan + 2,50%.

Pada tanggal 15 September 2016, Perusahaan mengadakan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian KMK dengan Mandiri yang mengubah jumlah fasilitas kredit menjadi Rp250.000.000 dengan alokasi sebagai berikut:

- Perusahaan Rp100.000.000
- PTP Rp50.000.000
- JPPI Rp50.000.000
- IKT Rp50.000.000

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

n) Working Capital Credit Agreement

Based on Working Capital Credit (KMK) Agreement No. 48 dated September 18, 2012 and KMK Agreement No. 50 dated September 18, 2012, the Company received KMK club deal credit facility amounting to Rp1,000,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) with maximum facility of Rp500,000,000, respectively. This facility is used for working capital with period of 1 (one) year and bears interest at average time deposit of +3.65%.

These facilities have been extended several times through Amendment I of the KMK Agreement No. 22 dated August 28, 2013, Amendment I of the KMK Agreement No. 19 dated August 28, 2013, Amendment II of the KMK Agreement No. 22 dated August 22, 2014 and Amendment II of the KMK Agreement No. 20 dated August 22, 2014 with period until September 17, 2015.

The credit facilities are secured by negative pledge, which are all assets, both moving and non-moving, and those existing or will exist as collateral of the total loan from the KMK agreement.

The Company extended the KMK facility with Mandiri for the period until September 17, 2016 through Amendment III KMK Agreement No. TOP.CRO/CCL.553/ADD/2015 dated September 11, 2015. Based on the Amendment III KMK Agreement, the amount of credit facility was amended to Rp300,000,000 with interest at JIBOR 3 months + 2.50%.

The Company extended the KMK facility with BNI for the period until September 17, 2016 through Credit Amendment Agreement No. (3) 48 dated September 17, 2015. Based on the Credit Amendment Agreement, the interest was amended to be at JIBOR 3 months + 2.50%.

On September 15, 2016, the Company entered into Amendment and Restatement of KMK Agreement with Mandiri which amended the credit facility to Rp250,000,000 with allocation as follows:

- The Company Rp100,000,000
- PTP Rp50,000,000
- JPPI Rp50,000,000
- IKT Rp50,000,000

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Fasilitas KMK tersebut berjangka waktu sampai dengan 14 September 2017 dengan suku bunga akan ditetapkan pada saat penarikan dan bersifat tetap sampai dengan akhir jangka waktu penarikan.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan BNI dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2017 melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 48 tanggal 16 September 2016. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut, jumlah fasilitas kredit modal kerja diubah menjadi Rp250.000.000.

Fasilitas KMK dari Mandiri dan BNI tersebut tidak diperpanjang.

o) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (MIE) dengan membentuk manajemen kerjasama operasi (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

p) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n) Working Capital Credit Agreement (continued)

The KMK Facility period is until September 14, 2017 with interest rate that will be determined upon withdrawal and at fixed rate until the end of withdrawal period.

The Company extended the KMK facility with BNI for the period until September 17, 2017 through Credit Amendment Agreement No. (4) 48 dated September 16, 2016. Based on the Credit Amendment Agreement, the amount of credit facility was amended to Rp250,000,000.

The credit facilities from Mandiri and BNI are not extended.

o) Construction and Operation of Car Terminal In Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate (MIE) by establishing joint operation management (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

p) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak

On July 12, 2018, the Company and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area. Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (lanjutan)

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Konsesi Kijing.
- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak berupa pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kijing.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, *trestle*, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
 - Superstruktur, termasuk peralatan di terminal multipurpose, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.
 - Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhan di dalam area konsesi.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak (continued)

- *Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.*
- *The Company is required to pay to Pontianak Port Authority, in form of concession revenues, 2.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kijing terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including access roads, piers, trestle, dock yard and other facilities.*
 - *Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.*
- *Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company has the right to impose and levy port services rate within the concession area.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**p) Perjanjian Konsesi - Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Pontianak (lanjutan)**

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kijing tersebut sebesar Rp417.550.953 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

46. PERKARA HUKUM

**a) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara,
S. Maryono, Doly Indra Nasution**

Penggugat menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No.1 dan No.2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (surat No.300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan Salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kec. Bojonegara Kabupaten Serang).

Penggugat mendalilkan bahwa kantor Pertanahan Kab. Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012 telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**p) Concession Agreement - Port Authority
Office Class II Pontianak (continued)**

- At the end of the concession period, the Company is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.

As of December 31, 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kijing terminal amounting to Rp417,550,953 and recorded them as part of "Intangible assets - concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the company (Note 15).

46. LAWSUIT

**a) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara,
S. Maryono, Doly Indra Nasution**

The Plaintiffs claimed that the Land Administration Office has admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

Plaintiffs argued that Land Administration Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, on the ground that the Land Administration Office was deemed to have known the existence of certificates owned by the Plaintiffs. Therefore, the Land Administration Office has been categorized to have breached the law.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012 has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

On August 14, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta District Court as stated above to the DKI Jakarta High Court.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- a) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (lanjutan)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang Amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di atas. Pada tanggal 6 Maret 2017, Perusahaan menerima salinan putusan kasasi No.3281 K/Pdt/2015 yang menolak permohonan kasasi Perusahaan. Atas putusan kasasi tersebut, Perusahaan telah menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali pada bulan Februari 2018.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut sedang pada tahap upaya Peninjauan Kembali (PK) dimana Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) menjadi kuasa dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- b) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan
- Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepada Manajemen Perusahaan dikarenakan merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- a) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (continued)

The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, strengthened the North Jakarta District Court decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012.

On June 9, 2015, the Company has filed a cassation through the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the decision issued by high court of DKI Jakarta as stated above. On March 6, 2017, the Company has obtained a copy of cassation verdict Number 3281 K/Pdt/2015 that rejected the company's appeal. Against the cassation verdict, in February 2018 the Company has submitted the Judicial Review.

Until the completion date of this consolidated financial statements, the lawsuit is at the stage of Judicial Review by Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) as the legal counsel of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- b) Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position
- There were 33 (thirty three) employees of the Company who rendered their resignation from their position to the management of the Company as they felt they were not in line with the policy undertaken by the Company's management.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)
- Atas dasar permohonan pengunduran diri dari jabatan tersebut, manajemen Perusahaan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai karyawan Perusahaan kepada 33 (tiga puluh tiga) karyawan tersebut dengan dasar bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak diatur di dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Perjanjian Kerja Bersama. Terhadap surat persetujuan dimaksud, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada masing-masing karyawan, namun demikian ada beberapa orang dari ke-33 orang karyawan tersebut yang mengajukan surat permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai karyawan dan 3 orang karyawan sudah diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan ke 30 (tiga puluh) karyawan tidak terima dengan keputusan Manajemen terkait Pengakhiran Hubungan Kerja, maka melalui Kuasa Hukumnya yakni Ihza & Ihza Lawfirm, mengirimkan Somasi kepada Manajemen Perusahaan dan menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas Somasi tersebut, Manajemen Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya (Kantor Hukum Kemalsjah & Associates) menolak somasi dimaksud.
 - Atas penolakan tersebut, Kuasa Hukum Karyawan mendaftarkan penyelesaian tersebut di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara untuk tujuan mediasi.
 - Sehubungan dengan gagalnya mediasi ke 30 karyawan yang tidak menerima keputusan manajemen, 30 karyawan tersebut mendaftarkan gugatan industrial pada masing-masing wilayah kerja antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi dan PHI Palembang.

46. LAWSUIT (continued)

- b) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*
- *In response to such resignation from the position, the management of the Company issued consent letters to those 33 (thirty three) employees for resignation as the employees of the Company on the basis that the resignation from the job position is not regulated in Law No. 13 of 2003 regarding Labor and the Collective Working Agreement. As a follow up on the consents for resignation, Director's Decisions Letters were issued regarding Employment Termination to each employee. However, there were several terminated employees out of those 33 (thirty three) employees who rendered request letters asking for rehiring as employees. Three employees have been rehired in accordance with the prevailing regulations.*
 - *As 30 (thirty) employees did not accept management decisions regarding employment termination, they sent a legal notice to the management of the Company through their legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm, demanding for rehiring and receiving their rights in accordance with the prevailing regulations. In response to such legal notice, the management of the Company through their legal counsel from Kemalsjah & Associates Law Firm rejected the legal notice in question.*
 - *In response to such rejection, the employees' legal counsel applied for resolution to the case to the Transmigration and Man Power Office of North Jakarta for mediation purpose.*
 - *Following to the failed mediation process with 30 employees that did not accept the management decision, the 30 employees submitted industrial lawsuit to Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi and PHI Palembang.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)
- PHI Jakarta dalam amarnya melalui surat Putusan No.114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014 menyatakan bahwa hubungan kerja antara 23 mantan karyawan dan Perusahaan berakhir terhitung 22 Juli 2014 dan tergugat wajib membayar kepada 23 mantan karyawan dengan nilai sebesar Rp15.742.190. Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 7 Januari 2015 dalam amarnya menyatakan membatalkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat, mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hubungan kerja putus, mewajibkan kepada Perusahaan untuk membayar hak para Penggugat antara lain manfaat program pensiun, Uang Pisah sebesar 2x Gaji Merit dan bantuan uang pindah sebagaimana diatur dalam PKB.
 - Putusan PHI Palembang No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg tanggal 25 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Perusahaan berkewajiban membayar uang bantuan pindah sebesar Rp39.888. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung dalam Putusan No.292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 telah menolak permohonan kasasi pekerja sehingga memenangkan Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- b) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*
- *The PHI Jakarta through its Decision letter No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST dated July 23, 2014, stated that the work relation between the 23 ex-employees and the Company ended as of July 22, 2014 and the defendant was obliged to pay to the 23 ex-employees amounting to Rp15,742,190. Against the decision, the Company filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the date of the financial statements, the status is still pending the decision from the Supreme Court. Based on Decision of Supreme Court of Republic Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 dated January 7, 2015 it was decided to reverse the court decision of the Jakarta Pusat District Court regarding industrial relations, to reject all the claims of the plaintiff to declare the termination of working relationship and to require the Company to pay the Plaintiff's right such as pension program benefit, severance payment amounting to 2x salary and relocation fund as regulated in PKB.*
 - *The PHI Palembang through its Decision letter No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg dated November 25, 2014, rejected all the plaintiff claims and the Company was required to pay relocation cost of Rp39,888. Against the decision, the plaintiff filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in the cassation process at the Supreme Court. Until the completion date of this consolidated financial statements, Supreme Court has stated in Cassation Verdict No. 292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on June 11, 2015 to reject the appeal from Employee, thus declaring a win to the Company.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)
- Putusan PHI Bandung No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali para penggugat, membayar upah para penggugat sebesar Rp502.971. Atas putusan tersebut, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.138k/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, sehingga memenangkan Perusahaan.
 - Putusan PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb tanggal 20 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah penggugat sampai putusan Inkracht. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Jambi No.13/G/2014/PHI.Jmb., sehingga memenangkan Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- b) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*
- *The PHI Bandung through its Decision letter No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG dated October 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salaries amounting to Rp502,971. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 138k/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Bandung No. 121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, thus resulting in a win to the Company.*
 - *The PHI Jambi through its Decision letter No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb dated November 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and ordered the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary until a binding decision is reached. The Supreme Court through its Cassation Verdict No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb, thus resulting a win to the Company.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

b) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)

- Putusan PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 26 November 2014. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah sebesar Rp68.546. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 438K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Serang No.49/PHI.G/2014/PN.Srg, sehingga memenangkan Perusahaan.

Dari 23 mantan karyawan tersebut terdapat 5 orang yang menempuh upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana perkara PK Nomor 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, isi putusan perkara tersebut masih belum diberikan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

- c) Permasalahan Gugatan PT Resources Alam Indonesia Tbk untuk meminta pembatalan sertifikat hak pengelolaan tanah No. 91 atas nama Perusahaan yang berada di Palembang.
- PT Resources Alam Indonesia Tbk (dahulu PT Susel Prima Permai) mengklaim memiliki tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 100/Sei Selincah tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.340 m², dan tanah Sertifikat HGB No.101/Sei Selincah tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 m², keduanya terletak di Desa Sungai Selincah Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua Sertifikat HGB tersebut berakhir pada tanggal 27 April 2012.
 - Perusahaan mempunyai tanah dengan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) No. 91/Sungai Selincah tanggal 6 Januari 2012 seluas 23.500 m².

46. LAWSUIT (continued)

b) Industrial Relation Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)

- The PHI Serang through its Decision letter No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg dated November 26, 2014, partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary for 6 (six) months amounting to Rp68,546. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 438 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on August 28, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg, thus resulting a win to the Company.

From 23 ex-employees five of them are preparing Judicial Review with case number 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018. Until the completion date of this consolidated financial statements, the verdict of this lawsuit is still not yet given to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

c) Claims of PT Resources Alam Indonesia for cancelation of right of land management certificate (HPL) No. 91 under the Company's name in Palembang.

- PT Resources Alam Indonesia Tbk (formerly PT Susel Prima Permai) claimed to have land with Building Rights Title No. 100/Sei Selincah dated August 22, 1990 with area of 34,340 m², and land with Building Rights Title No.101/Sei Selincah dated August 22, 1990 with area of 65,690 m², both of them located at Desa Sungai Selincah Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Both Building Rights Title have expired on April 27, 2012.
- The Company has land with right of land management certificate (HPL) No. 91/Sungai Selincah dated January 6, 2012 with area of 23,500 m².

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- c) Permasalahan Gugatan PT Resources Alam Indonesia Tbk untuk meminta pembatalan sertifikat hak pengelolaan tanah No. 91 atas nama Perusahaan yang berada di Palembang. (lanjutan)
- PT Resources Alam Indonesia Tbk mengklaim bahwa Kantor Pertanahan Kota Palembang menyatakan bahwa perpanjangan kedua Sertifikat tersebut belum dapat dilakukan, dan bahwa telah ada HPL atas nama Perusahaan.
 - PT Resources Alam Indonesia Tbk mengajukan gugatan kepada Perusahaan selaku Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Palembang yang di register dengan nomor perkara 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dengan pokok gugatan agar dilakukan pembatalan atas HPL tersebut di atas dan dilakukan perpanjangan atas HGB tersebut di atas, menuntut ganti rugi sebesar Rp10,56 miliar ditambah bunga 2% perbulan sejak Juli 2012 sampai dibayar lunas, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar, serta dilakukan sita jaminan atas HPL atas nama Perusahaan tersebut di atas seluas 23.500 m2.
 - Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., telah menyatakan bahwa Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah HPL No.91/Sungai Selincah, denda kepada Perusahaan sebesar Rp25 juta per tahun sejak terbitnya HPL No.91/Sungai Selincah tanggal 3 Januari 2012 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut Perusahaan telah menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.
 - Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Banding No.105/Pdt/2017/PT.Plg., telah menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg. Pada tanggal 14 Februari 2018 Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi.

46. LAWSUIT (continued)

- c) *Claims of PT Resources Alam Indonesia for cancelation of right of land management certificate (HPL) No. 91 under the Company's name in Palembang. (continued)*
- *PT Resources Alam Indonesia Tbk claimed that Palembang Land Administration Office stated that both Building Rights Title cannot be extended since there has been HPL under the company's name.*
 - *PT Resources Alam Indonesia Tbk submitted claim to Company as Defendant I and National Land Authority c.q Land Administration Office Palembang City as Defendant II through Palembang District Court which was registered with Case Number 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., with principle lawsuit to cancel the above HPL Certificate No. 91/Sungai Selincah and to extend the above Building Rights Title, claimed for compensation amounting to Rp10.56 billion plus interest 2% per month since July 2012 until fully paid, and immaterial compensation amounting to Rp1 billion, and land sequestration of the above HPL under the Company's name with area of 23,500 m2.*
 - *Palembang District Court through its Decision Letter No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg. has stated that HPL Certificate No. 91/Sungai Selincah was not legally binding, stated legitimate and contained valuable land sequestration of HPL No. 91/Sungai Selincah, fine against the Company with total amount of Rp25 million a year starting from the Issuance of HPL No. 91/Sungai Selincah dated January 3, 2012 until legally binding. With regard to that decision Decision, the Company has appealed to Palembang High Court.*
 - *Palembang High Court through its Decision Letter No. 105/Pdt/2017/PT.Plg. has strengthened the Verdict of Palembang District Court No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg. On February 14, 2018 the Company has filed cassation.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- d) Permasalahan gugatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Lampung (DPW APBMI Lampung) yang menuntut pembatalan perjanjian kerjasama dengan Cabang Pelabuhan Panjang.
- DPW APBMI Lampung mengajukan gugatan kepada Cabang Pelabuhan Panjang melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diregister dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., dengan pokok gugatan agar dilakukan pembatalan atas Kesepakatan Bersama antara APBMI Lampung dengan Cabang Pelabuhan Panjang tanggal 13 Juli 2012, dan menghapus tunggakan para penggugat kepada Cabang Pelabuhan Panjang sebesar Rp2,20 miliar.
 - Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 3 Desember 2015 dalam Amar Putusannya menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
 - DPW APBMI menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang diregister dengan perkara nomor 15/Pdt./2016/PT.Tjk.
 - Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam putusan perkara nomor 15/Pdt./2016/PT.TJK. tanggal 30 Mei 2016 dalam Amar Putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 52/Pdt.G/2015/Pn.Tjk. yang dimintakan banding tersebut.
 - APBMI Lampung menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang diregister dengan perkara nomor 2975K/Pdt/2016.
 - Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2975 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 telah menyatakan menolak permohonan kasasi APBMI Lampung.
 - Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini sedang dalam tahap pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Cabang Pelabuhan Panjang kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terkait eksekusi putusan.

46. LAWSUIT (continued)

- d) Lawsuit issue of Indonesian Stevedoring Companies Association Lampung Regional Management Board (DPW APBMI Lampung) which claimed cancelation of agreement with Port Panjang Branch
- DPW APBMI Lampung filed lawsuit to Port Panjang Branch through Tanjung Karang District Court registered with case number 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., with principal lawsuit to order cancelation of agreement between APBMI Lampung and Port Panjang Branch dated July 13, 2012 and to write-off the plaintiff's debt to Port Panjang Branch amounting to Rp2.20 billion.
 - Tanjung Karang District Court in their decision No. 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. dated December 3, 2015 rejected all of the plaintiff claims.
 - DPW APBMI takes legal action appeal to the Supreme Court Tanjung Karang and registered with case number 15/Pdt./2016/PT.Tjk.
 - Tanjung Karang High Court in decision case number 15/Pdt./2016/PT.TJK. dated May 30, 2016 strengthened the decision of Tanjung Karang District Court dated December 7, 2015 Number: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk which has been appealed to.
 - APBMI Lampung takes legal action of cassation to Supreme Court which is registered with case number 2975K/Pdt/2016.
 - The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 2975 K/Pdt/2016 on January 10, 2017 rejected the appeal of APBMI Lampung
 - Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still at the stage of granting special letter of authority from Panjang Branch to Bandar Lampung District Attorney regarding the execution of the verdict.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- e) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana menggugat Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional serta beberapa perseorangan yang diregister dengan nomor perkara 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pokok gugatan pembatalan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materiil Rp10.000.000, dan ganti rugi immateriil Rp10.000.000. Berdasarkan Putusan No 650/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dari Pengadilan Negeri Jakarta utara sudah ada putusan inkracht dengan Putusan (Niet Ontvankelijke) atau gugatan tidak dapat diterima.

- f) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Serikat Pekerja PT JICT mengajukan gugatan kepada PT JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan dengan PT JICT, pengembalian *rental fee* oleh Perusahaan kepada PT JICT sebesar USD147.595.109 atau setara dengan Rp1.976.869.823, dan sita jaminan atas rekening bank milik Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

46. LAWSUIT (continued)

- e) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 containing the granting of the right of land management to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana sued the Company and National Land Agency also individuals which are registered in Case Number 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., in Jakarta Utara District Court, with the principal lawsuit of cancelation of HPL with area of 592,771 m2 in Pelabuhan Sunda Kelapa, the material compensation of Rp10,000,000, and immaterial compensation of Rp10,000,000. Based on Jakarta Utara District Court Decision in Decision No 650/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr the verdict stated *Niet Ontvankelijke* or rejecting the lawsuit from PT Artha Sempana.

- f) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.

The Labor Union of PT JICT has filed a lawsuit to PT JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal issue to order cancelation of extension cooperation on Terminal Peti Kemas in Pelabuhan Tanjung Priok between the company and PT JICT, repayment of rental fee of the Company to PT JICT amounting to USD147,595,109 or equal to Rp1,976,869,823, and sequestration of Company's bank account. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in process in Jakarta Utara District Court.

The verdict of the North Jakarta District Court Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta District Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- f) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2018, SP JICT telah mengajukan banding dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

- g) Permasalahan Gugatan dari Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) dkk untuk mengesahkan penguasaannya atas tanah milik Perusahaan di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) mengajukan gugatan kepada Ade Harris Christian selaku Tergugat I, PT Putra Madya Jayagiri selaku Tergugat II, PT Putra Jaya Giri selaku Tergugat III, Perusahaan selaku Tergugat IV, Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa selaku Tergugat V, dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara selaku Turut Tergugat, yang diregister dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan perpanjangan 12 bidang tanah Hak Guna Bangunan seluas keseluruhan 28.455 m² diatas Hak Pengelolaan Perusahaan di Pelabuhan Sunda Kelapa, sita jaminan atas tanah dan bangunan di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materiil Rp441.309.220, ganti rugi immateriil Rp100.000.000, uang paksa Rp50.000 per hari sejak putusan dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1176K/Pdt/2018 Tanggal 4 Juni 2018 menyatakan menolak permohonan kasasi Wiryanto Khong dkk oleh karena itu perkara dimenangkan oleh Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- f) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok. (continued)

On March 13, 2018, the JICT SP has filed an appeal and until the completion date of this consolidated financial statements, the case is still in process in DKI Jakarta High Court

- g) Lawsuit issue filed by Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) et al to validate land tenure of the Company in Pelabuhan Sunda Kelapa.

Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) filed an appeal to Ade Harris Christian as Defendant I, PT Putra Madya Jayagiri as Defendant II, PT Putra Jaya Giri as Defendant III, the Company as Defendant IV, Sunda Kelapa Branch as Defendant V and Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara as co-defendant, which is registered by Case Number 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal lawsuit of the extention of 12 lands with Building Rights Title with total area of 28,455 m² over the HPL of the company in Pelabuhan Sunda Kelapa, material compensation of Rp441,309,220, immaterial compensation of Rp100,000,000, penalty of Rp50,000 a day starting from the verdict is announced until legally binding. Based on cassation verdict of the Supreme Court number 1176K/Pdt/2018 on June 4, 2018 the cassation petition from Wiryanto Khong et al. has been rejected therefore the case is won by the Company.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

47. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2018						
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.410.223.653	1.026.477.241	11.436.700.894	-	11.436.700.894	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.262.402.694	4.160.570	3.266.563.264	(3.266.563.264)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.672.626.347	1.030.637.811	14.703.264.158	(3.266.563.264)	11.436.700.894	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.193.660.949)	(959.616.637)	(11.153.277.586)	3.110.722.766	(8.042.554.820)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	(214.188.922)	94.303.039	(119.885.883)	(76.474.693)	(196.360.574)	Other operating income - net
Laba usaha					3.197.785.500	Operating income
Pendapatan keuangan	681.864.210	7.050.090	688.914.300	-	688.914.300	Finance income
Beban keuangan	(1.120.125.705)	(13.526.311)	(1.133.652.016)	2.870.000	(1.130.782.016)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.677.185.749	-	1.677.185.749	(1.300.985.155)	376.200.594	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.132.118.378	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(344.088.410)	(13.024.812)	(357.113.222)	-	(357.113.222)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.775.005.156	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(344.085.965)	(9.895.803)	(353.981.768)	-	(353.981.768)	Current
Tangguhan	(4.516.972)	14.203.439	9.686.467	-	9.686.466	Deferred
Laba tahun berjalan					2.430.709.854	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	59.489.560.988	1.184.698.666	60.674.259.654	(9.241.382.631)	51.432.877.023	Segment assets
Liabilitas segmen	39.839.642.559	667.223.706	40.506.866.265	(5.508.445.561)	34.998.420.704	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(713.497.663)	(59.861.617)	(773.359.280)	-	(773.359.280)	Segment depreciation and amortization

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2017

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	9.726.731.492	928.843.175	10.655.574.667	-	10.655.574.667	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.583.401.466	7.828.745	2.591.230.211	(2.591.230.211)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	12.310.132.958	936.671.920	13.246.804.878	(2.591.230.211)	10.655.574.667	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.097.354.360)	(821.093.003)	(9.918.447.363)	2.520.533.231	(7.397.914.132)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	20.149.963	22.002.858	42.152.821	(30.742.800)	11.410.021	Other operating income - net
Laba usaha					3.269.070.556	Operating income
Pendapatan keuangan	524.527.539	10.261.789	534.789.328	-	534.789.328	Finance income
Beban keuangan	(1.056.866.135)	(7.270.425)	(1.064.136.560)	-	(1.064.136.560)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.124.411.746	-	1.124.411.746	(1.045.329.894)	79.081.852	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.818.805.176	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(344.062.569)	(1.160.375)	(345.222.944)	-	(345.222.944)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.473.582.232	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan Kini	(271.549.007)	(20.282.881)	(291.831.888)	-	(291.831.888)	Corporate income tax Current
Tangguhan	17.350.841	6.625.834	23.976.675	-	23.976.675	Deferred
Laba tahun berjalan					2.205.727.019	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	51.990.594.793	1.170.033.548	53.160.628.341	(5.940.539.982)	47.220.088.359	Segment assets
Liabilitas segmen	35.651.377.334	692.726.133	36.344.103.467	(3.071.932.906)	33.272.170.561	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(712.645.982)	(57.141.873)	(769.787.855)	-	(769.787.855)	Segment depreciation and amortization

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's geographical segment is as follows:

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2018	2017	
Pendapatan Operasi			Operating Revenues
Tanjung Priok	9.666.180.682	8.725.416.852	Tanjung Priok
Panjang	332.388.938	332.818.724	Panjang
Banten	327.697.066	397.859.305	Banten
Palembang	283.449.657	377.221.304	Palembang
Teluk Bayur	250.570.236	215.315.163	Teluk Bayur
Pontianak	187.996.098	231.597.999	Pontianak
Bengkulu	129.757.069	126.039.917	Bengkulu
Cirebon	101.044.253	85.752.695	Cirebon
Sunda Kelapa	56.606.751	50.734.665	Sunda Kelapa
Jambi	56.168.698	72.742.320	Jambi
Pangkal Balam	36.573.146	32.848.935	Pangkal Balam
Tanjung Pandan	8.268.300	7.226.788	Tanjung Pandan
Total	11.436.700.894	10.655.574.667	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2018	2017
Aset tidak lancar		
Tanjung Priok	22.411.760.752	19.688.953.655
Banten	1.086.484.236	687.892.180
Panjang	711.492.393	642.492.117
Teluk Bayur	657.751.014	585.704.663
Pontianak	466.828.200	444.860.328
Bengkulu	443.924.137	427.285.654
Palembang	371.103.634	370.614.171
Jambi	248.972.474	232.446.613
Cirebon	226.987.094	126.827.355
Pangkal Balam	116.236.840	101.931.404
Sunda Kelapa	103.637.404	94.647.040
Tanjung Pandan	33.362.716	34.794.030
Total	26.878.540.894	23.438.449.210

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's geographical segment is as follows: (continued)

Non-current asset
Tanjung Priok
Banten
Panjang
Teluk Bayur
Pontianak
Bengkulu
Palembang
Jambi
Cirebon
Pangkal Balam
Sunda Kelapa
Tanjung Pandan
Total

48. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

48. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	-	4.000.000	-	-	4.000.000	Short-term bank loans
Utang bank	1.860.603	(1.860.603)	-	-	-	Bank loans
Utang obligasi	21.376.332.500	-	1.513.834.469	-	22.890.166.969	Bonds payable
Dividen	-	(653.968.052)	-	-	(653.968.052)	Dividend
Total	21.378.193.103	(651.828.655)	1.513.834.469	-	22.240.198.917	Total

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
I	UMUM GENERAL		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris The annual report is presented in good and correct Indonesian and also recommended in English		V
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca Annual reports is printed in good quality and use easy-to-read type and letter sizes		V
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas The annual report clearly identifies the identity of the company		V
4	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: Name of company and year of annual report shown on:	a. Sampul muka; b. Samping; c. Sampul belakang; dan d. Setiap halaman. a. Front cover; b. Side; c. Back cover; and d. Every page.	V
5	Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Information on the Company Website including the latest annual report and at least for the last 4 years.		V
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA		
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on business results of the company in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years	Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha; b. Laba (rugi): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. d. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. Information includes among others: a. Sales / operating revenues; b. Profit and loss); • <i>Attributed to the owner of the parent;</i> • <i>Attributed to non-controlling interests;</i> c. Comprehensive income for the current period: • <i>Attributed to the owner of the parent;</i> • <i>Attributed to non-controlling interests;</i> d. Earnings (loss) per share. Note: If the company does not have a subsidiary, the company presents the total current profit (loss) and total income for the current year.	26-35

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	<p>Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>Company's financial position information in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; b. Jumlah aset; c. Jumlah liabilitas; dan d. Jumlah ekuitas.</p> <p>Information includes among others: a. Amount of investment in associate entity; b. Total assets; c. Amount of liabilities; and d. Total equity.</p>	26-35
3	<p>Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>Financial ratios in the form of comparisons for 3 (three) fiscal years or since the start of business business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</p>	<p>Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.</p> <p>Information contains 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.</p>	34
4	<p>Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik</p> <p>Stock price information in tables and graphs</p>	<p>a. Jumlah saham yang beredar; b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p> <p>a. Number of shares outstanding; b. Information in tabular form which contains:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed;</i> • <i>The highest, lowest, and closing prices are based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> • <i>Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> <p>c. Information in graphical form containing at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The closing price based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> • <i>Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> <p>for each quarter for the last 2 (two) fiscal years.</p> <p>Note: if the company does not have market capitalization, stock price information, and stock trading volume, to be disclosed.</p>	36-37

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
5	<p>Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p>Information on bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last 2 (two) fiscal years</p>	<p>Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018 <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Number of bonds / sukuk / bonds of conversion in circulation (outstanding); Interest rate / reward; Due date; and Rating for bonds / sukuk in 2017 and 2018 <p>Note: if the company does not have bonds / sukuk / convertible bonds, to be disclosed.</p>	38-39
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT</i>		
1	<p>Laporan Dewan Komisaris</p> <p>Board of Commissioners Report</p>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. <p>Including the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> Assessment of the Board of Directors' performance on the management of the company and scoring basis; A view of the business prospects of the company drawn up by the Board of Directors and the basis for their consideration; The views on the whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and reasons for the change. 	48-59

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Laporan Direksi Board of Directors Report	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan strategis; • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; <p>b. Analisis tentang prospek usaha;</p> <p>c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan</p> <p>d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.</p> <p>Including the following:</p> <p>a. An analysis of the company's performance, which includes among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>strategic policy</i>; • <i>comparison between results achieved and targeted</i>; and • <i>constraints faced by the company and its settlement measures</i>; <p>b. Analysis of business prospects;</p> <p>c. The development of corporate governance in the fiscal year; and</p> <p>d. Changes in the composition of the Board of Directors members (if any) and reasons for the change.</p>	60-73
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;</p> <p>b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;</p> <p>c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan</p> <p>d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.</p> <p>Including the following:</p> <p>a. The signature are contained on a separate sheet;</p> <p>b. A statement that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;</p> <p>c. Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors by stating their names and positions; and</p> <p>d. A written explanation in a separate letter from individuals in the event that there are members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors who do not sign the annual report, or written explanation in separate letters from other members in the absence of written explanation from the concerned.</p>	74-75
IV	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan The full name and address of the company	<p>Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.</p> <p>The information includes: name and address, zip code, no. Tel, no. Fax, email, and website.</p>	78-79

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Riwayat singkat perusahaan Company brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Includes: date / year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name. Note: if the company has never changes its name, to disclose it	80
3	Bidang usaha Business fields	Uraian mengenai antara lain: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of: a. Company's business activities according to the latest articles of association; b. Business activities carried out; and c. Products and / or services produced.	82-86
4	Struktur Organisasi Organizational structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi. In the form of a chart, including the names and positions, at least up to 1 (one) level below the board of directors.	90-92
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: a. Visi perusahaan; b. Misi perusahaan; c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. Includes: a. Company vision; b. Company Mission; c. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors / Board of Commissioners in the fiscal year; and d. Statement about corporate culture owned by the company.	106-110

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief biography of members of the Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Information includes: a. Name; b. Position and term of office (including position in company or other institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (Field of Study and Educational Institution); f. Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and g. The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since first appointed.	112-127
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief biography of members of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Information includes: a. Name; b. Position (including position in company or other institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (Field of Study and Educational Institution); f. Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and g. The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company since first appointed.	128-143

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
 Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
8	<p>Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi</p> <p>Number of employees (2 years comparative) and employee competency development data reflecting the opportunities at each level of organization</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;</p> <p>b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;</p> <p>c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;</p> <p>d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan</p> <p>e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.</p> <p>Information includes:</p> <p>a. Number of employees for each level of organization;</p> <p>b. Number of employees for each level of education;</p> <p>c. Number of employees by employment status;</p> <p>d. Data of employee competency development that has been done in the fiscal year consisting of position levels for those who participated in training, type of training, and training objectives; and</p> <p>e. Employee competency development costs incurred during the fiscal year.</p>	144-157, 240-245, 252-258
9	<p>Komposisi Pemegang saham</p> <p>Shareholder Composition</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;</p> <p>b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan • Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <p>c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.</p> <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p> <p>Includes:</p> <p>a. Details of the shareholder's name including the 20 largest shareholders and the percentage of ownership;</p> <p>b. Shareholder details and percentage of ownership include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Name of shareholder owning 5% or more shares; and</i> • <i>Groups of public shareholders with share ownership of less than 5% each.</i> <p>c. Name of Directors and Commissioners as well as the percentage of ownership of shares directly and indirectly.</p> <p>Note: if the Director and Commissioner have no direct and indirect shares to disclose.</p>	158
10	<p>Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p>List of subsidiaries and / or associates</p>	<p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <p>a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;</p> <p>b. Persentase kepemilikan saham;</p> <p>c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan</p> <p>d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).</p> <p>In the form of the table containing information, including:</p> <p>a. Name of subsidiary and / or associate;</p> <p>b. Percentage of share ownership;</p> <p>c. Description of the business of the subsidiary and / or associate; and</p> <p>d. Description of the operating status of the subsidiary and / or associate entity (already in operation or not yet operating).</p>	159-193

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
11	Struktur grup perusahaan Company group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle (SPV)</i> . The group structure of the company in the form of a chart showing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	194
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Chronology of shares issuance (including private placement) and / or stock listing from initial offering up to the end of the fiscal year	Mencakup antara lain: a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Includes: a. Year of issuance, number of shares, par value of shares, and stock quotation price for each corporate action; b. Number of shares registered after each corporate action; and c. The name of the stock where the company's shares are listed. Note: if the company does not have a share listing chronology, it should be disclosed.	195-196
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku The chronology of the issuance and / or listing of other securities from the initial publication until the end of the fiscal year	Mencakup antara lain: a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; b. Nilai penawaran efek lainnya; c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan d. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Includes: a. Other securities name, other issuance year, other securities interest rate / reward, and maturity date of the securities; b. The value of other securities offerings; c. Name of exchange where other securities are listed; and d. Securities Ranking. Note: if the company does not have a chronology for other securities listing, to be disclosed.	199
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of supporting institutions and / or professions	Informasi memuat antara lain: a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Information includes: a. Name and address of BAE / party administering shares of the company; b. Name and address of Public Accounting Firm; and c. Name and address of the rating agency.	200-205

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/ atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards received in the last fiscal year and / or certification that is still valid in the last fiscal year both nationally and internationally	Informasi memuat antara lain: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; b. Tahun perolehan; c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan d. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Information includes: a. Name of award and / or certificate; b. Year of acquisition; c. Awarding bodies and / or certificates; and d. Validity period (for certification).	206-219
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Names and addresses of subsidiaries and / or branch offices or representative offices (if any)	Memuat informasi antara lain: a. Nama dan alamat entitas anak; dan b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/ cabang/perwakilan, agar diungkapkan. Information includes: a. Name and address of the subsidiaries; and b. Name and address of branch offices / representatives. Note: if the company does not have subsidiaries / branches / representatives, to be disclosed.	220-223
17	Informasi pada Situs <i>Website</i> Perusahaan Information on the Company Website	Meliputi paling kurang: a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; b. Isi Kode Etik; c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan f. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Information includes: a. Shareholder information up to the individual end owner; b. Code of Ethics Content; c. General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda items discussed in the GMS, summaries of minutes of the GMS, and important information, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS call, the GMS, the date of the minutes of the GMS; d. Separate annual financial statements (last 5 years); e. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and f. Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit Charter.	224

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	<p>Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p> <p>Includes at least (types and relevant parties):</p> <ol style="list-style-type: none"> Education and / or training for the Board of Commissioners; Education and / or training for Directors; Education and / or training for the Audit Committee; Education and / or training for the Nomination and Remuneration Committee; Education and / or training for Other Committees; Education and / or training for Corporate Secretary; and Education and / or training for the Internal Audit Unit. which is followed in the book year. <p>Note: if there is no education and / or training in the fiscal year, to be disclosed</p>	225-231
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN <i>MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE</i>		
1	Tinjauan operasi per segmen usaha	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan masing-masing segmen usaha. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Produksi; Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Penjualan/pendapatan usaha; dan Profitabilitas. <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Explanation of each business segment. Per business segment performance, including: <ul style="list-style-type: none"> <i>Production</i>; <i>Increased / decreased production capacity</i>; <i>Sales / operating revenues</i>; and <i>Profitability</i> 	274-366
	Overview of operations per business segment		

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan e. Arus kas. Financial performance analysis which includes comparison between financial performance for the year concerned with previous year and reason for increase / decrease (in the form of narration and table), among others concerning: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Equity; d. Sales / operating revenue, expenses and profits (loss), other comprehensive income, and total profit (loss) and other comprehensive income; and e. Cash flow.	404-438
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis of debt ability and collectibility level of the company, by presenting the calculation of relevant ratios according to the type of industrial company	Penjelasan tentang : a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan b. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation of : a. The ability to pay the debt, both short-term and long-term; and b. Collectibility of receivables.	439-441
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) Discussion about capital structure and management policy on capital structure policy	Penjelasan atas: a. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation of: a. Details of capital structure consisting of interest-based / sukuk and equity debts; and b. Management policy on capital structure policies; and c. Basic selection of management policies on capital structure.	442

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
5	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion of material ties to capital investment (not funding ties) in the last fiscal year</p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama pihak yang melakukan ikatan; Tujuan dari ikatan tersebut; Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; Mata uang yang menjadi denominasi; dan Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p> <p>Explanation of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name of the party making the bond; The purpose of the bond; Sources of funds expected to fulfill such commitments; Denominated currency; and Measures planned by the company to protect the risk of foreign currency positions. <p>Note: if the company does not have capital investment related bonds in the last fiscal year to disclose.</p>	443-445
6	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year</p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis investasi barang modal; Tujuan investasi barang modal; dan Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p> <p>Explanation of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Type of investment of capital goods; The purpose of investment of capital goods; and The investment value of capital goods issued in the last fiscal year. <p>Note: if there is no realization of investment in capital goods, to disclose.</p>	446-450
7	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan</p> <p>Comparative information between the targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization), and the target or projection to be achieved for the coming 1 (one) year for revenue, profits, and others deemed important to the enterprise</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Comparison between targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization); and Target or projection to be achieved 1 (one) year ahead. 	451-458

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts occurring after the date of the accountant's report	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description of important events after the date of the accountant's report including impact on future performance and business risks. Note: if there are no important events after the date of the accountant's report, to be disclosed.	459-460
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan A description of the business prospects of the company	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description of the company prospects attributed to industry and the economy in general along with quantitative support data from reliable data sources.	388-404
10	Uraian tentang aspek pemasaran A description of the marketing aspects	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of the marketing aspects of a company's products and / or services, among others, marketing strategy and market share.	276-277
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and the amount of dividend per annum announced or paid during the last 2 (two)	Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian dividen; b. Total dividen yang dibagikan; c. Jumlah dividen kas per saham; d. <i>Payout ratio</i> ; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Description of: a. Dividend distribution policy; b. Total dividends distributed; c. Amount of cash dividend per share; d. Payout ratio; and e. Date of announcement and payment of cash dividend. for each year. Note: if there is no dividend distribution, please disclose the reason.	462-463

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
12	<p>Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku</p> <p>Company's existing employee and / or management shareholding (ESOP / MSOP) program for the fiscal year</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; Jangka waktu; Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Harga <i>exercise</i>. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Number of shares of ESOP / MSOP and realization; Time period; Eligible employee and / or management requirements; and Exercise price. <p>Note: if it does not have the intended program, to be disclosed.</p>	464
13	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p>Use of proceeds from the public offering (in case the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Total perolehan dana; Rencana penggunaan dana; Rincian penggunaan dana; Saldo dana; dan Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Total acquisition of funds; Plan for the use of funds; Details of the use of funds; Fund balance; and Date of AGM / RUPO approval on changes in use of funds (if any). <p>Note: if no realization information on the use of proceeds from the public offering, to be disclosed.</p>	465

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
14	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p>Material transaction information containing conflict of interest and / or transaction with affiliates</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Alasan dilakukannya transaksi; Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> The name of the transacting party and the nature of the affiliate relationship; Explanation of the fairness of transactions; The reason for the transaction; Actual transactions during the last fiscal year; Company policy related to review mechanism of transaction; and Compliance with relevant rules and regulations. <p>Note: if no such transaction, to be disclosed.</p>	466-470
15	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>A description of legislation changes in the last fiscal year</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> The name of the changed legislation; and The impact (quantitative and / or qualitative) on the firm (if significant) or the statement that the impact is insignificant. <p>Note: if there is no change in legislation that has any significant effect, to be disclosed.</p>	472
16	<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>A description of the accounting policy changes adopted by the company in the last fiscal year</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan akuntansi; Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Changes in accounting policies; Reasons for changes in accounting policies; and The quantitative impact on the financial statements. <p>Note: if there is no change in accounting policy in the last fiscal year, to disclose.</p>	473-474

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
17	Informasi kelangsungan usaha Information on business continuity	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p>Information disclosure regarding:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year; Management assessment for issues mentioned above; Basic assumptions used by the management in conducting the assessment. <p>Note: if there is no potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year, disclose assumptions as the management basis in believing that there is no potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year.</p>	477
VI	GOOD CORPORATE GOVERNANCE GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
1.	Uraian Dewan Komisaris Description of the Board of Commissioners	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).</p> <p>Description of: Description of the responsibilities of the Board of Commissioners; Assessment of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis of its assessment; and Disclosure of Board Charter (Code of Conduct and Board of Commissioners).</p>	515-608
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Independent Commissioners (at least 30% of the total Board of Commissioners)	<p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <p>Includes: a. Criteria for determining Independent Commissioners; and b. Statement on the independence of each Independent Commissioner.</p>	538-539

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
3.	<p>Uraian Direksi</p> <p>Description of the Board of Directors</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan c. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <p>Description of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors; b. Assessment of the performance of committees under the Board of Directors (if any); and c. Disclosure of Board Charter (guidelines and work discipline of the Board of Directors). 	609-685
4.	<p>Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Assessment of GCG Implementation for the fiscal year 2018 covering at least the aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; b. Pihak yang melakukan penilaian; c. Skor penilaian masing-masing kriteria; d. Rekomendasi hasil penilaian; dan e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2016, agar diungkapkan.</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Criteria used in the assessment; b. The party conducting the assessment; c. Scoring scores for each criterion; d. Recommendation of assessment results; and e. Reason for not yet / not implementing recommendation. <p>Note: if there is no GCG implementation assessment for the fiscal year 2016, to be disclosed.</p>	826-835

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
5.	<p>Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Description of remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disclosure of procedure up to the determination of remuneration of the Board of Commissioners; b. Disclosure of procedure up to the determination of the remuneration of the Board of Directors; c. Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners; d. Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors; e. Disclosure of indicators for the Board of Directors' remuneration; and f. Disclosure of performance bonuses, non performance bonuses, and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors (if any). <p>Note: where there are no performance bonuses, non performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, to be disclosed.</p>	588-591, 671-674
6.	<p>Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)</p> <p>Frequency and Attendance by members at Board of Commissioners meetings (at least 1 times in 2 months), Board of Directors Meetings (at least 1 time in 1 month), and Joint Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors (minimum 1 time in 4 months)</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal Rapat; b. Peserta Rapat; dan c. Agenda Rapat. <p>untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</p> <p>Information includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Date of Meeting; b. Meeting participants; and c. Meeting agenda. <p>for each meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meetings.</p>	540-587, 641-670

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
7.	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu</p> <p>Information on the major and controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners</p>	<p>Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p> <p>In the form of schematics or diagrams that separate major shareholders with controlling shareholders.</p> <p>Note: the major shareholder is a party, directly or indirectly, with at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares issued by a Company, but not the controlling shareholder.</p>	744
8.	<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali</p> <p>Disclosure of affiliate relationships between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal and / or controlling Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Affiliation relationships between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors; Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Majority and / or Controlling Shareholders; Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and the Majority and / or Controlling Shareholders. <p>Note: if it has no such affiliate relationship, it should be disclosed.</p>	533-535 ,635-637

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
 Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
9.	Komite Audit Audit Committee	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan jabatan periode jabatan anggota komite audit; Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; Independensi anggota komite audit; Uraian tugas dan tanggung jawab; Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name and position of audit committee members; Education history (Study Field and Educational Institution) and work experience (Position, Institution, and Period of Work) of audit committee members; Independence of audit committee members; Description of duties and responsibilities; Description of the audit committee activities in the fiscal year; and The frequency of meetings and attendance of the audit committee. 	691-704
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi Nomination and / or Remuneration Committee Functions	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Uraian tugas dan tanggung jawab; Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan Kebijakan mengenai suksesi Direksi. <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name, position, and brief biography of nomination and / or remuneration committee members; Independence of nomination and / or remuneration committee members; Description of duties and responsibilities; Description of the nomination and / or remuneration committee activities; The frequency of meetings and the attendance of the nomination and / or remuneration committee; Statement of the nomination and / or remuneration committee members guidelines; and Policy on the succession of the Board of Directors. 	704-714
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other Committees under the Board of Commissioners	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; Independensi komite lain; Uraian tugas dan tanggung jawab; Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name, position, and brief biography of committee members; Independence of committees; Description of duties and responsibilities; Description of the implementation of the activities of committees; and The frequency of meetings and the attendance levels of committees. 	715-725

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Job Description and Function of Corporate Secretary	<p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; b. Domisili; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name, and history of the corporate secretary; b. Domicile; c. Description of duties and responsibilities; and d. Description on execution of the tasks of corporate secretary in the fiscal year. 	726-731
13.	Uraian mengenai unit audit internal Description of the internal audit unit	<p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama ketua unit audit internal; b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name of the head of the internal audit unit; b. Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit; c. Certification in an internal audit profession; d. The position of the internal audit unit within the company structure; e. Description of the internal audit unit activities in the fiscal year; and f. Parties who appoint and dismiss the chair of the internal audit unit. 	731-740
14.	Akuntan Publik Public Accountant	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan d. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Information includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name and year the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years; b. Name and year of the Public Accounting Firm who audited the annual financial statements for the last 5 years; c. The amount of fee for each type of services provided by the public accountant in the last fiscal year; and d. Other services provided by the accountant in addition to the annual financial statement audit services in the last fiscal year. <p>Note: if no other services are provided, to be disclosed.</p>	745-747

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description of the company's risk management	Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes: a. A description of the company's risk management system; b. A description of the evaluation of the effectiveness of the risk management system; c. A description of the risks facing the company; and d. Efforts to manage those risks.	748-772
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Description of the internal control system	Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan c. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes: a. Brief explanation of the internal control system, including financial and operational controls, among others; b. Explanation of conformity of internal control system with internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and c. An explanation of the results of reviews conducted on the implementation of the internal control system in the financial year.	773-784

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
17.	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tatakelola Tanggung jawab social</p> <p>A description of corporate social responsibility related to social responsibility governance</p>	<p>a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial</p> <p>b. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan</p> <p>c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan</p> <p>d. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan</p> <p>e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban</p> <p>f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i></p> <p>g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijaalkan</p> <p>h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab social</p> <p>a. Information on commitment to social responsibility</p> <p>b. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts from corporate activities</p> <p>c. Information on important stakeholders affected or influences impacts from corporate activities</p> <p>d. Information on important socio-economic and environmental issues related to impacts from corporate activities</p> <p>e. Information about the scope of corporate social responsibility that is both an obligation and beyond obligation</p> <p>f. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic and environmental issues in stakeholders engagement and increasing value for stakeholders and shareholders</p> <p>g. Information about various programs that exceeds the company's minimum responsibilities that are relevant to the ongoing business</p> <p>h. Information about financing and budgeting for social responsibility</p>	842-849
18.	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subjeck Hak Azasi Manusia</p> <p>A description of corporate social responsibility related to core subject of human rights</p>	<p>a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia</p> <p>b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia</p> <p>c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia</p> <p>d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia</p> <p>e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia</p> <p>a. Information about social responsibility commitments and policies, core subject: Human Rights</p> <p>b. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility, core subject: Human Rights</p> <p>c. Information about plans for corporate social responsibility in the field of Human Rights</p> <p>d. Information about implementing CSR initiatives in the field of Human Rights</p> <p>e. Information about achievements and awards for CSR initiatives in the field of of Human Rights</p>	850-852

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
19.	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil</p> <p>A description of corporate social responsibility related to core subject of fair operations</p>	<p>a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil</p> <p>b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil</p> <p>c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil</p> <p>d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil</p> <p>e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil</p> <p>a. Information about social responsibility commitments and policies, core subject: Fair operation</p> <p>b. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility, core subject: fair operation</p> <p>c. Information about plans for corporate social responsibility in the field of fair operations</p> <p>d. Information about implementing CSR initiatives in the field of fair operations</p> <p>e. Information about achievements and awards for CSR initiatives in the field of fair operations</p>	853-856
20.	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup.</p> <p>A description of corporate social responsibility related to environment</p>	<p>Penyampaian informasi tentang:</p> <p>f. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan</p> <p>g. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan</p> <p>h. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;</p> <p>i. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan</p> <p>j. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup</p> <p>k. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.</p> <p>l. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.</p> <p>Information disclosure on:</p> <p>a. Information about environmental commitments and policies</p> <p>b. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company</p> <p>c. Information about the 2018 target/activity plan determined by the management;</p> <p>d. Information on activities undertaken and environmental programs related to the company's operations</p> <p>e. Information about CSR initiative implementation related to the environment</p> <p>f. Information about the results of quantitative impacts on these activities; such as the use of environmentally-friendly and recycleable materials and energy, the company's waste treatment system, complaint mechanism for environmental issues, consideration of environmental aspects in providing credit to customers, and others.</p> <p>g. Certification in environmental issues..</p>	857-872

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
21	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.</p> <p>Description of corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core</i> subjek ketenagakerjaan b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan <i>gender</i> dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. <p>Includes information about:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Corporate social responsibility policy and commitment, with core subject of social and community development b. Information about social issues that are relevant to the Company c. Information about social risks managed by the company d. Information on the scope and formulation of social responsibility in social and community development e. Activity target/plan in 2018 set by management; Activities carried out and impacts of these activities; and Cost incurred Related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of communities around the Company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication about anti-corruption policies and procedures, anti-corruption training, and others. 	873-886
22	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen,</p> <p>Description of corporate social responsibility related to responsibility to customers</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <p>Includes among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Activity target/plan in 2018 set by management; and b. Activities carried out and impacts of these activities c. Related to product responsibility, such as customer health and safety, product information, facilities, number and countermeasures for customer complaints, and others. 	905-911

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
23	<p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <p>description of corporate social responsibility related to social and community development</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan Biaya yang dikeluarkan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. <p>Includes information about:</p> <ol style="list-style-type: none"> Corporate social responsibility policy and commitment, with core subject of social and community development Information about social issues that are relevant to the Company Information about social risks managed by the company Information on the scope and formulation of social responsibility in social and community development Activity target/plan in 2018 set by management; Activities carried out and impacts of these activities; and Cost incurred Related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of communities around the Company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication about anti-corruption policies and procedures, anti-corruption training, and others. 	887-904
24	<p>Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan</p> <p>Important matters currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors serving during the annual reporting period</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pokok perkara/gugatan; Status penyelesaian perkara/gugatan; Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p> <p>Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Principal cases / lawsuits; Court settlement / lawsuit status; Risks facing the company and the value of claims; and Administrative sanctions imposed on corporations, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that it is not subject to administrative sanctions). <p>Note: In the case that a company, subsidiary, member of the Board of Commissioners, and member of the Board of Directors is involved in no important cases, it is disclosed.</p>	785-793

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
25	Akses informasi dan data perusahaan Access to company information and data	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), <i>media massa</i>, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p>Description of availability of access to information and corporate data for the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, meetings with analysts, and so forth.</p>	795-801
26	Bahasan mengenai kode etik Discussion of codes of conduct	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pokok-pokok kode etik; Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; Penyebarluasan kode etik; Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p>Description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Key points of ethics; Disclosure that the code of ethics applies to all levels of the organization; Dissemination of codes of ethics; Sanctions for each type of offense set out in the code of ethics (normative); and Number of code violations and sanctions given in the last fiscal year. <p>Note: if there are no violations of the code of ethics in the last fiscal year, to be disclosed</p>	802-809
27	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> Disclosure of the whistleblowing system	<p>Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian laporan pelanggaran; Perlindungan bagi <i>whistleblower</i>; Penanganan pengaduan; Pihak yang mengelola pengaduan; dan Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p>Description of the whistleblowing system mechanism:</p> <ol style="list-style-type: none"> Submission of violation reports; Protection for whistleblowers; The handling of complaints; The party managing the complaint; and Number of incoming and processed complaints in the last fiscal year; and Sanctions / follow-up on complaints that have been processed in the fiscal year. <p>Note: if there are no incoming complaints in the last fiscal year, to be disclosed</p>	815-822

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. The Company's policy description on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there is no such policy, to disclose the reasons and considerations.	531-533, 633-635
VII	INFORMASI KEUANGAN <i>FINANCIAL INFORMATION</i>		
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Letter of the Board of Directors and / or Board of Commissioners on the Responsibility of the Financial Statement	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with relevant regulations on Liability to Financial Statements.	v
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan Opinion of independent auditors for financial statements		v
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor for Opinion	Deskripsi memuat tentang: a. Nama & tanda tangan; b. Tanggal Laporan Audit; dan c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. Description of: a. Name & signature; b. Date of Audit Report; and c. KAP license number and license number of a Public Accountant.	v

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
 Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters expressed: a. The names of related parties, as well as the nature and relationship of related parties; b. The value of the transaction and its percentage of total revenues and related expenses; and c. Total balance and percentage of total related assets or liabilities.	v
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosures related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Matters be Disclosed: a. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; b. Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit; c. The statement that the taxable income (LKP) resulted from the reconciliation is used as the basis for filling the Annual Income Tax Return of the Company in 2018; d. The details of the deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period and the total deferred tax expense (income) recognized in the statement of income if the amount is not reflected in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position; and e. Disclosure of no or no tax disputes.	v

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosures related to fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be Disclosed: a. Method of depreciation used; b. A description of the selected accounting policies between the revaluation model and the cost model; c. Significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for revaluation model) or disclosure of fair value of property, plant and equipment (for cost model); and d. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.	v
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* Disclosures related to operating segments *	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Matters to be Disclosed: a. General information covering factors used to identify reported segments; b. Information on reported segment of income, assets, and liabilities; c. Reconciliation of total segment revenues, reported segment loss, segment assets, segment liabilities, and other segment material items to related amounts in the entity; and d. Disclosure at the entity level, which includes information about products and / or services, geographic areas and key customers.	v

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

Cross Reference of ARA's Criteria 2018

	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures related to Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Kebijakan manajemen risiko; d. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be Disclosed: a. Details of financial instruments held by their classification; b. Fair value and hierarchy for each group of financial instruments; c. Risk management policy; d. Explanation of risks related to financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and e. The risk analysis associated with financial instruments is quantitative.	v
13.	Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters expressed include: a. Date of financial statements authorized for publication; and b. The party responsible for authorizing the financial statements.	v

Establishment of Excellence Digital Port

Membangun Pelabuhan Digital yang Unggul



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia .

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
T. (+6221) 4301080
F. (+6221) 4351225
www.indonesiaport.co.id



www.indonesiaport.co.id